BUMN
Hadir untuk negeri

biofarma

2018

ACCELERATION
TRANSFORMATION
TOWARDS **LIFE SCIENCE**
COMPANY

Laporan Tahunan 2018
www.biofarma.co.id

2018

ACCELERATED TRANSFORMATION TOWARDS **LIFE SCIENCE** COMPANY

Menyambut langkah strategis pemerintah menata Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk *holding company*, Bio Farma telah menyiapkan diri untuk melakukan percepatan transformasi menuju *Life Science Company* guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

PERJALANAN TEMA
LAPORAN TAHUNAN BIO FARMA

2017
CHANGE AND ACCELERATION TOWARDS A LEADING LIFE SCIENCE COMPANY

"Tantangan global bidang kesehatan baik kebutuhan pengembangan vaksin baru akibat munculnya wabah penyakit baru *(emerging diseases)* dan penyakit lama yang muncul kembali *(re-emerging diseases)* mendorong kami untuk melakukan percepatan dan perubahan.

Pada 2017 Indonesia dipercaya menjadi pemimpin *Center of Excellence* Riset Vaksin dan Produk Bioteknologi bagi negara-negara Islam. Kepercayaan ini merupakan pengakuan atas kinerja Indonesia melalui Bio Farma sebagai industri vaksin dan produk Bioteknologi yang lebih maju dibandingkan di negara-negara anggota OKI. Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota OKI yang memiliki industri vaksin lengkap yang diakui *World Health Organization* (WHO).

Sejalan dengan program Nawacita nomor enam yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional, industri vaksin Indonesia mampu dipasarkan secara masif di dunia sekaligus mendorong kemajuan negara-negara berkembang lainnya. Tahun 2017 ini dengan semangat perubahan dan percepatan, kami percaya langkah menuju perusahaan *Life Science* akan terwujud nyata untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik".

2016
BIOTECH INNOVATION FOR SUSTAINABILITY

Terus berinovasi guna memperbaiki kualitas hidup telah kami terapkan di sepanjang tahun 2016. Mempertahankan predikat Emas dalam PROPER yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI merupakan salah satu indikasi komitmen kuat Bio Farma dalam inovasi di bidang keberlanjutan.

Penyelenggaraan Forum Riset *Life Science* (FRLN) bertajuk, "Tantangan Menuju Kemandirian Riset Nasional Bidang *Life Science*" di tahun 2016 merupakan bentuk kontribusi lain dari inovasi bio teknologi Bio Farma guna mempercepat hilirisasi dan komersialisasi produk *Life Science* yang diakui sebagai produk nasional hasil kerja nyata putra-putri terbaik Bangsa Indonesia. Produk *Life Science* nasional akan mendorong tersedianya Biofarmasetikal berharga terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Inovasi bio teknologi merupakan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) yaitu menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

2015

BIOTECH INNOVATION FOR A BETTER FUTURE

Dengan dedikasi dari seluruh insan Bio Farma, sejak tahun 2011 kami telah bertekad dan berkomitmen menghasilkan berbagai inovasi bioteknologi, karena Inovasi adalah budaya kami. Implementasi Bisnis Proses Ramah Lingkungan serta Inovasi bidang lingkungan dan CSR, menjadikan Bio Farma satu-satunya industri Farmasi Indonesia yang meraih PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2015 ini, Inovasi Bioteknologi telah membuahkan hasil yaitu pengembangan produk Biologi Eritopoetin (EPO) serta pengembangan produk *Life Science* lainnya. Kini saatnya Bio Farma terus berinovasi di bidang Bioteknologi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

2014

BIO FOR SUSTAINABLE LIFE

Didukung kompetensi, pengalaman dan proses pembelajaran selama lebih dari 125 tahun, kami hadir sebagai bagian dari perjuangan, dalam menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia, berperan penting dalam membangun kesehatan bangsa, sehingga keberadaannya dipertahankan dari masa ke masa. Dengan filosofi *"Dedicated to Improve Quality of Life "* kami siap mendedikasikan kerja keras kami untuk keamanan kesehatan global *(Global Health Security)*, sehingga melalui Bio *for Life* memberikan solusi untuk kemakmuran global.

2013

BIOTECHNOLOGY FOR SUSTAINABILITY

Kompetensi kami di bidang bioteknologi bukan semata difokuskan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing global dan memaksimalkan *profit*. Lebih dari itu, kami ingin mendedikasikan pengetahuan kami untuk ikut serta membangun kemandirian masyarakat. Kami sangat antusias mengaplikasikan inovasi bioteknologi tepat guna untuk keberlanjutan pengembangan ekonomi kerakyatan. Tekad kami adalah memberikan kontribusi optimal bagi terciptanya kehidupan yang lebih baik, menawarkan solusi untuk kemakmuran global.

DAFTAR ISI

1 PEMBUKA

1 Accelerated Transformation Towards Life Science Company
2 Perjalanan Tema Laporan Tahunan Bio Farma
6 Pertemuan dengan OKI Dorong Kinerja Ekspor Bio farma
7 Badan POM RI Siap Membantu Percepatan Vaksin Halal Bio Farma
8 Bio Farma Raih Top IT On Digital and Trace System 2018
9 Konsisten Perluas Ekspor Bio Farma Raih Primaniyarta 2018
10 Bio Farma Raih Penghargaan BUMN Terbaik 2018
11 Pertumbuhan Kinerja Keuangan Yang Gemilang Tahun 2018
14 Ekspor Perdana Vaksin Bio Farma Ke Asia Selatan dan Amerika
15 Peran Bio Farma Di Masyarakat Global
16 Komitmen Menjaga Kualitas Vaksin
17 Akses Kesehatan dan Percepatan Pengembangan Industri Farmasi

18 IKHTISAR KEUANGAN

20 Posisi Keuangan Bio Fama Selama 5 Tahun Buku
32 Informasi Harga Saham dan Kronologis Pencatatan Saham
33 Ikhtisar Obligasi/Sukuk/Obligasi Konversi dan Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

36 LAPORAN MANAJEMEN

39 Laporan Dewan Komisaris
54 Laporan Direksi
67 Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018

68 PROFIL PERUSAHAAN

70 Profil Singkat Aktivitas dan Produk Utama
72 Riwayat Singkat Perusahaan
74 Sejarah Singkat Perusahaan
76 Sistem Manajemen Terintegrasi
78 Bidang Usaha
79 Produk Bio Farma
83 Struktur Organisasi
86 Filosofi, Visi, Misi, Kebijakan Perusahaan, Budaya Perusahaan dan Kompetensi Inti
90 Identitas dan Riwayat Singkat Anggota Dewan Komisaris
99 Identitas dan Riwayat Singkat Anggota Direksi
107 Sumber Daya Manusia
121 Komposisi Pemegang Saham
121 Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
122 Struktur Grup Perusahaan
122 Nama Dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal
123 Kronologis Pencatatan Saham
123 Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya aari Awal Penerbitan Sampai dengan Akhir Tahun Buku
124 Penghargaan 2018
128 Sertifikasi
132 Peristiwa Penting 2018
146 Nama & Alamat Entitas Anak dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan
148 Sebaran Pelanggan Vaksin ke Lebih dari 141 Negara
150 Informasi Pada Website Perusahaan

154 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

156 Perkembangan Ekonomi Dunia
157 Perkembangan Ekonomi Indonesia
158 Bio Farma Sebagai Produsen Vaksin Untuk Masyarakat Indonesia dan Global
161 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
162 Penjelasan Masing-Masing Segmen Usaha
168 Fasilitas dan Kualitas Produksi Bio Farma
168 Proses Produksi dan Pengujian Vaksin Bio Farma
169 Kinerja Per Segmen Usaha
176 Peningkatan/Penurunan Kapasitas Produksi
176 Penjualan/Pendapatan Usaha
183 Profitabilitas
184 Segmen/Divisi Penelitian dan Pengembangan
186 Segmen/Divisi Anggaran dan Akuntansi
187 Segmen/Divisi Pengadaan (Logistik)
188 Segmen Pajak
189 Segmen Administrasi
189 Indikator Utama Perusahaan Tahun 2018
190 Kinerja Keuangan Perusahaan
232 Kemampuan Membayar Hutang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Perusahaan
263 Struktur Modal (Capital Structure) dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal (Capital Structure Policy)
241 Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal Pada Tahun Buku Terakhir
245 Investasi Barang Modal yang Direalisasikan Pada Tahun Buku Terakhir
250 Perbandingan Antara Target Pada Awal Tahun dengan Hasil Yang Dicapai (Realisasi) dan Target atau Proyeksi Yang Ingin Dicapai Untuk Satu Tahun Mendatang Mengenai Pendapatan, Laba dan Lainnya
254 Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
255 Prospek Usaha Perusahaan
267 Aspek Pemasaran
274 Kebijakan Dividen, Jumlah Dividen Kas Per Saham dan Jumlah Dividen Per Tahun Yang Akan Diumumkan atau Dibayar Selama 5 Tahun Buku Terakhir
276 Program Kepemilikan Saham oleh dan/atau Manajemen Yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP) Yang Masih Ada Sampai Tahun Buku

276 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Dalam Hal Perusahaan Masih Diwajibkan Menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana)
277 Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi
279 Perubahan Peraturan Perundang-undangan Yang Signifikan Terhadap Perusahaan Pada Tahun Buku Terakhir
280 Uraian Mengenai Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Perusahaan Pada Tahun Buku Terakhir
282 Informasi Kelangsungan Usaha

288 TATA KELOLA PERUSAHAAN

291 Arti Penting GCG Bagi Bio Farma
291 Komitmen Bio Farma Dalam Menerapkan GCG
292 Faktor Penerapan GCG Di Bio Farma
293 Tiga Pilar Penerapan GCG
294 Tujuan Penerapan GCG Di Bio Farma
294 Tahap -Tahap Penerapan GCG Di Bio Farma
295 Struktur Tata Kelola Bio Farma
297 Kerangka GCG Bio Farma
298 Maksud dan Tujuan Pedoman GCG Di Bio Farma
298 Pedoman dan Kebijakan Penerapan GCG Di Bio Farma
301 Penerapan 5 Prinsip Tata Keola Perusahaan Yang Baik Di Bio Farma
306 Strategi dan Rencana Penerapan GCG Di Bio Farma
307 Penerapan GCG Secara Berkelanjutan
307 Kepatuhan Terhadap Hukum
307 Monitoring Penerapan GCG
313 Keterbukaan Informasi Publik
313 Benturan Kepentingan
318 Kesempatan Yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi
318 Pencatatan dan Penyusunan Data Perusahaan Serta Integritas Laporan Keuangan
319 Perlindungan Informasi Perusahaan
319 Perlindungan Aset Perusahaan
320 Perlindungan Konsumen
320 Kesehatan dan Keselamatan Kerja
320 Kebijakan Dividen
321 Pemegang Saham
322 Pemangku Kepentingan
323 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
325 Uraian Dewan Komisaris
350 Komisaris Independen
360 Uraian Direksi
383 Assessment/Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
400 Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi
406 Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi
429 Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali, Baik Langsung Maupun Tidak Langsung, Sampai Kepada Pemilik Individu
429 Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
436 Komite Audit
459 Komite Nominasi dan/atau Remunerasi
460 Komite-Komite Lain Di Bawah Dewan Komisaris Yang Dimiliki Oleh Bio Farma
496 Sekretaris Dewan Komisaris
499 Sekretaris Perusahaan
509 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
528 Satuan Pengawasan Intern (SPI)/ Unit Audit Internal
540 Divisi QA-RA (Quality Assurance and Regulatory Affair)
544 Akuntan Publik
549 Uraian Mengenai Manajemen Risiko Perusahaan
571 Sistem Pengendalian Internal
578 Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Oleh Perusahaan, Entitas Anak, Serta Anggota Dewan Komsaris dan Anggota Direksi Yang Menjabat Pada Periode Laporan Tahunan
579 Akses Informasi dan Data Perusahaan
591 Kode Etik (Pedoman Perilaku / Code of Conduct)
604 Pengungkapan Mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)
613 Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
618 Studi Studi Banding

620 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

622 Tata Kelola
622 Hak Azasi Manusia
623 Operasi yang Adil (Fair Operating Parctices)
623 Lingkungan Hidup
624 Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
624 Tanggung Jawab Pada Konsumen
626 Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
626 Penghargaan

628 LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

693 REFERENSI KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2018

PERTEMUAN DENGAN OKI DORONG KINERJA EKSPOR BIO FARMA

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pertemuan dengan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada forum Otoritas Regulatori Obat (National Medicine Regulatry Authorities/NMRAs). Pertemuan ini diprediksi dapat meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia khususnya ekspor Bio Farma sebagai salah satu komoditas nonmigas yang prospektif. Pertemuan BPOM-OKI yang berlangsung pada 20-21 November 2018 berpotensi menghasilkan peningkatan kinerja yang lebih besar lagi.

Dengan memperkuat *research and development* yang fokus untuk memunculkan inovasi-inovasi produk Bio Farma, kontribusi sektor ini bisa lebih besar. Apalagi jika disertai dengan riset pendahuluan terhadap kebutuhan dan preferensi masing-masing pasar ekspor yang tentunya berbeda antara satu negara dengan negara lain.

Sebagai salah satu negara yang memiliki kemampuan dalam produksi obat dan vaksin, Indonesia dapat mendorong kerja sama yang memperkuat kemandirian OKI. Sekaligus peluang Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspornya di bidang farmasi, apalagi jika ingin bersaing dengan Eropa.

Indonesia selama ini mengambil peran yang besar dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah. Dengan mengambil isu kesehatan, reputasi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang memiliki terobosan dalam industri obat dan vaksin semakin kuat.

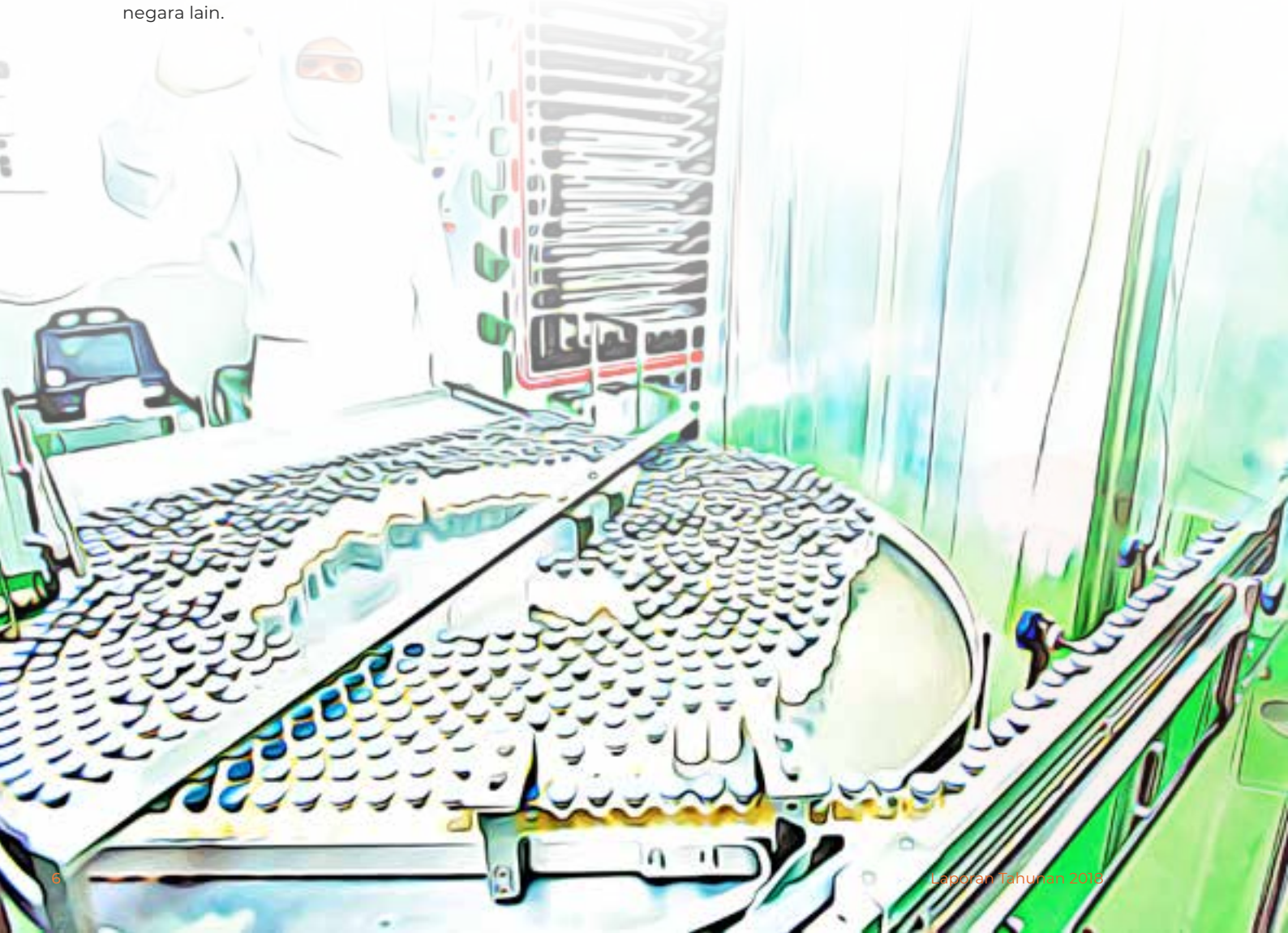

BADAN POM RI SIAP MEMBANTU PERCEPATAN VAKSIN HALAL BIO FARMA

Kepala Badan POM RI, Penny K Lukito, 28 November 2018 berkunjung ke Bio Farma sebagai tindak lanjut hasil pertemuan Internasional *The First Meeting of Heads of National Medicines Regulatory Authorities* (NMRAs) from *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) Member Countries (negara-negara anggota OKI) yang diselenggarakan pada tanggal 20–23 November 2018 di Jakarta dan Bandung.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Otoritas Medis dan Regulator OKI tersebut, menghasilkan Deklarasi Jakarta antara lain berisikan tentang komitmen bersama untuk mewujudkan kemandirian dalam bidang produksi obat dan vaksin, akses untuk mendapatkannya, mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SGDs) ke-3 tentang Kesehatan dan Kesejahteraan yang baik, penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular di negara berkembang.

Bio Farma sebagai produsen *Life Science* sudah memiliki PQ-WHO dan sebagai *Center of Excellence* (CoE) dijadikan acuan negara OKI untuk dapat memiliki kemampuan yang sama dengan Indonesia dalam pembuatan vaksin dan Bioteknologi.

Dengan ditunjuknya Bio Farma sebagai *Center of Excellence* (CoE) menjadi suatu kebanggaan, dapat mengangkat nama baik pemerintahan Indonesia dimata dunia karena Indonesia menjadi *leading* diantara negara-negara muslim untuk pembuatan vaksin.

BPOM siap membantu Bio Farma untuk percepatan pembuatan vaksin halal, termasuk pembentukan *Working Group* antara *Heads of National Medicines Regulatory Authorities* (NMRAs) untuk menyamakan pemahaman mengenai kriteria vaksin halal.

Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai CoE sehingga mendatangkan partner strategis dan potensial untuk Bio Farma, dibidang alih teknologi maupun dari sisi penelitian dan pengembangan, secara bertahap Bio Farma akan membantu proses *downstream* pembuatan vaksin untuk salah satu perusahaan di Arab Saudi,. Kemudian, untuk bidang penelitian, Bio Farma akan menggandeng Tunisia dan Maroko, karena Bio Farma melihat negara OIC memiliki potensial *researcher*, dalam bidang bioteknologi, sehingga diharapkan vaksin yang sesuai dengan syariah Islam dapat ditemukan.

Kesiapan Bio Farma untuk memproduksi vaksin halal yang harus diperhatikan adalah keamanan, keampuhan dan keefektifan dari vaksin tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2010, Bio Farma membentuk Kelompok Kerja *(Working Group)* untuk mengawal proses mendapatkan sertifikat halal, yang terdiri dari tim teknis dan nonteknis.

BIO FARMA RAIH TOP IT *ON DIGITAL AND TRACE SYSTEM* 2018

Bio Farma raih pengehargaan TOP IT *on Digital Track and Trace System* 2018 dan Direktur Utama Bio Farma M. Rahman Rustan raih penghargaan *Top Leader on IT Leadership 2018* dari Majalah IT Work yang diserahkan langsung oleh Ketua Penyelenggara dan Pemimpin Redaksi Majalah IT Work, M. Lutfi Handayani, MM, MBA. Penghargaan ini merupakan inovasi digitalisasi untuk menghindari produk vaksin palsu.

Track & Trace merupakan inovasi digital yang diinisiasi Bio Farma, inovasi ini sudah diuji coba terhadap produk terbaru Bio Farma di beberapa titik distribusi sampai ke konsumen. Ke depannya, sistem ini akan diterapkan untuk semua produk Bio Farma yang dilakukan secara bertahap.

Saat ini, Indonesia memasuki revolusi Industri 4.0. Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Bio Farma tahun 2018 – 2022, direncanakan transformasi digital menuju Industri 4.0 dengan penggunaan teknologi *business intelligence, big data* dan *bioinformatic*, sehingga peran teknologi informasi dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis *(enabler)* dan menuju ke arah *driver*.

Adopsi transformasi digital Bio Farma fokus setidaknya kepada tiga area utama, yaitu *customer experience*, *operational processes*, dan *business model* dengan sasaran harus meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan dan cepat dalam beradaptasi terhadap perubahan.

Menghadapi era *disruptive technology* dan era Industri 4.0, Bio Farma menyiapkan proses bisnis untuk mengimplementasikan *smart technology*, di antaranya proses *material handling, storage* dan proses produksi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem pencatatan dan analisa data.

KONSISTEN PERLUAS EKSPOR
BIO FARMA RAIH PRIMANIYARTA 2018

Bio Farma untuk yang ketujuh kalinya raih Penghargaan Primaniyarta kategori Pelopor Pasar Baru dari Kementerian Perdagangan. Penghargaan diterima oleh Direktur Pemasaran Bio Farma Sri Harsi Teteki, yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, di *Indonesia Convention Exhibition*, BSD Tangerang Banten, Rabu 24 Oktober 2018.

Primaniyarta merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada eksportir yang dinilai paling berprestasi di bidang ekspor dan dapat menjadi percontohan bagi eksportir lain. Penyelenggaraan Penghargaan Primaniyarta merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan cq Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Bio Farma satu-satunya BUMN yang mendapat apresiasi dari Pemerintah, turut serta berkontribusi bagi negara, terus upayakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas produksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesinambungan ekspor. Saat ini kapasitas bulk *(intermediate product)* sekitar 2,3 miliar dosis, produk akhir vaksin sekitar 700 juta dosis.

Raihan penghargaan tersebut dilatarbelakangi oleh keberhasilan Bio Farma dalam memperluas pasar vaksin, dengan menambah jumlah *market* di negara-negara benua Asia dan Afrika. Sehingga sampai dengan 2018, produk Bio Farma sudah digunakan di lebih dari 140 negara. Tantangan saat ini, ekspansi fasilitas untuk produk baru. Target Bio Farma ke depan terus menjajaki peluang ekspor untuk produk final *bulk* (HiB, campak) dan produk jadi seperti Pentabio-difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan haemophilus influenza type B. Serta memenuhi berbagai regulasi internasional (WHO, FDA dan Registrasi di negara tujuan) dan tentunya mempertahankan Pra-Kualifikasi WHO untuk produk *existing* dan produk baru.

BIO FARMA RAIH PENGHARGAAN BUMN TERBAIK 2018

Bio Farma raih kembali penghargaan BUMN terbaik 2018 untuk kategori Bidang Non Keuangan Sektor Farmasi, Makanan dan Aneka Industri.

Penghargaan yang diselenggarakan Majalah Investor diserahkan oleh Arif Baharudin Staf Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pardiman Direktur Keuangan Bio Farma pada Rabu malam, 19 Desember 2018 di Jakarta

PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN YANG GEMILANG TAHUN 2018

Catatkan Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Sebesar Rp727,37 Miliar, Tumbuh Signifikan 101,92% & Capaian Laba Bersih Tumbuh 103,40% Menjadi Rp543,23 miliar.

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN [RP MILIAR]

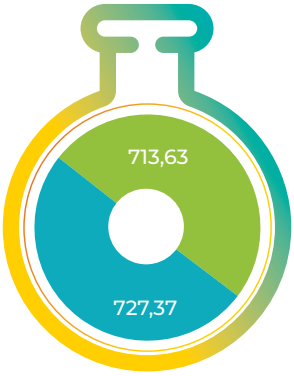

LABA BERSIH [RP MILIAR]

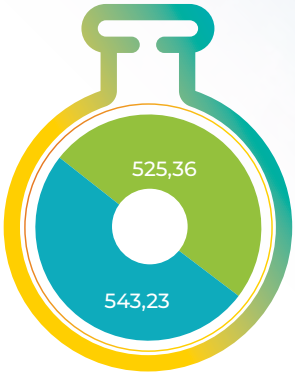

Pada tahun 2018, Bio Farma kembali mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang solid dengan capaian Laba Sebelum Pajak Penghasilan mencapai 101,92% menjadi Rp727,37 miliar dibandingkan dengan capaian Laba Sebelum Pajak Penghasilan Tahun 2017 sebesar Rp713,63 miliar, dengan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 107,43% menjadi Rp3,23 triliun.

Tercatat Bio Farma membukukan laba bersih sebesar Rp543,23 Miliar di 2018, pertumbuhan sebesar 103,40% dibandingkan capaian laba bersih 2017 sebesar Rp525,36 Miliar, sejalan dengan pertumbuhan signifikan kinerja produksi dan penjualan produk perusahaan, produk *partnership, trading partnership*, jasa Bio Farma serta peningkatan efisiensi yang berujung pada stabilnya level biaya tunai operasi Bio Farma.

Pada tahun 2018, nilai penjualan bersih Bio Farma tercatat sebesar Rp3,23 triliun dengan Produk Perusahaan merupakan komponen terbesar pendapatan Bio Farma, berkontribusi sebesar Rp2,04 triliun atau 63% dari total penjualan bersih tahun 2018. Penjualan bersih Bio Farma tahun 2018 sebesar Rp3,23 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 7,43% dibandingkan dengan realisasi penjualan bersih tahun 2017 sebesar Rp3,01 triliun.

Pada Tahun 2018, Bio Farma kembali mencatatkan volume produksi dan penjualan yang cukup baik. Kinerja produksi di bawah target sebesar 18,64% yaitu 2,8 miliar dosis. Penjualan pada 2018 merupakan kontributor terbesar dari total penjualan bersih Bio Farma adalah vaksin virus dengan kontribusi sebesar Rp1,21 triliun atau 36,90% dari total penjualan bersih 2018 turun sebesar Rp97,15 miliar atau 7,52%, dibandingkan dengan realisasi penjualan vaksin virus tahun 2017 sebesar Rp1,30 triliun atau 42,87% dan Produk Partnership sebesar Rp1,13 triliun atau 35,01% dari total penjualan bersih 2018 naik sebesar Rp22,95 miliar atau 2,07% dibandingkan dengan realisasi penjualan produk partnership tahun 2017 sebesar Rp1,11 triliun atau 36,89%.

PENJUALAN BERSIH (TRILIUN)

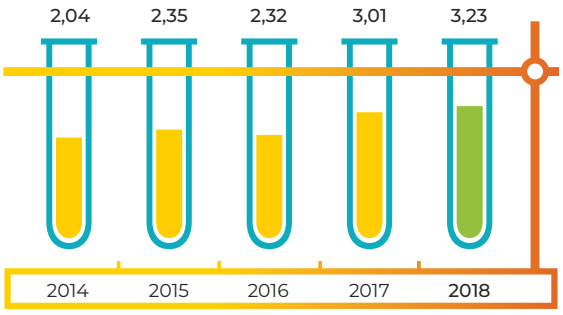

VOLUME PRODUKSI (MILIAR DOSIS)

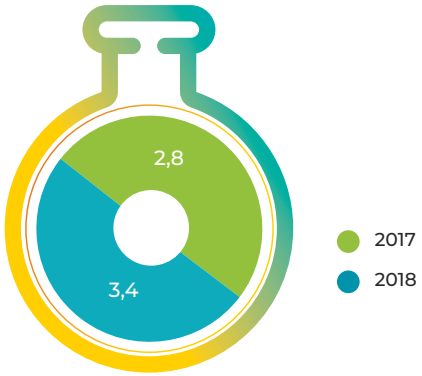

PENJUALAN VAKSIN VIRUS (RP TRILIUN)

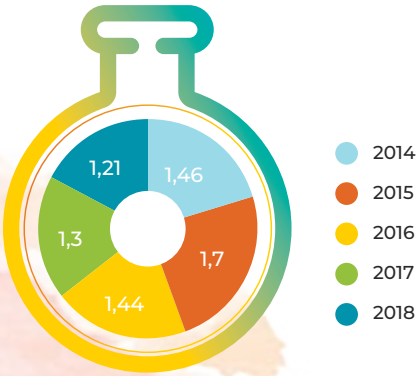

PENJUALAN PRODUK PARTNERSHIP (RP TRILIUN)

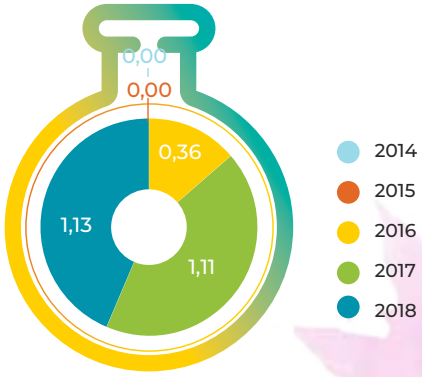

Laba kotor Bio Farma di tahun 2018 naik sebesar 4,21% menjadi Rp1,41 triliun dibandingkan tahun 2017 seiring dengan kenaikan nilai penjualan dan nilai beban pokok penjualan dan jasa Bio Farma di tahun 2018 sebesar Rp1,82 triliun. Dengan adanya peningkatan laba kotor, maka Bio Farma dapat mencatat laba usaha sebesar Rp736,77 miliar atau naik 7,93% dibandingkan laba usaha tahun 2017 sebesar Rp682,66 miliar. Peningkatan laba usaha ini juga mendukung pencapaian laba bersih Perusahaan menjadi Rp543,27 miliar, naik signifikan sebesar 103,40% dibandingkan capaian laba bersih Perusahaan tahun 2017 sebesar Rp525,36 miliar.

Beban pajak kini Bio Farma di tahun 2018 turun sebesar 2,20% menjadi Rp184,14 miliar dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp188,28 miliar seiring dengan menurunnya pajak kini dan pajak tangguhan Bio Farma di tahun 2018.

LABA KOTOR (RP TRILIUN)

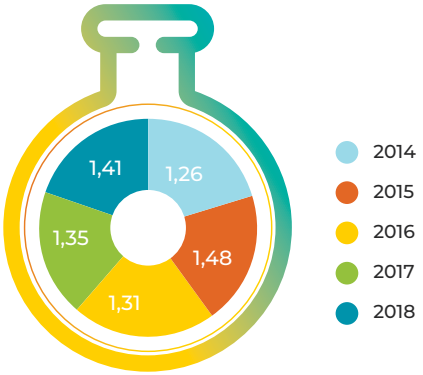

BEBAN PAJAK PENGHASILAN (RP MILIAR)

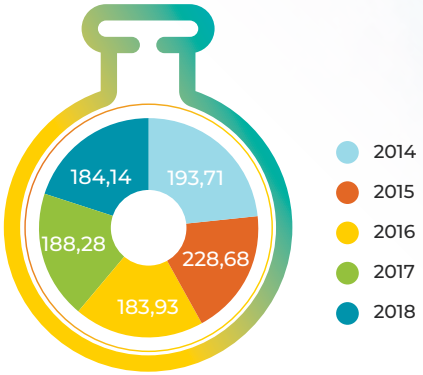

EKSPOR PERDANA VAKSIN BIO FARMA KE ASIA SELATAN DAN AMERIKA

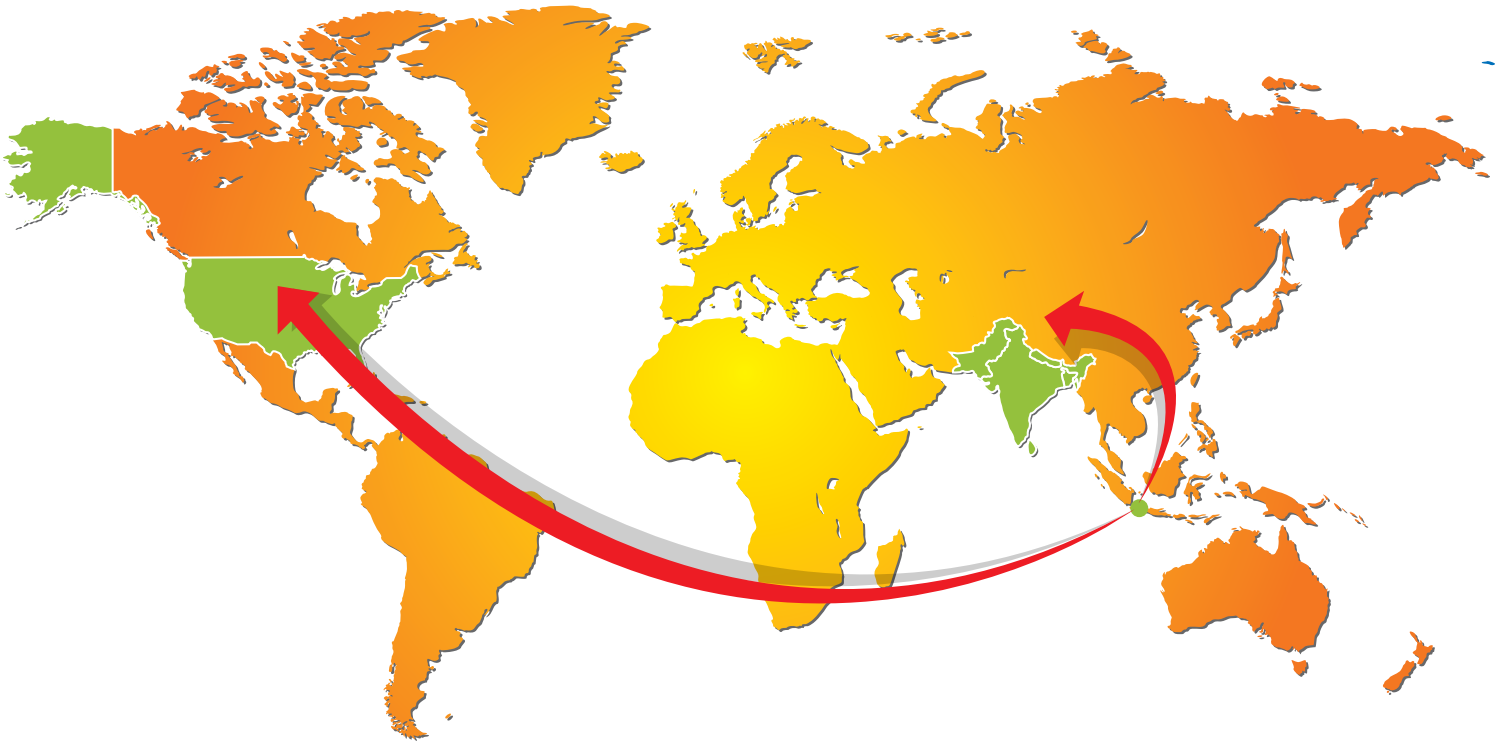

Pada 31 Oktober 2018, Bio Farma melepas ekspor vaksin ke sejumlah negara di Asia Selatan. Vaksin-vaksin tersebut diekspor ke empat negara tujuan, yaitu dua negara Asia Tengah, Pakistan dan India, Turki, dan Honduras yang terletak di Amerika Tengah.

Bio Farma pengiriman perdana ke empat negara tujuan ekspor. Tiga di antaranya adalah *finished product vaksin Polio* (bOPV-20 dosis) ke Pakistan dan ke Turki, serta vaksin difteri tetanus pertusis (DTP) 10 dosis ke Honduras, Amerika Tengah. Selain itu, ada pengiriman bahan setengah jadi atau *intermediate product (bulk)* Polio ke India. Jadi, total nilai ekspor vaksin yang diekspor sebesar USD5,18 juta atau sekitar Rp75 Miliar yang diekspor terdiri dari 50 juta dosis bulk polio ke India sedangkan ke Pakistan, Turki dan Honduras sekitar sebanyak 1 juta *vial* vaksin bOPV-20 dosis dan 10 dosis.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tunjukkan komitmen dan dukungan peningkatan ekspor dari BUMN berbagai sektor. Rini hadir langsung melepas ekspor produk vaksin Bio Farma, didampingi Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat dan Dirut Bio Farma Rahman Roestan.

PERAN BIO FARMA
DI MASYARAKAT GLOBAL

Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Vaccine Manufacturer Group

Islamic Development Bank's Self Reliance in Vaccine Programs (IDB-SRVP) Center of Excellence for Biological

Collaborating Partner

Developing Countries Vaccine Manufacturers Network

International Vaccine Institute (IVI)

Bio Farma sudah 128 tahun eksis untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, berperan penting dalam pencegahan penyakit baik di Indonesia maupun dunia dan jadi nomor empat terbaik di dunia dari 200 perusahaan vaksin. Bio Farma merupakan perusahaan vaksin paling besar setelah Eropa, Amerika Serikat, dan India di dunia. Selain itu, sebanyak 70 persen kebutuhan vaksin secara global dipasok dari Indonesia, India, dan Cina.

Bio Farma berkembang menjadi perusahaan *Life Science*. Bio Farma telah mengekspor produknya lebih dari 140 negara terutama negara–negara berkembang, dan 50 di antaranya adalah negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) hanya ada tujuh negara yang memiliki produsen vaksin. Di antara tujuh negara tersebut hanya Indonesia yang telah diakui oleh WHO untuk vaksin program imunisasi dasar.

Bahkan Saudi Arabia telah meminta kerja sama distribusi vaksin dan transfer teknologi vaksin untuk memenuhi vaksin imunisasi dasar yang dibutuhkan di regional negara-negara Teluk. Menurut data Bio Farma, pengiriman ekspor sejumlah 11 juta dolar AS pada 2015, meningkat menjadi 22 juta dolar AS pada 2016 dan 31 juta dolar AS pada 2017.

Saat ini hanya sekitar 30 produsen vaksin yang sudah mendapatkan kualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satunya Bio Farma. Di Asia Tenggara, Bio Farma merupakan yang terbesar dilihat dari jenis produk dan kapasitas, menjadi rujukan *Center of Excellence* (CoE) bagi produsen vaksin di negara Islam dan menjadi satu-satunya produsen vaksin yang mendapat sertifikasi dari WHO. Lebih dari 13 produk vaksin Bio Farma telah mendapat sertifikasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

KOMITMEN MENJAGA KUALITAS VAKSIN

Vaksin merupakan produk Biologi yang memerlukan penanganan khusus dalam pendistribusiannya. Diperlukan suatu sistem khusus untuk pendistribusian vaksin yaitu *Cold Chain System* atau Sistem Rantai Dingin dimulai dari pabrik, saat pendistribusian, penyimpanan di tempat tujuan, penyimpanan selama vaksin belum digunakan hingga vaksin tersebut diberikan kepada pelanggan.

Suhu dari vaksin harus tetap terjaga pada suhu kisaran 2 sampai dengan 8 derajat Celsius untuk vaksin BCG, DTP, TT, DT, Td, DTP-HB-Hib, Campak, Hepatitis B, Influenza. Sedangkan untuk vaksin Polio harus disimpan pada suhu -20 (minus 20) derajat Celsius.

Sistem Rantai Dingin merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk tetap menjaga suhu vaksin dalam keadaan yang stabil, agar keefektifan, keamanan, keampuhan dan kualitas vaksin tetap terjaga, sehingga penerima mendapatkan manfaat perlindungan, serta pencegahan terhadap berbagai penyakit menular.

Batas waktu untuk seluruh pengiriman di atas tidak boleh melebihi 48 jam berdasarkan *guidelines* WHO dan dengan tetap memperhatikan sistem rantai dingin untuk setiap jenis vaksin.

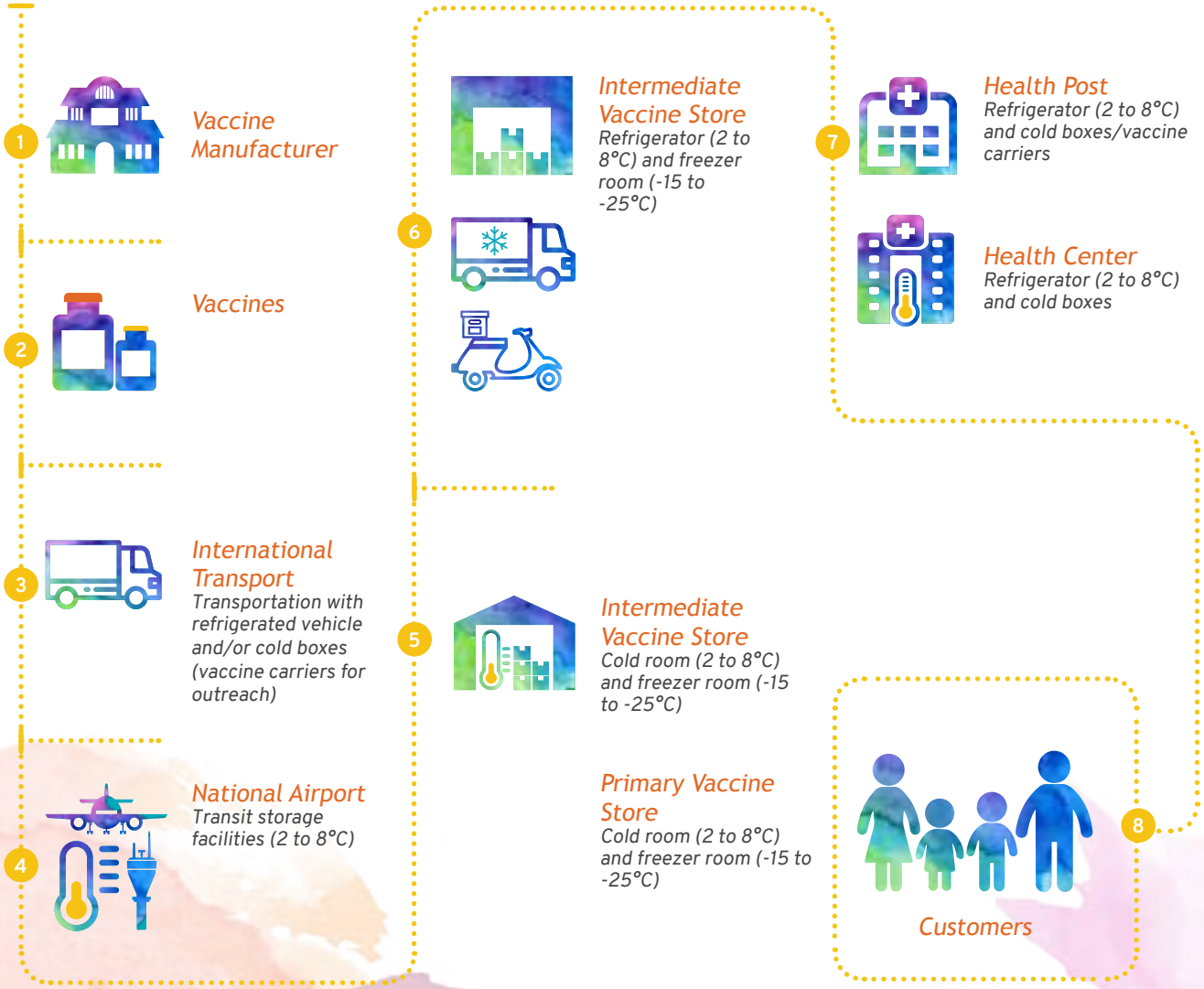

AKSES KESEHATAN DAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI

Sesuai instruksi presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, Bio Farma senantiasa mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, dengan menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional.

Bio Farma berkomitmen meningkatkan daya saing industru farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri dan ekspor, Saat ini dengan sejumlah 13 produk yang telah mendapatkan pengakuan – Pra Qualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) Lebih dari 140 negara telah menggunakan produk Bio Farma, kami telah menjadi produsen Vaksin yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas prduksi lebih dari 3,2 miliar dosis pertahun. Namun demikian Kami senantiasa memprioritaskan kebutuhan vaksin dalam negeri.

Bio Farma mendorong penguasaan teknologi dan Inovasi dalam bidang farmasi dan alat kesehatan dan mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan dalam negri dan ekspor serta memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri.

Kami berkomitmen dalam pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan terutama pengembangan ke arah Biopharmacutical, vaksin, natural, dan Active Pharmaceutical Ingredients (API) kimia. Melalui forum riset vaksin dan lifescience nasional kami mendorong dan mengembangkan penyelengaraan riset dan Pengembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan.

IKHTISAR KEUANGAN

Di tahun 2018, Bio Farma membukukan kinerja keuangan yang baik dan meningkat dari periode sebelumnya melalui strategi penetrasi pasar lokal dan ekspor, efisiensi dan efisien.

HASIL USAHA BIO FARMA SELAMA 5 TAHUN BUKU

PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA, LABA (RUGI) & TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik dalam Laporan Tahunan ini menggunakan notasi Bahasa Indonesia

Dalam Juta Rupiah

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
PENJUALAN BERSIH											
Produk Perusahaan	2.028.988	2.329.624	1.927.724	1.872.113	2.102.189	2.038.035	8,86	(3,05)	165.922	(64.154)	-
Produk *Partnership*	-	-	358.956	1.111.028	1.130.590	1.133.975	2,07	0,30	22.947	3.385	-
Trading Partnership	10.287	11.436	23.764	20.120	41.894	53.111	163,97	26,77	32.991	11.217	-
Jasa	4.805	4.858	5.315	8.310	9.006	10.104	21,59	12,19	1.794	1.098	-
Jumlah Penjualan Bersih	**2.044.080**	**2.345.918**	**2.315.759**	**3.011.571**	**3.283.680**	**3.235.225**	**7,43**	**(1,48)**	**223.654**	**(48.455)**	**3.682.448**
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA											
Produk Perusahaan	(767.609)	(852.361)	(763.398)	(923.185)	(998.443)	(1.010.966)	9,51	1,25	(87.781	(12.523	-
Produk Partnership	(8.827)	(11.165)	(215.497)	(710.318)	(740.047)	(758.734)	6,82	2,53	(48.416)	(18.687)	-
Trading Partnership	-	-	(21.437)	(16.766)	(34.149)	(39.981)	138,46	17,08	(23.215)	(5.832)	-
Beban Jasa	(3.654)	(3.962)	(4.962)	(6.861)	(7.908)	(14.070)	105,07	77,92	(7.209)	(6.162)	-
Jumlah Beban Pokok Penjualan & Jasa	**(780.090)**	**(867.488)**	**(1.005.294)**	**(1.657.130)**	**(1.780.548)**	**(1.823.750)**	**10,05**	**2,43**	**(166.620)**	**(43.202)**	**(2.041.811)**
LABA (RUGI) KOTOR	**1.263.991**	**1.478.430**	**1.310.465**	**1.354.440**	**1.503.132**	**1.411.475**	**4,21**	**(6,10)**	**57.035**	**(91.657)**	**1.640.637**
Penghasilan Lain-lain	118.630	129.064	164.728	115.158	3.672	454.802	294,94	12285,67	339.644	451.130	-

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018- RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Beban Administrasi dan Umum	(349.010)	(421.759)	(402.002)	(409.734)	(403.595)	(410.885)	0,28	1,81	(1.151)	(7.290)	-
Beban penjualan	(99.182)	(126.818)	(133.996)	(137.478)	(154.578)	(137.763)	0,21	(10,88)	(285)	16.815	-
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	(88.779)	(93.443)	(114.481)	(124.570)	(150.703)	(126.062)	1,20	(16,35)	(1.492)	24.641	-
Beban Bunga Pinjaman	-	-	-	-	(11.877)	-	-	-	-	11.877	-
Beban Lain-Lain	(69.748)	(66.201)	(139.745)	(84.182)	(1.103)	(464.199)	451,42	41985,10	(380.017)	(463.096)	-
Jumlah	**(488.089)**	**(579.157)**	**(625.497)**	**(640.806)**	**(718.184)**	**(684.108)**	**6,76**	**(4,74)**	**(43.302)**	**34.076**	**(800.189)**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**775.902**	**899.274**	**684.968**	**713.634**	**784.947**	**727.368**	**1,92**	**(7,34)**	**13.734**	**(57.579)**	**840.448**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN											
Pajak Kini	(197.136)	(232.893)	(185.425)	(194.907)	(208.933)	(178.928)	(8,20)	(14,36)	15.979	30.005	-
Pajak Tangguhan	3.427	4.213	1.498	6.629	5.163	(5.214)	(178,66)	(200,99)	(11.843)	(10.377)	-
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**(193.709)**	**(228.681)**	**(183.927)**	**(188.278)**	**(203.770)**	**(184.142)**	**(2,20)**	**(9,63)**	**4.136**	**19.628**	**(220.596)**
LABA (RUGI) BERSIH	**582.193**	**670.593**	**501.041**	**525.356**	**581.177**	**543.226**	**3,40**	**(6,53)**	**17.870**	**(37.951)**	**619.852**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN											
Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi											
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria Atas Imbalan Pasca Kerja	(21.323)	828.226	(8.313)	(27.239)	-	6.067	(122,27)	-	33.306	6.067	-
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	1.980.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(21.323)	1.979.954	(8.313)	(27.239)	-	6.067	(122,27)	-	33.306	6.067	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	**560.870**	**2.650.546**	**492.728**	**498.117**	**581.177**	**549.293**	**10,27**	**(5,49)**	**51.176**	**(31.884)**	**-**

Bio Farma per 31 Desember 2018 merupakan salah satu BUMN Non Listed Non Keuangan yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi mengenai.

1. Laba (Rugi):
   a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
   b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali.
2. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan:
   a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
   b. Diatribusikan kepada kepentingan non pengendali.

LABA (RUGI) PER SAHAM

Bio Farma per 31 Desember 2018 merupakan salah satu BUMN *non listed* non keuangan yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi mengenai pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai Laba (Rugi) Per Saham.

POSISI KEUANGAN BIO FAMA SELAMA 5 TAHUN BUKU

JUMLAH INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

A. REALISASI INVESTASI BERDASARKAN PENGGUNAANNYA TAHUN 2018

KELOMPOK INVESTASI	2014	2015	2016	2017	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN [%]	SELISIH 2018-2017
	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5-4
Penilaian WHO & GMP							
Peralatan Kantor	1.327	1.867	1.250	1.611	1.326	(17,67)	(285)
Peralatan Pabrik	17.425	28.779	15.665	20.788	6.855	(67,02)	(13.933)
Peralatan Lainnya	3.133	595	-	-	4.095	-	4.095
Peralatan Bangunan	1.354	43.073	1.800	-	287	-	287
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	7.632	-	4.826	-	-	-	-
Tanah	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**30.873**	**74.314**	**23.540**	**22.399**	**12.563**	**(43,91)**	**(9.836)**
Penggantian	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Peralatan Kantor	17.876	7.860	8.689	6.370	8.704	36,64	2.334
Peralatan Pabrik	7.320	13.700	20.582	17.958	12.788	(28,79)	(5.170)
Peralatan Lainnya	3.034	983	1.817	4.866	2.523	(48,15)	(2.343)
Peralatan Bangunan	909	807	2.438	1.157	961	(16,94)	(196)
Kendaraan Bermotor	750	384	30	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**29.889**	**23.735**	**33.555**	**30.351**	**24.976**	**(17,71)**	**(5.375)**

KELOMPOK INVESTASI	2014	2015	2016	2017	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN [%]	SELISIH 2018-2017
	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5-4
IPAL/K3/Lingkungan/ *Quality Control*							
Peralatan Kantor	832	738	803	243	218	(10,16)	(25)
Peralatan Pabrik	9.277	13.706	13.021	11.367	15.435	35.78	4.068
Peralatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Peralatan Bangunan	25	378	9.884	1.360	55.659	3.993,06	54.299
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**10.133**	**14.822**	**23.708**	**12.970**	**71.312**	**449,83**	**58.342**
Peningkatan Kapasitas							
Peralatan Kantor	12.115	2.879	6.464	3.707	8.286	123,51	4.579
Peralatan Pabrik	482	160.586	284.970	312.148	182.598	(41,50)	(129.550)
Peralatan Lainnya	16.071	51.322	12.423	11.814	25.879	119,06	14.065
Peralatan Bangunan	37.561	180.371	70.321	38.689	258.743	568,77	220.054
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	2.880	3.880	4.402	2.789	-	(100,00)	(2.789)
Tanah	-	-	-	40.268	-	(100,00)	(40.268)
Jumlah	**69.109**	**399.039**	**378.580**	**409.415**	**475.506**	**16,14**	**66.091**
LITBANG/Riset Dasar/*Development*							
Peralatan Kantor	243	328	1.006	679	118	(82,62)	(561)
Peralatan Pabrik	7.886	5.946	42.293	47.075	51.962	10,38	4.887
Peralatan Lainnya	4.855	-	112	-	-		-
Peralatan Bangunan	-	3.698	28.079	4.187	158	(96,23)	(4.029)
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**12.984**	**9.971**	**71.491**	**51.941**	**52.238**	**0,57**	**297**
Produk Baru							
Peralatan Kantor	161	170	113	133	267	100,72	134
Peralatan Pabrik	7.058	20.645	8.947	14.159	38.451	171,57	24.292
Peralatan Lainnya	4.925	907	-	-	-	-	-
Peralatan Bangunan	-	31	1.776	5.943	8.235	38,57	2.292
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	9.492	1.339	961	393	-	(100)	(393)
Jumlah	**21.636**	**23.093**	**11.797**	**20.628**	**46.953**	**128**	**26.325**
Total	**174.623**	**544.974**	**542.671**	**547.704**	**683.548**	**25**	**135.844**

B. REALISASI INVESTASI PER KELOMPOK TAHUN 2018

Dalam Juta Rupiah

KELOMPOK INVESTASI	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN [%]		SELISIH 2018-2017	SELISIH 2018-RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Peralatan Kantor	32.554	13.842	18.324	12.742	20.000	18.919	48	(5)	6.177	(1.081)	-
Peralatan Pabrik	49.448	243.363	385.478	423.495	594.343	308.089	(27)	(48)	(115.406)	(286.254)	-
Peralatan Lainnya	32.018	53.807	14.351	16.680	-	32.497	95	-	15.817	32.497	-
Peralatan Bangunan	39.849	228.358	114.298	51.336	-	324.043	531	-	272.707	324.043	-
Kendaraan Bermotor	750	384	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	20.004	5.219	10.189	3.183	554	-	(100)	(100)	(3.183)	(554)	-
Tanah	-	-	-	40.268	-	-	(100)	-	(40.268)	-	-
Uang Muka Investasi	-	-	-	-	-	69.097	-	-	69.097	69.097	-
Jumlah	**174.623**	**544.974**	**542.671**	**547.704**	**614.897**	**752.645**	**447**	**(154)**	**204.941**	**137.748**	**921.574**

REKAPITULASI REALISASI INVESTASI BERDASARKAN PENGGUNAANNYA

KELOMPOK INVESTASI	2014	2015	2016	2017	2018
Peralatan Kantor	32.554	13.842	18.324	12.742	18.919
Peralatan Pabrik	49.448	243.363	385.478	423.495	308.089
Peralatan Lainnya	32.018	53.807	14.351	16.680	32.497
Peralatan Bangunan	39.849	228.358	114.298	51.336	324.043
Kendaraan Bermotor	750	384	30	-	-
Aset Tak Berwujud	20.004	5.219	10.189	3.183	-
Tanah	-	-	-	40.268	-
Jumlah	**174.623**	**544.974**	**542.671**	**547.704**	**683.548**

C. ARUS KAS

Dalam Juta Rupiah

URAIAN	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN [%]		SELISIH 2018-2017	SELISIH 2018-RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5	9 = 6-4	6-5	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI											
Penerimaan Kas dari Pelanggan	2.108.672	2.106.478	2.334.948	3.111.408	3.299.585	3.335.796	7,21	1,10	224.387	36.210	-
Penerimaan (Pembayaran) Pajak	(314.959)	(297.534)	(267.037)	(369.722)	(342.245)	(161.057)	(56,44)	(52,94)	208.665	181.188	-
Penerimaan Bunga	35.395	37.422	7.960	3.558	-	4.505	26,63		947	4.505	
Penerimaan Hibah/ Donasi WHO	4.989	800	13.588	1.917	-	8.112	323,12	-	6.195	8.112	-
Penerimaan (Pembayaran) Lainnya - Bersih	11.673	(23.774)	1.238	613	2.569	5.954	870,55	131,79	5.341	3.385	-
Penerimaan Klaim Asuransi	107	-	-	575	-	39	(93,31)	-	(537)	39	-
Pembayaran Bunga	-	-	(9.343)	(8.071)	(17.333)	(24.025)	197,65	38,61	(15.953)	(6.692)	
Pembayaran Tantiem	(9.727)	(13.737)	(14.750)	(11.021)	(14.783)	(15.446)	40,15	4,49	(4.425)	(664)	-
Pembayaran Kepada Pemasok dan Karyawan	(1.330.310)	(1.584.191)	(1.519.679)	(2.362.898)	(2.241.521)	(2.885.703)	22,13	28,74	(522.805)	(644.183)	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	**505.839**	**225.465**	**546.926**	**366.360**	**686.273**	**268.174**	**(26,80)**	**(60,92)**	**(98.186)**	**(418.099)**	**929.480**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI											
Pembelian Aset Tetap	(163.149)	(535.175)	(393.170)	(293.309)	(1.543.120)	(538.677)	84	(65)	(245.368)	1.004.443	-
Penyertaan pada Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(25.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan pada Perusahaan Vial	-	-	-	-	(29.050)	-	-	(100)	-	29.050	-
Pembelian Aset Tak Berwujud	(20.578)	(3.962)	(11.173)	(3.245)	(554)	(46)	(99)	(92)	3.199	508	
Hasil Penjualan Aset Lain-lain	-	25.000	-	-	-	30	-	-	30	30	

URAIAN	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN [%]		SELISIH 2018-2017	SELISIH 2018-RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5	9 = 6-4	6-5	
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	**(208.727)**	**(514.137)**	**(404.343)**	**(296.554)**	**(1.572.723)**	**(538.693)**	**82**	**(66)**	**(242.138)**	**1.034.031**	**1.150.419**
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek	-	-	235.000	782.496	420.000	1.616.325	107	285	833.829	1.196.325	-
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek	-	-	(235.000)	(782.496)	(420.000)	(1.411.325)	80	236	(628.829)	(991.325)	-
Pembayaran Dividen & PKBL	(228.987)	(149.727)	(234.707)	(150.313)	(100.928)	(236.410)	57	134	(86.097)	(135.482)	-
Modal Donasi dari WHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	1.056.262	450.000	-	(57)	450.000	(606.262)	-
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setoran Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN											
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	**(228.987)**	-	**(234.707)**	**(150.313)**	**955.334**	**418.590**	**(378,48)**	**(56,18)**	**568.903**	**(536.744)**	**326.106**
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	**68.125**	-	**(92.123)**	**(80.507)**	**68.884**	**148.071**	**(283,92)**	**114,96**	**228.579**	**79.188**	**105.167**
Pengaruh Selisih Kurs Kas dan Setara Kas	12.341	22.621	(15.865)	2.103	-	18.293	769,78	-	16.190	18.293	-
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	891.251	971.717	555.939	447.950	151.555	369.546	(17,50)	143,84	(78.404)	217.991	329.671
Saldo Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	**971.717**	-	**447.950**	**369.546**	**220.438**	**535.910**	**45,02**	**143,11**	**166.364**	**315.472**	**434.838**

D. INVESTASI PERSEDIAAN

Dalam Juta Rupiah

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Bahan Baku / Penolong	116.251	205.936	272.003	212.601	-	612.583	188,14	-	612.583	612.583
Perlengkapan	1.293	4.866	756	768	-	-	-	-	-	-
Produk Dalam Proses	46.676	222.475	357.924	461.660	-	485.667	5,20	-	485.667	485.667
Produk Jadi	42.582	33.162	81.857	39.940	-	76.355	91,18	-	76.355	76.355
Trading *Partnership*	34	2.011	1.077	2.254	-	8.852	292,77	-	8.852	8.852
Jumlah	**206.836**	**468.449**	**713.618**	717.222	-	1.183.457	**65,01**	-	**1.183.457**	**1.183.457**
Dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan	1.937	(5.892)	(5.053)	(4.310)	-	(6.216)	44,19	-	(6.216)	(6.216)
Jumlah Persediaan Bersih	**204.899**	**462.557**	**708.564**	**712.912**	**-**	**1.177.242**	**65,13**	**-**	**1.177.242**	**1.177.242**

E. REALISASI INVESTASI TAHUN 2018 (BERDASARKAN PROYEK)

Dalam Juta Rupiah

No.	Proyek	Mulai Tahun	Total Akhir Proyek	Rencana s.d 2018	Realisasi s.d. 2018	%	
			1	2	3	3/1	3/2
1	Gedung Fasilitas Produksi Vaksin & Pengemasan (GED. 43)	2012					
	Bangunan		861.070	444.091	429.106	49,83	96,63
	Peralatan		1.574.111	927.887	826.260	52,49	89,05
	Sub Total		**2.435.181**	**1.371.978**	**1.255.366**	**51,55**	**91,50**
2	Fasilitas Downstream Produksi Vaksin BCG (GED. 36 Lt 3))	2013					
	Bangunan		29.076	29.076	29.658	102,00	102,00
	Peralatan		126.945	126.945	126.097	99,33	99,33
	Sub Total		**156.021**	**156.021**	**155.755**	**99,83**	**99,83**

No.	Proyek	Mulai Tahun	Total Akhir Proyek	Rencana s.d 2018	Realisasi s.d. 2018	%	
			1	2	3	3/1	3/2
3	Fasilitas Upstream Produksi Vaksin BCG (GED. 36 Lt 2)	2018					
	Bangunan		18.891	950	-	-	-
	Peralatan		12.000	-	-	-	-
	Sub Total		**30.891**	**950**	**-**	**-**	**-**
4	Fasilitas Vaksin Rekombinan berbasis Yeast (GED. 16)	2015					
	Bangunan		37.094	37.094	37.908	102,19	102,19
	Peralatan		82.463	82.463	84.101	101,99	101,99
	Sub Total		**119.557**	**119.557**	**122.009**	**102,05**	**102,05**
5	Gedung Fasilitas QC, Teknik & Surveilans (GED. 3)	2014					
	Bangunan		155.670	94.806	58.248	37,42	61,44
	Peralatan		205.597	41.019	22.464	10,93	54,76
	Sub Total		**361.267**	**135.825**	**80.712**	**22,34**	**59,42**
6	Gedung Fasilitas Pengembangan Produk Skala Pilot (GED. 34)	2017					
	Bangunan		581.753	120.299	3.537	0,61	2,94
	Peralatan		304.004	-	1.398	0,46	-
	Sub Total		**885.757**	**120.299**	**4.935**	**0,56**	**4,10**
7	Fasilitas Prefilled Syringe (GED. 41)	2017					
	Bangunan		12.506	12.505	12.593	100,70	100,70
	Peralatan		35.132	35.131	24.654	70,18	70,18
	Sub Total		**47.638**	**47.636**	**37.247**	**78,19**	**78,19**
TOTAL			**4.036.312**	**1.952.266**	**1.656.024**	**41,03**	**84,83**

JUMLAH ASET

Dalam Juta Rupiah

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Jumlah Aset Lancar	1.824.639	1.995.781	1.849.555	1.964.087	2.099.337	2.391.930	21,78	13,94	427.843	292.593	2.396.071
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.219.969	3.684.882	4.072.899	4.485.362	5.693.213	5.009.229	11,68	(12,01)	523.867	(683.984)	-
TOTAL ASET	**3.044.607**	**5.680.663**	**5.922.454**	**6.449.449**	**7.792.550**	**7.401.159**	**14,76**	**(5,02)**	**951.710**	**(391.391)**	**2.396.071**

LIABILITAS

Dalam Juta Rupiah

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	339.668	456.663	453.169	579.556	379.146	745.305	28,60	96,57	165.749	366.159	460.585
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	161.250	179.868	167.133	219.937	1.267.134	693.015	215,10	(45,31)	473.078	(574.119)	1.323.398
TOTAL LIABILITAS	**500.919**	**636.532**	**620.302**	**799.493**	**1.646.280**	**1.438.320**	**79,90**	**(12,63)**	**638.827**	**(207.960)**	**1.783.983**

EKUITAS

Dalam Juta Rupiah

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Modal Saham	1.250.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	(69.976)	1.909.600	1.901.287	1.874.048	1.910.830	1.880.116	0,32	(1,61)	6.068	(30.714)	-
Saldo Laba (Rugi)											
- Dicadangkan	786.075	816.422	899.824	1.250.552	1.654.263	1.539.498	23,11	(6,94)	288.946	(114.765)	-
- Belum Dicadangkan	-	(2484)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba Periode Berjalan	577.590	670.593	501.041	525.356	581.177	543.226	3,40	(6,53)	17.870	(37.951)	-
JUMLAH EKUITAS	**2.543.689**	**5.044.132**	**5.302.152**	**5.649.956**	**6.146.270**	**5.962.839**	**5,54**	**(2,98)**	**312.883**	**(183.431)**	**6.404.391**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**3.044.608**	**5.680.663**	**5.922.454**	**6.449.449**	**7.792.550**	**7.401.159**	**14,76**	**(5,02)**	**951.710**	**(391.391)**	**8.188.374**

RASIO KEUANGAN BIO FARMA

Rasio Keuangan	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Likuiditas [%]											
Rasio Kas	286,08	121,74	98,85	63,76	58,14	71,90	12,77	23,67	8,14	13,76	94,41
Rasio Lancar	537,18	437,04	408,14	338,90	553,70	320,93	(5,30)	(42,04)	(17,97)	(232,77)	520,22
Acid Test Ratio	441,03	335,75	251,78	117,79	120,16	105,99	(10,02)	(11,79)	(11,80)	(14)	94,41
Rentabilitas [%]											
Gross Profit Margin	61,84	63,02	56,59	44,97	45,78	43,63	(2,98)	(4,70)	(1,34)	(2,15)	44,55
Operating Margin	35,57	35,65	28,50	22,67	24,19	22,77	0,44	(5,87)	0,10	(1,41)	24,58
Net Profit Margin	28,48	28,59	21,64	17,44	17,70	16,79	(3,73)	(5,14)	(0,65)	(0,91)	16,83
Return on Equity (ROE)	31,93	17,14	12,47	12,97	14,81	14,18	9,33	(4,25)	1,21	(0,63)	15,85
Return on Investment (ROI)	31,15	20,27	16,53	16,93	15,78	15,70	(7,27)	(0,51)	(1,23)	(0,08)	17,55
Return On Assets (ROA)	20,26	15,37	8,80	8,62	8,43	8,24	(4,46)	(2,23)	(0,38)	(0,19)	-
Solvabilitas [%]											
Debt to Equity	19,69	12,62	11,70	14,15	26,79	24,12	70,46	(9,97)	9,97	(2,66)	27,87
Turnover [times]											
Turnover Persediaan (ITO)	2,94	2,20	1,72	2,33	2,59	1,93	(17,17)	(25,48)	(0,40)	(0,66)	-
Turnover Piutang (RTO)	7,54	6,17	5,87	10,08	13,51	11,50	14,09	(14,88)	1,42	(2,01)	-
Pertumbuhan [%]											
Penjualan	110,27	114,77	98,71	130,05	111,04	107,43	(17,39)	(3,25)	(22,62)	(3,61)	-
Laba Usaha	106,19	115,05	78,91	103,44	118,26	107,93	4,34	(8,73)	4,49	(10,34)	-
Laba Sebelum Pajak	99,65	115,90	76,17	104,18	114,92	101,92	(2,17)	(11,31)	(2,26)	(13,00)	-

RASIO KAS

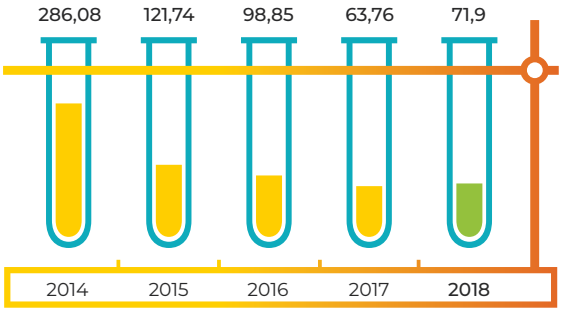

RASIO LANCAR

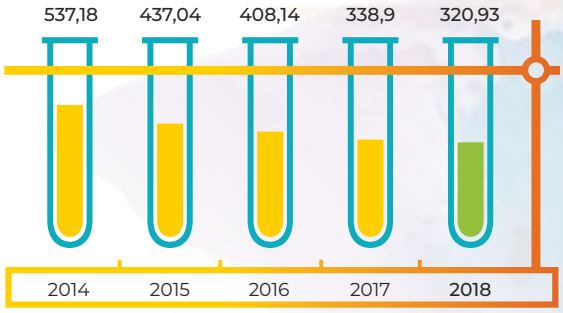

ACID TEST RATIO

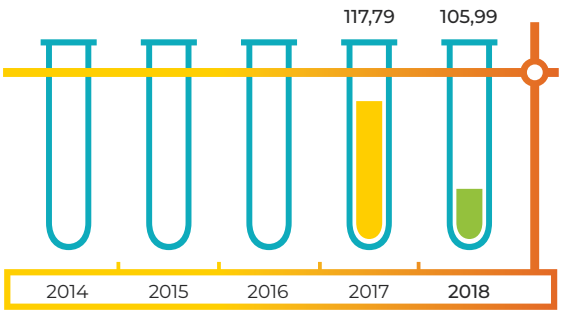

RENTABILITAS (%)

GROSS PROFIT MARGIN

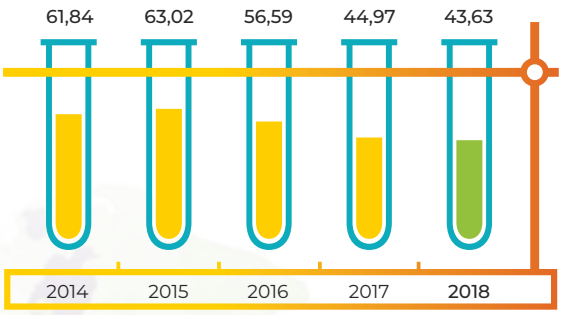

OPERATING MARGIN

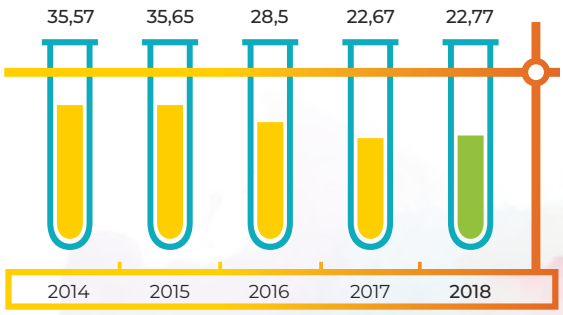

NET PROFIT MARGIN

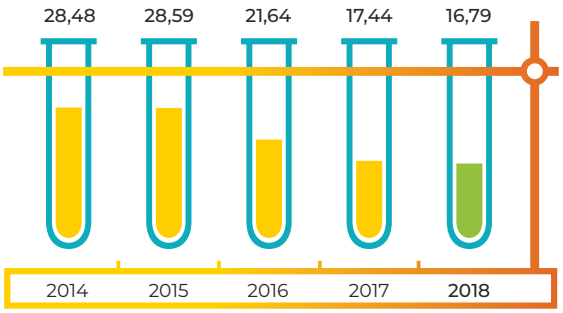

RETURN ON EQUITY (RoE)

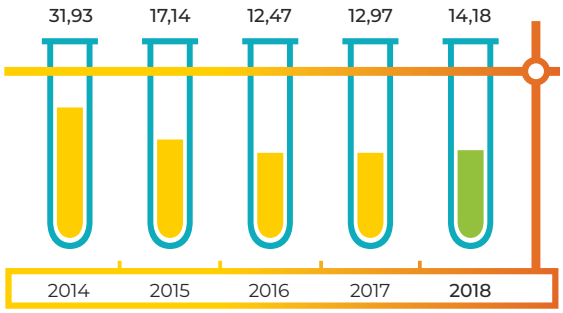

RETURN ON INVESTMENT (ROI)

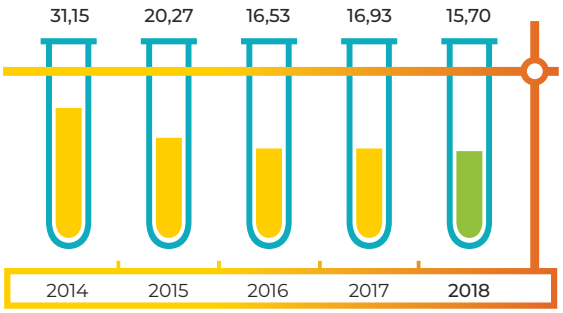

RETURN ON ASSETS (ROA)

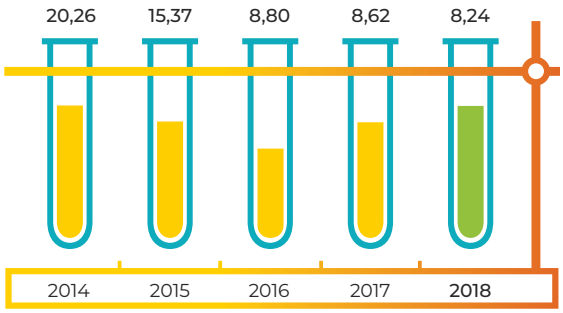

SOLVABILITAS

DEBT TO EQUITY

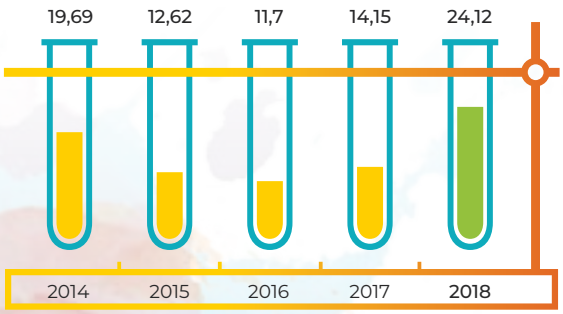

TURNOVER [TIMES]

TURNOVER PERSEDIAAN *(ITO)*

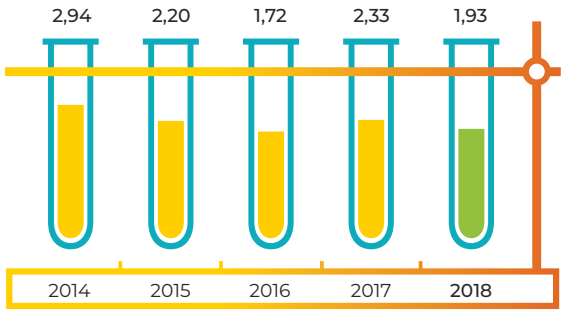

TURNOVER PIUTANG *(ITO)*

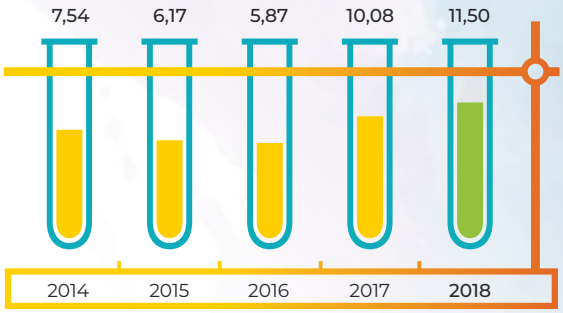

PERTUMBUHAN [%]

PENJUALAN

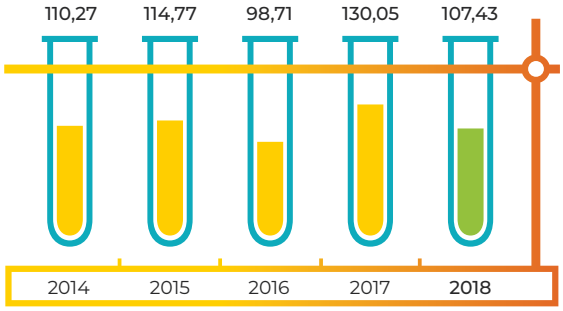

LABA USAHA

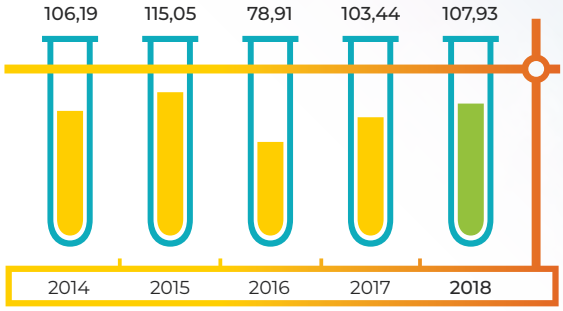

LABA SEBELUM PAJAK

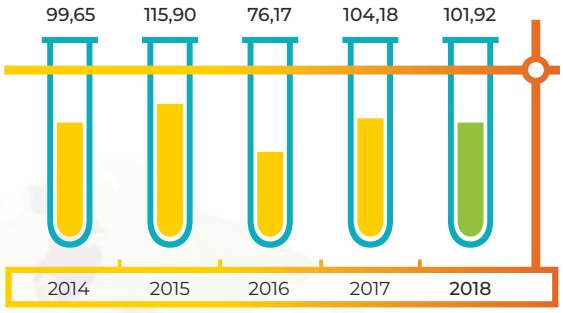

DIVIDEN DAN PKBL

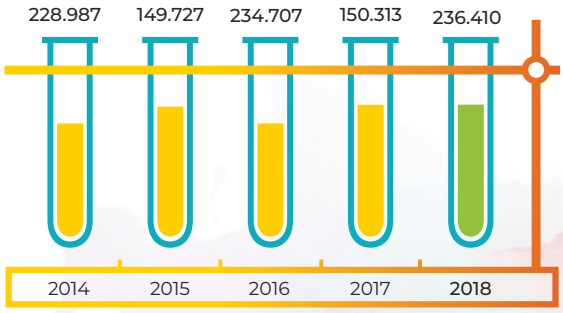

INFORMASI HARGA SAHAM DAN KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Bio Farma per 31 Desember 2018 merupakan Perusahaan *Non Listed* sehingga baik masyarakat, Direksi, maupun Dewan Komisaris Bio Farma tidak mempunyai kepemilikan saham atas Bio Farma. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%.

IKHTISAR SAHAM

Bio Farma per 31 Desember 2018 merupakan salah satu BUMN *non listed* atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak menyajikan informasi mengenai:

a. Jumlah saham yang beredar dalam bentuk tabel dan grafik.
b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.
c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.
d. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.
e. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.
f. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Bio Farma per 31 Desember 2018 merupakan salah satu BUMN *non listed* atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai Kronologis Pencatatan Saham, aksi korporasi, perubahan jumlah saham dan nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan.

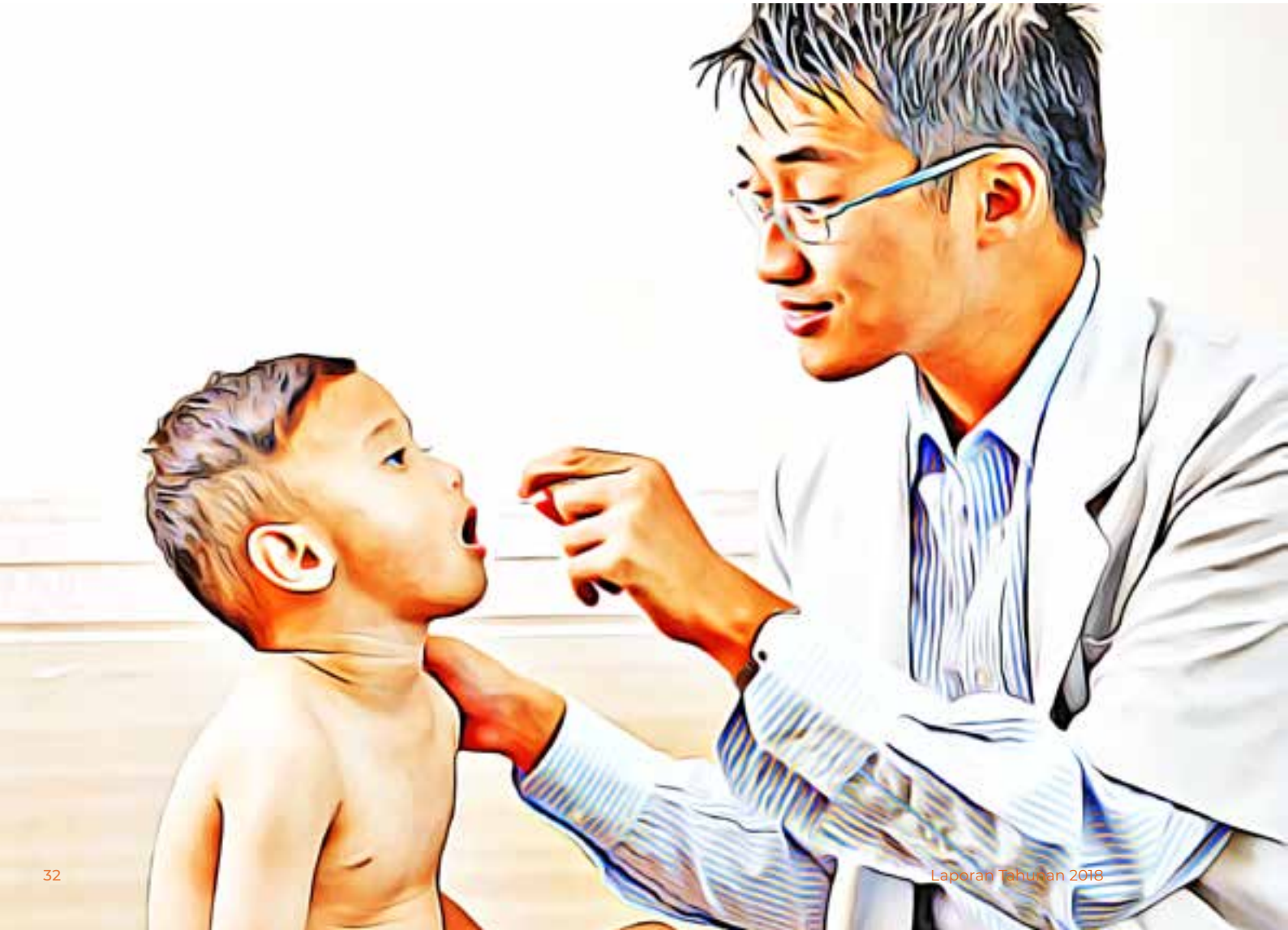

IKHTISAR OBLIGASI/SUKUK/OBLIGASI KONVERSI DAN KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

IKHTISAR OBLIGASI/SUKUK/OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2018, Bio Farma tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar *(Outstanding)*, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk tahun 2017 dan 2018

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

Bio Farma tidak menerbitkan efek dalam bentuk apapun sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan efek lainnya, aksi korporasi, perubahan jumlah efek lainnya, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, serta peringkat efek.

PENJUALAN PRODUK BERSIH
Dalam Juta Rupiah

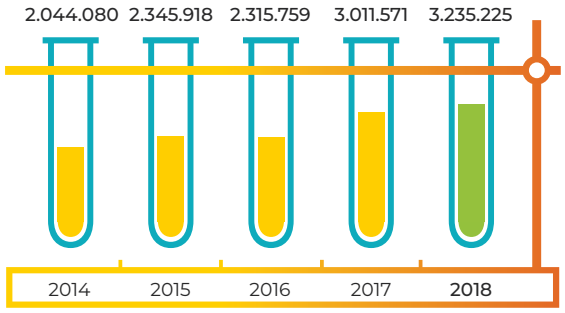

SEKTOR PEMERINTAH
Dalam Juta Rupiah

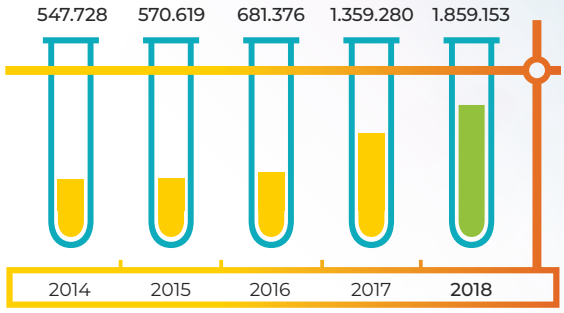

SEKTOR SWASTA
Dalam Juta Rupiah

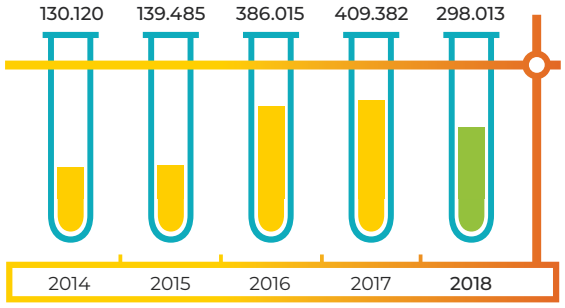

SEKTOR EKSPOR
Dalam Juta Rupiah

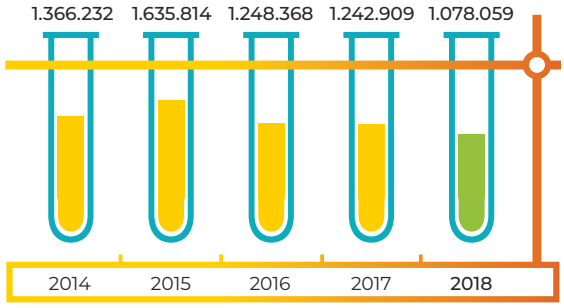

LABA (RUGI) KOTOR

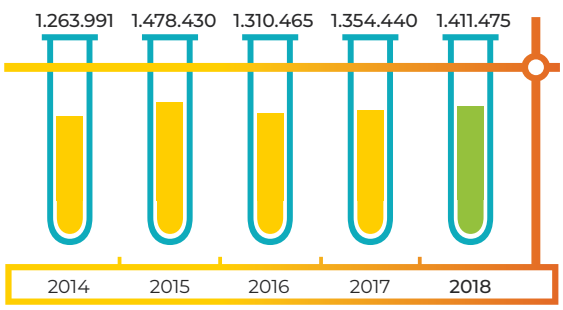

LABA (RUGI) BERSIH

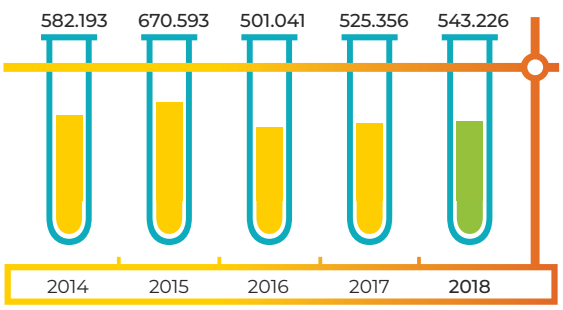

ASET
Dalam Juta Rupiah

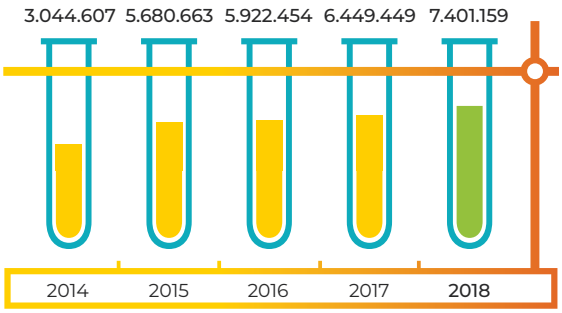

LIABILITAS
Dalam Juta Rupiah

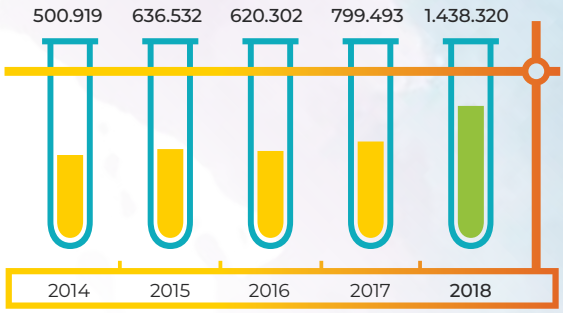

EKUITAS
Dalam Juta Rupiah

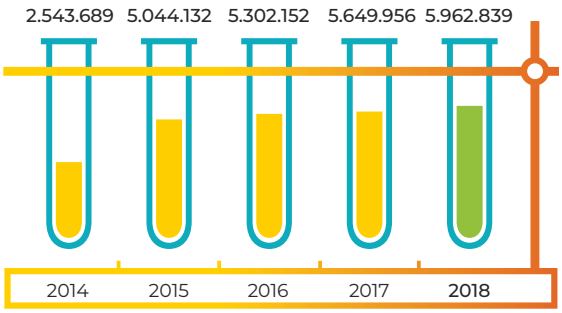

LAPORAN MANAJEMEN

Keberadaan Bio Farma, turut membantu mengangkat reputasi Indonesia dimata dunia, sebagai negara yang memiliki keunggulan dalam bidang bioteknologi dan vaksin. Tidak mudah untuk mendapatkan dan mempertahankan kompetensi membuat produk *Biopharmaceutical*, yang terkenal sangat *highly regulated and sophisticated*.

FARID WADJDI HUSAIN
Komisaris Utama

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

LIMA PILAR PERCEPATAN YAITU PERCEPATAN PRODUK BARU DENGAN SEMANGAT INOVASI, *ON TIME PROJECT* YANG FOKUS, PENGENDALIAN BIAYA, PENAMBAHAN PANGSA PASAR DALAM NEGERI DAN GLOBAL SERTA PENINGKATAN KOMPETENSI SDM, BIO FARMA YAKIN BISA MENCAPAI TARGET YANG SUDAH DISAHKAN OLEH PEMEGANG SAHAM.

Pemegang saham yang kami hormati,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Perkenankan kami, Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero), untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2018 tentang pencapaian kinerja Perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho-Nya, Perusahaan dapat melewati 2018 dengan baik. Pencapaian ini dapat diraih setelah melewati berbagai tantangan. Kunci kesuksesan ini adalah karena adanya kerjasama yang solid antara Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran eksekutif dan staf Bio Farma, mereka semuanya turut serta berkontribusi atas pencapaian kinerja 2018 yang gemilang.

Serangkaian peristiwa penting ikut mewarnai perjalanan Bio Farma pada tahun 2018, diantaranya; perubahan kebijakan global eradikasi polio, pro kontra imunisasi, kasus difteri, tantangan penerapan standar halal industri farmasi, laboratorium mikrobiologi Bio Farma siap bantu industri makanan dan kesehatan, Indonesia resmi sebagai *Centre of Excellence* pengembangan vaksin dan produk bioteknologi negara OKI, ekspor perdana produk vaksin Bio Farma ke Pakistan, Turki dan Honduras dan Papua New Guinea (PNG), Bio Farma siapkan strategi diplomasi ekonomi bidang kesehatan bersama Kementerian Luar Negeri, Bio Farma meluncurkan aplikasi manajemen risiko Perusahaan, mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik, Bio Farma kembali menggelar sosialisasi & penandatanganan pakta integritas, Bio Farma terus percepat penemuan vaksin & produk *Life Science* baru melalui FRLN, penandatanganan berbagai Nota Kesepahaman (MoU) yang mendukung bisnis proses korporasi, pemantapan strategi diplomasi untuk menambah pasar global, kerjasama baik dengan lembaga pemerintahan Indonesia maupun luar negeri melalui kelembagaan negara, serta penerimaan sertifikasi & penghargaan bergengsi.

Pemegang saham yang kami hormati,
Sebagai perusahaan terkemuka dalam memproduksi vaksin untuk Kawasan Asia Tenggara, tahun 2018 bagi Bio Farma merupakan tahun *recognition and acknowledgment*. Hal ini ditunjukan dengan adanya kepercayaan Kementerian Kesehatan RI kepada Bio Farma untuk penyediaan vaksin dasar. Di samping itu, bertambahnya kepercayaan pasar global atas produk – produk Bio Farma telah memperluas pasar baru ke

sejumlah negara, hingga kini telah mencapai lebih dari 140 negara. Selain itu, tawaran untuk mengadakan kerjasama riset dari negara maju, semakin bertambah. Bahkan salah satu lembaga filantropis dunia Bill Melinda Gates Foundation (BMGF) berkeinginan untuk turut membantu penelitian yang masuk ke dalam *pipeline* penelitian Bio Farma.

Keberadaan Bio Farma turut membantu mengangkat reputasi Indonesia di mata dunia, sebagai negara yang memiliki keunggulan dalam bidang bioteknologi dan vaksin. Tidak mudah untuk mendapatkan dan mempertahankan kompetensi membuat produk *Biopharmaceutical,* yang terkenal sangat *highly regulated and sophisticated*.

Bio Farma sebagai entitas perusahaan, tentu saja memerlukan sinergi lintas sektor dari pemerintahan, terutama untuk perluasan pangsa pasar. Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi yang bisa menembus pasar benua Afrika dan negara lainnya dengan strategi diplomasi dari Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kementerian Perdagangan RI melalui Dirjen Penguatan Ekspor Nasional (DPEN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai otoritas yang memeriksa kualitas vaksin. Kesuksesan Bio Farma dalam menemukan produk baru, diraih melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan komunitas peneliti, baik di dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, secara rutin kami menyelenggarakan Forum Riset *Life Science* Nasional (FRLN) dengan mendatangkan para ahli bioteknologi dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia yang bertujuan untuk menemukan produk baru *Life Science*.

Sedangkan kolaborasi internasional untuk pengembangan vaksin dilakukan dengan skema kerjasama melalui Kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia. Sejak tahun 2016 Bio Farma mengambil bagian dari Program Kerja Sama Selatan–Selatan dan Triangular yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara RI. Selanjutnya Bio Farma dipercaya menjadi tuan rumah dalam acara pertemuan terbatas kelompok produsen vaksin (*Vaccine Manufacturers Group*) negara Islam yang berada di bawah naungan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada 14-15 November 2016. Kegiatan akbar ini bersinergi bersama Kementerian Kesehatan RI dan BPOM RI.

Langkah strategis ini terus berlanjut dengan ditetapkannya Indonesia sebagai *Centre of Excellence for biotechnology and vaccine* untuk negara Islam (OKI), yang disahkan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri Kesehatan Negara Islam di Jeddah - Arab Saudi, yang pada akhirnya melahirkan kerjasama dengan negara–negara Islam, antara lain; Maroko, Tunisia dan Arab Saudi. Langkah strategis lainnya adalah terjalinnya Kerjasama dengan tema *Strengthening Indonesia-Morocco-Tunisia Development Cooperation Through Reverse Linkage (RL)* Program yang dilaksanakan pada 27-30 Agustus 2018, di Jakarta dan Bandung, melalui bantuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI).

ANALISIS PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Pemegang saham yang kami hormati,

Kondisi perekonomian dunia, menurut data dari Dana Moneter Internasional (IMF) tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7%. Relatif tidak ada perubahan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017. Pertumbuhan ini sedikti lebih rendah dari yang diperkirakan yaitu sebesar 3,9%. Namun demikian, tentu saja kondisi ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi 10 tahun yang lalu, di mana awal krisis ekonomi mulai melanda dunia.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah dari yang diperkirakan IMF merupakan dampak dari adanya tekanan global dan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Kebijakan Amerika Serikat yang meningkatkan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi China menjadi 6,2% dari 6,6% dibandingkan tahun lalu, melahirkan ketidakpastian yang berpengaruh kepada rantai pasokan global. Adanya isu *Brexit* di Eropa, menambah *chaos* di sejumlah pasar keuangan dunia. Demikian juga dengan pertumbuhan negara berkembang, IMF memprediksi pertumbuhannya melambat dari 4,6% menjadi 4,5% di tahun 2018.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, juga ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tetapi, seperti tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan, Indonesia dapat mencatat pertumbuhan

ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang dan juga lebih baik di antara negara anggota G20 sekalipun, dengan pertumbuhan ketiga tertinggi setelah China dan India.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Indonesia bertumbuh sebesar 5,1% di tahun 2018. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 yang tercatat sebesar 5,07%. Memang kondisi ini, masih di bawah rencana APBN 2018 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh sebesar 5,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia, tentu saja mengejutkan banyak pihak, di tengah kondisi ekonomi dunia yang belum stabil dan penuh dengan tekanan, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, yang saling menerapkan tarif pajak impor yang tinggi, tentu saja akan memengaruhi negara yang memiliki ketergantungan Impor bahan baku dari kedua negara tersebut.

Dilihat dari sisi neraca perdagangan Indonesia, juga terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar US$8,57 miliar pada tahun 2018 dibanding 2017 yang justru mengalami surplus US$11,8 miliar. Kondisi ini merupakan akibat dari adanya pertumbuhan nilai impor dan ekspor yang perbedaannya terpaut cukup jauh, yakni impor tumbuh sebesar 20,2% sedangkan nilai ekspor hanya bertumbuh sebesar 6,7% saja.

Salah satu pendorong defisit perdagangan Indonesia adalah, terjadinya kenaikan harga minyak dunia secara berkala di tahun 2018, yang mengakibatkan nilai impor migas Indonesia lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspornya. Demikian pun dari sektor non – migas, meski tidak mengalami defisit, namun terjadi penurunan yang sangat tajam sebesar 81,4%, lagi – lagi hal ini didorong oleh pertumbuhan ekspor nonmigas yang lebih lambat dibandingkan dengan nilai impornya yang meningkat secara tajam dan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang turun hingga 7,3% selama tahun 2018.

Kondisi perekonomian yang masih bisa dikatakan belum stabil ini, tidak memberikan pengaruh kepada permintaan produk farmasi secara global. Justru pada tahun 2018, industri farmasi di dunia tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Setidaknya, menurut pusat riset data farmasi IMS Health and Quint, pasar farmasi dunia mencatat pengeluaran obat – obatan pada tahun 2021 akan mencapai US$1,5 triliun.

Salah satu penyebabnya adalah akan bertambahnya jumlah penduduk dunia pada tahun 2030, dan bertambahnya angka harapan hidup di usia antara 65 – 80 tahun yang meningkat sebesar 28%, perubahan gaya hidup terutama pada kelas menengah, yang mulai sadar akan arti penting kesehatan dan ketersediaan obat menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

Demikian pula dengan produk vaksin, sebagai suatu metoda pencegahan penyakit yang paling *cost effective*, yang telah membantu menyelamatkan jutaan nyawa manusia dan melindungi generasi penerus bangsa sehingga bisa menjadi manusia yang berkualitas, juga memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan data lembaga *Research and Markets of Dublin*, Irlandia, pasar vaksin tercatat US$33,7 miliar pada tahun 2018, dan diharapkan akan terus meningkat dengan nilai pasar hingga US$57,5 miliar pada tahun 2025.

Pemegang saham yang kami hormati,

Industri farmasi Indonesia, menjadi salah satu prioritas sektor yang ditingkatkan di tahun 2018 karena dianggap telah memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk sektor manufaktur mencapai Rp222,3 triliun di mana sektor farmasi ikut meyumbang sebesar Rp13,3 triliun sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sektor farmasi tercatat US$1,9 miliar.

Pertumbuhan sektor farmasi ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah cita – cita untuk menuju Indonesia Sehat sesuai dengan Agenda ke-5 dari Nawa Cita, yaitu meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia Sehat, setidaknya dibutuhkan pilar – pilar, antara lain, : (1) penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN).

Untuk pilar penguatan pelayanan kesehatan bisa didapat dari ketersediaan obat – obatan, vaksin, fasilitas kesehatan, dan keterjangkauan dari pelayanan kesehatan tersebut. Bio Farma sebagai bagian dari industri farmasi, mengambil peran dalam hal penerapan paradigma sehat, dan penguatan pelayanan kesehatan melalui penyediaan vaksin, baik untuk bayi maupun dewasa.

Namun demikian industri farmasi masih menghadapi tantangan yaitu hampir 90% bahan baku industri farmasi terutama bahan kimia dasar, masih mengandalkan impor yang berasal dari China, India, Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri farmasi nasional untuk menerapkan harga yang bersaing dengan produk farmasi dari luar. Bila kondisi seperti ini masih berlanjut, cita – cita untuk mewujudkan kemandirian industri vaksin akan sulit terwujud.

Instruksi Presiden No 6 Tahun 2016, tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan merupakan landasan hukum dalam mewujudkan kemandirian industri vaksin nasional. Dalam peraturan ini terdapat 12 kelembagaan yang bersinergi antara lain ; 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK); 3. Menteri Kesehatan (Menkes); 4. Menteri Keuangan (Menkeu); 5. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti); 6. Menteri Perindustrian (Menperin); 7. Menteri Perdagangan (Mendag); 8. Menteri Pertanian (Mentan); 9. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 11. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); dan 12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).

Sinergi 12 lembaga ini memberikan harapan baru untuk mewujudkan kemandirian dalam bidang Bio Farmasetikal, mengingat Indonesia melalui Bio Farma sudah dipercaya menjadi *Centre of Excellence* untuk penelitian vaksin di Negara Kerjasama Islam (OKI) sejak tahun 2017 yang lalu.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pada tahun 2018 diselenggarakannya 2 (Dua) kali Rapat Umum Pemegang Umum (RUPS). RUPS pertama diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2018 mengenai Persetujuan RKAP Bio Farma tahun 2018. RUPS kedua diselenggarakan pada tanggal 25 April 2018 mengenai Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 & Laporan Kegiatan PKBL.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANGGAL 17 JANUARI 2018

RUPS pertama mengenai Persetujuan RKAP Bio Farma tahun 2018 dengan mata acara rapat terdiri dari tujuh agenda. Agenda pertama Menyetujui/mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 termasuk Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun 2018. Agenda kedua Menetapkan indikator aspek operasional yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan tahun 2018. Agenda ketiga Penetapan dan pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi Dan Dewan Komisaris Tahun 2018 Sebagaimana tercantum dalam kontrak manajemen dan kontrak kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Agenda keempat Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% dari nilai masing-masing program/ item investasi sepanjang tidak mengubah program/ item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi. Agenda kelima Menyetujui mengagunkan aset Perseroan yang nilainya melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh pinjaman dengan nilai maksimal sebesar Rp3 triliun dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menandatangani perjanjian pengikat jaminan dan dokumen lainnya terkait pendanaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh perbankan/ Lembaga pembiayaan.

Agenda keenam Menyetujui pelepasan dan penghapusbukuan aset tetap rusak dan tidak produktif yang memiliki umur ekonomis di atas 5 tahun berupa investasi kantor, pabrik, mesin, *utility* dan bangunan

perusahaan yang mempunyai nilai buku per 31-12-2017 sebesar Rp846.617.854,50 (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh empat koma lima nol rupiah). Agenda VII Menyetujui penerbitan Medium Term Note (MTN) tahun 2018 dengan nilai maksimal sebesar Rp450 miliar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANGGAL 25 APRIL 2018

RUPS kedua mengenai persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 & Laporan Kegiatan PKBL dengan mata acara rapat terdiri dari 6 agenda. Agenda pertama Menyetujui/Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017. Agenda kedua Menyetujui/mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2017. Agenda ketiga Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan pada RKAP Tahun 2017. Agenda keempat Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI's) Direksi Tahun 2017.

Agenda kelima Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris tahun 2017. Agenda kenenam Menyetujui pengagunan aset tetap perusahaan berupa tanah seluas 63.214 m2 di Jalan Kolonel Masturi, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dengan sertifikat HGB Nomor 00004 dan tanah seluas 91.058 m2 di Jalan Pasteur No.28, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan sertifikat HGB Nomor 288 dengan total nilai pasar sebesar Rp1,88 triliun untuk penarikan kredit investasi maksimal sebesar Rp1,20 triliun. Dalam hal ini dilakukan penilaian (appraisal) ulang atas aset agunan tersebut, maka nilai aset yang dipergunakan adalah nilai appraisal ulang tersebut.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Menteri Badan Usaha Milik Negara - selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (RUPS) PT Bio Farma (Persero), Rini M. Soemarno melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK – 102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero), Ahmad M. Ramli diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Utama Bio Farma dan digantikan oleh Farid Wadjdi Husain, kemudian Nizar Yamani dan Ihsan Setiadi Latief diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Bio Farma dan digantikan oleh Yuni Suryanto dan Made Arya Wijaya, serta Paruli Lubis diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Independen dan digantikan oleh Saud Usman.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-13/MBU/01/2019 tanggal 8 Januari 2019, Heridadi diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Independen dan digantikan oleh Elen Setiadi.

Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris per 8 Januari 2019: Farid Wadjdi Husain Sebagai Komisaris Utama, Yuni Suryanto, Made Arya Wijaya dan H.M. Subuh sebagai Komisaris serta Saud Usman dan Elen Setiadi sebagai Komisaris Independen.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihatan, Dewan Komisaris didukung oleh dua Komite Penunjang Dewan Komisaris serta Sekretaris Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit yang dikukuhkan dengan SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-02/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018 dengan susunan: Made Arya Wijaya sebagai Ketua Komite Audit, Yuni Suryanto sebagai Wakil Ketua Komite Audit dan M. Asawir Harahap, Priyatno sebagai Anggota Komite Audit.

Komite Audit Bio Farma berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengendalian internal dan audit perusahaan, serta membuat laporan secara tertulis atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan tingkat pencapaian kinerjanya untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala, baik berupa rapat internal, atau rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, Kepala SPI, Kepala Divisi atau Auditor Eksternal. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua yang hadir. Risalah rapat Komite Audit dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

Selama tahun 2018, Komite Audit mengadakan/ mengikuti rapat sebanyak 22 kali berupa rapat internal, rapat dengan SPI, rapat dengan eksternal auditor, rapat dengan Anggaran & Akuntansi, menghadiri rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi.

KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Komite Risiko, Pengembangan Dan GCG yang dikukuhkan dengan SK Dewan Komisaris No.: KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018 dengan susunan: Heridadi sebagai Ketua Komite Risiko, Pengembangan Dan GCG, H. M. Subuh sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota, Afrizal dan Judi Januardi Endjun sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan Dan GCG. Pada tanggal 08 Januari 2019 Heridadi diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Ketua Komite Risiko, Pengembangan Dan GCG dan diganti Elen Setiadi.

Komite Manajemen Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma dibentuk untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam upaya melakukan identifikasi, pemetaan, analisis, dan mitigasi risiko atas seluruh proses bisnis Bio Farma yang ditujukan untuk mencegah dan meminimalisasi risiko. Selain itu, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG membuat laporan secara tertulis atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan kegiatan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dan tingkat pencapaian kinerjanya untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Komite Risiko, Pengembangan dan GCG mengadakan rapat setidaknya satu kali dalam sebulan yang dipimpin oleh ketua Komite. Keputusan rapat Komite dianggap sah jika disetujui oleh ketua Komite. Setiap rapat Komite harus disusun dalam suatu risalah rapat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pertemuan diadakan.

Selama tahun 2018, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG mengadakan/mengikuti rapat sebanyak 9 (Sembilan) kali. Seluruh rapat tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tugas dan tanggung jawab Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan Perusahaan khusus Komisaris, Bio Farma memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Komisaris baru yang bertujuan memberikan gambaran tentang profil perusahaan yang berisikan materi tentang kondisi umum perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, strategi yang sedang dijalankan oleh Perusahaan, aktvitas bisnis, RJP Perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi. Program orientasi bagi Komisaris baru disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi SDM dan Divisi terkait lainnya, disampaikan dalam bentuk presentasi, pemberian dokumen laporan tahunan, *company profile,* sejarah Perusahaan, *Corporate Governance Policy*, serta peraturan perundangan yang terkait dengan proses bisnis Bio Farma.

Pada tanggal 20 April 2018 terjadinya perubahan komposisi Dewan Komisaris Bio Farma sehingga adanya kegiatan orientasi bagi Dewan Komisaris baru yaitu Farid Wadjdi Husain sebagai Komisaris Utama, Saud Usman Nasution sebagai Komisaris Independen, Made Arya Wijaya dan Yuni Suryanto sebagai Komisaris. Pada tanggal 08 Januari 2019 mengangkat Elen Setiadi sebagai Komisaris Independen. Penyelenggaraan Program Pengenalan Perusahaan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2019 dalam Rapat Dewan Komisaris.

Materi pengenalan diberikan sesuai Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2018. Selain pemaparan atas Perusahaan, dalam program pengenalan Perusahaan juga disampaikan dokumen-dokumen penunjang, diantaranya Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perusahaan, *Corporate Governance Policy* (CGP), Standar Etika Perusahaan, Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, *Charter* Dewan Komisaris, *Charter* Komite Dewan Komisaris, serta peraturan-

peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Selain itu, guna memahami secara langsung proses bisnis Perusahaan, program pengenalan Perusahaan juga meliputi kunjungan langsung ke Unit/ Unit Kerja Perusahaan.

EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2018

Tugas Dewan Komisaris secara umum adalah sebagai pengawas dan penasihat Direksi sedangkan Direksi bertugas sehari-hari mengelola dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal operasi Perseroan.

Pemegang saham menetapkan sasaran, target dan KPI untuk setiap tahun Anggaran yang pencapaiannya diwujudkan dalam beberapa tahapan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) Bio Farma. RJPP Bio Farma yang sedang berjalan saat ini untuk periode 2018-2022 dan akan diikuti oleh tahapan berikutnya sejalan dengan road map menuju visi dan Misi Bio Farma 2030. Atas dasar RJPP dan Surat Keputusan Menteri BUMN KEP-101/ MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN.

Evaluasi & penilaian atas Kinerja Pembuatan RKAP 2018 terdapat Keputusan Menteri BUMN No. 01/PER-BUMN/2012 tentang GCG antara lain menyebutkan bahwa peningkatan kinerja dan daya saing BUMN perlu dipastikan target perkembangannya dan dievaluasi setiap tahun.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi maka Dewan Komisaris menetapkan formula yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan KEP-04/DK/BF/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 Tentang Perubahan Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat. Direksi Bio Farma sesuai dengan Edaran dari Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 Tanggal 16 Januari 2013 Tentang Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 Tanggal 3 Juli 2016 Tentang PKBL BUMN.

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG. Untuk menilai keberhasilan kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan menggunakan formula yang ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris No. KEP-02/DK/BF/04/2018 dan KEP-03/DK/BF/04/2018 Tanggal 26 April 2018.

Dengan dievaluasinya kinerja Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG akan mendorong kedua organ Perusahaan tersebut untuk selalu bekerja dengan terukur dan profesional demi kepentingan Bio Farma yang lebih baik *(continuous improvement)* dan senantiasa berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Standar Etika.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN DASAR PENILAIANNYA

PENILAIAN TERHADAP ASPEK KINERJA KORPORASI YANG DIKELOLA OLEH DIREKSI

Dasar penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Direksi tentunya tidak terlepas dari tingkat keberhasilan Direksi dalam merealisasi RKAP Bio Farma tahun 2018 seperti yang direncanakan dalam tahun 2018. Disisi lain keberhasilan Direksi tentunya juga tidak lepas dari kontribusi/peran pengawasan dan penasihatan dari Dewan Komisaris terhadap Bio Farma yang akhirnya berfokus pada tingkat keberhasilan dalam merealisir RKAP 2018. RUPS telah mengukuhkan RKAP 2018 melalui RUPS pada Tanggal 17 Januari 2018 tentang Pengesahan RKAP Tahun Buku 2018 Dan Pengesahan RKA-PKBL Bio Farma Tahun 2018. Untuk menilai keberhasilan Direksi dalam merealisasikan RKAP 2018 Dewan Komisaris telah mengeluarkan Keputusan Dewan Komisaris tentang Penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai dasar Evaluasi Kinerja *(Performance Evaluation)* Direksi Tahun 2018. Sebagai pelengkap dari Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris tersebut ditetapkan juga target dan Perencanaan KPI Korporat tahun 2018 yang disusun dengan mengacu kepada surat edaran dari Sekretaris Kementerian BUMN No. 08/S.MBU/2013 Tanggal 16 Januari 2013 Tentang Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan surat dari Menteri BUMN No. S-487/MBU/08/2016 Tanggal 31 Agustus 2017 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal Untuk Penyusunan RKAP 2018.

FORMULA PENILAIAN KINERJA KORPORASI YANG DIKELOLA OLEH DIREKSI

Sebagai kelanjutan dari pembahasan atas penilaian kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, bahwa Kantor Kementerian BUMN mengeluarkan aspirasi pemegang saham sebagai rujukan terkait dengan penyusunan RKAP 2018. Dijelaskan juga

bahwa Kementerian BUMN mengeluarkan surat edaran No. S-08/S-MBU/2013 yang terkait dengan Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada BUMN.

Pencapaian/ realisasi KPI korporasi merupakan dasar penerapan penilaian kuantitatif dan objektif antara lain dalam perhitungan tantiem/bonus/insentif/ sanksi maupun perencanaan karier Direksi. Kelima prespektif yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi dimaksud terdiri dari 16 indikator yakni: Perspektif keuangan dan pasar dengan total bobot 24% terdiri dari 4 indikator dengan bobot antara 5-7%; 2. Perspektif efektivitas produk dan proses dengan total bobot 20% terdiri dari 4 indikator dengan bobot 5%: 3. Perspektif fokus pelanggan dan pasar dengan total bobot 22% terdiri dari 2 indikator dengan bobot masing-masing 11% ; 4. Perspektif fokus tenaga kerja dengan total bobot 17% terdiri dari 2 indikator dengan bobot antara 8-9% ; dan 5. Perspektif kepemimpinan tata kelola dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan dengan total bobot 17% terdiri dari 4 indikator dengan bobot 4-5%.

Tahun 2018, Kinerja Korporasi dihitung berdasarkan Formula yang ditetapkan dengan SK Dewan Komisaris dengan merujuk 5 (lima) perspektif dan terdiri dari 16 (Enam Belas) KPI. Total Nilai Pencapaian dari ke-16 KPI dimaksud adalah 91,76% (sangat memuaskan - *Outstanding*)

Kemudian Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani Lembar Pengesahan *Key Performance Indicator* - 2018 yang telah disepakati yang tentunya tetap terkait dengan RKAP 2018 dan saran pemegang saham pengendali. Sebagai pelengkap atas Lembar Pengesahan KPI 2018 diatas, dilengkapi lagi dengan Daftar 16 KPI, diiringi penjelasan detail atas setiap indikator termasuk formula penghitungannya.

Disamping perhitungan KPI yang didasarkan atas angka-angka yang tercantum dalam RKAP 2018 juga dihitung tingkat pencapaian yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan target atas kinerja korporat 2018. Perkalian antara capaian dan bobot merupakan "tingkat prestasi" untuk ke-16 KPI dimaksud. Dari penjumlahan ke-16 "tingkat prestasi" diperoleh jumlahnya sebesar 91,76% yang kemudian diverifikasi oleh Auditor Independen yang khusus ditugaskan untuk melakukan hal tersebut. Dengan prestasi yang besarnya 91,76% (untuk 16 KPI) berarti penilaian terhadap kinerja korporasi, yang dikelola oleh Direksi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris hasilnya berklasifikasi sangat memuaskan *(outstanding)*. Untuk kepentingan penilaian kesehatan Perusahaan biasanya digunakan formula yang ditetapkan oleh pemegang saham pengendali sedangkan hasil perhitungannya tersebut diverifikasi lagi oleh Auditor Independen (PWC) dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Bio Farma 2018. Dibandingkan dengan prestasi kinerja Korporasi 2017 yang besar prestasinya 91,27% maka prestasi kinerja Korporasi tahun 2018 lebih besar 0,49% dari tahun 2017 atau setara dengan 91,76%.

JUMLAH RAPAT DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN DEKOM DAN DIREKSI

Dewan Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawasan dan memberikan nasihat atas jalannya perusahaan, baik dari sisi bisnis, kebijakan, maupun secara umum yang dijalankan oleh Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan saat pelaksanaa RJPP, RKAP dan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi telah menyelenggarakan Rapat Internal Direksi sebanyak 36 kali dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota Direksi sebesar 95,72% artinya semua anggota Direksi nyaris selalu menghadiri rapat Direksi. Kalaupun tidak menghadiri rapat dikarenakan adanya tugas Perusahaan diluar kantor yang urgent. Dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah rapat pada 2018 meningkat 12,50% dari 28 kali rapat menjadi 36 kali rapat. Tingkat kehadirannya juga naik 6,56% dari 89,16% menjadi 95,72%.

Demikian juga dengan Dewan Komisaris, mengadakan rapat internal sebanyak 13 kali dengan jumlah kehadiran rapat sebesar 89,1%. Jumlah Rapat Internal Komisaris ini, meningkat sebesar 44,44% dari tahun 2017, dengan sembilan (9 kali) rapat dengan jumlah kehadiran yang meningkat dari 87,03% menjadi 89,1%.

Untuk meningkatkan konsolidasi dan kordinasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, maka pada tahun 2018, Direksi menghadiri Rapat atas undangan Dekom sebanyak 12 kali, dengan tingkat kehadiran Direksi sebesar 96,88%, sedangkan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebesar 98,75%. Ketidakhadiran Dewan Komisaris atau Direksi, disebabkan oleh tugas perusahaan diluar kantor yang memiliki prioritas yang tidak bisa diwakilkan oleh Dewan Komisaris atau Direksi lainnya.

Rapat tersebut membahas hal–hal strategis yang menjadi perhatian khusus Dewan Komisaris maupun rapat yang bersifat rutin, yang sesuai dengan RKAP 2018 Kegiatan rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan secara rutin, kecuali apabila ada hal mendesak untuk segera dilakukan rapat.

Dewan Komisaris, ingin menyampaikan apresiasi kepada Direksi yang secara konsisten menjalankan RKAP 2018. Instrumen keuangan perusahaan menunjukkan angka positif, Tingkat Kesehatan Perusahaan masuk ke dalam kategori "Sehat AA" dengan skor 90,35 penambahan pangsa pasar dapat terwujud dengan baik, dan kerjasama dengan pihak – pihak yang dapat mendukung Bio Farma menuju perusahaan *Life Science* terus dintensifkan.

KINERJA KEUANGAN BIO FARMA 2018

Kinerja Perusahaan pada tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Penerapan strategis & kerja keras serta berbagai upaya dalam menciptakan peluang & berbagai inisatif, pada tahun 2018 Bio Farma membukukan penjualan bersih sebesar Rp3,24 triliun atau naik sebesar Rp223,65 miliar atau 7,43% dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 2017 yang berjumlah Rp3,01 triliun dan Rp48,45 miliar atau 1,48% dibawah RKAP sebesar Rp3,28 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah penjualan produk perusahaan sebesar Rp165,92 miliar, Produk *Partnership* sebesar Rp22,95 miliar, Produk *Trading Partnership* sebesar Rp32,99 miliar dan Jasa sebesar Rp1,79 miliar bila dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 2017.

Suatu hasil yang sangat membanggakan Bio Farma membukukan penjualan produk di sektor Pemerintah pada tahun 2018 sebesar Rp1,86 triliun atau naik sebesar Rp499,87 miliar atau 36,77% di atas penjualan produk di sektor Pemerintah tahun 2017 yang berjumlah Rp1,36 triliun dan Rp309,94 atau 20,01% di atas RKAP sebesar Rp1,55 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya penjualan produk perusahaan dari vaksin Td 10 ds sebesar Rp126,83 miliar atau 375,92%, vaksin DT 10 ds sebesar Rp25,58 miliar atau 272,30% dan Pentabio 5 ds sebesar Rp523,63 miliar atau 170,98% untuk pemenuhan program *Outbreak Response Immunization* (ORI) difteri, serta produk *Partnership* dari vaksin BCG Bayi 20 ds impor sebesar Rp68,29 miliar atau 104,42%, IPV 5 ds sebesar Rp166,33 miliar atau 167,15% dan MR sebesar 819,34 miliar atau 102,11% untuk pencanangan vaksin *Partnership* Measles Rubella (MR) fase II yang diterapkan di 28 provinsi di Indonesia, bila dibandingkan dengan penjualan produk di sektor pemerintah tahun 2017.

Bio Farma membukukan penjualan produk di sektor Swasta pada tahun 2018 sebesar Rp298,01 miliar atau turun sebesar Rp111,37 miliar atau 27,20% di bawah penjualan produk sektor Swasta tahun 2017 yang berjumlah Rp409,38 miliar dan Rp77,18 miliar atau 20,57% diatas RKAP sebesar Rp375,20 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh terjadi turunnya penjualan produk *Partnership* sebesar 67,06% atau senilai Rp162,85 miliar, turunnya penjualan meningitis sebesar 79,65% atau senilai Rp178,80 miliar, dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Dibandingkan dengan RKAP tahun 2018 terjadi penurunan pencapaian penjualan produk perusahaan sebesar Rp154,79 miliar

atau 96,14% untuk vaksin Flu Bio 1 ds sebesar Rp12,64 miliar atau 62,55%, bulk Hepatitis B-RTF sebesar Rp2,47 miliar atau 28,54% dan BIOSAT-1.5 sebesar Rp48,09 miliar, atau 73,36% serta produk *Partnership* dari penjualan vaksin Meningitis sebesar Rp45,68 miliar atau mencapai 33,10%

Bio Farma membukukan penjualan produk di sektor ekspor pada tahun 2018 sebesar Rp1,08 triliun atau turun sebesar Rp164,85 miliar atau 13,26% di bawah penjualan produk sektor ekspor tahun 2017 yang berjumlah Rp1,24 triliun dan Rp281,21 miliar atau 20,69% di bawah RKAP sebesar Rp1,36 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, penjualan di sektor ekspor dalam mata uang rupiah turun sebesar 13,26% atau senilai Rp164,85 miliar dan bila dalam mata uang valas USD turun sebesar 19,34% atau senilai USD 17,92 juta. Penurunan penjualan di sektor ekspor tersebut terutama karena penurunan pencapaian penjualan vaksin TT 10 ds sebesar Rp7,65 miliar atau 55,44%, Td 10 ds sebesar Rp39,05 miliar atau 97,20%, DTP 10 ds sebesar Rp25,72 miliar atau 59,72%, bOPV 20 ds sebesar Rp14,71 miliar atau 5,03%, Campak 10 ds sebesar Rp54,93 miliar atau 47,12%, bulk Polio sebesar Rp83,32 miliar atau 12,65% dan bulk campak sebesar Rp7,37 miliar atau 25,47%. Dibandingkan dengan RKAP tahun 2018, penjualan di sektor ekspor dalam mata uang rupiah sebesar mencapai 79,31% senilai Rp1,08 triliun atau dalam mata uang valas USD mencapai 74,20% atau senilai USD 74,71 juta. Pencapaian tersebut terutama karena pencapaian penjualan Td 10 ds sebesar Rp1,13 miliar atau 4,05%, DTP 10 ds sebesar Rp17,35 miliar atau 36,05%, bOPV 20 ds sebesar Rp277,83 miliar atau 82,09%, Campak 10 ds sebesar Rp61,66 miliar atau 47,23%, bulk Polio sebesar Rp575,56 miliar atau 83,80% dan bulk campak sebesar Rp21,57 miliar atau 40,75%.

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar Rp535,91 miliar atau naik sebesar Rp315,47 miliar atau 45,02% di atas saldo kas dan setara kas pada akhir tahun 2017 yang berjumlah Rp369,55 miliar dan Rp434,84 milyar atau 143,11% di atas RKAP sebesar Rp220,44 miliar.

KINERJA DIREKSI DALAM ASPEK OPERASIONAL

KINERJA KECELAKAAN KERJA *(SAFETY)*

Bagi Bio Farma, SDM sangatlah penting karena karyawan merupakan salah satu aset penting guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Oleh karenanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman terhindar dari suatu hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja merupakan persyaratan mutlak di setiap unit kerja masing-masing. Dan perbaikan lingkungan kerja yang dilengkapi dengan SOP dan sistem pengawasan secara berkesinambungan terus dilakukan Bio Farma.

Dewan Komisaris selalu mendorong Direksi untuk mengupayakan pencapaian target *Zero Accident. Concern* Dewan Komisaris dalam masalah *safety* ini diwujudkan dalam pandangan dan sikap bahwa Bio farma memandang kinerja produksi tidak ada artinya jika SDM-nya mengalami kecelakaan kerja. Bio Farma menetapkan kinerja *safety* dan operasi produksi merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dewan Komisaris sangat puas dan merasa lega karena statistik keselamatan kerja pada tahun 2018 baik karena *Zero Accident*. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk menerapkan standar keamanan yang tinggi dan diawasi dengan sungguh-sungguh.

Pada dasarnya terjadinya kecelakaan adalah suatu hal yang tidak diinginkan sehingga Dewan Komisaris mengingatkan Direksi agar selalu waspada, konsisten terhadap penerapan sistem yang sudah tertata dengan baik. Beberapa tahun belakangan ini Bio Farma menerima penghargaan *Zero Accident* dari Kementerian ESDM, untuk tahun 2018 *safety award* dari Kementerian ESDM ditunda pengumuman pemenangnya.

PENINGKATAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MEMPERKUAT STRATEGI 2018

Berbagai strategi yang dilakukan Bio Farma dalam tahun 2018 untuk meningkatkan laba dan penjualan serta mencapai keberhasilan di masa depan.

PELUANG MEMPERLUAS DAN MENINGKATKAN “PENELITIAN, PENGEMBANGAN PRODUK & INOVASI”

Bio Farma memiliki perhatian khusus terhadap kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk & Inovasi sebagai usaha untuk peningkatan core bisnis perusahaan. Dalam mendukung kegiatan Penelitian dan Pengembangan Produk & Inovasi, Bio Farma menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk mendukung kinerja perusahaan.

PELUANG MEMPERLUAS DAN MENINGKATKAN "PRODUK *PARTNERSHIP* & PRODUK *TRADING PARTNERSHIP*"

Di bidang pemasaran Bio Farma melakukan strategi-strategi diantaranya mempertahankan pasar yang sudah ada dan memperluas pasar baru untuk meningkatkan pemasaran produk yang sudah dikenal maupun produk baru, membina dan membangun kemitraan yang lebih strategis melalui *face to face meeting* dengan *customer* sehingga dapat mengetahui secara langsung keinginan *customer (customer oriented)* dan kebutuhan pasar secara global, Bio Farma tidak hanya menjual produk perusahaan dan jasa tetapi juga menjual Produk *Partnership* & Produk *Trading Partnership*.

UPAYA EFISIENSI YANG BERKESINAMBUNGAN OLEH SETIAP INSAN BIO FARMA

EFISIENSI OPERASI DAN UPAYA OPTIMALISASI *COST*

Program efisiensi diterapkan pada setiap diri insan Bio Farma. Ini merupakan inisiatif yang terus didorong oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma sebagai upaya untuk menaikkan daya saing dan dalam rangka mengendalikan biaya/*cost* serendah mungkin. Namun Bio Farma meyakini jika dapat mengendalikan biaya/*cost* maka akan berdampak baik dengan keuangan Bio Farma. Dengan memperkuat strategi untuk mencapai keberhasilan maka upaya yang dilakukan adalah melakukan efisiensi semaksimal mungkin.

KINERJA DIREKSI DALAM ASPEK PENGEMBANGAN PROYEK

Dewan Komisaris memberikan motivasi terus kepada Direksi Bio Farma meningkatkan investasi barang modal dan bangunan untuk keperluan pengembangan Bio Farma dalam rangka meningkatkan nilai Bio Farma melalui ekspansi kapasitas produksi, peningkatan efisiensi produksi dan diversifikasi lini usaha. Investasi dalam pelaksanaan saat ini diantaranya Gedung Fasilitas Produksi Vaksin dan Pengemasan, Fasiltas *Downstream* Vaksin BCG, Sentral Hewan Laboratorium Animal *House 2, Piping & Utilities* Fasilitas Vaksin Rekombinan, Pembangunan Faspord Vaksin & Pengemasan, dll.

ANNUAL REPORT AWARD 2016

Tahun 2017 Bio Farma meraih penghargaan bergengsi Juara 2 *Annual Report Award* untuk kategori BUMN *Non Listed* Non Keuangan dengan jumlah nilai akhir 75,07. Penghargaan bergengsi ini merupakan apresiasi terhadap kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Bio Farma dalam melakukan kinerja terbaik selama tahun 2016. Bio Farma akan senantiasa meningkatkan prestasi yang bergengsi ini dengan terus melakukan kegiatan Perusahaan yang *accountable* dan transparan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. *Annual Report Award* 2016 diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Ikatan Akuntan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

Kami merasa terpanggil untuk menyediakan vaksin yang berkualitas dalam rangka memutus mata rantai penularan penyakit difteri, dengan menjadwal ulang beberapa kontrak dengan UNICEF dan mengalihkan jadwal pengepakan beberapa vaksin virus untuk kami prioritaskan kepada program ORI dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami Bio Farma, sebagai bagian dari BUMN ikut Hadir Untuk Negeri demi menjaga kesehatan dari generasi ke generasi.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN YANG DISUSUN OLEH DIREKSI DAN DASAR PERTIMBANGANNYA

Pemegang saham yang kami hormati,

Industri farmasi merupakan industri yang memiliki keunikan tersendiri, dengan peraturan yang ketat yang tidak bisa meninggalkan faktor keamanan, khasiat, kualitas/*safety*, *efficacy and quality*. Keunikan industri ini, dapat dilihat dari komposisi investasi yang fokus pada Riset, Pengembangan dan Inovasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan *Return on Invesment*, dibandingkan dengan industri lain, menjadikan tidak banyak perusahaan yang bermain di industri ini. Hal ini tentu saja menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Bio Farma, yang mulai mengembangkan sayapnya ke industri bioteknologi. Bioteknologi adalah dasar dalam hampir semua proses bioterapi farmasi dalam era RI keempat. Teknologi ini banyak diterapkan untuk memanipulasi berbagai bahan biologis yang dapat dipakai sebagai terapi untuk berbagai kondisi dan jenis penyakit, terutama yang bersifat mematikan.

Beberapa tahun terakhir, dunia mulai memasuiki era revolusi industri terbaru, yaitu Revolusi Industri keempat (RI 4.0) yang merupakan kelanjutan dari revolusi industri 3.0, yang mengandalkan internet sehingga memungkinkan pelaku industri, untuk mengirimkan data secara *real time*. Kemunculan RI 4.0, dipercaya akan merubah model bisnis secara menyeluruh, karena menggabungkan unsur teknologi dan digital yang memungkinkan membuat segalanya menjadi lebih cepat dan lebih murah.

Untuk industri bioteknologi seperti Bio Farma, pemanfaatan RI 4.0 bisa juga diarahkan untuk pemanfaatan *big data analysis*, *artificial intelligence* dan *machine learning* yang akan memungkinkan penelitian di Bio Farma dilakukan lebih cepat, akurat dan murah. Karena ketiga hal tersebut dapat bermanfaat untuk pemetaan gen dari virus/bakteri, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian vaksin baru lebih singkat dan mungkin saja dalam waktu beberapa tahun ke depan, Bio Farma bisa menghasilkan vaksin yang sudah tidak lagi menggunakan unsur hewani (non-animal origin) dalam pembuatan vaksinnya, dengan tetap mengedepankan *safety, quality* dan *efficacy*.

Industri Farmasi secara umum, akan sangat terbantu dengan kehadiran Revolusi Industri 4.0. Gerakan yang dipercaya sebagai revolusi besar – besaran yang memungkinkan untuk menggabungkan dunia digital dengan fisik, dan biologi melalaui proses perkembangan teknologi yang super cepat, lebih terintegrasi dan memengaruhi proses bisnis secara masif, dengan memanfaatkan *big data*, *Artificial Intelligence* dan *Machine Learning*.

Perkembangan vaksin masa depan tidak hanya berfungsi untuk pencegahan saja, tetapi juga untuk pengobatan atau terapeutik. Dewan Komisaris meminta kepada Direksi untuk memprioritaskan Riset, Pengembangan dan Inovasi produk yang sedang dikembangkan saat ini, mengarah kepada pemanfaatan rekayasa genetika untuk antigen vaksin TB generasi terbaru, dan antigen HBsAG untuk vaksin Hepatitis B terapi, dan juga beberapa produk Biosimilar seperti herceptin atau trastuzumab yang memanfaatkan monoklonal antibodi di sel mamalia untuk produk biosimilar anti pengobatan kanker.

Ditambah lagi dengan bermunculannya *star-up company*, yang memang khusus untuk memberikan hasil dari *sequencing* DNA dari suatu virus atau bakteri yang akan dijadkian vaksin, tentu saja ini akan mempercepat penemuan vaksin baru, dan akan menghasilkan *time to market* yang lebih tepat waktu.

Pemegang saham yang kami hormati,

Perekonomian di negara Islam, menunjukan geliatnya melalui pengadopsian perkembangan tenologi terbaru dari berbagai bidang, termasuk farmasi. Dorongan ini dilatar belakangi dari meningkatnya permintaan atas terapi pencegahan untuk mendukung gaya hidup

sehat yang *holistic* dari sebagian besar umat muslim milenial di Amerika Utara dan Eropa. Data menunjukan secara kumulatif, belanja Negara - Negara Islam untu produk kesehatan termasuk farmasi sebesar US$87 miliar dan diperkirakan akan mencapai US$131 miliar pada tahun 2023.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Global Islamic Economic Report dengan populasi umat muslim pada tahun 2017 yang sudah mencapai 1.8 miliar jiwa, setara dengan 24% penduduk dunia, telah menjadikan umat Islam menjadi pasar yang potensial bagi seluruh industri, tidak terkecuali oleh industri kesehatan. Hal ini berdasarkan semakin meningkatnya kesadaran pemerintah Negara–Negara Islam dalam menjaga kesehatan warganya baik melalui pengobatan maupun pencegahan.

Jumlah Populasi umat Islam di dunia adalah 1,8 miliar jiwa, setara dengan 24% populasi dunia. Dari jumlah tersebut, Setidaknya, secara kumulatif, belanja Negara-Negara Islam untuk produk kesehatan termasuk farmasi sebesar US$87 miliar dan diperkirakan akan mencapai US$131 miliar pada tahun 2023.

Dewan Komisaris menilai besarnya belanja yang dikeluarkan untuk barang farmasi di negara Islam, merupakan jumlah yang tidak sedikit dan tentu saja sangat potensial bagi Bio Farma untuk masuk ke pasar vaksin negara Islam, mengingat Indonesia merupakan satu–satunya dari negara anggota OKI yang produk vaksinnya paling lengkap yang sudah memiliki PQ WHO.

Oleh karenanya Dewan Komisaris, terus mengingatkan Direksi untuk senantiasa meningkatkan pangsa pasar, melalui penjualan vaksin ke negara–negara sahabat, baik secara bilateral melalui organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) khususnya negara Afrika, maupun kepada negara yang berada di Jaringan Produsen Vaksin negera–negara berkembang (DCVMN), dengan menularkan semangat kemandirian pembuatan vaksin halal, selain dengan tetap menjaga hubungan baik dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Unicef.

ISU HALAL PRODUK FARMASI

Isu kandungan produk yang sesuai dengan syariat Islam, telah menjadi isu utama di antara umat muslim di dunia. Diharapkan riset untuk produk farmasi di masa yang akan datang, untuk mengedepankan unsur kehalalan di samping tetap harus menjaga sisi *safety*, *efficacy*, dan *quality*, sehingga dapat dimulai sejak pemilihan bahan baku, cara produksi, dan pengembangan produk, hingga distribusi dan digunakan oleh masyarakat.

Di Indonesia sendiri, isu halal menjadi perhatian khusus bagi semua pelaku industri, terutama setelah disahkannya Undang – Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menurut rencana akan resmi digunakan pada Oktober 2019. Bagi Bio Farma, dengan kehadiran UU JPH ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat 90% bahan baku farmasi / *Active Pharmaceutical Ingredients* (API) berasal dari negara non-muslim, yang mungkin belum memahami mengenai konsep halal.

Untuk mewujudkan produk halal farmasi, diperlukan sinergi dan pengawalan dari lembaga pemerintah dan juga pemuka agama dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga konsep halal bisa dimulai dari penelitian, pemilihan bahan baku, proses produksi dan produk akhir sampai kemudian digunakan oleh masyarakat.

Dewan Komisaris mengapresiasi upaya dan kinerja Dewan Direksi, yang pada tahun 2018 sudah mengawal sinergi dengan institusi pemerintah dan LPPOM MUI, untuk kepengurusan sertifikat halal produk Bio Farma secara bertahap. Diharapkan dengan adanya sertifikat halal untuk produk vaksin, antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin akan meningkat.

Kami juga mengapresiasi Direksi, dengan semangat *Ukhuwah Islamiyah* mengajak negara–negara OKI yang tergabung dalam Vaccine Manufacturer Group, untuk bersama sama menciptakan konsep vaksin halal yang bisa diterima oleh semua negara Islam bahkan negara lain di Dunia. Sebagai langkah awal, Indonesia yang sudah resmi menjadi *Centre of Excellence* untuk Bioteknologi dan vaksin pada tahun 2017, dan merujuk pada pengalaman Bio Farma yang berhasil membuat vaksin dengan kualitas WHO, mengajak Tunisia, Maroko, Arab Saudi, untuk bersama – sama melaukan *joint research* untuk menghasilkan vaksin halal.

Data penjualan ekspor Bio Farma menunjukkan 33,2%, dengan kontribusi untuk Negara Islam, yang terus meningkat. Tantangan sebenarnya bukan hanya untuk menambah pasar saja, tetapi juga harmonisasi untuk menemukan vaksin halal dalam seperti yang tertuang dalam *The OIC's Strategic Action Plan* 2014-2023.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN/ PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS) DI BIO FARMA

Keberhasilan Bio Farma dalam menjawab tantangan Industri 4.0, dan bertarung di pasar internasional, bergantung pada bagaimana Dewan Direksi melihat segala peluang, tantangan serta risiko yang dihadapi. Oleh karenanya, kami berharap Direksi Bio Farma selalu melakukan kajian – kaian terkait dengan keputusan yang akan diambil, sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing*) merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Bio Farma maupun Pemangku Kepentingan, yang dilakukan oleh insan dan atau pimpinan Bio Farma atau Pimpinan Bio Farma. Pimpinan Bio Farma atau lembaga lain dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Bio Farma telah mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran *(Whistleblowing System -WBS)* sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 1026/ DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistle Blowing System)* di PT Bio Farma (Persero) dengan tujuan untuk menegakkan etika bisnis, etika kerja dan serta upaya pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), praktik *fraud*, atau tindakan lain yang melawan hukum yang dapat merugikan perusahaan. Bio Farma menerapkan *Whistle Blowing System* (WBS) yang merupakan suatu *Early Warning System* (EWS) untuk menghindari potensi praktik kecurangan yang dapat diketahui sedini mungkin. Sistem WBS memungkinkan seluruh Insan Bio Farma dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan laporan dugaan tindakan pelanggaran dan kecurangan *(fraud)* dan bentuk pelanggaran etika lainnya yang terjadi di Perusahaan.

Di tahun 2015, Bio Farma mulai membangun sistem pelaporan pelanggaran berbasis *Website* dengan nama Aplikasi WBS (*Whistleblowing System*). Pelapor dapat melaporkan secara *online* melalui sistem berbasis web dengan alamat http://aplikasi.biofarma.co.id/gcg. Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Admin Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing)* yang diduga dialakukan oleh Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris. Tim yang menangani pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

Mekanisme penyampaian laporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dilarang dan dapat merugikan Perusahaan merujuk kepada Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 01026/DIR/ II/2013, tanggal 22 Pebruari 2013. Dan untuk Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran juga diatur dalam SK Direksi Nomor: 01026/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013.

Pihak yang mengelola pengaduan / Pelaporan Dugaan Pelanggaran diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 01729/DIR/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang telah diperbaharui dengan SK No. : KEP-16/DK/BF/X/2014, No. :

05021/DIR/X/2014 tentang Penunjukan Admin Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing)*. Dalam penerapan WBS, Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran *(Whistleblowing)* dan untuk pelapor yang beriktikad baik, Perusahaan juga menyediakan perlindungan hukum.

Untuk menjamin efektivitas penerapan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dilakukan *monitoring* dan evaluasi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran secara berkala minimal satu tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal pencanangan sistem ini dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis perseroan maupun peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi ini dapat dilakukan sendiri oleh Direksi melalui Satuan Pengawasan Intern atau menggunakan pihak luar yang independen. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran maupun melakukan pemantauan atas rekomendasi perbaikan. Hasil *monitoring* dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan kepada Direksi.

Selama tahun 2018 Tim Pengelola WBS tidak pernah menerima laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Organ Perusahaan maupun Insan Bio Farma sehingga tidak disajikannya jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun 2018 serta tidak disajikannya sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah diproses pada tahun 2018.

Sebagai perwujudan terciptanya penyelenggaraan *Good Corporate Governance* yang efektif dan baik maka sosialisasi dan penegakan penerapan terhadap *Whistle Blowing System* akan selalu terus ditingkatkan dan akan dilaksanakan secara berkala penyempurnaan sistem dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

PENUTUP

Di masa yang akan datang, persaingan industri farmasi semakin tinggi. Dengan adanya penemuan teknologi *Artificial Intelligence*, *Machine Learning* dan *Big Data Analysis,* bisa menjadi ancaman sekaligus peluang bagi Bio Farma untuk mencapai visi perusahaan menjadi pemimpin *Life Science company*. Dengan semangat *Smart, Sharp dan Synergy,* mari kita songsong tahun 2019 dengan penuh keyakinan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Rencana pembentukan perusahaan holding industri farmasi BUMN oleh Pemerintah disambut baik. Dengan adanya perusahaan *holding*, akan melahirkan potensi peningkatan pangsa pasar yang lebih luas dan *value* perusahaan yang lebih tinggi serta, disamping *access to medicine* akan semakin meningkat. Tahun 2019 mendatang, Bio Farma akan menghadapi *assessment* WHO sehingga semakin membuka kepercayaan dunia terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh Bio Farma.

Dewan Komisaris mengingatkan dengan nilai-nilai Bio Farma, disertai tempaan pengalaman 128 tahun serta adanya tekad bersama, seluruh jajaran Bio Farma untuk bekerja keras, bekerja cerdas menghadapi RKAP Tahun 2019 yang lebih "menantang", menuju Bio Farma yang lebih baik. Sebagai penutup, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Pemegang Saham, dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya. Penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada Direksi, Manajemen dan seluruh Insan Bio Farma yang telah bekerja dengan penuh kesungguhan dan dedikasi yang tinggi serta bantuan dan kerjasamanya sehingga Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan penasihatan serta memastikan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) telah berjalan sebagai landasan operasional perusahaan yang pada gilirannya akan menciptakan imbal hasil yang optimum kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Jakarta, 22 Maret 2019

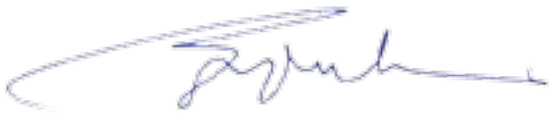

FARID WADJDI HUSAIN
Komisaris Utama
PT Bio Farm (Persero)

LAPORAN DIREKSI

KOMITMEN UNTUK TERUS MELAKUKAN INOVASI YANG SMART SEHINGGA PENETRASI PASAR PRODUK BARU BISA DILUNCURKAN TEPAT WAKTU, DITAMBAH DENGAN KOLABORASI DAN SINERGI DENGAN BERBAGAI PIHAK UNTUK PENAMBAHAN PANGSA PASAR BARU, TARGET BIO FARMA PADA TAHUN 2018 BISA TERCAPAI.

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Merupakan kehormatan, mewakili seluruh Direksi Bio Farma, untuk menyampaikan bahwa tahun 2018 merupakan tahun yang positif bagi pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan Bio Farma, sejalan dengan komitmen Manajemen untuk meningkatkan capaian kinerja positif Perusahaan. Jika kita mengukur kinerja perusahaan dari sisi pertumbuhan laba, tingkat imbal hasil ekuitas dan juga marjin profitabilitas, tahun 2018 mencatatkan hasil yang positif melalui penciptaan peluang, serta inovasi yang mendukung pertumbuhan produksi dan penjualan produk Bio Farma. Inovasi yang muncul diantaranya pengembangan produk-produk baru dan inisiatif perluasan pasar baik disektor pemerintah, swasta maupun ekspor.

Pada tahun 2018, Kami melakukan ekspor perdana Bio Farma ke Papua New Guinea, Pakistan, Turki dan Honduras. Hal ini secara positif meningkatkan capaian penjualan Bio Farma yang mencapai Rp3,23 triliun. Di tahun 2018, tingkat produksi dan penjualan Bio Farma menunjukan hasil yang memuaskan, sehingga pada tahun 2018 ini Bio Farma jumlah produksi sebesar 2,8 miliar dosis dapat dicapai.

Pencapaian positif di tahun 2018 ini merupakan landasan kami selanjutnya untuk merubah tantangan yang ada di tahun 2019 menjadi kesuksesan. Kami telah berupaya mendorong berbagai inovasi dalam pengembangan produk baru sehingga mampu meningkatkan nilai pemegang saham. Melalui kinerja yang baik ini, kami bertekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dalam hal pertumbuhan, efisiensi, penciptaan nilai serta aspek penting lainnya bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan kami.

ANALISIS ATAS KINERJA PERUSAHAAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Kinerja tahun 2018 yang menggembirakan merupakan bukti bahwa strategi dan kebijakan strategis Bio Farma telah berjalan dengan baik. Kami menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui; (i) penelitian, pengembangan dan inovasi produk yang smart sehingga penetrasi pasar baru bisa diluncurkan tepat waktu, (ii) ditambah dengan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk penambahan pangsa pasar baru, (iii) menurunkan biaya lebih jauh sekaligus meningkatkan competitiveness Perusahaan, (iv) serta melakukan penguatan kinerja bisnis inti untuk meningkatkan revenue Perusahaan.

M. RAHMAN ROESTAN
Direktur Utama

PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK

Bio Farma memiliki perhatian khusus terhadap kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Produk sebagai usaha untuk peningkatan *core* bisnis perusahaan. Dalam mendukung kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Produk, Bio Farma menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Bio Farma terus melakukan inovasi di berbagai bidang dengan mengacu pada standar internasional dan sistem manajemen mutu terkini. Sejak tahun 1997, produk Bio Farma merupakan salah satu dari sekitar 30 produsen vaksin di dunia yang telah mendapatkan Prakualifikasi WHO. Bio Farma juga telah mendapatkan sertifikasi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Good Laboratory Practices (GLP), Good Clinical Pratices (GCP), Good Distribution Practices (GDP), sistem manajemen terpadu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan OHSAS 18001:2007. Serta panduan *World Class Standard* antara lain ISO 26000 *guidance for* CSR, *Enterprise Risk Management* ISO 31000, International Financial Reporting Standard (IFRS) dan Teknologi Informasi ISO 27000.

Bio Farma sudah memiliki Sistem Manajemen Inovasi (SMI), yang meliputi produksi, proses dan strategi, yang dilakukan secara *top down* dan *bottom up*. Penguatan R&D melalui Sistem Manajemen Inovasi yang dilakukan oleh Bio Farma, merupakan komitmen Bio Farma untuk mendukung inovasi industri farmasi di Indonesia menuju kemandirian produk obat termasuk produk biopharmaceutical seperti vaksin. Penguatan R&D termasuk inovasi–inovasi didalamnya, merupakan golden ticket menuju kemandirian, khususnya pada industri farmasi produk *biopharmaceutical*. Saat ini, Indonesia sudah menjadi *Centre of Excellence* di negara Organisasi Kerjasama Islam untuk bidang vaksin dan bioteknologi.

Selama tahun 2018 Bio Farma melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan produk, antara lain: pengembangan vaksin, pengembangan biosimillar dan pengembangan stemcell. Bio Farma sedang melakukan inovasi produk pada vaksin BCG dalam kemasan vial, pembuatan *working seed* lot BCG Lokal.

Inovasi produk lainnya adalah vaksin Typhoid Conjugate (Vaksin untuk mencegah penyakit tifus) yang merupakan vaksin tifoid generasi baru. Vaksin ini dapat memberi kekebalan lebih lama terhadap penyakit tifus dari vaksin tifoid yang ada saat ini dan sudah bisa digunakan untuk anak usia dua tahun. Produk lainnya adalah vaksin Rotavirus yang digunakan untuk pencegahan terhadap penyakit diare yang disebabkan oleh kuman rotavirus pada bayi, Vaksin ini direncanakan akan diluncukan pada tahun 2020. Sementara itu, inovasi strategi untuk menghindari pemalsuan produk, Bio Farma merencanakan menerapkan sistem *track and trace* yang dapat memonitor distribusi vaksin sejak dari pabrik sampai ke konsumen.

Inovasi yang sudah diluncurkan oleh Bio Farma adalah produk pentabio, yang sesuai dengan namanya, pentabio merupakan lima jenis vaksin dalam satu kemasan yang terdiri dari Vaksin Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B dan *Haemophilus Influenzae* type b (DTP-HB-Hib), dengan adanya inovasi ini, efisiensi produksi dapat tercapai, mengurangi jumlah limbah jarum suntik, kemasan vial, penghematan penggunaan energi dan sumber daya.

Bio Farma memiliki komitmen untuk terus berinovasi dan bertransformasi menjadi perusahaan *Life Science*. Beberapa produk *Life Science* Bio Farma sudah masuk ke dalam *pipeline* produk Bio Farma. Bio Farma ingin percepatan pengembangan *Life Science* agar bisa mewujudkan kemandirian industri farmasi dalam pengembangan produk, bahan baku, vaksin, produk bioteknologi, dan alat kesehatan. Mempertahankan perusahaan untuk melewati usia 100 tahun, tentu tidak mudah.

Kami berkomitmen untuk terus menemukan produk-produk baru agar tetap tumbuh dan berkembang di industri ini dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, tangguh dan bermartabat. Untuk itu, diperlukan riset dan inovasi yang didukung penuh oleh pemerintah mengingat sebagian besar teknologi di bidang *Life Science* saat ini ini didapat melalui transfer teknologi dari negara-negara maju.

KOLABORASI DAN SINERGI DENGAN BERBAGAI PIHAK

Bio Farma bekerja sama dengan jaringan internasional berskala global, lembaga penelitian, organisasi profesional tingkat regional dan perusahaan-perusahaan multinasional. Bio Farma ikut aktif mengupayakan kesehatan masyarakat dunia dengan menyediakan vaksin dan transfer teknologi proses *downstream*.

Kiprah Bio Farma telah diakui di tingkat global. Sejak tahun 1997, Bio Farma merupakan salah satu dari sekitar 30 produsen vaksin dari 22 negara di dunia yang telah mendapatkan Prakualifikasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO *(World Health Organization)* sehingga dipercaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin di lebih dari 140 negara khususnya oleh negara-negara berkembang, 50 di antaranya adalah negara yang tergabung dalam OKI. Kapasitas inilah yang membuat Bio Farma dipercaya untuk membantu kerja sama Indonesia dan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait dengan riset dan produksi vaksin. Bio Farma ditunjuk sebagai leading institution dalam produksi vaksin di OIC (Organisasi Kerjasama Islam/OKI).

Indonesia menjalin kerja sama dengan Maroko dan Tunisia dalam pengembangan vaksin. Penandatanganan kerja sama berlangsung di Kementerian PPN/Bappenas. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari komitmen kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara anggota Islamic Development Bank (IDB) serta Organisasi Konferensi Islam (Organization Islamic Conference/OIC). Bio Farma yang bergerak di bidang pembuatan vaksin sudah ditetapkan sebagai salah satu leading institution dalam pembuatan vaksin untuk negara-negara OIC. Kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara IDB dan OIC akan terus berlanjut. Selain pengembangan vaksin dengan Maroko dan Tunisia, Indonesia juga aktif berkerja sama dengan negara lain, pada bidang pengembangan yang sesuai kebutuhan negara yang bersangkutan. Paling tidak ada 13 sektor yang dapat dikerjasamakan. Kerjasama ini terbuka dan di tandatangan dengan IDB & anggota OIC.

Melinda Gates, salah satu pendiri yayasan Bill and Melinda Gates Foundation mendorong Indonesia untuk bisa memproduksi vaksin sendiri. Melinda mendorong Indonesia untuk bisa memproduksi sendiri vaksin-vaksin melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bio Farma. Gates Foundation yang *concern* soal kesehatan masyarakat global, mereka ingin membantu Indonesia lewat *research* di BUMN melalui Bio Farma. Melinda, berharap Indonesia bisa memproduksi vaksin-vaksin sendiri baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional. Sehingga, dominasi produk vaksin tidak hanya oleh negara-negara di bagian Barat seperti Eropa tetapi juga di Asia. Melalui Gates Foundation, Melinda bersedia membantu supaya Indonesia bisa mendapatkan vaksin lebih murah.

Menjelang eradikasi polio pada tahun 2024 dimana penggunaan Vaksin Polio Oral (Oral Poilo Vaccine/OPV) akan dihentikan dan khusus untuk polio tipe 2 sudah mulai dihentikan oleh WHO pada bulan Mei 2016 dan diganti dengan vaksin IPV (Inactivated Polio Vaccine), laju pertumbuhan pendapatan Perusahaan berpotensi mengalami penurunan yang drastis karena sekitar 60% pendapatan Perusahaan diperoleh dari penjualan vaksin polio. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Perusahaan melakukan beberapa strategi melalui peningkatan kapasitas produksi atas produk-produk yang telah mendapatkan PQ WHO dan melakukan kemitraan (*Partnership*) untuk produk baru baik berupa kerjasama riset dan pengembangan serta pemasaran.

Penelitian dan pengembangan produk dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan *global trend* (WHO dan UNICEF) melalui percepatan *time to market* produk diversifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar dan mengurangi ketergantungan impor. Bio Farma bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset serta industri vaksin di dalam dan luar negeri supaya dapat mempercepat ketersediaan produk di pasar. Saat ini sedang mengintensifkan pengembangan produk baru antara lain yaitu vaksin s-IPV, vaksin Rotavirus, vaksin Hep B, vaksin Typhoid konjugat, vaksin Flu, vaksin Measles Rubella (MR) dan vaksin Pneumokok. Selain itu, Perusahaan sudah mulai penelitian dan pengembangan di luar vaksin dan antisera seperti kelompok biosimilar Eritropoitein (EPO) dan Trastuzumab; diagnostika kit Diabetes Millitus (DM); dan berencana untuk mengembangkan produk kelompok *blood products*. Prospek pasar untuk *blood product* sangat besar terutama untuk albumin, imunoglobulin dan faktor VIII yang selama ini dipenuhi oleh produk impor.

MENURUNKAN BIAYA DAN MENINGKATKAN DAYA SAING BIAYA

Kebijakan Bio Farma dalam strategi penurunan biaya dan meningkatkan daya saing biaya adalah dengan melakukan efisiensi.

Program efisiensi diterapkan pada setiap jajaran Bio Farma. Ini merupakan inisiatif yang terus didorong Direksi sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan dalam rangka mengendalikan biaya serendah mungkin, yang berdampak signifikan pada kesehatan keuangan perusahaan. Untuk bisa bersaing secara global di industri

vaksin, Bio Farma mengedepankan efisiensi produk untuk mencapai harga yang kompetitif di dunia internasional. Karena itu Bio Farma siap mengahadapi persaingan dengan negara lainnya di Asia.

Strategi yang telah dilakukan oleh Bio Farma dalam rangka pengendalian biaya untuk meningkatkan daya saing diantaranya dengan menerapkan sistem *green process* dalam setiap aktivitas yang diterapkan diseluruh lingkungan Bio Farma sehingga akan tercipta suatu *green habits*. Upaya lainnya adalah dengan meminimalkan pemborosan pemakaian bahan baku, pembelian bahan baku dengan teliti dan cermat, menempatkan karyawan sesuai skill, efisiensi jumlah karyawan, meminimumkan lembur serta melakukan penghematan pemakaian energy listrik, air dan kertas. Disamping itu kami juga terus melakukan *maintenance* peralatan secara berkala, mengatur tata letak fasilitas yang efisien, menjaga keselamatan kerja, pengaturan jadwal produksi secara efektif dan menghindari penumpukan barang persediaan.

PENINGKATAN KINERJA BISNIS UNTUK MENINGKATKAN *REVENUE* PERUSAHAAN

Pada tahun 2018 Bio Farma berhasil meningkatkan performa produksi dan penjualan produk Bio Farma yaitu vaksin bakteri, vaksin virus, vaksin kombinasi, sera dan jasa. Capaian operasional positif tersebut berdampak positif bagi peningkatan nilai penjualan bersih Perusahaan.

Pada tahun 2018, Bio Farma mencatatkan nilai penjualan bersih sebesar Rp3,23 triliun atau naik 7,43% dibandingkan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp3,01 triliun.

Bio Farma sebagai Perusahaan farmasi di bidang vaksin yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal berkomitmen untuk terus mempertahankan kekuatan keuangan melalui peningkatan perolehan pendapatan dengan berfokus pada penguatan kinerja operasi bisnis inti Perusahaan yaitu penjualan produk perusahaan, produk *Partnership*, produk *Trading Partnership* dan jasa.

PERBANDINGAN ANTARA HASIL YANG DICAPAI DENGAN YANG DITARGETKAN

Secara umum, Bio Farma berhasil mempertahankan kinerja positif tahun 2018, melalui pertumbuhan positif pada tahun 2018.

Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2018 mendapatkan skor 90,35 dengan kriteria " SEHAT AA" atau naik sebesar 4,35 atau 5,06% dibandingkan dengan tahun 2017 dengan skor 86,00 dengan kriteria " SEHAT AA".

PRODUKSI

Tahun 2018, target produksi Bio Farma sebesar 3,44 miliar dosis dan realisasi produksinya sebesar 2,80 miliar dosis. Realisasi pengadaan barang pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp1,83 triliun, naik sebesar Rp109,19 milliar atau 6,33% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,73 triliun dan sebesar Rp56,14 miliar atau 3,16% di atas RKAP sebesar Rp1,78 triliun.

LABA/RUGI

Tahun 2018 tercatat laba (rugi) kotor sebesar Rp1,41 triliun atau naik sebesar Rp57,04 miliar atau 4,21% di atas laba sebelum pajak penghasilan tahun 2017 yang berjumlah Rp1,35 triliun dan Rp91,66 miliar atau 6,10% dibawah RKAP sebesar Rp1,50 triliun.

Tahun 2018 tercatat Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan sebesar Rp727,37 miliar atau naik sebesar Rp13,73 miliar atau 1,92% di atas laba sebelum pajak penghasilan tahun 2017 yang berjumlah Rp713,63 miliar dan Rp57,58 miliar atau 7,34% dibawah RKAP sebesar Rp784,95 miliar.

Tahun 2018 tercatat laba bersih Bio Farma sebesar Rp543,23 miliar atau naik sebesar Rp17,87 miliar atau 3,40% di atas laba bersih tahun 2017 yang berjumlah Rp525,36 miliar dan Rp37,95 miliar atau 6,53% dibawah RKAP sebesar Rp581,18 miliar.

BEBAN PRODUKSI

Realisasi beban produksi tahun 2018 untuk memproduksi produk jadi maupun produk dalam proses sebesar Rp1,83 triliun, naik sebesar Rp109,19 miliar atau meningkat sebesar 6,33% bila dibandingkan dengan realiasasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp1,73 trilliun dan sebesar Rp56,14 miliar atau 3,16% di atas RKAP sebesar Rp1,78 trilliun.

Tahun 2018 tercatat realisasi beban produksi untuk vaksin bakteri sebesar Rp266,70 miliar, naik sebesar Rp51,65 miliar atau 24,02% bila dibandingkan dengan realiasasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp215,05 miliar, dan Rp0,02 miliar atau 0,01% di bawah RKAP 2018 sebesar Rp266,72 miliar.

Tahun 2018 tercatat realisasi beban produksi untuk vaksin virus sebesar Rp426,87 miliar, turun sebesar Rp105,97 miliar atau 19,89% bila dibandingkan dengan realiasasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp532,84 miliar, dan Rp79,29 miliar atau 15,67% di bawah RKAP 2018 sebesar Rp506,16 miliar.

Tahun 2018 tercatat realisasi beban produksi untuk vaksin kombinasi sebesar Rp307,89 miliar, naik sebesar Rp102,61 miliar atau 49,99% bila dibandingkan dengan realiasasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp205,28 miliar, dan Rp123,68 miliar atau 67,14% di atas RKAP 2018 sebesar Rp184,21 miliar.

Tahun 2018 tercatat realisasi beban produksi untuk Serum & Diaogostika sebesar Rp23,42 miliar, turun sebesar Rp35,15 miliar atau 60,01% bila dibandingkan dengan realiasasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp58,57 miliar dan Rp26,57 miliar atau 53,14% di bawah RKAP 2018 sebesar Rp49,99 miliar.

Tahun 2018 tercatat realisasi beban produksi untuk produk *Partnership* sebesar Rp809,32 miliar, naik sebesar Rp96,05 miliar atau 13,47% bila dibandingkan dengan realiasasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp713,27 miliar, dan Rp38,33 miliar atau 4,97% di atas RKAP 2018 sebesar Rp770,99 miliar.

PENJUALAN

Penjualan produk perusahaan tahun 2018 tercatat sebesar Rp2,04 triliun naik sebesar Rp165,92 miliar atau 8,86% dibandingkan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp1,87 triliun, dan sebesar Rp64,15 miliar atau 3,05% di bawah RKAP sebesar Rp2,10 triliun.

Penjualan Produk *Partnership* Perusahaan tahun 2018 tercatat sebesar Rp1,13 triliun, naik sebesar Rp22,95 miliar atau 2,07% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,11 triliun dan sebesar Rp3,39 miliar atau 0,3% diatas RKAP sebesar Rp1,13 triliun.

Penjualan bersih *Trading Partnership* Perusahaan tahun 2018 tercatat sebesar Rp53,11 miliar, naik sebesar Rp32,99 miliar atau 163,97% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp20,12 miliar dan sebesar Rp11,22 miliar atau 26,77% diatas RKAP sebesar Rp41,89 miliar.

Penjualan Jasa tahun 2018 tercatat sebesar Rp10,10 miliar, naik sebesar Rp1,79 milliar atau 21,59% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp8,31 miliar dan sebesar Rp1,10 miliar atau 12,18% diatas RKAP sebesar Rp9,01 miliar.

Kinerja Perusahaan tahun 2018 dari sisi penjualan tercatat sebesar Rp3,24 triliun naik sebesar Rp223,65 miliar atau 7,43% dibandingkan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp3,01 triliun, dan sebesar Rp48,46 miliar atau 1,48% di bawah RKAP sebesar Rp3,28 triliun.

Penjualan Sektor Pemerintah pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp1,86 triliun, naik sebesar Rp499,87 milliar atau 36,77% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,36 triliun dan sebesar Rp309,94 miliar atau 20,01% diatas RKAP sebesar Rp1,55 triliun.

Penjualan Sektor Swasta pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp298,01 miliar, turun sebesar Rp111,37 milliar atau 27,20% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp409,38 miliar dan sebesar Rp77,18 miliar atau 20,57% dibawah RKAP sebesar Rp375,20 miliar.

Penjualan Sektor Ekspor pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp1,08 triliun, turun sebesar Rp164,85 milliar atau 13,26% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,24 triliun dan sebesar Rp281,21 miliar atau 20,69% dibawah RKAP sebesar Rp1,36 miliar.

PROFITABILITAS

Gross Profitabilitas Perusahaan dapat diukur dari meningkatnya laba (rugi) kotor sebesar Rp57,04 miliar dari Rp1,35 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp1,41 triliun di tahun 2018.

Gross Net Profit Margin (GPM) Perusahaan pada tahun 2018 sebesar 43,63%, mengalami penurunan sebesar 2,98% dari tahun 2017 yang sebesar 44,97%.

Profitabilitas Perusahaan dapat diukur dari meningkatnya laba bersih sebesar Rp17,87 miliar dari Rp525,36 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp543,23 miliar di tahun 2018. *Net Profit Margin* (NPM) Perusahaan pada tahun 2018 sebesar 16,79%, mengalami penurunan sebesar 3,73% dari tahun 2017 yang sebesar 17,44%.

ASET

Pada 2018 jumlah Aset lancar tercatat sebesar Rp2,39 triliun naik sebesar Rp427,84 miliar atau 21,78% dibandingkan dengan aset lancar tahun 2017 yaitu sebesar Rp1,96 triliun,

dan 292,59 miliar atau 13,94% dibawah RKAP sebesar Rp2,10 triliun.

Aset tidak lancar Bio Farma di tahun 2018 tercatat sebesar Rp5,01 triliun naik Rp523,87 miliar atau 11,68.% dibandingkan dengan aset tidak lancar tahun 2017 yaitu sebesar Rp4,48 triliun, dan Rp683,98 miliar atau 12,01% dibawah RKAP sebesar Rp5,69 triliun.

Total Aset Bio Farma di tahun 2018 tercatat sebesar Rp7,40 triliun naik Rp951,71 miliar atau 14,76% dibandingkan dengan total aset tahun 2017 yaitu sebesar Rp6,45 triliun dan Rp391,39 miliar atau 5,02% dibawah RKAP sebesar Rp7,79 triliun.

Bio Farma membukukan liabilitas jangka pendek tahun 2018 sebesar Rp745,31 miliar atau naik sebesar Rp165,75 miliar atau 28,60% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek tahun 2017 yang berjumlah Rp579,56 miliar, dan Rp366,16 miliar atau 96,57% diatas RKAP sebesar Rp379,15 miliar.

LIABILITAS

Bio Farma membukukan liabilitas jangka panjang tahun 2018 sebesar Rp693,01 miliar atau naik sebesar Rp473,08 miliar atau 215,10% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang tahun 2017 yang berjumlah Rp219,94 miliar dan Rp574,12 miliar atau 45,31% di bawah RKAP sebesar Rp1,27 triliun.

Bio Farma membukukan total liabilitas tahun 2018 sebesar Rp1,44 triliun atau naik sebesar Rp638,83 miliar atau 79,90% dibandingkan dengan total liabilitas tahun 2017 yang berjumlah Rp799,49 miliar dan Rp207,96 atau 12,63% dibawah RKAP sebesar Rp1,65 triliun.

EKUITAS

Bio Farma membukukan total ekuitas tahun 2018 sebesar Rp5,96 triliun atau naik sebesar Rp312,88 miliar atau 5,54% dibandingkan dengan total ekuitas tahun 2017 yang berjumlah Rp5,65 triliun dan Rp183,43 miliar atau 2,98% dibawah RKAP sebesar Rp6,15 triliun.

Bio Farma membukukan total liabilitas & ekuitas tahun 2018 sebesar Rp7,40 triliun atau naik sebesar Rp951,71 miliar atau 14,76% dibandingkan dengan total liabilitas & ekuitas tahun 2017 yang berjumlah Rp6,45 triliun dan Rp391,39 atau 5,02% dibawah RKAP sebesar Rp7,79 triliun.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat beban pokok penjualan produk perusahaan sebesar Rp1,01 triliun atau naik sebesar Rp87,78 miliar atau 9,51% di atas beban pokok penjualan produk perusahaan tahun 2017 yang berjumlah Rp923,19 miliar dan Rp12,52 miliar atau 1,25% diatas RKAP sebesar Rp998,44 triliun.

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat beban pokok penjualan produk *Partnership* sebesar Rp758,73 miliar atau naik sebesar Rp48,42 miliar atau 6,82% di atas beban pokok penjualan produk *Partnership* tahun 2017 yang berjumlah Rp710,32 miliar dan Rp18,69 miliar atau 2,53% di atas RKAP sebesar Rp740,05 miliar.

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat beban pokok penjualan *Trading Partnership* sebesar Rp39,98 miliar atau naik sebesar Rp23,22 miliar atau 138,46% di atas beban pokok penjualan *Trading Partnership* tahun 2017 yang berjumlah Rp16,77 miliar dan Rp5,83 miliar atau 17,08% di atas RKAP sebesar Rp34,15.

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat beban jasa sebesar Rp14,07 miliar atau naik sebesar Rp7,21 miliar atau 105,07% di atas beban jasa tahun 2017 yang berjumlah Rp6,86 miliar dan Rp6,16 miliar atau 77,91% diatas RKAP sebesar Rp7,91 miliar.

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat beban pokok penjualan produk, produk *Partnership*, *Trading Partnership* & jasa sebesar Rp1,82 triliun atau naik sebesar 166,62 miliar atau 10,05% di atas beban pokok penjualan produk, produk *Partnership*, *Trading Partnership* & jasa tahun 2017 yang berjumlah Rp1,66 triliun dan Rp0,43 miliar atau 2,43% diatas RKAP sebesar Rp1,78 triliun

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI BIO FARMA DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIANNYA

Dalam tahun 2018 Bio Farma menghadapi kendala baik internal maupun eksternal. Kendala utama Bio Farma, adanya penggantian/perubahan prioritas kebutuhan produk vaksin secara global sesuai dengan himbauan dari WHO, perubahan regulasi dan persyaratan WHO untuk prakualifikasi produk yang semakin ketat, persyaratan registrasi produk di tiap negara yang semakin meningkat, perubahan teknologi proses produksi yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan modernisasi proses

(Pembangunan fasilitas baru), kebutuhan vaksin baru untuk program imunisasi massal. Dalam menghadapi kendala tersebut Bio Farma semakin intensif melakukan pendekatan dengan WHO dan Badan terkait lainnya sehingga setiap ada penggantian/perubahan Bio Farma segera mendapatkan informasinya.

Penyesuaian dengan arah kebijakan dan regulasi vaksin internasional. Kecepatan perubahan regulasi vaksin internasional tersebut masih belum sejalan dengan kecepatan riset dan pengembangan vaksin. Belum terintegrasinya kegiatan riset vaksin, pelaku kegiatan riset vaksin di Indonesia antara lain Lembaga Riset, Universitas, lembaga penelitian pemerintah sehingga hasil riset mengalami keterlambatan untuk dipasarkan kepada masyarakat. Dalam menghadapi kendala tersebut, Bio Farma berperan aktif dan turut serta dalam berbagai lembaga Internasional seperti DCVMN, GAVI, OIC sehingga dapat mempersiapkan diri apabila terjadi perubahan kebijakan dan regulasi vaksin internasional. Selain itu, di dalam negeri kami bekerja sama dengan Kemenristek, Kementerian Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan serta berbagai Universitas dan lembaga riset tanah air untuk melakukan percepatan riset vaksin dan produk *Life Science* melalui Forum Riset Life Science Nasional (FRLN).

Kendala lainnya yang dihadapi oleh industri farmasi secara umum terkait kesiapan dalam penerapan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Industri Farmasi memiliki regulasi yang ketat dan rumit, dengan regulasi yang mengutamakan aspek *quality, safety* dan *efficacy*, sedangkan bio farmasetikal ini menjadi tantangan ke depan karena bahan baku yang bersumber dari *biological sources*. Bagaimana *biological source* ini sesuai dengan kriteria tersebut, termasuk didalamnya tantangan produk plasma/*blood product* yang sangat diperlukan untuk masa depan kesehatan Indonesia seperti Albumin, globulin, dan faktor 8. Percepatan pengembangan produk yang berkualitas, aman dan ampuh serta terjangkau oleh masyarakat disertai dengan pemenuhan aspek yang sesuai dengan jaminan produk halal menjadi tantangan bagi seluruh industri farmasetikal dan biological di Indonesia. Namun demikian, Bio Farma senantiasa berkomitmen dan berusaha agar sesuai dengan regulasi, termasuk kami melakukan beberapa inisiatif seperti melaksanakan *Workshop* Penyusunan manual halal, mengundang tokoh ulama untuk mengunjungi fasilitas produksi, melakukan review produk produk baru yang melibatkan, serta beberapa produk vaksin kami sedang dalam proses persiapan pengajuan sertifikasi halal ke LPPOM MUI.

Tahun 2018, pasar sektor swasta untuk penjualan vaksin imunisasi dasar relatif sulit ditingkatkan mengingat vaksin tersebut sudah dipenuhi oleh Pemerintah, kecuali untuk daerah tertentu dengan adanya Otonomi Daerah (OTDA) dapat menganggarkan kebutuhan vaksin yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, peluang di sektor ini adalah penjualan ke non OTDA melalui *product branded* (produk dengan kemasan khusus/ berbeda) hasil produksi sendiri seperti vaksin Flu Bio dan serum serta produk *Partnership*, seperti Meningitis, Verorab, Vaxigrip, Varicella, HPV dan Measles Rubella (MR). Bio Farma pun telah membentuk *geographical marketer matrix* pada bagan organisasi Bio Farma dan membuka beberapa kantor perwakilan pemasaran di Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan penjualan dan lebih mengenalkan produk Bio Farma kepada masyarakat. Sedangkan untuk sektor ekspor, meskipun saat ini Bio Farma telah berhasil menjual produknya ke lebih dari 140 negara, masih perlu dilakukan pengembangan pasar global diantaranya dengan meningkatkan penjualan melalui agen internasional/agen lokal, pasar pemerintah Negara setempat dan penjualan melalui United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dan Pan American Health Organization (PAHO) serta harga jual yang kompetitif.

Menjelang eradikasi polio pada tahun 2024 dimana penggunaan Vaksin Polio Oral (Oral Poilo Vaccine/OPV) akan diberhentikan dan khusus untuk polio tipe 2 sudah mulai dihentikan oleh WHO pada bulan Mei 2016 dan diganti dengan vaksin IPV (Inactivated Polio Vaccine), laju pertumbuhan pendapatan Perusahaan berpotensi mengalami penurunan yang drastis karena sekitar 60% pendapatan Perusahaan diperoleh dari penjualan vaksin polio. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Perusahaan melakukan beberapa strategi melalui peningkatan kapasitas produksi atas produk-produk yang telah mendapatkan PQ WHO dan melakukan kemitraan (*Partnership*) untuk produk baru baik berupa kerjasama riset dan pengembangan serta pemasaran.

ANALISA TENTANG PROSPEK USAHA

Kami percaya bahwa prospek usaha Bio Farma akan lebih baik dengan dilakukannya penelitian, pengembangan dan inovasi produk, penetrasi pasar baru bisa diluncurkan tepat waktu, kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk penambahan pangsa pasar, penurunan biaya dengan melakukan efisiensi dan meningkatkan daya saing biaya. Pada tahun 2019, Bio Farma menargetkan

pertumbuhan produksi dan penjualan produk-produk Bio Farma yakni berdasarkan kelompok produk; produk perusahaan (vaksin bakteri, virus, kombinasi & sera), produk *Partnership*, produk *Trading Partnership* dan jasa serta berdasarkan sektor : sektor pemerintah, sektor swasta dan sektor ekspor.

Berdasarkan kelompok produk; untuk produk perusahaan, Bio Farma menargetkan penjualannya sebesar Rp2,10 triliun, turun 3,05% dibandingkan dengan capaian penjualan produk perusahaan tahun 2018 sebesar Rp2,04 triliun. Peningkatan target ini sejalan dengan strategi Bio Farma untuk meningkatkan market share melalui penetrasi pasar baru dan pelanggan baru. Untuk produk *Partnership*, Bio Farma menargetkan penjualan sebesar Rp1,13 triliun, naik 0,30% dibandingkan capaian penjualan produk *Partnership* tahun 2018 sebesar Rp1,13 triliun seiring dengan peningkatan kebutuhan pada produk yang lain. Untuk produk *Trading Partnership*, Bio Farma menargetkan penjualan sebesar Rp41,89 miliar, turun 26,77% dibandingkan capaian penjualan produk *Partnership* tahun 2018 sebesar Rp53,11 miliar seiring dengan meningkatnya kebutuhan pasar. Untuk produk jasa, Bio Farma menargetkan penjualan jasa sebesar Rp9,00 miliar, turun 12,18% dibandingkan capaian penjualan jasa tahun 2018 sebesar Rp10,10 miliar seiring dengan meningkatnya pelayanan dari Unit Bisnis Klinik dan Imunisasi (UBKI).

Berdasarkan sektor usaha; untuk sektor pemerintah, Bio Farma menargetkan penjualannya sebesar Rp1,55 triliun, meningkat 20,01% dibandingkan dengan capaian penjualan produk perusahaan tahun 2018 sebesar Rp1,86 triliun. Untuk sektor swasta, Bio Farma menargetkan penjualannya sebesar Rp375,20 miliar, menurun 20,57% dibandingkan dengan capaian penjualan produk perusahaan tahun 2018 sebesar Rp298,01 miliar. Untuk sektor ekspor, Bio Farma menargetkan penjualannya sebesar Rp1,36 triliun, menurun 20,69% dibandingkan dengan capaian penjualan produk perusahaan tahun 2018 sebesar Rp1,08 triliun.

Kami memandang bahwa posisi Bio Farma sebagai produsen vaksin dalam negeri memiliki beberapa prospek usaha yang sangat strategis. Indonesia berperan untuk mengamankan penyediaan vaksin nasional dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan vaksin untuk program imunisasi nasional di dalam negeri. Dengan jumlah kapasitas produksi yang besar, sehingga kami memiliki kapasitas lebih yang dapat digunakan untuk membantu negara-negara lain yang tidak memiliki pabrik vaksin terutama di negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) serta negara berkembang yang tergabung dalam Developing Countries Vaccine Manufacturers Network (DCVMN), sehingga mampu mengibarkan merah putih di kancah global.

Peta produsen vaksin global saat ini terdapat sekitar 100 industri vaksin di dunia, yang mana Bio Farma menjadi satu-satunya produsen vaksin atau Biotek di Indonesia saat ini Bio Farma, kami termasuk ke dalam sekitar 30 produsen vaksin *global player* yang mendapatkan pra-kualifikasi sehingga mendapatkan peran penting dalam menyediakan suplai vaksin pada badan kesehatan dunia (WHO) dan UNICEF. Market industri vaksin sangat berkembang, *emerging market* selalu naik sekitar 30%, dengan pertumbuhan di negara berkembang termasuk indonesia sekitar 14-17%, dimana di negara Amerika, Jepang masih jauh di bawah Indonesia.

Kami percaya bahwa Bio Farma berada di posisi yang sangat baik untuk memaksimalkan peluang dan kekuatan yang dimiliki. Hal ini, karena kami sebagai Perusahaan telah berhasil mengembangkan sayap dikancah lokal maupun global sehingga kami melihat masa depan dengan profitabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN *(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)* PADA TAHUN BUKU

Bio Farma telah melakukan evaluasi atas penerapan GCG di Perusahaan sesuai dengan perubahan regulasi serta perkembangan bisnis Bio Farma, diantaranya peyempurnaan *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi, Pedoman Perilaku *(Code Of Conduct)*, Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan disahkan pada tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya dilakukan pengukuran atas pemahaman Pedoman Perilaku (CoC) kepada seluruh Insan Bio Farma dan juga menjadi bagian dari *Key Performance Indicator* (KPI) setiap insan Bio Farma. Hasil komitmen atas Pedoman Perilaku di tahun 2018 mencapai 100% yang semakin menunjukkan komitmen Bio Farma untuk mengimplementasikan GCG dalam seluruh aktivitas bisnis Perusahaan.

Di Tahun 2018, Bio Farma mempertajam implementasi penerapan GCG melalui sosialisasi tentang *Strategic Business*, GCG, *Corporate Legal*, *Risk Management*

dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan Bio Farma serta penandatanganan Komitmen Pencegahan Terintegrasi antara Direktur Utama Bio Farma dengan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sebagai tindak lanjut, Bio Farma telah melakukan evaluasi dan pengesahan atas kebijakan tentang Penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Bio Farma (Persero) sesuai dengan regulasi yang diterbitkan oleh KPK.

Tanggal 26 Maret 2018, Bio Farma telah mensosialisasikan tentang Pengendalian Gratifikasi dengan tujuan memberikan panduan bagi insan Bio Farma untuk memahami definisi dan konsep Gratifikasi serta mengetahui harus bersikap bagaimana apabila berhadapan dengan Gratifikasi, memberikan panduan mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan Gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap dan membentuk lingkungan Perusahaan yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik Gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi praktik GCG di Perusahaan, Bio Farma luncurkan Aplikasi *Enterprise Risk Management* pada tanggal 13 Maret 2018 diharapkan setiap unit kerja lebih memahami semua aspek risiko yang dimilikinya, aplikasi *Enterprise Risk management* (ERM) ini menjadi dasar dan landasan yang kuat terhadap aspek risiko keuangan, bisnis, maupun strategis, termasuk aspek risiko kualitas, lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk aktivitas internal maupun eksternal perusahaan.

Bio Farma juga secara konsisten melaksanakan *Assessment* GCG setiap tahun dengan menunjuk *Independent Assessor*. Berdasarkan hasil *assessment* GCG Bio Farma tahun buku 2018 untuk parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi BUMN sesuai SK-16/S.MBU/2012, Bio Farma memperoleh skor 90,938. Berdasarkan Standar ASX *Corporate Governance Principle and Recommendation*, Bio Farma memperoleh predikat *"The Corporate Governance Structure is Outstanding "*.

Bio Farma meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat. Ini adalah merupakan penghargaan yang ke-4 kalinya sejak tahun 2013. Penghargaan ini merupakan komitmen Bio Farma yang secara konsisten menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengharuskan Badan Publik termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyajikan informasi yang diperuntukkan bagi kepentingan publik. Dengan skor 81,27 Bio Farma meraih peringkat ke 3 untuk kategori badan publik BUMN. Penerapan keterbukaan informasi publik ini mampu mendorong korporasi untuk bisa bersaing secara global dan penghargaan ini merupakan prestasi bagi Bio Farma yang telah memasuki kualifikasi informatif.

Kami berkeyakinan, hasil yang telah kami capai saat ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang baik antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan Bio Farma. Berbagai *improvement* akan terus kami lakukan untuk dapat semakin meningkatkan reputasi Bio Farma dan kepercayaan *stakeholder* yang akan menjadi kekuatan Bio Farma untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan *(sustainable)* dengan tetap memegang teguh pada etika bisnis dan praktik-praktik tata kelola Perusahaan yang baik.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-127/MBU/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017, Iskandar diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Utama Bio Farma dan digantikan oleh Juliman sebagai Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Produksi, Mahendra Suhardono diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Pemasaran Bio Farma dan digantikan oleh Mas Rahman Roestan yang semula sebagai Corporate Secretary, Andjang Kusumah diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur SDM Bio Farma.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-131/MBU/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017, Disril Revolin Putra diangkat sebagai Direktur SDM dan Umum Bio Farma yang semula menjabat Direktur SDM dan Hukum PT Pelindo II menggantikan Andjang Kusumah.

Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan dan penataan susunan keanggotaan Direksi PT Bio Farma (Persero), Menteri BUMN Rini M Soemarno selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Bio Farma mengalihkan penugasan M. Rahman Roestan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-27/MBU/01/2018 tanggal 23 Januari 2018, dari semula sebagai Direktur Pemasaran menjadi Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) menggantikan Plt Juliman dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya. Sejalan dengan Keputusan Menteri BUMN tersebut, RUPS juga mengangkat Sri Harsi Teteki sebagai Direktur Pemasaran PT Bio Farma (Persero).

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK–101/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018, Pramusti Indrascaryo diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Keuangan Bio Farma dan digantikan oleh Pardiman, Sugeng Raharso diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Perencanaan & Pengembangan dan digantikan oleh Adriansjah Azhari dan mengangkat kembali Juliman sebagai Direktur Produksi yang sebelumnya sebagai Plt. Direktur Utama Bio Farma sampai dengan penunjukkan Direktur Utama definitif.

Dengan demikian komposisi Direksi Bio Farma per 31 Desember 2018: Direktur Utama: M.Rahman Roestan, Direktur Produksi : Juliman, Direktur Keuangan: Pardiman, Direktur Perencanaan & Pengembangan: Adriansjah Azhari, Direktur SDM & Umum: Disril Revolin Putra dan Direktur Pemasaran: Sri Harsi Teteki.

Dengan latar belakang Direksi yang berbeda-beda, diharapkan potensi Bio Farma dapat tergali lagi sehingga membawa perusahaan lebih maju lagi. Kedepannya, perusahaan diharapkan mampu mengikuti tren vaksin dunia dan meningkatkan inovasi produk vaksinnya.

PENGELOLAAN *HUMAN CAPITAL*

Bagi Bio Farma, pengembangan SDM sangatlah penting karena karyawan merupakan salah satu aset penting guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama antar gender, untuk masing-masing level dan lainnya dalam program pembinaan, pengembangan dan peningkatan jenjang karir karyawan. Peningkatan kompetensi karyawan dilakukan melalui pengembangan solusi *learning & development*. Di samping itu Perusahaan juga melakukan transformasi pola pengelolaan SDM berbasis Teknologi Informasi. Tantangan kedepan bagi Bio Farma adalah merubah dan mendorong SDM dari kondisi *comfort zone* agar siap untuk bertransformasi dalam menghadapi persaingan di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Pada tahun 2018, strategi dan pengembangan *Human Capital* Bio Farma diselaraskan dengan kebutuhan bisnis Perusahaan yaitu melatih dan mengembangkan karyawan sejalan dengan kebutuhan, pembenahan sistem manajemen *Human Capital* untuk menunjang terciptanya iklim kerja yang kondusif dalam rangka meningkatkan produktivitas. Pada tahun 2018 Bio Farma terus melakukan inovasi pengelolaan *Human Capital* sejalan dengan visi Perusahaan untuk menjadi Perusahaan *Life Science* kelas dunia yang berdaya saing global, maka strategi pengelolaan sumber daya manusia didasarkan pada pembangunan budaya kerja melalui implementasi nilai-nilai perusahaan, menyempurnakan struktur organisasi, penataan SDM, meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan serta penyempurnaan tata kelola perusahaan.

Bio Farma telah meninjau ulang rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan menetapkan target *Human Capital Excellence* tahun 2018 yaitu Karyawan Bio Farma yang memenuhi kriteria BEST *(Beyond Expectation, Environment Awareness dan Synergized Partnership*). Bio Farma menerapkan pengembangan karyawan dari dua sisi, yaitu meningkatkan saling percaya antara Perusahaan dengan karyawan dan peningkatan kapabilitas dan kapasitas Karyawan Bio Farma dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.

Kebijakan non diskriminasi menjamin setiap Insan Bio Farma memiliki kesempatan yang sama dan setara dalam pelaksanaan kebijakan Perusahaan. Kebijakan ini diatur dalam Etika Perusahaan, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kebijakan Manajemen maupun Perjanjian Kerja Bersama dan dipublikasikan di internal Perusahaan.

Komposisi karyawan per 31 Desember 2018 tercatat sebanyak 1.280 orang yaitu sebanyak 1.195 orang Karyawan Tetap, 85 orang Karyawan Kontrak. Tahun 2018 jumlah Karyawan Tetap Bio Farma sebanyak 1.195 orang meningkat sebanyak 0,76% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 1.186 orang.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI

Pada tahun 2018, Bio Farma tidak memiliki komite yang berada di bawah Direksi.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kami memiliki komitmen tinggi untuk mengintegrasikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Coporate Social Responsibility*/CSR) dalam bisnis Bio Farma dengan merancang dan melaksanakan berbagai program strategis meliputi aspek ekonomi, lingkungan dan sosial termasuk tata kelola. Oleh sebab itu, CSR yang dijalankan oleh Bio Farma menyentuh aspek yang luas, meliputi kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), kepatuhan pada praktik-praktik bisnis yang sehat *(fair operating practices)*, kewajiban untuk melaksanakan operasi perusahaan dengan menjaga kelestarian lingkungan, kewajiban untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja, kewajiban untuk menangani isu kesehatan dan keselamatan pengguna produk *(consumer issues)* dan kewajiban untuk melaksanakan pengembangan masyarakat.

Kewajiban untuk melaksanakan pengembangan masyarakat, dilakukan pula melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat marginal. Program ini terus dilakukan Bio Farma secara berkesinambungan yang sekaligus bertujuan untuk menjaga eksistensi perusahaan di tengah masyarakat dalam jangka panjang. Kegiatan dalam PKBL mencakup bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sarana dan prasarana umum dan bantuan penanganan korban bencana alam serta bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup.

Disamping untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat *marginal* di sekitar daerah operasi perusahaan. Program CSR dan PKBL merupakan kontribusi Bio Farma dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs),

Di dalam pelaksanaan CSR, Bio Farma memahami begitu pentingnya melakukan proses komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menunjang keberlangsungan aktivitas Bio Farma mulai dari perencanaan strategis, implementasi, sampai dengan evaluasi kinerja perusahaan. Mekanisme yang berjalan untuk memastikan berjalannya komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan dilakukan melalui laporan keberlanjutan yang walaupun diterbitkan dalam laporan tersendiri *(stand alone)* namun merupakan satu kesatuan dengan laporan tahunan ini.

PENUTUP DAN APRESIASI

Sebagai penutup, Kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemegang saham, Dewan Komisaris, mitra usaha dan dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan kepada kami untuk menumbuh kembangkan Bio Farma. Secara khusus, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh insan Bio Farma yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dan profesional menjalankan tugasnya sehingga Bio Farma berhasil meraih kinerja yang membanggakan dalam tahun 2018. Akhirnya, marilah kita bekerja lebih keras lagi sehingga penciptaan nilai pemegang saham dan pertumbuhan perusahaan semakin meningkat pada tahun 2019.

Bandung, 22 Maret 2019
Atas Nama Direksi
PT Bio Farma (Persero)

M. RAHMAN ROESTAN
Direktur Utama

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018

Laporan Tahunan 2018 ini termasuk di dalamnya Laporan Keuangan dan informasi terkait lainnya adalah merupakan tanggung jawab dari seluruh Dewan Komisaris yang bertanda tangan di bawah ini.

DEWAN KOMISARIS

FARID WADJDI HUSAIN
Komisaris Utama

HERIDADI
Komisaris

H.M. SUBUH
Komisaris

SAUD USMAN NASUTION
Komisaris

YUNI SURYANTO
Komisaris

MADE ARYA W.
Komisaris

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018

Laporan Tahunan 2018 ini termasuk di dalamnya Laporan Keuangan dan informasi terkait lainnya adalah merupakan tanggung jawab dari seluruh Direksi yang bertanda tangan di bawah ini.

DIREKSI

M. RAHMAN ROESTAN
Direktur Utama

JULIMAN
Direktur Produksi

PARDIMAN
Direktur Keuangan

ADRIANSJAH AZHARI
Direktur Perencanaan dan Pengembangan

DISRIL REVOLIN PUTRA
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

SRI HARSI TETEKI
Direktur Pemasaran

PROFIL PERUSAHAAN

Bio Farma merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi, yang saat ini bergerak ke arah *Life Science*, yang sudah berdiri sejak 6 Agustus 1890. Sampai dengan tahun 2018, lebih dari 140 negara telah menggunakan produk Bio Farma.

PROFIL SINGKAT
AKTIVITAS, DAN PRODUK UTAMA

NAMA PERUSAHAAN & DOMISILI

PT Bio Farma (Persero)
Berdomisili di Bandung

TANGGAL PENDIRIAN

6 Agustus 1890 di Jakarta

AKTA PENDIRIAN

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Pada Tanggal 5 Maret 1998 dengan Nomor C2-1423HT.01.01. Tahun 1998.

BENTUK HUKUM

- **Akta Pendirian**
- **Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2002 Nomor 57, Tambahan Nomor 6884 dan akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 14 Desember 2016.**
- **Anggaran Dasar Perusahaan: perubahan terakhir disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1423HT.01.01 Tanggal 5 Maret 1998.**

KANTOR PUSAT

Alamat Kantor Pusat
Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161, Indonesia

No. Telp
+62 22-2033755

Fax
+62 22 - 2041306

Email
mail@biofarma.co.id

Website
www.biofarma.co.id
Blog
www.infoimunisasi.com

ALAMAT KANTOR PERWAKILAN

Gedung Pakarti Center
Jl. Tanah Abang III No 23-27
Jakarta - Indonesia
Telp & Fax : 021-34832485

WILAYAH OPERASI

Lokasi Pabrik
Bandung, Jawa Barat

Lokasi Fasilitas Produksi
Bandung, Jawa Barat

Lokasi Penunjang Produksi
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat

Kantor Perwakilan
Jakarta, DKI Jakarta

Wilayah Pemasaran
Seluruh Indonesia dan Luar Negeri sekitar 140 negara.

MODAL DASAR

Rp8 triliun terdiri dari 8 juta Lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1 juta per lembar saham

MODAL DITEMPATKAN

Rp2 triliun terdiri dari 2 juta lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1 juta per lembar saham

@infoimunisasi @biofarmaID biofarmaID @biofarmaID biofarmaID Biocare: 1500810

KEPEMILIKAN SAHAM

Pemerintah Republik Indonesia 100%.
Tidak Memiliki Anak Perusahaan.
Non Listed

JUMLAH KARYAWAN

Karyawan Tetap: 1.195 orang
Tenaga Kontrak: 85 orang

BIDANG USAHA

- **Penelitian dan pengembangan-produk *Life Science*.**
- **Produksi produk *Life Science***
- **Pemasaran, perdagangan dan distribusi produk *Life Science* dan alat kesehatan, termasuk barang umum.**
- **Pelayanan laboratorium kesehatan dan klinik**
- **Dan jasa lainnya yang ada hubungannya dengan yang disebutkan diatas.**

WHO WE ARE

Bio Farma merupakan pemimpin dalam industri vaksin di Indonesia. Dengan filosofi *"Dedicated to Improve Quality of Life,"* Bio Farma siap mendedikasikan kerja keras untuk keamanan kesehatan global *(Global Health Security),* melalui *"Biotech for a Better Future"* memberikan solusi untuk kemakmuran global.
Didukung kompetensi, pengalaman dan proses pembelajaran selama lebih dari 128 tahun, Bio Farma hadir sebagai bagian dari perjuangan dalam menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Mengingat pentingnya peran dalam membangun kesehatan bangsa, maka keberadaan Bio Farma dipertahankan dari masa ke masa.

CORPORATE IDENTITY

Batik ciri khas Bio Farma yang didisain khusus oleh Rumah Batik Komar, menggambarkan mahluk hidup yang terdiri atas satu atau beberapa kumpulan sel sebagai bahan baku dalam pembuatan vaksin atau antisera. Disain batik berupa virus, bakteri dan amuba mengkomunikasikan pesan tentang aspek keragaman hayati *(biodiversity)* sekaligus merangkum nilai profesionalisme dari sebuah perusahaan bioteknologi dan *Life Science*. Setiap ikon batik memiliki nilai filosofis perusahaan, *"Dedicated to Improve Quality of Life."*

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Bio Farma salah satu BUMN yang berdomisili di Bandung yang memproduksi vaksin, antisera dan produk-produk biologi lainnya *(Life Science)* yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 6 Agustus 1890 di Jakarta dengan nama Parc-vaccinogène yang berarti Lembaga Pengembangan Vaksin Negara. Lembaga tersebut menempati sebuah gedung di daerah Weltevreden - Batavia, yang kini menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta. Sejak awal berdirinya, Parc-vaccinogène fokus pada berbagai penelitian untuk memberantas penyakit menular hingga akhirnya Parc-vaccinogène menjalin kerja sama dengan Institut Pasteur untuk melakukan penelitian mengenai mikrobiologi. Kerja sama tersebut berdampak pada berubahnya nama Parc-vaccinogène menjadi Parc-vaccinogène en Instituut Pasteur.

Pada tahun 1923, Parc-vaccinogène pindah ke Jalan Pasteur No. 28 Bandung. Kemudian tahun 1955, Parc-vaccinogène berubah nama lagi menjadi Perusahaan Negara Pasteur, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1955. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 1961, nama Perusahaan Negara Pasteur berubah lagi menjadi Perusahaan Negara Bio Farma, dan pada tahun 1978 berubah status menjadi Perusahaan Umum Bio Farma berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1978. Terakhir, sejak 6 Januari 1997 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 tahun 1997, Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan nama PT Bio Farma (Persero), berkedudukan di Jalan Pasteur No. 28 Bandung, Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1997 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Akta pendirian dan Anggaran Dasar (AD) atas perubahan bentuk Perusahaan tersebut telah dimuat dalam akta No. 1 Tanggal 3 Februari 1997, Akta No 188 Tanggal 20 Juni 1997 dan Akta No 30 Tanggal 21 Oktober 1997 yang dibuat oleh notaris Muhani Salim SH., dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1423HT.01.01. Tanggal 5 Maret 1998 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2002 No. 57 Tambahan No. 6884.

Anggaran Dasar (AD) Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan AD terakhir adalah Anggaran Dasar Perusahaan No. 26 Tanggal 6 Juni 2015 yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENHUKHAM) RI, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0104.40.20.2015 Tanggal 10 Juni 2015 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bio Farma (Persero) berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-03087.40.21.2015 Tanggal 10 Juni 2015, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero). Perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 16 Tanggal 19 Januari 2016 dibuat oleh notaris Fathiah Helmi, S.H., yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-01.03-0006021 Tanggal 25 Januari 2016 dan Perubahan Peningkatan Modal Dasar Perseroan dan Penambahan Modal Setor yang telah dimuat dalam Akta No. 34 Tanggal 14 Desember 2016 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) yang telah disahkan oleh notaris Fathiah Helmi, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0024481.AH.01.02 Tahun 2016 Tanggal 21 Desember 2016.

Sampai hari ini, Bio Farma telah memainkan peran signifikan dalam sejarah pengembangan vaksin dan serum. Sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi vaksin dan antisera. Komitmen untuk mempersembahkan produk yang berkualitas dan inovatif ditunjukkan dengan kinerja yang senantiasa mengacu pada standar internasional dan sistem manajemen mutu terkini. Bio Farma telah menerapkan berbagai sistem terintegrasi, antara lain: Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawaan Obat dan makanan (BPOM) dan *current Good Manufacturing Practices* (cGMP) dari Badan

Kesehatan Dunia (WHO), Good Laboratory Practices (GLP), Good Clinical Pratices (GCP), Good Distribution Practices (GDP), sistem manajemen terpadu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan OHSAS 18001:2007. Selain itu, Bio Farma juga dibekali oleh panduan *World Class Standard* antara lain ISO 26000 guidance for CSR, Enterprise Risk Management (ERM) ISO 31000, International Financial Reporting Standard (IFRS) dan Teknologi Informasi ISO 27000.

Kiprah Bio Farma telah diakui di tingkat global. Sejak tahun 1997, Bio Farma merupakan salah satu dari sekitar 30 produsen vaksin di 22 negara di dunia yang telah mendapatkan Pra-kualifikasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) sehingga dipercaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin di lebih dari 140 negara. Bekerja sama dengan jaringan internasional berskala global, lembaga penelitian, organisasi profesional tingkat regional dan juga perusahaan multinasional, Bio Farma ikut aktif mengupayakan kesehatan masyarakat dunia, baik secara langsung dengan menyediakan vaksin, transfer teknologi, perusahaan dan pemerintahan yang menghasilkan kebijakan kesehatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Saat ini, kegiatan usaha Bio Farma berpusat di Jalan Pasteur No. 28 Bandung yang menempati lahan seluas 91.058 m^2 yang digunakan untuk fasilitas produksi, penelitian dan pengembangan, pemasaran, serta administrasi. Di samping itu, Perusahaan memiliki fasilitas penunjang di Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat di atas lahan seluas 282.441 m^2 yang digunakan untuk pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan laboratorium. Perusahaan juga memiliki kantor perwakilan di Gedung Pakarti Centre Jl. Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta.

SEJARAH PERUBAHAN NAMA BIO FARMA

Sejalan dengan perkembangan jaman, Bio Farma mengalami beberapa kali perubahan nama dan badan hukum hingga pada tahun 1997 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1997 Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan nama PT Bio Farma (Persero).

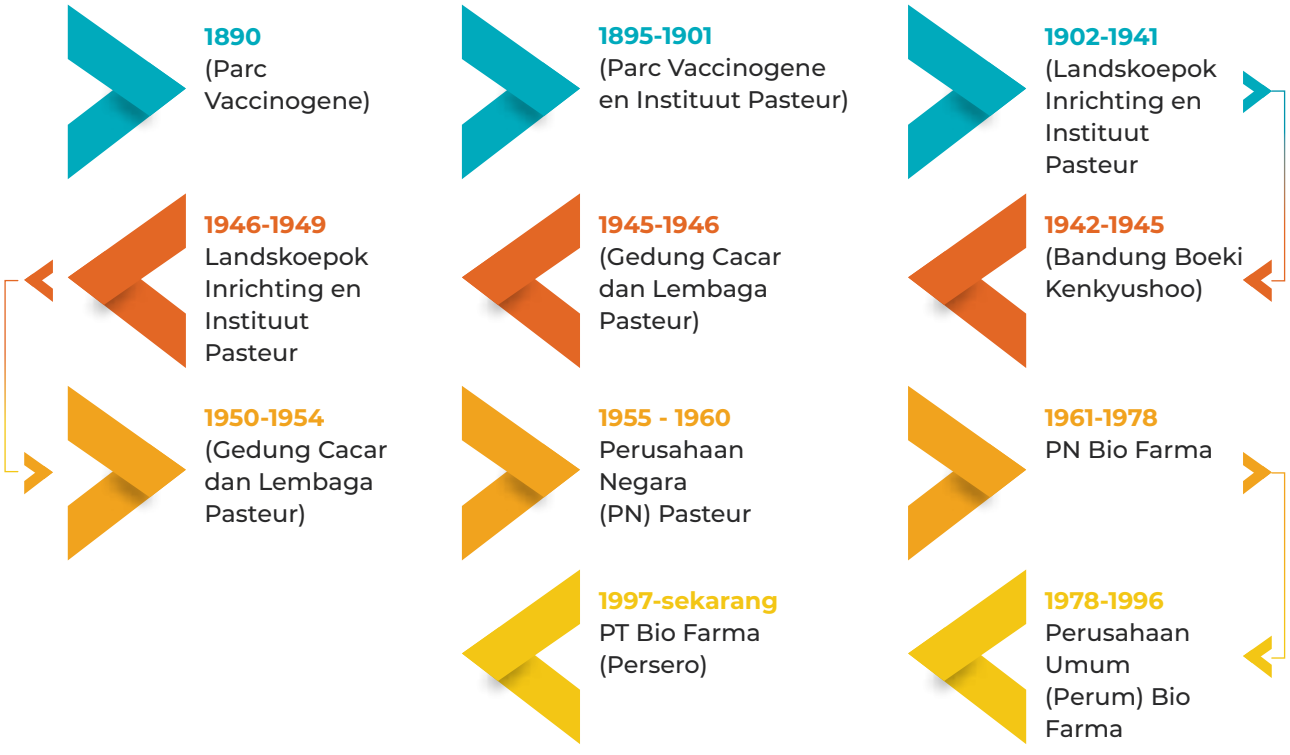

SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

1

6 AGUSTUS 1890

Bio Farma berdiri dengan nama "Parc Vaccinogene" pada tanggal 6 Agustus 1890 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 14 tahun 1890 di Rumah Sakit Militer Weltevreden, Batavia, yang saat ini telah berubah fungsi menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto), Jakarta.

2

1895-1901

Perusahaan mengalami pergantian nama menjadi "Parc Vaccinogene en Instituut Pasteur."

3

1902-1941

Perusahaan kembali mengalami perubahan nama menjadi "Landskoepok Inrichting en Instituut Pasteur." Pada tahun 1923, Bio Farma mulai menempati lokasi di Jalan Pasteur No. 28 Bandung yang dipimpin oleh L. Otten.

4

1942-1945

Saat penjajahan Jepang, Bio Farma berganti nama kembali menjadi "Bandung Boeki Kenkyushoo" yang dipimpin oleh Kikuo Kurauchi.

5

1945-1946

Perusahaan kembali berganti nama menjadi "Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur." Perusahaan ini dipimpin oleh R.M. Sardjito yang merupakan Pemimpin Indonesia pertama. Pada saat kepemimpinan R.M. Sardjito, lokasi sempat dipindahkan ke daerah Klaten.

6

1946-1949

Pada masa Agresi Militer, saat Bandung kembali diduduki oleh Belanda, perusahaan kembali berganti nama menjadi "Landskoepok Inrichting en Institut Pasteur."

7

1950-1954

Perusahaan kembali berganti nama menjadi "Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur" yang merupakan salah satu jawatan dalam lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

8

1955-1960

Pada masa nasionalisasi kepemilikan perusahaan Belanda di Indonesia, Perusahaan kemudian berganti nama kembali menjadi "Perusahaan Negara Pasteur." Perusahaan lebih dikenal dengan nama PN Pasteur.

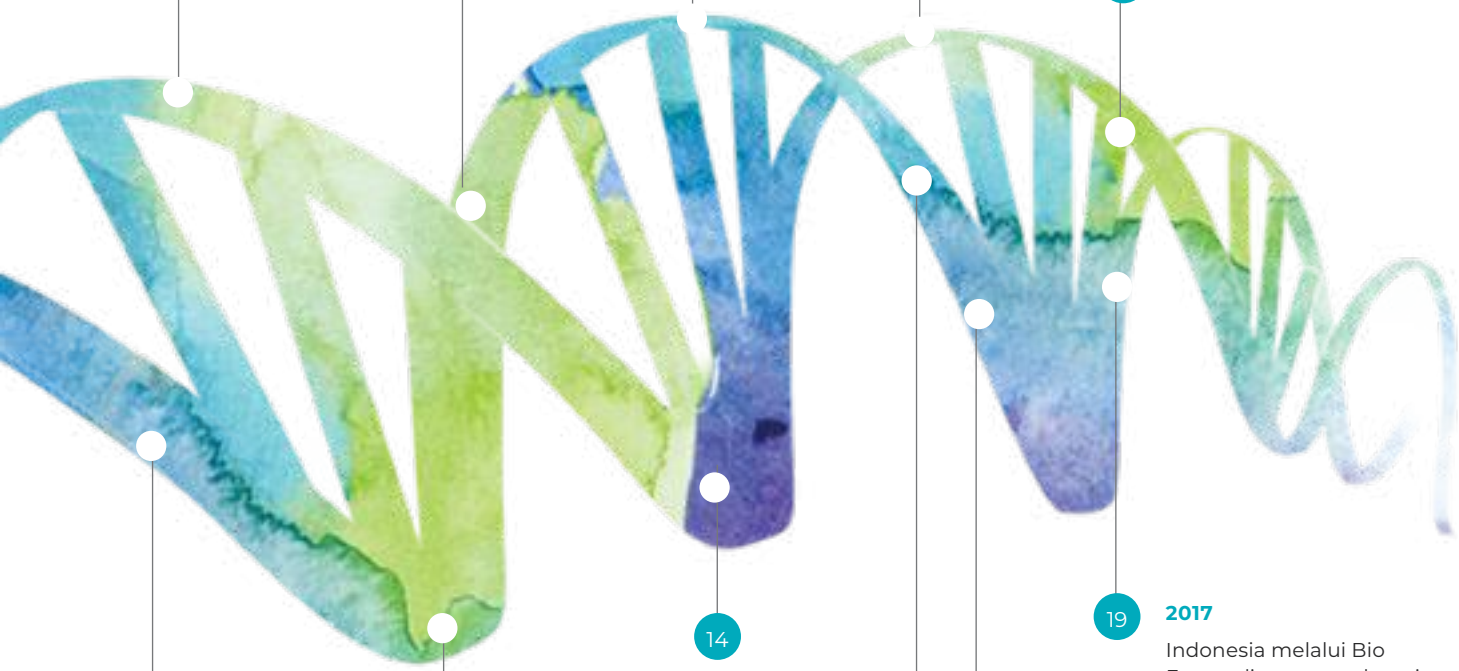

1961-1978

Perusahaan kembali mengubah nama menjadi "Perusahaan Negara Bio Farma" atau lebih dikenal dengan nama PN Bio Farma.

1978-1996

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1978, Perusahaan mengubah nama menjadi Perusahaan Umum Bio Farma yang lebih dikenal dengan nama Perum Bio Farma.

1997

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1997, nama Perusahaan kembali berubah dari Perum Bio Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) atau lebih dikenal dengan nama PT Bio Farma (Persero) sampai dengan saat ini.

1997-2011

Bio Farma berhasil mendapatkan Pra-Kualifikasi WHO untuk 12 jenis vaksin sehingga bisa memasuki pasar ekspor.

2008

Peluncuran logo baru mencerminkan semangat dan optimisme untuk menuju industri vaksin kelas dunia.

2009

Di bawah tim manajemen yang baru, Bio Farma melangkah menuju perusahaan vaksin kelas dunia yang berdaya saing global.

2013

Roadmap menuju industri *Life Science* dimulai. Peluncuran vaksin terbaru *Pentavalent* (Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B, HiB) dan Pencanangan Program Imunisasi Nasional.

2014

Peningkatan Visi baru "Menjadi Perusahaan *Life Science* Kelas Dunia yang berdaya saing global".

2015

Peresmian Gedung Heritage dan Museum Bio Farma.

2016

Transformasi Forum Riset Vaksin Nasional (FRVN) menjadi Forum Riset *Life* Science Nasional (FRLN)

2017

Indonesia melalui Bio Farma dipercaya sebagai *Center of Excellence Vaccine, Organisation of Islamic Cooperation* (OIC)

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI

Konsep *green industry* yang berkelanjutan di semua proses bisnis mencakup pemilihan produk sesuai persyaratan kriteria aktivitas operasi ramah lingkungan yang meliputi pemilihan bahan baku, proses produksi, perumusan inovasi berkelanjutan sesuai dengan standar ISO 14001:2015, guna menghasilkan berbagai produk berbasis bioteknologi menuju *green industry* yang berkelanjutan.

Komitmen untuk mempersembahkan produk yang berkualitas dan inovatif ditunjukkan dengan kinerja yang senantiasa mengacu pada Standar Internasional dan Sistem Manajemen Mutu terkini. Bio Farma telah menerapkan berbagai sistem terintegrasi, antara lain: CPOB dari Badan POM dan *current Good Manufacturing Practices* (cGMP) dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), *Good Laboratory Practices* (GLP), *Good Clinical Pratices* (GCP), *Good Distribution Practices* (GDP), sistem manajemen terpadu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 dan akreditasi ISO 17025:2016. Selain itu Bio Farma juga dibekali panduan *World Class Standard* antara lain ISO 26000 guidance for CSR, *Enterprise Risk Management* (ERM) ISO 31000, *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dan Teknologi Informasi 27000.

FAKTOR KEAMANAN MENJADI PERHATIAN PENTING BIO FARMA

Faktor keamanan juga menjadi perhatian Bio Farma. Hal ini dapat diamati dari setiap produk Bio Farma yang dilengkapi dengan teknologi *Vaccine Vial Monitor* (VVM). Tanda ini berperan menakar kualitas vaksin. Pasalnya, bila terpapar suhu yang tidak semestinya, vaksin itu akan berubah warna.

Untuk kebutuhan vaksin dalam negeri, Bio Farma membagi saluran distribusi produknya menjadi dua sektor, yakni pemerintah dan sektor swasta. Untuk sektor pemerintah, Vaksin Bio Farma dikirim langsung dari pabrik menggunakan kendaraan berpendingin menuju Dinas Kesehatan Provinsi untuk didistribusikan lagi ke tingkat rumah sakit pemerintah, Puskesmas dan Posyandu di setiap wilayah Indonesia.

Untuk sektor swasta, Vaksin akan didistribusikan dari Bio Farma menggunakan kendaraan berpendinginan menuju distributor, untuk disalurkan ke rumah sakit swasta atau klinik.

Sedangkan untuk pasar internasional, vaksin dari Bio Farma akan diantar menggunakan kendaraan berpendingin, untuk kemudian diangkut menggunakan transportasi udara untuk kemudian diantarkan ke negara tujuan atau ke lembaga - lembaga dunia seperti United Nations Children's Fund (UNICEF), Pan American Health Organization (PAHO).

Bio Farma sangat memperhatikan faktor keamanan untuk konsumen, setiap produk Bio Farma yang dilengkapi dengan teknologi *vaccine vial monitor* (VVM). Tanda ini berperan menakar kualitas vaksin. Sehingga apabila

terpapar suhu yang tidak semestinya, indikasi warna yang tertera pada kemasan vaksin akan berubah warna.

Didukung sumber daya dan kompetensi seluruh karyawan, inovasi yang dihasilkan mampu memberikan solusi untuk kemakmuran dan kesehatan global

MANAJEMEN INOVASI

Bagaimana dengan sepak terjang Bio Farma di ranah internasional? Selain sinergi dengan lembaga riset nasional, Bio Farma juga mengandalkan kerja sama dengan berbagai lembaga riset luar negeri dalam memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang. Bio Farma juga menggandeng lembaga seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) serta *Developing Countries Vaccine Manufacturer Network* (DCVMN) atau organisasi produsen vaksin di negara-negara berkembang.

Sebagai perusahaan BUMN yang berusia 128 tahun, Bio Farma telah melalui beragam dinamika dan perkembangan zaman. Kiprah di industri vaksin ini pun tak luput dari langkah strategi dan inovasi. Tak hanya sukses menjajal bisnis di dalam negeri, Perusahaan juga memiliki nama yang diperhitungkan di mancanegara.

Sesuai dengan filosofi, *"Dedicated to Improve Quality of Life,"* Bio Farma terus berinovasi secara komprehensif dan terintegrasi untuk menghasilkan produk vaksin dan *life science* masa depan bagi generasi dunia**.**

INOVASI KAMI

Kemunculan Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0), dipercaya akan merubah model bisnis secara menyeluruh, di seluruh industry. Hal ini dikarenakan RI 4.0 menggabungkan unsur teknologi dan digital yang memugkinkan membuat segalanya menjadi lebih cepat dan akurat.

Untuk industri bioteknologi seperti Bio Farma, pemanfaatan RI 4.0 bisa juga diarahkan untuk pemanfaatan *big data analysis*, *artificial intelligence* dan *machine learning* yang akan memungkinkan penelitian di Bio Farma dilakukan lebih cepat, efektif, dan memiliki time to market yang tepat.

Untuk bisa bersaing di pasar industry bioteknologi, diperlukan semangat untuk selalu berinovasi dari seluruh karyawan Bio Farma. Oleh karenanya majamen Manajemen inovasi yang diterapkan di Bio Farma, dibagi menjadi tiga hal yaitu ; yang berhubungan dengan produk, strategi dan proses bisnis. Inovasi Produk merupakan inovasi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan produk Bio Farma.

Sebut saja vaksin kombinsasi pentavalent yang terdiri dari lima antigen sekaligus untuk mencegah serangan penyakit Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B dan Haemophylus Influenza Type B (DTP-HB-Hib). Dengan pengkombinasian vaksin tersebut, Bio Farma dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus melakukan efisiensi baik dari penggunaan bahan baku dan tentu saja pengurangan limbah. Setelah melewati beragam pengujian ketat, akhirnya produk inovatif ini dipatenkan dalam bentuk liquid, bahkan sudah mendapatkan PQ WHO.

Inovasi dari sisi Strategi bisnis salah satuanya adalah melalui Diplomasi Pemasaran dengan berkolaborasi bersama Kementerian Luar Negeri RI melalaui Kedutaan – Kedutaan Besar Republik Indonesia(KBRI), Kementerian Perdagangan RI melalui Dirjen Penguatan Ekspor Nasional (DPEN). Dengan strategi tersebut, kami dapat menembus pasar Afrika lebih luas lagi dan juga jangkauan di negara OKI.

Sedangkan untuk proses bisnis, inovasi yang dilaksanakan lebih ke arah penelitian dan pengembangan produk. Salah satu inovasi dalam proses bisnis ini adalah pemanfaatan teknologi informasi, dengan menggunakan sistem *track and trace* dan *authentication application*, yang dapat mencegah pemalsuan produk vaksin. Sisten ini menggunakan Sistem *Quick Response Code* (QR *Code*) yang dipasang dalam setiap kemasan vaksin baik di kemasan primer maupun pada kemasan skunder.

Saat ini, Bio Farma juga fokus pada penelitian dan pengembangan produk berkualitas dan bersertifikasi halal. Kami berusaha menemukan solusi bersama negara-negara OKI. Upaya ini menitikberatkan pada pencarian kriteria halal untuk medikasi dengan tetap namun tetap mengedepankan *safety*, *quality* dan *efficacy*.

BIDANG USAHA

Sejak tahun 1890, Bio Farma hadir dan berperan aktif dalam memproduksi, memasarkan, dan mengembangkan teknologi vaksin, antisera dan produk-produk biologi lainnya *(Life Science)*, demi menjamin kemandirian kebutuhan vaksin di dalam negeri serta membantu memenuhi kebutuhan vaksin untuk dunia. Hingga saat ini, produk vaksin Bio Farma telah mendapatkan pengakuan pra-kualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan dipercaya memenuhi kebutuhan vaksin di lebih dari 140 negara.

Didukung kompetensi, pengalaman dan proses pembelajaran yang panjang, Bio Farma hadir sebagai bagian dari perjuangan dalam menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan berperan penting dalam membangun kesehatan bangsa.

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MENURUT ANGGARAN DASAR

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penelitian, pengembangan, produksi dan pemasaran produk biologi, produk farmasi, dan alat kesehatan. Selain itu, maksud tujuan lainnya adalah melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan dan selanjutnya meningkatkan nilai Perseroan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas.

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN YANG DIJALANKAN

Kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan, meliputi beberapa hal di bawah ini.

a. Penelitian dan pengembangan produk biologi dan produk farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerja sama dengan pihak lain.
b. Produksi produk biologi dan produk farmasi, baik dilakukan sendiri maupun kerja sama dengan pihak lain.
c. Pemasaran, perdagangan dan distribusi produk biologi, farmasi, alat kesehatan, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri.
d. Pelayanan laboratorium kesehatan dan klinik.
e. Berusaha di bidang jasa yang ada hubungannya dengan yang tertera pada huruf a, b, c dan d.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana disebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk pendidikan dan pelatihan, pertanian, peternakan, pengembangbiakan hewan laboratorium, properti, perkantoran, pergudangan, dan pariwisata.

Sifat usaha Bio Farma adalah melayani kebutuhan pasar domestik dan global, sebagai berikut:

1. **Pasar Pemerintah**, yaitu melayani kebutuhan Pemerintah untuk program imunisasi dasar/reguler, yaitu vaksin BCG, DT, TT, Polio, Campak, Hepatitis B, Td dan DTP-HB-Hib (pentaBio);
2. **Pasar Swasta Nasional**, yaitu melayani Pasar Swasta Nasional: Untuk memenuhi kebuthan vaksin, baik untuk program imunisasi dasar pemerintah, maupun imunisasi tambahan seperti ; Vaksin flubuio, menigitis, cacar, HPV dan antisera (BIO SAT, BIO ADS, BIO SAVE, ABU I dan ABU II (Australia) dan PPD 2 TU;
3. **Pasar Internasional**, terutama untuk melayani kebutuhan UNICEF dan negara lain yang telah melakukan kerja sama bilateral. Vaksin yang digunakan merupakan vaksin yang telah memenuhi pra-kualifikasi WHO baik dalam bentuk produk jadi maupun bulk, yaitu vaksin TT, Td ,DTP, BOPV (20 ds/vial), Campak (10 ds/vial), DTP HB HIB 5 ds, mOPV 1, DT dan DTP-HB.

PRODUK BIO FARMA

VAKSIN VIRUS

VAKSIN POLIOMYELITIS ORAL BIVALEN TIPE 1 & 3 (BOPV)

Pencegahan terhadap penyakit Poliomyelitis tipe 1 & 3.

VAKSIN CAMPAK)

Pencegahan terhadap penyakit Campak.

MOPV (VAKSIN ORAL POLIO MONOVALENT TIPE 1)

Untuk pencegahan terhadap penyakit *poliomyelitis tipe* 1.

VAKSIN HEPATITIS B REKOMBINAN

Pencegahan terhadap infeksi yang disebabkam oleh virus Hepatitis B pada bayi baru lahir.

VAKSIN FLUBIO (VAKSIN INFLUENZA HA)

Pencegahan terhadap penyakit seasonal influenza.

VAKSIN KOMBINASI

VAKSIN PENTABIO (DTP-HB-HIB)

Pencegahan terhadap penyakit Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B dan Haemophilus Influenza tipe B.

VAKSIN BAKTERI

VAKSIN TT

Pencegahan terhadap penyakit Tetanus dan perlindungan terhadap Tetanus neonatal pada bayi baru lahir.

VAKSIN JERAP TD

Pencegahan terhadap penyakit Difteri dan Tetanus pada individu mulai usia 7 tahun.

VAKSIN DTP

Pencegahan penyakit Difteri, Tetanus dan Pertusis.

VAKSIN JERAP DT

Pencegahan terhadap penyakit Difteri dan Tetanus.

VAKSIN BCG (FREEZE-DRIED)

Pencegahan terhadap penyakit Tuberkulosa.

VAKSIN BIO-TT

Pencegahan terhadap penyakit Tetanus dan perlindungan terhadap Tetanus neonatorum pada wanita usia subur.

VAKSIN JERAP BIO-TD

Pencegahan terhadap penyakit Difteri dan Tetanus pada individu mulai usia 7 tahun.

ANTISERA

SERUM ANTI BISA ULAR (BIOSAVE)

Pengobatan terhadap gigitan ular berbisa dari jenis Ular Kobra (Naja sputatrix), Ular Belang (Bungarus fasciatus) dan Ular Tanah (Agkistrodon rhodostoma).

SERUM ANTI TETANUS (BIOSAT 1.5)

Pencegahan dan pengobatan terhadap Tetanus yang disebabkan oleh infeksi Clostridium tetani.

SERUM ANTI DIFTERI (BIOADS)

Pengobatan terhadap penyakit Difteri.

DIAGNOSTIK

TUBERKULIN PDD RT 23 SSI (2 TU)

Uji Mantoux untuk menentukan apakah seseorang pernah terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis.

PRODUK PARTNERSHIP

- VAKSIN VARICELLA
- VAKSIN MEASLES RUBELLA
- SERUM ANTI BISA ULAR

TUBERKULIN PDD RT 23 SSI (2 TU)

Pencegahan terhadap penyakit Radang Selaput Otak.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 04276/DIR/XI/2017, Tanggal 17 November 2017 tentang Bagan Organisasi PT Bio Farma (Persero) diperbaharui dengan Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: 00117/DIR/I/2018, tanggal 8 Januari 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor: 04276/DIR/XI/2017 Tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma (PERSERO).

Tanggung jawab, wewenang dan hubungan setiap personel yang mengelola, melaksanakan dan memverifikasi pekerjaan yang memengaruhi mutu, lingkungan dan K3 didefinisikan dalam:

1. Struktur Organisasi
2. Uraian Pekerjaan
3. Manual, Pedoman dan Dokumen Pendukung

Struktur organisasi Bio Farma terdiri dari Direksi, Divisi, Bagian dan Seksi. Satu Divisi bisa membawahi lebih dari satu Bagian. Kepala Divisi memikul segala tanggung jawab, termasuk bertanggung jawab atas tugas-tugas yang didelegasikan kepada bawahannya. Direktur Utama bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas Bio Farma.

Direktur Utama menunjuk Wakil Manajemen (*Management Representatif*/MR) melalui Keputusan Direksi. Perannya mengkoordinasi dan mengelola Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan dan K3 yang efektif, meliputi keseluruhan aktivitas Bio Farma sesuai arahan Direktur Utama dan sesuai dengan Kebijakan, Pedoman, dan Dokumen Pendukung yang berlaku di Bio Farma.

STRUKTUR ORGANISASI

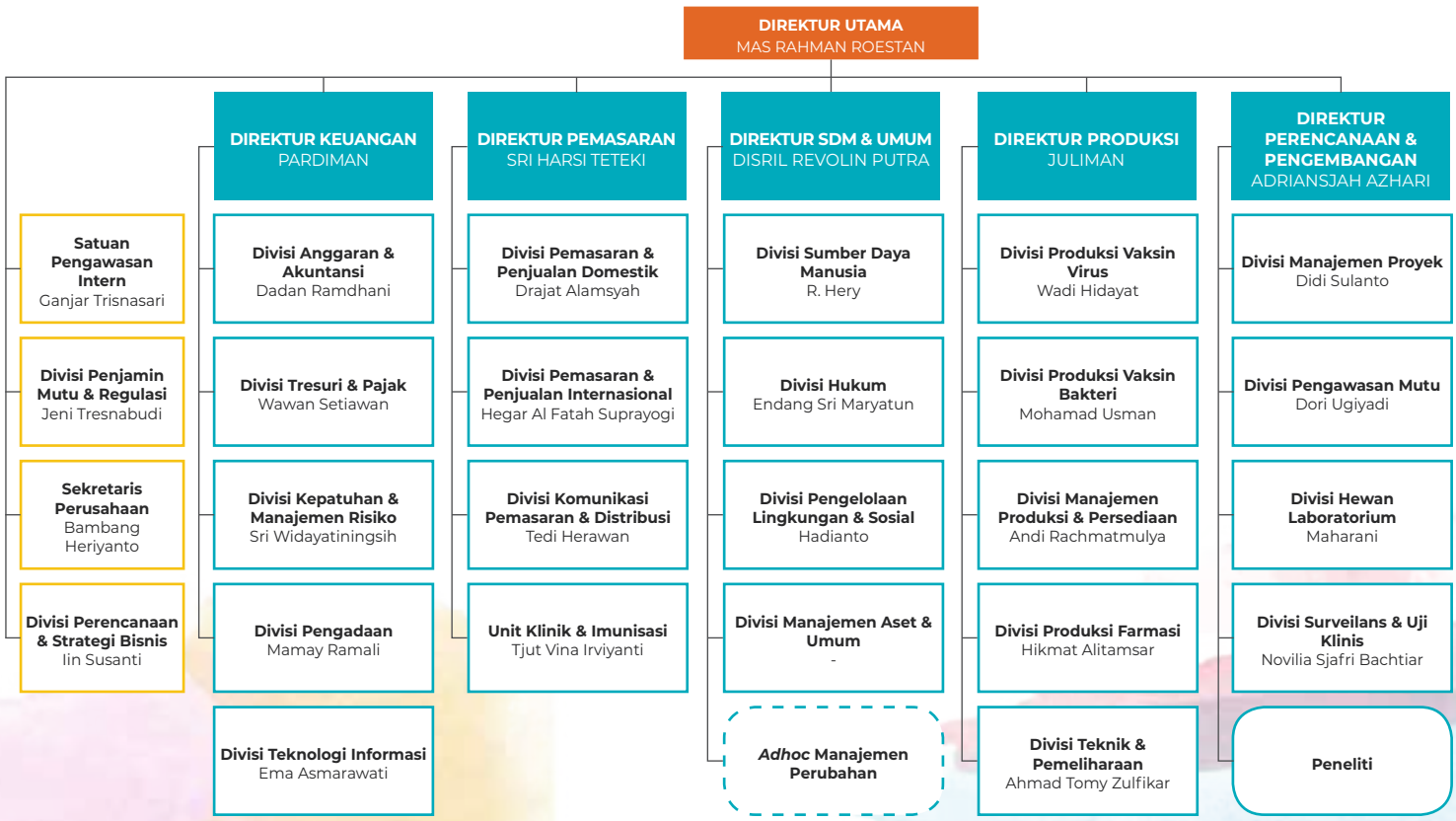

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK – 102/MBU/04/2018 Tanggal 20 April 2018. Tentang Susunan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero)

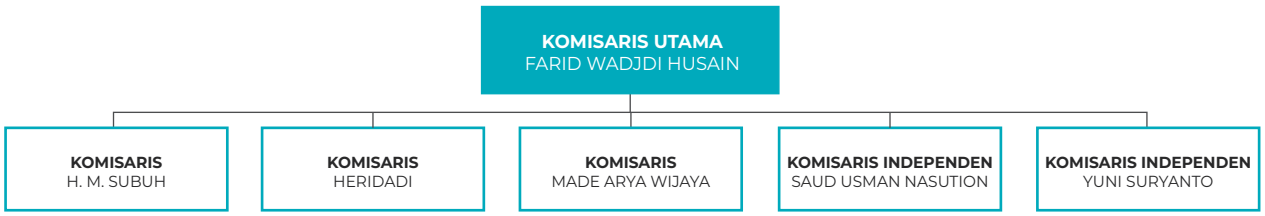

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) No. KEP-02/DK/BF/04/2018 Tanggal 26 April 2018 Tentang Susunan Komite Audit PT Bio Farma (Persero) Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero)

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE RISIKO & PENGEMBANGAN GCG

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) No. KEP-03./DK/BF/04/2018 Tanggal 26 April 2018 Tentang Susunan Komite Risiko, Pengembangan & GCG PT Bio Farma (Persero) Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero)

FILOSOFI, VISI, MISI, KEBIJAKAN PERUSAHAAN, BUDAYA PERUSAHAAN DAN KOMPETENSI INTI

Visi dan Misi Bio Farma ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris dan Kepala Divisi untuk memastikan keberlanjutan relevansinya.

"DEDICATED TO IMPROVE QUALITY OF LIFE" ADALAH **FILOSOFI** KAMI.

Vision

Menjadi Perusahaan *Life Science* Kelas Dunia yang Berdaya Saing Global.

Mission

Menyediakan dan Mengembangkan Produk *Life Science* Berstandar Internasional untuk Meningkatkan Kualitas Hidup.

BERPEGANG KEPADA VISI DAN MISI, BERIKUT INI ADALAH
KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN SEBAGAI PERUSAHAAN *LIFE SCIENCE*, YAITU:

1. **Produk bermutu tinggi. *(High Quality Products)***
2. **Produk ramah lingkungan. *(Environment-Friendly Products)***
3. **Berdaya saing global. *(GLobal Competitiveness)***
4. **Kepuasan pelanggan. *(Customer Satisfaction)***
5. **Perbaikan berkesinambungan. *(Continual Improvement)***
6. **Pengendalian pencemaran. *(Environment Protection)***
7. **Pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja *(Prevention of Injury and Ill-Health)***
8. **Penghematan energi dan Sumber Daya Alam *(Conservation of Energy and Natural Resources)***
9. **Melakukan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)***
10. **Patuh peraturan perundangan dan peraturan lainnya. *(Comply with Regulation and Other Requirement)***

Budaya Perusahaan

SETIAP ORGAN PERUSAHAAN BIO FARMA BERSIKAP DAN BERPIKIR SEJALAN DENGAN **BUDAYA PERUSAHAAN**, YAITU:

Setiap organ Perusahaan yang bersikap dan berpikir secara profesional, memiliki integritas yang tinggi, bekerja dalam suatu tim, penuh inovasi dan beroreantasi terhadap pelayanan konsumen.

PROFESSIONAL
Berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, efisien, efektif berorientasi ke depan, dan taat prosedur.

CUSTOMER ORIENTED
Memahami kebutuhan dan memberikan solusi yang tepat kepada *customer*.

TEAMWORK
Bekerjasama dengan menghargai peran dan pendapat orang lain.

INTEGRITY
Jujur, transparan dan dapat dipercaya sesuai dengan tujuan Perusahaan.

INNOVATION
Melakukan perbaikan dan pengembangan secara terus menerus untuk menghasilkan gagasan baru.

Budaya Perusahaan diperjuangkan dan dijalankan oleh seluruh organ perusahaan dalam rangka mendukung terselenggaranya *"Good Corporate Governance"* (GCG).

KOMPETENSI INTI PERUSAHAAN

Merupakan faktor kunci untuk menentukan pencapaian misi adalah *Affordable Life Science* (*Biopharmaceutical), Innovation, Employee Engagement, Green Product/Process* dan *Global Marketing*.

SMART SHARP SYNERGY

Salam Bio Farma merupakan salam yang biasa diucapkan Insan Bio Farma untuk menambah semangat kebersamaan. Salam Bio Farma diucapkan pada waktu pembukaan rapat, *safety talk* ataupun *event* korporasi lainnya.

Kami Direksi dan seluruh Insan Bio Farma berkomitmen untuk membentuk dan menyempurnakan sistem manajemen perusahaan melalui beberapa langkah di bawah.

1. Penerapan sistem manajemen terpadu/terintegrasi yang memenuhi standar internasional dan memungkinkan pengkajian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.
2. Pemahaman kebijakan dan penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari.
3. Penyusunan dan peninjauan secara berkala kebijakan dan sasaran.
4. Penerapan pengendalian operasi yang efektif untuk meminimalkan pelepasan bahan pencemar terhadap lingkungan sekitar.
5. Pengukuran dan peningkatan kinerja.
6. Usaha untuk memenuhi persyaratan pelanggan dengan selalu mengikuti persyaratan WHO, Farmakope dan persyaratan internasional lainnya.
7. Usaha untuk memenuhi peraturan perundangan lingkungan dan K3 serta persyaratan lainnya yang terkait.
8. Usaha untuk melakukan penghematan sumber daya dengan penggunaan sumber daya yang efisien.
9. Ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan sistem manajemen secara efektif dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah direncanakan.
10. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, kontraktor, *vendor/supplier* dengan menerapkan prosedur kerja yang aman sesuai kebijakan perusahaan.
11. Evaluasi resiko dan evaluasi kepatuhan terhadap perundangan serta tinjauan keefektifan sistem yang dikomunikasikan melalui forum QSHE *Council (Quality, Safety, Health and Environment)* dan Manajemen Review.
12. Pembentukan organisasi P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

DASAR HUKUM FILOSOFI, VISI, MISI DAN *VALUE* (BUDAYA PERUSAHAAN)

Berdasarkan hasil *review* dari Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma, maka pada tanggal 6 Maret 2014 Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma menyetujui perubahan Filosofi, Visi, Misi dan *Value* (Budaya Perusahaan) yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero), Nomor: KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor: 01103/DIR/III/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor: 01024/DIR/II/2013 tentang Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* PT Bio Farma (Persero) Pasal I Butir 1.5 dab 1.6.

Filosofi, Visi, Misi, Kebijakan Perusahaan, *Value* (Budaya Perusahaan) dan Kompetensi Inti Perusahaan sudah disosialisasikan oleh Perusahaan kepada karyawan melalui berbagai sarana sebagai berikut.

- *Training-training* yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 25 April 2014 di GH Universal Bandung, dengan Tema “Internalisasi Visi, Misi dan Nilai Perusahaan.”
- Acara pengarahan Direksi pada tanggal 26 Mei 2014 di Gedung Serba Guna Bio Farma.
- Melalui berbagai media internal pada tanggal 30 Juni 2014.
- Sampai saat ini masih disosialisasikan melalui intranet Bio Farma, website Bio Farma, Banner.
- *Training* yang diberikan kepada setiap karyawan baru Bio Farma.

PENJELASAN VISI

Visi Bio Farma diatur dalam Dokumen: MBF-01 revisi 13, tanggal 30 Juni 2014, yaitu menjadi perusahaan *Life Science* kelas dunia yang berdaya saing global. Visi tersebut menekankan peran Bio Farma dalam memenuhi ketersediaan vaksin nasional dan global. *Repositioning* dari produsen vaksin ke *Life Science* merupakan perubahan ke arah yang lebih baik, penambahan kelas dunia diiringi dengan inovasi pada berbagai segmen, efisiensi proses bisnis yang ramah lingkungan, pembaharuan teknologi, penerapan CSR berkelas dunia serta peningkatan kualitas SDM kelas dunia.

PENJELASAN MISI

Misi Bio Farma untuk mewujudkan visi, disusun dengan mempertimbangkan kompetensi utama Perusahaan dan tantangan strategis yang akan dihadapi, Bio Farma terus menerus melakukan inovasi dengan memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan vaksin dan antisera yang berkualitas internasional. Untuk menjaga kualitas Bio Farma menerapkan berbagai sistem secara terintegrasi seperti memenuhi persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, CPOB, ASEAN GMP, WHO GMP dan mengikuti perkembangan persyaratan cGMP secara global.

Dalam menjalankan misinya, Bio Farma senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG. Keberadaan Bio Farma telah mencapai 128 tahun diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal bagi seluruh *stakeholder* Perusahaan.

STRUKTUR DAN CAKUPAN SISTEM

Struktur dokumentasi terdiri atas:

1. **Kebijakan**
   Dokumen tingkat pertama yang berisi kebijakan perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CPOB, ASEAN GMP, WHO GMP, dan mengikuti perkembangan persyaratan cGMP secara global.

2. **Pedoman**
   Dokumen tingkat kedua yang berisi pedoman untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada pada Manual. Pedoman dibuat untuk setiap aktivitas sesuai aliran bisnis proses Perusahaan.

3. **Dokumen Pendukung**
   Dokumen tingkat ketiga yang berisi prosedur/ langkah detail untuk menjalankan suatu pekerjaan, mencakup: Prosedur Baku, Formula Induk, Spesifikasi, Protokol, Formulir Data dan Catatan/ *record*.

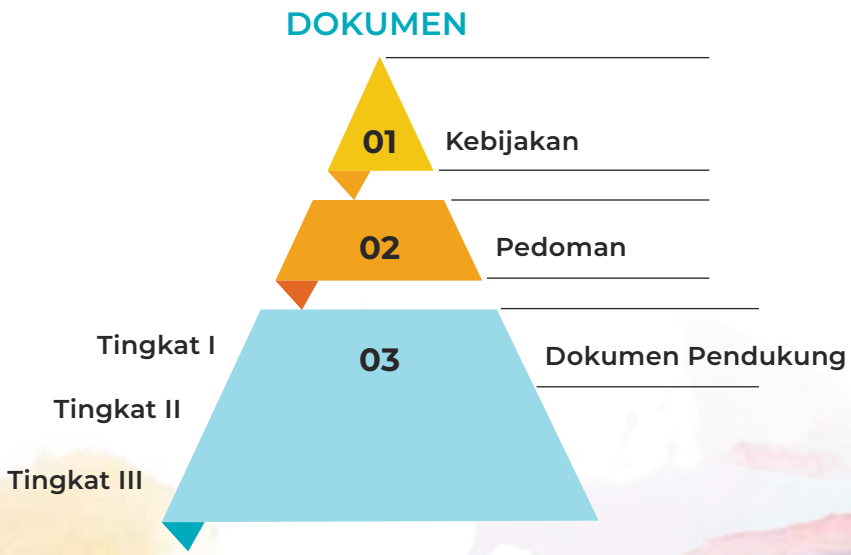

IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

AHMAD M. RAMLI
KOMISARIS UTAMA

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, usia per 31 Desember 2018 adalah 57 tahun. Lahir di Bandung, 4 Juli 1961, Ahmad M. Ramli meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung tahun 1985. Meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Studi Hukum Internasional tahun 1992 dan Doktor dari ProgramStudi Doktor Ilmu Hukum Internasional dari Universitas Padjajaran, lulus dengan Predikat *Cum Laude* pada tahun 1999.

Mengawali karir sebagai Asisten dosen di Fakultas Hukum Unpad tahun 1986, pernah menjadi anggota Tim Penyusun RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan anggota Tim Penelaahan Perundang-undangan (Tim Reformasi Hukum) Departemen Kehakiman RI (1998-1999), Dosen Pascasarjana di Universitas Padjajaran (1995-sekarang), Dosen luar biasa pada Program Pascasarjana Teknologi Sistem Informasi ITB (1998), pernah menjadi Pembantu Dekan II (1999-2001) dan Pembantu Dekan I (2001-2004), pakar HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan *cyber law* (hukum siber) dan pemegang *Certificate on Industrial Property Rights*, Japan Institute of Invention and Innovation ini adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2002-sekarang). Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI (2004-2007), Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak 2004 – sekarang), anggota Badan Regulasi Telekomunikasi–BRTI (2005-2007). Ketua Tim Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Departemen Komunikasi dan Informatika–Departemen Hukum dan HAM (2006), Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum & HAM (2007-2010), Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI (2010), Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (2010–2015), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemkumham (2015–2016). Pada bulan Oktober 2016 dilantik sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo. Diangkat sebagai Komisaris Utama Bio Farma pada tangga l8 Oktober 2007 hingga habis masa jabatannya tanggal 5 November 2012, kemudian diangkat kembali sebagai Komisaris Utama Bio Farma pada 12 April 2013 dan telah berakhir masa jabatannya tanggal 20 April 2018.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Komisaris Utama adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-220/MBU/2013 Tanggal 12 April 2013. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK–102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018, Ahmad M. Ramli diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Utama Bio Farma dan digantikan oleh Farid Wadjdi Husain.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun pemegang saham. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

PENGHARGAAN/PRESTASI LAIN-LAIN

Penghargaan RI: Satya Lencana Karya Satya 10 tahun (2004) dan 20 tahun (2013), penghargaan Microsoft (sebagai Dirjen HKI) 2014, penghargaan Sayta Karya Bhakti kelas II dari Rektor Unpad (2003), Wisudawan Program Doktor dengan Predikat Cumlade Unpad (2003), dinobatkan sebagai Mahasiswa Teladan oleh Menteri P&K RI tahun 1985.

FARID WADJDI HUSAIN
KOMISARIS UTAMA

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, usia per 31 Desember 2018 adalah 68 tahun. Lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan, 9 Maret 1950. Farid Wadjdi Husain adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 1978 Meraih gelar Spesialis Bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 1981 dan Spesialis Bedah Digestif di Universitas Hasanuddin tahun 1984.

Mengawali kariernya sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar (1978-2002). Direktur Utama Rumah Sakit Islam Faisal Makassar (1995-2002), Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kesehatan Rakyat Bidang Peran Serta Masyarakat (2001-2002), Deputi Menteri Koordinator Kesehatan Rakyat Bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup (2002-2005). Pernah menjabat berbagai posisi penting di antaranya: Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan (2005-2010), Komisaris Utama PT Askes (Persero) dan Utusan Khusus Presiden RI untuk Misi Perdamaian Papua. Komisaris Independen PT Kimia Farma (Tbk) (2013-2015), menjabat sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Kimia Farma (Tbk) (2015–2018). Sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo. Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang juga masih menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat PMI Jakarta. Diangkat sebagai Komisaris Utama Bio Farma pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan saat ini.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Komisaris Utama PT Bio Farma (Persero) berdasarkan SK Nomor: SK–102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 menggantikan Ahmad M. Ramli yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Utama Bio Farma .

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun pemegang saham.

SAUD USMAN NASUTION

ANGGOTA KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Usia per 31 Desember 2018 adalah 60 tahun. Lahir di Sigalangan, 25 Februari 1958. Saud Usman Nasution meraih gelar Sarjana pada tahun 1994. Meraih gelar Magister Hukum pada Program tahun 2002 dan Doktor dari pada tahun 2015. Menyelesaikan Pendidikan Polri sebagai Sespati Polri (Angakatan VII) pada tahun 2004, dan berbagai Pendidikan Kejuruan salah satunya Sus Jab Kapolres tahun 1999.

Mengawali karier sebagai PAMA POLDA Sumatera Utara pada tahun 1981. Pernah menjabat beberapa prosisi strategis di beberapa Kepolisian Daerah (POLDA) antara lain Maluku, Metro Jaya dan Jawa Timur, dalam rentang waktu 1981 - 2000. beliau pernah dipercaya sebagai Kasub Satgas Bidang Penegakan Hukum: Penanganan Kasus Konflik Posi pada tahun 2005 - 2007. Jabatan terakhir di Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2014.

Kasub Satgas Bidang Penegakan Hukum:
Selain itu pernah menjabat sebagai Komisaris PT Dahana BUMN tahun 2016 Komisaris PT Cemindo Semen Merah Putih tahun Mei 2016 Komisaris Independen PT SLJ Global Tbk. Tahun 2016 Komisaris PT Armina Reka Perdana tahun 2016 dan Komisaris Pengawas DPN Peraditahun. Diangkat sebagai Komisaris Bio Farma pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan saat ini.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Komisaris Bio Farma adalah berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK–102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018.

Berdasarkan SK Nomor: KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2016 tentang Pengangkatan sebagai Wakil Ketua I Komite Risiko, Pengembangan dan GCG menggantikan Nizar Yamanie.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun pemegang saham.

MADE ARYA WIJAYA

ANGGOTA KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Usia per 31 Desember 2018 adalah 53 tahun. Lahir di Singaraja, 17 Agustus 1965. Made Arya Wijaya lulusan Diploma III, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta tahun 1987. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Jakarta tahun 1995. Meraih gelar *Master of Science in Finance*, University of Colorado di Denver, USA tahun 2001.

Mengawali kariernya sebagai Pelaksana, Direktorat Anggaran Lain-lain, Ditjen Anggaran, tahun 1988-1990. Menjabat sebagai Koordinator Pelaksana, Direktorat Anggaran lain-lain, Ditjen Anggaran tahun 1990-1996. Menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem Penganggaran, Direktorat Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran, tahun 2008-2011. Menjabat sebagai Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Ditjen Anggaran, September 2014–November 2015 dan sejak November 2015–sekarang menjabat sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Ditjen Anggaran. Diangkat sebagai Komisaris Bio Farma pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan saat ini.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Komisaris Bio Farma adalah berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK–102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018.

Berdasarkan SK Nomor: SK Pengangkatan Nomor: KEP-02/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018 Tentang Pengangkatan sebagai Ketua Komite Audit menggantikan Paruli Lubis.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun pemegang saham.

IHSAN SETIADI LATIEF

DEWAN KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2018 adalah 46 tahun. Lahir di Bandung, 14 Juli 1972, Ihsan Setiadi Latief menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 1996. Kemudian mengambil Magister Program Studi Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran tahun 2004. Meraih gelar Doktor pada Program Pascasarjana S3 Unpad Buku Kajian Utama Ilmu Komunikasi dengan Predikat *Cum Laude* (2016).

Sejak jadi mahasiswa hingga saat ini aktif berorganisasi di antaranya di ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Perhimpunan Masyarakat Madani, Komunitas Konsultasi Komunikasi (Konklusi) dan Persatuan Islam. Berkarier di lingkungan perguruan tinggi di antaranya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAI Persis), Ketua III Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Islam (STKIP Persis) dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 dan kemudian menjabat sebagai Ketua STKIP Persis sampai sekarang. Selain itu juga menjadi dosen luar biasa Komunikasi dan Konseling di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani (Stikes Unjani) Bandung, dosen luar biasa Komunikasi dan Negoisasi di Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta dan Universitas Bung Karno. Mendirikan Yayasan Cita Insani Mandiri yang bergerak dalam dakwah, sosial dan kemasyarakatan. Diangkat sebagai Komisaris Bio Farma sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan 20 April 2018.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Komisaris adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-235/ MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK–102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018, Ihsan Setiadi Latief diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Bio Farma serta secara otomatis berhenti sebagai Wakil Ketua Komite Audit dan digantikan oleh Yuni Suryanto.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang Saham.

YUNI SURYANTO

ANGGOTA KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Usia per 31 Desember 2018 adalah 54 tahun. Lahir di Yogyakarta, 3 Juni 1964. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari UGM tahun 1990. Meraih gelar *Master of Business Administration Oklahoma City University,* USA tahun 1993.

Mengawali karier sebagai Pj. Kasi Analisis Perencanaan Perusahaan Industri Kimia Departemen Keuangan tahun 1997, menjabat sebagai Pj. Kasi Industri Kimia & Semen I Departemen Keuangan Tahun 1998. Menjabat sebagai Pj. Kasi Semen Departemen Keuangan tahun 1999, menjabat sebagai PPT Kasubdit Perusahaan Jasa Konsultan Kementerian BUMN tahun 2000, menjabat sebagai PPT Kasubdit Perkebunan II Kementerian BUMN tahun 2001. Menjabat sebagai Pj. Kabid Usaha Perkebunan II Kementerian BUMN di 2002, Menjabat Kabid Usaha Perkebunan 1A Kementerian BUMN Tahun 2006. Menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II Kementerian BUMN tahun 2013 serta pernah menjabat sebagai Komisaris PT. Jasa Raharja (Persero) tahun 2013. Diangkat sebagai Komisaris Bio Farma pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan saat ini.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Komisaris Utama PT Bio Farma (Persero) berdasarkan SK Nomor: SK–102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018.

Berdasarkan SK Nomor: SK Pengangkatan Nomor: KEP-02/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018 Tentang Pengangkatan sebagai Wakil Ketua Komite Audit menggantikan Ihsan S. Latief.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun pemegang saham.

HERIDADI
DEWAN KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Usia per 31 Desember 2018 adalah 66 tahun. Lahir di Tanjung Karang tanggal 24 Juli 1952. Heridadi memperoleh gelar Dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1977), lalu mengikuti Sekolah Perwira Wajib Militer ABRI. Dinas pertama sebagai Perwira TNI AD di Kesdam II/Sriwijaya dengan pangkat Letnan Satu CKM sebagai Dokter Pusat Latihan Tempur (Puslatpur). Pada tahun 1985-1987 mengikuti pendidikan S-2 Perencanaan dan Manajemen Kesehatan pada Fakultas Pascasarjana UI dan setelah selesai ditempatkan di Direktorat Kesehatan TNI AD. Pada tahun 2013 menyelesaikan Program Pascasarjana S-3 di Fakultas Kedokteran UGM di bidang *Biodefense*.

Tahun 1990-1992 menjadi Wakil Komandan Batalyon Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrad dan pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Seskoad. Selanjutnya mendapat jabatan sebagai Komandan Batalion Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrad. Tahun 1994-1995 menjadi Komandan Kontingen Garuda XIV/A untuk tugas PBB di Bosnia Herzegovina. Jabatan militer selanjutnya sebagai Kepala Kesehatan Kostrad, Kepala Kesehatan Kodam Jaya dan Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan TNI AD. Tahun 2004 menjadi Direktur Kesehatan TNI AD sampai dengan tahun 2008. Tahun 2007 mengikuti pendidikan Lemhannas dan tahun 2008 menjadi Kepala Pusat Kesehatan TNI sampai tahun 2010. Saat ini masih aktif sebagai Dosen S2 di Universitas Pertahanan, Wakil Ketua Bidang Sosial PPAD Jakarta, Ketua Umum Purna Warga Kesehatan TNI AD, Ketua Ikatan Alumni FKUI 1977. Diangkat sebagai Komisaris Bio Farma sejak tanggal 23 Januari 2014dan mengakhiri masa jabatannya tanggal 08 Januari 2019.

PENGHARGAAN/PRESTASI LAIN-LAIN

Satya Lencana Kesetiaan 8, 16 dan 24 tahun. Satya Lencana Dwidya Sista. Satya Lencana PBB, Satya Lencana Canti Dharma, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Komisaris adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014. Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pengukuhan Heridadi sebagai dari Dewan Komisaris menjadi Komisaris Independen. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: SK-13/MBU/01/2019 tanggal 8 Januari 2019, Heridadi diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Komisaris Independen Bio Farma serta secara otomatis berhenti sebagai Ketua Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dan digantikan oleh Elen Setiadi.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 20142014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

ELEN SETIADI

ANGGOTA KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Usia per 31 Desember 2018 adalah 47 tahun. Lahir di Cerenti, tanggal 1 September 1971, Elen Setiadi menyelesaikan meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (Undand) – Sumatera Barat tahun 1995. Meraih gelar Magister Jurusan Regional di Universitas Indonesia tahun 2006. Pernah mengikuti pendidikan dan kursus singkat di luar negeri di antaranya *IMF Regional Training Institute Singapore* tahun 2006.

Mengawali karier sebagai Penata Muda di Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1996. Pernah menjabat berbagai posisi penting di antaranya sebagai Kepala Subseksi Teknis dan Fungsional tahun 2000, Kepala Subbagian Perundang-undangan tahun 2002, Kepala Subbagian Pelaksanaan Persidangan tahun 2002-2005, Kepala Bagian Persidangan Kemenko Perekonomian tahun 2006, Kepala Bagian Hukum Kemenko Perekonomian tahun 2007, Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian tahun 2013-2016, Wakil Sekretaris Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tahun 2015, Wakil Sekretaris Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur tahun 2015 dan Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kemenko Perekonomian tahun 2016 Diangkat sebagai Komisaris Independen Bio Farma pada tangga l8 Januari 2019.

PENGHARGAAN/PRESTASI LAIN-LAIN

Sebagai bentuk pengabdian sebagai Pegawai Negeri Sipil dianugerahkan penghargaan: Satya Lencana Karya Satya 10 tahun (2008).

Dasar hukum pengangkatan sebagai Komisaris Independen adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-13/MBU/01/2019 Tanggal 8 Januari 2019.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : KEP-05/DK/BF/02/2019 Tentang Susunan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero) tanggal 18 Februari 2019.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun pemegang saham. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

H.M. SUBUH

DEWAN KOMISARIS

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Usia per 31 Desember 2018 adalah 56 tahun. Lahir di Pontianak, tanggal 19 Januari 1962, Mohamad Subuh menyelesaikan pendidikan Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia Jakarta (1988). Kemudian menyelesaikan S2, *School of Public Administration, Qualification Master Public Policy (MPPM) di University of Southern California* (1999). Pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Syarief Mohamad Alkadrie Kalimantan Barat (2004-2009), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (2009-2010), Direktur Pengendalian Penyakit Menular (2010-2013), Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (2013-2014). Pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI (2014-2016). Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI. Diangkat sebagai Komisaris Bio Farma sejak 22 Juni 2015 sampai dengan saat ini.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Komisaris adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-02/DK/BF/VII/2015, Tanggal 09 Juli 20152014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang saham.

IDENTITAS DAN RIWAYAT SINGKAT ANGGOTA DIREKSI

M. RAHMAN ROESTAN
DIREKTUR UTAMA

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2018 adalah 48 tahun. Lahir di Bandung 5 Agustus 1970, M. Rahman Roestan meraih gelar Sarjana Farmasi dan Apoteker dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1996 Meraih gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari ITB tahun 2004 dan Program Doktoral *Management Strategic* dari Universitas Padjadjaran tahun 2016.

Mengawali karier di Bio Farma tahun 1998. Pernah menjabat berbagai posisi struktural dan strategis di antaranya sebagai Kepala Bagian Formulasi tahun dan Kepala Bagian Pengemasan tahun 2001-2004 Kepala Bagian *Quality Assurance System* tahun 2004-2006 Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Produksi tahun 2006-2008 dan dipercaya sebagai *Corporate Secretary* tahun 2008–10 Juli 2017. Diangkat sebagai Direktur Pemasaran Bio Farma tanggal 10 Juli 2017-23 Januari 2018 dan diangkat menjadi Direktur Utama Bio Farma menggantikan Plt. Juliman tanggal 23 Januari 2018.

Menjabat sebagai Management Representative untuk Integrated Management System ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sejak tahun 2009. Aktif di Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia, Komite Hubungan Pemerintah dan Kelembagaan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Aktif di Yayasan *Indonesian Quality Award* (IQAF) sebagai *Examiner* untuk *Malcolm Baldridge Criteria for Excellence* tahun 2010-2011. Aktif sebagai narasumber dan *trainer* di berbagai forum baik dalam maupun luar negeri, serta aktif menulis beberapa jurnal internasional.

Aktif juga di beberapa organisasi baik tingkat nasional maupun Internasional, di antaranya: *Chairman of OIC Workshop on Vaccine Management* tahun 2016, *Vice Chairman OIC Vaccine Manufacturer Group* 2014–sekarang, sebagai delegasi RI dalam pertemuan Internasional bidang Kesehatan di *World Health Assembly World Health Organization* (WHO) di Jenewa dan di Forum *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) tahun 2012–2017, sebagai Delegasi RI untuk OIC SCH *(Steering Committee)* tahun 2013–2016. *Web Content Manager*, SRVP IDB sejak tahun 2012 2010–2011.

Dasar hukum Pengangkatan sebagai Direktur Pemasaran adalah berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 tanggal 10 Juli 2017. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-27/MBU/01/2018 tanggal 23 Januari 2018, M. Rahman Roestan diangkat dari Direktur Pemasaran menjadi Direktur Utama menggantikan Plt Juliman dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham.

JULIMAN
DIREKTUR PRODUKSI

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2018 adalah 56 tahun. Lahir di Pangkalpinang, 23 September 1962, Juliman meraih gelar Sarjana Farmasi dari Institut Teknologi Bandung tahun 1988 dan Apoteker dari Institut Teknologi Bandung tahun 1989. Meraih gelar Magister Bidang Manajemen Operasi dari Universitas Padjajaran tahun 2005.

Mengawali kariernya, Juliman pernah mengabdi di beberapa Industri Farmasi Nasional dan mulai bergabung dengan Bio Farma tahun 1994 Pernah menjabat berbagai posisi struktural dan strategis di antaranya sebagai Kepala Bagian Penunjang Vaksin Polio dan Campak tahun (1994 - 1997) Kepala Bagian Produksi Vaksin Campak tahun 1998 Kepala Divisi Teknik dan Pemeliharaan tahun 2002 - 2003 Kepala Divisi Pemasaran Ekspor tahun (2003 - 2009) dan Kepala Divisi Logistik pada tahun (2012 - 2013). Diangkat sebagai Direktur Produksi Bio Farma tanggal 12 April 2013, Plt Direktur Utama Bio Farma merangkap Direktur Produksi Bio Farma tanggal 10 Juli 2017-23 Januari 2018 menggantikan Iskandar yang sudah berakhir masa jabatannya. Juliman kemudian diangkat kembali sebagai Direktur Produksi Bio Farma pada tanggal 20 April 2018.

Selama menjabat banyak memberikan ide-ide yang kreatif serta penuh dengan inovatif di jajaran Direktorat Produksi. Pengalaman Juliman di bidang produksi vaksin dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) membuat beliau kerapkali menjadi narasumber di acara seminar, wawancara dan audiensi. Juliman juga sering terlibat di berbagai kegiatan tingkat national maupun Internasional, antara lain pernah aktif sebagai *Trainer* program WHO *Global Training Network* (GTN) *on Quality Assurance of Live Attenuated Poliomyelitis and Measles Vaccines,* sebagai bagian dari delegasi Indonesia untuk mengikuti Forum *World Health Assembly* yang diselenggarakan oleh *World Health Organization* (WHO), aktif mengikuti *Annual General Meeting* yang diadakan oleh DCVMN (*Developing Countries Vaccines Manufacturer Network*), yaitu organisasi kerja sama para produsen vaksin dari negara-negara berkembang. Saat ini juga menjabat sebagai Board Alternate *GAVI (Global Alliance for Vaccine Immunisation)* mewakili Organisasi DCVMN untuk hadir dalam *GAVI Board Meeting* yang rutin diadakan tiga kali dalam setahun tahun untuk membahas dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang diambil *GAVI Board* terkait program Imunisasi Global.

Pernah mengikuti berbagai pelatihan dalam dan luar negeri, di antaranya tentang manajemen, *maintenance*, validasi, dan berbagai topik lainnya terkait GMP (Good Manufacturing Practices)., *Training Course on Biological Products Technology* (1990-1991) dan *Individual Training Course on Measles Final Product Processing* (1993), keduanya diselenggarakan oleh JICA (Japan International Cooperation Agency) bekerja sama dengan Biken Institute-Japan, serta *Training on Lyohilization of Hib Vaccine Trial* (2002) yang diselenggarakan oleh *National Institute for Public Health and the Environment* (RIVM) di Belanda. Aktif juga mengikuti berbagai *meeting* yang diadakan oleh UNICEF (*United Nations Children's Fund*) sepanjang tahun 2003-2012.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Direktur Produksi adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013. Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 tentang Plt Direktur Utama merangkap Direktur Produksi dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK–101/MBU/04/2018 tentang pengangkatan kembali menjadi Direkur Produksi Bio Farma.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

PRAMUSTI INDRASCARYO
DIREKTUR KEUANGAN

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2018 adalah 53 tahun. Lahir di Semarang, 23 Agustus 1965, Pramusti Indrascaryo menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro Semarang tahun 1989 dan memperoleh gelar Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1998.

Lama berkecimpung di Industri Perbankan. Pernah menjadi Kepala Cabang di Bank Ekspor Impor Indonesia sebelum penggabungan empat Bank Pemerintah menjadi Bank Mandiri pada tahun 1999. Pernah menempati berbagai posisi penting di Bank Mandiri seperti Senior Manager pada *Corporate Risk Management dan Corporate Banking* (2003), *Assistant Vice President* (2009) dan *Vice President* (2012). Diangkat sebagai Direktur Keuangan Bio Farma sejak tanggal 12 April 2013, mengakhiri masa jabatannya tanggal 20 April 2018 dan digantikan oleh Pardiman.

Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur Keuangan adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK–101/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018, Pramusti Indrascaryo diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Keuangan karena berakhirnya masa jabatan dan digantikan oleh Pardiman.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham.

PARDIMAN

DIREKTUR KEUANGAN

Warga negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2018 adalah 58 tahun. Lahir di Boyolali 14 Februari 1960, Pardiman meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Diponegoro, Semarang Jawa Tengah tahun 1987. Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro, Semarang Jawa Tengah tahun 2002.

Memulai karier sebagai siswa calon staf pemimpin di Pusdiklat BRI Pusat tahun 1987, *Trainee* Kantor Cabang BRI Ungaran Kanwil Semarang tahun 1988, Job Trainee Klasikal BRI Jakarta tahun 1988, *Account Officer* BRI Jakarta tahun 1989–1991, Ma*rketing & Lending Officer* BRI Jakarta tahun 1991 - 1992. Pernah menjabat sebagai Pemimpin BRI Cabang Kolaka Sultra tahun 1993-1996, Pemimpin BRI Cabang Palopo Sulsesl tahun 1996–1999, Pemimpin BRI Cabang Tulung Agung Jatim tahun 1999-2001, Pemimpin BRI Cabang Gresik Jatim tahun 2001-2002, Pemimpin BRI Cabang Metikayu Medan tahun 2002-2004, Pemimpin BRI Cabang Kaliasin Surabaya tahun 2004-2006. Pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Wilayah BRI Surabaya tahun 2006-2007, Wakil Pemimpin Wilayah BRI Jakarta tahun 2008-2009. Pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Khusus di Kantor Pusat BRI Jakarta tahun 2009-2011, Pemimpin Wilayah BRI Palembang tahun 2011–2012, Pemimpin Wilayah BRI Bandung tahun 2012-2015. Pernah menjabat sebagai Direktur *Consumer Micro & Funding* PT BRI Syariah tahun 2015, Direktur Keuangan PT Petrokimia Gresik tahun 2016-2017, Direktur Keuangan Perum Bulog tahun 2017 dan diangkat sebagai Direktur Keuangan Bio Farma tanggal 20 April 2018.

Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur Keuangan adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK–101/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham.

DISRIL REVOLIN PUTRA

DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) & UMUM

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2018 adalah 53 tahun. Lahir di Tanjung Pinang, 18 Desember 1965, Disril Revolin Putra, meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Jakarta tahun 1989 dan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1998.

Mengawali kariernya di Bank Negara Indonesia (BNI). Pernah menjabat berbagai posisi struktural dan strategis di antaranya sebagai *Legal officer* Divisi Sumber Daya Manusia tahun 1991-1995, Manager Pengelolaan Kebijakan Divisi Sumber Daya Manusia tahun 1995-2000. Pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin di beberapa Kantor Cabang BNI yaitu Wakil Pemimpin Cabang Wonogiri tahun 2000-2002, Wakil Pemimpin Cabang Utama Tangerang tahun 2002-2004. Pernah menjabat sebagai Pemimpin Cabang Jembatan Ampera Palembang tahun 2004-2005 dan Pemimpin Cabang Utama Tebet Utara Jakarta tahun 2005-2006. Pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Divisi Hukum tahun 2006-2008, Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia tahun 2008-2010, Pemimpin Divisi *Organizational Learning* tahun 2010-2011, Pimpinan Divisi Hukum tahun 2011–2015, Pemimpin Wilayah Jakarta Kota tahun 2015-2016 dan sebagai SEVP Jaringan dan Layanan tahun 2016. Pernah menjabat sebagai fungsional dibeberapa Komite Pengawasan antara lain Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2008-2010, Dewan Pengawas Dana Pensiun BNI tahun 2008-2010, Ketua Komite Sanksi Administratif tahun 2008-2010, Ketua Komite Evaluasi Jabatan dan *Grading* tahun 2008-2010 dan Ketua Komite Mutasi dan Suksesi Pimpinan tahun Pernah menjabat sebagai Direktur SDM dan Hukum di PT Pelindo IIsejak 16 Mei 2016-14 Juli 2017 dan diangkat sebagai Direktur SDM & Umum Bio Farma tanggal 14 Juli 2017 menggantikan Andjang Kusumah yang sudah berakhir masa jabatannya.

Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan penugasan di antaranya Simposium Internasional anti Korupsi tahun 2007, Sespi Bank Angkatan 45 tahun 2007, Leadership Development Program tahun 2011, Credit for non-Credit tahun 2011 dan Sertifikasi Manajemen Risiko tingkat IV tahun 2011.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Direktur SDM & Umum adalah Keputusan Menteri BUMN SK-131/MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham.

SRI HARSI TETEKI
DIREKTUR PEMASARAN

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2018 adalah 54 tahun. Lahir di Yogyakarta 28 Juni 1964, Sri Harsi Teteki adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 1989. Meraih gelar Magister Kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2003 dan Ajun Ahli Asuransi Kesehatan (AAAK) pada tahun 2007.

Mengawali kariernya di PT Telkom. Selama 24 mengabdi pernah menjabat berbagai posisi struktural dan strategis di antaranya Direktur Marketing dan Operasional TelkoMedika pada tahun 2013 - 2016, dan Direktur Utama Direktur Utama TelkoMedika tahun 2017 - 2018.

Pernah menjabat sebagai Direktur TelkoMedika tahun 2013 dan Direktur Utama TelkoMedika tahun 2016 sampai Januari 2018. Diangkat sebagai Direktur Pemasaran Bio Farma tanggal 23 Januari 2017 menggantikan M. Rahman Roestan yang diangkat menjadi Direktur Utama Bio Farma.

Pernah meraih penghargaan sebagai *"Best Manager"* dari PT TELKOM tahun 2007. Aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar nasional, di antaranya membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan aktif dalam Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Undip atau Ika Medica, PAMJAKI dan IDI.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Direktur Pemasaran adalah Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-27/MBU/01/2018 tanggal 23 Januari 2018, tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham.

SUGENG RAHARSO
DIREKTUR PERENCANAAN & PENGEMBANGAN

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2018 adalah 59 tahun. Lahir di Surabaya, 20 Desember 1959, Sugeng Raharso menyelesaikan Program Sarjana Kedokteran Hewan pada tahun 1983 dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan tahun 1984 dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Memperoleh gelar Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Operasi dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004.

Mengawali karier di Bio Farma sejak lulus kuliah dan pernah menjabat berbagai posisi struktural dan strategis diantaranya sebagai Kepala Bagian Pemeliharaan Hewan tahun 1985-1989, *Staff* Direksi tahun 2002-2007, Kepala Satuan Pengawasan Intern tahun 2007-2010, Kepala Divisi Hewan Laboratorium tahun 2010-2012. Diangkat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bio Farma tanggal 12 April 2013 dan berakhirnya masa jabatannya tanggal 20 April 2018 digantikan oleh Adriansjah Azhari

Pernah mengikuti berbagai pelatihan/*workshop* di antaranya mengenai *Biosimilar* dan *Vaccine Technology* di Finlai. Memperoleh *Certified Professional Internal Auditor* (CPIA) dari *Center for Development of Accountancy and Finance–The Association of Internal Auditor* pada saat menjabat Kepala Satuan Pengawasan Intern.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Direktur Perencanaan & Pengembangan adalah Keputusan Menteri BUMN: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK–101/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018, Sugeng Raharso diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan karena berakhirnya masa jabatan dan digantikan oleh Adriansjah Azhari.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham.

ADRIANSJAH AZHARI
DIREKTUR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2018 adalah 55 tahun. Lahir di Bloomington, Indiana, Amerika Serikat 5 September 1963, Adriansjah Azhari meraih gelar Sarjana Farmasi dari Institut Teknologi Bandung tahun 1988 dan Apoteker dari Institut Teknologi Bandung tahun 1989 Meraih gerlar Master Manajemen Operasional dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2005.

Mengawali karier di *Clinical Research Monitor*, PT Merck Indonesia (Astra Division) Jakarta tahun 1989. Bergabung dengan Bio Farma tahun 1989. Pernah menjabat berbagai posisi struktural dan strategis di antaranya *Staff* Divisi Vaksin Bakteri tahun 1989-1993, Kepala Bagian Vaksin Tetanus tahun 1993-1998, Kepala Bagian Teknologi Terapan tahun 2001, Kepala Divisi Produksi Farmasi tahun 2002-2004, Kepala Divisi Vaksin Bakteri tahun 2004-2007, Kepala *Quality Assurance*, Apoteker Penanggung Jawab Mutu tahun 2007-2012, Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan tahun 2012-2017, Kepala Divisi Perencanaan dan Strategi Bisnis tahun 2017-2018. Diangkat menjadi Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bio Farma tanggal 20 April 2018 menggantikan Sugeng Raharso.

Sering terlibat di berbagai kegiatan nasional dan internasional seperti *Developing Countries Vaccine Manufacturers' Network* (DCVMN), World Health Organisation (WHO), *International Society for Pharmaceutical Engineering* (ISPE), Koordinator *Project* dengan Bill and Melinda Gates Foundation tahun 2014–sekarang, Anggota Tim CPOB Nasional di bawah BPOM tahun 2011–2013, masih aktif membantu BPOM dalam penyusunan revisi berbagai pedoman termasuk Farmakope Indonesia, Anggota Ikatan Apoteker Indonesia.

Aktif sebagai narasumber pada berbagai kegiatan dalam dan luar negeri antara lain Annual General Meeting of Developing Countries Vaccine Manufacturers' Network (DCVMN), Rio de Janeiro, Brazil; World Health Organisation (WHO) *QC course on Hib vaccine*, NVI, The Netherlands; ISPE Indonesian *Affiliate annual conference*, Jakarta; *National Vaccine Research* Forum, Jakarta; *Rotavirus symposium*, Bangkok, Thailand; Proteomic *Avian Flu Vaccine* Seminar, *Avian Influenza Research Center* (AIRC), Airlangga Univ, Surabaya; WHO *briefing for manufacturers* WHO *prequalification programme*" *Beijing, China; Global Health Regulatory Meeting on PDPs organized by PATH*, Hanoi, Vietnam dan lain-lain.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK–101/MBU/04/2018 menggantikan Sugeng Raharso yang berakhirnya masa jabatannya.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham.

SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2018 Bio Farma melakukan inovasi pengelolaan *Human Capital* dengan mengoptimalkan *Sistem Online Recruitment*, Remunerasi, Sistem Pelatihan Karyawan dan *Knowledge Sharing*.

Bagi Bio Farma, pengembangan SDM sangatlah penting karena karyawan merupakan salah satu aset penting guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Kegiatan pengembangan SDM dilakukan dengan tidak sembarangan dan memerlukan koordinasi yang baik pada setiap unit kerja yang ada di Perusahaan dengan Divisi SDM.

Hal ini sangat penting dilakukan karena setiap unit kerja pastinya akan lebih mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan mereka untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknis dari karyawan yang bekerja di unit mereka. Sedangkan Divisi SDM memiliki peran untuk mendukung dalam melaksanakan aktifitas dari pengembangan SDM guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknis pada setiap unit kerja tersebut.

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama antar gender, untuk masing-masing level dan lainnya dalam program pembinaan, pengembangan dan peningkatan jenjang karir karyawan. Peningkatan kompetensi karyawan dilakukan melalui pengembangan solusi *learning & development*. Di samping itu Perusahaan juga melakukan transformasi pola pengelolaan SDM berbasis Teknologi Informasi. Tantangan kedepan bagi Bio Farma adalah mengubah dan mendorong SDM dari kondisi *comfort zone* agar siap untuk bertransformasi dalam menghadapi persaingan di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). dan Revolusi Industri 4.0 yang mengusung digital ekonomi.

Pada tahun 2018 pengembangan memang harus selaras dengan strategi pengembangan Bio Farma terus melakukan inovasi pengelolaan *Human Capital* sejalan dengan visi Perusahaan untuk menjadi Perusahaan *Life Science* kelas dunia yang berdaya saing global, maka strategi pengelolaan sumber daya manusia didasarkan pada pembangunan budaya kerja melalui implementasi nilai-nilai perusahaan, menyempurnakan struktur organisasi, penataan SDM, meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan serta penyempurnaan tata kelola perusahaan. Bio Farma telah meninjau ulang rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan menetapkan target *Human Capital Excellence* tahun 2018 yaitu Karyawan Bio Farma yang memenuhi kriteria BEST (*Beyond Expectation, Environment Awareness* dan *Synergized Partnership*).

Bio Farma menerapkan pengembangan karyawan dari dua sisi, yaitu diganti Bio Farma menerapkan Pengembangan karyawan dari 3 sisi yaitu meningkatkan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan secara personal/individu, kebutuhuan divisional dan kebutuhan secara *company wide*.

PEDOMAN TENTANG PENERAPAN SDM

1. UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003) No. 39, Tambahan Lembaran Negara No. 4279)
2. UU RI No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (Lembaran Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara No. 4297)
3. PP No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 117, Tambahan Lembaran Negara No. 4556)
4. UU RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4756)
5. PP No. 1 Tahun 1997 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Bio Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No.4)

6. PP No. 41 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan(Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) pada Menteri Negara BUMN (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 82, Tambahan Lembaran Negara No. 4305).
7. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2011.
8. Keputusan Presiden No. 59/P Tahun 2011.
9. Surat Wakil Ketua DPR-RI No. PW/113/DPR-RI/XI/2013 tanggal 6 November 2013.
10. Surat Edaran No. SE 06/MBU/2013 Tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN.
11. Surat Edaran No. SE 02/MBU/2014 Tentang Kebijakan Penyerahan Pelaksanaan Kepada Perusahaan Lain *(Outsourcing)*.
12. Surat Edaran No. SE 01/MBU/2014 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TENTANG SDM

1. Anggaran Dasar Perusahaan
2. Surat Keputusan Direksi No. 04276/DIR/XI/2017 Tanggal 17 November 2017 tentang Bagan Organisasi PT Bio Farma (Persero) diperbaharui dengan Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: 00117/DIR/I/2018, tanggal 8 Januari 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor : 04276/DIR/XI/2017 Tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero).
3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
4. Keputusan Direksi No. 00118/DIR/I/2018 tentang Sistem Manajemen Karir.
5. Peraturan Direksi Nomor:PE-06905/DIR/XII/2008
6. Peraturan Direksi Nomor: PER-06231/DIR/XI/2018
7. Peraturran Direksi Nomor: PER-06421/DIR/XII/2018
8. Kepurusan/Peraturan Direksi lainnya terkait dengan dumber daya manusia
9. Prosedur/ketentuan internal lainnya terkait dengan operasional sistem manajemen sumber daya manusia

MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM YANG DITERAPKAN BIO FARMA

Karyawan bagi Bio Farma merupakan salah satu faktor penting dalam proses produksi Perusahaan, sehingga masalah SDM memegang peranan penting dalam kesuksesan Bio Farma. Oleh karena itu, Bio Farma membuat perencanaan masalah SDM sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan kebutuhan karyawan itu sendiri.

1. PERENCANAAN

Proses penyusunan rencana SDM secara sistematis dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan SDM yang berkesinambungan.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN SDM DISUSUN ATAS DASAR INFORMASI KETENAGAKERJAAN MELIPUTI:

a. Penduduk dan karyawan
b. Kesempatan kerja
c. Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja
d. Produktivitas karyawan
e. Hubungan industrial
f. Kondisi lingkungan kerja
g. Remunerasi dan kesejahteraan karyawan
h. Jaminan sosial tenaga kerja.

Perencanaan SDM diperlukan untuk mendapatkan calon karyawan yang memenuhi kualifikasi perusahaan. Perencanaan SDM juga dapat membantu untuk meningkatkan kompetensi, pengembangan karir karyawan Bio Farma yang sudah atau akan menduduki berbagai posisi jabatan dan pekerjaan.

Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Perencanaan SDM

a. Inventarisasi persediaan SDM
b. Memprediksi kebutuhan SDM
c. Menyusun rencana SDM
d. Monitor serta evaluasi SDM

Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Perencanaan:

a. **Faktor Internal** : rencana strategis Perusahaan, anggaran, estimasi produksi, perluasan usaha dan tugas-tugas pekerjaan Perusahaan.
b. **Faktor Eksternal** : situasi ekonomi, sosial budaya, politik, Peraturan Perundang-Undangan, teknologi dan pesaing.

2. REKRUTMEN DAN SELEKSI

Rekrutmen dan seleksi merupakan upaya Perusahaan untuk mencari, menemukan dan menarik orang untuk dijadikan karyawan. Proses rekrutmen dan seleksi ini penting untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan atau yang diinginkan Perusahaan dengan apa yang didapat secara tepat.

Perusahaan melaksanakan rekrutmen berdasarkan pada manajemen formasi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) seiring dengan perkembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan. Bio Farma membuka kesempatan yang setara bagi para pelamar kerja, baik pria atau wanita.

Secara bertahap, mulai tahun 2014 Bio Farma telah membuka kesempatan kerja bagi penyandang difabel sesuai dengan Surat Edaran No. SE 01/MBU/2014 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan rekrutmen calon karyawan, Bio Farma memiliki beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan rekrutmen berbasis pada formasi yang tersedia pada unit kerja sesuai dengan hasil analisa organisasi dan *job position;*
b. Menetapkan kebijakan sistem evaluasi berjenjang untuk penetapan sebagai Karyawan;
c. Menetapkan *staffing* indeks sesuai dengan pertumbuhan bisnis perusahaan;
d. Melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan seleksi Karyawan; dan
e. Melakukan evaluasi berjenjang untuk penetapan sebagai Karyawan.

Proses rekrutmen bersifat terbuka tanpa diskriminasi bagi setiap orang selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk menjaring dan memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya, proses rekrutmen diumumkan secara terbuka melalui berbagai media cetak nasional dan lokal, media elektronik (website Perusahaan, media sosial Facebook dan Twitter, portal BUMN, radio) serta melalui acara *job fair* serta *roadshow* ke beberapa perguruan tinggi.

Setelah calon tersedia, langkah berikutnya adalah penyeleksian. Jenis tes yang diberikan sesuai dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan.

Prosedur Rekrutmen Karyawan Baru di Bio Farma

a. Lowongan pekerjaan dipublikasikan di media massa
b. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi/ lembaga pendidikan
c. Pendaftaran kandidat dilakukan melalui website: www.biofarma.co.id pada menu tautan karier.
d. Pemilahan kandidat terkait persyaratan akademis dilakukan oleh sistem secara otomatis.
e. Verifikasi dan wawancara
f. Seleksi Tes Psikologi berupa psikotes dilakukan oleh pihak ketiga untuk menjaga independensi.
g. Tes kesehatan yang komprehensif menjadi penentu akhir kelulusan kandidat.

3. PENGEMBANGAN SDM BIO FARMA

Pengembangan SDM merupakan proses penyiapan karyawan-karyawan untuk memikul tanggungjawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam Perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pekerjaan. Sedangkan pelatihan membantu meningkatkan pengetahuan praktis dan penerapannya dalam tugas.

ROADMAP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Pengelolaan SDM di Bio Farma mengacu pada konsep manajemen *Human Capital* (HC), dimana karyawan sebagai mitra Perusahaan didorong untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi individu agar mampu mencapai kinerja yang optimal. Bio Farma secara sistematis melakukan berbagai inisiatif untuk menyongsong era *Bioeconomy* atau *Life Science Industry* di tahun 2030 era dimana bioteknologi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dunia. Dari sisi *Human Capital*, Perusahaan menyusun *Roadmap* Pengembangan *Human Capital* menuju *Life science Industry* dengan tahapan sebagai berikut.

HUMAN CAPITAL SYSTEMS FIT IN INFRASTRUCTURE (2017-2018)

Bio Farma merancang, mengembangkan dan menyelaraskan seluruh sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terintegrasi mulai dari sistem organisasi, pengelolaan pekerjaan dan posisi, pengelolaan kompetensi, pengelolaan kinerja, pengelolaan *talent,* pengelolaan *reward and punishment* pada seluruh elemen proses bisnis yang meliputi aspek finansial, *good corporate governance*, internal proses dan pembelajaran serta pengembangan yang didukung oleh teknologi informasi serta hubungan industrial dengan karyawan yang baik serta memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

HUMAN CAPITAL SYSTEMS AND OPERATION IMPLEMENTATION (2018-2019)

Bio Farma mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi tersebut dalam seluruh kegiatan pengelolaan SDM.

HUMAN CAPITAL SYSTEMS AND OPERATION SUSTAINABILITY (2019-2020)

Bio Farma memastikan seluruh sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi berjalan secara konsisten, *reliable* dan dapat digunakan sebagai dasar/basis untuk

pengembangan karyawan yang sesuai dengan bisnis perusahaan.

HUMAN CAPITAL PROFESSIONAL (2020-2021)

Bio Farma memastikan seluruh sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi berjalan secara konsisten, valid dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk seluruh kegiatan pengelolaan SDM.

EXCELLENCE HUMAN CAPITAL WITHIN SUPPORT TO BUSINESS (2021)

Bio Farma memastikan seluruh sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi dimana berperan sebagai strategic partner perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis.

STRATEGI MANAJEMEN *HUMAN CAPITAL*

Untuk mencapai sasaran pengembangan Human Capital sesuai Roadmap yang telah disusun, maka Perusahaan menetapkan Strategi Pengembangan SDM (*Human Capital*) Bio Farma sebagai berikut:

1. Mendudukan kembali fungsi-fungsi organisasi yang berada di Bio Farma.
2. Mendudukan kembali pekerjaan dan posisi sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan.
3. Menerapkan sistem pengelolaan dan pengembangan kompetensi karyawan baik secara technical, soft dan managerial.
4. Menerapkan penilaian kinerja karyawan berbasis KPI yang terintegrasi mulai dari KPI korporasi hingga individual.
5. Menerapkan sistem pengelolaan dan pengembangan karir karyawan dengan menggunakan pendekatan *talent management systems* yang berbasis pada kinerja dan kompetensi.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* yang berbasis pada kompetensi dan kinerja.
7. Menerapkan program *Work Life Balance* dalam berbagai aktivitas.
8. Membangun budaya organisasi yang berorientasi pada pencapaian hasil dan kinerja.
9. Menyiapkan aplikasi *Human Capital Information System (HCIS)* berbasis teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dengan ERP.
10. Menyederhanakan seluruh sistem dan kebijakan pengelolaan SDM.

TUJUAN PENGEMBANGAN SDM

Meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga terlaksananya tugas-tugas secara efisien, efektif dan produktif.

SASARAN PENGEMBANGAN SDM

Meningkatkan produktivitas, mutu kerja, moral kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, dan kualitas pribadi karyawan.

PELATIHAN DAN PENDIDIKAN

Perusahaan merancang program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas kinerja dan meningkatkan kompetensi. Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang setara dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan potensi, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

Perusahaan menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan yang dilaksanakan secara *in-house* maupun di lembaga pendidikan/pelatihan luar.

JENIS PELATIHAN YANG DITERAPKAN OLEH BIO FARMA

1. Pelatihan Kompetensi
   Pelatihan yang dilaksanakan untuk memenuhi matriks kompetensi yang telah ditetapkan untuk masing-masing Jabatan (*Role*).
2. Keterampilan Teknis/Fungsional
   Pelatihan yang dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi teknis (*hard competency*) yang telah ditetapkan untuk masing-masing *Job Position*.

3. Sertifikasi Keahlian
   Pelatihan sertifikasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan regulasi pemerintah (Kemenakertrans) atau regulator internasional untuk suatu posisi atau jabatan tertentu di area kerja tertentu.
4. Pelatihan Manajerial
   Pelatihan tentang kepemimpinan dan manajerial yang ditujukan bagi posisi pimpinan di perusahaan.
5. *Knowledge Sharing*
   a. Salah satu bentuk aktivitas *knowledge management* yang mengelola setiap karyawan yang telah menyelesaikan suatu pelatihan dan atau berpengalaman untuk memberikan *knowledge sharing* kepada karyawan yang lainnya.
   b. Pendidikan Formal Pasca Sarjana.
      Program pendidikan pasca sarjana yang diberikan kepada karyawan yang potensial dan berprestasi untuk meningkatkan kompetensi akademis dengan pendekatan berbasis riset terapan. Selain itu, Bio Farma juga memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal Pasca Sarjana.

Sejalan dengan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi setiap karyawan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dengan mengutamakan berbagai program *in house* dan memberdayakan karyawan Bio Farma sebagai narasumber.

REALISASI KEGIATAN PELATIHAN, BEASISWA PENDIDIKAN FORMAL PASCA SARJANA DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT TAHUN 2018

1. REALISASI KEGIATAN PELATIHAN TAHUN 2018

Selama tahun 2018 Perusahaan menyelenggarakan program pelatihan yang terdiri dari 30 pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi saat ini dan rencana bisnis ke depan, dan 240 pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi Divisi yang terkait kebutuhan teknis.

TEMA PROGRAM PELATIHAN TAHUN 2018

a. *Update Good Manufacturing Practices (GMP),*
b. *Environment Health & Safety Behavior,*
c. *Character Building Training,*
d. *Emotional Spiritual Quotient,*
e. *Executive English Class with Native Speaker,*
f. *Public Speaking,*
g. *Career Transition Program,*
h. *Team work,*
i. *Communication Skill,*
j. *Creative Design Presentation,*
k. *Customer Service Orientation,*
l. *Financial Planning,*

m. *Problem Solving,*
n. *Organization Management,*
o. *Competency Management,*
p. *ISO 27001: 2013,*
q. *Tematik Public Training* Lainnya.

Jenis Pelatihan	Dasar Training	Jumlah Program Pelatihan			Patisipan *Training*		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
Organizational Competency	Kebutuhan Kompetensi Organisasi	18	28	30	1.524	1.998	1.802
Divisional Competency	Kebutuhan Kompetensi Divisi yang Bersifat Teknis/*Hard Skill*	365	253	240	1.253	494	412

Rata-rata total hari pelatihan terhadap total peserta adalah 5 hari/orang. Artinya rata-rata partisipasi pelatihan setiap karyawan Bio Farma adalah 5 hari dalam setahun atau setara dengan 2 kali pelatihan (asumsi rata-rata pelatihan berdurasi 2 hari)

PROGRAM PELATIHAN SELAMA TAHUN 2018

Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Topik Pelatihan	Tempat	Penyelenggara	Jumlah Peserta	Jabatan	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan
02-Feb-18	03-Feb-18	Track and trace system	*CD Farm Meeting Point*-Bandung	Rantau Bumi Bersaudara	21	Kasie	Fungsional	Proses pelacakan rantai pasok dari pengiriman produk ke konsumen
19-Feb-18	20-Feb-18	*Capability Assessment* untuk Kepala Divisi	Hotel Manhattan Jakarta	DDI	21	Kadiv	*Managerial*	Meningkatkan kemampuan 12 Kompetensi kepemimpinan standar KBUMN
26-Feb-18	26-Feb-18	*Awareness of environmental management system* ISO 14001:2015	Hotel Aston Tropicana Cihampelas	QAIC Indonesia	135	Kasie, Staf	Fungsional	*Awareness* Pengeloaan Lingkungan
07-Mar-18	08-Mar-18	Penyusunan modul kompetensi	Hotel Holiday Inn Pasteur	PT. Thames	10	Kabag	Fungsional	Penyusunan modul yang efektif bagi *internal trainer*
07-Mar-18	07-Mar-18	Pembentukan Badan Usaha Baru	Hotel Holiday Inn Pasteur	PT. RNI & PT. Bio Farma	45	Kabag	Fungsional	Meningkatkan pengetahuan tentang pembentukan anak perusahaan
02-Apr-18	03-Apr-18	*Strategic management* Tingkat Kepala Divisi	Hotel Holiday Inn Pasteur	Daya Dimensi Indonesia	34	Kadiv	*Managerial*	Meningkatkan cara berpikir dan manajemen strategis bagi senior leader
09-Apr-18	09-Apr-18	PROPER	Gedung Pakarti Jakarta	CV. General	21	Kabag	Fungsional	Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup sesuai standar KLH
14-Apr-18	14-Apr-18	*Financial Planning*	PT. Bio Farma	CV. Safir Senduk	36	Staf	Fungsional	Perencanaan keuangan yang baik di usia dini untuk masa depan
17-Apr-18	17-Apr-18	Project Vaksin IPV	Hotel Regata Setiabudhi	Bio Farma & Sanofi Perancis	50	Kabag, Kasie, Staf	Fungsional	Proses pembuatan vaksin IPV sebagai produk baru
25-Apr-18	27-Apr-18	*Training of trainer be a great trainer #1*	Hotel Grand Tjokro Cihampelas	ESQ Leadership	11	Kasie	Fungsional	Standardisasi kompetensi *internal trainer*
26-Apr-18	26-Apr-18	*Microsoft Project*	Hotel Grand Tjokro Cihampelas	CV. General	35	Staf	Fungsional	Pengelolaan *project* berbasis IT agar memudahkan proses *monitoring*nya
30-Apr-18	30-Apr-18	*Leadership coaching*	Hotel Grand Tjokro Cihampelas	Daya Dimensi Indonesia	28	Kadiv	Managerial	*Coaching* untuk *skill* kepemimpinan strategis
24-Jul-18	24-Jul-18	Lindung Nilai/ *Hedging*	PT. Bio Farma	BNI	20	Kabag	Fungsional	Meningkatkan pengetahuan tentang *hedging*

Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Topik Pelatihan	Tempat	Penyelenggara	Jumlah Peserta	Jabatan	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan
25-Jul-18	25-Jul-18	*Functional Inventory Cost*	Hotel Holiday Inn Pasteur	PT. Wahana Cipta Sinatria	70	Kasie, Staf	Fungsional	Peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan perusahaan
04-Sep-18	06-Sep-18	*Training of trainer be a great trainer #2*	Hotel Novotel Cihampelas	PT. ESQ	12	Kabag	Fungsional	Standarisasi kompetensi *internal trainer*
04-Sep-18	05-Sep-18	*Change agent of corporate culture*	Learnimng Center Bio Farma	PT. Indotristar Solusi Utama	25	Staf	*Managerial*	Meningkatkan kemampuan 12 Kompetensi kepemimpinan standar KBUMN
06-Sep-18	07-Sep-18	*Supplay Chain Management* - ODP Angkatan 1	Learnimng Center Bio Farma	PT. Thames	23	Staf	Fungsional	Memahami dasar dasar *Supply Chain Management*
17-Sep-18	18-Sep-18	Alat ukur *self assessment*	Learnimng Center Bio Farma	Manajemen Karir	22	Kasie	Fungsional	Pengetahuan tentang metode
20-Sep-18	21-Sep-18	Biodigi *Troops-Internal Influencer*	Learnimng Center Bio Farma	PT. Thames	28	Staf	Fungsional	Optimalisasi Media Sosial sebagai media marketing bagi perusahaan dan edukasi bagi *customer*
24-Sep-18	24-Sep-18	Sistem penilaian kinerja berbasis KPI	Learnimng Center Bio Farma	Manajemen Kinerja	13	Kasie	Fungsional	Pengetahuan tentang pengelolaan
25-Sep-18	25-Sep-18	Implementasi PSAK (PSAK 23, 26, 65, 66, 69 & 71)	Gedung Pemasaran Lantai 3	IAI JABAR	25	Kasie, Staf	Fungsional	Peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan perusahaan
06-Nov-18	07-Nov-18	*Microsoft Access 2010*	PT. Bio Farma	CV. General	5	Staf	Fungsional	Pembuatan dan pengelolaan data base berbasis *access*
12-Nov-18	13-Nov-18	*Time Management*	Learning Center Bio Farma	Sucofindo Advisory	23	Staf	*Managerial*	Pengelolaan waktu yang efektif untuk optimalisasi kinerja
13-Nov-18	13-Nov-18	*Key Performance Indicator*	Gedung Pemasaran Lantai 3	WIBI	19	Kabag, Kasie	*Managerial*	Perumusan *Key Performance Indicator* yang akan digunakan perusahaan
14-Nov-18	14-Nov-18	*Key Performance Indicator #1*	Gedung Pemasaran Lantai 3	WIBI	99	Kabag, Kasie	*Managerial*	Perumusan *Key Performance Indicator* yang akan digunakan perusahaan
15-Nov-18	15-Nov-18	*Design of Spirit*	Learning Center Bio Farma	Telkom Hub	15	Kasie	*Managerial*	Pengetahuan design cara berpikir *customer oriented*
28-Nov-18	29-Nov-18	*Odoo Private*	Learning Center Bio Farma	ViTraining	13	Staf	Fungsional	Pengembangan aplikasi ERP *open source*
29-Nov-18	30-Nov-18	*Creative presentation with power point*	Learning Center Bio Farma	CV. General	24	Staf	Fungsional	Kemampuan merancang presentasi yang efektif dan menarik
29-Nov-18	29-Nov-18	*Key Performance Indicator #2*	Gedung Pemasaran Lantai 3	WIBI	111	Kabag, Kasie	*Managerial*	Perumusan *Key Performance Indicator* yang akan digunakan perusahaan
01-Oct-18	01-Oct-18	Peran UMKM Terhadap Pembangunan Negara dgn Memanfaatkan Fasilitas Perpajakan di Era Digital	Gedung Serba Guna Bio Farma	Ditjend Pajak - Jakarta	16	Kabag, Kasie	Fungsional	Pengetahuan tentang kemudahan membayar pajak di era digital
03-May-18	04-May-18	*International laboratory management standard* (CWA 15793)	Gedung Pemasaran Lantai 3	Asosiasi Biorisiko Indonesia	28	Kabag, Kasie, Staf	Fungsional	Pengelolaan area bio risiko sesuai regulasi CWA standard
05-Dec-18	06-Dec-18	*Agent of Change & Culture Management*	Learning Center Bio Farma	Star Consunting & Training	26	Staf	Managerial	Penguatan implementasi budaya perusahaan melalui *agent of change*
05-Dec-18	05-Dec-18	*Key Performance Indicator #3*	Gedung Pemasaran Lantai 3	WIBI	213	Kabag, Kasie	*Managerial*	Perumusan *Key Performance Indicator* yang akan digunakan perusahaan
06-Aug-18	10-Aug-18	*Officer Development Program-Induction Training*	Learnimng Center Bio Farma	PT. Bio Farma	28	Staf	Fungsional	Pengenalan perusahaan bagi karyawan baru

Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Topik Pelatihan	Tempat	Penyelenggara	Jumlah Peserta	Jabatan	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan
07-May-18	08-May-18	*2 Days become Professional MC*	Hotel Regata Setiabudhi	PT. Rahadian Multi Sarana	8	Staf	Fungsional	Standarisasi kompetensi bagi MC perusahaan
10-Aug-18	10-Aug-18	Strategi Pemasaran	Gedung Pemasaran Lantai 3	PT. Nurdiputra Lestari	43	Kadiv, Kabag	*Managerial*	Rencana dan strategi pemasaran
10-Dec-18	12-Dec-18	Program MiniMBA	LC & Hotel Amaroossa	WIBI	8	Kabag	*Managerial*	*Coaching Management* Strategis untuk kaderisasi kepemimpinan masa depan
10-Dec-18	12-Dec-18	*Business Leadership Kadiv # 1*	Hotel Holiday Inn	PPm Manajemen	20	Kadiv	*Managerial*	Meningkatkan kemampuan kepemimpinan strategis
10-Dec-18	11-Dec-18	*Creating dashboard with excel*	Ruang Rapat Manajemen Produksi	PT. Gagas Media Kreasindo	7	Staf	Fungsional	Pengelolaan *database* yang lebih efektif dan sederhana
10-Dec-18	11-Dec-18	*Visionary Leadership Kasie # 1*	Learning Center Bio Farma	Kubik	22	Kasie	*Managerial*	Peningkatan kemampuan kepemimpinan yang visioner
11-Aug-18	16-Aug-18	*Officer Development Program*-CBT dgn Bela Negara	Dodik Bela Negara - Lembang	Kubik Leadership	24	Staf	*Managerial*	Pembekalan dasar-dasar kepemimpinan
12-Dec-18	13-Dec-18	*Visionary Leadership Kasie # 2*	Leraning Center Bio Farma	Kubik	31	Kasie	*Managerial*	Peningkatan kemampuan kepemimpinan yang visioner
12-Oct-18	12-Oct-18	Strategi Pemasaran	Learning Center Bio Farma	Bio Farma	12	Kabag	Fungsional	Strategi pemasaran untuk mencapai target omzet perusahaan
14-Aug-18	14-Aug-18	*Balanced Score Card*	Leraning Center Bio Farma	WIBI	72	Staf	*Managerial*	Pengetahuan penggunaan tool management yang akan digunakan perusahaan
16-Oct-18	18-Oct-18	*Leadership Competency*	Gedung ACI	Assessment Center Indonesia (ACI)	11	Kadiv	*Managerial*	Meningkatkan kemampuan 12 Kompetensi kepemimpinan standar KBUMN
16-Oct-18	16-Oct-18	Tata Kelola TI Bio Farma	Gedung Serba Guna Bio Farma	LAPI-ITB	188	Staf	Fungsional	Peningkatan kesadaran tentang tata kelola IT untuk seluruh karyawan
17-Dec-18	17-Dec-18	*Winning strategy in digital social media management*	Learning Center Bio Farma	PT. Thames	54	Staf	Fungsional	Pemanfaatan media sosial sebagai strategi pemasaran dan edukasi bagi *customer.*
19-Dec-18	19-Dec-18	*Business Leadership Kadiv # 2*	Hotel Grand Tjokro Cihampelas	PPm Manajemen	21	Kadiv	*Managerial*	Meningkatkan kemampuan kepemimpinan strategis
19-Dec-18	19-Dec-18	*Visionary Leadership Kasie # 3*	Learning Center Bio Farma	Kubik	57	Kasie	*Managerial*	Peningkatan kemampuan kepemimpinan yang visioner
20-Dec-18	20-Dec-18	*Business Leadership Kadiv # 3*	Hotel Grand Tjokro Cihampelas	PPm Manajemen	26	Staf	*Managerial*	Meningkatkan kemampuan kepemimpinan strategis
23-Aug-18	24-Aug-18	*Basic Leadership for Officer Development Program*	Learnimng Center Bio Farma	Sucofindo	24	Staf	*Managerial*	Membentuk mental dasar kepemimpinan
25-Aug-18	25-Aug-18	Protokoler & *Eksekutif Secretary*	Learnimng Center Bio Farma	PT. Thames	9	Kasie	Fungsional	Menstandarisasikan prosedur protokoler dan pelayanan sekretariat
25-Oct-18	25-Oct-18	Program mini MBA	Learning Center Bio Farma	WIBI	8	Kabag	Managerial	*Coaching Management Strategis* untuk kaderisasi kepemimpinan masa depan
27-Aug-18	28-Aug-18	*Functional Cash Bank Management*	Hotel Grand Tjokro Cihampelas	PT. Wahana Cipta Sinatria	25	Kasie, Staf	Fungsional	Peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan perusahaan
28-Aug-18	28-Aug-18	*Spiritual Leadership Officer Development Program*	Learnimng Center Bio Farma	PT. QLM	21	Staf	Fungsional	pengembangan kepemimpinan berbasis spritual
29-Aug-18	29-Aug-18	*One Day For HR: HR Corporate-Officer Development Program*	Learnimng Center Bio Farma	PT. Bio Farma	24	Staf	Fungsional	Pengenalan Pengelolaan SDM perusahaan bagi karyawan baru

Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Topik Pelatihan	Tempat	Penyelenggara	Jumlah Peserta	Jabatan	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan
30-Aug-18	31-Aug-18	*Spiritual Motivation*	Learnimng Center Bio Farma	PT. ESQ	24	Staf	Fungsional	Peningkatan motivasi berbasis spiritual untuk etos kerja yang tinggi
30-Aug-18	30-Aug-18	Kepabeanan & Cukai	Hotel Grand Tjokro Cihampelas	PT. Harvest Consulting Indonesia	29	Kasie	Fungsional	Peningkatan pelayanan proses pengadaan di perusahaan
30-Oct-18	31-Oct-18	*Corporate Culture*	Learning Center Bio Farma	PT. Thames	7	Staf	Managerial	Memahami budaya perusahaan dan penguatan implementasi budaya perusahaan
31-Oct-18	01-Nov-18	*Stress Management*	Learning Center Bio Farma	Sucofindo Advisory	20	Staf	Managerial	Pengelolaan stres untuk optimalisasi kinerja

INTERNALISASI *CORPORATE CULTURE*

Dalam upaya meningkatkan *internalisasi corporate culture*, Perusahaan menyelenggarakan program pelatihan tentang *corporate value* yang pada tahun 2018 di khususkan untuk karyawan pada level staf khususnya karyawan baru dan *Agent of Change*. Untuk menunjang pencapaian pengembangan SDM, Perusahaan akan melakukan internalisasi *corporate culture* secara masif, sistematis dan berkelanjutan yang berdasarkan pada semangat inovasi, sinergi dan efisiensi pada seluruh karyawan. Hal tersebut diwujudkan melalui pembentukan struktur organisasi yang mengakomodir pengelola perubahan, *change agent* dan *culture festival*.

RENCANA PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2019

Tahun 2019 Perusahaan akan menyelenggarakan sebanyak sebanyak 41 pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi saat ini dan rencana bisnis ke depan, dan sebanyak 200 pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi Divisi yang terkait kebutuhan teknis.

2. REALISASI BEASISWA PENDIDIKAN FORMAL PASCA SARJANA TAHUN 2018

Bio Farma memberikan beasiswa kepada karyawan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Bio Farma untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata-2 dan Strata-3. Penjurusan yang dipilih disesuaikan dengan rencana strategis Perusahaan baik dari sisi pengembangan organisasi, manajemen maupun rencana pengembangan produk sehingga tesis atau disertasi yang dihasilkan bukan bersifat riset dasar, tetapi sudah merupakan sebuah penelitian praktis yang bernilai bisnis.

Agar program Pendidikan formal sejalan dengan tuntutan dan strategi bisnis, Perusahaan mengirim karyawan untuk mengikuti program pascasarjana di perguruan tinggi yang menjalin kerja sama riset sehingga hasilnya memiliki nilai jual dan berkontribusi terhadap percepatan riset.

Sampai dengan tahun 2018 tercatat 8 (delapan) orang karyawan yang sedang menjalani program beasiswa pendidikan formal dengan rincian 5 (lima) orang pada jenjang Strata-2 dan 3 (tiga) orang pada jenjang Strata-3.

Proses seleksi peserta pendidikan formal pasca sarjana adalah sebagai berikut:

a. Seleksi administrasi dengan kriteria: Masa kerja minimal 2 tahun, Penilaian Prestasi Kerja minimal B, memiliki ijazah S-1 yang relevan dengan rencana studi program beasiswa.
b. Tes Potensi Akademik (TPA) melalui Pihak Independen, dalam hal ini BAPPENAS.
c. Tes kemampuan Bahasa Asing untuk program beasiswa di luar negeri.
d. Wawancara terhadap visi, misi dan rencana penerapan hasil studi.
e. Evaluasi dan keputusan penugasan belajar (beasiswa).

3. REALISASI *KNOWLEDGE MANAGEMENT* TAHUN 2018

Pengelolaan pengetahuan atau *knowledge management* dilakukan untuk mengamankan aset pengetahuan (*knowledge asset*) yang dimiliki Perusahaan. Proses ini meliputi pengidentifikasian sumber pengetahuan, penyimpanan dan diseminasi pengetahuan.

KEGIATAN YANG DILAKUKAN DALAM PROSES KNOWLEDGE MANAGEMENT

a. Knowledge Exchange

Proses berbagi pengetahuan (*sharing*) antar karyawan dari suatu keahlian yang telah diterapkan di Perusahaan melalui sesi presentasi atau coaching. Dalam kegiatan ini juga ada *Exit Interview* bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada generasi penerusnya. Selama tahun 2018, kegiatan *Knowledge Exchange* dilakukan sebanyak 8 *event*.

b. Community of Practice (CoP)

Proses *sharing* di dalam komunitas praktisi internal untuk membahas suatu masalah teknis tertentu dengan tujuan menghimpun pengetahuan antar disiplin ilmu untuk merumuskan solusi. Selama tahun 2018, kegiatan CoP dilakukan sebanyak 18 event.

c. Lesson Learned Sharing

Proses *sharing* pengetahuan pasca mengikuti suatu sesi pelatihan di luar Perusahaan (*Public Training*) atau *Benchmarking* agar terjadi distribusi atau pemerataan pengetahuan khususnya di unit kerja masing-masing. Partisipasi karyawan dalam program ini adalah sebanyak 74% dari realisasi *public training*.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN REALISASI PROGRAM SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR

Dalam Juta Rupiah

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
I. Training Pimpinan					
Rencana	103	64	140	150	160
Realisasi	50	49	122	111	134
II. Training Non-pimpinan					
Rencana	139	432	725	650	700
Realisasi	30	375	642	565	614
III. Pendidikan Formal					
Anggaran					
Dalam Negeri	7.839	2.500	1.000	1.000	2.150
Luar Negeri	3.775	1.437	1.500	1.500	-

JUMLAH PESERTA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN REALISASI PROGRAM SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR

Jumlah Peserta					
Dalam Negeri	1	1	6	21	15
Luar Negeri	2	1	-	1	2

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN TAHUN 2018

Selama tahun 2018 biaya pengembangan kompetensi karyawan Bio Farma yang meliputi pendidikan formal dan pelatihan adalah sebagai berikut:

a. Program pendidikan formal dianggarkan sebesar Rp 2,1 miliar dan realisasinya sebesar Rp 1,7 miliar (80,95%) yang digunakan untuk membiayai program pendidikan pasca sarjana yang masih berjalan pada tahun 2018.
b. Program pelatihan dianggarkan sebesar Rp 9 miliar dan realisasinya sebesar Rp8,3 miliar (92,22%) untuk membiayai kegiatan pelatihan, seminar, workshop pada tahun 2018.

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN DAN JUMLAH PESERTA TRAINING SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan (Dalam Juta Rupiah)							
Dalam Negeri	4.026	12.000	9.430	14.000	8129	10.144	6.457
Luar Negeri	1.689	8.000	4.957	6.000	5.126	4.556	2.543
Total	**5.715**	**20.000**	**14.387**	**20.000**	**13.255**	**14.700**	**9.000**
Jumlah Peserta Training (Orang)							
Dalam Negeri	-	1.147	905	753	735	766	615
Luar Negeri	-	141	82	123	82	51	10
Total	**-**	**1.288**	**987**	**876**	**825**	**817**	**725**

RENCANA BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN TAHUN 2019

Rencana biaya pengembangan kompetensi karyawan Bio Farma yang meliputi pendidikan formal dan pelatihan adalah sebagai berikut:

a. Program pendidikan formal dianggarkan sebesar Rp3.5 miliar digunakan untuk membiayai program pendidikan pasca sarjana yang masih dan akan berjalan pada tahun 2019.
b. Program pelatihan dianggarkan sebesar Rp20 miliar untuk membiayai kegiatan pelatihan, seminar, *workshop* pada tahun 2019.

4. PENGELOLAAN

Dalam mengelola SDM, karyawan sebagai unsur produksi yang memiliki fikiran, perasaan, angan-angan/cita-cita. Sehingga memandang karyawan harus secara holistic dan manusiawi.

PENGELOLAAN SDM DI BIO FARMA

a. KEPUASAN KERJA

Kepuasan kerja adalah sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubung terkait dengan situasi kerja, imbalan kerja (remunerasi), hubungan antar karyawan dan Perusahaan dan hal-hal lain yang menyangkut faktor fisik dan psikologis yang berwujud perasaan senang atau tidak senang, puas atau tidak puas.

Divisi SDM memperhatikan kepuasaan pekerjaan karena alasan sebagai berikut: adanya hubungan kepuasan dengan kinerja, tingkat kesehatan, keberlangsungan karyawan (tetap bertahan) dan produktivitas.

Beberapa hal yang memengaruhi kepuasan kerja bagi karyawan Bio Farma dapat berupa fisik seperti *Key Performance Indicator* (KPI), (gaji (Remunerasi), fasilitas (Kesejahteraan Karyawan & *Work Life Balance*) dan jaminan masa depan, atau hal-hal yang non fisik seperti kesempatan untuk maju, keamanan pekerjaan, kesehatan, manajemen Perusahaan, pengawasan, kondisi pekerjaan, komunikasi.

b. PERFORMANCE MANAGEMENT

Perseroan senantiasa merujuk pada hasil yang dapat diukur melalui *Key Performance Indicator* (KPI) dalam membentuk pola manajemen kinerja. Dalam upaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi *human capital*, perlu segera dibangun, dibenahi dan dipelihara sistem *database* kepegawaian; sistem dan prosedur kerja, pola karir yang mendorong motivasi karyawan untuk bekerja; sistem kepangkatan dan remunerasi yang *fair* dan transparan; sistem dan mekanisme pendidikan dan latihan yang menunjang dan memacu kemampuan teknis dan manajerial *human capital* sehingga tercipta iklim kerja yang semakin kondusif.

c. REMUNERASI

Bio Farma memberlakukan sistem remunerasi yang kompetitif dengan mempertimbangkan level pengupahan pada industri sejenis, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Kemampuan Perusahaan. Perusahaan memastikan bahwa besaran upah minimum yang diberikan kepada semua karyawan berada di atas upah minimum provinsi.

Selain itu, tidak ada kebijakan remunerasi yang membedakan perlakuan terhadap karyawan laki-laki dan perempuan di seluruh level jabatan. Remunerasi yang kompetitif akan mempertahankan karyawan yang mempunyai kompetensi tinggi. Remunerasi diberikan kepada karyawan berdasarkan penilaian kinerja yang adil. Perusahaan terus mengembangkan sistem remunerasi sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan.

Pada tahun 2014 Divisi *Human Capital* mengembangkan sistem remunerasi berbasis kompetensi dan kinerja, **Total *reward* yang diterima karyawan terdiri dari:**

1. *Pay For Person* (kompensasi terhadap kompetensi).
2. *Pay For Position* (kompensasi terhadap pekerjaan).
3. *Pay For Performance* (kompensasi terhadap kinerja)
4. Insentif.

Sistem penggajian karyawan dinyatakan dalam grade dan level jabatan, dari grade 17 (terendah) hingga grade 2 (tertinggi).

d. KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Bio Farma memberikan berbagai tunjangan kepada karyawan sebagai bagian dari remunerasi. Tunjangan tersebut berupa Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Kesejahteraan, uang cuti tahunan, uang cuti panjang, uang pakaian dinas dan bonus tahunan (jasa produksi).

Selain tunjangan tersebut, karyawan mendapatkan fasilitas seperti pengobatan (rawat jalan dan rawat inap), kantin, sarana olah raga, sarana ibadah dan rekreasi.

Dalam memberikan hak normatif kepada Karyawan, Bio Farma menetapkan:

1. Jenis cuti yang terdiri dari cuti tahunan, cuti panjang, cuti sakit, cuti bersalin, cuti haid, cuti gugur kandungan, cuti ibadah dan cuti di luar tanggungan perusahaan. Karyawan berhak mengambil cuti dan memperoleh ijin meninggalkan pekerjaan karena alasan penting sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan tunjangan hari tua dalam bentuk iuran pasti dengan benefit diperoleh pada saat pensiun berupa penghasilan bulanan, tabungan hari tua, asuransi jiwa dan pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya seluruh karyawan baik yang berstatus karyawan tetap dan karyawan tidak tetap (tenaga kontrak) mendapatkan seluruh fasilitas tunjangan dan insentif/bonus, kecuali uang pakaian dinas dan uang cuti panjang yang tidak diberikan kepada karyawan tidak tetap.

E. *ENGAGEMENT* KARYAWAN

Terkait dengan *engagement* karyawan, Bio Farma menyusun beberapa kebijakan antara lain:

- Menetapkan kebijakan program *work life balance*
- Menetapkan kebijakan penghargaan karyawan
- Menetapkan kebijakan pengukuran kepuasan karyawan
- Melakukan penerapan program *work life balance* yang mengacu pada *employee well being*
- Melakukan penerapan program *recognition* Karyawan baik dalam bentuk penghargaan maupun bentuk *coaching, mentoring* dan penugasan khusus;
- Merancang kebijakan reward berdasarkan kompetensi, posisi dan kinerja.

Untuk meningkatkan *level of engagement* karyawan terhadap perusahaan, Bio Farma telah mengupayakan perubahan baik dari sisi organisasi perusahaan, kesisteman pengelolaan SDM dan program *reward and recognition* yang berbasis

pada kinerja dan *output* karyawan dengan memperhatikan kondisi psikologis masing-masing karyawan.

F. *WORK LIFE BALANCE (WLB)*

Keseimbangan dalam kehidupan dan pekerjaan (*work-life balance*) merupakan cara bekerja dengan tidak mengabaikan semua aspek kehidupan yaitu kerja, pribadi, keluarga, spiritual, dan sosial sehingga menghasilkan kemampuan untuk bertanggung jawab penuh atas pekerjaan, keluarga, kehidupan pribadi dan kehidupan sosial untuk dapat memberikan kontribusi dan pelayanan terbaik.

Menyadari pentingnya kualitas karyawan yang tidak hanya sehat secara fisik namun juga bahagia lahir bathin, pada tahun 2014 Bio Farma memiliki tim khusus yang dinamakan dengan Tim Paradigma Hidup sehat. Tim ini mempunyai tugas untuk pembentukan program Paradigma Hidup Sehat Karyawan Bio Farma dan evaluasi pencapaian implementasi program.

5 Aspek Penting Program Paradigma Hidup Sehat

1. Aspek kehidupan pribadi
2. Kerja
3. Ibadah
4. Keluarga & Komunitas
5. Budaya.

Sesuai dengan Filosofi Perusahaan yaitu *Dedicated to Improve Quality of Life*. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang tidak kalah penting adalah perhatian perusahaan agar tercipta karyawan yang BAHAGIA (Bugar, Harmonis & Giat).

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN SERTA LAYANAN MEDIS

Bio Farma menetapkan program keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mencapai kecelakaan nihil pada setiap unit kerja. Program tersebut mencakup pelatihan, penyuluhan yang berkesinambungan, penyediaan sarana dan prasarana untuk keselamatan kerja, melakukan pengawasan dan inspeksi secara rutin. Pada tahun 2018 tak ada terjadi kecelakaan kerja. Atas prestasi dalam melaksanakan program Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) Bio Farma diberikan Penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident*) dari Menteri Tenaga Kerja Dan Transmingrasi.

Dalam bidang kesehatan di Bio Farma meliputi tindakan pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), mempertahankan kesehatan (promotif) dan mengembalikan kesehatan seperti semula (rehabilitatif). Kegiatan pelatihan dan pelayanan kesehatan dilakukan Bio Farma di setiap Unit Kerja,. Dalam rangka meningkatkan kesehatan karyawan Bio Farma menyediakan pelayanan kesehatan untuk karyawan dan masyarakat sekitar. Bio Farma juga bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di kota Bandung bagi karyawan yang membutuhkan penanganan khusus.Seluruh karyawan Bio Farma juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala (*General check-up*) secara rutin, minimal sekali dalam setahun. Untuk mengantisipasi penyakit yang berbahaya maupun yang menular, karyawan Bio Farma mendapatkan vaksinasi secara gratis.
Bio Farma juga memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi pensiunan yang berhak serta anggota keluarganya.

Keikutsertaan dalam Program BPJS Kesehatan

Bio Farma senantiasa memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Dewan Komisaris, Direksi serta Karyawan Bio Farma. Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-06/MBU/10/2017 tentang Kepesertaan Badan Usaha Milik Negara pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Bio Farma telah mengikutsertakan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Bio Farma pada Program BPJS Kesehatan.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENSIUN

Terkait dengan pelaksanaan program pensiun, Bio Farma telah menyusun beberapa kebijakan antara lain:

1. Menetapkan kebijakan program transisi karir
2. Menetapkan kebijakan pensiun termasuk didalamnya peningkatan kesejahteraan pasca pensiun
3. Merencanakan kebijakan program manfaat pensiun
4. Melakukan program – program pelatihan untuk persiapan pensiun.

Program transisi karir dimulai dari 5 (lima) tahun sebelum pensiun. Program ini dilaksanakan salah satunya dalam bentuk Pelatihan Perubahan Paradigma untuk mempersiapkan mentalitas dari karyawan yang akan mengahadapi masa pensiun. Satu tahun sebelum pensiun, karyawan dibebastugaskan dari pekerjaannya dan diberikan kewajiban untuk melakukan *knowledge sharing* baik Pengetahuan maupun pengalaman kepada rekan kerja atau personil yang akan menggantikannya.

Hak-hak pensiun (pesangon, uang jasa pengabdian, DPLK,Tunjangan Hari Tua), Kedepannya dalam upaya meningkatkan Engagement level, Perusahaan telah mempersiapkan system Kesejahteraan Pasca Pensiun, contohnya uang pensiun bulanan dan kesehatan pensiunan.

Sepanjang tahun 2018, Bio Farma telah melaksanakan program pelatihan untuk persiapan pensiun yang diberi nama Pelatihan Perubahan Paradigma dengan total peserta sebanyak 36 orang, adapun tema pelatihannya adalah pembelajaran masa persiapan pensiun dan *financial planning for career transition*.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Per 31 Desember 2018, Bio Farma merupakan BUMN Non-listed Non-Keuangan, Dewan Komisaris, Direksi Bio Farma, Karyawan dan Masyarakat tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung karena Pemegang Saham Bio Farma adalah 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi mengenai:

1. Rincian nama Pemegang Saham yang meliputi 20 Pemegang Saham terbesar dan persentase kepemilikannya;
2. Rincian Pemegang Saham dan persentase kepemilikannya yang meliputi nama Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham, kelompok Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%; dan
3. Nama Komisaris dan Direktur serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

Per 31 Desember 2018, Bio Farma tidak memiliki entitas anak dan/atau entitas asosiasi. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan dalam bentuk tabel informasi tentang nama entitas anak dan/atau asosiasi, persentase kepemilikan saham, keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Per 31 Desember 2018, Bio Farma tidak memiliki Struktur Grup Perusahaan. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan Struktur Grup Perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan *special purpose vehicle* (SPV).

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Per 31 Desember 2018, Bio Farma merupakan BUMN Non-listed Non-Keuangan, Pemegang Saham Bio Farma adalah 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bio Farma tidak memiliki lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan serta nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN NOTARIS

Per 31 Desember 2018, Bio Farma memiliki Kantor Akuntan Publik Dan Notaris.

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERSEROAN:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Roebiandini Dan Rekan
Jl. Sidoluhur No 26 Sukauyu, Bandung, Jawa Barat 40121, Indonesia
Telp (62-22) 22 2512337
Fax. (62-22) 2504779

NOTARIS

Audit atas laporan Keuangan Perusahaan Tahunan & Laporan Kegiatan PKBL th. 2018
Fathiah Helmi, SH.
Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2 Bl X-1 Graha Irama
Lt 6-C, Kuningan Timur, Setia Budi
Jakarta, 12950
Phone: +62-21 5261136, 52907304, 52907305, 52907306
Fax: +62-21 5261136

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah and Partners
Capital Place, Level 36 & 37
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
Phone: +62 21 2555 7800
Fax: +62 21 2555 7899
Email: info@ahp.id
Website: https://www.ahp.co.id/lwka.php

Warens and Partners

Gedung Arthaloka Lt. 3 Suite 301 & 302,
Jl. Jenderal Sudirman Kav.2, Karet Tengsin, Tanah Abang, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120
Phone. +62-21 2511580
Website:http://www.warenslaw.com/home.php

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Per 31 Desember 2018, Bio Farma merupakan Perusahaan Non Listed Non Keuangan sehingga baik Masyarakat, Karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris Bio Farma tidak mempunyai kepemilikan saham atas Bio Farma. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%.

IKHTISAR SAHAM

Per 31 Desember 2018, Bio Farma merupakan salah satu BUMN Non Listed Non Keuangan atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta volume perdagangan.

KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM (TERMASUK *PRIVATE PLACEMENT*) DAN/ATAU PENCATATAN SAHAM DARI AWAL PENERBITAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN BUKU

Per 31 Desember 2018, Bio Farma merupakan salah satu BUMN Non Listed Non Keuangan atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi *(Corporate Action)* Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi *(Corporate Action)* Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

Kronologis pencatatan saham, jenis tindakan korporasi *(corporate action)* yang menyebabkan perubahan jumlah saham, perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku.

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA DARI AWAL PENERBITAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN BUKU

IKHTISAR OBLIGASI/SUKUK/OBLIGASI KONVERSI

Per 31 Desember 2018, Bio Farma tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar *(Outstanding)*, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK Lainnya

Per 31 Desember 2018, Bio Farma tidak menerbitkan dan/atau pencatatan efek lainnya. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang

Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya. Nilai penawaran efek lainnya.

Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan Peringkat efek Kronologis pencatatan efek lainnya, jenis tindakan korporasi *(corporate action)* yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya, perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan dan peringkat efek.

PENGHARGAAN 2018

1. *BUMN Marketeers Awards* 2018 kategori *Promising Company in Marketing 3.0 Silver Winner*
2. *BUMN Marketeers Awards 2018 Promising Company in strategic Marketing Bronze Winner*
3. Penghargaan *Geopark* Ciletuh sebagai Taman Bumi Dunia oleh UNESCO
4. Penghargaan Wajib Pajak dari Dirjen Pajak
5. Penghargaan PMDN (Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri)

6. Penghargaan Pelanggan Tertib Administrasi dari BPOM
7. Warta Ekonomi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
8. Penghargaan dalam rangka Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Tingkat Provinsi Jawa Barat 2018
9. Prestasi sebagai BUMN Transparan (Indeks 4)
10. Penghargaan Primaniyarta Kategori Pelopor Pasar Baru – Kementerian Perdagangan Republik *Indonesia Top Leader for CSR Commiment* & TOP CSR 2018 Sektor Industri Farmasi

11

12

13

17

11. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2018 – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

12. *Palu & Donggala Savior ; Quick Emergency Response Team in Medical Supplies Distribution*

13. *SOE Heroes : Good Exportir in Vaccine Product*

14. BUMN Penyelamat Bencana

15. *The Committed SOE in Dedicated to improve quality of life*

16. Penghargaan Wajib Pajak Kategori PBB

17. *Sustainability Report (SR)* Award kategori *"Gold Rank"*
18. *Top IT on Digital Track & Trace System 2018*
19. *Top Leader in IT Leadership 2018*
20. BUMN Terbaik 2018 kategori Bidang Non Keuangan Sektor Farmasi, Makanan & Aneka Industri dari Majalah Investor
21. Penghargaan Perusahaan Terbaik Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan
22. Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SERTIFIKASI

I. SERTIFIKASI DARI WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

Pengakuan dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) untuk

1. Vaksin virus Polio (9 April 1997)
2. Vaksin Campak 10 dosis & 20 dosis (9 April 1997 & 4 September 2006)
3. Vaksin Hepatitis B Uniject (13 Mei 2004)
4. Vaksin monovalen Oral Polio Vaccine Tipe 1/mOPV-1 (3 November 2009)
5. Vaksin bivalen Oral Polio Vaccine/ bOPV (26 Mei 2010)
6. Vaksin bakteri Difteri, Pertussis, Tetanus (6 April 2011)
7. Vaksin Tetanus dalam kemasan vial (11 Maret 1999) & Uniject (29 Oktober 2003)
8. Vaksin Td (6 Juli 2011),
9. Vaksin DT (11 Maret 1999)
10. Vaksin Kombinasi DTP-HB (7 Oktober 2004)
11. Vaksin Pentabio (16 Desember 2014).

Sertifikasi diterima dari World Health Organization (WHO) tidak memiliki masa berlaku.

II. SERTIFIKAT CPOB (CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK) DARI BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA (BPOM-RI)

	1. Bulk Vaksin Campak (29 April 2014) : Breeding Ayam SPF, Pembuatan Bulk. Masa Berlaku Sertifikasi : 31-Mar-2019
	2. Bulk Vaksin BCG (29 April 2014) : Pembuatan Bulk. Masa Berlaku Sertifikasi : 31-Mar-2019

	3. Bulk Toksoid Difteri (29 April 2014) : Pembuatan Bulk (Kultivasi & Detoksifikasi), Pembuatan Bulk (Purifikasi. Masa Berlaku Sertifikasi : 31-Mar-2019
	4. Bulk Toksoid Tetanus (29 April 2014) : Pembuatan Bulk (Kultivasi & Detoksifikasi), Pembuatan Bulk (Purifikasi). Masa Berlaku Sertifikasi : 31-Mar-2019

	5. Vaksin Virus (29 April 2014) : Formulasi, Filling, Liofilisasi Vaksin Campak, Pengemasan Vaksin Campak, Formulasi, Filling Vaksin Polio, Pengemasan Vaksin Polio. Masa Berlaku Sertifikasi : 31-Mar-2019
	6. Vaksin Virus (29 April 2014) : Formulasi, Filling Vaksin Hepatitis B, Pengemasan Vaksin Hepatitis B, Formulasi, Filling Vaksin Seasonal Flu, Pengemasan Vaksin Seasonal Flu. Masa Berlaku Sertifikasi : 31-Mar-2019
	7. Vaksin Bakteri (29 April 2014) : Formulasi, Filling, Liofilisasi Vaksin BCG, Pengemasan Vaksin BCG. Masa Berlaku Sertifikasi : 31-Mar-2019
	8. Vaksin Bakteri (29 April 2014) : Formulasi, Filling Vaksin DTP, Pengemasan Vaksin DTP, Formulasi, Filling Vaksin T T, Pengemasan Vaksin T T, Formulasi, Filling Vaksin DT, Pengemasan Vaksin DT, Formulasi, Filling Vaksin Td, Pengemasan Vaksin Td. Masa Berlaku Sertifikasi : 31-Mar-2019

	9. Vaksin Kombinasi (29 April 2014) : Formulasi, Filling Vaksin DTP-HB, Pengemasan Vaksin DTP-HB, Formulasi, Filling Vaksin DTP-HB-HiB, Pengemasan Vaksin DTP-HB-HiB. Masa Berlaku Sertifikasi : 31-Mar-2019
	10. Pelarut Vaksin (29 April 2014) : Filling Pelarut Vaksin, Pengemasan Pelarut Vaksin. Masa Berlaku Sertifikasi : 31-Mar-2019
	11. Bulk Vaksin Pertusis (04 Juni 2014) : Persiapan, Kultivasi, Inaktivasi dan Pooling. Masa Berlaku Sertifikasi : 31-Mar-2019
	12. Bulk Vaksin Polio (04-Juni-2014) : Persiapan ginjal kera, Pembuatan Bulk. Masa Berlaku Sertifikasi: 31 Maret 2019

	13. Bulk Antisera (14-Jan-2015): Pemisahan & Pooling Plasma, Pembuatan Bulk. Masa Berlaku Sertifikasi : 14-Jan-2020
	14. Antisera (14-Jan-2015): Formulasi Antisera, Filling Antisera, Pengemasan Antisera. Masa Berlaku Sertifikasi : 14-Jan-2020
	15. Bulk Vaksin Polio (11 Mei 2016) : Persiapan Ginjal Kera, Pembuatan bulk. Masa Berlaku Sertifikasi : 11-Mei-2021
	16. Vaksin Campak (11 Mei 2016) : Formulasi, Filling, Liofilisasi, Pengemasan. Masa Berlaku Sertifikasi : 11-Mei-2021

	17. Bulk Bets Uji Klinis (Upstream) (22-Nop-2016): Persiapan Substrat, Inokulasi dan Pemanenan, Klarifikasi dan Purifikasi, Pengisian Bulk. Masa Berlaku Sertifikasi : 22-Nop-2021
	18. Bulk Bets Uji Klinis (Downstream) (22-Nop-2016): Formulasi, Pengisian dan Pembekuan Kering. Masa Berlaku Sertifikasi: 22-Nop-2021
	19. Bulk Monovalen Influenza (22-Nop-2016) : Proses Pembuatan BMI yang Melibatkan Virus Hidup (Persiapan benih virus, Inokulasi, Panen, Purifikasi, Inaktivasi), Proses Pembuatan BMI Setelah Virus Diinaktivasi (Dialisis, Pemisahan, Penghilangan Detergen dan Filtrasi Steril). Masa Berlaku Sertifikasi : 22-Nop-2021
	20. Vaksin Virus (29 April 2014) : Formulasi, Filling Vaksin Hepatitis B, Pengemasan Vaksin Hepatitis B, Formulasi, Filling Vaksin Seasonal Flu, Pengemasan Vaksin Seasonal Flu, Formulasi, Filling Vaksin IPV, Pengemasan Vaksin IPV. Masa Berlaku Sertifikasi : 31-Mar-2019

	21. Bulk sIPV (18-Mei-2017) : Persiapan dan Kultivasi sel Vero, Inokulasi Virus Polio, Pemanenan, Purifikasi, Inaktivasi, Netralisasi, dan Filtrasi Steril. Masa Berlaku Sertifikasi : 18-Mei-2022

	22. Vaksin Bakteri (17-Sep-18) : Persiapan Pembuatan Bulk Pertusis, kultivasi Pembuatan Bulk Pertusis, pooling Pembuatan Bulk Pertusis. Masa Berlaku Sertifikasi : 16-Sep-23

Certificate of Approval
PT Bio Farma (Persero)

III. ISO 9001:2015 FROM PT. LLOYD'S REGISTER INDONESIA, FOR AND ON BEHALF OF LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE LIMITED, UNITED KINGDOM (LRQA – UK)

IV. ISO 14001:2015 FROM PT LLOYD'S REGISTER INDONESIA, , FOR AND ON BEHALF OF LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE LIMITED, UNITED KINGDOM (LRQA – UK)

V. OHSAS 18001:2007 FROM PT. LLOYD'S REGISTER INDONESIA, , FOR AND ON BEHALF OF LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE LIMITED, UNITED KINGDOM (LRQA – UK)

VI. ISO 17025 (LABORATORIUM PENGUJI) PT BIO FARMA (PERSERO). BERLAKU DARI 17 FEBRUARI 2016 – 16 FEBRUARI 2020

SERTIFIKAT AKREDITASI
PT BIO FARMA (PERSERO)

Sebagai informasi, kami rutin diaudit KAN dan selalu dinyatakan lulus (update). Terakhir diaudit (Survailans ke-2: 10 Agustus 2018) dan dinyatakan lulus serta penyesuaian versi ISO 17025:2005 ke versi ISO 17025:2017.

PERISTIWA PENTING 2018

5 JANUARI 2018

Bio Farma dan Serikat Pekerja Sepakati Perjanjian Kerja Bersama Periode 2018 – 2020

Bio Farma dan Serikat Pekerja Bio Farma menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2018 – 2020. PKB yang ditanda tangani oleh Plt Direktur Utama Bio Farma, Juliman, dan Ketua Himpunan Karyawan Bio Farma, Moh Usman, disaksikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Suardi, jajaran Direksi Bio Farma, serta tim perumus PKB Bio Farma.

12 JANUARI 2018

Plt Direktur Utama Bio Farma, Juliman, menjadi narasumber pada acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) di Jakarta.

Dalam diskusi in, membahas mengenai kesiapan Bio Farma dalam menyediakan vaksin Difteri untuk mengatasi Kejadian Luar Biasa penyakit difteri atau *Outbreak Response Immunization* (ORI).

13 JANUARI 2018

Menkes Nila Moeloek dan Dede Yusuf Tinjau Fasilitas Produksi Vaksin Bio Farma

Nila Moeloek, Menkes RI bersama Dede Yusuf, Ketua Komisi IX DPR-RI kunjungi fasilitas produksi vaksin Bio Farma, didampingi rombongan Kementerian Kesehatan RI, Dodo Suhendar Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat dan didampingi langsung, Plt Direktur Utama, Juliman, Direktur Pemasaran, M. Rahman Roestan, serta Direksi lainnya.

16 JANUARI 2018

Geopark Ciletuh Resmi Memenuhi Kriteria Sebagai Taman Bumi Dunia:

Geopark Ciletuh Palabuhanratu, resmi ditetapkan memenuhi kriteria sebagai Taman Bumi Dunia (Global Geopark), penetapan akan dilakukan dalam sidang *Executive Board* pada tanggal 4-17 April 2018. Bio Farma mendapatkan apresiasi dari Global Geopark Network, karena telah berhasil untuk membuat suatu skema percotohan kerjasama antara masyarakat di kawasn Ciletuh - Palabuhanratu dengan pihak swasta. Kerjasama yang juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Universitas Padjadjaran dan komunitas lokal kawasan Geopark, telah berhasil untuk menjadikan kawasan tersebut Taman Bumi Dunia (Global Geopark) dibawah UNESCO Global Geopark.

23 JANUARI 2018

M. Rahman Roestan Resmi Menjadi Dirut Bio Farma

Bertempat di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat, dilaksanakan penyerahan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor: SK-27/MBU/01/2018 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.

21 FEBRUARI 2018

Bio Farma salurkan bantuan pendidikan sebesar Rp 800 Juta

Bantuan ini merupakan salah satu program Bina Lingkungan yang dikelola oleh DKM Masjid Annur Bio Farma yang. Bantuan yang diberikan oleh Direktur Utama Bio Farma, M. Rahman Roestan, kepada 172 anak berprestasi yang terdiri dari anak yatim dari keluarga karyawan yang wafat semasa bertugsa di Bio Farma.

7-8 FEBRUARI 2018

Bio Farma Berikan Vaksinasi Flu Kepada Wartawan

Bio Farma memberikan vaksin flu untuk para wartawan Bandung, Jakarta dan Cirebon. Pemberiam vaksin flu ini, merupakan bagian dari acara Media Workshop 2018, yang diselenggarakan di kota Kuningan Jawa Barat.

24 FEBRUARI 2018

Bio Farma Raih Kembali Sustainability Report Award (SRA) 2017

Bio Farma raih penghargaan Sustainability Report Award (SRA) yang diselenggarakan oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR).

1 MARET 2018

Bio Farma siapkan strategi Diplomasi Ekonomi Bidang Kesehatan bersama Kemenlu

M. Rahman Roestan, Direktur Utama Bio Farma hadir sebagai pembicara dalam Diskusi panel dengan Tema Optimalisasi Organisasi Kerja Sama Islam untuk Peningkatan Diplomasi Ekonomi Bidang Kesehatan, Kamis, 1 Maret 2018 di Jakarta. M. Rahman Roestan, menjadi salah satu narasumber fokus membahas pemasaran produk vaksin dan produk Bio Farma lainnya, dengan fokus area ke negara – negara anggota OKI terutama yang berada di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

1 MARET 2018

Bio Farma tanda tangani MOU dengan RNI

Bio Farma dan RNI menandatangani nota kesepahaman (MOU) dalam rangka mengembangkan bisnis pembuatan vial dan ampul. Bio Farma diwakili oleh Direktur Utama, Rahman Rustan, dan dari RNI diwakili oleh Direktur Utama, Diediek Prasetyo, dan disaksikan oleh Desti Arlaini, mewakili Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi 1, Kementerian BUMN.

12 MARET 2018

Bio Farma Sosialisasikan Perjanjian Kerja Bersama 2018-2020

Bio Farma menggelar kegiatan sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2018-2020, yang dihadiri langsung oleh sekitar 1000 karyawan di Gedung Serba Guna Bio Farma. Hadir pula Disril Revolin Putra, Direktur SDM dan umum, M. Usman Ketua Umum Himpunan Karyawan (HIKA) Bio Farma serta Wawan Setiawan, Kepala Divisi SDM.

23 MARET 2018

Bio Farma Tanda Tangani Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan

Bio Farma Gandeng Kejaksaan untuk Percepatan Kemandirian Produk *Life Science*.
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Loeke Larasati Agoestina menandatangani nota kesepahaman dengan Direktur Utama Bio Farma M Rahman Roestan, serta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (KEJATI), Raja Nafrizal yang diwakili oleh Imanuel Zebua (Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) menandatangani kesepakatan dengan Direktur SDM da Umum Bio Farma, Disril Revolin Putra di Bandung.

23 MARET 2018

Organisasi Internal Bio Farma Berikan Bantuan untuk Korban Bencana Alam di Kabupaten Kuningan

Bio Farma Gandeng Kejaksaan untuk Percepatan Kemandirian Produk *Life Science*.
Organisasi internal Bio Farma, antara lain Himpunan Karyawan Bio Farma (HIKA BF) Forum Karyawan (Forwan), DKM An Nuur Bio Farma, Ikatan Istri Karyawan (IIK) dan Bio Farma Motorcycle Club (BFMC) memberikan bantuan untuk korban bencana alam longsor di Kab Kuningan berupa pengobatan, peralatan sekolah dan kitab suci Al - Quran.

25 MARET 2018

Bio Farma Bersinergi dengan Ikatan Alumni Lemhanas

Bio Farma dan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas menandatangani Nota Kesepahaman yang diwakili oleh Agum Gumelar sebagai ketua IKAL, bersama M Rahman Roestan sebagai Direktur Utama Bio Farma, serta disaksikan, Heridadi, Komisaris Bio Farma.

26 MARET 2018

Bio Farma Kembali Menggelar Sosialisasi & Penandatanganan Pakta Integritas

Bio Farma kembali mengelar Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Acara yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Bio Farma ini dihadiri oleh seluruh karyawan Bio Farma. Dalam sambutannya, Direktur Utama Bio Farma, Rahman Roestan menyampaikan bahwa sosialisasi terkait GCG harus terus diingatkan, kepada seluruh insan Bio Farma, agar kita semua, tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan GCG. “GCG merupakan hal yang kritikal dalam suatu perusahaan. Walaupun nilai GCG Bio Farma terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, bahkan sempat menjadi yang tertinggi di jawa barat, sosialisasi GCG harus terus disampaikan untuk saling mengingatkan untuk menghindari ketidak sesuaian dengan peraturan yang ada di GCG”.

10 APRIL 2018

International Islamic Healthcare Conference dan Expo (IHEX) di Jakarta Convention Centre

Direktur Utama Bio Farma, M. Rahman Roestan menjadi salah satu pembicara dalam acara International Islamic Healthcare Conference dan Expo (IHEX) di Jakarta Convention Centre, Selasa (10/4/2018). Dalam paparannya Rahman mengawali dengan peranan Bio Farma, sebagai BUMN di negara Islam dan negara berkembang untuk menjamin kemandirian dan ketersediaan vaksin, serta menyampaikan tantangan implementasi jaminan produk halal untuk Industri Farmasi, terutama produk Biologi.

16 – 19 APRIL 2018

Bio Farma Gelar Santri Sehat 2018

Bio Farma kembali menggelar Santri Sehat yang diselenggarakan pada 16 – 19 April 2018, dihadiri sekitar 300 santri di masing – masing pondok pesantren ini dilaksanakan di 4 pondok pesantren / boarding school yang berada di Jawa Timur & Jawa Tengah.

20-22 APRIL 2018

Bio Farma tandatangani nota kesepahaman pada *Indonesia Science Day* 2018

Bio Farma dipercaya mengisi wahana dalam acara *Indonesia Science Day* 2018 pada 20-22 April 2018, di PP Iptek TMII Jakarta. Wahana Teknologi Inovasi Indonesia ini dikembangkan untuk menampilkan berbagai produk-produk karya anak bangsa, termasuk diantaranya terkait dengan industri kesehatan.

3 MEI 2018

Bio Farma Raih Dua Penghargaan sekaligus di Jakarta Marketing Week 2018

Penghargaan diraih untuk kategori *Promising Company in Strategic Marketing dan Company in Marketing* 3.0 yang diserahkan oleh Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana (KSPP) Kementerian BUMN Ahmad Bambang secara langsung kepada Direktur Marketing Sri Harsi Teteki di Jakarta, Rabu (3 /5/2018).

14 MEI 2018

Indonesia Resmi sebagai Centre of Excellence Pengembangan Vaksin dan Produk Bioteknologi Negara OKI

Indonesia resmi sebagai Centre of Excellence (CoE) The Organization Of Islamic Cooperation (OIC) atau Pusat Riset Vaksin Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Senin 14 Mei 2018 di Jakarta. Peresmian langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek yang dihadiri oleh para Pejabat Kementerian Kesehatan, Duta Besar dan Perwakilan negara-negara Anggota OKI, Badan POM, Direktur Utama Bio Farma, Kimia Farma dan Phapros.

14 -16 MEI 2018

Bio Farma Turut Berpartisipasi dalam Pameran UKM & Bazar Sembako yang diselenggarakan Kementerian BUMN

Bio Farma turut berpartisipasi dalam kegiatan Pameran UKM & Bazar Sembako yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN pada tanggal 14-16 Mei 2018 di Jakarta.

31 MEI 2018

Bio Farma Berikan Bantuan Lingkungan dan Sosial untuk Sejahterakan Masyarakat

Bio Farma gelar Bio Farma Peduli "Berbagi Kebahagiaan Ramadhan" bersamaan dengan buka puasa bersama keluarga besar Karyawan Bio Farma beserta jajaran Direksi & Komisaris, hari Kamis, 31 Mei 2018. Kegiatan yang diselenggarakan di Masjid An-Nur Bio Farma ini juga turut mengundang & memberikan bantuan lingkungan dan sosial untuk masyarakat agar lebih sejahtera, Salah satunya, pelatihan menjahit, perlengkapan dan permodalan untuk komunitas keterbatasan khusus (difabel) guna meningkatkan perekonomian pra sejahtera, sejalan dengan program Kementerian BUMN yaitu membina ekonomi keluarga pra-sejahtera khususnya di Jawa Barat.

5 JUNI 2018

Bio Farma Raih Penghargaan Perusahaan PMDN Berperingkat Terbaik

Bio Farma meraih penghargaan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Berperingkat Terbaik. Kegiatan Pemeringkatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat. Diikuti sebanyak 28 perusahaan Penanam Modal Asing (PMDA) dan 29 perusahaan PMDN.

8 JUNI 2018

Bio Farma Berangkatkan 1.000 Peserta Mudik Gratis Bersama BUMN

Bio Farma mengadakan program mudik bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H, sebagai bagian dari Program Mudik bersama yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN pada tanggal 8 Juni 2018.
Bio Farma memberangkatkan sebanyak 1000 pemudik dengan menggunakan armada bus sebanyak 22 unit dengan tujuan 17 kota.

22 JUNI 2018

Bio Farma Gelar Halal Bihalal seluruh Karyawan dan Direksi

Bio Farma Gelar Halal Bihalal yang dihadiri oleh seluruh karyawan dan direksi di Gedung Serba Guna Bio Farma.

7 JULI 2018

Bio Farma Upayakan Untuk Sertifikasi Halal Vaksin MR

Saat ini hanya ada 2 produsen vaksin MR antara lain China dan India, tetapi yang memiliki persyaratan yang lengkap hanya dari India, semua vaksin MR yang digunakan untuk Kampanye MR pada tahap 1 dan tahap 2 ini, berasal dari mitra Bio Farma di India, yang produksi vaksin MR nya sudah digunakan di 140 negara, termasuk negara – negara Islam yang sudah lebih dulu mencanangkan vaksin ini, dan sudah melalui studi keamanan di berbagai negara di dunia.
Bio Farma sangat *concern* dengan masalah halal. Sesuai aturannya registrasi sertifikasi halal harus dilakukan oleh manufacturer atau produsen vaksin, dalam hal ini pabrik di India.

12 JULI 2018

Laboratorium Mikrobiologi Bio Farma Siap Bantu Industri Makanan dan Kesehatan12

Laboratorium ini siap membantu industri makanan, minuman, dan kesetahan baik skala kecil maupun menengah untuk bantu uji produknya.
Bio Farma sudah berperan dalam membantu proses Quality Control produk Bio Farma, untuk melakukan Uji Identifikasi bakteri seperti Salmonella, Staphylococcus Aureus, listeria, E. Coli, Bacillus Cereus, koliform, identifikasi Kapang dan khamir, Angka Lempeng Total (ALT) dan lainnya.

10 -13 JULI 2018

Pameran Industri Farmasi, Kosmetik dan Jamu Menuju Kemandirian dan Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Bio Farma mengikuti Pameran yang digelar Kementerian Perindustrian. Pameran Industri Farmasi, Kosmetik dan Jamu dengan tema “Industri Farmasi, Kosmetik dan Jamu Menuju Kemandirian dan Tuan Rumah di Negeri Sendiri” yang digelar selama 4 hari.

18 JULI 2018

Museum Bio Farma masuk 10 Destinasi Wisata Bandung

Museum Bio Farma sudah masuk pada daftar 10 destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Kota Bandung yang dibuat Disbudpar Kota Bandung.

7 AGUSTUS 2018

Kementerian BUMN Inisiasi Program Sambung Listrik Gratis

Dalam rangka mewujudkan program BUMN hadir untuk negeri dan percepatan program peningkatan rasio elektrifikasi, sebanyak 35 perusahaan pelat merah bersinergi untuk membiayai penyambungan listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu di sekitar Jawa Barat bagian selatan dan Banten.

10 – 18 AGUSTUS 2018

Siswa Mengenal Nusantara

Sebanyak 30 Siswa SMA dan SMK di Jawa Barat, yang terdiri dari 13 siswa SMA, dan 14 siswa SMK dan tiga siswa SLB dinyatakan terpilih untuk mewakili Provinsi Jawa Barat dalam program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) tahun 2018 yang merupakan bagian dari Kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri (BHUN), menuju Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kegiatan SMN ke-4 sejak tahun 2015 ini, merupakan kerjasama delapan BUMN PIC Jawa Barat antara lain Koordinator / PIC: Jasindo, CO-PIC yaitu Bio Farma, PJT II, PT Dahana, PT Pindad, PT Bahana, PT Inti dan PT Dirgantara Indonesia.

28 AGUSTUS 2018

Kerjasama Indonesia – Maroko – Tunisia

Indonesia dipercaya untuk berbagi pengetahuan mengenai produksi vaksin kepada Maroko dan Tunisia dalam program "*Strengthening Indonesia-Morocco–Tunisia Development Cooperation Through Reverse Linkage (RL) Program*". Kegiatan RL ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional-PPN /BAPPENAS. Bekerjasama dengan Badan POM, Kementerian Kesehatan dan Bio Farma melalui program Reverse Linkage dengan Islamic Development Bank (IsDB).

13 SEPTEMBER 2018

Forum Riset Life Science Nasional 2018

Bio Farma kembali mengumpulkan peneliti – peneliti level nasional dari seluruh Indonesia untuk berkumpul bersama, dalam rangkaian acara Forum Riset Life Science Nasional (FRLN), Kegiatan yang bertema "Riset dan Inovasi Bidang Life Science yang Berkelanjutan di Indonesia" bertujuan membangun sinergi antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, Industri serta Komunitas pendukungnya, sebagai upaya agar vaksin dan biopharmaceutical buatan dalam negeri dapat segera terwujud.

18 SEPTEMBER 2018

Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB'9)

Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB'9) dengan tema "Jalan Panjang Fatwa MUI Vaksin MR" di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa (18/9/2018). BPOM melakukan proses panjang terkait pengawasan obat dan makanan, termasuk vaksin Measles Rubella (MR). pengawasan baik prapemasaran ataupun pascapemasaran dilakukan dengan sangat ketat, terkait keamanan dan kualitasnya.

Menurut Ketua MUI, terkait masalah vaksin, MUI sudah mengeluarkan fatwa pada tahun 2016. Itu fatwa MUI No. 4 Tahun 2016 sudah diputuskan bahwa melakukan imunisasi yang mengancam, menimbulkan penyakit, kecacatan yang berkelanjutan, maka bukan hanya boleh (digunakan), bahkan wajib.

9 SEPTEMBER 2018

Bio Farma Raih Peringkat "AAA" dan "AAA(sy)" dari PEFINDO

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) memberikan peringkat "AAA" dan "AAA(sy)" kepada Bio Farma, sebagai obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang.

21 SEPTEMBER 2018

Dirut Bio Farma didampingi Dir Pemasaran lepas ekspor vaksin Polio (bOPV 20ds)

Direktur Utama Bio Farma, M. Rahman Roestan didampingi Sri Harsi Teteki, Direktur Pemasaran lepas ekspor vaksin Polio (bOPV 20ds) untuk pengiriman ke Papua New Guinea, Jum'at siang, 21 September 2018 di Bandung.

01 OKTOBER 2018

Kerja Sama Edukasi Pp 23 Bio Farma dan Kanwil DJP WP Besar untuk meningkatkan peran UMKM dalam Pembangunan

Untuk meningkatkan partisipasi dan gotong royong UMKM dalam pembangunan negara menuju kemandirian APBN serta pemanfaatan fasilitas perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar merangkul salah satu BUMN yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Tiga yaitu PT BIOFARMA (PERSERO) untuk bekerja sama dalam edukasi perpajakan.

01 OKTOBER 2018

Kunjungan Walikota Bandung di Dua Minggu Pertama Masa Jabatannya

Walikota Bandung, Oded M danial, bersama jajaran Kepala Dinas Pemerintah kota Bandung memenuhi undangan Bio Farma untuk berdiskusi melanjutkan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik terutama dibidang lingkungan dan kesehatan, diakhir diskusi pun Oded diajak untuk meninjau langsung fasilitas produksi vaksin di Bio Farma.

3 OKTOBER 2018

Bio Farma kirimkan bantuan untuk Korban Gempa Bumi & Tsunami Palu - Donggala

Bio Farma kirimkan vaksin dan tim bantuan yang terdiri dari tujuh pesonel ke pusat titik gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 yang lalu di Kota Palu dan Donggala Sulawesi Tengah. Tim yang dipimpin oleh Direktur SDM & Umum Bio Farma, Disril Revolin Putra, akan berada dilokasi selama sembilan hari, terhitung mulai 3 sampai 12 Oktober 2018.

3-6 OKTOBER 2018

Bio Farma Ikuti Pameran IBD Expo BUMN Terbesar di Indonesia

Bio Farma berpartisipasi dalam Indonesia *Business & Development* (IBD) Expo 2018 yang digelar pada tanggal 3-6 Oktober 2018 di Grand City Surabaya. Menurut M Rahman Roestan, Direktur Utama Bio Farma yang didampingi oleh Sri Harsi Teteki, Direktur Pemasaran Bio Farma, “Kami mengikuti IBD Expo untuk lebih mendekatkan diri pada masyarakat sehingga lebih mengenal produk dan layanan BUMN, khususnya vaksin yang dihasilkan oleh Bio Farma”

4 OKTOBER 2018

Bio Farma raih 2 Penghargaan CSR Bergengsi

Bio Farma raih dua penghargaan sekaligus yaitu penghargaan Top CSR 2018 sektor Industri Farmasi serta penghargaan *Top Leader CSR Commitment* kepada M. Rahman Roestan selaku Direktur Utama Bio Farma dari Majalah *Top Bussiness*. Penghargaan diserahkan oleh pemimpin redaksi Top Bussiness, Moh. Lutfi Handayani dan di terima langsung oleh Wawan Setiawan Kepala Divisi Umum dan Manajemen Aset, mewakili Direksi Bio Farma.

15 OKTOBER 2018

Bio Farma Jajaki pasar Afrika: Pertemuan tingkat tinggi di Bali

M. Rahman Roestan, Direktur Utama Bio Farma, didampingi Sri Harsi Teteki Direktur Pemasaran Bio Farma hadir pada pertemuan tingkat tinggi HLM4 di Bali. “Kami terus kejar target ekspor, sebesar USD 71,6 juta. Kami sudah masuk ke pasar Asia, Timur Tengah, sebagian Afrika, dan beberapa negara amerika latin, tahun ini kami akan menjajaki untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara Afrika” ungkap Rahman.

24 OKTOBER 2018

Bio Farma raih Penghargaan Primaniyarta 2018

PT Bio Farma meraih kembali Penghargaan Primaniyarta kategori Pelopor Pasar Baru dari Kementerian Perdagangan, diterima oleh Sri Harsi Teteki, Direktur Pemasaran Bio Farma yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Indonesia Convention Exhibition, BSD Tangerang Banten.

31 OKTOBER 2018

Menteri BUMN hadir melepas ekspor produk vaksin Bio Farma

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tunjukan komitmen dan dukungan peningkatan ekspor dari BUMN berbagai sektor. Rini hadir langsung melepas ekspor produk vaksin Bio Farma, setelahnya sebelumnya melepas produk dari Pindad dan LEN Industri di Bandung.

01 NOVEMBER 2018

Bio Farma tandatangani Komitmen Gerakan masyarakat Hidup Sehat

Direktur SDM & Umum Bio Farma, Disril Revolin Putra bersama 13 pelaku usaha di kota Bandung menandatangani Komitmen Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bersama Pemerintah Kota Bandung yang dilakukan oleh Walikota Bandung M.Oded Danial dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, dr Rita Verita, pada tanggal 1 November 2018 di GSG Bio Farma.

20 NOVEMBER 2018

"The 1st Meeting of the Heads of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) from the Organization of Islamic Cooperation Member States"

M. Rahman Roestan, Direktur Utama Bio Farma berbicara pada seminar rangkaian forum international "The 1st Meeting of the Heads of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) from the Organization of Islamic Cooperation Member States"

22 NOVEMBER 2018

Pertemuan Kepala Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota OKI , Solidaritas Kemanusiaan Untuk Kemandirian Obat dan Vaksin

Indonesia dipercaya untuk menjadi penyelenggara pertama pada acara Pertemuan Kepala Otoritas Obat dan Makanan dari Negara OKI. Pertemuan ini melahirkan Deklarasi Jakarta yang berisi antara lain komitmen untuk menghasilkan produk farmasi yang halal.

23 NOVEMBER 2018

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) kunjungi Bio Farma

Sejumlah delegasi negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) kunjungi Bio Farma di Bandung, hadir pula perwakilan dari Organisasi Kerjasama Islam OKI, Mr. Abdunur Sekindi dan beberapa perwakilan delegasi serta perwakilan dari Badan POM.

28 NOVEMBER 2018

Badan POM kunjungi Bio Farma

Kepala Badan POM RI, Penny K Lukito, mengunjungi Bio Farma, untuk menindaklanjuti potensi kerjasama sebagai hasil dari pertemuan internasional *The First Meeting of Heads of National Medicines Regulatory Authorities* (NMRAs) from OIC Member Countries, yang baru saja diselenggarakan pada tanggal 20 – 23 November 2018, di Jakarta dan Bandung.

3 DESEMBER 2018

Bio Farma beri akses Sanitasi bersih untuk Al-Fitri Cimaung

Bio Farma melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) memberikan fasilitas untuk toilet bersih beserta kelengkapannya, untuk Siswa SLB Al-Fithri, Cimaung, Kabupaten Bandung.

6 DESEMBER 2018

Bio Farma raih *Top Leader on IT Leadership* 2018

M. Rahman Roestan Direktur Utama Bio Farma raih penghargaan Top Leader on IT Leadership 2018 dari Majalah It Work yang diserahkan langsung oleh Ketua Penyelenggara dan Pemimpin Redaksi Majalah IT Works, M. Lutfi Handayani, MM, MBA. Selain itu Bio Farma juga meraih *TOP IT on Digital Track and Trace System* 2018. Penghargaan ini merupakan inovasi digitalisasi untuk menghindari produk vaksin palsu.

8 DESEMBER 2018

Bio Farma raih Peringkat Gold pada Asia Sustainability Reporting Rating 2018

Bio Farma kembali menerima penghargaan Asia *Sustainability Reporting* 2018, untuk kategori Gold (ASR Rating) dari National Centre For Sustainability Reporting (NCSR).

NAMA & ALAMAT ENTITAS ANAK DAN/ ATAU KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN

Bio Farma per 31 Desember 2018, tidak memiliki entitas anak dan/atau tidak memiliki Kantor Cabang, namun memiliki Kantor Perwakilan di Gedung Pakarti Centre, Jl. Tanah Abang III No. 23-27, Jakarta.

Penyediaan serta Distribusi Nasional dan Internasional melalui:

PT Bio Farma (Persero)
Jl. Pasteur No. 28
Bandung 40161
Indonesia
Telp. (62) 22 203 2755 ext. 747
Fax. (62) 22 204 1306
E-mail: sales@biofarma.co.id

SEBARAN PELANGGAN TAHUN 2018

Produk Vaksin Bio Farma telah mendapatkan Pengakuan Pra Kualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) sehingga dipercaya memenuhi kebutuhan Vaksin sbb:

1. Untuk Bagian Sektor Pemerintah sebaran Pelanggannya adalah Kemenkes RI Pusat sebagai Pembeli yang selanjutnya didistribusikan ke 34 Dinas Kesehatan Provinsi di Indonesia.
2. Untuk Bagian Sektor Penjualan Swasta sebaran pelanggannya yaitu Distributor-Distributor:
   - PT Merapi Utama Pharma
   - PT Rajawali Nusindo
   - PT Kimia Farma
   - PT Indofarma Global Medika
   - PT Sagi Capri
   - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
   - Dan Cabangnya diseluruh Indonesia
3. Untuk Bagian sektor penjualan ekspor sebaran pelanggannya tersebar ke 141 negara negara termasuk 50 negara Islam

SEBARAN PELANGGAN VAKSIN
KE LEBIH DARI 141 NEGARA

1	Afghanistan
2	Albania
3	Algeria
4	Angola
5	Anguilla
6	Antigua & Barbuda
7	Argentina
8	Australia
9	Azerbaijan
10	Bahamas
11	Bangladesh
12	Barbados
13	Belgium
14	Belize
15	Benin
16	Bhutan
17	Bolivia
18	Bosnia and Herzegovina
19	Botswana
20	Brazil
21	British Virgin Island
22	Brunei Darussalam
23	Burkina Faso
24	Burundi
25	Cape Verde
26	Cambodia
27	Cameroon
28	Central Africa
29	Chad
30	China
31	Colombia
32	Comoros
33	Congo
34	Cuba
35	Curacao
36	Djibouti
37	Dominican Rep.
38	East Timor (Timor Leste)
39	Ecuador
40	Egypt
41	El Salvador
42	Equatorial guinea
43	Eritrea
44	Ethiopia
45	Fiji
46	France
47	Gabon
48	Gambia
49	Georgia
50	Germany
51	Ghana
52	Grenada
53	Guam
54	Guatemala
55	Guinea
56	Guinea Bissau
57	Guyana
58	Haiti
59	Honduras
60	Hong kong
61	India
62	Iran
63	Israel
64	Ivory Coast

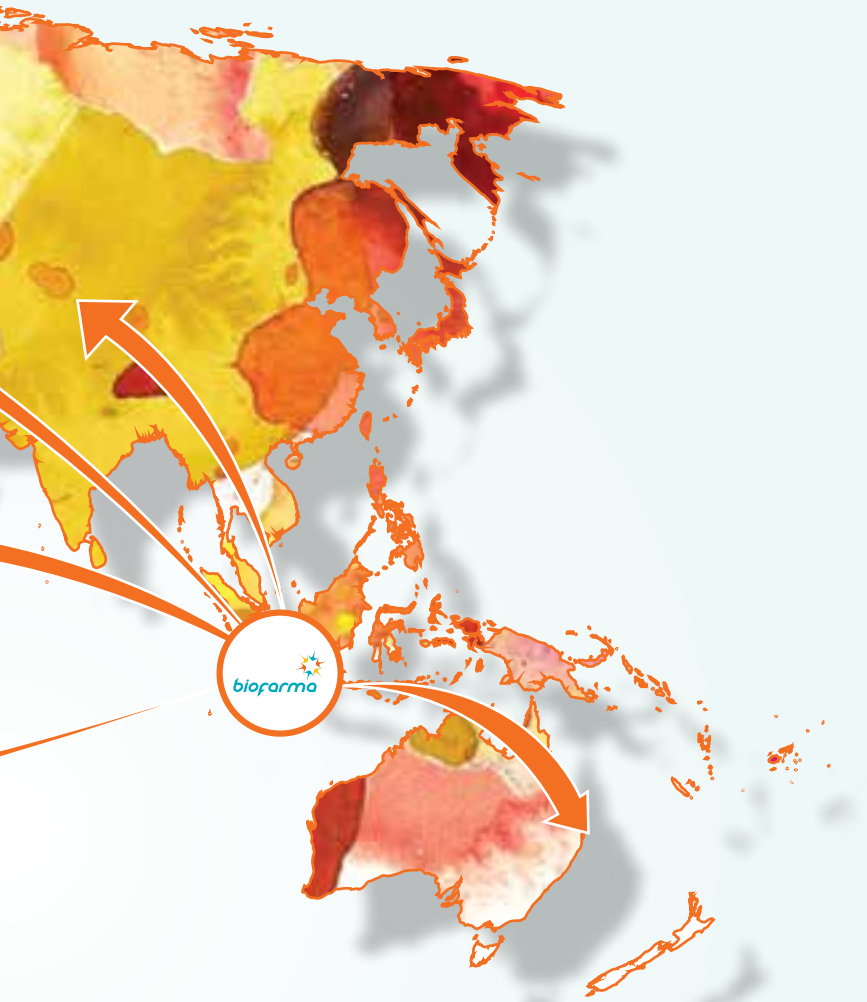

Update: 24 July 2018 OIC Members (49)

65	Jamaica
66	Kenya
67	Kosovo
68	Kyrgyztan
69	Laos
70	Lebanon
71	Lesotho
72	Liberia
73	Libya
74	Macau
75	Madagascar
76	Malawi
77	Malaysia
78	Maldives
79	Mali

80	Mauritania
81	Mauritius
82	Mexico
83	Micronesia
84	Mongolia
85	Montserrat
86	Morocco
87	Mozambique
88	Myanmar
89	Namibia
90	Nepal
91	Netherlands
92	Netherlands Antilles
93	New Zealand
94	Nicaragua

95	Niger
96	Nigeria
97	North Korea
98	Pakistan
99	Palestine
100	Panama
101	Papua New Guinea
102	Paraguay
103	Peru
104	Qatar
105	Philippines
106	Rwanda
107	Saint Kitts & Nevis
108	Saint Lucia

109	Saint Vincent and the Grenadines
110	Sao Tome and Principe
111	Saudi Arabia
112	Senegal
113	Seychelles
114	Sierra Leone
115	Singapore
116	Solomon Island
117	Somalia
118	South Africa
119	South Korea
120	South Sudan
121	Srilanka
122	Sudan
123	Suriname
124	Swaziland

125	Syria
126	Tajikistan
127	Tanzania
128	Thailand
129	Togo
130	Trinidad
131	Tunisia
132	Turkey
133	Turkmenistan
134	Turks & Caicos
135	Uganda
136	Uruguay
137	Uzbekistan
138	Vietnam
139	Yemen
140	Zambia
141	Zimbabwe

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Bio Farma memberikan kemudahan akses informasi secara transparan, tepat dan akurat kepada seluruh *stakeholder* baik itu pemegang saham, regulator maupun masyarakat luas. Bio Farma berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kehandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi melalui situs Bio Farma.

Situs resmi Bio Farma telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan Peraturan yang ada sbb :

1. Website : www.biofarma.co.id
2. Menu Customer Care
3. Portal : www.bumn.go.id/biofarma/application
4. Corporate blog : www.infoimunisasi.com

PETA SITUS: WWW.BIOFARMA.CO.ID

INFORMASI PENTING YANG DISAJIKAN PADA WEBSITE WWW.BIOFARMA.CO.ID

Siapa Kita	Tentang	· Filosofi, Visi, Misi, · Budaya Perusahaan · Tranformasi Logo · *Corporate Indentity* · Kebijakan Manajemen · Fokus Bisnis Kami · Pangsa Pasar & Pangsa Luar Negeri · Strategi Perusahaan · Aktivitas Operasi Bio Farma · *Corporate Reporting – Annual Report & Sustainability Report*
	Kepemimpinan Kami	· Susunan Direksi & Dewan Komisaris Bio Farma · Struktur Organisasi Perusahaan
	Sejarah Kami	Sejarah Bio Farma
	Prestasi Kami	· Penghargaan · Sertifikasi
Keberlanjutan	· SDM · *Access to Vaccine* · CSR	
	· GCG	· Pengawasan Dan Jaminan Mutu · Tanggung Jawab Pada Pelanggan · Proses Penerapan Tata Kelola Perusahaan · Proses Penerapan Gratifikasi · Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran · Pedoman Dewan Komisaris Dan Direksi · Pedoman Perilaku · Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan · Piagam SPI · Manajemen Risiko · Pedoman Direksi · Arti Penting GCG · Prinsip-Prinsip GCG · Tujuan Penerapan GCG · Struktur GCG · Kerangka GCG · Maksud Dan Tujuan GCG · *Road Map GCG* · *The results of GCG Implementation Self Assessment*
Produk & Pelayanan	· Produk · Pelayanan Kesehatan	
Pelayanan Kesehatan	· Jenis Imunisasi & Jadwal Imunisasi · Petunjuk Penyimpanan · Petunjuk Pemberian Vaksin · Produck Pipeline	
Penelitian	· Inovasi Kami · Para Ilmuwan Kami · Kegiatan Riset · Tahapa Uji Klinis	
Media	· Berita · *Media Release* · Q & A · *Event*	

PETA SITUS : HTTP://WWW.BUMN.GO.ID/BIOFARMA/APLICATION

INFORMASI YANG DISAJIKAN PADA WEBSITE HTTP://WWW.BUMN.GO.ID/BIOFARMA/APLICATION

Home	Home	
Tentang Kami		
Kinerja	Prestasi	
Publikasi		
Kontak	Kontak	

CORPORATE BLOG: WWW.INFOIMUNISASI.COM

INFORMASI YANG DISAJIKAN PADA WEBSITE WWW.INFOIMUNISASI.COM ADALAH

1. Home
2. Vaksin
3. Penyakit
4. Perspektif Islam
5. News
6. *Galery*
7. Distributor

INFORMASI PEMEGANG SAHAM SAMPAI DENGAN PEMILIK AKHIR INDIVIDU

Per 31 Desember 2018, Bio Farma merupakan BUMN Non-listed Non-Keuangan, Pemegang Sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi mengenai Pemegang Saham sampai dengan pemilik akhir individu dan struktur grup Perusahaan di Website Bio Farma.

INFORMASI BERIKUT INI DAPAT DILIHAT DI WEBSITE BIO FARMA

1. Isi Kode Etik
2. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan.
3. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir)
4. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN

Dengan kapasitas produksi lebih dari 3,2 miliar dosis per tahun untuk memenuhi kebutuhan vaksin dunia, produk-produk Bio Farma sudah lulus prakualifikasi WHO menjangkau lebih dari 140 negara di dunia melalui WHO dan UNICEF.

PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA

Memasuki paruh kedua tahun 2018, laju pertumbuhan perekonomian dunia cenderung tertahan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi global TW3-18 yang terindikasi melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Aktivitas konsumsi, investasi, dan net ekspor mengalami penurunan akibat pengaruh penguatan keuangan global dan eskalasi ketegangan perdagangan. Kinerja perekonomian global masih diwarnai oleh divergensi arah pertumbuhan dengan kecenderungan melebar. Ekonomi AS melanjutkan penguatan yang didorong stimulus fiskal dan perbaikan sektor tenaga kerja. Di sisi lain, ekonomi kawasan Euro, Jepang, Tiongkok, dan India melemah lebih dalam. PDB Kawasan Euro termoderasi cukup tajam akibat terdampak ketegangan perdagangan dan pelemahan ekonomi Tiongkok.

Di negara inti, perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di Jerman, Perancis dan Italia, sedangkan Spanyol relatif stabil. Penurunan pertumbuhan cukup tajam juga terjadi di India, sementara aktivitas konsumsi global di negara emerging cenderung melambat. Dampaknya, permintaan konsumsi global berkurang dan menyebabkan penurunan aktivitas produksi pada mayoritas negara di dunia, kecuali AS yang masih terakselerasi karena ditopang stimulus fiskal yang menurunkan pajak perusahaan, disertai sentimen bisnis yang positif. Di tengah laju ekonomi yang tertahan, inflasi global masih melanjutkan tren kenaikan akibat pengaruh harga energi dan makanan, serta ketegangan perdagangan.

Pergerakan pasar keuangan global selama TW3-18 masih dipengaruhi sentimen penguatan ekonomi AS dan eskalasi ketegangan perdagangan, yang menim*bulk*an ketidakpastian di pasar keuangan global. Faktor geopolitik dan pelemahan ekonomi turut menyebabkan gejolak di pasar keuangan, bahkan memicu depresiasi tajam nilai tukar Argentina dan Turki. Di pasar obligasi, prospek normalisasi moneter oleh the Federal Reserve *(the Fed)* dan sentimen konflik perdagangan menyebabkan *yield* obligasi AS dan negara emerging meningkat. Pada saat bersamaan, pasar komoditas (kecuali minyak) juga cenderung melemah karena kekhawatiran pasar atas prospek penurunan permintaan akibat ketegangan perdagangan.

Perbedaan kinerja ekonomi dan tantangan di berbagai negara menjadi dasar keberagaman respons kebijakan yang ditempuh. *The Fed* melanjutkan normalisasi kebijakan moneter yang dilakukan secara gradual, sedang European Central Bank (ECB) dan Bank of Japan (BOJ) masih mempertahankan *stance* akomodatif untuk menopang aktivitas ekonomi yang sedang lemah. Di sisi lain, bank sentral di negara emerging seperti Indonesia, India, Turki, dan Argentina menempuh kebijakan moneter lebih ketat dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi tekanan nilai tukar. Sementara *the People's Bank of China* memilih mempertahankan suku bunga dan penurunan *Reserve Requirement Rate* guna meredam tekanan eksternal dan menjaga pertumbuhan domestik.

Berbagai dinamika yang memengaruhi pelemahan perekonomian dunia selama 2018 telah menahan optimisme atas prospek pemulihan ekonomi. Sejumlah lembaga internasional mengoreksi proyeksi pertumbuhan dunia. IMF dalam *World Economic Outlook* Oktober 2018 memprakirakan pertumbuhan PDB dunia pada 2018 hingga 2020 akan relatif sama dengan 2017, yaitu 3,7% tahun ke tahun (yoy) yang merupakan revisi ke bawah dari estimasi Juli 2018 sebesar 3,9%. OECD bahkan lebih pesimis dengan memprediksi pertumbuhan 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 3,5%.

Kinerja perekonomian global ke depan juga diwarnai sejumlah risiko, baik risiko dari ekonomi global maupun domestik *(idiosyncratic)*. Beberapa faktor yang menjadi sumber risiko antara lain pengetatan kondisi keuangan global, pelemahan ekonomi Tiongkok dan beberapa negara maju, fluktuasi harga minyak, dan ketegangan perdagangan. Faktor geopolitik beserta isu domestik di masing-masing negara, dan sejumlah persoalan struktural seperti penurunan produktivitas, aging population, reformasi struktural yang berjalan lambat maupun perubahan iklim.

Dinamika perekonomian yang diwarnai divergensi arah pertumbuhan ekonomi dan beberapa risiko yang membayangi prospek pertumbuhan menjadi topik pembahasan dalam berbagai fora kerjasama internasional. Isu yang diangkat antara lain pentingnya bauran kebijakan moneter, fiskal, dan struktural *(three-pronged approach)* untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi, serta upaya untuk menyikapi kondisi perekonomian global dan kemungkinan spillovers terhadap kawasan.

Upaya memitigasi risiko ketidakpastian global melalui penguatan jaring pengaman keuangan global dan regional juga terus ditingkatkan, dengan memperkuat *Global Financial Safety Net* (GFSN), mendukung penyelesaian *15th General Review of Quotas* (GRQ) IMF, serta menekankan pentingnya penguatan sinergi dan koordinasi antara IMF dan *Regional Financing Arrangements* (RFAs). Forum ASEAN+3 berkomitmen terus melakukan penguatan *Chiang Mai Initiatives*

Multilateralisation (CMIM) dan meningkatkan peran AMRO sebagai lembaga *surveillance* untuk menghadapi potensi spillovers ke kawasan. Negara-negara ASEAN juga secara khusus mencermati peningkatan resiliensi sistem keuangan terhadap *cyber threat*, melalui inisiasi pembentukan wadah *information sharing* untuk isu-isu *cyber security* di kawasan.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat ketahanan eksternal, Bank Indonesia menjalin kerja sama bilateral antara lain dengan Bank Sentral Australia, Jepang, Singapura, dan Tiongkok. Kerja sama dengan skema *swap arrangement* ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, serta meningkatkan perdagangan dan investasi. Bank Indonesia juga berupaya mengelola persepsi positif atas kondisi makroekonomi Indonesia, salah satunya melalui penguatan *linkage Investor Relation Unit-Regional Investor Relation Unit-Global Investor Relation Unit* (IRU-RIRU-GIRU).

PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima triwulan terakhir ini didorong oleh investasi, terutama di sektor pertambangan dan infrastruktur. Pada triwulan ketiga tahun 2018, pertumbuhan PDB secara umum tetap stabil sebesar 5,2 persen yoy, didorong oleh permintaan dalam negeri yang lebih tinggi sehingga diperkirakan mampu mengimbangi hambatan dari sektor eksternal. Meskipun inflasi IHK diproyeksikan perlahan naik tahun depan, konsumsi swasta diperkirakan menguat karena peningkatan belanja sosial dan pasar tenaga kerja yang kuat.

Pembentukan modal tetap bruto juga diperkirakan akan tetap kuat, karena perusahaan- perusahaan saat ini menahan diri untuk investasi, mengingat adanya pemilihan umum yang akan dilanjutkan dengan komitmen- komitmen baru. Demikian juga, konsumsi Pemerintah diperkirakan akan tetap tinggi seiring berlanjutnya reformasi dan pertumbuhan penerimaan, yang menciptakan ruang untuk konsolidasi fiskal dan belanja tambahan.

Dengan adanya ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan global, pertumbuhan dari negara-negara mitra dagang utama yang diproyeksikan melambat, nilai tukar perdagangan (ToT, *terms-of-trade*) yang lebih lemah, dan tingginya investasi dalam negeri yang terus mendorong kebutuhan impor tinggi, menjadikan defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan melebar menjadi 2,9 persen dari PDB pada tahun 2018. Dampak tersebut diperkirakan akan dirasakan lebih kuat pada tahun 2019, ketika defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan menurun menjadi 2,5 persen PDB.

Resiko negatif terhadap prospek pertumbuhan Indonesia tetap besar. Ketegangan perdagangan global, khususnya antara Amerika Serikat dan Cina, walaupun tampak mereda tetapi dapat muncul kembali jika negosiasi yang sedang berlangsung tidak berhasil. Kemungkinan eskalasi lebih lanjut dari sengketa semacam itu tetap menim*bulk*an risiko yang signifikan bagi Indonesia melalui sektor eksternal yang lebih lemah dan harga-harga komoditas yang rendah. Pada saat yang sama, siklus pengetatan saat ini dari Bank Sentral AS terus meningkatkan risiko arus keluar modal dan gejolak keuangan di antara negara-negara pasar berkembang, termasuk Indonesia.

Sampai saat ini, gejolak global belum terlalu berpengaruh terhadap Indonesia, terutama karena fundamental ekonomi makro yang sehat dan penyangga/*buffer* yang memadai. Kondisi tersebut memungkinkan koordinasi kerangka kebijakan moneter, fiskal dan nilai tukar yang baik. Penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang ada saat ini dan membangun kembali cadangan devisa guna mempertahankan penyangga yang cukup besar.

Indonesia dapat bertumbuh lebih cepat, menciptakan pekerjaan lebih banyak serta meningkatkan posisi neraca transaksi berjalan dan pembiayaannya, dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor dan menarik lebih banyak dana global. Agenda kebijakan untuk meningkatkan ekspor dan investasi memerlukan kondisi investasi yang lebih membuka diri terhadap perdagangan, investasi dan tenaga kerja dari pasar global. Hal tersebut termasuk: (i) penurunan hambatan impor termasuk hambatan tarif dan hambatan non-tarif (tertentu); (ii) pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas yang dapat menjadi katalis bagi reformasi kebijakan dan meningkatkan akses pasar produk-produk Indonesia di luar negeri; (iii) pengurangan pembatasan yang signifikan bagi investor asing; (iv) penurunan persyaratan bagi masuknya mereka yang memiliki keterampilan langka untuk secara sementara mengisi kesenjangan keterampilan di dalam negeri.

Langkah-langkah tersebut, bersama dengan penurunan kesenjangan infrastruktur dan sumber daya manusia, tidak hanya akan memperkuat posisi eksternal, tetapi akan meningkatkan daya saing Indonesia dan mendukung percepatan pertumbuhan dalam dekade mendatang.

Sumber: CIEC dan Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar ES.5: Inflasi IHK menurun di Triwulan ke-3 meskipun harga minyak lebih tinggi.
(perubahan yoy, persen)

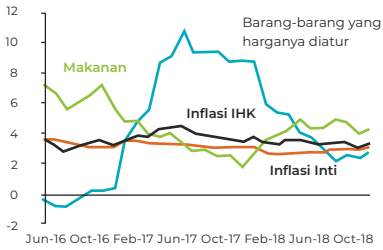

Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Lihat Gambar A.19

Sumber: JP Morgan, BPS dan Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar ES.6: Penerimaan dan pengeluaran yang lebih baik dengan hasil bersih dari defisit anggaran Pemerintah yang lebih rendah yang diproyeksikan untuk tahun 2018.

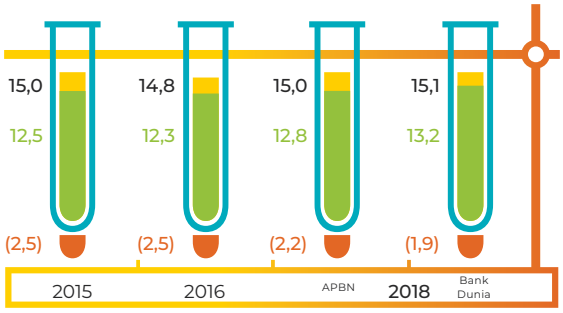

BIO FARMA SEBAGAI PRODUSEN VAKSIN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA DAN GLOBAL

Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Bio Farma, Perusahaan yang berkelas dunia. Lebih dari 140 negara di dunia berhasil dijangkau oleh Bio Farma melalui produk-produk vaksin yang sudah lulus Prakualifikasi WHO, dengan kapasitas produksi lebih dari 3,2 miliar dosis per tahun untuk memenuhi kebutuhan vaksin dunia melalui WHO dan UNICEF. Ini merupakan bentuk pengakuan Internasional pada Bio Farma sebagai produsen vaksin untuk masyarakat global.

Bio Farma juga telah mengekspor vaksin-vaksinnya ke negara-negara Islam. Tidak mudah untuk menembus pasar tersebut karena vaksin harus dibuat dengan bahan-bahan halal, sehingga layak dikonsumsi oleh umat Muslim. Semua vaksin produk Bio Farma sudah diarahkan untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI, Bio Farma juga menyediakan vaksin untuk melindungi masyarakat yang sedang dalam ibadah haji. Bio Farma memposisikan diri sebagai produsen vaksin untuk negara-negara berkembang yang pangsa pasarnya cukup besar dan Bio Farma akan mensuplai vaksin yang berkualitas dengan harga terjangkau sesuai dengan kebutuhan untuk negara berkembang.

Dari total pendapatan perusahaan, 65% di antaranya merupakan sumbangan dari aktivitas ekspor, sementara sisanya dihasilkan dari pasar dalam negeri. Namun, Bio Farma tetap melihat pasar dalam negeri sebagai pasar besar dan menargetkan setidaknya bisa memberikan porsi masing-masing 50%. Sebanyak 12 produk Bio Farma diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Vaksin terbarunya yaitu Pentabio *Five in One*, vaksin yang memiliki lima antigen dalam satu kemasan menjadi terobosan yang mengurangi intensitas suntikan imunisasi dan sampah biologi. Produk Bio Farma yang telah diekspor antara lain produk bOPV ke 46 negara, tOPV ke 82 negara, Campak 52 negara, TT 56 negara, TD 21 negara, DTP 10 negara, DT 3 negara, dan Bio TT 4 negara. Bio Farma juga mengekspor *intermediate product* (*bulk*) ke 24 negara. *Bulk* tetanus ke 6 negara, *bulk* campak 2 negara, *bulk* pertusis 3 negara, *bulk* difteri 5 negara, *bulk* polio 2 negara dan produk lainnya 6 negara.

Bio Farma mulai bergerak menjadi Perusahaan *Life Science*. Bio Farma menyongsong industri bio teknologi untuk lebih maju lagi dengan menciptakan inovasi terbaru terkait dengan *Life Science*. Berusaha memberikan kualitas terbaiknya dan ramah lingkungan, vaksin Bio Farma didasarkan pada riset dan pengalaman yang panjang serta sesuai standar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Peningkatan kapasitas dan kapabilitas produksi dilakukan Bio Farma dengan memperluas pengembangan produk baru, salah satunya difteri rota virus. Fasilitas untuk produksi vaksin juga dilakukan dengan rekombinan berbasis yeast untuk Hepatitis B. Gedung 41 akan dibangun fasilitas *prefilled syringe* kemasan baru, seperti *Unject*. Kemudian gedung 34 akan dibangun fasilitas untuk riset atau produksi skala pilot. Bio Farma juga sedang membangun Gedung 3 untuk fasilitas pendukung seperti QC.

Inovasi dalam mensinergikan diri dengan perkembangan teknologi dilakukan Bio Farma dengan menciptakan inovasi unggulannya. Upaya ini dilakukan untuk menghadapi tantangan ekspor dengan meluncurkan inovasi GS1 atau *QR Code* Monitor untuk mengantisipasi vaksin palsu. Melalui GS1, produk dapat dilacak sampai tingkat konsumen. Kemudian ada Uniject yang menjadi produk andalan dan Pentabio *Vaccine* yang merupakan lima komponen vaksin dalam satu kali suntik. Melalui pengembangan yang dilakukan, Bio Farma senantiasa untuk berperan aktif meningkatkan ketersediaan dan kemandirian produksi vaksin di negara-negara berkembang dan negara-negara Islam untuk menjaga keamanan kesehatan global *(Global Health Security)*.

KEMANDIRIAN BAHAN BAKU OBAT DAN KOMITMEN KONSORSIUM VAKSIN DAN PRODUK BIOLOGI LAINNYA TINGKATKAN DAYA SAING INDUSTRI FARMASI

Sampai saat ini, industri farmasi Indonesia masih mengimpor sekitar 90% bahan baku obat. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Paket Kebijakan Ekonomi XI, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017. Sejumlah Kementerian/Lembaga terkait pun melakukan terobosan guna mendukung kebijakan tersebut dalam upaya meningkatkan daya saing industri farmasi ke depan. Merespon hal tersebut, BPOM RI telah menyusun langkah-langkah konkrit yang bertujuan memfasilitasi akselerasi pengembangan industri farmasi menuju kemandirian bahan baku obat dan produk biologi melalui pelaksanaan kegiatan "Dukungan Kemandirian Bahan Baku Obat dan Pencanangan Komitmen Konsorsium Vaksin dan Produk Biologi Lainnya".

Dukungan pemerintah ini sangat penting mengingat pada saat yang sama juga telah terjadi pergeseran tren penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Hal ini berdampak pada perubahan tren terapi, dimana pengobatan dengan produk-produk biologi hasil inovasi akan terdepan, antara lain terapi gen dan sel punca, juga hasil pengembangan produk darah dan pengembangan berbagai jenis vaksin.

Percepatan pengembangan bahan baku obat maupun produk biologi ini juga tidak terlepas dari dukungan dan penguatan riset dan inovasi yang dikembangkan oleh pihak-pihak terkait seperti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sebagaimana pengawalan terhadap *life cycle* produk terapi lainnya, BPOM RI siap memfasilitasi dan mendampingi sejak awal tahap riset sampai dengan pengembangan dan kesiapan untuk produksi melalui langkah-langkah koordinasi dan sinergi yang penting dilakukan secara intensif, untuk menjamin penyediaan

obat bagi publik yang aman, berkhasiat dan berkualitas. Saat ini pemenuhan CPOB di Indonesia mengacu pada Pedoman CPOB Tahun 2012 yang penyusunannya sebagian mengadopsi GMP *Guideline* yang diterbitkan oleh PIC/s dan WHO. BPOM RI sebagai anggota PIC/s berkewajiban untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap GMP *Guideline* yang berlaku guna penyesuaian Pedoman CPOB, yang pada akhirnya akan digunakan sebagai standar pengawasan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat serta meningkatkan daya saing produk. Dengan demikian produk obat yang dihasilkan industri farmasi Indonesia memenuhi standar dan kualitas internasional.

15 TAHUN, PROSES TERCEPAT PEMBUATAN VAKSIN DI INDONESIA

Ada alasan mengapa vaksin baru bisa diproduksi secara massal hingga puluhan tahun. Ini dikarenakan prosesnya tidak semudah pembuatan obat. Untuk meneliti vaksin yang akan digunakan pada hewan saja, butuh waktu bertahun-tahun lamanya.

Setelah dapat kandidat virusnya untuk vaksin dimasukkan ke laboratorium. Ada *lab scale, up scale*, skala produksi. Setelah itu harus di tes dulu ke hewan. Proses tersebut memakan waktu sekitar dua tahun sampai tiga tahun. Apabila berhasil diuji ke hewan, setelah itu baru bisa diuji coba ke manusia. Waktunya pun bisa memakan waktu hingga tiga tahun dan terdiri dari berbagai tahapan.

Tahap satu untuk *safety*, efikasi. Tahap kedua tambah lagi populasinya. Misalnya dari 500 sampel jadi 1000 atau 2000. Setelah itu fase tiga lebih besar lagi populasinya. Waktunya hampir sama sekitar dua sampai tiga tahun. Satu jenis vaksin baru paling cepat bisa memakan waktu sampai lima belas tahun. Apabila suatu vaksin tidak lolos di satu tahap, maka proses penelitiannya harus diulang dari awal lagi.

RUMITNYA PROSES BISNIS VAKSIN

Selain proses pembuatan, salah satu yang rumit adalah dari sisi bisnisnya. karakteristik regulasi bisnis vaksin sangatlah ketat. Kemudian capital *investment*-nya pun cukup tinggi. Kemudian untuk kompetensi karyawannya pun cukup jarang, Saat ini bidang vaksinologi di universitas-universitas di Indonesia belum ada. Sehingga, dari segi Sumber Daya Manusia-nya pun tidak mudah. Selain itu, fungsi sosialnya pun juga terbilang tinggi. Sehingga, apabila tujuannya untuk mencari keuntungan haruslah dicari dari ekspor vaksin.

GANDENG DUA NEGARA INI, BIO FARMA BISA PERSINGKAT WAKTU TEMUKAN VAKSIN BARU

Indonesia menjalin kerja sama dengan Maroko dan Tunisia dalam pengembangan vaksin. Penandatanganan kerja sama berlangsung di Kementerian PPN/Bappenas. Ini merupakan pelaksanaan komitmen kerja sama Indonesia dengan negara-negara anggota Islamic Development Bank (IDB) dan Organisasi Konferensi Islam *(Organization Islamic Conference/OIC)*.

Bio Farma optimistis kerja sama ini bakal mempersingkat waktu penemuan vaksin baru menjadi lima tahun. Selama ini penemuan vaksin -vaksin baru yang membutuhkan waktu 15-20 tahun. Biasanya selama ini 15 sampai 20 tahun. Dengan kerja sama ini diharapkan dalam waktu 5 tahun sudah ada vaksin baru. Tapi itu pun kalau potential researcher ini tidak menemukan kendala. Dalam upaya penemuan vaksin baru peneliti Bio Farma akan bekerja sama dengan peneliti dari Maroko dan Tunisia.

Bio Farma siap dengan *expert* Bio Farma yang membantu. Mereka juga punya potential researcher yang bisa kita gabungkan juga untuk menemukan vaksin untuk penyakit baru ke depan. Selain dengan Maroko dan Tunisia, sebelumnya Bio Farma juga telah bekerjasama dengan Saudi Arabia dalam pengembangan vaksin. Ini menjadikan Indonesia sebagai *Center of Excellence* untuk vaksin dan bioteknologi, Mereka mau belajar bagaimana produksi vaksin di Indonesia. Ini baru satu contoh. Dengan Saudi Arabia sudah tanda tangan dengan Biofarma untuk transfer teknologi untuk memenuhi kebutuhan vaksinnya.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Bio Farma merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai produsen vaksin dan antisera bagi manusia, Bio Farma menjamin kualitas vaksin yang didistribusikan untuk Program Imunisasi Dasar yang diberikan secara gratis oleh Pemerintah itu memiliki kualitas internasional karena sudah lulus PQ Badan Kesehatan Dunia (WHO). Vaksin produksi Bio Farma terjamin kualitasnya karena sudah melalui proses pengawasan ketat, produksi sampai penyimpanan sudah diaudit BPOM hingga WHO.

Dari sekitar 200 pabrik vaksin di seluruh dunia, kurang lebih baru 30 pabrik yang diakui oleh WHO, salah satunya Indonesia. Bahkan saat ini Indonesia masih satu-satunya negara di Asia Tenggara yang vaksinnya sudah diakui WHO.

Setelah memenuhi kewajiban Program Imunisasi Nasional, barulah vaksin produksi Bio Farma di ekspor ke 140 negara. Indonesia juga termasuk lima negara yang dominan menyuplai vaksin.

Seluruh produk Bio Farma telah memenuhi Standar Internasional, baik dari unsur pengawasan mutu *(Quality Control)* dan jaminan mutu *(Quality Assurance)*. Selain itu, proses produksi dan pengawasan mutu vaksin selalu dipantau oleh National Control Authority (NCA)/Badan POM (BPOM) RI yang diakui oleh WHO.

disuntik ataupun dengan oral. Fungsi utama dari vaksin adalah untuk pencegahan terhadap suatu penyakit yang diakibatkan oleh kuman.

Serum adalah suatu cairan tubuh yang mengandung sistem kekebalan terhadap suatu kuman yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka orang tersebut akan mempunyai kekebalan terhadap kuman yang sama. Fungsi utama serum adalah mengobati suatu penyakit yang diakibatkan oleh kuman.

Yang dapat kita pilih untuk pembentukan sistem kekebalan tubuh: tergantung kondisi dan keadaan. Jika kita menginginkan pencegahan terhadap suatu penyakit, maka kita boleh memilih vaksin. Namun apabila kita telah terkena oleh suatu penyakit, maka kita pilih serum.

Akan tetapi apabila kita hanya menggunakan serum, maka sifatnya hanya mengobati dan tidak meninggalkan imunitas terhadap penyakit yang diobatinya.Jadi, kemungkinan besar kita akan bisa terkena penyakit yang sama berulang kali. Oleh karena itu, selain pemberian serum apabila tubuh kita sudah sembuh dari penyakit segeralah lakukan vaksinasi.

Vaksin dibuat dengan cara melumpuhkan atau mematikan kuman. Dengan konsentrasi tertentu, vaksin disuntikkan ke dalam tubuh seseorang sehingga sistem kekebalan tubuhnya memberikan respon terhadap vaksin tersebut. Pada saat ini vaksin banyak yang dibuat hanya dengan mengambil bagian gen kuman, sehingga relatif lebih aman.

PERBEDAAN VAKSIN DAN SERA

VAKSIN	PERBEDAAN	SERA
Mencegah	Fungsi Utama	Mengobati
Long Term	Kekebalan	Short Term
Mikroorganisme yang dilemahkan	Sumber	Serum hewan atau manusia
Imunisasi Aktif	Jenis Imunisasi	Imunisasi Pasif

Vaksin adalah suatu kuman (bakteri/virus) yang sudah dilemahkan yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh seseorang untuk membentuk kekebalan tubuh (imunitas) secara aktif. Cara memasukkannya bisa dengan

Serum dibuat dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh suatu hewan (sapi, kuda, kambing, dll) sehingga kekebalan tubuhnya memberikan respon terhadap vaksin tersebut. Setelah diuji dan hasilnya menunjukkan

bahwa hewan tersebut telah kebal terhadap vaksin yang dimasukkan, maka dilakukan pengambilan darah melalui vena leher (vena jugularis). Setelah diambil, darah kemudian dipisahkan antara plasma dengan sel-sel dan protein darahnya. Plasma darah kemudian dimurnikan menjadi serum. Serum inilah yang akan memberikan kekebalan kepada seseorang yang melakukan imunisasi dengan serum.

PENJELASAN MASING-MASING SEGMEN USAHA

HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI TENTANG VAKSIN

Vaksinasi disebut juga imunisasi yaitu pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut.

PERBEDAAN VAKSINASI DAN IMUNISASI

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui disuntikkan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Sedangkan, imunisasi merupakan proses dalam tubuh agar seseorang memiliki kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Imunisasi terbagi menjadi imunisasi aktif dan pasif. Vaksinasi termasuk dalam imunisasi aktif sebagai upaya memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu. Berbeda dengan imunisasi pasif yang berarti tubuh diberikan antibodi dan bukan dipancing untuk menghasilkan ketahanan tubuh, misalnya suntikan imunoglobulin. Imunisasi aktif dapat bertahan lebih lama untuk jangka panjang hingga seumur hidup, sedangkan imunisasi pasif hanya bertahan dalam hitungan minggu hingga bulan.

MANFAAT VASIN

Manfaat vaksin paling mendasar adalah sebagai tindakan pencegahan penyakit menular, sebagai tindakan pertahanan dan perlindungan terbaik terhadap infeksi dan berbagai penyakit serius. Vaksin ini bisa berisi produk biologi dan bagian dari virus atau bakteri, maupun virus atau bakteri hidup yang sudah dilemahkan. Hal tersebut berguna untuk merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh.

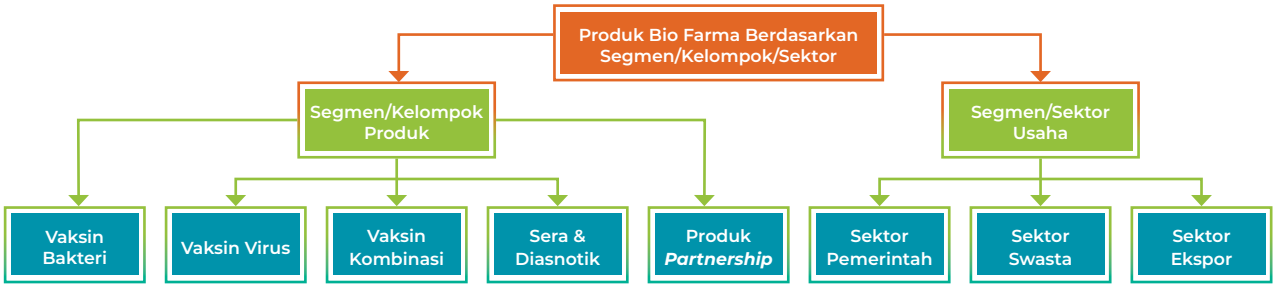

URAIAN MENGENAI SEGMEN/ KELOMPOK PRODUK

SEGMEN / KELOMPOK PRODUK VAKSIN BAKTERI

PRODUK-PRODUK BIO FARMA YANG TERMASUK SEGMEN VAKSIN BAKTERI

1. Vaksin TT

a. Vaksin Tetanus Toksoid (TT) merupakan vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit tetanus.
b. Vaksin TT merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus murni, teradsorbsi kedalam aluminium fosfat.
c. Manfaat Vaksin TT
Vaksin disuntikan TT pada ibu hamil adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh kekebalan pada ibu hamil terhadap infeksi tetanus yaitu dengan menyuntikan vaksin tetanus toxoid.

Tujuan diberikannya imunisasi TT:
- Memberikan kekebalan pasif kepada ibu hamil terhadap tetanus, karena vaksinasi selama hamil juga ikut membantu bayinya menghindari tetanus selama beberapa minggu setelah lahir.
- Mencegah terjadinya penyakit tetanus pada ibu saat hamil, bersalin dan nifas
- Pencegahan terhadap tetanus dan perlindungan bayi baru lahir dari tetanus neonatorum misalnya akibat infeksi tali pusat pada proses persalinan.

d. Kapan diberikan imunisasi TT
Pelayanan program imunisasi vaksin TT dilakukan pada ibu hamil, diberikan 2 kali dengan jarak waktu paling sedikit 1 bulan antara dosis pertama dan dosis kedua. Sebaiknya dosis kedua diberikan paling lambat satu bulan sebelum melahirkan agar menim*bulk*an kekebalan yang mantap.
e. Jumlah dan Dosis Pemberian Imunisasi Tetanus Toksoid
Vaksin TT untuk ibu hamil diberikan 2 kali, dengan dosis 0,5 cc disuntikkan secara intramuskuler atau subkutan. Sebaiknya vaksin TT diberikan sebelum kehamilan 8 bulan. Suntikan TT1 dapat diberikan sejak diketahui positif hamil dimana biasanya di berikan pada kunjungan pertama ibu hamil ke sarana kesehatan. Jarak pemberian (interval) imunisasi TT1 dengan TT2 adalah minimal 4 minggu.

2. Vaksin DT

a. Vaksin difteri merupakan vaksin yang diberikan untuk melawan *Corynebacterium Diphteriae* yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit difteri.
b. Vaksin DT merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri murni yang teradsorbsi kedalam aluminium fosfat.
c. Manfaat Vakdin DT
Vaksin DT diberikan kepada anak-anak guna menangkal penyebaran virus difetri serta penyebaran virus tetanus yang berada di masa-masa rawan, di mana ketika kondisi antibodi yang ada di dalam tubuh tengah berkurang yang diakibatkan oleh proses pertumbuhan. Penyakit difetri sendiri biasanya akan menyerang seseorang serta mampu menim*bulk*an atau menyebabkan infeksi bagian atau infeksi mukosa, baik di dalam saluran sistem pernapasan atau di bagian kulit yang tengah terluka.
d. Yang harus diperhatikan sebelum imunisasi DT
Anak yang sedang sakit ketika jadwal imunisasi tiba untuk menunggu dulu hingga dirinya sembuh. Namun bila anak hanya mengalami pilek, flu, atau demam biasa, tidak masalah untuk diberikan imunisasi saat itu juga. Selain itu, mungkin ada anak yang akan mengalami alergi terhadap imunisasi ini, maka sebaiknya diskusikan hal tersebut dengan dokter anak. Bila memang anak baik-baik saja, maka imunisasi tetap harus dilakukan karena vaksin tak hanya melindungi anak dari ancaman infeksi & juga orang-orang di sekitar Anda.
e. Kapan anak harus diberikan imunisasi DT
- Anak setidaknya mendapatkan lima kali imunisasi DT dengan jadwal berikut:
- Satu dosis pada usia 2 bulan
- Satu dosis pada usia 4 bulan
- Satu dosis pada usia 6 bulan
- Satu dosis pada usia 15-18 bulan
- Satu dosis pada usia 4-6 tahun
- Di Indonesia sendiri, pemberian imunisasi ini dilakukan di sekolah-sekolah, yaitu dengan jadwal seperti berikut:
- Kelas 1 SD, imunisasi vakdin: setiap bulan November.

3. Vaksin DTP

a. Vaksin DTP merupakan vaksin yang diberikan untuk pencegahan terhadap penyakit Diphtheria, Tetanus dan Pertusis (batuk rejan) secara simultan pada bayi dan anak-anak.

b. Vaksin DTP merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus murni, toksoid difteri murni, dan bakteri pertusis yang diinaktivasi, yang teradsorbsi kedalam aluminium fosfat.

c. Manfaat imunisasi vaksin DTP

- Vaksin DPT diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit Difteri (penyakit infeksi bakteri *Corynebacterium* diphtheriae, yang menyebabkan peradangan selaput lendir pada hulu kerongkongan, pangkal tenggorok, dan batang tenggorok). Penyakit ini membentuk lapisan tebal berwarna abu-abu pada tenggorokan, yang dapat membuat anak sulit makan dan bernapas. Bila infeksi dibiarkan dan tidak diobati, racun yang dihasilkan oleh bakteri bisa menyebabkan kerusakan saraf, ginjal, dan jantung.
- Pertusis atau batuk rejan adalah penyakit infeksi bakteri yang menyerang sistem pernapasan dan menyebabkan batuk parah (batuk yang keras, menular, dan mematikan, terutama menyerang anak usia 2 – 6 tahun yang disebabkan oleh infeksi bakteri Bordetella pertusis), Jika anak di bawah satu tahun terkena penyakit ini, kemungkinan dapat mengalami pneumonia, kerusakan otak, kejang, bahkan kematian.
- Tetanus merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kekakuan otot parah, kelumpuhan, dan kejang otot. Penyakit akibat infeksi pada luka yang disebabkan oleh bakteri *Clostridium* tetani dengan gejala berupa kejang). Berbeda dengan difteri dan pertusis yang menular, tetanus tidak ditularkan dari orang ke orang, tetapi dari luka yang kotor dan terpapar tanah

d. Kapan harus diberikan imunisasi DTP

Imunisasi DPT pada anak-anak diberikan sebanyak lima kali, sejak anak berusia 2 bulan hingga 6 tahun. Tiga pemberian pertama pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Pemberian yang ke-4 adalah pada usia 18 bulan, dan pemberian yang terakhir pada usia 5 tahun. Dosis yang diberikan yakni satu kali suntikan setiap jadwal imunisasi.

4. Vaksin BCG (Beku Kering)

a. Vaksin BCG atau *Bacillus Calmette–Guérin* adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi diri terhadap tuberkulosis (TB), yaitu penyakit infeksi yang terutama menyerang paru-paru.

b. Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung *Mycobacterium* bovis hidup yang dilemahkan *(Bacillus Calmette Guerin)*, strain Paris.

c. Manfaat Vaksin BCG

- Untuk pencegahan terhadap penyakit Tuberkulosis.
- Vaksin BCG juga dipakai sebagai terapi pada penyakit kanker kandung kemih.

d. Kapan harus diberikan imunisasi BCG

- Bayi yang baru lahir hingga berusia dua bulan adalah kelompok usia yang paling efektif untuk menerima vaksin ini. Jika bayi sudah berumur lebih dari tiga bulan, harus dilakukan uji tuberkulin terlebih dulu. BCG dapat diberikan apabila hasil uji tuberkulin negatif.
- Orang dewasa juga diperbolehkan menerima vaksin BCG jika belum diberikan semasa anak-anak. Meski demikian, efektivitas vaksin ini pada orang dewasa akan lebih rendah, sehingga jarang dianjurkan. Kecuali, bagi mereka yang berisiko tinggi, seperti petugas medis yang menangani pasien TB.
- Vaksin BCG hanya perlu diberikan satu kali seumur hidup, melalui suntikan yang dilakukan oleh dokter atau petugas medis. Vaksin ini berisi sedikit jumlah bakteri TB yang telah dilemahkan dan akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan bakteri TB nantinya.

5. Vaksin Td

a. Vaksin Td merupakan imunisasi lanjutan dari imunisasi DT agar anak semakin kebal dengan ketiga penyakit infeksi tersebut.

b. Vaksin Td merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri murni, dengan komponen difteri berdosis rendah dan teradsorbsi pada aluminium fosfat.

c. Manfaat Vaksin Td

- Vaksin Td diberikan untuk mencegah pertumbuhan virus yang bisa menyebabkan infeksi, baik itu Tetanus dan Difteri.

d. Kapan harus diberikan imunisasi Td

- Imunisasi Td diberikan ketika anak sudah melebihi usia 7 tahun. Biasanya, imunisasi ini

diberikan pada anak yang berusia 11 tahun. Kemudian diberikan lagi ketika dewasa yaitu pada usia 19-64 tahun.

- Setiap orang direkomendasikan untuk mendapat imunisasi Td setiap 10 tahun. Alasannya, kekebalan tubuh terhadap ketiga penyakit ini bisa saja menurun seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, imunisasi Td lebih dianjurkan untuk orang dewasa.
- Di Indonesia sendiri, pemberian imunisasi ini dilakukan di sekolah-sekolah, yaitu dengan jadwal seperti berikut:
  - Kelas 2-3 SD, diberikan imunisasi Tetanus diphteria (Td) di bulan November.

6. Vaksin Bio-TT

a. Vaksin Bio-TT merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam ampul, mengandung toksoid tetanus murni, teradsorbsi kedalam aluminium fosfat.

b Untuk pencegahan terhadap tetanus dan perlindungan terhadap tetanus neonatorum pada wanita usia subur.

SEGMEN / KELOMPOK PRODUK VAKSIN VIRUS

PRODUK-PRODUK BIO FARMA YANG TERMASUK SEGMEN VAKSIN VIRUS

1. Vaksin Oral Polio

a. Vaksin Oral Polio Vaccine (OPV) yaitu vasin yang mengandung virus polio hidup yang dilemahkan agar tubuh memiliki daya tahan terhadap virus polio yang menyerang. Pemberian vaksin polio jenis OPV ditetes melalui mulut.

b. Vaksin Polio Oral (OPV) adalah vaksin tri- valen merupakan cairan berwarna kuning kemerahan dikemas dalam vial gelas yang mengandung suspensi dari tipe 1,2, dan 3 virus Polio hidup *(strain Sabin)* yang telah dilemahkan. Vaksin Polio Oral ini merupakan suspensi *"drops"* untuk diteteskan melalui droper (secara *oral*).

c. Manfaat Vaksin Oral Polio

- Untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis *tipe1, type 2* dan *tipe 3.*
- Vaksin Oral Polio diberikan untuk menghindari penyakit polio atau poliomyelitis yang menyerang saraf. Virus penyebab infeksi polio hidup di tenggorokan dan saluran usus yang dapat disebarkan melalui kontak cairan ataupun tinja. Polio dapat menyebabkan kelumpuhan organ tubuh, bahkan kematian.

d Kapan harus diberikan vaksin OPV

- Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka vaksin polio biasanya akan diberikan Polio-0 diberikan saat kunjungan pertama setelah lahir. Selanjutnya vaksin ini diberikan 3 kali, saat bayi berumur 2, 4, dan 6 bulan. Pemberian vaksin ini dulang pada usia 18 bulan dan 5 tahun.
- Jika pemberian vaksin polio pada bayi atau anak terlambat, maka dapat terus dilanjutkan hingga dosis lengkap. Ingat, vaksin polio tidak perlu diulang dari awal.
- Apabila setelah vaksin polio, anak mengalami nyeri atau demam, konsultasikan dengan dokter mengenai pemberian obat pereda nyeri, seperti paracetamol atau ibuprofen..
- Sebagaimana obat pada umumnya, vaksin polio juga memiliki risiko memicu alergi dan risiko lain yang tergolong sangat kecil. Disarankan untuk menunda vaksin polio saat kondisi anak tidak fit atau sakit.

2. Vaksin Bivalent Oral Poliomyelitis

a. Vaksin bOPV adalah cairan berwarna ku- ning muda sampai merah muda dalam vial gelas yang mengandung suspensi dari tipe 1 virus Polio hidup yang dilemahkan (strain Sabin).

b. Manfaat Vaksin bOPV: untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis tipe1 & 3..

3. Vaksin Campak (Beku Kering)

a. Vaksin campak adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan, merupakan vaksin beku kering berwarna kekuningan pada vial gelas, yang harus dilarutkan hanya dengan pelarut vaksin campak kering produksi PT Bio Farma yang telah disediakan secara terpisah. Vaksin campak ini berupa serbuk injeksi.

b. Manfaat Vaksin Campak

- untuk mencegah penyakit campak *(measles desease).* Penyakit campak merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh virus. Virus dari penyakit campak bisa tersebar melalui udara. Orang yang terkena penyakit campak biasanya di awali dengan gejala berupa demam, batuk, pilek, mata memerah, lalu muncul bintik-bintik merah kecil di seluruh tubuh. Penyakit campak ini berakibat parah

karena bisa menyebabkan infeksi telinga, infeksi paru-paru, kerusakan otak hingga berujung kematian.

c. Kapan harus memberikan Vaksin Campak
   - ♦ Campak pertama kali diberikan saat anak umur 9 bulan. Campak-2 diberikan pada program BIAS SD kelas 1, umur 6 tahun.

4. Vaksin Hepatitis B Rekombinan

a. Vaksin Hepatitis B adalah vaksin yang mencegah Hepatitis B

b. Vaksin Hepatitis B rekombinan mengandung antigen virus Hepatitis B, HBsAg, yang tidak menginfeksi yang dihasilkan dari biakan sel ragi dengan teknologi rekayasa DNA. Vaksin Hepatitis B rekombinan berbentuk suspensi steril berwarna keputihan dalam prefill *injection device*, yang dikemas dalam aluminum *foil pouch, and vial*.

c. Kapan harus memberikan Vaksin Hepatitus B
   - ♦ Hepatitis B diberikan tiga kali. Yang pertama dalam waktu 12 jam setelah lahir. Imunisasi ini dilanjutkan saat bayi berumur 1 bulan, kemudian diberikan lagi saat 3-6 bulan.
   - ♦ Vaksin ini juga diberikan kepada mereka yang memiliki fungsi kekebalan tubuh buruk seperti HIV/AIDS dan mereka yang lahir prematur.
   - ♦ Pada orang sehat imunisasi rutin menghasilkan lebih dari 95% orang yang terlindungi. Tes darah untuk memastikan bahwa vaksin telah berhasil direkomendasikan pada mereka yang berisiko tinggi. Dosis tambahan mungkin diperlukan pada orang dengan fungsi kekebalan tubuh yang buruk, tetapi tidak diperlukan oleh kebanyakan orang. Pada mereka yang telah terpapar virus hepatitis B tetapi tidak diimunisasi sebelumnya, immunoglobulin hepatitis B harus diberikan sebagai tambahan terhadap vaksin. Vaksin diberikan dengan suntikan ke dalam otot.
   - ♦ Efek samping serius dari vaksin hepatitis B sangat jarang terjadi. Nyeri dapat terjadi pada tempat suntikan. Vaksin ini aman digunakan selama kehamilan maupun pada saat menyusui.

5. Vaksin Flubio

a. Vaksin influenza atau vaksin flu, adalah vaksin yang melindungi tubuh kita dari influenza.

b. Vaksin influenza HA merupakan suspensi jernih atau sedikit berwarna keputihan (slightly turbid), mengandung haemaggluti- nin dari antigen virus influenza. Vaksin in- fluenza HA berupa suspensi yang diberikan untuk injeksi.

c. Manfaat Vaksin Influenza
   - ♦ Untuk pencegahan influenza musiman.

d. Kapan harus memberikan Vaksin Influenza
   - ♦ Vaksin influenza diberikan kepada orang sehat usia 12 tahun ke atas. Karena secara alami influenza bersifat musiman, pemberian vaksin direkomendasikan sekali dalam setahun.

SEGMEN / KELOMPOK PRODUK VAKSIN KOMBINASI

PRODUK-PRODUK BIO FARMA YANG TERMASUK SEGMEN (PRODUK) VAKSIN

1. Vaksin Pentabio (DTP-HB-Hib)

a. Vaksin Pentabio adalah imunisasi kombinasi Pentavalen terdiri dari 5 jenis vaksin sekaligus diantaranya DPT-HB,Hib pada anak bayi dan imunisasi lanjutan pada anak batita sesuai standar.

b. Vaksin Pentabio adalah Vaksin DTP-HB-Hib (Vaksin Jerap Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B Rekombinan, *Haemophilus influenzae* tipe b) berupa suspensi homogen yang mengandung toksoid tetanus dan difter-i murni, bakter-i pertusis (batuk rejan) inaktif, antigen permukaan hepatitis B (HBsAg) murni yang tidak infeksius, dan komponen Hib sebagai vaksin bakteri sub unit berupa kapsul polisakarida *Haemophilus influenzae* tipe b tidak infeksius yang dikonjugasikan kepada protein toksoid tetanus.

c. Manfaat Vaksin Pentabio
   - ♦ Untuk pencegahan terhadap penyakit Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B & Haemophilus Influenza tipe B.

d. Kapan harus memberikan Vaksin Influenza
   - ♦ Imunisasi DPT-HB-Hib merupakan imunisasi rutin yang diberikan kepada sasaran pada usia 0-11 bulan. Imunisasi lanjutan DPT-HB,Hib dan Campak, diberikan kepada batita (Bawah Tiga Tahun).

SEGMEN / KELOMPOK PRODUK SERUM

PRODUK-PRODUK BIO FARMA YANG TERMASUK SEGMEN SERUM

1. Serum Anti Tetanus (BioSAT)

a. Serum Anti Tetanus (BioSAT) adalah antisera yang dibuat dari plasma kuda yang dikebalkan terhadap tetanus, serta mengandung fenol sebagai pengawet, berupa cairan bening kekuningan.

b. Manfaat Serum ATS
   - Untuk pengobatan terhadap penyakit tetanus.

c. Indikasi suntikan ATS *(Anti Tetanus Serum)*
   - Luka cukup besar (dalam lebih dari 1 cm)
   - Luka berbentuk bintang
   - Luka berasal dari benda yang kotor dan berkarat
   - Luka gigitan hewan dan manusia
   - Luka tembak dan luka bakar
   - Luka terkontaminasi, yaitu: luka yang lebih dari 6 jam tidak ditangani, atau luka kurang dari 6 jam namun terpapar banyak kontaminasi, atau luka kurang dari 6 jam namun timbul karena kekuatan yang cukup besar (misalnya luka tembak atau terjepit mesin)

d. Kapan memberikan suntikan Serum ATAS
   - Penderita tidak memiliki riwayat imunisasi tetanus yang jelas atau tidak mendapat *booster* selama 5 tahun atau lebih

2. Serum Anti Difteri (BioADS)

Manfaat Serum BioADS: untuk pengobatan terhadap penyakit diphtheria.

3. Serum Anti Bisa Ular (BioSave)

a. Serum Anti Bisa Ular (ABU) adalah suatu serum tipikal mengandung anti venom/anti venin terhadap racun ular jenis tertentu, yang dibuat dari antibodi hewan

b. Serum Anti Bisa Ular Polivalen *(BioSave)* adalah an- tisera murni yang dibuat dari plasma kuda yang memberikan kekebalan terhadap bisa ular yang bersifat neurotoksik (seperti ular dari jenis Naja sputatrix – Ular Kobra, *Bungarus fasciatus* – Ular Belang) dan yang bersifat hemotoksik (ular Agkistrodon rhodostoma – Ular Tanah) yang banyak ditemu- kan di Indonesia, serta mengandung fenol sebagai pengawet.

   Serum Anti Bisa Ular Polivalen berupa cairan bening kekuningan.

c. Untuk pengobatan terhadap gigitan ular berbisa yang mengandung efek neurotoksik (Naja sputratix/ula kobra dan Bungarus fasciatus/ ular belang) dan efek hemotoksis (*Ankystrodon rhodostoma*/ular tanah).

d. ABU produksi Bio Farma, yang selama ini digunakan di Indonesia, hanya untuk menetralkan racun ular berbisa, dari tiga jenis saja.

   ABU digunakan sebagai terapi anti venom lini pertama untuk:
   - Racun ular berbisa, yang bersifat neurotoksik:
   - Naja sputratix, atau ular kobra, atau ular sendok
   - JawaBungarus fasciatus, atau ular welang, jarang menggigit manusia
   - Racun ular berbisa, yang bersifat hemotoksik:
     - *Calloselasma rhodostoma*, atau *Agkistrodon rhodostoma*, atau ular tanah, atau juga dikenal di Malaysia sebagai Malayan pit viper

   Efek terapi ABU adalah untuk menetralkan racun ular berbisa yang berada dalam tubuh manusia secara sistemik.

SEGMEN / KELOMPOK PRODUK DIAGNOSTIKA

PRODUK-PRODUK BIO FARMA YANG TERMASUK SEGMEN DIAGNOSTIKA

1. PPD RT 23 (Purified Protein Derivative)

a. Manfaat PPD RT 23: untuk pengujian kepekaan seseorang terhadap infeksi tuberkulosis.

b. Tuberkulin Purified Protein Derivative (PPD) RT 23 adalah cairan bening yang mengandung PPD dari galur terpilih bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulin PPD RT 23 diproduksi dengan kekuatan 2 tuberculin unit (T.U, dimana 1 T.U = 0,02 mcg (microgram) Tuberkulin PPD RT 23). 1 mL larutan Tuberkulin mengandung 50 mcg penstabil, *polysorbate* 80 (Tween 80) dan 100 mcg pengawet, *potassium hy- droxyquinoline sulphate* (Khinosol) dalam *buffer fosfat*.

c. Indikasi

   Untuk tujuan diagnostik. Uji Mantoux dengan *Tuberculin* PPD RT 23 merupakan alat pengujian dalam menentukan apakah seseorang pernah terinfeksi oleh *Mycobacterium tuberculosis*.

SEGMEN / KELOMPOK PRODUK *PARTNERSHIP*

PRODUK-PRODUK BIO FARMA YANG TERMASUK SEGMEN *PARTNERSHIP*

1. Vaksin Menivax ACYW (Meningitis)

- Untuk pencegahan terhadap penyakit radang selaput otak.

FASILITAS DAN KUALITAS PRODUKSI BIO FARMA

Bio Farma, produsen vaksin Indonesia yang namanya telah dikenal internasional, mulai bergerak menjadi Perusahaan Life Science. Bio Farma menyongsong industri bio teknologi untuk lebih maju lagi dengan menciptakan inovasi terbaru terkait dengan *Life Science*. Bio Farma memberikan kualitas yang terbaik, inovatif di berbagai bidang dan ramah lingkungan. Vaksin Bio Farma didasarkan pada riset dan pengalaman yang panjang, mengacu pada standar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Standar Internasional dan Sistem Manajemen Mutu terkini.

Sejak tahun 1997, produk Bio Farma merupakan salah satu dari sekitar 30 produsen vaksin di dunia yang telah mendapatkan Prakualifikasi WHO. Bio Farma telah menerapkan berbagai sistem terintegrasi, antara lain: CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dari Badan POM dan current *Good Manufacturing Practices* (cGMP) dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), *Good Laboratory Practices* (GLP), *Good Clinical Pratices* (GCP), *Good Distribution Practices* (GDP), sistem manajemen terpadu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan OHSAS 18001:2007. Serta panduan world class standard antara lain ISO 26000 guidance for CSR, Enterprise Risk Management ISO 31000, International Financial Reporting Standard (IFRS) dan Teknologi Informasi 27000.

Saat ini, Bio Farma beroperasi di dua lokasi yang berbeda, yaitu Jalan Pasteur No. 28 Bandung dengan luas lahan 91.058 m2 yang digunakan untuk fasilitas Produksi, Penelitian dan Pengembangan, Pemasaran, serta Administrasi. Sedangkan lokasi kedua berada di Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan luas lahan 282.441 m2 yang digunakan untuk pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan laboratorium. Untuk mendukung kelancaran operasional, Bio Farma memiliki juga Kantor Perwakilan di Gedung Pakarti Centre, Jl. Tanah Abang III No. 23-27, Jakarta.

Untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas produksi Bio Farma memperluas pengembangan produk baru, salah satunya difteri rota virus. Fasilitas untuk produksi vaksin juga dilakukan dengan rekombinan berbasis *yeast* untuk Hepatitis B. Gedung 41 akan dibangun fasilitas *prefilled syringe* kemasan baru, seperti Uniject. Kemudian gedung 34 akan dibangun fasilitas untuk riset atau produksi skala pilot. Bio Farma juga sedang membangun Gedung 3 untuk fasilitas pendukung seperti QC.

PROSES PRODUKSI DAN PENGUJIAN VAKSIN BIO FARMA

Vaksin merupakan antigen (mikroorganisma) yang diinaktivasi atau dilemahkan. Jika vaksin diberikan kepada orang yang sehat, maka akan membentuk kekebalan atau antibodi spesifik terhadap mikroorganisma tersebut. Jika terpapar, akan kebal dan tidak sakit. Bahan dasar membuat vaksin memerlukan mikroorganisma, baik virus maupun bakteri. Menumbuhkan mikroorganisma memerlukan media tumbuh yang disimpan pada suhu tertentu.

Proses produksi vaksin Bio Farma dilakukan melalui proses yang sangat ketat dan berstandar tinggi, mulai dari penyediaan bahan baku yang berasal dari rekanan yang memiliki kualitas tertentu. Fasilitas produksi yang harus tervalidasi, baik alat dan penunjang lainnya sehingga fasilitas penyimpanan barang jadi dan proses distribusi dimonitor secara ketat agar tetap memenuhi faktor kualitas, kemanan dan efektivitas yang konsisten.

Proses produksi vaksin, diawali dengan pemilihan dan penanaman bibit/mikroorganisma/virus dan bakteri terpilih yang tumbuh kemudian dipanen, diinaktivasi, dimurnikan, diformulasi dan kemudian dikemas. Rangkaian proses pembuatan vaksin tersebut dipantau dengan regulasi cara pembuatan obat yang baik atau disebut standar CPOB, juga dikenal Good Manufacturing Practice (GMP) sehingga produk terjaga dalam kualitas yang baik. Setiap batch yang diproduksi harus lulus pengujian mutu *(Quality Control)*, dan jaminan mutu *(Quality Assurance*). Setiap batch produk yang dihasilkan akan dilaporkan ke BPOM untuk kemudian diperiksa dan bila sudah lulus, BPOM akan mengeluarkan sertifikat lulus uji untuk setiap batch vaksin. Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana setiap batch yang dihasilkan sangat terjaga kualitasnya.

Vaksin produksi Bio Farma yang digunakan Pemerintah untuk program imunisasi nasional (Pentabio (dtp-hb-hib), DT, TD, TT, Hepatitis b, Campak, Polio, dan BCG) adalah vaksin dengan proses pembuatan yang sangat ketat sesuai standar WHO serta sudah mendapatkan release dari Badan POM.

Membuat vaksin jenis baru bukanlah hal yang mudah. Membuat vaksin diawali dari riset beban penyakit *(diseases burden)*, hingga menemukan bibit mikroorganisma yang

baik. Formulasinya dapat memakan waktu 10 sampai dengan 12 tahun. Setiap tahap pengembangan ini senantiasa harus dalam tatanan CPOB. Sistem CPOB dan dokumentasi harus terimplementasi dengan baik. Riset yang lama dikarenakan bibit yang dipakai nantinya harus terbukti mempunyai karakter yang aman dan efektif.

KINERJA PER SEGMEN USAHA

PRODUKSI

Realisasi beban produksi tahun 2018 untuk memproduksi produk jadi maupun produk dalam proses sebesar Rp1,83 triliun, naik sebesar Rp109,19 miliar atau meningkat sebesar 6,33% bila dibandingkan dengan realiasasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp1,72 trilliun dan sebesar Rp56 miliar atau 3,16% di atas RKAP sebesar Rp1,78 triliun.

2. Realisasi Beban Produksi Vaksin Bakteri
   Pada tahun 2018 tercatat realisasi beban produksi untuk vaksin bakteri sebesar Rp266,70 miliar, naik sebesar Rp51,65 miliar atau 24,02% bila dibandingkan dengan realiasasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp215,05 miliar, dan Rp0,02 miliar atau 0,01% di bawah RKAP 2018 sebesar Rp266,72 miliar.

   Bila dibandingkan dengan realiasi tahun 2017 beban produksi Vaksin Bakteri meningkat sebesar 24,02% atau sebesar 51,65 miliar. Hal ini disebabkan oleh seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan pasar terhadap beberapa jenis vaksin bakteri diantaranya vaksin TT 10 ds, Bio TT 1 ds, Bio Td 1 ds, Td 10 ds, DT 10 ds, Bulk Difteri, bulk Tetanus dan bulk Pertusis sehingga meningkatnya jumlah produksi vaksin Bio Farma pada tahun 2018.

KINERJA SEGMEN VAKSIN BAKTERI

(Dalam Juta Dosis & Rp/Miliar)

Produksi	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Produksi Vaksin Bakteri (juta dosis)	435,38	531,50	536,98	392,70	670,44	543,54	38,41	(18,93)	150,84	(126,90)
Realisasi Beban Produksi Vaksin Bakteri (Rp/Miliar)	229,64	263,67	236,93	215,05	266,72	266,70	24,02	(0,01)	51,65	(0,02)

REALISASI PRODUKSI VAKSIN BAKTERI

(Dalam Juta Dosis)

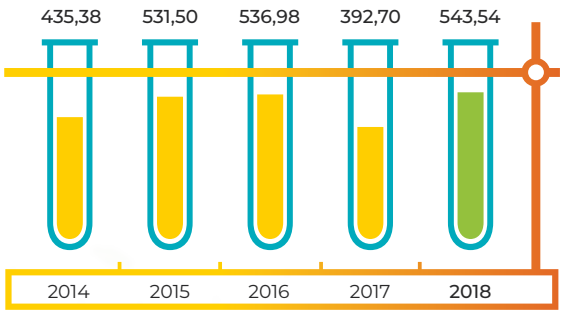

1. Realisasi Produksi Vaksin Bakteri
   Pada tahun 2018 tercatat sebesar 543,54 juta dosis, naik sebesar 150,84 juta dosis atau 38,41% dibandingkan dengan produksi vaksin bakteri tahun 2017 yaitu sebesar 392,70 juta dosis dan 126,90 juta dosis, atau 18,93% di bawah RKAP sebesar 670,44 juta dosis. Meningkatnya jumlah vaksin bakteri disebabkan pada tahun 2018 adanya *outbreak* Difteri. Sehingga produksi vaksin Bio Td 1 ds, dan Td 10 ds meningkat masing-masing sebesar 1.122% dan 133,77%.

   Tercatat jumlah realisasi beban produksi Vaksin Bio Td 10 ds pada tahun 2018 sebesar Rp15,10 miliar atau meningkat sebesar 2.121,32% bila dibandingkan dengan realisasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp680 juta, selisihnya sebesar Rp14,43 miliar.

   Jumlah realisasi beban produksi Vaksin Td 10 ds pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp100,10 miliar atau meningkat sebesar 133,77% bila dibandingkan dengan realisasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp42,82 miliar, selisihnya sebesar Rp57,28 miliar atau 156,73% diatas RKAP 2018 sebesar Rp38,99 miliar.

BEBAN PRODUKSI VAKSIN BAKTERI
(Dalam Rp/Miliar)

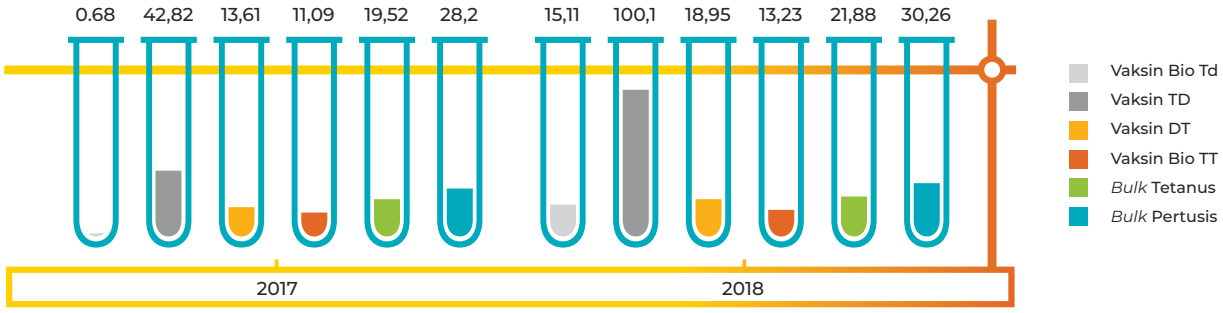

KINERJA SEGMEN VAKSIN VIRUS
(Dalam Juta Dosis & Rp/Miliar)

Produksi	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Produksi Vaksin Virus (juta dosis)	3.094,21	3.406,32	3.937,41	2.898,95	2.649,43	2.117,50	(26,96)	(20,08)	(781,45)	(531,94)
Realisasi Beban Produksi Vaksin Virus(Rp/Miliar)	457,44	506,16	529,54	532,84	506,16	426,87	(19,89)	(15,67)	(105,97)	(79,29)

REALISASI PRODUKSI VAKSIN VIRUS
(Dalam Juta Dosis)

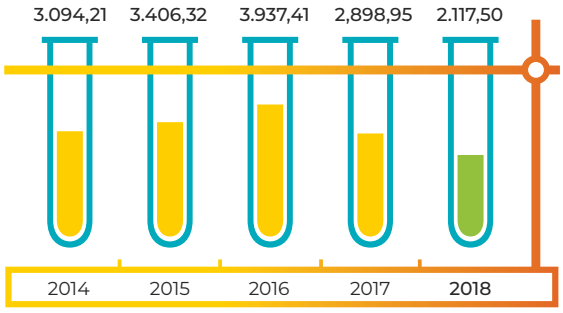

1. Realisasi Produksi Vaksin Virus
   a. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 2.117,50 juta dosis, turun sebesar 781,45 juta dosis atau 26,96% dibandingkan dengan produksi vaksin virus tahun 2017 yaitu sebesar 2.898,95 juta dosis dan 531,94 juta dosis atau 20,08% di bawah RKAP sebesar 2.649,43 juta dosis.
   b. Menurunnya jumlah produksi vaksin virus disebabkan oleh adanya penurunan produksi bulk polio akibat permintaan ekspor *Bulk* Polio menurun.
2. Realisasi Beban Produksi Vaksin Virus
   Pada tahun 2018 tercatat realisasi beban produksi untuk vaksin virus sebesar Rp426,87 miliar, turun sebesar Rp105,97 miliar atau turun 19,89% bila dibandingkan dengan realiasasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp532,84 miliar, dan Rp79,29 miliar atau 15,67% di bawah RKAP 2018 sebesar Rp506,16 miliar.

Bila dibandingkan dengan realiasi tahun 2017 beban produksi Vaksin Virus menurun sebesar 19,89% atau sebesar 105,97 miliar. Hal ini disebabkan oleh seiring dengan menurunnya jumlah permintaan pasar terhadap beberapa jenis vaksin virus diantaranya *Bulk* Polio, vaksin BOPV 10 ds, BOPV 20 ds, VHB Bayi/anak 1 ds sehingga menurunnya jumlah produksi vaksin tersebut pada tahun 2018.

Tercatat jumlah realisasi beban produksi *Bulk* Polio pada tahun 2018 sebesar Rp146,88 miliar atau turun sebesar 44,52% bila dibandingkan dengan realisasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp264,74 miliar, selisihnya sebesar Rp117,85 miliar. Jika dibandingkan dengan RKAP 2018 yaitu 56,22 miliar atau 27,68% di bawah RKAP 2018 sebesar Rp203,10 miliar.

Menurunnya jumlah produksi Polio Bio Farma hal ini disebabkan oleh Badan kesehatan WHO mengumumkan tahun 2020 mendatang, vaksin polio

akan dihentikan produksi dan suplainya (eradikasi). Pasalnya, kasus polio di dunia sudah menurun dan bisa dinyatakan bebas polio khususnya di negara berkembang. Sekitar 59% dari total penjualan ekspor Bio Farma adalah dari *bulk* polio. Hal ini sudah mulai berdampak untuk penjualan ekspor Bio Farma sejak tahun 2016 lalu, nilai ekspor *bulk* polio Bio Farma mencapai US$ 55,83 juta. Secara keseluruhan nilai ekspor Bio Farma pada 2016 turun dari US$ 121 miliar tahun 2015 menjadi US$ 93 miliar tahun 2016. Ini karena regulasi internasional WHO sudah masuk dalam tahap eradikasi polio di tahun 2017, jadi ada satu tipe vaksin polio Bio Farma yang tidak boleh lagi dijual yaitu tipe 1 ini sudah masuk eradikasi, sisa tipe 2 dan 3 yang masih diproduksi.

Terdapat tiga tipe vaksin polio, hanya satu tipe yang sudah eradikasi yaitu tipe 2. Bio Farma masih mensuplai dua tipe vaksin polio lainnya.

Hal ini membuat Bio Farma sebagai salah satu produsen vaksin polio terbesar di dunia, segera mengambil langkah guna menyelamatkan bisnis perusahaan ini. Suksesnya pemberantasan penyakit polio memang menjadi tantangan tersendiri bagi Bio Farma.

Jumlah realisasi beban produksi Vaksin BOPV 10 ds pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp34,14 miliar atau menurun sebesar 30,83% bila dibandingkan dengan realisasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp49,36 miliar, selisihnya sebesar Rp15,22 miliar, dan 6,74 miliar atau 24,61% diatas RKAP 2018 sebesar Rp27,40 miliar.

Jumlah realisasi beban produksi Vaksin BOPV 20 ds pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp70,48 miliar atau menurun sebesar 16,85% bila dibandingkan dengan realisasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp84,76 miliar, selisihnya sebesar Rp14,28 miliar, dan 3,36 miliar atau 4,55% dibawah RKAP 2018 sebesar Rp73,84 miliar.

BEBAN PRODUKSI VAKSIN VIRUS
(Dalam Rp/Miliar)

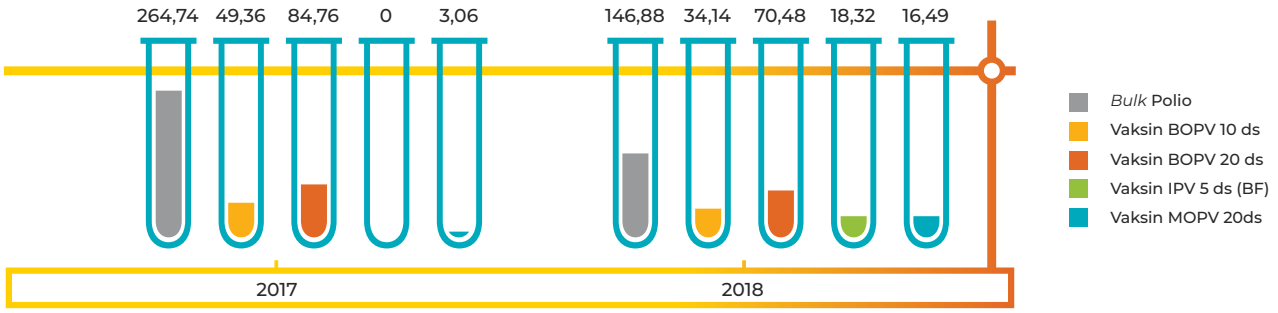

KINERJA SEGMEN VAKSIN KOMBINASI
(Dalam Juta Dosis & Rp/Miliar)

Produksi	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Produksi Vaksin Kombinasi (Juta dosis)	312,98	15,79	20,72	25,85	23,70	38,82	50,13	63,77	12,96	15,11
Realisasi Beban Produksi Vaksin Kombinasi (Rp/Miliar)	163,49	159,72	148,74	205,28	184,21	307,89	49,99	67,14	102,61	123,68

REALISASI PRODUKSI VAKSIN KOMBINASI
(Dalam Juta Dosis)

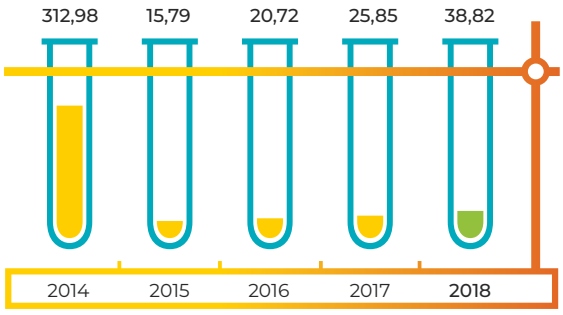

1. Realisasi Produksi Vaksin Kombinasi
   a. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 38,82 juta dosis, naik sebesar 12,96 juta dosis atau 50,13% dibandingkan dengan produksi vaksin kombinasi tahun 2017 yaitu sebesar 25,85 juta dosis dan 15,11 juta dosis miliar atau 63,77% di atas RKAP sebesar 23,70 juta dosis.
   b. Meningkatnya jumlah produksi vaksin kombinasi disebabkan meningkatnya jumlah permintaan vaksin Pentabio 5 ds oleh pemerintah.

2. Realisasi Beban Produksi Vaksin Kombinasi
   Pada tahun 2018 tercatat realisasi beban produksi untuk vaksin kombinasi sebesar Rp307,89 miliar, naik sebesar Rp102,61 miliar atau 49,99% bila dibandingkan dengan realiasasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp205,28 miliar, dan Rp123,68 miliar atau 67,14% di atas RKAP 2018 sebesar Rp184,21 miliar.

   Bila dibandingkan dengan realiasi tahun 2017 beban produksi Vaksin Bakteri meningkat sebesar 49,99% atau sebesar 102,61 miliar. Hal ini disebabkan oleh seiring dengan meningkatnya penjualan kepada Pemerintah melalui kontrak pengadaan vaksin regular (ORI Difteri).

   Outbreak respons immunization (ORI) merupakan standard operating procedure apabila terjadi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang sebenarnya bisa dicegah oleh imunisasi (PD3I), dalam hal ini Difteri. ORI dilaksanakan langsung bila ditemukan penderita Difteri oleh Puskesmas. Sasaran ORI adalah anak berusia usia 1 s.d 19 tahun.

ORI bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dengan menutup immunity gap sehingga diharapkan dapat memutus mata rantai penularan. Karena itu, ORI Difteri sebanyak tiga putaran perlu dilakukan untuk membentuk kekebalan tubuh dari bakteri *corynebacterium diphteriae*. Pemerintah menjamin ketersediaan vaksin difteri (DPT-HB-Hib, DT dan Td) yang digunakan untuk kegiatan ORI dan kegiatan imunisasi rutin. Distribusi vaksin dilakukan secara berjenjang sampai ditingkat pelayanan.

Bio Farma sebagai BUMN produsen Vaksin dan Antisera terbesar di Asia Tenggara, berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan vaksin, khususnya vaksin Difteri. Vaksin produksi Bio Farma yang digunakan pada ORI dan program imunisasi nasional, terjamin kualitas, keamanan, khasiat dan mutunya karena telah dilakukan pengujian untuk mendapatkan izin dari Badan POM, serta telah mendapatkan pengakuan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Saat ini produk vaksin Bio Farma sudah digunakan oleh lebih dari 140 negara, termasuk diantaranya 57 negara Islam.

Menghadapi KLB Difteri, Biofarma menambah kapasitas produksi vaksin dengan kandungan Difteri dengan memaksimalkan produksi, serta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sehingga permintaan ekspor telah dinegosiasi untuk dijadual ulang setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Vaksin dengan kandungan difteri yang diproduksi Biofarma terdiri dari: 1) Vaksin DTP-HB-Hib (Pentabio) diberikan untuk anak usia 1-5 tahun; 2) Vaksin DT diberikan untuk usia 5-7 tahun; dan 3) Vaksin Td diberikan untuk usia diatas 7 tahun.

Hal terpenting yang perlu diingat adalah bagaimana masyarakat secara sadar dapat mencegah agar KLB Difteri ataupun KLB penyakit lain tidak perlu terjadi karena dapat dicegah dengan imunisasi. Karena satu-satunya cara mencegahnya adalah dengan penguatan program imunisasi nasional dengan mengupayakan semua anak mendapatkan imunisasi rutin dengan lengkap.

KINERJA SEGMEN SERUM & DIAGNOSTIKA
(Dalam Ribu Vial/ampul & Rp/Miliar)

Produksi	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Produksi Serum & Diagnostika (Ribu Vial/ampul)	456,73	507,42	697,82	460,40	612,40	620,51	34,77	1,32	160,11	8,11
Realisasi Beban Produksi Serum & Diagnostika (Rp/Miliar)	32,20	33,06	38,26	58,57	49,99	23,42	(60,01)	(53,14)	(35,15)	(26,57)

REALISASI PRODUKSI SERUM & DIAGNOSTIKA
(Dalam Ribu Vial/ampul)

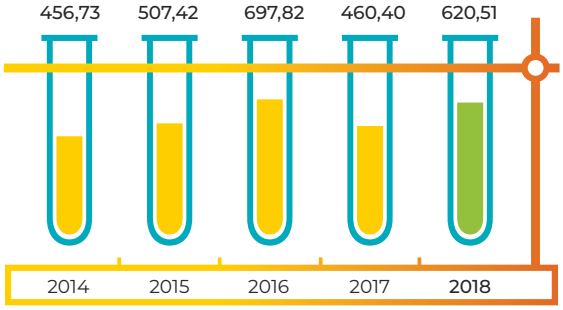

a. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 620,51 ribu vial/ampul, naik sebesasr 160,11 ribu vial/ampul atau naik 34,77% dibandingkan dengan produksi serum & diagnostika tahun 2017 yaitu sebesar 460,40 ribu vial/ampul dan 1,32% diatas RKAP sebesar 612,40 ribu vial/ampul.
b. Meningkatnya jumlah produksi serum dan diagnostika terutama disebabkan oleh naiknya BIOSAVE dan BIOSAT masing-masing sebesar 6,13% dan 14,45% dari realisasi tahun 2017, disamping terdapat beberapa produk baru yang di tahun 2017 tidak ada seperti Bulk TSM, Bulk ABN murni dan Bulk Bungarus murni.

1. Realisasi Beban Produksi Serum & Diagnostika
Pada tahun 2018 tercatat realisasi beban produksi untuk Serum & Diaogostika sebesar Rp23,42 miliar, turun sebesar Rp35,15 miliar atau 60,01%, dan Rp26,57 miliar atau 53,14% di bawah RKAP 2018 sebesar Rp49,99 miliar.

Bila dibandingkan dengan realiasi tahun 2017 beban produksi Serum & Diaogostika mengalami penurunan sebesar 60,01% atau sebesar 35,15 miliar. Hal ini disebabkan oleh seiring dengan menurunnya permintaan pasar terhadap Serum & Diaogostika.

Bila dibandingkan dengan RKAP 2018, Produk Serum & Diagnostika beban produksinya di bawah anggaran, hal ini disebabkan oleh menurunnya permintaan pasar terhadap Serum & Diaogostika.

KINERJA SEGMEN PRODUK *PARTNERSHIP*
(DalamJuta Dosis & Rp/Miliar)

Produksi	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Produksi Produk *Partnership* (juta dosis)	-	-	27,36	87,05	99,88	101,74	16,88	1,86	14,69	1,86
Realisasi Beban Produksi Produk *Partnership* (Rp/Miliar)	-	-	218,47	713,27	770,99	809,32	13,47	4,97	96,05	38,33

REALISASI PRODUKSI PRODUK *PARTNERSHIP*
(juta dosis)

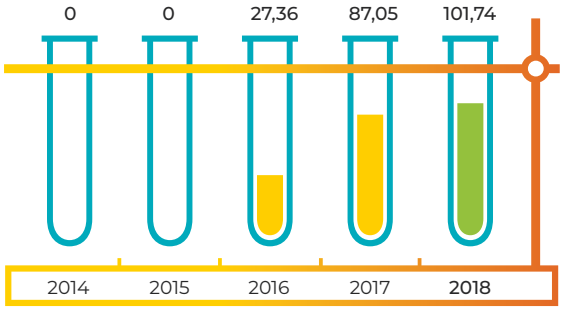

Pada tahun 2018 produksi produk partnership tercatat sebesar Rp101,74 juta dosis, naik sebesar Rp14,69 juta dosis atau 16,88% dibandingkan dengan produksi produk partnership tahun 2017 yaitu sebesar Rp87,05 juta dosis dan 1,86 juta dosis atau 1,86% di atas RKAP sebesar 99,88 juta dosis. Kenaikan jumlah produksi produk partnership disebabkan meningkatnya jumlah produksi vaksin MR 10 ds untuk memenuhi kebutuhan program vaksinasi nasional.

2. Realisasi Beban Produksi Produk *Partnership*
   Pada tahun 2018 tercatat realisasi beban produksi untuk produk *Partnership* sebesar Rp809,32 miliar, naik sebesar Rp96,05 miliar atau 13,47% bila dibandingkan dengan realiasasi beban produksi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp713,27 miliar, dan Rp38,33 miliar atau 4,97% di atas RKAP 2018 sebesar Rp770,99 miliar.

Bila dibandingkan dengan realiasi tahun 2017 beban produksi produk *Partnership* mengalami peningkatan sebesar 13,47% atau sebesar 96,05 miliar. Hal ini disebabkan oleh seiring dengan meningkatnya penjualan vaksin MR 10 ds, IPV 5ds, dan vaksin BCG Bayi + Anak-Anak. Maka terjadinya peningkatan beban produksi BCG Bayi dan Anak 20 ds impor, IPV 5 ds dan MR 10 ds masing-masing meningkat sebesar 24,39%, 37,68% dan 30,91% atau senilai Rp16,61 miliar, Rp36,20 miliar dan Rp129,01 miliar serta adanya realisasi beban produksi vaksin PPD 2TU senilai Rp5,39 miliar dimana tidak ada produksi pada tahun 2017.

Bila dibandingkan dengan RKAP 2018 beban produksi produk *Partnership* mengalami peningkatan sebesar 4,97% atau sebesar 38,33 miliar. Hal ini disebabkan oleh seiring dengan meningkatnya penjualan vaksin MR 10 ds, IPV 5ds, dan vaksin BCG Bayi + Anak-Anak. Maka meningkatnya beban produksi vaksin PPD 2TU, IPV 5 ds dan MR 10 ds masing-masing mencapai 119,12%, 183,21% dan 105,48% dari anggarannya atau senilai masing-masing Rp5,40 miliar, Rp132,26 miliar dan Rp546,41 miliar.

JUMLAH REALISASI PRODUKSI VAKSIN, SERUM & DIAGNOSTIKA DAN PRODUK *PARTNERSHIP*

Produksi	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018-2017
	1	2	3	4 = 3/1	5=3/2	6 = 3-1
Vaksin Bakteri (Dalam Juta Dosis)	392,70	670,44	543,54	38,41	(18,93)	150,84
Vaksin Virus (Dalam Juta Dosis)	2.898,95	2.649,43	2.117,50	(26,96)	(20,08)	(781,45)
Vaksin Kombinasi (Dalam Juta Dosis)	25,85	23,70	38,82	50,13	63,77	12,96
Sera (Dalam Ribu Vial/ampul)	-	-	-	-	-	-
Produk *Partnership* (Dalam Juta Dosis)	87,05	99,88	101,74	16,88	1,86	14,69
Jumlah Produksi	**3.404,55**	**3.443,45**	**2.801,59**	**(17,71)**	**(18,64)**	**(602,96)**

JUMLAH REALISASI PRODUKSI PER TAHUN
(Dalam Juta Dosis)

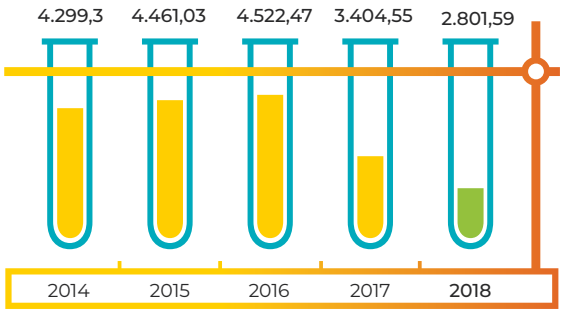

BEBAN PRODUKSI PERSEGMEN
REALISASI BEBAN PRODUKSI PER SEGMEN/KELOMPOK PRODUK
(Dalam Miliar Rupiah)

Produksi	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018-2017
	1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5	9 = 6-4
PRODUKSI									
Vaksin Bakteri	229,64	263,67	236,93	215,05	266,72	266,70	24,02	(0,01)	51,65
Vaksin Virus	457,44	506,16	529,54	532,84	506,16	426,87	(19,89)	(15,67)	(105,97)
Vaksin Kombinasi	163,49	159,72	148,74	205,28	184,21	307,89	49,99	67,14	102,61
Sera	32,20	33,06	38,26	58,57	49,99	23,42	(60,01)	(53,14)	(35,15)
Produk *Partnership*	-	-	218,47	713,27	770,99	809,32	13,47	4,97	96,05
Jumlah Produksi	**882,77**	**962,61**	**1.171,95**	**1.725,01**	**1.778,06**	**1.834,20**	**6,33**	**3,16**	**109,19**

JUMLAH REALISASI BEBAN PRODUKSI PER TAHUN
(Dalam Miliar Rupiah)

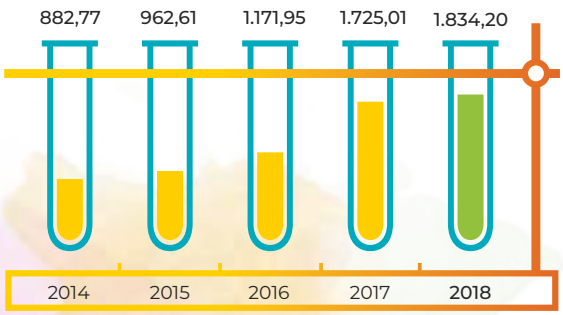

PENINGKATAN / PENURUNAN KAPASITAS PRODUKSI

Pada tahun 2018, target produksi Bio Farma adalah sebesar 3,2 miliar dosis dan realisasi produksinya adalah sebesar 3,2 miliar dosis. Pencapaian kinerja produksi Bio Farma pada tahun 2018 secara keseluruhan mencapai target Perusahaan. Strategi yang dilakukan adalah mengoptimalkan kapasitas produksi untuk mendapatkan jumlah produksi yang sesuai dengan proyeksi pemasaran. Perencanaan jadwal produksi dilakukan secara ketat untuk memenuhi kebutuhan pasar mengingat keterbatasan kapasitas produksi terutama pada fasilitas *fill* and finish. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Produksi telah menyiapkan dan merencanakan peningkatan kapasitas *fill* and finish melalui investasi secara bertahap. Selain itu juga dilakukan peremajaan beberapa fasilitas produksi, penambahan alat produksi dan perawatan mesin sehingga target Perusahaan dapat tercapai.

PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA

Kinerja Perusahaan pada tahun 2018 dari sisi penjualan tercatat sebesar Rp3,24 triliun naik sebesar Rp223,65 miliar atau 7,43% dibandingkan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp3.011 triliun, dan sebesar Rp48,46 atau 1,48% di bawah RKAP sebesar Rp3,28 triliun.

Penjualan per kelompok produks dapat dilihat sebagai berikut:

PENJUALAN PER SEGMEN / KELOMPOK PRODUK

PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan /Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Vaksin Bakteri	217.605	305.289	243.598	186.865	203.119	230.750	23,48	13,60	43.885	27.631	211.114
Vaksin Virus	1.457.280	1.705.305	1.436.397	1.301.225	1.490.584	1.206.231	(7,30)	(19,08)	(94.994)	(284.353)	1.690.457
Vaksin Kombinasi	276.548	253.404	200.695	323.810	319.273	540.463	66,91	69,28	216.653	221.190	489.332
Sera & Diagnostika	90.240	80.689	63.412	76.074	89.214	82.447	8,38	(7,59)	6.373	(6.767)	90.367
Jumlah	**2.041.673**	**2.344.687**	**1.944.102**	**1.887.974**	**2.102.190**	**2.059.891**	**9,11**	**(2,01)**	**171.917**	**(42.299)**	**2.481.270**
Dikurangi: Potongan Penjualan	(12.685)	(15.063)	(16.378)	(15.861)	-	(21.856)	37,80	0	(5.995)	(21.856)	-
Penjualan Produk Bersih	**2.028.988**	**2.329.624**	**1.927.724**	**1.872.113**	**2.102.190**	**2.038.035**	**8,86**	**(3,05)**	**165.922**	**(64.155)**	**2.481.270**

PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN

(Rp Triliun)

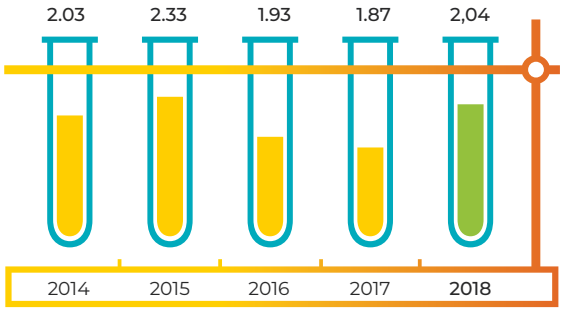

Kinerja penjualan produk perusahaan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp2,04 triliun naik sebesar Rp165,92 miliar atau 8,86% dibandingkan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp1,87 triliun, dan sebesar Rp64,15 miliar atau 3,05% di bawah RKAP sebesar Rp2,10 triliun. Bila dibandingkan dengan penjualan tahun 2017, peningkatan penjualan ini disebabkan oleh:

Realisasi penjualan kelompok vaksin bakteri pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp230,75 miliar naik sebesar Rp43,88 miliar atau 23,48% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 hal ini disebabkan oleh peningkatnya penjualan vaksin Bio TT 1ds, Bio Td 1 ds, Td 10 ds, DT 10 ds dan *bulk* Tetanus masing-masing naik senilai Rp3,23 miliar, Rp13,18 miliar, Rp62,67 miliar, Rp12,84 miliar dan Rp5,23 miliar. Bila dibandingkan dengan RKAP 2018, terjadinya peningkatan disebabkan oleh meningkatnya penjualan Vaksin Bio TT 1ds, Bio Td 1 ds, Td 10 ds, DT 10 ds dan *bulk* Tetanus masing-masing sebesar 122.611,03%, 206,11%, 273,12% dan 114,33% atau masing-masing senilai Rp20,03 miliar, Rp127,96 miliar, Rp25,76 miliar dan Rp8,49 miliar. Kenaikan penjualan vaksin bakteri dan vaksin kombinasi dibanding periode yang sama tahun lalu karena sampai tahun 2018 terdapat pemenuhan kebutuhan vaksin difteri karena adanya *Outbreak Response Immunization* (ORI) untuk penyakit difteri.

Realisasi penjualan kelompok vaksin virus,bila dibandingkan dengan RKAP 2018 penjualannya mencapai 80,09% atau senilai Rp1,19 triliun hal tersebut terutama karena pencapaian penjualan vaksin bOPV 20 ds, Campak 10 ds, *bulk* Polio, *bulk* Campak dan IPV 5 ds masing-masing sebesar 82,09%, 47,86%, 83,80%, 40,75% dan 0,36% atau senilai Rp277,83 miliar, Rp64,54 miliar, Rp575,56 miliar, Rp21,57 miliar dan Rp203 juta. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, Kelompok vaksin virus realisasi penjualannya turun 7,53% atau senilai Rp97,15 miliar terutama karena rendahnya penjualan vaksin bOPV 20 ds, Campak 10 ds dan *bulk* Polio masing-masing turun senilai Rp14,71 miliar, Rp63,91 miliar dan Rp83,32 miliar. Pencapaian penjualan kelompok vaksin virus dibawah anggarannya karena kapasitas produksi (pengepakan) yang ada diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan ORI Difteri sedangkan pencapaian penjualan vaksin bakteri dan vaksin kombinasi melebihi anggarannya karena adanya kontrak *Outbreak Response Immunization* (ORI) untuk penyakit difteri dari Pemerintah.

Realisasi penjualan kelompok vaksin kombinasi, bila dibandingkan dengan RKAP 2018, penjualannya meningkat sebesar 68,06% atau senilai Rp536,57 miliar, hal tersebut terutama karena meningkatnya penjualan vaksin Pentabio 5 ds sebesar 70,98% atau senilai Rp523,65 miliar. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, kelompok vaksin kombinasi realisasi penjualannya naik 68,43% atau senilai Rp217,99 miliar terutama karena adanya kenaikan penjualan vaksin Pentabio 5 ds senilai Rp217,22 miliar.

Realisasi penjualan kelompok sera, bila dibandingkan dengan RKAP 2018, mencapai 87,80% atau senilai Rp78,33 miliar terutama karena pencapaian penjualan BIOSAT-1.5 sebesar 73,39% senilai Rp48,11 miliar. Bila diabdningkan dengan realisasi penjualan tahun 2017, penjualan jasa mengalami kenaikan sebesar 21,59% atau senilai Rp1,79 miliar, hal tersebut terutama karena pencapaian penjualan jasa laboratorium naik sebesar 100,80% atau senilai Rp1,55 miliar.

PENJUALAN PRODUK *PARTNERSHIP*

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan /Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Pemerintah	7.769	-	129.812	868.174		1.053.971	21,40	-	185.797	1.053.971	
Swasta	-	-	235.105	248.404		80.559	(67,57)	-	(167.845)	80.559	
Jumlah	**7.769**	**-**	**364.917**	**1.116.579**		**1.134.529**	**1,61**	**-**	**17.950**	**1.134.529**	
Dikurangi: Potongan Penjualan	**-**	**-**	(5.961)	(5.551)		(554)	(90,02)	-	4.997	(554)	
Penjualan Bersih Produk *Partnership*	**7.769**	**-**	**358.956**	**1.111.028**	**1.130.590**	**1.133.975**	**2,07**	**0,30**	**22.947**	**3.385**	**1.095.830**

PENJUALAN PRODUK *PARTNERSHIP*
(Dalam Juta Rupiah)

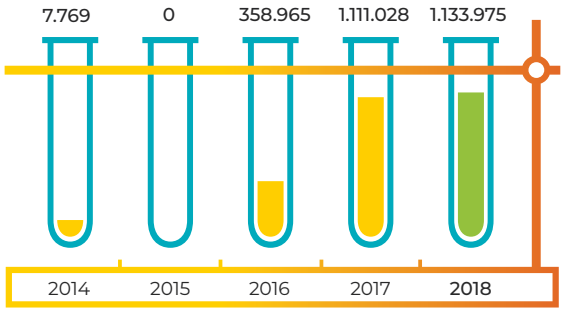

Penjualan Produk *Partnership* Perusahaan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp1,13 triliun, naik sebesar Rp22,95 miliar atau 2,07% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,11 triliun dan sebesar Rp3,39 miliar atau 0,3% diatas RKAP sebesar Rp1,13 triliun. Hal tersebut karena pencapaian penjualan vaksin BCG Bayi dan Anak 20 ds Impor, IPV 5 ds dan MR 10 ds masing-masing sebesar 104,42%, 167,15% dan 103,11% atau masing- masing senilai Rp68,29 miliar, Rp166,33 miliar dan Rp827,37 miliar serta adanya realisasi penjualan *Live* (JE) 5 ds senilai Rp4,67 miliar yang sebelumnya tidak dianggarkan. Penjualan produk *partnership* mengalami kenaikan sebesar 2,07% atau senilai Rp22,95 miliar terutama karena adanya kenaikan penjualan vaksin PPD 2TU, IPV 5 ds dan MR 10 ds masing-masing sebesar 163,76%, 27,63% dan 26,99% atau masing-masing senilai Rp13,42 miliar, Rp36,01 miliar dan Rp175,87 miliar lebih tinggi dari tahun 2017.

PENJUALAN *TRADING PARTNERSHIP*
(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan /Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Swasta											
Polyvalent Snake Anti Venom	2.641	3.393	1.125	-		4.539	-	-	4.539	4.539	-
Imovac Rabies Vero	-	8.528	-	-		-	-	-	-	-	-
HJ HPV-Gardasil	-	-	22.804	15.355		30.683	99,83	-	15.328	30.683	-
HJ Diftheria Antitoxin	-	-	-	2.898		10.866	274,92	-	7.968	10.866	-
HJ Live Attenuated JE 1 ds	-	-	-	111		-	-	-	(111)	-	-
Td 10 (*Trading* Parnership)	**-**	**-**	**-**	**1.983**		5.767	190,77	-	3.784	5.767	-
HJ Urokinase 60.000 iu	-	-	-	-		1.505	-	-	1.505	1.505	-
HJ Vaksin Varicella	**-**	**-**	**-**	**-**		3.337	-	-	3.337	3.337	-
Sub Jumlah	**2.641**	**11.921**	**23.929**	**20.348**	**-**	**56.698**	**178,65**	**-**	**36.351**	**56.698**	**-**
Dikurangi: Potongan Penjualan	**(123)**	**(486)**	**(165)**	**(228)**	**-**	**(3.588)**	**1.475,13**	**-**	**(3.360)**	**(3.588)**	-
Jumlah Penjualan Bersih Trading *Partnership*	**2.518**	**11.435**	**23.764**	**20.120**	**41.894**	**53.111**	**163,97**	**26,77**	**32.991**	**11.217**	**91.138**

PENJUALAN *TRADING PARTNERSHIP*
(Dalam Juta Rupiah)

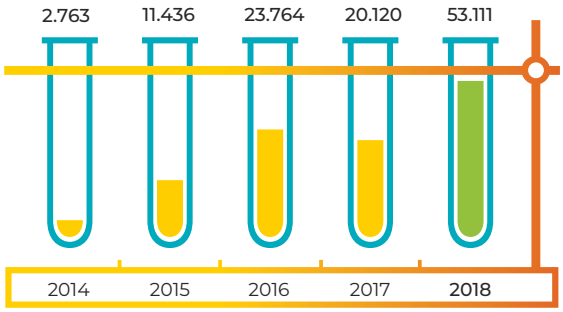

Penjualan bersih *Trading Partnership* Perusahaan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp53,11 miliar, naik sebesar Rp32,99 miliar atau 163,97% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp20,12 miliar dan sebesar Rp11,22 miliar atau 26,77% diatas RKAP sebesar Rp41,89 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari naiknya penjualan Sera ABU II (Aust), Gardasil dan Difteri Antitoxin masing-masing sebesar 134,56%, 99,94% dan 171,55% atau masing- masing naik senilai Rp2,44 miliar, Rp15,34 miliar dan 4,89 miliar dari tahun 2017 serta adanya realisasi penjualan vaksin Varicella, Urokinase 60.000 IU dan Td 1 ds masing- masing senilai Rp3,16 miliar, Rp1,51 miliar dan Rp5,77 miliar dimana sebelumnya tidak ada realisasi penjualan.

Bila dibandingkan dengan RKAP 2018, penjualan *trading partnership* mencapai 126,77% atau senilai Rp53,11 miliar terutama karena pencapaian penjualan vaksin Sera ABU II (Aust) dan Gardasil masing-masing sebesar 411,50% dan 102,28% atau senilai Rp4,25 miliar dan Rp30,68 miliar serta adanya realisasi penjualan produk Urokinase 60.000 IU, Difteri Antitoxin dan TD 1 ds masing-masing senilai Rp1,51 miliar, Rp7,75 miliar dan Rp5,77 miliar yang sebelumnya tidak dianggarkan.

PENJUALAN JASA
(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan /Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Imunisasi	3.978	3.529	3.975	7.047	-	7.834	11,17	-	787	7.834	-
Laboratorium	827	1.329	1.660	1.696	-	2.816	66,03	-	1.120	2.816	-
Poliklinik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**4.805**	**4.859**	**5.635**	**8.743**	**-**	**10.650**	**21,81**	**-**	**1.907**	**10.650**	**-**
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	-	(320)	(433)	-	(546)	26,14	-	(113)	(546)	-
Penjualan Bersih Jasa	**4.805**	**4.857**	**5.315**	**8.310**	**9.006**	**10.104**	**21,59**	**12,19**	**1.794**	**1.098**	**14.210**
Total Penjualan Bersih Per Tahun	**2.044.080**	**2.345.917**	**2.315.759**	**3.011.571**	**3.283.681**	**3.235.225**	**7,43**	**(1,48)**	**223.654**	**(48.456)**	**3.682.448**

PENJUALAN JASA
(Dalam Juta Rupiah)

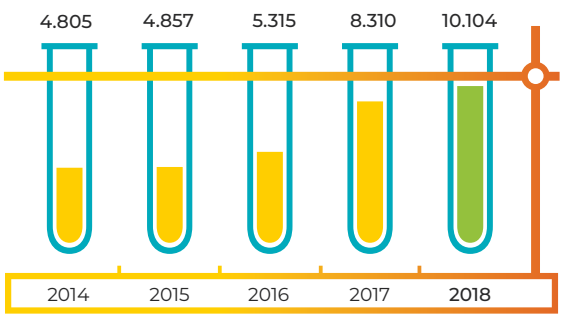

Penjualan Produk, Produk *Partnership*, *Trading Partnership* dan Jasa pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp10,10 miliar, naik sebesar Rp1,79 milliar atau 21,59% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp8.310 miliar dan sebesar Rp1,10 miliar atau 12,19% diatas RKAP sebesar Rp9,01 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pencapaian penjualan jasa laboratorium naik sebesar 100,80% atau senilai Rp1,55 miliar bila dibandingkan dengan realiasi penjualan tahun 2017. Bila dibandingkan

dengan RKAP 2018, Realisasi penjualan jasa sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan RKAP tahun 2018 mencapai 112,18% atau senilai Rp10,10 miliar, hal tersebut karena pencapaian penjualan jasa laboratorium dan imunisasi masing-masing sebesar 107,11% dan 114,56% atau senilai Rp3,08 miliar dan Rp7,03 miliar.

Hasil penjualan imunisasi diperoleh dari imunisasi vaksin dan serum, sedangkan hasil penjualan laboratorium diperoleh dari jasa pengujian mutu dan pemeriksaan laboratorium. Terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2015 unit pelayanan jasa diubah menjadi Strategic Business Unit (SBU) dengan nama Unit Bisnis Klinik dan Imunisasi lalu berdasarkan SK Direksi Nomor 04276/DIR/XII/2017 tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma terjadi penggantian nama menjadi Unit Klinik Dan Imunisasi.

TOTAL PENJUALAN PER TAHUN
(Dalam Juta Rupiah)

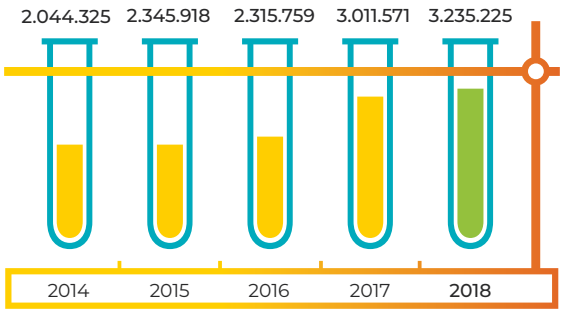

PENJUALAN PRODUK BERSIH PER SEGMEN USAHA (PER SEKTOR)

REALISASI PENJUALAN PRODUK BERSIH PER SEGMEN USAHA / PER SEKTOR SELAMA TAHUN 2018
(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Sektor Pemerintah	539.959	570.619	618.376	1.359.280	1.549.213	1.859.153	36,77	20,01	499.873	309.940	1873322
Sektor Swasta	137.889	139.485	386.015	409.382	375.197	298.013	(27,20)	(20,57)	(111.369)	(77.184)	383402
Sektor Ekspor	1.366.232	1.635.814	1.248.368	1.242.909	1.359.270	1.078.059	(13,26)	(20,69)	(164.850)	(281.211)	1425724
Total Penjualan Bersih	**2.044.080**	**2.345.918**	**2.252.759**	**3.011.571**	**3.283.680**	**3.235.225**	**7,43**	**(1,48)**	**223.654**	**(48.455)**	**3.682.448**

SEKTOR PEMERINTAH
(Dalam Juta Rupiah)

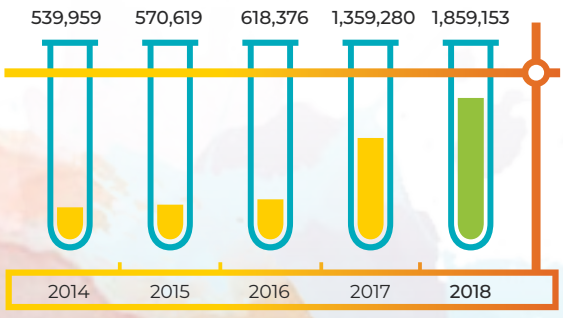

REALISASI PENJUALAN SEKTOR PEMERINTAH TAHUN 2018

Penjualan Sektor Pemerintah pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp1,86 triliun, naik sebesar Rp499,87 milliar atau 36,77% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,36 triliun dan sebesar Rp309,94 miliar atau 20,01% diatas RKAP sebesar Rp1,55 triliun.

Peningkatan tersebut terutama berasal dari pencapaian penjualan Vaksin reguler (ORI Difteri) ke Pemerintah senilai Rp506,35 miliar, Vaksin reguler ke Pemerintah senilai Rp1,18 triliun, Vaksin reguler (DPT-HB-HiB) ke Pemerintah senilai Rp99,45, Vaksin Measles Rubella (MR), *Auto Disable Syringe* (ADS) dan Safety Box ke Pemerintah senilai Rp26,59 miliar bersumber dana hibah GAVI, Vaksin *Inactivated Polio Vaccine* (IPV), Auto Disable Syringe (ADS) dan Safety Box senilai Rp108,49 miliar bersumber dana hibah GAVI, Vaksin reguler (DPT-HB-HiB 5 ds Tahap II) ke Pemerintah nilai kontrak senilai Rp86,17 miliar, Vaksin Reguler Tahun 2018 (Vaksin BCG dan Vaksin bOPV) senilai Rp4,54 miliar, Vaksin Reguler Tahun 2018 (Vaksin DT) senilai Rp466,26 juta.

Dibandingkan dengan RKAP tahun 2018 terjadinya peningkatan terutama karena penjualan produk perusahaan dari vaksin Td 10 ds, DT 10 ds dan Pentabio 5 ds masing-masing mencapai 375,92%, 272,30% dan 170,98% atau bila dalam nominal masing-masing senilai Rp126,83 miliar, Rp25,58 miliar dan Rp523,63 miliar karena adanya pemenuhan ORI Difteri, serta produk *partnership* dari vaksin BCG Bayi 20 ds impor, IPV 5 ds dan MR masing-masing mencapai 104,42%, 167,15% dan 102,11% atau bila dalam nominal masing-masing senilai Rp68,29 miliar, Rp166,334 miliar dan Rp819,34 miliar.

Dibandingkan dengan tahun 2017 terjadinya kenaikan terutama karena adanya kenaikan penjualan produk perusahaan dari vaksin Td 10 ds, DT 10 ds, VHB BAyi/anak 1 ds dan Pentabio 5 ds masing-masing sebesar 440,57%, 100,19%, 22,95% dan 70,96% atau masing-masing senilai Rp103,37 miliar, Rp12,80 miliar, Rp13,78 miliar dan Rp217,34 miliar karena adanya pemenuhan ORI Difteri, serta produk *partnership* dari IPV 5 ds dan MR masing- masing sebesar 27,63% dan 25,93% atau masing-masing senilai Rp36,01 miliar dan Rp168,70 miliar.

PENJUALAN SEKTOR SWASTA
(Dalam Juta Rupiah)

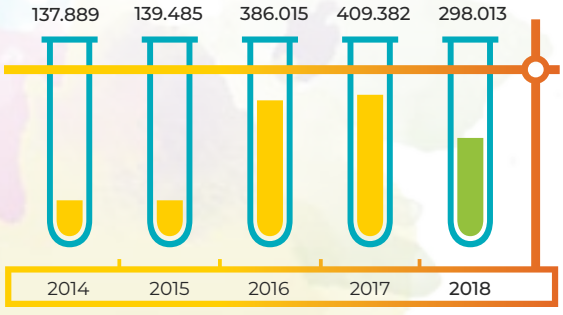

REALISASI PENJUALAN SEKTOR SWASTA TAHUN 2018

Penjualan Sektor Swasta pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp298,01 miliar, turun sebesar Rp111,37 milliar atau 27,20% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp409,38 miliar dan sebesar Rp77,18 miliar atau 20,57% dibawah RKAP sebesar Rp375,20 miliar.

Dibandingkan dengan RKAP tahun 2018 terjadi penurunan terutama karena pencapaian penjualan produk perusahaan dan produk *Partnership* masing-masing sebesar 96,14% dan 49,00% atau senilai Rp154,79 miliar dan Rp80,00 miliar. Pencapaian penjualan produk perusahaan tersebut terutama karena penjualan vaksin Flu Bio 1 ds, *bulk* Hepatitis B-RTF dan BIOSAT-1.5, masing- masing mencapai 62,55%, 28,54% dan 73,36%, atau masing-masing senilai Rp12,64 miliar, Rp2,47 miliar dan Rp48,09 miliar, serta produk *Partnership* dari penjualan vaksin Meningitis mencapai 33,10% atau senilai Rp45,68 miliar.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 terjadinya penurunan terutama karena penurunan penjualan produk *partnership* sebesar 67,06% atau senilai Rp162,85 miliar dibandingkan dengan tahun 2017 karena adanya penurunan penjualan meningitis sebesar 79,65% atau senilai Rp178,80 miliar.

PENJUALAN SEKTOR EKSPOR
(Dalam Juta Rupiah)

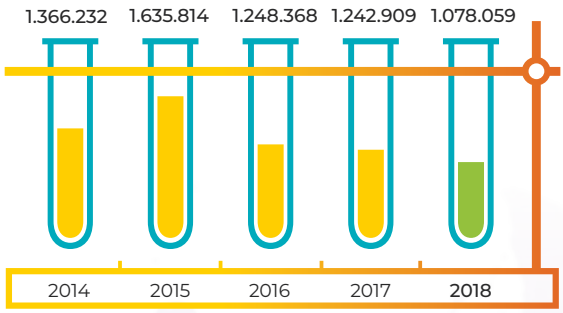

REALISASI PENJUALAN EKSPOR TAHUN 2018

Penjualan Sektor Ekspor pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp1,08 triliun, turun sebesar Rp164,85 milliar atau 13,26% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp1,24 triliun dan sebesar Rp281,21 miliar atau 20,69% dibawah RKAP sebesar Rp1,36 miliar.

Dibandingkan dengan RKAP tahun 2018, penjualan ekspor dalam mata uang rupiah sebesar mencapai 79,31% senilai Rp1,08 triliun atau dalam mata uang valas USD mencapai 74,20% atau senilai USD 74,71 juta. Pencapaian tersebut terutama karena pencapaian penjualan Td 10 ds, DTP 10 ds, bOPV 20 ds, Campak 10 ds, *bulk* Polio dan *bulk* campak masing-masing sebesar 4,05%, 36,05%, 82,09%, 47,23%, 83,80% dan 40,75% atau senilai Rp1,13 miliar, Rp17,35 miliar, Rp277,83 miliar, Rp61,66 miliar, Rp575,56 miliar dan Rp21,57 miliar.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, penjualan ekspor dalam mata uang rupiah turun sebesar 13,26% atau senilai Rp164,85 miliar dan bila dalam mata uang valas USD turun sebesar 19,34% atau senilai USD 17,92 juta. Penurunan penjualan ekspor tersebut terutama karena penurunan pencapaian penjualan vaksin TT 10 ds, Td 10 ds, DTP 10 ds, bOPV 20 ds, Campak 10 ds, *bulk* Polio dan *bulk* campak masing- masing sebesar 55,44%, 97,20%, 59,72%, 5,03%, 47,12%, 12,65% dan 25,47% atau senilai Rp7,65 miliar, Rp39,05 miliar, Rp25,72 miliar, Rp14,71 miliar, Rp54,93 miliar, Rp83,32 miliar dan Rp7,37 miliar.

Penurunan penjualan ekspor terutama disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Bio Farma hanya dapat memenuhi sebagian komitmen supply bOPV-20 ds ke UNICEF (kekurangan supply sebanyak 509.690 vial senilai USD 1.22 juta) karena penuhnya jadwal pengepakan untuk memenuhi kebutuhan program ORI;
2. Bio Farma tidak dapat merealisasikan pengiriman Vaksin Td-10 ds ke Nigeria dari bulan Februari sampai Juni 2018 sesuai *Purchase Orders* yang diterbitkan oleh UNICEF dengan total kuantum sebanyak 1.520.660 vial atau senilai USD 1,75 juta (Rp23,61 miliar), mengingat harus dialihkannya produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan program ORI di Indonesia;
3. Keterbatasan kemampuan produksi vaksin Campak.

PROFITABILITAS

Rasio Profitabilitas *(Profitability Ratio)* adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba *(profit)* dari pendapatan *(earning)* terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang memengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Rasio-rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan biasanya dinilai oleh investor dan kreditur *(bank)* untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan.

MARGIN LABA KOTOR *(GROSS PROFIT MARGIN)*

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
LABA (RUGI) KOTOR	1.263.991	1.478.430	1.310.465	1.354.440	1.503.132	1.411.475	4,21	(6,1)	57.035	(91.657)	1.640.637
Jumlah Penjualan Bersih	2.044.080	2.345.918	2.315.759	3.011.571	3.283.680	3.235.225	7,43	(1,48)	223.654	(48.455)	3.682.448
Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)	61,84	63,02	56,59	44,97	45,78	43,63	(2,99)	(4,6913)	(1,35)	(2,15)	44,55

LABA (RUGI) KOTOR)

(Rp Miliar)

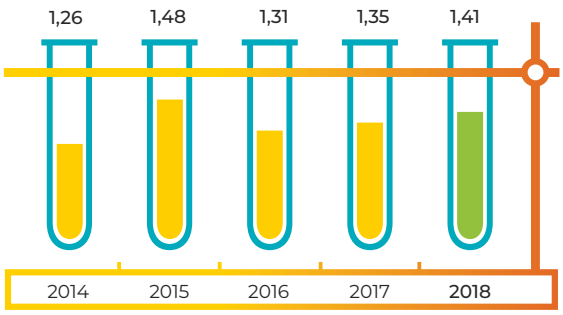

Gross Profitabilitas Perusahaan dapat diukur dari meningkatnya laba (rugi) kotor sebesar Rp57,04 miliar dari Rp1,35 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp1,411 triliun di tahun 2018. *Gross Net Profit Margin* (GPM) Perusahaan pada tahun 2018 sebesar 43,63%, mengalami penurunan sebesar 1,35% dari tahun 2017 yang sebesar 44,97%.

MARGIN LABA BERSIH (NET PROFIT MARGIN)

Dalam Juta Rupiah

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
LABA (RUGI) BERSIH	582.193	670.593	501.041	525.356	581.177	543.226	3,40	(6,53)	17.870	17.870	619.852
Jumlah Penjualan Bersih	2.044.080	2.345.918	2.315.759	3.011.571	3.283.680	3.235.225	7,43	(1,48)	223.654	223.654	3.682.448
Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)	28,48	28,59	21,64	17,44	17,70	16,79	(3,75)	(5,13)	(1)	(1)	16,83

LABA BERSIH PER TAHUN
(Rp Miliar)

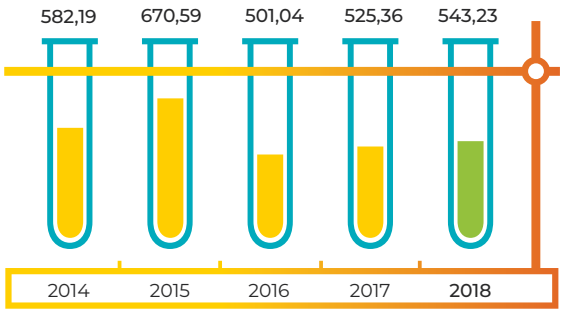

Profitabilitas Perusahaan dapat diukur dari meningkatnya laba bersih sebesar Rp17,87 miliar dari Rp525,36 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp543,23 miliar di tahun 2018. *Net Profit Margin* (NPM) Perusahaan pada tahun 2018 sebesar 16,79%, mengalami penurunan sebesar 3,75% dari tahun 2017 yang sebesar 17,44%.

Penurunan profita margin ini karena dipengaruhi oleh tingginya beban pokok penjualan dan jasa karena adanya perubahan komposisi produk yang dijual dari yang dianggarkan sebelumnya berupa *Bulk* Polio sedangkan realisasinya berupa produk *partnership* sehingga berdampak pada upaya perusahaan dalam memperoleh laba.

Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Di Bio Farma Dilakukan Hal-Hal berikut:

1. Meningkatkan motivasi kerja melalui training-training yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan motivasi karyawan sehingga menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi.
2. Linkungan Kerja Yang Kondusif
   Peran Pimpinan *(top leader)* dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga karyawan merasa nyaman dan optimis dalam bekerja serta memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan mindset positif.
3. Integrasi Manajemen Waktu Dengan Sistem Perusahaan
   Manajemen waktu yang terintegrasi dengan sistem Perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi pada produktivitas karyawan yang efektif dan produktif.
4. *Reward*
   Perusahaan memberikan *reward* untuk karyawan yang berprestasi, dedikasi dan profesionalisme yang tinggi.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan bahwa maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Bio Farma:

1. Penelitian dan pengembangan produk biologi dan produk farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
2. Produksi-produk biologi dan produk farmasi, baik dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
3. Pemasaran, perdagangan dan distribusi produk biologi, farmasi, alat kesehatan, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan klinik.
5. Berusaha di bidang jasa yang ada hubungannya dengan yang tertera pada huruf a, b, c dan d.

Selain kegiatan usaha utama di atas, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Bio Farma melakukan usaha pendidikan dan pelatihan, pertanian, peternakan, pengembangbiakan hewan laboratorium, properti, perkantoran, pergudangan, dan pariwisata.

SEGMEN / DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bio Farma memiliki perhatian khusus terhadap kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagai usaha untuk peningkatan *core* bisnis perusahaan. Dalam mendukung kegiatan Penelitian dan Pengembangan, Bio Farma menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk mendukung kinerja perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA SURVEILANS DAN UJI KLINIS

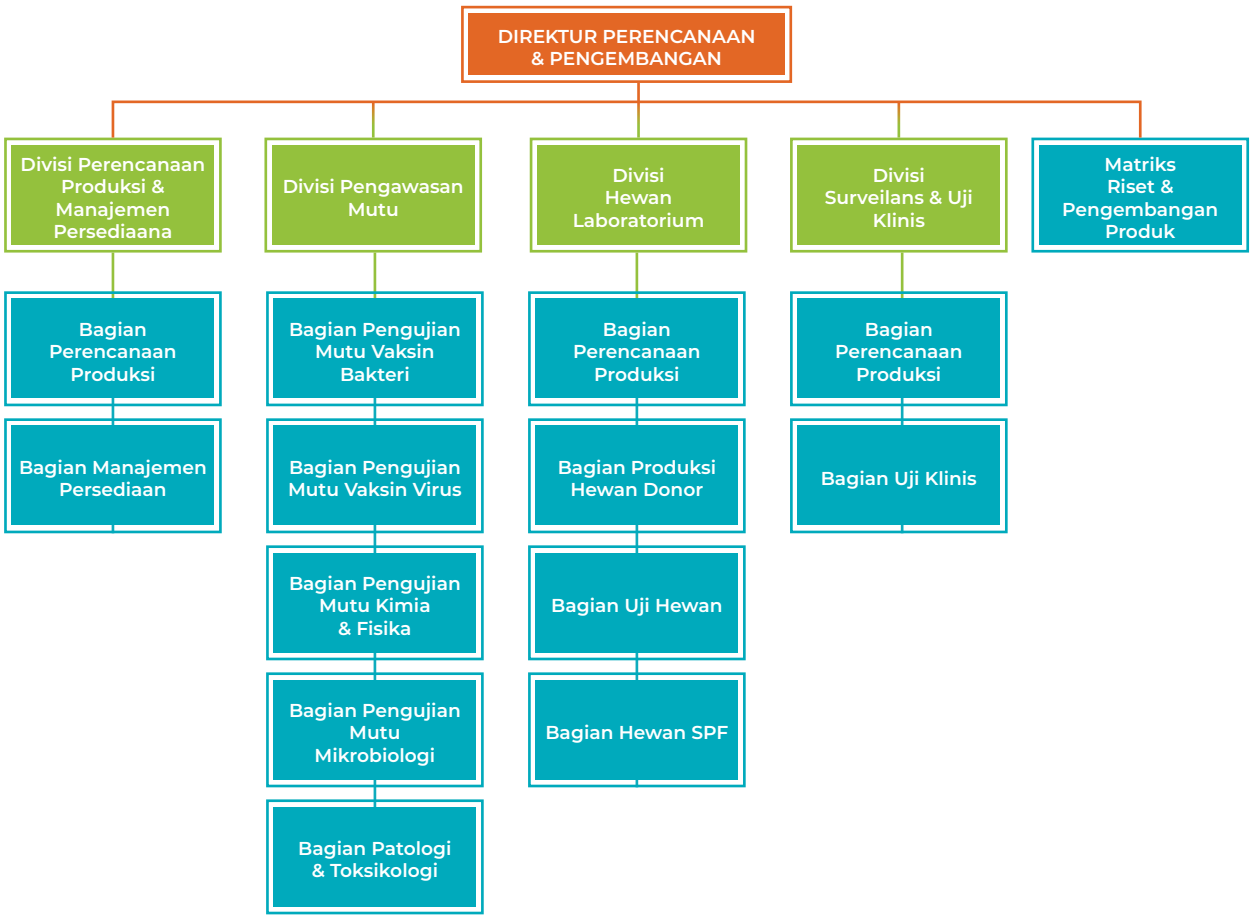

Program Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Produk
   Penelitian dan Pengembangan Vaksin
   Selama tahun 2018 terdapat kegiatan penelitian dan pengembangan vaksin, antara lain:
   a. Pengembangan Vaksin
   b. Pengembangan Biosimillar
   c. Pengembangan stemcell

2. Inovasi Produk
   Kegiatan inovasi produk yang dilakukan pada tahun 2018:
   a. Scale up produksi dan pembuatan inokulum pada vaksin bakteri.
   b. Studi proses pemurnian tanpa menggunakan ammonium sulfat.
   c. Pembangunan fasilitas baru untuk produksi *bulk* Tetanus sesuai cGMP dan aspek *biosafety*.
   d. Peningkatan *yield* kultur Bordetella Pertusis menggunakan metode kultivasi *fed-batch*.
   e. Penggunaan *disposable* bag untuk produksi *bulk* konjugat Hib.
   f. Pembuatan vaksin BCG dalam kemasan vial.
   g. Pembuatan *working seed lot* BCG lokal.
   h. Percobaan formulasi adjuvant dan vaksin Td *Stability*.

3. Surveilans dan Evaluasi Produk
   Kegiatan surveilans dan uji klinis yang dilakukan pada tahun 2018
   a. *Surveilans* AFP
   b. *Surveilans* Polio Lingkungan.
   c. Pemeriksaan sampel polio lingkungan dari IPAL
   d. *Surveilans* Campak dalam rangka reduksi Campak.
   e. *Surveilans* Rubella
   f. *Surveilans* CRS
   g. *Surveilans* Rotavirus.
   h. Implementasi Farmakovigilans.
   i. Uji Klinis beberapa jenis vaksin
   j. PMS *(Post Marketing Surveilance)* vaksin bOPV, MR SII dan JE.
   k. *Bridging* studi vaksin *Influenza Quadrivalent, Flubio*, MR Bio Farma, *bulk* Campak Bio Farma dan *bulk* Rubella dari SII.
   l. Pemeriksaan sampel limbah polio, surveilans polio, PCR virus polio, titer Pertusis dan titer Antibodi karyawan.
   m. Melakukan studi kolaborasi dengan NIBSC.

SEGMEN / DIVISI ANGGARAN DAN AKUNTANSI

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI ANGGARAN & AKUNTANSI

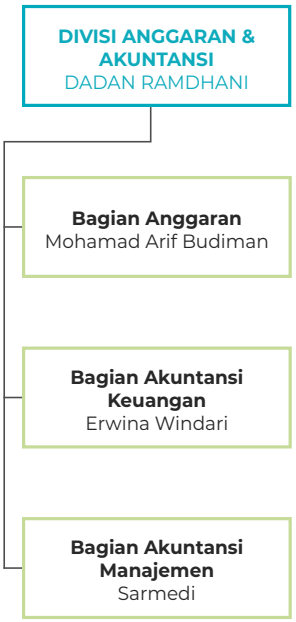

Pada tahun 2018, segmen / Divisi Anggaran dan Akuntansi telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun laporan keuangan dan laporan manajemen perusahaan Un-Audited maupun Audited tahun buku 2018.
2. Update data Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2018 (Unaudited & Audited), dan RKAP tahun 2018 pada program FIS-BUMN.
3. Menyusun laporan keuangan dan laporan manajemen perusahaan triwulan I, II dan III Tahun 2018.
4. Menyusun Resume Plan of Action RKAP tahun 2018.
5. Menghitung realisasi Key Performance Indicators (KPI) Perusahaan tahun 2018, RKAP 2018 dan Triwulan I, II dan III Tahun 2018.
6. Pengembangan ABC Costing dengan konsultan IAI.
7. Menyempurnakan Aplikasi Anggaran dan ERP terkait modul penyusunan laporan keuangan dan akuntansi manajemen.
8. Mengirimkan surat pemberitahuan Royalty of DTwP-HB-Hib Vaccine
9. Menerima pengembalian pendahuluan restitusi PPN untuk masa pajak Juli 2017 senilai Rp24,14 miliar, masa pajak September 2017 senilai Rp22,44 miliar, masa pajak Oktober 2017 senilai Rp6,25 miliar dan Rp9,44 miliar, masa pajak Desember 2017 senilai Rp28,65 miliar, masa pajak April-Desember 2016 senilai Rp75,42 miliar, masa pajak Januari-Februari 2018 senilai Rp27,26 miliar, masa pajak Maret-Mei 2018 senilai Rp70,46 miliar dan masa pajak Januari 2017 senilai Rp5,75 miliar.
10. Melakukan jual beli valuta asing sesuai kebutuhan.
11. Menempatkan dan mencairkan deposito on call atau deposito berjangka
12. Melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan bank dan Non Bank.
13. Menerbitkan LC untuk pembelian investasi/bahan baku dan barang investasi melalui LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) dan Bank Mandiri
14. Menerbitkan polis asuransi dengan nilai pertanggungan.

SEGMEN / DIVISI PENGADAAN (LOGISTIK)

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PENGADAAN

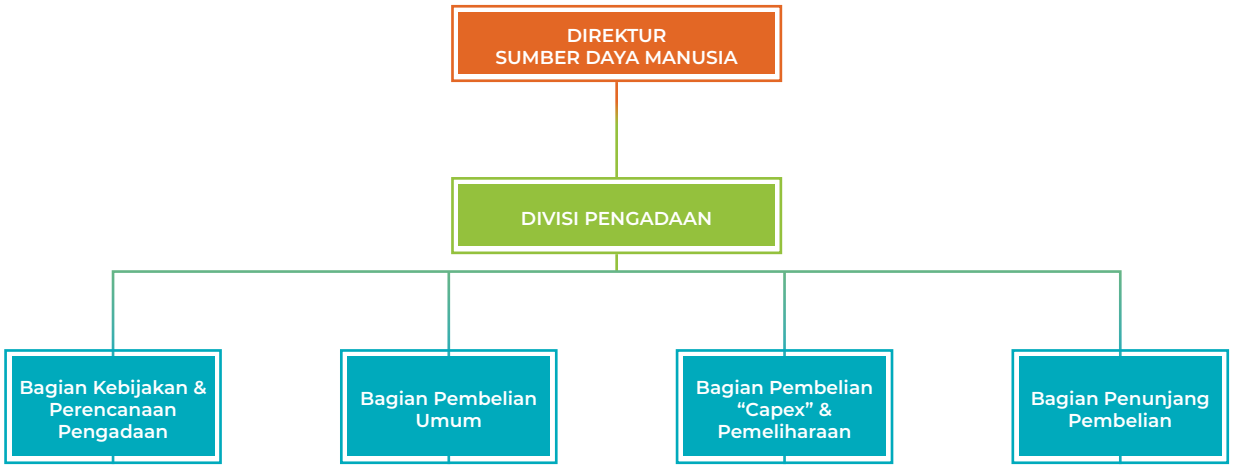

Kegiatan pembelian baik lokal maupun impor tahun 2018 sebesar Rp2,78 triliun atau 106,54% dari anggarannya, dan naik sebesar 2,68% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, dengan perincian per kelompok pembelian sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan /Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Bahan Kimia & Bahan Baku Lainnya	258.670	329.115	453.900	904.711	864.094	1.228.280	35,76	42,15	323.569	364.186	871.910
Alat Kedokteran & Alat-alat Laboratorium	121.672	186.298	189.787	235.792	129.815	150.566	(36,14)	15,99	(85.226)	20.751	111.943
Perkamasan & *Embalage* & Perlengkapan Kerja	135.424	148.804	116.230	169.185	124.714	166.057	(1,85)	33,15	(3.128)	41.343	148.903
Pemeliharaan & Suku Cadang	69.778	76.455	136.776	127.736	91.685	142.558	11,60	55,49	14.822	50.873	214.876
Jasa Konsultasi	27.855	31.155	50.986	56.995	60.520	46.730	(18,01)	(22,79)	(10.265)	(13.790)	54.282
Investasi	174.623	544.974	542.671	452.650	1.181.450	677.207	49,61	(42,68)	224.557	(504.243)	921.574

Kelompok	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan /Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Pengujian	5.416	7.008	6.357	10.538	7.740	8.278	(21,45)	6,95	(2.260)	538	8.443
Barang Umum & Sewa	23.990	57.012	96.502	81.639	86.694	97.042	18,87	11,94	15.403	10.348	75.722
Biaya & Keperluan Hewan	-	-	-	62.460	31.923	36.425	(41,68)	14,10	(26.035)	4.502	48.986
Persediaan Barang Dagangan	10.316	11.331	68.879	609.210	34.149	230.433	(62,18)	574,79	(78.777)	196.284	78.689
Jumlah	**827.745**	**1.392.151**	**1.662.088**	**2.710.916**	**2.612.784**	**2.783.576**	**2,68**	**6,54**	**72.660**	**170.792**	**2.535.328**

Perbandingan pembelian lokal dan impor tahun 2018 adalah 39% lokal dan 61% impor, dimana pada barang-barang lokal terdapat juga barang impor yang dibeli melalui agen di Indonesia. Realisasi pembelian tahun 2018 tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2017 yaitu hanya sekitar 2,68%.

Realisasi pengadaan barang pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp2,78 triliun, naik sebesar Rp72,66 milliar atau 2,68% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2,71 triliun dan sebesar Rp170,79 miliar atau 6,54% dibawah RKAP sebesar Rp2,61 triliun.

PEMBELIAN LOKAL DAN IMPOR PER TAHUN
(Rp Triliun)

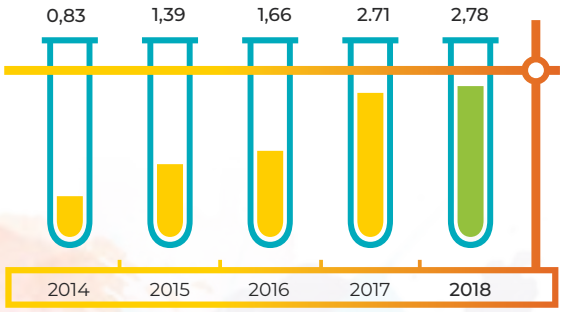

SEGMEN PAJAK

Bio Farma dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan tata kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya. Atas kepatuhan wajib pajak, serta tepat waktu dan jumlah atas pajak bumi dan bangunan, Bio Farma meraih Penghargaan Pajak Daerah dengan Kategori Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, dengan ini Biofarma mencetak *Hattrick* untuk kategori ini. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana kepada Direktur Keuangan Bio Farma Pardiman.

PEMBAYARAN PAJAK

TOTAL PEMBAYARAN PAJAK TAHUN 2017 – 2018
(Juta Rupiah)

Uraian Pajak	Pembayaran Pajak			Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018
	2017	RKAP	2018	6-4	6-5
PPh	357.926	275.515	235.060	(34,327)	(14,68)
PPN	175.370	287.406	482.063	174,883	67,73
Pajak Daerah	1.712	2.000	1.759	2,745	(12,05)
Pajak Lainnya	3.052	1.319	740	(75,754)	(43,90)
Total	**538.060**	**566.240**	**719.622**	**33,744**	**27,09**

SEGMEN ADMINISTRASI

Segmen Administrasi tidak memiliki komoditas untuk dijual sesuai dengan karakteristik Administrasi yang mengelola strategi Perusahaan, segmen ini tidak membukukan penjualan bersih ataupun laba.

INDIKATOR UTAMA PERUSAHAAN TAHUN 2018

PERHITUNGAN INDIKATOR UTAMA PERUSAHAAN TAHUN 2018

Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	RKAP 2018	Realisasi 2018
Pertumbuhan (%)					
a. Pendapatan/Penjualan *Netto*	114,77	98,71	130,05	111,04	107,43
b. Laba Usaha	115,05	78,91	103,44	118,26	107,93
c. Laba Sebelum Pajak	115,90	76,17	104,18	114,92	101,92
*Return On Investment (ROI) * (%)*	15,83	11,57	11,07	10,07	9,83
Profit Margin (PROMA) (%)	38,33	29,58	23,70	23,90	22,48
Company Productivity (COPRO) (Rp/orang)	1.312.570.440.89	1.119.272.626.90	1.138.592.913.76	1.289.203.442.89	1.173.975.212
Employee Productivity (EMPRO) (Rp/orang)	2.095.356.606.81	1.997.081.801.28	2.557.877.861.54	2.747.849.122.07	2.729.513.755
Asset Productivity (ASPRO) (%)	41,30	39,10	46,70	42,14	43,71
Inventory Turn Over (ITO) (kali)	2,20	1,72	2,33	2,59	1,93
Receivable Turn Over (RTO) (kali)	6,17	5,87	10,08	13,51	11,50
Base Cost Productivity (BASE PRO) (%)	64,35	71,50	77,33	75,81	77,23
Quality Performance Rate (%)					
a. Product Defect	1,75	0,61	0,42	-	0,17
b. Material Defect	0,15	0,48	-	-	0,00

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Di tahun 2018, Bio Farma mencatatkan pertumbuhan yang signifikan pada kinerja keuangan Perusahaan. Bio Farma mampu meningkatkan laba sebesar Rp543,23 miliar, naik 3,40% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp525,36 miliar. Penjualan Bio Farma juga tumbuh 7,43% menjadi Rp3,24 triliun dari Rp3,01 triliun di tahun 2017.

Kinerja Keuangan Merupakan Kemampuan Perusahaan Dalam Mengelola Dan Mengendalikan Sumber Daya Yang Dimiliki.

ANALISA KINERJA KEUANGAN MENCAKUP PERBANDINGAN ANTARA KINERJA KEUANGAN TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017, TAHUN 2018 DENGAN RKAP 2018 DAN PENYEBAB KENAIKAN/PENURUNANNYA

Kinerja Keuangan merupakan usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada . Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan

Berikut ini adalah pembahasan kinerja keuangan Bio Farma yang berakhir 31 Desember 2018. Angka-angka yang berpadanan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 maupun target anggaran tahun 2018 (RKAP 2018) disajikan untuk tujuan analisa dan atau perbandingan.

ASET LANCAR, ASET TIDAK LANCAR DAN TOTAL ASET

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
   Pada 31 Desember 2018, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
2. Pinjaman yang diberikan dan piutang,
   Pada 31 Desember 2018, aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain.
3. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo
   Pada 31 Desember 2018, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo.
4. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.
   Pada 31 Desember 2017, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual

ASET LANCAR

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2018-2017
	1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5	9 = 6-4
Aset Lancar									
Kas dan Setara Kas	971.717,05	555.939,26	447.950,33	369.546,13	220.438,29	535.910,34	45,02	143,11	166.364,21
Efek Tersedia untuk Dijual	25.599,79	-	-	-	-	-		-	-
Piutang Usaha	257.259,80	507.746,09	288.626,43	313.138,28	235.156,88	254.065,48	(18,86)	8,04	(59.072,80)
Piutang Lain-Lain	850,05	822,21	446,14	121,77	900,00	799,82	556,83	(11,13)	678,05
Persediaan	326.600,04	462.557,27	708.564,47	712.911,96	639.955,07	1.177.241,65	65,13	83,96	464.329,69
Uang Muka	50.412,49	102.353,24	54.052,29	27.734,36	442.749,42	121.850,63	339,35	(72,48)	94.116,27
Pajak Dibayar Dimuka	154.008,29	242.720,02	298.816,99	359.948,03	491.423,11	279.927,56	(22,23)	(43,04)	(80.020,46)
Biaya Dibayar Dimuka	4.767,42	10.163,13	12.136,51	12.473,63	20.956,21	12.410,12	(0,51)	(40,78)	(63,51)
Setoran Jaminan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	2.725,70	1.591,89	800,06	13,99	-	84,18	501,52	-	70,18
Aset Lancar Lainnya	30.698,00	111.887,97	38.162,20	168.198,39	47.757,67	9.640,20	(94,27)	(79,81)	(158.558,19)
Jumlah Aset Lancar	**1.824.638,62**	**1.995.781,08**	**1.849.555,40**	**1.964.086,54**	**2.099.336,65**	**2.391.929,98**	**21,78**	**13,94**	**427.843,43**

JUMLAH ASET LANCAR
(Rp Triliun)

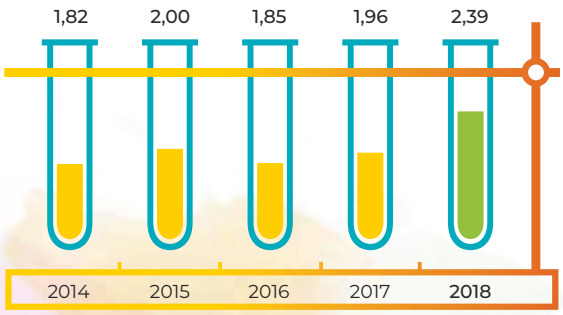

Pada 2018 jumlah Aset lancar tercatat sebesar Rp2,39 triliun naik sebesar Rp427,84 miliar atau 21,78% dibandingkan dengan aset lancar tahun 2017 yaitu sebesar Rp.1,96 triliun, dan 292,59 miliar atau 13,94% dibawah RKAP sebesar Rp.2,10 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh

Persediaan mengalami kenaikan sebesar 65,13% terutama karena:

1. Bahan baku/penolong perusahaan sebesar Rp612,58 miliar terutama dari persediaan *Concentrate* HBsAG sebesar Rp288,39 miliar, bahan kimia sebesar Rp79,11 miliar, alat gelas dan kedokteran Rp102,11 miliar dan alat kemasan sebesar Rp76,82 miliar.
2. Produk dalam proses (PDP) sebesar Rp485,67 miliar dari PDP produk perusahaan berupa *bulk* dan produk vaksin yang sudah di filling untuk mendukung rencana penjualan tahun beikutnya.
3. Persediaan produk jadi sebesar Rp76,35 miliar terdiri dari persediaan produk perusahaan dan produk *Partnership* untuk persiapan penjualan tahun berikutnya.
4. Uang muka mengalami kenaikan sebesar Rp339,35% terutama karena uang muka pembelian local sebesar Rp53,79 miliar dan pembelian impor sebesar Rp67,51 miliar.

KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

KAS DAN SETARA KAS
(Rp Miliar)

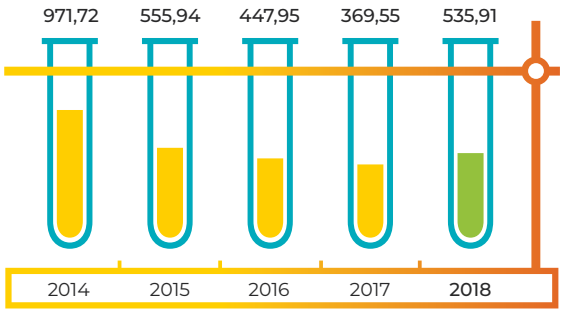

Kas dan setara kas di tahun 2018 tercatat sebesar Rp535,91 miliar naik sebesar Rp166,36 miliar atau 45,02% dibandingkan dengan kas dan setara kas tahun 2017 yaitu sebesar Rp369,55 miliar, dan Rp315,47 miliar atau 143,11% diatas RKAP sebesar Rp220,44 miliar.

PIUTANG USAHA

JUMLAH PIUTANG USAHA
(Rp Miliar)

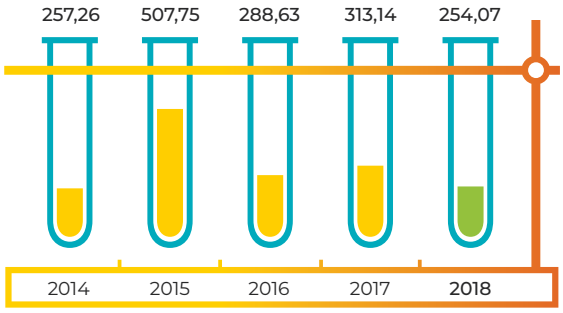

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas tidak tertagihnya piutang. Adanya hubungan berelasi mungkin mengakibatkan persyaratan transaksi tersebut di atas tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Piutang usaha di tahun 2018 tercatat sebesar Rp254,07 miliar turun sebesar Rp59,07 miliar atau 18,86% dibandingkan dengan piutang usaha tahun 2017 yaitu sebesar Rp313,14 miliar, dan Rp18,91 miliar atau 8,04% diatas RKAP sebesar Rp235,16 miliar. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan piutang pelanggan luar negeri di tahun 2018 sebesar Rp66,38 miliar atau 23,20% dibandingkan dengan piutang usaha tahun 2017 sebesar Rp286,17 miliar.

PIUTANG LAIN-LAIN

JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN
(Rp Juta)

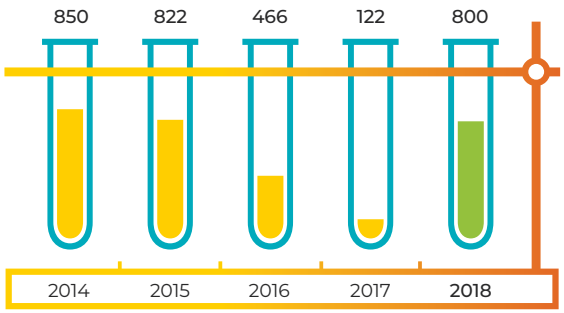

Piutang lain-lain di tahun 2018 tercatat sebesar Rp800 juta naik sebesar Rp678 juta atau 556,83% dibandingkan dengan piutang lain-lain tahun 2017 yaitu sebesar Rp122 juta, dan Rp100 juta atau 11,13% di atas RKAP sebesar Rp900 juta. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan pihak ketiga piutang lainnya besar Rp150 juta atau 123,45% dibandingkan dengan piutang lain-lain tahun 2017 yaitu sebesar Rp122 juta.

PERSEDIAAN

1. Penilaian Persediaan
   Biaya persediaan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak atau rata-rata sederhana bergantung pada jenis persediaan. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual persediaan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan.
2. Biaya Perolehan Persediaan
   Biaya perolehan *(acquisition cost)* persediaan meliputi harga beli, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, biaya konversi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai *(present location and condition),*

kecuali untuk persediaan produk dalam proses dicatat sebesar persentase beban pokok barang dalam proses terhadap beban pokok barang jadi, yaitu:

a. Produk dalam proses untuk barang curah (*bulk* penilaiannya disamakan antara yang akan diformulasi menjadi produk akhir atau yang akan dijual.
b. Produk dalam proses untuk produk akhir dilakukan berdasarkan rata-rata beban pokok produksi (HPP) tanpa bahan kemasan terhadap HPP Vaksin terapan dikurangi persentase produk reject saat dikemas, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Direksi No.07841/DIR/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.

3. Persediaan Bahan Baku, Penolong dan Perlengkapan
   Persediaan bahan baku, penolong dan perlengkapan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak *(moving average method)*.
4. Persediaan Produk Dalam Proses
   Biaya persediaan produk dalam proses dihitung setiap triwulan berdasarkan beban pokok produksi terapan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana.
   Persediaan produk dalam proses terdiri dari:
   a. *Bulk* (barang curah) hasil produksi yang telah lulus uji *(quality control)* dengan kondisi siap untuk diformulasi menjadi produk akhir dan siap untuk dijual sebelum dilakukan pengemasan.
   b. Produk akhir hasil produksi yang telah dikemas dalam wadah (botol/ampul/vial/*unject blank*) dan telah lulus uji *(quality control)* sebelum diberi etiket, leaflet dan dimasukkan ke dalam dus.
5. Persediaan Produk Jadi
   Persediaan produk jadi terdiri dari persediaan produk perusahaan dan persediaan *trading partnership*. Biaya persediaan produk Perusahaan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana, sedangkan biaya persediaan *trading partnership* ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.
6. Persediaan Dalam Perjalanan
   Persediaan dalam perjalanan merupakan persediaan bahan baku/bahan penolong/perlengkapan/*trading partnership* yang pada akhir periode pelaporan barangnya sudah diterima/tiba di pelabuhan dan sesuai syarat penyerahan barang sudah menjadi milik Perusahaan. Khusus untuk barang yang berasal dari impor dibuat Nota Perhitungan Barang Impor (NPI) sementara sebagai dasar mencatat nilai "Persediaan dalam Perjalanan".
7. Persediaan dalam Karantina
   Persediaan dalam karantina merupakan persediaan bahan baku/penolong/perlengkapan/*trading partnerhsip* yang pada akhir periode pelaporan barangnya sudah diterima/tiba di Perusahaan, tetapi belum memenuhi syarat penyerahan barang karena belum lulus pengujian. Persediaan dalam karantina dikelompokkan ke kelompok Aset Lancar Lainnya.
8. Penurunan Nilai Persediaan
   Penurunan nilai persediaan dari biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih diakui sebagai beban dalam periode terjadinya penurunan nilai. Pemulihan kembali nilai persediaan setelah terjadi penurunan nilai diakui sebagai pengurangan beban dalam periode terjadinya pemulihan.
   Persentase penurunan nilai persediaan diakui jika nilai tercatat melebihi nilai realisasi neto. Persentase ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa depan.

JUMLAH PERSEDIAAN
(Rp Miliar)

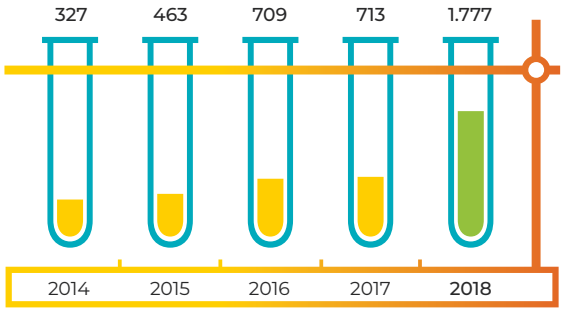

Persediaan di tahun 2018 tercatat sebesar Rp1,177 triliun naik sebesar Rp464,33 miliar atau 65,13% dibandingkan dengan persediaan tahun 2017 yaitu sebesar Rp712,91 miliar, dan Rp537,29 atau 83,96% diatas RKAP sebesar Rp639,96 miliar. Hal ini disebabkan oleh

1. Pada tahun 2018 persediaan bahan baku penolong besar Rp612,58 miliar meningkat sebesar Rp399,98 miliar atau 188,14% dibandingkan dengan persediaan tahun 2017 yaitu sebesar Rp212 miliar. Terjadinya peningktanan bahan baku/penolong perusahaan terutama dari persediaan *Concentrate* HBsAG *Bulk* sebesar Rp288,39 miliar, bahan kimia sebesar Rp79,11 miliar, alat gelas dan kedokteran Rp102,11 miliar dan alat kemasan sebesar Rp76,82 miliar.

2. Pada tahun 2018 persediaan produk jadi besar Rp76,36 miliar meningkat sebesar Rp36,42 miliar atau 91,18% dibandingkan dengan persediaan tahun 2017 yaitu sebesar Rp39,94 miliar. Terjadinya peningkatan persedian produk jadi karena meingkatnya persediaan produk perusahaan dan produk *Partnership* untuk persiapan penjualan tahun berikutnya.
3. Produk Dalam Proses (PDP) sebesar Rp485,67 miliar dari PDP produk perusahaan berupa *Bulk* dan produk vaksin yang sudah di filling untuk mendukung rencana penjualan tahun berikutnya.

Persediaan produk jadi dan bahan baku yang rusak atau kedaluwarsa tahun berjalan dibebankan pada kelompok beban pokok penjualan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk selisih kurang atau lebih harga pokok terapan-aktual dibebankan ke beban (penghasilan) lain. Penyisihan dilakukan atas saldo persediaan yang telah dikurangkan dengan yang rusak atau kedaluwarsa.

UANG MUKA

JUMLAH UANG MUKA
(Rp Miliar)

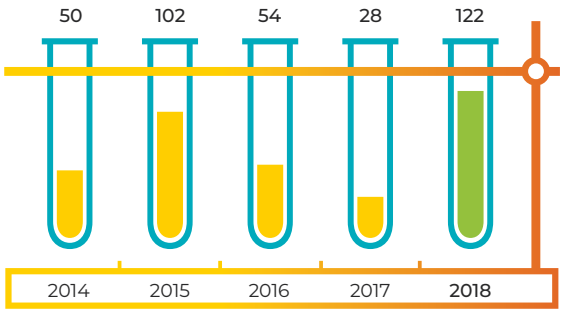

Uang Muka di tahun 2018 tercatat sebesar Rp121,85 miliar naik sebesar Rp94,12 miliar atau 339,35% dibandingkan dengan uang muka tahun 2017 yaitu sebesar Rp27,73 miliar, dan Rp320,90 miliar atau 72,48% diatas RKAP sebesar Rp Rp442,75 miliar. Hal ini disebabkan oleh:

1. Uang Muka Impor dalam penyelesaian sebesar Rp255,11 juta merupakan pembayaran biaya asuransi, biaya bongkar muat, biaya inklaring, bea masuk dan pajak terkait proses penanganan barang impor dari Bandar udara/pelabuhan dalam negeri ke lokasi Perusahaan.
2. Pembayaran uang muka pembelian barang impor diantaranya *autoclave* No 2 for *Filling Line 3* sebesar Rp1,05 miliar, Acellular Pertussis Vaccine sebesar Rp1,34 miliar, *Stainless Steel Final Bulk Vessel* 500/240 L Intermediate Vessel 320/235L System sebesar Rp3,82 miliar, Media Department sebesar Rp2,68 miliar, Pembayaran L/C Impor MI77106108353 *Concentrate* HBSAG *Bulk* sebesar Rp44,68 miliar, *Saturated Steam Sterilization* sebesar Rp1,24 miliar, *Steam/Water Washer* sebesar Rp1,13 miliar, HEATmarker VVM2 *Freight*, bOPV 20 Dose sebesar Rp1,06 miliar, *Down Payment for 1 unit* CARR *Powerfuge Separation* System Model P12 sebesar Rp4,78 miliar, *Down Payment* of 1 *unit Saturated Steam Sterilizer* sebesar Rp1,08 miliar.

PAJAK DIBAYAR DIMUKA

JUMLAH PAJAK DIBAYAR DIMUKA
(Rp Miliar)

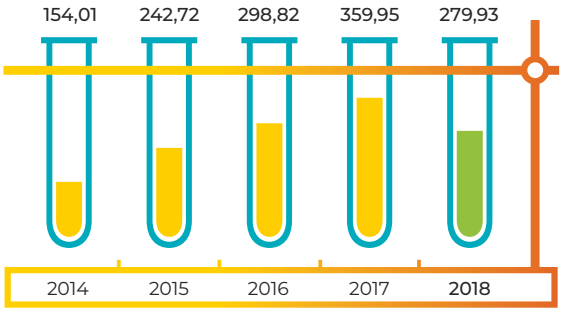

Pajak dibayar dimuka di tahun 2018 tercatat sebesar Rp279,23 miliar turun sebesar Rp80,02 miliar atau 22,23% dibandingkan dengan pajak dibayar dimuka tahun 2017 yaitu sebesar Rp359,95 miliar, dan Rp211,50 miliar atau 43,04% dibawah RKAP sebesar Rp491,42 miliar. Hal ini disebabkan oleh:

1. Terjadinya penurunan pajak pertambahan nilai masukan pada tahun 2018 sebesar Rp138,45 miliar turun sebesar Rp60,77 miliar atau 30,50% dibandingkan dengan pajak pertambahan nilai masukan tahun 2017 yaitu sebesar Rp.199 miliar.
2. Terjadinya penurunan estimasi PPH Pasal 28 pada tahun 2018 sebesar Rp125,05 miliar miliar turun sebesar Rp30,11 miliar atau 19,40% dibandingkan

dengan pajak pertambahan nilai masukan tahun 2017 yaitu sebesar Rp.155,16 miliar.

BIAYA DIBAYAR DIMUKA

JUMLAH BIAYA DIBAYAR DIMUKA
(Rp Miliar)

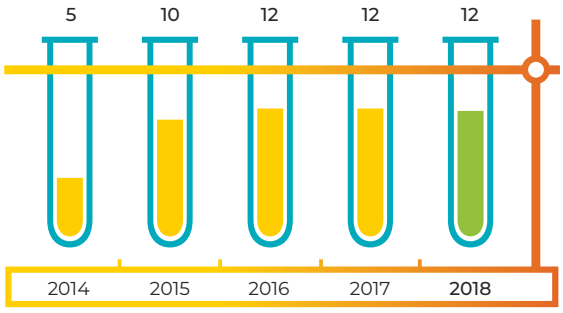

Biaya dibayar dimuka di tahun 2018 tercatat sebesar Rp12,41 miliar turun sebesar Rp64 juta atau 0,51% dibandingkan dengan Biaya dibayar dimuka tahun 2017 yaitu sebesar Rp12,47 miliar, dan Rp8,55 miliar atau 40,78% dibawah RKAP sebesar Rp20,96 miliar. Hal ini disebabkan oleh: turunnya beban dibayar dimuka untuk pembayaran sewa tercatat sebesar Rp2,23 miliar turun sebesar Rp2,83 miliar atau 0,51% dibandingkan dengan biaya dibayar dimuka untuk pembayaran sewa tahun 2017 sebesar 5,09 miliar.

Asuransi dibayar dimuka tersebut merupakan saldo premi asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), BNI Life, PT Asuransi Bumiputera Muda 1967, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

JUMLAH PENDAPATAN YANG AKAN DITERIMA
(Rp Juta)

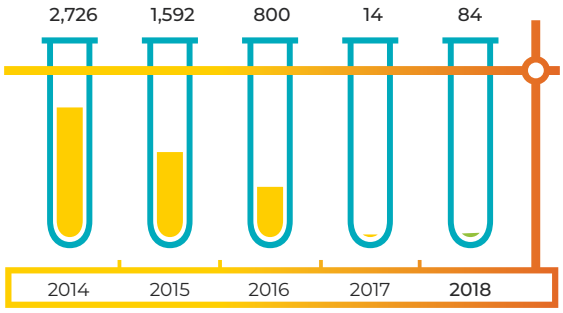

Pendapatan yang masih akan diterima di tahun 2018 tercatat sebesar Rp84 juta naik sebesar Rp70 juta atau 501,52% dibandingkan dengan Pendapatan yang masih akan diterima tahun 2017 yaitu sebesar Rp14 juta hal ini disebabkan oleh karena ada kenaikan penerinaan yang akan diterima dimuka dintaranya Bunga deposito sebesar Rp24 juta & pendapatan lain yang akan mash diterima sebesar Rp60 juta.

ASET LANCAR LAINNYA

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018- RKAP 2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Persediaan dalam Perjalanan	3.698	19.528	3.235	-	-	1.103	0	-	1.103	1.103
Persediaan dalam Karantina	15.684	89.150	34.388	166.520	-	8.002	(95,19)	-	(158.519)	8.002
Persediaan dalam Proses Penggantian	11.316	3.210	540	1.678	-	536	(68,06)	-	(1.142)	536
Jumlah Aset Lancar Lainnya	**30.698**	**111.888**	**38.162**	**168.198**	**47.758**	**9.640**	**(94,27)**	**(79,81)**	**(158.558)**	**(38.118)**

JUMLAH ASET LANCAR LAINNYA
(Rp Juta)

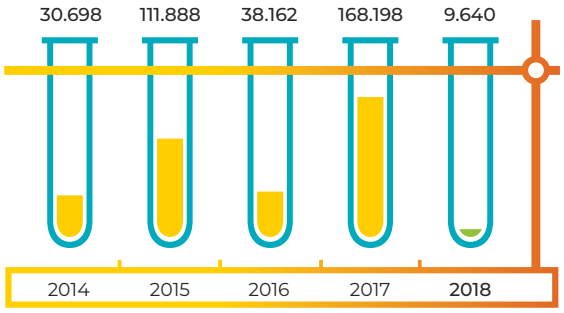

Aset lancar lainnya di tahun 2018 tercatat sebesar Rp9,64 miliar turun sebesar Rp158,56 miliar atau 94,27% dibandingkan dengan Aset lancar lainnya tahun 2017 yaitu sebesar Rp168,20 miliar dan Rp38,12 miliar atau 79,81% dibawah RKAP sebesar Rp47,76 miliar.

Hal ini disebabkan oleh:

1. Persediaan dalam karantina berasal dari pembelian bahan baku vaksin dan sera dan bahan perkemasan yang sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masih dalam status karantina karena sedang dalam proses pengujian
2. Persediaan Dalam Proses Penggantian per 31 Desember 2018 terutama dari persediaan bahan kemasan yang dinyatakan tidak lulus uji.

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR
(Rp Triliun)

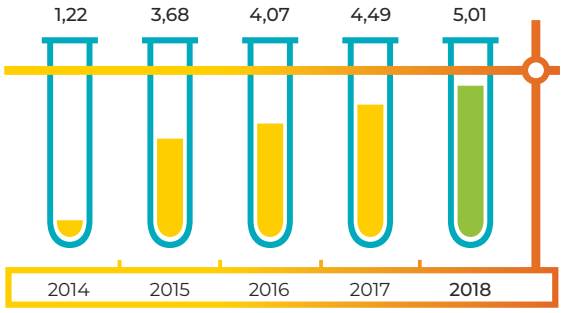

Aset tidak lancar Bio Farma di tahun 2018 tercatat sebesar Rp7,79 triliun naik Rp951,71 miliar atau 14,76.% dibandingkan dengan aset tidak lancar tahun 2017 yaitu sebesar Rp6,45 miliar, dan Rp391,39 atau 5,02% dibawah RKAP sebesar Rp7,79.

PAJAK TANGGUHAN

Rekonsiliasi antara taksiran pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku sebesar 25% dari laba akuntansi sebelum taksiran beban (manfaat) pajak penghasilan dan beban pajak seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

ASET TIDAK LANCAR

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan[%]		Selisih 2018-RKAP 2018
	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5	9=6-4
Aset Tidak Lancar									
Aset Pajak Tangguhan	17.874,06	22.086,83	23.585,02	30.213,96	34.372,63	24.999,89	(17,26)	(27,27)	(5.214,07)
Aset Tetap	1.163.473,24	3.605.537,01	3.998.187,10	4.394.230,96	5.598.101,59	4.930.721,37	12,21	(11,92)	536.490,40
Penyertaan pada Perusahaan Vial	-	-	-	-	29.049,73	-		-	-
Aset Tak Berwujud	37.855,46	36.005,02	38.633,60	32.522,39	26.616,31	25.346,61	(22,06)	(4,77)	(7.175,78)
Aset Tidak Lancar Lainnya	766,32	21.253,30	12.493,20	28.395,09	5.072,98	28.161,45	(0,82)	455,13	(233,64)
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.219.969,09**	**3.684.882,16**	**4.072.898,92**	**4.485.362,41**	**5.693.213,24**	**5.009.229,32**	**11,68**	**(12,01)**	**523.866,91**

BEBAN (MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN
(Rp Miliar)

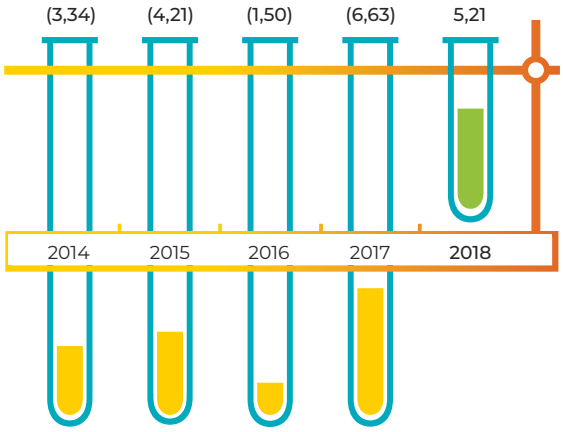

Pajak tangguhan di tahun 2018 tercatat sebesar Rp5,21 miliar naik Rp11,84 miliar atau 178,66% dibandingkan dengan Pajak tangguhan tahun 2017 yaitu sebesar Rp6,63 miliar, dan Rp40,580 miliar atau 88,61% dibawah RKAP sebesar Rp45,79 miliar.

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dari dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2015	Dibebankan Ke Laba Rugi Komprehensif	2016	Dibebankan Ke Laba Rugi Komprehensif	2017	Dibebankan Ke Laba Rugi Komprehensif	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018
	1	2	3	4	5	7	8	9	9/5	9/8	9-5	9-8
Imbalan Kerja	20.210	1.699	21.910	6.391	28.301	7.286	-	35.587	25,75	-	7.286	35.587
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	404	8	412	5	417	9	-	426	2,10	-	9	426
Penyisihan Persediaan	1.473	(210)	1.263	233	1.496	1.702	-	3.198	113,78	-	1.702	3.198
Penyusutan Aset Dalam Penyelesaian	-	-	-	-	-	(14.211)	-	(14.211)	-	-	(14.211)	(14.211)
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	**22.087**	**1.498**	**23.585**	**6.629**	**30.214**	**(5.214)**	**34.373**	**25.000**	**(17,26)**	**(27,27)**	**(5.214)**	**(9.373)**

JUMLAH ASET PAJAK TANGGUHAN
(Rp Juta)

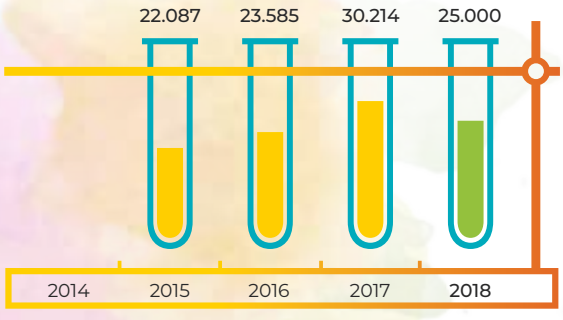

Aset & liabilitas pajak tangguhan perusahaan di tahun 2018 tercatat sebesar Rp25 miliar turun Rp5,21 miliar atau 17,26% dibandingkan dengan Aset & liabilitas pajak tangguhan perusahaan tahun 2017 yaitu sebesar Rp30,21 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penyustan asset dalam penyelsaian sebesar Rp14,21 miliar.

ASET TETAP

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018- RKAP 2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Biaya Perolehan										
Tanah	17.140	2.059.183	2.059.183	2.099.451	2.112.183	2.099.451	-	(0,60)	-	(12.732)
Bangunan	503.284	557.670	631.496	724.634	962.435	733.709	1,25	(23,77)	9.076	(228.726)
Peralatan Mesin & Pabrik	1.076.051	1.186.837	1.277.105	1.374.341	2.012.030	1.457.901	6,08	(27,54)	83.560	(554.129)
Peralatan Kantor	79.289	110.848	130.023	143.468	-	153.731	7,15	-	10.263	153.731
Peralatan Utilitas	67.354	70.319	98.139	106.328	-	163.073	53,37	-	56.745	163.073
Kendaraan Bermotor	5.210	4.671	4.701	4.701	163.461	2.250	(52,13)	(98,62)	(2.450)	(161.211)
Aset Dalam Pembangunan										
Bangunan	75.539	241.052	281.524	239.723	1.640.059	554.306	131,23	(66,20)	314.583	(1.085.753)
Peralatan Mesin, Pabrik Kantor & Utility	62.566	219.971	500.840	790.146	-	1.033.233	30,76	-	243.087	1.033.233
Aset Tetap Dalam Perjalanan										
Peralatan Mesin, Pabrik Kantor & Utility	-	-	-	44.741	-	4.138	(90,75)	0	(40.603)	4.138
Jumlah Biaya Perolehan	**1.886.433**	**4.450.551**	**4.983.012**	**5.527.533**	**6.890.168**	**6.201.793**	**12,20**	**(9,99)**	**674.260**	**(688.375)**
Akumulasi Penyusutan & Penurunan Nilai										
Bangunan	123.407	148.287	178.620	212.551	-	247.988	16,67	-	35.437	247.988
Peralatan Mesin & Pabrik	509.219	587.907	668.202	756.398	-	779.753	3,09	-	23.355	779.753
Peralatan Kantor	57.355	70.916	92.180	110.751	-	185.145	67,17	-	74.393	185.145
Peralatan Utilitas	29.441	34.202	41.618	49.188	-	56.106	14,06	-	6.918	56.106
Kendaraan Bermotor	3.538	3.702	4.205	4.414	-	2.081	(52,86)	-	(2.333)	2.081
Jumlah	**722.959**	**845.014**	**984.825**	**1.133.302**	**(1.292.067)**	**1.271.072**	**12,16**	**(198,38)**	**137.770**	**2.563.139**
Nilai Buku	**1.163.473**	**3.605.537**	**3.998.187**	**4.394.231**	**5.598.101**	**4.930.721**	**12,21**	**(11,92)**	**536.490**	**(667.380)**

NILAI BUKU ASET TETAP
(Rp Triliun)

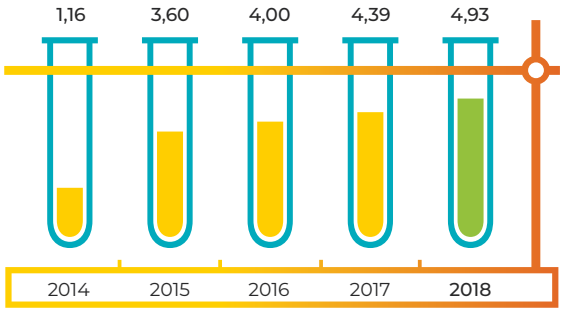

Aset tetap di tahun 2018 tercatat sebesar Rp4,93 triliun naik Rp536,49 miliar atau 12,21% dibandingkan dengan Aset tetap tahun 2017 yaitu sebesar Rp4,39 triliun, dan Rp667,38 atau 11,92% dibawah RKAP sebesar Rp5,60 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya Bangunan dalam pelaksanaan sebesar Rp554,31 miliar, peralatan mesin, pabrik, kantor dan utilitas sebesar Rp1,03 triliun.

Aset tetap kecuali tanah dan kendaraan, telah diasuransikan kepada PT Asuransi Bumiputera Muda 1967, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Asuransi Jasa Tania terhadap semua risiko termasuk gempa bumi berdasarkan suatu paket polis tertentu. Kendaraan diasuransikan terhadap risiko all risk dan total loss only (TLO) kepada PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 dan PT Asuransi Jasa Tania.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atas risiko kerugian.

BANGUNAN DALAM PELAKSANAAN

(Dalam Juta Rupiah)

Nama Aset	Nilai 31 Desember 2017
Gedung Dalam Pelaksanaan	
a. Gedung 43	429.033
b. Gedung Lainnya	125.273
Total Gedung Dalam Pelaksanaan	554.306
Mesin, Pabrik, Utiliti dalam Pelaksaaan	
a. Fasilitas Gedung 43	784.336
b. Fasiltas Gedung Lainnya	248.897
Total Mesin, Pabrik, Utiliti dalam Pelaksaaan	**1.033.233**
Total Aset Dalam Pelaksanaan	**1.587.539**

Sebagian besar nilai Aset Dalam Pelaksanaan tersebut terdapat di Gedung Fasilitas Produksi Vaksin dan Pengemasan (gedung 43). Tahap I pembangunan telah selesai dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk Cabang IV. Tahap II pembangunan Gedung 43 dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk Cabang IV Pembagunan Gedung 43 Tahap II ini direncanakan akan selesai dan diserahterimakan pada triwulan IV tahun 2019.

Selanjutnya akan dilakukan pembangunan Gedung 43 tahap ke III yang sampai pada tanggal 31 Desember 2018 masih dalam tahap perencanaan. Sampai dengan 31 Desember 2018, Gedung 43 dan peralatan yang merupakan fasilitas produksi dan pengemasan belum siap digunakan menunggu selesainya pembangunan gedung tersebut. Oleh karena itu seluruh nilai gedung dan peralatan tersebut masih dicatat kedalam Aset Dalam Pelaksanaan. Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Gedung 43 dan fasilitas peralatannya akan selesai dan dapat digunakan pada tahun 2022.

Sampai dengan 31 Desember 2018, gedung lainnya dan peralatan yang ada didalamnya belum siap digunakan menunggu selesainya pembangunan gedung dan instalasi alat. Oleh karena itu seluruh nilai gedung dan peralatan tersebut masih dicatat kedalam Aset Dalam Pelaksanaan. Terhadap gedung dan peralatan yang sudah dapat dipakai di tahun 2019 akan segera dilakukan reklasifikasi ke aset tetap pada tahun 2019.

ASET TIDAK BERWUJUD

Aset tak berwujud terdiri atas aset tak berwujud dalam penyelesaian dan aset tak berwujud setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD
(Rp Juta)

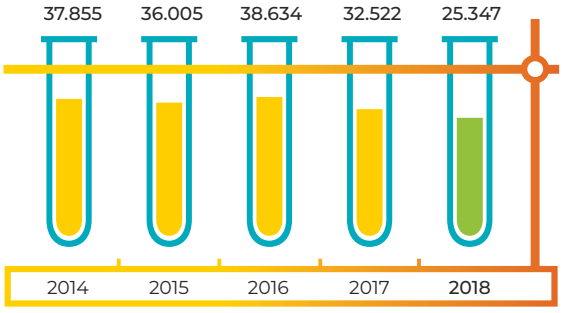

Aset tak berwujud di tahun 2018 tercatat sebesar Rp25,35 miliar turun Rp7,18 miliar atau 22,06% dibandingkan dengan Aset tak berwujud tahun 2017 yaitu sebesar Rp32,52 miliar, dan Rp1,27 miliar atau 4,77% dibawah RKAP sebesar Rp26,62 miliar. Hal ini disebabkan oleh Biaya Pengembangan Upstream Vaksin Flu Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2018 sebesar Rp15.031.886706,31 merupakan biaya yang terkait dengan transfer teknologi upstream flu dengan BIKEN - Jepang yang meliputi aktivitas pengembangan vaksin flu pada skala pilot (5000 telur), optimalisasi proses produksi pada skala pilot untuk menghasilkan yield (hasil) yang ekonomis, produksi *preclinical lot*, uji pra klinis (uji immunogenisitas pada hewan coba mencit), hingga produksi clinical lot untuk vaksin flu prepandemik, uji tantang (challenge study) pada hewan uji *ferret* dan uji preklinis *immunogenicity*. Tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan mulai tahun 2018 untuk vaksin flu (pre-pandemik) meliputi Uji klinis fase 2 dan 3 serta lisensi/registrasi produk ke BPOM. Biaya pengembangan Upstream Vaksin Flu ini akan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat 8 (delapan) tahun sejak vaksin tersebut diproduksi secara komersil.

ASET BIOLOGIS

ASET BIOLOGIS
(Rp Miliar)

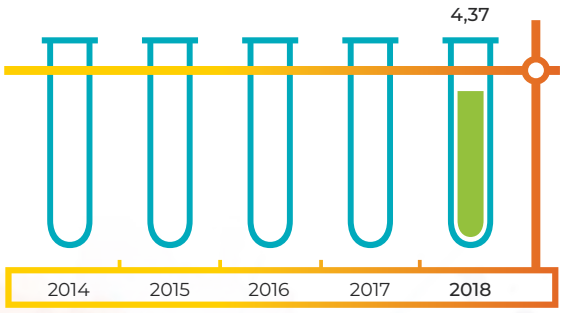

Pada tahun 2018 manajemen melakukan perhitungan atas aset biologis berdasarkan PSAK No. 69 tentang Agrikultur, mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, penerapan dini diperkenankan.

Penerapan PSAK No 69 ini merupakan penerapan awal di PT Bio Farma (Persero) yaitu hewan kuda yang berjumlah 208 ekor dimana hewan kuda tersebut diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dimasukkan dalam laba rugi pada periode terjadinya.

ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR LAINNYA
(Rp Miliar)

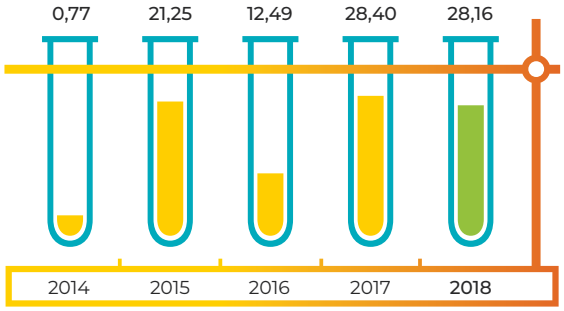

Aset tak lancar lainnya di tahun 2018 tercatat sebesar Rp28,16 miliar turun Rp233,64 juta atau 0,82% dibandingkan dengan Aset tak lancar lainnya tahun 2017 yaitu sebesar Rp28,40 miliar, dan Rp23,08 miliar atau 455,13% diatas RKAP sebesar Rp5,07 miliar.

Beban tangguhan merupakan biaya sistem jaringan listrik PLN ditangguhkan yang diamortisasi selama 4 tahun. Setoran jaminan merupakan jaminan yang diberikan untuk penambahan daya listrik, jaminan sewa gedung Pakarti Center (Kantor Perwakilan Perusahaan) dan jaminan gas elpiji.

Pada bulan April 2016 World Health Organization (WHO) mendeklarasikan penghentian penggunaan, pengedaran, penyimpanan dan produksi vaksin polio tipe 2 (trivalent Oral Polio Vaccine/tOPV) secara global terhitung 1 Mei 2016, dan menggantinya dengan bivalent Oral Polio Vaccine (bOPV). Atas putusan tersebut Perusahaan telah mengambil langkah-langkah menghentikan produksi tOPV dan *Bulk* OPV tipe 2 serta menarik dari peredaran dan menggantinya dengan bOPV. Pada tanggal Laporan

Posisi Keuangan, Perusahaan memiliki persediaan OPV tipe 2 dalam bentuk *bulk* setara 2.882,5 liter dengan nilai tercatat sebesar Rp21,77 miliar. Manajemen berpendapat bahwa penyimpanan *bulk* OPV tipe 2 diperlukan karena:

1. Untuk keperluan produksi sIPV pada tahun 2021 dan pengembangan vaksin Polio Oral baru menggunakan strain baru virus Polio tipe 2 (nOPV2).
2. Sebagai cadangan untuk mendukung program Pemerintah jika terjadi *outbreak* atau wabah polio tipe 2, mengingat Indonesia masih berisiko terjadi outbreak atau wabah polio tipe 2.
3. Telah mendapat dukungan dari Pemerintah cc. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah meminta kepada WHO melalui representatif di Indonesia, agar PT Bio Farma diberi wewenang sebagai *stockpile* nasional untuk vaksin mOPV2.
4. Permintaan UNICEF kepada PT Bio Farma (Persero) agar tetap menyimpan persediaan *bulk* mOPV2 melalui surat Deputy Director, Supply Division UNICEF kepada Plt. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) tanggal 18 Desember 2017.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat persediaan *bulk* OPV tipe 2 sebesar Rp21,77 miliar telah mencerminkan nilai realisasi bersih *(netto)* setelah mempertimbangkan aspek kegunaan dan mengkaji jumlah kebutuhannya di masa depan sesuai dengan kriteria-kriteria diatas.

Mempertimbangkan status eradikasi wabah polio pada akhir tahun 2022 sesuai dengan perkiraan waktu dari UNICEF. Pada tahun 2018 Perusahaan melakukan pencadangan sebagai penyisihan penurunan nilai persediaan *bulk* OPV tipe 2 berdasarkan position paper yaitu sebesar 20% per tahun.

TOTAL ASET

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan[%]		Selisih 2018-2017
	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5	9=6-4
Aset Lancar									
Kas dan Setara Kas	971.717,05	555.939,26	447.950,33	369.546,13	220.438,29	535.910,34	45,02	143,11	166.364,21
Efek Tersedia untuk Dijual	25.599,79	-	-	-	-	-			-
Piutang Usaha	257.259,80	507.746,09	288.626,43	313.138,28	235.156,88	254.065,48	(18,86)	8,04	(59.072,80)
Piutang Lain-Lain	850,05	822,21	446,14	121,77	900,00	799,82	556,83	(11,13)	678,05
Persediaan	326.600,04	462.557,27	708.564.47	712.911,96	639.955,07	1.177.241,65	65,13	83,96	464.329,69
Uang Muka	50.412,49	102.353,24	54.052,29	27.734,36	442.749,42	121.850,63	339,35	(72,48)	94.116,27
Pajak Dibayar Dimuka	154.008,29	242.720,02	298.816,99	359.948,03	491.423,11	279.927,56	(22,23)	(43,04)	(80.020,46)
Biaya Dibayar Dimuka	4.767,42	10.163,13	12.136,51	12.473,63	20.956,21	12.410,12	(0,51)	(40,78)	(63.51)
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	2.725,70	1.591,89	800,06	13,99	-	84,18	501,52		70,18
Aset Lancar Lainnya	30.698,00	111.887,97	38.162,20	168.198,39	47.757,67	9.640,20	(94,27)	(79,81)	(158.558,19)
Jumlah Aset Lancar	**1.824.638,62**	**1.995.781,08**	**1.849.555,40**	**1.964.086,54**	**2.099.336,65**	**2.391.929,98**	**21,78**	**13,94**	**427.843,43**
Aset Tidak Lancar									
Aset Pajak Tangguhan	17.874,06	22.086,83	23.585,02	30.213,96	34.372,63	24.999,89	(17,26)	(27,27)	(5.214,07)
Aset Tetap	1.163.473,24	3.605.537,01	3.998.187,10	4.394.230,96	5.598.101,59	4.930.721,37	12,21	(11,92)	536.490,40
Aset Tak Berwujud	37.855,46	36.005,02	38.633.60	32.522,39	26.616,31	25.346,61	(22,06)	(4,77)	(7.175,78)
Aset Tidak Lancar Lainnya	766,32	21,253,30	12,493,20	28,395,09	5,072,98	28,161,45	(0,82)	455,13	(233,64)
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.219.969,09**	**3.684.882,16**	**4.072.898,92**	**4.485.362,41**	**5.693.213,24**	**5.009.229.32**	**11,68**	**(12,01)**	**523.866,91**
Total Aset	**3.044.607,71**	**5.680.663,24**	**5.922.454,32**	**6.449.448,95**	**7.792.549,89**	**7.401.159,29**	**14,76**	**(5,02)**	**951.710,35**

Total Aset Bio Farma di tahun 2018 tercatat sebesar Rp740 triliun naik Rp951.71 miliar atau 14,76% dibandingkan dengan total aset tahun 2017 yaitu sebesar Rp.6,45 triliun dan Rp391,39 miliar atau 5,02% dibawah RKAP sebesar Rp7,79 triliun.

LIALIBITAS JANGKA PENDEK, LIABILITAS JANGKA PANJANG DAN TOTAL LIABILITAS

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
   Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.
   Pada tahun 2018 dan 2017, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi
   Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
   Pada tahun 2018 dan 2017, Perusahaan mempunyai utang usaha, biaya masih harus dibayar, dan liabilitas lancar lainnya yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2018-2017
	1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5	9 = 6-4
Liabilitas Jangka Pendek									
Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	-	-	205.000	-	-	205.000,00
Utang Usaha	145.094,99	233.417,27	259.234,47	371.252,52	192.323,05	336.111,91	(9,47)	74,76	(35.140,61)
Utang Pajak	38.918,79	46.518,29	47.624,36	57.801,11	89.908,01	68.519,41	18,54	-23,79	10.718,30
Biaya yang Masih Harus Dibayar	128.279,65	145.488,51	113.405,21	107.859,07	86.250,28	110,910,56	2,83	28,59	3.051,48
Pendapatan Diterima Dimuka	1.366,41	898,72	44,13	1.007,78	-	1.646,36	63,37	-	638,59
Liabilitas Lancar Lainnya	26.008,57	30.340,63	32.860,81	41.635,03	10.664,47	23.116,86	(44,48)	116,77	(18.518,17)
Jumlah Jangka Pendek	**339.668,41**	**456.663,42**	**453.168,97**	**579.555,52**	**379.145,81**	**745.305,11**	**28,60**	**96,57**	**165.749,59**

LIABILITAS JANGKA PENDEK
(Rp Miliar)

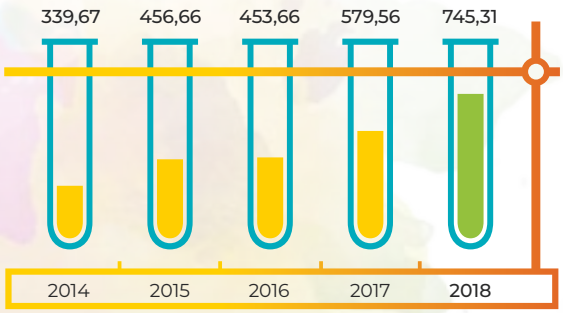

Bio Farma membukukan liabilitas jangka pendek tahun 2018 sebesar Rp745,31 miliar atau naik sebesar Rp165,75 miliar atau 28,60% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek tahun 2017 yang berjumlah Rp579,56 miliar, dan Rp366,16 miliar atau 96,57% diatas RKAP sebesar Rp379,15 miliar. Kenaikan liabilitas jangka pendek ini disebabkan oleh ada utang jangka pendek senilai Rp205 miliar merupakan Kredit Modal Kerja atas realisasi penggunaan fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Bio Farma (Persero) senilai Rp1,59 triliun.

UTANG USAHA

Bio Farma membukukan utang usaha tahun 2018 sebesar Rp336,11 miliar atau turun sebesar Rp35,14 miliar atau 9,47% dibandingkan dengan utang usaha tahun 2017 yang berjumlah Rp371,25 miliar dan Rp143,79 miliar atau 74,76% diatas RKAP sebesar Rp192,32 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya utang usaha Pihak Ketiga pada tahun 2018 sebesar Rp305,02 miliar atau turun sebesar Rp48,68 miliar atau 13,76% dibandingkan dengan utang usaha tahun 2017 yang berjumlah Rp353,70 miliar yaitu pembelian bahan baku/penolong sebesar Rp215,34 miliar, investasi Rp86,60 miliar, pengadaan jasa Rp3,07 miliar. Utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp31,09 miliar.

JUMLAH UTANG USAHA
(Rp Miliar)

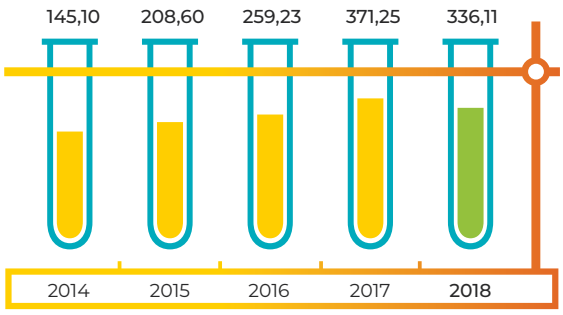

JUMLAH UTANG PAJAK

UTANG PAJAK
(Rp Miliar)

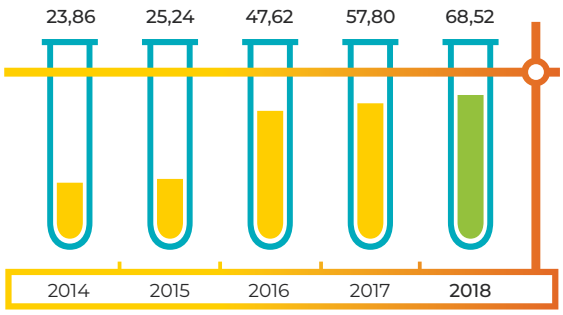

Bio Farma membukukan utang pajak tahun 2018 sebesar Rp68,52 miliar atau naik sebesar Rp10,72 miliar atau 18,54% dibandingkan dengan utang pajak tahun 2017 yang berjumlah Rp57,80 miliar dan Rp21,39 ayau 23,79% dibawah RKAP sebesar Rp89,91 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya Utang Pajak:

(Dalam Juta Rupiah)

Utang Pajak	31 Desember 2017	31 Desember 2018
PPN Keluaran	0,00	0
PPN WAPU	12.985,31	31.327,82
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2)	261,87	5.068,53
Pajak Penghasilan Pasal 21	43.541,97	30.447,58
Pajak Penghasilan Pasal 22	702,24	986,28
Pajak Penghasilan Pasal 23	309,72	689,22
Jumlah	**57.801,11**	**68.519,41**

BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

JUMLAH BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
(Rp Miliar)

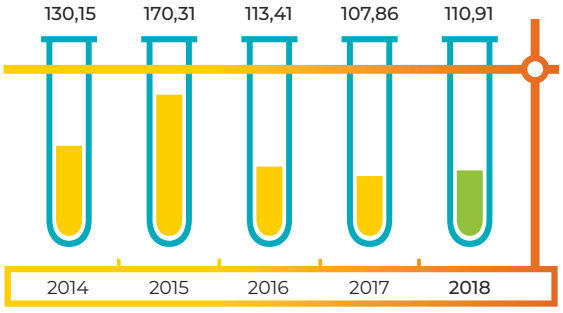

Bio Farma membukukan biaya yang harus dibayar tahun 2018 sebesar Rp110,91 miliar atau naik sebesar Rp3,05 miliar atau 2,83% dibandingkan dengan biaya yang harus dibayar tahun 2017 yang berjumlah Rp10786 miliar, dan Rp24,66 miliar atau 28,59% diatas RKAP sebesar Rp86,25 miliar. Kenaikan biaya yang harus dibayarkan disebabkan oleh karena adanya kenaikan jasa produksi karyawan sebesar Rp6,93 miliar, Keagenan ekspor, royalty & insentif penjualan sebesar 6,21 miliar dan bunga pinjaman sebesar Rp3,30 miliar

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

JUMLAH PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
(Rp Miliar)

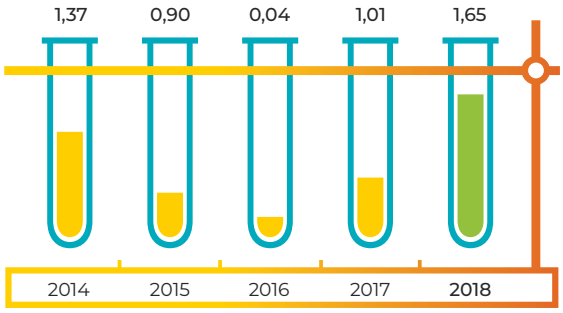

Bio Farma membukukan pendapatan diterima dimuka tahun 2018 sebesar Rp1,65 miliar atau naik sebesar Rp639 juta atau 63,37% dibandingkan dengan pendapatan diterima dimuka tahun 2017 yang berjumlah Rp1,08 miliar. Kenaikan pendapatan dibayar dimuka disebabkan oleh meningkatnya pendapatan diterima dimuka untuk ekspor sebesar Rp717 juta dibandingkan dengan pendapatan diterima dimuka pada tahun 2017.

LIABILITAS LANCAR LAINNYA

JUMLAH LIABILITAS LANCAR LAINNYA
(Rp Miliar)

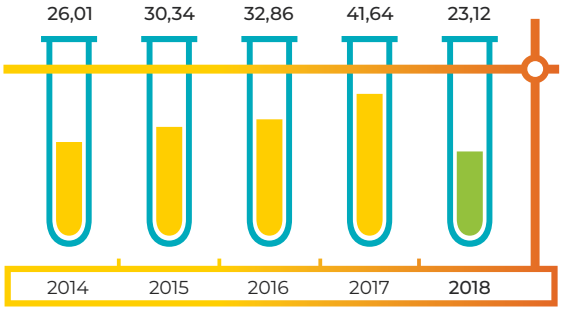

Bio Farma membukukan liabilitas lancar lainnya tahun 2018 sebesar Rp23,12 miliar atau turun sebesar Rp18,52 miliar atau 44,48% dibandingkan dengan liabilitas lancar lainnya tahun 2017 yang berjumlah Rp41,64 miliar. Hal ini karena terjadinya penurunan pada tantiem sebesar Rp14,64 miliar, taksasi ongkos angkut dan embalage sebesar Rp1,32 miliar, dan sanofi sebesar Rp3,07 miliar dibandingkan dengan liabilitas lancar lainnya tahun 2017.

Saldo liabilitas lancar lainnya atas sanofi merupakan pembelian yang belum dilakukan set off dengan penjualan ke PT Aventis Pharma dikarenakan belum dilakukan penagihan.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan[%]		Selisih 2017-2016
	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5	9=6-4
Liabilitas Jangka Panjang									
Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	1.066.393,13	450.000,00		(57,80)	450.000,00
Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Pasca Kerja	136.368,11	152.021,93	167.133,08	219.937,07	200.740,63	243.014,77	10,49	21,06	23.077,70
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya	24.882,31	27.846,38	-	-	-	-			-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**161.250,42**	**179.868,31**	**167.133,08**	**219.937,07**	**1.267.133,76**	**693.014,77**	**215,10**	**(45,31)**	**473.077,70**

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG
(Rp Miliar)

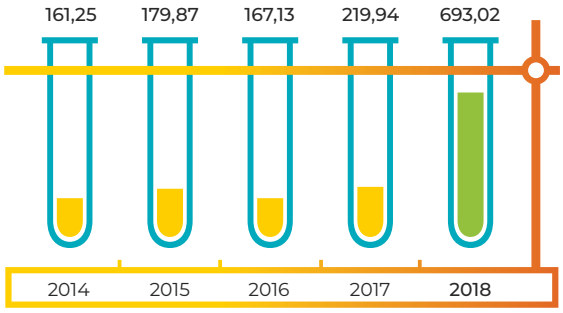

Bio Farma membukukan liabilitas jangka panjang tahun 2018 sebesar Rp696,02 miliar atau naik sebesar Rp473,08 miliar atau 215,10% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang tahun 2017 yang berjumlah Rp219,94 miliar dan Rp574,12 miliar atau Rp45,31 miliar 45,31% diatas RKAP sebesar Rp1,27 triliun. Peningkatan Liablitas Jangka panjang karena adanya utang jangka panjang senilai Rp450 miliar merupakan merupakan Middle Term Notes yang diberikan kepada Bio Farma.

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menerapkan liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013). Selain itu Perusahaan juga mengikutsertakan seluruh karyawan tetap dan kontrak ke dalam program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya.

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN PASCA KERJA (Rp Miliar)

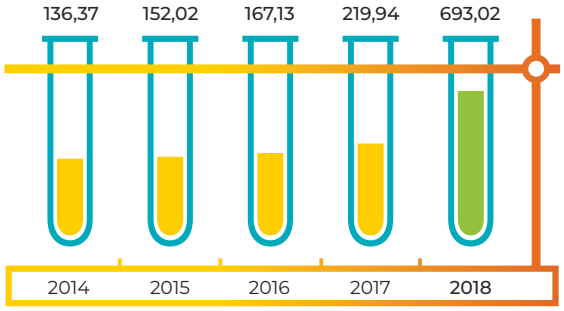

Bio Farma membukukan liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja tahun 2018 sebesar Rp243,02 miliar atau naik sebesar Rp23,08 miliar atau 10,49% dibandingkan dengan liabilitas diestimasi atas imbalan pasca kerja tahun 2017 yang berjumlah Rp219,94 miliar dan Rp42,27 miliar atau 21,06% diatas RKAP sebesar Rp200,74 miliar. Peningkatan liabilitas Diestimasi Imbalan Pasca Kerja disebabkan oleh diantaranya meningkatnya saldo awal nilai kini liabilitas imbalan kerja sebesar Rp52,80 miliar laba rugi aktuaria atas kewajiban sebesar Rp19,16 miliar.

TOTAL LIABILITAS

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan[%]		Selisih 2017-2016
	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5	9=6-4
Liabilitas Jangka Pendek									
Utang Usaha	145.094,99	233.417,27	259234,47	371.252,52	192.323,05	336.111,91	(9,47)	74,76	(35,140,61)
Utang Pajak	38.918,79	46.518,29	47.624,36	57.801,11	89.908,01	68.519,41	18,54	(23,79)	10,718,30
Biaya yang Masih Harus Dibayar	128.279,65	145.488,51	113.405,21	107.859,07	86.250,28	110.910,56	2,83	28,59	3,051,48
Pendapatan Diterima Dimuka	1.366,41	898,72	44,13	1.007,78	0,00	1.646,36	63,37		638,59
Liabilitas Lancar Lainnya	26.008,57	30.340,63	32.860,81	41.635,03	10.664,47	23.116,86	(44,48)	116,77	(18,518,17)
Jumlah Jangka Pendek	**339.668,41**	**456.663,42**	**453.168,97**	**579.555,52**	**379.145,81**	**745.305,11**	**28,60**	**96,57**	**165,749,59**
Liabilitas Jangka Panjang									-
Pinjaman Jangka Panjang									-
Liabilitas Diestimasi Imbalan Pasca Kerja	136.368,11	152.021,93	167.133,08	219.937,07	200.740,63	243.014,77	10,49	21,06	23,077,70
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya	24.882,31	27.846,38	-	-	-	-			-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**161.250,42**	**179.868,31**	**167.133,08**	**219.937,07**	**1.267.133.76**	**693.014,77**	**215,09**	**(45.31)**	**473.077.70**
Jumlah Liabilitas	**500.918,83**	**636.531,73**	**620.302,05**	**799.492,59**	**1.646.279.57**	**1.438.319,88**	**79,90**	**(12.63)**	**638.827.29**

TOTAL LIABILITAS

(Rp Miliar)

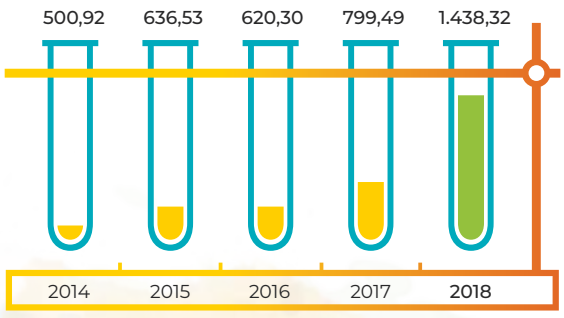

Bio Farma membukukan total liabilitas tahun 2018 sebesar Rp1,44 triliun atau naik sebesar Rp638,83 miliar atau 79,90% dibandingkan dengan total liabilitas tahun 2017 yang berjumlah Rp799,49 miliar dan Rp207,96 atau 12,63% dibawah RKAP sebesar Rp1,65 triliun. Kenaikan total liablitas karena meningkatnya liablitas diestimasi imbalan pasca kerja sebesar Rp23,08 miliar dan adanya utang jangka panjang sebesar Rp450 miliar.

EKUITAS

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2018-2017	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5	9=6-4	
Ekuitas										
Modal Saham	1.250.000.00	1.650.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-	
Saldo Laba (Rugi)										
Dicadangkan	786.074,86	816.422,04	899.824,24	1.250.552,23	1.654.263,18	1.539.497,84	23,11	(6,94)	288.945,61	
Belum Dicadangkan		(2.483,70)								
Laba Periode Berjalan	577.590,04	670.592,89	501.04,.99	525.355,61	581.177,20	543.226,02	3,40	(6,53)	17.870,41	
Komponen Ekuitas Lainnya	(69.976,03)	1.909.600,28	1.901.287,05	1.874.048,52	1.910.829,94	1.880.115,56	0,32	(1,61)	6.067,04	
Jumlah Ekuitas	**2.543.688,88**	**5.044.13,51**	**5.302.152,27**	**5.649.956,36**	**6.146.270,32**	**5.962.839,41**	**5,54**	**(2,98)**	**312.883.05**	**6.404.391.00**

JUMLAH EKUITAS

(Rp Miliar)

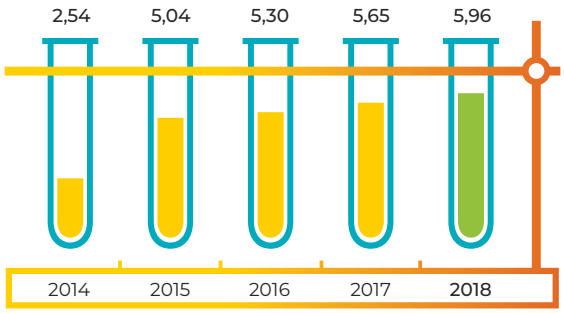

Bio Farma membukukan total ekuitas tahun 2018 sebesar Rp5,96 triliun atau naik sebesar Rp312,88 miliar atau 5,54% dibandingkan dengan total ekuitas tahun 2017 yang berjumlah Rp5,65 triliun dan Rp183,43 miliar atau 2,98% dibawah RKAP sebesar Rp6,15 triliun. Kenaikan jumlah ekuitas ini disebabkan oleh peningkatan saldo Laba (Rugi) dicadangkan sebesar 288,95 miliar dan laba Periode Berjalan sebesar 17,87 milar dan komponen ekuitas lainnya sebesar Rp6,07 dibandingkan dengan jumlah ekuitas tahun 2017.

MODAL SAHAM

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Modal ditempatkan dan disetor pada awal tahun	5.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	-	-
Kapitalisasi Cadangan ke Modal Disetor	(3.750.000)	(3.350.000)	(6.000.000)	(6.000.000)	(6.000.000)	(6.000.000)	-	-	-	-
Modal Ditempatkan Dan Disetor	1.250.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR
(Rp Triliun)

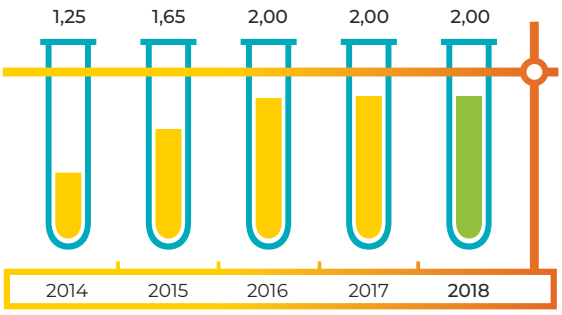

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Risalah RUPS No 34, tanggal 14 Desember 2016, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024481.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bio Farma (Persero), modal dasar Perseroan meningkat dari semula Rp5 triliun (terdiri dari 5 juta lembar saham) menjadi Rp8 triliun (terdiri dari 8 juta lembar saham) dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan meningkat dari semula Rp1,65 triliun (terdiri dari 1,65 juta lembar saham) menjadi Rp2 triliun (terdiri dari 2 juta lembar saham) dengan mengkapitalisasi sebagian cadangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp350 juta.

KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

JUMLAH KOMPONEN EKUITAS LAINNYA
(Rp Triliun)

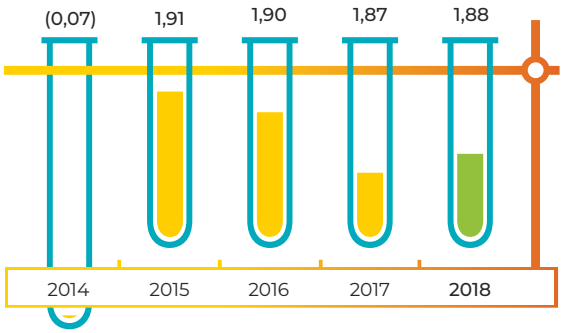

Bio Farma membukukan komponen ekuitas lainnya tahun 2018 sebesar Rp1,88 triliun atau naik sebesar Rp6,07 miliar atau 0,32% dibandingkan dengan komponen ekuitas lainnya tahun 2017 yang berjumlah Rp.1,87 triliun. Peningkatan jumlah komponen ekuitas lainnya disebabkan oleh penambahan tahun sebesar Rp33,31 miliar dibandingkan dengan tahun 2017.

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan /Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018- RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	339.668	456.663	453.169	579.556	379.146	745.305	28,60	96,57	165.749	366.159	460.585
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	161.250	179.868	167.133	219.937	1.267.134	693.015	215,10	(45,31)	473.078	(574.119)	1.323.398
Total Liabilitas	500.919	636.532	620.302	799.493	1.646.280	1.438.320	79,90	(12,63)	638.827	(207.960)	1.783.983
Jumlah Ekuitas	2.543.689	5.044.132	5.302.152	5.649.956	6.146.270	5.962.839	5,54	(2,98)	312.883	(183.431)	6.404.391
Jumlah Ekuitas & Liabilitas	3.044.608	5.680.663	5.922.454	6.449.449	7.792.550	7.401.159	14,76	(5,02)	951.710	(391.391)	8.188.374

JUMLAH EKUITAS & LIABILITAS
(Rp Triliun)

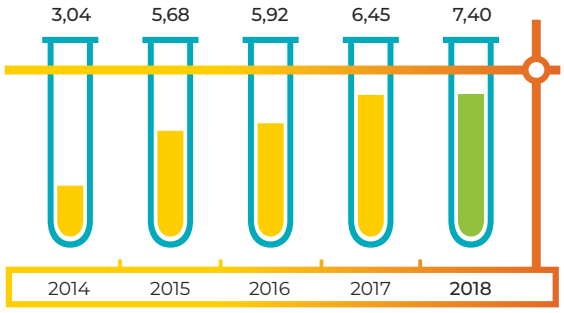

Bio Farma membukukan total liabilitas & ekuitas tahun 2018 sebesar Rp7,40 triliun atau naik sebesar Rp951,71 miliar atau 14,76% dibandingkan dengan total liabilitas & ekuitas tahun 2017 yang berjumlah Rp6,45 triliun dan Rp391,39 miliar atau 5,02% dibawah RKAP sebesar Rp7,79 triliun.

PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA, BEBAN DAN LABA (RUGI), PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, DAN TOTAL LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PENJUALAN / PENDAPAT USAHA

PENJUALAN BERSIH
(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2018-2017
	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5	9=6-4
Produk Perusahaan	2.028.988,09	2.329.623,85	1.927.724,33	1.872.113,08	2.102.189,29	2.038.035,46	8,86	(3,05)	165.922,39
Produk *Partnership*	-	-	358.955,60	1.111.028,03	1.130.589,92	1.133.975,32	2,07	0,30	22.947,29
Produk *Trading Partnership*	10.286,94	11.435,94	23.763,82	20.119,59	41.894,08	53.110,83	163,98	26,77	32.991,24
Jasa	4.805,42	4.858,49	5.315,26	8.310,03	9.006,41	10.103,77	21,59	12,18	1.793,74
Jumlah Penjualan Bersih	**2.044.080,45**	**2.345.918,27**	**2.315.759,01**	**3.011.570,73**	**3.283.679,70**	**3.235.225,39**	**7,43**	**(1,48)**	**223.654,66**

JUMLAH PENJUALAN BERSIH
(Rp Triliun)

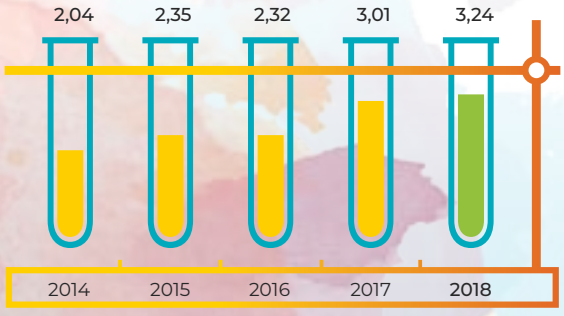

Bio Farma membukukan penjualan bersih tahun 2018 sebesar Rp3,24 triliun atau naik sebesar Rp223,65 miliar atau 7,43% dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 2017 yang berjumlah Rp3,01 triliun dan Rp48,45 miliar atau 1,48% dibawah RKAP sebesar Rp3,28 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah penjualan produk perusahaan sebesar Rp165,92 miliar, Produk *Partnership* sebesar Rp22,95 miliar, Produk *Trading Partnership* sebesar Rp32,99 miliar dan Jasa sebesar Rp1,79 miliar bila dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 2017.

PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN PER SEGMEN / KELOMPOK PRODUK

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014				2015			
	Pemerintah	Swasta		Jumlah	Pemerintah	Swasta		Jumlah
		Lokal	Ekspor			Lokal	Ekspor	
Penjualan Produk								
Vaksin Bakteri	98.522	7.776	111.308	217.605	137.172	6.748	161.368	305.289
Vaksin Virus	167.684	34.687	1.254.909	1.457.280	191.216	47.576	1.466.512	1.705.305
Vaksin Kombinasi	273.678	2.870	-	276.548	242.231	3.265	7.909	253.404
Sera & Diagnostika	76	90.149	14.88	90.240	-	80.664	25	80.689
Jumlah	**539.959**	**135.481**	**1.366.232**	**2.041.673**	**570.619**	**138.253**	**1.635.814**	**2.344.687**
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	(12.685)	-	(12.685)	-	(15.063)	-	(15.063)
Penjualan Produk Bersih	539.959	122.796	1.366.232	2.028.988	570.619	123.190	1.635.814	2.329.624

Uraian	2016				2017			
	Pemerintah	Swasta		Jumlah	Pemerintah	Swasta		Jumlah
		Lokal	Ekspor			Lokal	Ekspor	
Penjualan Produk								
Vaksin Bakteri	91.703	8.244	143.650	243.598	46.831	15.239	124.796	186.865
Vaksin Virus	274.617	57.956	1.103.825	1.436.398	137.984	45.137	1.118.104	1.301.225
Vaksin Kombinasi	185.244	15.451	-	200.695	306.291	17.510	9	323.810
Sera & Diagnostika	-	63.412	-	63.412	-	76.074	-	76.074
Jumlah	**551.564**	**145.063**	**1.247.475**	**1.944.102**	**491.106**	**153.960**	**1.242.909**	**1.887.974**
Dikurangi: Potongan Penjualan	**-**	**(16.378)**	**-**	**(16.378)**	**-**	**(15.861)**	**-**	**(15.861)**
Penjualan Produk Bersih	551.564	128.685	1.247.475	1.927.724	491.106	138.098	1.242.909	1.872.113

Uraian	RKAP 2018					2018				
	Pemerintah	Swasta		Anak Perusahaan	Jumlah	Pemerintah	Swasta		Anak Perusahaan	Jumlah
		Lokal	Ekspor				Lokal	Ekspor		
Penjualan Produk										
Vaksin Bakteri	-	-	-	-	203.119	152.415	26.040	52.295	-	230.750
Vaksin Virus	-	-	-	-	1.490.584	129.138	51.494	1.025.599	-	1.206.231
Vaksin Kombinasi	-	-	-	-	319.273	523.630	16.689	144	-	540.463
Sera & Diagnostika	-	-	-	-	89.214	-	82.426	21	-	82.447
Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.102.189**	**805.182**	**176.649**	**1.078.059**	**-**	**2.059.891**
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	-	-	-	-	-	(21.856)	-	-	- 21.856
Penjualan Produk Bersih	-	-	-	-	2.102.189	805.182	154.794	1.078.059	-	2.038.035

PENJUALAN SEKTOR PEMERINTAH
(Rp Triliun)

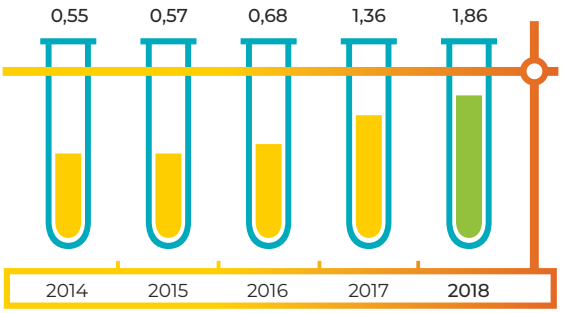

PENJUALAN SEKTOR SWASTA
(Rp Triliun)

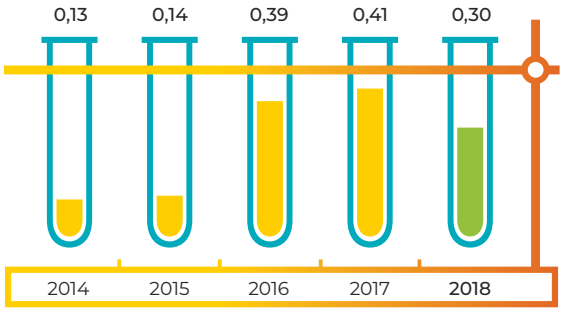

PENJUALAN SEKTOR EKSPOR
(Rp Triliun)

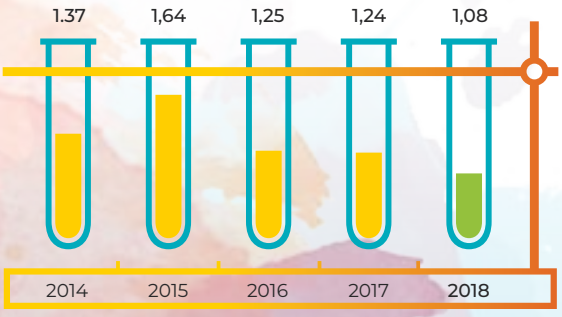

REKAPITULASI PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN PER SEGMEN / KELOMPOK PRODUK

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018- RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Vaksin Bakteri	217.605	305.289	243.598	186.865	203.119	230.750	23,48	13,60	43.885	27.631	211.114
Vaksin Virus	1.457.280	1.705.305	1.436.397	1.301.225	1.490.584	1.206.231	(7,30)	(19,08)	(94.994)	(284.353)	1.690.457
Vaksin Kombinasi	276.548	253.404	200.695	323.810	319.273	540.463	66,91	69,28	216.653	221.190	489.332
Sera & Diagnostika	90.240	80.689	63.412	76.074	89.214	82.447	8,38	(7,59)	6.373	(6.767)	90.367
Jumlah	2.041.673	2.344.687	1.944.102	1.887.974	2.102.189	2.059.891	9,11	(2,01)	171.917	(42.298)	2.481.270
Dikurangi: Potongan Penjualan	(12.685)	(15.063)	(16.378)	(15.861)	-	(21.856)	37,80	-	(5.995)	(21.856)	-
Penjualan Produk Bersih	2.028.988	2.329.624	1.927.724	1.872.113	2.102.189	2.038.035	8,86	(3,05)	165.922	(64.154)	2.481.270

PENJUALAN BERSIH SEGMEN / KELOMPOK PRODUK VAKSIN BAKTERI

VAKSIN BAKTERI
(Rp Miliar)

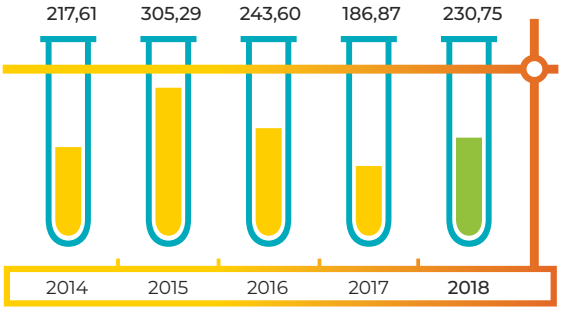

Bio Farma membukukan penjualan vaksin bakteri tahun 2018 sebesar Rp230,75 miliar atau naik sebesar Rp43,89 miliar atau 23,48% dibandingkan dengan penjualan vaksin bakteri tahun 2017 yang berjumlah Rp186,87 milar dan Rp27,63% di atas RKAP sebesar Rp203,12 miliar.

PENJUALAN BERSIH SEGMEN / KELOMPOK PRODUK VAKSIN VIRUS

PENJUALAN VAKSIN VIRUS
(Rp Triliun)

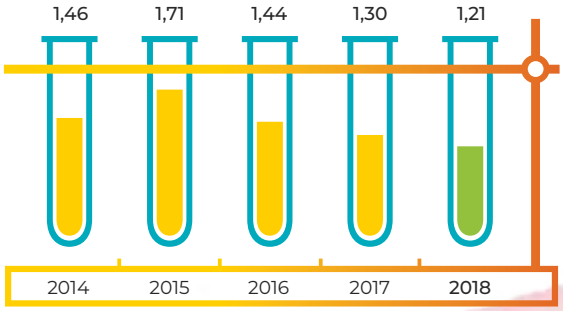

Bio Farma membukukan penjualan vaksin virus tahun 2018 sebesar Rp1,21 triliun atau turun sebesar Rp94,99 miliar atau 7,30% dibandingkan dengan penjualan vaksin virus tahun 2017 yang berjumlah Rp1,30 triliun dan Rp284,35 miliar atau 19,08.% dibawah RKAP sebesar Rp1,49 triliun.

PENJUALAN BERSIH SEGMEN (KELOMPOK PRODUK) VAKSIN KOMBINASI

PENJUALAN BERSIH SEGMEN (KELOMPOK PRODUK) VAKSIN KOMBINASI (Rp Miliar)

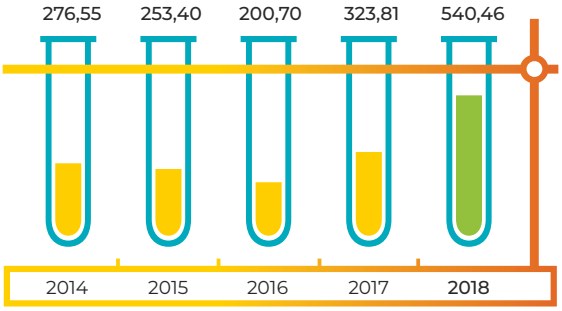

Bio Farma membukukan penjualan vaksin kombinasi tahun 2018 sebesar Rp540,46 miliar atau naik sebesar Rp216,65 miliar atau 66,91% di atas penjualan vaksin kombinasi tahun 2017 yang berjumlah Rp323,81 miliar dan Rp221,19 miliar atau 69,28.% diatas RKAP sebesar Rp319,27 miliar.

PENJUALAN BERSIH SEGMEN / KELOMPOK PRODUK SERA DAN DIAGNOSTIKA

PENJUALAN SERA & DIAGNOSTIKA
(Rp Miliar)

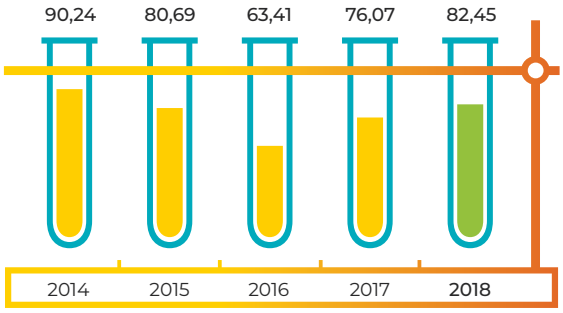

Bio Farma membukukan penjualan Sera dan Diagnostika tahun 2018 sebesar Rp82,45 miliar atau naik sebesar Rp6,37 miliar atau 8,38% di atas penjualan Sera dan Diagnostika tahun 2017 yang berjumlah Rp76,07 miliar dan Rp6,77 miliar atau 7,59% di bawah RKAP sebesar Rp89,21 miliar.

PENJUALAN SEGMEN / KELOMPOK PRODUK *PARTNERSHIP*

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	4-Jun	5-Jun	4-Jun	5-Jun	
Pemerintah	7.769	-	129.812	868.174	-	1.053.971	21,40	-	185.797	1.053.971	-
Swasta	-	-	235.105	248.404	-	80.559	(67,57)	-	(167.845)	80.559	-
Jumlah	**7.769**	**-**	**364.917**	**1.116.579**	**-**	**1.134.529**	**1,61**	**-**	**17.95**	**1.134.529**	**-**
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	-	(5.961)	(5.551)	-	(554)	(90,02)	-	4.997	(554)	-
Penjualan Bersih Produk *Partnership*	7.769	-	358.956	1.111.028	1.130.590	1.133.975	2,07	0,30	22.947	3.385	1.095.830

PENJUALAN *PARTNERSHIP*
(Rp Triliun)

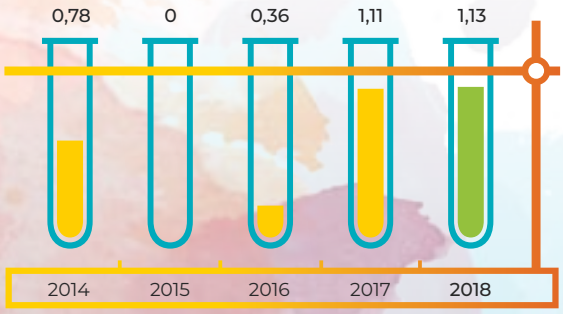

Bio Farma membukukan penjualan produk *partnership* tahun 2018 sebesar Rp1,13 triliun atau naik sebesar Rp22,95 miliar atau 2,07% di atas penjualan produk *partnership* tahun 2017 yang berjumlah Rp1,11 triliun dan Rp3,39 miliar atau 0,30 % diatas RKAP sebesar Rp1,13 triliun.

PENJUALAN SEGMEN / KELOMPOK *TRADING PARTNERSHIP*

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018- RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Swasta											
Polyvalent Snake Anti Venom	2.641	3.393	1.125	-		4.539	-	-	4.539	4.539	-
Imovac Rabies Vero	-	8.528	-	-		-	-	-	-	-	-
HJ HPV-Gardasil	-	-	22.804	15.355		30.683	99,83	-	15.328	30.683	-
HJ Diftheria Antitoxin	-	-	-	2.898		10.866	274,92	-	7.968	10.866	-
HJ Live Attenuated JE 1 ds	-	-	-	111		-	-	-	(111)	-	-
Td 10 *(Trading Parnership)*	-	-	-	1.983		5.767	190,77	-	3.784	5.767	-
HJ Urokinase 60.000 iu	-	-	-	-		1.505	-	-	1.505	1.505	-
HJ Vaksin Varicella	-	-	-	-		3.337	-	-	3.337	3.337	-
Sub Jumlah	**2.641**	**11.921**	**23.929**	**20.348**	**-**	**56.698**	**178,65**	**-**	**36.351**	**56.698**	**-**
Dikurangi: Potongan Penjualan	(123)	(486)	(165)	(228)		(3.588)	1.475,13	-	(3.360)	(3.588)	-
Jumlah Penjualan Bersih *Trading* ***Partnership***	**2.518**	**11.435**	**23.764**	**20.120**	**41.894**	**53.111**	**163,97**	**26,77**	**32.991**	**11.217**	**91.138**

PENJUALAN *TRADING* ***PARTNERSHIP***
(Rp Miliar)

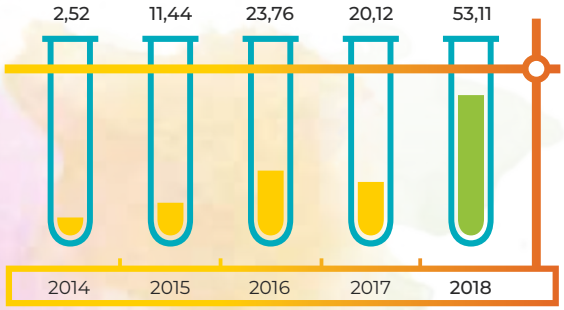

Bio Farma membukukan penjualan *trading partnership* tahun 2018 sebesar Rp53,11 miliar atau naik sebesar Rp32,99 miliar atau 163,97% di atas penjualan *trading partnership* tahun 2017 yang berjumlah Rp20,12 miliar dan Rp11,22 miliar atau 26,77% di atas RKAP sebesar Rp41,89 miliar

PENJUALAN JASA

Hasil penjualan imunisasi diperoleh dari imunisasi vaksin dan serum, sedangkan hasil penjualan laboratorium diperoleh dari jasa pengujian mutu dan pemeriksaan laboratorium. Terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2015 unit pelayanan jasa diubah statusnya menjadi *Strategic Business Unit* (SBU) dengan nama Unit Bisnis Klinik dan Imunisasi lalu berdasarkan SK Direksi Nomor 04276/DIR/XII/2017 tentang struktur organisasi PT Bio Farma terjadi penggantian nama menjadi Unit Klinik dan Imunisasi.

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Imunisasi	3.978	3.529	3.975	7.047	-	7.834	11,17	-	787	7.834	-
Laboratorium	827	1.329	1.660	1.696	-	2.816	66,03	-	1.120	2.816	-
Poliklinik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4.805	4.859	5.635	8.743	-	10.650	21,81	-	1.907	10.650	
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	-	(320)	(433)	-	(546)	26,14	-	(113)	(546)	-
Penjualan Jasa Bersih	4.805	4.857	5.315	8.310	9.006	10.104	21,59	12,19	1.794	1.098	14.210
Total Penjualan Produk, Produk *Partnership, Trading Partnership* dan Jasa	**2.044.080**	**2.345.917**	**2.315.759**	**3.011.571**	**3.283.680**	**3.235.225**	**7,43**	**(1,48)**	**223.654**	**(48.455)**	**3.682.448**

PENJUALAN JASA
(Rp Miliar)

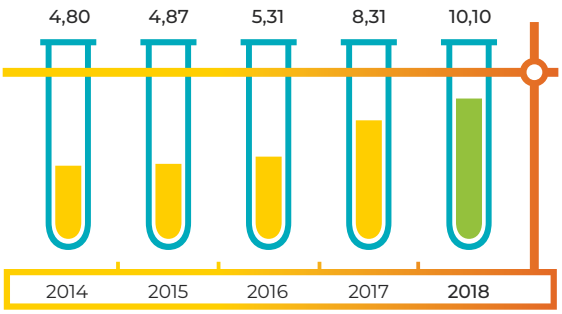

Bio Farma membukukan penjualan jasa tahun 2018 sebesar Rp10,10 miliar atau naik sebesar Rp1,79 miliar atau 21,59% di atas penjualan jasa tahun 2017 yang berjumlah Rp8,31 miliar dan Rp1,098 miliar atau 12,19.% diatas RKAP sebesar Rp9,01 miliar.

Hasil penjualan imunisasi diperoleh dari imunisasi vaksin dan serum, sedangkan hasil penjualan laboratorium diperoleh dari jasa pengujian mutu dan pemeriksaan laboratorium. Terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2015 unit pelayanan jasa diubah menjadi *Strategic Business Unit* (SBU) dengan nama Unit Bisnis Klinik dan Imunisasi lalu berdasarkan SK Direksi Nomor 04276/DIR/XII/2017 tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma terjadi penggantian nama menjadi Unit Klinik Dan Imunisasi.

REKAPITULASI PENJUALAN BIO FARMA TAHUN 2018

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan /Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Penjualan Produk											
Vaksin Bakteri	217.605	305.289	243.598	186.865	203.119	230.750	23,48	13,60	43.885	27.631	211.114
Vaksin Virus	1.457.280	1.705.305	1.436.397	1.301.225	1.490.584	1.206.231	(7,30)	(19,08)	(94.994)	(284.353)	1.690.457
Vaksin Kombinasi	276.548	253.404	200.695	323.810	319.273	540.463	66,91	69,28	216.653	221.190	489.332
Sera & Diagnostika	90.240	80.689	63.412	76.074	89.214	82.447	8,38	(7,59)	6.373	(6.767)	90.367
Jumlah	2.041.673	2.344.687	1.944.102	1.887.974	2.102.189	2.059.891	9,11	(2,01)	171.917	(42.298)	2.481.270
Dikurangi: Potongan Penjualan	(12.685)	(15.063)	(16.378)	(15.861)	-	(21.856)	37,80	#DIV/0!	(5.995)	(21.856)	-
Penjualan Produk Bersih	2.028.988	2.329.624	1.927.724	1.872.113	2.102.189	2.038.035	8,86	(3,05)	165.922	(64.154)	2.481.270
Penjualan *Produk Partnership*											
Pemerintah	7.769	-	129.812	868.174	-	1.053.971	21,40	-	185.797	1.053.971	-
Swasta	-	-	235.105	248.404	-	80.559	(67,57)	-	(167.845)	80.559	-
Jumlah	**7.769**	**-**	**364.917**	**1.116.579**	**-**	**1.134.529**	**1,61**	**-**	**17.950**	**1.134.529**	**-**
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	-	(5.961)	(5.551)	-	(554)	(90,02)	-	4.997	(554)	-
Penjualan Bersih Produk *Partnership*	7.769	-	358.956	1.111.028	1.130.590	1.133.975	2,07	0,30	22.947	3.385	1.095.830
Penjualan *Trading* *Partnership*											
Swasta											
Polyvalent Snake Anti Venom	2.641	3.393	1.125	-	-	4.539	-	-	4.539	4.539	-
Imovac Rabies Vero	-	8.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HJ HPV-Gardasil	-	-	22.804	15.355	-	30.683	99,83	-	15.328	30.683	-
HJ Diftheria Antitoxin	-	-	-	2.898	-	10.866	274,92	-	7.968	10.866	
HJ Live Attenuated JE 1 ds	-	-	-	111	-	-	(100,00)	-	(111)	-	-
Td 10 *(Trading Parnership)*	-	-	-	1.983	-	5.767	190,77	-	3.784	5.767	-
HJ Urokinase 60.000 iu	-	-	-	-	-	1.505	-	-	1.505	1.505	-
HJ Vaksin Varicella	-	-	-	-	-	3.337	-	-	3.337	3.337	-
Sub Jumlah	**2.641**	**11.921**	**23.929**	**20.348**	**-**	**56.698**	**178,65**	**-**	**36.351**	**56.698**	**-**
Dikurangi: Potongan Penjualan	(123)	(486)	(165)	(228)	-	(3.588)	1.475,13	-	(3.360)	(3.588)	-
Jumlah Penjualan Bersih *Trading Partnership*	**2.518**	**11.435**	**23.764**	**20.120**	**41.894**	**53.111**	**163,97**	**26,77**	**32.991**	**11.217**	**91.138**

Kelompok	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan /Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Penjualan Jasa											
Imunisasi	3.978	3.529	3.975	7.047	-	7.834	11,17	-	787	7.834	-
Laboratorium	827	1.329	1.660	1.696	-	2.816	66,03	-	1.120	2.816	-
Poliklinik	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jumlah	4.805	4.859	5.635	8.743	-	10.650	21,81	-	1.907	10.650	-
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	-	(320)	(433)	-	(546)	26,14	-	(113)	(546)	-
Penjualan Jasa Bersih	4.805	4.857	5.315	8.310	9.006	10.104	21,59	12,19	1.794	1.098	14.210
Total Penjualan Produk, Produk *Partnership,* *Trading* *Partnership* dan Jasa	**2.044.080**	**2.345.917**	**2.315.759**	**3.011.571**	**3.283.680**	**3.235.225**	**7,43**	**(1,48)**	**223.654**	**(48.455)**	**3.682.448**

TOTAL PENJUALAN BERSIH
(Rp Triliun)

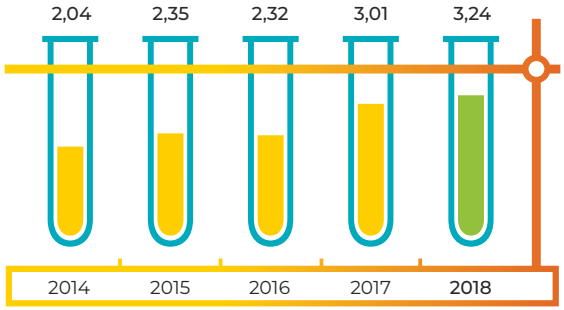

TOTAL PENJUALAN PER TAHUN (PENJUALAN PRODUK, PRODUK *PARTNERSHIP, TRADING PARTNERSHIP* DAN JASA)

Bio Farma membukukan penjualan produk, produk *partnership*, *trading partnership* dan jasa tahun 2018 sebesar Rp3,24 triliun atau naik sebesar Rp223,65 miliar atau 7,43% di atas penjualan produk, produk *partnership*, *trading partnership* dan jasa tahun 2017 yang berjumlah Rp3,01 triliun dan Rp48,45 miliar atau 1,48% di bawah RKAP sebesar Rp3,28 triliun

PENJUALAN PRODUK BERSIH PER SEGMEN / SEKTOR USAHA

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Sektor Pemerintah	539.959	570.619	618.376	1.359.280	1.549.213	1.859.153	36,77	20,01	499.873	309.940	1.873.322
Sektor Swasta	137.889	139.485	386.015	409.382	375.197	298.013	(27,20)	(20,57)	(111.369)	(77.184)	383.402
Sektor Ekspor	1.366.232	1.635.814	1.248.368	1.242.909	1.359.270	1.078.059	(13,26)	(20,69)	(164.850)	(281.211)	1.425.724
Total Penjualan Bersih	**2.044.080**	**2.345.918**	**2.252.759**	**3.011.571**	**3.283.680**	**3.235.225**	**7,43**	**(1,48)**	**223.654**	**(48.455)**	**3.682.448**

PENJUALAN PRODUK SEGMEN / SEKTOR PEMERINTAH

Bio Farma membukukan penjualan produk di segmen / sektor pemerintah tahun 2018 sebesar Rp1,86 triliun atau naik sebesar Rp499,87 miliar atau 36,77% di atas penjualan produk segmen / sektor Pemerintah tahun 2017 yang berjumlah Rp1,36 triliun dan Rp309,94 atau 20,01% di atas RKAP sebesar Rp1,55 triliun.

PENJUALAN PRODUK SEGMEN / SEKTOR SWASTA

Bio Farma membukukan penjualan produk di Segmen (sektor) Swasta tahun 2018 sebesar Rp298,01 miliar atau turun sebesar Rp111,37 miliar atau 27,20% di bawah penjualan produk segmen (sektor) Swasta tahun 2017 yang berjumlah Rp409,38 miliar dan Rp77,18 miliar atau 20,57% diatas RKAP sebesar Rp375,20 miliar.

PENJUALAN PRODUK SEGMEN (SEKTOR) EKSPOR

Bio Farma membukukan penjualan produk di segmen (sektor) Ekspor tahun 2018 sebesar Rp1,08 triliun atau turun sebesar Rp164,85 miliar atau 13,26% di bawah penjualan produk segmen (sektor) Ekspor tahun 2017 yang berjumlah Rp1,24 triliun dan Rp281,21 miliar atau 20,69% di bawah RKAP sebesar Rp1,36 triliun.

BEBAN USAHA

BEBAN POKOK PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018- RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Beban Produksi	882.769	962.608	953.475	1.011.742	-	1.024.719	1,28	-	12.977	1.024.719	-
Persediaan Produk Dalam Proses											
Awal Tahun	46.676	97.889	222.475	357.924	-	461.660	28,98	-	103.736	461.660	-
Akhir Tahun	(97.889)	(222.475)	(357.924)	(461.660)	-	(451.959)	(2,10)	-	9.701	(451.959)	-
Beban Pokok Produksi	831.555	838.022	818.026	908.006	-	1.034.420	13,92	-	126.414	1.034.420	-
Persediaan Produk Jadi											
Awal Tahun	42.582	65.775	31.982	77.727	-	35.451	(54,39)	-	(42.276)	35.451	-
Kadaluarsa/ Rusak	(38.040)	(16.833)	(6.397)	(3.755)	-	(1.657)	(55,86)	-	2.098	(1.657)	-
Promosi, Rusak, Disumbangkan Penggantian dan Pemakaian Sendiri	(1.234)	(738)	(191)	(357)	-	(237)	(33,61)	-	93	(237)	-
Penggantian dan Pemakaian Sendiri	-	-	(1.626)	(331)	-	(312)	5,74	-	26	(312)	-
Reklarifikasi Ke Persediaan Lain-Lain	-	-	-	(21.770)	-	-	(100,00)	-	21.770	-	-
Beban Pokok Barang Tersedia untuk Dijual	834.863	886.225	841.794	959.540	-	1.067.665	11,27	-	108.125	1.067.665	-

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Dijual untuk Imunisasi	(1.479)	(703)	(668)	(904)	-	(1.429)	58,11	-	(525)	(1.429)	-
Persediaan Akhir Tahun	(65.775)	(33.162)	(77.727)	(35.451)	-	(55.270)	55,90	-	(19.819)	(55.270)	-
Jumlah Beban Pokok Penjualan Produk	767.609	852.361	763.399	923.185	-	1.010.966	9,51	-	87.781	1.010.966	-
Beban Pokok Anak Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Pokok Penjualan Produk Konsolidasi	**767.609**	**852.361**	**763.399**	**923.185**	**998.443**	**1.010.966**	**9,51**	**1,25**	**87.781**	**12.523**	**1.222.419**

JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN PRODUK
(Rp Miliar)

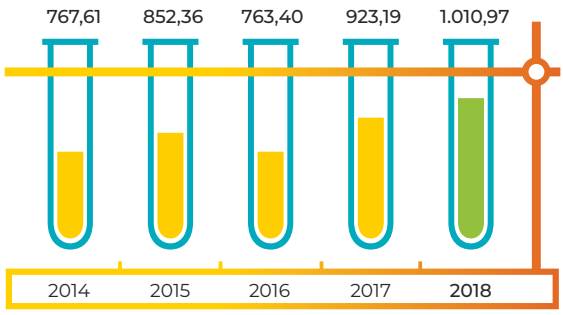

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat beban pokok penjualan produk perusahaan sebesar Rp1,01 triliun atau naik sebesar Rp87,78 miliar atau 9,51% di atas beban pokok penjualan produk perusahaan tahun 2017 yang berjumlah Rp923,19 miliar dan 12,52 miliar atau 1,25% diatas RKAP sebesar Rp998,44 miliar.

Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan beban pokok produksi sebesar Rp126,41 miliar, reklarifikasi ke persediaan lain-lain sebesar Rp21,77 miliar dibandingkan dengan beban pokok penjualan produk perusahaan tahun 2017.

BEBAN POKOK PENJUALAN PRODUK *PARTNERSHIP*

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Beban Produksi											
Pemakaian Bahan Baku	-	-	218.470	713.271	-	804.572	12,80	-	91.301	804.572	-
Pemakaian Bahan Penolong	-	-	-	-	-	188	-	-	188	188	-
Biaya Pemasangan & QC-FP	-	-	-	-	-	4.573	-	-	4.573	4.573	-

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Persediaan Produk Dalam Proses											
Ditambah: PDP Awal Tahun	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Dikurangi: PDP Akhir Tahun	-	-	-	-		(33.708)	-	-	(33.708)	(33.708)	-
Beban Pokok Produksi	-	-	218.470	713.271		775.626	8,74	-	62.355	775.626	-
Persediaan Produk Jadi											
Ditambah: Persediaan Awal Produk	-	-	1.180	4.130		4.489	8,69	-	359	4.489	-
Dikurangi: Produk Rusak/ Kadaluarsa	-	-	-	(1.787)		(60)	(96,65)	-	1.727	(60)	-
Dikurangi: Pemakaian Produk Sendiri	-	-	(12)	(793)		(219)	(72,43)	-	574	(219)	-
Dikurangi: Promosi Produk	-	-	(1)	(2)		(1)	(50,41)	-	1	(1)	-
BP Produk Siap Jual	-	-	219.637	714.819		779.835	9,10	-	65.016	779.835	-
Dikurangi: Persediaan Produk Jadi Akhir	-	-	(4.130)	(4.489)		(21.085)	369,71	-	(16.596)	(21.085)	-
Dikurangi: Beban Pokok Produk Untuk Imunisasi	-	-	(10)	(13)		(17)	27,20	-	(4)	(17)	-
BP Penjualan Produk Jadi *Partnership*	-	-	215.497	710.318	740,05	758.734	6,82	2,53	48.416	18,69	728.937

BEBAN POKOK PENJUALAN PRODUK JADI PARTNERSHIP
(Rp Miliar)

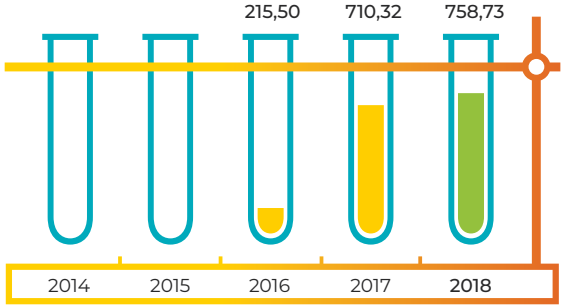

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat beban pokok penjualan produk *partnership* sebesar Rp758,73 miliar atau naik sebesar Rp48,42 miliar atau 6,82% di atas beban pokok penjualan produk *partnership* tahun 2017 yang berjumlah Rp710,32 miliar dan Rp18,69 miliar atau 2,53% di bawah RKAP sebesar Rp740,05 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan pada pemakaian bahan baku 91,30 miliar, Biaya pemasangan dan QA-FP sebesar Rp4,57 miliar bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan produk *partnership* tahu 2017.

BEBAN POKOK PENJUALAN *TRADING PARTNERSHIP*

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Persediaan Awal Tahun	34	1.313	2.011	1.077	-	2.254	109,27	-	1.177	2.254	-
Pembelian	10.332	13.176	22.307	20.681	-	50.008	141,81	-	29.327	12.103	-
Tersedia untuk Dijual	10.366	14.489	24.318	21.758	-	52.262	140,20	-	30.504	14.357	-
Kadaluarsa/ rusak	-	-	(470)	(533)	-	-	-	-	533	-	-
Digunakan untuk Promosi, Penggantian, Pemakaian Sendiri dan Disumbangkan	-	(1.089)	(908)	(378)	-	(2.573)	580,76	-	(2.195)	(2.573)	-
Digunakan untuk Imunisasi	(226)	(224)	(425)	(1.827)	-	(855)	(53,19)	-	972	2.900	-
Persediaan Akhir Tahun	(1.313)	(2.011)	(1.077)	(2.254)	-	(8.852)	292,77	-	(6.598)	(8.852)	-
Jumlah Beban Pokok Penjualan *Trading Partnership*	**19.193**	**25.654**	**21.437**	**16.766**	**34.149**	**39.981**	**138,46**	**17,08**	**23.215**	**5.832**	**77.677**

JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN *TRADING PARTNERSHIP*

(Rp Triliun)

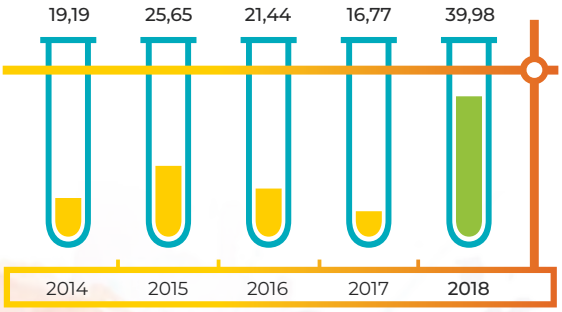

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat beban pokok penjualan *trading partnership* sebesar Rp39,98 miliar atau naik sebesar Rp23,22 miliar atau 138,46% di atas beban pokok penjualan *trading partnership* tahun 2017 yang berjumlah Rp16,77 miliar dan Rp5,83 miliar atau 17,08% di atas RKAP sebesar Rp34,15. Kenaikan ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan pesediaan awal tahun sebesar Rp1,18 miliar, pembelian sebesar Rp29,33 miliar.

BEBAN POKOK PENJUALAN JASA

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Penjualan Produk Jadi untuk Imunisasi	1.479	703	679	904	-	1.429	58,08	-	525	1.429	-
Penjualan Produk Jadi *Partnership* untuk Imunisasi	226	224	425	13	-	17	38,46	-	4	17	-
Penjualan *Trading Partnership* untuk Imunisasi	-	-	-	1.827	-	855	(53,19)	-	(972)	855	-
Pemakaian Bahan Baku Penolong	-	45	81	22	-	1.086	4.836,36	-	1.064	1.086	-
Karyawan	967	1.866	2.493	3.490	-	9.064	159,73	-	5.574	9.064	-
Perjalanan Dinas	66	148	171	76	-	389	411,84	-	313	389	-
Jasa Profesional	0	481	410	73	-	384	426,03	-	311	384	-
Pemeliharaan dan Perbaikan	14	46	151	121	-	147	21,49	-	26	147	-
Penyusutan Aset Tetap	218	229	175	117	-	133	23,68	-	16	133	-
Asuransi	2	2	2	4	-	8	100,00	-	4	8	-
Beban Kantor	0	182	273	203	-	244	20,19	-	41	244	-
Peningkatan & Pengembangan SDM	0	35	101	11	-	274	2.390,91	-	263	274	-
Lain-lain	681	-	-	-	-	40	-	-	40	40	-
Jumlah Beban Jasa	3.654	3.962	4.962	6.861	7.908	14.070	105,07	77.91	7.209	6.162	12.789
Total Beban Pokok Penjualan Produk, BP Penjualan Produk Jadi *Partnership*, BP Penjualan *Trading Partnership* & BP Jasa	**780.090**	**867.488**	**1.005.295**	**1.657.130**	**1.815.865**	**1.823.750**	**10,05**	**0,43**	**166.620**	**7.885**	**1.984.862**

JUMLAH BEBAN JASA

(Rp Miliar)

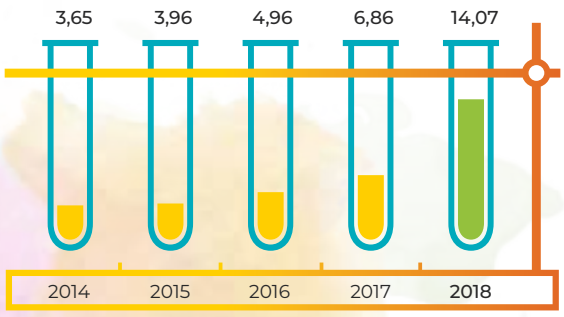

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat beban jasa sebesar Rp14,07 miliar atau naik sebesar Rp7,21 miliar atau 105,07% di atas beban jasa tahun 2017 yang berjumlah Rp6,86 miliar dan Rp6,16 miliar atau 77,91% diatas RKAP sebesar Rp3,65 miliar. Kenaikan beban jasa disebabkan oleh meningkatnya pemakaian bahan baku penolong sebesar Rp1,06 miliar, Karyawan sebesar Rp5,57 miliar bila dibandingkan dengan beban jasa tahun 2017.

TOTAL BEBAN POKOK PENJUALAN PRODUK, PRODUK *PARTNERSHIP, TRADING PARTNERSHIP* & JASA

TOTAL BEBAN POKOK PENJUALAN PRODUK, PRODUK *PARTNERSHIP,* *TRADING PARTNERSHIP* & JASA
(Rp Triliun)

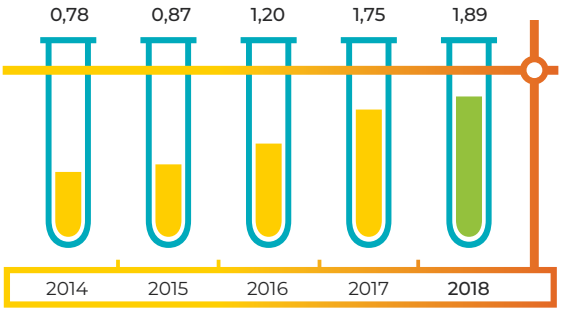

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat beban pokok penjualan produk, produk *partnership, trading partnership* & jasa sebesar Rp1,89 triliun atau naik sebesar Rp138,93 miliar atau 7,95% di atas beban pokok penjualan produk, produk *partnership, trading partnership* & jasa tahun 2017 yang berjumlah Rp1,75 triliun dan Rp70,79 miliar atau 3,90% diatas RKAP sebesar Rp1,82 triliun. Kenaikannya disebabkan oleh meningkatnya beban pokok penjualan produk perusahaan sebesar Rp12,98 miliar, Beban pokok penjualan produk partnership sebesar Rp96,06 miliar, beban trading partnership sebesar Rp 22,24 miliar dan beban pokok penjualan jasa sebesar Rp7,65 miliar.

BEBAN PENJUALAN, BEBAN ADMINISTRASI & UMUM, BEBAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN & *SURVEILANS*

(Dalam Juta Rupiah)

URAIAN	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Beban Penjualan	99.182	126.818	133.996	137.478	154.578	137.763	0,21	(10,88)	285	(16.815)	161.663
Beban Adminsitarsi & Umum	349.010	421.759	402.002	409.734	403.595	410.885	0,28	1,81	1.151	7.291	420.807
Beban Penelitian, Pengembangan & Surveilans	88.779	93.443	114.481	124.570	150.703	126.062	1,20	(16,35)	1.492	(24.641)	153.119
Beban Bunga Pinjaman	-	-	9.343	8.071	11.877	27.323	238,52	130,04	19.251,86	15.445,81	70.872
Beban Lain-Lain	69.748	66.201	130.403	76.110	1.103	436.875	474	39.509,23	360.765	435.772	4.399
Total Beban Penjualan, Administrasi & Umum, Litbang & Surveilans	**606.719**	**708.221**	**790.225**	**755.965**	**721.856**	**1.138.909,44**	**50,66**	**57,78**	**382.945**	**417.053**	**810.860**

Di tahun 2018 Bio Farma mencatat total beban penjualan, administrasi & umum, litbang & surveilans sebesar Rp1,14 triliun atau naik sebesar Rp382,94 miliar atau 50,66% di atas realisasi tahun 2017 yang berjumlah Rp755,97 miliar dan Rp417,05 miliar atau 57,78% diatas RKAP sebesar Rp721,86 miliar. Kenaikannya disebabkan oleh meningkatnya beban bunga pinjaman dan beban lain-lain masin-masing sebesar Rp19,25 miliar dan Rp360,77 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2017.

TOTAL BEBAN PENJUALAN, ADMINISTRASI & UMUM, LITBANG & SURVEILANS
(Rp Miliar)

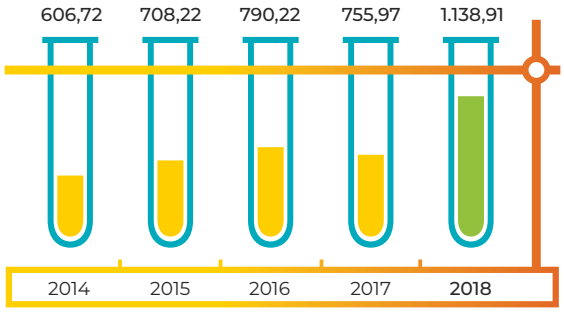

LABA (RUGI), PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, DAN TOTAL LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Juta Rupiah)

	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018- RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
PENJUALAN BERSIH											
Produk Perusahaan	2.028.988	2.329.624	1.927.724	1.872.113	2.102.189	2.038.035	8,86	(3,05)	165.922	(64.154)	-
Produk Partnership	-	-	358.956	1.111.028	1.130.590	1.133.975	2,07	0,30	22.947	3.385	-
Trading Partnership	10.287	11.436	23.764	20.120	41.894	53.111	163,98	26,77	32.991	11.217	-
Jasa	4.805	4.858	5.315	8.310	9.006	10.104	21,59	12,19	1.794	1.098	-
Jumlah Penjualan Bersih	**2.044.080**	**2.345.918**	**2.315.759**	**3.011.571**	**3.283.680**	**3.235.225**	**7,43**	**(1,48)**	**223.654**	**(48.455)**	**3.682.448**
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN JASA											
Produk Perusahaan	(767.609)	(852.361)	(763.398)	(923.185)	(998.443)	(1.010.966)	9,51	1,25	(87.781)	(12.523)	-
Produk Partnership	(8.827)	(11.165)	(215.497)	(710.318)	(740.047)	(758.734)	6,82	2,53	(48.416)	(18.687)	-
Trading Partnership	-	-	(21.437)	(16.766)	(34.149)	(39.981)	138,47	17,08	(23.215)	(5.832)	-
Beban Jasa	(3.654)	(3.962)	(4.962)	(6.861)	(7.908)	(14.070)	105,06	77,92	(7.209)	(6.162)	-
Jumlah Beban Pokok Penjualan & Jasa	**(780.090)**	**(867.488)**	**(1.005.294)**	**(1.657.130)**	**(1.780.548)**	**(1.823.750)**	**10,05**	**2,43**	**(166.620)**	**(43.202)**	**(2.041.811)**
LABA (RUGI) KOTOR	1.263.991	1.478.430	1.310.465	1.354.440	1.503.132	1.411.475	4,21	(6,10)	57.035	(91.657)	1.640.637
Penghasilan Lain-lain	118.630	129.064	164.728	115.158	3.672	454.802	294,94	12286,57	339.644	451.130	-
Beban Administrasi dan Umum	(349.010)	(421.759)	(402.002)	(409.734)	(403.595)	(410.885)	0,28	1,81	(1.151)	(7.290)	-
Beban penjualan	(99.182)	(126.818)	(133.996)	(137.478)	(154.578)	(137.763)	0,21	(10,88)	(285)	16.815	-
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	(88.779)	(93.443)	(114.481)	(124.570)	(150.703)	(126.062)	1,20	(16,35)	(1.492)	24.641	-
Beban Bunga Pinjaman	-	-	-	(8.071)	(11.877)	(27.323)	238,52	130,04	(19.252)	11.877	-
Beban Lain-Lain	(69.748)	(66.201)	(139.745)	(76.110)	(1.103)	(436.875)	474,00	39509,23	(360.765)	(463.096)	-
Jumlah	**(488.089)**	**(579.157)**	**(625.497)**	**(640.807)**	**(718.185)**	**(684.107)**	**6,76**	**(4,75)**	**(43.300)**	**34.076**	**(800.189)**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**775.902**	**899.274**	**684.968**	**713.634**	**784.947**	**727.368**	**1,92**	**(7,34)**	**13.735**	**(57.579)**	**840.448**

	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018- RKAP2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN											
Pajak Kini	(197.136,00)	(232.893)	(185.425)	(194.907)	(208.933)	(178.928)	(8.20)	(14.36)	15.979	30.005	
Pajak Tangguhan	3.427	4.213	1.498	6.629	5.163	(5.214)	(178.65)	(200.99)	(11.843)	(10.377)	
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(193.709,00)	(228.681)	(183.927)	(188.278)	(203.770)	(184.142)	(2,20)	(9,63)	4.136	19.628	(220.596)
LABA (RUGI) BERSIH	**582.193**	**670.593**	**501.041**	**525.356**	**581.177**	**543.226**	**3,40**	**(6,53)**	**17.871**	**(37.951)**	**619.852**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN											
Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi											
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria Atas Imbalan Pasca Kerja	(21.323,00)	828.226	(8.313,00)	(27.239,00)	-	6.067	(122,27)	-	33.306	6.067	
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	1.980,782	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	**(21.323,00)**	**1.979.954**	**(8.313,00)**	**(27.239,00)**	**-**	**6.067**	**(122,27)**	**0,00**	**33.306**	**6,067**	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	**560.870**	**2.650.546**	**492.728**	**498.117**	**581.177**	**549.293**	**10,27**	**(5,49)**	**51.177**	**(31884)**	

LABA (RUGI) KOTOR

LABA (RUGI) KOTOR
(Rp Triliun)

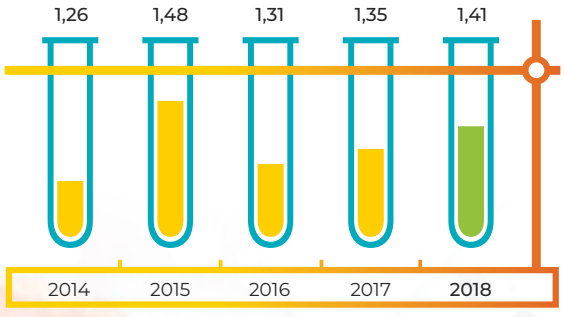

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat laba (rugi) kotor sebesar Rp1,41 triliun atau naik sebesar Rp57,04 miliar atau 4,21% di atas laba kotor tahun 2017 yang berjumlah Rp1,35 triliun dan Rp91,66 miliar atau 6,10% dibawah RKAP sebesar Rp1,50 triliun.

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
(Rp Miliar)

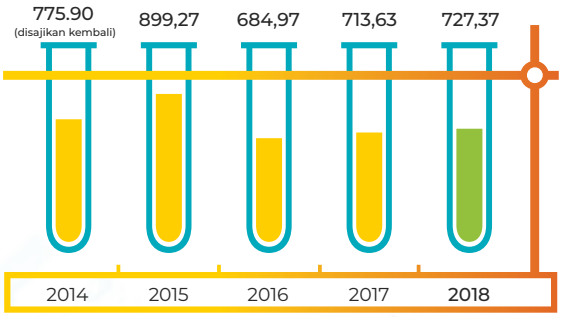

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan sebesar Rp727,37 miliar atau naik sebesar Rp13,73 miliar atau 1,92% di atas laba sebelum pajak penghasilan tahun 2017 yang berjumlah Rp713,63 miliar dan Rp57,58 miliar atau 7,34% dibawah RKAP sebesar Rp784,95 miliar.

LABA BERSIH

LABA (RUGI) BERSIH
(Rp Miliar)

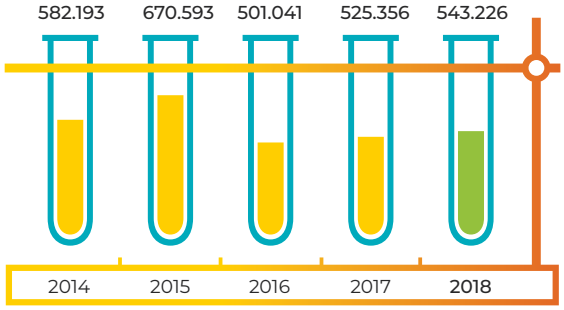

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat laba bersih sebesar Rp543,23 miliar atau naik sebesar Rp17,87 miliar atau 3,40% di atas laba bersih tahun 2017 yang berjumlah Rp525,36 miliar dan Rp37,95 miliar atau 6,53% dibawah RKAP sebesar Rp581,18 miliar.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

POS-POS YANG TIDAK DIREKLARIFIKASI KE RUGI LABA

KEUNTUNGAN (KERUGIAN) AKTUARIA ATAS IMBALAN KERJA PASCA KERJA
(Rp Miliar)

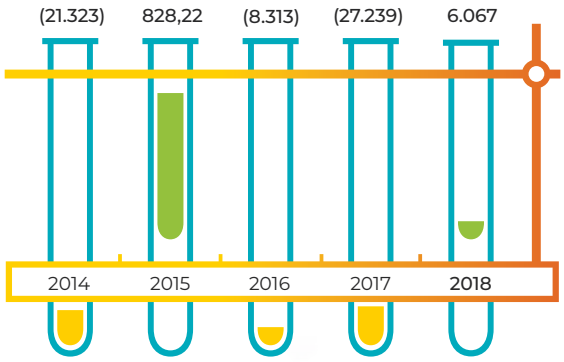

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat Keuntungan (Kerugian) Aktuaria Atas Imbalan Kerja Pasca Kerja sebesar Rp6,07 miliar atau naik sebesar Rp33,31 miliar atau 122,27% di atas Keuntungan (Kerugian) Aktuaria Atas Imbalan Kerja Pasca Kerja tahun 2017 yang berjumlah Rp-27,24 miliar.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
(Rp Miliar)

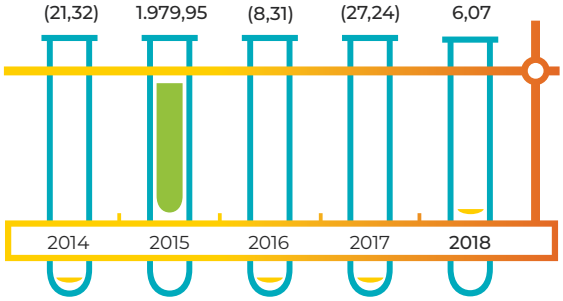

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp6,07 miliar atau naik sebesar Rp33,31 miliar atau 122,27% di atas Keuntungan (Kerugian) Aktuaria Atas Imbalan Kerja Pasca Kerja tahun 2017 yang berjumlah Rp-27,24 miliar.

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF
(Rp Miliar)

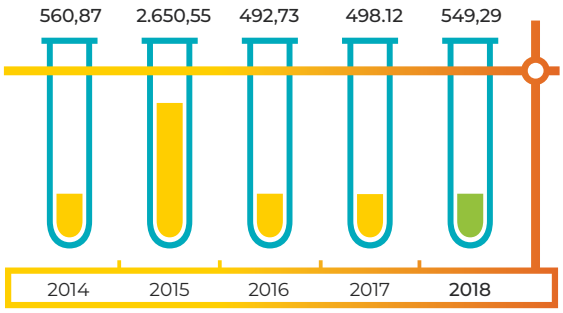

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat total penghasilan komprehensif Rp549,29 miliar atau naik sebesar Rp51,18 miliar atau 10,27% di atas total penghasilan komprehensif tahun 2017 yang berjumlah Rp498,12 miliar dan Rp31,88 miliar atau 5,49% di bawah RKAP sebesar Rp.581,18.

ARUS KAS

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2018-2017
	1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5	9 = 6-4
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi									
Penerimaan Kas dari Pelanggan	2.108.671,54	2.106.477,76	2.334.948,02	3.111.408,45	3.299.585,34	3.335.795,62	7,21	1,10	224.387,17
Penerimaan (Pembayaran) Pajak	(314.958,84)	(297.533,54)	(267.036,86)	(369.721,87)	(342.245,50)	(161.05,25)	(56,44)	(52,94)	208.664,62
Penerimaan Bunga	35.394,88	37.422,48	7.960,35	3.557,79	-	4.505,07	26,63		947,28
Penerimaan Hibah/ Donasi WHO	4.988,92	800,00	13.588,01	1.917,25	-	8.112,25	323,12		6.194,99
Penerimaan (Pembayaran) Lainnya - Bersih	11.672,99	(23.773,91)	1.238,15	613,49	2.568,77	5.954,19	870,55	131,79	5.340,70
Penerimaan Klaim Asuransi	106,65	-	-	575,23	-	38,51	(93,31)		(536,73)
Pembayaran Bunga	-	-	(9.342,50)	(8.071,43)	(17.332,65)	(24.024,56)	197,65	38,61	(15.953.13)
Pembayaran Tantiem	(9.726.64)	(13.736,82)	(14.750,00)	(11.021,00)	(14.782.,0)	(15.446,35)	40,15	4,49	(4.425.35)
Pembayaran Kepada Pemasok dan Karyawan	(1.330.310.15)	(1.584.190,62)	(1.519.679,07)	(2.362.897,93)	(2.241.520,77)	(2.885.703,33)	22,13	28,74	(522.805.40)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	**505.839.37**	**225.465,34**	**546.926,11**	**366.359,99**	**686.272,69**	**268.174,14**	**(26,80)**	**(60,92)**	**(98.185.84)**
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian Aset Tetap	(163.149.13)	(535.174,88)	(393.169,90)	(293.309,27)	(1.543.120,15)	(538.677,28)	83,66	(65,09)	(245.368,00)
Penyertaan pada Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	(25.000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan pada Perusahaan Vial	-	-	-	-	(29.049,73)	-	-	(100,00)	-
Pembelian Aset Takberwujud	(20.578.11)	(3.962,39)	(11.172,65)	(3.245,06)	(553,60)	(46,00)	(98,58)	(91,69)	3.199,06
Hasil Penjualan Aset Lain-lain	-	25.000,00	-	-	-	30,45	-	-	30,45

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2018-2017
	1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5	9 = 6-4
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	**(208.727,25)**	**(514.137,27)**	**(404.342,55)**	**(296.554,33)**	**(1.572.723,48)**	**(538.692,82)**	**81.65**	**(65.75)**	**(242.138,49)**
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek	-	-	235.000,00	782.495,91	420.000,00	1.616.325,00	106.56	284.84	833.829,09
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek	-	-	(235.000,00)	(782.49,91)	(420.000,00)	(1.411.325,00)	80,36	236.03	(628.829.09)
Pembayaran Dividen & PKBL	(228.987,29)	(149.726,56)	(234.707,00)	(150.313,00)	(100.927,74)	(236.410,00)	57,28	134,24	(86.097,00)
Modal Donasi dari WHO									-
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	1.056.262,08	450.000,00	-	(57,40)	450.000,00
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setoran Modal									-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	**(228.987,29)**	**(149.726,56)**	**(234.707,00)**	**(150.313,00)**	**955.334,35**	**418.590,00**	**(378,48)**	**(56,18)**	**568.903,00**
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	68.124,83	(438.398,49)	(92.123,45)	(80.507,35)	68.883,56	148.071,32	(283,92)	114,96	228.578,66
Pengaruh Selisih Kurs Kas dan Setara Kas	12.341,45	22.620,70	(15.865,49)	2.103,15	-	18.292,89	769,78		16.189,74
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	**891.250,77**	**971.717,05**	**555.939,26**	**447.950,33**	**151.554,73**	**369.546,13**	**(17,50)**	**143,84**	**(78.404,19)**
Saldo Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	**971.717,05**	**555.939,26**	**447.950,33**	**369.546,13**	**220.438,29**	**535.910,34**	**45,02**	**143,11**	**166.364,21**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
(Rp Miliar)

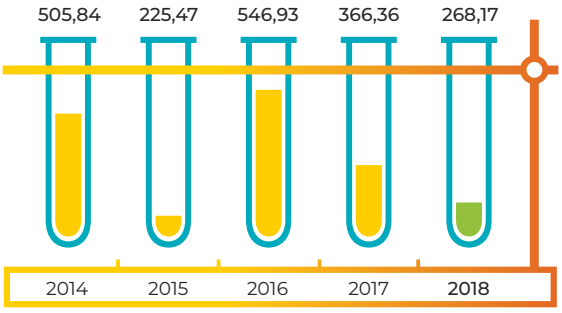

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp268,17 miliar atau turun sebesar Rp98,19 miliar atau 26,80% di bawah arus kas dari aktivitas operasi tahun 2017 yang berjumlah Rp366,36 miliar dan Rp418,10 miliar atau 60,92% di bawah RKAP sebesar Rp686,273 miliar. Hal ini disebabkan oleh turunnya penerimaan Bunga sebesar Rp15,95 miliar, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp488.50 miliar dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi tahun 2017.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
(Rp Miliar)

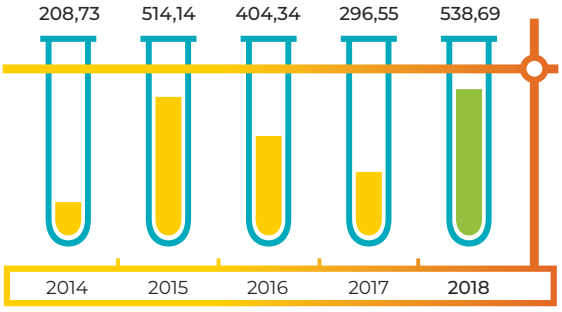

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp538,69 miliar atau naik sebesar Rp242,14 miliar atau 81,65% di atas arus kas kas dari aktivitas investasi tahun 2017 yang berjumlah Rp296,55 miliar dan Rp1,03 triliun atau 65,75% di bawah RKAP sebesar Rp1,57 triliun. Hal ini disebabkan meningkatnya pembelian asset tetap sebesar 245,37 miliar bila dibanding dengan arus kas dari aktivitas investasi 2017.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
(Rp Miliar)

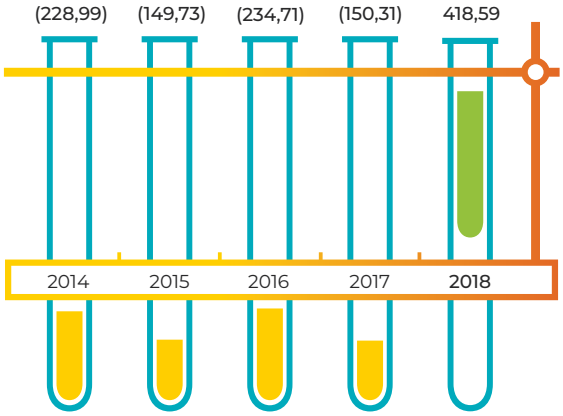

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp418,59 miliar atau naik sebesar Rp585,90 miliar atau 378,48% di atas arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2017 yang berjumlah Rp150,31 miliar dan Rp536,74 miliar atau 56,18% di bawah RKAP sebesar Rp955,33 miliar. Kenaikan arus kas dari aktivitas pendanaan adalah karena penerimaan pinjaman jangka pendek sebesar Rp833,83 miliar, penerimaan pinjaman jangka panjang sebesar Rp450 miliar bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2017.

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN
(Rp Miliar)

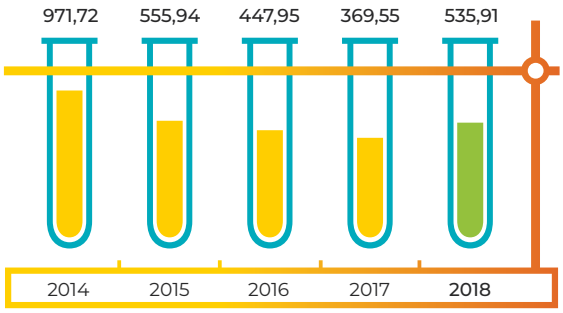

Di Tahun 2018 Bio Farma mencatat saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar Rp535,91 miliar atau naik sebesar Rp315,47 miliar atau 45,02% di atas saldo kas dan setara kas pada akhir tahun 2017 yang berjumlah Rp369,55 miliar dan Rp315.47 miliar atau 143,11% di atas RKAP sebesar Rp220,44 miliar.

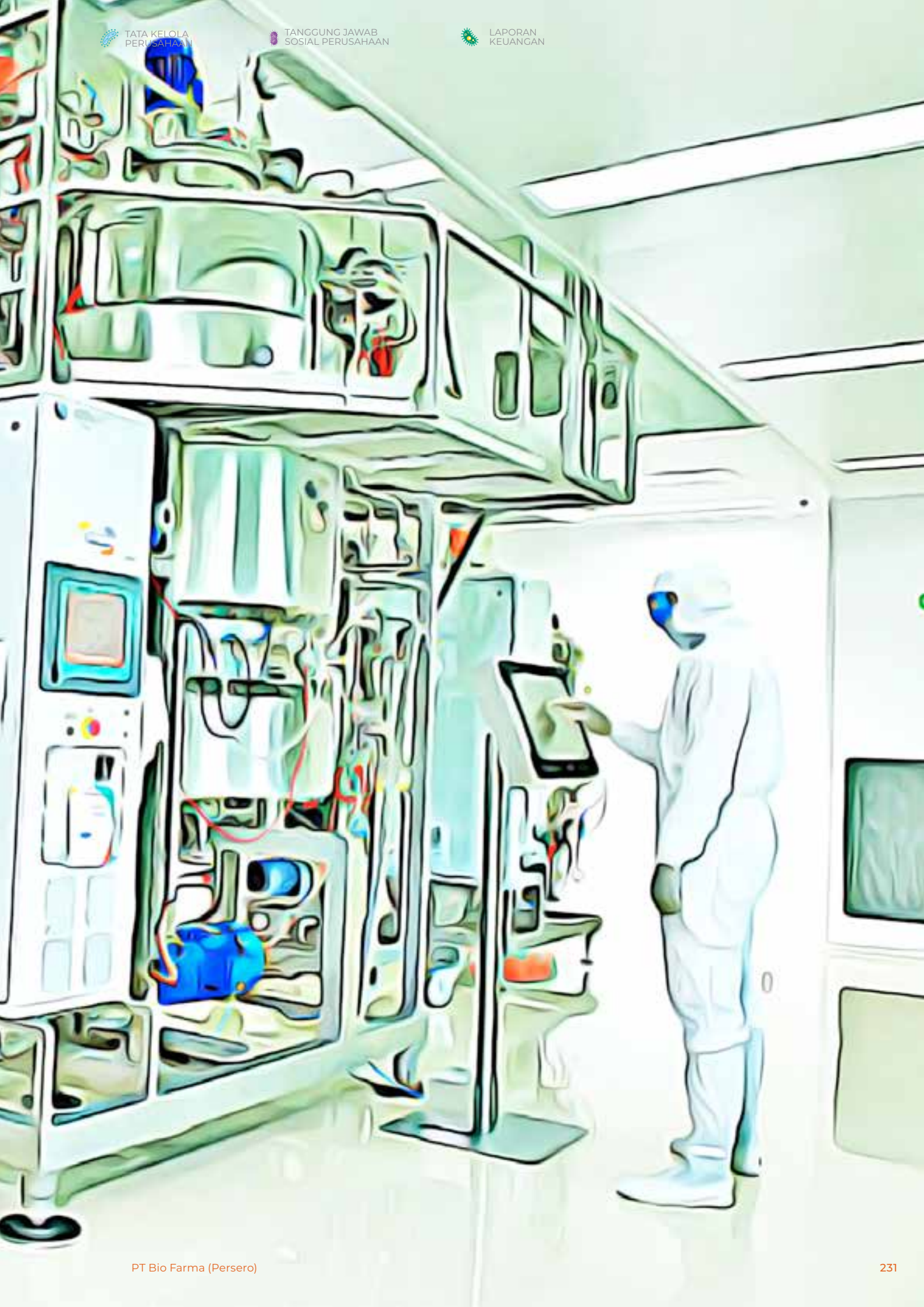

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG PERUSAHAAN

Indikator Kinerja Keuangan Dapat Diukur Melalui Kemampuan Bio Farma Dalam Memenuhi Kewajibannya Baik Dalam Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang. Selain Itu Juga Dapat Memaksimalkan Kolektibilitas Piutang Dengan Cepat

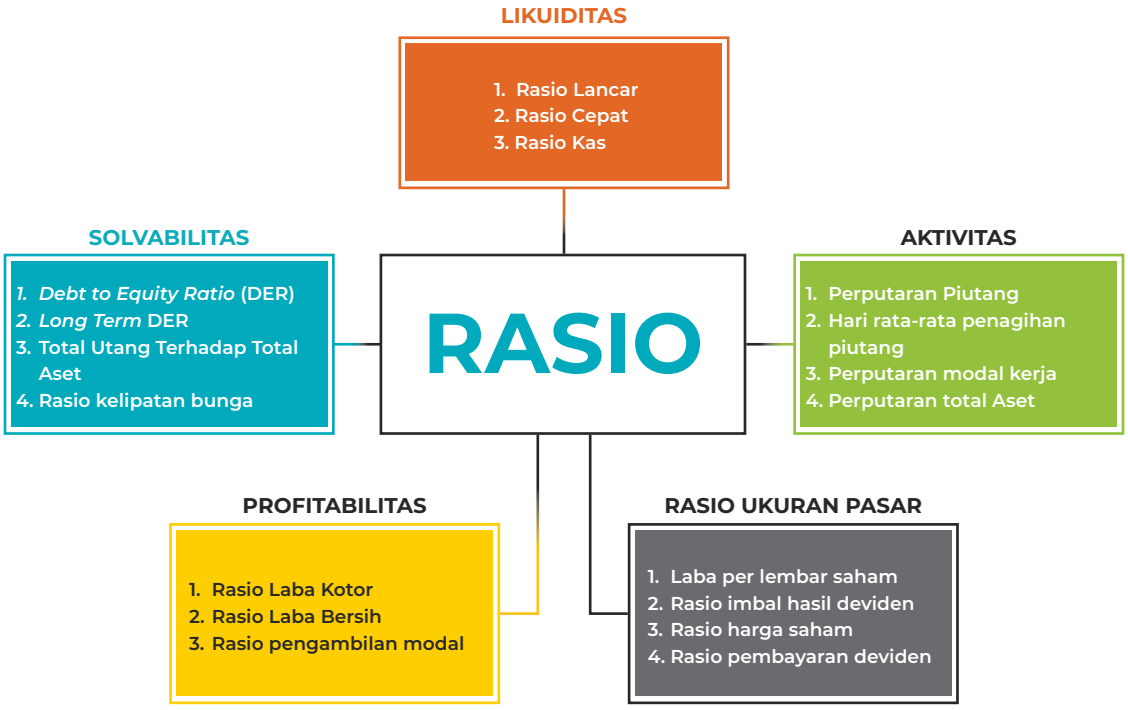

Kemampuan Bio Farma dalam menyelesaikan kewajibannya diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio tersebut merupakan indikator dalam menghitung kemungkinan risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional Bio Farma. Hal ini mendorong Bio Farma untuk senantiasa melakukan pengendalian kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Bio Farma melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan memonitor profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga saldo kecukupan kas dan surat berharga dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar.

Bio Farma juga mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang andal.

Tanggal jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan seperti utang usaha, biaya masih harus dibayar, utang lain-lain dan pinjaman bank jangka pendek adalah kurang dari satu tahun, kecuali untuk liabilitas keuangan seperti utang obligasi dan pinjaman investasi.

Rasio kemampuan membayar pinjaman terefleksikan dalam rasio lancar dan rasio kas. Di akhir tahun 2018, rasio lancar *(Current Ratio)* tercatat sebesar 320,93% sementara rasio kas *(Cash Ratio)* tercatat sebesar 71,90%.

Likuiditas Bio Farma tercermin dari struktur pendanaan, likuiditas aset, liabilitas kepada pihak Ketiga. Bio Farma membukukan Aset Lancar tahun 2018 sebesar Rp2,39 triliun meningkat 21,78% dibandingkan tahun 2017 dan jumlah tersebut merupakan 32,32% dari total Aset. Kondisi ini mengindikasikan bahwa likuiditas Perseroan yang baik.

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG BAIK JANGKA PENDEK MAUPUN JANGKA PANJANG

Kemampuan membayar liabilitas tergambar dari rasio liabilitas jangka pendek terhadap ekuitas yang tercatat sebesar 12,50% di tahun 2018. Rasio ini naik dari tahun 2017 yaitu 10,26%. Sementara itu rasio liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas naik dari 3,89% pada tahun 2017 menjadi 11,62% pada tahun 2018. Secara keseluruhan rasio total liabilitas terhadap ekuitas tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017 yaitu dari 14,15% pada tahun 2017 menjadi 24,12% pada tahun 2018.

RATIO SOLVABILITIAS *(TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO)*

Merupakan Perbandingan antara hutang–hutang (Liabilitas) dan Ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

LIABILITAS JANGKA PENDEK / EKUITAS (%)

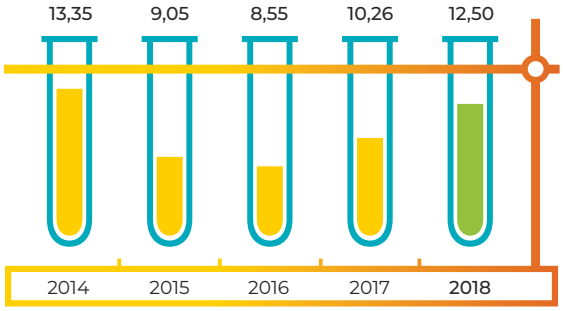

LIABILITAS JANGKA PANJANG / EKUITAS (%)

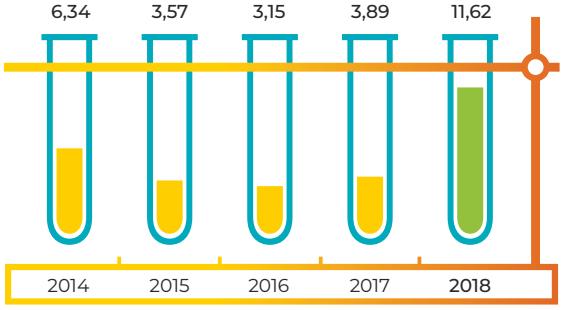

TOTAL LIABILITAS / EKUITAS (%)

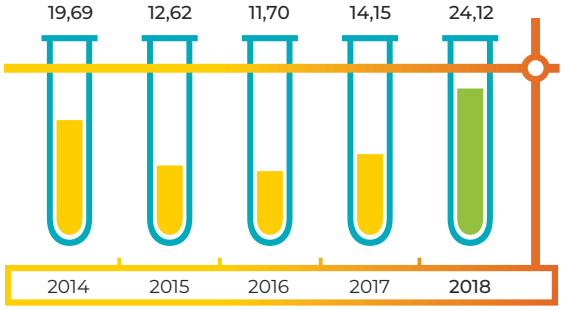

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Liabilitas Jangka Pendek / Ekuitas (%)	13,35	9,05	8,55	10,26	6,17	12,50	21,85	102,62	2,24	6,33
Liabilitas Jangka Panjang / Ekuitas (%)	6,34	3,57	3,15	3,89	20,62	11,62	198,56	(43,63)	7,73	(8,99)
Total Liabilitas / Ekuitas (Solfabilitas / *Debt to Equity*) (%)	**19,69**	**12,62**	**11,70**	**14,15**	**26,79**	**24,12**	**70,46**	**(9,94)**	**9,97**	**(2,67)**

TOTAL *DEBT TO ASSET RATIO*

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan /Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018- RKAP 2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Jumlah Liabilitas (Juta Rupiah)	500.919	636.532	620.302	799.493	1.646.279	1.438.320	79,90	(12,63)	638.827	(207.959)
Total Aset (Juta Rupiah)	3.044.608	5.680.663	5.922.454	6.449.449	7.792.549	7.401.159	14,76	(5,02)	951.710	(391.390)
Total Debt to Asset Ratio (%)	**16,45**	**11,21**	**10,47**	**12,40**	**21,13**	**19,43**	**56,77**	**(8,01)**	**0,67**	**0,53**

TOTAL *DEBT TO ASSET RATIO* (%)

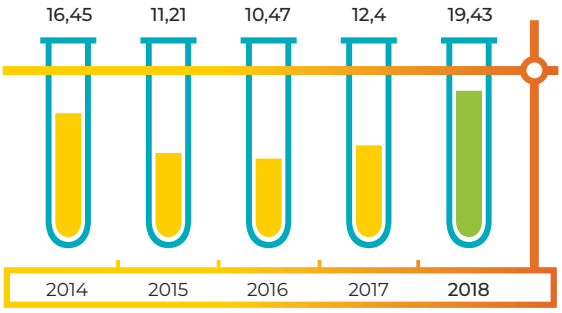

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG PERUSAHAAN

Kolektibilitas merupakan klasifikasi status pembayaran angsuran atau pinjaman beserta bunganya.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung dengan mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Bio Farma tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukan adanya penurunan nilai piutang

TINGKAT KOLEKTIBILTAS PIUTANG

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018- RKAP 2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Jumlah Piutang Usaha Bersih	257.260	507.746	288.626	313.138	235.157	254.065	(18,86)	8,04	(59.073)	254.065
Penjualan Bersih	2.044.080	2.345.918	2.315.759	3.011.571	3.283.680	3.235.225	7,43	(1,48)	223.655	3.235.225
Collection period	45,94	79,00	45,49	37,95	26,14	28,66	(24,47)	9,64	(9)	28,66
Average A/R	7,95	4,62	8,02	9,62	13,96	12,73	32,40	(8,81)	3,12	12,73

COLLECTION PERIOD

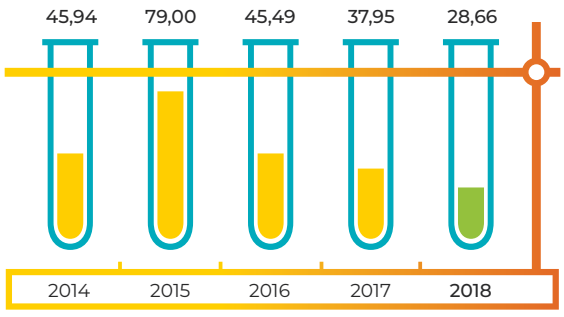

AVERAGE A/R

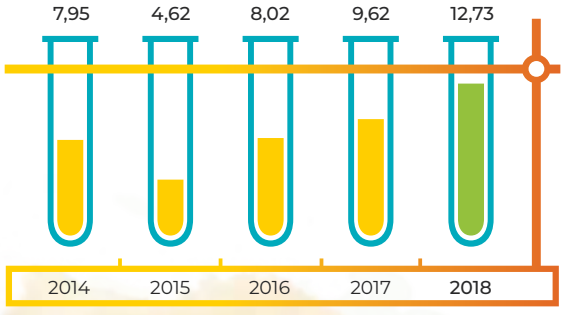

Kolektibilitas piutang dipengaruhi oleh kemampuan Bio Farma dalam menagih piutangnya. Pada akhir tahun 2018, *Collection Period* memperlihatkan peningkatan menjadi 12,73 hari dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 9,62 hari.

Untuk mengurangi risiko pembeli gagal bayar *(default)*, Bio Farma menerapkan kebijakan distributor tidak melakukan pembayaran atau telat melakukan pembayaran sebagai berikut:

1. Dikenakan denda 1% dari nilai faktur untuk tiap hari keterlambatan pembayaran yang dihitung berdasarkan hari kalender (tercantum dalam perjanjian distributorship pasal 12)
2. Barang yang dikirim ditahan terlebih dahulu sampai mereka melakukan pembayaran (SOP dan perjanjian *distributorship*)
3. Dilakukan klaim atas bank garansi distributor tersebut, klaim diajukan oleh Bagian Penjualan Sektor Swasta ke Bagian Administrasi Keuangan yang akan dilanjutkan ke Bank atau Asuransi yang mengeluarkan Bank Garansi tersebut. (Bank Garansi tercantum dalam Perjanjian Distributorship pasal 12 dan SOP)
4. Besaran bank garansi ditentukan oleh Pemasaran

STRUKTUR MODAL *(CAPITAL STRUCTURE)* DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL *(CAPITAL STRUCTURE POLICY)*

Struktur Modal merupakan masalah penting dalam pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan.

Penetapan rencana permodalan Bio Farma berdasarkan atas penilaian kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan dan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Struktur modal yang kuat memiliki daya dukung terhadap kelangsungan usaha Perusahaan yang tinggi.

Struktur Modal merupakan perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing adalah hutang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan.

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal

1. Tingkat Penjualan
2. Struktur Aktiva
3. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan
4. Profitabilitas
5. Variabel Laba & perlindungan pajak *(tax shield)*
6. Penggunaan hutang memberi manfaat perlindungan pajak.
7. Skala perusahaan
8. Kondisi intern perusahaan & ekonomi makro

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Bio Farma menyusun Rencana Permodalan berdasarkan telaah dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Rencana Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Perusahaan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perusahaan senantiasa menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko melalui proses perencanaan modal. Begitu juga dengan bisnis yang didasarkan pada permodalan dan persyaratan likuiditas Perusahaan. Kebutuhan permodalan direncanakan dan didiskusikan secara rutin dengan didukung data-data analisis.

Tujuan Perusahaan mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Perusahaan dapat tetap memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalannya, Perusahaan menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada Pemegang Saham, Perusahaan harus memonitor modal berdasarkan rasio hutang terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah hutang dengan total modal. Hutang merupakan jumlah liabilitas pada laporan posisi keuangan konsilidasian.

Modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas yang ada sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Struktur modal merupakan perimbangan antara pengguna modal sendiri dengan pinjaman/ hutang yang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL *(CAPITAL STRUCTURE)*

Kebijakan manajemen terkait permodalan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa Bio Farma memiliki modal yang kuat dan menciptakan struktur permodalan yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan dimasa mendatang. Selain itu, kebijakan permodalan ditetapkan untuk

memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Perusahaan telah efektif dan efisien.

Perusahaan menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Oleh karena itu Bio Farma menetapkan kebijakan struktur permodalan yang optimal agar dapat memaksimalkan nilai Perusahaan.

RINCIAN STRUKTUR MODAL *(CAPITAL STRUCTURE)* YANG TERDIRI DARI UTANG BERBASIS BUNGA / SUKUK DAN EKUITAS

Rasio Keuangan	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018-2017
	1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5	9 = 6-4
Likuiditas (%)									
Rasio Kas	286,08	121,74	98,85	63,76	58,14	71,90	12,77	23,67	8,14
Rasio Lancar	537,18	437,04	408,14	338,90	553,70	320,93	(5,30)	(42,04)	(17,96)
Rentabilitas (%)									
Gross Profit Margin	61,84	63,02	56,59	44,97	45,78	43,63	(2,99)	(4,69)	(1,35)
Operating Margin	35,57	35,65	28,50	22,67	24,19	22,77	0,46	(5,85)	0,11
Net Profit Margin	28,48	28,59	21,64	17,44	17,70	16,79	(3,75)	(5,14)	(0,65)
Return on Equity (ROE)	31,93	17,14	12,47	12,97	14,81	14,18	9,28	(4,26)	1,20
Return on Investment (ROI)	31,15	20,27	16,53	16,93	15,78	15,70	(7,27)	(0,53)	(1,23)
Return On Assets (ROA)	20,26	15,37	8,80	8,62	8,43	8,24	(4,46)	(2,23)	(0,38)
Solvabilitas (%)									
Debt to Equity	19,69	12,62	11,70	14,15	26,79	24,12	70,46	(9,94)	9,97
Turnover (times)									
Turnover Persediaan	2,94	2,20	1,72	2,33	2,59	1,93	(17,23)	(25,40)	(0,40)
Turnover Piutang	7,54	6,17	5,87	10,08	13,51	11,50	14,05	(14,87)	1,42
Pertumbuhan (%)									
Penjualan	110,27	114,77	98,71	130,05	111,04	107,43	(17,39)	(3,25)	(22,62)
Laba Usaha	106,19	115,05	78,91	103,44	118,26	107,93	4,34	(8,74)	4,49
Laba Sebelum Pajak	99,65	115,90	76,17	104,18	114,92	101,92	(2,17)	(11,31)	(2,26)

RASIO HUTANG TERHADAP MODAL *(DEBT TO EQUITY RATIO)*

Debt to Equity Ratio / Rasio Hutang Terhadap Modal merupakan rasio keuangan yang menunjukan proporsi relatif antara Ekuitas dan Hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Rasio *Debt to Equity* digunakan untuk mengukur seberapa baik struktur investasi, menilai posisi keuangan perusahaan, ukuran kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya, rasio penting untuk diperhatikan pada saat memeriksa kesehatan keuangan perusahaan.

Kemampuan Perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas merupakan indikator dalam menghitung kemungkinan risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional Perseroan. Hal ini mendorong Bio Farma untuk senantiasa melakukan pengendalian kinerja keuangan secara berkelanjutan.

Selama tahun 2018, Bio Farma mempertahankan strategi diterapkan pada tahun 2018 yaitu mempertahankan rasio hutang terhadap modal maksimal yaitu liabilitas terhadap ekuitas 14,15% pada tahun 2017 menjadi 24,12% pada tahun 2018.

RASIO UTANG TERHADAP MODAL PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 SEBAGAI BERIKUT:

RASIO HUTANG TERHADAP MODAL
((Dalam Juta Rupiah))

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018-2017
	1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5	9 = 6-4
Jumlah Liabilitas	500.918,83	636.531,73	620.302,05	799.492,59	1.646.279,57	1.438.319,88	79,90	(12,63)	638,827,29
Jumlah Ekuitas	2.543.688,88	5.044.131,51	5.302.152,27	5.649.956,36	6.146.270,32	5.962.839,41	5,54	(2,98)	312,883,05
Rasio Hutang Terhadap Modal (%)	19,69	12,62	11,70	14,15	26,79	24,12	70,46	(9,94)	9,97

***DEBT TO EQUITY* (DER)(%)**

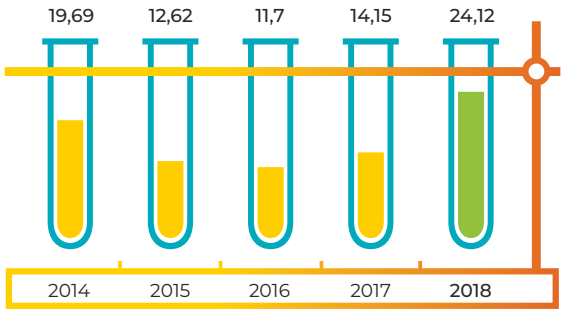

CURRENT RATIO

Merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

Rasio Keuangan	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018-2017	Pertumbuhan (%)
	1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5	9 = 6-4	10 = 9/4
Rasio Lancar	537,18	437,04	408,14	338,90	553,70	320,93	(5,30)	(42,04)	(17,97)	35,67

CURRENT RASIO (%)

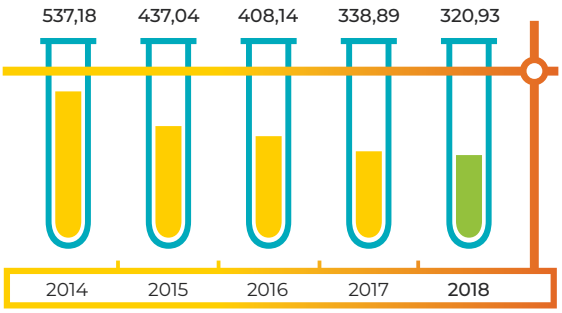

ACID TEST RATIO (RATIO IMMEDIATE SOLVENCY)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid.

Rata-rata industri tingkat *liquid*nya/*quick ratio* adalah 0,5 kali sedangkan Bio Farma 1,63 maka keadaanya sangat baik karena perusahaan dapat membayar hutang walaupun sudah dikurangi persediaan.

Dalam Juta Rupiah

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018- RKAP 2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Jumlah Aset Lancar	1.824.639	1.995.781	1.849.555	1.964.086	2.099.336	2.391.930	21,78	13,94	427.844	292.594
Persediaan	326.600	462.557	708.564	712.912	639.955	1.177.242	65,13	83,96	464.330	537.287
Total	**1.498.039**	**1.533.224**	**1.140.991**	**1.251.174**	**1.459.381**	**1.214.688**	**(2,92)**	**(16,77)**	**(36.486)**	**(244.693)**
Jumlah Libilitas Jangka Pendek	339.668	456.663	453.169	579.556	379.145	745.305	28,60	96,58	165.749	366.160
Quick Ratio	4,41	3,36	2,52	2,16	3,85	1,63	(24,51)	(57,66)	(1)	-2

QUICK RATIO

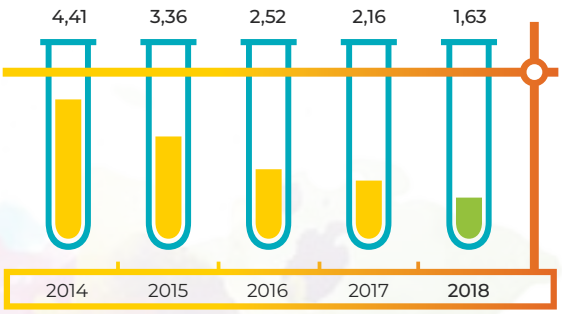

STRUKTUR MODAL *(CAPITAL STRUCTURE)*

Struktur Modal merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang maupun jangka pendek dan modal sendiri (laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan) yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Struktur modal yang efektif mampu menciptakan perusahaan dengan keuangan yang kuat dan stabil. Struktur Modal merupakan masalah penting dalam pengambilan keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan.

(Dalam Juta Rupiah)

URAIAN	2014		2015		2016		2017		2018	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Liabilitas Jangka Pendek	339.668,41	11,16	456.663,42	8,04	453.168,97	7,65	579.555,52	8,99	745.305,11	10,07
Liabilitas Jangka Panjang	161.250,42	5,30	179.868,31	3,17	167.133,08	2,82	219.937,07	3,41	693.014,77	9,36
Jumlah Liabilitas	500.918,83	16,45	636.531,73	11,21	620.302,05	10,47	799.492,59	12,40	1.438.319,88	19,43
Ekuitas	2.543.688,88	83,55	5.044.131,51	88,79	5.302.152,27	89,53	5.649.956,36	87,60	5.962.839,41	80,57
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**3.044.607,71**	**100,00**	**5.680.663,24**	**100,00**	**5.922.454,32**	**100,00**	**6.449.448,95**	**100,00**	**7.401.159,29**	**100,00**

Uraian	Kenaikan / Penurunan	Kenaikan / Penurunan	Kenaikan / Penurunan	Kenaikan / Penurunan	Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018 - RKAP 2018	Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018 - RKAP 2018
	11/7	11/9	12/8	12/10	11-7	11-9	12-8	12-10
	(%)	(%)	(%)	(%)	Rp	Rp	(%)	(%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	28,60	96,58	12,06	106,97	165.749	366.160	1,08	5,20
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	215,10	(45,31)	(100,00)	0	473.078	(574.119)	(3,41)	0,00
JUMLAH LIABILITAS	79,90	(12,63)	56,77	(8,01)	638.827	(207.959)	7,04	(1,69)
JUMLAH EKUITAS	5,54	(2,98)	(8,03)	2,15	312.884	(183.430)	(7,04)	1,69
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**14,76**	**(5,02)**	**0**	**0**	**951.711**	**(391.389)**	**0,00**	**0,00**

RATIO LIKUIDITAS

Merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Bio Farma dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

LIKUIDITAS

((Dalam Juta Rupiah))

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)	Selisih 2018-2017
	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5-4
Aset Lancar	1.824.638,62	1.995.781,08	1.849.555,40	1.964.086,54	2.391.929,98	21,78	427,843,43
Liabilitas Jangka Pendek	339.668,41	456.663,42	453.168,97	579.555,52	745.305,11	28,60	165,749,59
Rasio (%)	537,18	437,04	408,14	338,90	320,93	(5,30)	(17,96)

RASIO LIKUIDITAS (%)

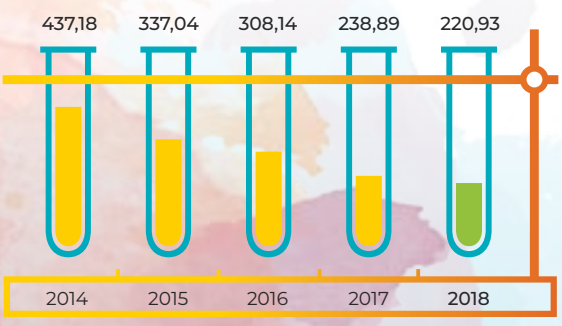

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Investasi berupa Barang Modal *(Capital Expenditure)* merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah Aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Realisasi investasi tahun 2018 sebesar Rp752,64 miliar (fisik sebesar Rp683,55 miliar & uang muka investasi senilai Rp69,10 miliar) atau 63,71% dari RKAP 2018 yaitu sebesar Rp1,18 triliun, atau naik 37,42% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp547,70.

NAMA PIHAK YANG MELAKUKAN IKATAN

Selama tahun 2018 Bio Farma melakukan ikatan material untuk investasi barang modal dengan dengan beberapa rekanan Bio Farma / pihak-pihak berelasi. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi - transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

TUJUAN DARI IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL PADA TAHUN BUKU 2018

Selama tahun 2018 Bio Farma melakukan ikatan material untuk investasi barang modal dengan beberapa rekanan dengan tujuan pengadaan terkait dengan Penilaian *Assesment* WHO & GMP, Penggantian, IPAL / K3/ Lingkungan, Peningkatan Kapasitas, Litbang dan Produk Baru.

SUMBER DANA YANG DIHARAPKAN UNTUK MEMENUHI IKATAN-IKATAN TERSEBUT

Sumber pendanaan atas belanja modal berasal dari dana intern Perusahaan yaitu dari RKAP 2018.

MATA UANG YANG MENJADI DENOMINASI

Mata uang yang menjadi denominasi adalah Rupiah. Transaksi transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, keuangan dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut, sebagai berikut:

Mata Uang Yang Mendominasi	2014	2015	2016	2017	2018
1 Dollar Amerika Serikat (USD)	12.440,00	13.795,00	13.436,00	13.548,00	14.481,00
1 Euro (EUR)	15.133,26	15.069,67	14.161,55	16.173,62	16.559,75
1 Dollar Singapura (SGD)	9.422,10	9.751,19	9.298,92	10.133,53	10.602,97
1 Dollar Australia (AUD)	10.218,22	10.064,16	9.724,31	10.557,29	10.211,29
1 Yen Jepang (JPY)	104,24	114,52	115,40	120,22	131,12
1 Poundsterling Inggris (GBP)	19.370,33	20.451,11	16.507,51	18.218,01	18.372,78
1 Danish Krone Denmark (DKK)	2.031,90	2.019,32	1.905,09	2.172,34	2.217,87
1 Frank Swiss (CHF)	12.582,82	13.951,29	13.177,76	13.842,15	14.709,75

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pernjabaran asset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan.

LANGKAH-LANGKAH YANG DIRENCANAKAN PERUSAHAAN UNTUK MELINDUNGI RISIKO DARI POSISI MATA UANG ASING YANG TERKAIT

MANAJEMEN RISIKO RISIKO KEUANGAN

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Melalui pendekatanmanajemen risiko,Perusahaan mencoba meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko risiko di atas.

1. RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha, dan piutang lain.Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Untuk risiko penjualan kredit, Perusahaan mensyaratkan adanya bank garansi atau LC dengan limit tertentu. Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Perusahaan adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Perusahaan memiliki kas dan setara kas di berbagai bank.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Perusahaan:
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2015			2016		
	Konsentrasi Risiko Kredit		Eksposur Maksimum	Konsentrasi Risiko Kredit		Eksposur Maksimum
	Institusi	Lain-Lain		Institusi	Lain-Lain	
Piutang Usaha	507.746.089.376	-	507.746.089.376	288.626.423.903	-	288.626.423.903
Piutang Lain-Lain	1.302.637.458	3.194.971.060	4.497.608.518	1.302.637.458	446.140.212	1.748.777.670
Total	**509.048.726.834**	**3.194.971.060**	**512.243.697.894**	**289.929.061.361**	**446.140.212**	**290.375.201.573**

URAIAN	2017			2018		
	Konsentrasi Risiko Kredit		Eksposur Maksimum	Konsentrasi Risiko Kredit		Eksposur Maksimum
	Institusi	Lain-Lain		Institusi	Lain-Lain	
Piutang Usaha	313.138.277.507	-	313.138.277.507	254.065.476.289	-	254.065.476.289
Piutang Lain-Lain	1.302.637.458	121.769.028	1.424.406.486	1.302.637.458	799.820.095	2.102.457.553
Total	**314.440.914.965**	**121.769.028**	**314.562.683.994**	**255.368.113.747**	**799.820.095**	**256.167.933.841**

2. RISIKO MATA UANG

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing. Perusahaan menggunakan mata uang asing dalam transaksi pengadaan barang/jasa dan penjualan ekspor dengan pihak luar negeri serta pengeluaran biaya operasional sehingga terdapat risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah yang berlangsung sejak transaksi terjadi sampai dengan pembayaran dilakukan atau diterima.

Disamping terkena eksposur transaksi yang dapat menyebabkan kerugian arus kas dimasa yang datang pada saat menerima atau melakukan pembayaran, juga Perusahaan akan terkena eksposur ekonomi karena melakukan transaksi perdagangan internasional. Perusahaan akan menghadapi risiko penurunan nilai pendapatan atau peningkatan biaya akibat fluktuasi nilai tukar sehingga harga jual produk menjadi tidak kompetitif dibanding pesaing baik di pasar global atau pesaing asing di pasar domestik.

Penerimaan hasil penjualan ekspor yang didominasi oleh mata uang Dolar AS (USD) secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami {natural hedging) terhadap eksposur fluktuasi nilai tukar. Namun demikian, karena posisi penerimaan dalam valuta asing lebih besar dibanding kebutuhan *(long position)* serta terdapat pengeluaran untuk pengadaan barang impor dalam mata uang asing non USD, maka Perusahaan mempunyai eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi mata uang asing.

Untuk menghindari risiko fluktuasi nilai tukar di atas, Perusahaan melakukan lindung nilai alami dengan menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran mata uang asing dengan cara memelihara saldo mata uang asing sesuai kebutuhan, mengalihkan harga beli barang/jasa dengan *Vendor* Luar Negeri dari non USD ke USD, dan menjual sisa kebutuhan USD secara bertahap sesuai proyeksi kebutuhan arus kas dan harga pasar.

3. RISIKO SUKU BUNGA

Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan. Tabel di bawah ini menggambarkan detail jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Des-15				31-Des-16			
	Suku Bunga Mengembang	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Jumlah	Suku Bunga Mengembang	Suku Bunga Tetap	Tidak Dikenakan Bunga	Jumlah
	Kurang Dari 1 Tahun	Kurang Dari 1 Tahun			Kurang Dari 1 Tahun	Kurang Dari 1 Tahun		
Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas dan Setara Kas	346.754.915.461	209.001.583.500	182.759.333	555.939.258.294	175.710.469.720	272.050.386.800	189.469.748	272.239.856.548
Jumlah Aset Keuangan	346.754.915.461	209.001.583.500	182.759.333	555.939.258.294	175.710.469.720	272.050.386.800	189.469.748	272.239.856.548
Jumlah Gap Suku Bunga	**346.754.915.461**	**209.001.583.500**	**182.759.333**	**555.939.258.294**	**175.710.469.720**	**272.050.386.800**	**189.469.748**	**272.239.856.548**

URAIAN	31-Dec-17				31-Dec-18			
	Suku Bunga Mengembang	Suku Bunga Tetap		Jumlah	Suku Bunga Mengembang	Suku Bunga Tetap		Jumlah
	Kurang Dari 1 Tahun	Kurang Dari 1 Tahun	Tidak Dikenakan Bunga		Kurang Dari 1 Tahun	Kurang Dari 1 Tahun	Tidak Dikenakan Bunga	
Aset	0	0	0	0	0	0	0	0
Kas dan Setara Kas	334.477.033.019	334.477.033.019	183.925.904	35.069.098.304	535.724.709.290	16.324.895.300	185.630.168	552.235.234.758
Jumlah Aset Keuangan	334.477.033.019	334.477.033.019	183.925.904	35.069.098.304	535.724.709.290	16.324.895.300	185.630.168	552.235.234.758
Jumlah Gap Suku Bunga	**334.477.033.019**	**334.477.033.019**	**183.925.904**	**35.069.098.304**	**535.724.709.290**	**16.324.895.300**	**185.630.168**	**552.235.234.758**

4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi komitmen kepada semua pihak dan melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Menindaklanjuti program WHO tahun 2013-2018 terkait eradikasi Polio Global yang telah disetujui oleh Dewan Eksekutif WHO di Tahun 2013. Dimana salah satu keputusannya yang harus dilaksanakan adalah melakukan penghapusan semua vaksin Polia Oral secara bertahap. Strategi untuk meminimalkan risiko adalah melalui penghentian produksi tOPV *(trivalent Oral Polio Vaccine)* secara bertahap oleh para produsen dan pembatasan produk tOPV ke bOPV *(bivalent Oral Polio Vaccine)* selesai dilakukan pada April 2016.

Komitmen Indonesia untuk eradikasi Polio Nasional tahun 2020 sudah ditindaklanjuti melalui edaran kemenkes mengenai peralihan 95% pemakaian vaksin tOPV ke bOPV secara bertahap sampai batas waktu 4 April 2016, melalui pengenalan produk pengganti IPV *(Inactivated Polio Vaccine)* pada program imunisasi rutin, pencabutan ijin edar dan penarikan tOPV serta pemusnahannya mulai tanggal 4-30 April 2016 diseluruh Indonesia baik di sektor swasta maupun pemerintah.

Perusahaan sudah menindaklanjuti edaran tersebut melalui percepatan atas realisasi kontrak pemerintah tahun 2016 untuk produk tOPV melalui program imunisasi yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia tanggal 8-11 Maret 2016 dan Penarikan secara bertahap produk tOPV di distributor sampai dengan 28 Maret 2016 serta melakukan penggantian secara serentak dengan produk bOPV mulai 4 April 2016.

NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi *arms length*. Perusahaan memperhitungkan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek mendekati nilai tercatatnya karena pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang diestimasikan pada nilai kini arus kas masa depan pada tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank kepada perusahaan untuk utang dengan jatuh tempo sejenis.

Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat memberikan dampak pada kondisi keuangan Perusahaan.

Selama ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh Perusahaan untuk melindungi risiko dari perubahan nilai tukar mata uang asing dengan menerapkan kebijakan hedging natural *(Natural Hedge)*, perusahaan masih mempelajari dampak penerapan hedging terhadap perubahan transaksi keuangan.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Investasi merupakan penanaman modal untuk jangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung.

JENIS INVESTASI BARANG MODAL

Jenis investasi barang modal yang ada di Bio Farma terdiri dari 2 sebagai berikut:

1. Investasi Berdasarkan Penggunaannya meliputi:
   a. Rutin: untuk *assessment* WHO & GMN, Penggantian, IPAL/K3 & Lingkungan
   b. Pengembangan: untuk peningkatan kapasitas produksi, Litbang/Riset dasar & *Development* & produk baru

2. Investasi Berdasarkan Per Kelompok meliputi:
   a. Inventaris Kantor
   b. Inventaris Pabrik
   c. Inventaris Lainnya
   d. Inventaris Bangunan
   e. Inventaris Kendaraan Bermotor
   f. Aset tak berwujud
   g. Investasi Tanah

Strategi keuangan Bio Farma difokuskan pada pengelolaan dana sebaik mungkin dengan terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan.

Untuk meningkatkan investasi barang modal dan bangunan Bio Farma juga melakukan penelitian, pengembangan dan surveilans, investasi dalam pelaksanaan antara lain Gedung Fasilitas Produksi Vaksin dan Pengemasan, Fasiltas *Downstream* Vaksin BCG, Sentral Hewan Laboratorium Animal House 2, Piping & *Utilities* Fasilitas Vaksin Rekombinan, Pembangunan *Faspord* Vaksin & & Pengemasan, dll.

Kebijakan investasi Bio Farma berfokus pada kelancaran operasional dan pemenuhan sasaran jangka panjang perusahaan. Jenis investasi barang modal yang dilakukan terutama untuk keperluan proyek pengembangan dalam bentuk mesin dan peralatan.

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Tujuan investasi barang modal untuk keperluan pengembangan Perseroan adalah dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan melalui ekspansi kapasitas produksi, peningkatan efisiensi produksi dan diversifikasi lini usaha.

NILAI INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Realisasi investasi tahun 2018 sebesar Rp752,64 miliar (fisik sebesar Rp683,55 miliar & uang muka investasi senilai Rp69,10 miliar) atau 63,71% dari RKAP 2018 yaitu sebesar Rp1,18 triliun, atau naik 37,42% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp547,70 karena terdapat investasi penyelesaiannya bergeser ke tahun 2018 senilai Rp420,69 miliar. Dari jumlah investasi tersebut terdapat investasi masih dalam pelaksanaan senilai Rp576,56 miliar antara lain Fasilitas Produksi Vaksin & Pengemasan (Gedung No. 43 Tahap 2), Gedung QC, Teknik & Media (Gedung No. 3) *Upstream & Downstream* Integrasi Tetanus dan *Filling Syringe Machine*.

REALISASI INVESTASI BERDASARKAN PENGGUNAANNYA

(Dalam Juta Rupiah)

KELOMPOK INVESTASI	2014	2015	2016	2017	2018
Peralatan Kantor	32.553,69	13.842,40	18.324,42	12.742,40	18.919,00
Peralatan Pabrik	49.447,82	243.362,67	385.478,08	423.494,89	308.089,00
Peralatan Lainnya	32.018,37	53.807,48	14.351,35	16.680,03	32.497,00
Peralatan Bangunan	39.849,05	228.358,38	114.297,87	51.336,12	324.043,00
Kendaraan Bermotor	750,00	383,60	30,04	-	-
Aset Tak Berwujud	20.003,93	5.219,22	10.188,76	3.182,91	-
Tanah	-	-	-	40.267,73	-
Jumlah	**174.622,86**	**544.973,75**	**542.670,52**	**547.704,07**	**683.548,00**

REALISASI INVESTASI BERDASARKAN KELOMPOK

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok Investasi	2014	2015	2016	2017	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)	Selisih 2018-2017
	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7 = 5-4
Peralatan Kantor	32.553,69	13.842,40	18.324,42	12.742,40	18.919,00	48,47	6.177
Peralatan Pabrik	49.447,82	243.362,67	385.478,08	423.494,89	308.089,00	(27,25)	(115.406)
Peralatan Lainnya	32.018,37	53.807,48	14.351,35	16.680,03	32.497,00	94,83	15.817
Peralatan Bangunan	39.849.05	228.358,38	114.297,87	51.336,12	324.043,00	531,22	272.707
Kendaraan Bermotor	750,00	383,60	30,04	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	20.003,93	5.219.22	10.188,76	3.182,91	-	(100,00)	(3.183)
Tanah	-	-	-	40.267,73		(100,00)	(40.268)
Uang Muka Investasi	-	-	-	-	69.096,89		69.097
Jumlah	**174.622,86**	**544.973,75**	**542.670,52**	**547.704,07**	**752.644,89**	**37,42**	**204.941**

REALISASI INVESTASI BERDASARKAN KELOMPOK

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok Investasi	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 -2017	Selisih 2018 -RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Peralatan Kantor	32.554	13.842	18.324	12.742	20.000	18.919	48,48	(5,41)	6.177	(1.081)	-
Peralatan Mesin & Pabrik	49.448	243.363	385.478	423.495	594.343	308.089	(27,25	(48,16)	(115.406	(286.254)	-
Inventaris Kendaraan Bermotor	750	384	30	-	-	-	-	-	-	-	-

Kelompok Investasi	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2018 -2017	Selisih 2018 -RKAP 2018	RKAP 2019
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Aset Tak Berwujud	20.004	5.219	10.189	3.183	554	-	-	-	(3.183	(554)	-
Tanah	-	-	-	40.268	-	-	-	-	-	-	-
Bangunan	39.849	228.358	114.298	51.336	503.757	324.043	531,22	(35,67)	272.707	(179.714)	-
Peralatan Utilitas	32.018	53.807	14.351	16.680	33.747	32.497	94,83	(3,70)	15.817	(1.250	-
Penyertaan Pada Perusahaan Vial	-	-	-	-	29.050	-	-	-	-	(29.050)	-
Uang Muka Investasi	-	-	-	-	-	69.097	-	-	69.097	69.097	-
Jumlah	**174.623**	**544.974**	**542.671**	**547.704**	**1.181.451**	**752.645**	**48,32**	**(36,29)**	**245.209**	**(428.806)**	**921.574**

BANGUNAN

Realisasi pengadaan inventaris bangunan tahun 2018 mencapai 64,33% dari anggarannya karena terdapat bangunan yang proses pembangunannya bergeser ke tahun 2019 antara lain Gedung No. 3 (Gedung Fasilitas QC, teknik dan surveilans) dan Gedung 34 (Gedung fasilitas pengembangan produk skala pilot).

PERALATAN MESIN DAN PABRIK

Realisasi pengadaan peralatan mesin dan pabrik tahun 2018 mencapai 51,84% dari anggarannya karena terdapat peralatan untuk Gedung No. 3 (Gedung Fasilitas QC, teknik dan surveilans) dan Gedung 34 (Gedung fasilitas pengembangan produk skala pilot) yang realisasinya bergeser ke tahun 2019.

PERALATAN KANTOR

Realisasi pengadaan peralatan kantor tahun 2018 mencapai 94,60% dari anggarannya karena terdapat beberapa peralatan kantor yang realisasinya bergeser ke tahun 2019.

PERALATAN UTILITAS

Realisasi pengadaan peralatan utilitas tahun 2018 mencapai 96,30% dari anggarannya.

ASET TAK BERWUJUD

Realisasi aset takberwujud tahun 2018 realisasinya bergeser ke tahun 2019 berupa Aplikasi kalkulasi HPP Terapan dan Sistem Informasi Laboratorium.

PENYERTAAN PADA VENTURA BERSAMA *(VIAL)*

Investasi Pada Ventura Bersama *(Vial)* pada tahun 2018 belum ada realisasi disebabkan *feasibility study* pembentukan Ventura Bersama *(Vial)* sampai akhir tahun 2018 belum selesai, diperkirakan selesai awal tahun 2019.

UANG MUKA INVESTASI

Uang muka investasi sampai dengan tahun 2018 senilai Rp69,10 miliar yang fisiknya akan terealisir pada tahun 2019.

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan kantor, dan aset yang masih dalam penyesuaian berupa bangunan. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan.

Aset tetap di tahun 2018 tercatat sebesar Rp4,93 triliun naik Rp536,49 miliar atau 12,21% dibandingkan dengan Aset tetap tahun 2017 yaitu sebesar Rp4,39 triliun dan Rp667,38 atau 11,92% dibawah RKAP sebesar Rp5,60 triliun.

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	RKAP 2018	2018	Kenaikan /Penurunan (%)		Selisih 2018 - 2017	Selisih 2018-RKAP 2018
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Biaya Perolehan										
Tanah	17.140	2.059.183	2.059.183	2.099.451	2.112.183	2.099.451	-	(0,60)	-	(12.732)
Bangunan	503.284	557.670	631.496	724.634	962.435	733.709	1,25	(23,77)	9.076	(228.726)
Peralatan Mesin & Pabrik	1.076.051	1.186.837	1.277.105	1.374.341	2.012.030	1.457.901	6,08	(27,54)	83.560	(554.129)
Peralatan Kantor	79.289	110.848	130.023	143.468	-	153.731	7,15	-	10.263	153.731
Peralatan Utilitas	67.354	70.319	98.139	106.328	-	163.073	53,37	-	56.745	163.073
Kendaraan Bermotor	5.210	4.671	4.701	4.701	163.461	2.250	(52,13)	(98,62)	(2.450)	(161.211)
Aset Dalam Pembangunan										
Bangunan	75.539	241.052	281.524	239.723	1.640.059	554.306	131,23	(66,20)	314.583	(1.085.753)
Peralatan Mesin, Pabrik Kantor & *Utility*	62.566	219.971	500.840	790.146	-	1.033.233	30,76	-	243.087	1.033.233
Aset Tetap Dalam Perjalanan										
Peralatan Mesin, Pabrik Kantor & *Utility*	-	-	-	44.741	-	4.138	(90,75)	-	(40.603)	4.138
Jumlah Biaya Perolehan	**1.886.433**	**4.450.551**	**4.983.012**	**5.527.533**	**6.890.168**	**6.201.793**	**12,20**	**(9,99)**	**674.260**	**(688.375)**
Akumulasi Penyusutan & Penurunan Nilai										
Bangunan	123.407	148.287	178.620	212.551	-	247.988	16,67	-	35.437	247.988
Peralatan Mesin & Pabrik	509.219	587.907	668.202	756.398	-	779.753	3,09	-	23.355	779.753
Peralatan Kantor	57.355	70.916	92.180	110.751	-	185.145	67,17	-	74.393	185.145
Peralatan Utilitas	29.441	34.202	41.618	49.188	-	56.106	14,06	-	6.918	56.106
Kendaraan Bermotor	3.538	3.702	4.205	4.414	-	2.081	(52,86)	-	(2.333)	2.081
Jumlah	**722.959**	**845.014**	**984.825**	**1.133.302**	**(1.292.067)**	**1.271.072**	**12,16**	**(198,38)**	**137.770**	**2.563.139**
Nilai Buku	**1.163.473**	**3.605.537**	**3.998.187**	**4.394.231**	**5.598.101**	**4.930.721**	**12,21**	**(11,92)**	**536.490**	**(667.380)**

JUMLAH ASET TETAP
(Rp Juta)

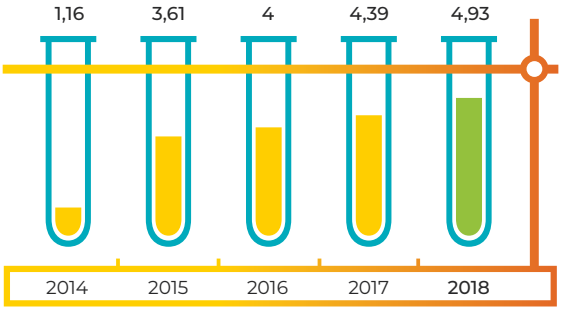

ASET DALAM PELAKSANAAN

Aset Dalam Pelaksanaan merupakan gedung dan fasilitas peralatan didalamnya yang sampai dengan 31 Desember 2018 masih dalam proses pembangunan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Aset	Nilai 31 Desember 2018
Gedung Dalam Pelaksanaan	
a. Gedung 43	429.033
b. Gedung Lainnya	125.273
Total Gedung Dalam Pelaksanaan	**554.306**
Mesin, Pabrik, Utiliti dalam Pelaksaaan	
a. Fasilitas Gedung 43	784.336
b. Fasiltas Gedung Lainnya	248.897
Total Mesin, Pabrik, Utiliti dalam Pelaksaaan	**1.033.233**
Total Aset Dalam Pelaksanaan	**1.587.539**

PERBANDINGAN ANTARA TARGET PADA AWAL TAHUN DENGAN HASIL YANG DICAPAI (REALISASI) DAN TARGET ATAU PROYEKSI YANG INGIN DICAPAI UNTUK SATU TAHUN MENDATANG MENGENAI PENDAPATAN, LABA DAN LAINNYA

Pencapaian operasional dan keuangan pada tahun 2018 terhadap target RKAP tahun 2018 sangat membanggakan. Realisasi tahun ini menjadi landasan pacu dan semangat optimis untuk mencapai target di tahun 2019 dengan optimisme pencapaian yang lebih baik.

PERBANDINGAN ANTARA RKAP 2018 DENGAN REALISASI 2018 DAN TARGET YANG INGIN DICAPAI (RKAP) 2019

GAMBARAN UMUM KINERJA BIO FARMA TAHUN 2018

Kinerja Perusahaan tahun 2018 dari sisi penjualan mencapai Rp3,23 triliun meningkat sebesar 7,43% dibandingkan realisasi tahun 2017 dan mencapai 98,52% dari anggarannya, sedangkan beban pokok penjualan & jasa sebesar Rp1,82 triliun meningkat 10,05% dibandingkan realisasi tahun 2017 dan meningkat sebesar 2,43% dari anggarannya, sedangkan perolehan laba bersih perusahaan meningkat sebesar 3,40% dari realisasi tahun 2017 menjadi sebesar Rp543,23 miliar atau mencapai 93,47% dari anggarannya.

Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2018 mendapat skor 90,35 dengan kriteria "SEHAT AA", tahun 2017 mendapat skor 86,00 dengan kriteria "SEHAT AA". Untuk pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) memperoleh nilai 91,77 dari total nilai 100.

URAIAN PENCAPAIAN (REALISASI) TAHUN 2018 TERHADAP RKAP 2018 DAN PROYEKSI KINERJA (RKAP) BIO FARMA TAHUN 2019

TARGET (RKAP) 2018, REALISASI 2018 DAN RKAP TAHUN 2019

GAMBARAN UMUM KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2018
(Dalam Juta rupiah)

Uraian	RKAP 2018	Realisasi 2018	RKAP 2019	Kenaikan/Penurunan (%)		Selisih 2018 - RKAP 2018	Selisih RKAP 2019-2018
	1	2	3	2/1	3/1	2-1	3-2
Penjualan Bersih	3.283.680	3.235.225	3.682.448	(1,48)	12,14	(48.455)	447.223
Beban Pokok dan Penjualan & Jasa	1.780.548	1.823.750	2.041.811	2,43	14,67	43.202	218.061
Beban Perusahaan	2.524.741	2.561.369	2.720.452	1,45	7,75	36.628	159.083
Investasi	1.181.450	752.645	921.574	(36,29)	(22,00)	(428.805)	168.929
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	784.947	727.368	840.448	(7,34)	7,07	(57.580)	113.080
Beban Pajak Bersih	203.770	184.142	220.596	(9,63)	8,26	(19.628)	36.454
Laba Bersih	581.177	543.226	619.852	(6,53)	6,65	(37.951)	76.626
Total Liabilitas & Ekuitas	7.792.550	7.401.159	8.188.375	(5,02)	5,08	(391.391)	787.216
Jumlah SDM (Orang)	1.195	1.195	1.237	0,00	3,51	0	42
Tingkat Kinerja Perusahaan	Sehat (AA)	Sehat (AA)	Sehat (AA)	0	0	0	0

PENJUALAN BERSIH

Realisasi penjualan bersih tahun 2018 sebesar Rp3,23 triliun, dan Rp48,46 miliar atau 1,48% dibawah RKAP 2018 yaitu Rp3,28 triliun. RKAP penjualan bersih tahun 2019 ditargetkan besar Rp3,68 triliun naik sebesar Rp447,22 miliar atau 13,82% dari realisasi penjualan bersih tahun 2018.

TOTAL BEBAN PERUSAHAAN

Realisasi total beban Perusahaan tahun 2018 sebesar Rp2,56 triliun, dan Rp36,63 miliar atau 1,45% diatas RKAP 2018 yaitu Rp2,52 triliun. RKAP total beban perusahaan tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp2,72 triliun naik sebesar Rp159,08 miliar atau naik 6,21% dari realisasi total beban perusahaan tahun 2018.

INVESTASI

Realisasi investasi tahun 2018 sebesar Rp752,65 miliar, dan Rp428,81 miliar atau 36,29% dibawah RKAP 2018 yaitu Rp1,18 triliun. RKAP total beban perusahaan tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp921,57 miliar naik sebesar Rp168,93 miliar atau 22,44% dari realisasi investasi tahun 2018.

LABA BERSIH

Realisasi Laba Bersih tahun 2018 sebesar Rp543,23 miliar, dan Rp37,95 miliar atau 6,53% dibawah RKAP 2018 yaitu Rp581,18 miliar. RKAP laba bersih tahun 2019 ditargetkan besar Rp619,85 miliar naik sebesar Rp76,63 miliar atau 14,11% dari realisasi laba bersih tahun 2018.

TOTAL LIABILITAS & EKUITAS

Realisasi Total Liabilitas & Ekuitas tahun 2018 sebesar Rp7,40 triliun, dan Rp391,39 miliar atau 5,02% dibawah RKAP 2018 yaitu Rp7,79 miliar. RKAP total liablitas & ekuitas tahun 2019 ditargetkan besar Rp8,19 triliun naik sebesar Rp787,22 miliar atau 10,64% dari realisasi total liablitas & ekuitas tahun 2018.

JUMLAH SDM

Realisasi jumlah SDM tahun 2018 sebanyak 1.195 orang sesuai RKAP 2018 yaitu sebanyak 1.195 orang & Jumlah SDM tahun 2019 ditargetkan sebanyak 1.237 orang naik sebanyak 42 orang atau 3,51% dari realisasi jumlah SDM tahun 2018.

TINGKAT KINERJA PERUSAHAAN

Baik RKAP 2018, realisasi tahun 2018 dan target 2019 adalah sama yaitu “SEHAT AA”

RKAP 2018, REALISASI 2018 DAN RKAP TAHUN 2019 UNTUK LAPORAN LABA (RUGI)

LAPORAN RUGI LABA

(Dalam Juta Rupiah)

KETERANGAN	REALISASI 2017 (AUDITED)	RKAP 2018	REALISASI 2018 (AUDITED)	%	%
	1	2	3	3/2	3/1
PENJUALAN BERSIH					
Produk Perusahaan	1.872.113	2.102.189	2.038.035	96,95	108,86
Produk *Partnership*	1.111.028	1.130.590	1.133.975	100,30	102,07
Trading Partnership	20.120	41.894	53.111	126,77	263,98
Jasa	8.310	9.006	10.104	112,18	121,59
Jumlah Penjualan Bersih	**3.011.571**	**3.283.680**	**3.235.225**	**98,52**	**107,43**
BEBAN POKOK PENJUALAN & JASA					
Produk Perusahaan	(923.185)	(998.443)	(1.010.966)	101,25	109,51
Produk Partnership	(710.318)	(740.047)	(758.734)	102,53	106,82
Trading Partnership	(16.766)	(34.149)	(39.981)	117,08	238,47

KETERANGAN	REALISASI 2017 (AUDITED)	RKAP 2018	REALISASI 2018 (AUDITED)	%	%
	1	2	3	3/2	3/1
Jasa	(6.861)	(7.908)	(14.070)	177,91	205,07
Jumlah Beban Pokok Penjualan & Jasa	**(1.657.130)**	**(1.780.548)**	**(1.823.750)**	**102,43**	**110,05**
LABA KOTOR	1.354.440	1.503.132	1.411.475	93,90	104,21
BEBAN USAHA					
Beban Penjualan	(137.478)	(154.578)	(137.763)	89,12	100,21
Beban Administrasi & Umum	(409.734)	(403.595)	(410.885)	101,81	100,28
Beban Litbang & Surveilans	(124.570)	(150.703)	(126.062)	83,65	101,20
Jumlah Beban Usaha	**(671.783)**	**(708.876)**	**(674.711)**	**95,18**	**100,44**
LABA USAHA	682.657	794.256	736.765	92,76	107,93
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Penghasilan lain-lain	115.158	3.672	454.802	12,386,56	394,94
Beban Bunga Pinjaman	(8.071)	(11.877)	(27.323)	230,04	338,52
Beban Lain-lain	(76.110)	(1.103)	(436.875)	39.609,23	574,00
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain	**30.977**	**(9.309)**	**(9.397)**	**100,95**	**(30,34)**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	713.634	784.947	727.368	92,66	101,92
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Pajak Tahun Berjalan	(194.907)	(208.933)	(178.928)	85,64	91,80
Pajak Tangguhan	6.629	5.163	(5.214)	(100,99)	(78,66)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**(188.278)**	**(203.770)**	**(184.142)**	**90,37**	**97,80**
LABA BERSIH	525.356	581.177	543.226	93,47	103,40
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pengukuran kembali Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja	(27.239)	-	6.067	-	(22,27)
Pendapatan Komprehensif lain Thn Berjalan stlh pajak	(27.239)	-	6.067	-	(22,27)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	**498.117**	**581.177**	**549.293**	**94,51**	**110,27**

RKAP 2018, REALISASI 2018 DAN RKAP TAHUN 2019 UNTUK PENJUALAN PERUSAHAAN

PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN, PRODUK PARTNERSHIP, TRADING PARTNERSHIP DAN JASA

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	RKAP 2018	Realisasi 2018	RKAP 2019	Kenaikan/Penurunan (%)		Selisih 2018 - RKAP 2018	Selisih 2018-RKAP 2019
	1	2	3	2/1	3/1	2-1	3-2
Produk Perusahaan							
Vaksin Bakteri	203.119	230.750	211.114	13,60	(8,51)	27.631	(19.636)
Vaksin Virus	1.490.584	1.206.231	1.690.457	(19,08	40,14	(284.353)	484.226
Vaksin Kombinasi	319.273	540.463	489.332	69,28	(9,46)	221.190	(51.131)
Sera & Diagnostika	89.214	82.447	90.367	(7,59	9,61	(6.767)	7.920

Uraian	RKAP 2018	Realisasi 2018	RKAP 2019	Kenaikan/Penurunan (%)		Selisih 2018 - RKAP 2018	Selisih 2018-RKAP 2019
	1	2	3	2/1	3/1	2-1	3-2
Dikurangi Potongan Penjualan	0	(21.856,00)	-	-	(100,00)	(21.856)	21.856
Penjualan Produk Perusahaan	**2.102.189**	**2.038.035**	**2.481.270**	**(3,05)**	**21,75**	**(64.154)**	**443.235**
Penjualan Produk Partnership	**1.130.590**	**1.133.975**	**1.095.830**	**0,30**	**(3,36)**	**3.385**	**(38.145)**
Penjualan Trading Partnership	**41.894**	**53.111**	**91.138**	**26,77**	**71,60**	**11.217**	**38.027**
Jasa	**9.006**	**10104**	**14.210**	**12,19**	**40,64**	**1.098**	**4.106**
Jumlah	**3.283.679**	**3.235.225**	**3.682.448**	**(1,48)**	**13,82**	**(48.454)**	**447.223**

PENJUALAN PRODUK BERSIH PER SEGMEN (PER SEKTOR)

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	RKAP 2018	Realisasi 2018	RKAP 2019	Kenaikan/Penurunan (%)		Selisih 2018 - RKAP 2018	Selisih 2018-RKAP 2019
	1	2	3	2/1	3/1	2-1	3-2
Sektor Pemerintah	1.549.213	1.859.153	1.873.322	20,01	0,76	309.940	14.169
Sektor Swasta	375.197	298.013	383.402	(20,57)	28,65	(77,184)	85.389
Sektor Ekspor	1.359.270	1.078.059	1.425.724	(20,69)	32,25	(281.211)	347.665
Total Penjualan Bersih	**3.283.680**	**3.235.225**	**3.682.448**	**(1,48)**	**13,82**	**(48.455)**	**447.223**

RKAP 2018, REALISASI 2018 DAN RKAP TAHUN 2019 UNTUK ASET, LIABILITAS & EKUITAS

ASET, LIABILITAS & EKUITAS

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	RKAP 2018	Realisasi 2018	RKAP 2019	Kenaikan/Penurunan (%)		Selisih 2018 - RKAP 2018	Selisih RKAP 2019-2018
	1	2	3	2/1	3/2	2-1	3-2
ASET							
Aset Lancar	2.099.337	2.391.930	2.396.071	0,14	0,17	292.593	4.141
Aset Tidak Lancar	5.693.213	5.009.229	5.792.304	(0,12)	15,63	(683.984)	783.075
Total Aset	7.792.550	7.401.159	8.188.375	(0,05)	10,64	(391.391)	787.216
Liabilitas & Ekuitas							
Liabilitas Lancar	379.146	745.305	460.585	96,57	(38,20)	366.159	(284.720)
Liabilitas Tidak Lancar	1.267.134	693.015	1.323.398	(45,31)	90,96	(574.119)	630.383
Jumlah Liablititas	1.646.280	1.438.320	1.783.983	(12,63)	24,03	(207.960)	345.663
Ekuitas	6.146.270	5.962.839	6.404.391	(2,98)	7,41	(183.431)	441.552
Total Liabilitas & Ekuitas	7.792.550	7.401.159	8.188.374	(5,02)	10,64	(391.391)	787.215

RKAP 2018, REALISASI 2018 DAN RKAP TAHUN 2019 UNTUK LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS

Dalam Juta Rupiah

Uraian	RKAP 2018	Realisasi 2018	RKAP 2019	Kenaikan/Penurunan (%)		Selisih 2018 - RKAP 2018	Selisih 2018- RKAP 2019
	1	2	3	2/1	3/1	2-1	3-2
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	686.273	268.174	929.480	(60,92)	246,60	(418.099)	661.306
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(1.572.723)	(538.693)	(1.150.419)	(65,75)	113,56	1.034.030	(611.726)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	955.334	418.590	326.106	(56,18)	(22,09)	(536.744)	(92.484)
Kenaikan (Penurunan Kas Bersih	68.883	148.071	105.167	114,96	(28,98)	79.188	(42.904)
Pengaruh Selisih Kurs Kas & Setara Kas	-	18.293	-	-	(100,00	18.293	(18.293)
Saldo Kas & Setara Kas Pada Awal Tahun	151.555	369.546	329.671	143,84	(10,79)	217.991	(39.875)
Saldo Kas Setara Kas Pada Akhir Tahun	**220.438**	**535.910**	**434.838**	**143,11**	**(18,86)**	**315.472**	**(101.072)**

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada terjadi kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan tahun 2018 yang berakhir 31 Desember 2018 tidak terdapat informasi dan fakta material termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

PROSPEK PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN INDUSTRI DAN EKONOMI SECARA UMUM

BANK DUNIA PREDIKSI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2019

Bank Dunia menaksir pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 hanya mencapai 2,9%, turun dari proyeksi pertumbuhan untuk tahun 2018 sebesar 3%. Perlambatan ekonomi dunia dinilai sebagai dampak dari aktivitas perdagangan dan manufaktur internasional yang melesu. Sementara, ketegangan perdagangan masih berpotensi meningkat dan perekonomian sejumlah negara berkembang juga tengah mengalami tekanan pasar keuangan yang cukup besar.

Awal 2018, perekonomian global mencapai puncaknya, namun mulai kehilangan laju sepanjang tahun dan akan makin sulit di tahun mendatang. Pertumbuhan ekonomi negara maju diprediksi jatuh ke level 2% tahun ini. Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi negara maju menyentuh 2,2%. Sementara, pertumbuhan ekonomi negara berkembang stagnan di level 4,2%, lantaran menghadapi melambatnya permintaan eksternal, meningkatnya biaya pinjaman, dan ketidakpastian kebijakan yang terus-menerus sehinga membebani prospek pertumbuhan.

Bank dunia juga menyoroti aktivitas ekspor impor global yang menurun. Pertumbuhan per kapita di 35% negara berkembang dinilai tidak akan cukup untuk mempersempit kesenjangan pendapatan antara negara maju dan negara berkembang, terutama di negara-negara yang terdampak kerapuhan, konflik, dan kekerasan. Pengetatan biaya pinjaman yang lebih tajam juga dapat menekan aliran masuk modal dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat di banyak negara berkembang. Peningkatan utang publik dan swasta di masa lalu menambah kerentanan terhadap perubahan kondisi keuangan dan sentimen pasar. Tambah lagi, ketegangan perdagangan yang kian intens mengganggu rantai nilai secara global yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan.

Ketika prospek ekonomi global semakin gelap, memperkuat perencanaan kontinjensi, memfasilitasi perdagangan, dan meningkatkan akses ke keuangan akan sangat penting untuk menavigasi ketidakpastian saat ini dan memperkuat pertumbuhan. Untuk menjaga momentum, Bank Dunia mendorong negara-negara untuk berinvestasi pada sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan inklusif, dan membangun masyarakat yang tangguh.

TANTANGAN EKONOMI RI YANG DIPREDIKSI TUMBUH PADA 2019

Bank Indonesia (BI) optimistis prospek perekonomian Indonesia tetap baik di tahun 2019. Ini lantaran ditopang stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. BI optimis bahwa kedepan prospek ekonomi Indonesia tetap baik. Yang ingin lakukan adalah menjaga daya tarik pasar keuangan tetap baik yang pada giliranya bisa *support* pembiayaan dari CAD. BI memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan berkisar antara 5-5,4 persen. Inflasi sekitar 2,5-4,5 persen. Adapun defisit transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD) diharapkan turun sebesar 2,5 persen dari pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, BI memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan antara 10-12 persen dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh di level 8-10 persen. Kendati demikian, tahun depan perekonomian Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Itu antara lain rebalancing komoditas global akibat langkah *The Fed* dalam melakukan normalisasi kebijakannya. Terakhir *fate fund rate* (FFR) naik 2,5 persen dan diperkirakan masih akan naik. Adapun di 2019 FFR kemungkinan akan naik 2 sampai 3 kali lagi.

PROSPEK BIO FARMA

Pertumbuhan pasar vaksin didorong oleh peningkatan pembelanjaan pemerintah dan NGO *(Non Governmental Organization)* terkait pelaksanaan program kesehatan nasional akibat peningkatan populasi serta peningkatan jenis vaksin ke dalam program nasional tersebut. Imunisasi merupakan cara yang efektif untuk mencegah timbulnya sebuah penyakit dan mengurangi biaya dan beban kesehatan nasional secara keseluruhan. Walaupun adanya peningkatan pembelanjaan pemerintah untuk imunisasi, 60% dari total pembelanjaan berasal dari NGO, terutama Pan American Health Organization (PAHO), UNICEF, dan Global Alliance for Vaccines and Immunization(GAVI).

Pasar untuk vaksin preventif diperkirakan akan meningkat sebesar rata-rata CAGR 10% dari USD 30,4 miliar di tahun 2014 sampai dengan USD 49,2 miliar di tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

PELUANG PASAR GLOBAL VAKSIN, 2019
(USD)

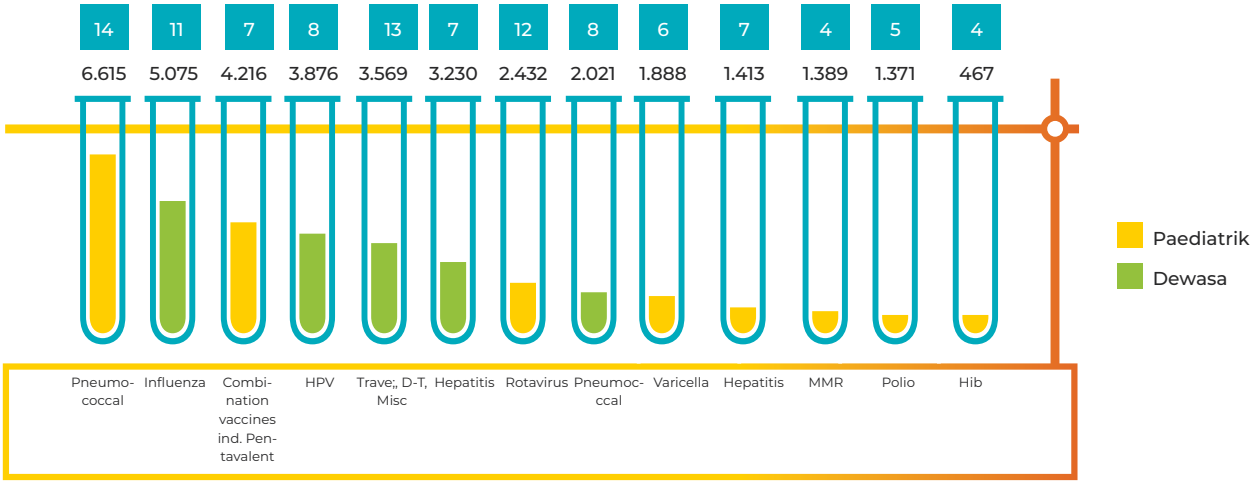

Laju pertumbuhan untuk vaksin *preventif* orang dewasa mencapai CAGR 10% dari rentang tahun 2014-2019. Seiring dengan meningkatnya jumlah infeksi penyakit yang fatal, permintaan untuk vaksin preventif orang dewasa juga terus meningkat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan program vaksin nasional dengan tata waktu peluncuran produk yang jelas. Diperkirakan terdapat 5 juta bayi dan lebih dari 27 juta anak per tahun yang akan diimunisasi. Sesuai dengan program Pemerintah, cakupan imunisasi *(immunization coverage)* akan mencapai 91% kedepannya terlihat pada gambar 3.5. GAVI diperkirakan akan memberikan bantuan pendanaan untuk meningkatkan cakupan tersebut ke angka 85% di tahun 2020 dari 75% di tahun 2015.

Adapun beberapa tantangan Bio Farma yang sebaiknya dipertimbangkan guna mengoptimalkan peluang yang ada, yakni:

1. Kompleksitas yang tinggi dan jangka waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaan tahap basic research. Riset dan pengembangan memerlukan uji klinis berskala besar sehingga memerlukan biaya yang tinggi.
2. Pengelolaan rantai nilai dimulai dari riset dan pengembangan, perencanaan kapasitas produksi, dan penjualan harus disesuaikan dengan permintaan pasar saat ini dan kedepannya.
3. Diperlukan proses manufaktur yang efektif dan efisien agar dapat mengoptimalkan biaya produksi vaksin pada skala ekonomis. Dengan demikian pemilihan teknologi produksi harus dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi.
4. Pengadaan *partnership* dan kerja sama yang optimal untuk memastikan adanya keunggulan *first-mover* dalam segmen pasar yang dituju.
5. Memiliki pengetahuan terkait dengan tren dan regulasi yang berlaku untuk seluruh produk dan atau pasar yang dituju.
6. Kapabilitas niaga atau pemasaran serta penjualan untuk membangun jaringan pelanggan dan distributor lokal dan *global*, *customer relationship* dan *account management*.

Bio Farma memiliki situasi kompetitif yang spesifik dengan karakteristik industrinya yang *highly regulated, preventive product, dependency to government and global program low profitability and high content technology. Global Vaccine Action Plan* dan *Sustainable evelopment Goals* (SDGs) telah menetapkan target yang jelas untuk meningkatkan akses terhadap vaksin di seluruh dunia. Pencapaian target ini membutuhkan kerangka kerja yang terkoordinasi dari berbagai lembaga donor atau pemberi dana, lembaga riset dan pengembangan vaksin, serta produsen vaksin. Hal ini sangat penting mengingat diperlukan sinergi dan kolaborasi baik pada aspek produksi maupun aspek pembelian vaksin untuk menjaga ketersediaan vaksin di dunia.

Peta produsen vaksin global saat ini terdapat sekitar 140 industri vaksin di dunia, Bio Farma menjadi satu-satunya produsen vaksin atau Biotek di Indonesia. Saat ini Bio Farma, termasuk ke dalam sekitar 30 produsen vaksin *global player* yang mendapatkan pra-kualifikasi sehingga mendapatkan peran penting dalam menyediakan suplai vaksin pada badan kesehatan dunia (WHO) dan UNICEF. *Market* industri vaksin sangat berkembang, *emerging market*

selalu naik sekitar 30%, dengan pertumbuhan di negara berkembang termasuk indonesia sekitar 14-17 %, di negara Amerika, Jepang masih jauh dibawah Indonesia. Pasar utama yang dilayani Bio Farma saat ini adalah pasar vaksin generik yang dibutuhkan negara berkembang (*emerging market*) untuk program imunisasi pemerintah atau oleh lembaga internasional yang bergerak di bidang kesehatan atau sosial.

PERUBAHAN SITUASI PERSAINGAN

Perubahan penting yang sedang terjadi dan dapat mempengaruhi posisi persaingan, termasuk peluang inovasi dan kolaborasi adalah:

1. Adanya penggantian/perubahan prioritas kebutuhan produk vaksin secara global sesuai dengan himbauan dari WHO.
2. Perubahan regulasi dan persyaratan WHO untuk prakualifikasi produk yang semakin ketat.
3. Persyaratan registrasi produk di tiap negara yang semakin meningkat.
4. Perubahan teknologi proses produksi yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan modernisasi proses (Pembangunan fasilitas baru).
5. Kebutuhan vaksin baru untuk program imunisasi masal.

Peluang inovasi dan kolaborasi untuk menghadapi tantangan global tersebut adalah melakukan:

1. Riset produk yang sesuai *trend* dan regulasi,
2. Kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset di dalam negeri maupun luar negeri
3. Peran aktif dalam organisasi internasional seperti WHO, DCVMN, OIC, dan GAVI.

Industri dan bahan farmasi menjadi salah satu sektor andalan yang diprioritaskan karena berperan sebagai penggerak utama perekonomian nasional di masa datang. Pemerintah telah mencanangkan program percepatan pengembangan sektor industri farmasi melalui Permenkes RI No. 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan serta Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah pada tahun 2018, yaitu:

1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
2. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
3. Surveilans, imunisasi, dan karantina kesehatan (Sumber: Perpres No.79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018)

Pasar Pemerintah yang selama ini merupakan *captive market* telah berubah mengingat telah diberlakukannya proses pengadaan vaksin dengan menggunakan *e-catalog*, konsumen (dalam hal ini pemerintah) membeli produk vaksin pada *e-catalog* secara *online*. Hal tersebut akan meningkatkan persaingan sesama produsen vaksin karena hanya produk yang berkualitas dan harga bersaing yang masuk ke *e-catalog*. Di samping itu, masuknya kompetitor lain ke pasar domestik seperti China (memiliki 41 Perusahaan vaksin) dan India serta berlakunya pasar tunggal ASEAN (*Asean free Trade Area*/ AFTA) tahun 2016 dan *World Trade Organization* (WTO) tahun 2020 akan meningkatkan persaingan baik untuk sektor pemerintah maupun swasta.

Hal yang dapat dilakukan untuk pasar domestik adalah melakukan penguatan pasar dengan menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan, khususnya dalam hal ketepatan pengiriman dan kelengkapan/ keragaman jenis vaksin yang dibutuhkan. Untuk produk yang belum bisa diproduksi sendiri akan tetapi dibutuhkan oleh konsumen, Bio Farma akan memanfaatkan peluang tersebut melalui kemitraan dengan produsen lain dimulai dari *trading* kemudian jika pasar menjanjikan akan dilanjutkan ke tahap *fill and finish* (impor *bulk* kemudian Bio Farma akan melakukan formulasi dan *filling*) dan jika pasar sudah memasuki skala ekonomis akan berlanjut ke produksi sendiri.

Selain dari itu, peluang dapat diciptakan dari produk yang telah ada, seperti vaksin DTP, DT, TT, Td, DTP-Hep B-Hib dan *bulk* Difteri, Pertusis, Tetanus, *bulk* dan vaksin Campak, *bulk* Hib, serta *bulk* dan vaksin Polio yang kebutuhannya meningkat menjelang eradikasi penyakit Polio yang diperkirakan tahun 2020. Untuk vaksin Bakteri (Difteri, Pertusis, Tetanus dan BCG), Bio Farma secara bertahap melakukan penyempurnaan fasilitas produksi sesuai tuntutan regulasi sekaligus meningkatkan kapasitas produksi untuk menekan biaya produksi, agar dapat bersaing di pasar global.

Bio Farma telah memulai penelitian dan pengembangan di luar vaksin dan antisera seperti kelompok biosimilar Eritropoitein (EPO) dan Trastuzumab; diagnostika kit Diabetes Millitus (DM) dan insulin; dan berencana untuk

mengembangkan produk kelompok *blood product*. Prospek pasar untuk *blood product* sangat besar terutama untuk albumin dan imunoglobulin yang selama ini dipenuhi oleh produk impor. Dalam rangka kemandirian *blood product* ini, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan No.72/2015 dan Surat Menteri Kesehatan No. TU.02.01/V/0448/2016 Pemerintah telah memberikan mandat kepada Bio Farma untuk melakukan produksi *blood product* secara lokal pada tahun 2018.

Peluang lainnya adalah dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah cukup besar. Pada tahun 2015, JKN telah meliputi 60% dari total populasi di Indonesia dan tahun 2019 ditargetkan akan meliputi seluruh populasi di Indonesia. Bio Farma dapat memasukkan produknya (saat ini vaksin dan antisera) ke dalam program BPJS.

Saat ini, pasar sektor swasta untuk penjualan vaksin imunisasi dasar relatif sulit ditingkatkan mengingat vaksin tersebut sudah dipenuhi oleh Pemerintah, kecuali untuk daerah tertentu dengan adanya Otonomi Daerah (OTDA) dapat menganggarkan kebutuhan vaksin yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, peluang di sektor ini adalah penjualan ke non OTDA melalui *product branded* (produk dengan kemasan khusus/berbeda) hasil produksi sendiri seperti vaksin Flu Bio dan serum serta produk *partnership*, seperti Meningitis, Verorab, Vaxigrip, Varicella, HPV (gardasil) dan Measles Rubella (MR).

Bio Farma pun telah membentuk *geographical marketer matrix* pada bagan organisasi Bio Farma dan membuka beberapa kantor perwakilan pemasaran di Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan penjualan dan lebih mengenalkan produk Bio Farma kepada masyarakat.

Sedangkan untuk sektor ekspor, meskipun saat ini Bio Farma telah berhasil menjual produknya ke lebih dari 132 negara, masih perlu dilakukan pengembangan pasar global diantaranya dengan meningkatkan penjualan melalui agen internasional/agen lokal, pasar pemerintah Negara setempat dan penjualan melalui *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dan *Pan American Health Organization* (PAHO) serta harga jual yang kompetitif.

Bedasrkan Surat Menteri Kesehatan Nomor FO.03.01/ Menkes/ 288/2017, menugaskan Bio Farma untuk meningkatkan produksi vaksin dan mengembangkan produk vaksin baru antara lain IPV, MR HPV, JE dan vaksin Pneumokok dalam rangka ketersediaan vaksin untuk peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan imunisasi di dalam negeri, merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya. Untuk produk yang belum bisa diproduksi sendiri akan tetapi dibutuhkan oleh konsumen, Bio Farma akan memanfaatkan peluang tersebut melalui kemitraan dengan produsen lain dimulai dari *trading* kemudian kalau pasar menjanjikan akan dilanjutkan ke tahap *fill and finish* (impor *bulk* kemudian Bio Farma akan melakukan formulasi dan *filling*) dan kalau pasar sudah memasuki skala ekonomis akan berlanjut ke produksi sendiri (*in house*).

Melihat peluang yang ada di industri farmasi tersebut, dengan kekuatan yang dimiliki, Bio Farma optimis bahwa prospek usaha Bio Farma di masa yang akan datang akan sangat baik. Bio Farma memandang bahwa prospek usaha farmasi pada tahun 2018 akan tetap tumbuh. Bio Farma terus bersinergi untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas bisnis yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung rencana Perusahaan untuk tumbuh lebih baik di tahun 2018.

Bio Farma saat ini telah memiliki beberapa produk yang terkualifikasi oleh *World Health Organization* (WHO), yaitu vaksin Campak, TT vial, DT, DTP, TT Uniject, Hepatitis B, Td, bOPV (tipe 1 dan 3) dan DTP-HB-Hib. Selain memperoleh prekualifikasi (PQ) WHO untuk kualitas produk, Laboratorium Bio Farma juga juga telah memperoleh prekualifikasi WHO. Sistem manajemen mutu Bio Farma telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) yang terintegrasi dengan lingkungan (ISO 14001:2004) dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) – OHSAS 18001: 2007 dari PT Lloy'd Register *Quality Assurance*. Dengan dimilikinya sertifikasi WHO, ISO dan OHSAS serta komitmen tinggi menjadi *green company* dapat menjadikan salah satu kekuatan Bio Fara untuk bersaing dengan Perusahaan lain di pasar global.

Menjelang eradikasi polio pada tahun 2024 dimana penggunaan Vaksin Polio Oral (*Oral Poilo Vaccine*/OPV) akan diberhentikan dan khusus untuk polio tipe 2 sudah

mulai dihentikan oleh WHO pada bulan Mei 2016 dan diganti dengan vaksin IPV (*Inactivated Polio Vaccine),* laju pertumbuhan pendapatan Perusahaan berpotensi mengalami penurunan yang drastis karena sekitar 60% pendapatan Perusahaan diperoleh dari penjualan vaksin polio. Untuk menghadapi kondisi tersebut, Perusahaan melakukan beberapa strategi melalui peningkatan kapasitas produksi atas produk-produk yang telah mendapatkan PQ WHO dan melakukan kemitraan (*partnership*) untuk produk baru baik berupa kerjasama riset dan pengembangan serta pemasaran.

Penelitian dan pengembangan produk dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan *global trend* (WHO dan UNICEF) melalui percepatan *time to market* produk diversifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar dan mengurangi ketergantungan impor. Bio Farma bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset serta industri vaksin di dalam dan luar negeri supaya dapat mempercepat ketersediaan produk di pasar. Saat ini sedang mengintensifkan pengembangan produk baru antara lain yaitu vaksin s-IPV, vaksin Rotavirus, vaksin Hep B, vaksin *Typhoid konjugat,* vaksin Flu, vaksin Measles Rubella (MR) dan vaksin Pneumokok. Selain itu, Perusahaan sudah mulai penelitian dan pengembangan di luar vaksin dan antisera seperti kelompok biosimilar Eritropoitein (EPO) dan Trastuzumab; diagnostika kit Diabetes Millitus (DM); dan berencana untuk mengembangkan produk kelompok *blood products*. Prospek pasar untuk *blood product* sangat besar terutama untuk albumin dan imunoglobulin yang selama ini dipenuhi oleh produk impor.

Dalam rangka kemandirian *blood product* ini, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan No.72/2015 dan Surat Menteri Kesehatan No. TU.02.01/V/0448/2016 Pemerintah telah memberikan mandat kepada Bio Farma untuk melakukan produksi *blood product* secara lokal pada tahun 2018, namun target tersebut bergeser satu tahun karena kendala regulasi. Untuk memenuhi kebutuhan pasar terhadap produk baru dan produk *Life Science* lainnya, Perusahaan mempunyai keterbatasan kapasitas fasilitas litbang dan produksi serta kapabilitas sumber daya manusia.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, maka rencana penelitian dan pengembangan produk baru yang selama ini dilakukan Bio Farma sudah sejalan dengan Inpres karena bertujuan untuk mempercepat kemandirian penyediaan bahan baku vaksin yang selama ini masih impor dalam rangka menjamin ketersediaan vaksin untuk kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Perusahaan, kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting. Perusahaan melakukan pengelolaan SDM dengan paradigma *"Human Capital Management"* yang memandang SDM sebagai aset yang perlu terus ditumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan dan perilakunya agar nilainya terus bertambah melalui program pengembangan yang terintegrasi yaitu melalui *performance management system, reward management system, talent management system* dan *knowledge management system.* Diharapkan dengan memiliki karyawan yang kompeten di bidangnya dapat dilakukan *international placement* dan siap untuk melakukan transformasi bisnis Bio Farma ke depan yang tantangannya semakin besar termasuk rencana Kementerian BUMN untuk melakukan *holding* BUMN Farmasi.

Sesuai dengan arahan pemegang saham agar menerapkan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) dan *Risk Management System* yang berbasiskan teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta dapat mengelola perusahaan dengan baik, Bio Farma telah menindaklanjuti dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) termasuk memperkuat *Enterprise Risk Management* (ERM). Atas implementasi GCG dan kinerja unggul, telah dilakukan *assessment* secara berkala oleh *assesor* eksternal.

Pada tahun 2018, selain penggunaan aplikasi ERP untuk laporan keuangan, aplikasi CRM (*Customer Relationship Management*) untuk pemasaran dan e-QMS (*Qualitty Management System)* untuk kualitas produk juga Perusahaan menggunakan aplikasi MRP (*Material Resource Planning*) yang akan mengintegrasikan rencana kebutuhan bahan baku sampai dengan produk jadi sehingga pengendaliannya persediaan menjadi lebih baik, akurasi dan integrasi data antar unit kerja lebih baik, serta kecepatan proses bisnis akan meningkat. Peranan sistem informasi yang terintegrasi tersebut akan sangat membantu Perusahaan dalam memperlancar aktivitas dan efisiensi proses bisnis serta memenuhi persyaratan regulasi, termasuk dalam pelaksanaan GCG.

Bio Farma memiliki peran yang sangat strategis di bidang pengembangan dan produksi vaksin baik di tingkat lokal maupun internasional. Di tingkat lokal merupakan satu-satunya produsen yang memasok kebutuhan vaksin EPI untuk kebutuhan masyarakat Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI, sehingga suplai vaksin secara nasional dapat diamankan. Perusahaan merupakan salah satu anggota Dewan Riset Nasional yang salah satu tugasnya mempercepat pengembangan vaksin di Indonesia sehingga kemandirian bangsa di bidang vaksin dapat segera terwujud.

Di tingkat internasional, Perusahaan memiliki peran yang strategis sebagai *global player* dalam memasok kebutuhan vaksin dunia melalui WHO/UNICEF, karena merupakan salah satu produsen vaksin yang telah lulus prakualifikasi WHO. Di OIC (*Organization of Islamic Countries*) peran strategis Perusahaan semakin diakui, yang ditandai dengan banyaknya tawaran dari Negara-negara Islam untuk melakukan kerjasama di bidang pengembangan dan produksi vaksin diantaranya dari Negara Iran dan Arab Saudi. Peran strategis ini, merupakan salah satu kekuatan untuk mendapatkan hibah keperluan pengembangan dan penelitian dari lembaga internasional.

STRATEGI BIO FARMA KE DEPAN

Untuk mewujudkan transformasi bisnis dari produsen vaksin dan antisera menjadi produsen produk *Life Science* dan strategi diversifikasi produk sebagaimana direncanakan dalam RJPP tahun 2018-2022, maka di dalam tahun 2018, Bio Farma merencanakan strategi ke depan untuk pengembangan bisnis Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengembangkan Unit Bisnis Imunisasi dan Klinik menjadi Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan preventif, klinik dan pemasaran, sinergi dengan salah satu BUMN Farmasi;
2. Membentuk Unit Bisnis *Market Access and Delivery* untuk Divisi Pemasaran, Divisi *Regulatory Affairs,* Divisi Penjualan Dalam Negeri dan Divisi Penjualan Ekspor agar dapat memaksimalkan sinergi pemasaran, penjualan dan jaringan distribusi produk sendiri maupun produk *partnership*.
3. Menjajagi pembentukan Anak Perusahaan produksi vial dan ampul.
4. Menjajagi pembentukan Unit Bisnis Sera dan Diagnostik dan *Animal Breeding*.
5. Menjajagi pembentukan Anak Perusahaan *Blood Product,* yang diawali dengan *toll manufactoring* dengan pemilik teknologi dan melakukan perjanjian komersial dengan institusi terkait.
6. Menjajagi pembentukan *Joint Venture MR Vaccine*.
7. Menjajagi pembentukan *Joint Venture Conjugated Meningitis Vaccine*.
8. Berdasarkan analis eksternal dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2018 – 2022, untuk menghadapi peluang dan ancaman dari pihak eksternal, strategi Bio Farma adalah mempertahankan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan melalui percepatan *time to market* produk diversifikasi (vaksin dan antisera, *blood products*, dan *biosimilars*).

BIO FARMA DIMATA LOKAL DAN GLOBAL

MELINDA GATES DORONG INDONESIA PRODUKSI VAKSIN

Melinda Gates, salah satu pendiri yayasan Bill and Melinda Gates Foundation mendorong Indonesia untuk bisa memproduksi vaksin sendiri. Melinda mendorong Indonesia untuk bisa memproduksi sendiri vaksin-vaksin melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bio Farma. Gates Foundation yang concern soal kesehatan mereka ingin bantu Indonesia lewat di research BUMN melalui Bio Farma.

Melinda, berharap Indonesia bisa memproduksi vaksin-vaksin sendiri baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional. Sehingga, dominasi produk vaksin tidak hanya oleh negara-negara di bagian Barat seperti Eropa tetapi juga di Asia. Melinda menilai, Indonesia memiliki kapastias yang cukup untuk bisa memproduksi sendiri vaksin. Melalui cara ini Indonesia diharapkan menjadi salah satu pemain di dunia yang ikut memproduksi vaksin.

Menurut Melinda, vaksin polio dan pnunomonia ini penting karena Indonesia saat ini tidak lagi dianggap sebagai negara dengan *low income*. Akibatnya, Indonesia harus membeli vaksin dengan harga yang lebih tinggi. Melalui Gates Foundation, Melinda bersedia membantu supaya Indonesia bisa mendapatkan vaksin lebih murah. Sehingga selama lima tahun ke depan, sembari menunggu Bio Farma mampu memproduksi vaksin sendiri, Indonesia masih bisa mendapatkan vaksin lebih murah menjadi US$ 3 dolar per dosis dari harga awal US$

18 dolar per dosis. Diharapkan (selama) lima tahun ke depan Bio Farma (sudah bisa memproduksi) sehingga Indonesia bisa dapat harga vaksin yang lebih baik.

PERUSAHAAN DI BALIK MILIARAN DOLAR BISNIS VAKSIN DUNIA

Dunia yang kian mengglobal membuat ancaman penyebaran penyakit antar benua turut meningkat. Vaksinasi dianggap sebagai metode ampuh untuk mencegah merebaknya penyakit sehingga produktivitas tetap terjaga dan biaya pengobatan dapat ditekan. Bisnis vaksin pun akan segera menjadi sumber utama keuntungan bagi perusahaan farmasi terbesar di dunia.

Technavio, salah satu peneliti teknologi dan konsultan bisnis global terkemuka, memprediksi bahwa pendapatan pelbagai perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin akan mencapai sekitar 61 miliar dolar AS pada 2020. Sementara nilai pasar vaksin dunia hari ini ditaksir mencapai 24 miliar dolar AS. Laporan berjudul "Global Human Vaccine Market 2016-2022" memberikan analisis mendalam tentang potensi pendapatan dan tren pasar yang muncul secara global. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa bisnis vaksin secara global meningkat didorong oleh inovasi dan pengenalan produk baru dalam dunia kesehatan.

Peningkatan prevalensi berbagai penyakit menular seperti difteri, influenza, hepatitis, penyakit pneumokokus (menyerang THT), dan penyakit meningokokus (menginfeksi organ dalam) telah mendorong peningkatan yang signifikan dalam penggunaan vaksin di seluruh dunia. Hal itu karena kesadaran untuk vaksinasi sudah merata; mulai bayi, anak, orang dewasa, hingga orang lanjut usia. Di pasar global, pangsa pasar bisnis vaksin didominasi oleh perusahaan-perusahaan farmasi dari beberapa negara maju.

Data Statista menghimpun, perusahaan farmasi asal Inggris, GlaxoSmithKline (GSK) tercatat sebagai perusahaan yang menguasai sekitar 23 persen pasar vaksin dunia. Tahun lalu, perusahaan tersebut menghimpun pendapatan hingga 7,2 miliar dolar AS (Rp107 triliun). GSK telah menjual lebih dari 2 juta vaksin setiap hari untuk masyarakat di 170 negara. Pada 2014, bisnis ini menyumbang 3,2 miliar pound sterling (Rp62 triliun) atau 14 persen dari total pendapatan GSK.

Di bawah dominasi GSK, ada nama Merck & Co -- sebuah perusahaan farmasi asal Amerika Serikat (AS). Perusahaan tersebut berhasil mengantongi 6,54 miliar dolar AS (Rp97,8 triliun) dari penjualan vaksin di seluruh dunia dengan pangsa pasar 18 persen. Perusahaan ini awalnya merupakan anak perusahaan dari perusahaan Jerman, Merck KGaA. Sama seperti aset Jerman lainnya di AS, Merck & Co. adalah perusahaan pampasan Perang Dunia I 1917 dan kemudian dibentuk badan usaha mandiri yang berdiri bebas. Perusahaan ini sekarang masuk dalam daftar lima perusahaan *pharmaceutical* raksasa dunia, baik dalam modal dan pemasukan.

Posisi ketiga ditempati oleh Sanofi S.SA - sebuah perusahaan farmasi asal Perancis. Sanofi menguasai sekitar 17 persen pangsa pasar vaksin di seluruh dunia. Sanofi secara global mempekerjakan lebih dari 110.000 karyawan di 100 negara. Dengan anggaran riset lebih lebih dari 4,4 miliar euro atau setara Rp52,2 triliun pada 2010, Sanofi Group menjadi sebagai satu dari tiga pelaku riset terbesar di kalangan industri farmasi dunia.

Selanjutnya Pfizer, perusahaan farmasi asal AS yang menguasai 13 persen bisnis vaksin di seluruh dunia dengan pendapatan 6 miliar dolar AS (Rp89,9 triliun) pada 2017. Namun, tidak ada data pasti penjualan vaksin di Indonesia meski perusahaan yang memproduksi dan mengimpor vaksin tidaklah banyak.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang diakui sebagai pemasok vaksin di kawasan ini oleh badan kesehatan dunia atau WHO. Selain itu, sebanyak 140 negara telah mengimpor vaksin dari Indonesia. WHO juga mencatat Indonesia menjadi salah satu negara yang mendominasi pasokan vaksin dunia bersama dengan India, Belgia, Perancis, dan Korea Selatan. Untuk pemasok vaksin ke negara muslim, Indonesia adalah produsen besar bersama Tiongkok dan India.

Perusahaan farmasi milik negara PT Bio Farma (Persero) tercatat sebagai satu-satunya produsen vaksin dan antisera di Indonesia. Bio Farma memiliki kapasitas produksi sebesar 3,2 miliar dosis yang terdiri dari 14 jenis vaksin, terbesar di Asia Tenggara. Untuk beberapa produk vaksin imunisasi dasar, perseroan menyuplai ke UNICEF dan melalui kerjasama bilateral dengan negara lain. Bio Farma menggunakannya untuk masuk ke organisasi global dalam memasarkan produknya ke negara lain, terutama negara muslim anggota Organisasi Kerja Sama

Islam (OKI) dan negara berkembang. Berbagai produk vaksin Bio Farma antara lain vaksin Polio, Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B, dan Haemophilus Influenzae Tipe B.

Di Indonesia, penjualan vaksin itu terdistribusi melalui jalur pemerintah dan swasta. Untuk penjualan di jalur pemerintah, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan memastikan vaksin yang beredar asli. Vaksin untuk bayi hingga anak usia SD itu diberikan gratis melalui sejumlah fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas dan jejaringnya. Namun, vaksin yang diberikan pemerintah itu terbatas, tidak untuk semua penyakit. Vaksin yang diberikan dalam bentuk vaksin tunggal atau rekombinan itu setidaknya mampu melindungi untuk delapan penyakit: hepatitis B, tuberkulosis, difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus, haemofilus influenza tipe B (Hib), polio, dan campak.

Untuk tahun anggaran 2017; jenis vaksin yang disediakan gratis pemerintah adalah vaksin hepatitis B, BCG *(Bacillus Calmette Guerin)*, DPT-HB-Hib *(Diphtheria Pertusis Tetanus-Hepatitis B-Haemophilus Influenzae type B),* campak, serta vaksin polio dalam bentuk tetes (oral polio vaccine/OPV) dan *inactivated polio vaccine* (IPV). Semua vaksin itu diberikan gratis pada bayi dan anak bawah tiga tahun. Sementara untuk anak usia sekolah hingga kelas III SD diberikan vaksin campak, vaksin DT (Diphtheria Tetanus), dan Td *(Tetanus diphtheria)*.

INI MENGAPA TAK BANYAK YANG INGIN TERJUN KE BISNIS VAKSIN

Sebagai satu-satunya produsen vaksin di Indonesia, Bio Farma tidak menutup kemungkinan apabila ada perusahaan farmasi lain yang ingin melakukan pengembangan vaksin. Namun, hal tersebut menurut mereka bukanlah hal yang mudah. Bio Farma tidak ingin memonopoli pembuatan vaksin. Bio Farma mempersilakan siapa pun untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan vaksin. Tetapi karakteristik vaksin dari regulasinya cukup ketat. Kemudian *capital investment*-nya pun cukup tinggi. Kemudian untuk kompetensi karyawannya pun cukup jarang.

Saat ini bidang vaksinologi di universitas-universitas di Indonesia belumlah ada, sehingga dari segi sumber daya manusia-nya tidak mudah. Dari kompleksitas, fungsi sosialnya pun tinggi. Vaksin untuk imunisasi dasar di daerah-daerah saat ini gratis. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan imunisasi nasional, pihak Bio Farma wajib memenuhi permintaan pemerintah.

Bio Farma tidak menutup apabila ada pihak lain yang ingin melakukan bisnis vaksin. Namun, rumitnya berbagai faktor menjadi alasan banyak yang tidak mau terjun ke bisnis vaksin. Bio Farma sendiri merupakan salah satu dari sekitar 30 produsen vaksin yang sudah mendapatkan kualifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Bio Farma merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dilihat dari jenis produk dan kapasitas, serta menjadi rujukan centre of excellence bagi produsen vaksin di negara Islam.

MAROKO DAN TUNISIA BELAJAR PENGEMBANGAN VAKSIN DARI BIO FARMA

Indonesia menjalin kerja sama dengan Maroko dan Tunisia dalam pengembangan vaksin. Penandatanganan kerja sama berlangsung di Kementerian PPN/Bappenas. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari komitmen kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara anggota Islamic Development Bank (IDB) serta Organisasi Konferensi Islam (Organization Islamic Conference/OIC).

Bio Farma yang bergerak di bidang pembuatan vaksin sudah ditetapkan sebagai salah satu leading institution dalam pembuatan vaksin untuk negara-negara OIC. Kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara IDB dan OIC akan terus berlanjut. Selain pengembangan vaksin dengan Maroko dan Tunisia, Indonesia juga aktif berkerja sama dengan negara lain, pada bidang pengambang yang sesuai kebutuhan negara yang bersangkutan. Paling tidak ada 13 sektor yang dapat dikerjasamakan. Kerjasama ini terbuka dan di tandatangan dengan IDB & anggota OIC. Kerjasama ini terbuka dan sesuai kebutuhan. Beberapa negara di Afrika misalnya lebih butuh ke pertanian, kita bisa perkuat berbagai bidang.

BIO FARMA BANTU DUNIA BERANTAS PENYAKIT DENGAN TRANSFER TEKNOLOGI PEMBUATAN VAKSIN

Posisi Indonesia yang saat ini sudah masuk kedalam negara dengan status middle income country dan juga salah satu anggota negara G-20, menciptakan dorongan untuk membantu negara lain khususnya negara berkembang. Selain hal itu, adanya komitmen dan semangat solidaritas dari negara Asia –Afrika, menjadikan landasan lahirnya kerjasama teknik berupa transfer teknologi dalam segala bidang salah satunya dalam bidang kesehatan. Kerjasama dalam bidang kesehatan ini, ditandai dengan adanya transfer teknologi

pembuatan vaksin dari Bio Farma, kepada negra – negara yang bearada di dalam naungan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Kementerian Kesehatan sebagai pengguna dari produk yang dihasilkan oleh Bio Farma, baik untuk Program Imunisasi Wajib (usia 0 – 5 tahun) maupun Program Imunisasi Non Wajib seperti vaksin menigitis dan vaksin influenza. Ketersedian vaksin menjadi perhatian khusus Kementerian Kesehatan karena sifat dari vaksin untuk pencegahan. Oleh karenanya Kemenkes meminta Bio Farma untuk dapat memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri setelah itu dapat diekspor "Alhamdulilah untuk kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi dari Bio Farma terutama untuk program imunisasi wajib, oleh karenanya Bio Farma dijadikan centre of excellence untuk produk vaksin yang inovatif.

Sementara itu, Dr Martin Eisenhawer peneliti senior dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) regional Asia Tenggara (SEARO), mengatakan Bio Farma merupakan salah satu supllier utama untuk beberapa jenis vaksin yang sudah menerima PQ WHO untuk pasar dunia, khususnya untuk vaksin polio.

Bio Farma turut membantu usaha dunia untuk memberantas penyakit polio, dan beberapa penyakit lainnya. Dan selain dengan Bio Farma, WHO pun bekerjasama dengan BPOM dalam hal melakukan uji klinis dan beberapa aktivitas lainnya. WHO juga bekerja keras untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SGDs) terutama dalam hal pencapaian kesehatan termasuk vaksin. Dan workshop ini membahas mengenai manajemen produksi vaksin yang merupakan alat yang paling cost efficient untuk pencegahan penyakit menulardan mengurangi angka kematian bayi dan balita dan ibu melahirkan.

BIO FARMA, SANG PETARUNG YANG TEMBUS 140 NEGARA

Bio Farma sebagai salah satu produsen vaksin berperan penting di kancah internasional. Produksi vaksin Bio Farma telah menjangkau lebih dari 140 negara di dunia, termasuk memasok 2/3 kebutuhan vaksin polio dunia.

Produk Bio Farma dikenal ramah lingkungan, karena telah melalui uji riset dan pengalaman yang panjang. Tidak mengherankan, saat ini 12 produk Bio Farma yang telah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Di level nasional, produk Bio Farma telah memenuhi standar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dengan kapasitas produksi lebih dari 3,2 miliar dosis per tahun, Bio Farma telah memenuhi kebutuhan vaksin dunia melalui WHO dan UNICEF. Kini, Bio Farma memiliki vaksin terbaru, yaitu *Pentabio Five in One*, yang memiliki lima antigen dalam satu kemasan. Terobosan ini sangat membantu, selain mengurangi jumlah suntikan imunisasi, juga mengurangi sampah biologi.

Strategi Bio Farma untuk meningkatkan eskpor di tengah krisis global saat ini memang tidaklah mudah bagi industri farmasi, khususnya industri vaksin, untuk bisa bertahan dan meningkatkan ekspor. Karena, sangat ketatnya persaingan di industri vaksin serta berlakunya regulasi baru WHO. Munculnya berbagai macam penyakit yang tidak secepat penemuan vaksin baru menjadi tantangan Bio Farma. Juga, munculnya produsen baru dengan kualifikasi WHO dan harga produk yang lebih terjangkau semakin menambah tingkat persaingan industri vaksin. Diperlukan strategi khusus untuk bisa bertahan di tengah krisis global. Strategi tersebut yaitu mempertahankan prakualifikasi WHO, memenuhi regulasi nasional dan internasional, serta melakukan registrasi di negara-negara tujuan ekspor.

Selain itu, Bio Farma melakukan ekspansi kapasitas, fasilitas, dan kapabilitas untuk produk baru, baik vaksin maupun *Life Science*, serta menjajaki peluang ekspor untuk *Bulk* (*Intermediate Product Vaccine*). Bio Farma juga menempatkan para ahlinya untuk aktif diberbagai lembaga internasional seperti *Developing Countries Vaccine Manufacturers Network*, Organisasi Kerjasama Islam, *Global Alliance Vaccine Initiative*, dan *Vaccine Manufacturers Group*. Bio Farma pun melakukan transfer teknologi dengan berbagai partner di dalam dan luar negeri untuk percepatan riset vaksin. Bio Farma juga membentuk Forum Riset Vaksin & Life Science Nasional, bersinergi dengan lembaga riset, universitas, pemerintah, dan industri agar riset lebih fokus dan (ada) percepatan riset. Dengan berbagai strategi tersebut, Bio Farma mampu bertahan dan masih menjadikan Indonesia sebagai negara utama penyedia vaksin bagi negara-negara berkembang bersama China dan India, serta terus menambah pasar baru negara tujuan ekspor.

Penjualan ekspor Bio Farma dari setiap produk yang sudah terkualifikasi WHO. Perkembangan penjualan Bio Farma sampai sekarang masih stabil grafiknya. Pada tahun 2017 regulasi internasional WHO sudah masuk

dalam tahap eradikasi polio. Jadi, ada satu tipe vaksin polio Bio Farma yang tidak boleh lagi dijual, yaitu tipe 1 yang sudah masuk eradikasi, sisanya ada tipe 2 dan 3. Meskipun ada satu tipe yang sudah dieradikasi, Bio Farma masih menyuplai dua tipe vaksin lagi, yaitu tipe 2 dan 3. Namun, satu tipe vaksin yang terkena eradikasi pun tidak boleh serta- merta dihapus oleh WHO, hanya di-*skip* dan virusnya tetap disimpan. Nanti suatu saat jika ada lagi kasus/penyakitnya, vaksin tesebut harus disuplai lagi.

Di pasar lokal penjualan produk Bio Farma mengalami peningkatan. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan berbagai inovasi unggulan untuk menghadapi tantangan ekspor. Inovasinya itu di antaranya inovasi untuk antisipasi produk palsu. Seperti inovasi yang bernama GS1 atau QR *Code Monitor*, yaitu data *batch* produksi yang bisa sampai ke tangan konsumen dan nomor *batch* tersebut bisa dilacak sampai tingkat konsumen. Kemudian, ada Uniject yang masih menjadi produk andalan Bio Farma. Produk ini untuk sekali suntik yang sudah lengkap dengan jarum suntiknya. Lalu, ada vaksin Pentabio, yang mengandung lima komponen vaksin dalam satu kali suntik. Untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas produksi, Bio Farma akan melakukan perluasan kapasitas dan pengembangan produk baru.

TINJAUAN INDUSTRI FARMASI, VAKSIN & *LIFE SCIENCE*

BIO FARMA: INDONESIA BISA MAJU DALAM INDUSTRI *LIFE SCIENCE*

Dalam diskusi *Tantangan dan Kemandirian Biotech Masa Depan di Indonesia* antara Bio Farma (Persero) dengan Forum Pemred, ada fakta yang menarik Di satu sisi, Indonesia mempunyai posisi geografis beriklim tropis dengan sumber daya genetic yang paling besar. Di sisi lain, mempunyai jumlah penduduk yang banyak dengan berbagai penyakit *stroke*, flu, kanker, influenza, kanker, dan lain-lain.

Jadi, Indonesia mempunyai modal besar untuk mengembangkan *Life Science*. Indonesia berpotensi memiliki industri *Life Science* sendiri. Sebab, dari peta industri farmasi nasional dapat dilihat kalau Indonesia memiliki perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak dalam bidang *biopharmaceutical*, vaksin, natural, dan herbal.

Bio Farma sendiri, yang sudah berusia 128 tahun, memiliki komitmen untuk terus berinovasi dan bertransformasi menjadi perusahaan *Life Science*. Beberapa produk *Life Science* Bio Farma sudah masuk ke dalam *pipeline* produk Bio Farma.

Bio Farma ingin percepatan pengembangan *Life Science* agar bisa mewujudkan kemandirian industri farmasi dalam pengembangan produk, bahan baku, vaksin, produk bioteknologi, dan alat kesehatan. Merawat perusahaan untuk melewati usia 100 tahun, tentu tidak mudah. Bagi perusahaan seperti Bio Farma, harus selalu menemukan produk-produk baru agar tetap bisa bertahan di industri ini. Bio Farma juga selalu membutuhkan sumber daya manusia yang kuat. Diperlukan riset dan inovasi yang didukung penuh oleh pemerintah mengingat sebagian besar teknologi di bidang *Life Science* di Indonesia didapat melalui transfer teknologi dari negara-negara maju.

Yang pasti, Bio Farma akan menjalankan perintah Nawacita, yakni "Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Hal ini antara lain diperlihatkan dengan ekspor vaksin Bio Farma ke lebih dari 140 negara, di mana lebih dari 40 negara merupakan Negara Islam anggota OKI. Sudah banyak negara-negara Islam yang ingin belajar mengembangkan vaksin ke Indonesia.

KESIAPAN BIO FARMA DI MASA DEPAN LEWAT *LIFE SCIENCE*

Life Science akan segera menjadi era baru setelah masuknya penetrasi digital dan teknologi.

Hal itu diyakini oleh industri bio teknologi untuk lebih maju lagi menciptakan inovasi terbaru terkait dengan *Life Science*. Pengembangan berbasis *Life Science* memberikan kesempatan mewujudkan sebuah penemuan bersejarah untuk umat manusia.

Bio Farma menjadi salah satu perusahaan BUMN di bidang bioteknologi yang telah 128 tahun meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tindakan preventif melalui vaksinasi dan antisera yang Bio Farma ciptakan memberikan persiapan untuk generasi yang sehat dan produktif di masa depan. Bio Farma mampu menghadapi *bioeconomy* dengan pengembangan bisnis mereka untuk senantiasa berinovasi dalam memproduksi vaksinisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Indonesia begitu potensial masuk sebagai industri *Life Science* sendiri dengan adanya beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang *biopharmaceutical*, vaksin, herbal, dan chemical. Hal ini di dukung dengan Inpres No. 6 Tahun 2016 tentang percepatan pengembangan biofarmasetikal, termasuk penguasaan teknologi dan inovasi bidang farmasi dan alat kesehatan. Bio Farma akan bertransformasi untuk tidak hanya menghasilkan produk vaksinasi saja, namun juga untuk produk yang berbasis Life Science. Kedepan selain vaksinasi serum juga akan mengembangkan diagnostik, produk turunan darah, Biosimilar akan menjadi produk tulang punggung Bio Farma.

Bergerak di bidang kesehatan secara berkelanjutan, Bio Farma wujudkan dengan melakukan pengembangan produk *Life Science* dalam produk *pipeline*-nya, salah satunya *Erytopoetin* (EPO) generasi kedua dan Diabetes Melitus Diagnostik Kit. Semuanya dalam tahap penelitian dan akan siap diluncurkan dalam kedepannya. Percepatan ke arah *Life Science* juga untuk mewujudkan kemandirian industri farmasi dalam pengembangan produk, bahan baku, vaksin, bioteknologi dan alat kesehatan dengan penguasaan teknologi sebagai faktor penentu. Penguasaan teknologi ini diwujudkan dengan transfer teknologi dengan negara-negara maju. Diharapkan produk-produk *Life Science* Bio Farma dapat bersaing dengan produk lainnya dari negara maju.

Produk-produk *Life Science* yang Bio Farma kembangkan sejalan dengan Program Nawacita Pemerintah. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Bio Farma menjadi satu-satunya perusahaan vaksin dan biopharmaceutical di Indonesia. Menuju *bioeconomy* tahun 2030, Bio Farma senantiasa mengembangkan *Life Science industry*. Bio Farma juga melakukan sinergi dengan berbagai universitas untuk mendapatkan produk terbaru berbasis riset yang bisa di kembangkan lebih lanjut untuk kesehatan masyarakat.

Bio Farma bertujuan untuk *dedicated to improve quality of life* untuk masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Tercatat lebih dari 140 negara telah mendapatkan suplai vaksin dari Bio Farma, khususnya negara-negara Islam. Bio Farma juga senantiasa menjalin kolaborasi untuk kemandirian nasional terkait dengan produksi berbasis vaksin dan *biopharmaceutical* di Indonesia.

INDUSTRI VAKSIN NEGARA BERKEMBANG

Adapun perkembangan belanja kesehatan Indonesia, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) masuk pada jajaran yang terendah yaitu sebesar 3,6% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2016. Sebagai perbandingan, belanja kesehatan Vietnam 7,1 % dari PDB dan Filipina 4,7% dari PDB. Untuk belanja pemerintah, Indonesia tercatat merupakan yang terendah ketiga diantara negara lain yang berada pada level yang sama, dengan proporsi 41,4 % dari APBN, jauh dari Thailand yang sudah menapai 86%. Menurut data dari Kementerian Perindustrian menunjukan bahwa Industri Farmasi, Kimia dan obat tradisional tumbuh 5,46%, sedangkan menurut *International Pharmaceutical Manufacturers Group* (IPMG) mencatat pada 2016 industri farmasi tumbuh pada kisaran 7,49%.

Adanya kepedulian untuk berkontribusi kepada masyarakat dunia ini dilatarbelakangi banyaknya permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang. Ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Pertama, kemandirian vaksin dan ketidakmampuan industri vaksin negara negara berkembang dan negara Islam berkompetisi dengan negara maju. Tidak banyak negara berkembang yang mampu membangun kemandirian vaksin. Sampai saat ni, mereka masih bergantung pada industri vaksin di negara-negara maju.

Kalaupun negara-negara berkembang dan Islam memiliki fasilitas industri vaksin, tetapi mereka belum mampu memenuhi standar global sehingga belum mampu masuk dan berkompetisi di pasar internasional.

Saat ini, jumlah negara berkembang yang memiliki industri vaksin hanya 17 dan 7 di kalangan negara muslim. Mereka menghasilkan 200 produk vaksin, tetapi hanya sekitar 30 yang memiliki prekualifikasi WHO.

Dengan populasi penduduknya mencapai 80% dari total warga dunia, tetapi industri vaksin negara berkembang tidak mampu mencukupinya. Justru sebaliknya, hampir 80% pangsa pasar vaksin global dikuasai oleh negara maju.

Meskipun ukuran pasar produk vaksin hanya 2,3% dari total industri farmasi global, tetapi pertumbuhannya cukup spektakuler yakni 10-15% per tahun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan farmasi yang hanya 5-7% per tahun. Tentu saja, bagi mereka ini sangat menggiurkan.

Permasalahan dan tantangan tersebut mendorong kami untuk berinisiatif mengambil peran lebih besar. Dengan *world-class capability* yang dimiliki, Bio Farma mencoba lebih aktif membantu produsen vaksin di negara negara-negara berkembang dan Islam untuk lebih mandiri dan mampu berkompetisi di tingkat global.

Sebagai produsen vaksin dari negara berkembang yang diakui dunia karena kualitas dan ekspertisnya, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dan *center of excellence* industri vaksin bagi negara-negara berkembang dan Islam.

Semenjak tahun 2011, lebih dari 70% kebutuhan vaksin global hanya dipenuhi oleh 3 negara yaitu China, India dan Indonesia. Bio Farma sebagai satu-satunya produsen Vaksin di Indonesia tentunya berkontribusi dalam pemenuhan tersebut, sesuai data SESRIC bahwa Produsen Vaksin Indonesia memiliki kinerja bintang, walaupun industri vaksin merupakan industri yang kompleks serta memiliki tingkat pengembalian investasi yang lama dan tingkat risiko yang besar dalam riset dan pengembangan produk. Peningkatan kebutuhan vaksin tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah produsen vaksin, sejak tahun 1990 produsen vaksin yang berjumlah 63 menjadi 44 pada tahun 2010. Negara berkembang menjadi produsen vaksin utama dibandingkan negara lainnya.

BIO FARMA SASAR EKSPOR KE NEGARA BERKEMBANG

Bio Farma terus menggenjot penjualan ekspor ke beberapa negara. Hingga akhir tahun Bio Farma menyuplai kebutuhan vaksin polio, campak, TT, DTP, TD untuk negara lainnya. Semua jenis vaksin tersebut diekspor ke negara-negara berkembang seperti Pakistan, Afghanistan, Sudan, Maroko dan lainnya. Nilai ekspor diperkirakan akan mencapai US$ 71,6 juta sampai akhir tahun 2018. Peningkatan ekspor ini tidak hanya dalam bentuk produk akhir, tapi juga dalam bentuk barang setengah jadi.

Produk setengah jadi berbentuk konsentrat/*bulk* tersebut akan menjadi produk bernilai tambah di negara lainnya lewat proses formulasi dan menjadi produk akhir di negara tujuan ekspor. Khususnya untuk negara-negara berkembang dan negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Untuk melebarkan penetrasi pasar vaksin di tingkat global, Bio Farma memanfaatkan kunjungan yang bersifat diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan KBRI di negara tujuan agar lebih memperkenalkan produk Bio Farma. Supaya memperoleh pasar atau *customer* baru. Selain itu, Bio Farma aktif mengikuti berbagai *event* internasional, seperti *business forum*, misi dagang dan pameran. Serta berpartisipasi dalam beberapa organisasi riset di bidang biopharmaceutical.

Potensi ekspor baik dalam bentuk barang jadi maupun *bulk* masih terbuka lebar. Hal ini seiring dengan ditunjuknya Indonesia sebagai *centre of excellence* (CoE) di antara negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam bidang bioteknologi dan vaksin. Dengan menjadi CoE, Bio Farma dijadikan rujukan untuk pembuatan vaksin yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Sebagai tahap awal, Bio Farma akan melakukan transfer teknologi *down stream*, dengan mengekspor *bulk* untuk kemudian dilakukan formulasi di negara tujuan.

ASPEK PEMASARAN

Pencapaian kinerja operasional yang maksimal diperoleh melalui pemasaran yang terintegrasi. Strategi pemasaran yang efektif dan inovatif memantapkan posisi terbaik Bio Farma dalam menghadapi persaingan yang ketat dan kondisi ekonomi yang tidak menentu.

STRATEGI PEMASARAN BIO FARMA

Untuk mendukung pencapaian target penjualan, Bio Farma menjalankan strategi sebagai berikut:

PENJUALAN DALAM NEGERI

Strategi Pemasaran Bio Farma terdiri dari :

1. Pengembangan pasar domestic dan ekspor
2. Pricing strategy
3. Diversifikasi produk dan layanan
4. Meningkatkan kepuasan pelanggan
5. Meningkatkan brand image layanan

Untuk Pemasaran & Penjualan Dalam Negeri beberapa program yang dilakukan adalah :

a. Memprioritaskan penyediaan produk untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dan mendukung program imunisasi nasional.
b. Untuk meningkatkan market share di sektor swasta, dilakukan beberapa upaya antara lain penambahan jumlah marketer dan penyempurnaan sistem marketing yang diterapkan, sinergi dengan berbagai organisasi profesi (IDI, IDAI, PAPDI), sinergi dengan berbagai BUMN, serta koordinasi rutin dengan distributor.
c. Untuk memperluas jangkauan distribusi produk Bio Farma, dilakukan penambahan distributor yang memiliki cakupan secara nasional.
d. Untuk meningkatkan daya saing di pasar, dilakukan penetapan harga yang kompetitif
e. Bio Farma menambah lini produk untuk dipasarkan di pasar domestik, yaitu vaksin Varicella dan IPV.
f. Sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, Bio Farma menjamin kontinuitas ketersediaan produk dengan mutu yang memenuhi persyaratan
g. Dalam upaya untuk meningkatkan brand image produk, dilakukan berbagai kegiatan promosi.

PENJUALAN EKSPOR & PENGEMBANGAN BISNIS

1. Mempertahankan pasar yang sudah ada dan memperluas pasar baru untuk meningkatkan pemasaran produk yang sudah dikenal maupun produk baru.
2. Mengikuti tender-tender vaksin yang diselenggarakan oleh suatu negara maupun organisasi internasional.
3. Penambahan lini produk yang dipasarkan di pasar ekspor yaitu *bulk* Campak.
4. Ekspor perdana Vaksin Pentabio 10 ds melalui Institusi Internasional (UNICEF).
5. Pertemuan langsung (*face to face meeting*) dengan *customer*, agar terjaga hubungan baik dengan *customer* dan memperoleh informasi terkini terkait kebutuhan vaksin maupun update informasi kebijakan global.
6. Peningkatan kepuasan pelanggan melalui kontinuitas ketersediaan produk dan pengiriman tepat waktu.
7. Peningkatan aktivitas promosi menggunakan media yang efektif dan efisien.
8. Melakukan survei dan analisa potensi dan peluang pasar.
9. Inisiasi proses pembentukan Anak Perusahaan *Market Access and Delivery*.
10. Inisiasi proses pembentukan Anak Perusahaan produksi vial dan ampul.
11. Inisiasi proses pembentukan Anak Perusahaan *Blood Product*.
12. Inisiasi proses pembentukan *Joint Venture* MR *Vaccine*.
13. Inisiasi proses pembentukan *Joint Venture Conjugated Meningitis Vaccine*.

PEMASARAN

1. Pendirian kantor perwakilan pemasaran di kota-kota besar seluruh Indonesia.
2. Peningkatan kinerja marketer untuk penjualan di sektor swasta dan didukung oleh aplikasi Customer Relationship Management (CRM).

3. Peningkatan kepuasan pelanggan melalui kontinuitas ketersediaan produk dan pengiriman tepat waktu.
4. Peningkatan aktivitas promosi menggunakan media yang efektif dan efisien.

UNIT KLINIK DAN IMUNISASI

Unit Klinik dan Imunisasi merupakan Divisi yang bergerak di bidang Healthcare Service baik Preventive maupun Curatitve, memiliki lima layanan utama yaitu laboratorium mikrobiologi industri, vaksinasi, laboratorium klinik, poliklinik dan Apotek. Inovasi dan perbaikan berkesinambungan terus dilakukan secara konsisten hingga saat ini, seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu dan industri kesehatan.

Unit Klinik dan Imunisasi mempunyai visi menjadi market leader dalam pelayanan kesehatan preventif yakni bidang layanan vaksinasi dan layanan laboratorium mikrobiologi industri di Indonesia yang profitable. Pengembangan bisnis layanan vaksinasi ini sejalan dengan "Strategic Plan" Bio Farma untuk memperkuat sektor swasta & retail agar aksesibilitas pelayanan vaksinasi lebih mudah dan terjangkau oleh masyarakat.

PROGRAM KERJA

a) Akreditasi KAN ISO 15189 tentang Laboratorium Medik tahun 2018/2019.
b) Penambahan ruang lingkup parameter uji Mikrobiologi pada ISO 17025 tentang Laboratorium Penguji.
c) Implementasi Laboratory Information System (LIS)
d) Pengembangan bisnis layanan vaksinasi
e) Training untuk peningkatan kompetensi, layanan dan customer Satisfaction.

Strategi Pemasaran yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Penetrasi pasar (*Market Penetration*)** untuk produk vaksin dewasa seperti vaksin Influenza, Hepatitis B dan yang lainnya). Di pasar domestik sektor swasta, Direktorat Pemasaran melakukan penetrasi pasar melalui aktivitas *Geographical Marketing* dan menawarkan program vaksinasi di berbagai instansi pemerintah/ swasta dalam negeri.
2 **Pengembangan pasar *(Market Development)*** di pasar Internasional dengan pengembangan pasar ke negara-negara anggota OIC *(Organization of Islamic Conference)* dan negara-negara baru lainnya di wilayah Amerika Latin dan Carribean Countries melalui Pan American Health Organization (PAHO).
2. **Pengembangan produk (*Product Development*)** dengan mengembangkan produk branded seperti BIO Td, BIOSAT, BIOADS, BIOSAVE untuk masuk ke pasar sektor swasta dalam negeri.
3. **Strategi media (*Media Strategy*)** yang terpadu untuk meningkatkan awareness pelanggan terhadap perusahaan dan produk-produk yang ditawarkannya melalui berbagai *media above the line, below the line dan through the line.*

Menghadapi permintaan di sektor/Internasional yang lebih tinggi dari pada produk yang tersedia, Bio Farma melakukan langkah-langkah strategis yaitu

1. Merencanakan pembangunan fasilitas baru untuk menambah kapasitas produksi sekaligus proses pengemasannya.

2. Upaya lain yang dilakukan Bio Farma untuk mengakomodir kebutuhan *customer* adalah perpanjangan masa kadaluarsa (ED) untuk Vaksin Campak 10 ds dan Vaksin DT-10 ds. dari semula 2 tahun menjadi 3 tahun, sehingga apabila ada penundaan campaign imunisasi di suatu negara, sisa umur vaksin (Residual Shelf Life) masih dapat diterima oleh negara tujuan ekspor.

Untuk meningkatkan kinerja di sektor penjualan dalam negeri/domestik, dibutuhkan penyempurnaan dan penyesuaian *business process* yang memerlukan dukungan fasilitas dan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Perusahaan telah mengambil langkah strategis untuk mengatasinya yatu dengan melakukan investasi pembuatan aplikasi CRM (*Customer Relationship Management)* sebagai bagian dari IT *Masterplan* serta membangun aplikasi *integrated inventory stock* dengan pihak distributor dalam negeri.

PANGSA PASAR

BIO FARMA MELAYANI KEBUTUHAN PASAR SEKTOR DOMESTIK DAN GLOBAL

1. PASAR DALAM NEGERI

a. Sektor Pemerintah, yaitu melayani kebutuhan Pemerintah untuk program imunisasi dasar/ reguler di Indoenesia yaitu vaksin BCG, DT, TT, Polio, Campak, Hepatitis B, Td dan DTP-HB-Hib (pentaBio);

b. Pasar swasta nasional, yaitu melayani distributor dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan vaksin diluar program imunisasi rutin Pemerintah yaitu vaksin BCG, BioTd, BioTT, FluBio, Campak, Polio, Hepatitis B, PentaBio, anti sera (BioSAT, BioADS, BioSAVE, ABU II (Australia)) dan PPD 2 TU;

2. PASAR LUAR NEGERI / INTERNASIONAL

Pasar internasional, terutama untuk melayani kebutuhan UN *Agency*/Badan-badan Internasional dan negara lain melalui kerjasama bilateral. Vaksin yang digunakan merupakan vaksin yang telah memenuhi prakualifikasi WHO baik dalam bentuk produk jadi maupun *bulk*.

PASAR LUAR NEGERI TERDIRI DARI 2 SEKTOR

a. Sektor Ekspor Institusi: Suplai vaksin melalui institusi seperti Badan Kesehatan Dunia - *World Health Organization* (WHO), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan *Pan American Health Organization* (PAHO) untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi negara-negara berkembang untuk program imunisasi.
b. Sektor Ekspor Korporasi: Suplai vaksin secara bilateral ke negara-negara tujuan ekspor secara *business to business, business to government* atau kerjasama dengan International atau *local partner* yang telah ditunjuk. Vaksin yang digunakan merupakan vaksin yang telah memenuhi prakualifikasi WHO baik dalam bentuk produk jadi maupun *bulk*.

VAKSIN YANG TELAH MEMENUHI PRAKUALIFIKASI WHO BAIK DALAM BENTUK PRODUK JADI MAUPUN *BULK*, YAITU

Vaksin tOPV (vial 20 dosis), Vaksin tOPV (vial 10 dosis), Vaksin Campak (vial 10 dosis), Vaksin TT (Vial 10 dosis), Vaksin TT (Vial 20 dosis), Vaksin DT (Vial 10 dosis), Vaksin DTP (whole cell) (vial 10 dosis), Vaksin TT (Uniject 1 Dosis), Vaksin Hepatitis B (Uniject 1 dosis), Vaksin DTP (whole cell) – Hep B (5µg) (vial 5 dosis), Vaksin DTP (whole cell) – HepB (10µg) (vial 10 dosis), Vaksin Campak (vial 20 dosis), Vaksin mOPV tipe 1 (vial 20 dosis), Vaksin bOPV tipe 1 & 3 (vial 20 dosis), Vaksin Td (untuk dewasa) (vial 10 dosis), Vaksin DTP (whole cell)-HepB-Hib (vial 5 dosis), Vaksin DTP (whole cell)-HepB-Hib (vial 10 dosis).

PENJUALAN BIO FARMA BERDASARKAN KELOMPOK

1. Penjualan Produk Perusahaan
   a. Vaksin Bakteri
   b. Vaksin Virus
   c. Vaksin Kombinasi
   d. Vaksin Sera
2. Penjualan Produk Partnership
3. Penjualan Trading Partnership
4. Penjualan Jasa

PENJUALAN BIO FARMA BERDASARKAN SEKTOR

1. Penjualan Sektor Pemerintah
2. Penjualan Sektor Swasta
3. Penjualan Sektor Ekspor

REALISASI PENJUALAN BIO FARMA BERDASARKAN KELOMPOK

Realisasi Penjualan bersih tahun 2018 dibandingkan dengan RKAP 2018 mencapai 98,52% atau senilai Rp3,24 triliun, bila dilihat berdasarkan kelompok produk sebagai berikut:

1. Penjualan produk perusahaan mencapai 96,95% atau senilai Rp2,04 triliun.
2. Penjualan Produk Partnership mencapai 100,30% atau senilai Rp1,13 triliun
3. Penjualan Produk *Trading Parnership* mencapai 126,77% atau senilai Rp53,11 miliar
4. Penjualan Jasa mencapai 112,18 % atau senilai Rp10,10 miliar

Realisasi Penjualan bersih meningkat sebesar 7,43 % atau senilai Rp223,65miliar bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 dengan komposisi per kelompok produk sebagai berikut:

1. Penjualan produk perusahaan naik sebesar 8,86% atau senilai Rp165,92 miliar.
2. Penjualan Produk Partnership naik sebesar 2,07% atau senilai Rp22,95 miliar.
3. Penjualan Produk Trading Parnership naik sebesar 163,98% atau senilai Rp32,99 miliar
4. Penjualan Jasa naik sebesar 21,59% atau senilai Rp1,79 miliar

REALISASI PENJUALAN BIO FARMA BERDASARKAN SEKTOR

Realisasi Penjualan tahun 2018 dibandingkan dengan RKAP 2018, bila dilihat berdasarkan sektor sebagai berikut:

1. Penjualan Sektor Pemerintah mencapai 120,01% atau senilai Rp1,86 triliun.
2. Penjualan Sektor Swasta mencapai 79,43% atau senilai Rp298,01miliar
3. Penjualan Sektor Ekspor mencapai 79,31% atau senilai Rp1,08 triliun

Realisasi Penjualan bersih meningkat sebesar 7,43 % atau senilai Rp223,65miliar bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 dengan komposisi per kelompok produk sebagai berikut:

1. Penjualan Sektor Pemerintah naik sebesar 36,77% atau senilai Rp499,87 miliar.
2. Penjualan Sektor Swasta turun sebesar 27,20% atau senilai Rp111,37 miliar.
3. Penjualan Sektor Ekspor turun sebesar 13,26% atau senilai Rp164,85 miliar

REALISASI PROGRAM KERJA PEMASARAN TAHUN 2018

PEMASARAN DAN PENJUALAN DOMESTIK

1. Mengikuti pengadaan vaksin dan serum via LKPP-LPSE 2016 untuk memenuhi permintaan dari LPSE Kemenkes.
2. Mengadakan kontrak kerja sama dengan RS Muhammadiyah Grup, Brawijaya Grup, Rumah sakit Pelabuhan Jakarta dan Pertamedika IHC dalam rangka memasukkan produk Bio.
3. Melakukan negosiasi dengan LKPP untuk pengadaan katalog elektronik obat tahun 2018-2019.
4. Realisasi Kontrak Distributorship tahun 2018
5. Mempertahankan pangsa pasar sektor Pemerintah pada tingkat 100%, yakni dengan berkomitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan vaksin program imunisasi nasional.
6. Melakukan kerjasama dengan KFTD, KFA, Telkomedika sebagai Distributor Perusahaan dalam upaya untuk memperluas area pelayanan produk Perusahaan.
7. Menerbitkan ketetapan harga Harga Jual Produk (HJP) untuk Distributor tahun 2018, Harga Netto Apotik (HNA) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).
8. Melakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Vaksin Reguler tahun 2018 :ORI Difteri, DPT- HB-Hib, Measles Rubella (MR), Auto Disable Syringe (ADS) dan Safety Box, Inactivated Polio Vaccine (IPV), DPT-HB-Hib 5ds Tahap II, Vaksin BCG dan Vaksin bOPV, DT,
9. Penambahan lini produk yang dipasarkan di pasar domestik yaitu Penjualan Varicella melalui Distributor resmi perusahaan.
10. Pertemuan langsung (face to face meeting) dengan customer, agar terjaga hubungan baik dengan customer dan memperoleh informasi terkini terkait kebutuhan vaksin maupun update informasi kebijakan.
11. Menambah produk focus yaitu Varicella, BIOSAT dan BCG.
12. Penetapan kebijakan harga khusus dalam rangka meningkatkan penjualan dan persaingan pasar yaitu BIOSAT, BCG, Varicella dan Menivax.
13. Melakukan kordinasi dengan IT untuk pembuatan sistem monitoring Pending Order dalam penjualan e-Katalog dan Reguler dalam sistem ERP untuk meminimalkan kesalahan pelayanan.
14. Peningkatan kepuasan pelanggan melalui kontinuitas ketersediaan produk dan pengiriman tepat waktu sesuai dengan jadwal pemenuhan kebutuhan vaksin yang dikeluarkan oleh Ditjen P2P.
15. Berperan serta dalam kegiatan sosialisasi program imunisasi secara terpadu di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat.
16. Melakukan penjualan vaksin Menivax untuk kebutuhan Umroh di KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan), vaksin HPV untuk kebutuhan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan penjualan vaksin Hepatitis B Dewasa untuk Dinas Kesehatan.

PEMASARAN DAN PENJUALAN INTERNASIONAL

1. Melakukan registrasi produk tahap awal dan registrasi variasi di Argentina, Bahrain, Colombia, Hongkong, India, Iran, Iraq, Jordan, Laos, Malaysia, Mesir, Mexico, Myanmar, Nigeria, Philippine, Saudi Arabia, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Thailand dan Ukraine.
2. Melakukan perpanjangan registrasi di Bhutan, Filipina, Mexico dan Sri Lanka.
3. Mengikuti tender-tender di luar negeri, yaitu : Iraq & UNICEF
4. Memberikan penawaran harga yang kompetitif kepada customer.
5. Penunjukkan local company untuk melakukan registrasi atau tender produk Bio Farma di negara-negara tujuan ekspor:

6. Penandatanganan CDA atau MOU dengan pihak lain dalam rangka perluasan pasar,
7. Melalui UN Agency "Pan American Health Organization" telah menambahkan 3 tujuan ekspor baru sebagai berikut Grenada, Anguilla dan Saint Vincent and the Grenadines.
8. Melakukan supply/penjualan vaksin dan bulk kepada customer sesuai dengan keinginan pelanggan dan memenuhi syarat mutu.
9. Memperoleh awards dari UNICEF atas produk mOPV1 (20 ds) untuk periode supply tahun 2018-2019. Diperoleh juga awards dari UNICEF atas produk Td-10 ds dan TT-10 ds untuk periode supply tahun 2019-2021.
10. Meningkatkan sinergi Marketing Diplomacy antara Kemenkes, Kemenlu, KBRI, KJRI, Kemendag, BPOM, KADIN dan institusi lainnya dalam rangka mencari peluang pasar baru.

REGULATORY AFFAIR DAN KOMUNIKASI PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

1. Melaksanakan pengiriman vaksin, sera dan bulk untuk konsumen dalam negeri dan luar negeri sebanyak 4.709 kali pengiriman.
2. Optimalisasi uji coba pemutahiran fasilitas penunjang proses distribusi (track and trace system).
3. Melaksanakan pengiriman vaksin DT, Td dan Pentabio ke Dinas Kesehatan Propinsi dan beberapa Dinkes Kota/Kabupaten di Jawa Barat penerima vaksin ORI Difteri sebanyak 45 kali pengiriman dan ke beberapa Dinas Kesehatan Propinsi yang terindikasi ORI Difteri sebanyak 50 kali pengiriman.
4. Melaksanakan pengiriman vaksin MR untuk campaign dari Kementerian Kesehatan RI.
5. Menggunakan sarana SMS Location Based Advertising (LBA) untuk kampanye vaksin flubio yang terintegrasi dengan website dan pendaftaran online di layanan klinik dan imunisasi.
6. Melakukan perencanaan mengembangkan kegiatan Digital Marketing dengan menghadiri pengenalan produk Microsoft 365 dan diskusi dengan pihak Telkom, untuk menyusun URS Digital Marketing.
7. Pemasangan logo (brand) perusahaan di 104 buah kegiatan sponsorship.
8. Mendistribusikan material promosi di 762 kegiatan/event.
9. Mengikuti berbagai pameran/open table sebanyak 45 (empat puluh lima) kali.
10. Melakukan pengiriman vaksin HPV (Gardasil) ke 4 Dinas Kesehatan Propinsi: DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
11. Melakukan kunjungan dan audit distributor,
12. Melakukan sharing product knowledge sebanyak 76 kali di berbagai kegiatan.
13. Merevisi Nota Dinas terkait kebijakan penetapan Harga Jual Produk (HJP).
14. Menyusun dan menganalisa Harga Jual Produk (HJP), Partnership & Trading Partnership.
15. Melakukan studi dan uji coba suhu pengiriman untuk vaksin Td 10 ds naked vial.

UNIT KLINIK DAN IMUNISASI

KEGIATAN UNIT BISNIS KLINIK DAN IMUNISASI YANG DILAKUKAN PADA TAHUN 2018.

Melakukan pelayanan jasa klinik kesehatan, vaksinasi, pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan mikrobiologi industri, penunjang medis non lab dan pelayanan apotik dengan memperhatikan aspek mutu, lingkungan dan K3.

PROGRAM KERJA PEMASARAN TAHUN 2019

1. PENJUALAN DALAM NEGERI

a. Penambahan lini produk yang dipasarkan di pasar domestik yaitu vaksin PCV13, Flubio Pref Trivalen (Halal) dan EPO.
b. Menambah marketer untuk daerah potensial.
c. Menetapkan harga jual yang kompetitif.
d. Pertemuan langsung (face to face meeting) dengan customer, agar terjaga hubungan baik dengan customer dan memperoleh informasi terkini terkait kebutuhan vaksin maupun update informasi kebijakan global.
e. Mengadakan event dengan instansi/customer terkait untuk koordinasi pemasaran dan penjualan produk.
e. Mengoptimalkan implementasi CRM.
f. Peningkatan kepuasan pelanggan melalui kontinuitas ketersediaan produk dan pengiriman tepat waktu.

2. PEMASARAN DAN PENJUALAN INTERNASIONAL

1. Mempertahankan pasar yang sudah ada dan memperluas pasar baru untuk meningkatkan pemasaran produk yang sudah dikenal maupun produk baru.

2. Mengikuti tender-tender vaksin yang diselenggarakan oleh suatu negara maupun organisasi internasional.
3. Penambahan lini produk yang dipasarkan di pasar ekspor yaitu bulk Campak.
4. Pertemuan langsung (face to face meeting) dengan customer, agar terjaga hubungan baik dengan customer dan memperoleh informasi terkini terkait kebutuhan vaksin maupun update informasi kebijakan global.
5. Peningkatan kepuasan pelanggan melalui kontinuitas ketersediaan produk dan pengiriman tepat waktu.
6. Melakukan survei dan analisa potensi dan peluang pasar.

3. PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

a. Menyusun Harga Jual Produk Perusahaan, Partnership dan Trading Partnership minimal setiap setahun sekali.
b. Menyusun Harga Jual Produk Perusahaan, Partnership dan Trading Partnership baru.
c. Menerbitkan laporan biaya, RKAP biaya dan prognosa biaya, serta evaluasi biaya pemasaran setiap bulan per bagian di Direktorat Pemasaran.
d. Menerapkan konsep komunikasi pemasaran terpadu *(Integrated Marketing Communication)*.
e. Melakukan Inovasi pengepakan produk untuk pengiriman ke luar negeri dan dalam negeri.
f. Melakukan evaluasi berkala terhadap content promosi Bio Farma seperti leaflet, vademecum.
g. Melakukan update informasi/prioritas vaksin dari WHO/UNICEF.
h. Komunikasi rutin dengan marketer/pelanggan untuk mengetahui kondisi pasar.

4. UNIT BISNIS KLINIK DAN IMUNISASI (UBKI)

a. Melakukan kerjasama dengan Pusat Veteriner Farma (PusVetMa) dan dengan asosiasi makanan dan minuman Indonesia.
b. Secara selektif, mengembangkan outlet layanan vaksin menjadi 13 unit atau kerjasama denngan BUMN lain..
c. Meningkatkan kunjungan dan promosi, edukasi, sosialisasi layanan oleh marketer ke BUMN institusi, sekolah dan lainnya.
d. Meningkatkan kunjungan bersama marketer dan meningkatkan promosi melalui media sosial.

EKSPOR VAKSIN INDONESIA KE NEGARA OKI MENINGKAT

Bio Farma sebagai produsen vaksin Indonesia mengekspor ke Saudi Arabia dan negara negara anggota OKI dalam tiga tahun terakhir meningkat. Tercatat, pada 2015 dari US$11 Juta meningkat menjadi US$22 juta pada 2016 dan US$31 juta pada tahun 2017.

Total kapasitas produksi lebih dari 3,2 miliar dosis per tahun. Komposisi produksi tersebut adalah masing-masing 60% untuk kebutuhan dalam negeri dan 40 persen untuk kebutuhan ekspor. Diperkirakan penjualan ekspor sampai 2018 bisa mencapai USD71,6 juta. Vaksin yang akan diekspor pada bulan September sampai dengan Desember, terdiri dari Vaksin Polio, Campak, TT, DTP, Tdd. Ekspor akan dilakukan ke negara- negara berkembang seperti Pakistan, Afganistan, Sudan, Maroko dan negara lainnya.

Bio Farma secara rutin melakukan ekpor vaksin Polio (bOPV 20ds) ke berbagai negara berkembang. Salah satunya pengiriman dilakukan ke Papua New Guinea yang merupakan pemenuhan komitmen ekspor bulan September 2018 senilai USD12 Juta dari target tahun 2018 senilai total USD71,6 juta. Hampir setiap minggu Bio Farma melakukan ekspor, masih banyak negara berkembang yang memerlukan vaksin produk Bio Farma.

Selain produk akhir vaksin yang didistribusikan melalui lembaga Internasional UNICEF dan PAHO, Bio Farma juga melakukan ekspor dalam bentuk *bulk* vaksin atau intermediate produk yang nantinya akan di formulasi dan dikemas menjadi produk akhir vaksin. Melalui bilateral dan melalui beberapa produsen vaksin langsung. Beberapa produsen yang membeli *bulk* antara lain produsen vaksin di India, perusahaan di Belgia, Turki, Mexico, Mesir, Thailand, Filipina, dan beberapa negara lain. Jenis *bulk* yang diekspor seperti *bulk* Polio, Tetanus, Difteri, Pertusis, Campak.

Bio Farma berupaya memperhatikan aspek kemandirian khususnya untuk bahan baku produk vaksin, dengan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar tercipta kemandirian produk vaksin nasional. Termasuk tantangan Bio Farma dalam memasuki negara tujuan ekspor yang memiliki risiko ekonomi, risiko politik dan risiko infrastruktur, apalagi produk vaksin memerukan penanganan khusus dari mulai vaksin dikirim dari pabrik sampai tiba ke pelanggan, harus dengan suhu tertentu.

Strategi marketing diplomasi untuk peningkatan ekspor. Pada tahun 2018 Bio Farma sudah berkomunikasi dengan beberapa Duta Besar dan bekerja sama dengan atase perdagangan dan promosi yang akan ditempatkan di beberapa negara (ITPC – Indonesia Trade Promotion Centre)".

Saat ini hanya sekitar 30 produsen vaksin yang sudah mendapatkan kualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satunya Bio Farma. Sebagai BUMN memiliki peran yang sangat strategis untuk turut serta melakukan percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, dalam upaya percepatan dan kemandirian pengembangan produk biopharmaceutical dan vaksin. Bio Farma merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dilihat dari jenis produk dan kapasitas, serta menjadi rujukan centre of excellence bagi produsen vaksin di negara Islam.

Di antara negara negara Islam yang tergabung didalam Organisasi Kerjasama Islam, OKI, hanya ada tujuh negara yang memiliki produsen vaksin, dan diantara tujuh negara tersebut hanya Indonesia yang telah diakui oleh WHO untuk vaksin program imuniasi dasar, sehingga Indonesia melalui Bio Farma telah dipercaya menjadi OIC CoE (Organization of Islamic Cooperation – Centre of Excellence) for vaccine and biotechnology products.

Bahkan Saudi Arabia telah meminta kerjasama distribusi vaksin dan transfer teknologi vaksin untuk memenuhi vaksin imunisasi dasar yang dibutuhkan di regional negara negara Teluk.

BAGAIMANA PROSES DISTRIBUSI VAKSIN. KHUSUSNYA DI INDONESIA ?

Bio Farma memiliki prosedur baku yg menjamin kualitas dan keamanan vaksin dalam proses pendistribusiannya. Untuk vaksin yang masuk dalam program pemerintah, distribusi dilakukan melalui jalur pemerintah. Barang dikirimkan langsung ke pemerintah Provinsi untuk disebarkan ke RSUD, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah lainnya. Sedangkan untuk Rumah Sakit swasta dan pihak swasta penyedia pelayanan vaksinasi, distribusi dilakukan melalui distributor resmi yg telah terkualifikasi, distributor resmi dengan mengimplementasikan cold chain yang konsisten dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sehingga terjaga kualitas, keamanan dan efektivitas. Selama pengguna (konsumen) mendapatkan vaksin Bio Farma dari kedua jalur resmi tersebut, maka keaslian, kualitas, keamanan dan keefektivitasan produk vaksin terjamin..

INDUSTRI FARMASI: TAHUN INI, KEBUTUHAN VAKSIN MENANJAK

Permintaan vaksin di Indonesia pada 2018 tumbuh seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Kejadian luar biasa (KLB) difteri pada akhir tahun lalu menjadi salah satu penggerak kebutuhan vaksin secara drastis untuk outbreak respons immunization (ORI). Kejadian ini juga berakibat kesadaran masyarakat untuk memberikan imunisasi bagi keluarga pun tumbuh. Akibatnya imunisasi dengan vaksin meningkat. Mulai tahun 2018 ini juga sudah dilaksanakan beberapa vaksin baru untuk menjadi program tambahan.

Untuk memenuhi permintaan vaksin dalam negeri, pemerintah juga mengimpor vaksin yang tidak mampu dipenuhi oleh produsen vaksin dalam negeri, yaitu Biofarma. Vaksin yang diproduksi oleh Biofarma cukup untuk memenuhi kebutuhan ORI dan program imunisasi rutin di dalam negeri. Dalam menghadapi KLB difteri, Biofarma akan menambah kapasitas produksi vaksin yang mengandung difteri dengan menaikkan kapasitas produksi dari 15 juta vial per tahun menjadi 19,5 juta vial. Untuk upaya penanggulangan KLB difteri sebanyak 19,5 juta vial tahun 2018 akan tersedia untuk Indonesia.

Biofarma sudah lebih dari satu abad berkiprah dalam pengembangan vaksin untuk pencegahan penyakit. Apalagi kualitas dan keamanan produknya telah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan dipergunakan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga diekspor ke 140 negara, termasuk ke 57 negara islam, salah satunya Saudi Arabia. Membuat vaksin itu sangat tidak sembarangan.

KEBIJAKAN DIVIDEN, JUMLAH DIVIDEN KAS PER SAHAM DAN JUMLAH DIVIDEN PER TAHUN YANG AKAN DIUMUMKAN ATAU DIBAYAR SELAMA 5 TAHUN BUKU TERAKHIR

Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Pembagian dividen pada umumnya dibagikan pada waktu yang ditetapkan meski dalam kondisi tertentu dividen dapat dibagi sewaktu-waktu. Dividen dapat diberikan kepada pemilik saham jika perusahaan memperoleh laba untuk dibagikan sebagai dividen. Penentu besaran dividen adalah Direksi dan disahkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Meski dividen adalah hak bagi pemilik saham, penentuan pembagian dividen melalui banyak pertimbangan begitu pula apakah laba layak dibagi menjadi dividen atau lebih tepat untuk biaya operasional perusahaan kembali.

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen

1. Dividend Payout Ratio Industri: dimana perusahaan itu berada. artinya, perusahaan tidak boleh mengabaikan kebijakan dividen perusahan lain.
2. Kesempatan investasi: kebijakan dividen perusahaan jangan sampai mengorbankan proyek yang dapat meningkatkan value pemegang saham di masa yang akan datang.
3. Profitabilitas dan Likuiditas: kebijakan dividen perusahaan memperhitungkan profitabilitas dan likuiditas perusahaan.
4. Akses ke pasar keuangan: jika perusahaan mempunyai akses ke pasar keuangan yang baik, perusahaan bisa membayar deviden lebih tinggi. Akses yang baik bisa membantu perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditas.
5. Pertumbuhan pendapatan perusahaan: jika pendapatan perusahaan mengalami pertumbuhan, maka jumlah pembayaran dividen dapat dinaikkan
6. Stabilitas pendapatan: jika pendapatan perusahaan relatif stabil, aliran kas di masa mendatang bisa diperkirakan dengan lebih akurat.
7. Prefensi pemegang saham dan keleluasaan untuk menyimpang dari maksimisasi kemakmuran.
8. Ketersediaan dan biaya alternatif sumber dana, apabila biaya modal tinggi, maka penggunaan laba ditahan akan semakin menarik.
9. Pembatasan-pembatasan yang diberikan kreditur.
10. Harapan mengenai kondisi bisnis pada umumnya: pada waktu inflasi laba cenderung naik sehingga manajemen dapat menaikkan pembayaran dividen.

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Dividen terdiri atas empat jenis:

1. Dividen tunai; metode paling umum untuk pembagian keuntungan. Dibayarkan dalam bentuk tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya.
2. Dividen saham; cukup umum dilakukan dan dibayarkan dalam bentuk saham tambahan, biasanya dihitung berdasarkan proporsi terhadap jumlah saham yang dimiliki.
3. Dividen properti; dibayarkan dalam bentuk aset. Pembagian dividen dengan cara ini jarang dilakukan.
4. Dividen interim; dibagikan sebelum tahun buku Perseroan berakhir.

Bio Farma memilih kebijakan untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham setidaknya satu kali setahun. Berdasarkan hasil perolehan laba bersih tahun 2018 yaitu sebesar Rp543,23 miliar manajemen mengusulkan pembagian laba sebagai berikut:

- Dividen sebesar 20% = Rp108,65 miliar
- Cadangan sebesar 80 % = Rp434,58 miliar
- Jumlah 100% = Rp543,23 miliar

Cadangan diusulkan sebesar Rp434,58 miliar atau 80% dari laba bersih untuk mendanai rencana investasi tahun 2018 yang cukup besar, yaitu sebesar Rp752,64 miliar, dan memperkuat modal kerja sehubungan dengan peningkatan beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans untuk menghasilkan produk baru dan sustainable growth.

TOTAL DIVIDEN YANG DIBAGIKAN DAN TANGGAL PENGUMUMAN, PEMBAYARAN DIVIDEN KAS UNTUK MASING-MASING TAHUN

Kewajiban dividen dari laba bersih tahun buku 2017 yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Tahunan tahun buku 2017 pada tanggal 25 April 2018 adalah sebesar Rp236,41 miliar. Untuk kewajiban dividen atas laba bersih tahun buku 2018 akan ditetapkan pada RUPS tentang Laporan Tahunan tahun buku 2018.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Juta Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Saldo Laba (Rugi)		Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah Ekuitas
		Dicadangkan	Belum Dicadangkan		
Saldo awal per 1 Januari 2017	2.000.000	899.824	501.041	1.901.287	5.302.152
Pembagian laba					
Dividen	-	-	(150.313)	-	(150.313)
Cadangan	-	350.728	(350.728)	-	-
Bina Lingkungan	-	-	-		-
Kapitalisasi Cadangan Ke Setoran Modal	-	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lainnya	-	-	-	(27.239)	(27.239)
Laba (Rugi) Tahun 2017	-	-	525.356	-	525.356
Saldo Akhir Per 31 Desember 2017	2.000.000	1.250.552	525.356	1.874.049	5.649.956
Saldo awal per 1 Januari 2018	2.000.000	1.250.552	525.356	1.874.049	5.649.956
Pembagian laba					
Dividen	-	-	(236.410)	-	(236.410)
Cadangan	-	288.946	(288.946)	-	-
Kapitalisasi Cadangan Ke Setoran Modal	-	-	-	-	-
Penghasilan Komprehensif Lainnya	-	-	-	6.067	6.067
Laba (Rugi) Tahun 2018	-	-	543.226	-	543.226
Saldo Akhir Per 31 Desember 2018	2.000.000	1.539.498	543.226	1.880.116	5.962.839

JUMLAH DIVIDEN KAS PER SAHAM

Bio Farma per 31 Desember 2018 merupakan salah satu BUMN non listed yang kompoisi kepemilikan saham: 100% Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah Dividen Kas Per Saham.

DIVIDEN PAYOUT RATIO (DPR) DAN TANGGAL PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN KAS

Pembagian atas laba bersih tahun 2018 dan 2017 ditetapkan dalam RUPS tentang persetujuan laporan keuangan tahunan, pengesahan perhitungan dan pembagian laba bersih tahun buku 2017 pada tanggal 25 April 2018.

Kelompok	2014	2015	2016	2017	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)
	1	2	3	4	5	5/4
Dividen	145.015,00	234.707,00	150.313,00	236.410,00	108.645,00	45,96
Cadangan	435.058,74	435.885,89	350.727,99	288.945,61	434.581,02	150,40
Laba Bersih Setelah Pajak	580.073,74	670.592,89	501.041,00	525.356,00	543.226,02	103,40
Dividend Payout Ratio (DPR)	25,00%	35,00%	30,00%	45,00%	20,00%	44,44
Dividen Kas Per Saham	-	-	-	-	-	-
Tanggal Pengumuman	21 Maret 2015	10 Juni 2016	10 Mei 2017	25-Apr-18	-	-
Tanggal Pembayaran	13 Mei 2015	29 Juni 2016	30 Mei 2017	25 Juni 2018	-	-

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP) YANG MASIH ADA SAMPAI TAHUN BUKU

Per 31 Desember 2018, Sesuai dengan karakteristik Bio Farma 100% dimiliki oleh Pemerintah, maka tidak ada program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) di Bio Farma. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi dengan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) seperti jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga *exercise*.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM (DALAM HAL PERUSAHAAN MASIH DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA)

Sampai 31 Desember 2018, Bio Farma adalah perusahaan negara 100% dimiliki oleh Pemerintah, yang tidak melakukan penawaran saham dan obligasi di bursa, sehingga tidak adanya realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum di dalam Ekuitas. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum seperti total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Per 31 Desember 2018, Bio Farma tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi yang diungkapkan.

NAMA PIHAK YANG BERTRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

NAMA PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, sesuai dengan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015).

Dalam kegiatan usaha, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi - transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

SIFAT HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

1. Pemerintah RI yang diwakili Menteri BUMN yang merupakan pemegang saham Perusahaan, Perusahaan atau BUMN lainnya yang memiliki hubungan afiliasi melalui Penyertaan Modal Pemerintah.
2. Perusahaan menempatkan dana atau memiliki pinjaman dana pada bank yang dimiliki Pemerintah atau BUMN/D dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
3. Mempunyai anggota, pengurus yang sama dengan Entitas anak, yaitu Direksi Perusahaan menjadi Komisaris pada Entitas Anak.
4. Perusahaan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha dengan BUMN lain maupun Entitas Anak BUMN serta badan/lembaga-lembaga Pemerintah.

SIFAT HUBUNGAN

Berikut nama-nama pihak yang berelasi dengan Bio Farma dan sifat hubungannya.

Pihak yang Berikatan	Hubungan Dengan Perusahaan	Tujuan	Sumber Dana
Bank Milik Negara/Daerah	Entitas Sepengendali	Kas Dan Setara Kas	RKAP 2018
PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.	Entitas Sepengendali	Penjualan Produk	RKAP 2018
PT Indofarma Global Medika (Persero) Tbk.	Entitas Sepengendali	Penjualan Produk	RKAP 2018
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Penjualan Produk	RKAP 2018
PT Iglas (Persero)	Entitas Sepengendali	Piutang Lain-lain	-
PT. PP (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Pembelian Investasi	RKAP 2018
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	Entitas Sepengendali	Pembelian Investasi	RKAP 2018
K2BF	Hubungan Istimewa	Pembelian Barang dan Investasi	RKAP 2018
CV KCA	Hubungan Istimewa	Pembelian Barang dan Investasi	RKAP 2018
Pihak Berelasi Lainnya	Entitas Sepengendali	Lain-lain dengan nilai dibawah Rp1 miliar	RKAP 2018

KEWAJARAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Seluruh transaksi yang dilakukan pada tahun 2018 dilakukan secara wajar (Arm's Length) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal. Kewajaran transaksi dengan pihak terkait atau mengandung benturan kepentingan telah dilakukan secara wajar sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Perusahaan dan bebas dari konflik kepentingan.

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, sesuai dengan PSAK No.7 (Penyesuaian 2015).

REALISASI TRANSAKSI PADA PERIODE TAHUN BUKU TERAKHIR

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Berikut rincian saldo akun transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Dalam Rupiah

Akun	31-Jan-15		31-Jan-16		31-Jan-17		31-Jan-18	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kas dan Setara Kas	555.939.258.294	9,79%	440.760.856.520	7,52%	369.362.205.419	5,73%	535.724.709.290	7,24%
Piutang Usaha	17.298.055.107	0,30%	12.281.476.667	0,21%	9.214.473.247	0,14%	14.560.313.460	0,20%
Piutang Lain-lain	1.302.637.458	0,02%	1.302.637.458	0,02%	1.302.637.458	0,02%	1.830.359.268	0,02%
Uang Muka Pembelian Lokal	16.044.202.629	0,28%	834.000.000	0,01%	-	0,00%	49.584.348.779	0,67%
Pendapatan yang masih akan diterima	1.591.887.435	0,03%	221.375.000	0,004%	13.994.095	0,000%	23.923.288	0,000%
Utang Usaha								
Koperasi Karyawan Bio Farma	8.174.576.205	0,14%	14.869.209.176	0,25%	10.179.747.608	0,16%	7.378.350.976	0,10%
CV Karya Cahya Abadi	1.180.481.303	0,02%	1.652.232.908	0,03%	2.420.885.452	0,04%	4.243.620.741	0,06%
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	4.392.144.317	0,08%	8.351.209.045	0,14%	-	0,00%	11.743.603.858	0,16%
PT Pertamina (Persero)	-		-	0,00%	3.405.240.000	0,05%	3.680.640.000	0,05%
PT Kimia Farma, Tbk	419.689.563	0,01%	160.990.986	0,00%	194.204.873	0,00%	175.990.231	0,00%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	0,00%	-	0,00%	1.350.000.000	0,02%	3.867.914.240	0,0,5%
PT INTI	-	0,00%	71.221.650	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PT Wijaya Karya (Persero)	769.068.182	0,01%	9	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Jumlah	**14.935.959.570**	**0,26%**	**25.104.863.765**	**0,42%**	**17.550.077.933**	**0,27%**	**31.090.120.046**	**0,42%**

Investasi berupa Barang Modal (Capital Expenditure) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah Aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan. Sepanjang tahun 2018, Bio Farma melakukan perikatan material mengenai investasi barang modal dengan berbagai pihak yang diuraikan sebagai berikut:

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi. Secara umum persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sebagai mana dilakukan dengan pihak ketiga. Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Mekanisme review atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor. Salah satu tujuan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah upaya pemenuhan PSAK No.7 (Penyesuaian 2015).

TUJUAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Tujuan utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah demi kepentingan dan keberlanjutan bisnis Perseroan.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Salah satu komitmen Perseroan terhadap penerapan kepatuhan adalah selalu menaati peraturan yang berlaku dari regulator, yang relevan pada bisnis dan operasi Perusahaan. Bentuk implementasi komitmen tersebut adalah melakukan pengkajian terhadap peraturan baru dan amandemen peraturan sehingga Perseroan selalu taat

Selama tahun 2018, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Bio Farma. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya (kualitatif dan/atau kuantitatif) terhadap perusahaan.

URAIAN MENGENAI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Salah satu indikator laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah laporan yang sesuai dengan seluruh kebijakan akuntansi yang relevan dengan bisnis perusahaan. Oleh karena itu Perseroan berkomitmen untuk comp ly terhadap seluruh standar akuntansi keuangan terutama pada kebijakan baru atau perubahan kebijakan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah memenuhi semua persyaratannya.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (historical cost method), kecuali beberapa akun tertentu menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode akrual (accrual basis), kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung (Direct Method) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

PERUBAHAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRESTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Pada tahun 2016 dan 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan penyesuaian dan amandemen atas beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta mengesahkan SAK, Standar dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang relevan dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, sebagai berikut:

1. ISAK 31: Interprestasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi, memberikan interprestasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari define property investasi dalam PSAK 13: Properti Investasi. Berlaku efektif tanggal 1 Januari 2017.
2. PSAK 24: (Penyesuaian 2016): Imbalan kerja, mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara dimana obligasi tersebut berada.
3. PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Selain itu, perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.
4. PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan, mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan 42C untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.

Penerapan standar-standar tersebut tidak mempunyai pengaruh material terhadap jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan.

Amandemen, Interprestasi, dan Penyesuaian standar, serta SAK yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, yaitu:

1. Amendemen PSAK 13: Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi, mengamandemen paragraf 57 sehingga mencerminkan prinsip bahwa perubahan penggunaan mencakup penilaian atas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan bukti pendukung bahwa perubahan penggunaan telah terjadi. Berlaku efektif 1 Januari 2018, dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
2. Amandemen PSAK 16: Agrikultur: Tanaman Produktif, mengklarifikasi bahwa aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif (bearer plants) masuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset Tetap. Berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, penerapan dini diperkenankan.
3. ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, ISAK 33 mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing. Berlaku efektif 1 Januari 2019, dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
4. PSAK 69: Agrikultur, mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, penerapan dini diperkenankan.
5. PSAK 71: Instrumen Keuangan, mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai. Berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
6. PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
7. PSAK 73: Sewa, menetapkan prinsip pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Perusahaan sedang mengevaluasi penerapan standar-standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

ALASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan dilakukan untuk mematuhi PSAK yang berlaku. Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018

DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SECARA KUANTITATIF TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

1. Penerapan standar-standar yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 tidak mempunyai pengaruh material terhadap jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan.
2. Dampak dari Amandemen, Interprestasi, dan Penyesuaian standar, serta SAK yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018: Perusahaan sedang mengevaluasi penerapan standar-standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.
3. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan, di mana ekonomi global bergerak tidak stabil. Ada tiga hal penting kondisi perekonomian global dan domestik di tahun ini. Dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dunia di 2018 yang cukup tinggi kemungkinan akan melandai di 2019.

1. Pertumbuhan ekonomi AS menurun, sedangkan Uni Eropa dan Tiongkok melandai. Tekanan inflasi mulai tinggi di AS dan cenderung akan meningkat di Uni Eropa dan sejumlah negara lain.
2. Kenaikan suku bunga AS diikuti oleh normalisasi kebijakan moneter di Uni Eropa dan sejumlah negara maju. Setelah The Fed menaikkan suku bunga acuan tiga kali sebanyak 75 bps, The Fed menaikkan lagi di Desember 2018 dan tiga kali di 2019.
3. Ketidakpastian global mendorong tingginya premi risk investment di negara-negara emerging market. Ketegangan dagang hingga akhirnya terjadi krisis ekonomi di Argentina dan Turki, serta sejumlah risiko geopolitik, turut memberikan sentimen negatif ke negara emerging market.

Ketiga hal tersebut mendorong menguatnya mata uang dolar AS serta berdampak pada pembalikan modal asing dan pelemahan mata uang emerging market, termasuk Indonesia.

Dari kondisi perekonomian itu, dapat diambil tiga pelajaran penting untuk menghadapi ekonomi global pada 2019 yang diperkirakan masih kurang kondusif.

1. Ketahanan ekonomi perlu diperkuat lagi. Inflasi di jaga rendah, nilai tukar rupiah stabil, defisit fiskal aman, dan stabilitas sistem keuangan terjaga. Defisit transaksi berjalan perlu diturunkan di tingkat aman. Daya saing harus ditingkatkan, industrialisasi ditingkatkan, ekspor kita dorong agar tidak tergantung komoditas primer, dan investasi langsung terus kita tingkatkan.
2. Sinergi kebijakan ekonomi nasional yang erat harus semakin diperkuat. Sementara kebijakan moneter, fiskal diarahkan ke stabilitas nilai tukar.
3. Deregulasi ditempuh untuk peningkatan kapasitas ekonomi nasional. Perbaikan sistem investasi dipercepat dan diperkuat lagi. Potensi demografi dan ekonomi digital perlu dimanfaatkan.

KONDISI EKONOMI GLOBAL BERDAMPAK NEGATIF BAGI DOMESTIK

Sistem keuangan triwulan III-2018, pada kondisi yang terkendali. Namun, perkembangan ekonomi global berdampak negatif terhadap perekonomian domestik. Hal itu dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, tingkat inflasi yang stabil dan berada pada level yang rendah. Selain itu cadangan devisa berada pada level yang memadai, volatilitas nilai tukar yang terkendali, serta defisit APBN dan keseimbangan primer yang jauh lebih baik dari periode sebelumnya.

Seperti diketahui cadangan devisa Indonesia saat ini sebanyak US$113 miliar dan rupiah sampai dengan 23 Oktober terdepresiasi sebesar 10,65%. Potensi risiko utama yang patut dicermati masih berasal dari arah kebijakan pemerintah AS dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dunia, khsususnya mitra dagang utama AS. Pertumbuhan ekonomi global berdampak negatif terhadap perekonomian *domestic*. Dari dalam negeri, potensi risiko masih berasal dari defisit transaksi berjalan (*Curent Account Defisit* - CAD) yang terus melebar, nilai tukar yang terus tertekan, serta ketergantungan pada ekspor komoditas tertentu.

BIO FARMA

Eradikasi Polio, tahun 2020 Perusahaan berpotensi kehilangan omset yang berasal dari penjualan vaksin Polio baik dalam bentuk *bulk* maupun produk. Untuk mengantisipasi hal tersebut Perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, menyiapkan infrastruktur untuk produk baru dengan tetap memperhatikan regulasi internasional terkini. Rencana investasi tersebut diantaranya untuk pembangunan gedung fasilitas

produksi dan peralatan di dalamnya. Dengan upaya-upaya tersebut di atas diharapkan potensi kehilangan omzet dari produk vaksin Polio dapat di minimalisasi melalui peningkatan penjualan produk yang ada dan produk baru.

Penelitian dan pengembangan produk dilakukan sesuai dengan tren dan berupaya melakukan percepatan sehingga time to market produk tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar. Bio Farma bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset di dalam dan luar negeri agar dapat mempercepat ketersediaan produk di pasar. Saat ini sedang mengintensifkan pengembangan produk baru antara lain yaitu vaksin S-IPV, Rotavirus, vaksin Pneumococ, vaksin Typhoid konjugat dan vaksin Hep B. Selain itu, Bio Farma telah memulai penelitian dan pengembangan di luar vaksin dan antisera seperti kelompok biosimilar Eritropoitein (EPO) dan Trastuzumab; diagnostika kit Diabetes Millitus (DM) dan insulin; dan berencana untuk mengembangkan produk kelompok blood product.

Pasar Pemerintah yang selama ini merupakan captive market harus tetap dipelihara mengingat masuknya kompetitor lain yang dapat merebut pasar yaitu China dan India untuk produk yang sudah PQ WHO serta berlakunya pasar tunggal ASEAN (Asean free Trade Area/AFTA) tahun 2016 dan WTO *(World Trade Organization)* tahun 2020. Demikian pula penambahan kompetitor yang mendapat PQ WHO akan meningkatkan persaingan dan dapat merebut pasar tersebut. Perusahaan harus waspada agar pelanggan terbesar di sektor dalam negeri ini tidak berpaling ke pemasok lain. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan penguatan pasar domestik dengan menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan, khususnya dalam hal ketepatan pengiriman dan kelengkapan/keragaman jenis vaksin yang dibutuhkan. Peluang tersebut harus ditangkap oleh Perusahaan dengan menyediakan produk tersebut sesuai jadwal yang dibutuhkan baik produksi sendiri maupun melalui aliansi dengan pihak lain.

Bio Farma telah menerapkan sistem ERP (Enterprise Resource Planning) dan Risk Management System yang berbasiskan IT yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta dapat mengelola Perusahaan dengan baik dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG *(Good Corporate Governance)* termasuk memperkuat *Enterprise Risk Management* (ERM) yang dinyatakan dalam budaya Perusahaan yaitu PITIC *(Professional, Integrity, Teamwork, Inovation Customer Oriented)*, dokumen manual mutu, pedoman dan prosedur baku secara optimal dan berkelanjutan. Pada tahun 2015 sampai sekarang Perusahaan telah mengimplementasikan ERP yang mengintegrasikan hampir seluruh proses bisnis Perusahaan, sesuai dengan best practice/standar yang berlaku, sehingga pengendaliannya menjadi lebih baik, akurasi dan integrasi data antar unit kerja lebih baik, serta kecepatan proses bisnis akan meningkat. Peranan sistem informasi yang terintegrasi tersebut akan sangat membantu Perusahaan dalam memperlancar dan efisiensi proses bisnis serta memenuhi persyaratan regulasi, termasuk dalam pelaksanaan GCG. Perusahaan memiliki *core competences*.

Untuk mewujudkan visi Perusahaan, peranan Sumber Daya Manusia sangatlah penting dan harus dikelola dengan baik, untuk itu Perusahaan melakukan pengelolaan SDM dengan paradigma *"Human Capital Management"* yang memandang SDM sebagai aset yang perlu terus ditumbuh kembangkan pengetahuan, keterampilan dan perilakunya agar nilainya terus bertambah melalui program pengembangan yang terintegrasi yaitu melalui *performance management system, reward management system, talent management system* dan *knowledge management system*. Diharapkan dengan memiliki karyawan yang kompeten di bidangnya dapat dilakukan international placement. Disisi lain, Perusahaan berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawan selama bekerja dan setelah pensiun sehingga diharapkan disamping mereka kompeten juga memiliki loyalitas dan integritas tinggi terhadap Perusahaan.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memilki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menim*bulk*an keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya.

Dalam evaluasi aspek-aspek yang mempengaruhi kelangsungan usaha, Bio Farma memiliki Divisi *Compliance & Risk Management*, Satuan Pengawasan Intern (SPI) Dan *Quality Assurance* (QA).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI *COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT*

1. Mengkoordinasikan aspek kepatuhan GCG, Regulasi, dengan Risiko aktivitas korporasi
2. Monitoring aspek GCG, Risiko, dan Regulasi/Hukum
3. Evaluasi aspek GCG, Risiko, dan Regulasi/Hukum

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN INTERNAL (PI)

1. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas terhadap operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya di perusahaan.
3. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada Manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau pelaksanaan Tindak Lanjut perbaikan yang direkomendasikan.
7. Melakukan tugas konsultasi untuk memperbaiki sistem pengendalian intern.
8. Bersama dengan komite audit membahas Laporan hasil audit dan meminta masukkan yang diperlukan.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI QUALITY ASSURANCE

1. Melakukan Audit Sistem Manajemen Mutu
2. Melakukan Audit Sistem Manajemen Lingkungan
3. Melakukan Audit Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja
4. Melakukan Audit Praktek Produksi yang Baik (GMP)
5. Melakukan Audit Vendor
5. Melakukan Audit Pengaduan Pelanggan

EVALUASI YANG DILAKUKAN ATAS EFEKTIFITAS SISTEM MANAJAMEN RISIKO

Evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko dengan mengukur 8 (delapan) unsur Key Risk Indicator yaitu:

1. Kesadaran yaitu mengukur tingkat kesadaran para pemangku kepentingan internal, baik terhadap risiko secara umum maupun penerapan manajemen risiko yang sedang dilangsungkan.
2. Reputasi yaitu mengukur pandangan serta penerimaan para pemangku kepentingan internal terhadap penerapan Manajemen Risiko.
3. Budaya yaitu mengukur sejauh mana budaya sadar risiko telah mengakar dan melatar belakangi pelaksanaan praktik Manajemen Risiko.
4. Keahlian yaitu mengukur tingkat kompetensi para pemangku kepentingan internal di bidang Manajemen Risiko guna menunjang penerapan manajemen risiko.
5. Kepercayaan yaitu mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan internal terhadap hasil dari penerapan Manajemen Risiko.
6. Sumber Daya yaitu mengukur sumber daya khususnya SDM perusahaan yang tersedia secara memadai guna menunjang penerapan manajemen risiko.
7. Penerapan yaitu mengukur seberapa jauh praktik Manajemen Risiko serta pemeliharaan basis data/ informasi manajemen risiko perusahaan telah didukung dengan proses otomatisasi berbasis teknologi informasi.
8. Proses yaitu mengukur seberapa jauh praktik Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan berbasis pada suatu metodologi yang dirujuk oleh praktik terbaik penerapan Manajemen Risiko.

Berdasarkan hasil pengukuran di atas maka Sistem Manajemen Risiko di Bio Farma berjalan dengan cukup efektif dan terus dikembangkan sesuai roadmap Manajemen Risiko Bio Farma.

Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Kesadaran pemilik risiko untuk melakukan swa asesmen risiko.
2. Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya melakukan kajian risiko dalam kegiatan operasional perusahaan.

3. Para pemangku kepentingan di bidang Manajemen Risiko dinilai cukup mampu melakukan kajian risiko secara efektif seperti penggunaan analisis risiko secara semi kuantitatif.
4. Sumber daya yang tersedia cukup memadai.

Terdapat 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) risiko kejadian yang telah teridentifikasi dari 80 (delapan puluh) unit kerja (Bagian) dan 12 (dua belas) proyek yang terbagi dalam 27 (dua puluh tujuh) aktivitas (Divisi), kemudian dievaluasi dan diukur berdasarkan nilai kemungkinan dan dampak, sehingga diperoleh prioritas risiko yang harus dikendalikan.

RISIKO-RISIKO TYANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Pada tahun 2018, terdapat 11 (sebelas) risiko korporat, yang terbagi atas 9 (sembilan) risiko dari aktivitas rutin dan 2 (dua) risiko proyek, sebagai berikut:

RISIKO AKTIVITAS RUTIN

1. Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional & Internasional
2. Keluar/ Pindahnya Karyawan Yang Memilki Talenta dan Potensi Tinggi
3. Tidak Terserapnya Persediaan Produk
4. Kinerja Manajemen dan Karyawan Tidak Mencapai Target KPI
5. Pemalsuan Produk Bio Farma
6. Munculnya Berita Negatif Mengenai Perusahaan di Media Massa Mainstream
7. Kegagalan Divisi SDM dalam menciptakan talent Karyawan
8. Ketidakmampuan Memenuhi Kewajiban Jangka Pendek (Likuiditas)
9. Ketidakmampuan Memenuhi Kewajiban Jangka Panjang (Kredit Investasi)

RISIKO PROYEK

1. Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung
2. Implimentasi MRP tidak Sesuai Target

Dimana tiga risiko tertinggi adalah meningkatnya persaingan global, keterlambatan suplai vaksin dan perubahan kebijakan/regulasi nasional dan internasional.

Setelah menentukan risiko-risiko yang terkait dengan korporat dan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam menangani risiko-risiko tersebut, Divisi Corporate and Risk Management (CRM) selaku penanggung jawab risiko korporat akan melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan penanganan risiko yang dilaksanakan setiap unit. Masing-masing Kepala Bagian unit risiko menjadi penanggung jawab setiap risiko dan kegiatan penanganannya yang secara keseluruhan menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bio Farma.

PENGELOLAAN RISIKO

Bio Farma berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dalam melaksanakan aktvitasnya dan terus melanjutkan upaya untuk senantiasa melaksanakan budaya kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan, yang meliputi tindakan:

- Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan.
- Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan.
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan pemerintah dan etika usaha.

Pengelolaan risiko di Bio Farma meliputi kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, mekanisme komunikasi, pelaporan pelaksanaan manajemen risiko baik internal maupun eksternal dan kesamaan bahasa.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan assessment terhadap kelangsungan usaha adalah sebegai berikut:

- Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan
- Likuiditas
- Solvabilitas
- Masalah Internal
- Tingkat inflasi
- Nilai tukar
- Indikator pelaksanaan tata kelola Perusahaan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Praktik Terbaik GCG Konsisten dan Berkesinambungan Merupakan Komitmen Penuh dari Bio Farma dalam Pengelolaan Bio Farma dengan Menjaga Keseimbangan Kepentingan Manajemen Perusahaan, Karyawan, Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah serta *Stakeholder* lainnya.

WHISTLE
BLOWING
SYSTEM

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sangatlah penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Mempertimbangkan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut, Bio Farma memandang perlunya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) oleh Bio Farma.

Untuk memperoleh manfaat dari penerapan GCG tersebut, Bio Farma senantiasa berupaya menerapkan GCG dan mengembangkannya secara konsisten dan berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat dalam Bio Farma, diharapkan GCG tidak hanya akan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bio Farma tetapi menjadi bagian dari budaya perusahaan untuk mencapai kesinambungan dan ketahanan usaha Bio Farma dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja Bio Farma, dan pada akhirnya memberikan nilai tambah Bio Farma untuk kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*, termasuk pula para *costumer* Bio Farma. Pendekatan *top-down* dalam penerapan GCG oleh Bio Farma, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan Budaya Perusahaan, juga diharapkan dapat melancarkan penerapan GCG dan memperoleh dukungan dari setiap pihak.

Sejalan dengan komitmen Bio Farma untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkesinambungan, Bio Farma sudah memiliki beberapa perangkat pendukung sebagai panduan penerapan GCG, antara lain filosofi, visi, misi, Budaya Perusahaan, Peraturan Perusahaan, Panduan Mengenai Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional, serta berbagai Standar Prosedur Operasional yang telah lama ditetapkan. Selain melengkapi perangkat pendukung penerapan GCG tersebut juga secara konsisten mengembangkan perangkat pendukung yang telah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Bio Farma dan kondisi persaingan pasar domestik maupun global.

Penerapan GCG oleh Bio Farma juga secara aktif didukung oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma. Kejelasan pelaksanaan tugas dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, penentuan rencana strategis Bio Farma disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, dan pembentukan komite dan satuan kerja yang mengawasi dan mengendalikan internal Bio Farma, merupakan perwujudan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan GCG. Untuk memastikan penerapan GCG tersebut, bukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku, beberapa pihak independen ditunjuk oleh Bio Farma untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan Direksi.

Bentuk perwujudan Bio Farma telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Bio Farma mampu mengoptimalkan Nilai Perusahaan, meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional dan global, dan meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar Perusahaan.

Pada tahun 2018, Bio Farma tidak melakukan asesmen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) karena Kementerian BUMN sedang melakukan review terhadap pelaksanaan asesmen KPKU, sehingga Kementerian BUMN tidak memberikan arahan untuk melaksanakan asesmen KPKU.

GCG merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan *(hard definition)*, maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri *(soft definition)*

ARTI PENTING GCG BAGI BIO FARMA

Arti penting penerapan GCG bagi Bio Farma adalah untuk menambah dan memaksimalkan nilai Perusahaan guna memenangkan kompetisi global, untuk menghindari *fraud* dan KKN dan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada beberapa prinsip dasar *Good Corporate Governance,* yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness,* meningkatkan kontribusi Perusahaan di Lingkungan sekitar Perusahaan dan dalam perekonomian nasional, meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar Perusahaan.

KOMITMEN BIO FARMA DALAM MENERAPKAN GCG

Dalam persaingan global Bio Farma dituntut untuk *sustain* oleh *stakeholders* dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Faktor utama penentu daya saing adalah efisiensi proses pelayanan, mutu, ketepatan dan kepastian kebijakan publik dalam sistem tata kelola berbagai sektor. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara fundamental menjadi landasan yang kuat bagi Bio Farma dalam upaya peningkatan daya saing di berbagai aspek baik pada tataran lokal, regional, nasional maupun global.

Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Insan Bio Farma menjunjung tinggi komitmen dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

GCG menjadi filosofi dasar yang melekat dalam sikap, perilaku, pola pikir, dan cara kerja setiap Insan Bio Farma. Dengan GCG, Bio Farma mampu membangun citra dan reputasi sebagai Perusahaan yang unggul dan bermartabat dengan budaya Perusahaan, yaitu *Professional, Integrity, Team Work, Innovation* dan *Customer Oriented*.

Dengan terwujudnya GCG, Bio Farma mampu mengoptimalkan nilai Perusahaan, meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional, dan meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar Perusahaan.

Bio Farma telah merasakan manfaat dari diterapkannya *Good Corporate Governance*. Selain adanya peningkatan kinerja baik dari sisi operasional maupun keuangan secara berkelanjutan, Bio Farma mendapat pengakuan dari masyarakat dengan diperolehnya beberapa penghargaan.

DASAR-DASAR PENERAPAN GCG DI BIO FARMA

Penerapan prinsip GCG oleh perusahaan merupakan sebuah pilihan dalam menjalankan kegiatan ekonomi karena GCG merupakan suatu etika bisnis. Penerapan prinsip-prinsip tersebut lebih banyak digantungkan pada kebutuhan perusahaan itu sendiri untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun demikan, pada dasarnya perusahaan memiliki kebutuhan yang sangat tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terutama yang terkait dengan manajemen internal perusahaan yang bersangkutan. Penerapan prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri, yang pada gilirannya meningkatkan *value* dari perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1997, saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Terdapat banyak akibat buruk dari krisis tersebut, salah satunya adalah banyaknya perusahaan yang berjatuhan karena tidak mampu bertahan. *Corporate Governance* yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997. Menyadari kondisi dan situasi demikian, pemerintah melalui Kementrian Negara BUMN mulai memperkenalkan prinsip *Good Corporate Governance* ini di lingkungan BUMN.

Bio Farma melandaskan penerapan GCG dengan mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
   Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan

berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG). Prinsip-prinsip pengelolaan BUMN dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

2. Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN. Kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN. Sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN. Menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan/atau menjadikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
   Tanggal 16 Agustus 2007, pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menggantikan UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995. Tujuan pembaharuan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, salah satunya adalah untuk mendukung implementasi GCG. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk penyempurnaan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 adalah pembaharuan tentang konsep pengelolaan perseroan. Pendirian perseroan terbatas dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu kepentingan pemegang saham/pemilik serta kepentingan masyarakat luas dalam hal ini adalah *stakeholders* dan *shareholders*. Sehingga dengan dua kepentingan yang saling tarik menarik ini, diharapkan pada pengelolaan perseroan yang bisa mengakses kepentingan kedua belah pihak.
4. Surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN No S-168/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan *Good Corporate Governance* yang diperbaharui dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012.
5. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006.

FAKTOR PENERAPAN GCG DI BIO FARMA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN GCG DI BIO FARMA

1. **Faktor eksternal,** berasal dari luar Perusahaan yang sangat memengaruhi keberhasilan penerapan GCG, di antaranya:
   a. ketersediaan sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
   b. dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
   c. ketersediaan contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional (*benchmark*/acuan).

2. **Faktor internal,** pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG di Bio Farma yang berasal dari dalam Perusahaan, antara lain:
   a. Budaya Perusahaan *(corporate culture)* yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di Perusahaan.

b. peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan Perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
c. Manajemen Pengendalian Risiko Perusahaan berdasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG;
d. sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam Perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
e. keterbukaan informasi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam Perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika Perusahaan dari waktu ke waktu.

TIGA PILAR PENERAPAN GCG

Penerapan GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING PILAR

1. **Negara dan perangkatnya**, menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten *(consistent law enforcement)*.

   Peran Negara

   a. Melakukan koordinasi secara efektif antar penyelenggara negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem hukum nasional dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan masyarakat.
   b. Mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat secara bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (*rule-making rules*).
   c. Menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi.
   d. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten.
   e. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
   f. Mengatur kewenangan dan koordinasi antar instansi yang jelas untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi dan mata rantai yang singkat serta akurat dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
   g. Memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi dan pelapor (*whistleblower*) yang memberikan informasi mengenai suatu kasus yang terjadi pada perusahaan. Pemberi informasi dapat berasal dari manajemen, karyawan perusahaan atau pihak lain.
   h. Mengeluarkan peraturan untuk menunjang pelaksanaan GCG dalam bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
   i. Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang saham lainnya dalam hal Negara juga sebagai pemegang saham perusahaan.

2. **Dunia usaha** sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.

   Peranan Dunia Usaha

   a. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
   b. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
   c. Mencegah terjadinya KKN.
   d. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada asas GCG secara berkesinambungan.
   e. Melaksanakan fungsi Ombudsman untuk dapat menampung informasi tentang penyimpangan yang terjadi pada perusahaan. Fungsi Ombudsman dapat dilaksanakan bersama pada suatu kelompok usaha atau sektor ekonomi tertentu.

3. **Masyarakat** sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial *(social control)* secara obyektif dan bertanggung jawab.

Peranan Masyarakat

a. Melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan penyelenggara negara serta terhadap kegiatan dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha, melalui penyampaian pendapat secara obyektif dan bertanggung jawab.
b. Melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan dunia usaha dalam mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat.
c. Mematuhi peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

TUJUAN PENERAPAN GCG DI BIO FARMA

Dalam kegiatan operasional Bio Farma, GCG tidak hanya merupakan kewajiban atau keharusan melainkan suatu kebutuhan. Oleh karena itu, Bio Farma berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan.

PENERAPAN GCG DI BIO FARMA DENGAN TUJUAN

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi Bio Farma di lingkungan sekitar Bio Farma dan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar Bio Farma.
6. Seluruh jajaran Bio Farma meyakini bahwa penerapan GCG dapat mendukung tercapainya tujuan Perusahaan baik dalam hal pertumbuhan usaha, profitabilitas, dan keberlangsungan usaha jangka panjang. Dengan demikian, Bio Farma dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Bio Farma dan memberikan kontribusi optimal bagi negara.
7. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal bagi seluruh *stakeholder* Perusahaan.
8. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan.
9. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh *stakeholder* Perusahaan.
10. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
11. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
12. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan.

TAHAP-TAHAP PENERAPAN GCG DI BIO FARMA

Awal penerapan GCG dimulai dari kesadaran (*awareness*) Bio Farma bahwa praktik GCG sangat penting diterapkan guna meningkatkan kepercayaan *stakeholder* serta mewujudkan bisnis yang berkelanjutan bagi Perusahaan. Sebagai tindak lanjut dari *awareness* dan untuk mengukur kualitas penerapan GCG, maka Bio Farma melaksanakan asesmen yang dilakukan oleh asesor independen setiap tahunnya. Proses asesmen yamg mengacu pada parameter-parameter yang relevan dengan Bio Farma. Hasil dari asesmen tersebut menghasilkan saran dan rekomendasi yang dipenuhi dalam upaya memaksimalkan praktik terbaik GCG di Bio Farma. Penguatan GCG di Bio Farma juga dilaksanakan melalui sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* Bio Farma agar seluruh *stakeholder* dapat mengetahui dan memahami praktik-praktik GCG di Bio Farma. Pada akhirnya, implementasi GCG tersebut dipublikasikan melalui website Bio Farma, Laporan Tahunan serta rilis media yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*.

TAHAPAN IMPLEMENTASI GCG BIO FARMA

1. TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan terdiri atas 3 langkah utama, yaitu:

a. Awareness Building, langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapan GCG. Kegiatan ini dilakukan melalui seminar, lokakarya dan diskusi kelompok dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar Perusahaan.

b. GCG *assessment*, mengidentifikasi aspek-aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

- **GCG *manual building***, langkah yang dilakukan setelah GCG asesmen. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan Perusahaan dan identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ Perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota Perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:
- Kebijakan GCG Perusahaan,
- Pedoman GCG bagi organ-organ Perusahaan,
- Pedoman perilaku,
- *Audit commitee charter*,
- Kebijakan *disclosure* dan transparansi,
- Kebijakan dan kerangka manajemen risiko,
- *Roadmap* implementasi.

2. TAHAP IMPLEMENTASI

Tahap implementasi terdiri atas 3 langkah, yaitu:

1. **Sosialisasi,** memperkenalkan kepada seluruh Insan Bio Farma berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG, khususnya mengenai pedoman penerapan GCG.
2. **Implementasi**, kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *Top Down Approach* yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi. Implementasi mencakup pada upaya manajemen perubahan *(change management)* guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
3. **Internalisasi,** upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis Perusahaan kerja dan berbagai peraturan Perusahaan.

3. TAHAP EVALUASI

Tahap evaluasi, dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik GCG yang ada.

MANFAAT IMPLEMENTASI GCG BAGI BIO FARMA

Manfaat yang dirasakan oleh Bio Farma dengan adanya penerapan GCG adalah seperti dijelaskan di bawah.

1. Mengurangi *agency cost*
   Biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham sebagai akibat dari pelimpahan wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita Perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*)
   Sebagai dampak dari pengelolaan Perusahaan yang baik, menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh Perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko Perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus meningkatkan citra Bio Farma di masyarakat untuk jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder)* di lingkungan Bio Farma tentang keberadaan Bio Farma dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Bio Farma, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga bisa mendapatkan manfaat maksimal dari semua tindakan dan operasi Bio Farma dalam menciptakan kekayaan dan kemakmuran.
5. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
6. Perusahaan dapat mengoptimalkan perolehan laba dan nilai pertumbuhan yang tinggi.

STRUKTUR TATA KELOLA BIO FARMA

Bio Farma Senantiasa Berupaya Meningkatkan Penerapan GCG yang Sistematis dan Berkesinambungan.

Di dalam dunia usaha yang semakin kompetitif dan penuh tantangan, Bio Farma menyadari pentingnya arti membangun dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Bio Farma memiliki komitmen tinggi dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) untuk melaksanakan usaha secara sehat dan beretika dengan terus meningkatkan

kinerja, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab di mata para pemangku kepentingan.

Dengan memegang teguh nilai-nilai tersebut, Bio Farma terus berupaya untuk mencapai visi dan misi Perusahaan sekaligus memaksimalkan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham sekaligus memberikan manfaat dan kesejahteraan berkesinambungan bagi negara, khususnya masyarakat di tempat Bio Farma beroperasi, termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Bio Farma terdiri atas tiga organ utama, yakni Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan Perusahaan, dan Direksi sebagai pengelola Perusahaan.

Masing-masing memiliki peran penting dalam penerapan GCG sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memelihara keberlanjutan usaha Bio Farma dalam jangka panjang sehingga harus memiliki persamaan persepsi terhadap filosofi, visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG. Direksi didukung oleh Satuan Pengawas Intern (SPI), Sekretaris Perusahaan dan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

STRUKTUR TATA KELOLA BIO FARMA

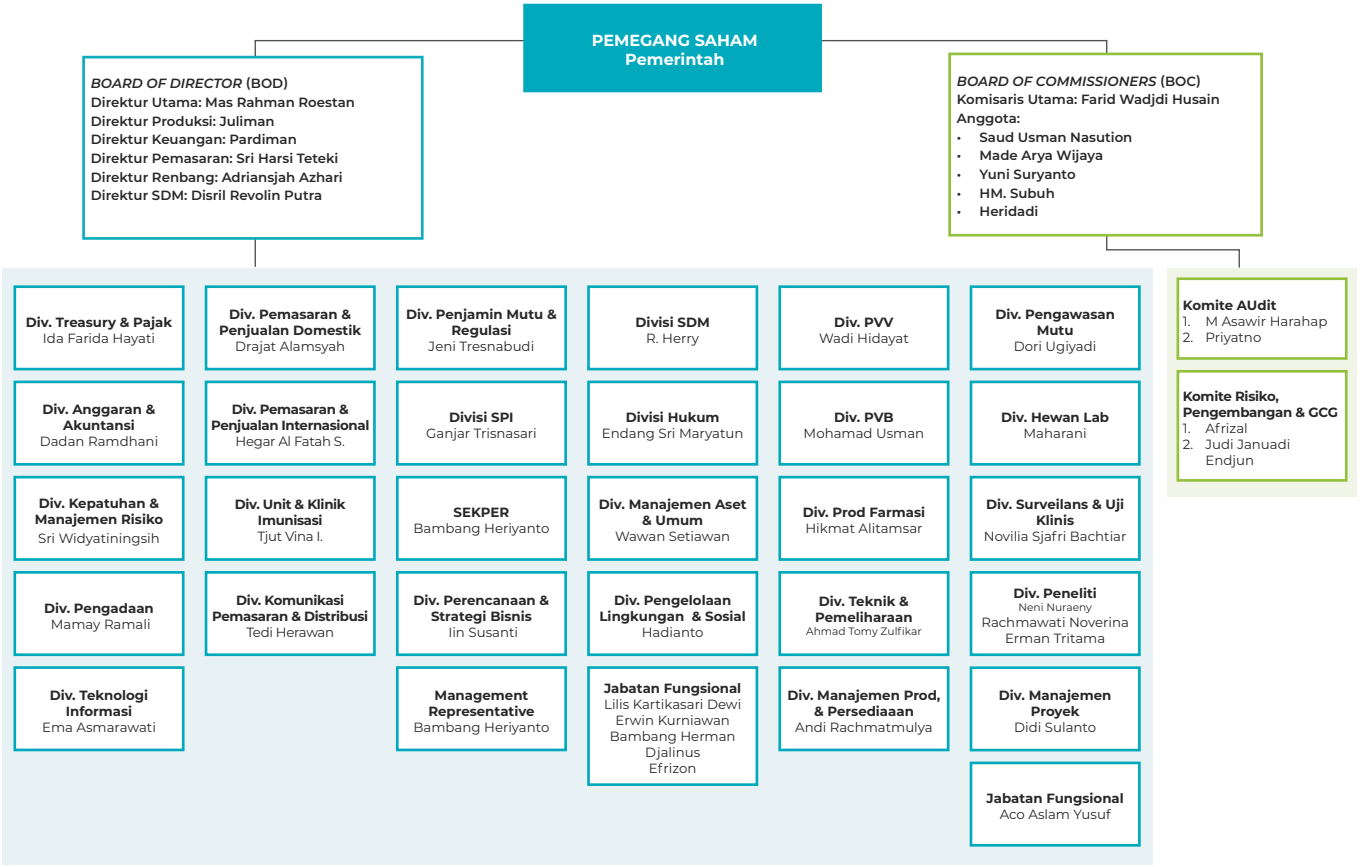

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan bisnis dan operasional Perseroan termasuk jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, pembayaran dividen dan pembagian keuntungan, persetujuan tentang Laporan Tahunan, penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan pendelegasian wewenang kepada Direksi untuk menindaklanjuti pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan disetujui oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris, bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG untuk memberdayakan fungsi kepengawasan Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

Direksi, bertanggung jawab secara kolektif untuk mengelola Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Manajemen memiliki organ-organ pendukung sebagai unit kerja untuk mengendalikan, mengawal dan bertanggung jawab atas implementasi GCG sekaligus sebagai mitra kerja dari komite di bawah Dewan Komisaris.

KERANGKA GCG BIO FARMA

Bio Farma memiliki kerangka GCG yang dibentuk berdasarkan sistem Tata Kelola yang ada di Bio Farma yaitu sebagai berikut:

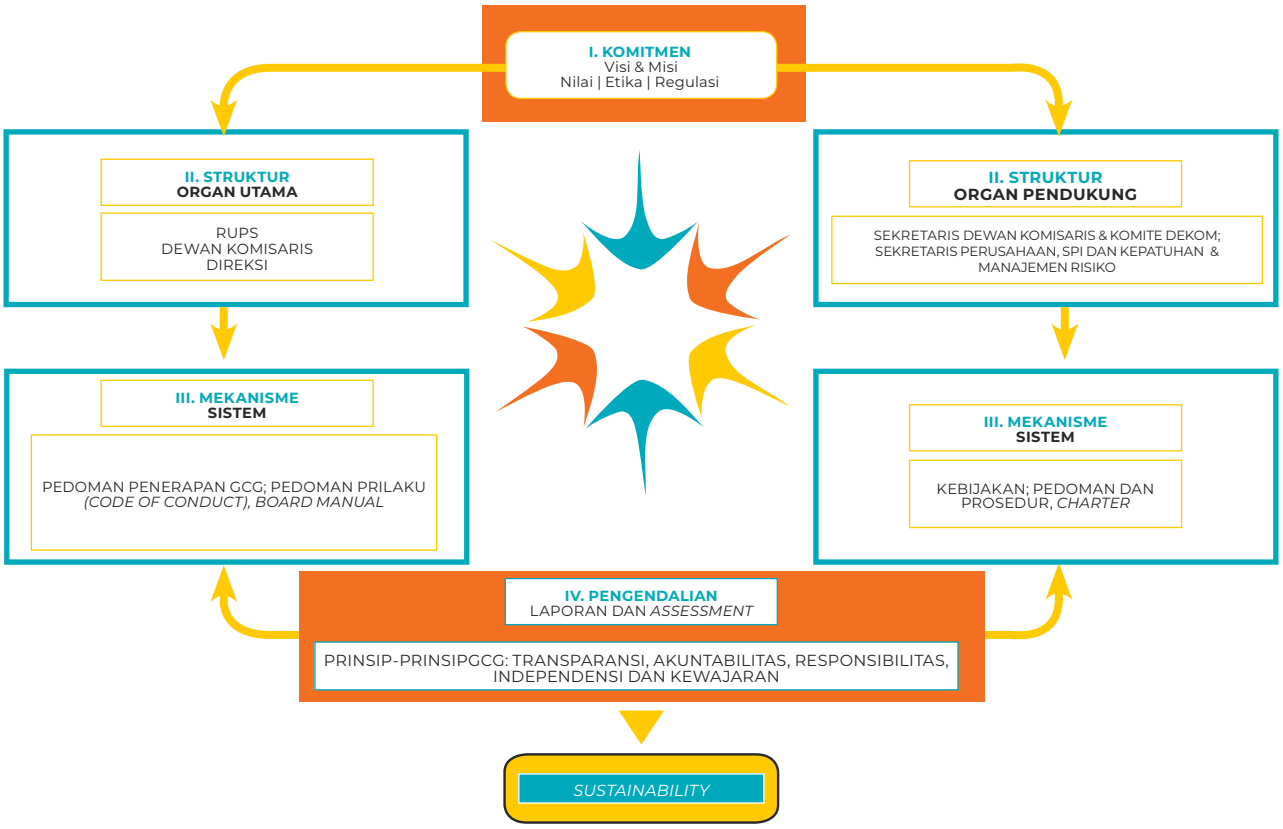

MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN GCG DI BIO FARMA

PEDOMAN GCG MERUPAKAN ACUAN BAGI PERUSAHAAN UNTUK MELAKSANAKAN GCG DALAM RANGKA

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS, dewan komisaris dan direksi);
3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan;
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan;
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN PENERAPAN GCG DI BIO FARMA

Sebagai wujud dari Bio Farma sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baik dan untuk menjamin efektivitas penerapan GCG yang berkelanjutan, Bio Farma telah memiliki pedoman dan kebijakan untuk melaksanakan GCG yang telah diterapkan di lingkungan Perusahaan. Prinsip dasar pelaksanaan GCG di Bio Farma dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

PEDOMAN POKOK PENERAPAN GCG DI BIO FARMA

1. Dalam rangka penerapan GCG, Bio Farma menyusun pedoman GCG sebagai berikut:
   a. filosofi, visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
   b. kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Satuan Pengawasan Internal dan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
   c. kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap Organ Perusahaan secara efektif.
   d. kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar.
   e. pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis.
   f. sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan.
   g. kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan Perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG.

2. Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan efektif, diikutsertakan semua pihak dalam perusahaan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan;
   b. melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan;
   c. menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG perusahaan;
   d. melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan sehari-hari;
   e. melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GCG secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.

KEBIJAKAN PENERAPAN GCG DI BIO FARMA

Bio Farma memiliki sejumlah kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan penerapan Tata kelola Perusahaan sebagai berikut:

1. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-06/DK/BF/12/2018; PER-06963/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Di PT Bio Farma (Persero).
2. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-07/DK/BF/12/2018; PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Bio Farma (Persero). Board Manual merupakan acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-08/DK/BF/12/2018; PER-06965/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018. Pedoman Perilaku (Code of Conduct) memberikan acuan perilaku yang harus dilakukan oleh seluruh Insan Bio Farma dalam menerapkan nilai-nilai Perusahaan dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pedoman Perilaku merupakan elemen penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran/perilaku tidak etis.
4. Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: 03991/DIR/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Bio Farma (Persero).

Pedoman dan kebijakan terkait implementasi tata kelola perusahaan senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini, perubahan peraturan perundang-undangan, dan dinamika perkembangan usaha Bio Farma. Implementasi GCG diharapkan dapat mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Perusahaan.

Sebagai langkah nyata dari komitmen pelaksanaan GCG, pada tanggal 26 Maret 2018, Insan Bio Farma (Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan seluruh Tenaga Kerja) telah menandatangani Pakta Integritas setelah dilakukan internalisasi dan sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN
4. Surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN No S-168/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Good Corporate Governance yang diperbaharui dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012
5. Pedoman Umum Good Corporate Governance, yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.

Di samping itu, Bio Farma juga telah memiliki kebijakan/pedoman sebagai berikut:

1. Pedoman Kerja (Board Manual) Direksi dan Dewan Komisaris, *Charter* Komite Audit, *Charter* Komite Risiko, Pengembangan & GCG, dan *Charter* Satuan Pengawasan Intern (SPI);
2. Kebijakan Pengelolaan Penyampaian Informasi Melalui Media Massa, Kebijakan Pemutakhiran Konten *Website*, Kebijakan Distribusi Informasi Internal, Kebijakan Penetapan Klasifikasi Informasi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi;
3. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;
4. Kebijakan Manajemen Risiko;
5. Kebijakan Teknologi Informasi
6. Kebijakan Sumber Daya Manusia;
7. Pedoman dan Prosedur Baku setiap unit kerja.

Pedoman dan kebijakan terkait implementasi tata kelola Perusahaan senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini, perubahan peraturan perundang-undangan, dan dinamika perkembangan usaha Bio Farma. Implementasi GCG diharapkan dapat mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Perusahaan.

Berdasarkan Kebijakan Sistem Manajemen Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Nomor: MBF-02571/DIR/VI/2018 Tanggal 25 Juni 2018, Bio Farma menetapkan dokumen perusahaan ke dalam 4 (empat) kelompok dokumen, sebagai berikut:

1. Kelompok Dokumen I, terdiri dari Anggaran Dasar, Kebijakan Sistem Manajemen Perusahaan, dan Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan DIreksi.
2. Kelompok Dokumen II, terdiri dari Peraturan Direksi, Keputusan Dewan Komisaris, dan Keputusan Direksi.
3. Kelompok Dokumen III, terdiri dari Instruksi Direksi, Surat Tugas Direksi, Surat Edaran, Keputusan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Surat Tugas Kepala Divisi, Pedoman.
4. Kelompok IV, terdiri dari Prosedur Baku, Dokumen Teknis yaitu Formula Induk, Spesifikasi, Protokol, Formulir Data, Catatan (record), Gambar Teknik

Adapun Piramida Kelompok Dokumen digambarkan sebagaimana attachment berikut

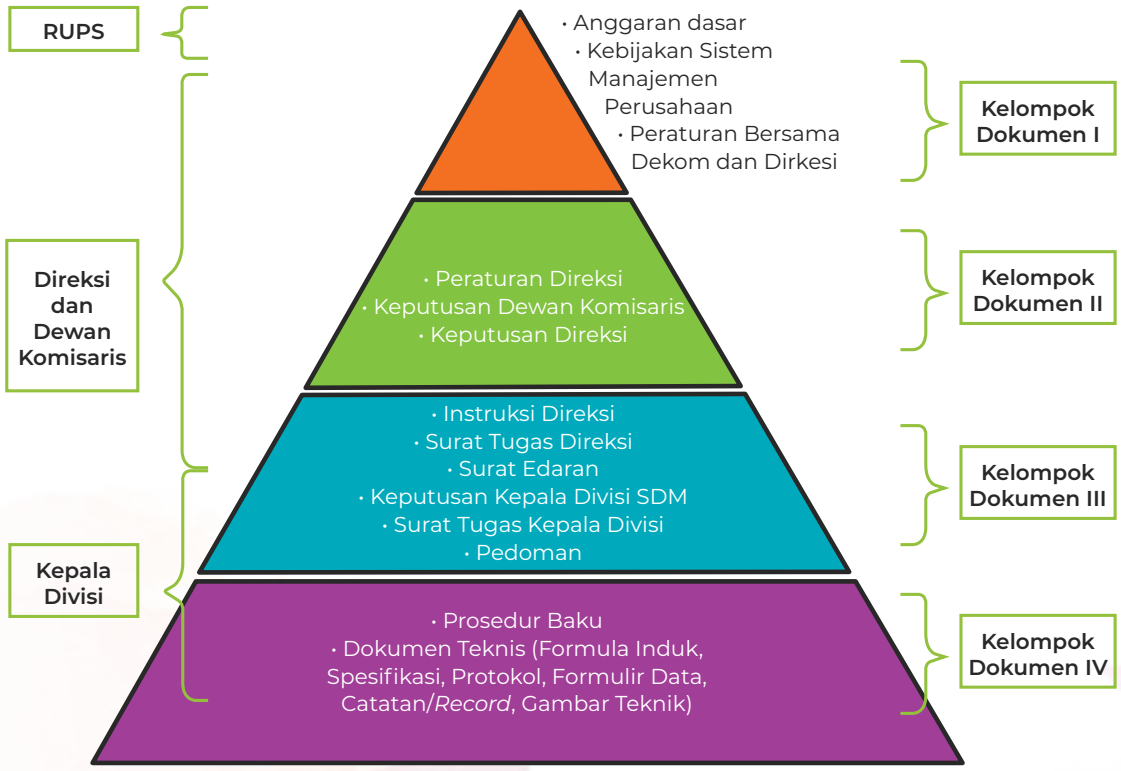

PENERAPAN 5 PRINSIP TATA KEOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI BIO FARMA

Dalam penerapan prinsip GCG, Bio Farma telah menganut Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh KNKG dengan penerapan TARIF, sebagai 5 pilar dasar GCG, yaitu Keterbukaan *(Transparency),* Akuntabilitas *(Accountability),* Pertanggungjawaban *(Responsibility),* Independensi *(Independency)* dan Kesetaraan dan Kewajaran *(Fairness).*

Penerapan 5 pilar dasar terebut diyakini oleh Bio Farma sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur segala aspek bisnis yang dijalankan oleh Bio Farma, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan Bio Farma, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional usaha Bio Farma secara menyeluruh. Keseimbangan operasional usaha yang akan dicapai meliputi segala bentuk kepentingan, baik individu maupun kelompok, baik internal maupun eksternal, sehingga kepentingan Perusahaan, *shareholder* dan *stakeholders* akan mencapai titik ekuilibrium.

Penerapan GCG di Bio Farma bertujuan untuk mencapai keberhasilan atas filosofi, visi, misi, dan tujuan Perusahaan, yang berlandaskan atas **5 (lima) prinsip-prinsip dasar GCG,** yaitu *Transparency, Acoountability, Responsibility, Independency,* dan *Fairness* disingkat **TARIF**.

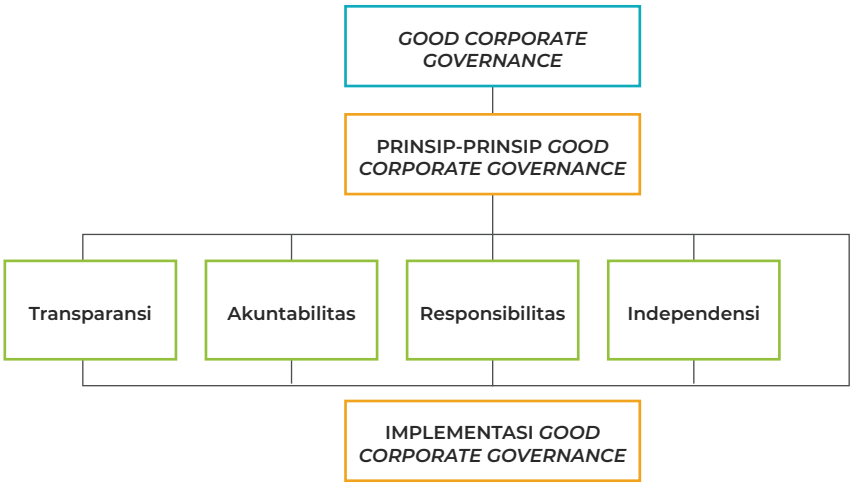

1. ***Transparency*** **(Transparansi),** dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis. Bio Farma menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bio Farma mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan.

   Pedoman Pelaksanaan ***Transparency*** **(Transparansi)** mencakup:
   a. Bio Farma menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan;
   b. informasi yang diungkapkan: visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam Perusahaan dan Perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi Perusahaan;
   c. keterbukaan informasi Perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi

ketentuan kerahasiaan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi;

d. kebijakan Perusahaan secara tertulis dan proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. ***Accountability*** **(Akuntabilitas)**, yaitu Bio Farma dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Bio Farma dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pelaksanaan ***Accountability*** **(Akuntabilitas)** mencakup:

a. Bio Farma menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan dan semua Insan Bio Farma secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan *(corporate values)* dan strategi Perusahaan;
b. Bio Farma meyakini bahwa semua Organ Perusahaan dan semua Insan Bio Farma mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG;
c. Bio Farma memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan;
d. Bio Farma memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran Perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha Perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi *(reward and punishment system)*;
e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap Organ Perusahaan dan semua Insan Bio Farma berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku *(code of conduct)* yang telah disepakati.

3. ***Responsibility*** **(Pertanggungjawaban)**, yaitu Bio Farma mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.

Pedoman Pelaksanaan ***Responsibility*** **(Pertanggung jawaban)** mencakup:

a. Organ Bio Farma berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan *(by laws)*;
b. Bio Farma melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di lingkungan sekitar Bio Farma dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. ***Independency*** **(Kemandirian)**, yaitu untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, Bio Farma dikelola secara independen sehingga masing-masing Organ Bio Farma tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pelaksanaan ***Independency*** **(Kemandirian)** mencakup:

a. Masing-masing Organ Bio Farma menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan *(conflict of interest)* dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif;
b. Masing-masing Organ Bio Farma melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan/atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. ***Fairness*** **(Kewajaran)**, yaitu dalam melaksanakan kegiatannya, Bio Farma senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pelaksanaan ***Fairness*** **(Kewajaran)** mencakup:

a. Bio Farma memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta membuka

T

TRANSPARENCY

- Laporan Tahunan Perusahaan
- Informasi penting lainnya kepada stakeholders melalui website, media massa, dan lain-lain

A

ACCOUNTABILITY

- RUPS mengesahkan RKAP dan Laporan Tahunan
- Dewan Komisaris mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi tentang kepengurusan Perusahaan
- Direksi memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai peraturan yang berlaku
- Kejelasan tugas dan fungsi tercermin dalam Struktur Organisasi

R

RESPONSIBILITY

- Melaksanakan kewajiban perpajakan
- Melaksanakan kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan sekitar

I

INDEPENDENCY

- Organ Perusahaan saling menghormati dan tidak mencampuri hak, kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing organ
- Dewan Komisaris, Direksi serta Karyawan Bio Farma dalam pengambilan keputusan selalu menghindari benturan kepentingan

F

FAIRNESS

- Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai peraturan yang berlaku
- Perusahaan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman, kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dan meningkatkan kompetensi karyawan

akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing;

b. Bio Farma memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan;
c. Bio Farma memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

PENDEKATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN BERDASARKAN *OBJECTIVE, RISK AND CONTROL* SERTA PRINSIP-PRINSIP GCG

Penyusunan kebijakan juga memperhatikan arahan strategis dan kebijakan lain yang telah dituangkan dalam kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi sebelumnya. Proses penyusunan dilakukan secara bertahap melalui *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*.

Risk and opportunity untuk menyatukan *governance, risk and control*. Tujuannya adalah untuk membumikan pemahaman konsep tata kelola pada semua mulai dari manajemen puncak hingga penyelia.

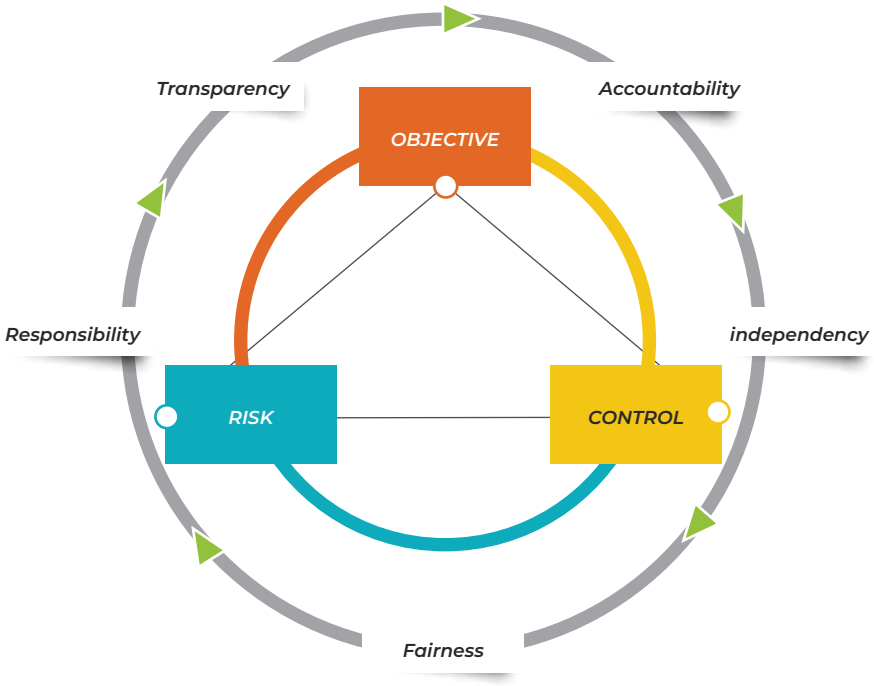

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pada kelompok dokumen I (satu), Bio Farma memiliki Kebijakan Tata Kelola Perusahaan/*Corporate Governance Policy* (CGP) sebagai induk kebijakan Perusahaan yang berisi himpunan pedoman-pedoman pokok pengelolaan Perusahaan yang bersifat holistik dan terintegrasi sesuai prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan Bio Farma harus merujuk pada CGP sebagai standar dan pedoman dasar dalam pembentukannya. CGP yang diimplementasikan di tahun 2018 merupakan CGP yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 31 Desember 2018.

Corporate Governance Policy (CGP) sebagai induk kebijakan Perusahaan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip-Prinsip GCG
2. Pengukuran Terhadap Penerapan GCG
3. Dewan Komisaris
4. Direksi
5. Program Pengenalan Dewan Komisaris dan Direksi
6. Hubungan Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan *(Stakeholders)*
7. Etika Berusaha dan Anti Korupsi
8. Keselamatan dan Kesempatan Kerja Serta Pelestarian Lingkungan.

SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai langkah nyata dari komitmen Bio Farma dalam pelaksanaan GCG, pada tanggal 26 Maret 2018 setelah dilakukan internalisasi dan sosialisasi atas Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance),* Pedoman Perilaku *(Code of Conduct),* Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System),* dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Insan Bio Farma menandatangani Pakta Integritas. Penanaman nilai-nilai GCG juga dilakukan melalui portal internal Perusahaan, sosialiasi melalui *e-mail* kepada seluruh insan Bio Farma, maupun publikasi pada website Perusahaan yang dapat dilihat dan diunduh dengan mudah oleh Insan Bio Farma maupun *stakeholders*. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penerapan tata kelola Perusahaan yang baik.

Sejak April sampai dengan tanggal 4 Juli 2018, Bio Farma telah melakukan asesmen GCG secara internal (*self assessment*) yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan, sebagai *Counterpart* GCG Bio Farma. Hasil *self assessment* digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan praktik tata kelola yang baik di Bio Farma yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Sampai dengan tahun 2018, Bio Farma telah menyempurnakan dan melengkapi perangkat kebijakan *(soft structure)* GCG yang dimiliki, meliputi:

1. Disusunnya GCG manual sebagai bentuk komitmen manajemen terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yaitu:
   a. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* Tahun 2018

b. Kebijakan SDM
c. Pedoman Manajemen Risiko Korporat
d. Kebijakan tentang Penyampaian LHKPN Tahun 2017
e. Kebijakan Program *Corporate Social Responsibility* Tahun 2016
f. Kebijakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun 2017
g. Kebijakan Akuntansi Tahun 2017
h. ITMP *(Information Technology Master Plan)* 2017-2021
i. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* Tahun 2018.
j. Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* Tahun 2018.
k. Piagam Komite Audit tahun 2014.
l. Piagam Satuan Pengawasan Intern *(Internal Audit Charter)* Tahun 2018.
m. Piagam Komite Risiko, Pengembangan, dan GCG tahun 2014.

2. Penyempurnaan *Standard Operating Procedures* (SOP) Perusahaan yang mengacu pada struktur, proses kerja, dan kebutuhan organisasi Perusahaan.
3. Penyampaian informasi terkini Perusahaan kepada para pemangku kepentingan melalui website dan buletin internal.
4. Menjalankan peran dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham sebagai organ utama GCG sesuai aturan hukum dan anggaran dasar Perusahaan.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, *Corporate Secretary*, Satuan Pengawasan Internal (SPI) & Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko sebagai organ pendukung GCG.
6. Melakukan evaluasi berkala atas penerapan GCG baik melalui kegiatan asesmen yang dilakukan pihak internal (*self assessment*) sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Tahun 2018, Bio Farma melakukan evaluasi penerapan GCG melalui kegiatan asesmen yang dilaksanakan pihak internal *(self assessment)*. 90,53 dengan kategori predikat "Sangat Baik".

MEMBANGUN KESADARAN MENGENAI ARTI PENTING GCG DAN KOMITMEN BERSAMA DALAM PENERAPAN GCG

Kegiatan yang dilakukan Bio Farma dalam rangka membangun kesadaran mengenai pentingnya GCG dan komitmen bersama dalam penerapan GCG adalah pelaksanaan sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan Penandatanganan Pakta Integritas, yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2018, dengan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan seluruh Tenaga Kerja PT Bio Farma (Persero).

ROADMAP GCG PT BIOFARMA (PERSERO)

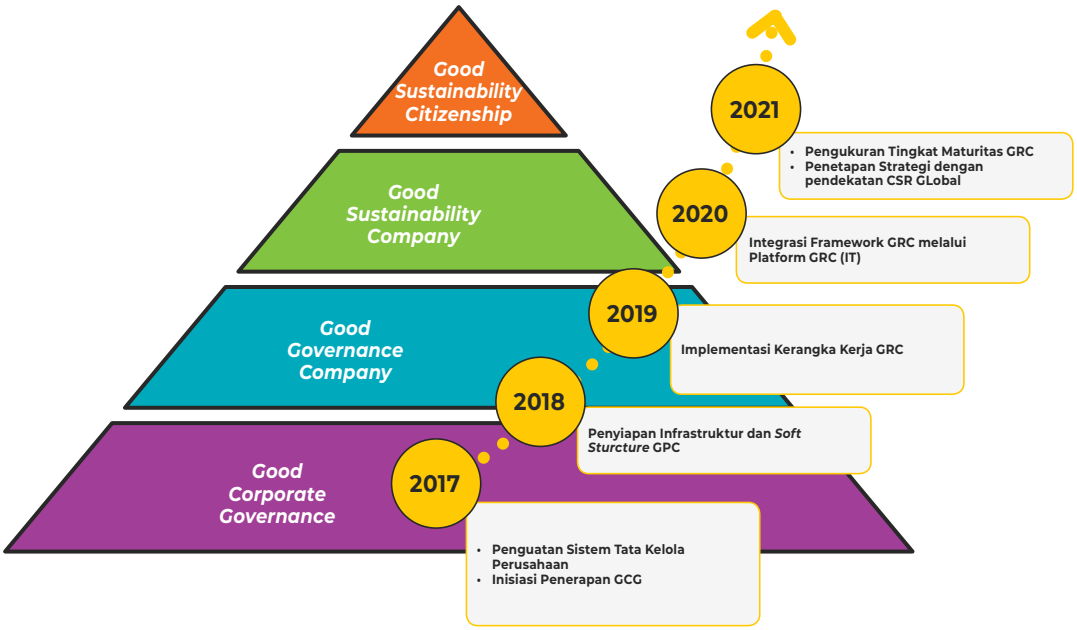

STRATEGI DAN RENCANA PENERAPAN GCG DI BIO FARMA

Strategi	Kebijakan	Program Kerja
1. Membangun komitmen dari Direksi dan seluruh pimpinan Divisi/Bagian untuk memberikan dukungan penuh terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko korporat. 2. Bekerjasama antar unit di perusahaan dan instansi lain terkait kegiatan yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan manajemen risiko serta memanfaatkan fasilitas jaringan yang tersedia (intranet, internet, email, dan lainnya) untuk memperoleh dan menyampaikan informasi terkait peraturan perundang- undangan, regulasi dan tata kelola perusahaan 3. Mengelola Risiko Korporat yang disusun atas hasil identifikasi semua potensi kejadian/risiko yang ada di semua Unit Risiko (Bagian). 4. Menerapkan GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan dan manajemen risiko. 5. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang manajemen risiko, hukum dan tata kelola perusahaan yang baik. 6. Mensosialisasikan kebijakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan menjadikannya sebagai budaya kerja di lingkungan Perusahaan. 7. Menerapkan GCG yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan dan manajemen risiko dengan membangun IT GRC. 8. Menyediakan SDM yang kompeten untuk membangun konsep GRC dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) – *Single GRC Platform*.	1. Berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aktivitas Perusahaan, Anggaran Dasar Perusahaan, regulasi dan standar Internasional yang berkaitan dengan aktivitas dan produk yang dihasilkan Perusahaan. 2. Pelaksanaan tata kelola perusahaan senantiasa berlandaskan pada lima prinsip yakni *transparency, accountability, responsibility, independency,* dan fairness, serta nilai Perusahaan yakni *professional, integrity, teamwork, innovation*, dan *customer oriented.* 3. Mengimplementasikan kebijakan tentang Penerapan GCG di perusahaan, Kode Etik Perilaku Perusahaan, Panduan Tata Kelola Perusahaan Bagi Direksi, dan Pedoman Penilaian Internal GCG. 4. Menerapkan Manajemen Risiko Perusahaan dengan rujukan ISO 31000. 5. Tuntutan multi – regulasi dan cakupan ruang lingkup yang luas. 6. Menerapkan ISO 22301 *Business Continuity Management System*.	1. Melakukan *review*, pemutakhiran dan sosialisasi atas kebijakan/Pedoman dan SOP tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko sesuai aturan yang berlaku. 2. Mendampingi pelaksanaan *assessment* penerapan GCG, KPKU dan melakukan perbaikan atas rekomendasinya. 3. Membuat Laporan Manajemen Risiko Korporat (ERM), dan *Monitoring* Implementasi Manajemen Risiko Korporat (ERM). 4. Melakukan konsultasi implementasi GCG, ERM, aplikasi IT GRC, dan KPKU. 5. Menyusun kebutuhan pelatihan di bidang, tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko di Divisi CRM. 6. Menyusun infrastruktur dan *soft structure* GRC. 7. Pengukuran Tingkat Kematangan GRC (*Maturity Level*). 8. Mendampingi dan melakukan pengawalan atas proyek-proyek perusahaan dalam rangka mitigasi atas risiko yang muncul 9. Perolehan penghargaan di bidang GCG.

PENERAPAN GCG SECARA BERKELANJUTAN

Pada prinsipnya, penerapan GCG di Bio Farma berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh tenaga kerja dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Perseroan senantiasa melakukan evaluasi penerapan GCG secara berkelanjutan, sehingga penerapan GCG akan selalu mengalami peningkatan.

Mekanisme penerapan GCG di Bio Farma tidak seperti siklus yang digambarkan, melainkan sebagaimana attachment di samping kiri.

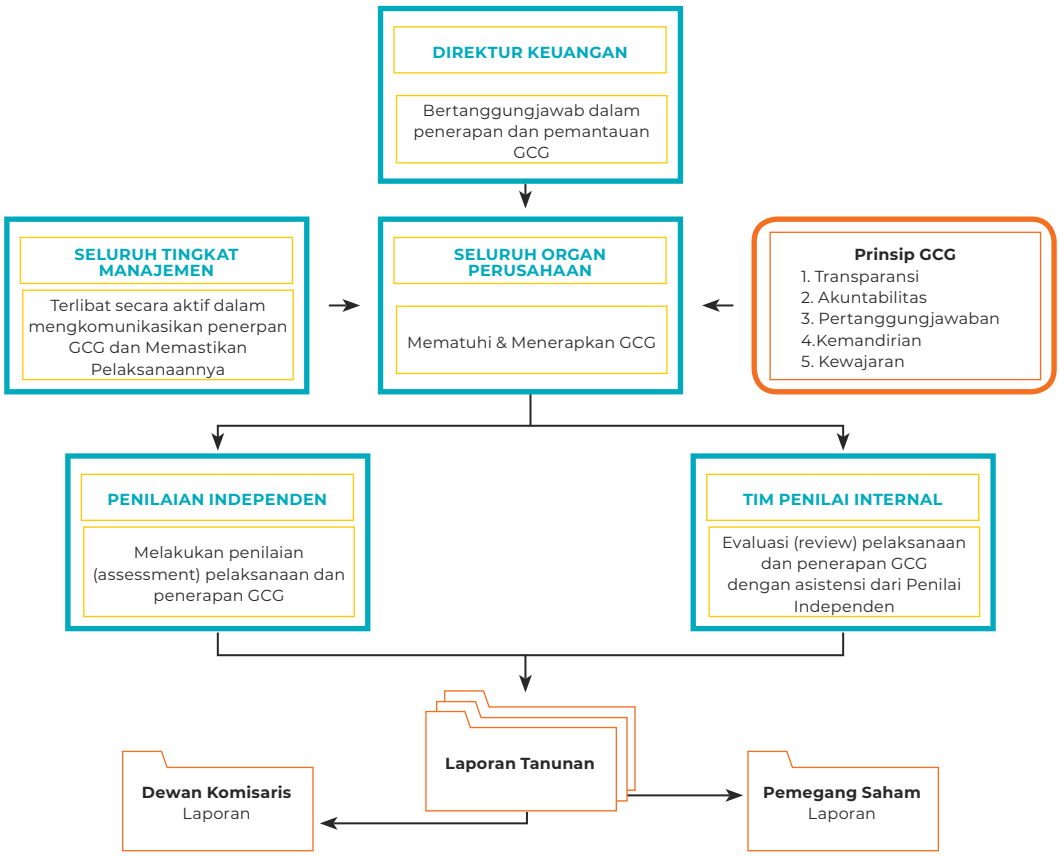

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Seluruh Insan Bio Farma berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan/peraturan yang diterbitkan oleh Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

MONITORING PENERAPAN GCG

Bio Farma melakukan *monitoring* penerapan GCG secara berkala setiap tahun dengan melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil asesmen GCG baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun oleh pihak internal.

PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI GCG

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi GCG, Bio Farma memiliki Kebijakan/Pedoman sebagai berikut:

1. Pedoman Penerapan GCG, Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) dan Pedoman Perilaku.
2. Piagam/*Charter* Komite Audit, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, serta Satuan Pengawasan Intern.
3. Kebijakan Pengelolaan Penyampaian Informasi Melalui Media Massa, Kebijakan Pemutakhiran

Konten Website, Kebijakan Distribusi Informasi Internal, Kebijakan Penetapan Klasifikasi Informasi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

4. Kebijakan Manajemen Risiko.
5. Kebijakan Teknologi Informasi.
6. Kebijakan Sumber Daya Manusia.
7. Pedoman dan Prosedur Baku Setiap Unit Kerja.

Adanya pengukuran terhadap penerapan GCG berupa penilaian *(assessment)* dan evaluasi *(review)* sesuai dengan PERMEN BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara merupakan upaya Perusahaan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kualitas implementasi GCG di PT Bio Farma (Persero).

ASESMEN PENERAPAN GCG

Asesmen penerapan GCG di Bio Farma mengacu pada pasal 44 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN Bab XII tentang Pengukuran Terhadap Penerapan GCG, yang mewajibkan BUMN untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk penilaian *(assessment)*, yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan melakukan evaluasi *(review),* yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Penilaian yang menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat yang telah melakukan asesmen GCG secara berkala selama 6 periode. Pada tahun 2018, dilakukan *self assessment* untuk menilai penerapan GCG tahun 2017 dan di tahun 2017 dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat untuk menilai penerapan GCG tahun 2016. Adapun hasil assessment GCG periode penilaian tahun 2017 mencapai skor 90,53, termasuk ke dalam predikat kategori “Sangat Baik”.

HASIL *ASSESSMENT* PENERAPAN GCG PADA PT BIO FARMA (PERSERO) TAHUN 2017

Aspek Pengujian / Indikator/Parameter		Bobot	Capaian Tahun 2017		Penjelasan
			Skor	% Capaian	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7	6,81	97,28	Sangat Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS	9	7,76	86,19	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris	35	32,06	91,60	Sangat Baik
IV	Direksi	35	32,82	93,76	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	8,59	95,44	Sangat Baik
	Sub Total	95	88,03		
VI	Aspek Lainnya	5	2,50		
	TOTAL	**100**	**90,53**		**SANGAT BAIK**

Rekomendasi Hasil *Self Assessment* GCG antara lain:

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	
1	Menetapkan secara definitif Direksi dan Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir	√			1. Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor: SK-101/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma 2. Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor: SK-102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan (Persero) PT Bio Farma 3. Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor: SK-27/MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 Tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma
2	Memberikan Penilaian Kinerja Direksi secara individual dan dituangkan dalam RUPS	√			-
3	Menetapkan Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Komisaris dan Penilaiannya	√			-
4	Melaksanakan tindak lanjut atas areas of improvement yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT Bio Farma (Persero)	√			-
5	Melakukan segera pembahasan dan pengesahan atas rancangan RJPP Tahun 2017-2021 atau revisi RJPP	√			• Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2018-2022 PT Bio Farma (Persero) Nomor: S-807/MBU/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 • Rapat Pembahasan Teknis Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2018-2022 PT Bio Farma (Persero) tanggal 23 Oktober 2018 • Rapat Pembahasan Teknis Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2017-2021 PT Bio Farma (Persero)
6	Melaksanakan RUPS pengesahan RKAP secara tepat waktu	√			Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2019 Nomor:10.- tanggal 21 Desember 2018
7	Memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Pemegang Saham secara tepat waktu	√			• Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2018 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor: 19.- tanggal 17 Januari 2018 • Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2018 PT Bio Farma (Persero) Nomor: S-01/DK/BF/I/2018 tanggal 8 Januari 2018

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	
8	Melaksanakan pelatihan sesuai dengan target rencana kerja Dewan Komisaris		√		• Rencana pelatihan Direksi-Komisaris Tahun 2018 (1 kali dalam setahun) • Laporan Kegiatan Executive Development Yogyakarta Tahun 2018
9	Memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan berdasarkan telaahan atas hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas, dan internal control report		√		• Notulen Rapat Komite Audit tanggal 26 Januari 2018 • Notulen Rapat Komite Audit tanggal 23 Februari 2018 • Notulen Rapat Komite Audit tanggal 15 Mei 2018 • Notulen Rapat Komite Audit tanggal 20 Juli 2018 • Notulen Rapat Komite Audit tanggal 25 Oktober 2018 • Notulen Rapat Komite Audit tanggal 10 Desember 2018 • Notulen Rapat Komite Audit tanggal 28 Desember 2018
10	Melakukan telaahan atas hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya		√		-
11	Meningkatkan pemberian arahan dan nasehat tentang kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan		√		Notulen Rapat Komiet Audit tanggal 12 Maret 2018
12	Meningkatkan pemberian arahan dan nasehat tentang kebijakan pengadaan		√		Notulen Rapat Komite Audit tanggal 25 Oktober 2018
13	Melibatkan Komite Dewan Komisaris untuk melakukan telaahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya		√		Notulen Rapat Komite Audit tanggal 23 Februari 2018
14	Memberikan persetujuan/ otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris secara tepat waktu		√		• Persetujuan Kredit Investasi Jangka Panjang Nomor: S-03/DK/BF/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 • Permohonan Persetujuan Kredit Investasi Jangka Panjang Nomor: 00393/DIR/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 • Persetujuan atas Penghapusbukuan dan atau Pemindahtangan Aset Tetap PT Bio Farma (Persero) Nomor: S-24/DK/BF/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 • Permohonan Pelaksanaan Penghapusbukuan dan atau Pemindahtanganan Aset Tetap Tidak Produktif PT Bio Farma (Persero) Nomor: S-24/ DK/BF/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018
15	Mencantumkan besarnya honorarium auditor eksternal dalam pengusulan penunjukan auditor eksternal		√		-
16	Melakukan pembahasan terkait efektivitas pelaksanaan audit eksternal		√		• Evaluasi Komite Audit atas Kinerja KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan dan Usulan Penunjukan KAP untuk melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2018 Nomor: 06/DK-KA/ BF/II/2018 tanggal 12 Maret 2018 • Notulen Rapat tanggal 23 Februari 2018 Pembahasan Progress Tindak Lanjut Audit Internal & Eksternal dan evaluasi system pengendalian intern secara entitas

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	
17	Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan mempertimbangkan realisasi pencapaian masing-masing Direksi		√		
18	Melakukan telaah mengenai muatan GCG pada laporan tahunan Perusahaan		√		
19	Mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan menuangkannya di dalam risalah rapat Dewan Komisaris serta melaporkannya di dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris		√		
20	Memerintahkan Sekretaris Dewan Komisaris untuk memuat penjelasan ketidakhadiran dalam rapat dan evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dalam Risalah Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi		√		
21	Memerintahkan Komite Dewan Komisaris untuk: • Memasukkan dalam Program Kerja Tahunan Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG mengenai rencana self assessment komite tersebut • Mengefektifkan pertemuan rutin Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG sesuai dengan program kerja		√		• Pelaksanaan kegiatan Komite Audit sebanyak 40 (empat puluh) kali. Sedangkan di dalam RKA Komite Audit tahun 2018 direncanakan kegiatan Komite Audit sebanyak 46 (empat puluh enam) kali. • Pelaksanaan kegiatan Komite RPG sebanyak 11 (sebelas) kali. Sedangkan di dalam RKA Komite RPG tahun 2018 direncanakan kegiatan Komite RPG sebanyak 20 (dua puluh) kali.
22	Menyelesaikan proses pemutakhiran Pedoman Penerapan Tata Kelola (GCG) di PT Bio Farma (Persero) dengan memuat organ-organ utama perusahaan dalam penerapan GCG			√	Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-06/DK/BF/12/2018 Nomor: PER-06963/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di PT Bio Farma (Persero)
23	Menyelesaikan proses pemutakhiran Pedoman Perilaku dengan memuat Penghormatan kepada Hak Intelektual dan integritas Laporan Keuangan			√	Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-08/DK/BF/12/2018 Nomor: PER-06965/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	
24	Menempatkan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan			√	-
25	Mengimplementasikan Pedoman Performance Management System (PMS) sebagai sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja unit dan jabatan dalam organisasi termasuk aplikasinya			√	-
26	Menetapkan kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi			√	• Kontrak Manajemen Divisi SDM Tahun 2018 • Kontrak Manajemen Divisi Pengelolaan Lingkungan & Sosial Tahun 2018 • Kontrak Manajemen Divisi Hukum tahun 2018 • Kontrak Manajemen Divisi Manajemen Aset & Umum tahun 2018
27	Mendokumentasikan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit di bawah Direksi secara berjenjang			√	-
28	Mendokumentasikan dan melaporkan pencapaian target kinerja Direksi secara individu kepada Dewan Komisaris			√	-
29	Mempercepat proses penerapan aplikasi e-procurement dalam proses pengadaan Barang dan Jasa			√	-
30	Menetapkan KPI individu yang mencakup indikator kinerja individu dan target kinerja bagi setiap karyawan			√	-
31	Menetapkan kebijakan job tender untuk pengisian jabatan satu level di bawah Direksi sebagai salah satu sarana pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk menduduki jabatan sesuai persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan			√	-
32	Menindaklanjuti rekomendasi/ temuan audit SPI dan eksternal auditor (KAP dan BPK)			√	• Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI • Laporan Hasil Tindak Lanjut SPI Tahun 2018
33	Memperbaharui prosedur kualifikasi dan evaluasi rekanan dengan menambahkan kriteria evaluasi dari aspek service dan cost yang diberikan serta menambahkan pengaturan penilaian kinerja rekanan yang memasok barang investasi			√	-
34	Mencantumkan alasan ketidakhadiran dalam rapat bersama Direksi dan Komisaris			√	-

No.	Rekomendasi	Penanggung Jawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	
35	Meningkatkan pengetahuan dan keahlian staf auditor internal/kualitas tenaga auditor/ personil yang ditugaskan di SPI			√	Spesifikasi dan Sertifikat yang dimiliki personil SPI Tahun 2018
36	Meningkatkan kontribusi terhadap perbaikan/ peningkatan proses Tata Kelola (governance), manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan meningkatkan kualitas rekomendasi hasil audit SPI			√	Dasar penentuan program kegiatan pengawasan tahun 2018 berdasarkan aspek risiko perusahaan, berdasarkan aspek GCG, dan berdasarkan aspek penilaian SPI dan masukan Komite Audit
37	Memastikan bahwa dinamika rapat, dissenting comments, dan penjelasan ketidakhadiran Direksi dituangkan dalam Risalah Rapat			√	-
38	Menyempurnakan laporan tahunan untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku			√	Laporan Tahunan tahun 2018

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Bio Farma wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif, sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor 01 Tahun 2011.

Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada pemegang saham dan Dewan Komisaris dalam Laporan Manajemen (Triwulan dan Tahunan) serta Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham.

Penyampaian Laporan Manajemen (Triwulan dan Tahunan) serta Laporan Tahunan dilakukan tepat waktu.

Pada taanggal 5 November 2018, Bio Farma mendapatkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2018 - Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dari Komisi Informasi Pusat RI.

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah situasi di mana Insan Bio Farma memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga memengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, Direksi BUMN dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan diatur di dalam Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-08/DK/BF/12/2018 Nomor: PER-06965/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct), dimana maksud dan tujuannya adalah sebagai pedoman

bagi Insan Bio Farma memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan, sebagai pedoman dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan, dan mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Terkait ketentuan tersebut, seluruh anggota Direksi Bio Farma telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan dengan isian sebagai berikut sebagai berikut:

Sepanjang tahun 2018, belum pernah terjadi peristiwa-peristiwa terkait benturan kepentingan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

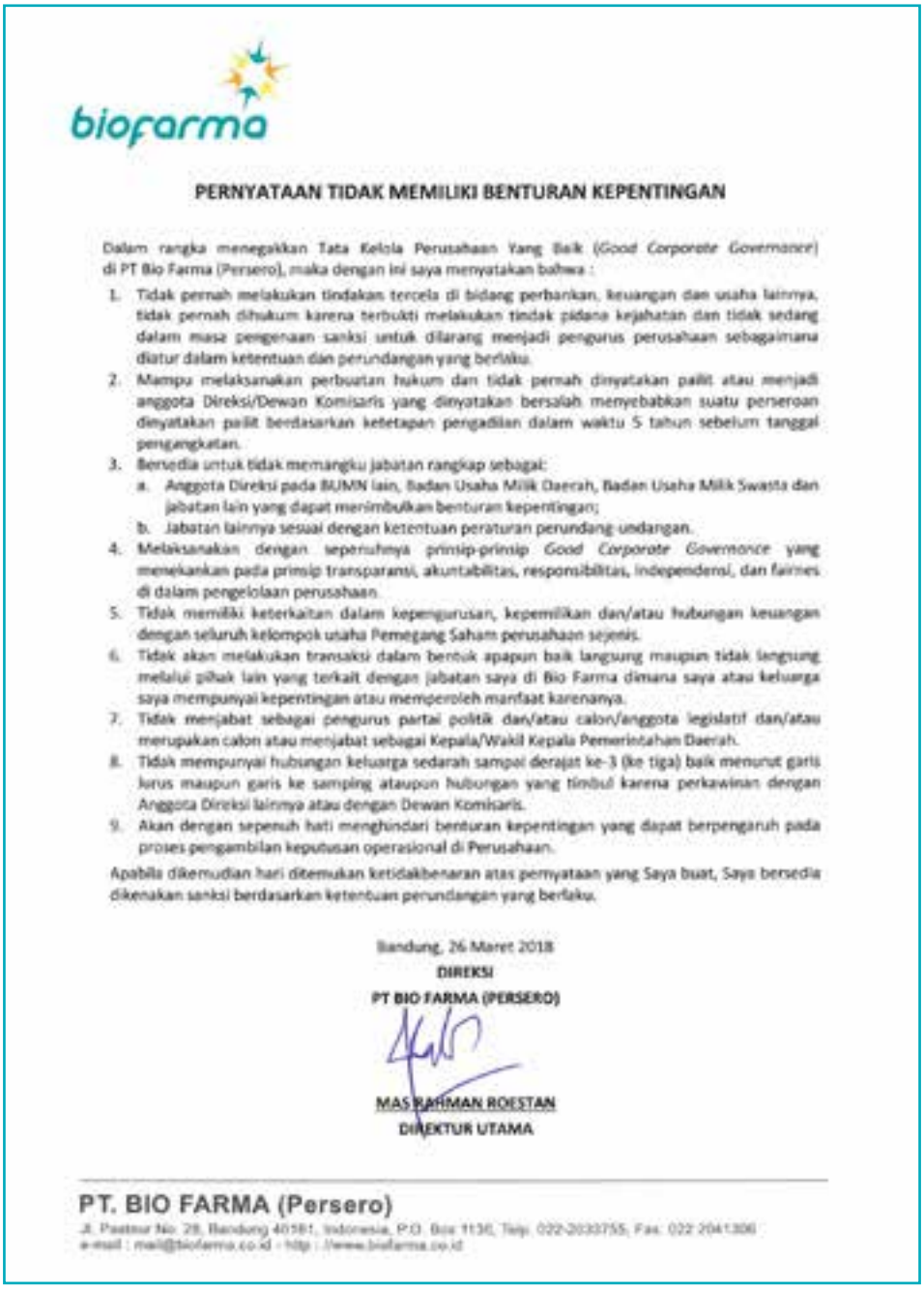

bioFarma

PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di PT Bio Farma (Persero), maka dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundangan yang berlaku.
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan.
3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Direksi pada BUMN lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
   b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness di dalam pengelolaan perusahaan.
5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham perusahaan sejenis.
6. Tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain yang terkait dengan jabatan saya di Bio Farma dimana saya atau keluarga saya mempunyai kepentingan atau memperoleh manfaat karenanya.
7. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah.
8. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Direksi lainnya atau dengan Dewan Komisaris.
9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan.

Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas pernyataan yang Saya buat, Saya bersedia dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bandung, 26 Maret 2018

DIREKSI

PT BIO FARMA (PERSERO)

MAS RAHMAN ROESTAN

DIREKTUR UTAMA

PT. BIO FARMA (Persero)

Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161, Indonesia, P.O. Box 1130, Telp. 022-2033755, Fax. 022 2041306
e-mail : mail@biofarma.co.id - http : //www.biofarma.co.id

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Untuk memperkuat budaya antigratifikasi di Bio Farma, pada tahun 2018 Bio Farma menandatangani Komitmen Pencegahan Terintegrasi bersama KPK. Dalam Komitmen tersebut salah satunya Bio Farma berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Bio Farma.

Tujuan ditetapkannya Pedoman ini adalah memberikan panduan bagi Insan Bio Farma untuk memahami definisi dan konsep Gratifikasi serta mengetahui harus bersikap bagaimana apabila berhadapan dengan Gratifikasi, memberikan panduan mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan Gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap, dan membentuk lingkungan Perusahaan yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik Gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Insan Bio Farma dapat mengidentifikasi dan menilai apakah suatu pemberian yang diterimanya cenderung ke arah Gratifikasi ilegal/suap atau legal, dapat berpedoman pada motif pemberian hadiah yang diberikan oleh pihak pemberi, hubungan kekuasaan/posisi setara, hubungan relasi kuasa yang bersifat strategis, potensi benturan kepentingan, metode pemberian, dan kepantasan/kewajaran nilai serta frekuensi pemberian yang diterima

SOSIALISASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Sosialisasi pengendalian gratifikasi dilakukan melalui media tatap muka yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2018, e-mail, banner, poster, intranet dan website, video animasi, buletin dan laporan tahunan. Pada saat hari besar keagamaan dilakukan sosialisasi yang melarang untuk menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun, baik parcel, bingkisan, uang, dan sebagainya.

GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN

1. Gratifikasi dalam kategori ini merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh ASN/Penyelenggara Negara dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima.
2. Insan Bio Farma wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi gratifikasi yang diterima:
   a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
   b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
   c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
   d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Perusahaan;
   e. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi Karyawan;
   f. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
   g. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
   h. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan/atau jasa;
   i. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
   j. Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Insan Bio Farma dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
   k. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
   l. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Insan Bio Farma.
3. Dibawah ini adalah contoh penerimaan gratifikasi yang jika ditinjau dari segala keadaan dapat dianggap terkait dengan jabatan ASN/Penyelenggara Negara yang menerimanya sehingga wajib dilaporkan, antara lain:
   a. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, apaman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
   b. Penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;

c. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
d. Pemberian sesama Karyawan dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
e. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

GRATIFIKASI YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

Bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi:

a. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, akak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan;
b. Hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
c. Pemberi terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
d. Pemberian sesama karyawan dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
e. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
f. Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
g. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
h. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
i. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi karyawan berdasarkan keanggotaan koperasi karyawan yang berlaku umum;
j. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
k. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
l. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/karyawan, tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Pada tahun 2018, tidak terdapat pelaporan atas penerimaan Gratifikasi yang disampaikan oleh pelapor kepada UPG (Unit Pengendali Gratifikasi), dan yang selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada KPK. Untuk yang langsung melaporkan penerimaan gratifikasi ke KPK ada 1 (satu) pelaporan terkait pernikahan. Ketentuan terkait laporan penerimaan Gratifikasi yang disampaikan oleh pelapor kepada UPG dan diteruskan kepada KPK tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja.

GRATIFIKASI YANG TERKAIT DENGAN KEDINASAN

1. Penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi terkait dengan kedinasan adalah setiap penerimaan yang memiliki karakteristik umum sebagai berikut:
   a. Diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi;
   b. Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan, artinya dapat dimaknai cara pemberian yang terbuka, yaitu disaksikan atau diberikan di hadapan para peserta yang lain, atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan;
   c. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai (mengacu pada standar biaya umum), untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan; dan
   d. Selain bentuk-bentuk yang dinyatakan tidak wajib dilaporkan dalam rangkaian kegiatan kedinasan.
2. Contoh dari penerimaan dalam kedinasan antara lain:
   a. Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima oleh Insan Bio Farma dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi;
   b. Plakat, vandel, *goody bag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diterima oleh Insan Bio Farma dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
   c. Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
   d. Penerimaan honor, insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh Insan Bio Farma dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi.

***FLOWCHART* PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI BIO FARMA**

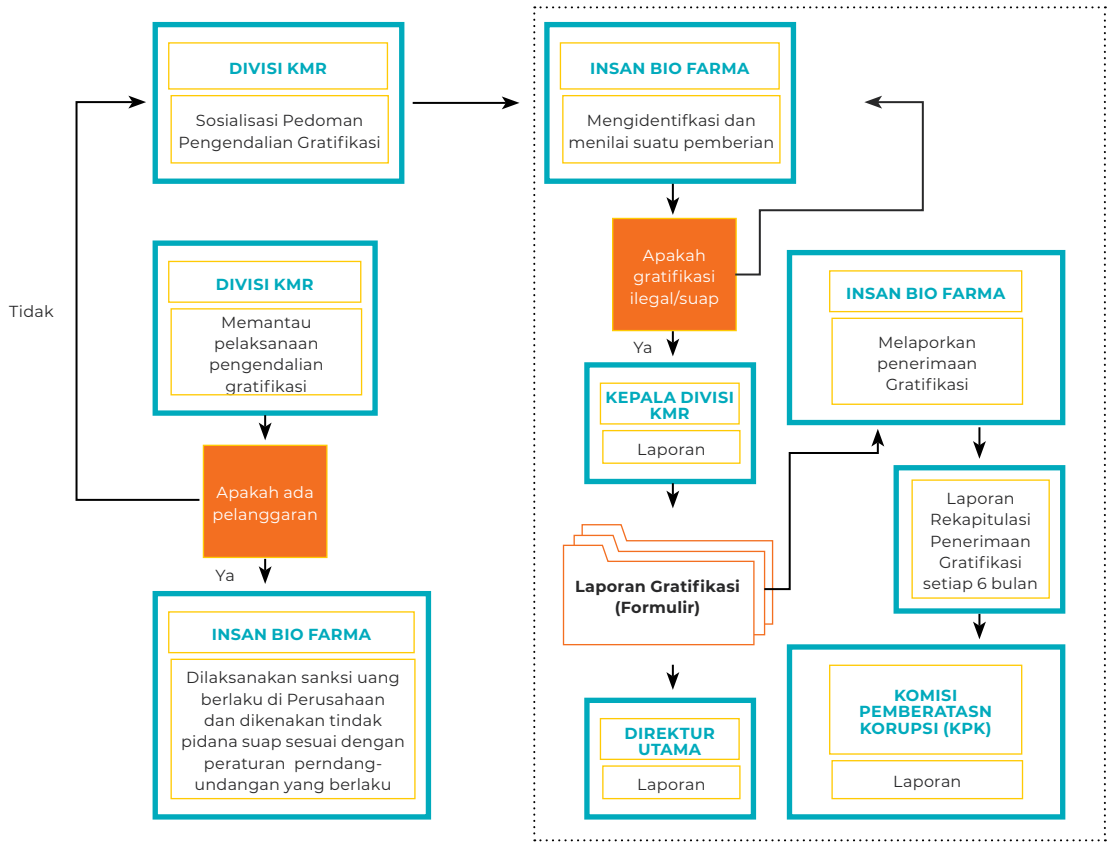

KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN DAN PROMOSI

Berdasarkan Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-08/DK/BF/12/2018; PER-06965/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Perusahaan menaati peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang berlaku;
b. Perusahaan melakukan rekrutmen tenaga kerja, memberikan pelatihan, melakukan promosi, pemberhentian, pemberian kompensasi dan pemberian lainnya secara adil tanpa memandang suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, hubungan pribadi, kewarganegaraan, cacat atau karakteristik lain yang dilindungi oleh hukum;
c. Perusahaan berkomitmen bahwa setiap Karyawan mempunyai hak yang sama dalam kenaikan pangkat, jabatan dan pengembangan karirnya di Perusahaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan prestasi kerja dan kinerja yang ditunjukkan, dengan menjunjung tinggi kesetaraan kerja termasuk didalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi ras, suku, jenis kelamin dan agama;
d. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh Karyawan dan tidak mentolerir praktek-praktek diskriminatif dalam pekerjaan dengan alasan apapun;
e. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan intimidasi, baik yang dilakukan terhadap atasan, bawahan, rekan sekerja, pelanggan/konsumen, pemasok atau mitra bisnis perusahaan. Pelecehan dan intimidasi tersebut dapat berupa ancaman, tindak kekerasan dan berbagai bentuk disriminasi dan pelecehan yang didasari perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia ataupun ketidakmampuan pribadi melalui komentar, gurauan dan/atau tindakan semacamnya.

PERILAKU ASUSILA, NARKOTIKA, OBAT TERLARANG DAN PENJUDIAN SETIAP INSAN BIO FARMA:

1. dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, memfitnah;
2. dilarang menggunakan, mengedarkan, menyimpan dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya serta minuman keras;
3. dilarang mengedarkan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pornografi;
4. dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun;
5. dilarang membawa senjata api dan senjata tajam serta senjata lainnya di lingkungan Perusahaan.

PENCATATAN DAN PENYUSUNAN DATA PERUSAHAAN SERTA INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

Insan Bio Farma berkewajiban untuk melakukan pengelolaan data Perusahaan secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu.

1. mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, diversifikasi keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. menyampaikan laporan secara benar, lengkap, jelas dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan;
4. melakukan dokumentasi dokumen, laporan dan berkas-berkas sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
5. menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas-berkas Perusahaan dengan tertib sehingga mudah ditemukan dan digunakan sewaktu-waktu oleh semua pihak yang berkepentingan;
6. penggunaan, pendistribusian dan pemusnahan dokumen, laporan dan berkas-berkas Perusahaan sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
7. dilarang memalsukan dokumen, laporan dan berkas-berkas Perusahaan;
8. dilarang membiarkan dokumen, laporan dan berkas-berkas yang tidak benar atau transaksi yang melanggar hukum;
9. seseorang di Perusahaan yang karena kedudukan atau profesinya atau hubungan usaha dengan Perusahaan dilarang menggunakan dokumen laporan dan berkas-berkas serta informasi Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan berpotensi merugikan Perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya;
10. setiap Insan Bio Farma bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen, laporan dan berkas-berkas serta informasi yang ada di bawah pengawasannya;

11. Laporan Keuangan Perusahaan harus dibuat akurat mengingat data tersebut mendukung prinsip-prinsip integritas dan kejujuran usaha, di samping itu juga reputasi Perusahaan bergantung pada akurasi datanya.

PERLINDUNGAN INFORMASI PERUSAHAAN

1. Seluruh Insan Bio Farma berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nonpublik Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha;
2. Informasi nonpublik adalah informasi yang oleh Perusahaan belum diungkapkan atau belum tersedia secara umum bagi publik. Contohnya informasi yang berkaitan dengan Peraturan Direksi/Keputusan Direksi yang bersifat strategis dan menjadi rahasia Perusahaan, dokumen Perusahaan lainnya yang merupakan alur proses bisnis Perusahaan dan menjadi rahasia Perusahaan, risalah rapat Perusahaan, perjanjian dengan pihak ketiga, proses manufaktur retail, formula, hasil riset, dokumen pengujian, dokumen validasi dan kalibrasi, dokumen dan nota-nota keuangan, instrumen keuangan, dokumen lain yang akan ditetapkan oleh Direksi, informasi lain yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, dan informasi lain yang tidak boleh diungkapkan sebagaimana diatur di dalam Peraturan di Perusahaan terkait pengelolaan informasi.
3. Pengungkapan informasi nonpublik hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan dalam rangka menyampaikan informasi yang relevan kepada auditor internal atau eksternal dalam proses audit atau kepada penegak hukum dalam rangka penyelidikan atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Insan Bio Farma yang bekerja dengan data atau informasi milik pemberi pekerjaan, rekanan dan mitra bisnis yang dikategorikan rahasia, dilarang mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi, atau tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain, kecuali diwajibkan oleh hukum;
5. Insan Bio Farma yang telah menyelesaikan masa tugasnya di Perusahaan dilarang mengungkapkan informasi nonpublik Perusahaan yang diperolehnya selama menjabat kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyelidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak lagi menjadi rahasia milik Perusahaan;
6. Keterbukaan informasi mencakup:
   a. Perusahaan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dengan kegiatan usaha Perusahaan kepada pihak yang berwenang seperti Laporan Tahunan, Laporan Manajemen dan lain-lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tepat waktu, akurat, jelas dan objektif;
   b. Perusahaan akan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan kepada pihak-pihak yang kepentingan sesuai dengan prosedur Keterbukaan Informasi Publik di Perusahaan.

PERLINDUNGAN ASET PERUSAHAAN

Terhadap aset Perusahaan setiap Insan Bio Farma berkewajiban untuk:

1. Menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menggunakan aset perusahaan sesuai dengan peruntukannya, sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaannya yang sedang diaksanakan;
3. Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya;
4. Dilarang untuk memindahkan secara tidak sah peralatan, persediaan maupun aset perusahaan lainnya;
5. Fasilitas dan peralatan komunikasi seperti telepon, faksimili, e-mail dan sarana telekomunikasi lainnya hanya dipergunakan untuk keperluan perusahaan. Komunikasi pribadi harus dibatasi dan dijaga pada tingkat penggunaan minimal;
6. Menjaga akurasi pencatatan dan pelaporan aset perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bio Farma berkomitmen memenuhi seluruh kontrak penjualan yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dan pemenuhan pasokan kepada pelanggan. Ini semua tercermin dalam etika perusahaan sebagai berikut:

1. bekerja keras untuk memberikan hasil produksi terbaik dengan harga terjangkau;
2. mengedepankan standar layanan yang profesional demi memuaskan pelanggan;
3. memperhatikan kebutuhan para pelanggan melalui peningkatan standar kerja yang tersistem didukung teknologi yang tinggi;
4. mempertahankan kualitas produk, Bio Farma memperhatikan aspek keselamatan dan inovasi pada setiap tahap proses pengembangan, produksi, dan distribusi.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Bio Farma mendukung secara nyata K3 dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K3, meningkatkan partisipasi semua pihak untuk optimalisasi pelaksanaan budaya K3 di lingkungan Perusahaan. Sehingga, dengan menerapkan K3 diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan terjadinya kejadian berbahaya lainnya. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Bio Farma pelaksanaan K3 dengan melakukan sosialisasi penerapan kegiatan yang melibatkan seluruh aspek di lingkungan perusahaan secara langsung, seperti pemantauan kegiatan K3 dan rutin melakukan *safety patrol* ke setiap bagian. Untuk masyarakat, Bio Farma melalui TTD ikut terlibat secara langsung dalam memberikan bantuan dan penanganan bagi para korban bencana alam, seperti penanganan bencana gunung berapi, bencana banjir bandang, bencana tsunami, bencana longsor dan bencana banjir.

Sertifikasi *Occupational, Health and Safety Management System*-OHSAS 18001: 2007 untuk pengelolaan keamanan, keselamatan dan kesehatan bekerja yang dimiliki oleh Bio Farma merupakan salah satu bentuk keberhasilan Bio Farma dalam mengimplementasikan K3 di lingkungan perusahaan. Selain Sertifikasi OHSAS 18001:2007, Bio Farma selama tiga tahun berturut-turut berhasil meraih *Zero Accident Award* sebagai keberhasilan kecelakaan nihil di lingkungan kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bio Farma berharap melalui pengoptimalan Sistem Manajemen K3 dan implementasi K3 menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat menuju nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja guna peningkatan produksi dan produktivitas nasional dapat segera terwujud. Keberadaan P2K3 di lingkungan Bio Farma memiliki tujuan untuk menjamin keberadaan tenaga kerja secara jasmani maupun rohani melalui proses identifikasi, analisa, penilaian, dan pengendalian sumber potensi bahaya yang berkaitan dengan peralatan, bahan, proses, cara kerja serta lingkungan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, peraturan sekaligus pedoman K3.

Sehingga dapat tercipta sistem K3 yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dengan mengimplementasikan sistem K3 diharapkan mampu mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja, dan menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Bio Farma memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan disetujui bahwa kewajiban dividen dari laba bersih tahun buku 2017 yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Tahunan tahun buku 2017 pada tanggal 25 April 2018 adalah sebesar Rp236,41 miliar. Untuk kewajiban dividen atas laba bersih tahun buku 2018 akan ditetapkan pada RUPS tentang Laporan Tahunan tahun buku 2018.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab, pemegang saham memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. harus memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan;
2. perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

Hak pemegang saham harus dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

HAK PEMEGANG SAHAM

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat;
3. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya;
4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham;
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam perusahaan, maka:
   (i) setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki;
   (ii) setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.

Pemegang saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

Tanggung jawab pemegang saham

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
   (i) memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
   (ii) mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
3. Pemegang saham harus dapat:
   (iii) memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi;
   (iv) memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
4. Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antarperusahaan dapat dilakukan secara jelas.

TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

1. Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
2. Perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
4. Perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
5. Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.

PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku kepentingan, selain pemegang saham, adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan. Antara perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Agar hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perusahaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan gender serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing;
2. Perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan;
3. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat sekitar perusahaan, serta pengguna produk dan jasa perusahaan.

PEDOMAN POKOK PELAKSANAAN KARYAWAN

1. Perusahaan harus menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam mengambil keputusan mengenai penerimaan karyawan.
2. Penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, penetapan jenjang karier dan penentuan persyaratan kerja lainnya harus dilakukan secara obyektif, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender* dan kondisi fisik seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan harus memiliki peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola rekrutmen serta hak dan kewajiban karyawan.
4. Perusahaan harus menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif.
5. Perusahaan harus memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu.
6. Perusahaan harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. Untuk itu perusahaan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku.
7. Karyawan serta serikat pekerja yang ada di perusahaan berhak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan.
8. Karyawan berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan.

MITRA BISNIS

1. Mitra bisnis adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur dan pihak lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan.
2. Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
3. Mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan perusahaan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar.
4. Kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan, Perusahaan dan mitra bisnis berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak.

MASYARAKAT SERTA PENGGUNA PRODUK DAN JASA

1. Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, termasuk penerapan program kemitraan dan bina lingkungan.
2. Perusahaan bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta dampak negatif terhadap dan keselamatan pengguna.
3. Perusahaan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan harus menyampaikan informasi kepada masyarakat yang dapat terkena dampak kegiatan perusahaan.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Bio Farma memiliki Kebijakan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diatur di dalam Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: 03991/DIR/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Bio Farma (Persero).

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Wajib Lapor LHKPN Berdasarkan Kebijakan Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Bio Farma adalah:

Kebijakan tersebut mengatur bahwa karyawan di lingkungan PT Bio Farma (Persero) yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah pejabat sampai dengan 2 (dua) tingkat di bawah Direksi. LHKPN disampaikan pada saat baru pertama kali menjabat, mengalami promosi atau transfer karir, dan mengakhiri jabatan atau pensiun. Pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis dalam bentuk surat peringatan.

Kebijakan tersebut menunjuk Kepala Divisi Human Capital Division sebagai Koordinator Pengelolaan LHKPN, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan KPK mengenai perubahan regulasi LHKPN, melaksanakan pemonitoran dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN serta melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi e-LHKPN;
2. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Sumber Daya Manusia, Kementerian BUMN terkait LHKPN;
3. Mengingatkan pejabat di Bio Farma untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
4. Menerima rekomendasi pemberian sanksi dari KPK atau memberikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Pejabat yang tidak melaporkan atau tidak mengumumkan LHKPN. Rekomendasi pemberian sanksi disampaikan kepada atasan langsung Pejabat yang belum melaksanakan pelaporan dan/atau pengumuman LHKPN.

Dewan Komisaris juga mengatur mengenai LHKPN bagi Dewan Komisaris di dalam SK Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) tanggal 18 Maret 2016 Nomor: SK-04/DK/BF/03/2016 Tentang Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero).

LAPORAN LHKPN TAHUN 2018

Sesuai Surat Edaran Pimpinan KPK No. 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN setelah diberlakukannya Peraturan KPK No. 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pelaporan LHKPN dilakukan secara tahunan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret setelah tahun berjalan dan dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi e-LHKPN. Penyampaikan melalui e-LHKPN ini baru diberlakukan untuk periode pelaporan tahun buku 2017 yang akan ditutup pada 31 Maret 2018. Untuk dapat melaksanakan pelaporan e-LHKPN tersebut dengan baik, maka pada tanggal 26 Maret 2018 Bio Farma bekerjasama dengan KPK telah melaksanakan Sosialiasi e-LHKPN dan bimbingan teknis penyampaian LHKPN.

Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2018 seluru pejabat di Bio Farma telah melaporkan LHKPN sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN DI BIO FARMA

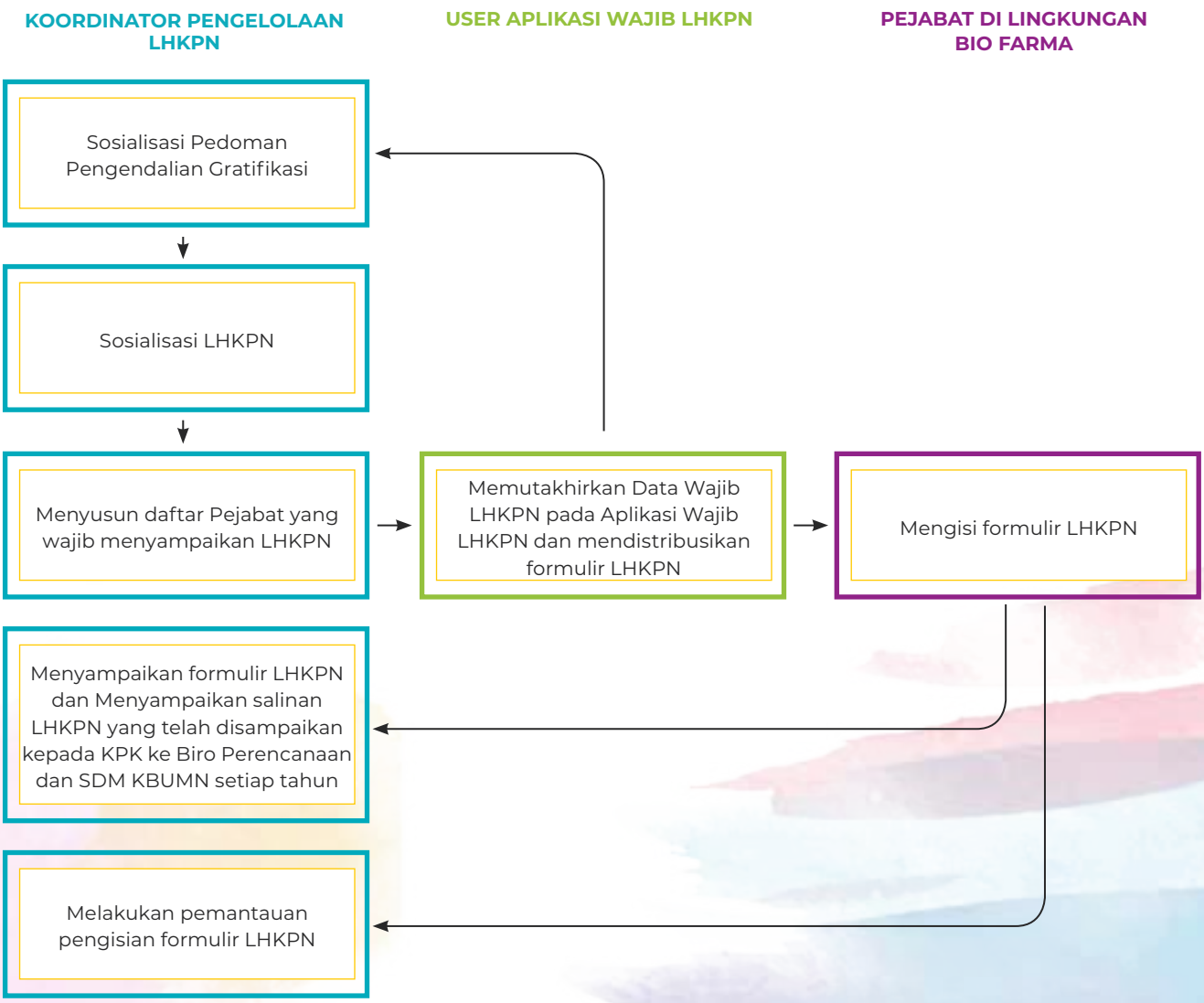

URAIAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris ditunjuk berdasarkan hasil RUPS dan UU No, 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungksi, wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris sebagai Organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan menerapkan GCG secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
2. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi.
3. Jumlah Komisaris Independen dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.
3. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
4. Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan melaksanakan Pedoman GCG.

HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH DEWAN KOMISARIS BIO FARMA DALAM MENJALANKAN TUGAS

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan dalam mengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan antar Dewan Komisaris maupun hubungan terhadap Direksi.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.
5. Anggota Dewan Komisaris memahami dan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Anggota Dewan Komisaris memahami dan melaksanakan Pedoman GCG.

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bio Farma disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bio Farma memiliki Dewan Komisaris Independen, yaitu Dewan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PROSES PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Proses pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUHAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bio Farma telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit & proper test*) berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta peraturan dan ketentuan lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bio Farma memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik. Hal tersebut terbukti dengan lulusnya *fit and proper test*.

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Pelaksana	Representasi	Lulus *Fit & Proper Test.*
Ahmad M. Ramli **	Komisaris Utama	12 April 2013 s/d 20 April 2018	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Ihsan Setiadi Latief *	Komisaris	1Mei 2013 s/d 11 April 2018	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Heridadi	Komisaris	23 Januari2014 s/d sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
H.M. Subuh	Komisaris	22 Juni 2015 s/d sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Farid Wadjdi Husain ***	Komisaris Utama	20 April 2018 s/d sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Saud Usman Nasution***	Komisaris Indepen	20 April 2018 s/d sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Made Arya Wijaya***	Komisaris	20 April 2018 s/d sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Yuni Suryanto***	Komisaris Independen	20 April 2018 s/d sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus

Keterangan
* Berakhir masa jabatan : tanggal 11 April 2018
** Berakhir masa jabatan : tanggal 20 April 2018
***Mulai menjabat : tanggal 20 April 2018

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)*. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui tahap *fit & proper test*.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS melalui proses yang transparan serta memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, *Board Manual* dan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dengan pertimbangan aspek integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan bisnis Bio Farma.

KRITERIA/PERSYARATAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

KRITERIA/PERSYARATAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

Bio Farma memiliki kriteria persyaratan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan sebagai berikut:

PERSYARATAN FORMAL

Persyaratan formal untuk menjadi Dewan Komisaris Bio Farma, yaitu:

1. orang perseorangan,
2. cakap melakukan perbuatan hukum,
3. dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

PERSYARATAN MATERIIL

Persyaratan materiil anggota Dewan Komisaris:

1. Berintegrasi,
2. Berdedikasi tinggi,
3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,
4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan,
5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

PERSYARATAN LAIN

Persyaratan lain untuk menjadi Dewan Komisaris Bio Farma:

1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terpilih dan calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
3. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
4. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

ALASAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri atau RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sewaktu-waktu dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris:
   a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
   b. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
   c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
   d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Dewan Komisaris;
   e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   f. Mengundurkan diri.

3. Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Menteri atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN misalnya, tetapi tidak terbatas pada:
   a. dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
   b. memasuki masa usia pensiun dan Aparatur Sipil Negara, bagi Dewan Komisaris yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

TATA CARA PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

1. Deputi Teknis berkoordinasi dengan Sekretaris untuk melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan dan berdasarkan hasil evaluasi menyampaikan usulan pemberhentian anggota Dewan Komisaris kepada Menteri guna mendapatkan penetapan disertai dengan penjelasan mengenai alasan pemberhentian.
2. Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi Menteri sendiri atau dapat meminta pertimbangan Deputi Teknis, Sekretaris dan/atau Deputi.
3. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk melakukan pemberitahuan dan dapat juga menugaskan Sekretaris dan/atau Deputi berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan pemberitahuan.
4. Keputusan pemberhentian setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela. Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan diberitahu. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan oleh Menteri/pejabat yang memberitahukan.
5. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang bersangkutan dan Menteri/ pejabat yang memberitahukan.
6. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
7. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam forum RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
8. Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, disiapkan oleh Deputi Teknis dengan berkoordinasi dengan pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh dokumen terkait disampaikan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
9. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri.
10. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS dan keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
11. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka Deputi Teknis dan Sekretaris memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
12. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS secara fisik dan apabila Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
13. Menteri dapat pula memberi kuasa kepada Deputi dan/atau Sekretaris untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
14. Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
15. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan.
16. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis Bio Farma untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, efisien, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.

Pada tahun 2018 terjadinya perubahan komposisi Dewan Komisaris Bio Farma berdasarkan keputusan RUPS tahunan tanggal 20 April 2018, yaitu berakhirnya masa jabatan diputuskan pemberhentian dengan hormat Ahmad M. Ramli sebagai Komisaris Utama, Nizar Yamanie, Paruli Lubis dan Ihsan Setiadi Latief sebagai Komisaris. Kemudian mengangkat Farid Wadjdi Husain sebagai Komisaris Utama, Made Arya Wijaya, Saud Usman Nasution dan Yuni Suryanto sebagai Komisaris. Terhitung sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.

Komposisi Dewan Komisaris Bio Farma berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 5 (lima) orang Komisaris. Nizar Yamanie dan Paruli Lubis telah berakhir masa jabatannya tahun 2017. Berikut komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari-20 April dan dasar pengangkatan sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan dan Pemberhentian
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	Indonesia	23 Januari 2014 s/d 20 April 2018	KepMen BUMN Nomor:SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Utama KepMen BUMN Nomor: SK–102/ MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pemberhentian Menjadi Komisaris Utama
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	Indonesia	1 Mei 2013s/d 20 April 2018	KepMen BUMN Nomor:SK-235/MBU/2013 tanggal 1Mei2013 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris KepMen BUMN Nomor: SK–102/ MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pemberhentian Menjadi Dewan Komisaris Independen
Heridadi	Komisaris Independen	Indonesia	23 Januari 2014 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor:SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari2014 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris KEP-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Independen
H.M. Subuh	Komisaris	Indonesia	22 Juni 2015 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor: SK-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni2015

Pada tanggal 20 April 2018 terjadinya pergantian susunan Dewan Komisaris. Telah mengakhiri masa jabatannya: Ahmad Ramli diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris Utama yang digantikan oleh Farid Wadjdi Husain, Ihsan Setiadi diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris dan Wakil Ketua Komite Audit digantikan oleh Yuni Suryanto. Nizar Yamanie diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris dan Wakil Ketua Komite Risiko, Pengembangan dan GCG digantikan oleh Saud Usman, Paruli Lubis diberhentikan dengan hormat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit digantikan oleh Made Arya Wijaya.

Komposisi Dewan Komisaris Bio Farma per tanggal 20 April 2018-31 Desember 2018 berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 5 (lima) orang Komisaris dengan komposisi dan dasar pengangkatan sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan
Farid Wadjdi Husain	Komisaris Utama	Indonesia	20 April 2018 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor: SK–102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Utama
Saud Usman Nasution	Komisaris Independen	Indonesia	20 April 2018 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor: SK–102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Independen
Made Arya Wijaya	Komisaris	Indonesia	20 April 2018 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor: SK–102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris
Yuni Suryanto	Komisaris	Indonesia	20 April 2018 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor: SK–102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris
Heridadi *	Komisaris Independen	Indonesia	23Januari2014 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor:SK-17/MBU/2014 tanggal23Januari2014 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris KEP-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris menjadi Dewan Komisaris Independen KepMen BUMN Nomor:SK-13/MBU/01/2019 tanggal 08 Januari 2019 Tentang Pemberhentian menjadi Dewan Komisaris Independen
H.M. Subuh	Komisaris	Indonesia	22 Juni 2015 s/d sekarang	KepMen BUMN Nomor: SK-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris

Riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Apabila dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, maka tindak lanjut yang dilakukan Perusahaan mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

URAIAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN PENETAPAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baik dan menerapkan GCG yang berkelanjutan, dalam penetapan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris Bio Farma mengacu pada pedoman dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
2. Anggaran Dasar Perusahaan
3. Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero)

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perusahaan yang pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dilaporkan kepada RUPS. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, lingkup pekerjaan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan.

TUGAS DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
   a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
   b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

1. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berwenang untuk:
   a. Melihat buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
   b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
   c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
j. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
k. Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

2. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:
   a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
   b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BowT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerjasama lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Menyewakan aset,
         Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk menyewakan aset Perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai sewa/transaksi lebih dari 1% sampai dengan 2,5% dari pendapatan (*revenue*), atau lebih dari 2% sampai dengan 5% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
      2. Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT) Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BowT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO).
      3. Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan kerjasama Bangun Serah Guna (*Build Operate Transfer*/BOT) Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BowT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 tahun dengan nilai aset Perusahaan yang dikerjasamakan lebih dari 6% sampai dengan 12,5% dari pendapatan (*revenue*) atau lebih dari 6,5% sampai dengan 13% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
      4. Kontrak manajemen dan kerjasama lainnya,
         Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan kontrak manajemen dan kerjasama lainnya dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perusahaan yang dikerjasamakan) lebih dari 2,5% sampai dengan 5% dari pendapatan (*revenue*) atau lebih dari 5% sampai dengan 10% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
      5. Pelaksanaan tindakan tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4, harus disertai dengan Pakta Intergritas yang berisi pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris bahwa pelaksanaan tindakan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan dengan itikad baik, tanpa pengaruh pihak lain dan tanpa benturan kepentingan, serta dengan penuh kehati-hatian untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
   c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan dari Perusahaan, dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dari Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Internal;
h. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)*.

3. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan atas permohonan Direksi sebagaimana dimaksud angka 2 diatas.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJP Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJP Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP;
9. Membentuk Komite Audit;
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberi nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS;
15. Dewan Komisaris harus memantau bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
16. Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*/KPI) Dewan Komisaris kepada RUPS;
17. Menyajikan laporan triwulan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*/KPI) kepada pemegang saham.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG (RJP)

Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

1. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
2. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan yang tercantum dalam RKAP yang merupakan penjabaran dari RJP.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNANLAPORAN TAHUNAN (*ANNUAL REPORT*)

1. Dewan komisaris melakukan telaahatas Rancangan Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan, untuk selanjutnya oleh Direksi disampaikan kepada pemegang saham.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO BIO FARMA

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA BERKAITAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BIO FARMA

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI BIO FARMA

1. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.
2. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
3. Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
4. Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
5. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUORUM RAPAT DEWAN KOMISARIS

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, hanya oleh anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, berdasarkan kuasa tertulis yang khusus untuk keperluan Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

PENDELEGASIAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud dan pendelegasian wewenang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab 18 (delapan belas) melalui surat kuasa khusus. Seluruh kuorum Rapat Dewan Komisaris untuk pengambilan keputusan dapat terpenuhi.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasehatan, Dewan Komisaris telah melakukan pembagian tugas diantara para anggota Dewan Komisaris.

Pembagian tugas Dewan Komisaris Bio Farma Periode 1 Januari 2018-20 April 2018, sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) No: KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 sebagai berikut:

No.	Nama	Bidang Tugas	Perincian Tugas
1	Ahmad M. Ramli*	Komisaris Utama	Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Dewan Komisaris· Melakukan pengawasan serta memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam melakukan tugasnya secara keseluruhan termasuk ketaatan pada ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2	Ihsan S. Latief *	Membidangi Pemasaran dan Teknologi Informasi	Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan dan pemasaran dalam negeri dan luar negeri serta pengawasan penyusunan dan implementasi IT Master Plan Sebagai Wakil Ketua Komite Audit dengan tugas sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite Audit
3	Heridadi	Membidangi Penelitian dan Pengembangan	Melakukan pengawasan dan memberi nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan produk vaksin dan antisera Sebagai Ketua Komite Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
4	H.M. Subuh	Membidangi SDM	Melakukan pengawasan dan memberi nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyiapan SDM, mulai dari sistem rekrutmen, penegakan disiplin, sistem penggajian dan pemberian insentif, diklat pegawai, organisasi perusahaan Sebagai Wakil Ketua II Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

*Berakhir masa jabatannya tanggal 20 April 2018

Pembagian tugas Dewan Komisaris Bio Farma Periode 26 April-08 Januari 2019, sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) No: KEP-01/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018 sebagai berikut:

No	Nama	Bidang Tugas	Perincian Tugas
1	Farid Wadjdi Husain	Komisaris Utama	Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Dewan Komisaris Melakukan pengawasan serta memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam melakukan tugasnya secara keseluruhan termasuk ketaatan pada ketentuan anggaran dasar, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2	Saud Usman Nasution	Membidangi SDM	Melakukan pengawasan dan memberi nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyiapan SDM, mulai dari sistem rekrutmen, penegakan disiplin, sistem penggajian dan pemberian insentif, diklat pegawai, organisasi perusahaan Sebagai Wakil Ketua I Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
3	Made Arya Wijaya	Membidangi Keuangan	Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan tata cara dan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana jangka panjang, pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan pelaporan yang meliputi laporan manajemen triwulanan dan laporan keuangan tahunan dengan memperhatikan standar pelaporan yang berlaku sebagai Ketua Komite Audit dengan tugas sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite Audit
4	Yuni Suryanto	Membidangi Pemasaran dan Teknologi Informasi	Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan pemasaran dalam negeri dan luar negeri serta pengawasan penyusunan dan implementasi IT *Master Plan* Sebagai Wakil Ketua Komite Audit dengan tugas sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite Audit
5	Heridadi	Membidangi Penelitian dan Pengembangan	Melakukan pengawasan dan memberi nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan produk vaksin dan antisera sebagai Ketua Komite Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
6	H.M. Subuh	Membidangi Produksi	Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan produksi meliputi proses produksi termasuk rencana investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, ketersediaan barang jadi, barang dalam proses, bahan baku serta pengendalian terhadap barang persediaan kadaluarsa sebagai Wakil Ketua II Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam *Charter* Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

RENCANA KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta prinsip *Good Corporate Governance* bahwa tugas, fungsi dan tanggungjawab Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas dan penasehat (konsultatif) Perseroan.

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018 ADALAH SEBAGAIMANA DIJABARKAN DI BAWAH.

1. Rapat Rutin Internal

a. Rapat Rutin Internal Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam1 (satu) bulan. Rapat Rutin Internal membahas kinerja perusahaan perbulan, apabila diperlukan atau dalam rangka mendalami permasalahan perusahaan dan dapat mengikutsertakan anggota Komite Audit atau anggota Komite Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:
   - Pembahasan rencana kegiatan dan anggaran dewan komisaris dan komite tahun 2018;
   - Pembahasan laporan tahunan tahun buku 2017 dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka persiapan pra RUPS dan RUPS;
   - Pembahasan laporan manajemen perusahaan triwulanan tahun 2018 dengan mengikut sertakan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka pembahasan dengan direksi;
   - Pembahasan laporan manajemen perusahaan semesteran tahun 2018 dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka pembahasan dengan direksi;
   - Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan *genera laudit* laporan keuangan, laporan PKBL, kinerja perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2018 serta jadwal dan program pelaksanaan audit oleh KAP dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris;
   - Pembahasan usulan rencana kerja dan anggaran perusahaan dan peserta kontrak manajemen tahun 2019 dengan mengikut sertakan komite-komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka persetujuan dari dewan komisaris;
   - Pembahasan tindak lanjut *area of improvement* hasil asesmen GCG;
   - Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* yang terjadi di perusahaan dan *monitoring* implementasi kebijakan perusahaan yang meliputi antara lain:
     - » Perubahan lingkungan bisnis;
     - » Respon terhadap *stakeholder*;
     - » Penguatan sistem pengendalian internal perusahaan;
     - » Manajemen risiko perusahaan;
     - » Sistem teknologi informasi;
     - » Kebijakan sdm;
     - » Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
     - » Kebijakan pengadaan;
     - » Kebijakan mutu dan pelayanan;
     - » Remunerasi direksi;
     - » Hal-hal penting lainnya yang perlu dibahas.

b. Rapat internal Dewan Komisaris dapat melibatkan Kepala Divisi yang terkait dengan pemberitahuan tertuliskepada Direksi.

c. Rapat internal Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik).

2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi

a. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan (waktu sesuai kesepakatan Dewan Komisaris dan Direksi).

b. Rapat rutin dimaksud untuk membahas kinerja perusahaan serta permasalahan pengurusan perseroan.

c. Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi sebagai berikut:
   - pembahasan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 dalam rangka persiapan pra-RUPS dan RUPS;
   - pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan tahun 2018;
   - pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Semester I dan II tahun 2018 dengan Kementerian BUMN / pemegang saham;

- pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan *General Audit* Laporan Keuangan, Laporan PKBL, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk Tahun 2019serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP;
- pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 dan KPI dan Kontrak Manajemen Tahun2018 dalam rangka persiapan pra-RUPS dan RUPS dengan pemegang saham;
- pembahasan tindak lanjut *area of improvement* hasil asesmen GCG;
- pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* yang terjadi di perusahaan dan *monitoring* implementasi kebijakan perusahaan yang meliputi antara lain:
  - » Perubahan lingkungan bisnis;
  - » Respon terhadap *stakeholder*;
  - » Penguatan sistem pengendalian internal perusahaan;
  - » Manajemen risiko perusahaan;
  - » Sistem teknologi informasi;
  - » Kebijakan SDM;
  - » Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
  - » Kebijakan pengadaan;
  - » Kebijakan mutu dan pelayanan;
  - » Remunerasi direksi;
  - » Hal-hal penting lainnya yang perlu dibahas.

3. Rapat Dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham

a. Dalam rangka pra-RUPS dan RUPS dengan Kementerian BUMN/pemegang saham untuk Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 dan Kontrak Manajemen/ KPI Tahun 2018 PT Bio Farma (Persero).

b. Dalam rangka pra-RUPS dan RUPS, persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan.

c. Rapat pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* yang terjadi di Perusahaan.

1. Program Pengembangan

Program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya dalam rangka peningkatan kemampuan dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Bentuk program yang direncanakan akan dilaksanakan, yaitu:

a. Program Internal
   - Program internal dapat dilakukan dalam bentuk *forum group discussion* (FGD) dengan menghadirkan nara sumber. Nara sumber selaku tenaga ahli Dewan Komisaris dapat memberikan informasi/analisa terhadap kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen sehingga memberikan jaminan memadai terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan bilamana ditempatkan secara efektif dan efisien dapat membantu mengurangi dampak risiko bisnis pada suatu tingkatan tertentu yang harus diterima Perusahaan.
   - Dengan mengoptimalkan fungsi Komite Audit dan Komite Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, khususnya menyangkut evaluasi terhadap pengendalian internal dengan menitikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:
     - » Sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terstruktur selaras dengan tujuan organisasi;
     - » Terintegrasi dengan proses bisnis untuk mendorong perbaikan terus menerus;
     - » Membangun kapabilitas, ketahanan organisasi atas perubahan lingkungan.

b. Program Eksternal
   1. Diklat dalam negeri dalam bentuk *short course*, seminar, *workshop*, konferensi yang berkaitan dengan peran Dewan Komisaris di bidang GCG, Risk Manajemen, SDM dan Investasi proyek.
   2. Studi banding ke luar negeri untuk mengetahui perkembangan vaksin dunia.

2. Program Kunjungan Kerja ke Lapangan/*Monitoring*

a. Kunjungan berkala (dalam negeri) dalam rangka:
   - Melakukan *monitoring* dan pengawasan atas realisasi dari program-program investasi sebagaimana dianggarkan dalam RKAP tahun 2018;

- Melakukan *monitoring* dan pengawasan terhadap proses produksi, pemasaran, distribusi sebagaimana dianggarkan dalam RKAPtahun2018;
- Melakukan koordinasi dengan pejabat satu tingkat di bawah direksi untuk mendapat masukan tentang permasalahan yang dihadapi;
- Memonitor pelaksanaan dan pencapaian RKAP.

b. Kunjungan berdasarkan kebutuhan (luar negeri) Akan dijadwalkan sesuai tingkat kebutuhan (urgensinya) berdasarkan pertimbangan dan masukan dari BOD ataupun pihak terkait lainnya, serta kesepakatan atau keputusan bersama Dewan Komisaris.

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SELAMA TAHUN 2018

Sesuai kewenangannya dalam Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero), Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan/rekomendasi diantaranya:

4. Persetujuan atas Penghapusbukuan dan atau Pemindahtanganan Aset Tetap PT Bio Farma (Persero).
5. Persetujuan Kredit Investasi Jangka Panjang.
6. Persetujuan Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji dan THR Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Persetujuan Perubahan Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji dan THR bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Persetujuan Mengagunkan Aktive Tetap Perusahaan terkait Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) Indonesia Eximbank Tahun 2018-2019.
9. Persetujuan Tambahan Limit dan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bank Mandiri tahun 2018-2019 dan Mengagunkan Aktiva Tetap Perusahaan

REALISASI PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Dengan memperhatikan isu-isu penting yang menjadi tantangan pengawasan Dewan Komisaris, dengan dukungan Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan pengawasan.

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris Bio Farma telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap:
   a. Pelaksanaan RKAP Tahun 2018 dan RJPP;
   b. Masalah-masalah strategis bagi perusahaan seperti WHO PQ, Proyek Pengembangan Vaksin dan lain sebagainya;
   c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Penerapan prinsip-prinsip GCG, ISO, cGMP dan lain-lain;
   e. Penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM);
   f. *Self assessment* GCG PT Bio Farma (Persero);
   g. Rancangan RKAP tahun 2019;
   h. LMP dan Laporan Kegiatan PKBL tahun 2018;
   i. Perkembangan Perusahaan.

2. Membuat keputusan/memberikan persetujuan/tanggapan:
   a. Menyampaikan pendapat/tanggapan/masukan kepada pemegang saham atas Laporan Manajemen Berkala, Laporan Tahunan dan Usulan RKAP dan RJPP;
   b. Laporan RKAP dan RKA PKBL;
   c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP);
   d. Persetujuan penghapus-bukuan aktiva;
   e. Usulan remunerasi Direksi;
3. Review analisis kinerja bulanan Perusahaan dan pembahasan perkembangan kondisi perusahaan melalui rapat rutin internal Dewan Komisaris;
4. Review analisis kinerja bulanan Perusahaan dan pembahasan perkembangan kondisi perusahaan melalui rapat gabungan bersama Direksi termasuk pemberian nasihat/saran kepada Direksi;
5. Menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan beserta Rencana Anggaran Dewan Komisaris tahun 2019;
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tugas pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2017;
7. Pemantauan atas tindak lanjut keputusan/arahan pemegang saham dan hasil/temuan audit internal dan eksternal;
8. Melakukan kunjungan kerja dan monitoring ke lapangan;
9. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan;
10. Melaksanakan kegiatan lain yang sifatnya mendadak dan mendesak;
11. Melakukan penilaian kinerja Direksi tahun Buku 2018;
12. Melakukan penilaian kinerja Direksi tahun Buku 2018 dengan metode *self assessment*;
13. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG menjadi kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris;
14. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada pemegang saham pada waktunya (triwulan) dan tahunan dalam RUPS tahun 2018;
15. Mengikuti perkembangan kegiatan Bio Farma baik dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya dalam tahun 2018.

ARAHAN, NASIHAT DAN PERSETUJUAN DARI DEWAN KOMISARIS MENYANGKUT KELANGSUNGAN/PERKEMBANGAN BISNIS BIO FARMA

Secara khusus arahan yang disampaikan Dewan Komisaris selama tahun 2018, antara lain:

1. Direksi agar menjabarkan RKAP tahun 2018 yang telah disusun dalam bentuk RKAP bulanan dan triwulanan yang berisikan strategi dan kebijakan perusahaan yang lebih terinci dan bersifat jangka pendek sebagai tahapan untuk pencapaian target RKAP dalam 1 tahun. Setiap akhir periode jangka pendek tersebut di-review dan ditinjau kembali apabila diperlukan untuk dilakukan revisi sesuai dengan perubahan kondisi anggaran tahun berjalan.

2. Untuk memenuhi target penjualan khususnya dari sektor swasta dan sektor ekspor, Dewan Komisaris menghimbau agar Direksi menyusun dan mereview strategi pemasaran secara berkala, meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional khususnya WHO.

3. Agar tetap mengikuti perkembangan perubahan kebijakan dan persyaratan internasional, serta perubahan-perubahan regulasi dari Pemerintah,

serta berperan aktif dalam kegiatan nasional dan internasional, baik WHO maupun organisasi lainnya terutama yang berkaitan dengan regulasi vaksin.

4. Untuk program-program investasi tahun 2018, agar didasarkan pada asa manfaat, skala prioritas dan dilakukan dengan perencanaan yang strategis, serta terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan yang komprehensif. Pelaksanaan investasi harus memperhitungkan kondisi keuangan perusahaan, risiko yang akan dihadapi serta dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential).

5. Dalam mengambil setiap keputusan, Direksi agar mengutamakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) secara optimal dan berkelanjutan melalui penciptaan mekanisme evaluasi dan analisis risiko yang tepat (risk management), terutama terkait dengan risiko bisnis, risiko hukum, risiko operasional dan risiko lainnya.

6. Direksi diminta agar meningkatkan peran perusahaan selaku produsen vaksin yang besar, baik dalam negeri, maupun di dunia internasional terutama di negara-negara berkembang khususnya yang berkaitan dengan vaksin.

7. Direksi agar tetap mengantisipasi terjadinya pemalsuan produk vaksin Bio Farma di pasar, dengan tetap menjaga ketersediaan vaksin di pasar, sehingga permintaan konsumen dapat selalu terpenuhi.

8. Direksi diminta agar menyiapkan strategi untuk mempertahankan karyawan merupakan aset perusahaan, yang berkualitas supaya tidak meninggalkan perusahaan, dan membekali kemampuan memimpin (leadership), membangun orang lain, inovasi dan language skill, serta melakukan pengelolaan manajemen talenta, reward, serta sistem karir.

9. Berkenaan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), agar Direksi lebih selektif dan berhati-hati dalam rangka penyaluran dana dan pemberian pinjaman, serta melakukan pemetaan terhadap program-program dan diarahkan pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitarnya, baik dalam bentuk pengurangan kemiskinan maupun penciptaan lapangan kerja sehingga menimbulkan efek timbal balik yang kondusif bagi usaha PT Bio Farma (Persero).

10. Direksi dan jajarannya dalam melaksanakan semua pelaksanaan tugasnya secara konsisten taat terhadap perundang-undangan serta anggaran dasar perusahaan dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

DEWAN KOMISARIS MEMBERIKAN PERSETUJUAN /REKOMENDASI SESUAI KEWENANGANNYA DALAM ANGGARAN DASAR

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan/rekomendasi sesuai kewenangannya dalam Anggaran Dasar diantaranya:

1. Persetujuan atas Penghapusbukuan dan atau Pemindahtanganan Aset Tetap PT Bio Farma (Persero).
2. Persetujuan Kredit Investasi Jangka Panjang.
3. Persetujuan Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji dan THR Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Persetujuan Perubahan Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji dan THR bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Persetujuan Mengagunkan Aktive Tetap Perusahaan terkait Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) Indonesia Eximbank Tahun 2018-2019.
6. Persetujuan Tambahan Limit dan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bank Mandiri tahun 2018-2019 dan Mengagunkan Aktiva Tetap Perusahaan.

PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
2. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal

tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.

3. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

REALISASI ANGGARAN DEWAN KOMISARIS

Jumlah RKAP Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebesar Rp15,19 miliar dan realisasi RKAP sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp12,514 miliar atau terealisasi sebesar 82,36% dari anggaran.

RENCANA KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS

1. Mendapatkan keseragaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris
2. Mewujudkan hasil kerja yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)
3. Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

1. Rapat Rutin Internal

a. Rapat Rutin Internal Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat rutin dimaksud dilaksanakan guna membahas kinerja perusahaan per bulan, apabila diperlukan atau dalam rangka mendalami permasalahan perusahaan dan dapat mengikutsertakan anggota Komite Audit atau anggota Komite Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yaitu:

- pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite tahun 2020;
- pembahasan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka persiapan pra-RUPS dan RUPS;
- pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan tahun 2019 dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka pembahasan dengan Direksi;
- pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Semesteran tahun 2019 dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka pembahasan dengan Direksi;
- pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan *General Audit* Laporan Keuangan, Laporan PKBL, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2019 serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris;
- pembahasan Usulan Rencana Kerja, Anggaran Perusahaan, KPI dan Kontrak Manajemen Tahun 2019 dengan mengikutsertakan komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka persetujuan dari Dewan Komisaris;
- pembahasan tindak lanjut *area of improvement* hasil asesmen GCG;
- pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* yang terjadi di Perusahaan dan *monitoring* implementasi kebijakan Perusahaan, termasuk:
  - » perubahan lingkungan bisnis;
  - » respon terhadap *stakeholder*;
  - » penguatan sistem pengendalian internal perusahaan;
  - » manajemen risiko perusahaan;
  - » sistem teknologi informasi;
  - » kebijakan SDM;
  - » kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
  - » kebijakan pengadaan;
  - » kebijakan mutu dan pelayanan;
  - » remunerasi Direksi;
  - » hal-hal penting lainnya yang perlu dibahas.

b. Rapat internal Dewan Komisaris dapat melibatkan Kepala Divisi yang terkait dengan pemberitahuan tertulis kepada Direksi.
c. Rapat internal Dewan Komisaris dengan auditor eksternal (kantor akuntan publik).

2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi

a. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan (waktu sesuai kesepakatan Dewan Komisaris dan Direksi).
b. Rapat rutin dimaksud untuk membahas kinerja perusahaan serta permasalahan pengurusan Perseroan.
c. Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi, meliputi:
   - pembahasan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dalam rangka persiapan pra-RUPS dan RUPS;
   - pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan tahun 2019;
   - pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Semester I dan II tahun 2019 dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham;
   - pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan, Laporan PKBL, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk Tahun 2019 serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP;
   - pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 dan KPI dan Kontrak Manajemen Tahun 2019 dalam rangka persiapan pra-RUPS dan RUPS dengan pemegang saham;
   - pembahasan tindak lanjut area of improvement hasil asesmen GCG;
   - pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* yang terjadi di perusahaan dan *monitoring* implementasi kebijakan perusahaan yang meliputi antara lain:
     » perubahan lingkungan bisnis;
     » respon terhadap *stakeholder*;
     » penguatan sistem pengendalian internal perusahaan;
     » manajemen risiko Perusahaan;
     » sistem teknologi informasi;
     » kebijakan SDM;
     » kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
     » kebijakan pengadaan;
     » kebijakan mutu dan pelayanan;
     » remunerasi Direksi;
     » hal-hal penting lainnya yang perlu dibahas.

3. Rapat dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham

a. Dalam rangka Pra RUPS dan RUPS dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham untuk Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 dan Kontrak Manajemen/ KPI Tahun 2019 PT Bio Farma (Persero).
b. Dalam rangka pra-RUPS dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan.
c. Rapat pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/*urgent* yang terjadi di Perusahaan.

4. Program Pengembangan

Dimaksudkan sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya dalam rangka peningkatan kemampuan dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Bentuk program yang direncanakan akan dilaksanakan, yaitu:

a. program internal;
   - Program internal dapat dilakukan dalam bentuk *forum group discussion* (FGD) dengan menghadirkan narasumber. Narasumber selaku tenaga ahli Dewan Komisaris dapat memberikan informasi/analisa terhadap kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen sehingga memberikan jaminan memadai terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan bilamana ditempatkan secara efektif dan efisien dapat membantu mengurangi dampak risiko bisnis pada suatu tingkatan tertentu yang harus diterima Perusahaan.
   - Dengan mengoptimalkan fungsi Komite Audit dan Komite Risiko yang dibentuk oleh Dewan

Komisaris, khususnya menyangkut evaluasi terhadap pengendalian internal dengan menitikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:
- » sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terstruktur selaras dengan tujuan organisasi;
- » terintegrasi dengan proses bisnis untuk mendorong perbaikan terus menerus;
- » membangun kapabilitas, ketahanan organisasi atas perubahan lingkungan.

b. Program Eksternal
   - Diklat dalam negeri dalam bentuk *short course*, seminar, *workshop*, konferensi yang berkaitan dengan peran Dewan Komisaris di bidang GCG, Risk Manajemen, SDM, Investasi proyek.
   - Studi banding ke luar negeri untuk mengetahui perkembangan vaksin dunia.

5. Program Kunjungan Kerja ke Lapangan/*Monitoring*
Kunjungan berkala (dalam negeri) dalam rangka:

a. Melakukan *monitoring* dan pengawasan atas realisasi program-program investasi sebagaimana dianggarkan dalam RKAP 2019;
b. Melakukan *monitoring* dan pengawasan terhadap proses produksi, pemasaran, distribusi sebagaimana dianggarkan dalam RKAP Tahun 2019;
c. Melakukan koordinasi dengan pejabat satu tingkat dibawah Direksi untuk mendapat masukan tentang permasalahan yang dihadapi;
d. Memonitor pelaksanaan dan pencapaian RKAP.

Kunjungan berdasarkan kebutuhan (luar negeri)
Akan dijadwalkan sesuai tingkat kebutuhan (urgensi) berdasarkan pertimbangan dan masukan dari BOD ataupun pihak terkait lainnya serta kesepakatan atau keputusan bersama Dewan Komisaris.

PENILAIAN ATAS KINERJA MASING-MASING KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam rangka mendukung serta membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi *advise* atau memberi arahan, kontrol atau melakukan pengawasan, dan *approve* atau memberikan persetujuan, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG.

Dalam pelaksanaan fungsinya, Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang tertuang dalam Piagam Komite dan program kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dalam satu tahun. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris menilai peran, fungsi serta rekomendasi yang diberikan Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG telah sangat efektif berkontribusi dalam membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG secara intensif mengadakan pertemuan dengan Direksi terkait, Satuan Pengawasan Internal (SPI) serta Divisi *Compliance* dan *Risk Management* (CRM), rekomendasi dari Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG telah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perusahaan dan memberikan pandangan dan masukan secara keseluruhan atas laporan kinerja Direksi kepada RUPS. Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerjanya. Atas masukan dari Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Dewan Komisaris dapat melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian di seluruh unit kerja, unit bisnis, sesuai kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan secara menyeluruh.

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif dengan periode setiap 1 (satu) tahun secara *self assessment* dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG menjadi bahan penilaian untuk perpanjangan masa kerja anggota Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG untuk tahun berikutnya. Penilaian diantaranya meliputi kehadiran dalam rapat, kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi secara aktif sesama anggota Komite, integritas, kemampuan memahami visi misi dan

rencana strategis Bio Farma, serta kualitas atas saran/rekomendasi yang diberikan terkait program kerja masing-masing Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG.

Pada tahun 2018, capaian Kinerja Komite Audit sebesar 104,35% dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG sebesar 75%. Adapun detil penjelasan dari penilaian kinerja masing-masing Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG tercantum dalam Laporan Tahunan ini pada bagian Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG.

PENGUNGKAPAN MENGENAI *BOARD CHARTER/MANUAL* (PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS)

Berdasarkan Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-07/DK/BF/2018, Nomor: PER- 06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Bio Farma (Persero).

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI *(BOARD MANUAL)* PT BIO FARMA (PERSERO)

I KETENTUAN UMUM
1.1 Terminologi
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Ruang Lingkup Pedoman

II PROGRAM PELATIHAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

III HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

IV. DIREKSI
4.1 Pengangkatan Pemberhentian
4.2 Tujuan dan Kedudukan dalam Organisasi
4.3 Masa Jabatan
4.4 Rangkap Jabatan
4.5 Ketentuan Pelaksanaan Tugas Jabatan Direksi yang Lowong
4.6 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
4.7 Pembagian Tugas Direksi
4.8 Perbuatan-Perbuatan Direksi yang Tidak Memerlukan Persetujuan dari RUPS
4.9 Kewenangan Direksi dalam Bertindak Mewakili Perusahaan
4.10 Kewajiban Direksi yang Berkaitan dengan Penyusunan Laporan Manajemen Perusahaan
4.11 Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan
4.12 Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan
4.13 Laporan Tahunan (Annual Report)
4.14 Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
4.15 Penyelenggaraan Daftar-Daftar dan Dokumen oleh Direksi
4.16 Pakta Integritas
4.17 Benturan Kepentingan
4.18 Pelaksanaan Cuti Direksi

V DEWAN KOMISARIS
5.1 Pengangkatan dan Pemberhentian
5.2 Tujuan dan Kedudukan dalam Organisasi
5.3 Masa Jabatan
5.4 Rangkap Jabatan
5.5 Larangan Hubungan Keluarga
5.6 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris
5.7 Pembagian Tugas Dewan Komisaris
5.8 Ketentuan Pelaksanaan Tugas Jabatan Dewan Komisaris yang Lowong
5.9 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Manajemen Risiko dan Pelaksanaannya
5.10 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Rancangan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaksanannya
5.11 Informasi yang Harus Disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
5.12 Merespon Saran, Harapan, Permasalahan dan Keluhan dari Stakeholders dan Menyampaikan Saran Penyelesaian kepada Direksi
5.13 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Sistem Teknologi Informasi Perusahaan dan Pelaksanaannya
5.14 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
5.15 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
5.16 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaannya
5.17 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Mutu dan Pelayanan serta Pelaksanannya
5.18 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kepatuhan Perusahaan dalam Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga
5.19 Pemantauan atas Kepatuhan Direksi dalam Menjalankan Pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP
5.20 Proses Penunjukan Akuntan Publik
5.21 Penilaian atas Efektivitas Pelaksanaan Audit Eskternal dan Audit Internal, serta Pelaksanaan Telaah atas Pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang Diterima oleh Dewan Komisaris
5.22 Pelaporan kepada Pemegang Saham jika terjadi Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan
5.23 Pengawasan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan dan Pelaksanaannya
5.24 Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan
5.25 Seleksi dan Pengusulan Calon Direksi kepada Pemegang Saham
5.26 Penilaian Kinerja Direksi dan Pelaporan kepada Pemegang Saham
5.27 Pengusulan Remunerasi Direksi
5.28 Benturan Kepentingan yang Dapat Mengganggu Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
5.29 Pemantauan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
5.30 Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

VI ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
6.1 Organ Pendukung Dewan Komisaris
6.2 Sekretariat Dewan Komisaris
6.3 Komite Audit
6.4 Komite Lain
6.5 Tata Kerja Komite
6.6 Rencana Kerja dan Penganggaran
6.7 Rapat-Rapat Komite
6.8 Pelaporan
6.9 Akses dan Kerahasiaan Informasi
6.10 Evaluasi Kinerja Komite

VII RAPAT DIREKSI
7.1 Waktu dan Penyelenggaraan Rapat
7.2 Peserta Rapat Direksi
7.3 Agenda Rapat Direksi
7.4 Undangan Rapat Direksi
7.5 Kuorum Rapat Direksi
7.6 Pimpinan Rapat Direksi
7.7 Pengambilan Keputusan dalam Rapat Direksi
7.8 Tata Cara Menjalankan Rapat Direksi
7.9 Risalah Rapat Direksi
7.10 Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Direksi
7.11 Pencatat/Notulis Rapat Dewan Direksi

VIII RAPAT DEWAN KOMISARIS
8.1 Waktu dan Penyelenggaraan Rapat
8.2 Peserta Rapat Dewan Komisaris
8.3 Agenda Rapat Dewan Komisaris
8.4 Undangan Rapat Dewan Komisaris
8.5 Kuorum Rapat Dewan Komisaris
8.6 Pimpinan Rapat Dewan Komisaris
8.7 Pengambilan Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris
8.8 Tata Cara Menjalankan Rapat Dewan Komisaris
8.9 Risalah Rapat Dewan Komisaris
8.10 Pencatat/Notulis Rapat Dewan Dewan Komisaris

IX RAPAT GABUNGAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
9.1 Waktu dan Penyelenggaraan Rapat
9.2 Peserta Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
9.3 Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
9.4 Undangan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
9.5 Kuorum Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
9.6 Pimpinan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
9.7 Pengambilan Keputusan dalam Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
9.8 Tata Cara Menjalankan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
9.9 Risalah Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
9.10 Pencatat/Notulis Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Dewan Komisaris

X. RAPAT ANTARA KOMITE DEWAN KOMISARIS DENGAN *COUNTERPART* KOMITE DEWAN KOMISARIS
10.1 Komite Dewan Komisaris dan *Counterpart* Komite Dewan Komisaris
10.2 Waktu dan Penyelenggaraan Rapat
10.3 Peserta Rapat antara Komite Dewan Komisaris dengan Counterpart Dewan Komisaris
10.4 Agenda Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
10.5 Undangan Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
10.6 Kuorum Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
10.7 Pimpinan Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
10.8 Pengambilan Keputusan dalam Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
10.9 Tata Cara Menjalankan Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
10.10 Risalah Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
10.11 Pencatat/Notulis Rapat Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Dewan Komisaris

XI PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP) DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
11.1 Penyusunan RJPP
11.2 Penyusunan RKAP
11.3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris Perusahaan
XII Penutup

Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari Organ Perusahaan, harus menjadi teladan yang baik (*role model*) bagi setiap Insan Bio Farma. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan Bio Farma.

Booard Charter/Manual merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan pemegang saham dan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Booard Charter/Manual merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Perusahaan dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

TUJUAN DARI *BOARD CHARTER*/ MANUAL DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. sebagai panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab
2. untuk menjabarkan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perusahaan yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG

Board Charter/Manual merupakan *living document* sehingga senantiasa ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan-perubahan atas *Board Charter/Manual* harus berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Pedoman dan tata tertib kerja *(Board Manual)* Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama Direksi dan Dewan Komisaris. *Board Manual* disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PEDOMAN PELAKSANAAN *BOARD MANUAL* DEWAN KOMISARIS

1. **Undang-Undang Republik Indonesia, di antaranya adalah:**
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
   c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
   d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
   e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
   g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

2. **Peraturan Pemerintah di antaranya adalah:**
   Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.

3. **Peraturan Menteri Negara BUMN, diantaranya adalah:**
   a. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-16/MBU/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN
   b. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN
   c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
   d. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN
   e. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU/2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN

4. **Keputusan Menteri Negara BUMN, diantaranya adalah:**
   a. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-104/MBU/2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
   b. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara
   c. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP)
   d. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
   e. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
   f. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-09A/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *BOARD MANUAL* DEWAN KOMISARIS

1. Anggaran Dasar Perusahaan
   Berdasarkan Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-07/DK/BF/2018, Nomor: PER- 06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Bio Farma (Persero).

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS DIATUR DALAM *BOARD MANUAL* DEWAN KOMISARIS MENGATUR ASPEK

1. program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris Baru;
2. program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris;
3. pengambilan keputusan Dewan Komisaris;
4. tindak lanjut hasil rapat Dewan Komisaris;
5. hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
6. tugas, wewenang dan kewajiban serta pembagian tugas Dewan Komisaris;
7. ketentuan pelaksanaan tugas jabatan Dewan Komisaris yang lowong;
8. kewajiban Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penyusunan rencana jangka panjang;
9. kewajiban Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penyusunan RKAP;
10. kewajiban Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*);
11. pengelolaan Manajemen Risiko;
12. sistem pengendalian internal;
13. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
14. etika berusaha dan anti korupsi;
15. larangan mengambil keuntungan pribadi;
16. organ pendukung Dewan Komisaris;
17. rapat Dewan Komisaris;
18. rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris;
19. rapat antara Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris;
20. kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris;
21. kebijakan informasi yang harus disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;
22. kebijakan informasi perubahan lingkungan bisnis;
23. kebijakan dalam merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholder* dan menyampaikan saran penyelesaian kepada Direksi;
24. kebijakan Komisaris dan pemberian nasehat atas kebijakan sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya;
25. kebijakan komisaris dan pemberian nasihat atas kebijakan pengelolaan sumber daya manusia;
26. kebijakan komisaris dan pemberian nasihat atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan;
27. kebijakan komisaris dan pemberian nasihat atas kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya;
28. kebijakan komisaris dan pemberian nasihat atas kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya;
29. kebijakan komisaris dan pemberian nasihat atas kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perjanjian dengan pihak ketiga;
30. kebijakan atas pemantauan kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP;
31. kebijakan pemberian persetujuan/rekomendasi terhadap tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris;
32. kebijakan atas proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukkan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS;

33. kebijakan komisaris efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris;
34. kebijakan pelaporan kepada pemegang saham jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
35. kebijakan komisaris dan pemberian nasihat atas kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan dan pelaksanaannya;
36. kebijakan atas pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
37. kebijakan atas seleksi dan pengusulan calon Direksi kepada pemegang saham;
38. kebijakan atas penilaian kinerja dan pelaporan kepada pemegang saham;
39. kebijakan dan pengurusan remunerasi Direksi;
40. kebijakan pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG)
41. kebijakan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris;
42. kebijakan pengendalian gratifikasi;
43. kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS).

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan diri bagi Dewan Komisaris dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri dan menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris serta sejalan dengan program pengembangan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam *Charter* Dewan Komisaris, yakni bahwa anggota Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memutakhirkan pengetahuannya melalui kegiatan pelatihan, *workshop*, seminar, *conference*, ataupun dalam bentuk kunjungan kerja serta banding kaji (*benchmark*), maka pada tahun 2018 realisasi Program Pelatihan dan Pengembangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yakni:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Topik	Tempat Pelatihan	Penyelenggara	Jenis Pelatihan
1	Ahmad M. Ramli *	Komisaris Utama	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk Life Science (Antara lain Blood Product, UU Produk Halal)	Yogyakarta	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Professional Coach I & II
2	Ihsan Setiadi Latief *	Komisaris	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk Life Science (Antara lain Blood Product, UU Produk Halal)	Yogyakarta	Kementerian BUMN – Daya Dimensi Indonesia	Professional Coach I & II
3	Heridadi	Komisaris	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk Life Science (Antara lain Blood Product, UU Produk Halal)	Yogyakarta	Kementerian BUMN – Daya Dimensi Indonesia	Professional Coach I & II
4	M. Subuh	Komisaris	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk Life Science (Antara lain Blood Product, UU Produk Halal)	Yogyakarta	Kementerian BUMN – Daya Dimensi Indonesia	Professional Coach I & II
5			13-17 Februari 2018	International Nanotechnology & Conference 2018	Tokyo		
6			21-26 Mei 2018	World Health Assembly 2018	Jenewa		
7			13 September 2018	Forum Riset Life Science Nasional Tahun 2018	Jakarta		

Keterangan:
*Berakhir Masa Jabatan Tanggal 20 April 2018

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ORIENTASI KOMISARIS BARU BIO FARMA

Pelaksanaan program orientasi Komisaris Baru Bio Farma mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN
2. SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN Sekretaris Kementerian BUMN
3. *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)* PT Bio Farma (Persero).

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan Perusahaan khusus Komisaris, Bio Farma memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Komisaris baru yang bertujuan memberikan gambaran tentang profil perusahaan yang berisikan materi tentang kondisi umum perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, strategi yang sedang dijalankan oleh Perusahaan, aktvitas bisnis, RJP Perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi bagi Komisaris baru disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi SDM dan Divisi terkait lainnya, disampaikan dalam bentuk presentasi, pemberian dokumen laporan tahunan, *company profile*, sejarah Perusahaan, *Corporate Governance Policy* (CGP), serta peraturan perundangan yang terkait dengan proses bisnis Bio Farma.

Dalam acara program pengenalan tersebut Dewan Komisaris yang baru sepakat akan menghindari potensi untuk terlibat dalam kegiatan operasional yang menjadi kewenangan Direksi dan menghindari potensi terjadinya gratifikasi serta berkomitmen akan melaksanakan GCG sebaik-baiknya. Dewan Komisaris juga telah menyepakati pembagian tugas di antara Komisaris.

Komisaris baru juga aktif mengikuti forum-forum yang diselenggarakan oleh Perusahaan, baik yang berskala nasional seperti Forum Riset Vaksin maupun skala internasional seperti pertemuan vaksin negara berkembang *(Developing Countries Vaccine Manufacturer Networks)* serta *Organization of Islamic Cooperation* (OIC).

Pada tanggal 20 April 2018, terjadinya perubahan komposisi Dewan Komisaris Bio Farma sehingga adanya kegiatan orientasi bagi Dewan Komisaris baru, yaitu Farid Wadjdi Husain sebagai Komisaris Utama, Saud Usman Nasution sebagai Komisaris Independen, Made Arya Wijaya dan Yuni Suryanto sebagai Komisaris. Selama tahun 2018, terdapat pengangkatan Dewan Komisaris baru berdasarkan RUPS sehingga Bio Farma melaksanakan program orientasi untuk Dewan Komisaris baru pada tanggal 26 April 2018 di Ruang Rapat Direksi, Gedung Heritage PT Bio Farma (Persero) yang dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Anggaran & Akuntansi, pada tanggal 24 April 2018 di Gedung Pakarti lantai 7, Jakarta yang dihadiri oleh Komisaris Utama, Direktur Keuangan, dan Sekretaris Perusahaan, dan pada tanggal 23 April 2018 di Gedung Pakarti lantai 7, Jakarta yang dihadiri oleh Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan.

Materi pengenalan diberikan sesuai Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.Selain pemaparan atas Perusahaan, dalam program pengenalan Perusahaan juga disampaikan dokumen-dokumen penunjang, diantaranya Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perusahaan, *Corporate Governance Policy* (CGP), Standar Etika Perusahaan, Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, *Charter* Dewan Komisaris, *Charter* Komite Dewan Komisaris, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Selain itu, guna memahami secara langsung proses bisnis Perusahaan, program pengenalan Perusahaan juga meliputi kunjungan langsung ke unit/Unit Kerja Perusahaan.

KOMISARIS INDEPENDEN

Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bio Farma, yang dapat mempengaruhi kemampuanya untuk bertindak independen.

Disadari bahwa menurut UUPT semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain. Dengan demikian tanpa harus mempertentangkan, pengertian Komisaris Independen di dalam UUPT sama dengan anggota Dewan Komisaris.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN, Komisaris Independen Bio Farma telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan.
3. Tidak bekerja pada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
4. Tidak bekerja pada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya.
6. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

Anggota Dewan Komisaris Bio Farma telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada BUMN yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bio Farma saat ini adalah 6 (enam) orang, 2 (dua) orang diantaranya atau sama dengan 33% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN mengenai Komisaris Independen.

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN BIO FARMA

1. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor: SK-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Serta Pengukuhan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma yang berisikan sebagai berikut:
   a. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor KEP-392/MBU/2012 tanggal 5 November 2012 dan SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014 mengukuhkan Paruli Lubis dan Heridadi sebagai Dewan Komisaris menjadi Komisaris Independen.
   b. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang dikukuhkan sebagai Komisaris Independen merujuk masa jabatan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor KEP-392/MBU/2012 tanggal 5 November 2012 dan SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014.

2. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-102/MBU/04/2018, memberhentikan dengan hormat Paruli Lubis yang telah habis masa jabatannya sebagai Dewan Komisaris Independen digantikan dengan Saud Usman.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN PER 1 JANUARI 2018 – 20 APRIL 2018

Komposisi Dewan Komisaris Independen berjumlah 2 (dua) orang, Paruli Lubis diberhentikan dengan hormat yang telah mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2017 dan pada tanggal 20 April 2018 Saud Usman diangkat sebagai penggantinya. Berikut komposisi Dewan Komisaris dan dasar pengangkatan Periode 1 Januari – 20 April 2018 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan & Pemberhentian
Heridadi	Komisaris Independen	Indonesia	22 Juni 2015 – 8 Januari 2019	Kep Men BUMN Nomor: SK-97/MBU06/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Independen.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN PER 20 APRIL 2018 – 31 DESEMBER 2018

Pada tanggal 20 April 2018 terjadinya pergantian susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan
Heridadi	Komisaris Independen	Indonesia	22 Juni 2015 – sekarang	Kep Men BUMN Nomor: SK-97/MBU06/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Independen. Keputusan Menteri BUMN SK-13/MBU/01/2019 Tentang Pemberhentian Menjadi Dewan Komisaris Independen.
Saud Usman	Komisaris Independen	Indonesia	20 April 2015 – sekarang	Kep Men BUMN Nomor: SK-102/MBU04/2018 tanggal 20 April 2018 Tentang Pengangkatan Menjadi Dewan Komisaris Independen.

TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* di dalam Perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan dikelola dengan baik.
6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

TUGAS DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

1. Menjamin transparansi dan keterbukaaan laporan keuangan perusahaan.
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain.
3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite risiko, pengembangan dan GCG.
2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

Bedah
Buku

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN PT BIO FARMA (PERSERO)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Heridadi
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal Pengangkatan : 22 Juni 2015

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundangan yang berlaku.
2. Mampu melaksanakan perbuatan tidak melawan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan.
3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
   b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* di dalam pengelolaan perusahaan.
5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham perusahaan sejenis.
6. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah.
7. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Komisaris lainnya atau dengan Direksi.
8. Tidak memiliki kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di PT Bio Farma (Persero) dan atau perusahaan lain.
9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan.

Demikian pernyataan independensi dan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya atas kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 2018
HERIDADI

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN PT BIO FARMA (PERSERO)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Saud Usman
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal Pengangkatan : 20 April 2018

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundangan yang berlaku.
2. Mampu melaksanakan perbuatan tidak melawan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan.
3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Anggota Dewan Komisaris pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
   b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* di dalam pengelolaan perusahaan.
5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham perusahaan sejenis.
6. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/ Wakil Kepala Pemerintahan Daerah.
7. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Komisaris lainnya atau dengan Direksi.
8. Tidak memiliki kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di PT Bio Farma (Persero) dan atau perusahaan lain.
9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan.

Demikian pernyataan independensi dan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya atas kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 2018
SAUD USMAN

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI SERTA DEWAM KOMISARIS DENGAN PEMEGANG SAHAM UTAMA (PENGENDALI)

Setiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk bertindak secara independen, tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan dengan pihak manapun yang berkaitan dengan Perusahaan maupun hubungan dengan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bio Farma bertindak independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Untuk menjamin tercapainya independensi dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif dan menempatkan kewajaran di antara beragam kepentingan serta senantiasa terbebas dari benturan kepentingan *(conflict of interest)*.

Setiap anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan independensi pada tiap awal tahun untuk menyatakan status independensinya dan pada setiap akhir tahun untuk menyatakan apakah selama tahun terakhir terdapat situasi yang memiliki benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris atas tindakan yang dilakukan. Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat perubahan kepemilikan saham baik Pribadi ataupun keluarga di Bio Farma dan atau perusahaan lain. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas memastikan apakah praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusannya sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Bertindak Independen dalam Pengawasan Operasional Perusahaan yang telah dipublikasikan dalam situs Perusahaan

PERNYATAAN INDEPENDENSI DAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pada tanggal 31 Desember 2018 semua anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan independensi untuk menyatakan status independensinya dan menyatakan selama tahun terakhir terdapat situasi yang memiliki benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris atas tindakan yang dilakukan. Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat perubahan kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di Bio Farma dan atau perusahaan lain. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusannya. Dalam kedudukannya Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang saham Utama dan atau Pemegang Saham Pengendali (Kementrian BUMN). Surat Pernyataan Independensi ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk yang baru diangkat.

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antar Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham dapat dilihat pada tabel di bawah ini

HUBUNGAN KELUARGA DAN KEUANGAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bio Farma tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan: Dewan Komisaris lainnya, Direksi & Pemegang Saham.

PERIODE 1 JANUARI 2018 S/D 20 APRIL 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	23-Jan-14		√		√		√		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01-Mei-13		√		√		√		√		√		√
Heridadi	Komisaris Independen	23-Jan-14		√		√		√		√		√		√
H.M. Subuh	Komisaris	22-Jun-15		√		√		√		√		√		√

PERIODE 20 APRIL S/D 31 DESEMBER 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Farid Wadjdi Husain	Komisaris Utama	20 April 2018		√		√		√		√		√		√
Saud Usman Nasution	Komisaris Independen	20 April 2018		√		√		√		√		√		√
Made Arya Wijaya	Komisaris	20 April 2018		√		√		√		√		√		√
Yuni Suryanto	Komisaris	20 April 2018		√		√		√		√		√		√
Heridadi *	Komisaris Independen	23 Januari 2014 – 08 Januari 2019		√		√		√		√		√		√
H.M. Subuh	Komisaris	22-Jun-15		√		√		√		√		√		√

*Berakhir masa jabatan : tanggal 8 Januari 2019

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BESERTA KELUARGA

Komposisi Anggota Dewan telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris pada saat ini adalah 6 (enam) orang, di mana seluruhnya merupakan komisaris dari pihak di luar Pemegang Saham. Hal ini untuk menjaga independensi fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan menjamin terlaksananya mekanisme *check and balance*.

Pada tahun 2018, Dewan Komisaris Bio Farma tidak memiliki saham di Bio Farma, Badan Usaha Milik Negara lain dan Perusahaan lain serta tidak ada kepemilikan saham secara pribadi maupun keluarga. Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, setiap Anggota Dewan Komisaris telah membuat daftar khusus yang berisikan keterangan kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BESERTA KELUARGANYA

PERIODE 1 JANUARI 2018 S/D 20 APRIL 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)					
			PT Bio Farma (Persero)		BUMN Lain		Perusahaan Lain	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	23-Jan-14		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01-Mei-13		√		√		√
Heridadi	Komisaris Independen	23-Jan-14		√		√		√
H.M. Subuh	Komisaris	22-Jun-15		√		√		√

31 DESEMBER 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)					
			PT Bio Farma (Persero)		BUMN Lain		Perusahaan Lain	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Farid Wadjdi Husain	Komisaris Utama	20 April 2018		√		√		√
Saud Usman Nasution	Komisaris Independen	20 April 2018		√		√		√
Made Arya Wijaya	Komisaris	20 April 2018		√		√		√
Yuni Suryanto	Komisaris	20 April 2018		√		√		√
Heridadi *	Komisaris Independen	23 Januari 2014 – 08 Januari 2019		√		√		√
H.M. Subuh	Komisaris	22-Jun-15		√		√		√

*Berakhir masa jabatan: tanggal 8 Januari 2019

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2018, tidak terdapat Dewan Komisaris Bio Farma yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Dalam Ayat tersebut menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha swasta
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

RANGKAP JABATAN PADA DEWAN KOMISARIS

PERIODE 1 JANUARI 2018 S/D 20 APRIL 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Sebagai Anggota Dewan Komisaris Pada BUMN/ Perusahaan/Instansi Lain		Sebagai Anggota Direksi Pada BUMN/ Perusahaan/Instansi Lain		Sebagai Pejabat Eksekutif Pada BUMN/ Perusahaan/ Instansi Lain	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	23-Jan-14		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01-Mei-13		√		√		√
Heridadi	Komisaris Independen	23-Jan-14		√		√		√
H.M. Subuh	Komisaris	22-Jun-15		√		√		√

PERIODE 20 APRIL 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Sebagai Anggota Dewan Komisaris Pada BUMN/ Perusahaan/Instansi Lain		Sebagai Anggota Direksi Pada BUMN/ Perusahaan/Instansi Lain		Sebagai Pejabat Eksekutif Pada BUMN/ Perusahaan/ Instansi Lain	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Farid Wadjdi Husain	Komisaris Utama	20 April 2018		√		√		√
Saud Usman Nasution	Komisaris Independen	20 April 2018		√		√		√
Made Arya Wijaya	· Komisaris · Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II di Kementerian BUMN	20 April 2018		√		√	√	-
Yuni Suryanto	· Komisaris · Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan kemaritiman di Kementerian Keuangan	20 April 2018		√		√	√	-
Heridadi*	Komisaris Independen	23 Januari 2014-08 Januari 2019		√		√		√
H.M. Subuh	Komisaris	22-Jun-15		√		√		√

*Berakhir masa jabatan: tanggal 8 Januari 2019

URAIAN DIREKSI

Direksi sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH DIREKSI BIO FARMA DALAM MENJALANKAN TUGAS

1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan *(profitability)* dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah anggota Direksi Bio Farma harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Seluruh anggota Direksi Bio Farma harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi Direksi Bio Farma mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Sumber bakal calon Direksi berasal dari:

1. Direksi BUMN
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
3. Talenta BUMN yang diusulkan melalui Dewan Komisaris, terdiri atas:
   a. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
   b. Direksi anak perusahaan BUMN/Perusahaan patungan BUMN.
4. Talenta Kementerian BUMN;
5. Sumber lain yang terdiri dari:
   a. Pejabat BUMN lain; dan
   b. Sumber lainnya.

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam PER-03/MBU/02/2015 tentang Direksi dan Dewan Komisaris dan telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional. Pada tahun 2018 asesmen dilakukan oleh PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) untuk selanjutnya hasil asesmen serta penilaian performance Bakal calon yang akan diajukan, dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Negara BUMN dengan melibatkan Komisaris Utama atau Ketua Komite Risiko, Pengembangan & GCG untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian BUMN dan ditetapkan pada RUPS.

PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) selanjutnya hasil asesmen serta penilaian performance Bakal calon yang akan diajukan, dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri dengan melibatkan Komisaris Utama atau Komite Risiko, Pengembangan & GCG untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian BUMN dan ditetapkan pada RUPS.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUHAN DIREKSI

Seluruh Anggota Direksi Bio Farma telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam uji kepatutan dan kelayakan *(fit & proper test)* berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik, serta peraturan dan ketentuan lainnya. Seluruh anggota Direksi Bio Farma memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik. Hal tersebut terbukti dengan lulusnya *fit and proper test*.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUHAN DIREKSI

PERIODE I: 1 JANUARI – 21 JANUARI 2018

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper test)*
Juliman	Direktur Produksi yang menjalankan tugas sebagai Direktur Utama	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-127/ MBU/07/2017 tanggal 10 Juli 2017	Lulus
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Kep. Menteri BUMN Nomor: 221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	Lulus
Mas Rahman Roestan	Direktur Pemasaran	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-127/ MBU/07/2017 tanggal 10 Juli 2017	Lulus
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-131/ MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017	Lulus
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	Lulus

PERIODE II: 22 JANUARI - 11 APRIL 2018

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper test)*
Mas Rahman Roestan	Direktur Utama	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-27/ MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018	Lulus
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	Lulus
Juliman	Direktur Produksi	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	Lulus
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013	Lulus
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-131/ MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017	Lulus
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-27/ MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018	Lulus

PERIODE III: 12 APRIL - 19 APRIL 2018

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper test)*
Mas Rahman Roestan	Direktur Utama	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-27/ MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018	Lulus
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-131/ MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017	Lulus
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-27/ MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018	Lulus

PERIODE IV: 20 APRIL – 31 DESEMBER 2018

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper test)*
Mas Rahman Roestan	Direktur Utama	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-27/ MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018	Lulus
Juliman	Direktur Produksi	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-101/ MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018	Lulus
Adriansjah Azhari	Direktur Perencanaan dan Pengembangan	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-101/ MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018	Lulus
Pardiman	Direktur Keuangan	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-101/ MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018	Lulus
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-131/ MBU/07/2017 tanggal 14 Juli 2017	Lulus
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	Kep. Menteri BUMN Nomor: SK-27/ MBU/01/2018 tanggal 22 Januari 2018	Lulus

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)*. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan Direksi dilakukan melalui tahap *fit & proper test*.

KRITERIA/PERSYARATAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

KRITERIA/PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKSI

Bio Farma memiliki kriteria persyaratan calon anggota Dewan Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku.

KRITERIA/PERSYARATAN PENGANGKATAN DIREKSI BIO FARMA

Bio Farma memiliki kriteria persyaratan calon anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan sebagai berikut:

PERSYARATAN FORMAL

Persyaratan formal untuk menjadi Direksi Bio Farma

1. Orang perseorangan
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat

4. Tidak pernah dinyatakan pailit
5. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit
6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

PERSYARATAN MATERIIL

Persyaratan materiil untuk menjadi Direksi Bio Farma yaitu:

1. Mempunyai keahlian
2. Berintegritas tinggi
3. Mempunyai jiwa kepemimpinan
4. Mempunyai pengalaman
5. Jujur
6. Perilaku yang baik
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

PERSYARATAN LAIN

Persyaratan lain untuk menjadi Direksi Bio Farma:

1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II
2. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah
3. Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut
4. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya
5. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.

ALASAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKSI

1. Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS atau Menteri dengan menyebutkan alasannya
2. Alasan Pemberhentian antara lain:
   a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen
   b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik
   c. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan
   d. Telah ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara
   e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi BUMN
   f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
   g. Mengundurkan diri
   h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara lain karena terjadinya ketidakharmonisan antar Anggota Direksi.
3. Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan Peraturan Menteri ini dengan Anggaran Dasar BUMN mengenai alasan pemberhentian, maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar.
4. Jabatan Direksi berakhir apabila:
   a. Meninggal dunia
   b. Masa jabatannya berakhir
   c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
5. Rangkap jabatan yang dilarang sebagai mana dimaksud pada angka 4 huruf c antara lain sebagai berikut:
   a. Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta
   b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN
   c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah
   d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
   e. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;dan/atau
   f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
   g. Menjadi calon legislatif atau calon kepada daerah/wakil kepada daerah

h. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.

6. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimasud pada angka 5, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:
   a. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/ perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/ perusahaan patungan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.
   b. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri.
7. Direksi yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 4, masa jabatannya sebagai Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.

TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKSI

1. Deputi Teknis melakukan evaluasi terhadap Direksi sebelum mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Menteri.
2. Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi dan Sekretaris menyampaikan usulan pemberhentian Direksi BUMN kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
3. Penyampaian usulan pemberhentian disertai dengan
   a. Penjelasan mengenai alasan pemberhentian
   b. Konsep surat keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS tentang pemberhentian, atau surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS mengenai pemberhentian, atau surat kuasa untuk melakukan pemanggilan/penerimaan pembelaan diri dalam hal pemberhentian akan dilakukan di luar RUPS.
4. Rencana pemberhentian Direksi sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.
5. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan, maka Menteri, dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
6. Menteri dapat menugaskan Deputi dan/atau Sekretaris berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan pemberitahuan.
7. Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela difi.
8. Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Direksi yang bersangkutan diberitahu
9. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan.
10. Apabila Direksi yang bersangkutan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu dianggap telah terpenuhi.
11. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh Direksi yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan.
12. Apabila Direksi yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
13. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
14. Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, disiapkan oleh Deputi Teknis dengan dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh dokumen terkait disampaikan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
15. Menteri dapat memberhentikan Direksi berdasarkan basil evaluasi Menteri sendiri selain yang diusulkan oleh Deputi Teknis.

16. Dalam proses pemberhentian, Menteri dapat meminta pertimbangan Deputi Teknis dan/atau Sekretaris.
17. Penetapan pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan melalui cara:
    a. Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara;
    b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
18. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka Deputi Teknis dan Sekretaris memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
19. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
20. Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi dan/atau Sekretaris untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 19.
21. Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
22. Pemberhentian anggota Direksi dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI BIO FARMA

Komposisi dan jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi Bio Farma untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta melaksanakan operasional Perusahaan dengan penuh strategi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Miliki Negara Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013 dan Kep. Men. BUMN Nomor: SK-69/MBU/2013 tanggal 4 Februari 2013 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma, komposisi Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham yang melaksanakan pengelolaan Perusahaan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan visi dan misi.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bio Farma pada tanggal 07 Juli 2017, Iskandar diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Utama Bio Farma dan digantikan oleh Juliman sebagai Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Produksi, Mahendra Suhardono diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Pemasaran Bio Farma dan digantikan oleh Mas Rahman Roestan yang semula sebagai Corporate Secretary, Andjang Kusumah diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur SDM Bio Farma.

Pada 14 Juli 2017, Disril Revolin Putra diangkat sebagai Direktur SDM dan Umum Bio Farma yang semula menjabat Direktur SDM dan Hukum PT Pelindo II.

Berdasarkan hasil RUPS Bio Farma, pada tanggal 23 Januari 2018 terjadinya perubahan komposisi Direksi Bio Farma dengan mengangkat Mas Rahman Roestan dari Direktur Pemasaran menjadi Direktur Utama dan Sri Harsi Teteki sebagai Direktur Pemasaran.

Berdasarkan hasil RUPS Bio Farma, pada tanggal 20 April 2018, Pramusti Indrascaryo diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Keuangan Bio Farma dan digantikan oleh Pardiman, Sugeng Raharso diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Direktur Perencanaan & Pengembangan dan digantikan oleh Adriansjah Azhari dan mengangkat kembali Juliman sebagai Direktur Produksi yang sebelumnya sebagai Plt. Direktur Utama Bio Farma sampai dengan penunjukkan Direktur Utama definitive (10 Juli 2017 s/d 23 Januari 2018).

Komposisi Direksi Bio Farma 1 Januari 2018 sampai dengan 22 Januari 2018, Direksi Bio Farma berjumlah 5 (Lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Produksi dan 4 (Empat) orang Direktur dengan komposisi dan dasar pengangkatan sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan
Juliman	Direktur Produksi Plt. Direktur Utama	Indonesia	12 April 2013 – 20 April 2018 10 Juli 2017 – 23 Januari 2018	Kep Men BUMN Nomor: SK-21/MBU/04/2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Produksi Kep Men BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Produksi
Mas Rahman Roestan	Direktur Pemasaran	Indonesia	10 Juli 2017 s/d 23 Januari 2018	Kep Men BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pemasaran
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Indonesia	14 Juli 2017 – 14 Juli 2022	Kep Men BUMN Nomor: SK-131/MBU/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur SDM & Umum
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	Indonesia	12 April 2013 – 20 April 2018	Kep Men BUMN Nomor SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Keuangan
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Indonesia	12 April 2013 – 20 April 2018	Kep Men BUMN Nomor SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Rencanaan Dan Pengembangan.

Komposisi Direksi Bio Farma 23 Januari 2018 sampai dengan 20 April 2018, Direksi Bio Farma berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur dengan komposisi dan dasar pengangkatan sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan
Mas Rahman Roestan	Direktur Utama	Indonesia	10 Juli 2017 - 23 Januari 2018 23 Januari 2018 – 10 Juli 2022	Kep Men BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pemasaran Kep Men BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Utama
Juliman	Direktur Produksi	Indonesia	12 April 2013 – 20 April 2018 10 Juli 2017 – 23 Januari 2018	Kep Men BUMN Nomor: SK-21/MBU/04/2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Produksi Kep Men BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Produksi
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	Indonesia	23 Januari 2018 – 23 Januari 2023	Kep Men BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pemasaran
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Indonesia	14 Juli 2017 – 14 Juli 2022	Kep Men BUMN Nomor: SK-131/MBU/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur SDM & Umum
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	Indonesia	12 April 2013 – 12 April 2018	Kep Men BUMN Nomor SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Keuangan
*Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Indonesia	12 April 2013 – 20 April 2018	Kep Men BUMN Nomor SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Rencanaan Dan Pengembangan.

Komposisi Direksi Bio Farma 20 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, Direksi Bio Farma berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur dengan komposisi dan dasar pengangkatan sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Domisili	Masa Jabatan	Dasar Pengangkatan
Mas Rahman Roestan	Direktur Utama	Indonesia	10 Juli 2017 - 23 Januari 2018 23 Januari 2018 – 10 Juli 2022	Kep Men BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pemasaran Kep Men BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Utama
Juliman	Direktur Produksi	Indonesia	12 April 2013 – 20 April 2018 10 Juli 2017 – 23 Januari 2018	Kep Men BUMN Nomor: SK-21/MBU/04/2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Produksi Kep Men BUMN Nomor: SK-127/MBU/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Produksi
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	Indonesia	23 Januari 2018 – 23 Januari 2023	Kep Men BUMN Nomor: SK-27/MBU/01/2018 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pemasaran
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Indonesia	14 Juli 2017 – 14 Juli 2022	Kep Men BUMN Nomor: SK-131/MBU/07/2017 Tanggal 14 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur SDM & Umum
Pardiman	Direktur Keuangan	Indonesia	20 April 2018 – 20 April 2023	Kep Men BUMN Nomor: SK – 101/MBU/04/2018 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Keuangan
Adriansjah Azhari	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Indonesia	20 April 2018 – 20 April 2023	Kep Men BUMN Nomor: SK – 101/MBU/04/2018 Tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Rencanaan Dan Pengembangan.

Riwayat singkat dari masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatan dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para Anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KEBIJAKAN TERKAIT PENGUNDURAN DIRI DIREKSI APABILA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN KEUANGAN

Apabila dalam menjalankan tugasnya, Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan, maka tindak lanjut yang dilakukan Perusahaan mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

URAIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan bagian dari Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasional Perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab dalam pencapaian rencana kerja jangka pendek yang tercantum dalam Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Direksi harus mampu mengambil keputusan secara efektif, tepat, cepat dan bertindak independen sekaligus bertanggung jawab dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta sistem manajemen risiko secara konsisten dan berkesinambungan.

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN PENETAPAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Sebagai BUMN yang baik dan menerapkan GCG yang berkelanjutan, dalam penetapan tugas, wewenang dan kewajiban Direksi Bio Farma mengacu pada pedoman dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada BUMN
2. Anggaran Dasar Perusahaan
3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris Dan Direksi *(Board Manual)* PT Bio Farma (Persero).

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual Direksi yang telah diunggah pada situs Perusahaan.

TUGAS DIREKSI BIO FARMA

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
4. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

WEWENANG DIREKSI BIO FARMA

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-ama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiunan atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
5. Mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)*. Untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan *(Corporate Secretary)*dilakukan berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawas Intern. Untuk Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawas Intern dilakukan berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, megikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
9. Melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dengan batasan kewenangan sebagai berikut:
   a. Menyewakan aset.
      Direksi dapat menyewakan aset Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan nilai sewa/transkasi sampai dengan 1% dari pendapatan *(revenue)* atau 2% dari ekuitas *(equity)* Perusahaan, mana yang lebih kecil.
   b. Kerjasama Operasi dan Kerjasama Usaha.
      Direksi dapat melakukan Kerjasama Operasi dan Kerjasama Usaha dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perusahaan yang dikerjasamakan) sampai dengan 2,5% dari pendapatan *(revenue)* atau 5% dari ekuitas *(equity)* Perusahaan, mana yang lebih kecil.
   c. Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BowT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO).
      Direksi dapat melakukan Kerjasama dengan jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan nilai aset Perusahaan yang dikerjasamakan sampai dengan 6% dari pendapatan *(revenue)* atau 6,5% samapai dari ekuitas *(equity)* Perusahaan, mana yang lebih kecil.
   d. Kontrak Manajemen dan Kerjasama Lainnya.
      Direksi dapat melakukan kerjasama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perusahaan yang dikerjsamakan) sampai dengan 2,5% dari pendapatan *(revenue)*, atau 5% dari ekuitas *(equity)* Perusahaan, mana yang lebih kecil.
   e. Pelaksanaan tindakan tersebut pada huruf a, b, c dan d, harus disertai dengan Pakta Integritas yang berisi pernyataan Direksi bahwa pelaksanaan tindakan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan itikad baik, tanpa pengaruh pihak lain dan tanpa benturan kepentingan, serta dengan penuh kehati-hatian untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntan Keuangan dan menyerahkan kepada Aakuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan dan dokumen perusahaan lainnya.

12. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan serta dokumen perusahaan lainnya.
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
14. Memberi laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham.
15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
16. Memberikan penejelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Para Pemegang Saham.
17. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
18. Menyusun Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Direksi guna dimintakan persetujuan RUPS.
19. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN RENCANA JANGKA PANJANG (RJP)

1. Direksi wajib menyiapkan RJP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. RJP sekurang-kurangnya memuat:
   a. Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya.
   b. Posisi Perusahaan saat ini.
   c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP.
   d. Penetapan misi, sasaran, startegi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.
3. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJP disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

1. Direksi wajib menyiapkan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJP.
2. RKAP sekurang-kurangnya memuat:
   a. Misi, sasaran, strategi, kebijakan Perusahaan dan program kerja/kegiatan.
   b. Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan.
   c. Proyeksi keuangan Perusahaan dan anak Perusahaannya.
   d. Program kerja Dewan Komisaris.
   e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
3. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
4. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
5. Rancangan RKAP disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan).
6. Dalam hal rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.
7. Rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas harus disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN (ANNUAL REPORT)

1. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, dan pada akhir tahun bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
   a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan

perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
b. Laporan mengenai kegiatan Perusahaan.
c. Laporan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, jika ada.
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang baru lampau.

3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan tidak memberi alasannya secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagimana dimaksud pada angka 5, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.
9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.
11. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa kedaan tersebut bukan karena kesalahannya.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas meliputi laporan triwulan dan laporan tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau RUPS.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 di atas, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
6. Laporan triwulanan sebagimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani oleh semua anggota Direksi.
7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

1. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha.
2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan:
   a. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi atau
   b. Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BIO FARMA

1. Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
2. Sistem pengendalian intern antara lain mencakup:
   a. Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:
   b. Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan.
   c. Filosofi dan gaya manajemen.
   d. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
3. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
   a. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
   b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
   c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan ada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otoritasasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilain atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
   d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
   e. *Monitoring* yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA BERKAITAN DENGAN KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI BIO FARMA

1. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan atau perusahaan lain termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan Perusahaan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
2. Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.
3. Direksi bertanggungjawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
4. Informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
5. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDELEGASIAN WEWENANG DIREKSI BIO FARMA

Direksi dapat mendelegasikan kewenangan kepada anggota Direksi lainnya dan pejabat setingkat di bawah Direksi. Pendelegasian wewenang meliputi tugas, tanggung jawab serta kewenangan, dan dibuat secara tertulis. Setiap pendelegasian wewenang dilakukan melalui analisis terhadap pekerjaan yang akan didelegasikan dan kompetensi orang yang akan menerima pendelegasian wewenang.

Pada tahun 2018, terdapat 6 (enam) kali pendelegasian wewenang anggota Direksi kepada anggota Direksi lainnya melalui Surat Kuasa. Wewenang anggota Direksi kepada anggota Direksi lainnya melalui surat kuasa mengingat rapat Direksi untuk pengambilan keputusan selalu memenuhi kuorum rapat.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BIO FARMA

Direksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi. Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi tidak menghilangkan tanggungjawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan Perusahaan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dijabarkan dalam Bagan Organisasi Perusahaan yang penetapannya melalui persetujuan Dewan Komisaris.

Direksi mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi juga harus melaksanakan kepentingan Perusahaan sesuai dengan visi dan misi serta mewakili Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing Direktur adalah sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Bidang Tugas
M. Rahman Roestan	Direktur Utama	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Utama dan seluruh jajaran Direksi dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta melakukan koordinasi dengan Direksi lainnya dalam pencapaian kinerja bisnis Perusahaan.
Juliman	Direktur Produksi	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Produksi dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Pemasaran termasuk pengelolaan unit bisnis strategis dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat SDM & Umum dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Pardiman	Direktur Keuangan	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Keuangan dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Adriansjah Azhari	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Memastikan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan telah sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya Perusahaan serta memastikan strategi, perencanaan, implementasi dan evaluasi tata kelola Perusahaan di Direktorat Perencanaan & Pengembangan dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan sesuai dengan arah dan pencapaian kinerja bisnis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

RENCANA KERJA DIREKSI TAHUN 2018

Mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta prinsip *Good Corporate Governance* bahwa tugas, fungsi dan tanggungjawab Direksi adalah sebagai pengelola Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.

1. Gambaran Umum
   a. Model Bisnis
   b. Analisis Internal
   c. Analisis Eksternal
2. Asumsi-asumsi Penyusunan RKAP Tahun Buku 2019
3. Risiko Perusahaan
   a. Perubahan Kebijakan / Regulasi Nasional & Internasional
   b. Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung
   c. Keluar/Pindahnya karyawan yang Memiliki Talenta dan Potensi Tinggi
   d. Ketidak mampuan memenuhi kewajiban jangka pendek (Likuiditas)
   e. Tidak Terserapnya Persediaan Produk
   f. Ketidak mampuan memenuhi kewajiban jangka panjang (Kridit Investasi)
   g. Kinerja Manajemen dan Karyawan Tidak Mencapai Target KPI
   h. Pemalsuan Produk Bio Farma
   i. Munculnya Berita Negatif Mengenai Perusahaan di Media Massa Mainstream
   j. Implementasi MRP Tidak Sesuai Target
4. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Korporat Tahun 2019
   a. Sasaran Perusahaan
      - Keuangan
        - » Absolute Target
        - » Main Target
        - » Spesifik Target
      - Non Keuangan
   b. Strategi Perusahaan
      - Produk
      - Pengembangan Bisnis
      - Keuangan
   c. Kebijakan Perusahaan
5. Program Kerja Per Bidang
   a. Organisasi & Proses Bisnis
      - Perencanaan Strategis
      - Implementasi GCG
      - Implementasi Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan dan K3
      - Sistem Informasi Manajemen
      - Optimalisasi Aset Tetap Perusahaan
   a. Penelitian dan Pengembangan
      - Penelitian dan Pengembangan Vaksin
      - Penelitian dan Pengembangan Antisera
      - Penelitian dan Pengembangan Diagnostik
      - Penelitian dan Pengembangan Biosimilar
      - Pengembangan Stemcell
      - *Surveilance* Dan Uji Klinis
   b. Pemasaran
      - Penjualan Dalam Negeri
      - Penjualan Ekspor
      - Pemasaran dan Distribusi
      - Unit Bisnis Klinik Dan Imunisasi (UBKI)
   c. Produksi Dan Penunjang Produksi
      - Perencanaan Produksi
      - Produksi
      - Pengadaan
   d. Human Capital (SDM)
   e. Keuangan dan Akuntansi
   f. Satuan Pengawasan Intern
   g. Rencana Kerjasama Tahun 2018
6. Target Kinerja Perusahaan dalam RKAP 2018 Dibanding Dengan RJPP 2018
7. Anggaran Perusahaan
   a. Penjualan: Penjualan Vaksin, Sera & *Trading Partnership*
   b. Produksi
   c. Beban Peningkatan & Pengembangan SDM
      - Pembelian
      - Beban Perusahaan
      - Beban Pokok Penjualan
        - Beban Pokok Penjualan Produk Perusahaan
        - Beban Pokok Penjualan Produk Partnership
        - Beban Pokok Penjualan Trading Partnership
        - Beban Pokok Penjualan Jasa
        - Beban Penjualan
        - Beban Administrasi Umum
        - Beban Penelitian & Pengembangan
      - Investasi dan Sumber Pembiayaan
        - Investasi Tahun 2018
        - Sumber & Penggunaan Dana
        - Investasi Multiyears 2018-2019
        - Uang Muka Investasi Tahun 2018
8. Proyeksi Keuangan Tahun 2018
   a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
   b. Laporan Laba/Rugi Komprehensif
   c. Perubahan Ekuitas
   d. Arus Kas
   e. Rasio Keuangan
   f. Tingkat Kesehatan Perusahaan
   g. *Key Performance Indicators* (KPI)

9. Program Kemitraan, Bina Lingkungan Dan CSR Tahun 2018

REALISASI PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, Direksi Bio Farma telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

PERENCANAAN BISNIS, KEUANGAN DAN AKUNTANSI

1. Menyusun Program Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2018 - 2022
2. Menyusun Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2019
3. Kinerja Perusahaan tahun 2018 dari sisi penjualan mencapai Rp3,24 triliun meningkat sebesar 7,43% dibandingkan realisasi tahun 2018 dan mencapai 98,52% dari anggarannya
4. Beban pokok penjualan & jasa sebesar Rp1,82 triliun meningkat 10,05% dibandingkan realisasi tahun 2018 dan mencapai 102,43% dari anggarannya
5. Perolehan laba bersih perusahaan meningkat sebesar 3.4% dari realisasi tahun 2018 menjadi sebesar Rp543,23 miliar atau mencapai 93,47% dari anggarannya.
6. Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2018 mendapat skor 90,35 dengan kriteria "SEHAT AA", tahun sebelumnya 86,00 dengan kriteria "SEHAT AA".
7. Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) memperoleh nilai 91,76 dari total nilai 100.
8. Pencapaian penjualan tahun 2018 baik per kelompok produk maupun per sektor mencapai 98,52% dari anggarannya
9. Realisasi beban produksi tahun 2018 untuk memproduksi produk jadi maupun produk dalam proses sebesar Rp1,83 triliun atau naik sebesar 3,16% dari anggarannya. Apabila dibanding dengan realisasi tahun 2017 naik sebesar 6,33%.
10. Dilaksanakannya penelitian dan pengembangan vaksin, surveilans & evaluasi produk.

MANAJEMEN RISIKO / IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Pada tahun 2018 kegiatan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. *Benchmarking* Implementasi GCG, CRM, Culture dan Corsec
2. Penyebaran Kuesioner *Self Assessment* GCG untuk Dewan Komisaris, Komite Dekom dan Direksi.
3. Pembuatan Laporan Pemantauan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)
4. Finalisasi Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bab Tata Kelola Perusahaan Tahun 2018 untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Penyebaran Kuesioner *Self Assessment* GCG untuk Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Staf, Staf Muda, dan Pelaksana.
6. Tabulasi Kuesioner *Self Assessment* GCG.
7. Finalisasi Scorecard *Self Assessment* GCG.
8. Finalisasi Laporan Hasil *Self Assessment* PT Bio Farma (Persero).
9. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Bio Farma (Persero) dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
10. Pembahasan Program Aplikasi ERM.
11. Koordinasi Mitigasi & Action Plan Risiko Korporat (Tindak Lanjut Penanganan Risiko Korporat).
12. Sosialisasi Pedoman GCG dan Pakta Integritas.
13. Penyerahan Laporan ERM Unit dan Rencana Tindak Lanjut Penanganan Risiko Unit.
14. Penyusunan *Sustainability Report* Bab Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Produk.
15. Koordinasi Program aplikasi ERM: Sso, schema, & konversi *source code*.
16. Pembuatan daftar dokumen *Assessment* GCG Tahun 2017/2018.
17. Penyusunan Laporan Implementasi KPKU Tahun 2018.
18. Pembahasan *Corporate Risk Register* – Risiko realisasi investasi tidak sesuai jadwal.
19. Revisi pedoman penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance)* dan pedoman perilaku (*Code of Conduct*) di PT Bio Farma sesuai rekomendasi *assesment* GCG oleh BPKP Jabar.
20. Penyusunan materi presentasi *Induction Training* karyawan baru untuk aspek GCG Bio Farma.

PENGENDALIAN INTERNAL

Realisasi kegiatan Pengendalian internal pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2018.
2. Melakukan pemeriksaan / audit internal di beberapa bagian yang ada di Bio Farma sesuai Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2018 serta dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

3. Melakukan pemeriksaan diluar PKPT / Non PKPT yaitu melakukan pemeriksaan rutin aktivitas keuangan, pemasaran dan pengadaan barang & jasa.
4. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut dari objek pemeriksaan atas LHP audit internal maupun LHP audit eksternal.
5. Melakukan kas *opname* Perusahaan per Triwulan tahun 2018 dan *opname* fisik persediaan barang jadi dan bahan baku pada akhir tahun 2018.
6. Menjadi *Counterpart* Pemeriksa/Auditor eksternal seperti Kantor Akuntan Publik/KAP, BPK dan BPKP.

KOMUNIKASI

Realisasi kegiatan komunikasi pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama baik dalam maupun luar negeri dengan mempertimbangkan manajemen risiko Perusahaan.
2. Membuat Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
3. Menyampaikan Laporan Tahunan tahun 2018 termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
4. Penyajian laporan tahun 2018 mengenai kegiatan operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
5. Rapat Rutin Internal Direksi.
6. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi.
7. Rapat internal Direksi dapat melibatkan Kepala Divisi atau Bagian yang terkait.
8. Kunjungan Kerja Ke Lapangan/*Monitoring* ke dalam dan luar negeri.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Penggunaan dana Program Kemitraan di Tahun 2018 sebesar Rp6,47 miliar atau sebesar 39% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp16,70 miliar terdiri dari:

1. Pinjaman modal: merupakan penyaluran dana kepada 142 (seratus empat puluh dua) pengusaha kecil sebesar Rp6,005 miliar atau sebesar 38% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp16,00 miliar. Hal ini dikarenakan pengembalian dana Program Kemitraan yang berasal dari PTPN X sebesar Rp7,00 miliar dan PTPN XI sebesar Rp4,00 miliar direncanakan akan diterima di tahun 2018 dan disalurkan kembali ke PTPN X sebesar Rp7,00 miliar dan PTPN XI sebesar Rp4,00 miliar di tahun 2018 untuk musim tanam 2018-2019.

   Sehubungan dengan adanya risalah rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran PKBL tahun 2018 PT Bio Farma Nomor: RIS-04/D.7.MBU.3/2017 tanggal 15 November 2017 yang menyatakan bahwa penyaluran dana Program Kemitraan kepada petani tebu melalui PTPN X dan PTPN XI, sesuai arahan Menteri BUMN, pembiayaannya menggunakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikeluarkan oleh Bank setelah petani mendapatkan kartu tani. Sehingga rencana penyaluran dana Program Kemitraan ke PTPN X sebesar Rp7,00 miliar dan PTPN XI sebesar Rp4,00 miliar tidak dapat dilaksanakan.

2. Hibah pembinaan: merupakan bantuan pendidikan, pelatihan & promosi untuk mitra binaan dengan total sebesar Rp461,07 juta atau sebesar 66% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp700,00 juta. Hibah pembinaan ini terdiri dari kegiatan pameran mitra binaan sebesar Rp133,25 juta, kegiatan pendidikan dan pelatihan mitra binaan sebesar Rp208,42 juta dan bantuan pelatihan kepada petani tebu melalui sinergi BUMN dengan PTPN XI sebesar Rp119,40 juta.

   Penyaluran Program Kemitraan pada Tahun 2018 didasarkan pada wilayah dan sektor usaha.

Penyaluran dana bantuan Program CSR disalurkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Bantuan pada sektor ekonomi berupa pelaksanaan kegiatan Mudik Bareng Gratis BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2018, bantuan sarana penunjang kegiatan program life skill menjahit di Kec. Sukajadi Kota Bandung, bantuan pembuatan pakan silase domba garut di Kec. Wanaraja Kab. Garut dan bantuan BUMN Hadir Untuk Negeri dalam pemenuhan kebutuhan dasar program rumah karyawan dan masyarakat.
2. Bantuan pada sektor kesehatan
3. Bantuan pada sektor lingkungan
4. Bantuan pada sektor pendidikan

REALISASI ANGGARAN DIREKSI

Jumlah RKAP Direksi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp30,275 miliar dan realisasi RKAP sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp25,877 miliar atau terealisasi sebesar 85,47% dari anggaran.

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI

1. Direksi menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG.
2. Laporan tahunan memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan memperoleh pengesahan RUPS.
3. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
4. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

RENCANA KERJA DIREKSI TAHUN 2019

1. Gambaran Umum
   e. Analisis Internal
   f. Analisis Eksternal
   g. Peran Strategis Bio Farma
2. Asumsi-asumsi Penyusunan RKAP Tahun Buku 2019
3. Risiko Perusahaan
   h. Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional & Internasional
   i. Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung
   j. Kegagalan Divisi SDM dalam menciptakan talent Karyawan
   k. Keluar/Pindahnya karyawan yang Memiliki Talenta dan Potensi Tinggi
   l. Ketidak mampuan memenuhi kewajiban jangka pendek (Likuiditas)
   m. Tidak Terserapnya Persediaan Produk
   n. Ketidak mampuan memenuhi kewajiban jangka panjang (Kridit Investasi)
   o. Kinerja Manajemen dan Karyawan Tidak Mencapai Target KPI
   p. Pemalsuan Produk Bio Farma
   q. Munculnya Berita Negatif Mengenai Perusahaan di Media Massa Mainstream
   r. Implementasi MRP Tidak Sesuai Target
4. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Korporat Tahun 2019
   a. Sasaran Perusahaan
      - Keuangan
        - Absolute Target
        - Main Target
        - Spesifik Target
      - Non Keuangan
   b. Strategi Perusahaan
      - Produk
      - Pengembangan Bisnis
      - Keuangan
5. Kebijakan Perusahaan
   a. Program Kerja Per Bidang
      - Organisasi & Proses Bisnis
      - Perencanaan Strategis
      - Implementasi GCG
      - Implementasi Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan dan K3
      - Sistem Informasi Manajemen
      - Optimalisasi Aset Tetap Perusahaan
   b. Penelitian dan Pengembangan
      - Penelitian dan Pengembangan Vaksin
      - Penelitian dan Pengembangan Antisera
      - Penelitian dan Pengembangan Diagnostik
      - Penelitian dan Pengembangan Biosimilar
      - Pengembangan Stemcell
      - *Surveilance* dan Uji Klinis
   c. Pemasaran
      - Penjualan Dalam Negeri
      - Penjualan Ekspor
      - Pemasaran dan Distribusi
      - Unit Bisnis Klinik Dan Imunisasi (UBKI)
   d. Produksi Dan Penunjang Produksi
      - Perencanaan Produksi
      - Produksi
      - Pengadaan
   k. Human Capital (SDM)
   l. Keuangan dan Akuntansi
   m. Satuan Pengawasan Intern
   n. Rencana Kerjasama Tahun 2019
6. Target Kinerja Perusahaan dalam RKAP 2019 Dibanding Dengan RJPP 2019
7. Anggaran Perusahaan
   a. Penjualan: Penjualan Vaksin, Sera & Trading Parnership
   b. Produksi
   c. Beban Peningkatan & Pengembangan SDM
   d. Pembelian

e. Beban Perusahaan
f. Beban Pokok Penjualan
   - Beban Pokok Penjualan Produk Perusahaan
   - Beban Pokok Penjualan Produk Partnership
   - Beban Pokok Penjualan Trading Partnership
   - Beban Pokok Penjualan Jasa
   - Beban Penjualan
   - Beban Administrasi Umum
   - Beban Penelitian & Pengembangan
g. Investasi dan Sumber Pembiayaan
   - Investasi Tahun 2019
   - Sumber & Penggunaan Dana
   - Investasi *Multiyears* 2019-2020
   - Uang Muka Investasi Tahun 2019

8. Proyeksi Keuangan Tahun 2019
   a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
   b. Laporan Laba/Rugi Komprehensif
   c. Perubahan Ekuitas
   d. Arus Kas
   e. Rasio Keuangan
   f. Tingkat Kesehatan Perusahaan
   g. *Key Performance Indicators* (KPI)
9. Program Kemitraan, Bina Lingkungan Dan CSR Tahun 2019

PENILAIAN ATAS KINERJA MASING-MASING KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Per 31 Desember 2018, Bio Farma tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh unit kerja yang dipimpin oleh Kepala Divisi, Ahli Utama, Kepala Bagian, Ahli Madya, Kepala Seksi dan Ahli Muda.

Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Direksi dan dasar penilannya.

PENGUNGKAPAN MENGENAI *BOARD MANUAL* (PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA) DIREKSI

Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsi kepengurusan perseroan serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris, Direksi berpedoman pada Pedoman Direksi yang termuat dalam Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi. Board Manual merupakan *living document* sehingga secara berkala harus selalu dilakukan pengembangan sesuai kebutuhan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keputusan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris Dan Direksi (Board Manual) PT Bio Farma (Persero).

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang senantiasa dievaluasi secara berkala agar sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan telah diunggah ke situs Perusahaan.

TUJUAN BOARD MANUAL DIREKSI

1. Sebagai panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan kualitas dan efektifikats dan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi
3. Menjabarkan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan perusahaan yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance).*

PEDOMAN PELAKSANAAN *BOARD MANUAL* DIREKSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya adalah:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
   b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
   c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
   d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
   e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

2. Peraturan Pemerintah, diantaranya adalah:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.

3. Peraturan Menteri Negara BUMN, diantaranya adalah
a. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-16/MBU/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN
b. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN
c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
d. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN
e. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU/2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN

4. Keputusan Menteri Negara BUMN, diantaranya adalah:
a. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-104/MBU/2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
b. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara
c. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP)
d. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)
e. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
f. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-09A/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *BOARD MANUAL* DIREKSI

1. Anggaran Dasar Perusahaan
2. *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris Dan Direksi (Board Manual) PT Bio Farma (Persero).

PEDOMAN DIREKSI YANG DIATUR DALAM *BOARD MANUAL* ANTARA LAIN MENGATUR ASPEK:

1. Program pengenalan bagi anggota Direksi Baru.
2. Program pelatihan bagi anggota Direksi.
3. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Tugas, wewenang dan Kewajiban serta Pembagian tugas Direksi.
5. Ketentuan pelaksanaan tugas jabatan Direksi yang lowong.
6. Benturan kepentingan.
7. Kewajiban Direksi berkaitan dengan penyusunan rencana jangka panjang.
8. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan penyusunan RKAP.
9. Kewajiban Direksi berkaitan dengan penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report).
10. Pengelolaan Manjemen Risiko.
11. Sistem Pengendalian Internal.
12. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi.
13. Etika berusaha dan anti korupsi.
14. Larangan mengambil keuntungan pribadi.
15. Rapat Direksi.
16. Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas dan wewenang yang sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keduanya secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG secara konsisten. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk turut campur dalam pengambilan keputusan operasional Perusahaan.

Direksi sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola Perusahaan akan mempertanggungjawabkannya di RUPS.

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan keputusan strategis Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai 2 (dua) organ Perusahaan terpenting senantiasa mengagendakan pertemuan berkala. Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi. Rapat ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris secara berkala, antara lain untuk membahas kinerja Perusahaan bulan sebelumnya, rencana Direksi bulan mendatang untuk meraih peluang yang ada, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui usulan Direksi mengenai:
   a. RJPP.
   b. Rencana Pengembangan Perusahaan.
   c. RKAP.
   d. Rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan.
   e. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Intern.
   f. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan.
   g. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Bersama-sama dengan Direksi melakukan kajian Visi dan Misi Perusahaan
3. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dibantu Direksi dalam:
   a. Proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perusahaan.
   b. Penunjukan penilai *(assessor)* independen dalam proses *assessment* penerapan GCG di Perusahaan.
4. Direksi bertanggung jawab memastikan bahwa:
   a. Dewan Komisaris menerima informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap
   b. Dewan Komisaris memperoleh laporan secara periodik mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi.
   c. Dewan Komisaris menerima laporan mengenai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan dari Perusahaan, yang telah ditetapkan dalam RUPS anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
   d. Dewan Komisaris atau Komite Penunjang Dewan Komisaris menerima penjelasan atas segala hal yang ditanyakan;
   e. Dewan Komisaris menerima Risalah Rapat Direksi.
5. Hal-hal lainnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, *Board Manual* Dewan Komisaris & Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

EVALUASI ATAS STRATEGI PERUSAHAAN

Evaluasi atas strategi Perusahaan selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan yang dilakukan secara berkala dan pelaksanaan dikoordinir oleh Divisi Rencana Strategi Perusahaan dengan melibatkan seluruh Direksi dan para Kepala Divisi Dan Kepala Bagian dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk mengetahui tingkat pencapaian dan arah bisnis. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahunnya yang mengacu pada RJPP harus diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Review atas RJPP di tahun 2018 telah dilakukan dalam Rapat Direksi pada tanggal 17 Mei, 30 Mei, 8 Juni, 28 Juni, 15 November 2018 dan pada rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi pada tanggal 29 Januari, 31 Mei, 26 Juli, dan 30 November 2018.

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DIREKSI DAN PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Program pelatihan dan pengembangan diri bagi anggota Direksi perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Sepanjang tahun 2018, Direksi telah mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Tanggal	Kegiatan / Agenda	Penyelenggara	Tempat Pelatihan	Kategori
M. Rahman Rustan	Direktur Utama	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk *Life Science* (Antara lain *Blood Product*, UU Produk Halal)	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Yogyakarta	*Professional Coach I & II*
Juliman	Direktur Produksi	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk *Life Science* (Antara lain *Blood Product*, UU Produk Halal)	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Yogyakarta	*Professional Coach I & II*
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk *Life Science* (Antara lain *Blood Product*, UU Produk Halal)	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Yogyakarta	*Professional Coach I & II*
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk *Life Science* (Antara lain *Blood Product*, UU Produk Halal)	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Yogyakarta	*Professional Coach I & II*
Pardiman	Direktur Keuangan	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk *Life Science* (Antara lain *Blood Product*, UU Produk Halal)	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Yogyakarta	*Professional Coach I & II*
Adriansjah Azhari	Direktur Perencanaan & Pengembangan	16 Maret 2018	Antisipasi Regulasi Terkait Produk *Life Science* (Antara lain *Blood Product*, UU Produk Halal)	Kementerian BUMN - Daya Dimensi Indonesia	Yogyakarta	*Professional Coach I & II*

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

PROGRAM ORIENTASI DIREKSI BARU BIO FARMA MENGACU PADA

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada BUMN
2. SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Paramater Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada BUMN Sekrearis Kementerian BUMN
3. Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris Dan Direksi *(Board Manual)* PT Bio Farma (Persero).

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan perusahaan khusus Direksi, Bio Farma memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Direksi baru yang bertujuan memberikan gambaran aktvitas bisnis, strategi, rencana jangka panjang perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi bagi Direksi baru disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi SDM dan divisi terkait lainnya, disampaikan dalam bentuk presentasi, pemberian dokumen laporan tahunan, *company profile*, buku sejarah perusahaan, Dokumen terkait GCG, *product knowledge*, serta diakhiri dengan kunjungan ke area produksi vaksin.

Direksi baru juga aktif mengikuti forum-forum yang diselenggarakan oleh Perusahaan baik yang skala nasional seperti Forum Riset Vaksin maupun skala internasional seperti pertemuan vaksin negara berkembang

(*Developing Countries Vaccine Manufacturer Networks*) serta Organization of Islamic Cooperation (OIC).

Pada tanggal 23 Januari 2018 terjadinya perubahan komposisi dan jumlah Direksi Bio Farma yaitu M. Rahman Roestan sebagai Direktur Pemasaran diangkat menjadi Direktur Utama menggantikan Juliman sebagai Plt. Direktur Utama merangkap Direktur Produksi dan mengangkat Sri Harsi Teteki sebagai Direktur Pemasaran. Sesuai dengan aturan yang ada dilaksanakan program oreintasi pengenalan Perusahaan pada tanggal 01 Februari 2018 dalam Rapat Direksi.

Pada tanggal 20 April 2018, Pramusti Indarcasyo diberhentikan dengan hormat yang telah habis masa jabatannya sebagai Direktur Keuangan Bio Farma digantikan oleh Pardiman. Sugeng Raharso diberhentikan dengan hormat yang telah habis masa jabatannya sebagai Direktur Prencanaan dan Pengembangan digantikan oleh Adriansjah Azhari. Sesuai dengan peraturan yang ada dilaksanakan program orientasi pengenalan perusahaan pada tanggal 4 Mei 2018 dalam acara rapat Direksi.

Materi pengenalan diberikan sesuai Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2018. Selain pemaparan atas Perusahaan, dalam program pengenalan Perusahaan juga disampaikan dokumen-dokumen penunjang, diantaranya Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perusahaan, Corporate Governance Policy (CGP), Standar Etika Perusahaan, Program Kerja Direksi, Charter Direktur, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi, guna memahami secara langsung proses bisnis Perusahaan, program pengenalan Perusahaan juga meliputi kunjungan langsung ke Unit/ Unit Kerja Perusahaan serta program orientasi yang lainnya sebagai berikut:

Nama	Materi Program Orientasi	Tempat Pelaksanaan
Pardiman Adriansjah Azhari Sri Harsi Teteki	1. Company Profile 2. Implementasi GCG di PT Bio Farma (Persero) 3. SMK3L PT Bio Farma 4. Divisi SDM – Data HC dan Kompensasi & Benefit 5. Career Management PT Bio Farma (Persero) 6. Learning Management 7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 8. Hubungan Industrial 9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan 10. Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan 11. Work Life Balance Bio Farma 12. Kemandirian Pemenuhan Produk Plasma di Indonesia Melalui Fraksionasi Plasma Dalam Negeri 13. Orientasi Umum Product Knowledge 14. Quality Management – Basic Principles of GMP	PT Bio Farma (Persero)

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2018, belum ada Direksi yang pernah mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko.

ASSESSMENT/PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Bio Farma meyakini bahwa penerapan GCG dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan baik dalam hal pertumbuhan usaha, profitabilitas maupun keberlanjutan usaha jangka panjang, sehingga memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*.

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk pelaksanaan asesmen / penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada:

1. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, bahwa RUPS menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
2. Kementerian BUMN melalui Sekretaris Kementerian BUMN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tanggal 06 Juni 2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada BUMN. Pada Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG, BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, BUMN dapat segera menetapkan rencana tindak *(action plan)* yang diperlukan.
3. Dewan Komisaris Bio Farma telah mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK-06/DK/BF/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan dan Penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris tahun 2012.
4. Surat Menteri BUMN Nomor: S-676/MBU/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Penerapan KPI

KRITERIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DAN PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

1. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen atas kinerja Direksi didasarkan pada pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen atas kinerja Dewan Komisaris didasarkan pada usulan Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011
3. Setiap awal tahun, pelaksanaan tugas Direksi direncanakan dalam suatu program kerja yang tercantum dalam RKAP. Pada akhir tahun, Direksi menyusun Laporan Manajemen Perusahaan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan.
4. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolegial yang merupakan bagian dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas telah direncanakan setiap awal tahun dalam suatu program kerja yang tercantum dalam RKAP. Pada akhir tahun, Dewan Komisaris menyusun Laporan Tugas Pengawasan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN KPI

Penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2018 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui Kontrak Manajemen.

PROSEDUR PELAKSANAAN ASSESSMENT KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kinerja Perusahaan yang dituangkan dalam pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan oleh RUPS. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam RUPS tercermin dari keputusan RUPS yang memberikan persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perusahaan untuk tahun buku yang lalu.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-1/MBU/2011, bahwa RUPS menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan usulan Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris Bio Farma telah menerbitkan Charter Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) 2018.

KRITERIA EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

PENILAIAN KPI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2016-2018 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.	Aspek Dan parameter	Periode	Satuan Output	Bobot (%)	2016			2017			2018		
					Target	Realisasi	Bobot	Target	Realisasi	Bobot	Target	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
I.	Aspek Perencanaan												
1	Menyusun RKAP serta KPI Dewan Komisaris	Tahunan	Dokumen	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10
	Sub Total			10			10			10			10
II	Aspek Pengawasan Dan Nasehat												
1	Memberikan tanggapan/ rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap:												
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan	Tahunan	Surat	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4
	b. Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	4	1	1	4	1	1	4	1	1	4
	c. Analisis kinerja triwulanan	Triwulan	Surat	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
	d. Evaluasi RJPP	Setahun	Surat	4	1	0	0	1	1	4	1	1	4
2	Memberi nasehat dan arahan kepada Direksi sesuai tugas Dewan Komisaris												
	a. Jumlah rapat	Bulanan	Kali	4	12	16	5	12	12	4	12	13	4
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	4	100	95,96	4	100	100	4	100	83,33	3,33
	c. Penyelesaian risalah rapat	Bulanan	Risalah	4	12	15	5	12	12	4	12	13	4
3	Rapat Dewan Komisaris												
	a. Jumlah rapat	Bulanan	Kali	9	12	18	14	12	12	9	12	12	9
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	5	100	95,96	5	100	100	5	100	83,33	4,17
	c. Penyelesaian risalah rapat	Bulanan	Risalah	5	12	12	5	12	12	5	12	12	5
4	Rapat Komite Komisaris dengan Unit terkait	Setahun	Risalah	6	12	12	6	12	12	6	12	12	6
5	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	4	2	4	8	2	2	4	2	-	-
6	Realisasi rencana kerja Komite Dewan Komisaris	Setahun	%	3	100	90	3	100	100	3	100	100	3

No.	Aspek Dan parameter	Periode	Satuan Output	Bobot (%)	2016			2017			2018		
					Target	Realisasi	Bobot	Target	Realisasi	Bobot	Target	Realisasi	Bobot
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
	Sub Total			60			67			60			54,5
III	Aspek Pelaporan												
1	Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris	Triwulan	Laporan	5	2	2	5	3	3	5	3	3	5
	Laporan pengawasan Dewan Komisaris	Tahunan	Laporan	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10
	Sub Total			15			15			15			15
IV	Aspek Dinamis												
1	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3
2	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop dll.	Setahun	Kali	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
3	Hasil assessment GCG Dewan Komisaris (self assessment/Konsultan Independen)	Tahunan	Skor	3	85	85,77	3	25	25	3	25	32	3
4	Pembagian tugas Dewan Komisaris	Setahun	Kali	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3
5	Tanggapan terhadap Tindak Lanjut Temuan Auditor/SPI/Assessor GCG	Setahun	Surat	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3
	Sub Total						**111,7**			**90,69**			**94,5**

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2018 dilakukan secara kolegial yang merupakan bagian dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas telah direncanakan setiap awal tahun dalam suatu Program Kerja yang tercantum dalam RKAP. Pada akhir tahun, Dewan Komisaris menyusun Laporan Tugas Pengawasan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS untuk dievaluasi dan disahkan.

Asesmen atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan SK Dwan Komisaris Nomor: KEP-04/DK/BF/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 Tentang Perubahan Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat

SKOR PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Menyusun dan mengusulkan KPI Dewan Komisaris kepada RUPS setiap awal tahun

Mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris

KPI dituangkan di dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara mandiri dan dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Penilaian KPI Dewan Komisaris oleh RUPS pada awal tahun berikutnya

Adapun tabel di bawah ini merupakan KPI Dewan Komisaris Tahun 2016 - 2018

Indikator	Bobot	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Aspek Perencanaan	10	10	10	10
Aspek Pengawasan & Nasehat	60	64.4	55,42	54,5
Aspek Pelaporan	15	15	11,67	15
Aspek Dinamis	15	22,3	13,60	15
Total	**100**	**111,7**	**90,69**	94,5

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS BERDASARKAN GCG *ASSESSMENT*

Selain penilaian Dewan Komisaris berdasarkan KPI, Dewan Komisaris senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan pencapaian kinerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui GCG *assessment*. Penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui *assessment* yang telah dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

PROSEDUR PELAKSANAAN *ASSESSMENT* KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat yang telah melakukan asesmen GCG secara berkala selama 6 (enam) periode. Pada tahun 2018, Asesmen GCG dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, sedangkan di tahun 2017 telah dilakukan

self assessment untuk menilai implementasi GCG tahun 2016 oleh Tim Penilai Internal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Dewan Komisaris;
2. Pembagian tugas dan penetapan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
3. Pemberian persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi;
4. Pemberian arahan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
6. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan;
7. Peran dalam pencalonan anggota Direksi, penilaian kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi;
8. Pelaksanaan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris;
9. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
10. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadirannya dalam rapat tersebut;
11. Terdapatnya Sekretaris Dewan Komisaris yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan Komisaris;
12. Terdapatnya Komite Dewan Komisaris yang efektif.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2018, Bio Farma telah melakukan GCG assessment yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat.

SKOR PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pada 2018, hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris hasil self assessment GCG mencapai skor 91,60% dengan predikat kategori “Sangat Baik”.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Direksi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kinerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, telah dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi tahun 2018 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui kontrak manajemen. Selain itu, penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui *assessment* GCG.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)

Penilaian kinerja Direksi melalui *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2018 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham melalui Kontrak Manajemen.

PROSEDUR PELAKSANAAN *ASSESSMENT* KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS secara kolegial berdasarkan kinerja perusahaan yang dituangkan dalam persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan oleh RUPS. Pada setiap awal tahun, Direksi wajib menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) yang merupakan penjabaran dari RKAP yang disahkan RUPS dan dituangkan dalam kontrak manajemen. Penyusunan KPI mengacu pada Surat Menteri BUMN Nomor: S-676/MBU/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Penerapan KPI yang bertujuan sebagai alat penilaian bagi pemegang saham atas kinerja Direksi sampai dengan akhir tahun. Hasil kinerja Direksi secara kolegial dilaporkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS di dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Indikator kinerja atau yang disebut sebagai *Key Performance Indicators* (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja Direksi Perseroan, terdiri dari 4 (empat) *perspectives*, yaitu:

PENILAIAN KPI DIREKSI TAHUN 2016

KPI		Bobot	Satuan	2016		
				Rencana	Realisasi Nilai	Skor
Keuangan dan Pasar	Pertumbuhan Pendapatan Usaha	8	persentase	22,03	-	-
	Pertumbuhan Aset	5	persentase	21,61	4,48	1,04
	EBITDA Margin	9	persentase	43,38	36,01	7,47
Sub Jumlah		22				8,51
Efektivitas Produk dan Proses	PQ WHO	10	Item Produk	17	17	10
	Proper KLH	8	kategori	Hijau	Emas	13,33
Sub Jumlah		18				23,33
Fokus Pelanggan	Kepuasan Pelanggan	7	Skor	80	79,64	6,97
Sub Jumlah		7				6,97
Fokus Tenaga Kerja	Hari Training Karyawan	5	hari/karyawan	7	4,43	3,16
	Produktifitas Tenaga Kerja/ Empro	5	Rp/karyawan	2.402.432.847,40	1.997.081.801,28	4,16
Sub Jumlah		10				7,32
Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan	a. Tingkat Kesehatan	8	Skor	90,5	81,6	7,21
	b. Skor GCG & KPKU					
	* Skor GCG	9	skor	86,5	87	9,05
	*Skor KPKU	9	skor	430	510,25	10,68
	c. Capex	7	persentase	75	52,52	4,9
	d. Entry Data Portal BUMN	5	Item	5	5	5
	e. Sinergi BUMN	5	Rp	134.520.000.000,00	124.928.514.369,00	4,64
Sub Jumlah		43				41,49
Jumlah		**100**				**87,62**

PENILAIAN KPI DIREKSI TAHUN 2017

Penilaian KPI Direksi						
Perspektif		Bobot (%)	Satuan Target 2017	2017		
				Realisasi Tahun 2017		
				Nilai	Skor	
Keuangan dan Pasar	Pendapatan Usaha	10	Rp000	2.940.215.456	3.011.570.730	10,24
	EBITDA: *Interest*	10	Rp000	317,75	109,19	3,44
	Working Capital Days	5	hari	201,18	167,80	5,99
Sub Jumlah		**25**				**19,67**
Efektivitas Produk dan Proses	PQ WHO	7	Jumlah Produk	11	11	7,00
	Proper KLH	8	Katergori	Hijau	Emas	10,00
Sub Jumlah		**15**				**17,00**
Fokus Pelanggan dan Pasar	*Increasing of exported product*	5	Rp000	1.749.494.136	1.242.909.017	3,55
	Kepuasan Pelanggan	7	Skor	80	82,74	7,24
Sub Jumlah		**12**				**10,79**
Fokus Tenaga Kerja	Pengembangan Kompetensi	5	Persentase	100	100	5,00
	Produktifitas Tenaga Kerja/Empro	5	Rp/Karyawan	2.411.989.709	2.539.267.058	5,26
Sub Jumlah		**10**				**10,26**
Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan	Tingkat Kesehatan	7	Skor	91,50	86,00	6,58
	Skor GCG & KPKU:					
	*Skor GCG	8	Skor	86,50	90,49	8,37
	*Skor KPKU	8	Skor	500	537	8,59
	c. Capex Fisik	10	Persentase	75	37,49	5,00
	d. Entry Data Portal BUMN	5	Item	5	5	5,00
Sub Jumlah		**38**				**33,54**
Jumlah		**100**				**91,27**

PENILAIAN KPI DIREKSI TAHUN 2018

Penilaian KPI Direksi						
Perspektif		Bobot (%)	Satuan Target 2018	2018		
				Realisasi Tahun 2018		
				Nilai	Skor	
Keuangan dan Pasar	Pendapatan Usaha	7	RpJuta	3.283.680	3.235.225	6,90
	EBITDA: *Interest*	7	Kali	81,74	33,34	2,86
	Working Capital Days	5	Hari	191,21	185,77	5,15
	Return On Equity	5	Persentase	14,81	14,18	4,79
Sub Jumlah		**24**				**19,69**
Efektivitas Produk dan Proses	PQ WHO	5	Jumlah Produk	11	11	5,00
	Proper KLH	5	Katergori	Hijau	Emas	5,00
	Realisasi Penyerahan CAPEX	5	Persentase	75,00	63,71	4,25
	Inventory Turn Over	5	Hari	71,13	132,82	2,68
Sub Jumlah		**20**				**16,92**
Fokus Pelanggan dan Pasar	*Increasing of exported product*	11	RpJuta	1.359.270	1.078.059	8,72
	Kepuasan Pelanggan	11	Skor	80	84,19	11,58
Sub Jumlah		**22**				**20,30**
Fokus Tenaga Kerja	Pengembangan Kompetensi	8	Persentase	100	111	8,91
	Produktifitas Tenaga Kerja/Empro	9	Rp/Karyawan	2.747.849.122	2.729.513.755	8,94
Sub Jumlah		**17**				**17,85**
Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan	Tingkat Kesehatan	5	Skor	90,50	90,35	4,99
	Skor GCG	4	Skor	90,49	90,49	4
	d. Entry Data Portal BUMN	4	Item	5	5	4,00
	Sinergi BUMN	4	BUMN	7	7	4,00
Sub Jumlah		**17**				**16,99**
Jumlah		**100**				**91,76**

PENCAPAIAN KPI DIREKSI TAHUN 2014 - 2018 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No.	Aspek dan Parameter	Periode	Satuan Output	Bobot	Target	Realisasi	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. Aspek Perencanaan							
1.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2018	Tahunan	Dokumen	10	1	1	10
Sub Total				**10**			**10**
II. Aspek Pengawasan dan Nasehat							
1.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: a.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan b.Laporan Tahunan c.Analisis kinerja triwulanan d.Evaluasi RJPP	 Tahunan Tahunan Triwulanan Setahun	 Surat Surat Surat Surat	 4 4 4 4	 1 1 3 1	 1 1 1 1	 4 4 1,33 4
2.	Memberi nasehat dan arahan kepada Direksi sesuai tugas Dewan Komisaris. a. Jumlah rapat b. Kehadiran Rapat c. Penyelesaian risalah rapat	 Bulanan Bulanan Bulanan	 Kali % Risalah	 4 4 4	 12 100 12	 8 97,62 8	 2,67 3,90 2,67
3.	Rapat Dewan Komisaris a. Jumlah Rapat b. Kehadiran Rapat c. Penyelesaian risalah rapat	 Bulanan Bulanan Bulanan	 Kali % Risalah	 9 5 5	 12 100 12	 9 87,04 9	 6,75 4,35 3,75
4.	Rapat Komite Dewan Komisaris dengan unit terkait	Setahun	Risalah	6	12	22	11
5.	Kunjungan kerja Dewan Komisaris	Setahun	Kunjungan	4	2	2	4
6.	Realisasi rencana kerja Komite Dewan Komisaris	Setahun	%	3	100	100	3
Sub Total				**60**			**55,42**
III. Aspek Pelaporan							
1.	Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris	Triwulanan	Laporan	5	3	1	1,67
2.	Laporan pengawasan Dewan Komisaris tahunan	Tahunan	Laporan	10	1	1	10
Sub Total				**15**			**11,67**
IV. Aspek Dinamis							
1.	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham	Tahunan	Surat	3	1	1	3
2.	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop dll.	Setahun	Kali	3	4	1	0,75
3.	Hasil assessment GCG Dewan Komisaris (self assessment/Konsultan Independen)	Tahunan	Skor	3	25	32,06	3,85
4.	Pembagian tugas Dewan Komisaris	Setahun	Kali	3	1	1	3
5.	Tanggapan terhadap Tindak Lanjut Temuan Auditor/SPI/Assessor GCG	Setahun	Surat	3	1	1	3
Sub Total				**15**			**13,60**
TOTAL				**100**			**90,69**

PIHAK YANG MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Pihak yang melakukan *assessment* terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah RUPS. Sedangkan, penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI Direksi sebagaimana uraian di atas. Kemudian, Dewan Komisaris dan Direksi akan mempertanggung jawabkan pencapaian kinerja mereka pada periode 2017, termasuk didalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tahun 2018.

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

Secara keseluruhan KPI tahun 2018 melebihi target yang ditentukan terutama untuk aspek keuangan & pasar, aspek efektivitas produk & proses, fokus pelanggan serta kepemimpinan, tata kelola & tanggung jawab sosial kemasyarakatan, meskipun pada sisi lain untuk fokus tenaga kerja tidak seluruhnya sesuai target yang ditentukan.

Uraian		Target Bobot (%)					Realisasi Tahun Skor					Kenaikan / Penurunan %				
No.	**Perspektif** Kpku	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
1	Keuangan dan Pasar (7.5)	24	40	22	25	24	22,03	80,56	8,51	19,67	19,7	(8,21)	101,40	(61,32)	(21,32)	(17,92)
2	Efektifitas Produk dan Proses (7.1)	20	20	18	15	20	17,27	23,33	23,33	17	16,92	(13,65)	16,65	29,61	13,33	(15,40)
3	Fokus Pelanggan (7.2)	22	10	7	12	22	23,59	10	6,97	10,79	20,3	7,23	0,00	(0,43)	(10,08	(7,73)
4	Fokus Tenaga Kerja (7.3)	17	10	10	10	17	16,18	11,64	7,32	10,26	17,85	(4,82)	16,40	(26,80)	2,60	5,00
5	Kepemimpinan, Tatakelola, dan Tanggung Jawab Sosial Kemasyarakatan (7.4)	17	20	43	38	17	19,06	20,31	41,49	33,54	16,99	12,12	1,55	(3,51)	(11,74)	(0,06)
Jumlah		100	100	100	100	100	98,13	145,84	87,62	91,27	91,76	(1,87)	45,84	(12,38)	(8,73)	(8,24)

KPKU BUMN merupakan sistem penilaian yang dibuat Kementerian BUMN sebagai panduan untuk membangun, menata dan memperdayakan kesisteman dan sumberdaya Perusahaan untuk mencapai Kinerja Unggul kinerja yang diadopsi dan diadaptasi dari *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*.

KPI BERDASARKAN PERSPEKTIF KPKU 2015 - 2018

KERANGKA KERJA KPKU

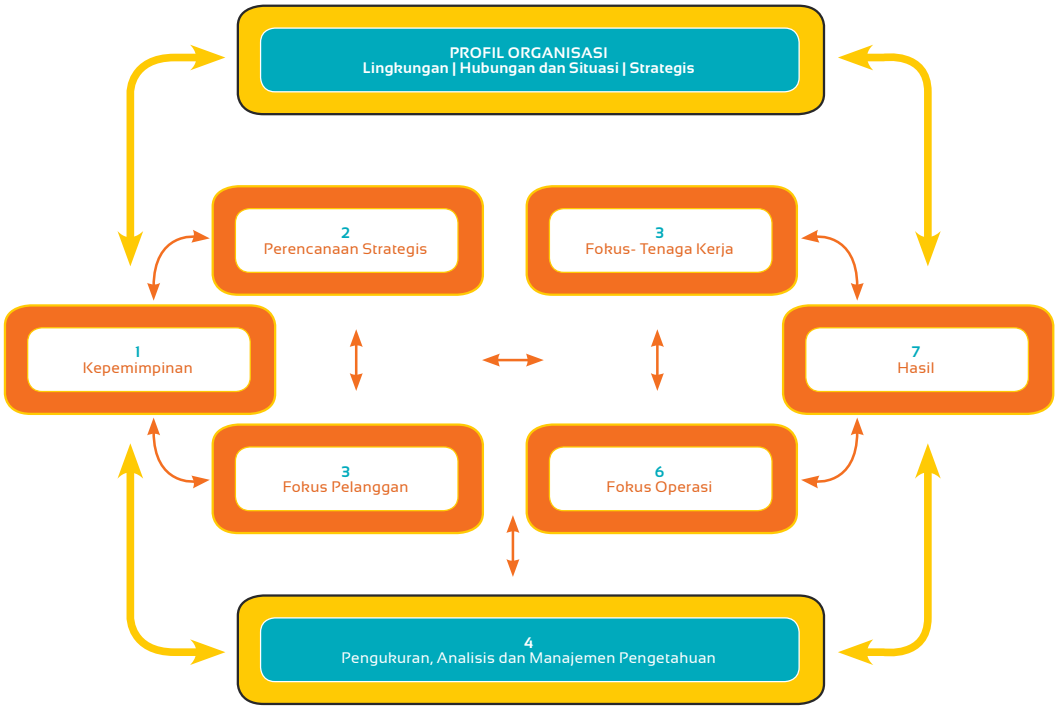

11 TATA NILAI INTI *(CORE VLUE)*

- **Kepemimpinan Yang Memiliki Visi *(Visionary Leadership)***
- **Keunggulan Yang Digerakkan Pelanggan *(Customer Driven Excellence)***
- **Pembelajaran Organisasi Dan Individu *(Organizational And Personal Learning)***
- **Pengharkatan Tenaga Kerja dan Mitra (Valuing *Workforce and Partners)***
- **Kecekatan *(Agility)***
- **Fokus Pada Masa Depan *(Focus On The Future)***
- **Pengelolaan Inovasi *(Innovation Management)***
- **Manajemen Berdasarkan Fakta *(Management By Fact)***
- **Tanggung Jawab Kemasyarakatan *(Societal Responsibility)***
- **Fokus Pada Hasil Dan Penciptaan Nilai *(Focus On Result And Creating Value)***
- **Perspektif Kesisteman *(Systems Perspective)***

BENEFIT KEUNGGULAN KINERJA

1. Perusahaan selalu memberikan/meningkatkan nilai kepada pelanggan dan para stakeholder.
2. Perusahaan senantiasa meningkatkan efektifitas dan kemapuan keseluruhan aspek Perusahaan
3. Perusahaan yang terus meningkat dan belajar
4. Tenaga kerjanya senantiasa belajar dan tumbuh

TUJUAN PENILAIAN KPKU

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Perusahaan
2. Memberikan umpan balik kepada Perusahaan
3. Memberikan apresiasi kepada Perusahaan yang berprestasi

PEDOMAN PELAKSANAAN ASESMEN KPKU BIO FARMA

1. Surat Sekretaris Kementerian BUMN RI Nomor S-08/S.MBU/2013 Tanggal 16 Januari 2013 mengenai Pedoman Penentuan Key Performance Indicators (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Surat Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementrian BUMN Tgl. 14 Oktober 2016 Nomor: S-445/D7.MBU/10/2016 Hal: Pelaksanaan Asesmen Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN Tahun 2016

PELAKSANAAN ASESMEN KPKU BIO FARMA

Pelaksanaan Asesmen KPKU ditujukan untuk penyelarasan dan konsistensi dalam penataan sistem pengelolaan kinerja di Bio Farma di mana Direksi menetapkan skor KPKU sebagai KPI Skor KPKU merupakan cerminan kualitas sistem pengelolaan kinerja yang diharapkan di Bio Farma. Dengan penggunaan KPKU dalam penentuan KPI, Bio Farma diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian kinerjanya, mampu mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi yang dihadapi, dan dapat mengakselerasi pertumbuhan kinerja Bio Farma.

Pada tahun 2018, tidak dilakukan penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) karena pada periode tersebut sedang dilakukan evaluasi pelaksanaan asesmen KPKU oleh Kementerian BUMN. Oleh karena itu, KPI berdasarkan perspektif KPKU masih menggunakan skor KPKU tahun 2017.

SKOR KPKU YANG DIPEROLEH BIO FARMA TAHUN 2016 - 2017

	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4
Skor KPKU	422,75	467	510,25	537,00

KPI Berdasarkan Perspektif KPKU	Maks. Skor	2015		2016		2017	
		Realisasi (%)	Skor	Realisasi (%)	Skor	Realisasi (%)	Skor
Kategori 1: Kepemimpinan							
1.1 Kepemimpinan Senior	70	55	38,5	60	42	65%	45,50
1.2 Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan	50	50	25	55	27,5	60%	30,00
Kategori 2: Perencanaan Strategis							
2.1 Pengembangan Strategi	40	50	20	60	24	65%	26,00
2.2 Implementasi Strategi	45	50	22,5	55	24,75	60%	27,00
Kategori 3: Fokus Pelanggan							

KPI Berdasarkan Perspektif KPKU	Maks. Skor	2015		2016		2017	
		Realisasi (%)	Skor	Realisasi (%)	Skor	Realisasi (%)	Skor
3.1 Suara Pelanggan	45	50	22,5	55	24,75	55%	24,75
3.2 Keterikatan Pelanggan	40	45	18	60	24	55%	22,00
Kategori 4: Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan							
4.1 Pengukuran, Analisis dan Perbaikan Kinerja	45	50	22,5	45	20,25	50%	22,50
4.2 Pengelolaan Informasi, Pengetahuan dan Teknologi Informasi	45	50	22,5	50	22,5	55%	24,75
Kategori 5: Fokus Tenaga Kerja							
5.1 Lingkungan Tenaga Kerja	40	50	20	55	22	60%	24,00
5.2 Keterikatan Tenaga Kerja	45	45	20,25	50	22,5	55%	24,75
Kategori 6: Fokus Operasi							
6.1 Proses Kerja	45	50	22,5	60	27	60%	27,00
6.2 Efektivitas Proses	40	50	20	55	22	55%	22,00
Kategori 7: Hasil-Hasil							
7.1 Hasil-Hasil Produk dan Proses	110	40	44	45	49,5	50%	55,00
7.2 Hasil-Hasil Fokus Pelanggan	85	45	38,25	45	38,25	50%	42,50
7.3 Hasil-Hasil Fokus Tenaga Kerja	85	40	34	45	38,25	45%	38,25
7.4 Hasil-Hasil Kepemimpinan dan Tata Kelola	80	45	36	45	36	45%	36,00
7.5 Hasil-Hasil Keuangan	90	45	40,5	50	45	50%	45,00
Total	**1.000**		**467**		**510,25**		**537,00**

KPI Berdasarkan Perspektif KPKU	Tahun		
	2015	2016	2017
Kategori 1: Kepemimpinan	63,50	69,50	75,50
Kategori 2: Perencanaan Strategis	42,50	48,75	53,00
Kategori 3: Fokus Pelanggan	40,50	48,75	46,75
Kategori 4: Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan	45	42,75	47,25
Kategori 5: Fokus Tenaga Kerja	40,25	44,5	48,75
Kategori 6: Fokus Operasi	42,50	49	49,00
Kategori 7: Hasil - hasil	192,75	207	216,75
Total	**467**	**510,25**	**537,00**

PENILAIAN KINERJA DIREKSI BERDASARKAN GCG *ASSESSMENT*

Direksi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan pencapaian kinerjanya. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan penilaian kinerja Direksi melalui GCG *assessment*. Penilaian kinerja Direksi melalui GCG *Assessment* yang telah dilakukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut.

PROSEDUR PELAKSANAAN *ASSESSMENT* KINERJA DIREKSI

Penilaian menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat yang telah melakukan asesmen GCG secara berkala selama 6 periode. Pada tahun 2017, Asesmen GCG dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, sedangkan di tahun 2016 telah dilakukan self *assessment* untuk menilai implementasi GCG tahun 2015 oleh Tim Penilai Internal yang dibentuk berdasarkan Keptusan Direksi.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Direksi;
2. Pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang jelas;
3. Penyusunan perencanaan perusahaan;
4. Pemenuhan target kinerja perusahaan;
5. Pelaksanaan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
6. Pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar;
7. Pelaksanaan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan;
8. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi;
9. Pelaksanaan keterbukaan informasi dan komunikasi, serta penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu;
10. Penyelenggaraan rapat Direksi dan kehadiran pada rapat Dewan Komisaris;
11. Penyelenggaraan pengawasan *intern* yang berkualitas dan efektif;
12. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif;
13. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pada tahun 2018, Bio Farma telah melakukan GCG assessment yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pada 2018, hasil penilaian kinerja Direksi hasil self assessment GCG mencapai skor 93,76% dengan predikat kategori “Sangat Baik”.

SELF ASSESSMENT IMPLEMENTASI GCG

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian yang menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat yang telah melakukan asesmen GCG secara berkala selama 6 periode. Pada tahun 2018, dilakukan self assessment untuk menilai penerapan GCG tahun 2017 dan di tahun 2017 dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat untuk menilai penerapan GCG tahun 2016. Adapun hasil assessment GCG periode penilaian tahun 2017 mencapai skor 90,53, termasuk ke dalam predikat kategori “Sangat Baik”.

HASIL *ASSESSMENT* PENERAPAN GCG PADA PT BIO FARMA (PERSERO) TAHUN 2017

Aspek Pengujian / Indikator/Parameter		Bobot	Capaian Tahun 2016		Penjelasan
			Skor	% Capaian	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7	6,81	97,28	Sangat Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS	9	7,76	86,19	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris	35	32,06	91,60	Sangat Baik
IV	Direksi	35	32,82	93,76	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	8,59	95,44	Sangat Baik
	Sub Total	95	88,03		
VI	Aspek Lainnya	5	2,50		
	Total	100	**90,53**		**SANGAT BAIK**

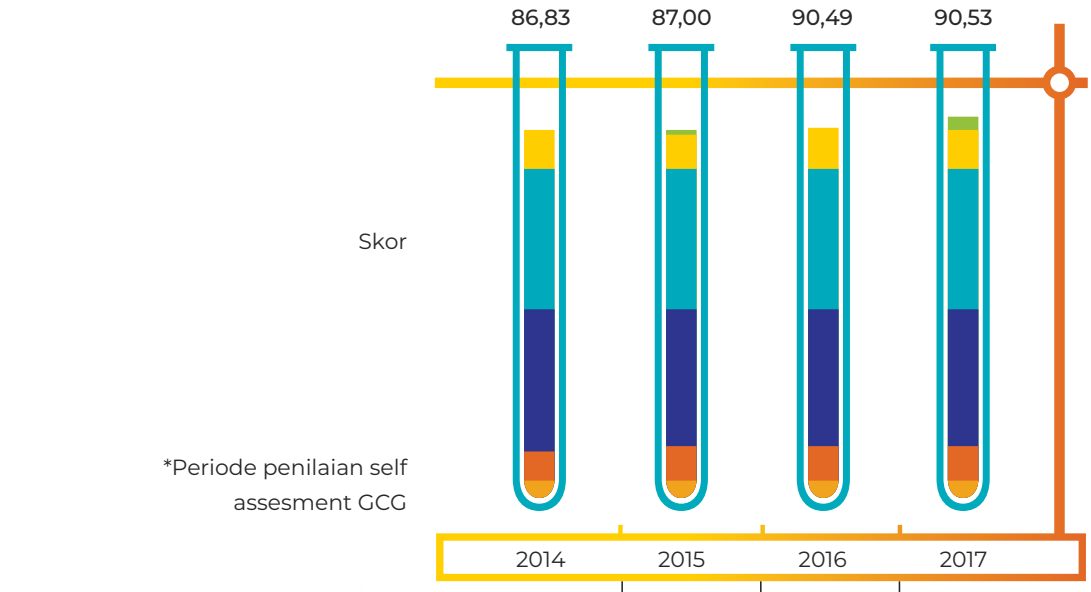

	2014	2015	2016	2017
Aspek Lainnya	1,25	0	2,5	2,5
Pengungkapan dan Transparansi	7,71	8,74	8,65	8,59
Direksi	31,61	32,04	32,24	32,82
Dewan Komisaris	32,04	31,37	32,55	32,06
Pemegang Saham dan RUPS	8,17	8,19	8,08	7,76
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan	6,06	6,64	6,47	6,81

EVALUASI INTERNAL PENERAPAN GCG (*SELF ASSESMENT*)

Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan oleh BUMN yang bersangkutan *(Self Assesment)* yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asisten) kepada penilai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Evaluasi terhadap implimentasi GCG yang dilakukan Bio Farma adalah evaluasi internal *(Self Assessment)*, antara lain dilakukan oleh *Tim Counterpart*. Pada tahun 2018 Bio Farma tidak melakukan asesmen GCG sehingga tidak disajikannya: SK Direksi untuk pelaksananya, tanggal pelaksanaannya dan perolehan skor hasil *Self Assessment* Penerapan GCG.

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Tingkat kesehatan Perusahaan diukur berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Kinerja Perusahaan dari tahun 2014 mencapai skor 95,50 dengan kriteria "Sehat AAA", tahun 2015 mencapai skor 88,50 dengan kriteria "Sehat AA", tahun 2016 mencapai skor 81,60 dengan kriteria "Sehat AA", dan tahun 2017 mencapai skor 86,00 dengan kriteria "Sehat AA", tahun 2017 mencapai skor 86,00 dengan kriteria"Sehat AA" dan tahun 2018 mencapai skor 90,35 dengan kriteria "Sehat AA". Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan 2018 *(Audited)*

Kinerja Perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018
Skor	95,5	88,5	81,6	86	90,35
	"Sehat AAA"	"Sehat AA "	"Sehat AA "	"Sehat AA "	"Sehat AA "

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN 2014- 2018 *(AUDITED)*

No.	Indikator	2014			2015		2016		2017		2018		
		Bobot (%)	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Bobot (%)	Nilai	Skor
I.	**ASPEK KEUANGAN**												
1	Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)	20	30,76%	20,00	17,14	20,00	12,47	16,00	12,97	16,00	20	14,18%	18,00
2	Imbalan Investasi (ROI)	15	31,20%	15,00	20,27	15,00	16,53	13,50	16,93	13,50	15	15,70%	13,50
3	Rasio Kas	5	286,08%	5,00	121,74	5,00	98,85	5,00	63,76	5,00	5	71,90%	5,00
4	Rasio Lancar	5	537,18%	5,00	437,04	5,00	408,14	5,00	338,90	5,00	5	320,93%	5,00
5	Collection Periods	5	45,94	5,00	79,00	4,50	45,49	5,00	37,95	5,00	5	28,66 hari	5,00
6	Perputaran Persediaan	5	58,32	5,00	71,97	4,50	111,68	4,00	86,40	4,50	5	132,82 Hari	3,50
7	Perputaran Total Asset	3,5	75,56%	5,00	48,46	2,50	48,62	2,50	60,05	3,00	5	63,58%	3,00
8	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	7,50	81,53	7,00	86,01	7,00	86,63	7,00	83,51	7,00	10	72,71%	7,50
	SUBTOTAL	**66,00**		**67,00**		**63,50**		**58,00**		**59,00**	**70,00**		**60,50**

No.	Indikator	2014			2015		2016		2017		2018		
		Bobot (%)	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Bobot (%)	Nilai	Skor
II.	**ASPEK OPERASIONAL**												
1	Efisiensi Produksi & Produktivitas	5	800,39	5	1291,92	2	113468	4,00	1529,32	-	-	-	-
2	Produktivitas Tenaga Kerja (EMPRO)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	Rp2.729.513.755	3,97
3	Pemeliharaan Kontinuitas Produksi	5	16,39	5	14,04	4	17,92	4,00	17,57	4	5	16,81%	5,00
4	Penugasan Pemerintah	2	87,2	3	89,9	2	83,35	1,60	94,36	2	3	100%	3,00
5	Penelitian & Pengembangan	3	100	2	100	3	100	3,00	100	3	3	96,08%	2,88
	SUBTOTAL	**15**		**15**		**11**		**12,60**		**12**	**15**		**14,85**
III.	**ASPEK ADMINISTRASI**												
1	Laporan Perhitungan Tahunan	3	100	3	100	3	100	3	100	3	3	100%	3
2	Rancangan RKAP	3	100	3	100	3	100	3	100	3	3	100%	3
3	Laporan Periodik	3	100	3	100	3	100	3	100	3	3	100%	3
4	Kinerja PKBL:												
	- Efektivitas Penyaluran Dana	3	90,07	3	86,44	2	32,86	0	97,08	3	3	94,80	3
	- Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman	3	75,72	3	76,3	3	59,95	2	75,77	3	3	75,26	3
	SUBTOTAL	**15**		**15**		**14**		**11**		**15**	**15**		**15**
	TOTAL SKOR	**100**		**95,5**		**88,5**		**81,6**		**86**	**100**		**90,35**
	KRITERIA		**SEHAT (AA)**		**SEHAT (AA)**		**SEHAT (AA)**		**SEHAT (AA)**			**SEHAT (AA)**	

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS

ACUAN DAN INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI

Remunerasi Dewan Komisaris tahun 2018 merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS Tahun Buku 2017 dengan basis formula yang telah disetujui oleh Pemegang Saham. Besaran remunerasi yang diusulkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham berdasarkan hasil kajian Komite Audit dengan memperhatikan realisasi pencapaian KPI Tahun Buku 2017. Usulan Remunerasi menggunakan beberapa pertimbangan antara lain perbandingan dengan besaran remunerasi tahun sebelumnya, kenaikan kompleksitas operasional Perusahaan, serta perbandingan besaran remunerasi dengan perusahaan yang sejenis, pencapaian KPI serta tingkat kesehatan Perusahaan.

DASAR PENETAPAN REMUNERASI

Remunerasi bagi Dewan Komisaris mengacu kepada :

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014, Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014, Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 Tanggal 4 Juni 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratutan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
2. Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-08/DK/BF/07/2016 Tanggal 27 Juli 2016 Tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2016, Telah dirubah dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2017.
3. Surat Keputusan Direksi No 01378/DIR/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018, Surat Keputusan Direksi No 02376/DIR/VI/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji/Honorarium Dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Direksi Dan Dewan Komisaris Secara Teknis.
4. Berita Acara RUPS Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 (Audited) PT Bio Farma (Persero) Nomor: 16.- tanggal 25 April 2018.
5. Formulasi penetapan remunerasi mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-122/MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2017 dan Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: S-24/D1.MBU/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor: S-542/MBU/D1/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 Tentang Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2018.

PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Perseroan mengusulkan sampai dengan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

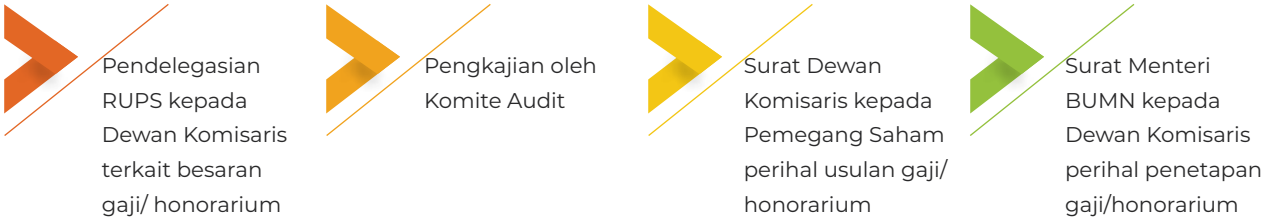

PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

1. Pendelegasian RUPS kepada Dewan Komisaris terkait besaran gaji/honorium
2. Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
3. Komite Audit melakukan koordinasi dengan *Human Capital Division* dan unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi Dewan Komisaris.
    a. Komite Audit menyusun rekomendasi Remunerasi Dewan Komisaris dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.
    b. Dewan Komisaris membahas usulan Komite Audit tentang usulan Remunerasi Dewan Komisaris.
    c. Dewan Komisaris menyampaikan usulan Remunerasi Dewan Komisaris dalam RUPS dan RUPS memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris Bio Farma. RUPS menetapkan penghasilan Dewan Komisaris berdasarkan PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014, diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017, dan pembaharuan terakhir Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 Tanggal 4 Juni 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratutan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
    d. Dewan Komisaris menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris.

Gaji/honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 termasuk didalamnya tantiem atas kinerja Perusahaan tahun buku 2017 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku RUPS Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero) sebagaimana dalam Risalah RUPS Nomor: RIS-01/RUPS/BF/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2017 dan telah diperbaharui dengan Berita Acara RUPS Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 (Audited) PT Bio Farma (Persero) Nomor: 16. Tanggal 25 April 2018 tentang Gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 termasuk di dalamnya tantiem atas kinerja perusahaan Tahun Buku 2017 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero).

Berdasarkan persetujuan dan keputusan RUPS Laporan Tahunan PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2017 tersebut, penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2017, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018 akan ditetapkan secara tersendiri.

INDIKATOR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variable, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor lain yang relevan.

Pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris atas pencapaian kinerja Perusahaan tahun 2017.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris Bio Farma sesuai ketentuan remunerasi Dewan Komisaris meliputi gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja. Remunerasi yang diberikan kepada Komisaris sesuai dengan Peraturam Menteri BUMN.

REMUNERASI YANG DIBERIKAN KEPADA DEWAN KOMISARIS SESUAI DENGAN KETENTUAN RUPS SEBAGAI BERIKUT:

1. Honorarium
   a. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan dengan faktor jabatan 45% dari gaji Direktur Utama.
   b. Honorarium Anggota Komisaris ditetapkan dengan faktor jabatan 90% dari Honorarium Komisaris utama.
2. Tunjangan
   a. Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali honorarium per bulan.
   b. Tunjangan transportasi sebesar 20% x honorarium.
   c. Asuransi Purna Jabatan: premi sebesar 25% dari honorarium dalam satu tahun.
3. Fasilitas
   a. Kesehatan : Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, dengan rincian sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014, diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, diperbahrui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017, dan perbaharuan terakhir Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 Tanggal 4 Juni 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratutan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
   b. Bantuan Hukum: fasilitas bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.
4. Tantiem/Insentif Kinerja. Tantiem/Insentif Kinerja didasarkan atas kinerja tahun buku 2017.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

(Dalam Rupiah)

Nama	Jabatan	Mulai Menjabat	Akhir Jabatan	Gaji Per Tahun	Tunjangan Per Tahun	Gaji Bersih Per Tahun	Tantiem	THR	Tantiem & THR	Jumlah
				1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	6 = 3 + 6
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	23 Januari 2014	20-Apr-18	151.500.000	30.300.000	181.800.000	906.255.754	45.000.000	951.255.754	1.133.055.754
Nizar Yamanie	Komisaris	28 Mei 2012	20-Apr-18	-	-	-	328.486.675	-	328.486.675	328.486.675
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01 Mei 2013	11-Apr-18	162.000.000	32.400.000	194.400.000	815.630.180	40.500.000	856.130.180	1.050.530.180
Total				**313.500.000**	**62.700.000**	**376.200.000**	**2.050.372.609**	**85.500.000**	**2.135.872.609**	**2.512.072.609**
Farid Wadjdi Husain	Komisaris Utama	20-Apr-18	20-Apr-23	436.500.000,00	87.300.000,00	523.800.000,00	-	45.000.000,00	45.000.000,00	568.800.000,00
H.M. Subuh	Komisaris	22 Juni 2015	22 Juni 2020	514.350.000,00	102.870.000,00	617.220.000,00	815.630.180,00	40.500.000,00	856.130.180,00	1.473.350.180,00
Heridadi	Komisaris	23 Januari 2014	8 Januari 2019	514.350.000,00	102.870.000,00	617.220.000,00	815.630.180,00	40.500.000,00	856.130.180,00	1.473.350.180,00
Made Arya Wijaya	Komisaris	20-Apr-18	20-Apr-23	392.850.000,00	78.570.000,00	471.420.000,00	-	40.500.000,00	40.500.000,00	511.920.000,00
Saud Usman Nasution	Komisaris	20-Apr-18	20-Apr-23	392.850.000,00	78.570.000,00	471.420.000,00	-	40.500.000,00	40.500.000,00	511.920.000,00
Yuni Suryanto	Komisaris	20-Apr-18	20-Apr-23	392.850.000,00	78.570.000,00	471.420.000,00	-	40.500.000,00	40.500.000,00	511.920.000,00
Total				**2.957.250.000**	**591.450.000**	**3.548.700.000**	**3.681.632.969**	**333.000.000**	**4.014.632.969**	**7.563.332.969**

PENGUNGKAPAN TUNJANGAN DAN FASILITAS YANG DITERIMA DEWAN KOMISARIS

Selain memperoleh gaji, Dewan Komisaris juga memperoleh Tunjangan Hari Raya Kegamaan (THR), honorarium, asuransi purna jabatan, tunjangan transportasi serta fasilitas kesehatan dan bantuan hukum dengan rincian sebagai berikut:

HONORARIUM, TUNJANGAN DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS

Honorarium	Tunjangan	Fasilitas
Komisaris Utama Rp594.000.000 Komisaris Rp534.600.000	**Tunjangan Hari Raya** Keagamaan: 1 (satu) kali Gaji/ **Honorarium.** **Asuransi Purna Jabatan**: Premi 25% gaji/ honorariumper tahun **Tunjangan Transport** sebesar Rp 6.525.000.	**Fasilitas kesehatan:** Asuransi/Penggantian pengobatan sebesar at cost **Fasilitas bantuan hukum** **Sesuai yang diatur :** PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014, diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, diperbahrui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017, dan perbaharuan terakhir Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 Tanggal 4 Juni 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratutan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN

URAIAN KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DIREKSI

ACUAN DAN INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI

Remunerasi Direksi tahun 2018 merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS Tahun Buku 2017 dengan basis formula yang telah disetujui oleh Pemegang Saham. Besaran remunerasi yang diusulkan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham berdasarkan hasil kajian Komite Audit dengan memperhatikan realisasi pencapaian KPI Tahun Buku 2017. Usulan Remunerasi menggunakan beberapa pertimbangan antara lain perbandingan dengan besaran remunerasi tahun sebelumnya, kenaikan kompleksitas operasional Perusahaan, serta perbandingan besaran remunerasi dengan perusahaan yang sejenis, pencapaian KPI serta tingkat kesehatan Perusahaan.

DASAR PENETAPAN REMUNERASI

Penetapan remunerasi Direksi mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014, Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014, Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 Tanggal 4 Juni 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratutan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
2. Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-08/DK/BF/07/2016 Tanggal 27 Juli 2016 Tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2016, Telah dirubah dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/07/2017 Tanggal 10 Juli 2017 Tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2017.
3. Surat Keputusan Direksi No 01378/DIR/III/2018 Tanggal 29 Maret 2018, Surat Keputusan Direksi No 02376/DIR/VI/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji/ Honorarium Dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Direksi Dan Dewan Komisaris Secara Teknis.
4. Berita Acara RUPS Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 (Audited) PT Bio Farma (Persero) Nomor: 16.- tanggal 25 April 2018.
5. Formulasi penetapan remunerasi mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-122/MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan

Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2017 dan Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: S-24/D1.MBU/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor: S-542/MBU/D1/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 Tentang Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2018.

PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Perseroan menetapkan remunerasi bagi Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

1. Dewan Komisaris penugaskan Komite Audit untuk melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Direksi.
2. Komite Audit melakukan koordinasi dengan Human Capital Division dan unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi Direksi.
3. Komite Audit menyusun rekomendasi Remunerasi Direksi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris membahas usulan Komite Audit tentang usulan Remunerasi Direksi.
5. Dewan Komisaris menyampaikan usulan Remunerasi Direksi dalam RUPS dan RUPS memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan Remunerasi Direksi Bio Farma. RUPS menetapkan penghasilan Direksi berdasarkan PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014, diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, diperbahrui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017, dan perbaharuan terakhir Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 Tanggal 4 Juni 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratutan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
6. Dewan Komisaris menetapkan Remunerasi Direksi.

Gaji/honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 termasuk didalamnya tantiem atas kinerja Perusahaan tahun buku 2017 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku RUPS Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero) sebagaimana dalam Risalah RUPS Nomor: RIS-01/RUPS/BF/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2017 dan telah diperbaharui dengan Berita Acara RUPS Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 (Audited) PT Bio Farma (Persero) Nomor: 16. Tanggal 25 April 2018 tentang Gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 termasuk di dalamnya tantiem atas kinerja perusahaan Tahun Buku 2017 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero)

Berdasarkan persetujuan dan keputusan RUPS Laporan Tahunan PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2017 tersebut, penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2017, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018 akan ditetapkan secara tersendiri.

INDIKATOR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variable, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor lain yang relevan.

Pemberian remunerasi kepada Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi atas pencapaian kinerja perusahaan tahun 2017.

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014, diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, diperbahrui dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017, dan perbaharuan terakhir Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 Tanggal 4 Juni 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peratutan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014, rincian remunerasi yang diterima oleh Direksi Bio Farma pada tahun 2018 terdiri atas honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya seperti asuransi dan santunan purna jabatan sebagai berikut:

REMUNERASI DIREKSI TAHUN 2018

(Dalam Rupiah)

Nama	Jabatan	Mulai Menjabat	Akhir Jabatan	Gaji per Tahun	Tunjangan per Tahun	Potongan Dinas	Gaji Bersih per Tahun	Tantiem + THR	Jumlah
				1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6 = 4 + 5
M. Rahman Roestan	Direktur Pemasaran	10 Juli 2017	22 Januari 2018	Rp1.320.000.000	Rp300.000.000	Rp-	Rp1.620.000.000	Rp2.046.846.395	Rp3.666.846.395
	Direktur Utama	23 Januari 2018	10 Juli 2022						
Juliman	Direktur Produksi 20-Apr-18 20-Apr-23	12-Apr-13	12-Apr-18	Rp1.122.000.000	Rp300.000.000	Rp-	Rp1.422.000.000	Rp1.836.661.755	Rp3.258.661.755
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	23 Januari 2018	23 Januari 2023	Rp810.333.333	Rp216.666.667	Rp-	Rp1.027.000.000	Rp1.304.028.997	Rp2.331.028.997
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	14 Juli 2017	14 Juli 2022	Rp1.122.000.000	Rp300.000.000	Rp-	Rp1.422.000.000	Rp1.836.661.755	Rp3.258.661.755
Pramusti Indrascaryo *	Direktur Keuangan	12-Apr-13	12-Apr-18	Rp339.716.667	Rp90.833.333	Rp-	Rp430.550.000	Rp532.632.759	Rp963.182.759
Pardiman	Direktur Keuangan	20-Apr-18	20-Apr-23	Rp810.333.333	Rp216.666.667	Rp-	Rp1.027.000.000	Rp1.304.028.997	Rp2.331.028.997
Sugeng Raharso *	Direktur Perencanaan & Pengembangan	12-Apr-13	12-Apr-18	Rp339.716.667	Rp90.833.333	Rp-	Rp430.550.000	Rp532.632.759	Rp963.182.759
Adriansjah Azhari	Direktur Perencanaan & Pengembangan	20-Apr-18	20-Apr-23	Rp810.333.333	Rp216.666.667	Rp-	Rp1.027.000.000	Rp1.304.028.997	Rp2.331.028.997
Total				**Rp6.674.433.333**	**Rp1.731.666.667**	**Rp-**	**Rp8.406.100.000**	**Rp10.697.522.414**	**Rp19.103.622.414**

* Masa Jabatan sampai dengan 12 April 2018

PENGUNGKAPAN TUNJANGAN DAN FASILITAS YANG DITERIMA DIREKSI

Selain memperoleh gaji, Direksi juga memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan purna jabatan, tunjangan perumahan, serta fasilitas kendaraan, kesehatan dan bantuan hukum dengan rincian sebagai berikut:

GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS DIREKSI

Gaji per Tahun	Tunjangan	Fasilitas
Direktur Utama Rp 1.320.000.000 Direksi Rp 1.220.000.000	Tunjangan Hari Raya: 1 (satu) kali Gaji Tunjangan Purna Jabatan: Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun Tunjangan Perumahan : Rp 25.000.000 per bulan	Fasilitas kendaraan : 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi perusahaan. Fasilitas kesehatan: dalam bentuk asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan *(at cost)* Fasilitas bantuan hukum: sebesar pemakaian *(at cost)*

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris telah diagendakan sebelum tahun berjalan seperti tercantum dalam program kerja Dewan Komisaris tahun 2018.

PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Anggaran Dasar Perusahaan
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) pada BUMN
3. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) pada BUMN
4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero) dan diperbaharui dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-07/DK/BF/II/2018, Nomor: PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero) dan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: 07/DK/BF/03/2016 Tentang Tata Tertib Rapat Internal Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero)

RAPAT DEWAN KOMISARIS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM *BOARD MANUAL* DEWAN KOMISARIS

DASAR, WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.
2. Di samping waktu tersebut, rapat Dewan Komisaris dapat pula diselenggarakan setiap waktu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dan/atau perlu mendapat keputusan, apabila:
   a. atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris,
   b. atas permintaan Direksi,
   c. atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
3. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan di tempat Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

PESERTA RAPAT DEWAN KOMISARIS

Peserta Rapat Dewan Komisaris terdiri atas semua anggota Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris menganggap perlu, pihak lainnya dapat dihadirkan dalam rapat Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris yang mengusulkan untuk diselenggarakan rapat Dewan Komisaris, menentukan acara dan menyiapkan bahan/berkas yang diperlukan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.
2. Agenda untuk rapat Dewan Komisaris dapat disampaikan secara lisan atau secara tertulis berupa memo, surat dan lain sebagainya, disertai dengan bahan/berkas yang diperlukan dalam rapat Dewan Komisaris.

UNDANGAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Undangan rapat dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris lain yang mewakili Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika diperlukan untuk segera diselenggarakan rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
2. Dalam undangan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat Dewan Komisaris.
3. Undangan rapat Dewan Komisaris tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

KUORUM RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah.
2. Dalam rapat Dewan Komisaris, diupayakan selalu dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, hanya oleh anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, berdasarkan kuasa tertulis yang khusus untuk keperluan rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

PIMPINAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat antara Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
2. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk secara tertulis oleh Komisaris Utama.
3. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir dan Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang memimpin rapat Dewan Komisaris.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.

RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Untuk setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan Risalah Rapat.
2. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan:
   a. alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, apabila ada Dewan Komisaris yang tidak hadir;
   b. hasil evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan keputusan hasil Rapat Dewan Komisaris sebelumnya;
   c. dinamika rapat sebagai proses pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris termasuk pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) jika ada;
   d. pertimbangan dan/atau analisis dalam pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris;
   e. hal-hal yang diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
3. Risalah rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh pimpinan rapat, seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat dan notulis.
4. Risalah rapat Dewan Komisaris diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.
5. Risalah asli dari setiap rapat Dewan Komisaris disimpan dan dipelihara oleh Direksi. Direksi dapat menugaskan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris disimpan dan dipelihara oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

PENCATAT/NOTULIS RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pencatat/notulis Dewan Komisaris adalah Sekretaris Komisaris.
2. Dalam hal Sekretaris Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka yang bertindak sebagai notulis rapat Dewan Komisaris adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir atau personel lain yang ditunjuk oleh pimpinan rapat.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Daftar kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

PERIODE 1 JANUARI–20 APRIL 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris		
			Jumlah Rapat / Tahun	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Ahmad Ramli	Komisaris Utama	12/04/2013 s/d 20 April 2018	3	3	100%
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01 Mei 2013 s/d 20 April 2018	3	3	100%
Heridadi	Komisaris	23 Januari 2014 s/d 08 Januari 2019	13	13	100%
Mohamad Subuh	Komisaris	22 Juni 2015 s/d Sekarang	3	3	100%
Farid Wadjdi Husain	Komisaris Utama	12/04/2018 s/d Sekarang	10	10	100%
Made Arya Wijaya	Komisaris	12/04/2018 s/d Sekarang	10	7	70%
Saud Usman Nasution	Komisaris	12/04/2018 s/d Sekarang	10	7	70%
Yuni Suryanto	Komisaris	12/04/2018 s/d Sekarang	10	9	90%
Heridadi	Komisaris	23 Januari 2014 s/d 08 Januari 2019	13	13	100%
Mohamad Subuh	Komisaris	22 Juni 2015 s/d Sekarang	10	6	60%

TANGGAL, AGENDA RAPAT, KEPUTUSAN, TEMPAT DAN NAMA PESERTA RAPAT

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2018, tanggal, agenda rapat, keputusan, tempat dan nama peserta rapat internal Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Nama Peserta	Tempat	Keterangan
1.	29 Januari 2018	· Membahas Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2017 (Unaudited) · Membahas Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2017-2021 · Membahas Permohonan Persetujuan dari Direksi terkait Kredit Investasi Jangka Panjang	Ahmad Ramli Ihsan Setiadi Latief Heridadi M/ Subuh	Jakarta	-
2.	27 Februari 2018	· Membahas Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2017 (Audited) · Membahas pelaksanaan Assessment terhadap pejabat satu tingkat di bawah Direksi	Ahmad Ramli Ihsan Setiadi Latief Heridadi M. Subuh	Jakarta	-
3.	16 Maret 2018	· Membahas Hasil Asesmen terhadap Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi · Membahas Persiapan Wawancara Bakal Calon Direksi PT Bio Farma (Persero)	Ahmad Ramli Ihsan Setiadi Latief Heridadi M.Subuh	Jakarta	-
4.	24 April 2018	· Membahas persiapan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 · Membahas Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2017 (Audited)	Farid Wadjdi Husain Saud Usman Nasution Yuni Suryanto Heridadi M. Subuh	Jakarta	-
5.	31 Mei 2018	· Membahas Kinerja Perusahaan s.d April 2018 · Membahas Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2017-2022	Farid Wadjdi Husain Made Arya Wijaya Saud Usman Nasution Heridadi M. Subuh	PT Bio Farma	-
6.	29 Juni 2018	· Membahas Pengembangan Produk-Produk Baru · Membahas Hal-Hal Strategis Perusahaan	Farid Wadjdi Husain Saud Usman Nasution Yuni Suryanto Heridadi	Jakarta	-
7.	26 Juli 2018	· Membahas Laporan Manajemen Perusahaan Semester I Tahun 2018 · Membahas Rancangan RJPP Tahun 2018-2022	Farid Wadjdi Husain Made Arya Wijaya Saud Usman Nasution Yuni Suryanto Heridadi M. Subuh	Jakarta	-
8.	30 Agustus 2018	· Membahas Kinerja Perusahaan s.d Juli 2018 · Membahas realisasi investasi · Membahas permohonan Direksi atas penghapusbukuan dan atau pemindahtanganan aset tetap	Farid Wadjdi Husain Made Arya Wijaya Saud Usman Nasution Yuni Suryanto Heridadi M. Subuh	Jakarta	-
9.	28 September 2018	· Membahas Kinerja Perusahaan s.d Agustus 2018	Farid Wadjdi Husain Saud Usman Nasution Yuni Suryanto Heridadi	Jakarta	-
10.	19 Oktober 2018	· Membahas rancangan RKAP tahun 2019	Farid Wadjdi Husain Made Arya Wijaya Yuni Suryanto Heridadi	Jakarta	-
11.	29 Oktober 2018	· Membahas Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan III tahun 2018	Farid Wadjdi Husain Made Arya Wijaya Yuni Suryanto Heridadi M. Subuh	Jakarta	-

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Nama Peserta	Tempat	Keterangan
12.	30 November 2018	• Membahas kinerja perusahaan s.d Oktober 2018 • Membahas update rancangan RJPP tahun 2018-2022	Farid Wadjdi Husain Made Arya Wijaya Saud Usman Nasution Yuni Suryanto Heridadi	Jakarta	-
13.	28 Desember 2018	• Membahas kinerja Perusahaan s.d November 2018	Farid Wadjdi Husain Made Arya Wijaya Yuni Suryanto Heridadi M. Subuh	PT Bio Farma - Bandung	-

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi telah diagendakan sebelum tahun berjalan seperti tercantum dalam program kerja Dewan Komisaris tahun 2018.

PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI

1. Anggaran Dasar Perusahaan
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) pada BUMN
3. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) pada BUMN
4. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-07/DK/BF/12/2018 Nomor: PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual).*

RAPAT DIREKSI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM BOARD MANUAL DIREKSI

DASAR, WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Dewan Direksi diselenggarakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.
2. Di samping waktu tersebut, rapat Direksi dapat pula diselenggarakan setiap waktu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dan/atau perlu mendapatkan keputusan, apabila:
   a. atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Direksi,
   b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris,
   c. atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
3. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain wilayah RI yang ditetapkan oleh Direksi.

PESERTA RAPAT DIREKSI

1. Peserta Rapat Direksi terdiri atas semua anggota Direksi.
2. Apabila Direksi menganggap perlu, pihak lainnya dapat dihadirkan dalam rapat Direksi untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

AGENDA RAPAT DIREKSI

1. Direksi yang mengusulkan untuk diselenggarakan rapat Direksi, menentukan acara dan menyiapkan bahan/berkas yang perlu dibahas dalam rapat Direksi.

2. Agenda untuk rapat Direksi dapat disampaikan secara lisan atau secara tertulis berupa memo, surat dan lain sebaginya disertai dengan bahan/berkas yang diperlukan dalam rapat Direksi.
3. Direksi yang mengusulkan untuk diselenggarakan rapat Direksi, menentukan agenda yang perlu dibahas/diputuskan dalam rapat Direksi, yang untuk itu –apabila dianggap perlu oleh anggota Direksi yang bersangkutan– dapat menugaskan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) agar melaksanakan penyusunan acara dan menyiapkan bahan/berkas untuk rapat Direksi.
4. Acara yang belum selesai dibahas/diputuskan pada rapat Direksi sebelumnya, dapat diajukan ke dalam rapat Direksi berikutnya oleh anggota Direksi yang terkait/berkepentingan.
5. Setiap anggota Direksi dapat menambah acara rapat Direksi di luar acara yang telah disusun sebelumnya, untuk dibahas/diputuskan dalam rapat Direksi, dengan ketentuan bahan/berkasnya telah disiapkan oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hasil dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
6. Semua bahan/berkas yang perlu dibahas dalam rapat Direksi disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada para anggota Direksi sebelum rapat Direksi diselenggarakan.

UNDANGAN RAPAT DIREKSI

1. Undangan rapat dilakukan secara tertulis oleh Direktur Utama atau oleh anggota Direksi lain yang mewakili Direktur Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat jika diperlukan untuk segera diselenggarakan rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
2. Dalam undangan rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat Direksi.
3. Undangan rapat Direksi tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

KUORUM RAPAT DIREKSI

1. Rapat Direksi sah dan dapat mengambil keputusan yng mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari setengah anggota Direksi atau wakilnya yang sah.
2. Dalam rapat Direksi, diupayakan selalu dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
3. Seorang anggota Direksi dapat diwaliki dalam rapat Direksi, hanya oleh anggota Direksi lain dalam rapat Direksi yang bersangkutan, berdasarkan kuasa tertulis yang khusus untuk keperluan rapat Direksi yang bersangkutan.
4. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggotaa Direksi lainnya.

PIMPINAN RAPAT DIREKSI

1. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir, rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama.
3. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir dan Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi.
4. Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

RISALAH RAPAT DIREKSI

1. Untuk setiap rapat Direksi harus dibuatkan Risalah Rapat.
2. Risalah Rapat Direksi harus mencantumkan:
   a. alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada Direksi yang tidak hadir;
   b. hasil evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan keputusan hasil rapat Direksi sebelumnya;
   c. dinamika rapat sebagai proses pengambilan keputusan rapat Direksi termasuk pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) jika ada;
   d. pertimbangan dan/atau analisis dalam pengambilan keputusan rapat Direksi;
   e. hal-hal yang diputuskan dalam rapat Direksi.
3. Risalah rapat Direksi ditandatangani oleh pimpinan rapat, seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan notulis.

4. Risalah rapat Direksi diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Direksi tersebut.
5. Risalah asli dari setiap rapat Direksi disimpan dan dipelihara oleh Direksi. Direksi dapat menugaskan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

PENCATAT/NOTULIS RAPAT DIREKSI

1. Pencatat/notulis rapat Direksi adalah Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
2. Dalam hal Sekretaris Perusahaan tidak hadir atau berhalangan, maka yang bertindak sebagai notulis rapat Direksi adalah salah seorang anggota Direksi yang hadir atau personel lain yang ditunjuk oleh pimpinan rapat.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2018, Direksi telah melaksanakan rapat internal Direksi sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali. Daftar kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RAPAT DIREKSI TAHUN 2018

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Rapat Internal Direksi			Keterangan
			Jumlah Rapat / Tahun	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	
M. Rahman Rustan	Direktur Pemasaran	10 Juli 2017 s/d 23 Januari 2018	2	2	100,00	
	Direktur Utama	23 Januari 2018 s/d 10 Juli 2022	34	32	94,12	Dinas = 2
Juliman	Direktur Produksi	12/04/2013 s/d 12/04/2018	34	34	100,00	
		20/04/2018 s/d 20/04/2023				
	Plt. Direktur Utama	10 Juli 2017 s/d 23 Januari 2018	2	2	100,00	
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	23 Januari 2018 s/d 23 Januari 2023	34	31	91,18	Dinas = 2
Pramusti Indrascaryo *	Direktur Keuangan	12/04/2013 s/d 12/04/2018	12	12	100,00	
Pardiman **	Direktur Keuangan	20/04/2018 s/d 20/04/2023	23	22	95,65	Cuti = 1
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum	14 Juli 2017 s/d 14 Juli 2022	36	32	88,89	Dinas = 3 Cuti = 1
Sugeng Raharso *	Direktur Perencanaan & Pengembangan	12/04/2013 s/d 12/04/2018	12	11	91,67	Dinas = 1
Adriansjah Azhari **	Direktur Perencanaan & Pengembangan	20/04/2018 s/d 20/04/2023	23	22	95,65	Dinas = 1

* Masa jabatan s.d 11 April 2018
**Mulai menjabat: 20 April 2018

TANGGAL, AGENDA RAPAT, KEPUTUSAN, TEMPAT DAN NAMA PESERTA RAPAT DIREKSI

RAPAT INTERNAL DIREKSI

Sepanjang tahun 2018, rapat Direksi membahas tentang berbagai masalah yang dihadapi Perusahaan, kinerja dan strategi yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan dengan rincian tanggal, agenda rapat, keputusan, tempat dan nama peserta rapat rapat internal Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Hari, Tgl	Waktu	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Tempat	Keterangan
1	Rabu, 10 Januari 2018	Pkl. 13.30-14.00	1. Update Kesiapan Menghadapi KLB Difteri	Juliman	Bio Farma	Direnbang Dinas
			2. Lain-lain	Pramusti Indrascaryo		
				M. Rahman Roestan		
				Disril Revolin Putra		
2.	Rabu, 17 Januari 2018	Pkl. 13.00-14.30	1. Tender Vaksin Meningitis	Juliman	Bio Farma	
			2. Permintaan Donasi Vaksin bOPV dari Kemkes untuk Timorleste	Sugeng Raharso		
			3. Permohonan Bantuan Vaksin Difteri untuk P2P Kemkes	Pramusti Indrascaryo		
			4. Rencana Penandatanganan Kontrak Gedung No. 43 thp 2 dihubungkan dengan proses Penelitian oleh KPPU	Disril Revolin Putra		
			5. Lain-lain	M. Rahman Roestan		
3.	Kamis, 25 Januari 2018	Pkl. 10.00-12.00	1. Laporan Manajemen Perusahaan Tahun Buku 2017 (Unaudited)	M. Rahman Roestan	Bio Farma	Direktur Pemasaran Dinas
			2. Persediaan Vaksin Td	Sugeng Raharso		
			3. Lain-lain	Juliman		
				Pramusti Indrascaryo		
				Disril Revolin Putra		
4.	Kamis, 01 Februari 2018	Pkl. 08.00-12.00	1. Pembahasan Rapat Sebelumnnya	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Skema Pengelolaan Anak Perusahaan	Sugeng Raharso		
			3. Surat Keputusan Direksi tentang Jasa Produksi	Juliman		
			4. Lain-lain	Pramusti Indrascaryo		
				Disril Revolin Putra		
				M. Rahman Roestan		
5.	Kamis, 08 Februari 2018	Pkl. 10.00-12.00	1. Progres Kajian Hukum Issue Blood Product	M. Rahman Roestan	Bio Farma	

No	Hari, Tgl	Waktu	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Tempat	Keterangan
			2. Kebijakan Pelimpahan Wewenang/Pelaksana Tugas Direksi	Sugeng Raharso		
			3. Kebijakan Sistem Manajemen Pembelajaran	Juliman		
				Pramusti Indrascaryo		
				Disril Revolin Putra		
				Sri Harsi Teteki		
6.	Kamis, 15 Februari 2018	Pkl. 08.00-12.00	1. Rencana Kerja Sama dengan Jamdatun dan Lemhamnas	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Status Tenaga Kerja PKWT di Perusahaan	Sugeng Raharso		
			3. Implementasi Sistem Suksesi dan Informasi Pejabat dalam Kelayakan Suksesi	Juliman		
			4. Proyeksi Pencapaian Proyek Pembangunan Tahun 2018	Pramusti Indrascaryo		
			5. Lain-lain	Disril Revolin Putra		
				Sri Harsi Teteki		
7.	Senin, 26 Februari 2018	Pkl. 13.30-16.00	1. Pembahasan Rapat Sebelumnnya	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Laporan hasil Rapat di DJKN terkait Penyelesaian KDP (Konstruksi dalam Pengerjaan) Aset Flu Burung Kemkes	Sugeng Raharso		
			3. Transformasi SDM Bio Farma	Juliman		
			4. PSAK 24 tentang Akuntansi Imbalan Paska Kerja, tahun 2017	Pramusti Indrascaryo		
			5. Perhitungan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris	Disril Revolin Putra		
			6. Lain-lain	Sri Harsi Teteki		

No	Hari, Tgl	Waktu	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Tempat	Keterangan
8	Kamis, 8 Maret 2018	Pkl. 08.00-15.00 WIB	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Pemenuhan Produk Bio Farma sesuai RJPP dan Strategi Produksi Produk Pipeline R & D	Sugeng Raharso		
			3. Dampak Implementasi Regulasi Sistem Track & Trace terhadap HPP	Juliman		
			4. Rencana Pembuatan Gudang Aset dan Arsip	Pramusti Indrascaryo		
			5. Potensi Sinergi Bio Farma dan Kimia Farma	Disril Revolin Putra		
			6. Lain-lain	Sri Harsi Teteki		
9	Jum'at, 16 Maret 2018	Pkl. 16.00-18.00	1. Pembahasan Rapat Sebelumnnya	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Penawaran Lahan dan PTPN VIII	Sugeng Raharso		
			3. Revitalisasi PBF dan Perijinan IPAK	Juliman		
				Pramusti Indrascaryo		
				Disril Revolin Putra		
				Sri Harsi Teteki		
10	Selasa, 20 Maret 2018	Pkl. 09.00-10.30	Pembahasan Rapat Sebelumnya (Progres	M. Rahman Roestan	Bio Farma	Dir.SDM dan Umum Dinas Luar Kota
			Pemeringkatan/Rating oleh Pefindo)	Sugeng Raharso		
				Juliman		
				Pramusti Indrascaryo		
				Sri Harsi Teteki		
11	Kamis, 29 Maret 2018	Pkl. 08.00-15.00	1. Update Hasil Rapat Teknis LMP Tahun 2017 dengan KBUMN	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Progres Pendirian Anak Perusahaan JVC Pabrik Vial dan Ampul	Sugeng Raharso		

No	Hari, Tgl	Waktu	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Tempat	Keterangan
			3. Progres Rencana Pembuatan Gedung aset dan Arsip	Juliman		
			4. Progres Pengembangan Vaksjin sIPV	Pramusti Indrascaryo		
			5. Program ITMS (Integrated Talent Management System)	Sri Harsi Teteki		
			6. Sistem Pergerakan Karir Tahun 2018	Disril Revolin Putra		
			7. Rencana Rekruitment PKWT untuk Karyawan Posisi Core			
			8. Usulan Sistem Penggajian Baru Karyawan			
			9. Program MTN			
			10. Rencana Penambahan Limit KMK dan Persetujuan			
12	Kamis, 11 April 2018	Pkl. 16.00-17.30	1. Persiapan RUPS Laporan Manajemn Perusahaan 2017	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Draft Laorpan Keuangan Triwulan I 2018	Sugeng Raharso		
				Juliman		
				Pramusti Indrascaryo		
				Sri Harsi Teteki		
				Disril Revolin Putra		
13	Kamis, 19 April 2018	Pkl. 13.00-16.00	1. Progres Pendirian Anak Perusahaan JVC Pabrik Vialdan Ampul	M. Rahman Roestan	Bio Farma	Direktur Keuangan, Direktur Produksi dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan selesai SK masa Bakti pengangkatan
			2. Produk Partnership BCHT	Disril Revolin Putra		
			3. Stok dan Produksi Vaksin BCG	Sri Harsi Teteki		
			4. Izin Importir Obat Hewan			
			5. Exit Lahan Jasinga (Surat ke DJKN Tentang Jasingan)			
			6. Partisipasi Paket Obat-obatan dari Program PKBL			

No	Hari, Tgl	Waktu	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Tempat	Keterangan
14	Jum'at, 4 Mei 2018	Pkl. 09.00-14.30	1. Pembahasan Rapat Sebelumnnya	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Strategi Pencapaian Target 100 hari (Sejak 20 April 2018 berbasis Kinerja	Adriansjah Azhari		
			3. Usulan Kebijakan KPI dan Penilaian Tahunan	Juliman		
			4. Usalan Penanganan Kasus di KPPU dan Perubahan Type Chiller Gedung no. 43	Pardiman		
			5. Usulaln Program Mini MBA	Sri Harsi Teteki		
			6. Lain-lain	Disril Revolin Putra		
			- Laporan Kerjasama Pertnership dengan MSD			
15	Rabu, 9 Mei 2018	Pkl. 09.00-14.30	1. Pembahasan Rapat Sebelumnnya - Update komunikasi sIPV (BIKEN)	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Usulan THR	Adriansjah Azhari		
			3. Rencana Kerjasama dan Pengembangan Ovine Enoxaparin	Juliman		
			4. Proyek Pengembangan Vaksin Pneumokok whole Cell	Pardiman		
			5. Lain-lain	Sri Harsi Teteki		
			- Percepatan Proyek Blood Product	Disril Revolin Putra		
			- Usulan Konsep Call Center			
16	Kamis, 17 Mei 2018	Pkl. 08.00-11.30	1. Pembahasan Rapat Sebelumnnya	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Progres Pendirian Anak Perusahaan JVC Pabrik Vial dan Ampul	Adriansjah Azhari		
			3. Update RJPP 2017-2021	Juliman		
			4. Lain-lain	Pardiman		
			- Agenda Buka Bersama dan Radirkom, 31 Mei 2018	Sri Harsi Teteki		
				Disril Revolin Putra		

No	Hari, Tgl	Waktu	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Tempat	Keterangan
17	Kamis, 24 Mei 2018	Pkl. 08.00-09.50	1. Alokasi Anggaran Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan	Juliman	Bio Farma	Dir. Utama Dinas Luar Negeri
			2. Lain-lain	Adriansjah Azhari		Dir Pemasaran Dinas Luar Kota
				Pardiman		
				Disril Revolin Putra		
18	Rabu, 30 Mei 2018	Pkl. 13.30-15.30	1. Pembahasan Rapat Sebelumnnya	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			- Rencana kerjasama dengan Pusvetma	Adriansjah Azhari		
			2. Update RJPP 2017-2021 dan Forecast Penjualan 2022	Juliman		
			3. Lain-lain	Pardiman		
			- Perpanjangan kontrak GSG	Sri Harsi Teteki		
			- Proyek Blood Product	Disril Revolin Putra		
			- Surat dari Bio Laboratories			
			- Management Letter dari KAP Djoemarma dan Rekan			
			- Tim Advokasi Imunisasi			
19	Senin, 4 Juni 2018	Pkl. 15.00-15.30	1. Progres Pendirian Anak Perusahaan JVC Pabrik Vial dan Ampul	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
				Adriansjah Azhari		
				Juliman		
				Pardiman		
				Sri Harsi Teteki		
				Disril Revolin Putra		
20	Kamis, 7 Juni 2018	Pkl. 08.00-12.00	1. Proyek Pengembangan Whole Cell Pneumo Vaccine (wPCV)	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Proyek Pengembangan Vaksin Tifoid Konyugat	Adriansjah Azhari		
			3. Program Paska Pensiun	Juliman		
			4. Pengembangan Budaya Perusahaan	Pardiman		
			5. Program Komunitas Mengajar	Sri Harsi Teteki		
				Disril Revolin Putra		

No	Hari, Tgl	Waktu	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Tempat	Keterangan
21	Jumat, 8 Juni 2018	Pkl. 08.00-11.00	1. Pembahasan Rapat Sebelumnnya	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			- Progress RJPP 2017-2022	Adriansjah Azhari		
			2. Sistem Gaji Baru	Juliman		
			3. Sistem Penilaian Berbasis Kinerja	Pardiman		
			4. Program Penempatan di Forum Internasional	Sri Harsi Teteki		
				Disril Revolin Putra		
22	Kamis, 28 Juni 2018	Pkl. 08.00-11.00	1. Pembahasan Rapat Sebelumnnya	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			- Penyusunan RJPP 2017-2022	Adriansjah Azhari		
			2. Penyempurnaan Implementasi *Activity Based Costing*	Juliman		
				Pardiman		
				Sri Harsi Teteki		
				Disril Revolin Putra		
23	Kamis, 5 Juli 2018	Pkl. 08.00-12.00 WIB	1. Pembahasan Rapat Sebelumnya	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			-Progress Call Center	Adriansjah Azhari		
			2. WHO PQ Fee	Juliman		
			3. Program ODP *(Officer Development Program)*	Sri Harsi Teteki		
			4. Kebijakan Lindung Nilai *(Hedging)*	Disril Revolin Putra		
			5. Progress Pendirian Anak Perusahaan JVC Pabrik Vial dan Ampul	Pardiman		
			6. Lain-lain			

No	Hari, Tgl	Waktu	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Tempat	Keterangan
24	Kamis, 19 Juli 2018	Pkl. 14.00-16.30 WIB	1. Usulan Kerangka Kerjasama Bio Farma-Kimia Farma	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Rencana Master Plan Lahan baru Indotaisei	Adriansjah Azhari		
			3. Laporan Kinerja Semester 1 tahun 2018	Juliman		
			4. Bantuan untuk Korban Musibah Pohon Tumbang	Sri Harsi Teteki		
				Disril Revolin Putra		
				Pardiman		
25	Kamis, 9 Agustus 2018	Pkl. 13.00-17.00 WIB	1. Usulan Persedian dan Rencana Produk Bulk Polio 2019 dan Rencana Pembelian Bulk Hepatitis B	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Rencana Kerjasama Produk Ovine Enoxaparin	Adriansjah Azhari		
			3. Parameter Penilaian KPI Direktorat	Juliman		
			4. Usulan Penempatan Internasional	Sri Harsi Teteki		
			5. MTN BNI Sekuritas	Disril Revolin Putra		
			6. Penawaran Kerjasama Blood Product dari Tae Chang Indofarma (TCI)	Pardiman		
			7. Lain-lain			
26	Rabu, 15 Agustus 2018	Pkl. 13.00-18.30 WIB	1. Penawaran Supply Tambahan Bulk Hepatitis B	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Kinerja Perusahaan Per 31 Juli 2018	Adriansjah Azhari		
			3. Review Implementasi MRP	Juliman		
			4. Laporan hasil pertemuan dengan Pfizer dan Kalbe Farma	Sri Harsi Teteki		
			5. Lain-lain	Disril Revolin Putra		
				Pardiman		
27	Rabu, 29 Agustus 2018	Pkl. 13.30-18.30 WIB	1. Persiapan Radirkom	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Update kerjasama Bio Farma dan Kimia Farma dalam Joint Venture Company Vial-Ampul	Adriansjah Azhari		
			3. Pengembangan Vaksin Whole Cell Pneumokok (wSP)	Juliman		
			4. Laporan Hasil Pertemuan Bio Farma dengan BMGF tentang pengembangan vaksin new OPV type 2	Sri Harsi Teteki		
			5. Lain-lain	Disril Revolin Putra		
				Pardiman		

No	Hari, Tgl	Waktu	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Tempat	Keterangan
28	Senin, 10 September 2018	Pkl. 08.00-12.00 WIB	1. Arahan Direksi dan Aspirasi Pemegang Saham untuk Draft RKAP 2019	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Data Demografi SDM di Bio Farma	Adriansjah Azhari		
			3. Progress Proyek Blood Product	Pardiman		
			4. Lain-lain	Disril Revolin Putra		
				Sri Harsi Teteki		
				Juliman		
29	Kamis, 27 September 2018	Pkl. 13.00-15.30 WIB	1. Progress Review Kerjasama sIPV BF-BIKEN	M. Rahman Roestan	Bio Farma	Direktur SDM Dinas
			2. Program Pengembangan Produk Halal	Adriansjah Azhari		
			3. Potensi Ekspansi Peningkatan Ekspor dan Investasi Subtitusi Impor (Hasil meeting dengan LPEI)	Sri Harsi Teteki		
			4. Update penyusunan RKAP 2019	Juliman		
				Pardiman		
30	Kamis, 11 Oktober 2018	Pkl. 09.00-11.30 WIB	1. Update Penyusunan RKAP 2019	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Lain-lain	Adriansjah Azhari		
				Juliman		
				Pardiman		
				Disril Revolin Putra		
				Sri Harsi Teteki		
31	Kamis, 18 Oktober 2018	Pkl. 08.00-11.30 WIB	1. Wawancara BoD dengan asesor terkait dengan asesmen Tata Kelola IT	M. Rahman Roestan	Bio Farma	Dir SDM Dinas Luar Kota
			2. Persiapan Radirkom : RKAP 2019	Adriansjah Azhari		
			3. Agreement dengan pihak Wistar	Pardiman		
				Juliman		
				Sri Harsi Teteki		
32	Kamis, 01 November 2018	Pkl. 10.00-14.00 WIB	1. Finalisasi RJPP tahun 2018-2022	M. Rahman Roestan	Bio Farma	Dir. Renbang Dinas LN
			2. Aplikasi Mobile Training Karyawan	Pardiman		
			3. Program Work Force Experience untuk Retail Sales	Juliman		

No	Hari, Tgl	Waktu	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Tempat	Keterangan
			4. Usulan Rekrutmen Tahap 2 tahun 2018	Disril Revolin Putra		
			5. Penyempurnaan Organisasi dan Fungsi Divisi Perencanaan dan Strategi Bisnis	Sri Harsi Teteki		
			6. Lain-lain			
33	Kamis, 15 November 2018	Pkl. 10.00-12.00 WIB	1. Usulan Perubahan Pengadaan Barang dan Jasa (Progres Report Pengembangan Proses Bisnis SCM)	M. Rahman Roestan	Bio Farma	Dir. SDM Dinas Luar Kota
			2. Monitoring Progress Realisasi Investasi RKAP 2018	Adriansjah Azhari		
			3. Update RJPP tahun 2018-2022	Juliman		
			4. Laporan Perjalanan Dinas DCVMN 19th Annual General Meeting	Sri Harsi Teteki		
			5. Lain-lain	Pardiman		
34	Kamis, 29 November 2018	Pkl. 14.00-17.00 WIB	1. Progress Realisasi Investasi Tahun 2018 (InvestasiProyek Fasilitas Ayam SPF)	M. Rahman Roestan	Bio Farma	
			2. Usulan Branding Strategi (Konsultan)	Adriansjah Azhari		
			3. Kebijakan Akuntansi Biaya Pengembangan Upstream Vaksin Flu	Juliman		
			4. Update Mitra Kerja Produk Darah	Pardiman		
			5. Lain-lain	Disril Revolin Putra		
				Sri Harsi Teteki		
35	Kamis, 06 Desember 2018	Pkl. 08.00-10.00 WIB	1. Usulan Bagan Organisasi Divisi Direktorat Pemasaran	Pardiman	Bio Farma	Direktur Utama Dinas Luar kota
			2. Kebutuhan Rekrutmen dan Pergerakan Karier 2019	Juliman		
				Adriansjah Azhari		
				Sri Harsi Teteki		
				Disril Revolin Putra		
36	Selasa, 18 Desember 2018	Pkl. 08.00-09.00 WIB	1. Rencana Perjalanan Dinas Luar Negeri Direksi Tahun 2019	M. Rahman Roestan	Bio Farma	Dir. SDM Cuti Ibadah
			2. Lain-lain	Adriansjah Azhari		Dir. Keuangan Cuti
				Juliman		
				Sri Harsi Teteki		
				Disril Revolin Putra		

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT GABUNGAN DEWAN DENGAN Direksi

Bedasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero) dan diperbaharui dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-07/DK/BF/II/2018, Nomor: PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero) dan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: 07/DK/BF/03/2016 Tentang Tata Tertib Rapat Internal Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero), di antaranya mengenai rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris

RAPAT GABUNGAN ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

DASAR, WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.
2. Di samping waktu tersebut, rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris dapat pula diselenggarakan setiap waktu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dan/atau perlu mendapatkan keputusan, apabila:
   a. Dipandang perlu oleh Direktur Utama atau Komisaris Utama atau lebih dari setengah anggota Direksi atau lebih dari setengah anggota Dewan Komisaris;
   b. Atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
3. Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris diselenggarakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia (RI) yang ditetapkan oleh Direksi.

PESERTA RAPAT DALAM RAPAT ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Peserta Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris terdiri dari semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Apabila Direksi dan/atau Dewan Komisaris menganggap perlu, pihak lainnya dapat dihadirkan dalam rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

AGENDA RAPAT ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN DIREKSI

1. Direksi atau Dewan Komisaris yang mengusulkan untuk diselenggarakan rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris, menentukan acara dan menyiapkan bahan/berkas yang perlu dibahas dalam rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris.
2. Agenda untuk rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris dapat disampaikan secara lisan atau secara tertulis berupa memo, surat dan lain sebagainya disertai dengan bahan/berkas tersebut.
3. Direksi atau Dewan Komisaris yang menentukan agenda yang perlu dibahas/diputuskan dalam rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang bersangkutan–dapat menugaskan pimpinan atau pejabat lain di Perusahaan atau Komite Dewan Komisaris dan/atau terkait/kepentingan dengan agenda yang perlu dibahas/diputuskan dalam rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris tersebut, agar melaksanakan penyusunan acara dan menyiapkan bahan/berkas untuk rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris.
4. Acara yang belum selesai dibahas/diputuskan pada rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris sebelumnya, dapat diajukan ke dalam rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris berikutnya oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terkait/berkepentingan.
5. Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat menambah acara rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris di luar acara yang telah disusun sebelumnya, untuk dibahas/diputuskan dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahan/berkasnya telah disiapkan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan dan semua peserta rapat atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
6. Semua bahan/berkas yang perlu dibahas dalam rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang berasal dari Direksi disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) untuk selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) disampaikan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris sebelum rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris diselenggarakan.

7. Semua bahan/berkas yang perlu dibahas dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang berasal dari Dewan Komisaris disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk selanjutnya oleh Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan kepada para anggota Direksi melalui Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dan Dewan Komisaris sebelum rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris diselenggarakan.

UNDANGAN RAPAT ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Apabila inisiasi rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris berasal dari Direksi, maka setelah jadwal rapat disepakati oleh Direksi dan Dewan Komisaris, undangan rapat dilakukan secara tertulis oleh Direktur Utama atau oleh anggota direksi lain yang mewakili Direktur Utama atau oleh anggota direksi lain yang mewakili Direktur Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika diperlukan untuk diselenggarakan rapat.
2. Apabila inisiasi rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris berasal dari Dewan Komisaris, maka setelah jadwal rapat disepakati oleh Direksi dan Dewan Komisaris, undangan rapat dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris lain yang mewakili Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris lain yang mewakili Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika diperlukan untuk diselenggarakan rapat.
3. Dalam undangan rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.
4. Undangan rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

KUORUM RAPAT ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah.
2. Dalam rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris, diupayakan selalu dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris, hanya oleh anggota Direksi lain yang hadir dalam rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang bersangkutan, berdasarkan kuasa tertulis yang khusus untuk keperluan rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang bersangkutan.
4. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris, hanya oleh anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang bersangkutan, berdasarkan kuasa tertulis yang khusus untuk keperluan rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang bersangkutan.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komsaris lainnya.

PIMPINAN RAPAT ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
2. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris dipimpin oleh Dewan Komisasris yang ditunjuk secara tertulis oleh Komisaris Utama.
3. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir dan Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah satu Anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahan lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

RISALAH RAPAT ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Untuk setiap rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus dibuatkan Risalah Rapat.
2. Risalah rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus mencantumkan:

a. alasan ketidakhadiran anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, apabila ada Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak hadir;
b. hasil evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan keputusan hasil rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris sebelumnya;
c. dinamika rapat sebagai proses pengambilan keputusan rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris termasuk pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) jika ada;
d. pertimbangan dan/atau analisis dalam pengambilan keputusan rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris;
e. hal-hal diputuskan dalam rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris;

3. Risalah Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris ditandatangani oleh pimpinan rapat, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat dan notulis;
4. Risalah Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris tersebut;
5. risalah asli dari setiap Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris disimpan oleh Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

PENCATAT/NOTULIS RAPAT ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

Pencatat/notulis rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris adalah Sekretaris Komisaris.

Dalam hal Sekretaris Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka yang bertindak sebagai notulis antara Direksi dengan Dewan Komisaris adalah personel lain yang ditunjuk oleh pimpinan rapat.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama tahun 2018, Direksi telah melaksanakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas kali dengan rincian sebagai berikut:

PERIODE 1 JANUARI–20 APRIL 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Mulai Menjabat	Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi			Keterangan
			Jumlah Rapat / Tahun	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	
Dewan Komisaris						
Ahmad Ramli	Komisaris Utama	12/04/2013 s/d 20 April 2018	2	2	100%	-
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01 Mei 2013 s/d 20 April 2018	2	2	100%	-
Heridadi	Komisaris	23 Januari 2014 s/d 08 Januari 2019	2	2	100%	-
Mohamad Subuh	Komisaris	22 Juni 2015 s/d Sekarang	2	2	100%	-
Direksi						
M. Rahman Rustan	Direktur Pemasaran	10 Juli 2017 s/d 23 Januari 2018	-	-	-	-
	Direktur Utama	23 Januari 2018 s/d Sekarang	2	2	100%	-
Juliman	DirekturProduksi	12/04/2013 s/d 12/04/2018	2	2	100%	-
		20/04/2018 s/d Sekarang	-	-	-	-
	Plt. Direktur Utama	10 Juli 2017 s/d 23 Januari 2018	-	-	-	-
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	23 Januari 2018 s/d Sekarang	-	-	-	-

Nama Komisaris	Jabatan	Mulai Menjabat	Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi			Keterangan
			Jumlah Rapat / Tahun	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	
Pramusti Indrascaryo *	Direktur Keuangan	12/04/2013 s/d 12/04/2018	2	2	100%	-
Disril Revolin Putra	DirekturSDM & Umum	14 Juli 2017 s/d Sekarang	2	2	100%	-
Sugeng Raharso *	Direktur Perencanaan & Pengembangan	12/04/2013 s/d 12/04/2018	2	2	100%	-

* Berakhir masa jabatan: 20 April 2018

PERIODE 20 APRIL 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

Nama Komisaris	Jabatan	Mulai Menjabat	RapatGabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi			Keterangan
			Jumlah Rapat / Tahun	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	
Dewan Komisaris						
Farid Wadjdi Husain	Komisaris Utama	s.d sekarang 20 April 2018	10	10	100%	-
Made Arya Wijaya	Komisaris	s.d sekarang 20 April 2018	10	7	70%	-
Saud Usman Nasution	Komisaris	s.d sekarang 20 April 2018	10	7	70%	-
Yuni Suryanto	Komisaris	s.d sekarang 20 April 2018	10	9	90%	-
Heridadi **	Komisaris	23 Januari 2014 s/d 08 Januari 2019	10	10	100%	-
Mohamad Subuh	Komisaris	22 Juni 2015 s/d Sekarang	10	6	60%	-
Direksi						
M. Rahman Rustan	Direktur Pemasaran	10 Juli 2017 s/d 23 Januari 2018	-	-	-	-
	Direktur Utama	23 Januari 2018 s/d Sekarang	10	10	100%	-
Juliman	DirekturProduksi	12/04/2013 s/d 12/04/2018	-	-	-	-
		20/04/2018 s/d Sekarang	10	9	90%	
	Plt. Direktur Utama	10 Juli 2017 s/d 23 Januari 2018	-	-	-	-
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran	23 Januari 2018 s/d Sekarang	12	12	100%	-
Pardiman *	Direktur Keuangan	20/04/2018 s/d Sekarang	10	10	100%	-
Disril Revolin Putra	DirekturSDM & Umum	14 Juli 2017 s/d Sekarang	10	8	80%	-
Adriansjah Azhari *	Direktur Perencanaan & Pengembangan	20/04/2018 s/d Sekarang	10	10	100%	-

* Mulai Menjabat : 20 April 2018
** Berakhir Masa Jabatan : 08 Januari 2019

TANGGAL, AGENDA RAPAT, KEPUTUSAN, TEMPAT DAN NAMA PESERTA RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2018, Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris membahas tentang berbagai masalah yang dihadapi Perusahaan, kinerja dan strategi yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan, dengan agenda sebagai berikut:

No.	Hari/Tanggal	Agenda Rapat	Tempat
1	29 Januari 2018	- Membahas Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2017 (Unaudited) - Membahas Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2017-2021 - Lain-lain	Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1 Jakarta
2	27 Februari 2018	- Membahas Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2017 (Audited) - Lain-lain	Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1 Jakarta
3	24 April 2018	- Membahas persiapan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 - Membahas Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2017 (Audited)	Gedung Pakarti Center Lt.7 Jakarta
4	31 Mei 2018	- Membahas Kinerja Perusahaan s.d April 2018 - Membahas Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2017-2022	PT Bio Farma (Persero) Bandung
5	29 Juni 2018	- Membahas Pengembangan Produk-Produk Baru - Membahas hal-hal strategis Strategis Perusahaan - Lain-lain	Gedung Pakarti Center Lt.7 Jakarta
6	26 Juli 2018	- Membahas Laporan Manajemen Perusahaan Semester I Tahun 2018 - Membahas Rancangan RJPP tahun 2018-2022 - Membahas strategi komunikasi halal	Gedung Pakarti Center Lt.7 Jakarta
7	30 Agustus 2018	- Membahas Kinerja Perusahaan s.d Juli 2018 - Membahas realisasi investasi	Hotel Aryaduta Jakarta
8	28 September 2018	- Laporan Kinerja Perusahaan per 31 Agustus 2018 - Lain-lain	Gedung Pakarti Center Lt.7 Jakarta
9	19 Oktober 2018	- Rancangan RKAP Tahun 2019 PT Bio Farma (Persero) - Lain-lain	Gedung Pakarti Center Lt.7 Jakarta
10	29 Oktober 2018	- Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan III tahun 2018 - Lain-lain	Gedung Pakarti Center Lt.7 Jakarta
11	30 November 2018	- Kinerja s.d Oktober 2018 - *Update* RJPP dan RKAP (yang telah dibahas dengan Tim Teknis KBUMN) - *Update* proses aset flu burung - Lain-lain	Gedung Pakarti Center Lt.7 Jakarta
12	28 Desember 2018	- Kinerja s.d November 2018 - Lain-lain	PT Bio Farma (Persero) Bandung

PERNYATAAN DIREKSI BIO FARMA TENTANG INDEPENDENSI DAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pada tanggal 26 Maret 2018 semua anggota Direksi membuat pernyataan independensi untuk menyatakan status independensinya dan menyatakan selama tahun terakhir terdapat situasi yang memiliki benturan kepentingan oleh Direksi atas tindakan yang dilakukan. Anggota Direksi juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat perubahan kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di Bio Farma dan atau perusahaan lain. Sekretaris Perusahaan bertugas memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*/GCG.

Independensi Direksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan pengurusan Perusahaan atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan yang secara material dapat mengganggu objektivitas dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan untuk kepentingan Perusahaan.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusannya. Dalam kedudukannya Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan atau Pemegang Saham Pengendali (Kementerian BUMN). Surat pernyataan independensi ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

Surat Pernyataan Independensi Potensi Benturan Kepentingan Direksi

M. Rahman Roestan Juliman Sri Harsi Teteki Pramusti Indrascaryo * Pardiman ** Disril Revolin Putra Sugeng Raharso * Adriansjah Azhari **	1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundangan yang berlaku. 2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan. 3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMN lain, BUMD, Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*/GCG yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* di dalam pengelolaan perusahaan. 5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha pemegang saham perusahaan sejenis. 6. Tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain yang terkait dengan jabatan saya di Bio Farma, di mana saya atau keluarga saya mempunyai kepentingan atau memperoleh manfaat karenanya. 7. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah. 8. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Komisaris lainnya atau dengan Direksi. 9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan. 10. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas pernyataan yang Saya buat, Saya bersedia dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

*Berakhir masa jabatan: 11 April 2018
** Mulai menjabat: 20 April 2018

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, kepemilikan saham Bio Farma 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bio Farma per 31 Desember 2018 merupakan Perusahaan Non Listed sehingga baik Masyarakat, Direksi, maupun Dewan Komisaris Bio Farma tidak mempunyai kepemilikan saham atas Bio Farma. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham dengan pemegang saham pengendali mengenai Pemegang Saham Utama (pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali) dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada Pemilik Individu.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Anggota Direksi dituntut untuk selalu bertindak independen, tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan dengan pihak manapun yang berkaitan dengan dengan Perusahaan maupun hubungan dengan Dewan Komisaris.

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan lainnya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN ANGGOTA DIREKSI

Hingga 31 Desember 2018, seluruh anggota Direksi Bio Farma tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan: Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan pemegang saham

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dewan Komisaris		Pemegang Saham		Direksi lainnya		Dewan Komisaris		Pemegang Saham		Direksi lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
M. Rahman Roestan	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Juliman	Direktur Produksi		√		√		√		√		√		√
Sugeng Raharso *	Direktur Perencanaan & Pengembangan		√		√		√		√		√		√
Adriansjah Azhari **	Direktur Perencanaan & Pengembangan		√		√		√		√		√		√
Pramusti Indrascaryo *	Direktur Keuangan		√		√		√		√		√		√
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum		√		√		√		√		√		√
Pardiman **	Direktur Keuangan		√		√		√		√		√		√
Sri Harsi Teteki **	Direktur Pemasaran		√		√		√		√		√		√

Keterangan:
* : Masa Jabatan s.d 11 April 2018
** : Menduduki Jabatan Mulai Tanggal 20 April 2018

HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI BESERTA KELUARGA

Hingga 31 Desember 2018, seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham di PT Bio Farma (Persero), Badan Usaha Milik Negara lain dan Perusahaan serta tidak ada kepemilikan saham secara pribadi maupun keluarga.

Dengan demikian, Direksi Bio Farma telah memenuhi kriteria independensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) pada BUMN.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar) Pribadi pada						Kepemilikan Saham (Lembar) Anggota Keluarga pada					
		PT Bio Farma (Persero)		BUMN lain		Perusahaan lain		PT Bio Farma (Persero)		BUMN lain		Perusahaan lain	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
M. Rahman Roestan	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Juliman	Direktur Produksi		√		√		√		√		√		√
Sugeng Raharso *	Direktur Perencanaan & Pengembangan		√		√		√		√		√		√
Adriansjah Azhari **	Direktur Perencanaan & Pengembangan		√		√		√		√		√		√
Pramusti Indrascaryo *	Direktur Keuangan		√		√		√		√		√		√
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum		√		√		√		√		√		√
Pardiman **	Direktur Keuangan		√		√		√		√		√		√
Sri Harsi Teteki **	Direktur Pemasaran		√		√		√		√		√		√

Keterangan:
*Masa Jabatan s.d 11 April 2018
**Menduduki Jabatan Mulai Tanggal 20 April 2018

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Aturan rangkap jabatan Direksi sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai berikut:

1. Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
7. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
8. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri Selaku RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
9. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud di atas, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:
10. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/ perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan;
11. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri.

Pada tahun 2018, seluruh anggota Direksi Bio Farma tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif di BUMN, perusahaan, instansi lainnya yang menimbulkan benturan kepentingan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BUMN/ Perusahaan/Instansi Lain		Sebagai Anggota Direksi pada BUMN/Perusahaan/ Instansi Lain		Sebagai Pejabat Eksekutif pada BUMN/ Perusahaan/Instansi Lain	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
M. Rahman Roestan	Direktur Utama		√		√		√
Juliman	Direktur Produksi		√		√		√
Sugeng Raharso *	Direktur Perencanaan & Pengembangan		√		√		√
Adriansjah Azhari **	Direktur Perencanaan & Pengembangan		√		√		√
Pramusti Indrascaryo *	Direktur Keuangan		√		√		√
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum		√		√		√
Pardiman **	Direktur Keuangan		√		√		√
Sri Harsi Teteki **	Direktur Pemasaran		√		√		√

Keterangan:
*Masa Jabatan s.d 11 April 2018
**Menduduki Jabatan Mulai Tanggal 20 April 2018

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA TENTANG INDEPENDENSI DAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pada tanggal 31 Desember 2018, semua anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan independensi untuk menyatakan status independensinya dan menyatakan selama tahun terakhir terdapat situasi yang memiliki benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris atas tindakan yang dilakukan. Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat perubahan kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di Bio Farma dan atau perusahaan lain.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusannya. Dalam kedudukannya Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali (Kementerian BUMN). Surat Pernyataan Independensi ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

PERIODE 1 JANUARI–20 APRIL 2018

Surat Pernyataan Independensi Potensi Benturan Kepentingan Dewan Komisaris	
Ahmad Ramli ** Ihsan Setiadi Latief * Heridadi *** H.M. Subuh	1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundangan yang berlaku. 2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan. 3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Dewan Komisaris pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*/GCG yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* di dalam pengelolaan perusahaan. 5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha pemegang saham perusahaan sejenis. 6. Tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain yang terkait dengan jabatan saya di Bio Farma, di mana saya atau keluarga saya mempunyai kepentingan atau memperoleh manfaat karenanya. 7. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah. 8. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Komisaris lainnya atau dengan Direksi. 9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan. 10. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas pernyataan yang Saya buat, Saya bersedia dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku

** Berakhir masa jabatan: 20 April 2018

PERIODE 20 APRIL 2018–31 DESEMBER 2018

Surat Pernyataan Independensi Potensi Benturan Kepentingan Dewan Komisaris	
Farid Wadjdi Husain * Saud Usman Nasution * Made Arya Wijaya * Yuni Suryanto * H.M. Subuh Heridadi **	1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundangan yang berlaku. 2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan. 3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Dewan Komisaris pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*/ GCG yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* di dalam pengelolaan perusahaan. 5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha pemegang saham perusahaan sejenis. 6. Tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain yang terkait dengan jabatan saya di Bio Farma, di mana saya atau keluarga saya mempunyai kepentingan atau memperoleh manfaat karenanya. 7. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah. 8. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Komisaris lainnya atau dengan Direksi. 9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan. 10. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas pernyataan yang Saya buat, Saya bersedia dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku

*Mulai menjabat: 20 April 2018
**Berakhir masa jabatan: 08 Januari 2019

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Hingga 31 Desember 2018, seluruh anggota Dewan Komisaris Bio Farma tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan: Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan pemegang saham.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dewan Komisaris lainnya		Pemegang Saham		Direksi		Dewan Komisaris lainnya		Pemegang Saham		Direksi	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ahmad M. Ramli *	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
Heridadi	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief **	Anggota Komisaris		√		√		√		√		√		√
H.M. Subuh	Anggota Komisaris		√		√		√		√		√		√
Farid Wadjdi Husain ***	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
Yuni Suryanto ***	Anggota Komisaris		√		√		√		√		√		√

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dewan Komisaris lainnya		Pemegang Saham		Direksi		Dewan Komisaris lainnya		Pemegang Saham		Direksi	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Made Arya Wijaya ***	Anggota Komisaris		√		√		√		√		√		√
Saud Usman ***	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√

Keterangan :
*masa jabatan s.d 11 April 2018
**masa jabatan s.d 20 April 2018
***menduduki jabatan mulai tanggal 20 April 2018

HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BESERTA KELUARGA

Hingga 31 Desember 2018, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PT Bio Farma (Persero), Badan Usaha Milik Negara lain dan Perusahaan serta tidak ada kepemilikan saham secara pribadi maupun keluarga.

Dengan demikian, Dewan Komisaris Bio Farma telah memenuhi kriteria independensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) pada BUMN.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar) Pribadi pada						Kepemilikan Saham (Lembar) Anggota Keluarga pada					
		PT Bio Farma (Persero)		BUMN lain		Perusahaan lain		PT Bio Farma (Persero)		BUMN lain		Perusahaan lain	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ahmad M. Ramli *	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
Heridadi	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief **	Anggota Komisaris		√		√		√		√		√		√
H.M. Subuh	Anggota Komisaris		√		√		√		√		√		√
Farid Wadjdi Husain ***	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
Yuni Suryanto ***	Anggota Komisaris		√		√		√		√		√		√
Made Arya Wijaya ***	Anggota Komisaris		√		√		√		√		√		√
Saud Usman ***	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√

Keterangan :
*masa jabatan s.d 11 April 2018
**masa jabatan s.d 20 April 2018
***menduduki jabatan mulai tanggal 20 April 2018

KOMITE AUDIT

ORGAN PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk dua Komite Penunjang Dewan Komisaris, yakni Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG serta didukung oleh fungsi Sekretaris Dewan Komisaris. Setiap Komite Penunjang Dewan Komisaris diketuai oleh anggota Dewan Komisaris dan tugas serta tanggung jawab masing-masing Komite tercantum dalam masing-masing pedoman kerja *(charter)*.

Dalam setiap Rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris, setiap anggota diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat termasuk pendapat yang berbeda *(dissenting opinions)*, dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan diketahui oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat. Seluruh organ pendukung Dewan Komisaris wajib membuat laporan pada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diterima, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komite.

KOMITE AUDIT

Komite Audit Bio Farma telah dibentuk sejak 29 Agustus 2003 dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance/GCG)*, memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengendalian internal dan audit perusahaan, serta membuat laporan secara tertulis atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan tingkat pencapaian kinerjanya untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN pasal 70 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi sebagai pengawas perusahaan.

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 Tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Komite Audit PT Bio Farma (Persero) telah dibentuk sejak tahun 2003, sesuai dengan Surat Keputusan No: 023/KEP/DK/BF/2003 tanggal 29 Agustus 2003 Tentang Pembentukan Komite Audit PT Bio Farma (Persero). Komite Audit berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Coporate Governance/GCG)*.

Komite Audit Bio Farma terakhir diperbaharui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris melalui SK No: KEP-15/DK/BF/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bio Farma (Persero).

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, yang menyatakan bahwa Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Ketua Komite Audit adalah Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris independen atau yang dapat bertindak independen. Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Anggota Komite audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau di luar Perusahaan.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu

kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit Bio Farma tidak berasal dari karyawan Bio Farma dan tidak mempunyai benturan kepentingan, bukan pelanggan dan bukan *vendor* Bio Farma. Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan Ketua/Anggota Komite melalui Surat Keputusan Komisaris dan disampaikan pada Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

PERIODE 1 JANUARI–25 APRIL 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
1	Ihsan S. Latief	Wakil Ketua Komite Audit	30 Sep 2015 - 20 April 2018	SK Pengangkatan Nomor : KEP-10/DK/BF/09/2015
				SK Pemberhentian Nomor : SK-102/MBU/04/2018
2	M. Asawir Harahap (Pihak Independen)	Anggota Komite Audit	30 Sep 2015 - 2 Juni 2017, 3 Juni 2017 - 25 April 2018, 26 April 2018 - 2 Juni 2020	SK Pengangkatan : SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-10/DK/BF/09/2015 Tanggal 30 September 2015, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-05/DK/BF/06/2017 tanggal 3 Juni 2017, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-02/DK/BF/04/2018 Tanggal 26 April 2018
3	Priyatno (Pihak Independen)	Anggota Komite Audit	Mei 2017 - 25 April 2018, 26 April 2018 - Mei 2020	SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-04/DK/BF/05/2017, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-02/DK/BF/04/2018 Tanggal 26 April 2018

Keterangan
* Berakhir masa jabatan: 20 April 2018

PERIODE 26 APRIL 2018–31 DESEMBER 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
1	Made Arya Wijaya	Ketua Komite Audit	26 April 2018 - 20 April 2023	SK Pengangaktan Nomor : KEP-02/DK/BF/04/2018
2	Yuni Suryanto	Wakil Ketua Komite Audit	26 April 2018 - 20 April 2023	SK Pengangkatan Nomor : KEP-02/DK/BF/04/2018
3	M. Asawir Harahap (Pihak Independen)	Anggota Komite Audit	30 Sep 2015 - 2 Juni 2017, 3 Juni 2017 - 25 April 2018, 26 April 2018 - 2 Juni 2020	SK Pengangkatan : SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-10/DK/BF/09/2015 Tanggal 30 September 2015, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-05/DK/BF/06/2017 tanggal 3 Juni 2017, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-02/DK/BF/04/2018 Tanggal 26 April 2018
4	Priyatno (Pihak Independen)	Anggota Komite Audit	Mei 2017 - 25 April 2018, 26 April 2018 - Mei 2020	SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-04/DK/BF/05/2017, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-02/DK/BF/04/2018 Tanggal 26 April 2018

NAMA, JABATAN DAN PERIODE JABATAN, RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA ANGGOTA KOMITE AUDIT

Komite Audit Bio Farma dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari salah seorang anggota Dewan Komisaris dan memiliki 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite, yang masing-masing memiliki kualifikasi pendidikan dan keahlian di bidang audit. Hal ini dapat dilihat dari profil Komite Audit sebagai berikut.

RIWAYAT SINGKAT ANGGOTA KOMITE AUDIT

MADE ARYA WIJAYA

KETUA KOMITE AUDIT

(26 APRIL 2018 – 20 APRIL 2023)

Profil Ketua Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Dasar hukum penunjukkan sebagai Ketua Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-02/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018 menggantikan Paruli Lubis yang telah berakhir masa jabatannya.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. Merangkap jabatan sebagai Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Kementerian Keuangan. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

YUNI SURYANTO

WAKIL KETUA KOMITE AUDIT MERANGKAP ANGGOTA

(26 APRIL 2018 – 20 APRIL 2023)

Profil Ketua Komite Audit dapat dilihat pada Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Dasar hukum penunjukkan sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-02/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018 menggantikan Ihsan Setiadi Latief yang telah berakhir jabatannya tanggal 20 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. Merangkap jabatan sebagai Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II di Kementerian BUMN. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

IHSAN SETIADI LATIEF

WAKIL KETUA KOMITE AUDIT MERANGKAP ANGGOTA

Profil Wakil Ketua Komite Audit merangkap Anggota dapat dilihat pada Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Dasar hukum penunjukan sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-10/DK/BF/09/2015 tanggal 30 September 2015. Berdasarkan SK Pemberhentian Nomor: SK-102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018, Ihsan Setiadi Latif diberhentikan dengan hormat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai Wakil Ketua Komite Audit dan digantikan oleh oleh Yuni Suryanto.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. Tidak memiliki rangkap jabatan. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

M. ASAWIR HARAHAP

ANGGOTA KOMITE AUDIT (INDEPENDEN)

3 Juli 2017 - 3 Juli 2019

Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili di Jakarta. Usia per 31 Desember 2018 adalah 72 tahun. Lahir di Padang Sidempuan tanggal 11 Agustus 1946, M. Asawir Harahap menyelesaikan pendidikan S1 dari Institut Ilmu Keuangan/Akuntansi (1975). Ia memiliki pengalaman sebagai auditor di bidang perusahaan negara dan perusahaan daerah pada Direktorat Akuntan Negara (1969), Kasiwas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kanwil VII DJPKN Palembang (1981), Kasiwas Jasa Bidwas Industri, Jasa Perdagangan dan Pertambangan di Kanwil VII DJPKN Palembang (1982), Kasiwas Pertambangan dan Energi, Bidwas BUMN/BUMD II di Unit Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan (1984), Kasiswas Industri 3, Bidwas BUMN/BUMD I di Unit Perwakilan BPKP DKI Jakarta (1985), Kabidwas Pengeluaran II di Unit Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan (1993), Kabidwas BUMN/BUMD I di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (1996), Kepala Perwakilan (Eselon II) di Unit Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan (1998), Direktur Pengawasan Penerimaan Pajak di Unit Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan (2001), Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan di Unit Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam (2001), Kepala Perwakilan (Eselon II) Unit Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (2002), Deputi (Eselon I) di Unit Deputi Bidang Akuntan Negara. Selain itu, Asawir juga memiliki pengalaman di bidang audit/pengawasan, yaitu pengalaman audit selama 37 tahun di bidang Perusahaan Negara, BUMN & BUMD, Komisaris Independen PT Indofarma Global Medika, Ketua Badan Pengawas Yayasan Keluarga BPKP Dharma Satya Parahita, Komite Audit PT Indo Farma (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan PT Taspen (Persero). Asawir ditunjuk menjadi anggota Komite Audit Bio Farma sejak tanggal 01 Juli 2014.

PENGHARGAAN

SATYA LENCANA KARYA SATYA XXX TAHUN 1996

Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-10/DK/BF/09/2015 tanggal 30 September 2015, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-05/DK/BF/06/2017 tanggal 3 Juni 2017, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-02/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. Tidak memiliki rangkap jabatan. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

PRIYATNO

ANGGOTA KOMITE AUDIT (INDEPENDEN)

Mei 2017 - Mei 2020

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Depok, Usia per 31 Desember 2018 adalah 64 tahun. Lahir di Yogyakarta, 20 Juni 1954, Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Memiliki pengalaman sebagai Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum (1989), Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan (1992), Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kepegawaian (1995), Kepala Bidang Perencanaan Analisa dan Evaluasi (1997), Kepala Bagian Penelahaan Hukum (1999), Kepala Bagian Mutasi (2001), Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi (2003), serta Kepala Biro Umum (2011).

Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-04/DK/BF/05/2017 tanggal Mei 2017, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris Nomor: KEP-02/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. Tidak memiliki rangkap jabatan. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA ANGGOTA KOMITE AUDIT

1. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
   a. Memiliki integritas yang baik pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
   b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
   c. Mampu berkomunikasi secara aktif;
   d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
   e. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.

2. Salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.

Anggota Komite Audit Bio Farma sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, hal ini dapat dilihat pada profil di bawah ini.

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Ihsan Setiadi Latief *	Wakil Ketua Merangkap Anggota Komite Audit	Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-10/ DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015	S1, Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat IAIN Sunan Gunung Djati Bandung	Aktif berorganisasi di ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Perhimpunan Masyarakat Madani, Komunitas Konsultasi Komunikasi (Konklusi) dan Persatuan Islam.
			S2, Magister Program Studi Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran	Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAI Persis)
			S3, Doktor pada Program Pascasarjana S3 Unpad Buku Kajian Utama Ilmu Komunikasi	Ketua III Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Islam (STKIP Persis)
				Ketua STKIP Persis
				Dosen luar biasa Komunikasi dan Konseling di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani (Stikes Unjani) Bandung
				Dosen luar biasa Komunikasi dan Negoisasi di Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta dan Universitas Bung Karno.
				Mendirikan Yayasan Cita Insani Mandiri yang bergerak dalam dakwah, sosial dan kemasyarakatan
Made Arya Wijaya **	Ketua Komite Audit	Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-02/ DK/BF/04/2018, tanggal 26 April 2018	D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran
			S1, Sarjana Ekonomi, Universitas Islam Jakarta	Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran
			S2, Master of Scinece In France, University of Colorado at Denver, USA	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem Penganggaran
				Pelaksana, Direktorat Anggaran Lain-Lain
				Koordinator Pelaksana, Direktorat Anggaran Lain-Lain

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Yuni Suryanto **	Wakil Ketua Merangkap Anggota Komite Audit	Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-02/ DK/BF/04/2018, tanggal 26 April 2018	S1, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gajah Mada S2, Master of Business Administration Oklahoma City Univerity, USA	Pj. Kasi Semen Departemen Keuangan
				PPT Kasubdit Perusahaan Jasa Konsultan Kementerian BUMN
				PPT Kasubdit Perkebunan II Kementerian BUMN
				Pj. Kabid Usaha Perkebunan II Kementerian BUMN
				Pj. Kabid Usaha Perkebunan 1A Kementerian BUMN
				Asisten Deputi Bidang Usaha Infrastruktur Dan Logistik II Kementerian BUMN
				Komisaris PT Jasa Raharja (Persero)
M. Asawir Harahap (Pihak Independen)	Anggota Komite Audit	SK Pengangkatan : SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-10/DK/ BF/09/2015 Tanggal 30 September 2015, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-05/DK/ BF/06/2017 tanggal 3 Juni 2017, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-02/DK/BF/04/2018 Tanggal 26 April 2018	Indonesia	Sebagai Auditor di Bidang Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah pada Direktorat Akuntan Negara
				Menjadi Kasiwas di beberapa Unit di Kanwil VII DJPKN Palembang Kasiwas Jasa Bidwas Industri, Kanwil VII DJPKN Palembang, Unit Perwakilan BPKP Prov. Sumsel, Unit Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Prov. Jatim
				Kepala Perwakilan (Eselon II) di Unit Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan
				Direktur Pengawasan Penerimaan Pajak di Unit Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan
				Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan & Kemanan di Unit Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam
				Kepala Perwakilan (Eselon II) Unit Perwakilan BPKP Prov. Jatim
				Deputi (Eselon I) di Unit Deputi Bidang Akuntan Negara.
				Menjadi Auditor & Pengawasan selama 35 tahun dibidang Perusahaan Negara, BUMN &BUMD,
				Komisaris Independen PT Indofarma Global Medika,
				Ketua Badan Pengawas Yayasan Keluarga BPKP Dharma Satya Parahita,
				Komite Audit PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan PT Taspen (Persero).

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Priyatno (Pihak Independen)	Anggota Komite Audit	SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-04/ DK/BF/05/2017, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris Nomor : KEP-02/DK/ BF/04/2018 Tanggal 26 April 2018	S1, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Jurusan Akuntansi	Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum (1989)
				Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan
				Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Kepegawaian
				Kepala Bidang Perencanaan Analisa dan Evaluasi
				Kepala Bagian Penelahaan Hukum
				Kepala Bagian Mutasi
				Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
				Kepala Biro Umum

Keterangan
* Berakhir masa jabatan: 20 April 2018
** Mulai menjabat komite audit: 26 April 2018

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Independensi anggota Komite Audit tertuang dalam Pedoman Kerja *(Charter)* Komite Audit, yaitu bahwa anggota Komite Audit harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup dalam membaca dan memahami Laporan Keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Mampu berkomunikasi secara efektif;
6. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
8. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir;
9. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada BUMN/Perusahaan lain;
10. Tidak mempunyai:
    a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama Perseroan, dan atau
    b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Semua anggota Komite Audit tidak mempunyai afiliasi dengan anggota Komite Audit lainnya, dengan Komite Risiko Pengembangan dan GCG, dengan Direksi, dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Independensi Komite Audit ditetapkan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya atau hubungan dengan pihak lain secara independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran.

Dasar perusahaan yang secara material dapat mengganggu objektivitas dan kemandirian tugas Komite Audit yang dijalankan untuk kepentingan perusahaan. Antar-anggota Komite Audit serta antara anggota Komite Audit, dengan anggota Komite Risiko Pengembangan dan GCG, dengan Direksi, dengan Dewan Komisaris dan

Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Surat Pernyataan Independensi Potensi Benturan Kepentingan Komite Audit	
Ihsan Setiadi Latief * Made Arya Wijaya ** Yuni Suryanto ** Abu Bakar M. Asawir Harahap	a. Tidak memiliki keterikatan keuangan, kepengurusan, dan/atau kepemilikan saham. b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan. c. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Dewan Komisaris atau dengan Direksi, Komite yang lain dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. d. Tidak merangkap sebagai anggota komite pada perusahaan lain. e. Jika anggota Komite Audit berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Audit berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan. f. Tidak memiliki aktivitas sebagai berikut: • menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah; • jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan dengan Perusahaan; • menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada pengawasan sebagai Komite Audit PT Bio Farma (Persero).

Keterangan
* Berakhir masa jabatan: 20 April 2018
** Mulai menjabat komite audit: 26 April 2018

HUBUNGAN AFILIASI KOMITE AUDIT
HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Hingga 31 Desember 2018, seluruh anggota Komite Audit Bio Farma tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan: Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Komite Audit lainnya.

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan Sebagai Komite Audit	Hubungan Keluarga dengan								Hubungan Keuangan dengan							
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Komite Lainnya		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Komite Lainnya	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Made Arya Wijaya **	Ketua	26 April 2018 s/d 20 April 2023		√		√		√		√		√		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief *	Wakil Ketua Merangkap Anggota	30 Sep 2015 - 20 April 2018		√		√		√		√		√		√		√		√
Yuni Suryanto **	Wakil Ketua Merangkap Anggota	26 April 2018 s/d 20 April 2023		√		√		√		√		√		√		√		√
M. Asawir Harahap (Pihak Independen)	Anggota	30 Sep 2015 - 2 Juni 2017, 3 Juni 2017 - 25 April 2018, 26 April 2018 - 2 Juni 2020		√		√		√		√		√		√		√		√
Priyatno (Pihak Independen)	Anggota	Mei 2017 - 25 April 2018, 26 April 2018 - Mei 2020		√		√		√		√		√		√		√		√

* Berakhir masa jabatan: 20 April 2018
** Mulai menjabat sebagai Komite Audit: 26 April 2018

KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, PENGURUS PARTAI DAN SEBAGAI PENGURUS PARTAI

Hingga 31 Desember 2018, seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki saham di PT Bio Farma (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain dan Perusahaan serta tidak ada kepemilikan saham secara pribadi maupun keluarga.

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan Sebagai Komite Audit	Kepemilikan Saham (Lembar)												Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun perusahaan afiliasi		Tidak Menjabat Sebagai Pengurus Partai Politik, Pejabat dan Pemerintah		Tidak Menjabat Sebagai Komite Audit di Perusahaan lain	
			Pribadi pada PT Bio Farma (Persero)		Pribadi pada BUMN lain		Perusahaan Lain		Keluarga pada PT Bio Farma (Persero)		Keluarga pada BUMN lain		Keluarga pada Perusahaan lain							
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Made Arya Wijaya **	Ketua	26 April 2018 s/d 20 April 2023		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief *	Wakil Ketua Merangkap Anggota	30 Sep 2015 - 20 April 2018		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Yuni Suryanto **	Wakil Ketua Merangkap Anggota	26 April 2018 s/d 20 April 2023		√		√		√		√		√		√		√		√		√
M. Asawir Harahap (Pihak Independen)	Anggota	30 Sep 2015 - 2 Juni 2017, 3 Juni 2017 - 25 April 2018, 26 April 2018 - 2 Juni 2020		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Priyatno (Pihak Independen)	Anggota	Mei 2017 - 25 April 2018, 26 April 2018 - Mei 2020		√		√		√		√		√		√		√		√		√

Keterangan
* Berakhir masa jabatan: 20 April 2018
** Mulai menjabat sebagai Komite Audit: 26 April 2018

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit *(Audit Committee Charter)* yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2014. Piagam Komite Audit berisi latar belakang, visi, misi, maksud dan tujuan, kedudukan, keanggotaan, hak dan kewenangan, tugas dan tanggung jawab, hubungan dengan pihak yang terkait, rapat, laporan, serta konflik dan kode etik sebagai pedoman bagi Komite Audit.

Berdasarkan Piagam Komite Audit (*Charter* Komite Audit), Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

TUGAS POKOK KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Tugas pokok Komite Audit adalah sebagai berikut:
1. membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas ekternal auditor dan internal auditor;
2. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal;
3. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

4. memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan perusahaan;
5. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris serta tugas-tugas dewan komisaris lainnya;
6. menyusun jenis dan jumlah gaji atau honorarium tunjangan dan fasilitas yang sudah/akan diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan Dewan Komisaris kepada RUPS;
7. melakukan evaluasi dan analisis atas sistem penggajian, honorarium tunjangan fasilitas yang sudah/akan diberikan kepada level manajemen dan karyawan.

Komite Audit juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

1. melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan serta RJPP, RKAP, Laporan Manajemen Perusahaan dan informasi lainnya;
2. melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kegiatan Perusahaan;
3. melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;
4. mengkaji kecukupan fungsi audit internal termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan, dan penugasan yang telah dilaksanakan;
5. mengkaji kecukupan fungsi audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.

MELAKUKAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH DEWAN KOMISARIS NAMUN TIDAK SEBATAS PADA:

1. menyusun dan mereview secara berkala Charter Komite Audit;
2. melakukan penelaahan atas informasi mengenai BUMN, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Angaran Perusahaan, Laporan Manajemen dan informasi lainnya;
3. melakukan penelaahan atas ketaatan BUMN terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kegiatan BUMN;
4. melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN;
5. menggkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan;
6. mengkaji kecukupan fungsi audit eksternal termasuk didalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.

HAK DAN KEWENANGAN KOMITE AUDIT

1. Kepada Anggota Komite Audit baru diberikan orientasi atau program pengenalan mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite Audit.
2. Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Komite Audit, berdasarkan Surat Tugas dari Komisaris, memiliki hak akses atas informasi yang ada di Perusahaan dari Direksi, SPI dan semua satuan organisasi perusahaan. Jika terjadi kasus/indikasi penyimpangan komite audit perlu meneliti/klarifikasi kasus-kasus tersebut.
5. Komite Audit dengan persetujuan Komisaris dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perseroan.

Atas setiap penugasan yang diberikan, Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komite.

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka disusun Pedoman Kerja Komite Audit yang dimutakhirkan dan disahkan terakhir oleh Dewan Komisaris pada tanggal 1 Juli 2014. Pedoman Kerja tersebut mencakup struktur keanggotaan, persyaratan keanggotaan termasuk persyaratan kompetensi dan independensi, tugas, tanggung jawab dan wewenang, serta rapat, pelaporan dan anggaran.

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT PADA TAHUN 2018

Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman Kerja Komite Audit serta Rencana Kerja Komite Audit (RKKA) yang disetujui Dewan Komisaris. Realisasi pelaksanaan tugas Komite Audit di tahun 2018 di antaranya:

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
1.	2 Januari 2018	Laporan Kegiatan Komite Audit PT Bio Farma (Persero) Triwulan IV Tahun 2017	
2.	18 – 19 Januari 2018	Rapat Kerja PT Bio Farma (Persero) Tahun 2018	
3.	26 Januari 2018	Rapat dengan SPI : • Pembahasan laporan keuangan PT Bio Farma Tahun 2017 (unaudited) • Pembahasan laporan hasil pemeriksaan SPI	• Komite Audit menyarankan untuk segera menjalankan fungsi ERP, yang salah satunya dapat membaca laporan keuangan secara real time. • Pajak dibayar dimuka agak tinggi restitusi lama, sehingga dana Perusahaan tertanam di pajak padahal seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan. • Rasio keuangan ada penurunan di aspek rentabilitas dan tingkat kesehatan Perusahaan walaupun skor meningkat namun masih di kategori "AA". a. LHP atas PKPT No.05 Kegiatan Divisi Pengadaan & Unit Kerja yang mempunyai peran penting dalam Pengendalian & Percepatan Proyek • Atas setiap proyek yang direncanakan harus dilengkapi dengan FS. • Sebaiknya disediakan waktu yang memadai untuk membuat perencanaan, penyiapan FS dan proses lelang di tahun sebelumnya. • Agar dipikirkan juga optimasi terhadap investasi lahan sebelum digunakan. b. LHP atas PKPT No.07 Kegiatan Divisi Pengadaan (Bagian Penunjang Pembelian) • Langkah yang baik untuk mengingatkan Divisi Logistik terkait kelengkapan impor barang komplementer dan agar terus dipantau tindaklanjutnya. Jangan sampai API-P yang sudah dimiliki Bio Farma dicabut/dibekukan. • Terkait waktu penerbitan faktur pajak yang mundur dan berpotensi timbulnya kerugian agar terus menerus dipantau langkah perbaikannya jangan sampai menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. c. LHP atas PKPT No.08 Kegiatan Divisi Matrix Riset & Penelitian • Divisi Matrix & Pengembangan agar lebih terdorong untuk melakukan riset-riset terhadap produk-produk yang dapat dihasilkan secara mandiri oleh Perusahaan. • Kegiatan riset didorong juga dalam melakukan percepatan sehingga produk-produk yang akan diproduksi dalam skala besar dapat dijual dengan harga yang bersaing dibandingkan dengan produsen lainnya d. LHP atas PKPT No.08 Kegiatan Divisi Perencanaan Produksi & Manajemen Persediaan terkait Pengelolaan Barang Persediaan di Bagian • Penerapan inventory management agar terus dikawal • Go Live MRP agar terus diupayakan selesai 2018 dan terus dipantau perkembangannya. • Terkait formula agar dilakukan pengecekan berkala dan kesiapannya. • Diusulkan dilakukan rapat progres implementasi ERP-MRP untuk percepatan penerapannya.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
4.	23 Februari 2018	Rapat dengan SPI : • Pembahasan hasil general audit atas laporan keuangan PT Bio Farma tahun buku 2017 bersama KAP • Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2017	a. Sebaiknya ada 1 Bagian khusus yang menangani tata naskah. b. SPI berdasarkan fungsinya sebaiknya tidak terlibat secara langsung dalam operasional. SPI dapat membantu melakukan monitoring terhadap temuan-temuan di lapangan. c. Audit operasional yang dilakukan Bio Farma sudah cukup bagus, namun sebaiknya saat audit lebih sering untuk terjun langsung ke lapangan guna melihat secara langsung kendala-kendala riil yang ada di lapangan. d. Untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan, sebaiknya dilakukan audit pada proses perencanannya termasuk melihat dari sisi risikonya dan dilakukan pengawalan terhadap kegiatan tersebut. e. Pada umumnya hasil evaluasi SPI atas Sistem Pengendalian Intern secara Entitas sudah cukup baik, namun dari hasil evaluasi terkait dengan kegiatan pemantauan proses bisnis yang tercatat dalam laporan bahwa perusahaan sedang merancang atau menyusun sistem yang memisahkan peran assurance, yaitu assurance yang terkait mutu akan ditangani oleh QA dan yang non mutu dipisahkan dari kegiatan fungsional SPI sesuai dengan struktur organisasi PT Bio Farma (Persero) terbaru, dimana ditangani oleh Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko. • Agar dilakukan evaluasi IT (Sitem ERP) agar diketahui permasalahan-permasalahan yang terjadi, untuk mengetahui perkembangannya dan sebagai bahan penjelasan kepada Dewan Komisaris secara lebih lengkap. • Agar dilakukan rekonsiliasi atas piutang yang tidak teridentifikasi.
5.	23 Februari 2018	Evaluasi Komite Audit atas Laporan Keuangan PT Bio Farma (Persero) yang berakhir per 31 Desember 2017 (Audited)	
6.	6 Maret 2018	Evaluasi Komite Audit atas Laporan Manajemen Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Tahun 2017 (Audited)	
7.	12 Maret 2018	Rapat dengan SPI : • Pembahasan hasil review atas program ERP	Secara umum ERP telah berfungsi lebih baik dibandingkan tahun 2016, dengan modul-modul procurement, inventory sales, finance dll, walaupun terdapat proses yang belum terakomodir sehingga menggunakan proses manual dan beberapa SOP belum disusun secara lengkap.
8.	12 Maret 2018	Evaluasi Komite Audit atas kinerja KAP Djoemarma & Rekan dan usulan penunjukan KAP untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2018	
9.	27 Maret 2018	Rapat pembahasan laporan keuangan jan-feb 2018	KAP diminta untuk melakukan audit khusus terhadap IT dan telah dilakukan secara terpisah, begitu pula laporan yang disajikan akan terpisah.
10.	27 Maret 2018	Evaluasi Komite Audit atas Laporan Keuangan PT Bio Farma (Persero) yang berakhir per 28 Februari 2018	

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
11.	11 April 2018	Rapat pembahasan limit fasilitas KMK Bank Mandiri	Komite Audit memandang terkait dengan penambahan kontrak dengan pemerintah atas ORI difteri serta isu meningkatnya dividen kepada pemerintah, maka kenaikan limit fasilitas Kredit Modal Kerja Bank Mandiri ini dinilai memang diperlukan. Manajemen diharapkan dapat menyelesaikan administrasi yang diperlukan sebelum waktu pembayaran dividen ditetapkan.
12.	11 April 2018	Permohonan persetujuan tambahan limit Kredit Modal Kerja Bank Mandiri Tahun 2018-2019 dan mengagunkan aktiva tetap perusahaan.	
13.	27 April 2018	• Rapat paparan gambaran umum kegiatan pemasaran oleh Direktur Keuangan, paparan kegiatan masing-masing divisi dibawah Direktorat Pemasaran oleh Kepala Divisi Pemasaran & Penjualan Domestik, Kepala Divisi Pemasaran & Penjualan Internasional serta Kepala Divisi Unit Klinik & Imunisasi. • Rapat pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan I Tahun 2018 dan rencana Pemasaran tahun 2018.	• Pola/teknik pelaporan disarankan untuk dibuat berurut dan sistematis, dimulai dari posisi keuangan, neraca & laba rugi dilanjutkan dengan ratio, sisanya merupakan supporting (penjelasan per kelompok, per sektor, suplemen investasi, laporan keuangan PKBL) • Sebaiknya ditambahkan juga informasi mengenai target tiap triwulan, sehingga capaian laba diketahui. • Pencapaian triwulan I dianggap masih baik namun beberapa hal masih perlu ditingkatkan. • Terkait ERP/IT masih terdapat kelemahan sehingga belum sepenuhnya dapat diandalkan. • Sebaiknya laba usaha disajikan per triwulan. Dari laba usaha tersebut dapat dilakukan analisis perlu tidaknya ekspansi. • Sebaiknya mencari informasi mengenai peta dunia pervaksinan, sehingga dapat diketahui potensi pasar dan market sharenya. • Untuk Divisi Pemasaran dan Penjualan Domestik banyak potensi bagus yang ditawarkan. • Untuk Divisi Pemasaran dan Penjualan Internasional, Bio Farma melakukan upaya-upaya untuk menghindari negative base dunia internasional. Penjualan internasional mempunyai margin yang lebih besar, konsentrasinya juga seharusnya lebih besar. • Untuk Divisi Klinik & Imunisasi, sebaiknya perlu dipertimbangkan laporan keuangan dari sektor jasa ini untuk dibuat terpisah. Selain itu, KPI nya juga sebaiknya terpisah. Sedangkan untuk menjadi anak perusahaan, saat ini nampaknya belum perlu/belum siap untuk menjadi anak perusahaan.
14.	27 April 2018	Evaluasi atas Laporan Manajemen Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Triwulan I Tahun 2018	
15.	15 Mei 2018	Rapat pembahasan laporan hasil pemeriksaan triwulan I tahun 2018, yang terdiri dari : 1. Pemeriksaan operasional atas risiko keterlambatan proyek pembangunan gedung pada Divisi Produksi Vaksin Bakteri. 2. Pemeriksaan operasional atas Divisi Penjamin Mutu dan Regulasi terkait implementasi EQMS. 3. Pemeriksaan operasional atas Bagian Kemitraan. 4. Proses pemeriksaan tindak lanjut. 5. Audit eksternal kepabeanan bea cukai.	1. Pemeriksaan operasional atas risiko keterlambatan proyek pembangunan gedung pada Divisi Produksi Vaksin Bakteri a. Sebelum dibuat adendum, sebaiknya dilakukan telaahan terlebih dahulu. 2. Pemeriksaan operasional atas Divisi Penjamin Mutu dan Regulasi terkait implementasi EQMS a. Perlu dilakukan validasi terkait dengan kesisteman laporan karena terdapat beberapa custom yang bukan bawaan AXAPTA. b. Pengalokasian dan pekerjaan IT harus dilakukan berkoordinasi dengan bagian. Perubahan harus juga dipertimbangkan dari segi waktu dan biayanya. 3. Pemeriksaan operasional atas Bagian Kemitraan a. Harus melakukan pengecekan di kantor BPN terkait dengan sertifikat yang diagunkan. b. Diharapkan dilakukan monitoring terkait dengan piutang PTPN (sinergi BUMN) 11 M dan dilakukan rekonsiliasi antara PKBL dan mitra.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
16.	21 Mei 2018	Evaluasi atas Laporan Manajemen Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Periode Januari-April 2018	
17.	22 Mei 2018	Rapat paparan Laporan Manajemen Perusahaan per 30 April 2018, draft RJPP 2017-2021.	• Posisi keuangan perusahaan secara garis besar sudah cukup bagus. Namun, berhubung tidak ada perusahaan sejenis yang bisa digunkana sebagai pembanding Bio Farma, maka tidak dapat diketahu sejauh mana posisi Bio Farma diantara Perusahaan lainnya. • Untuk laporan keuangan bulanan sebaiknya dilihat trend per bulannya, untuk melihat pencapaiannya, dan selanjutnya dibandingkan dengan RKAP tahun berjalan dan RKAP tahun yang lalu. • Pajak dibayar dimuka Bio Farma tergolong relatif tinggi. • Diharapkan ada percepatan faktur penjualan ke Pemerintah dan dana segera cair sehingga likuiditas perusahaan semakin baik. • Terkait bulk polio type 2 kaitan dengan PSAK 14, sebaiknya dibuat penyisihannya secara bertahap karena dikhawatirkan menjadi obyek temuan KAP baru. Namun, di lapangan kendalinya masih belum ada kejelasan dari WHO terkait status bulk tersebut. • Kenaikan penjualan biasanya diikuti dengan kenaikan Beban Pokok Penjualan. Untuk Bio Farma agak sulit menghitung BPP karena masa produksi yang relatif lama, agak sulit menentukan cut off-nya sehingga kadangkala ada koreksi di akhir tahun. • Rasio keuangan sudah cukup bagus nemun perlu diperhitungkan untuk investasi bangunan dan mesin. • Mengingatkan kembali temuan KAP terkait IT, antara lain DRC dan IT di produksi yang beberapa masih manual. Agar ditentukan dahulu peta IT/arsitektur IT Bio Farma. • Perlu adanya kampanye terkait produk halal Bio Farma. • Draft laporan RJPP 2017-2022 dibuat 2 versi, yaitu versi penambahan tahun 2022 saja dan versi penyesuianan 2018-2022.
18.	22 Mei 2018	Laporan Kegiatan Komite Audit PT Bio Farma (Persero) Triwulan I Tahun 2018	
19.	31 Mei 2018	Rapat pembahasan TOR jasa audit KAP 2018.	Dasar penyelenggaran Rapat adalah hasil RUPS tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2017 tanggal 25 April 2018, bahwa untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan serta laporan keuangan program kemitraan & bina lingkungan PT Bio Farma tahun buku 2018 akan dipilih KAP yang baru. Dalam rapat tersebut dibuat beberapa persyaratan KAP dan akan diadakan beauty contest dan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Komite Audit dan manajemen Bio Farma yang terkait dengan minimal peserta 3 KAP.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
20.	26 Juni 2018	Progres Investasi PT Bio Farma (Persero) Tahun 2018	a. Mempercepat realisasi investasi terutama investasi bangunan sehingga peralatan pabrik yang sudah datang dapat segera dipasang guna pengembangan usaha perusahaan ke depan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RKAP. b. Memberikan keterangan yang mudah dimengerti terhadap proyek-proyek yang berpotensi batal. c. Meneliti dan mengkaji penyebab meningkatnya beban pokok penjualan untuk produk partnership dalam SM I tahun 2017 guna meningkatkan efisiensi perusahaan. d. Meningkatkan pengendalian intern IT pada ERP dan melaksanakan rekomendasi KAP tentang ERP guna memperoleh informasi data yang akurat. e. Mencari solusi untuk mendorong percepatan realisasi investasi terutama investasi bangunan sehingga peralatan pabrik yang sudah datang dapat segera dipasang guna pengembangan usaha perusahaan ke depan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RKAP.
21.	2 Juli 2018	Laporan Kegiatan Komite Audit PT Bio Farma (Persero) Triwulan II Tahun 2018	
22.	18 Juli 2018	Rapat pembahasan : • Laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) Semester I Tahun 2018 • RJPP 2018-2022	• Untuk pembayaran dari pemerintah, diharapkan dapat segera difakturkan karena pemerintah melakukan evaluasi tentang pembayaran setiap bulannya/indikator kinerja pemerintah. • Potensi pasar atas vaksin meningitis jangan hanya melihat potensi dalam negeri namun juga harus melihat kebutuhan dunia, minimal kebutuhan di Asia (Malaysia, Brunei dll). • Untuk analisa SWOT, mohon untuk dilakukan koreksi skala garis analisa dari kuadran SWOT. • Untuk strategi Perusahaan agar ditambahkan strategi marketing.
23.	18 Juli 2018	Evaluasi atas Laporan Kinerja Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Semester I Tahun 2018	
24.	18 Juli 2018	Laporan Pembahasan RJPP 2018-2022	
25.	18 Juli 2018	Laporan Pemilihan KAP yang akan melaksanakan jasa audit laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) untuk tahun buku 2018	
26.	19 Juli 2018	Rapat Beauty Contest, pemilihan KAP yang akan melaksanakan jasa audit laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) untuk tahun buku 2018.	Total peserta beuaty contest adalah 4 (empat) KAP yaitu: 1. Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih 2. Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan adalah partner dari BDO 3. Kantor Akuntan Publik Roebiandini dan Rekan 4. Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo adalah partner dari KRESTON

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
27.	20 Juli 2018	Rapat pembahasan laporan hasil pemeriksaan semester I tahun 2018	• ERP dan MRP sampai saat ini masih belum clear, Komite Audit akan melaporkan poin-poin penting dari hasil pemeriksaan atas MRP ini kepada Komisaris supaya selanjutnya bisa dibawa dalam Rapat Direksi dan Komisaris. • Mengusulkan ada kas kecil di Kantor Cabang Marketer. • Agar dilakukan review terhadap penurunan omset flubio 2017 dan 2018 jika dimungkinkan serta evaluasi meningitis. • Agar dilakukan review terhadap penjualan partenrship dan jasa kaitannya dengan beban pokok yang tinggi serta pengaruh terhadap laba kotor. • Poin-poin penting dari Hasil Pemeriksaan atas Pemasaran akan dilaporkan kepada Komisaris untuk selanjutnya bisa dibawa dalam Rapat Direksi dan Komisaris. • Komite Audit akan membaca dan mepelajari terlebih dahulu atas penyesuaian konten piagam SPI sebelum disahkan.
28.	27 Juli 2018	Evaluasi atas laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) Juli Tahun 2018	
29.	29 Agustus 2018	Rapat pembahasan laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) Januari – Juli tahun 2018	• Likuiditas perusahaan lebih banyak tersimpan dalam persediaan, hal ini terlihat posisi Acid Test Ratio dan Cash Ratio cukup rendah karena arus kas bersih dari aktivitas operasional lebih tinggi. • Penjualan masih tercapai, walaupun masih ada kendala di sektor ekspor. • Terkait dengan JV tersebut diharapkan Bio Farma sudah siap dengan IT karena akan muncul laporan konsolidasi. Dengan adanya laporan konsolidasi maka laporan keuangan akan lebih spesifik.
30.	24 September 2018	Rapat pembahasan laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) Januari s.d Agustus tahun 2018	• Piutang usaha nilainya besar karena penagihan ke pemerintah dilakukan secara bertahap. Agar segera diselesaikan agar tidak terjadi carry over ke tahun depan. • Persediaan cukup tinggi karena persediaan bahan baku untuk Bulk HbsAg untuk stok sampai dengan 2020 dikarenakan pabrik bulk di Korea akan ditutup. • Aset tidak lancar masih di bawah target RKAP karena rendahnya pencapaian investasi. • Rasio masih baik, diharapkan 4 bulan ke depan laba yang diharapkan dapat dicapai (sesuai prognosa). Likuiditas apabila dibandingkan dengan bulan Juli 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan RKAP 2018. Rentabilitas masih rata-rata tercapai. Solvabilitas masih cukup baik. • RKAP 2019 harus usdah masuk ke Kementerian BUMN pada Oktober 2018.
31.	24 September 2018	Evaluasi atas laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) s.d agustus tahun 2018	
32.	27 September 2018	Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit PT Bio Farma (Persero) 2019	
33.	1 Oktober 2018	Laporan Kegiatan Komite Audit PT Bio Farma (Persero) Triwulan III	

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
34.	15 Oktober 2018	Rapat pembahasan RKAP 2019	• Apabila dilihat dari neraca pertumbuhan yang cukup besar yaitu piutang ekspor, diharapkan lebih diperhatikan di penagihan (collection period) atas piutang ekspor tersebut. • Untuk rapat dengan pemegang saham, diharapkan disiapkan planning B karena dengan bottom line yang hanya 1%, sulit untuk mempertahankan nilai tersebut. • Untuk menjadi perhatian perbedaan antara RJPP 2019 dan RKAP 2019, serta penjualan yang turun. Agar dibuatkan alasan gap sehingga tidak menjadi pertanyaan dari pemegang saham. • Ada beberapa yang harus diperhatikan antara lain : a. Asumsi ekonomi makro terhadap USD 1,00 tercantum Rp 13.500,- tapi posisi saat ini untuk USD 1,00 menjadi Rp 15.241,- b. Tingkat inflasi suku bunga SBN c. Tingkat kesehatan perusahaan saat ini masih wajar.
35.	16 Oktober 2018	Telaah atas rancangan kerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) tahun 2019	
36.	25 Oktober 2018	Rapat pembahasan laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) Triwulan III Tahun 2018 dan laporan hasil pemeriksaan Triwulan III 2018	• Total aset lancar naik dari target RKAP 2018, tetapi lebih kecil dari atrget pada periode yang sama dilihat dari persediaan yang naik 2 (dua) kali lipat. • Diharapkan pada akhir tahun penjualan lebih tinggi dan barang-barang persediaan yang akan datang di akhir tahun apabila memungkinkan dapat digeser ke bulan Januari 2019. • Di dalam Laporan laba rugi, penjualan meningkat dari target RKAP 2018 tetapi pada periode yang sama tahun sebelumnya lebih rendah. • KPI Inventory Turn Over belum tercapai karena dampak tingginya persediaan, begitu juga dengan penyerapan CAPEX. Hal ini dipengaruhi oleh investasi yang lambat.
			• Agar segera dilengkapi dengan kajian serta kebijakan yang saat ini sedang direview oleh BPKP terkait pengadaan barang di atas 10M. • Komite Audit agar dapat diberikan laporan manajemen risiko terkait MTN dan Kredit Investasi • Perusahaan agar mengantisipasi keterlambatan proyek dan keterlambatan percepatan produk baru, karena dampaknya cukup besar terhadap kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban MTN tersebut.
37.	25 Oktober 2018	Evaluasi atas laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) Triwulan III 2018	
38.	12 November 2018	Rapat pembahasan general audit atas laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) Tahun 2018 (*Entry Meeting* KAP)	Audit akan langsung dibantu oleh Divisi terkait dan untuk permintaan dokumentasi akan dikoordinir melalui SPI.
39.	26 November 2018	Rapat pembahasan laporan kinerja perusahaan januari-oktober 2018	• Persediaan yang tinggi berdampak pada utang usaha. Persediaan tinggi dan investasi proyek yang belum selesai serta bunga yang terus berjalan dapat menjadikan pembebanan yang melebihi target. • BPP terhadap penjualan dilihat secara keseluruhan adanya sedikit pertumbuhan. • Rasio keuangan sudah baik, likuid.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
40.	26 November 2018	Evaluasi atas laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) periode 1 Januari 2018 s.d 31 Oktober 2018	
41.	10 Desember 2018	Rapat pembahasan laporan interm KAP (kemajuan I)	Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh KAP, sebagian besar sudah closed. Akan tetapi sistem selalu ada dinamika karena transaksi sistem dan manual berbeda.
42.	26 Desember 2018	Evaluasi atas laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) untuk periode 1 Januari 2018 s.d 30 Nopember 2018	
43.	28 Desember 2018	Rapat pembahasan laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) Nopember 2018 dan rencana PKPT 2019	• Bio Farma diusulkan untuk meng-hire konsultan terkait pembuatan kajian atas investasi telur SPF. Kajian atas investasi fasilitas telur untuk vaksin campak ini dimaksudkan untuk meningkatkan konten lokal dan sebagai bentuk kemandirian di masa depan. Kemudian dibuat surat terpisah ke pemegang saham karena investasi tersebut dilakukan di luar RKAP. • Sehubungan dengan persediaan bahan baku yang tinggi diperlukan kehati-hatian terhadap dampak yang diakibatkan hal tersebut. Diharapkan dikaji kembali terkait dengan pembelian bahan baku, stock opname, penyimpanan, dan pemakaian bahan baku tersebut. Apabila dilihat dari pergerakan bulan Oktober ke November, kenaikan persediaan naik tajam dan KMK juga mengalami kenaikan yang sama sehingga berefek pada beban bunga yang tinggi. • Diperhatikan ED dari persediaan yang sudah dibeli dan dikaji lebih mendalam dampak dari persediaan yang tinggi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari laporan arus kas di mana penerimaan dan pembayaran untuk vendor dan karyawan menghasilkan posisi minus di mana diperlukan KMK.
			• Diperhatikan penggantian mitra lain untuk pabrik bulk yang akan tutup. Proses uji klinis dapat dimulai dari sekarang untuk pabrik lain dan dibuat timeline. • Apabila ingin bersaing dengan klinik atau perusahaan sejenis, harap diperhatikan dengan pesaing (dilakukan pemetaan) untuk bisa bersaing dengan klinik-klinik swasta. • Pemeriksaan akan dilakukan pada Divisi Manajemen Produksi dan Persediaan, yang diharapkan persediaan tidak akan over seperti saat ini yang terjadi pada persediaan Bulk HBSag. • Aspek pertimbangan dalam melakukan pemeriksaan salah satunya adalah peta risiko. SPI mengambil risiko yang muncul dari peta risiko tersebut dan membuat prioritas yang dapat dijadikan PKPT. Tahun 2019, SPI mulai menggunakan risk based audit dilihat dari mitigasinya.

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE AUDIT

Ketentuan Rapat Komite Audit tercantum dalam Pedoman Kerja *(Charter)*Komite Audit. Rapat Komite Audit terdiri dari Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komite Audit dan rapat khusus yang hanya dihadiri oleh anggota Komite Audit. Kedua jenis rapat tersebut dapat mengundang divisi atau pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala, baik berupa rapat internal, atau rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, Kepala SPI, Kepala Divisi atau Auditor Eksternal. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua yang hadir. Risalah rapat Komite Audit dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

Selama tahun 2018, Komite Audit mengadakan/mengikuti rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali berupa rapat internal, rapat dengan SPI, rapat dengan eksternal auditor, rapat dengan anggaran dan akuntansi, menghadiri rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi. Data kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan Sebagai Komite Audit	Rapat Komite Audit		
				Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Made Arya Wijaya **	Ketua Komite Audit	26 April 2018 s/d 20 April 2023	16	6	37,50%
2	Ihsan Setiadi Latief *	Wakil Ketua merangkap Anggota	30 Sep 2015 - 20 April 2018	6	5	83,33%
3	Yuni Suryanto **	Wakil Ketua Merangkap Anggota	26 April 2018 s/d 20 April 2023	16	7	43,75%
4	Priyatno	Anggota (Eksternal)	Mei 2017-25 April 2018, 26 April 2018-Mei 2020	22	22	100,00%
5	M. Asawir Harahap	Anggota (Eksternal)	30 Sep 2015-2 Juni 2017, 3 Juni 2017-25 April 2018, 26 April 2018-2 Juni 2020	22	22	100,00%

Keterangan:
*Berakhir masa jabatan: 11 April 2018
**Mulai menjabat sebagai Komite Audit: 26 April 2018

PELAKSANAAN RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2018, rincian tanggal, agenda rapat, keputusan, tempat dan nama peserta rapat Komite Audit sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Tempat	Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2018	
			Agenda	Peserta Rapat
1	18 – 19 Januari 2018	Harris Hotel & Covention Ciumbuleuit Bandung	Rapat Kerja PT Bio Farma (Persero) Tahun 2018	· Ihsan Setiadi Latief · M. Asawir Harahap · Priyatno
2	26 Januari 2018	Ruang Rapat Gedung Heritage PT Bio Farma (Persero)	Rapat dengan SPI : · Pembahasan laporan keuangan PT Bio Farma Tahun 2017 *(unaudited)* · Pembahasan laporan hasil pemeriksaan SPI	· Ihsan Setiadi Latief · M. Asawir Harahap · Priyatno
3	23 Februari 2018	Ruang Rapat Gedung Heritage PT Bio Farma (Persero)	Rapat dengan SPI : · Pembahasan hasil general audit atas laporan keuangan PT Bio Farma tahun buku 2017 bersama KAP · Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2017	· M. Asawir Harahap · Priyatno

No	Tanggal Rapat	Tempat	Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2018	
			Agenda	Peserta Rapat
4	12 Maret 2018	Ruang Rapat Gedung Heritage PT Bio Farma (Persero)	Rapat dengan SPI : • Pembahasan hasil *review* atas program ERP	• Ihsan Setiadi Latief • M. Asawir Harahap • Priyatno
5	26 Maret 2018	Ruang Rapat Gedung Heritage PT Bio Farma (Persero)	Rapat pembahasan laporan keuangan Jan-Feb 2018	• Ihsan Setiadi Latief • M. Asawir Harahap • Priyatno
6	11 April 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti Lt.7 Jakarta	Rapat pembahasan *limit* fasilitas KMK Bank Mandiri	• Ihsan Setiadi Latief • M. Asawir Harahap • Priyatno
7	27 April 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti Lt.7 Jakarta	• Rapat paparan gambaran umum kegiatan pemasaran oleh Direktur Keuangan, paparan kegiatan masing-masing divisi dibawah Direktorat Pemasaran oleh Kepala Divisi Pemasaran & Penjualan Domestik, Kepala Divisi Pemasaran & Penjualan Internasional serta Kepala Divisi Unit Klinik & Imunisasi. • Rapat pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan I Tahun 2018 dan rencana Pemasaran tahun 2018.	• Made Arya Wijaya • M. Asawir Harahap • Priyatno
8	15 Mei 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti Lt.7 Jakarta	Rapat pembahasan laporan hasil pemeriksaan triwulan I tahun 2018, yang terdiri atas: • pemeriksaan operasional atas risiko keterlambatan proyek pembangunan gedung pada Divisi Produksi Vaksin Bakteri; • pemeriksaan operasional atas Divisi Penjamin Mutu dan Regulasi terkait implementasi EQMS; • pemeriksaan operasional atas Bagian Kemitraan; • proses pemeriksaan tindak lanjut; • audit eksternal kepabeanan bea cukai.	• Made Arya Wijaya • M. Asawir Harahap • Priyatno
9	22 Mei 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti 8Lt.7 Jakarta	Rapat paparan Laporan Manajemen Perusahaan per 30 April 2018, draft RJPP 2017-2021.	• Made Arya Wijaya • M. Asawir Harahap • Priyatno
10	31 Mei 2018	Gedung Admin II Lt.5 PT Bio Farma (Persero)	Rapat pembahasan TOR jasa audit KAP 2018	• Yuni Suryanto • M. Asawir Harahap • Priyatno
11	26 Juni 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti Lt.7 Jakarta	Rapat pembahasan progress investasi 2018	• Yuni Suryanto • M. Asawir Harahap • Priyatno
12	18 Juli 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti Lt.7 Jakarta	Rapat pembahasan: • Laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) Semester I Tahun 2018 • RJPP 2018-2022	• Yuni Suryanto • M. Asawir Harahap • Priyatno
13	19 Juli 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti Lt.7 Jakarta	Rapat *Beauty Contest*, pemilihan KAP yang akan melaksanakan jasa audit laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) untuk tahun buku 2018.	• M. Asawir Harahap • Priyatno
14	20 Juli 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti Lt.7 Jakarta	Rapat pembahasan laporan hasil pemeriksaan semester I tahun 2018	• Made Arya Wijaya • Yuni Suryanto • M. Asawir Harahap • Priyatno
15	29 Agustus 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti Lt.7 Jakarta	Rapat pembahasan laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) Januari – Juli tahun 2018	• M. Asawir Harahap • Priyatno
16	24 September 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti Lt.7 Jakarta	Rapat pembahasan laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) Januari s.d Agustus tahun 2018	• Made Arya Wijaya • M. Asawir Harahap • Priyatno
17	15 Oktober 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti Lt.7 Jakarta	Rapat pembahasan RKAP 2019	• Yuni Suryanto • M. Asawir Harahap • Priyatno
18	25 Oktober 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti Lt.7 Jakarta	Rapat pembahasan laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) Triwulan III Tahun 2018 dan laporan hasil pemeriksaan Triwulan III 2018	• M. Asawir Harahap • Priyatno

No	Tanggal Rapat	Tempat	Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2018	
			Agenda	Peserta Rapat
19	12 November 2018	Ruang Rapat Gedung Heritage PT Bio Farma (Persero)	Rapat pembahasan general audit atas laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) Tahun 2018 (*Entry Meeting* KAP)	· M. Asawir Harahap · Priyatno
20	26 November 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti Lt.7 Jakarta	Rapat pembahasan laporan kinerja perusahaan Januari-Oktober 2018	· M. Asawir Harahap · Priyatno
21	10 Desember 2018	Ruang Rapat Gedung Pakarti Lt.7 Jakarta	Rapat pembahasan laporan interm KAP (kemajuan I)	· Made Arya Wijaya · Yuni Suryanto · M. Asawir Harahap · Priyatno
22	28 Desember 2018	Ruang Rapat Gedung Heritage PT Bio Farma (Persero)	Rapat pembahasan laporan kinerja perusahaan PT Bio Farma (Persero) Nopember 2018 dan rencana PKPT 2019	· Yuni Suryanto · M. Asawir Harahap · Priyatno

PENCAPAIAN KPI KOMITE AUDIT

Tata Cara Penilaian Kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris. Hasil pencapaian KPI Komite Audit di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rapat Internal			
	Evaluasi kebijakan, laporan manajemen, laporan keuangan, RJPP, RKAP dan masalah-masalah khusus	12	16	
2	Rapat dengan Auditor Eksternal			
	Pembahasan Laporan audit dengan KAP (eksternal auditor)	4	2	
3	Rapat dengan Direktorat Keuangan			
	Pembahasan RKAP dan RJPP	2	3	
	Pembahasan Laporan Manajemen dan Laporan Keuangan (triwulanan, semester, tahunan)	4	10	
	Pembahasan laporan keuangan (audited)	1	1	
	Pembahasan kebijakan dan masalah khusus	2	1	
4	Rapat dengan SPI			
	Pembahasan LHP (triwulanan)	5	4	
	Pembahasan Penilaian Internal Control	1	4	
	Pembahasan Evaluasi Investasi	1	1	
5	Rapat dengan Direktorat Pemasaran			
	Pembahasan Permasalahan Pemasaran		1	
6	Rapat dengan Divisi IT			
	Pembahasan Permasalahan IT		1	
7	Rapat dengan Dewan Komisaris			
	Pembahasan dalam rangka pengesahan laporan tahunan dan perhitungan tahunan (audited)	2	2	
	Pembahasan RKAP dan RJPP	2	5	
	Pembahasan laporan manajemen (triwulanan, semester, tahunan)	4	8	
	Pembahasan kebijakan dan masalah khusus	2	7	
8	Kunjungan Kerja dan Capacity Building			
	Untuk memahami bisnis perusahaan dilakukan perjalanan dinas dalam atau luar negeri apabila dianggap perlu	2	-	
	Untuk meningkatkan kompetensi dilakukan perjalanan dinas dalam atau luar negeri untuk menghadiri seminar/workshop atau studi banding pada industri vaksin/ farmasi	2	-	
Total		**46**	**66**	**143,48**

REMUNERASI KOMITE AUDIT

Penentuan jumlah remunerasi Komite Audit ditetapkan dengan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri BUMN No: PER12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur bahwa penghasilan anggota Komite Audit, yakni berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut;
2. Remunerasi bagi Komite Audit ditetapkan secara internal oleh Dewan Komisaris Bio Farma dan diatur lebih lanjut dalam SK Dekom No: KEP-15/DK/BF/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris No: KEP-07/DK/BF/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015, diperbaharui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-10/DK/BF/07/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-08/DK/BF/07/2017 tanggal 10 Juli 2017 Tentang Penetapan Penghasilan Bagi Anggota Komite Audit Dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG PT Bio Farma (Persero).

Remunerasi yang diterima oleh Komite Audit terdiri atas honorarium dan fasilitas lainnya seperti asuransi. Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris tidak diberikan honorarium bulanan dan fasilitas. Anggota Komite Audit yang tidak berasal dari Dewan Komisaris diberikan honorarium bulanan yang besarnya ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit untuk melaksanakan tugas menjadi beban perusahaan. Besaran remunerasi Komite Audit tersebut ditentukan melalui RUPS dengan perincian sebagai berikut:

PENETAPAN PENGHASILAN BAGI ANGGOTA KOMITE AUDIT

No	Jenis Penghasilan	Besaran
1	Honorarium bulanan bagi anggota Komite Audit	20% x gaji Direktur Utama = Rp22.000.000
2	Tunjangan : 1. Tunjangan Hari Raya 2. Tunjangan Komunikasi 3. Santunan Purna Jabatan 4. Tunjangan Transportasi	1. Tidak Ada 2. Tidak Ada 3. Tidak Ada 4. Tidak Ada
3	Fasilitas Fasilitas Kesehatan	Tidak ada
4	Tantiem / Insentif Kinerja	Tidak ada

REMUNERASI KOMITE AUDIT TAHUN 2018

Dalam Rupiah

Nama	Jabatan	Masa Jabatan Sebagai Komite Audit	Gaji per Tahun	Tunjangan per Tahun	Gaji Bersih per Tahun	Tantiem + THR	Jumlah
			1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4
Made Arya Wijaya **	Ketua	26 April 2018 s/d 20 April 2023	Rp -	Rp-	Rp-	Rp -	Rp -
Ihsan Setiadi Latief *	Wakil Ketua Merangkap Anggota	30 Sep 2015 - 11 April 2018	Rp -	Rp-	Rp-	Rp -	Rp -
Yuni Suryanto **	Wakil Ketua Merangkap Anggota	26 April 2018 s/d 20 April 2023	Rp -	Rp-	Rp-	Rp -	Rp -
M. Asawir Harahap (Pihak Independen)	Anggota	30 Sep 2015 - 2 Juni 2017, 3 Juni 2017 - 25 April 2018, 26 April 2018 - 2 Juni 2020	Rp264.000.000	Rp-	Rp-	Rp -	Rp264.000.000
Priyatno (Pihak Independen)	Anggota	Mei 2017 - 25 April 2018, 26 April 2018 - Mei 2020	Rp264.000.000	Rp-	Rp-	Rp -	Rp264.000.000
TOTAL			**Rp528.000.000**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 528.000.000**

***** Berakhir masa jabatan: 11 April 2018
****** Mulai menjabat sebagai Komite Audit: 26 April 2018

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Dalam rangka peningkatan kompetensi diri bagi anggota Komite Audit dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri dan menunjang pelaksanaan tugas Komite Audit.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Audit.

KOMITE NOMINASI DAN/ATAU REMUNERASI

Terhitung per 31 Desember 2018, Bio Farma tidak memiliki Komite Nominasi dan/atau Remunerasi. Dengan demikian, Bio Farma tidak menyajikan informasi nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan/atau Remunerasi. Demikian juga Perusahaan tidak menyajikan independensi Komite Nominasi dan/atau Remunerasi, uraian tugas dan tanggung jawab, uraian pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan/atau Remunerasi pada tahun 2018, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Nominasi dan/atau Remunerasi, pernyataan adanya pedoman Komite Nominasi dan/atau Remunerasi dan kebijakan mengenai suksesi Direksi.

KOMITE-KOMITE LAIN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS YANG DIMILIKI OLEH BIO FARMA

KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Komite Manajemen Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma dibentuk untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam upaya melakukan identifikasi, pemetaan, analisis, dan mitigasi risiko atas seluruh proses bisnis Bio Farma yang ditujukan untuk mencegah dan meminimalisasi risiko. Selain itu, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG membuat laporan secara tertulis atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan kegiatan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dan tingkat pencapaian kinerjanya untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

SEJARAH SINGKAT PEMBENTUKAN KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Dalam rangka mengelola kegiatan usaha Bio Farma selain efisien, berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan pengendalian yang baik, dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya, maka dipandang perlu untuk membentuk Komite Risiko Bio Farma.

Komite Risiko PT Bio Farma (Persero) telah dibentuk sejak tahun 2009, sesuai dengan Surat Keputusan No.:KEP-033/DK/BF/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Komite Risiko.

Pada tahun 2012, penamaan Komite Risiko berubah menjadi Komite Risiko dan Nominasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/DK/BF/V/2012 tanggal 20-Jan-2012 tentang Pengangkatan Komite Risiko dan Nominasi PT Bio Farma (Persero).

Pada tahun 2013, penamaan Komite Risiko dan Nominasi berubah menjadi Komite Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.: KEP-11/DK/BF/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pengangkatan Komite RIsiko PT Bio Farma (Persero) Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero).

Pada tahun 2014, penamaan Komite Risiko berubah menjadi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.: KEP-02/DK/BF/I/2014 tanggal 15 Januari 2014.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 70 ayat 3, mewajibkan Dewan Komisaris membentuk komite lainnya selain Komite Audit yang berfungsi membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan di PT Bio Farma (Persero)
2. Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 Yang Diperbaharui Dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada BUMN Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada BUMN pasal 17 ayat 1 bahwa organ Dewan Komisaris terdiri dari:
    1. Sekretaris Dewan Komisaris, jika diperlukan
    2. Komite Audit
    3. Komite Lainnya, jika diperlukan
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG diatur secara dalam Pedoman Kerja Komite Risiko Pengembangan dan GCG. Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dibentuk Dewan Komisaris dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Risiko, Pengembangan dan GCG bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Risiko Pengembangan dan GCG diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal Februari 2014 tentang Pengangkatan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero) dan telah diperbaharui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018 tentang Perubahan Susunan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero).

Masa jabatan anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

KOMPOSISI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN & GCG

Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang berasal dari anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota dari pihak eksternal. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma tidak berasal dari karyawan Bio Farma dan tidak mempunyai benturan kepentingan, bukan pelanggan dan bukan vendor Bio Farma.

Per 31 Desember 2018, Komposisi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma adalah sebagai berikut:

PERIODE 1 JANUARI - 25 APRIL 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan Sebagai Komite Risiko, Pengembangan & GCG	KETERANGAN
1	Heridadi	Ketua	09 Juli 2015 - 08 Jan 2019	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016
2	H. M. Subuh	Wakil Ketua II merangkap Anggota	09 Juli 2015 - 22 Juni 2020	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/VII/2015, tanggal 09 Juli 2015, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016
3	Afrizal (Independen)	Anggota	04 Feb 2016 - 04 Feb 2019	SK Dekom No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-01/DK/BF/01/2017 Tanggal 16 Januari 2017
4	Judi Januardi Endjun (Independen)	Anggota	04 Feb 2016 - 04 Feb 2019	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/02/2016 tanggal 02 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016

PERIODE 26 APRIL - 31 DESEMBER 2018

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	KETERANGAN
1	Heridadi	Ketua	09 Juli 2015 - 08 Jan 2019	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018
2	Saud Usman *	Wakil Ketua I Komite Risiko, Pengembangan dan GCG	26/04/2018 s/d 20 April 2023	SK Pengangkatan Nomor: KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018
3	H. M. Subuh	Wakil Ketua II merangkap Anggota	09 Juli 2015 - 22 Juni 2020	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018
4	Afrizal (Independen)	Anggota	04 Feb 2016 - 04 Feb 2019	SK Dekom No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-01/DK/BF/01/2017 Tanggal 16 Januari 2017, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018
5	Judi Januardi Endjun (Independen)	Anggota	04 Feb 2016 - 04 Feb 2019	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/02/2016 tanggal 02 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018

NAMA, JABATAN DAN PERIODE JABATAN, RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Komposisi keanggotaan Komite Risiko, Pengembangan Dan GCG terdiri dari 5 (empat) orang, yaitu 3 (dua) orang Komisaris yang menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota, serta 2 (dua) orang pihak independen. Masa kerja Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit berlangsung selama 3 (tiga) tahun.

RIWAYAT SINGKAT KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

HERIDADI
KETUA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Profil Ketua Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dapat dilihat pada Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Dasar hukum penunjukan sebagai Ketua Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. Tidak memiliki rangkap jabatan. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi

SAUD USMAN NASUTION
WAKIL KETUA I MERANGKAP ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Profil Wakil Ketua I Merangkap Anggota Komite Profil Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dapat dilihat pada Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Dasar hukum penunjukan sebagai Wakil Ketua I Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris SK Pengangkatan Nomor: KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. Tidak memiliki rangkap jabatan. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

H.M. SUBUH
WAKIL KETUA II MERANGKAP ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Profil Wakil Ketua II Merangkap Anggota Komite Profil Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dapat dilihat pada Profile Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Dasar hukum penunjukan sebagai Wakil Ketua II Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang saham. Tidak memiliki rangkap jabatan. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

AFRIZAL ANGGOTA (INDEPENDEN)
ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta, Usia per 31 Desember 2018 adalah 58 tahun.Lahir di Jakarta 17 April 1960, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi (1985) dan lulus Pascasarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi FISIP UI (2002). Memiliki pengalaman banyak kerja sebagai Dosen Fakultas Ekonomi UI (1988-1989), Konsultan Akuntansi, Keuangan dan Auditor (1987-1990), Financial Controller (1990-1995), Asisten Direksi PT Tarnsweep International (1996-2000), General Manager Adm. & Keuangan PT SNC Lavalin TPS (2002-204), Konsultan Senior Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi UI (2003-2004), Manajer Audit Badan Audit Internal UI (2005-2008), Direktur Akuntansi UI (2008), Kepala Badan Audit Internal UI (2008-2014), Direktur Logistik UI (2015-2016). Ditunjuk sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma sejak tanggal 15 Januari 2014.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-01/DK/BF/01/2017 Tanggal 16 Januari 2017, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang Saham. Tidak memiliki rangkap jabatan. Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

JUDI JANUARDI ENDJUN ANGGOTA (INDEPENDEN)
ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, usia per 31 Desember 2018 adalah 53 tahun. Lahir tahun 1965 Kedokteran Universitas Padjajaran (1985), Diploma of Ultrasound, Universitas of Zagreh Croatia (1991), Spesialis 1 Obstetri & Ginekologi di Fakultas Kedokteran UI (1993), dan saat ini sedang mengambil gelar Magister Hukum UPN Veteran. Memiliki banyak pengalaman kerja sebagai Kepala Puskesmas Kec. Hato Builico Timor-Timor (1985-1987), Sekretaris Pendidikan S1 dan S2 Dep. OBGIN RSPAD/FK UPN Veteran, Ketua Unit Peristi RSPAD, saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Fetomaternal Dep. OBGIN RSPAD. Selain itu masih aktif sebagai dosen dan penguji dibeberapa beberapa Universitas ternama di Jakarta serta aktif menyusun buku kedokteran & buku awam. Ditunjuk sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma sejak tanggal 02 Februari 2015.

PENGHARGAAN

Pengabdian sebagai dokter Puskemas di Propinsi Timor-Timur (1987) dan Pengabdian 20 tahun sebagai PNS.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/DK/BF/02/2016 tanggal 02 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang Saham.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

1. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG harus memenuhi persyaratan:
   b. Memiliki integritas yang baik pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas sebagai Komite Risiko, Pengembangan dan GCG .
   c. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
   d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
   e. Mampu berkomunikasi secara efektif.

Anggota Komite Risiko, Pengembangan, dan GCG Bio Farma sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, hal ini dapat dilihat di bawah ini

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Heridadi	Ketua Komite Risiko, Pengembangan & GCG	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018	S1 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	Perwira TNI AD di Kesdam II/Sriwijaya dengan pangkat Letnan Satu CKM sebagai Dokter Pusat Latihan Tempur (Puslatpur).
			Sekolah Perwira Wajib Militer ABRI	Dokter di Direktorat Kesehatan TNI AD - Kesdam II/Sriwijaya
			S-2 Perencanaan dan Manajemen Kesehatan - Fakultas Pascasarjana UI	Wakil Komandan Batalyon Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrad
			Pendidikan Seskoad	Komandan Batalyon Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrad.
			Pendidikan Lemhannas	Komandan Kontingen Garuda XIV/A untuk tugas PBB di Bosnia Herzegovina
			Program S-3 di Fakultas Kedokteran UGM Di Bidang Biodefense	Kepala Kesehatan Kostrad
				Kepala Kesehatan Kodam Jaya
				Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan TNI AD
				Direktur Kesehatan TNI AD
				Kepala Pusat Kesehatan TNI
				Wakil Ketua Bidang Sosial PPAD Jakarta
				Ketua Umum Purna Warga Kesehatan TNI AD
				Ketua Ikatan Alumni FKUI 1977
Saud Usman Nasution*	Wakil Ketua I Merangkap Anggota	SK Pengangkatan Nomor: KEP-03/DK/BF/04/2018 Tanggal 26 April 2018	S1 Fakultas Hukum	Menjabat Berbagai Posisi Strategis Di Kepolisian Daerah (POLDA) & Kepolisian RI (POLRI)
				Komisaris PT Dahana BUMN
			S2, Fakultas Hukum,	Komisaris PT Cemindo Semen Merah Putih
			S3, Fakultas Hukum,	Komisaris Independen PT SLJ Global Tbk.,
			Pendidikan Polri Sespati Polri (Angakatan VII)	Komisaris PT Armina Reka Perdana
			Pendidikan POLRI SESPIM POLRI Pendidikan POLRI PTIK Pendidikan POLRI AKABRI KEPOLISIAN	Komisi Pengawas DPN Peradi

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
H.M. Subuh	Wakil Ketua II Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018	S1, Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia Jakarta	Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Syarief Mohamad Alkadrie Kalimantan Barat
			S2, School of Public Administration, Qualification Master Public Policy (MPPM) di University of Southern California	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
				Direktur Pengendalian Penyakit Menular
				Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
				Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI
				Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI.
Afrizal (Independen)	Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	SK Dekom No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-01/DK/BF/01/2017 Tanggal 16 Januari 2017, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018	S1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Akuntansi	Dosen Fakultas Ekonomi UI
			S2, Pascasarjana Kekhususan Administrasi Kebijakan Perpajakan Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi FISIP UI	Konsultan Akuntansi
				Keuangan dan Auditor
				Financial Controller
				Asisten Direksi PT Tarnsweep International
				General Manager Adm. & Keuangan PT SNC Lavalin TPS
				Konsultan Senior Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi UI
				Manajer Audit Badan Audit Internal UI
				Direktur Akuntansi UI
				Kepala Badan Audit Internal UI
				Direktur Logistik UI
Judi Januardi Endjun (Independen)	Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/02/2016 tanggal 02 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016, diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/04/2018 tanggal 26 April 2018	S1, Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran	Kepala Puskesmas Kec. Hato Builico Timor-Timor
			Diploma of Ultrasound, Universitas of Zagreh Croatia	Sekretaris Pendidikan S1 dan S2 Dep. OBGIN RSPAD/FK UPN Veteran
			Spesialis 1 Obstetri & Ginekologi di Fakultas Kedokteran UI	Ketua Unit Peristi RSPAD
			Saat ini sedang mengambil gelar Magister Hukum UPN Veteran	Saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Fetomaternal Dep. OBGIN RSPAD.
				Masih aktif sebagai dosen dan penguji dibeberapa beberapa Universitas ternama di Jakarta
				Aktif menyusun karya ilmiah: buku kedokteran & Buku Awam

INDEPENDENSI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Independensi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG tertuang dalam pada Pedoman Kerja *(Charter)* Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yaitu bahwa anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugasnya, anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dipilih dari luar perusahaan yang tidak memiliki keterikatan keuangan, kepengurusan, dan/atau kepemilikan saham.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan.
3. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang berasal dari luar Perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawasan dan anggota Direksi Perusahaan.
4. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang berasal dari luar Perusahaan, tidak boleh merangkap sebagai anggota komite pada Perusahaan lain.
5. Jika anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan.

Surat Pernyataan Independensi Potensi Benturan Kepentingan Komite Risiko, Pengembangan & GCG	
Heridadi Saud Usman Nasution * H.M. Subuh Afrizal Judi Januardi Endjun	• Tidak memiliki keterikatan keuangan, kepengurusan, dan/atau kepemilikan saham. • Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan. • Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke-tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Dewan Komisaris atau dengan Direksi, Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. • Tidak merangkap sebagai anggota komite pada Perusahaan lain. • Jika anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan. • Tidak memiliki aktivitas sebagai berikut: » Menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. » Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan dengan Perusahaan. » Menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada pengawasan sebagai Komite Risiko, Pengembangan & GCG PT Bio Farma (Persero).

Keterangan
* Mulai Menjabat tanggal 26 April 2018

HUBUNGAN AFILIASI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN & GCG

HUBUNGAN KELUARGA & HUBUNGAN ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Hingga 31 Desember 2018, seluruh anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan: Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Komite Audit lainnya.

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Hubungan Keluarga dengan								Hubungan Keuangan dengan							
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Komite Lainnya		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Komite Lainnya	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Heridadi	Ketua Komite Risiko, Pengembangan & GCG	09 Juli 2015 - 08 Jan 2019		√		√		√		√		√		√		√		√
Saud Usman Nasution *	Wakil Ketua I Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	26 April 2018 - 26 April 2023		√		√		√		√		√		√		√		√
H.M. Subuh	Wakil Ketua II Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	09 Juli 2015 - 22 Juni 2020		√		√		√		√		√		√		√		√
Afrizal (Independen)	Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	04 Feb 2016 - 04 Feb 2019		√		√		√		√		√		√		√		√
Judi Januardi Endjun (Independen)	Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	04 Feb 2016 - 04 Feb 2019		√		√		√		√		√		√		√		√

Keterangan
* Mulai Menjabat tanggal 26 April 2018

KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPEGURUSAN, PENGURUS PARTAI & SEBAGAI PENGURUS PARTAI

Hingga 31 Desember 2018, seluruh anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG tidak memiliki saham di Bio Farma, Badan Usaha Milik Negara lain dan Perusahaan serta tidak ada kepemilikan saham secara pribadi maupun keluarga.

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)										Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun perusahaan afiliasi		Tidak Menjabat Sebagai Pengurus Partai Politik, Pejabat & Pemerintah		Tidak Menjabat Sebagai Komite Dekom Di Perusahaan Lain	
			PT Bio Farma (Persero)		Pribadi pada BUMN lain		Pada Perusahaan Lain		Keluarga pada PT Bio Farma (Persero)		Keluarga pada BUMN lain		Keluarga pada Perusahaan lain					
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Heridadi	Ketua Komite Risiko, Pengembangan & GCG	09 Juli 2015 - 08 Jan 2019		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Saud Usman Nasution *	Wakil Ketua I Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	26 April 2018 - 26 April 2023		√		√		√		√		√		√		√		√		√
H.M. Subuh	Wakil Ketua II Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	09 Juli 2015 - 22 Juni 2020		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Afrizal (Independen)	Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	04 Feb 2016 - 04 Feb 2019		√		√		√		√		√		√		√		√		√
Judi Januardi Endjun (Independen)	Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	04 Feb 2016 - 04 Feb 2019		√		√		√		√		√		√		√		√		√

Keterangan
* Mulai Menjabat tanggal 26 April 2018

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN & GCG

Berdasarkan Piagam Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero), tugas dan tanggung jawab Komite Risiko, Pengembangan dan GCG sebagai berikut:

1. Komite Risiko, Pengembangan dan GCG bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
   a. Melakukan *riview* dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Divisi *Compliance* dan *Risk Management* Perusahaan;
   b. Melakukan *review* atas penilaian risiko oleh Divisi *Compliance* dan Risk Management terhadap rencana investasi perusahaan yang material;
   c. Melakukan pengawasan atas kegiatan Divisi *Compliance* dan *Risk Management* dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit-unit kerja terkait;
   d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG oleh Divisi *Compliance* dan *Risk Management*;
   e. Melakukan evaluasi terhadap rencana pengembangan atau ekspansi bisnis;
   f. Melakukan pemantauan terhadap penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan GCG serta dan mendampingi Divisi *Compliance* dan *Risk Management* (CRM) dalam *assessment* GCG oleh pihak eksternal secara berkala;
   g. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan riviu tahunan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang diajukan oleh Direksi.
   h. Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko perusahaan dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan;
   i. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan Perusahaan sesuai kebutuhan;
   j. Menyusun sistem penilaian dan nominasi calon Direksi dan Dewan Komisaris;
   k. Memberikan evaluasi dan analisa atas system seleksi, rekrutmen, dan suksesi karyawan perusahaan;
   l. Menyusun jenis dan jumlah gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang sudah/akan diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan Dewan Komisaris kepada RUPS;
   m. Melakukan evaluasi dan analisa atas system penggajian, honorarium, tunjangan dan fasilitas yang sudah/akan diberikan kepada level manajemen dan karyawan.

WEWENANG KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN & GCG

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan kewajibannya, komite berwenang untuk:

1. Memperoleh semua dokumen dan akses penuh, independen, dan tidak terbatas tentang kebijakan perusahaan yang terkait dengan strategi pengembangan usaha, penerapan GCG, pengelolaan risiko, dan sistem nominasi dan remunerasi perusahaan;
2. Bekerjasama dengan *counterpart* manajemen perusahaan, termasuk anggota Direksi yang berkaitan, dan terutama dengan Divisi *Compliance* dan *Risk Management*, Divisi SDM, *Corporate Strategy*, SPI, dan Divisi-divisi lain terkait sebagai *Risk/Business Process Owner*;
3. Melakukan riviu atas fungsi Divisi *Compliance* dan *Risk Management* terutama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG dan keberadaan dan efektivitas implementasi ERM di PT Bio Farma (Persero);
4. Mendapatkan masukan dari profesional eksternal/ pihak yang independen bila diperlukan atas biaya perusahaan.

PEDOMAN KERJA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN & GCG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berpedoman pada Piagam *(Charter)* Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang disahkan pada 19 Februari 2014.

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Sepanjang tahun 2018, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja yang disetujui Dewan Komisaris sebagai berikut:

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
2.	27 Februari 2018	Pembahasan monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko korporat "perubahan kebijakan regulasi nasional dan internasional"	1. Perusahaan sudah merasakan dampak dari adanya perubahan regulasi terhadap kinerja perusahaan, dimulai sejak tahun 2016 terjadi penurunan omzet, hal ini terutama terkait dampak *country regulation* yang menerapkan persyaratan-persyaratan yang ketat untuk eksport produk. Oleh karena itu perusahaan mengambil langkah – langkah untuk mengantisipasi perubahan-perubahan regulasi, antara lain memindahkan divisi *regulatory affair* yang semula dibawah Direktorat Pemasaran ditarik ke Direktorat Utama. Selanjutnya dibentuk divisi *marketing diplomacy* untuk meningkatkan usaha-usaha pendekatan ke negara-negara tujuan eksport perusahaan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. 2. Terkait pengaturan divisi *regulatory affairs* dan pembentukan *marketing diplomacy* Komite RPG sangat mendukung dan menyarankan agar divisi - divisi tersebut dapat diisi oleh orang-orang yang kompeten dan senior yang mengerti semua aspek usaha seperti produksi, marketing terutama kemampuan *lobby* karena sifat pekerjaannya kebanyakan bukan teknis. Kaderisasi dalam divisi tersebut harus dilakukan dan dipersiapkan sebaik mungkin. 3. Sistem kualitas (*quality system*) sudah diterapkan pada seluruh *phase* produksi, mulai dari bahan baku sampai dengan distribusi produk, termasuk mengelola komplain-komplain yang timbul sehingga dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Seluruh pegawai diharapkan mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan, memelihara dan menjaga keberlangsungan sistem kualitas tersebut. 4. Saat ini kebutuhan untuk menerapkan standar mutu *country requirements* semakin tinggi mengingat *customer* perusahaan tidak hanya WHO, tetapi juga 132 negara tujuan ekspor perusahaan. Kadang-kadang standar mutu yang diterapkan masing-masing negara seperti Arab Saudi dan Mexico lebih ketat dari WHO. 5. Produk vaksin yang harus mendapat PQ WHO berjumlah 12 produk, dari ke 12 produk tersebut terdapat 3 produk vaksin yang tidak pernah dibeli oleh WHO tetapi masuk dalam PQ WHO, yaitu : TT (Uniject), Hep B (Uniject) dan mOPV1. Oleh karena itu disarankan agar dikaji apakah produk tersebut masih perlu masuk dalam daftar PQ WHO, karena PQ memerlukan biaya dan waktu. 6. Risiko-risiko terkait perubahan regulasi nasional maupun internasional dapat diidentifikasi sebanyak 3 risiko sebagai berikut : a. Ketidaksesuaian dokumen dan implementasinya dengan kebijakan, regulasi nasional dan pedoman WHO serta regulasi lain yang dipersyaratkan oleh *customer*. b. Inkonsistensi implementasi *Quality Management System* (QMS) yang dapat menimbulkan risiko ketidaksesuaian pelaksanaan proses berjalan dengan prosedur yang berlaku, pencatatan kegiatan produksi, QC, *maintenance* yang tidak *update*, dan pelaksanaan validasi dan kalibrasi yang tidak sesuai jadwal sehingga dapat berdampak produksi dihentikan dan tidak bisa menjual ke UNICEF dan Konsumen bilateral. c. Ketidaksesuaian persyaratan *containment* untuk fasilitas produksi polio *type* 2.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
			7. Mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan adalah : mengembangkan QMS, yang meliputi SOP, dokumen, dsbnya, merencanakan renovasi dan sertifikasi fasilitas produksi untuk memenuhi persyaratan *containment* fasilitas produksi vaksin polio. Komite RPG menggaris bawahi bahwa risiko terkait containment ini harus diwaspadai karena terkait *bio security* dan *bio safety*, jangan sampai masalah ini dijadikan alasan untuk menghambat perusahaan memproduksi IPV. 8. Komite Risiko menyaran agar permasalahan *Bio safety* dan *bio security* perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai, termasuk partisipasi apa yang diharapkan dari pegawai, melakukan komunikasi dan diskusi yang intensif dengan NAC untuk sertifikasi *Polio Essential Facility* (PEF), bagaimana menangani hal-hal terkait adanya perubahan kebijakan, harus ada *timeline* sebagai target untuk penyelesaian masalah masalah yang timbul. Oleh karena itu disarankan ada tim terstruktur yang menanganinya. Beberapa kebijakan Kemenkes tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh perusahaan atau berisiko untuk tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh Bio Farma karena ketidak siapan Bio Farma untuk memproduksi sendiri maupun bekerja sama dengan mitra produsen, seperti : program imunisasi vaksin baru (*pneumo*), progam imunisasi vaksin MR dan JE, dan program imunisasi rotavirus. Komite Risiko menyarankan agar dibentuk tim yang selalu mengadakan komunikasi dengan tim Kemenkes, terutama ke direktorat jenderal P2P, mengingat program imunisasi Kemenkes tidak akan pernah berhenti dan selalu diperluas cakupan produknya. Selain itu percepatan pengembangan produk sendiri harus dilakukan agar perusahaan dapat memperoleh marjin laba yang cukup besar. UU Jaminan Produk Halal (JPH) Nomor : 33/2014 sudah ditanda tangani pada tahun 2014. Produk yang harus mendapatkan sertifikat halal MUI meliputi : kelompok makanan dan minuman, kelompok kosmetik, bahan – bahan kimia dan berbagai barang yang digunakan, serta kelompok produk farmasi dan biologi. Implementasi sertifikasi halal kelompok produk farmasi dan biologi ditetapkan pada 1 November 2018. Dalam rangka mengantisipasi risiko terkait UU JPH, manajemen Bio Farma sudah membentuk : Tim Eksternal, Tim Advokasi dan Tim Internal. Mitigasi risiko yang sudah diidentifikasi dan akan dilakukan meliputi antara lain : - Tim Eksternal melakukan koordinasi dan konsultasi dengan MUI/ LPPOM MUI Jabar dan BPJPH, melakukan proses sertifikasi produk, dan melakukan integrasi dengan pihak terkait seperti BPOM. - Tim Internal mempersiapkan data yang diperlukan untuk sertifikasi halal, mengkaji kesiapan produk dengan bahan *animal/porcine free*, dan melakukan koordinasi persiapan sertifikasi halal internal Bio Farma.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
			- Hal-hal yan sudah dilakukan dalam persiapan sertifikasi halal (koordinasi internal) antara lain : • *Training* oleh LPPOM MUI, setelah dilakukan konsultasi dengan mantan ketua LPPOM MUI, pemaparan dan diskusi dengan komisi fatwa MUI. • Pengkajian bahan pembuat vaksin • Penetapan produk yang akan dilakukan sertifikasi • Persiapan registrasi, menyusun manual sistem jaminan produk halal Bia Farma, pembuatan matriks material vaksin BCG dan pelarut, menyusun tim internal audit, pelatihan tim internal audit dan tim eksternal. • Melakukan pre audit oleh LPPOM MUI, untuk persiapan audit dan melihat kekurangan-kekurangan yang mesti dilengkapi. • Melakukan regstrasi sertifikasi halal untuk vaksin BCG dan pelarut (Jan 2018). Penerapan UU JPH untuk kelompok produk farmasi dan biologi baru akan dilaksanakan pada 1 November 2018 masih ada waktu bagi perusahaan untuk mendapatkan solusi terbaik. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian perusahaan dan disarankan dibahas dalam Radirkom : - Permasalahan sertifikasi halal vaksin hendaknya menjadi perhatian utama Kemenkes karena vaksin merupakan urusan anak bangsa untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu manajemen harus mengupayakan agar masalah sertifikasi halal vaksin menjadi perhatian Kemenkes. Kemenkes harus lebih *aware*. - Melakukan review pengaruh penerapan UU JPH terhadap RJPP karena dalam RJPP salah satu *cluster* produk yang akan dikembangkan adalah *blood product* dan mencari solusi terbaik yang dapat dilakukan - Melakukan perencanaan investasi fasilitas produksi yang akan digunakan untuk produk halal yang akan disertifikasi oleh MUI. - Mendapatkan informasi bagaimana mekanisme penggunaan Perguruan Tinggi (Salman ITB, Pajajaran *Halal Centre*) untuk dipilih sebagai Lembaga Pemeriksa Halal mengingat Perguruan Tinggi lebih memahami kriteria halal produk vaksin.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
4.	28 Mei 2018	Monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko korporat keterlambatan pelaksanaan proyek pembangunan	1. Pada tanggal 4 November 2017 dibentuk Divisi Manajemen Proyek (Manpro) untuk mengawal proyek-proyek pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas peralatan produksi/riset agar pelaksanaannya lebih lancar. Tugas dan fungsinya adalah untuk mengelola proyek–proyek yang melibatkan beberapa pihak seperti unit kerja pengguna (*user*), divisi pengadaan, divisi legal, konsultan, dsbnya. 2. Siklus pengelolaan proyek di Bio Farma dapat dibagi dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : - Kegiatan penyusunan RJPP Divisi Perencanaan dan Startegi Perusahaan merangkum inspirasi *stakeholders* dan strategi perusahaan menjadi RJPP, didalamnya termasuk perencanaan proyek-proyek investasi yang harus diadakan. - Penyusunan *master timeline* Proyek Divisi Manpro menyusun *master timeline* proyek, termasuk barang investasi proyek setelah FS disetujui. *Master timeline* proyek dijadikan pedoman penyusunan RKAP. - Penyusunan RKAP Rencana investasi untuk proyek-proyek yang melibatkan koordinasi antara unit kerja pengguna, divisi manpro, Anggaran dan divisi terkait lainnya dituangkan dalam RKAP. - Pengesahan RKAP Pengesahan RKAP terkait investai proyek dilakukan setelah seluruh data terkait selaras dengan RJPP dan *master timeline* proyek. - Monitoring Divisi manpro melakukan monitoring atas realisasi pelaksanaan pengadaan oleh divisi pengadaan apakah sudah selaras dengan *master timeline proyek*. 3. Identifikasi risiko yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan proyek disebabkan sebagian besar karena lemahnya perencanaan seperti : - Keterlambatan kedatangan peralatan - Disain yang direncanakan tidak bisa diaplikasikan - Penyesuaian *lay out* - Disain yang belum selesai - DED yang belum selesai - Konsultan perencana yang kurang resposif - IMB yang belum terbit - Belum ada vendor yang ditunjuk 4. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengadaan dan pelaksanaan proyek investasi, Komite Risiko menyarankan beberapa hal kepada manajemen : - Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pelaksana proyek, termasuk pelaksana pengadaan dengan menyelenggarakan pelatihan berupa pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi pengadaan, walaupun dana untuk membiayai proyek bukan berasal dari dana APBN, tetapi pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan. - Mengkaji ulang SOP Pengadaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar pengadaan yang baik, dalam hal ini bisa berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah agar pelaksanaan proyek dapat dipercepat dan tetap dapat dipertanggungjawabkan - Membuat prioritas proyek-proyek untuk memperkecil dampak keterlambatan proyek pada KPI Perusahaan, karena indikasi keterlambatan terlihat dari masih kecilnya kemajuan pelaksanaan proyek sampai saat ini seperti dibahas dalam butir 5 diatas.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
			- Memberikan kewenangan kepada manpro untuk bertindak sebagai lini pertama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam proyek, agar proses penyelesaian dapat segera dilakukan, sedangkan divisi – divisi lain yang terkait berkewajiban membantu mempersiapkan hal-hal yang diperlukan.
5.	25 Juni 2018	Monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko korporat: 1. Keluar/pindahnya karyawan yang memiliki talenta dan potensi tinggi, 2. Kinerja manajemen dan karyawan tidak mencapai target KPI	1. Dalam 3 tahun ini perusahaan telah memetakan 2 risiko terkait pengelolaan SDM yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan, yaitu : a. Risiko keluar/pindahnya karyawan yang memiliki talenta dan potensi tinggi dari perusahaan; b. Risiko tidak tercapainya target kinerja manajemen dan karyawan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi selama 3 tahun ini, risiko pertama cenderung tidak terjadi yang dibuktikan dengan *turn-over* pegawai yang rendah dan hampir tidak ada, kecuali karena sebab pensiun. 2. Strategi pengembangan SDM saat ini bertujuan untuk meminimalisir adanya *critical gap* (kesenjangan kritis) pengelolaan dan pengembangan SDM. Kesenjangan terjadi karena sistem SDM yang diterapkan atau yang ada sekarang belum dapat memenuhi kebutuhan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kesenjangan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut : a. Sistem Penilaian Kinerja belum berbasis KPI b. Pengelolaan *Expertise* masih belum terpetakan, dalam hal ini perusahaan belum memiliki standarisasi *expertise* yang cocok. c. Sistem Pengembangan SDM masih belum fokus, yang terlihat pada belum dibaginya mana kegiatan yang merupakan *core* dan *non core* perusahaan. d. Sistem remunerasi tidak mendukung tujuan *competitiveness* dan *productivity* perusahaan. e. Budaya korporasi yang belum tumbuh sebagai *corporate identity,*dimana nilai nilai yang dianut oleh perusahaan, seperti : *professional, customer oriented, teamwork, integrity,* dan *innovation* belum menjadi *corporate identity*, dalam arti belum tertuang dalam aspek-aspek prilaku pegawai. f. *Leadership* masih belum memadai, dimana hal ini tercermin dari hasil *assessment* yang dilakukan terhadap karyawan jenjang menengah keatas hanya 8 % yang memenuhi ekspektasi. 3. Komite RPG sependapat bahwa *updating* dan *completenes* isi peraturan-peraturan SDM, harus dilakukan secara terus menerus seiring terjadinya perubahan dan perkembangan operasional perusahaan. Peraturan – peraturan tersebut harus dalam bentuk SK Direksi sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan agar pelaksanaan kegiatan SDM ada dasar payung hukumnya sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 4. Komite Risiko menyarankan bahwa dalam membuat *road map* pengembangan SDM perlu memperhatikan kebutuhan pengembangan organisasi sesuai dengan RJPP, seperti pengembangan organisasi untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangan vaksin yang cepat dalam rangka pencegahan berbagai penyakit, kebutuhan internasionalisasi operasional perusahaan, pencegahan *bio terrorrism*, dsbnya, sehingga dapat ditentukan berapa jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan setiap tahun. 5. Komite RPG menyambut baik penerapan sistem penilaian kinerja berbasis KPI pada tahun 2018 - 2019, termasuk penentuan besarnya remunerasi didasarkan pada penilaian KPI. Sistem penilaian kinerja berbasis KPI disarankan agar direviu secara berkala apakah KPI yang diterapkan sudah berdampak baik dalam mendukung usaha-usaha untuk mencapai tujuan perusahaan.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
6.	23 Juli 2018	Rapat pembahasan risiko korporat : 1. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo (likuiditas); 2. Proyek tidak selesai pada saat jatuh tempo pembayaran (kredit investasi)	1. Pembiayaan investasi sampai saat ini menggunakan modal kerja operasional perusahaan, sehingga beresiko akan mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Kekurangan modal kerja dibiayai dengan fasilitas kredit modal kerja. Pemanfaatan kredit jangka pendek untuk membiayai investasi tidak sesuai (*mismatch*) karena investasi berdimensi jangka panjang, artinya baru menghasilkan dalam jangka panjang. 2. Investasi memerlukan pendanaan jangka panjang dari pihak luar perusahaan, pendanaan dari pihak luar ini juga diperlukan dalam rangka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek, besaran dana harus sesuai dengan kebutuhan investasi sehingga proyek tidak tersendat karena kekurangan dana. 3. Kemajuan pelaksanaan proyek harus sesuai dengan rencana, apabila proyek mundur maka kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban finansial akan terganggu, produksi mundur, *time to market* juga mundur yang berakibat proyeksi penjualan tidak tercapai. Oleh karena itu untuk memitigasi hal ini direktorat keuangan secara reguler (mingguan) melakukan pemantauan bagaimana kemajuan proyek, mana yang harus selesai, mana yang dapat ditunda, dsbnya. 4. Rencana kredit investasi yang sebelumnya telah dipersiapkan tetapi tidak digunakan, oleh Bank sindikasi diminta untuk dikaji ulang. Komite RPG menyarankan agar ada terobosan dan koordinasi dengan Bank sindikasi agar proses persetujuan pinjaman tidak dimulai dari awal lagi 5. Risiko lain yang harus dipantau adalah risiko kurs, yaitu terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, mengingat saat ini perusahaan lebih banyak melakukan penjualan dalam negeri dibandingkan eksport, sementara untuk investasi diperlukan pendanaan dalam bentuk pembayaran dalam mata uang asing. 6. Komite RPG menyarankan direktur keuangan dalam radirkom memaparkan kondisi keuangan perusahaan, terutama terkait kebutuhan pendanaan investasi, ketepatan waktu kemajuan pelaksanaan proyek, agar tidak terjadi kegagalan bayar, mana proyek investasi yang memerlukan perhatian khusus, dan perencanaan untuk lindung nilai mata uang asing yang digunakan dalam pembayaran investasi. Beberapa proyek investasi harus dapat dipaparkan mana yang menguntungkan, mana yang dapat di drop agar tidak terlalu membebani perusahaan. 7. Terkait perkembangan kurs dollar disarankan agar perusahaan melakukan simulasi bagaimana ketahanan perusahaan dalam menghadapi pelemahan rupiah, sampai batas dollar berapa perusahaan masih dapat berjalan dengan baik, dan apa-apa yang harus dilaksanakan perusahaan untuk mempertahankan perusahaan agar tetap dapat berjalan dengan baik. 8. Komite RPG menyarankan agar perusahaan memperbaiki akar permasalahannya yaitu kualitas perencanaan perusahaan yang rendah : - Struktur organisasi perusahaan agar dilengkapi dengan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan pada tingkat korporasi, sehingga fungsi perencanaan dapat dilaksanakan secara komprehensif tidak terkotak-kotak. - Perlu dilakukan perbaikan atas kualitas perencanaan, perencanaan harus dibuat secara detil, termasuk membuat rencana alternatif (*plan* A dan B), misal MTN tidak cair apa yang akan kita kerjakan; - Membuat *time line* yang rigid, dengan target keuangan sebagai patokan, kemudian diikuti target penjualan, produksi, penyelesaian gedung, pengadaan mesin, dan kesiapan tenaga kerja.
			- Manajemen proyek (Manpro) harus dapat berfungsi sebagai mata dan telinga Direksi dengan melakukan pemantauan setiap hari bagaimana kemajuan proyek, bagaimana dampaknya terhadap *timeline* pemasaran, produksi, dan rencana arus kas. - Analisis risiko dan mitigasi dilakukan tidak hanya untuk risiko korporat, sebagai contoh untuk pembangunan gedung dibuat setiap minggu karena bertujuan untuk peningkatan kapasitas produksi vaksin pengganti vaksin polio.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
7.	30 Agustus 2018	Rapat pembahasan monitoring risiko korporat : - Pemalsuan produk Bio Farma - Munculnya berita negatif di media *mainstream*	1. Komite RPG menyarankan manajemen untuk melakukan pendaftaran paten dan merk, ijin edar, sertifikasi halal, dan menjaga tidak terjadi produk kadaluarsa tetap beredar. ijin edar sudah diperoleh, dan sertifikasi halal sedang diurus. 2. Mengingat sistem penjualan produk perusahaan dilakukan secara jual putus baik kepada distributor, maupun kemenkes (dinas kesehatan) maka disarankan agar dibuat klausul dalam perjanjian kerjasama sebagai *reminder* bahwa tanggung jawab adanya produk kadaluarsa dan pemusnahannya menjadi tanggung jawab ditributor atau Kemenkes (dinas kesehatan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan peredaran obat farmasi. 3. Mekanisme penarikan produk kadaluarsa oleh produsen sangat sulit karena peredaran produk tidak hanya lokal tetapi juga nasional, kadaluarsa bisa terjadi di gudang-gudang dinas kesehatan, puskesmas atau penjual terakhir lainnya, yang terpenting perusahaan sudah mencantumkan tanggal kadaluarsa produk pada kemasan yang terjamin keamanannya, dan dalam perjanjian kerjasama dibuat klausul tanggung jawab produk kadaluarsa ada pada distributor. 4. Selanjutnya Komite RPG menyarankan agar : - Tim yang bertanggung jawab terhadap pengembangan system *track and trace* harus dapat memperesentasikan pengaruh biaya investasi terhadap harga pokok penjualan produk sebagai dasar untuk menentukan harga jual; - Tim harus dapat mempertanggungjawabkan biaya investasi dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti : rekomendasi WHO dan ketentuan nasional terkait penanganan pemalsuan produk. sehingga tidak menjadi temuan audit. - Harus dilakukan pengawalan terhadap rencana terbitnya Peraturan Kepala (Perka) BPOM agar peraturan terkait sistem anti pemalsuan produk tidak berubah, tetap mengakomodasi sistem yang telah diimplementasikan secara gloabal yaitu *GS one* sehingga kompatibel dengan sistem yamg diimplementasikan oleh Bio Farma. - Sistem TT rasanya tidak mungkin sampai kepada *end user*, tetapi cukup sampai kepada distributor/dinas kesehatan, dengan pertimbangan metode jual putus, tantangan dilapangan yang mengharuskan perusahaan realistis seperti akses internet, fasilitas gudang yang harus dipenuhi, pegawai yang kompeten untuk verifikasi yang harus disediakan, oleh karena itu tangguing jawab perusahaan hanya sampai kepada distributor/dinas kesehatan, untuk itu harus diatur dalam perjanjian kerjasama. 5. Komite RPG menyarankan agar fokus pada media-media sosial yang kebanyakan merupakan media *on line*, karena kecepatan penyebar luasan beritanya. Selanjutnya disarankan agar dilakukan monitoring terhadap adanya berita-berita terkait perusahaan, dan memberikan respon (*counter)* yang tepat untuk meluruskannya. Saat ini perusahaan bekerjasama dengan mediaweb dan *global insight*, dan juga dengan Kementerian Kominfo untuk penutupan media sosial yang melakukan pemberitaan bohong (*hoax*) terkait anti vaksin.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
			6. Komite RPG menekankan kembali bahwa dalam melakukan pemberitaan atau untuk merespon berita negatif perusahaan harus meminta narasumber yang kompeten untuk bicara karena apabila kita yang bicara biasanya tidak akan didengar, misalnya terkait *issue* produk halal sebaiknya ulama yang menjelaskan. Dalam hal ini perusahaan harus menyiapkan narasi-narasi sebagai bahan masukan narasumber yang kita pilih.
8.	24 September 2018	Pembahasan risiko korporat implementasi MRP tidak sesuai target dan risiko korporat tahun 2019	1. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap tahap pengembangan sistem tersebut antara lain : a. Pada tahap perencanaan, seperti ; *user requirement* memerlukan partisipasi banyak pihak sebagai pemilik bisnis proses agar keperluan mereka terakomodasi dalam sistem, kajian risiko harus dapat dideskripsikan dan dibuat mitigasinya agar sistem mempunyai pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko. b. Pada tahap validasi data harus betul-betul dipastikan akurasinya agar pada saat *testing*, data yang ada merupakan data yang akurat untuk diproses oleh sistem baru. c. Terkait pengembang sistem perlu dipertimbangkan apakah menggunakan pihak internal atau eksternal, perlu dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing alternatif tersebut. 2. Unit kerja yang terlibat dalam proses penyusunan sistem harus mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi untuk mensukseskan keberhasilan proyek. Pemisahan tugas untuk mereka yang melaksanakan pekerjaan rutin dan proyek MRP memang sebaiknya dilakukan agar mereka dapat fokus dan jelas pertanggungjawabannya, selain itu untuk meningkatkan motivasi staf yang terlibat sebaiknya dipertimbangkan pemberian insentif. 3. Mengingat proyek MRP ini memerlukan data terintegrasi, maka perlu melibatkan unit-unit kerja lintas bidang seperti : produksi, SDM, keuangan, akuntansi, dengan demikian sebaiknya ada konsultan yang mendisain dan mengarahkan pekerjaan dari semua unit-unit kerja tersebut dan menyampaikan hasil pekerjaan untuk diimplementasikan oleh konsultan pengembang sistem. Konsultan yang dipilih harus kompeten dan bersedia memberikan cara-cara apabila terjadi permasalahan terhadap sistem di masa mendatang, bukan membuat perusahaan tergantung pada mereka. 4. Proses penyusunan t*imeline* telah melibatkan para kepala divisi, bertujuan agar unit kerja terkait komit untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam proyek, selanjutnya evaluasi akan dilakukan secara bertahap. Komite RPG menyarankan agar *timeline* dibuat secara *rigid, timeline* yang ada sekarang terlihat mencakup suatu rentang waktu yang panjang seperti bulan Oktober s.d Desember, disarankan dibuat rincian per kegiatan dan ada dimensi waktunya, misalnya mingguan, bulanan dan interval waktu lainnya mengacu pada *grand design* proyek untuk memudahkan pengawasan atas kemajuan proyek. Selanjutnya disarankan agar aplikasi ini juga perlu disiapkan untuk mengakomodir produk-produk non vaksin, dan pola kerjasama dengan perusahaan lain atau unsur pemerintah. 5. Draft risiko korporat untuk RKAP tahun 2019 adalah : a. Perubahan kebijakan/regulasi nasional dan internasional b. Keterlambatan Pelaksanaan proyek pembangunan gedung c. Kegagalan divisi SDM dalam menciptakan talet karyawan d. Keluar/pindahnya karyawan yang memiliki talenta dan potensi tinggi e. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas) f. Tidak terserapnya persediaan produk

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
			g. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka panjang (kredit investasi) h. Kinerja manajemen dan karyawan tidak mencapai target KPI i. Pemalsuan produk Bio Farma j. Implementasi MRP tidak sesuai target. Urutan risiko tersebut diatas tidak mencerminkan urutan besarnya risiko, karena secara kuantitaif sedang dihitung dampak risiko tersebut Beberapa catatan terkait mitigasi risiko korporat tahun 2019 yang musti diperhatikan : • Operasional Bio Farma tidak terlepas dari regulasi baik nasional maupun internasional terutama yang berkaitan dengan negara tujuan ekspor sehingga kepatuhan terhadap regulasi harus diperhatikan dan dibuat rencana untuk melaksanakannya. • MOU atau perjanjian harus dibuat dengan baik dan benar, termasuk di lingkungan internal untuk mencegah terjadinya pembajakan pegawai atau di eksternal untuk menjaga dampak adanya pemalsuan produk agar perusahaan tidak dirugikan finansial dan reputasinya. • Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan perbankan harus disiapkan segera mungkin agar perusahaan mendapatkan pinjaman untuk pembiayaan investasi agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek karena kekurangan biaya. Perencanaan proyek juga harus dilakukan secara baik, apakah proyek itu sifatnya *single year* atau *multi years*, begitu juga dalam pembuatan HPS harus berdasarkan data-data dari berbagai sumber yang relevan. • Dalam setiap rekrutmen harus dilakukan *assessment* yang ketat dan dibuat pakta integritas untuk pegawai. Selain itu *job description* harus detil sehingga memberikan kepastian bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. • *Reward* dan *punishment* harus dibuat dan dijalankan secara konsisten. Pegawai yang beprestasi harus diberikan *reward*, sedangkan pegawai yang melakukan penyimpangan harus diberi *punihment*. • Untuk mitigasi pemalsuan produk, salah satunya dapat dilakukan dengan membuat MOU yang jelas agar produk Bio Farma tidak salah digunakan, selain itu produk Bio Farma didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga apabila ada usaha-usaha untuk menyalah gunakan produk Bio Farma, perusahaan dapat melakukan penuntutan. Risiko penyalah gunaan produk kadaluarsa disarankan juga dimonitor dan ditangani agar tidak terjadi adanya produk kadaluarsa yang masih beredar yang dapat merugikan perusahaan. . • Risiko munculnya berita negatif di media *mainstream* harus tetap dimonitor baik oleh divisi korkom maupun divisi kepatuhan dan manjemen risiko agar risiko yang akan muncul dapat dikendalikan dan dimitigasi dengan baik, walaupun sudah tidak menjadi risiko korporat. • Tahun lalu ada kejadian luar biasa (*outbreak*) yang tidak diprediksi pada saat perencanaan, yaitu diphteri. Apakah dalam tahun 2019 tidak ada rencana mitigasi bila ada kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa yang saat ini menjadi risiko direktorat disarankan dikaji lagi apakah dampaknya cukup besar untuk dijadikan risiko korporat.
			• Fluktuasi nilai rupiah apakah tidak masuk dalam risiko korporat mengingat ada kecenderungan dollar terus menguat dimana saat ini penerimaan Bio Farma sebagian besar berasal dari penjualan dalam negeri, sementara investasi dan import bahan baku dengan menggunakan mata uang asing. Apabila risiko fluktuasi kurs menjadi risiko direktorat, disarankan untuk dilakukan *hedging* agar tidak terlalu merugikan perusahaan apabila terjadi penguatan mata uang asing.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
9.	22 Oktober 2018	Pembahasan penanganan risiko korporat "tidak terserapnya persediaan produk" dan hasil *self assessment* penerapan GCG pada PT Bio Farma (Persero) tahun 2017-2018	1. Risiko tidak terserapnya persediaan produk dapat terjadi karena rencana penjualan tidak sesuai dengan realisasi penjualan baik di sektor ekspor mapun penjualan dalam negeri. 2. Penjualan ekspor terdiri dari penjualan produk vaksin dan bulk. Proporsi penjualan vaksin adalah 41 %, sedangkan penjalan bulk sebesar 59 %. Penjualan dilakukan baik melalui agen atau melalui tender. 3. Identifikasi kemungkinan sebab-sebab terjadinya, rencana mitigasi dan perbaikan adalah sebagai berikut: a. Kalah tender, Mitigasi : - Perlu adanya *marketing intelligence* untuk menganalisis kondisi pasar, kompetitor, harga, dan seleksi *local partner* yang bonafid; - Melakukan koordinasi intensif dengan agen Rencana perbaikan: - Produk dialihkan ke pasar lain yang dapat menyerap persediaan produk; - Mengikuti tender di negara lain untuk produk sejenis; - Meminta penghentian produksi untuk produk yang belum masuk tahapan produksi; - Membuat prognosa sesuai hasil tender; - Evaluasi harga produk. b. Penurunan *demand* produk vaksin Mitigasi : - Perlu adanya *marketing intelligence* untuk melihat kondisi pasar; - Melakukan koordinasi intensif dengan agen; - Order produksi berdasarkan rencana pemasaran, misalnya 3 bulan sebelumnya. Rencana perbaikan: - Penghentian produksi; - Monitoring *stockpile* dan ED - Melakukan promosi harga, penjualan dalam paket (*bundling*) c. Pembatalan PO Mitigasi : - Penerapan sistem pembayaran dimuka; Rencana perbaikan; - Produk dialihkan ke pasar lain yang dapat menyerap persediaan produk; - Koordinasi intensif dengan agen untuk mencari alternatif pembeli pengganti. Perubahan regulasi - Mempelajari dan menyesuaikan perubahan regulasi tentang impor dan registrasi produk negara *customer*; - Memenuhi dan meningkatkan standar kualitas produk sesuai dengan negara tujuan ekspor. Rencana perbaikan: - Mempercepat proses registrasi/variasi registrasi produk bila diperlukan; - Produk dialihkan ke pasar lain yang dapat menyerap persediaan produk. Kondisi politik dan ekonomi Mitigasi : - Belum dilakukan Rencana perbaikan : - Melakukan negosiasi melalui jalur birokrasi, biasanya meminta bantuan Kedutaan Besar kita; - Garansi pembayaran melalui LPEI (Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia); - Pembagian risiko produk dan pembayaran bersama agen internasional/distributor. Delisting/pencabutan izin impor/edar customer Mitigasi : - Audit pihak *customer*.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
			• *Assessment* terhadap penerapan GCG pada PT. Bio Farma dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practise*), sehingga area yang memelukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi. *Assessment* dilakukan setiap tahun berupa *assessment* oleh pihak independen dalam hal ini BPKP dan *self assessment* secara bergantian setiap tahun. • Hasil *self assessment GCG* PT. Bio Farma tahun 2017 menunjukkan bahwa perusahaan masih dapat mempertahankan peningkatan skor secara keseluruhan, yaitu total capaian 90,53 dibandingkan dengan hasil *assessment* BPK pada tahun sebelumnya, dengan total capaian 90.494. Tetapi apabila dilihat per rincian skor terjadi penurunan pada aspek pemegang saham dan RUPS dari skor 89,76 menjadi 86,19, dan aspek dewan komisaris dari 93,00 menjadi 91,60. • Sekalipun skor penerapan GCG perusahaan tetap meningkat, tetapi masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk tetap mempertahankan skor yang sudah dicapai dan perbaikan berkesinambungan untuk mencapai kinerja pencapaian menuju praktik-praktik terbaik penerapan GCG sebagai berikut : • Aspek komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan : • Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal • Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas: • Aspek Direksi:
10.	26 November 2018	1. Pembahasan pengembangan vaksin dan produk lainnya 2. Pembahasan monitoring dan evaluasi ERM berbasis IT	1. Dengan adanya eradikasi polio, perusahaan menghadapi tantangan besar pada kinerja keuangannya, oleh karena itu perusahaan mengembangkan strategi portofolio produk yang dapat mengganti potensi hilangnya pendapatan Bio Farma dari penjualan OPV. Perusahaan telah mengembangkan rencana untuk meluncurkan beberapa produk baru termasuk vaksin dan produk lain seperti bio similar. 2. Pelaksanaan atas rencana pengembangan produk vaksin dan produk lainnya yang dilakukan ternyata menghadapi kendala-kendala untuk dapat tercapai. Oleh karena itu disarankan harus ada kajian kelayakan projek, dengan memperhatikan hal-hal seperti : a. Sebaiknya dibuat prioritas jangka pendek dan jangka panjang, mana yang bisa diproduksi segera, mana yang perlu waktu dan biaya besar, perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk merealisasikannya; b. Kerjasama yang dibuat harus dapat mengamankan kepentingan perusahaan, jangan sampai pada saat berhasil perusahaan tidak punya hak atas produk yang dikembangkan, dalam hal ini harus didukung oleh bagian hukum yang kuat untuk membuat perjanjian kerjasama; c. Apabila proyek akan direskedul harus dikaji secara mendalam apa-apa yang harus dipersiapkan dan dicari solusi yang terbaik agar tidak berdampak buruk bagi perusahaan saat diaudit; d. Penggunaan fasilitas produksi dan SDM bersama harus diatur secara tepat, agar tidak mengganggu produksi yang telah dijadwalkan sesuai rencana penjualan, tidak menurunkan produktivitas personil karena tidak fokus, tidak mengabaikan proses cek dan ricek mutu produk, aman dari kontaminasi antara satu proses produksi dengan proses produksi berikutnya. e. Meminta pertimbangan pemegang saham sehingga apabila ada fasilitas yang bisa digunakan dari BUMN lain dapat dimanfaatkan, termasuk perhatian dan kontribusi kemenkes karena hasil pengembangan produk yang akan diperoleh adalah dalam rangka mencapai tujuan kemandirian bangsa di bidang kesehatan; f. Antrian fasilitas produksi, termasuk SDM akan mengakibatkan keterlambatan pengembangan produk dibanding kompetitor menyebabkan keterlambatan *time to market*, sehingga pada saat memasuki pasar kompetitor sudah menguasai pangsa pasar, hal ini juga dapat mengakibatkan mitra kerjasama mengundurkan diri karena perusahaan tidak dapat memenuhi skedul; 3. Selain itu Komite RPG menggaris bawahi bahwa perusahaan bukan merupakan lembaga riset, sebaiknya riset-riset murni dilakukan oleh Dewan Riset Nasional, Bio Farma lebih fokus pada riset-riset yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil riset untuk pengembangan produk yang dapat segera diproduksi. Oleh karena itu disarankan manajemen membuat matriks garis besar riset dan pengembangan. Di dalam melakukan riset dan pengembangan kuncinya adalah prioritas, dimulai dari kebutuhan WHO, produk-produk apa yang menguntungkan, kemudian apakah tersedia fasilitas produksi dan SDM yang memungkinkan untuk merealisasikan produksi dengan biaya dan anggaran yang dapat diusahakan oleh perusahaan.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
			4. Berdasarkan hasil evaluasi *soft live* dan pendampingan ke setiap user di unit kerja, masih ada kendala yang sebelumnya tidak di akomodir oleh aplikasi EM. Aplikasi sudah dapat digunakan tetapi terbatas hanya untuk manajemen risiko-risiko di bagian (struktural), belum termasuk fugsional dan proyek-proyek, karena dalam pengelolaan proyek mencakup lintas bagian. Untuk mengantisipasi kekurangan fungsi-fungsi yang diperlukan pada aplikasi tersebut, perlu dilakukan pendampingan oleh konsultan IT untuk memperbaiki agar penggunaan aplikasi ERM lebih optimal. 5. Dalam pelaksanaan digitalisasi, agar sukses disarankan perusahaan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, personil yang mengoperasikan harus termotivasi untuk melaksanakannya sehingga perubahan-perubahan data akan selalu di perbaharui dalam sistem. Oleh karena itu perlu juga ada kebijakan pimpinan untuk mendorong pegawai agar berani melaporkan kejadian-kejadian apa adanya sehingga data yang di input lebih akurat. Selain itu disarankan agar perbaikan-perbaikan dapat dikawal oleh divisi kepatuhan dan manajemen risiko sehingga perbaikan dapat direalisasikan sesuai jadwal yang disepakati.
11.	28 Desember 2018	Allignment RKAP 2019 dengan RJPP 2018-2022	1. Penyusunan RKAP 2019 sudah merujuk kepada strategi korporasi dan arah pengembangan perusahaan. Strategi perusahaan dalam RKAP merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi korporasi dalam RJPP tahun 2018-2022, sedangkan program kerja masing-masing bidang dalam RKAP tahun 2019 merujuk kepada arah pengembangan perusahaan yang dinyatakan dalam RJPP. 2. Disamping startegi korporasi tersebut diatas, disarankan perusahaan juga membuat strategi unuk mengelola issue. Strategi pengelolaan issue sebaiknya masuk dalam RKAP dan ditangani dengan serius. Issue tersebut bisa berasal dari produk itu sendiri atau dari program pemerintah yang dijalankan oleh Bio Farma, seperti program imunisasi MR. Selama ini perusahaan sudah membentuk tim intenal untuk menangani issue-issue terkait produk halal dan anti imunisasi, seperti : program edukasi dan advokasi vaksinasi, inventarisasi bahan-bahan baku yang mengandung atau bersinggungan dengan materi yang tidak halal, registrasi produk halal, dan pengembangan produk halal. 3. Dalam pengembangan produk-produk baru, baik produk mitra, *fill & finish*, maupun produk produksi sendiri, perlu perhitungan dan solusi mitigasi yang dapat dilaksanakan, apabila belum pasti sebaiknya jangan dilaksanakan sehingga bisa lebih fokus. Beberapa kendala yang mesti dipertimbangkan adalah mekanisme registrasi ke BPOM yang kadang-kadang berubah-ubah dan dibelakukan surut, penggunaan kapasitas produksi bersama yang berisiko kontaminasi antara satu produk dengan yang lainnya, termasuk pembiyaan import yang menimbulkan risiko kurs. 4. Walaupun penerapan UU JPH untuk produk farmasi direskedul dari bulan November 2018, perusahaan disarankan agar tetap melanjutkan program kerja terkait penerapan produk halal, selain itu juga disarankan membuat analisa capaian RKAP 2018 mengingat secara kualitatif memang sudah tercapai tetapi bagaimana detil kuantitaifnya. Sebagai contoh beberapa produk andalan seperti *blood product* dan *biosimilar* sebagai pengganti OPV belum terealisir pada tahun 2018, hal ini memerlukan analisis agar kendala-kendala yang ada seperti aturan payung dari kemenkes, supplai dari PMI, issue paten, dsbnya dapat diantisipasi dan dimitigasi. 5. Perusahaan disarankan melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi sehingga dapat memanfaatkan hasil penelitian yang dilakukan para dosen maupun tesis atau disertasi mahasiswa sehingga persahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan penembangan. 6. Secara keseluruhan perusahaan disarankan agar memperhatikan faktor-faktor kritis dalam membuat peencanaan, faktor-faktor kritis dapat berubah setiap saat, saat ini faktor kritis yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut : a. Kebijakan WHO; terutama terkait dengan *priority list* produk, tetapi harus dianalisa karena *priority list* dari WHO bersifat tidak tetap dapat berubah sehingga harus selalu dicermati; b. Kebijakan Kemenkes, terutama terkait dengan peraturan menteri tentang *blood product;* c. Peraturan BPOM, terkait dengan registrasi produk; perubahan peraturan seperti registrasi manual pada mulanya menjadi *on line* hendaknya dinegosiasi agar tidak diterapkan berlaku surut ; d. Perkembangan penyakit yang harus selalu dicermati, misalnya pengembangan vaksin flu quadrivalent saat ini, bagaimana perkembanan penyakit kedepannya.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
			e. Kecenderungan kompetitor dan mitra kerja harus diantisipasi, jangan sampai saat akan meluncurkan produk baru, kompetitor sudah lebih siap dan punya kecenderungan akan mematikan perusahaan, begitu juga dengan mitra yang akan merugikan perusahaan. f. Percepatan penerapan digitalisasi, seperti saat ini yang sudah *on proggress* CRM, MRP maupun bidang-bidang lain sehingga direksi mendapatkan *dashboard* permasalahan – permasalahan yang dihadapi dan dapat cepat mengambil keputusan; Faktor geopolitik dan geostrategi perlu diperhitungkan sehingga dalam perencanaan kita harus mempersiapkan skenario pesimistik dan membuat rencana alternatif. Kemampuan operasional perusahaan, seperti ketersediaan fasilitas, sumber daya manusia, keuangan, dsbnya.

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Komite Risiko, Pengembangan dan GCG mengadakan rapat setidaknya satu kali dalam sebulan yang dipimpin oleh ketua Komite. Keputusan rapat Komite dianggap sah jika disetujui oleh ketua Komite. Setiap rapat Komite harus disusun dalam suatu risalah rapat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pertemuan diadakan.

Selama tahun 2018, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG mengadakan/mengikuti rapat sebanyak 9 (Sembilan) kali. Seluruh rapat tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tugas dan tanggung jawab Komite Risiko, Pengembangan dan GCG. Data kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Masa Jabatan	Rapat Komite Risiko, Pengembangan dan GCG		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Heridadi	Ketua Komite Risiko, Pengembangan & GCG	09 Juli 2015 - 08 Jan 2019	9	9	100,00%
Saud Usman Nasution *	Wakil Ketua I Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	26 April 2018 - 26 April 2023	8	8	100,00%
H.M. Subuh	Wakil Ketua II Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	09 Juli 2015 - 22 Juni 2020	9	1	11,11%
Afrizal (Independen)	Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	04 Feb 2016 - 04 Feb 2019	9	9	100,00%
Judi Januardi Endjun (Independen)	Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	04 Feb 2016 - 04 Feb 2019	9	5	55,56%

Keterangan
* Mulai Menjabat tanggal 26 April 2018

PELAKSANAAN RAPAT KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Sepanjang tahun 2018, rincian tanggal, agenda rapat, keputusan, tempat dan nama peserta Rapat Komite Risiko, Pengembangan dan GCG sebagai berikut:

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
1.	27 Februari 2018	Pembahasan monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko korporat "perubahan kebijakan regulasi nasional dan internasional"	1. Perusahaan sudah merasakan dampak dari adanya perubahan regulasi terhadap kinerja perusahaan, dimulai sejak tahun 2016 terjadi penurunan omzet, hal ini terutama terkait dampak *country regulation* yang menerapkan persyaratan-persyaratan yang ketat untuk eksport produk. Oleh karena itu perusahaan mengambil langkah – langkah untuk mengantisipasi perubahan-perubahan regulasi, antara lain memindahkan divisi *regulatory affair* yang semula dibawah Direktorat Pemasaran ditarik ke Direktorat Utama. Selanjutnya dibentuk divisi *marketing diplomacy* untuk meningkatkan usaha-usaha pendekatan ke negara-negara tujuan eksport perusahaan melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
			2. Terkait pengaturan divisi *regulatory affairs* dan pembentukan *marketing diplomacy* Komite RPG sangat mendukung dan menyarankan agar divisi - divisi tersebut dapat diisi oleh orang-orang yang kompeten dan senior yang mengerti semua aspek usaha seperti produksi, marketing terutama kemampuan *lobby* karena sifat pekerjaannya kebanyakan bukan teknis. Kaderisasi dalam divisi tersebut harus dilakukan dan dipersiapkan sebaik mungkin. 3. Sistem kualitas (*quality system*) sudah diterapkan pada seluruh *phase* produksi, mulai dari bahan baku sampai dengan distribusi produk, termasuk mengelola komplain-komplain yang timbul sehingga dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Seluruh pegawai diharapkan mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan, memelihara dan menjaga keberlangsungan sistem kualitas tersebut. 4. Saat ini kebutuhan untuk menerapkan standar mutu *country requirements* semakin tinggi mengingat *customer* perusahaan tidak hanya WHO, tetapi juga 132 negara tujuan ekspor perusahaan. Kadang-kadang standar mutu yang diterapkan masing-masing negara seperti Arab Saudi dan Mexico lebih ketat dari WHO. 5. Produk vaksin yang harus mendapat PQ WHO berjumlah 12 produk, dari ke 12 produk tersebut terdapat 3 produk vaksin yang tidak pernah dibeli oleh WHO tetapi masuk dalam PQ WHO, yaitu : TT (Uniject), Hep B (Uniject) dan mOPV1. Oleh karena itu disarankan agar dikaji apakah produk tersebut masih perlu masuk dalam daftar PQ WHO, karena PQ memerlukan biaya dan waktu. 6. Risiko-risiko terkait perubahan regulasi nasional maupun internasional dapat diidentifikasi sebanyak 3 risiko sebagai berikut : a. Ketidaksesuaian dokumen dan implementasinya dengan kebijakan, regulasi nasional dan pedoman WHO serta regulasi lain yang dipersyaratkan oleh *customer*. b. Inkonsistensi implementasi *Quality Management System* (QMS) yang dapat menimbulkan risiko ketidaksesuaian pelaksanaan proses berjalan dengan prosedur yang berlaku, pencatatan kegiatan produksi, QC, *maintenance* yang tidak *update*, dan pelaksanaan validasi dan kalibrasi yang tidak sesuai jadwal sehingga dapat berdampak produksi dihentikan dan tidak bisa menjual ke UNICEF dan Konsumen bilateral. c. Ketidaksesuaian persyaratan *containment* untuk fasilitas produksi polio *type* 2.
			7. Mitigasi risiko yang dilakukan perusahaan adalah : mengembangkan QMS, yang meliputi SOP, dokumen, dsbnya, merencanakan renovasi dan sertifikasi fasilitas produksi untuk memenuhi persyaratan *containment* fasilitas produksi vaksin polio. Komite RPG menggaris bawahi bahwa risiko terkait containment ini harus diwaspadai karena terkait *bio security* dan *bio safety*, jangan sampai masalah ini dijadikan alasan untuk menghambat perusahaan memproduksi IPV. 8. Komite Risiko menyaran agar permasalahan *Bio safety* dan *bio security* perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai, termasuk partisipasi apa yang diharapkan dari pegawai, melakukan komunikasi dan diskusi yang intensif dengan NAC untuk sertifikasi *Polio Essential Facility* (PEF), bagaimana menangani hal-hal terkait adanya perubahan kebijakan, harus ada *timeline* sebagai target untuk penyelesaian masalah masalah yang timbul. Oleh karena itu disarankan ada tim terstruktur yang menanganinya.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
			9. Beberapa kebijakan Kemenkes tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh perusahaan atau berisiko untuk tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh Bio Farma karena ketidak siapan Bio Farma untuk memproduksi sendiri maupun bekerja sama dengan mitra produsen, seperti : program imunisasi vaksin baru (*pneumo*), progam imunisasi vaksin MR dan JE, dan program imunisasi rotavirus. Komite Risiko menyarankan agar dibentuk tim yang selalu mengadakan komunikasi dengan tim Kemenkes, terutama ke direktorat jenderal P2P, mengingat program imunisasi Kemenkes tidak akan pernah berhenti dan selalu diperluas cakupan produknya. Selain itu percepatan pengembangan produk sendiri harus dilakukan agar perusahaan dapat memperoleh marjin laba yang cukup besar. 10. UU Jaminan Produk Halal (JPH) Nomor : 33/2014 sudah ditanda tangani pada tahun 2014. Produk yang harus mendapatkan sertifikat halal MUI meliputi : kelompok makanan dan minuman, kelompok kosmetik, bahan – bahan kimia dan berbagai barang yang digunakan, serta kelompok produk farmasi dan biologi. Implementasi sertifikasi halal kelompok produk farmasi dan biologi ditetapkan pada 1 November 2018. 11. Dalam rangka mengantisipasi risiko terkait UU JPH, manajemen Bio Farma sudah membentuk : Tim Eksternal, Tim Advokasi dan Tim Internal. Mitigasi risiko yang sudah diidentifikasi dan akan dilakukan meliputi antara lain : - Tim Eksternal melakukan koordinasi dan konsultasi dengan MUI/ LPPOM MUI Jabar dan BPJPH, melakukan proses sertifikasi produk, dan melakukan integrasi dengan pihak terkait seperti BPOM. - Tim Internal mempersiapkan data yang diperlukan untuk sertifikasi halal, mengkaji kesiapan produk dengan bahan *animal/porcine free*, dan melakukan koordinasi persiapan sertifikasi halal internal Bio Farma. - Hal-hal yan sudah dilakukan dalam persiapan sertifikasi halal (koordinasi internal) antara lain : • *Training* oleh LPPOM MUI, setelah dilakukan konsultasi dengan mantan ketua LPPOM MUI, pemaparan dan diskusi dengan komisi fatwa MUI. • Pengkajian bahan pembuat vaksin • Penetapan produk yang akan dilakukan sertifikasi • Persiapan registrasi, menyusun manual sistem jaminan produk halal Bia Farma, pembuatan matriks material vaksin BCG dan pelarut, menyusun tim internal audit, pelatihan tim internal audit dan tim eksternal. • Melakukan pre audit oleh LPPOM MUI, untuk persiapan audit dan melihat kekurangan-kekurangan yang mesti dilengkapi. • Melakukan regstrasi sertifikasi halal untuk vaksin BCG dan pelarut (Jan 2018). 12. Penerapan UU JPH untuk kelompok produk farmasi dan biologi baru akan dilaksanakan pada 1 November 2018 masih ada waktu bagi perusahaan untuk mendapatkan solusi terbaik. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian perusahaan dan disarankan dibahas dalam Radirkom : - Permasalahan sertifikasi halal vaksin hendaknya menjadi perhatian utama Kemenkes karena vaksin merupakan urusan anak bangsa untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu manajemen harus mengupayakan agar masalah sertifikasi halal vaksin menjadi perhatian Kemenkes. Kemenkes harus lebih *aware*.
			- Melakukan review pengaruh penerapan UU JPH terhadap RJPP karena dalam RJPP salah satu *cluster* produk yang akan dikembangkan adalah *blood product* dan mencari solusi terbaik yang dapat dilakukan - Melakukan perencanaan investasi fasilitas produksi yang akan digunakan untuk produk halal yang akan disertifikasi oleh MUI. - Mendapatkan informasi bagaimana mekanisme penggunaan Perguruan Tinggi (Salman ITB, Pajajaran *Halal Centre*) untuk dipilih sebagai Lembaga Pemeriksa Halal mengingat Perguruan Tinggi lebih memahami kriteria halal produk vaksin.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
2.	28 Mei 2018	Monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko korporat keterlambatan pelaksanaan proyek pembangunan	1. Pada tanggal 4 November 2017 dibentuk Divisi Manajemen Proyek (Manpro) untuk mengawal proyek-proyek pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas peralatan produksi/riset agar pelaksanaannya lebih lancar. Tugas dan fungsinya adalah untuk mengelola proyek–proyek yang melibatkan beberapa pihak seperti unit kerja pengguna (*user*), divisi pengadaan, divisi legal, konsultan, dsbnya. 2. Siklus pengelolaan proyek di Bio Farma dapat dibagi dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : - Kegiatan penyusunan RJPP Divisi Perencanaan dan Startegi Perusahaan merangkum inspirasi *stakeholders* dan strategi perusahaan menjadi RJPP, didalamnya termasuk perencanaan proyek-proyek investasi yang harus diadakan. - Penyusunan *master timeline* Proyek Divisi Manpro menyusun *master timeline* proyek, termasuk barang investasi proyek setelah FS disetujui. *Master timeline* proyek dijadikan pedoman penyusunan RKAP. - Penyusunan RKAP Rencana investasi untuk proyek-proyek yang melibatkan koordinasi antara unit kerja pengguna, divisi manpro, Anggaran dan divisi terkait lainnya dituangkan dalam RKAP. - Pengesahan RKAP Pengesahan RKAP terkait investai proyek dilakukan setelah seluruh data terkait selaras dengan RJPP dan *master timeline* proyek. - Monitoring Divisi manpro melakukan monitoring atas realisasi pelaksanaan pengadaan oleh divisi pengadaan apakah sudah selaras dengan *master timeline proyek*.
			3. Identifikasi risiko yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan proyek disebabkan sebagian besar karena lemahnya perencanaan seperti : - Keterlambatan kedatangan peralatan - Disain yang direncanakan tidak bisa diaplikasikan - Penyesuaian *lay out* - Disain yang belum selesai - DED yang belum selesai - Konsultan perencana yang kurang resposif - IMB yang belum terbit - Belum ada vendor yang ditunjuk 4. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengadaan dan pelaksanaan proyek investasi, Komite Risiko menyarankan beberapa hal kepada manajemen : - Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pelaksana proyek, termasuk pelaksana pengadaan dengan menyelenggarakan pelatihan berupa pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi pengadaan, walaupun dana untuk membiayai proyek bukan berasal dari dana APBN, tetapi pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan. - Mengkaji ulang SOP Pengadaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar pengadaan yang baik, dalam hal ini bisa berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah agar pelaksanaan proyek dapat dipercepat dan tetap dapat dipertanggungjawabkan - Membuat prioritas proyek-proyek untuk memperkecil dampak keterlambatan proyek pada KPI Perusahaan, karena indikasi keterlambatan terlihat dari masih kecilnya kemajuan pelaksanaan proyek sampai saat ini seperti dibahas dalam butir 5 diatas. - Memberikan kewenangan kepada manpro untuk bertindak sebagai lini pertama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam proyek, agar proses penyelesaian dapat segera dilakukan, sedangkan divisi – divisi lain yang terkait berkewajiban membantu mempersiapkan hal-hal yang diperlukan.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
3.	25 Juni 2018	Monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko korporat: 1. Keluar/ pindahnya karyawan yang memiliki talenta dan potensi tinggi, 2. Kinerja manajemen dan karyawan tidak mencapai target KPI	1. Dalam 3 tahun ini perusahaan telah memetakan 2 risiko terkait pengelolaan SDM yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan, yaitu : a. Risiko keluar/pindahnya karyawan yang memiliki talenta dan potensi tinggi dari perusahaan; b. Risiko tidak tercapainya target kinerja manajemen dan karyawan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi selama 3 tahun ini, risiko pertama cenderung tidak terjadi yang dibuktikan dengan *turn-over* pegawai yang rendah dan hampir tidak ada, kecuali karena sebab pensiun. 2. Strategi pengembangan SDM saat ini bertujuan untuk meminimalisir adanya *critical gap* (kesenjangan kritis) pengelolaan dan pengembangan SDM. Kesenjangan terjadi karena sistem SDM yang diterapkan atau yang ada sekarang belum dapat memenuhi kebutuhan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kesenjangan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut : a. Sistem Penilaian Kinerja belum berbasis KPI b. Pengelolaan *Expertise* masih belum terpetakan, dalam hal ini perusahaan belum memiliki standarisasi *expertise* yang cocok. c. Sistem Pengembangan SDM masih belum fokus, yang terlihat pada belum dibaginya mana kegiatan yang merupakan *core* dan *non core* perusahaan. d. Sistem remunerasi tidak mendukung tujuan *competitiveness* dan *productivity* perusahaan. e. Budaya korporasi yang belum tumbuh sebagai *corporate identity,*dimana nilai nilai yang dianut oleh perusahaan, seperti : *professional, customer oriented, teamwork, integrity,* dan *innovation* belum menjadi *corporate identity*, dalam arti belum tertuang dalam aspek-aspek prilaku pegawai. f. *Leadership* masih belum memadai, dimana hal ini tercermin dari hasil *assessment* yang dilakukan terhadap karyawan jenjang menengah keatas hanya 8 % yang memenuhi ekspektasi. 3. Komite RPG sependapat bahwa *updating* dan *completenes* isi peraturan-peraturan SDM, harus dilakukan secara terus menerus seiring terjadinya perubahan dan perkembangan operasional perusahaan. Peraturan – peraturan tersebut harus dalam bentuk SK Direksi sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan agar pelaksanaan kegiatan SDM ada dasar payung hukumnya sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 4. Komite Risiko menyarankan bahwa dalam membuat *road map* pengembangan SDM perlu memperhatikan kebutuhan pengembangan organisasi sesuai dengan RJPP, seperti pengembangan organisasi untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangan vaksin yang cepat dalam rangka pencegahan berbagai penyakit, kebutuhan internasionalisasi operasional perusahaan, pencegahan *bio terrorrism*, dsbnya, sehingga dapat ditentukan berapa jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan setiap tahun. 5. Komite RPG menyambut baik penerapan sistem penilaian kinerja berbasis KPI pada tahun 2018 - 2019, termasuk penentuan besarnya remunerasi didasarkan pada penilaian KPI. Sistem penilaian kinerja berbasis KPI disarankan agar direviu secara berkala apakah KPI yang diterapkan sudah berdampak baik dalam mendukung usaha-usaha untuk mencapai tujuan perusahaan.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
4.	23 Juli 2018	Rapat pembahasan risiko korporat : 1. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo (likuiditas); 2. Proyek tidak selesai pada saat jatuh tempo pembayaran (kredit investasi)	1. Pembiayaan investasi sampai saat ini menggunakan modal kerja operasional perusahaan, sehingga beresiko akan mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Kekurangan modal kerja dibiayai dengan fasilitas kredit modal kerja. Pemanfaatan kredit jangka pendek untuk membiayai investasi tidak sesuai (*mismatch*) karena investasi berdimensi jangka panjang, artinya baru menghasilkan dalam jangka panjang. 2. Investasi memerlukan pendanaan jangka panjang dari pihak luar perusahaan, pendanaan dari pihak luar ini juga diperlukan dalam rangka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek, besaran dana harus sesuai dengan kebutuhan investasi sehingga proyek tidak tersendat karena kekurangan dana. 3. Kemajuan pelaksanaan proyek harus sesuai dengan rencana, apabila proyek mundur maka kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban finansial akan terganggu, produksi mundur, *time to market* juga mundur yang berakibat proyeksi penjualan tidak tercapai. Oleh karena itu untuk memitigasi hal ini direktorat keuangan secara reguler (mingguan) melakukan pemantauan bagaimana kemajuan proyek, mana yang harus selesai, mana yang dapat ditunda, dsbnya. 4. Rencana kredit investasi yang sebelumnya telah dipersiapkan tetapi tidak digunakan, oleh Bank sindikasi diminta untuk dikaji ulang. Komite RPG menyarankan agar ada terobosan dan koordinasi dengan Bank sindikasi agar proses persetujuan pinjaman tidak dimulai dari awal lagi 5. Risiko lain yang harus dipantau adalah risiko kurs, yaitu terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, mengingat saat ini perusahaan lebih banyak melakukan penjualan dalam negeri dibandingkan eksport, sementara untuk investasi diperlukan pendanaan dalam bentuk pembayaran dalam mata uang asing. 6. Komite RPG menyarankan direktur keuangan dalam radirkom memaparkan kondisi keuangan perusahaan, terutama terkait kebutuhan pendanaan investasi, ketepatan waktu kemajuan pelaksanaan proyek, agar tidak terjadi kegagalan bayar, mana proyek investasi yang memerlukan perhatian khusus, dan perencanaan untuk lindung nilai mata uang asing yang digunakan dalam pembayaran investasi. Beberapa proyek investasi harus dapat dipaparkan mana yang menguntungkan, mana yang dapat di drop agar tidak terlalu membebani perusahaan. 7. Terkait perkembangan kurs dollar disarankan agar perusahaan melakukan simulasi bagaimana ketahanan perusahaan dalam menghadapi pelemahan rupiah, sampai batas dollar berapa perusahaan masih dapat berjalan dengan baik, dan apa-apa yang harus dilaksanakan perusahaan untuk mempertahankan perusahaan agar tetap dapat berjalan dengan baik. 8. Komite RPG menyarankan agar perusahaan memperbaiki akar permasalahannya yaitu kualitas perencanaan perusahaan yang rendah : - Struktur organisasi perusahaan agar dilengkapi dengan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan pada tingkat korporasi, sehingga fungsi perencanaan dapat dilaksanakan secara komprehensif tidak terkotak-kotak. - Perlu dilakukan perbaikan atas kualitas perencanaan, perencanaan harus dibuat secara detil, termasuk membuat rencana alternatif (*plan* A dan B), misal MTN tidak cair apa yang akan kita kerjakan; - Membuat *time line* yang rigid, dengan target keuangan sebagai patokan, kemudian diikuti target penjualan, produksi, penyelesaian gedung, pengadaan mesin, dan kesiapan tenaga kerja.
			- Manajemen proyek (Manpro) harus dapat berfungsi sebagai mata dan telinga Direksi dengan melakukan pemantauan setiap hari bagaimana kemajuan proyek, bagaimana dampaknya terhadap *timeline* pemasaran, produksi, dan rencana arus kas. - Analisis risiko dan mitigasi dilakukan tidak hanya untuk risiko korporat, sebagai contoh untuk pembangunan gedung dibuat setiap minggu karena bertujuan untuk peningkatan kapasitas produksi vaksin pengganti vaksin polio.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
5.	30 Agustus 2018	Rapat pembahasan monitoring risiko korporat : - Pemalsuan produk Bio Farma - Munculnya berita negatif di media *mainstream*	1. Komite RPG menyarankan manajemen untuk melakukan pendaftaran paten dan merk, ijin edar, sertifikasi halal, dan menjaga tidak terjadi produk kadaluarsa tetap beredar. ijin edar sudah diperoleh, dan sertifikasi halal sedang diurus. 2. Mengingat sistem penjualan produk perusahaan dilakukan secara jual putus baik kepada distributor, maupun kemenkes (dinas kesehatan) maka disarankan agar dibuat klausul dalam perjanjian kerjasama sebagai *reminder* bahwa tanggung jawab adanya produk kadaluarsa dan pemusnahannya menjadi tanggung jawab ditributor atau Kemenkes (dinas kesehatan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan peredaran obat farmasi. 3. Mekanisme penarikan produk kadaluarsa oleh produsen sangat sulit karena peredaran produk tidak hanya lokal tetapi juga nasional, kadaluarsa bisa terjadi di gudang-gudang dinas kesehatan, puskesmas atau penjual terakhir lainnya, yang terpenting perusahaan sudah mencantumkan tanggal kadaluarsa produk pada kemasan yang terjamin keamanannya, dan dalam perjanjian kerjasama dibuat klausul tanggung jawab produk kadaluarsa ada pada distributor. 4. Selanjutnya Komite RPG menyarankan agar : - Tim yang bertanggung jawab terhadap pengembangan system *track and trace* harus dapat memperesentasikan pengaruh biaya investasi terhadap harga pokok penjualan produk sebagai dasar untuk menentukan harga jual; - Tim harus dapat mempertanggungjawabkan biaya investasi dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti : rekomendasi WHO dan ketentuan nasional terkait penanganan pemalsuan produk. sehingga tidak menjadi temuan audit. - Harus dilakukan pengawalan terhadap rencana terbitnya Peraturan Kepala (Perka) BPOM agar peraturan terkait sistem anti pemalsuan produk tidak berubah, tetap mengakomodasi sistem yang telah diimplementasikan secara gloabal yaitu *GS one* sehingga kompatibel dengan sistem yamg diimplementasikan oleh Bio Farma. - Sistem TT rasanya tidak mungkin sampai kepada *end user*, tetapi cukup sampai kepada distributor/dinas kesehatan, dengan pertimbangan metode jual putus, tantangan dilapangan yang mengharuskan perusahaan realistis seperti akses internet, fasilitas gudang yang harus dipenuhi, pegawai yang kompeten untuk verifikasi yang harus disediakan, oleh karena itu tangguing jawab perusahaan hanya sampai kepada distributor/dinas kesehatan, untuk itu harus diatur dalam perjanjian kerjasama.
			5. Komite RPG menyarankan agar fokus pada media-media sosial yang kebanyakan merupakan media *on line*, karena kecepatan penyebar luasan beritanya. Selanjutnya disarankan agar dilakukan monitoring terhadap adanya berita-berita terkait perusahaan, dan memberikan respon (*counter)* yang tepat untuk meluruskannya. Saat ini perusahaan bekerjasama dengan mediaweb dan *global insight*, dan juga dengan Kementerian Kominfo untuk penutupan media sosial yang melakukan pemberitaan bohong (*hoax*) terkait anti vaksin. 6. Komite RPG menekankan kembali bahwa dalam melakukan pemberitaan atau untuk merespon berita negatif perusahaan harus meminta narasumber yang kompeten untuk bicara karena apabila kita yang bicara biasanya tidak akan didengar, misalnya terkait *issue* produk halal sebaiknya ulama yang menjelaskan. Dalam hal ini perusahaan harus menyiapkan narasi-narasi sebagai bahan masukan narasumber yang kita pilih.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
6.	24 September 2018	Pembahasan risiko korporat implementasi MRP tidak sesuai target dan risiko korporat tahun 2019	1. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap tahap pengembangan sistem tersebut antara lain : a. Pada tahap perencanaan, seperti ; *user requirement* memerlukan partisipasi banyak pihak sebagai pemilik bisnis proses agar keperluan mereka terakomodasi dalam sistem, kajian risiko harus dapat dideskripsikan dan dibuat mitigasinya agar sistem mempunyai pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko. b. Pada tahap validasi data harus betul-betul dipastikan akurasinya agar pada saat *testing*, data yang ada merupakan data yang akurat untuk diproses oleh sistem baru. c. Terkait pengembang sistem perlu dipertimbangkan apakah menggunakan pihak internal atau eksternal, perlu dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing alternatif tersebut. 2. Unit kerja yang terlibat dalam proses penyusunan sistem harus mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi untuk mensukseskan keberhasilan proyek. Pemisahan tugas untuk mereka yang melaksanakan pekerjaan rutin dan proyek MRP memang sebaiknya dilakukan agar mereka dapat fokus dan jelas pertanggungjawabannya, selain itu untuk meningkatkan motivasi staf yang terlibat sebaiknya dipertimbangkan pemberian insentif. 3. Mengingat proyek MRP ini memerlukan data terintegrasi, maka perlu melibatkan unit-unit kerja lintas bidang seperti : produksi, SDM, keuangan, akuntansi, dengan demikian sebaiknya ada konsultan yang mendisain dan mengarahkan pekerjaan dari semua unit-unit kerja tersebut dan menyampaikan hasil pekerjaan untuk diimplementasikan oleh konsultan pengembang sistem. Konsultan yang dipilih harus kompeten dan bersedia memberikan cara-cara apabila terjadi permasalahan terhadap sistem di masa mendatang, bukan membuat perusahaan tergantung pada mereka. 4. Proses penyusunan t*imeline* telah melibatkan para kepala divisi, bertujuan agar unit kerja terkait komit untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam proyek, selanjutnya evaluasi akan dilakukan secara bertahap. Komite RPG menyarankan agar *timeline* dibuat secara *rigid, timeline* yang ada sekarang terlihat mencakup suatu rentang waktu yang panjang seperti bulan Oktober s.d Desember, disarankan dibuat rincian per kegiatan dan ada dimensi waktunya, misalnya mingguan, bulanan dan interval waktu lainnya mengacu pada *grand design* proyek untuk memudahkan pengawasan atas kemajuan proyek. Selanjutnya disarankan agar aplikasi ini juga perlu disiapkan untuk mengakomodir produk-produk non vaksin, dan pola kerjasama dengan perusahaan lain atau unsur pemerintah.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
			5. Draft risiko korporat untuk RKAP tahun 2019 adalah : a. Perubahan kebijakan/regulasi nasional dan internasional b. Keterlambatan Pelaksanaan proyek pembangunan gedung c. Kegagalan divisi SDM dalam menciptakan talet karyawan d. Keluar/pindahnya karyawan yang memiliki talenta dan potensi tinggi e. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas) f. Tidak terserapnya persediaan produk g. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka panjang (kredit investasi) h. Kinerja manajemen dan karyawan tidak mencapai target KPI i. Pemalsuan produk Bio Farma j. Implementasi MRP tidak sesuai target. Urutan risiko tersebut diatas tidak mencerminkan urutan besarnya risiko, karena secara kuantitaif sedang dihitung dampak risiko tersebut 6. Beberapa catatan terkait mitigasi risiko korporat tahun 2019 yang musti diperhatikan : a. Operasional Bio Farma tidak terlepas dari regulasi baik nasional maupun internasional terutama yang berkaitan dengan negara tujuan ekspor sehingga kepatuhan terhadap regulasi harus diperhatikan dan dibuat rencana untuk melaksanakannya. b. MOU atau perjanjian harus dibuat dengan baik dan benar, termasuk di lingkungan internal untuk mencegah terjadinya pembajakan pegawai atau di eksternal untuk menjaga dampak adanya pemalsuan produk agar perusahaan tidak dirugikan finansial dan reputasinya. c. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan perbankan harus disiapkan segera mungkin agar perusahaan mendapatkan pinjaman untuk pembiayaan investasi agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek karena kekurangan biaya. Perencanaan proyek juga harus dilakukan secara baik, apakah proyek itu sifatnya *single year* atau *multi years*, begitu juga dalam pembuatan HPS harus berdasarkan data-data dari berbagai sumber yang relevan. d. Dalam setiap rekrutmen harus dilakukan *assessment* yang ketat dan dibuat pakta integritas untuk pegawai. Selain itu *job description* harus detil sehingga memberikan kepastian bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. e. *Reward* dan *punishment* harus dibuat dan dijalankan secara konsisten. Pegawai yang beprestasi harus diberikan *reward*, sedangkan pegawai yang melakukan penyimpangan harus diberi *punihment*. f. Untuk mitigasi pemalsuan produk, salah satunya dapat dilakukan dengan membuat MOU yang jelas agar produk Bio Farma tidak salah digunakan, selain itu produk Bio Farma didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga apabila ada usaha-usaha untuk menyalah gunakan produk Bio Farma, perusahaan dapat melakukan penuntutan. Risiko penyalah gunaan produk kadaluarsa disarankan juga dimonitor dan ditangani agar tidak terjadi adanya produk kadaluarsa yang masih beredar yang dapat merugikan perusahaan.
			g. Risiko munculnya berita negatif di media *mainstream* harus tetap dimonitor baik oleh divisi korkom maupun divisi kepatuhan dan manjemen risiko agar risiko yang akan muncul dapat dikendalikan dan dimitigasi dengan baik, walaupun sudah tidak menjadi risiko korporat. h. Tahun lalu ada kejadian luar biasa (*outbreak*) yang tidak diprediksi pada saat perencanaan, yaitu diphteri. Apakah dalam tahun 2019 tidak ada rencana mitigasi bila ada kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa yang saat ini menjadi risiko direktorat disarankan dikaji lagi apakah dampaknya cukup besar untuk dijadikan risiko korporat. i. Fluktuasi nilai rupiah apakah tidak masuk dalam risiko korporat mengingat ada kecenderungan dollar terus menguat dimana saat ini penerimaan Bio Farma sebagian besar berasal dari penjualan dalam negeri, sementara investasi dan import bahan baku dengan menggunakan mata uang asing. Apabila risiko fluktuasi kurs menjadi risiko direktorat, disarankan untuk dilakukan *hedging* agar tidak terlalu merugikan perusahaan apabila terjadi penguatan mata uang asing.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
7.	22 Oktober 2018	Pembahasan penanganan risiko korporat "tidak terserapnya persediaan produk" dan hasil *self assessment* penerapan GCG pada PT Bio Farma (Persero) tahun 2017-2018	1. Risiko tidak terserapnya persediaan produk dapat terjadi karena rencana penjualan tidak sesuai dengan realisasi penjualan baik di sektor ekspor mapun penjualan dalam negeri. 2. Penjualan ekspor terdiri dari penjualan produk vaksin dan bulk. Proporsi penjualan vaksin adalah 41 %, sedangkan penjalan bulk sebesar 59 %. Penjualan dilakukan baik melalui agen atau melalui tender. 3. Identifikasi kemungkinan sebab-sebab terjadinya, rencana mitigasi dan perbaikan adalah sebagai berikut: a. Kalah tender, Mitigasi : - Perlu adanya *marketing intelligence* untuk menganalisis kondisi pasar, kompetitor, harga, dan seleksi *local partner* yang bonafid; - Melakukan koordinasi intensif dengan agen Rencana perbaikan: - Produk dialihkan ke pasar lain yang dapat menyerap persediaan produk; - Mengikuti tender di negara lain untuk produk sejenis; - Meminta penghentian produksi untuk produk yang belum masuk tahapan produksi; - Membuat prognosa sesuai hasil tender; - Evaluasi harga produk. b. Penurunan *demand* produk vaksin Mitigasi : - Perlu adanya *marketing intelligence* untuk melihat kondisi pasar; - Melakukan koordinasi intensif dengan agen; - Order produksi berdasarkan rencana pemasaran, misalnya 3 bulan sebelumnya. Rencana perbaikan: - Penghentian produksi; - Monitoring *stockpile* dan ED - Melakukan promosi harga, penjualan dalam paket (*bundling*) 4. *Assessment* terhadap penerapan GCG pada PT. Bio Farma dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practise*), sehingga area yang memelukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi. *Assessment* dilakukan setiap tahun berupa *assessment* oleh pihak independen dalam hal ini BPKP dan *self assessment* secara bergantian setiap tahun.
			5. Hasil *self assessment GCG* PT. Bio Farma tahun 2017 menunjukkan bahwa perusahaan masih dapat mempertahankan peningkatan skor secara keseluruhan, yaitu total capaian 90,53 dibandingkan dengan hasil *assessment* BPK pada tahun sebelumnya, dengan total capaian 90.494. Tetapi apabila dilihat per rincian skor terjadi penurunan pada aspek pemegang saham dan RUPS dari skor 89,76 menjadi 86,19, dan aspek dewan komisaris dari 93,00 menjadi 91,60. 6. Sekalipun skor penerapan GCG perusahaan tetap meningkat, tetapi masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk tetap mempertahankan skor yang sudah dicapai dan perbaikan berkesinambungan untuk mencapai kinerja pencapaian menuju praktik-praktik terbaik penerapan GCG sebagai berikut : a. Aspek komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan : b. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal c. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas: d. Aspek Direksi:

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
8.	26 November 2018	1. Pembahasan pengembangan vaksin dan produk lainnya 2. Pembahasan monitoring dan evaluasi ERM berbasis IT	1. Dengan adanya eradikasi polio, perusahaan menghadapi tantangan besar pada kinerja keuangannya, oleh karena itu perusahaan mengembangkan strategi portofolio produk yang dapat mengganti potensi hilangnya pendapatan Bio Farma dari penjualan OPV. Perusahaan telah mengembangkan rencana untuk meluncurkan beberapa produk baru termasuk vaksin dan produk lain seperti bio similar. 2. Pelaksanaan atas rencana pengembangan produk vaksin dan produk lainnya yang dilakukan ternyata menghadapi kendala-kendala untuk dapat tercapai. Oleh karena itu disarankan harus ada kajian kelayakan projek, dengan memperhatikan hal-hal seperti : a. Sebaiknya dibuat prioritas jangka pendek dan jangka panjang, mana yang bisa diproduksi segera, mana yang perlu waktu dan biaya besar, perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk merealisasikannya; b. Kerjasama yang dibuat harus dapat mengamankan kepentingan perusahaan, jangan sampai pada saat berhasil perusahaan tidak punya hak atas produk yang dikembangkan, dalam hal ini harus didukung oleh bagian hukum yang kuat untuk membuat perjanjian kerjasama; c. Apabila proyek akan direskedul harus dikaji secara mendalam apa-apa yang harus dipersiapkan dan dicari solusi yang terbaik agar tidak berdampak buruk bagi perusahaan saat diaudit; d. Penggunaan fasilitas produksi dan SDM bersama harus diatur secara tepat, agar tidak mengganggu produksi yang telah dijadwalkan sesuai rencana penjualan, tidak menurunkan produktivitas personil karena tidak fokus, tidak mengabaikan proses cek dan ricek mutu produk, aman dari kontaminasi antara satu proses produksi dengan proses produksi berikutnya. e. Meminta pertimbangan pemegang saham sehingga apabila ada fasilitas yang bisa digunakan dari BUMN lain dapat dimanfaatkan, termasuk perhatian dan kontribusi kemenkes karena hasil pengembangan produk yang akan diperoleh adalah dalam rangka mencapai tujuan kemandirian bangsa di bidang kesehatan; f. Antrian fasilitas produksi, termasuk SDM akan mengakibatkan keterlambatan pengembangan produk dibanding kompetitor menyebabkan keterlambatan *time to market*, sehingga pada saat memasuki pasar kompetitor sudah menguasai pangsa pasar, hal ini juga dapat mengakibatkan mitra kerjasama mengundurkan diri karena perusahaan tidak dapat memenuhi skedul;
			3. Selain itu Komite RPG menggaris bawahi bahwa perusahaan bukan merupakan lembaga riset, sebaiknya riset-riset murni dilakukan oleh Dewan Riset Nasional, Bio Farma lebih fokus pada riset-riset yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil riset untuk pengembangan produk yang dapat segera diproduksi. Oleh karena itu disarankan manajemen membuat matriks garis besar riset dan pengembangan. Di dalam melakukan riset dan pengembangan kuncinya adalah prioritas, dimulai dari kebutuhan WHO, produk-produk apa yang menguntungkan, kemudian apakah tersedia fasilitas produksi dan SDM yang memungkinkan untuk merealisasikan produksi dengan biaya dan anggaran yang dapat diusahakan oleh perusahaan. 4. Berdasarkan hasil evaluasi *soft live* dan pendampingan ke setiap user di unit kerja, masih ada kendala yang sebelumnya tidak di akomodir oleh aplikasi EM. Aplikasi sudah dapat digunakan tetapi terbatas hanya untuk manajemen risiko-risiko di bagian (struktural), belum termasuk fugsional dan proyek-proyek, karena dalam pengelolaan proyek mencakup lintas bagian. Untuk mengantisipasi kekurangan fungsi-fungsi yang diperlukan pada aplikasi tersebut, perlu dilakukan pendampingan oleh konsultan IT untuk memperbaiki agar penggunaan aplikasi ERM lebih optimal. 5. Dalam pelaksanaan digitalisasi, agar sukses disarankan perusahaan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, personil yang mengoperasikan harus termotivasi untuk melaksanakannya sehingga perubahan-perubahan data akan selalu di perbaharui dalam sistem. Oleh karena itu perlu juga ada kebijakan pimpinan untuk mendorong pegawai agar berani melaporkan kejadian-kejadian apa adanya sehingga data yang di input lebih akurat. Selain itu disarankan agar perbaikan-perbaikan dapat dikawal oleh divisi kepatuhan dan manajemen risiko sehingga perbaikan dapat direalisasikan sesuai jadwal yang disepakati.

No.	Waktu Pelaksanaan	Agenda	Hasil
9.	28 Desember 2018	Allignment RKAP 2019 dengan RJPP 2018-2022	1. Penyusunan RKAP 2019 sudah merujuk kepada strategi korporasi dan arah pengembangan perusahaan. Strategi perusahaan dalam RKAP merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi korporasi dalam RJPP tahun 2018-2022, sedangkan program kerja masing-masing bidang dalam RKAP tahun 2019 merujuk kepada arah pengembangan perusahaan yang dinyatakan dalam RJPP. 2. Disamping startegi korporasi tersebut diatas, disarankan perusahaan juga membuat strategi unuk mengelola issue. Strategi pengelolaan issue sebaiknya masuk dalam RKAP dan ditangani dengan serius. Issue tersebut bisa berasal dari produk itu sendiri atau dari program pemerintah yang dijalankan oleh Bio Farma, seperti program imunisasi MR. Selama ini perusahaan sudah membentuk tim intenal untuk menangani issue-issue terkait produk halal dan anti imunisasi, seperti : program edukasi dan advokasi vaksinasi, inventarisasi bahan-bahan baku yang mengandung atau bersinggungan dengan materi yang tidak halal, registrasi produk halal, dan pengembangan produk halal. 3. Dalam pengembangan produk-produk baru, baik produk mitra, *fill & finish*, maupun produk produksi sendiri, perlu perhitungan dan solusi mitigasi yang dapat dilaksanakan, apabila belum pasti sebaiknya jangan dilaksanakan sehingga bisa lebih fokus. Beberapa kendala yang mesti dipertimbangkan adalah mekanisme registrasi ke BPOM yang kadang-kadang berubah-ubah dan dibelakukan surut, penggunaan kapasitas produksi bersama yang berisiko kontaminasi antara satu produk dengan yang lainnya, termasuk pembiyaan import yang menimbulkan risiko kurs.
			4. Walaupun penerapan UU JPH untuk produk farmasi direskedul dari bulan November 2018, perusahaan disarankan agar tetap melanjutkan program kerja terkait penerapan produk halal, selain itu juga disarankan membuat analisa capaian RKAP 2018 mengingat secara kualitatif memang sudah tercapai tetapi bagaimana detil kuantitaifnya. Sebagai contoh beberapa produk andalan seperti *blood product* dan *biosimilar* sebagai pengganti OPV belum terealisir pada tahun 2018, hal ini memerlukan analisis agar kendala-kendala yang ada seperti aturan payung dari kemenkes, supplai dari PMI, issue paten, dsbnya dapat diantisipasi dan dimitigasi. 5. Perusahaan disarankan melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi sehingga dapat memanfaatkan hasil penelitian yang dilakukan para dosen maupun tesis atau disertasi mahasiswa sehingga persahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan penembangan. 6. Secara keseluruhan perusahaan disarankan agar memperhatikan faktor-faktor kritis dalam membuat peencanaan, faktor-faktor kritis dapat berubah setiap saat, saat ini faktor kritis yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut : a. Kebijakan WHO; terutama terkait dengan *priority list* produk, tetapi harus dianalisa karena *priority list* dari WHO bersifat tidak tetap dapat berubah sehingga harus selalu dicermati; b. Kebijakan Kemenkes, terutama terkait dengan peraturan menteri tentang *blood product;* c. Peraturan BPOM, terkait dengan registrasi produk; perubahan peraturan seperti registrasi manual pada mulanya menjadi *on line* hendaknya dinegosiasi agar tidak diterapkan berlaku surut ; d. Perkembangan penyakit yang harus selalu dicermati, misalnya pengembangan vaksin flu quadrivalent saat ini, bagaimana perkembanan penyakit kedepannya. e. Kecenderungan kompetitor dan mitra kerja harus diantisipasi, jangan sampai saat akan meluncurkan produk baru, kompetitor sudah lebih siap dan punya kecenderungan akan mematikan perusahaan, begitu juga dengan mitra yang akan merugikan perusahaan. f. Percepatan penerapan digitalisasi, seperti saat ini yang sudah *on proggress* CRM, MRP maupun bidang-bidang lain sehingga direksi mendapatkan *dashboard* permasalahan – permasalahan yang dihadapi dan dapat cepat mengambil keputusan; g. Faktor geopolitik dan geostrategi perlu diperhitungkan sehingga dalam perencanaan kita harus mempersiapkan skenario pesimistik dan membuat rencana alternatif. h. Kemampuan operasional perusahaan, seperti ketersediaan fasilitas, sumber daya manusia, keuangan, dsbnya.

PENCAPAIAN KPI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Hasil pencapaian KPI Komite Risiko, Pengembangan dan GCG di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rapat Internal	5	16	
2	Rapat dengan Divisi CPS dan Direktorat Perencanaan & Pengembangan	2	2	
3	Rapat dengan Divisi CRM dan Divisi Terkait lainnya	11	9	
4	Rapat dengan Divisi SDM	2	1	
5	Rapat dengan Konsultan GCG dan Manajemen Risiko Independen (jika diperlukan)	2		
		22	28	127,27

REMUNERASI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Remunerasi bagi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG ditetapkan secara internal oleh Dewan Komisaris Bio Farma dan diatur lebih lanjut dalam SK Dewan Komisaris No: KEP-10/DK/BF/07/2016 tanggal 27 Juli 2016, diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No: KEP-08/DK/BF/07/2017 tanggal 10 Juli 2017 Tentang Penetapan Penghasilan Bagi Anggota Komite Audit Dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG PT Bio Farma (Persero).

Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang berasal dari Dewan Komisaris tidak diberikan honorarium bulanan. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang tidak berasal dari Dewan Komisaris diberikan honorarium bulanan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Komite Risiko, Pengembangan dan GCG untuk melaksanakan tugas menjadi beban Perusahaan.

PENETAPAN PENGHASILAAN BAGI ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG PT BIO FARMA (PERSERO)

Jenis Penghasilan	Besaran
Honorarium bulanan bagi anggota Komite Audit	20% x gaji Direktur Utama = Rp. 22.000.000
Tunjangan:	
1. Tunjangan Hari Raya	Tidak Ada
2. Tunjangan Komunikasi	Tidak Ada
3. Santunan Purna Jabatan	Tidak Ada
4. Tunjangan Transportasi	Tidak Ada
Fasilitas Fasilitas Kesehatan	Tidak ada
Tantiem / Insentif Kinerja	Tidak ada

Besaran remunerasi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan perincian sebagai berikut:

REMUNERASI KOMITE RISIKO PENGEMBANGAN DAN GCG TAHUN 2018

Dalam Rupiah

Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Gaji per Tahun	Tunjangan per Tahun	Gaji Bersih per Tahun	Tantiem + THR	Jumlah
			1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4
Heridadi	Ketua Komite Risiko, Pengembangan & GCG	4 Feb 2016 - 8 Januari 2019	-	-	-	-	-
Saud Usman Nasution *	Wakil Ketua I Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	26 April 2018 - 26 April 2023	-	-	-	-	-
H.M. Subuh	Wakil Ketua II Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	4 Feb 2016 - 9 Juli 2020	-	-	-	-	-
Afrizal (Independen)	Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	04 Februari 2016 - 04 Feb 2019	264.000.000	-	-	-	264.000.000
Judi Januardi Endjun (Independen)	Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	04 Februari 2016 - 04 Feb 2019	264.000.000	-	-	-	264.000.000
Total			**528.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528.000.000,00**

Keterangan

* Mulai Menjabat tanggal 26 April 2018

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Dalam rangka peningkatan kompetensi diri bagi anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri dan menunjang pelaksanaan tugas Komite Risiko, Pengembangan dan GCG. Sepanjang tahun 2018, anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG tidak mengikuti program pelatihan pengembangan kompetensi.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

AAN ROSYIANTO
SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Warga Negara Indonesia berdomisili di Jakarta, usia per 31 Desember 2018 adalah 36 tahun. Lahir di Demak, tanggal 9 September 1982, menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Indonesia.

Memiliki pengalaman kerja sebagai Pelaksana pada Bagian Kepegawaian di Biro Umum Sekretariat Kementerian Negara BUMN (2003-2004), Pelaksana pada Asisten Deputi Urusan Usaha Perhubungan di Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata (2004-2006), Pelaksana pada Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Keuangan di Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan (2006-2010), Pelaksana pada Inspektorat Kementerian BUMN (2011-2012), Kasubbid Infrastruktur dan Logistik IIA2 di Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik (2012-2013), Kasubbid Usaha Jasa IIIa2 di Deputi Bidang Usaha Jasa (2013-2014), Kasubbid Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain IIIb di Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain (2014-2015), Kasubbid Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis (2015-2017), dan Kasubbag Protokol di Sekretariat Kementerian BUMN (Juli 2017-sekarang).

DASAR HUKUM KRITERIA DAN PROSEDUR PEMBERHENTIAN & PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Kriteria dan prosedur pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tangal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN, yang antara lain mensyaratkan Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan, diangkat oleh Dewan Komisaris, memahami tata kelola perusahaan, dan mampu berkomunikasi dengan baik.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menjaga agar pelaksanaan tata tertib Dewan Komisaris secara teknis dapat dilakukan secara tertib;

2. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi maupun Pemegang Saham dan/atau pihak terkait lainnya;
3. Memberikan informasi/data yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dan Komite secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris;
5. Membuat risalah rapat baik rapat intern Dewan Komisaris, maupun rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan;
6. Dalam hal membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris harus bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan;
7. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
8. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
9. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
10. Menyampaikan kepada Komisaris Utama setiap surat yang masuk untuk mendapatkan disposisi;
11. Untuk ketertiban administrasi setiap surat yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, harus terlebih dahulu dikoreksi dan diparaf oleh Sekretaris Dewan Komisaris;
12. Untuk setiap kegiatan Komite-komite, Sekretaris Dewan Komisaris dapat membantu demi kelancaran tugas-tugas dimaksud;
13. Dengan berkoordinasi pihak manajemen, Sekretaris Dewan Komisaris setiap bulan Oktober mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Dewan Komisaris (RKAK) untuk tahun berikutnya;
14. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Komisaris dibantu oleh staf Sekretariatan Dewan Komisaris yang keberadaannya diangkat atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
15. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
16. Berkoordinasi dengan anggota Komite jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
17. Sebagai penghubung (liasion officer) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

REMUNERASI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-09/DK/BF/07/2016 tanggal 27 Juli 2016 Tentang Penetapan Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Sekretaris Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2016. Remunerasi yang diterima oleh Sekretaris Dewan Komisaris terdiri atas honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kerja.

PENETAPAN PENGHASILAAN BAGI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

No.	Jenis Penghasilan	Besaran
1.	Honorarium	15% x gaji Direktur Utama = Rp. 16.500.000
2.	Tunjangan: 1. Tunjangan Hari Raya 2. Tunjangan Komunikasi 3. Tunjangan Transportasi 4. Asuransi Purna Jabatan	 1. 1 (satu) kali Take Home Pay per bulan = Rp. 16.500.000 2. 5% dari Honorarium per bulan = Rp. 825.000 3. 20% x honorarium per bulan = Rp. 3.300.000 4. Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti) b. Premi yang ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium dalam satu tahun c. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk didalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.
3.	Fasilitas 1. Fasilitas Kesehatan 2. Bantuan Hukum	1. Sekretaris Dewan Komisaris beserta seorang suami/istri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun berhak atas fasilitas kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa: - Rawat jalan dan obat; - Rawat inap dan obat; dan - Medical check up dalam negeri 1 (satu) kali setiap tahun untuk yang bersangkutan. 2. Sesuai dengan ketentuan Perusahaan
4.	Tantiem/Insentif Kinerja	- Sesuai PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 - Sesuai Surat Edaran Wakil Menteri BUMN Nomor: SE-03/MBU/Wk/2014
5.	Kewajiban Perpajakan	Pajak Penghasilan ditanggung Perusahaan

Kewajiban perpajakan seperti pajak penghasilan ditanggung Perusahaan, kecuali pajak atas tantiem/insentif ditanggung yang bersangkutan.

Remunerasi yang diterima oleh Sekretaris Dewan Komisaris terdiri atas honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya seperti asuransi. Besaran remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris tersebut ditentukan melalui RUPS dengan perincian sebagai berikut:

REMUNERASI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Dalam Rupiah

Nama	Gaji per Tahun	Tunjangan per Tahun	Gaji Bersih per Tahun	Tantiem & THR	Jumlah
	1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4
Aan Rosyianto	198.000.000	49.500.000	247.500.000	16.500.000	264.000.000
Total	198.000.000	49.500.000	247.500.000	16.500.000	264.000.000

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka peningkatan kompetensi diri bagi sekretaris dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri dan menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2018, tidak ada program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

NAMA, DOMISILI DAN JABATAN SINGKAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

BAMBANG HERIYANTO
SEKRETARIS PERUSAHAAN

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2108 adalah 48 tahun. Lahir di Cirebon, 18 Januari 1970. Meraih gelar Sarjana Farmasi (1994) dan Apoteker (1995) dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran.

Mengawali karirnya di Bio Farma sejak tahun 1997 sebagai Staf di Bagian Pemurnian & Diagnostika/Reagensia (1997). Pernah menjabat berbagai posisi struktural dan strategis diantaranya sebagai Kepala Bagian Produksi Sera & Diagnostika tahun 2002, Kepala Bagian Formulasi & Pengisian tahun 2003, Kepala Bagian Produksi Vaksin Tetanus tahun 2009, Kepala Divisi Produksi Vaksin Virus tahun 2012, Kepala Divisi Compliance & Risk Management tahun 2015, dan diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2017 – Sekarang.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan SK Direksi Nomor 0501/HC/TKK/VII/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tidak Memiliki rangkap jabatan.

Bio Farma memiliki Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung Direksi yang memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, sebagai penghubung (liaison officer), menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS

Selain mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, dalam peraturan tersebut juga mencantumkan tentang persyaratan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dasar pengangkatan dan pemberhentian serta fungsi Sekretaris Perusahaan Bio Farma mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, Pasal 29 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada BUMN.
2. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-06/DK/BF/12/2018; Nomor: PER-06963/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* di PT Bio Farma (Persero).
3. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-07/DK/BF/12/2018; Nomor: PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi *(Board Manual)*.

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan membantu tugas Direksi memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan yang baik. Sekretaris Perusahaan Bio Farma membawahi 2 Bagian, yaitu Komunikasi Perusahaan dan Sekretariat.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 04276/DIR/XI/2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero) dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. 00117/DIR/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Perubahan Keputusan Ata Keputusan Direksi No. 04276/DIR/XI/2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero), diantaranya adalah Kedudukan Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Utama.

Sekretaris Perusahaan menjalankan tiga fungsi utama yaitu:

1. ***Gate Keeper*,** dengan fungsi melakukan analisa kesisteman korporasi baik yang telah dilaksanakan maupun sistem/standar baru yang perlu diimplementasikan ke dalam sistem manajemen terintegrasi.
2. **Sebagai *Compliance adviser***, yang berfungsi melakukan telaah dan rekomendasi kepada manajemen dalam aspek GRC *(Governance, Risk, Compliance/legal aspect)*.
3. **Sebagai *Corporate Agenda***, yang melakukan fungsi koordinasi agenda perusahaan dan kolaborasi dengan instansi lain baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN & KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan Bio Farma telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan (*Job Requirement*) mampu berkomunikasi dan membangun hubungan kerja serta mempunyai pemikiran analitis dan mampu berpikir secara konseptual. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memastikan sistem manajemen dapat terintegrasi dan corporate agenda dapat dikelola dengan efektif dan efisien melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan fungsi gate keeper dan *compliance advisor*.

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Bambang Heriyanto	Sekretaris Perusahaan	SK Direksi Nomor 0501/HC/TKK/VII/2017 Tanggal 19 Juli 2017	• Sarjana Farmasi dari Institut Teknologi Bandung • Apoteker dari Institut Teknologi Bandung • Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran (2005).	• Staf di Bagian Pemurnian & Diagnostika/ Reagensia (1997) • Kepala Bagian Produksi Sera & Diagnostika (2002) • Kepala Bagian Formulasi & Pengisian (2003) • Kepala Bagian Produksi Vaksin Tetanus (2009) • Kepala Divisi Produksi Vaksin Virus (2012) • Kepala Divisi Compliance & Risk Management sejak tahun 2015 • Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2017 – Sekarang.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahan juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap perundangan dan peraturan, serta aspek keterbukaan dari perusahaan.

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan Pemegang Saham, bertanggung jawab terhadap administrasi dokumen dan notulensi rapat, penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi korporat menangani hubungan dengan para Pemangku Kepentingan, masyarakat, serta pihak-pihak internal.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan diatur dalam Dokumen *Job Description & Job Specification* yang telah di sahkan oleh Direktur Utama tanggal 29 Juni 2018 diantaranya adalah:

Memastikan tersedianya system manajemen yang terintegrasi dan pelaksanaan agenda Perusahaan serta image Perusahaan dikelola dengan efektif dan efisien melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sebagai gatekeeper agenda Perusahaan, memfasilitasi komunikasi antara Perusahaan dengan seluruh Pemangku Kepentingan sebagai pejabat penghubung *(liason officer)* dalam komunikasi dengan semua Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)* dan melakukan pengelolaan informasi (penyediaan, perolehan, pengolahan, penatausahaan informasi) yang tepat waktu, akurat dan obyektif kepada Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)*

Rincian Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan sbb:

1. Melaksanakan dan menjabarkan kebijakan Perusahaan umumnya dan kebijakan *Corporate Secretary* khusunya dengan memperhatikan aspek mutu, lingkungan dan K3.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
3. Mewakili direksi atau perusahaan dalam menyampaikan informasi atau pernyataan kepada pihak yang berkepentingan.
4. Memastikan penerapan system managemen terintegrasi.
5. Memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG
6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyusunan laporan pelaksanaan program pengenalan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
    - Program pengenalan bagi Dewan Komisaris dan Direksi berjalan baik. Hal tersebut menimal meliputi pengenalan:
        - Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG
        - Gambaran Perusahaan
        - Kewenangan pendelegasian, audit internal dan eksternal, system dan kebijaakan pengendalian internal termasuk Komite Audit
        - Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
7. Mengikuti update informasi global
8. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan forum dan asosiasi internasional, pendokumentasian hasil rapat direksi, hasil rapat gabungan direksi- komisaris dan dokumen dewan komisaris.
9. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan *Coerporate Communication*, kegiatan Sekretariat dan kegiatan lainnya yang terkait, termasuk informasi keputusan rapat direksi kepada unit terkait.
10. Mengelola dan mengamankan semua sarana/fasilitas asset perusahaan
11. Menjalin hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal
12. Mereview aspek legal dan perjanjian yang terkait, baik dari sisi internal maupun dengan mitra luar negeri.
13. Mengimplimentasikan persyaratan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku
14. Mengimplimentasikan pelaksanaan K3
15. Mengimplimentasikan pengendalian limbah
16. Melaksanakan pengehematan SDA seperti pemakaian kertas, listrik, air, solar dan bahan baku.

Selain yang tersebut diatas tugas Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Bertindak selaku wakil Perusahaan dan pejabat penghubung antara Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengkomunikasikan kegiatan Perusahaan secara akurat dan tepat waktu.

2. Mengarahkan seluruh aspek penyelenggaraan RUPS agar acara RUPS dapat berjalan dengan baik dan lancar
3. Menetapkan strategi dan implementasi program komunikasi korporat untuk berbagai target audiens baik dalam dan luar negeri agar reputasi Bio Farma terjaga dengan baik
4. Mengendalikan penyampaian informasi kinerja Perusahaan dan *corporate action* kepada pihak-pihak yang berkepentingan
5. Menganalisis dan mengawasi pengelolaan strategi komunikasi untuk membangun citra korporat berdasarkan *key performance indicator*
6. Menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Keuangan berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, mengkoordinasikan pencatatan notulen rapat serta mengendalikan administrasi kesekretariatan Direksi
8. Sebagai *Management Representative* untuk sistem manajemen terintegrasi ISO, OHSAS, ERM, dan IFRS
9. Mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi aspek GCG, regulasi dengan risiko aktivitas perusahaan.

Terkait tugas mengevaluasi aspek-aspek GCG, Sekretaris Perusahaan memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen dalam upaya penyempurnaan dan melengkapi perangkat kebijakan GCG seperti Kode Etik Perilaku *(Code of Conduct)*, Kebijakan GCG, Pedoman Penerapan dan Penilaian Internal Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Piagam Internal Audit dan Piagam Komite Audit.

Untuk mendukung visi Perusahaan menjadi produsen vaksin kelas dunia yang berdaya saing global, Sekretaris Perusahaan mengemban tugas strategis mewakili Perusahaan untuk aktif di berbagai forum internasional seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO), Organization of Islamic Conference (OIC), DCVMN, GAVI, dan sebagainya.

URAIAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN PADA TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

LAPORAN KEGIATAN SEKRETARIS PERUSAHAANV

No.	Kegiatan
1.	Menyiapkan data/materi yang dibutuhkan oleh Direksi
2.	Menyiapkan bahan presentasi untuk Direksi, sebagai Narasumber di Internal dan eksternal perusahaan
3.	Mengagendakan jadwal Direksi
4.	Arrangement tamu Direksi
5.	Mengurus administrasi perjalanan dinas Direksi di dalam dan luar negeri
6.	Melakukan koordinasi dengan pihak intern dan ekstern Bio Farma untuk kegiatan perusahaan
7.	Menyiapkan meeting dan menindaklanjuti meeting
8.	Arrangement kunjungan tamu perusahaan dan menindaklanjuti hasil kunjungan
9.	Arrangement acara perusahaan dan menindaklanjuti hasil acara perusahaan
10.	Menjajaki e-correspondence program untuk pendistribusian surat
11.	Mengadakan acara *Coffee Morning*
12.	Dokumentasi kegiatan perusahaan
13.	Menyusun berita dan menyebarkan informasi melalui media banner, poster, spanduk, umbul-umbul, media cetak seperti majalah dan koran, *e-mail*, dan media *online* (baik media sosial dan media *online* lainnya).
14.	Kegiatan Roadshow Santri Sehat dan Silaturahmi Pimpinan Pondok Pesantren

No.	Kegiatan
15.	Mengadakan kegiatan media relations, media gathering, dan mengikuti kegiatan Forum Merdeka Barat 9
16.	Wawancara Media Massa
17.	Melaksanakan kegiatan informasi publik
18.	Melaksanakan kegiatan pemasangan iklan
19.	Media monitoring artikel perusahaan
20.	Melaksanakan update informasi konten website, konten portal BUMN

PUBLIKASI MEDIA INTERNAL TAHUN 2018

No.	Tanggal	Kategori	Link Berita
1.	Senin/ 8 Januari 2018	1. Paprika Merah, Buah Sehat yang Bikin Panjang Umur 2. 5 Makanan Super yang Wajib Dikonsumsi oleh Calon Pengantin 3. Alasan Penting Mengapa Kamu Harus Makan Buah	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95818-paprika-merah-buah-sehat-yang-bikin-panjang-umur.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95786-5-makanan-super-yang-wajib-dikonsumsi-oleh-calon-pengantin.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95784-alasan-penting-mengapa-kamu-harus-makan-buah.html
2.	Senin/ 15 Januari 2018	1. Mengagumkan, Inilah 5 Manfaat Daun Jambu Buat Kesehatan 2. Tertipu! 6 Sarapan Sehari-hari Ini Ternyata Tak Sehat Sama Sekali 3. Kapan Waktu Terbaik Makan Buah? Jawabannya Mengejutkan!	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95763-mengagumkan-inilah-5-manfaat-daun-jambu-buat-kesehatan.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95770-tertipu-7-sarapan-sehari-hari-ini-ternyata-tak-sehat-sama-sekali.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95753-kapan-waktu-terbaik-makan-buah-jawabannya-mengejutkan.html
3.	Senin/ 22 Januari 2018	1. Hal yang Harus Kamu Lakukan untuk Menjaga Kesehatan Gigi 2. Kulit Awet Muda? Tambahkan Ini Agar Kulit Cantik Alami 3. Licik, Inilah Cara Gula Memberi Makan & Menumbuhkan Sel Kanker	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95749-hal-yang-harus-kamu-lakukan-untuk-menjaga-kesehatan-gigi.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95735-kulit-awet-muda-tambahkan-ini-agar-kulit-cantik-alami.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/ 95729-licik-inilah-cara-gula-memberi-makan-menumbuhkan-sel-kanker.html
4.	Senin/ 29 Januari 2018	1. Memijat Telinga, Solusi Mudah Atasi Pusing & Menyehatkan Hati 2. 5 Gejala Kanker Usus Sering Terjadi Namun Jarang Disadari 3. Stop! Jangan Terbiasa Lakukan Ini Jika Kamu Digigit Nyamuk	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95725-memijat-telinga-solusi-mudah-atasi-pusing-menyehatkan-hati.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95721-5- gejala-kanker-usus-sering-terjadi-namun-jarang-disadari.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95692-stop-jangan-terbiasa-lakukan-ini-jika-kamu-digigit-nyamuk.html
5.	Senin/ 5 Februari 2018	1. Awas, Cahaya Lampu Berlebih di Kota Bisa Merusak Retina Mata 2. Mentega Ternyata Sehat dan Tidak Meningkatkan Risiko Jantung 3. Duh Jorok! Ini Nih Bahayanya Mengoles Lipstik Pakai Tangan...	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95672- awas-cahaya-lampu-berlebih-di-kota-bisa-merusak-retina-mata.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95633-mentega- ternyata-sehat-dan-tidak-meningkatkan-risiko-jantung.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95613-duh-jorok-ini-nih-bahayanya-mengoles-lipstik-pakai-tangan.html
6.	Senin/ 12 Februari 2018	1. Butuh Berapa Lama Untuk Buang Air Besar?Ini Tandanya Jika Sehat 2. Wow!Menekan 5 Titik Ini di Tubuh Bisa Bikin Kamu Langsing 3. Shalat Wajib Tepat Waktu Memberi Kebaikan pada Tubuh dan Pikiran	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95611- butuh-berapa-lama-untuk-buang-air-besar-ini-tandanya-jika-sehat.html 2. http://www.vemale.com/galeri/wow- menekan-5-titik-ini-di-tubuh-bisa-bikin- kamu-langsing.html 3. http://www.vemale.com/galeri/shalat-wajib-tepat-waktu-memberi-kebaikan-pada-tubuh-dan-pikiran.html
7.	Senin/ 19 Februari 2019	1. Kisah Diet Sukses, Buktikan Jika Ada Kemauan Pasti Ada Jalan 2. Cek di Sini: Sudahkah Kamu Memilih Olahraga yang Tepat? 3. 8 Gerakan Yoga untuk Membantu Proses Detoksifikasi Tubuh	1. http://www.vemale.com/galeri/sukses-buktikan-jika-ada-kemauan-pasti-ada-jalan.html 2. http://www.vemale.com/galeri/cek-di-sini-sudahkah-kamu-memilih-olahraga-yang-tepat.html 3. http://vemale.com/galeri/8-gerakan-yoga-untuk-membantu-proses-detoksifikasi-tubuh.html
8.	Senin/ 26 Februari 2018	1. Hindari Duduk dengan Posisi yang Seperti Ini 2. 10 Trik Meluangkan Waktu untuk Olahraga Saat Sudah Punya Anak 3. Gerakan Yoga 8 Menit yang Bisa Dilakukan di Atas Tempat Tidur	1. http://www.vemale.com/galeri/hindari-duduk-dengan-posisi-yang-seperti-ini.html 2. http://www.vemale.com/galeri/10-trik-meluangkan-waktu-untuk-olahraga-saat-sudah-punya-anak.html 3. http://www.vemale.com/galeri/gerakan-yoga-8-menit-yang-bisa-dilakukan-di-atas-tempat-tidur.html

No.	Tanggal	Kategori	Link Berita
9.	Senin/ 5 Maret 2018	1. Tetap Sehat Selama Puasa, Ini Perlu Dilakukan Penderita Diabetes 2. Rawan Naik, Ini Cara Mengatur Waktu Makan Setelah Puasa Ramadan 3. Stop Main Gadget di Ruang Gelap, Bisa Sebabkan Kebutaan	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95510-tetap-sehat-selama-puasa-ini-perlu-dilakukan-penderita-diabetes.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95511-rawan-naik-ini-cara-mengatur-waktu-makan-setelah-puasa-ramadan.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95505-stop-main-gadget-di-ruang-gelap-bisa-sebabkan-kebutaan.html
10.	Senin/ 12 Maret 2018	1. Hindari Ini, Kebiasaan Kecil Sebelum Tidur yang Fatal untuk Tubuh 2. Suka Makan Tempe, Ini Rahasia Kesehatannya 3. Brokoli: Sayur Sehat Mencegah Risiko Kanker, Jantung & Diabetes	1. http://www.vemale.com/body-and-mind/segar-dan-rileks/95482-hindari-ini-kebiasaan-kecil-sebelum-tidur-yang-fatal-untuk-tubuh.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95466-suka-makan-tempe-ini-rahasia-kesehatannya.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95452-brokoli-sayur-sehat-mencegah-risiko-kanker-jantung-diabetes.html
11.	Senin/ 19 Maret 2018	1. Berdiri Saat Kerja Tak Cukup Bantu Kurangi Potensi Penyakit Lho! 2. 10 Kota Paling Asyik Untuk Bersepeda 3. Suka Makan Cabe Rawit Hijau? Kamu Nggak Butuh Suplemen Kesehatan	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95448-berdiri-saat-kerja-tak-cukup-bantu-kurangi-potensi-penyakit-lho.html 2. http://www.vemale.com/galeri/10-kota-paling-asyik-untuk-bersepeda.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95365-suka-makan-cabe-rawit-hijau-kamu-nggak-butuh-suplemen-kesehatan.html
12.	Senin/ 26 Maret 2018	1. Hati-Hati! Makin Tinggi Pendidikan, Makin Besar Risiko Tumor Otak 2. Manfaat Kacang yang Seharusnya Kamu Tahu 3. Ingin Daya Tahan Tubuh Menguat?Kuncinya Adalah Puasa	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95329-hati-hati-makin-tinggi-pendidikan-makin-besar-risiko-tumor-otak.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95325-manfaat-kacang-yang-seharusnya-kamu-tahu.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95247-ingin-daya-tahan-tubuh-menguat-kuncinya-adalah-puasa.html
13.	Senin/ 2 April 2018	1. Hal yang Harus Kamu Lakukan untuk Menjaga Kesehatan Gigi 2. Awas, Cahaya Lampu Berlebih di Kota Bisa Merusak Retina Mata 3. Tertipu! 6 Sarapan Sehari-Hari Ini Ternyata Tak Sehat Sama Sekali	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95749-hal-yang-harus-kamu-lakukan-untuk-menjaga-kesehatan-gigi.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95672- awas-cahaya-lampu-berlebih-di-kota-bisa-merusak-retina-mata.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95770-tertipu-7-sarapan-sehari-hari-ini-ternyata-tak-sehat-sama-sekali.html
14.	Senin/ 9 April 2018	1. Paprika Merah, Buah Sehat yang Bikin Panjang Umur 2. 5 Makanan Super yang Wajib Dikonsumsi oleh Calon Pengantin 3. Alasan Penting Mengapa Kamu Harus Makan Buah	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95818-paprika-merah-buah-sehat-yang-bikin-panjang-umur.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95786-5-makanan-super-yang-wajib-dikonsumsi-oleh-calon-pengantin.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95784-alasan-penting-mengapa-kamu-harus-makan-buah.html
15.	Senin/ 16 April 2018	1. Mengagumkan, Inilah 5 Manfaat Daun Jambu Buat Kesehatan 2. Tertipu! 6 Sarapan Sehari-Hari Ini Ternyata Tak Sehat Sama Sekali 3. Kapan Waktu Terbaik Makan Buah?Jawabannya Mengejutkan!	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95763-mengagumkan-inilah-5-manfaat-daun-jambu-buat-kesehatan.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95770-tertipu-7-sarapan-sehari-hari-ini-ternyata-tak-sehat-sama-sekali.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95753-kapan-waktu-terbaik-makan-buah-jawabannya-mengejutkan.html
16.	Senin/ 16 April 2018	1. Hal yang Harus Kamu Lakukan untuk Menjaga Kesehatan Gigi 2. Kulit Awet Muda?Tambahkan Ini Agar Kulit Cantik Alami 3. Licik, Inilah Cara Gula Memberi Makan & Menumbuhkan Sel Kanker	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95749-hal-yang-harus-kamu-lakukan-untuk-menjaga-kesehatan-gigi.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95735-kulit-awet-muda-tambahkan-ini-agar-kulit-cantik-alami.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/ 95729-licik-inilah-cara-gula-memberi-makan-menumbuhkan-sel-kanker.html
17.	Senin/23 April 2018	1. Memijat Telinga, Solusi Mudah Atasi Pusing & Menyehatkan Hati 2. 5 Gejala Kanker Usu Sering Terjadi Namun Jarang Disadari 3. Stop! Jangan Terbiasa Lakukan Ini Jika Kamu Digigit Nyamuk	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95725-memijat-telinga-solusi-mudah-atasi-pusing-menyehatkan-hati.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95721-5- gejala-kanker-usus-sering-terjadi-namun-jarang-disadari.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95692-stop-jangan-terbiasa-lakukan-ini-jika-kamu-digigit-nyamuk.html
18.	Senin/ 30 April 2018	1. Awas, Cahaya Lampu Berlebih di Kota Bisa Merusak Retina Mata 2. Mentega Ternyata Sehat dan Tidak Meningkatkan Risiko Jantung 3. Duh Jorok! Ini Nih Bahayanya Mengoles Lipstik Pakai Tangan....	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95672- awas-cahaya-lampu-berlebih-di-kota-bisa-merusak-retina-mata.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95633-mentega- ternyata-sehat-dan-tidak-meningkatkan-risiko-jantung.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95613-duh-jorok-ini-nih-bahayanya-mengoles-lipstik-pakai-tangan.html
19.	Senin/ 7 Mei 2018	1. Butuh Berapa Lama Untuk Buang Air Besar?Ini Tandanya Jika Sehat 2. Wow! Menekan 5 Titik Ini di Tubuh Bisa Bikin Kamu Langsing 3. Shalat Wajib Tepat Waktu Memberi Kebaikan pada Tubuh dan Pikiran	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95611- butuh-berapa-lama-untuk-buang-air-besar-ini-tandanya-jika-sehat.html 2. http://www.vemale.com/galeri/wow- menekan-5-titik-ini-di-tubuh-bisa-bikin- kamu-langsing.html 3. http://www.vemale.com/galeri/shalat-wajib-tepat-waktu-memberi-kebaikan-pada-tubuh-dan-pikiran.html

No.	Tanggal	Kategori	Link Berita
20.	Senin/ 14 Mei 2018	1. Kisah Diet Sukses, Buktikan Jika Ada Kemauan Pasti Ada Jalan 2. Cek di Sini: Sudahkah Kamu Memilih Olahraga yang Tepat? 3. 8 Gerakan Yoga untuk Membantu Proses Detoksifikasi Tubuh	1. http://www.vemale.com/galeri/sukses-buktikan-jika-ada-kemauan-pasti-ada-jalan.html 2. http://www.vemale.com/galeri/cek-di-sini-sudahkah-kamu-memilih-olahraga-yang-tepat.html 3. http://vemale.com/galeri/8-gerakan-yoga-untuk-membantu-proses-detoksifikasi-tubuh.html
21.	Senin/ 21 Mei 2018	1. Hindari Duduk dengan Posisi yang Seperti Ini 2. 10 Trik Meluangkan Waktu untuk Olahraga Saat Sudah Punya Anak 3. Gerakan Yoga 8 Menit yang Bisa Dilakukan di Atas Tempat Tidur	1. http://www.vemale.com/galeri/hindari-duduk-dengan-posisi-yang-seperti-ini.html 2. http://www.vemale.com/galeri/10-trik-meluangkan-waktu-untuk-olahraga-saat-sudah-punya-anak.html 3. http://www.vemale.com/galeri/gerakan-yoga-8-menit-yang-bisa-dilakukan-di-atas-tempat-tidur.html
22.	Senin/ 28 Mei 2018	1. Tetap Sehat Selama Puasa, Ini Perlu Dilakukan Penderita Diabetes 2. Rawan Naik, Ini Cara Mengatur Waktu Makan Setelah Puasa Ramadan 3. Stop Main Gadget di Ruang Gelap, Bisa Sebabkan Kebutaan	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95510-tetap-sehat-selama-puasa-ini-perlu-dilakukan-penderita-diabetes.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95511-rawan-naik-ini-cara-mengatur-waktu-makan-setelah-puasa-ramadan.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95505-stop-main-gadget-di-ruang-gelap-bisa-sebabkan-kebutaan.html
23.	Senin/ 4 Juni 2018	1. Hindari Ini, Kebiasaan Kecil Sebelum Tidur yang Fatal untuk Tubuh 2. Suka Makan Tempe, Ini Rahasia Kesehatannya 3. Brokoli: Sayur Sehat Mencegah Risiko Kanker, Jantung & Diabetes	1. http://www.vemale.com/body-and-mind/segar-dan-rileks/95482-hindari-ini-kebiasaan-kecil-sebelum-tidur-yang-fatal-untuk-tubuh.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95466-suka-makan-tempe-ini-rahasia-kesehatannya.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95452-brokoli-sayur-sehat-mencegah-risiko-kanker-jantung-diabetes.html
24.	Senin/ 25 Juni 2018	1. Hal yang Harus Kamu Lakukan untuk Menjaga Kesehatan Gigi 2. Awas, Cahaya Lampu Berlebih di Kota Bisa Merusak Retina Mata 3. Tertipu! 6 Sarapan Sehari-Hari Ini Ternyata Tak Sehat Sama Sekali	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95749-hal-yang-harus-kamu-lakukan-untuk-menjaga-kesehatan-gigi.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95672- awas-cahaya-lampu-berlebih-di-kota-bisa-merusak-retina-mata.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95770-tertipu-7-sarapan-sehari-hari-ini-ternyata-tak-sehat-sama-sekali.html
25.	Senin/ 2 Juli 2018	1. Paprika Merah, Buah Sehat yang Bikin Panjang Umur 2. 5 Makanan Super yang Wajib Dikonsumsi oleh Calon Pengantin 3. Alasan Penting Mengapa Kamu Harus Makan Buah	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95818-paprika-merah-buah-sehat-yang-bikin-panjang-umur.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95786-5-makanan-super-yang-wajib-dikonsumsi-oleh-calon-pengantin.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95784-alasan-penting-mengapa-kamu-harus-makan-buah.html
26.	Senin/ 9 Juli 2018	1. Mengagumkan, Inilah 5 Manfaat Daun Jambu Buat Kesehatan 2. Tertipu! 6 Sarapan Sehari-Hari Ini Ternyata Tak Sehat Sama Sekali 3. Kapan Waktu Terbaik Makan Buah?Jawabannya Mengejutkan!	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95763-mengagumkan-inilah-5-manfaat-daun-jambu-buat-kesehatan.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95770-tertipu-7-sarapan-sehari-hari-ini-ternyata-tak-sehat-sama-sekali.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95753-kapan-waktu-terbaik-makan-buah-jawabannya-mengejutkan.html
27.	Senin/ 16 Juli 2018	1. Hal yang Harus Kamu Lakukan untuk Menjaga Kesehatan Gigi 2. Kulit Awet Muda?Tambahkan Ini Agar Kulit Cantik Alami 3. Licik, Inilah Cara Gula Memberi Makan & Menumbuhkan Sel Kanker	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95749-hal-yang-harus-kamu-lakukan-untuk-menjaga-kesehatan-gigi.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95735-kulit-awet-muda-tambahkan-ini-agar-kulit-cantik-alami.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/ 95729-licik-inilah-cara-gula-memberi-makan-menumbuhkan-sel-kanker.html
28.	Senin/ 23 Juli 2018	1. Memijat Telinga, Solusi Mudah Atasi Pusing & Menyehatkan Hati 2. 5 Gejala Kanker Usu Sering Terjadi Namun Jarang Disadari 3. Stop! Jangan Terbiasa Lakukan Ini Jika Kamu Digigit Nyamuk	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95725-memijat-telinga-solusi-mudah-atasi-pusing-menyehatkan-hati.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95721-5- gejala-kanker-usus-sering-terjadi-namun-jarang-disadari.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95692-stop-jangan-terbiasa-lakukan-ini-jika-kamu-digigit-nyamuk.html
29.	Senin/ 30 Juli 2018	1. Awas, Cahaya Lampu Berlebih di Kota Bisa Merusak Retina Mata 2. Mentega Ternyata Sehat dan Tidak Meningkatkan Risiko Jantung 3. Duh Jorok! Ini Nih Bahayanya Mengoles Lipstik Pakai Tangan....	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95672- awas-cahaya-lampu-berlebih-di-kota-bisa-merusak-retina-mata.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95633-mentega- ternyata-sehat-dan-tidak-meningkatkan-risiko-jantung.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95613-duh-jorok-ini-nih-bahayanya-mengoles-lipstik-pakai-tangan.html
30.	Senin/ 6 Agustus 2018	1. Butuh Berapa Lama Untuk Buang Air Besar?Ini Tandanya Jika Sehat 2. Wow! Menekan 5 Titik Ini di Tubuh Bisa Bikin Kamu Langsing 3. Shalat Wajib Tepat Waktu Memberi Kebaikan pada Tubuh dan Pikiran	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95611- butuh-berapa-lama-untuk-buang-air-besar-ini-tandanya-jika-sehat.html 2. http://www.vemale.com/galeri/wow- menekan-5-titik-ini-di-tubuh-bisa-bikin- kamu-langsing.html 3. http://www.vemale.com/galeri/shalat-wajib-tepat-waktu-memberi-kebaikan-pada-tubuh-dan-pikiran.html

No.	Tanggal	Kategori	Link Berita
31.	Senin/ 13 Agustus 2018	1. Kisah Diet Sukses, Buktikan Jika Ada Kemauan Pasti Ada Jalan 2. Cek di Sini: Sudahkah Kamu Memilih Olahraga yang Tepat? 3. 8 Gerakan Yoga untuk Membantu Proses Detoksifikasi Tubuh	1. http://www.vemale.com/galeri/sukses-buktikan-jika-ada-kemauan-pasti-ada-jalan.html 2. http://www.vemale.com/galeri/cek-di-sini-sudahkah-kamu-memilih-olahraga-yang-tepat.html 3. http://vemale.com/galeri/8-gerakan-yoga-untuk-membantu-proses-detoksifikasi-tubuh.html
32.	Senin/ 20 Agustus 2018	1. Hindari Duduk dengan Posisi yang Seperti Ini 2. 10 Trik Meluangkan Waktu untuk Olahraga Saat Sudah Punya Anak 3. Gerakan Yoga 8 Menit yang Bisa Dilakukan di Atas Tempat Tidur	1. http://www.vemale.com/galeri/hindari-duduk-dengan-posisi-yang-seperti-ini.html 2. http://www.vemale.com/galeri/10-trik-meluangkan-waktu-untuk-olahraga-saat-sudah-punya-anak.html 3. http://www.vemale.com/galeri/gerakan-yoga-8-menit-yang-bisa-dilakukan-di-atas-tempat-tidur.html
33.	Senin/ 27 Agustus 2018	1. Tetap Sehat Selama Puasa, Ini Perlu Dilakukan Penderita Diabetes 2. Rawan Naik, Ini Cara Mengatur Waktu Makan Setelah Puasa Ramadan 3. Stop Main Gadget di Ruang Gelap, Bisa Sebabkan Kebutaan	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95510-tetap-sehat-selama-puasa-ini-perlu-dilakukan-penderita-diabetes.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95511-rawan-naik-ini-cara-mengatur-waktu-makan-setelah-puasa-ramadan.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95505-stop-main-gadget-di-ruang-gelap-bisa-sebabkan-kebutaan.html
34.	Senin/ 1 Oktober 2018	1. Paprika Merah, Buah Sehat yang Bikin Panjang Umur 2. 5 Makanan Super yang Wajib Dikonsumsi oleh Calon Pengantin 3. Alasan Penting Mengapa Kamu Harus Makan Buah	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95818-paprika-merah-buah-sehat-yang-bikin-panjang-umur.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95786-5-makanan-super-yang-wajib-dikonsumsi-oleh-calon-pengantin.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95784-alasan-penting-mengapa-kamu-harus-makan-buah.html
35.	Senin/ 8 Oktober 2018	1. Mengagumkan, Inilah 5 Manfaat Daun Jambu Buat Kesehatan 2. Tertipu! 6 Sarapan Sehari-Hari Ini Ternyata Tak Sehat Sama Sekali 3. Kapan Waktu Terbaik Makan Buah?Jawabannya Mengejutkan!	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95763-mengagumkan-inilah-5-manfaat-daun-jambu-buat-kesehatan.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95770-tertipu-7-sarapan-sehari-hari-ini-ternyata-tak-sehat-sama-sekali.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95753-kapan-waktu-terbaik-makan-buah-jawabannya-mengejutkan.html
36.	Senin/ 15 Oktober 2018	1. Hal yang Harus Kamu Lakukan untuk Menjaga Kesehatan Gigi 2. Kulit Awet Muda?Tambahkan Ini Agar Kulit Cantik Alami 3. Licik, Inilah Cara Gula Memberi Makan & Menumbuhkan Sel Kanker	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95749-hal-yang-harus-kamu-lakukan-untuk-menjaga-kesehatan-gigi.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95735-kulit-awet-muda-tambahkan-ini-agar-kulit-cantik-alami.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/ 95729-licik-inilah-cara-gula-memberi-makan-menumbuhkan-sel-kanker.html
37.	Senin/22 Oktober 2018	1. Memijat Telinga, Solusi Mudah Atasi Pusing & Menyehatkan Hati 2. 5 Gejala Kanker Usu Sering Terjadi Namun Jarang Disadari 3. Stop! Jangan Terbiasa Lakukan Ini Jika Kamu Digigit Nyamuk	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95725-memijat-telinga-solusi-mudah-atasi-pusing-menyehatkan-hati.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95721-5- gejala-kanker-usus-sering-terjadi-namun-jarang-disadari.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95692-stop-jangan-terbiasa-lakukan-ini-jika-kamu-digigit-nyamuk.html
38.	Senin/ 29 Oktober 2018	1. Awas, Cahaya Lampu Berlebih di Kota Bisa Merusak Retina Mata 2. Mentega Ternyata Sehat dan Tidak Meningkatkan Risiko Jantung 3. Duh Jorok! Ini Nih Bahayanya Mengoles Lipstik Pakai Tangan....	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95672- awas-cahaya-lampu-berlebih-di-kota-bisa-merusak-retina-mata.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95633-mentega- ternyata-sehat-dan-tidak-meningkatkan-risiko-jantung.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95613-duh-jorok-ini-nih-bahayanya-mengoles-lipstik-pakai-tangan.html
39.	Senin/ 5 November 2018	1. Butuh Berapa Lama Untuk Buang Air Besar?Ini Tandanya Jika Sehat 2. Wow! Menekan 5 Titik Ini di Tubuh Bisa Bikin Kamu Langsing 3. Shalat Wajib Tepat Waktu Memberi Kebaikan pada Tubuh dan Pikiran	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95611- butuh-berapa-lama-untuk-buang-air-besar-ini-tandanya-jika-sehat.html 2. http://www.vemale.com/galeri/wow- menekan-5-titik-ini-di-tubuh-bisa-bikin- kamu-langsing.html 3. http://www.vemale.com/galeri/shalat-wajib-tepat-waktu-memberi-kebaikan-pada-tubuh-dan-pikiran.html
40.	Senin/ 12 November 2018	1. Kisah Diet Sukses, Buktikan Jika Ada Kemauan Pasti Ada Jalan 2. Cek di Sini: Sudahkah Kamu Memilih Olahraga yang Tepat? 3. 8 Gerakan Yoga untuk Membantu Proses Detoksifikasi Tubuh	1. http://www.vemale.com/galeri/sukses-buktikan-jika-ada-kemauan-pasti-ada-jalan.html 2. http://www.vemale.com/galeri/cek-di-sini-sudahkah-kamu-memilih-olahraga-yang-tepat.html 3. http://vemale.com/galeri/8-gerakan-yoga-untuk-membantu-proses-detoksifikasi-tubuh.html
41.	Senin/ 19 Oktober 2018	1. Hindari Duduk dengan Posisi yang Seperti Ini 2. 10 Trik Meluangkan Waktu untuk Olahraga Saat Sudah Punya Anak 3. Gerakan Yoga 8 Menit yang Bisa Dilakukan di Atas Tempat Tidur	1. http://www.vemale.com/galeri/hindari-duduk-dengan-posisi-yang-seperti-ini.html 2. http://www.vemale.com/galeri/10-trik-meluangkan-waktu-untuk-olahraga-saat-sudah-punya-anak.html 3. http://www.vemale.com/galeri/gerakan-yoga-8-menit-yang-bisa-dilakukan-di-atas-tempat-tidur.html
42.	Senin/ 26 Oktober 2018	1. Tetap Sehat Selama Puasa, Ini Perlu Dilakukan Penderita Diabetes 2. Rawan Naik, Ini Cara Mengatur Waktu Makan Setelah Puasa Ramadan 3. Stop Main Gadget di Ruang Gelap, Bisa Sebabkan Kebutaan	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95510-tetap-sehat-selama-puasa-ini-perlu-dilakukan-penderita-diabetes.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95511-rawan-naik-ini-cara-mengatur-waktu-makan-setelah-puasa-ramadan.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95505-stop-main-gadget-di-ruang-gelap-bisa-sebabkan-kebutaan.html

No.	Tanggal	Kategori	Link Berita
43.	Senin/ 3 Desember 2018	1. Hindari Ini, Kebiasaan Kecil Sebelum Tidur yang Fatal untuk Tubuh 2. Suka Makan Tempe, Ini Rahasia Kesehatannya 3. Brokoli: Sayur Sehat Mencegah Risiko Kanker, Jantung & Diabetes	1. http://www.vemale.com/body-and-mind/segar-dan-rileks/95482-hindari-ini-kebiasaan-kecil-sebelum-tidur-yang-fatal-untuk-tubuh.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95466-suka-makan-tempe-ini-rahasia-kesehatannya.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95452-brokoli-sayur-sehat-mencegah-risiko-kanker-jantung-diabetes.html
44.	Senin/ 10 Desember 2018	1. Berdiri Saat Kerja Tak Cukup Bantu Kurangi Potensi Penyakit Lho! 2. 10 Kota Paling Asyik Untuk Bersepeda 3. Suka Makan Cabe Rawit Hijau? Kamu Nggak Butuh Suplemen Kesehatan	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95448-berdiri-saat-kerja-tak-cukup-bantu-kurangi-potensi-penyakit-lho.html 2. http://www.vemale.com/galeri/10-kota-paling-asyik-untuk-bersepeda.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95365-suka-makan-cabe-rawit-hijau-kamu-nggak-butuh-suplemen-kesehatan.html
45.	Senin/ 17 Desember 2018	1. Hati-Hati! Makin Tinggi Pendidikan, Makin Besar Risiko Tumor Otak 2. Manfaat Kacang yang Seharusnya Kamu Tahu 3. Ingin Daya Tahan Tubuh Menguat?Kuncinya Adalah Puasa	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95329-hati-hati-makin-tinggi-pendidikan-makin-besar-risiko-tumor-otak.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95325-manfaat-kacang-yang-seharusnya-kamu-tahu.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95247-ingin-daya-tahan-tubuh-menguat-kuncinya-adalah-puasa.html
46.	Senin/ 24 Desember 2018	1. Hal yang Harus Kamu Lakukan untuk Menjaga Kesehatan Gigi 2. Awas, Cahaya Lampu Berlebih di Kota Bisa Merusak Retina Mata 3. Tertipu! 6 Sarapan Sehari-Hari Ini Ternyata Tak Sehat Sama Sekali	1. http://www.vemale.com/kesehatan/95749-hal-yang-harus-kamu-lakukan-untuk-menjaga-kesehatan-gigi.html 2. http://www.vemale.com/kesehatan/95672- awas-cahaya-lampu-berlebih-di-kota-bisa-merusak-retina-mata.html 3. http://www.vemale.com/kesehatan/95770-tertipu-7-sarapan-sehari-hari-ini-ternyata-tak-sehat-sama-sekali.html

EVALUASI KINERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2018

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan strategi maupun rencana kerja terkait penyampaian informasi kepada investor dan publik. Dalam pelaksanaan internalisasi GCG, *Corporate Secretary* telah melaksanakan berbagai kegiatan secara berkesinambungan dalam upaya membudayakan penerapan GCG di seluruh lingkungan Bio Farma. Evaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan diukur dengan KPI Sekretaris Perusahaan. Pencapaian KPI Sekretaris Perusahaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

***REALISASI KEY PERFORMANCE INDICATORS* (KPI) SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2018**

No	Indikator	Target *)	Formula	Satuan	Bobot	Nilai	Skor
A.	RUTIN						
1	Memastikan Pengelolaan Informasi Publik, memastikan Penyusunan Annual Report & Sustainability Report 2017	Paling lambat 3 bulan setelah Laporan Audited diterima perusahaan	Realisasi/Target	%	15	100%	15,00
2	Memastikan Peningkatan dan pengelolaan Corporate Image secara Nasional dan Global melalui semua saluran komunikasi	Peningkatan berita positif 10%	Realisasi/Target	%	20	100%	20,00
3	Mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan event yang melibatkan pihak dalam maupun luar negeri (Forum Riset Vaksin Nasional)	Penyelenggaraan minimal 1 event	Realisasi/Target	%	15	100%	15,00
4	Memastikan pembuatan dan update dokumentasi perusahaan (company profile video, buku company profile)	Paling Lambat Desember 2018 dana terserap 80% dari anggaran	Realisasi/Target	%	15	100%	15,00

No	Indikator	Target *)	Formula	Satuan	Bobot	Nilai	Skor
5	Mereview dan Merespon terhadap korespondensi dengan stakeholder, serta merencanakan, mengkoordinasikand ena mengendalikan kegiatan-kegiatan dalam hal kesekretariatan	Tidak kurang dari 75% diberikan dalalm waktu 2 (dua) hari kerja	Realisasi/Target	%	15	90%	13,50
		Sub Jumlah			**80**		**78,50**
B.	NON RUTIN						
6	Implementasi Quality Management Sistem terintegrasi	Integrasi Manajemen Sistem	Realisasi/Target	%	10	100%	10,00
7	Realisasi Investasi Tahun 2018 Rp441.400.000	tidak kurang dari 75% dapat direalisasikan pada tahun berjalan	Realisasi/Target	%	10	100%	10,00
		Sub Jumlah			20		20,00
		Jumlah			**100**	**-**	**98,50**

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Guna menunjang kinerja Sekretaris Perusahaan serta menambah wawasan dalam bidang *Good Corporate Governance* maka selama tahun 2018, program pelatihan yang diberikan adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

No	Tgl	Topik	Tempat Pelatihan	Jenis Pelatihan
1.	19 – 20 Februari 2018	*Capability Assessment* Kepala Divisi Batch #1	Hotel Manhat-tan, Jakarta	Assessment
2.	28 Februari 2018	*Awareness of Environmental Management System* ISO 14001:2015	Hotel Aston Tropicana, Band-ung	Pelatihan
3.	7 Maret 2018	*Sharing Session* Pembentukan Badan Usaha Baru	Hotel Holiday Inn, Bandung	Meeting/Musyawarah
4.	27-28 Maret 2018	Pertemuan Optimalisasi Kepatuhan BUMN terhadap Program JKN KIS	Jakarta	Seminar
5.	2-3 April 2018	*Strategic Managemenet* Tingkat Kepala Divisi Batch #1	Hotel Holiday Inn, Bandung	Pelatihan
6.	30 April 2018	*Workshop "Leadership Coaching"* Tingkat Kepala Divisi	Hotel Grand Tjokro, Bandung	Workshop
7.	4 Desember 2018	*Key Performance Indicator*	Bio Farma, Bandung	Pelatihan
8.	10-12 Desember 2018	*Business Leadership Execution*	Hotel Holiday Inn, Bandung	Pelatihan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS sebagai Organ Perusahaan merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, termasuk untuk melakukam penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

RUPS sebagai Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar.

Organ Perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ Perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang,

RUPS memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja dan meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal pengelolaan perusahaan, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba, dan menunjuk akuntan publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham sebagai Pemilik Modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan.

Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan.
2. Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (fairness) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

HAK PEMEGANG SAHAM

Hak pemegang saham harus dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara
2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat
3. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya
4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam perusahaan, maka:
   a. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki
   b. Setiap pemegang saham berhak untuk

diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya

TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
   a. kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
   b. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (ultimate shareholders) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait
2. Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
3. Pemegang saham harus dapat:
   a. Memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi
   b. Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut
4. Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar-perusahaan dapat dilakukan secara jelas

TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

1. Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
2. Perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
4. Perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
5. Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.

AKSES INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Bio Farma telah menyediakan akses terhadap informasi untuk memungkinkan pemegang saham melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, yaitu:

RUPS
Media penyampaian laporan dan informasi dimana memungkinkan pemegang saham dapat berpatisipasi dalam pengambilan keputusan

Media Elektronik
Situs: www.biofarma.co.id
Email: mail@biofarma.co.id

Media Sosial
Facebook: infoimunisasi
Twitter: @biofarmaID
Instagram: @biofarmaID
Youtube: biofarmaID

PENYELENGGARAAN RUPS

SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN TERDAPAT 2 JENIS RUPS

RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun meliputi:

1. RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan, diadakan paling lama dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.
2. RUPS mengenai persetujuan RKAP Perusahaan, diadakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan).

RUPS LUAR BIASA

RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2018

RUPS mengenai persetujuan RKAP Dan Rencana Kerja & Anggaran PKBL Tahun 2018 yang diselenggarakan tanggal 17 Januari 2018, RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 23 Januari 2018, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan dan penataan susunan keanggotaan Direksi Bio Farma. RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 20 April 2018, perombakan susunan Dewan Komisaris Bio Farma. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) mengenai persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 & Laporan Kegiatan PKBL yang diselenggarakan tanggal 25 April 2018. RUPS mengenai persetujuan RKAP Dan Rencana Kerja & Anggaran PKBL Tahun 2019 diselenggarakan tanggal 28 Desember 2018.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN RUPS DAN RUPS LUAR BIASA

RUPS TAHUNAN

Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Mengenai Pelaksanaan RUPS Tahunan
Pengumuman RUPS disampaikan paling lambat 14 hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS

Pemanggilan Kepada Pemegang Saham Mengenai RUPS Tahunan
Pemanggilan RUPS disampaikan paling lambat 21 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS Tahunan

Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan
Ringkasan Risalah RUPS disampaikan paling lambat 2 hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS

Penyampaian Risalah/Berita Acara RUPS
Risalah/Berita Acara RUPS disampaikan paling lambat 30 hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS

RUPS LUAR BIASA

Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Mengenai Pelaksanaan RUPS Luar Biasa
Pengumuman RUPS disampaikan paling lambat 14 hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS

Pemanggilan Kepada Pemegang Saham Mengenai RUPS Luar Biasa
Pemanggilan RUPS disampaikan paling lambat 21 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa

Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa
Ringkasan Risalah RUPS disampaikan paling lambat 2 hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS

Penyampaian Risalah/Berita Acara RUPS Luar Biasa
Risalah/Berita Acara RUPS Luar Biasa disampaikan paling lambat 30 hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS

KETENTUAN KUORUM

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan yang berlaku.

Seluruh kuorum kehadiran, baik dalam RUPS Tahun Buku 2017 maupun RUPS Tahun 2018 telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat bagi para Pemegang Saham Perseroan untuk setiap Mata Acara Rapat.

PROSES PENGHITUNGAN SUARA

Perhitungan suara dan prosedur pemungutan suara dalam RUPS Tahunan dijelaskan dalam Tata Tertib RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham dan dibacakan oleh Pimpinan Rapat sebelum RUPS dimulai.

KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2018 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselanggarakan.

TAHAPAN PENYELENGGARAN RUPS TAHUN 2018

RUPS Persetujuan RKAP Perusahaan Tahun Buku 2018		RUPS Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 & Laporan Kegiatan PKBL
03 Januari 2018	**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM MENGENAI PELAKSANAAN RUPS**	**11 April 2018**
Bio Farma mengirimkan surat undangan kepada pemegang saham, Surat No. 00056/DIR/I/2018		Bio Farma mengirimkan surat undangan kepada pemegang saham, Surat No. 01590/DIR/IV/2018
17 January 2018	**PELAKSANAAN RUPS**	**25 April 2018**
Pelaksanaan RUPS di Kantor Kemetrian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusar		Pelaksanaan RUPS di Kantor Kemetrian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusar
Penyampaian Risalah/Berita Acara RUPS No 19 secara langsung kepada Kementerian BUMN		Penyampaian Risalah/Berita Acara RUPS No 16 secara langsung kepada Kementerian BUMN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TENTANG PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN RENCANA KERJA ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (RKA-PKBL) TAHUN 2018

PENYELENGGARAN RUPS RKAP & RKA PKBL TAHUN 2018

WAKTU, TEMPAT DAN AGENDA RUPS RKAP & RKA PKBL TAHUN 2018

Sesuai dengan surat undangan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma No. 00056/DIR/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 telah diselenggarakan RUPS PT Bio Farma (Pesero) pada:

Hari, tanggal : 17 Januari 2018
Waktu : 11.00 WIB sampai 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lantai 6. Gedung Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat – 10110

DASAR PENYELENGGARAAN RUPS RKAP & RKA PKBL TAHUN 2018

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4297)
2. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4756)
3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1997 Tentang Pngalihan Bentuk Perusahaan Umum Bio Farma Menjadi Peusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 4)
4. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero) telah mendapat persetujuan berdasrkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-1423 HT.01.01. Th98 tanggal 5 Maret 1998, yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 16 Juli 2002 No. 57Tambahan No. 6884. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana dimuat dalam akta No. 34 Tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0024481.AH.01.02.Tahun 2016 Tanggal 21 Desember 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bio Farma (Persero), serta sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0109923 Tanggal 21 Desember 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero).
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER—01//MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER—09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012,
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan telah diubah dengan Peraturan Mnteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017
9. Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-11/MBU/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Perseroan telah memberi Kuasa kepada Wahyu Kuncoro Deputi Bidang Uasaha Industri Agro Dan Farmasi Kementrian BUMN mewakili RUPS Perseroan.

PESERTA RUPS RKAP & RKA PKBL TAHUN 2018

RUPS Tahunan 2018 dihadiri oleh Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris, Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi, Pemegang Saham dan Para Undangan.

Nama Komisaris	Jabatan	Keanggotaan pada Komite	Kehadiran	
			Hadir	Tidak
Kuasa Pemegang Saham				
Wahyu Kuncoro	Deputi Bidang Uasaha Industri Agro Dan Farmasi Kementrian BUMN		√	
Dewan Komisaris				
Ahmad Ramli	Komisaris Utama	-	√	
Heridadi	Komisaris	Ketua Komite Risiko, Pengembangan & GCG	√	
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	Wakil Ketua II Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	√	
Mohamad Subuh *	Komisaris	Wakil Ketua II Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG		√
Direksi				
Juliman	Plt Direktur Utama & Direktur Produksi		√	
M. Rahman Roestan	Direktur Pemasaran		√	
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan		√	
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan		√	
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umum		√	
Undangan				
Sabar Wicaksomo	Kepada Bidang Usaha Industri - Agro Dan Farmasi II B Kementerian BUMN		√	
Pejabat Serta Staf Kementerian BUMN Dan PT Bio Farma (Persero)			√	

Keterangan
*M. Subuh berhalangan hadir dan dikuasakan kepada Ihsan Setiadi Latief sesuai Surat Kuasa Nomor: SKU-01/DK/BF/01/2018 tanggal 16 Januari 2018.

JALANNYA RUPS RKAP & RKA PKBL TAHUN 2018

1. RUPS dibuka oleh Komisaris Utama yang selanjutnya menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi selaku Kuasa Pemegang Saham untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat.
2. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persayaratan yuridis sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
3. Pemaparan oleh Plt. Diretur Utama mengenai Gambaran Umum RKAP Tahun 2018.
4. Pemaparan oleh Direktur Pemasaran mengenai Asumsi Penyusunan RKAP 2018, Pemenuhan Shareholder Aspiration (SHA) RKAP 2018, Anggaran Penjualan Per Sektor Tahun 2018, Anggaran Beban Perusahaan Tahun 2018, Anggaran

Investasi Per Kelompok Tahun 2018, Proyeksi Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2018, Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Tahun 2018, Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Tahun 2018 (Kewajiban & Ekuitas).

5. Proyeksi Laporan Arus Kas Tahun 2018, Key Performance Indicators (KPI), Tingkat Kesehatan Perusahaan, Program Kemitraan.
6. Tanggapan Dewan Komisaris atas usulan RKAP & RKA PKBL Tahun 2018.
7. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas pemaparan Direksi dan Tanggapan Dewan Komisaris mengenai usulan RKAP dan RKA PKBL Tahun 2018.
8. Pembacaan Keputusan RUPS dan penandatanganan Risalah RUPS
9. Penutup.

AGENDA PEMBAHASAN DAN KEPUTUSAN RUPS RKAP & RKA PKBL TAHUN 2018

Rincian agenda pembahasan dan keputusan RUPS RKAP tahun 2018, sebagai berikut:

1. Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dan Persetujuan/ Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2018.
2. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Peritungan Tingkat Kesehatan pada RKAP pt Bio Farma (Persero) Tahun 2018
3. Penetapan Dan Pengesahan Key Performance Indicators (KPI) Direksi Dan Dewan Komisaris Tahun 2018
4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari masing0masing item investasi.
5. Persetujuan untuk mengagunkan asset Perseroan yang nilainya melebigi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh pinjaman dengan nilai maksimal sebesar Rp. 3 triliun dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menandatangani perjanjian pengikatan jaminan dan dokumen lainnya terkait pendaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh perbankan / lembaya pembiayaan.
6. Persetujuan penghapusbukuan atau pemindahantangan asset tetap rusak dan tidak produktif yang memiliki umur ekonomis di atas 5 (lima) tahun berupa investasi kantor, pabrik, mesin, utility dan bangunan perusahaan dengan nilai buku per 31 Desember 2017 sebesar Rp846.617.854,50.
7. Persetujuan untuk menerbitkan *Medium Term Note* (MTN) Tahun 2018 dengan nilai maksimal sebesar Rp450 miliar.

KEPUTUSAN RUPS RKAP & RKA PKBL TAHUN 2018

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bio Farma (Persero) Tentang Pengesahan RKAP & RKA PKBL tahun 2018 Nomor 19, tanggal 17 Januari 2018 hasil musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui:

AGENDA I

Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dan Persetujuan/ Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2018.

KEPUTUSAN AGENDA 1

Menyetujui/Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 termasuk Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun 2018 dengan pokok-pokok sbb:

LAPORAN LABA (RUGI)

1. Pendapatan Usaha sebesar Rp. 3.283.680 juta (tiga triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus depalan puluh juta rupiah)
2. Laba Tahun Berjalan sebesar Rp 581.177 juta (lima ratus delapan puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)

POSISI KEUANGAN

1. ASET

   Total Aset sebesar Rp. 7.792.550 juta (tujuh triliun tujuh ratus Sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari

   a. Aset Lancar sebesar Rp. 2.099.337 juta (dua triliun sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)
   b. Aset Tidak Lancar sebesar Rp 5.693.213 juta (lima triliun enam ratus Sembilan puluh tiga miliar dua ratus tiga belas juta rupiah)

2. LIABILITAS DAN EKUITAS
   Total Liabilitas dan Ekuitas sebesar Rp 7.792.550 juta (tujuh triliun tujuh ratus Sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari
   a. Liabilitas sebesar Rp. 1.646.280 juta (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) meliputi Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp. 379.146 juta (tiga ratus tujuh puluh Sembilan miliar seratus empat puluh enam juta rupiah) dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp. 1.267.134 juta (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah).
   b. Ekuitas sebesar Rp 6.146.270 juta (enam triliun seratus empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

INVESTASI

Rencana investasi tahun 2018 sbb:

1. Bangunan sebesar Rp503.757 juta (lima ratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah)
2. Peralatan Pabrik sebesar Rp594.344 juta (lima ratus Sembilan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh emapat juta rupiah)
3. Pelatan Kantor sebesar Rp20.000 juta (dua puluh miliar rupiah)
4. Peralatan Lainnya Rp33.750 juta (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
5. Aset Tak Berwujud Rp554 juta (lima ratus lima puluh empat juta rupiah)
6. Investasi pada ventura bersama *(vial)* Rp29.050 juta (dua puluh Sembilan miliar lima puluh juta rupiah).

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Program Kemitraan

1. Dana Tersedia sebesar Rp16.952 juta (enam belas miliar Sembilan ratus limalima ratus tigpuluh dua juta rupiah)
2. Penggunaan Dana sebesar Rp16.700 juta (enam belas miliar tujuh ratus juta rupiah)
3. Sisa Dana sebesar Rp252 juta (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)

Program Bina Lingkungan

1. Dana Tersedia sebesar Rp7.000 juta (tujuh miliar rupiah)
2. Penggunaan Dana sebesar Rp7.000 juta (tujuh miliar rupiah)

AGENDA II

Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Peritungan Tingkat Kesehatan pada RKAP pt Bio Farma (Persero) Tahun 2018.

KEPUTUSAN AGENDA II

Menetapkan indikator aspek operasional yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan tahun 2018 sebagai berikut:

1. Produktivitas tenaga kerja (EMPRO)
   Rumus: Penjualan Bruto dibagi jumlah karyawantetap
   Bobot: 4 (empat)
2. Pemeliharaan Kontinuitas produksi
   Rumus: CMP (Capital Maintenance Production) rata-rata 5 tahun terakhir dibagi value added 5 tahun terakhir.
   Bobot: 5 (lima)
3. Penugasan Pemerintah
   Rumus: Nilai kontrak penjualan Pemerintah dibagi Nilai realisasi penjualan Pemerintah.
   Bobot: 3 (tiga)
4. Penelitian dan Pengembangan
   Rumus: Jumlah program kerja Litbang dibagi realisasi kerja Litbang.
   Bobot: 3 (tiga)

AGENDA III

Penetapan dan Pengesahan *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018

KEPUTUSAN AGENDA III

1. Menetapkan dan Mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi tahun 2018
2. Menetapkan dan Mengesahkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris tahun 2018

Sebagaiman tercantum dalam kontrak manajemen dan kontrak kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

AGENDA IV

Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari masing-masing item investasi.

KEPUTUSAN AGENDA IV

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% dari nilai masing-masing program/item investasi sepanjang tidak mengubah program/item investasi dan tidak melebihi total nilai investasi.

AGENDA V

Persetujuan untuk mengagunkan asset Perseroan yang nilainya melebigi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh pinjaman dengan nilai maksimal sebesar Rp. 3 triliun dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menandatangani perjanjian pengikatan jaminan dan dokumen lainnya terkait pendaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh perbankan / lembaya pembiayaan.

KEPUTUSAN AGENDA V

Menyetujui mengagunkan asset Perseroan yang nilainya melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh pinjaman dengan nilai maksimal sebesar Rp 3 triliun dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menandatangani perjanjian pengikat jaminan dan dokumen lainnya terkait pendanaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh perbankan/ Lembaga pembiayaan.

AGENDA VI

Persetujuan penghapusbukuan atau pemindahantangan asset tetap rusak dan tidak produktif yang memiliki umur ekonomis di atas 5 (lima) tahun berupa investasi kantor, pabrik, mesin, utility dan bangunan perusahaan dengan nilai buku per 31 Desember 2017 sebesar 846.617.854,50.

KEPUTUSAN AGENDA VI

Menyetujui pelepasan dan penghapusbukuan asset tetap rusak dan tidak produktif yang memiliki umur ekonomis di atas 5 tahun berupa investasi kantor, pabrik, mesin, utility dan bangunan perusahaan yang mempunyai nilai buku per 31-12-2017 sebesar Rp. 846.617.854,50 (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh empat koma lima nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Investasi kantor kelompok II dengan nilai buku Rp. 1.455.824,26 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat koma dua enam rupiah)
2. Investasi pabrik dengannilai buku Rp. 423.314.609,67 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus sembilan koma enam tujuh rupiah)
3. Investasi mesin dengan nilai buku Rp. 43.416.497,88 (empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh koma delapan delapan rupiah).
4. Investasi utility dengan nilai buku Rp. 226.719.183,23 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus Sembilan belas ribu seratus delapan puluh tiga koma dua tiga rupiah).
5. Bangunan Perusahaan dengan nilai buku Rp. 151.711.739,46 (seratus lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan koma empat enam rupiah).

   Total Rp. 846.617.854,50 (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh empat koma lima nol rupiah).

AGENDA VII

Persetujuan untuk menerbitkan *Medium Term Note* (MTN) Tahun 2018 dengan nilai maksimal sebesar Rp 450 miliar (empat ratus lima puluh miliar rupiah).

KEPUTUSAN AGENDA VII

Menyetujui penerbitan *Medium Term Note* (MTN) tahun 2018 dengan nilai maksimal sebesar Rp 450 miliar.

ARAHAN DARI PEMEGANG SAHAM

1. RKAP yang disahkan ini merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2018. RKAP tersebut agar dirinci menjadi target per bulan dan cascading ke seluruh jajaran perusahaan. Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian dan cascading dimaksud kepada Pemegang Saham dalam Triwulan I tahun 2018
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya di smua lini usaha (cost effectiveness program) guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien.
3. Menindaklanjuti dan meyelesaikan temuan-temuan serta rekomendasi hasil pemeriksaan auditor internal maupun eksternal sehingga temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.

4. Melakukan penataan human capital dan peningkatan kompetensinya secara berkesinambungan guna meningkatkan produktivitas perusahaan.
5. Memperkuat fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan manajemen risiko perusahaan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip GCG dan *early warning syatem*. Selanjutnya, Dewan Komisaris agar melakukan evaluasi atas efektivitas peran SPI dan Manajemen Risiko serta melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan persediaan komoditas perusahaan secara efektif dan terstruktur sehingga potensi barang kadaluarsa, rusak dan hilang dikurangi.
7. Segera merealisasikan transformasi bisnis untuk mengantisipasi perkembangan industry Bio Farma antara lain dengan pengembangan produk biosimilar khususnya produk fraksionasi darah.
8. Mengimplementasikan *system* ERP *(Enterprise Resource Planning)* dalam rangka mempermudah pengendalian dan penyedehanaan pada seluruh proses bisnis perusahaan.
9. Dalam rangka pengelolaan fungsi-fungsi *talent management* dengan sistematika yang lebih baik serta memastikan ketersediaan dan kesiapan talent untu *Sustainable Growth* perusahaan agar dilakukan:
   a. Penyelanggaraan talent management syatem sekaligus penyiapan talent perusahaan untuk menjadi *talent pool* di Kementerian BUMN
   b. Penyediaan *talent pool* minimal 20%
   c. Penyiapan kandidat calon Direksi dari BOD-1 sejumlah 3 suksesor per posisi BOD
10. Menyampaikan data, laporan dan dokumen BUMN secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-18/MBU/10/2014 dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-03/MBU/06/2015
11. Buku RKAP, RKA dan Risalah Pembahasan PKBL, tanggapan tertulis Dewan Komisaris, *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi yang tertuang dalam Kontrak Manajemen dan KPI Dewan Komisaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini.
12. Cek lagi angka-angkanya apakah sudah sesuai karena sudah dilaporkan kepada Menteri BUMN
13. Terkait dengan *Joint Venture* karena kuasa pemegang saham hamya 7 item maka belum bisa diputuskan namun dicatat Bio Farma di tahun 2018 ada agenda untuk investasi kalau sudah dimasukkan dalam poin investasi artinya sudah di-*approve* dalam RUPS ini.

REALISASI / TINDAK LANJUT ARAHAN RUPS RKAP & RKA PKBL TAHUN 2018

Dalam rangka peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma telah menindaklanjuti arahan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Pengesahan RKAP & RKA-PKBL tahun 2018 pada hari Rabu, 17 Januari 2018 sebagai berikut:

No	Arahan Pemegang Saham	Efektif	Belum Efektif	Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
1.	RKAP yang disahkan ini merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2018. RKAP tersebut agar dirinci menjadi target per bulan dan cascading ke seluruh jajaran perusahaan. Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian dan cascading dimaksud kepada Pemegang Saham dalam Triwulan I tahun 2018	V	-	RKAP 2018 yang sudah dapat dibuat target per bulan baru untuk data rencana penjualan sedangkan untuk rencana investasi baru dapat dibuat target per tiga bulan

No	Arahan Pemegang Saham	Efektif	Belum Efektif	Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
2.	Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya di smua lini usaha (cost effectiveness program) guna mewujudkan pengelolaan perusahaan yang semakin efektif dan efisien.	V		Untuk menumbuhkan kesadaran efisiensi biaya dilakukan sosialisasi realisasi OPEX per direktorat dan Divisi dibandingkan dengan RKAPnya. Dilakukan Proses penyempurnaan sistem akuntansi Biaya dari metode full costing menjadi pendekatanABC costing dengan bantuan konsultan

3.	Menindaklanjuti dan meyelesaikan temuan-temuan serta rekomendasi hasil pemeriksaan auditor internal maupun eksternal sehingga temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.	V		• Sampai dengan tahun 2018, progress pemantauan tindak lanjut atas temuan hasil audit internal (SPI) adalah sebagai berikut:
				  • Pemantauan tindak lanjut temuan hasil audit SPI tahun 2017. Sisa rekomendasi audit intern SPI Tahun 2017 yang masih belum ditindaklanjuti pada awal 2018 sebanyak 26 rekomendasi. Samapi dengan akhir tahun 2018 sebanyak 56 telah ditindaklanjuti & 21 masih dalam proses tindak lanjut.
				• Terkait pemantauan hasil tindak lanjut atas audit ekternal sampai dengan 2018 dapat disampaikan sbb:
				KAP
				• Laporan Auditor independen atas kepatuhan terhadap Perundang-undangan & Pengendalian intern untuk tahun yang berkahir 31 Desember 2016 terdiri dari 19 temuan dengan 26 rekomendasi sesuai Laporan Auditor Independen No 073B/LAK.17.BF-6/DWR/2018 Tanggal 13 Februari 2018, disampaikan bahwa seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.
				• Hasil pengujian transaksi & pengendalian intern dalam audit interim KAP Tahun 2017, terdapat 8 temuan dengan 13 rekomendasi, Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti
				• Hasil audit IT atas aplikasi ERP MS Dynamics, terdapat 13 temuan dengan 17 rekomendasi. Sebanyak 16 rekomendasi telah ditindaklajuti & 1 rekomendasi dalam proses tindaklanjut (terkait topologi jaringan dengan target penyelesaian juli 2019)
				BPK-RI
				• Hasil pemeriksaan BPK dengan tujuan tertentu atas PKBL Tahun 2010-2011 serta biaya-biaya terkait pengadaan vaksin flu burung s/d tahun 2011. Terdapat 11 rekomendasi & seluruhnya telah ditindaklajuti serta dinyatakan selesai,
				• Hasil Pemeriksaan BPK dengan tujuan tertentu atas kegiatan pengadaan pengelolaan Persediaan, penjualan & biaya tahun buku 2014 & 2015. Terdapat 52 rekomendasi yaitu
				  • Dalam 27 rekomendasi telah sesuai rekomendasi BPK berdasarkan dokumen No. 241/S/X/07/2017 tanggal 28/7/2017
				  • 20 rekomendasi telah sesuai rekomendasi BPK, berdasar dok No. 147/S/XX/7/2018 Tanggal 06/07/2018
				  • 5 ekomendasi tersisa, 3 rekomenasi telah disampaikan tindak lanjutnya kepada BPK pada 14 Novemebe 2018. Saat ini masih menunggu review BPK RI, 2 Rekomendasi lainnya dalam proses penyelsaian.

No	Arahan Pemegang Saham	Efektif	Belum Efektif	Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
4.	Melakukan penataan human capital dan peningkatan kompetensinya secara berkesinambungan guna meningkatkan produktivitas perusahaan.	V		a. Menetapkan struktur organisasi perusahaan yang fit in pada bisnis perusahaan. b. Menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan HC berbasis kompetensi & kinerja c. Melakukan pergerakan karir periode Januari-Maret 2018 dalam rangka peningkatan kompetensi & kinerja karyawan. d. Melakukan program pendidikan formal berdasarkan produk.Divisi SDM/Bagian Manajemen Pengembangan telah menyusun program pendidikan formal berdasarkan kebutuhan RKAP & RJPP terhadap project atau pengembangan produk contohnya sdr Almir Yamani mendapatkan tugas belajar program pendidikan formal untuk mempelajari Bio Process karena dibutuhkan dalam rangkaian pembuatan suatu produk, rencana selanjutnya akan menugaskan salah satu personil libang untuk belajar terkait produk Traztuzuma. e. Melakukan program training kompetensi teknis terkait dengan job description f. Melakukan program training kompetnsi teknis terkait dengan gap kompetensi anatar kompetensi wajib/mandatory dengan posisi pekerjaan. Saat ini telah selesai disusun kamus kompetensi berdasarkan MBF, SOP serta Jobdes & dibuat SK Manajemen Pembelajaran yang memuat kamus kompetensi tsb. SK Manajemen Pembelajaran sedang di review oleh Divisi Legal, Divisi SDM berkoordinasi untuk percepatan relase nya. Kedepannya kamus kompetensi akan dijadikan dasar bagi karyawan dalam meningkatkan kompetensinya berdasarkan GAP yang dimiliki. Kamus kompetensi berisi General Competency & specific Competency (Kompetensi teknis) berserta Standar kompetensi kompetesi yang harus dimiliki oleh karyawan berdasarkan job position nya.
5.	Memperkuat fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan manajemen risiko perusahaan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip GCG dan early warning syatem. Selanjutnya, Dewan Komisaris agar melakukan evaluasi atas efektivitas peran SPI dan Manajemen Risiko serta melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham.	V		Sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara Direksi & Dewan Komisaris PT Bio Farma dengan Piagam Pengawasan Internal bahwa untuk meperkuat fungsi SPI sesuai dengan arahan yang dimaksud RUPS, SPI dengan Komite Audit sevcara periodic meinimal triwulan mengadakan pertemuan guna membahs atau mengevaluasi hasil audit SPI dan Masalah lainnya untuk dimintai masukannya.
6.	Meningkatkan kualitas pengelolaan persediaan komoditas perusahaan secara efektif dan terstruktur sehingga potensi barang kadaluarsa, rusak dan hilang dikurangi.	V		Monitoring tanggal kadaluarsa barang persediaan akan ditingkatkan dengan menambah reminder dari system ERP ke Kepala Seksi Dan Kepala Bagian melalui email otomatis secara periodic seminggu sekali (setiap hari senin). Reminding dilakukan via email karena tidak dapat dilakukan secara embedded dalam aplikasi ERP. Untuk monitoring barang ED sudah ada di system ERP dan berjalan. Namun untuk reminding melaluiemail belum tersedia di system dan akan terus di follow-up ke didivisi IT. Kriteria: barang persediaan yang meiliki masa kadluarsa 6 bulan atau kurang akan masuk kedalam daftar yang harus di-reminding secara otomatis. Selain itu, sebagai pengaman lapis keduanya akan disipakan pula reminding denan aplikasi MS Exel yang datanya ditarik dari sitem ERP. Setiao aplikasi ini dibuka akan muncul reminding list barang persediaan yang meiliki masa daluarsa 6 bulan atau kurang.

No	Arahan Pemegang Saham	Efektif	Belum Efektif	Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
7.	Segera merealisasikan transformasi bisnis untuk mengantisipasi perkembangan industry Bio Farma antara lain dengan pengembangan produk biosimilar khususnya produk fraksionasi darah.	V		Untuk meulai proses toll manufacturing belum dapat dilakukan karena revisi permenkes 72 tahun 2015 belum ditandatangani. Tim fraksionasi darah Bio Farma masih melakukan pengawalan terhadap draft permenkes tsb.
8.	Mengimplementasikan system ERP (Enterprise Resource Planning) dalam rangka mempermudah pengendalian dan penyederhanaan pada seluruh proses bisnis perusahaan.	V		• Menindaklajuti temuan KAP atas audit IT dan aplikasi ERP Ms Dynamic tahun 2017 dari 13 temuan selama tahun 2018 sudah ditindaklajuti 12 temuan • Menyelsaikan Change Request (CR) dari user terkait perubahan fitur atau report aplikasi ERP sejumlah 257 buah CR • Mengembangkan aplikasi yang meunjang implimentasi aplikasi ERP yaitu • Aplikasi inventory management untuk mencatat mutasi barang di bagian (khusus untuk barang persediaan digunakan sebelum aplikasi MRP live). Status aplikasi versi 1(kuantum) sudah go live per 28 desember 2018. • Aplikasi Raw Material Management untuk pemercepat proses status mutu dari QA (release atau reject), sebelumnya menunggu data hardcopy, sehingga proses penerbitan Product Receipt dari aplikasi ERP cepat. Status aplikasi masih soft live & sudah dilakukan perbaikan interface dari ERP. Prosedur naku untuk implementasi aplikasi RMM dari Bagian Manajemen Persediaan, Divisi Pngawasan Mutu & Divisi Penjamin Mutu & Regulasi sedang direview di Divisi TI. • Aplikasi Production Planning untuk perencanaan produksi berdasarkan rencana penjualan yang terintegrasi ke aplikasi MRP. Sebelumnya menggunakan manual. Status ditunda menunggu hasil redefinisi proses bisnis implementasi MRP oleh Tim penyusun Proses Bisnis untuk implimentasi Sistem MRP sesuai surat tugas No. ST-04898/DIR/X/2018 berlaku tanggal 10 Oktober 2018 s.d 31 Desember 2019.
9.	Dalam rangka pengellaan fungsi-fungsi talent management dengan sistematika yang lebih baik serta memastikan ketersediaandan kesiapan talent untu Sustainable Growth perusahaan agar dilakukan:	V		• Melakukan program executive business planning program • Melakukan program executive strategy for leader • Melakukan program acceleration of executive strategy • Melakukan kegiatan assessment untuk level BOD-1 • Melaksanakan program perencanaan karir dalam bentuk talent perusahaan melalui talent committee
	a. Penyelanggaraan talent management syatem sekaligus penyiapan talent perusahaan untuk menjadi talent pool di Kementerian BUMN			
	b. Penyediaan talent pool minimal 20%			
	c. Penyiapan kandidat calon Direksi dari BOD-1 sejumlah 3 suksesor per posisi BOD			
10	Menyampaikan data, laporan dan dokumen BUMN secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-18/MBU/10/2014 dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-03/MBU/06/2015	V		Hal itu sudah rutin dilaksanakan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) TAHUN 2017

PENYELENGGARAN RUPS LAPORAN KEUANGAN & PKBL TAHUN 2017

WAKTU, TEMPAT DAN AGENDA RUPS

Sesuai dengan surat undangan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma No. 01590/DIR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 telah diselenggarakan RUPS PT Bio Farma (Pesero) pada:

Hari, tanggal : Rabu, 25 April 2018
Waktu : 09.00 WIB sampai 11.00 WIB
Tempat : Kantor Kementrian BUMN, Jln Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat – 10110

DASAR PENYELENGGARAN RUPS LAPORAN KEUANGAN & PKBL TAHUN 2017

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 70)
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4756)
3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1997 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Bio Farma Menjadi Peusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 4)
4. PP No. 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan KeduDukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri BUMN (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4305)
5. PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 117, Tambahan Lembaran Negara No. 4556)
6. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2014.
7. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019
8. Angggaran Dasar PT Bio Farma (Persero) yang dibuat dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH No. 1 tanggal 3 Februari 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 26 Tanggal 6 Juni 2014 dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan terbatas PT Bio Farma (Persero), dan berdasarkan Surat Kmenterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-03087.40.40.21.2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero).
9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER—01//MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER—09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012,
10. Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-03/D1.MBU/04/2018 tanggal 25 April 2018 Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Perseroan telah memberi Kuasa kepada Wahyu Kuncoro Deputi Bidang Uasaha Industri Agro Dan Farmasi Kementrian BUMN mewakili RUPS Perseroan. Surat Kuasa Menteri BUMN No. SKU-90/MBU/04/2018 tanggal 18 April 2018.

PESERTA RUPS LAPORAN KEUANGAN & PKBL TAHUN 2017

RUPS Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan PKBL Tahunan 2017 dihadiri oleh Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris, Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi, Pemegang Saham dan Para Undangan.

Nama Komisaris	Jabatan	Keanggotaan pada Komite	Kehadiran	
			Hadir	Tidak
Kuasa Pemegang Saham				
Purnomo Sinar Hadi	Asisten Deputi Bidang Uasaha Industri Agro Dan Farmasi II Kementrian BUMN		√	
Dewan Komisaris				
Farid Wadji Husain	Komisaris Utama	-	√	
Heridadi	Komisaris Independen	Ketua Komite Risiko, Pengembangan & GCG	√	
Made Arya Wijaya	Komisaris	Ketua Komite Audit	√	
Mohamad Subuh	Komisaris	Wakil Ketua II Merangkap Anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	-	√
Saud Usman Nasution	Komisaris Indpenden	Wakil Ketua I Komite Risiko, Pengembangan dan GCG	-	√
Yuni Suryanto	Komisaris Independen	Wakil Ketua Komite Audit	-	√
Direksi				
Rahman Roestan	Direktur Utama		√	
Juliman	Direktur Produksi		√	
Disril Revolin Putra	Direktur SDM & Umumt		√	
Sri Harsi Teteki	Direktur Pemasaran		√	
Adriansjah Azhari	Direktur Perencanaan & Pegembangan		√	
Pardiman	Direktur Keuangan		√	
Undangan	Sabar Wicaksono		√	
Pejabat Serta Staf Kementerian BUMN Dan PT Bio Farma (Persero)			√	

Keterangan
Mohamad Subuh memberi kuasa kepada Heridadi dengan Surat Kuasa Nomor: SKU-09/DK/BF/04/2018 tanggal 24 April 2018
Yuni Suryanto memberi kuasa kepada Made Arya Wijaya dengan Surat Kuasa Nomor: SKU-08/DK/BF/04/2018 tanggal 24 April 2018
Saud Usman memberi kuasa kepada Farid W. Husain dengan Surat Kuasa Nomor: SKU-07/DK/BF/04/2018 tanggal 24 April 2018

JALANNYA RUPS LAPORAN KEUANGAN & PKBL TAHUN 2017

1. RUPS dibuka oleh Komisaris Utama yang selanjutnya menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi selaku Kuasa Pemegang Saham untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat.
2. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persayaratan yuridis sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
3. Pemaparan Direksi mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan PKBL Tahun 2017.
4. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan PKBL Tahun 2017
5. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas pemaparan Direksi dan Tanggapan Dewan Komisaris mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan PKBL Tahun 2017.
6. Pembacaan Keputusan RUPS dan penandatanganan Risalah RUPS
7. Penutup.

AGENDA PEMBAHASAN DAN KEPUTUSAN RUPS LAPORAN KEUANGAN & PKBL TAHUN 2017

Rincian agenda pembahasan dan keputusan RUPS tahun 2017, sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2017 serta pengesahan Laporan PKBL tahun buku 2017
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
4. Penetapan Gaji/Honorarium, tunjangan & fasilitas Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2017.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

KEPUTUSAN RUPS LAPORAN KEUANGAN & PKBL TAHUN 2017

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bio Farma (Persero) Tentang Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan PKBL tahun 2017 No. 16, tanggal 25 April 2018 hasil musyawarah dan mufakat memutuskan menyetujui:

MATA ACARA I

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian Tahun Buku 2017.

KEPUTUSAN

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kedaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.

MATA ACARA II

Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2017 serta pengesahan Laporan PKBL tahun buku 2017

KEPUTUSAN

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan sebagiaman dimuat dalam Laporannya Nomor 425/LAI.17.BF-6/DWR/2018 tanggal 13 Februari 2018 dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program KKBL PT Bio Farma (Persero) tanggal 31-12-2017 serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tsb sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Direksi Dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan pengurusan PKBL yang telah dilakukan selama tahun buku 2017. Sepanjangbukan merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukukm yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA III

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

KEPUTUSAN

Menyetujui penetapan Laba Tahun Buku 2017sebesar RP 525.355.610.162,- sbb:

1. Deviden sebesar 45% atau 236.410.000.000 ditetapkan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham.
2. Sebesar 55% atau Rp. 288.945.610.162 akan digunakan sebagai cadangan perseroan.
3. Dividen sebesar 236.410.000.000 tsb agar disetor kepada rekening Bendahara Umum Negara selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanggal Keputusan ini dan pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA IV

Penetapan Gaji/Honorarium, tunjangan & fasilitas Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2017.

KEPUTUSAN

Penetapan Gaji/Honorarium, tunjangan, fasilitas bagi Dewan Komisaris dan direksi perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2017 akan diputuskan secara tersendiri.

MATA ACARA V

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

KEPUTUSAN

Dewan Komisaris agar melakukan seleksi KAP untuk mengganti KAP Djoemarma, Wahidin dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Dan Laporan PKBL Tahun Buku 2018 dan selanjutnya menyampaikan kepada pemegang saham untuk mendapatkan persetujuan.

REALISASI / TINDAK LANJUT ARAHAN RUPS LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN (PKBL) PT BIO FARMA (PERSERO) TAHUN BUKU 2017

Dalam rangka peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi dan Dewan Komisaris telah Menindak Lanjut Keputusan/Arahan RUPS tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2017.

No	Arahan Pemegang Saham	Status		Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
		Efektif	Belum Efektif	
1	Menindaklajuti dan meyelesaikan secara tuntas terhadap setiap temuan, catatan serta sara/rekomendasi baik dari auditor eksternal (KAP) BPK, BPKP dan maupun auditor internal Perseroan yang belum dinyatakan selesai ditindaklanjuti. Progres tindak lanjut penyelesaian temuan-emuan dimaksud agar dbahas secara komprehensif berdasam Dewan Komisaris dan selanjutnya disampaikan tertulis berkala kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham	√		Setiap temuan sudah ditindaklanjuti dan telah dibahas dengan Dewan Komisaris. Hasil tindaklanjut temuan tsb secara berkala disampaikan kepada Menteri BUMN dalam bentuk Laporan manajemen Perusahaan Triwulan.
2	Memastikan agar penerapan GCG dapat dialkukan secara knsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri BUMN	√		GCG terus dilakukan secara knsisten dan berkelanjutan
3	Merealisasi program-program investasi khususnya yang dapat mendorong pengembangan bisnis untuk mencapai rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang Perusahaan.	√		Telah direalisasikan investasi yang dibutuhkan untuk mendorong pengembangan bisnis. Realisasi investasi pada tahun 2018 sebesar Rp 683,34 miliar atau mecapai 57,84% dari anggarannya.
4	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pedoman pedoman administrasi dan operational perseroan (termasuk PKBL) dalam rangka peningkatan kualitas manajemen termasuk namun tidak terbatas pada SAK terkini yang berlaku di Indonesia & Penyajian Laporan Arus Kas dengan metode langsung Peraturan perpajakan terkini Pengadaan barang dan jasa dengan mengedepanan prinsip efisiensi, efektif kompetitif, transparan, adil & wajar serta akuntabel Pelaporan & pengungkapan informasi yang komprehensif (termasuk mengenai hak-hak Perseroan) yang tidak tercatat pada pembukuan sesuai kepentingan stakeholders berdasarkan anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan	√		Telah dilakukan evaluasi meyeluruh terhadap program-program adminstrasi dan operational perseroan untuk meningkatkan kualitas manajemen
5	Meningkatkan konsistensi dalam melakukan monitoring dan updating data 5 (lima) portal BUMN yakni portal Finacial Information System, Portal Aset, Portal SDM, Postal PKBL dan Portal Publik. Progres Pemutakhiran data dalam portal tsb agar dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan	√		Perusahaan selalu melakukan update data 5 Portal BUMN secara berkala melalui penyampaian laporan manajemen triwulan dan tahunan.
6	Menupayakan pengendalian biaya secara efisiensi dan efektif khusunya pada biaya yang tidak berkaitan dengan upaya merealisasikan target laba	√		Sudah dilakukan pengendalian baiaya
7	Mempercepat penyelesaian implimentasi ERP dan MRP agar dapat mendukung kegiatan operational perusahaan			ERP dan MRP masih dalam tahap penyempurnaan program
8	Meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan bisnis baru dengan didukung dengan system teknologi informasi	√		Kompetensi SDM terus ditingkatkan dengan menggunakan system teknologi informasi

No	Arahan Pemegang Saham	Status		Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
		Efektif	Belum Efektif	
9	Memperkuat komposisi portofolio produk dengan margin tinggi untuk mendukung program investasi	√		Sedang dilakukan pengembangan beberapa produk baru diantaranya Vaksin Rotavirus, (MCRI), SIPV, Influenza, Rabies, Pneumokokus Whole Cell (PATH), Thypoid Konjugat, Acellular Pertusis, Hepatitis B (Artes), Nopv2 (BMGF), Heksavalent, Vaksin MR 5 ds dengan Rubella yang dibuat oleh Bio Farma, Vaksin MR dengan Rubella Impor, TB Hepatitis B Terapeutik, Dengue, Anti Bisa Ular Hijau, Diagnostika Kit Diabetes Mellitus (DM), Eritropoietin (EPO), Trastuzumab dan Stemcell
10	Buku Laporan Tahunan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan PKBL Tahun Buku 2017, presentasi Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris dalam RUPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara RUPS	√		

RUPS PERSETUJUAN RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN RENCANA KERJA & ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN (RKA-PKBL) TAHUN 2019

RUPS tentang Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2019 diselenggarakan pada:

Waktu	Tempat	Agenda
Jumat tanggal 21 Desember 2018	Gedung Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta Pusat	1. Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2019. 2. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk perhitungan Tingkat Kesehatan pada RKAP PT Bio Farma (Persero) Tahun 2019. 3. Penetapan dan Pengesahan Key Performance Indicators (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019. 4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari masing-masing item investasi. 5. Persetujuan untuk mengagunkan aset tetap Perusahaan berupa tanah seluas 91.058m2 di Jalan Pasteur No.28, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan sertifikat HGB Nomor 288 untuk penarikan kredit maksimal sebesar Rp 3,00 triliun dalam rangka membiayai proyek pembangunan fasilitas produksi vaksin dan pengemasan serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menandatangani perjanjian pengikatan jaminan dan dokumen lainnya terkait pendanaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh perbankan/lembaga pembiayaan. 6. Persetujuan penghapusbukuan atau pemindahtanganan aset tetap rusak dan tidak produktif yang memiliki umur ekonomis diatas 5 (lima) tahun berupa inventaris mesin, pabrik, kantor dan bangunan dengan nilai buku per 31 Desember 2018 sebesar Rp 223.553.306,00. 7. Persetujuan penyaluran dana program kemitraan PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp 2 miliar untuk disalurkan melalui BUMN Khusus, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017.

ALASAN DALAM HAL TERDAPAT KEPUTUSAN RUPS YANG BELUM DIREALISASI

Keputusan RUPS yang Belum Direalisasi	Alasannya
Semua keputusan RUPS sudah ditindak lanjuti	Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang alasan tidak menindak lanjuti keputusan RUPS

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) / UNIT AUDIT INTERNAL

Audit Internal Dilakukan untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Terpadu, Meliputi Kualitas, Lingkungan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

GANDJAR TRISNASARI
KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Warga negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2018 adalah 54 tahun. Lahir di Tanjung Karang, 10 September 1964. Meraih gelar Sarjana Farmasi & Apoteker dari Institut Teknologi Bandung tahun 1989 dan Magister Manajemen Operasi dari Universitas Padjadjaran tahun 2004.

Mengawali karirnya di di Bio Farma sejak Mei 1990. Selama di Bio Farma, pernah menempati berbagai posisi strategis, diantaranya sebagai Kepala Bagian Pengujian Mutu Vaksin Bakteri (Mei 1995 – September 2001), Kepala Bagian Produksi Vaksin Tetanus (September 2001 – Desember 2004), Kepala Bagian *Quality Assurance Operation* (Desember 2004 – September 2007). Kepala Divisi Produksi Vaksin Bakteri (September 2007 - Januari 2015), Kepala Divisi Produksi Farmasi (Januari 2015 – Juli 2017) dan diangkat menjadi Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Aktif diberbagai kegiatan diantaranya sebagai penguji pada kegiatan ujian Apoteker yang diselenggarakan oleh Sekolah Farmasi (2013, 2014, 2016 & 2018), dan sebagai narasumber dibeberapa acara Seminar Nasional Kesehatan yang diselenggarakan oleh STIKES Paguwarmas, Cilacap (201v6), 7th Annual World Vaccine Congress Singapore (2013), Sosialisasi Penerapan PQ WHO di Indonesia (2012), dan Evaluasi Perkembangan penerapan program Pre Qualification di Indonesia (2012).

Dasar hukum Pengangkatan sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern adalah Surat Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No: 0502/HC/TKK/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 dengan persetujuan Dewan Komisaris No. S-22/DK/BF/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.

Sejalan dengan konsep era globalisasi, maka sebagai konsekuensinya makin banyak masalah yang harus dihadapi oleh Perusahaan dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks tersebut. Keadaan ini menuntut Manajemen Perusahaan untuk dapat mengelola Perusahaan secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini membuat Manajemen tidak dapat lagi secara langsung mengawasi aktivitas Perusahaan sehingga harus mendelegasikan sebagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dipikulnya kepada Auditor Internal.

Manajemen dituntut untuk menerapkan Pengendalian Internal yang tentunya akan sangat berguna untuk

mengamankan aset Perusahaan. Variabel yang mempengaruhi efektivitas Pengendalian Internal adalah kualitas Auditor Internal.

Bio Farma membentuk Audit Internal yang disebut dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan pengawas yang objektif dan independen, dibentuk untuk memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kinerja Perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Audit Internal merupakan suatu kegiatan pemberian keyakinan *(assurance)* dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.

SECARA GARIS BESAR SPI TERDIRI ATAS 2 (DUA) ASPEK

1. Aspek Struktur
2. Aspek Proses

Aspek Struktur mengatur mengenai:

1. Kedudukan, tugas dan fungsi SPI
2. Wewenang SPI
3. Pertanggungjawaban SPI
4. Persyaratan Pengawas Internal
5. Piagam Pengawasan Internal
6. Hubungan SPI dengan organ Dewan Komisaris dan Komite Audit

Aspek Proses mengatur mengenai:

1. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan Pengawasan Internal
2. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pengawasan eksternal
3. Pelaksanaan program *quality assurance*
4. Dokumentasi dan administrasi

Kedua aspek tersebut diatur dalam Peraturan Menteri mengenai Piagam Pengawasan Internal serta Kebijakan dan Prosedur Pengawasan Intern yang di dalamnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

DASAR PENERAPAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DI BIO FARMA

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN.
2. Surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN No S-168/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan Good Corporate Governance yang diperbaharui dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012.
3. Anggaran Dasar Perusahaan
4. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* di PT Bio Farma (Persero).

JUMLAH KARYAWAN (AUDITOR INTERNAL) PADA DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Per 31 Desember 2018, Satuan Pengawasan Intern (SPI) memiliki sebanyak 14 (empat belas) orang karyawan yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Pengawasan Intern dan 12 orang karyawan yang terkait langsung dengan pelaksanaan Internal Audit. Latar belakang auditor adalah berpendidikan Strata 2 dan Strata 1. Setiap Auditor telah mengikuti pelatihan di bidang audit secara berkesinambungan.

PENDIDIKAN PERSONIL SPI

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Ganjdar Trisnasari	Kepala Satuan Pengawasan Intern	Strata 2
2	Amar Yuliar	Ahli Madya	Strata 1
3	Edi Iskandar	Ahli Madya	Strata 2
4	Johnny H. Gultom	Ahli Madya	Strata 1
5	Leni Lestari	Ahli Madya	Strata 2
6	Ahmad Agus Romansyah	Ahli Madya	Strata 2
7	Dini Elsiana D	Ahli Madya	Strata 2
8	Ai Sukarni	Ahli Muda	SMEA
9	Dedi Mulyadi	Ahli Muda	SMEA
10	Nurdin Wijaya	Ahli Muda	Strata 2
11	Emillina	Ahli Muda	Strata 1
12	Dani Matias	Ahli Muda	Diploma III
13	Benny Emirald H.	Ahli Muda	Strata 1
14	Yanuar Rasvid (sd awal 2018)	Staff	Strata 1

KOMPOSISI KARYAWAN SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) PER 31 DESEMBER 2018

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1	Kepala Satuan Pengawasan Intern	1
2	Ahli Madya Satuan Pengawasan Intern	6
3	Ahli Muda Satuan Pengawasan Intern	6
4	*Staff*	1
	Jumlah	**14 orang**

SERTIFIKASI PERSONIL SPI SEBAGAI PROFESI PENGAWASAN INTERN (AUDIT INTERNAL)

Dalam melaksanakan kegiatan Audit Internal, Satuan Pengawasan Intern didukung oleh tenaga Auditor yang profesional. Per 31 Desember 2018, kualifikasi dan kompetensi karyawan Satuan Pengawasan Intern Bio Farma sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Personil	Jabatan	Jumlah Personil
Kepala SPI	1	Qualified of Internal Auditor (QIA)	On process
Ahli Madya SPI	6	Qualified of Internal Auditor (QIA)	3
		Certified International on Information System Auditor (CIISA)	1
		Certified of Accountant (CA)**	1
		Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP)**	1
		Certified International Project Manager (CIPM)**	1
		Certified of IT Service Management based ITIL V.30)	1
	6	Qualified of Internal Auditor (QIA)	On process
Jumlah	**13**	**Jumlah**	**8**

** bukan termasuk kualifikasi, namun terdapat personil SPI yang sudah mendapatkan sertifikat ydm.

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi/ Non Sertifikasi	Dikeluarkan oleh
1	Gandjar Trisnasari	Kepala SPI	Internal Audit Pra Manajerial I unt Ka.SPI***	YPIA
			Seminar Nasional Internal Audit 2018	YPIA
			Seminar Asosiasi Auditor Internal 2018	AAI
			Workshop Fraud Risk Management	LPFA
			Saber Pungli & WBS dlm Meningkatkan GCG	FKSPI Jabar Banten
			Penggunaan Lap. Auditor Internal sbg Alat Bukti di Pengadilan	KoranBUMN
2	Amar Yuliar Sucahyono	Ahli Madya	Seminar Nasional Internal Audit 2018	YPIA
3	Edi Iskandar	Ahli Madya		-
4	Johni H.Gultom	Ahli Madya	Internal Audit tingkat Manajerial***	YPIA
			Seminar Nasional Internal Audit 2018	YPIA
5	Leni Lestari	Ahli Madya	Dasar-Dasar Audit***	PPAK
			Audit Operasional***	PPAK
			Saber Pungli & WBS dlm Meningkatkan GCG	FKSPI Jabar Banten
			Munas FKSPI "Peran Auditor Internal dlm peningkatan GRC di Era Disruptif	FKSPI Indonesia
			Seminar Nasional Internal Audit 2018	YPIA
6	A Agus Romansyah	Ahli Madya	Sertifikasi Ahli Kepabeanan***	LMKN
			GCG untuk PKBL	KBUMN
			Inhouse Training Kepabeanan	Harvest Consulting
			PSAK 23, 26, 65, 66, 69 & 71	IAI Wilayah Jabar

No	Nama	Jabatan	Sertifikasi/ Non Sertifikasi	Dikeluarkan oleh
7	Dini Elsiana D	Ahli Madya	Workshop Fraud Risk Management	LPFA
			Seminar Asosiasi Auditor Internal 2018	AAI
			Seminar Nasional Internal Audit 2018	YPIA
			Inhouse Training Kepabeanan	Harvest Consulting
			PSAK 23, 26, 65, 66, 69 & 71	IAI Wilayah Jabar
8	Ai Sukarni	Ahli Muda	Saber Pungli & WBS dlm Meningkatkan GCG	FKSPI Jabar Banten
9	Dedi Mulyadi	Ahli Muda	Audit Operasional***	PPAK
			Inhouse Training Kepabeanan	Harvest Consulting
10	Nurdin Wijaya	Ahli Muda	Pendidikan Internal Audit Tingkat Dasar II***	YPIA
			Pendidikan Internal Audit Tk. Lanjutan I***	YPIA
11	Emillina	Ahli Muda	Saber Pungli & WBS dlm Meningkatkan GCG	FKSPI Jabar Banten
			Munas FKSPI "Peran Auditor Internal dlm peningkatan GRC di Era Disruptif	FKSPI Indonesia
12	Dani Matias	Ahli Muda	Pendidikan Internal Audit Tingkat Dasar I***	YPIA
			Pendidikan Internal Audit Tingkat Dasar II***	YPIA
			Pendidikan Internal Audit Tk. Lanjutan I***	YPIA
			Inhouse Training Kepabeanan	Harvest Consulting
13	Benny Emirald H	Ahli Muda	ODP/Officer Development Program Training	
			~ Character Building Training & Bela Negara	Kubik Leadership
			~ Basic Leadership for ODP	Sucofindo
			~ Personal Financial Training	BF
			~ Inhouse Training ESQ Character Building	ESQ Leadership
			~ Change Agent of Corporate Culture	Star Training
			~ Supply Chain Management	Thames Center
			PSAK 23, 26, 65, 66, 69 & 71	IAI Wilayah Jabar
			Stress Management	Sucofindo
			Creative Presentation with Powerpoint	HC Strategic Solution
			Implementasi Internal Control COSO based	YPIA
			Visionary Leaders	Kubik Leadership
14	Yanuar Rasyid	Staff		-

YPIA = Yayasan Pendidikan Internal Audit

PPAK = Pusat Pengembangan Akuntansi & Keuangan
AAI = Asosiasi Auditor Internal
FKSPI = Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
LPFA = Lembaga Pengembangan Fraud Auditing
LMKN = Lembaga Manajemen Kompetensi Nasional
***peningkatan kompetensi yang masuk dalam kelompok sertifikasi

Sejumlah tenaga auditor lainnya yang cukup berpengalaman dan sedang proses menyelesaikan sertifikasi. Pada tahun 2018 sebanyak 6 (enam) auditor sedang dalam proses mengikuti program pendidikan dan pelatihan profesi serta program sertifikasi.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero)Nomor: KEP-04/DK/BF/11/2018; dan Nomor: KEP-05574/DIR/XI/2018 tanggal 2 November 2018 Tentang Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) yaitu kedudukan Satuan Pengawasan Intern sebagai Organisasi Internal Audit, ruang lingkup tugas, tanggung jawab pelaporan, wewenang dan peranan, serta standar profesi auditor internal. *Internal Audit Charter* disusun untuk menjadi pedoman bagi para Auditor Intern agar dapat melaksanakan tugas secara optimal, serta diketahui oleh *Auditee*/pihak-pihak lain yang terkait agar dapat saling tercipta pengertian dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan Visi dan Misi Bio Farma. Dengan adanya *Internal Audit Charter*, Satuan Pengawasan Intern (SPI) diharapkan dapat menghasilkan suatu laporan audit yang berkualitas untuk mendukung semua aktivitas Perusahaan.

VISI & MISI DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) BIO FARMA

VISI

Menjadi unit pengawasan yang profesional, independen, objektif, memberikan konsultasi dan menjadi mitra manajemen yang terpercaya serta memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dalam pencapaian tujuannya.

MISI

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan unit pengawasan yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham, berupa adanya kepastian pencapaian tujuan operasional perusahaan.

Atas hal tersebut maka Satuan Pengawasan Intern melakukan audit secara berkala kegiatan operasional Perusahaan, berdasarkan prioritas risiko, dan menilai pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, serta memberikan konsultasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Perusahaan.

ALUR PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA SPI

KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) DALAM STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) BIO FARMA

Sesuai SK Direksi No. 05586/Dir/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero), Satuan Pengawasan Intern (SPI) dirubah menjadi Pengawasan Internal (PI). Diperbaharui dengan SK Direksi No. 04276/DIR/I/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero), Pengawasan & Pengendalian Intern diubah menjadi Satuan Pengawasan Intern (SPI). Dan diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Direksi No. 00117/DIR/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Perubahan Keputusan Atas Keputusan Direksi No. 04276/DIR/XI/2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero).

Secara struktural Satuan Pengawasan Intern (SPI) berada di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern yang membawahi Auditor Internal (Ahli Madya SPI dan Ahli Muda SPI). Auditor pada SPI bertanggung jawab kepada Kepala SPI. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern (SPI) mengacu pada:

1. Kerangka yang diakui secara Internasional (*COSO-Internal Control Framework*)
2. Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) sebagaimana ditetapkan dalam SK Direksi Nomor: 05166/Dir/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) dan diperbaharui menjadi Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan melalui SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 07357/DIR/XII/2012 pada tanggal 17 Desember 2012 diperbarui melalui SK bersama Komisaris & Direksi Nomor: KEP-04/DK/BF/11/2018 dan No. KEP-05574 / DIR /XI/2018 tangga 02/11/2018.

Secara garis besar memuat visi, misi, struktur dan kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab SPI, persyaratan profesional auditor serta kode etik auditor internal. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) dievaluasi secara berkala dan disepakati oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Pelaksanaan audit secara operasional mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Pemeriksaan (Audit Manual) Pengawasan Internal yang ditetapkan melalui SK Direksi Nomor: 05094/DIR/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012.

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB SPI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dengan pendekatan risiko *(risk based auditing)*.
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit untuk mendapat pertimbangan dan saran-saran sebelum disahkan.
3. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disetujui oleh DIrektur Utama, disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.
4. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas terhadap operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya di Perusahaan.
6. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada Manajemen.
7. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) per triwulanan untuk disampaikan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama melalui Komite Audit.
8. Memantau pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang direkomendasikan, baik yang berasal dari pengawasan intern maupun ekstern.
9. Melakukan pertemuan dengan komite audit secara periodik triwulanan atau empat kali setahun untuk membahas LHP dan tindak lanjutnya serta meminta masukan yang diperlukan.
10. Membuat Laporan Hasil Tindak Lanjut secara periodik triwulanan untuk disampaikan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama melalui Komite Audit.

11. Melakukan tugas konsultasi untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern
12. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

WEWENANG SPI

Direktur Utama memberi wewenang kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk:

1. Mengakses ke seluruh informasi, dokumen, dan catatan, ke Direksi dan ke karyawan, ke lokasi asset perusahaan, ke sistem informasi, dan ke sistem dan prosedur yang relevan tentang perusahaan yang terkait dengan tugas dan fungsi audit.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan komisaris, melalui Komite Audit.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan isedental dengan Direksi, Komisaris, melalui Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi bila perusahaan sedang diaudit oleh auditor eksternal seperti KAP, BPK, dsb.
5. Menghasilkan sumber daya audit, menentukan fokus ruang lingkup dan jadwal audit.
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang audit.
7. Mendapatkan saran dan nasihat dari tenaga profesional/ahli.

TANGGUNG JAWAB SPI

Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab kepada Direktur Utama untuk :

1. Memberikan penilaian dan saran – saran mengenai kecukupan dan efektivitas proses manajemen perusahaan dalam mengendalikan kegiatan dan pengelolaan risiko.
2. Melaporkan kejadian penting yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen, dan melaporkan peningkatan/pembenahan sistem pengendalian intern yang perlu dilakukan.
3. Memberikan laporan hasil pemeriksaan sesuai program kerja pemeriksaan tahunan secara berkala.
4. Melaporkan pencapaian KPI Satuan Pengawasan Internal.

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL *(INTERNAL AUDIT CHARTER)*

Bio Farma telah memiliki Piagam Pengawasan Internal atau *Internal Audit Charter* yaitu dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen Pimpinan atas fungsi suatu Unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Bio Farma.

Piagam Pengawasan Internal *(Internal Audit Charter)* Bio Farma merupakan dasar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para auditor SPI, dan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak lain yang terkait, agar tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Bio Farma

Hal-hal yang dimuat dalam *Internal Audit Charter* adalah:

I. Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal Audit Charter)
II. Audit Internal
III. Visi
IV. Misi
V. Struktur dan Kedudukan
VI. Tugas dan Tanggung Jawab
VII. Independensi
VIII. Ruang Lingkup
IX. Wewenang
X. Pertanggungjawaban
XI. Persyaratan Auditor
XII. Kode Etik Auditor
XIII. Standar Pelaksanaan Tugas
XIV. Penutup

PERSYARATAN AUDITOR

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam melaksanakan tugasnya
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan tugasnya
3. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif
4. Mempunyai keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang audit

KODE ETIK AUDITOR

1. Auditor intern harus menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
2. Auditor intern dilarang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.
3. Auditor intern harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Auditor intern harus mematuhi standar profesi Auditor Internal, kebijakan Perusahaan, dan peraturan perundangan.

5. Auditor intern dilarang secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal dan mendiskreditkan organisasinya.
6. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dengan alasan apapun.
7. Tidak menerima imbalan/supa dari pihak manapun yang terkait dengan temuan audit.
8. Auditor intern harus senantiasa meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pendidikan profesional berjenjang dan berkelanjutan.

HUBUNGAN SPI DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT

1. Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Tugas Komite Audit mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan.
3. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal.

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) TAHUN 2018

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENGAWASAN INTERN

PERENCANAAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2018

Pada setiap akhir tahun, SPI membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk tahun berikutnya. SPI menyusun jadwal audit internal dengan memperhatikan tingkat risiko masing-masing bagian yang diaudit. Pada tahun 2018 SPI akan melakukan audit terhadap 7 (tujuh) obyek Pemeriksaan obyek. Rencana PKPT disetujui oleh Direktur Utama, dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris c/q Komite Audit. Selain pelaksanaan audit SPI juga menyusun rencana kegiatan pengembangan kompetensi auditor.

Satuan Pengawasan Internal (SPI) Bio Farma menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) untuk pelaksanaan audit terhadap proses pengendalian kegiatan operasional, pengelolaan risiko dan *Corporate Governance*, memberikan konsultasi serta rekomendasi yang independen dan obyektif.

Dalam melakukan penilaian risiko, SPI mengkoordinasikan aktivitasnya dengan pemilik risiko untuk memperoleh masukan mengenai penilaian risiko yang dihasilkan dari proses pengelolaan risiko tersebut.

PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2018

Selama tahun 2018, SPI melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Pemeriksaan diluar PKPT/Non PKPT.

Program pemeriksaan sesuai PKPT dilakukan terhadap 7 (tujuh) obyek pemeriksaan, dimana 3 (tiga) obyek pemeriksaan dilakukan pada triwulan I, 2 (dua) obyek pemeriksaan dilakukan pada triwulan II dan 2 (dua) obyek lainnya dilakukan pada triwulan III/2018.

Periode bulan pemeriksaan pada triwulan I yaitu tanggal 22 Januari sampai dengan 09 Maret 2018, dengan jadwal terbit Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 19 Maret 2019 dan menghasilkan 3 (tiga) buah LHP.

Selanjutnya pada triwulan II, periode bulan pemeriksaan pada 09 April sampai dengan 28 Mei 2018, dengan jadwal terbit Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 07 Juni 2018 sebanyak 2 (dua) LHP.

Sedangkan periode bulan pemeriksaan pada triwulan III pada tanggal 09 Juli sampai dengan 27 Agustus 2018, dengan jadwal terbit Laporan Hasil Pemeriksaan pada 04 September 2018 serta menghasilkan 2 (dua) LHP.

Program Pemeriksaan diluar PKPT/Non PKPT dilakukan terhadap 3 (tiga) obyek pemeriksaan.

1 (satu) obyek pemeriksaan pada triwulan I menghasilkan 1 (satu) LHP pada tanggal 14 Maret 2018, dan pada triwulan II terdapat 1 (satu) obyek pemeriksaan dengan 1 (satu) LHP yang terbit pada tanggal 07 Juni 2018. Selanjutnya pada triwulan IV terdapat 1 (satu) obyek pemeriksaan dengan 1 (satu) LHP yang terbit pada 18 Des 2018.

Selain itu selama tahun 2018 SPI juga menjadi Counterpart Auditor Eksternal, untuk kegiatan sebagai berikut :Kegiatan Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Kegiatan PKBL Tahun Buku 2017 oleh KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan; Kegiatan Audit Kepabeanan serta Kegiatan Penilaian PMDN, dimana Bio Farma meraih Juara I Tingkat Propinsi Jawa Barat

Secara rutin SPI juga melakukan kegiatan kas opname dengan jadwal triwulanan dan *Stock Opname* setiap akhir tahun; juga pemeriksaan aktivitas bulanan (produksi, pemasaran, pembelian dan bukti-bukti pembukuan)

Dari pelaksanaan program kerja tahun 2018 sesuai PKPT telah menerbitkan 7 (tujuh) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pengawasan Internal juga melakukan rapat dengan Komite Audit yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 setiap bulan dengan agenda rapat yang telah disepakati. SPI melaporkan perkembangan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan membahas laporan keuangan serta isu terakhir yang ada di perusahaan. SPI juga membina hubungan baik dengan auditor eksternal seperti BPK RI, BPKP dan KAP dalam rangka membantu kelancaran pemeriksaan yang dilakukan.

PELAPORAN PENGAWASAN INTERNAL

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN DAN PENGAWASAN EKSTERNAL

SPI melakukan pemantauan tindaklanjut atas rekomendasi audit internal dan eksternal, sebagai berikut:

1. Hasil audit internal atas PKPT 2018 menghasilkan 77 rekomendasi dan sebagian besar sudah ditindaklanjuti
2. Hasil Audit eksternal, sebagai berikut:
   - Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundangan dan Pengendalian Intern untuk Tahun yang berakhir 2016, sudah semuanya ditindaklanjuti sesuai pemantauan dan Laporan Auditor Eksternal.
   - Hasil Pemantauan Tindak Lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti dan sebagian besar telah dinyatakan sesuai oleh BPK-RI.
     Pada akhir 2018 tersisa 5 rekomendasi, yang mana hasil tindaklanjutnya telah disampaikan kepada BPK RI. Saat ini sedang menunggu review dari BPK RI.

EVALUASI KINERJA INTERNAL AUDIT

Berdasarkan Laporan Analisa Data Pencapaian Indikator Kinerja SM-S10.2 Monitoring Tindak Lanjut Semester I Tahun 2017, indikator kinerja diperoleh dari tenggang waktu penyerahan Lembar Rencana Tindak Lanjut (LRTL) dengan Surat Pengantar kepada auditee tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan. Pencapaian kinerja minimal 90%. Pada semester I tahun 2017, pencapaian kinerja sebesar 100%. Dan berdasarkan Laporan Analisa Data Pencapaian Indikator Kinerja SM-S10.2 Monitoring Tindak Lanjut Semester II Tahun 2017, pencapaian kinerja sebesar 100%.

Kinerja SPI dilakukan penilaian oleh KAP pada tanggal 13 April 2015 dan dilaporkan ke dalam Laporan Asesmen Mutu Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Bio Farma (Persero). Tujuan utama dari asesmen SPI adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dan objektif bahwa SPI telah memenuhi standar The Institute of Internal Auditors (The IIA) dan untuk mengidentifikasi apakah terdapat peluang untuk peningkatan mutu sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit internal serta memberikan nilai tambah bagi Perusahaan. Berdasarkan hasil asesmen, fungsi SPI PT Bio Farma (Persero) telah sebagian sesuai *(partially conform)* dengan Standar, Kode Etik dan definisi Audit Internal.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KAPABILITAS SDM SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan sebagai Satuan Pengawasan Internal (SPI), sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Internal Audit, Tahun 2018 personi SPI telah mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, seminar maupun workshop yaitu sebagai berikut:

No	Tanggal	Topik	Tempat Pelatihan	Penyelenggara	Jenis Pelatihan	Nama Peserta	Jabatan
1	15 Maret 2018	GCG untuk PKB	Jakarta	KBUMN	Non Sertifikasi	Ahmad Agus R	Ahli Madya
2	19-27 Maret 2018	Dasar-dasar Audit	Bandung	PPAK	Sertifikasi	Leni Lestari	Ahli Madya
3	19-29 Maret 2018	Pendidikan IA Tk. Manajerial	Jakarta	YPIA	Sertifikasi	Johnny H. Gultom	Ahli Madya
4	27 Maret 2018	Seminar FKSPI "Saber Pungli & WBS dalam meningkatkan GCG"	Bandung	FKSPI Jabar	Non Sertifikasi	Gandjar Trisnasari	Kepala SPI
						Leni Lestari	Ahli Madya
						Ai Sukarni	Ahli Muda
						Emillina	Ahli Muda
5	02-13 April 2018	Pendidikan IA Tk. Dasar I	Jakarta	YPIA	Sertifikasi	Dani Matias	Ahli Muda
6	17-19 April 2018	Seminar Nasional Internal Audit 2018 sekaligus wisuda thd peraih gelar QIA (Qualified of IA) - BF 2 org (Amar Yuliar + Johnny HG)	Yogya	YPIA	Non Sertifikasi	Gandjar Trisnasari	Kepala SPI
						Amar Yuliar S	Ahli Madya
						Johnny H. Gultom	Ahli Madya
						Leni Lestari	Ahli Madya
7	08 Mei 2018	Seminar Asosiasi Auditor Internal 2018	Batam	AAI	Non Sertifikasi	Gandjar Trisnasari	Kepala SPI
						Dini Elsiana	Ahli Madya
8	07 Juni 2018	Penggunaan Lap. Keuangan sbg Alat Bukti di Pengadilan	Jakarta	Koran BUMN	Non Sertifikasi	Gandjar Trisnasari	Kepala SPI
9	09-20 Juli 2018	Pendidikan IA Tk. Dasar II	Jakarta	YPIA	Sertifikasi	Nurdin Wijaya	Ahli Muda
10	09-14 Juli 2018	Pendidikan IA Pra Manajerial I	Jakarta	YPIA	Sertifikasi	Gandjar Trisnasari	Kepala SPI
11	23 Juli-05 Agustus 2018	Pendidikan IA Tk. Dasar II	Jakarta	YPIA	Sertifikasi	Dani Matias	Ahli Muda
12	06 Agustus-07 September 2018	Rangkaian ODP/Officer Dev. Program	Bandung	*Kubik Leadership*			
		~ Character Building Training & Bela Negara		Sucofindo			
		~ Basic Leadership for ODP		BF			
		~ Personal Financial Training		ESQ Leadership			
		~ Inhouse Training ESQ Character Building		Star Training			
		~ Change Agent of Corporate Culture		Thames Center			
		~ Supply Chain Management					
13	08-10 Agustus 2018	Seminar FKSPI "Peran IA dalam Peningkataan GCG di Era Disruptif"	Solo	FKSPI Jabar	Non Sertifikasi	Leni Lestari	Ahli Madya
						Emllina	Ahli Muda
14	30 Agustus 2018	Inhouse Training Kepabeanan	Bandung	Harvest Consulting	Non Sertifikasi	Ahmad Agus R	Ahli Madya
						Dedi Mulyadi	Ahli Muda
						Dani Matias	Ahli Muda
15	05-06 September 2018	Workshop Fraud Risk Management	Semarang	LPFA	Non Sertifikasi	Gandjar Trisnasari	Kepala SPI
						Dini Elsiana	Ahli Madya
16	25 September 2018	PSAK 23, 26, 65, 66, 69 & 71	Bandung	IAI Wilayah Jabar	Non Sertifikasi	Ahmad Agus R	Ahli Madya
						Dini Elsiana	Ahli Madya
						Benny Emirald H	Ahli Muda

No	Tanggal	Topik	Tempat Pelatihan	Penyelenggara	Jenis Pelatihan	Nama Peserta	Jabatan
17	18-14 Oktober 2018	Sertifikasi Ahli Kepabeanan	Jakarta	LMKN	Sertifikasi	Ahmad Agus R	Ahli Madya
18	15-26 Oktober 2018	Pendidikan IA Tk. Lanjutan I	Jakarta	YPIA	Sertifikasi	Nurdin Wijaya	Ahli Muda
19	21 Oktober-01 November 2018	Stress Management	Bandung	Sucofindo	Non Sertifikasi	Benny Emirald	Ahli Muda
20	29 Oktober-09 November 2018	Pendidikan IA Tk. Lanjutan I	Jakarta	YPIA	Sertifikasi	Dani Matias	Ahli Muda
21	26 November-05 Desember 2018	Audit Operasional	Bandung	PPAK	Sertifikasi	Leni Lestari	Ahli Madya
						Dedi Mulyadi	Ahli Muda
22	29-30 November 2018	Creative Presentation	Bandung	HC Strategic	Non Sertifikasi	Benny Emirald H	Ahli Muda
23	03-04 Desember 2018	Implementasi Internal Control COSO	Jakarta	YPIA	Non Sertifikasi	Benny Emirald H	Ahli Muda
24	10-11 Desember 2018	Visionary Leader	Bandung	Kubik Leadership	Non Sertifikasi	Benny Emirald	Ahli Muda
25	14 Desember 2018	Deklarasi IIA Chapter Bandung	Bandung	IIA	Non Sertifikasi	Ahmad Agus R	Ahli Madya

YPIA = Yayasan Pendidikan Internal Audit
PPAK = Pusat Pengembangan Akuntansi & Keuangan
AAI = Asosiasi Auditor Internal
FKSPI = Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
LPFA = Lembaga Pengembangan Fraud Auditing
LMKN = Lembaga Manajemen Kompetensi Nasional

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA PENGENDALIAN INTERNAL

PEDOMAN PENGENGAKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

1. Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Pasal 28 (3) tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN.
2. Anggaran Dasar Perusahaan.

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pengangkatan Kepala Pengawasan Internal berdasarkan Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: 0502/HC/TKK/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Transfer Karir Karyawan memutuskan Sdr. Gandjar Trisnasari Grade 3 (tiga) yang semula sebagai Kepala Divisi Produksi Farmasi pada Direktorat Produksi, mengalami Transfer Karir menjadi Kepada Satuan Pengawasan Intern pada Direktorat Utama terhitung mulai tanggal 19 Juli 2017. Dan persetujuan Dewan Komisaris Np. S-22/DK/BF/07/2017 tanggal 17 Juli 2017

Satuan Pengawasan Intern berada di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang membawahi Auditor Internal (Ahli Madya PI dan Ahli Muda PI). Auditor pada Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern. Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PERENCANAAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

Adapun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 sebanyak 9 obyek pemeriksaan.

Program pemeriksaan pada triwulan I/2019 terhadap 3 (tiga) obyek pemeriksaan, dengan bulan pemeriksaan 14 Januari sampai dengan 04 Maret 2019 dan menghasilkan 3 (tiga) LHP yang direncanakan terbit pada 12 maret 2019.

Selanjutnya pada triwulan II direncanakan melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) obyek pemeriksaan pada periode 08 April sampai dengan 29 Mei 2019, dengan rencana penerbitan 3 (tiga) LHP pada 14 Juni 2019.

Selain itu pada triwulan III direncanakan melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) obyek pemeriksaan pada periode 12 Juli sampai dengan 30 Agustus 2019, dengan rencana penerbitan 3 (tiga) LHP pada 06 September 2019.

DIVISI QA-RA *(QUALITY ASSURANCE AND REGULATORY AFFAIR)*

Penerapan *Quality Management System* Di Bio Farma Bertujuan Untuk Menjaga Konsistensi Pemenuhan Sistem Terintgrasi

Selain Satuan Pengawasan Intern (SPI), Bio Farma juga mempunyai Divisi Penjamin Mutu Dan Regulasi (*Quality Assurance & Regulatory Affair* / QA-RA) dengan tugas, wewenang & tanggung jawabnya antara lain melakukan Audit Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja, Audit Praktek Produksi yang Baik (GMP), Audit Vendor, Audit Pengaduan Pelanggan.

PROFIL KEPALA DIVISI PENJAMIN MUTU DAN REGULASI (QA-RA)

JENI TRESNABUDI

Kepala Divisi Penjamin Mutu Dan Regulasi (QA-RA)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2018 adalah 51 tahun. Lahir di Lahir di Bandung, 24 Januari 1967, memperoleh gelar Sarjana Farmasi & Apoteker dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1993 dan Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2005.

Mengawali karirnya di Bio Farma sejak tahun 1996-2001 sebagai Staf Bagian Pengawasan Mutu Vaksin Bakteri. Selama di Bio Farma, pernah menempati berbagai posisi strategis, diantaranya Kepala Bagian Pengawasan Mutu Vaksin Bakteri (2001-2008), Kepala Bagian *Quality Assurance Operation* (2008-2011), Kepala Bagian *Quality Assurance System* (2012-2014), Kepala Divisi Produksi Farmasi (2014), Kepala Divisi Produksi Vaksin Bakteri (2015-2016) dan diangkat sebagai Kepala Divisi Penjamin Mutu & Regulasi (2018 – Sekarang).

Memiliki kompetensi di Bidang Pengawasan Mutu, *Current* GMP, dll. Memiliki Kualifikasi sebagai Auditor dan Lead Auditor ke berbagai Perusahaan di dalam dan luar negeri.

Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Divisi Penjamin Mutu & Regulasi (QA) adalah Surat Keputusan No : 02504/DIR/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018. Tidak memiliki rangkap jabatan.

Bio Farma secara konsisten dan berkesinambungan melakukan pengawasan dan jaminan mutu dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices* (cGMP), *Good Laboratory Practices* (GLP), *Good Regulatory Practices* (GRP), *Good Clinical Practices* (GCP), *Good Distribution Practices* (GDP), ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001. Prosedur pengawasan dan jaminan mutu ini dipantau secara ketat oleh *National Control Authority* (NCA) yang diakui oleh badan kesehatan dunia (WHO), atau di Indonesia dikenal dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Bio Farma secara konsisten dan berkesinambungan melakukan pengawasan dan jaminan mutu dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices* (cGMP), *Good Laboratory Practices* (GLP), *Good Regulatory Practices* (GRP), *Good Clinical Practices* (GCP), *Good Distribution Practices* (GDP), ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001. Prosedur pengawasan dan jaminan mutu ini dipantau secara ketat oleh *National Control Authority* (NCA) yang diakui oleh badan kesehatan dunia (WHO), atau di Indonesia dikenal dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KEPALA DIVISI PENJAMIN MUTU DAN REGULASI (QA)

TUGAS KEPALA DIVISI PENJAMIN MUTU DAN REGULASI (QA)

1. Melakukan Audit Sistem Manajemen Mutu
2. Melakukan Audit Sistem Manajemen Lingkungan
3. Melakukan Audit Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja,
4. Melakukan Audit Praktek Produksi yang Baik (GMP)
5. Melakukan Audit Vendor
6. Melakukan Audit Pengaduan Pelanggan

WEWENANG KEPALA DIVISI PENJAMIN MUTU DAN REGULASI (QA)

Kepala Divisi Quality Assurance dan/atau MR berwenang untuk menyetujui program audit serta menunjuk tim audit yang kompeten dan independen yang akan melakukan audit ke setiap Divisi/Bagian yang terkait dan memerintahkan audit di luar jadwal yang telah ditentukan baik dengan pemberitahuan dan/atau tanpa pemberitahuaan kepada auditee.

TANGGUNG JAWAB KEPALA DIVISI PENJAMIN MUTU DAN REGULASI (QA)

1. Bertanggung jawab terhadap penerapan integrasi ISO 9001,
2. Bertanggung jawab terhadap penerapan integrasi ISO 14001
3. Bertanggung jawab terhadap penerapan integrasi OHSAS 18001.

Kepala Bagian QA *Service* bertanggung jawab untuk membuat jadwal, program audit, lingkup audit dan evaluasinya termasuk penyimpanan rekaman internal audit serta melaporkan pelaksanaan audit pada Kepala Divisi QA dan/atau MR. Pembuatan jadwal internal audit berdasarkan analisis risiko (*Risk Analysis*).

KOMPETENSI KEPALA DIVISI PENJAMIN MUTU DAN REGULASI (QA)

1. Kepala Divisi *Quality Assurance* (QA) memiliki kompetensi di bidang pengawasan mutu, *current GMP*, dll.
2. Memiliki kualifikasi sebagai *auditor* dan *lead auditor* ke berbagai perusahaan di dalam dan luar negeri untuk memastikan *vendor* Bio Farma memenuhi aspek *quality management system* dan ramah lingkungan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DIVISI PENJAMIN MUTU DAN REGULASI (QA)

Kepala Divisi Penjamin Mutu Dan Regulasi (QA) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, Surat Keputusan Direksi Bio Farma Nomor: 02504/DIR/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang pengangkatan Kepala Divisi Manajemen Mutu & Regulasi.

KEDUDUKAN DIVISI PENJAMIN MUTU DAN REGULASI (QA) DALAM STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENJAMIN MUTU DAN REGULASI (QA)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 04276/DIR/XI/2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero) dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. 00117/DIR/I/2018 Tanggal 8 Januari 2018 Tentang Perubahan Keputusan Ata Keputusan Direksi No. 04276/DIR/XI/2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero), diantaranya secara struktural Divisi Penjamin Mutu Dan Regulasi (QA) berada di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang membawahi Bagian Penjamin Mutu Operasional, Bagian Penjamin Mutu Pelayanan, Bagian Penjamin Mutu Sistem, Bagian Regulasi Mutu, dan Bagian Fungsional Penjamin Mutu Dan Regulasi. Struktur Organisasi Divisi QA Bio Farma adalah sebagai berikut:

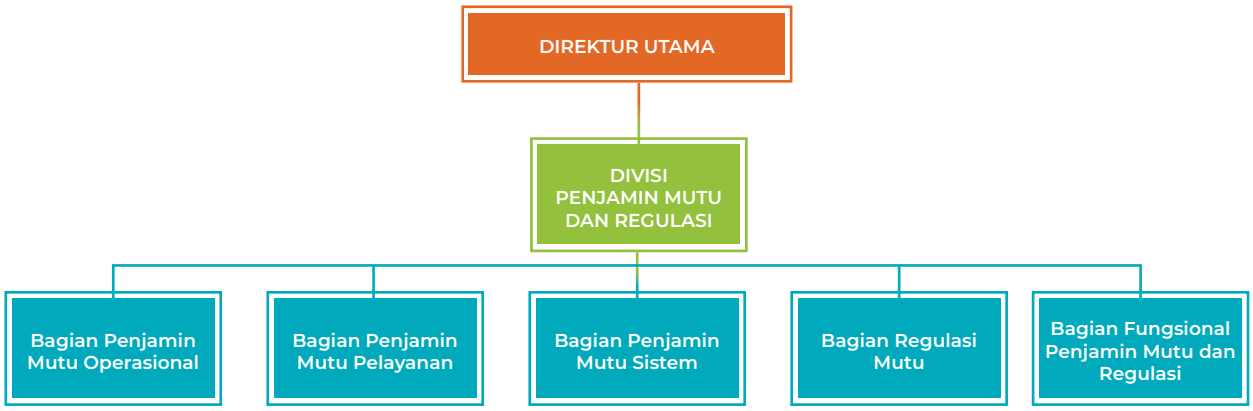

JUMLAH *INTERNAL AUDITOR QUALITY ASSURANCE* (QA)

Per 31 Desember 2018, jumlah Internal Auditor sebanyak 108 (Seratus Delapan) orang yang merupakan perwakilan dari Divisi *Quality Assurance, Quality Control*, Produksi, Teknik, Hewan Laboratorium, Pengelolaan Persediaan, Pemasaran dan Administrasi. Rinciannya sebagai berikut:

No.	Kompetensi Auditor	Jumlah
1	Auditor GMP, ISO, OHSAS	98 orang
2	Auditor ISO dan OHSAS	10 orang
Jumlah		**108 orang**

Latar belakang pendidikan *Internal Auditor* yaitu Strata 2 (S2) dan Strata I (S1) di bidang Farmasi, Biologi, Kedokteran dan bidang lainnya. Setiap Auditor telah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang audit secara berkesinambungan.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENJAMIN MUTU DAN REGULASI (QA) TAHUN 2018

Dalam rangka peningkatan kompetensi diri, profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri, kemampuan sebagai Auditor Anggota Internal Auditor QA, mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, seminar maupun workshop.

Sepanjang tahun 2018, tidak adanya pelatihan dari pihak eksternal untuk anggota Internal Auditor QA.

SERTIFIKASI *AUDITOR QUALITY ASSURANCE* (QA)

Dalam melaksanakan kegiatan Audit, QA didukung oleh tenaga Auditor yang profesional. Per 31 Desember 2018, kualifikasi dan kompetensi Auditor QA Bio Farma sebagai berikut:

Kompetensi auditor	**Jumlah**
Lead Auditor GMP, ISO, OHSAS	**48 orang**
Lead Auditor ISO dan OHSAS	**5 orang**

Sejumlah tenaga observer lainnya yang cukup berpengalaman dan sedang proses menyelesaikan sertifikasi. Pada tahun 2018 tidak ada calon auditor sedang dalam kualifikasi auditor.

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN AUDITOR QA TAHUN 2018

PENERAPAN *QUALITY MANAGEMENT SYSTEM*/QMS

Penerapan *Quality Management System* di Bio Farma bertujuan untuk menjaga konsistensi pemenuhan sistem terintegrasi. Dalam pelaksanaan, perusahaan telah menunjuk penanggung jawab *Management Representative* (MR) yaitu *Corporate Secretary* dan wakil MR *Quality* untuk membantu pelaksanaan adalah Divisi Penjamin Mutu & Regulasi. Tim integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001 beranggotakan dari berbagai unit kerja berfungsi mengkoordinasikan, memastikan implementasi sistem terintegrasi serta sebagai internal auditor dan auditor vendor Bio Farma, Keputusan yang diperbarui setiap tahunnya, SK No: 00167/DIR/I/2015 tanggal 9 Januari 2015. Implementasi *Quality Management System* pada tahun 2018 sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan
1	02-06 Juli 2018	Certificate Renewal and NST toISO 14001:2015
2	02-06 Juli 2018	Certificate Renewal OHSAS 18001:2007
3	4-6 July 2018	AUDIT OF ISO 9001 : 2015 Surveillance 3-5

PROGRAM KERJA AUDIT QA TAHUN 2019

Perencanaan Audit yang akan dilakukan oleh Auditor QA di tahun 2019 adalah sebagai berikut

1. Bagian administrasi paling sedikit diaudit satu kali dalam setahun (aspek kualitas, lingkungan dan K3).
2. Bagian produksi, QA, QC, teknik atau bagian diluar adminstrasi diinspeksi paling sedikit tiga kali dalam setahun yaitu dua kali aspek GMP dan satu kali keseluruhan aspek meliputi aspek kualitas, lingkungan, dan K3.
3. Bagian EHS diaudit paling sedikit tiga kali setahun (aspek kualitas, lingkungan dan K3).

AKUNTAN PUBLIK

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan dilakukan dengan melaksanakan audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. KAP yang mengaudit Perusahaan merupakan perpanjangan tangan BPK dalam menjalankan tugas dan wewenang pemeriksaan. Namun, ranah pemeriksaan yang dapat dijangkau KAP pada Perusahaan hanya kepada pemeriksaan akan kewajaran penyajian sebuah laporan keuangan, yang pada umumnya adalah audit atas laporan keuangan atau audit keuangan Perusahaan.

Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP), adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.

LINGKUP AUDIT MENCAKUP

1. Review Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan posisi dan periode yang berakhir 31 Desember 2018
2. Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan posisi dan periode yang berakhir 31 Desember 2018; dan
3. Audit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan posisi dan periode yang berakhir 31 Desember 2018.

PEDOMAN MENGENAI AKUNTAN PUBLIK

1. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 mengenai Kantor Akuntan Publik
3. UU PT Nomor 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat (4) dan pasal 68 ayat (3) bahwa BUMN Persero juga dapat diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
4. Anggaran Dasar Perusahaan

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) tahun Buku 2018. KAP Djoemarna, Wahyudin dan rekan telah memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) selama 6 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2012 – 2017. Untuk itu rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. agar dilakukan proses pengadaan KAP yang baru sesuai ketentuan yang berlaku yang akan melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2018 PT Bio Farma (Persero).

Menindaklajuti hasil RUPS tanggal 25 April 2018 yang tercantum di dalam Berita Acara RUPS No 16, menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Roebiandini dan Rekan sebagai KAP Bio Farma menggantikan Djoemarma, Wahyudin & Rekan.

Roebiandini dan Rekan sebagai Auditor Eksternal melakukan audit independen terhadap Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2018. KAP ini telah memiliki izin dari Menteri Keuangan RI No. 684/KM.1/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan BAPEPAM No. STTD.KAP-00056/PM.223/2017 tanggal 27 Desember 2017.

Penunjukan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Proses pemilihan akuntan publik dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Bio Farma. Mulai dari mengundang beberapa KAP yang telah terdaftar di BPK dan berpengalaman dalam mengaudit untuk ikut dalam proses pengadaan jasa KAP yang akan dilaksanakan oleh Bio Farma sampai dengan proses persetujuan Dewan Komisaris dan Pelaporan Kepada Pemegang Saham.

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, KAP yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Roebiandini dan Rekan telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2018 serta laporan Laporan Rugi Laba dan penghasilan

komprehensif lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Roebiandini dan Rekan melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia dan standar pemeriksaan keuangan negara yang diterbitkan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

Bio Farma melakukan komunikasi dan pertemuan yang rutin dengan Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen untuk meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan, perjanjian kerja, ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

PROSES PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Piagam Komite Audit yang di dalamnya mengatur tentang proses seleksi dan penunjukan Akuntan Publik, serta ketentuan yang harus dipatuhi terkait legalitas, kompetensi dan independensi Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia dan Australia, Komite Audit bertanggung jawab dalam pemilihan Akuntan Publik.

Adapun proses penunjukan Akuntan Publik melalui mekanisme sebagai berikut

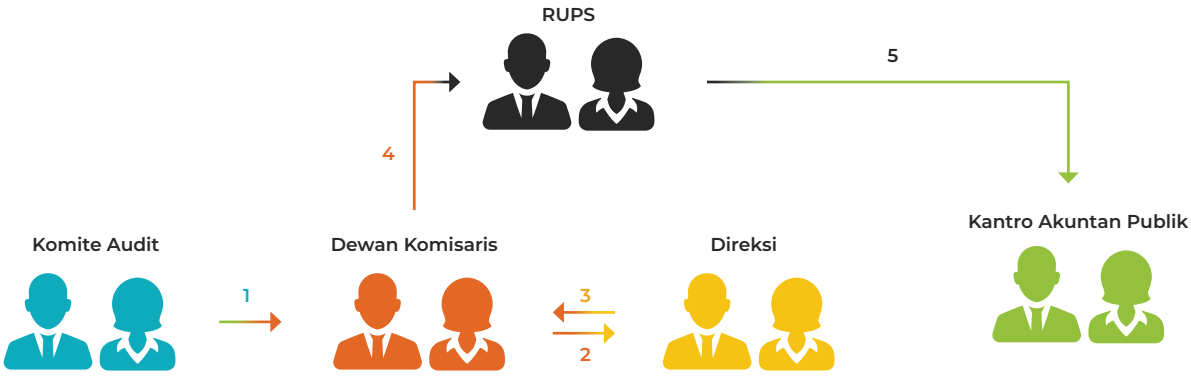

1. Rapat membahas pengadaan Jasa Audit KAP dan Evaluasi atas pelaksanaan KAP tahun sebelumnya yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoemarma, Wahyudin & Rekan. Hasil evaluasi memuaskan, sehingga dapat dilakukan penunjukan langsung, mengingat KAP tersebut memberikan jasa audit 7 tahun berturut-turut.
2. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris atas evaluasi KAP dan memberikan saran terkait pengadaan Jasa Audit KAP berdasarkan hasil rapat Komite Audit.

1

2 Meminta Direksi untuk melakukan proses pengadaan Jasa Audit KAP berdasarkan hasil evaluasi KAP dan sesuai ketentuan Bio Farma serta melakukan negosiasi terkait nilai jasa audit dan ruang lingkup audit.

3 Melakukan proses pengadaan KAP melalui penunjukan langsung dan negosiasi terkait nilai jasa audit dan ruang lingkup audit.

4 Mengajukan usulan jasa Audit KAP

5 RUPS menyetujui penunjukan KAP dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan penambahan ruang lingkup dan besaran imbalan jasa audit.

NAMA DAN TAHUN AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN BIO FARMA SELAMA 8 TAHUN TERAKHIR

Akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Bio Farma adalah

1. Tahun 2009 – 2011 : Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
2. Tahun 2012 – 2017 : Djoemarna
3. Tahun 2018 : Roebiandini dan Rekan

NAMA DAN TAHUN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN BIO FARMA SELAMA 8 TAHUN TERAKHIR

Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan Bio Farma adalah

1. Tahun 2009 – 2011: Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
2. Tahun 2012 – 2017: Djoemarma, Wahyudin & Rekan
3. Tahun 2018: Roebiandini dan Rekan

BESARNYA *FEE* YANG DIBERIKAN KEPADA AKUNTAN PUBLIK

Pada tahun 2018 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Laporan Keuangan Bio Farma adalah Roebiandini dan Rekan. Perusahaan menetapkan nilai *fee* Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 sebesar Rp250.800.000.

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN SELAIN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN PADA TAHUN TERAKHIR

Selain Jasa Audit Keuangan, KAP Roebiandini dan Rekan pada tahun 2018 belum memberikan jasa lainnya kepada Bio Farma, sebagai berikut:

a. Jasa *Assessment* Mutu SPI

Jasa *assessment* mutu Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Auditor Eksternal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dan obyektif bahwa Pengawasan Internal telah memenuhi standar *The Institute of Internal Auditors* (The IIA).

Tujuan berikutnya adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat peluang untuk peningkatan mutu sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses audit internal serta memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

b. Jasa *Assessment* Implementasi ERP

Saat ini Perusahaan sedang melakukan konversi sistem informasi, yaitu dengan mengimplementasikan sistem ERP *(Enterprise Resources Planning)* dalam rangka meningkatkan kemampuan dan daya saing Perusahaan. Implementasi sistem informasi memerlukan penyesuaian yang signifikan pada proses bisnis dan sumber daya manusia. Oleh karena dalam masa transisi, diperlukan assessmen terhadap infrastruktur yang akan mendukung keberhasilan implementasi sistem ERP tersebut di Perusahaan, terutama menyangkut perubahan dalam organisasi, SOP dan sistem pengendalian internal, apakah telah sesuai dengan penerapan ERP.

Tujuan assessmen terhadap sistem ERP yang diimplementasikan adalah untuk memastikan bahwa perubahan dalam organisasi, SOP dan sistem pengendalian internal telah sesuai dengan sistem ERP, sehingga dapat menghasilkan berbagai informasi dan laporan yang diperlukan Perusahaan.

Berikut Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Bio Farma sepanjang tahun 2009 – 2018 sebagai berikut:

Tahun Audit	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Partner Penaggung Jawab)	No. Registrasi	Periode	Fee Audit (Rp)	Opini	Izin KAP	Jasa Di Luar Audit Keuangan
2018	Roebiandini dan Rekan	Rudiana	No. Registrasi Akuntan Publik: NRAP: AP.1055	1		Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang meteral, posisi keuangan PT Bio Farma (Persero) tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan & arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tsb sesuai dengan SAK di Indonesia	NIUKAP.684/ KM.1/2008	
2017	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Djoemarma	No. Registrasi Akuntan Publik: NRAP: AP.0190	6 Tahun	Rp256.300.000	Wajar dalam semua hal yang material	NIUKAP: KEP-350/ KM.17/2000	
2016	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Djoemarma	No. Registrasi Akuntan Publik: NRAP: AP.0190		Rp215.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	NIUKAP: KEP-350/ KM.17/2000	
2015	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Djoemarma	No. Registrasi Akuntan Publik: NRAP: AP.0190		215.000.000,-	Wajar dalam semua hal yang material	NIUKAP: KEP-350/ KM.17/2000	Ada
2014	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Djoemarma	No. Registrasi Akuntan Publik: NRAP: AP.0190		200.000.000,-	Wajar dalam semua hal yang material	NIUKAP: KEP-350/ KM.17/2000	Tidak ada
2013	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Djoemarna	No. Registrasi Akuntan Publik: NRAP: AP.0190		200.200.000,-	Wajar dalam semua hal yang material	NIUKAP: KEP-350/ KM.17/2000	Tidak ada
2012	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	Djoemarna	No. Registrasi Akuntan Publik: NRAP: AP.0190		200.200.000,-	Wajar dalam semua hal yang material	NIUKAP: KEP-350/ KM.17/2000	Tidak ada
2011	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono	No. Registrasi Akuntan Publik: R/134. AGA/4.2/2011		242.000.000,-	Wajar dalam semua hal yang material		Tidak ada
2010	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono	No. Registrasi Akuntan Publik: R/123. AGA/4.1/04/2010	3 Tahun	187.000.000,-	Wajar dalam semua hal yang material		Tidak ada
2009	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono	No. Registrasi Akuntan Publik: R/077.S/7/03/08		187.000.000,-	Wajar dalam semua hal yang material		Tidak ada

TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajamen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

TANGGUNG JAWAB AUDITOR

Tanggung jawab Auditor adalah menyatakan opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit. Auditor melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Auditor untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian materi.

OPINI

Menurut Kantor Akuntan Publik (KAP) Roebiandini dan Rekan, laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) menyajikan secara wajar, dengan Laporan Nomor: 00010/2.0756/AU.1/04/1055-1/1/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dalam semua hal yang meterial, posisi keuangan PT Bio Farma (Persero) tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

URAIAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Manajemen Risiko Korporat adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis/ mengevaluasi, mengelola dan mengkaji ulang risiko perusahaan secara efektif agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan dampak risiko seminimal mungkin.

PROFIL DIVISI KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO

SRI WIDAYATININGSIH
Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2018 adalah 55 tahun. Lahir di Unggaran pada tanggal 3 Mei 1963. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (UII) tahun 1991.

Mengawali karirnya di Bio Farma sejak 03 Januari 1994. Selama berkarir di Bio Farma, pernah menempati berbagai posisi strategis, diantaranya menjabat sebagai Staf Bagian Perencanaan tahun 1994, Staf Bagian Satuan Pengawasan Intern (1995), Ahli Muda Satuan Pengawasan Intern (1999), Ahli Madya Satuan Pengawasan Intern (2002), Kepala Bagian Pengadaan Umum (2007), Kepala Bagian Akuntansi Manajemen (2010), Kepala Divisi Logistik (2013), dan Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern (2015) dan diangkat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko tahun 2017.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Resiko berdasarkan SK Direksi Nomor 0219/HC/TKK/III/2017 Tanggal 15 Maret 2017.
Tidak Memiliki rangkap jabatan.

MANAJEMEN RISIKO KORPORAT

Bio Farma sebagai Perusahaan *Life Science* Kelas Dunia Yang Berdaya Saing Global memiliki risiko inherent yang cukup besar. Bio Farma memiliki komitmen dalam pengelolaan manajemen risiko bahwa dalam pengelolaan bisnis, Bio Farma berkomitmen mengelola semua risiko secara efektif dan efisien serta memastikan kesinambungan dan risiko pertumbuhan dari bisnis inti yang berkelanjutan melalui pengelolaan risiko secara proaktif, berfokus pada risiko yang terpenting, dan memberikan perhatian terhadap alokasi modal dalam proses pengendalian. Pengelolaan risiko Bio Farma dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko bisnis, Bio Farma berpedoman kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada Badan Usaha Milik Negara dan diperbaharui melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012. Manajemen Risiko Korporasi di Bio Farma dituangkan di dalam Manual Bio Farma (MBF-01 dan MBF-02).

SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN BIO FARMA

Mengelola risiko adalah tanggung jawab setiap orang, sehingga setiap karyawan harus mengenali setiap risiko yang terkait dengan pekerjaannya dan mengelolanya secara proaktif.

Bio Farma menyadari bahwa jalannya operasional Perusahaan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik yang berada di bawah kendali maupun di luar kendali Perusahaan. Karena itu, risiko tidak boleh diabaikan dan harus dikelola secara integrasi, optimal, dan berkesinambungan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari praktik tata kelola yang baik.

Sejak tahun 2009, Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan di Bio Farma mengacu kepada COSO *Enterprise Risk Management – Integrated Framework*. Seiring dengan perancangan Sistem Manajemen Terpadu Bio Farma, Sistem Manajemen Risiko Bio Farma mengalami perubahan dengan bridging COSO *Enterprise Risk Management – Integrated Framework* ke ISO 31000 (2018).

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada BUMN
2. Manajemen Risiko Korporasi di Bio Farma dituangkan di dalam Manual Bio Farma (MBF-01 dan MBF-02).
3. Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh KNKG (2006)
4. Anggaran Dasar Perusahaan
5. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma Nomor: PER-06/DK/BF/12/2018; Nomor: PER-06963/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* di PT Bio Farma (Persero)

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 25, Bio Farma menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan korporasi, harus mempertimbangkan risiko usaha.
2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan.

ALIRAN BISNIS PROSES MANAJEMEN RISIKO KORPORAT

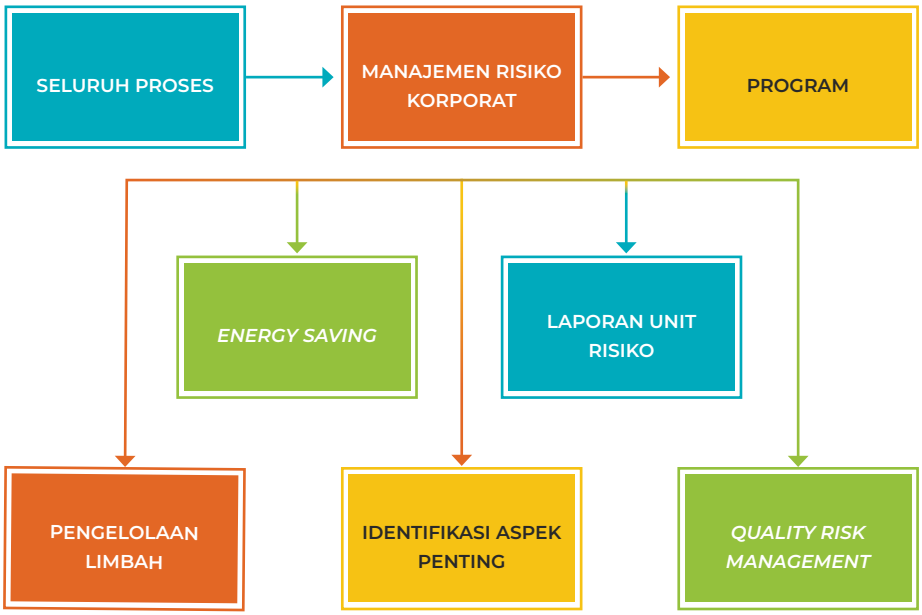

Proses ini bertujuan untuk menggali dan memahami semua risiko yang ada di dalam perusahaan secara menyeluruh sehingga risiko dapat dikelola dan dikendalikan.

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

Dalam mencapai visi dan misi pengelolaan risiko Perusahaan, Bio Farma melakukan strategi manajemen risiko sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan SK Direksi SK Direksi No. 04276/DIR/XI/2017 Tanggal 17 November 2017 tentang Bagan Organisasi Bio Farma, bahwa dalam pengelolaan manajemen risiko, Bio Farma telah membentuk Divisi yang membawahi fungsi Kepatuhan yaitu Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko. Kepala Kepatuhan & Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan membawahi 2 Bagian yaitu Bagian Kepatuhan dan Bagian Manajemen Risiko.

Terkait dengan penerapan manajemen risiko di Bio Farma maka Tugas Direksi adalah sebagai Penanggung jawab Utama: penerapan manajemen risiko pada Perseroan, sedangkan Dewan Komisaris adalah Pengawas Tertinggi dalam pelaksanaan pengawasan (*monitoring* dan *review*) pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada Perseroan

TUGAS & KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP MANAJEMEN RISIKO

TUGAS DEWAN KOMISARIS

Melakukan pengawasan aktif atas fungsi kepatuhan melalui komite-komite Dewan Komisaris yang mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan. Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

1. Apa yang dapat membuat Perusahaan bangkrut atau rugi
   Mengidentifikasi risiko utama
   a. Pemangku kepentingan utama dan kebutuhannya
   b. Rencana strategis Perusahaan dan pelaksanaannya
   c. Risiko kegiatan utama, baik finansial, operasional, maupun kepatuhan kepada peraturan perundangan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup Perusahaan;
   d. Menetapkan toleransi risiko dan membandingkannya dengan kapabilitas Perusahaan ataupun rencana strategi Perusahaan;
2. Fokus pada perubahan yang terjadi.
3. Melakukan pengujian dan membandingkannya dengan apa yang telah terjadi.
4. Menemu kenali hubungan antar-risiko.
5. Pelaksanaan proses komunikasi risiko, pembinaan budaya sadar risiko, menciptakan situasi yang kondusif untuk penerapan manajemen risiko dan pembentukan “tone at the top” (perilaku keteladanan).

TUGAS & KEWAJIBAN DIREKSI TERHADAP MANAJEMEN RISIKO

TUGAS DIREKSI

1. Direksi berperan dalam memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan serta mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha antara lain dengan menyusun kebijakan dan/atau menetapkan keputusan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan harus mempertimbangkan risiko.
3. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan.

KEWAJIBAN DIREKSI

1. Menciptakan situasi yang kondusif untuk melaksanakan manajemen risiko melalui penetapan prinsip, strategi umum, dan kebijakan penerapan manajemen risiko
2. Menyusun dan menetapkan struktur oraganisasi manajemen risiko, serta menetapkan struktur akuntabilitas hingga level yang terendah
3. Menetapkan "bahasa dan terminologi" manajemen risiko baku yang akan digunakan di dalam Perusahaan, antara lain dengan menetapkan jenis standar manajemen risiko yang akan digunakan
4. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. Menyediakan pelatihan, dana, sarana fisik, peralatan, dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan manajemen risiko dengan baik.
5. Memastikan keselarasan program manjemen risiko dengan strategi Perusahaan, sekaligus menentukan ukuran kinerja pencapaian sasaran manajemen risiko
6. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

1. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko adalah Memastikan tata kelola dan kepatuhan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi *Governance, Risk and Compliance* (GRC) secara terintegrasi, konsisten dan berkesinambungan guna mendukung tercapainya GCG dan visi Perusahaan berdasarkan prosedur dan regulasi yang berlaku baik nasional maupun internasional.
2. Melakukan supervisi dan mengkoordinasi proses *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) terhadap seluruh kegiatan operasional Perusahaan di lingkungan Bio Farma dan seluruh proyek atau inisiatif strategis.
3. Melakukan proses *Loss Event Management* (LEM) yang berupa pengumpulan data dan evaluasi terhadap event yang menimbulkan kerugian finansial dan non-finansial serta langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan
4. Mengelola *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai earlywarning untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan strategis Perusahaan
5. Melakukan kajian-kajian khusus untuk inisiatif/proyek baru sesuai dengan permintaan manajemen untuk menunjang pengambilan keputusan
6. Memberikan masukan untuk faktor risiko strategis dan operasional jangka panjang maupun jangka pendek dalam penyusunan management *policy* Perusahaan.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Bio Farma dalam melaksanakan aktivitas kerja dan setiap pengambilan keputusan didasarkan kepada risiko. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan/prosedur yang mengatur implementasi manajemen risiko. Manajemen risiko korporat diatur di dalam :

1. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-06/DK/BF/12/2018; Nomor: PER-06963/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di PT Bio Farma (Persero).
2. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: PER-07/DK/BF/12/2018; Nomor: PER-06964/

DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Bio Farma (Persero).

3. Kebijakan Sistem Manajemen Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Nomor: MBF-02571/DIR/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.
4. SM-S20 Rev.#:2 Pedoman Manajemen Risiko Korporat
5. 235K-SIS-ERM Rev.#:1 Prosedur Baku Manajemen Risiko Korporat
6. 235K-SIS-KBS Rev.#:1 Prosedur Baku Manajemen Risiko Fungsi Keuangan, Bisnis, dan Strategis
7. 235K-SIS-ORM Rev.#:1 Prosedur Baku Manajemen Risiko Fungsi Operational Administrasi

Kebijakan manajemen risiko digunakan untuk memastikan bahwa semua level manajemen Perusahaan selalu mempertimbangkan aspek pengelolaan risiko dalam menjalankan proses pengambilan keputusan. Kebijakan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan budaya sadar risiko dengan menetapkan tahapan-tahapan proses standar pengelolaan risiko yang berlaku di Bio Farma.

Sejak tahun 2009 Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan di Bio Farma mengacu kepada COSO *Enterprise Risk Management – Integrated Framework*. Seiring dengan perancangan Sistem Manajemen Terpadu Bio Farma, Sistem Manajemen Risiko Bio Farma mengalami perubahan dengan *bridging COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework* ke ISO 31000 (2018).

Kebijakan Manajemen Risiko Bio Farma saat ini sudah mengadopsi standar ISO 31000 yang terdiri dari Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko, dan Prinsip Manajemen Risiko yang memiliki tujuan utama:

a. Tersedianya panduan dasar bagi Perusahaan dalam pengelolaan risiko Perusahaan
b. Terkoordinasinya proses dan kegiatan manajemen risiko yang terintegrasi dan tersinkronisasi di lingkungan Perusahaan

MANAJEMEN RISIKO YANG BERBASIS TATA KELOLA

Prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang berpengaruh dalam pelaksanaan manajemen risiko adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab (responsibilitas) dan independensi.

MANAJEMEN RISIKO YANG BERBASIS TATA KELOLA SANGAT DIPERLUKAN OLEH BIO FARMA:

1. Manajemen Risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata kelola Perusahaan karena peran manajemen risiko dalam memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran keberhasilan usaha tidak tergantikan.
2. Pelaksanaan manajemen risiko yang baik memerlukan prinsip-prinsip tata kelola sbb
   a) Transparansi: pengelolaan risiko haruslah transparan, karena dampak risiko tidak hanya pada satu unit atau bagian saja, tetapi juga pada bagian lain. Pengelolaan risiko haruslah bersifat inklusif dan transparan artinya melibatkan semua pihak yang terkait dengan risiko tersebut, baik dalam penanganan sumber risiko, maupun perlakuan terhadap dampak risiko
   b) Akuntabilitas: harus terdapat akuntabilitas yang jelas dalam penerapan manajemen risiko dalam Peusahaan. Akuntabilitas tertinggi dalam penerapan manajemen risiko terletak pada Direksi dan akuntabilitas pengawasan penerapan manajemen risiko terletak pada Dewan Komisaris. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan risiko harus jelas di setiap tingkatannya, bahkan hingga ke tiap proses bisnis.
   c) Responsibilitas: penjabaran akuntabilitas penerapan manajemen risiko memerlukan uraian tanggung jawab yang lebih jelas dalam pengelolaan risiko pada masing-masing tingkatan, bahkan hingga ke pengelolaan risiko dalam proses Perusahaan. Oleh karena itu setiap pemangku risiko *(risk owner)* harus dapat memamahi tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan risiko dalam lingkup tugas dan kewenangannya
   d) Independensi: konsekuensi logis dari prinsip akuntabilitas dan responsibilitas, dimana unit atau individu yang dibebani dengan akuntabilitas dan responsibilitas untuk mengelola risiko yang masuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya, haruslah diberi kebebasan dalam merumuskan cara menangani risiko tersebut.

3. Risiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses organisasi. Manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari kegiatan utama ataupun proses lain dalam Perusahaan. Manajemen risiko juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab manajemen dalam memastikan tercapainya sasaran Perusahaan.

Oleh sebab itu manajemen risiko haruslah diintegrasikan sepenuhnya ke dalam tata kelola Perusahaan agar dapat memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran Perusahaan. Dengan manajemen yang effektif, maka akan lebih memberikan jaminan terhadap pencapaian sasaran Perusahaan.

MAKSUD DAN TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI BIO FARMA

1. Meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan. dalam menerapkan manajemen risiko wajib untuk menemukenali para pemangku kepentingan dan harapannya. Melalui komunikasi timbal balik yang cukup intens maka dapat digalang kesamaan persepsi dan kepentingan bersama, dengan demikian dapat diperoleh hubungan yang lebih baik;
2. Meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan adanya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, dapat mengetahui bahwa perusahaan mampu untuk menangani risiko-risiko yang dihadapi dengan baik. Akibatnya kepercayaan pelanggan, pemasok, kreditor, komunitas bisnis serta masyarakat juga meningkat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi telah diidentifikasikan dengan baik. Kemudian gangguan kelancaran proses organisasi tersebut juga telah diantisipasi sebelumnya. Karenanya, bila gangguan tersebut memang terjadi, maka organisasi telah siap untuk menanganinya dengan baik;
4. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungan dengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani risiko perusahaan yang juga meningkat, termasuk risiko kepatuhan dan hukum.
5. Meningkatkan kesadaran terhadap adanya dampak dari aktivitas dan tindakan bisnis dan/atau dari faktor eksternal yang mengandung risiko
6. Menurunkan potensi kejadian yang dinilai membahayakan yang mungkin terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang
7. Meningkatkan *shareholder value*
8. Memberikan gambaran komprehensif kepada *stakeholder* maupun pengelola Perusahaan mengenai potensi peluang maupun kerugian sehingga pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja Perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien.
9. Bio Farma secara berkelanjutan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

HASIL *REVIEW* YANG DILAKUKAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PADA TAHUN 2018

Untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Bio Farma, maka setiap tahun dilakukan *review* dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko melalui pengukuran maturitas manajemen risiko.

TUJUAN PENGUKURAN ADALAH

1. Untuk mengetahui dan memetakan sejauh mana efektifitas penerapan manajemen risiko yang ada di lingkungan Bio Farma
2. Untuk mengatahui kualitas penerapan manajemen risiko yang ada di lingkungan Bio Farma sehingga dapat digunakan sebagai bahan oleh manajemen dalam menyusun strategi dan program- program pengembangan manajemen risiko Perseroan di masa mendatang.

Dalam melakukan review dan evaluasi penerapan manajemen risiko, digunakan **Model Pengukuran Maturitas** dengan **5 (lima) tingkatan** yaitu **awal, pemula, kompeten, mahir sampai dengan pemimpin** pada tingkatan teratas yang merepresentasikan tingkat kemampuan (kapabilitas) dan/atau Perseroan sebagai entitas untuk mengelola risiko dalam mencapai tujuan/ sasaran yang dicanangkan.

PT Bio Farma (Persero) belum melakukan pengukuran maturitas manajemen risiko di tahun 2018. Adapun rencana pengukuran akan dilakukan di tahun 2019.

Review dan Evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko dengan mengukur 8 (delapan) unsur *Key Risk Indicator* yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran yaitu mengukur tingkat kesadaran para pemangku kepentingan internal, baik terhadap risiko secara umum maupun penerapan manajemen risiko yang sedang dilangsungkan.
2. Reputasi yaitu mengukur pandangan serta penerimaan para pemangku kepentingan internal terhadap penerapan Manajemen Risiko.
3. Budaya yaitu mengukur sejauh mana budaya sadar risiko telah mengakar dan melatar belakangi pelaksanaan praktik Manajemen Risiko.
4. Keahlian yaitu mengukur tingkat kompetensi para pemangku kepentingan internal di bidang Manajemen Risiko guna menunjang penerapan manajemen risiko.
5. Kepercayaan yaitu mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan internal terhadap hasil dari penerapan Manajemen Risiko.
6. Sumber Daya yaitu mengukur sumber daya khususnya SDM perusahaan yang tersedia secara memadai guna menunjang penerapan manajemen risiko.
7. Penerapan yaitu mengukur seberapa jauh praktik Manajemen Risiko serta pemeliharaan basis data/ informasi manajemen risiko perusahaan telah didukung dengan proses otomatisasi berbasis teknologi informasi.
8. Proses yaitu mengukur seberapa jauh praktik Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan berbasis pada suatu metodologi yang dirujuk oleh praktik terbaik penerapan Manajemen Risiko.

Berdasarkan hasil pengukuran di atas maka Sistem Manajemen Risiko di Bio Farma berjalan dengan cukup efektif dan terus dikembangkan sesuai road map Manajemen Risiko Bio Farma. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Kesadaran pemilik risiko untuk melakukan swa asesmen risiko.
2. Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya melakukan kajian risiko dalam kegiatan operasional perusahaan.
3. Para pemangku kepentingan di bidang Manajemen Risiko dinilai cukup mampu melakukan kajian risiko secara efektif seperti penggunaan analisis risiko secara semi kuantitatif.
4. Sumber daya yang tersedia cukup memadai.

Terdapat 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) risiko kejadian.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, Bio Farma melakukan pengembangan terhadap sistem informasi manajemen risiko secara real time dan dapat diakses melalui berbagai media yaitu komputer, tablet, handphone. Pada tahun 2018 Bio Farma melakukan pengembangan terhadap sistem manajemen risiko berbasis Website. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengelola risiko di lingkungan Bio Farma dalam melakukan pemantauan dan pembaharuan data informasi terkait dengan risiko yang dimiliki oleh unit kerjanya secara real time dan terdokumentasi, kapanpun dan dimanapun.

Bio Farma, tanggal 13 Maret 2018 meluncurkan atau GO LIVE Aplikasi Enterprise Risk Management (AERP). Dengan adanya AERM diharapkan setiap unit kerja lebih memahami aspek risiko yang dimilikinya, AERM ini menjadi dasar dasar dan landasan yang kuat terhadap aspek risiko keuangan, bisnis maupun strategis termasuk aspek risiko kualitas, lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk aktivitas internal maupun eksternal Perusahaan. AERM ini cukup mudah digunakan, tiap unit kerja dalam melakukan register indicator risiko dan melakukan identifikasi risiko unit kerja yang kemuadian dilakukan pengesahan risiko oleh Divisi (CRM). Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pelaporan risiko dapat lebih cepat, efisien dan lebih mudah dalam melakukan monitoring dan mitigasi risiko dan dapat dilakukan percepatan untuk Bio Farma menjadi Perusahaan Lifescience.

dengan Bio Risk Management System dalam mendukung proses pengelolaan risiko. ARMS merupakan sistem informasi bagi Perusahaan untuk melakukan proses pengelolaan risiko yang dapat membantu komunikasi secara efektif pada semua Stakeholder risiko Perusahaan. Adanya alur informasi dan komunikasi ini berguna dalam proses identifikasi, penilaian dan respon risiko sehingga membantu dalam pencapaian visi dan misi Manajemen Risiko Perusahaan. Ruang lingkup ARMS mencakup 3 (tiga) hal pokok yaitu RCSA, KRI dan LEM.

ARMS digunakan di seluruh lingkungan Perusahaan meliputi Divisi dan Biro pada Kantor Pusat/Unit/Unit Bisnis dan Proyek sebagai perangkat untuk membantu pelaksanaan Manajemen Risiko.

Seluruh data yang masuk ke dalam sistem ARMS telah diverifikasi dan divalidasi secara bertingkat mulai dari *Risk Officer, Risk Owner* hingga pejabat berwenang. Persetujuan profil risiko melalui aplikasi ARMS memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan manual.
Informasi yang dihasilkan melalui ARMS akan digunakan oleh Divisi Internal Audit dalam membantu pelaksanaan proses audit berdasarkan risiko *(Risk Based Audit)*

EVALUASI KINERJA DIVISI KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko dengan mengukur 8 (delapan) unsur Key Risk Indicator yaitu sebagai berikut :

1. Kesadaran yaitu mengukur tingkat kesadaran para pemangku kepentingan internal, baik terhadap risiko secara umum maupun penerapan manajemen risiko yang sedang dilangsungkan.
2. Reputasi yaitu mengukur pandangan serta penerimaan para pemangku kepentingan internal terhadap penerapan Manajemen Risiko.
3. Budaya yaitu mengukur sejauh mana budaya sadar risiko telah mengakar dan melatar belakangi pelaksanaan praktik Manajemen Risiko.
4. Keahlian yaitu mengukur tingkat kompetensi para pemangku kepentingan internal di bidang Manajemen Risiko guna menunjang penerapan manajemen risiko.
5. Kepercayaan yaitu mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan internal terhadap hasil dari penerapan Manajemen Risiko.
6. Sumber Daya yaitu mengukur sumber daya khususnya SDM perusahaan yang tersedia secara memadai guna menunjang penerapan manajemen risiko.
7. Penerapan yaitu mengukur seberapa jauh praktik Manajemen Risiko serta pemeliharaan basis data/ informasi manajemen risiko perusahaan telah didukung dengan proses otomatisasi berbasis teknologi informasi.
8. Proses yaitu mengukur seberapa jauh praktik Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan berbasis pada suatu metodologi yang dirujuk oleh praktik terbaik penerapan Manajemen Risiko.

Berdasarkan hasil pengukuran di atas maka Sistem Manajemen Risiko di Bio Farma berjalan dengan cukup efektif dan terus dikembangkan sesuai road map. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

1. Kesadaran pemilik risiko untuk melakukan swa asesmen risiko.
2. Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya melakukan kajian risiko dalam kegiatan operasional perusahaan.
3. Para pemangku kepentingan di bidang Manajemen Risiko dinilai cukup mampu melakukan kajian risiko secara efektif seperti penggunaan analisis risiko secara semi kuantitatif.
4. Sumber daya yang tersedia cukup memadai.

Terdapat 1.126 (seribu seratus dua puluh enam) risiko kejadian yang telah teridentifikasi dari 80 (delapan puluh) unit kerja (Bagian) dan 12 (dua belas) proyek yang terbagi dalam 27 (dua puluh tujuh) aktivitas (Divisi), kemudian dievaluasi dan diukur berdasarkan nilai kemungkinan dan dampak, sehingga diperoleh prioritas risiko yang harus dikendalikan.

RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Pada tahun 2018, terdapat 10 (sepuluh) risiko korporat, yang terbagi atas 8 (delapan) risiko dari aktivitas rutin dan 2 (dua) risiko proyek, sbb

Risiko Aktivitas Rutin

1. Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional & Internasional
2. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka panjang (kredit investasi)
3. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo (likuiditas)
4. Keluar/pindahnya karyawan yang memiliki talenta dan potensi tinggi
5. Kinerja karyawan tidak mencapai target KPI
6. Pemalsuan produk
7. Munculnya berita negatif mengenai perusahaan di media massa mainstream
8. Tidak terserapnya persediaan produk

Risiko Proyek

1. Implementasi MRP tidak sesuai target
2. Keterlambatan pelaksanaan proyek

Dimana tiga risiko tertinggi adalah meningkatnya persaingan global, keterlambatan suplai vaksin dan perubahan kebijakan/regulasi nasional dan internasional.

Setelah menentukan risiko-risiko yang terkait dengan korporat dan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam menangani risiko-risiko tersebut, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko selaku penanggung jawab risiko korporat akan melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan penanganan risiko yang dilaksanakan setiap unit. Masing-masing Kepala Bagian unit risiko menjadi penanggung jawab setiap risiko dan kegiatan penanganannya yang secara keseluruhan menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bio Farma.

RINCIAN RISIKO KORPORAT BIO FARMA

Melalui proses RCSA (Risk & Control Self Assessment), Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko memperoleh peta seluruh risiko Perusahaan. Selanjutnya Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko menentukan risiko-risiko yang berpengaruh signifikan terhadap arah Perusahaan yang terangkum dalam Risk That Matter (RTM).

Pada tahun 2018, terdapat 10 (sepuluh) risiko korporat, yang terbagi atas 8 (delapan) risiko dari aktivitas rutin dan 2 (dua) risiko proyek. Setelah menentukan risiko-risiko yang terkait dengan korporat dan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam menangani risiko-risiko tersebut, Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko selaku penanggung jawab risiko korporat akan melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan penanganan risiko yang dilaksanakan setiap unit. Masing-masing Kepala Bagian unit risiko menjadi penanggung jawab setiap risiko dan kegiatan penanganannya yang secara keseluruhan menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bio Farma. Adapun rincian risiko korporat tersebut adalah:

No	Jenis Risiko	Risiko Yang Dihadapi	
1	Risiko Aktivitas Rutin	1. Perubahan Kebijakan/ Regulasi Nasional & Internasional	Pengakuan kualitas produk oleh Badan WHO (*World Health Organization*) memegang peranan penting dalam kelancaran penjualan produk ekspor Bio Farma. Berdasarkan hal itu, Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan perubahan kebijakan dan persyaratan nasional maupun internasional, terutama regulasi dari Badan WHO agar dapat terhindar dari delisting WHO, serta perubahan-perubahan regulasi yang mungkin terjadi di Pemerintah.
		2. Ketidakmampuan Memenuhi Kewajiban Jangka Panjang (Kredit Investasi)	Dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi di tahun 2018, Perusahaan merencanakan untuk menarik dana (kredit investasi) dari bank sindikasi. Kemampuan Perusahaan dalam membayar pokok dan bunga pinjaman dapat dilihat dari tingkat produk yang berhasil dijual (performance cash flow) sesuai proyeksi yang terdapat dalam RJPP. Jika produk yang dijual mengalami penurunan dari yang diproyeksikan, otomatis akan menurunkan pendapatan dan laba yang dihasilkan sehingga dapat mengakibatkan Perusahaan menunggak pembayaran baik pokok ataupun bunga pinjaman tersebut. Jika hal ini terjadi, selain denda yang akan diberikan oleh pihak bank sindikasi dikarenakan terlambatnya pembayaran pinjaman, Perusahaan pun berisiko akan kehilangan aset yang diagunkan.
		3. Ketidakmampuan Perusahaan untuk Memenuhi Kewajiban pada saat Jatuh Tempo (Likuiditas)	Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, Perusahaan memerlukan pendanaan, diantaranya untuk pengadaan barang investasi berupa gedung, fasilitas dan peralatan. Fungsi perencanaan Perusahaan terkait kebutuhan investasi lebih ditingkatkan, termasuk pada saat penyusunan timeline realisasi investasi dan metode pembiayaannya. Potensi risiko perlu diidentifikasi terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membiayai kebutuhan investasi yang tingkat pengembaliannya jangka panjang dan kemampuan dalam memenuhi modal kerja yang sifatnya jangka pendek. Risiko ini muncul dari kondisi tersebut antara lain penggunaan modal kerja Perusahaan untuk membiayai kebutuhan investasi, yang seharusnya menggunakan pembiayaan eksternal.
		4. Keluar/Pindahnya Karyawan yang Memiliki Talenta dan Potensi Tinggi	Karyawan merupakan aset yang paling berharga dalam menjalankan bisnis Perusahaan. Setiap perusahaan senantiasa membutuhkan dan mempekerjakan karyawan yang berkualitas, terutama Karyawan yang memiliki talenta dan potensi tinggi. Banyak faktor dan penyebab karyawan yang berkualitas meninggalkan perusahaan. Namun apabila karyawan tersebut meninggalkan perusahaan dengan segala kompetensi dan pengetahuan yang dimilikinya, maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kinerja bisnis Perusahaan.
		5. Kinerja Karyawan Tidak Mencapai Target KPI	Target *Key Performance Indicators* (KPI) yang sesuai dengan bisnis perusahaan dan telah disepakati dalam RKAP antara Pemegang Saham dan Manajemen, kemudian dijabarkan ke dalam KPI Direktorat, Divisi dan Bagian. Jika realisasi kinerja karyawan dan unit kerja tidak dapat tercapai sesuai dengan target bisnis yang telah ditetapkan dari target KPI dalam RKAP, akan menyebabkan risiko berkurangnya pendapatan secara finansial (bonus, tantiem, penggajian) terhadap seluruh *stakeholder*.

No	Jenis Risiko	Risiko Yang Dihadapi	
		6. Pemalsuan Produk Bio Farma	Pada tahun 2016, terdapat temuan peredaran vaksin palsu di Indonesia. Walaupun hasil investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak ada vaksin Bio Farma yang dipalsukan, dan hanya serum yang dipalsukan, namun demikian perusahaan melihat masih terdapat potensi risiko pemalsuan terhadap vaksin. Kasus pemalsuan ini kemungkinan dapat terjadi lagi di masa mendatang dan hal ini dapat menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan konsumen akan produk Bio Farma baik vaksin maupun serum yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan.
		7. Munculnya Berita Negatif Mengenai Perusahaan di Media Massa *Mainstream*	Sejalan dengan perubahan, saat ini media tidak hanya membuat berita juga secara bisnis harus menguntungkan dan media tidak lagi sebagai institusi ideologis tetapi juga institusi bisnis. Media juga memiliki prinsip apakah sebuah berita laik siar dan laik jual serta menilai apakah sebuah berita memiliki news values & selling values. Dengan adanya perubahan tersebut, Perusahaan perlu strategi khusus dan lebih kehati-hatian terhadap tren media, akrena bisa saja berita negatif mengenai Perusahaan dapat muncul, baik media massa mainstream maupun di media online.
		8. Tidak Terserapnya Persediaan Produk	Perusahaan secara rutin telah memasok vaksin untuk kebutuhan program imunisasi baik dalam negeri maupun luar negeri melalui institusi internasional dan secara bilateral. Ketersediaan vaksin disesuaikan dengan forecast atau rencana pengiriman produk dari konsumen. Terdapat risiko apabila produk telah diproduksi dan siap dipasarkan, namun produk tidak terserap oleh pasar.
2	Risiko Aktivitas Proyek	9. Implementasi MRP Tidak Sesuai Target	Ketersediaan barang hasil produksi dan ketepatan jumlah persediaan menjadi salah satu faktor kunci memenangkan persaingan di pasar. Ketersediaan jumlah hasil produksi sangata dipengaruhi oleh jumlah bahan baku/penolong yang harus selalu tersedia sesuai kebutuhan, tidak mengalami *stock out* atau *over stock*. Untuk tujuan ini, maka Perusahaan telah membuat modul *Material Resources Planning* (MRP) yang meliputi area produksi. Dalam rangka implementasi modul *Material Resources Planning* (MRP) tersebut, terdapat potensi risiko implementasi MRP tidak sesuai target atau tidak sesuai jadwal sehingga akan menghambat kinerja Perusahaan.
		10. Keterlambatan Pelaksanaan Proyek	Perusahaan harus dapat menjaga ketersediaan produk yangs esuai dengan kebutuhan pasar, baik melalui perbaikan dan investasi sarana dan prasarana produksi baru, maupun melalui riset dan pengembangan produk baru. Diperlukan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses produksi yang memenuhi persyaratan atau regulasi yang berlaku serta fasilitas yang memadai untuk mendukung proses produksi yang memenuhi persyaratan atau regulasi yang berlaku serta fasilitas riset & pengembangan yang memadai agar riset dan pengembangan produk baru dapat diselesaikan tepat waktu sehingga produk tersebut dapat masuk ke pasar sesuai dengan kebutuhan. Adanya keterlambatan dalam program investasi baik yang mendukung proses riset maupun produksi akan menyebabkan hilangnya kesempatan meraih pasar, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program investasi harus tepat waktu dan sasaran.

PENGELOLAAN RISIKO

Bio Farma berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dalam melaksanakan aktvitasnya dan terus melanjutkan upaya untuk senantiasa melaksanakan budaya kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan, yang meliputi tindakan:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan pemerintah dan etika usaha.

Pengelolaan risiko di Bio Farma meliputi kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, mekanisme komunikasi, pelaporan pelaksanaan manajemen risiko baik internal maupun eksternal dan kesamaan bahasa.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan manajemen risiko digunakan untuk memastikan bahwa semua level manajemen Perusahaan selalu mempertimbangkan aspek pengelolaan risiko dalam menjalankan proses pengambilan keputusan. Kebijakan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan budaya sadar risiko dengan menetapkan tahapan-tahapan proses standar pengelolaan risiko yang berlaku di Bio Farma.

Sejak tahun 2009 Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan di Bio Farma mengacu kepada COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Seiring dengan perancangan Sistem Manajemen

Terpadu Bio Farma, Sistem Manajemen Risiko Bio Farma mengalami perubahan dengan bridging COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework ke ISO 31000 (2018).

Kebijakan Manajemen Risiko Bio Farma saat ini sudah mengadopsi standar ISO 31000 yang terdiri dari Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko, dan Prinsip Manajemen Risiko yang memiliki tujuan utama:

- Tersedianya panduan dasar bagi Perusahaan dalam pengelolaan risiko Perusahaan
- Terkoordinasinya proses dan kegiatan manajemen risiko yang terintegrasi dan tersinkronisasi di lingkungan Perusahaan

Dalam pengelolaan manajemen risiko, Bio Farma telah membentuk divisi yang membawahi fungsi Kepatuhan di bawah Direktur Keuangan yaitu Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan serta memastikan pelaksanaan kepatuhan di lingkungan Bio Farma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSEP PENGELOLAAN RISIKO

Konsep pengelolaan risiko Bio Farma berpedoman pada Kebijakan Sistem Manajemen Perusahaan PT Bio Farma (Persero) Nomor: MBF-02571/DIR/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018., Pedoman Manajemen Risiko SM-S.20 serta Prosedur-prosedur Baku/SOP: 235K-SIS-ERM, Enterprise Risk Management; 235K-SIS-ORM, Operational Risk Management; dan 235K-SIS-KBS, Keuangan, Bisnis dan Strategis.

AKUNTABILITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Akuntabilitas tertinggi untuk penerapan manajemen risiko di Bio Farma adalah Direktur Keuangan.

Di Bio Farma yang ditugaskan untuk mendorong pelaksanaan penerapan manajemen risiko dan sebagai fasilitator untuk penerapan manajemen risiko adalah Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, Bagian GCG & ERM. Kepala Divisi merupakan pemangku risiko pada divisi masing-masing dan sekaligus menjadi Penanggung Jawab dalam melakukan pengelolaan risiko pada divisinya.

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO BIO FARMA

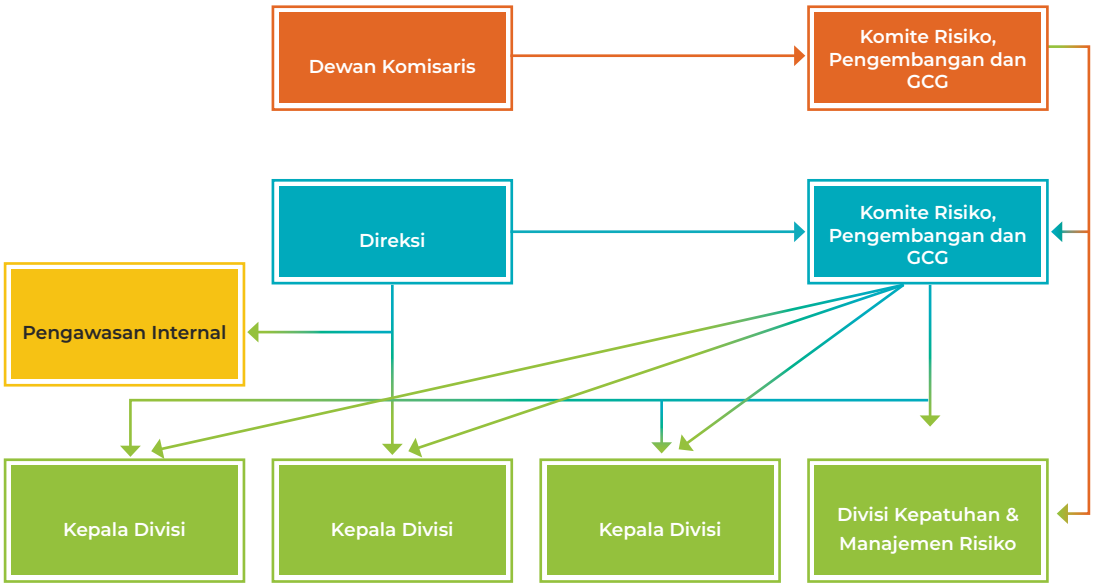

SOSIALISASI MANAJEMEN RISIKO

Untuk menimbulkan budaya sadar risiko dilakukan dengan sosialisasi Manajemen Risiko di lingkungan Bio Farma dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memperoleh sertifikasi manajemen risiko, upaya yang dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan, workshop, seminar dan lokakarya baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

KOMPONEN PENGELOLAAN RISIKO

Sistem manajemen risiko terdiri dari 3 komponen yang saling berkaitan yaitu:

1. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko.
   Prinsip-prinsip manajemen risiko merupakan pondasi (aturan dasar) bagi pengembangan kerangka kerja pengelolaan risiko yang merupakan pilar-pilar bagi penerapan proses manajemen risiko.
2. Kerangka kerja dalam mengelola risiko
3. Proses pengelolaan risiko.
   Proses manajemen risiko adalah penjabaran dari kerangka kerja pengelolaan risiko dalam rangka mempermudah penerapan prinsip-prinsip pengelolaan risiko, baik di tingkat korporat, di tingkat unit kerja, maupun individu.

PRINISIP-PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Merujuk pada Standar Manajemen Risiko yaitu ISO 31000:2018 –Risk Management – Principles and guidelines, manajemen risiko Bio Farma menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut

1. **Manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah**
   Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan pencapaian sasaran Perusahaan secara nyata, memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, corporate governance, efisiensi operasi, dan lain-lain.
2. **Manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses bisnis**
   Manajemen risiko merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses bisnis, proyek, dan manajemen perubahan. Manajemen risiko bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan serta proses bisnis dalam mencapai sasaran.
3. **Manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan**
   a. Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan informasi yang selengkap mungkin
   b. Membantu menentukan prioritas tindakan dan membedakan berbagai alternatif tindakan
   c. Membantu menunjukkan semua risiko yang ada, mana risiko yang dapat diterima dan mana risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut
   d. Memantau apakah perlakuan risiko yang telah diambil memadai dan cukup efektif atau tidak. Informasi ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan.
4. **Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian**
   Manajemen risiko secara khusus menangani aspek sifat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan cara menanganinya.
5. **Manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu**
   Memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi manajemen risiko sehingga hasilnya dapat dibandingkan dan memberikan hasil serta perbaikan.
6. **Manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia**
   Seperti pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data lain yang tersedia. Semua informasi ini mempunyai keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam membuat model risiko maupun perbedaan pendapat yang mungkin terjadi di antara para ahli.

7. **Manajemen risiko adalah khas untuk penggunanya (tailored)**
   Penyelarasan konteks internal dan eksternal Perusahaan, serta sasaran Perusahaan, profil risiko yang dihadapi Perusahaan dan kebutuhan dari para pemangku risiko dalam Perusahaan.
8. **Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya**
   Menemukan kapabilitas organisasi, persepsi dan tujuan masing-masing individu di dalam serta di luar Perusahaan, khususnya yang menunjang atau menghambat pencapaian sasaran Perusahaan.
9. **Manajemen risiko harus transparan dan inklusif**
   Untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan terkini, para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di setiap tingkatan Perusahaan harus dilibatkan secara efektif.
10. **Manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan**
    Ketika terjadi peristiwa baru, baik di dalam maupun di luar Perusahaan, konteks manajemen risiko dan pemahaman harus mengalami perubahan sehingga diperlukannya monitoring dan review.
11. **Manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut**
    Manajemen Perusahaan harus senantiasa mengembangkan dan menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan kematangan dan kecanggihan pelaksanaan manajemen risiko, sejalan dengan aspek lain dari Perusahaan.

KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO BIO FARMA

Agar dapat berhasil dengan baik, manajemen risiko harus diletakkan dalam suatu kerangka kerja manajemen risiko yang akan menjadi dasar dan penataan yang mencakup seluruh kegiatan manajemen risiko di segala tingkatan Perusahaan. Kerangka kerja membantu Perusahaan mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko dalam berbagai tingkatan Perusahaan dan dalam konteks spesifik Perusahaan. Kerangka kerja dapat memastikan bahwa informasi risiko yang lengkap dan memadai yang diperoleh dari proses manajemen risiko akan dilaporkan serta digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan sesuai dengan kejelasan akuntabilitas pada setiap tingkatan Perusahaan

Merujuk pada Standar Manajemen Risiko yaitu ISO 31000:2011 – Risk Management – Principles and guidelines, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Bio Farma sbb:

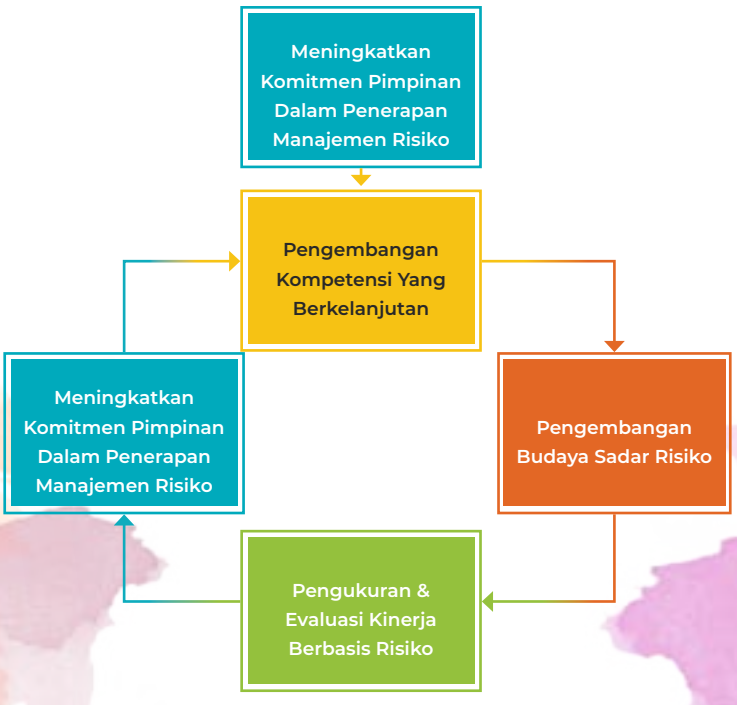

Kerangka kerja manajemen risiko sebagai induk dari proses manajemen risiko yang lebih bersifat teknis. Kerangka kerja ini membantu Perusahaan dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sistem manajemen Perusahaan keseluruhan khususnya melalui sikolus manajemen sederhana PDCA (Plan-Do-Check-Action), menunjukkan gambaran mengenai bagaimana seharusnya tata kelola risiko (risk governance) harus dilaksanakan, dan dimana dalam tata kelola risiko ini.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko merupakan penerapan secara sistematik kebijakan manajemen, prosedur dan praktik manajemen dalam pelaksanaan tugas untuk melakukan komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks, melakukan asesmen risiko.

Proses manajemen risiko Bio Farma meliputi identifikasi, analisa, dan evaluasi risiko, perlakuan risiko, dan pemantauan dan pengkajian risiko.

Proses manajemen risiko merupakan penerapan kerangka kerja manajemen risiko pada tiap tiap jenis risiko yang secara spesifik mempunyai karakter yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya.

PENERAPAN PROSES MANAJEMEN RISIKO BIO FARMA

PROSES MANAJEMEN RISIKO BIO FARMA MELIPUTI 5 (LIMA) TAHAPAN KEGIATAN

1. **Komunikasi dan Konsultasi**
   Proses interaktif tukar menukar informasi dan pendapat mengenai risiko *(risk)* dan pengelolaannya, serta komunikasi antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan *(stakeholder)* mengenai isu tertentu yang terkait dengan pengambilan keputusan atau penentuan langkah tertentu dalam menangani risiko *(risk)*.
2. **Menentukan Konteks**
   Dilakukan dengan menetapkan parameter-parameter yang relevan dengan Perseroan, baik internal maupun eksternal yang digunakan dalam pengelolaan risiko *(risk)*, terutama dalam rangka menetapkan ruang lingkup dan kriteria risiko *(risk criteria)*.
3. **Penilaian Risiko *(Risk Assessment)***
   a. Identifikasi Risiko *(Risk Identification)* dilakukan secara teliti sehingga semua risiko *(risk*) yang relevan termasuk risiko-risiko *(risk)* yang berada di luar kendali Perusahaan, dapat dipastikan telah teridentifikasi.
   b. Analisis Risiko *(Risk Analysis)* meliputi penentuan besaran kemungkinan terjadinya risiko *(risk)*, besaran dampak kerugian, dengan memperhatikan sumber dan penyebab risiko (*risk agent/ risk source)* serta pengendalian risiko *(risk)* yang sudah ada saat ini dan efektivitasnya.
   c. Evaluasi Risiko *(Risk Evaluation)* dilakukan untuk menetapkan risiko *(risk)* yang memerlukan penanganan risiko *(risk treatment)* berdasarkan skala prioritas.
4. **Penanganan Risiko *(Risk Treatment)*** dilakukan untuk menyeleksi satu atau lebih alternatif metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengurangi eksposur *(exposure)*. Pemilihan alternatif penanganan risiko *(risk treatment)* harus didasarkan atas analisis biaya penanganan risiko *(risk treatment cost/cost of risk*) dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh pada berbagai aspek terkait.

   Alternatif atau pilihan penanganan risiko *(risk treatment)* adalah:
   a. Menghindari risiko *(risk avoiding)* dengan tidak melakukan aktivitas korporasi tertentu
   b. Mitigasi risiko *(risk mitigation)*, misalnya dengan peningkatan keselamatan kerja, pemeliharaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemutakhiran sistem, dan prosedur
   c. Pembagian risiko *(risk transfer/risk sharing)* dengan pihak lain, misalnya asuransi, *hedging*, kerja sama dengan bentuk *joint venture/ partnership*. Pembagian risiko *(risk transfer/* risk sharing) ini dapat dilakukan untuk eksposur *(exposure)* yang melampaui toleransi risiko *(risk tolerance)* Perusahaan
   d. Menerima risiko *(risk acceptance)* dengan melaksanakan aktivitas korporasi tertentu dengan tanpa usaha untuk mengurangi, membagi ataupun memindahkan risiko *(risk transfer)*
   e. Kombinasi antara beberapa alternatif sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas.

5. **Pemantauan *(Monitoring)* dan Kaji Ulang *(Review)***
   Pelaksanaan pemantauan meliputi monitoring secara berkelanjutan oleh para pemilik risiko *(risk owner)*. Pengawasan pemantauan dilakukan oleh pimpinan pemilik risiko yang dilaksanakan secara berkala dan pihak ketiga melalui audit internal maupun eksternal yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan, kaji ulang merupakan peninjauan secara berkala terhadap efektivitas sistem manajemen risiko yang diberlakukan dan efektivitas pelaksanaan penanganan risiko untuk disempurnakan secara berkesinambungan.

TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO

1. Meningkatkan kesadaran bahwa semua upaya pencapaian sasaran dan target-target perusahaan mengandung risiko sehingga setiap individu/unit kerja harus dapat mengelola risiko sesuai kedudukan dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai bagian dari pengelolaan risiko korporat terintegrasi.
2. Meningkatkan kepastian pencapaian sasaran dan target perusahaan dengan cara:
   a. Menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang dapat menghambat kelancaran proses bisnis.

b. Meminimalkan potensi kerugian sebagai dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut.

UPAYA UNTUK MENGELOLA RISIKO

Upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko Bio Farma melalui:

1. Melaksanakan asesmen risiko terhadap setiap sasaran proses bisnis sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dan membuat rencana mitigasi atau pengendalian risiko yang dituangkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO).
2. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang ada sudah dikelola dengan baik, antara lain dengan melakukan evaluasi secara rutin oleh Divisi Kepatuhan Dan Manajemen Risiko dan melakukan pendekatan audit berbasis risiko oleh Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI).

Tugas & tanggung jawab dari Kepala Kepatuhan Dan Manajemen Risiko untuk mengelola risiko kepatuhan serta memastikan pelaksanaan kepatuhan di lingkungan Bio Farma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Pengelolaan risiko kepatuhan difokuskan pada upaya peningkatan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha dan pada setiap jenjang organisasi.

Selama tahun 2018, Divisi Kepatuhan Dan Manajemen Risiko telah melakukan aktivitas sebagai berikut:

1. Melanjutkan sosialisasi mengenai pentingnya fungsi dan peranan kepatuhan dalam aktivitas Perusahaan guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
2. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka kepatuhan untuk memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku agar dapat meminimalkan risiko kepatuhan Perusahaan.
4. Melakukan tindakan pencegahan, bilamana diperlukan, agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak lain.
6. Membuat ringkasan peraturan, menganalisa dampaknya bagi Perusahaan, dan menginformasikan setiap perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada seluruh jajaran Direksi dan Kepala Divisi/Fungsi yang berkepentingan sehingga memudahkan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
7. Melaksanakan asesmen risiko terhadap setiap sasaran proses bisnis sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dan membuat rencana mitigasi atau pengendalian risiko yang dituangkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO).
8. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang ada sudah dikelola dengan baik, antara lain dengan melakukan evaluasi secara rutin oleh Urusan Manajemen Risiko Kantor Direksi dan melakukan pendekatan audit berbasis risiko oleh Bagian SPI

PENGELOLAAN ERM BIO FARMA

ERM BIO FARMA TERBAGI ATAS 2 (DUA) YAITU:

1. ERM Unit Risiko dan
2. ERM Korporat.

ERM UNIT RISIKO

ERM Unit Risiko disusun oleh seluruh Unit Risiko sesuai dengan Prosedur Baku/SOP 235K-SIS-ERM, yaitu setiap Unit Risiko membuat Laporan ERM Unit Risiko tahunan, dengan format laporan sebagai berikut:

1. Bab Pendahuluan, berisi tentang maksud dan tujuan dilakukannya ERM di setiap Unit Risiko, antara lain untuk menggali dan memahami semua risiko yang ada di dalam perusahaan secara menyeluruh sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan.

2. Bab Ruang Lingkup, berisi penjabaran proses bisnis perusahaan.
3. Tabel Risiko *(Risk Register)*, menjelaskan langkah-langkah identifikasi dan pengukuran risiko untuk menentukan kejadian atau risiko yang mungkin timbul/terjadi, kemudian dihitung nilai probabilitas dengan metode *Poisson*, Binomial, *Z-Score,* Aproksimasi dan impact dengan metode Value at Risk (VaR), ditentukan Status Risikonya, dibuatkan Peta Risikonya apakah terdapat pada Kuadran I *(Minor/ Prevention)* Kuadran II *(Major/Catastropic/Avoidance),* Kuadran III *(Insignificant/Acceptance)* atau Kuadran IV *(Moderate/Mitigation)*.
4. Bab Pembahasan, berisi informasi mengenai:
   - Jumlah risiko yang berhasil diidentifikasi dan dinyatakan masuk sebagai risiko Unit Risiko.
   - Status Risiko yang diurutkan dari nilai terbesar hingga terkecil sebagai dasar prioritas penanganan risiko.
   - Risiko-risiko yang masuk kategori Acceptance, Prevention, Mitigation ataupun Avoidance.
5. Kesimpulan, yang menyimpulkan risiko-risiko yang akan atau masuk menjadi risiko korporat dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menanganinya.
6. Laporan Tindak Lanjut Penanganan Risiko, berupa tabel yang menjelaskan bagaimana cara penanganan atau tindakan mitigasi atas risiko yang mungkin muncul, berisi:
   - Jenis kegiatan penanganan risiko.
   - Perkiraan biaya penanganan risiko.
   - Waktu pelaksanaan penanganan risiko.
   - Penanggung Jawab (PIC).

ERM KORPORAT

Sedangkan ERM Korporat disusun oleh Divisi Kepatuhan Dan Manajemen Risiko dengan melakukan analisa dan rekomendasi atas Laporan ERM Unit Risiko dari seluruh bagian yang selanjutnya diajukan kepada manajemen (Direksi) untuk ditetapkan jumlah/besaran Profil Risiko Korporat.

TINDAK LANJUT PENANGANAN RISIKO KORPORAT

Setelah menentukan risiko-risiko yang terkait dengan korporat dan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam menangani risiko-risiko tersebut, Divisi Kepatuhan Dan Manajemen Risiko selaku penanggung jawab risiko korporat akan melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan penanganan risiko yang dilaksanakan setiap unit di mana masing-masing Kepala Bagian unit risiko atau Ketua Tim proyek menjadi penanggung jawab setiap risiko dan kegiatan penanganannya yang secara keseluruhan menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko di Bio Farma.

KEGIATAN PENANGANAN RISIKO DARI SETIAP RISIKO KORPORAT BIO FARMA YANG AKAN DILAKUKAN PADA TAHUN 2018

No.	Kejadian	Kegiatan Penanganan Risiko	Pemilik Risiko
1.	Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional & Internasional	α. Implementasi sistem manajemen kualitas (Quality Management System/QMS) secara konsisten dan berkesinambungan sesuai ketentuan WHO sehingga Perusahaan tetap dapat mempertahankan status prakualifikasinya; β. Terus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh karyawan dan manajemen mengenai penerapan dan sustainability QMS; χ. Menjaga komunikasi internal di Perusahaan dan eksternal Perusahaan dengan WHO maupun BPOM dan instansi lainnya; δ. Berperan aktif dalam kegiatan nasional dan internasional baik WHO maupun organisasi lain terutama yang ebrkaitan dengan regulasi vaksin seperti BPOM sehingga tetap mengikuti perkembangan; ε. Bekerjasama dengan konsumen bulk untuk menjaga QMS agar menghindari delisting WHO; φ. Mencari konsumen bulk lain untuk mengurangi ketergantungan penjualan bulk hanya ke beberapa konsumen; γ. Pemastian pengembangan produk sesuai tuntutan regulasi diantaranya design pengembangan produk, pelaksanaan kualifikasi & validasi; η. Mempercepat dan meningkatkan penjualan produk baru untuk mengantisipasi turunnya penjualan vaksin polio oral; ι. Meningkatkan kapasitas produksi bulk vaksin yang telah memenuhi prakualifikasi WHO dan masih dibutuhkan pasar seperti Measles dan Hib; φ. Kerjasama teknologi untuk formulasi vaksin IPV (Inactivated Polio Vaccine) selama Bio Farma belum memproduksi sendiri; κ. Mempercepat kesiapan produksi vaksin IPV sendiri; λ. Strategi untuk UU Jaminan Produk Halal dengan membentuk Tim Persiapan Produk Halal, untuk persiapan dan mengkoordinasikan di internal dan eksternal Perusahaan; μ. Koordinasi dengan Kementerian terkait, untuk peran serta dalam penyusunan petunjuk teknis (PP) agar kriteria halal untuk obat dibedakan dengan untuk makanan; ν. Mempersiapkan untuk proses sertifikasi halal bagi produk existing yang potensial diajukan sertifikasinya, baik sertifikasi halal oleh badan sertifikasi nasional maupun internasional; ο. Mempersiapkan pembentukan sistem jaminan halal di perusahaan; π. Mengutamakan penggunaan bahan-bahan non animal dalam riset vaksin baru	• Penjamin Mutu Pelayanan • Penjualan Ekspor Institusi • Peneliti
2.	Ketidakmampuan Memenuhi Kewajiban Jangka Panjang (Kredit Investasi)	α. Fungsi perencanaan Perusahaan terkait kebutuhan investasi lebih ditingkatkan, termasuk pada saat penyusunan timeline realisasi investasi dan metode pembiayaannya; β. Komunikasi dan koordinasi secara rutin dan efektif antar lini di internal Perusahaan, agar timeline proyek investasi dan realisasi dapat berjalan sesuai rencana; χ. Meningkatkan koordinasi dan fungsi monitoring yang efektif antar lini di internal Perusahaan, agar data perencanaan pembelian dan pendanaan serta realisasi penerimaan pendapatan dapat akurat, sehingga dana untuk bunga dan pokok pinjaman dapat tersedia tepat waktu.	• Treasury & Pajak
3.	Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo (likuiditas)	α. Melakukan monitoring atas pelaksanaan tahapan timeline realisasi investasi, agar dapat memperhitungkan pemenuhan kebutuhan pembiayaannya; β. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dan efektif, baik antar lini di internal Perusahaan maupun dengan pihak eksternal, agar proses pembiayaan kebutuhan investasi dapat tersedia dengan baik dan tepat waktu.	• Treasury & Pajak
4.	Keluar/Pindahnya karyawan yang Memiliki Talenta dan Potensi Tinggi dari Perusahaan	α. Sosialisasi dan implementasi integrasi sistem Human Capital Management yang berbasis pada kompetensi dan kinerja dengan menggunakan teknologi informasi; β. Sosialisasi dan implementasi program retention yang komprehensif untuk “mengikat” karyawan tersebut di perusahaan; χ. Program pengembangan yang dapat memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan dirinya.	• SDM/ Manajemen Kinerja & Kebijakan

No.	Kejadian	Kegiatan Penanganan Risiko	Pemilik Risiko
5.	Kinerja karyawan tidak mencapai target KPI	α. Melakukan sosialisasi dan implementasi sistem *Performance Management System*; β. Melakukan monitoring dan pendampingan yang intensif untuk setiap siklus *Performance Management Systems* mulai dari *planning*, monitoring dan *evaluating* dengan menggunakan IT χ. Memastikan ketersediaan rencana strategis dan bisnis perusahaan yang dapat dikomunikasikan ke seluruh unit kerja	• SDM/ Manajemen Kinerja & Kebijakan
6.	Pemalsuan produk Bio Farma	α. Meningkatkan sosialisasi (press conference/siang klinik/ RTD) mengenai produk yang dipasarkan oleh Bio Farma, dengan sasaran para tenaga kesehatan di daerah; β. Koordinasi intensif dengan internal Bio Farma (PPMP, Produksi, QC, dan Penjamin Mutu & Regulasi) untuk menjamin kontinuitas ketersediaan produk; χ. Penambahan penandaan spesifik untuk membedakan kemasan produk asli/palsu	• Pemasaran & Penjualan Domestik
7.	Munculnya berita negatif mengenai perusahaan di media massa *mainstream*	α. Strategi preventing yaitu mencegah sebelum terjadi krisis, munculnya berita negatif di media, mengantisipasi isu-isu yang saat ini belum ada, tetapi kemungkinan muncul di kemudian hari, misalnya dengan cara: 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara rutin kepada media dengan format workshop vaksin untuk jurnalis, dan 2. Melakukan media relations yang positif dengan pihak media dari berbagai level dimulai dengan pemilik media/penerbit, personil editorial (pemimpin redaksi, redaktur, wartawan), personil komersial (Tim Adverse Event/AE, Marketing) β. Strategi protecting yaitu menjaga, memagari, melindungi perusahaan dari berbagai isu negatif, dengan: 1. Melakukan strategi penanganan di masa normal dalam bentuk press conference, media gathering, press tour, event, ralat atau hak koreksi, school of vaccine for journalist (workshop media), 2. Melakukan strategi penanganan di masa krisis melalui pernyataan pers cepat kepada media, respons cepat tanggap, narasumber yang kompeten, PIC mudah dihubungi. χ. Strategi promoting yaitu mempromosikan keunggulan dan hal positif tentang perusahaan dengan cara: 1. Melakukan media placement, iklan, advertorial, infotorial, TV commercial; 2. Mendukung dalam bentuk sponsorship event yang dilakukan oleh media dalam bentuk sharing/promosi Perusahaan. δ. Memberikan edukasi kepada publik mengenai dampak virus MR apabila tidak divaksinasi ε. Memenuhi permintaan informasi oleh publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik ϕ. Sigap dalam memberikan respon terhadap berita-berita negatif yang tersebar di media massa.	• Komunikasi Perusahaan

No.	Kejadian	Kegiatan Penanganan Risiko	Pemilik Risiko
8.	Tidak terserapnya persediaan produk	α. Melakukan komunikasi maupun pertemuan langsung (face to face meeting) dengan konsumen untuk memperoleh informasi terkini atas kebijakan registrasi produk dan kebijakan program imunisasi di negara tujuan ekspor; β. Mencari konsumen bulk lain untuk mengurangi ketergantungan penjualan bulk hanya ke beberapa konsumen; χ. Koordinasi internal terkait, dilakukan peninjauan ulang terhadap harga jual pabrik (HJP) ekspor untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif, sehingga dapat memasuki pasar UN Agency; δ. Melakukan penawaran kepada UN Agency lainnya (selain UNICEF), yaitu PAHO dan WHO; ε. Berperan aktif dalam kegiatan internasional baik WHO maupun organisasi lain terutama yang berkaitan dengan vaksin agar dapat memperoleh informasi terkini atas perkembangan pasar vaksin dan informasi kebijakan global.	Pemasaran & Penjualan Internasional
9	Implementasi MRP tidak sesuai target	α. Komitmen kuat manajemen untuk menggunakan MRP sebagai salah satu tools wajib Perusahaan dan harus diturunkan menjadi KPI dari setiap unit untuk melaksanakannya β. Internalisasi yang kuat kepada seluruh unit mengenai proses bisnis yang terintegrasi dan pentingnya transparansi data di setiap unit χ. Perubahan mindset cost center dari berdasarkan unit kerja menjadi berdasarkan produk yang akan mengubah proses bisnis perusahaan δ. Menyempurnakan sistem akuntansi biaya untuk persiapan implementasi MRP ε. Menghire konsultan, tenaga kerja dan mendedikasikan SDM yang ada untuk fokus menyempurnkan sistem akuntansi biaya φ. Memastikan aplikasi MRP sesuai kebutuhan dengan melakukan validasi dan uji coba yang cukup dan validasi software yang sesuai standard Quality Assurance Bio Farma γ. Menata proses bisnis di gudang Bio Farma baik gudang pusat maupun gudang di bagian η. Membuat aplikasi Inventory Management untuk pengendalian barang di Bagian sebelum aplikasi MRP berjalan.	• Divisi TI • Divisi PPMP
10.	Keterlambatan Pelaksanaan Proyek	α. Penambahan konsultan perencana/pengawas GMP terkait investasi bangunan; β. Dokumen perencanaan sudah tersedia di tahun anggaran; χ. Term anggaran dibuat multiyear; δ. Melakukan monitoring dan pelaporan hasil progress pelaksanaan proyek oleh unit terkait; ε. Mengantisipasi kendala-kendala awal yang mungkin timbul pada pelaksanaan pekerjaan proyek dan segera memutuskannya; φ. Penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan jumlah serta kompetensi SDM di Divisi Pengadaan untuk percepatan proses pengadaan	• Produksi Vaksin Tetanus • Produksi Vaksin Difteri • Pengemasan • sIPV • Pengawasan Mutu • Surveilans dan Uji Klinis • Kalibrasi dan Validasi • Produksi Media • Hewan SPF

EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko Bio Farma belum dilakukan pengukuran maturitas manajemen risiko tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (risk maturity) . Penilaian risk maturity menggunakan model maturitas. Dalam Risk *Maturity Model* (RMM) terdapat 7 (tujuh) elemen dan karakteristik manajemen risiko yang dalam skala 5 (lima) level maturitas yang terdiri dari:

1. Penerapan pendekatan berbasis Enterprise Risk Management (ERM)
2. Pengelolaan Proses ERM
3. Pengelolaan Selera Risiko
4. Penerapan Analisis Akar Penyebab
5. Pengungkapan Risiko
6. Pengelolaan Kinerja
7. Ketahanan dan Keberlanjutan Usaha

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Untuk meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuan penerapan manajemen risiko, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko senantiasa berupaya meningkatkan komitmen pimpinan Perusahaan untuk memberi dukungan dan kontribusi penuh dalam pelaksanaan Manajemen Risiko, mengembangkan budaya sadar risiko *(corporate risk culture)* di seluruh proses Perusahaan dengan menitikberatkan konsep risiko sebagai tanggung jawab setiap orang (risk is everybody's business) melalui sosialisasi yang berkelanjutan serta selalu mengembangkan kompetensi dan proses pembelajaran secara berkesinambungan melalui pelatihan Manajemen Risiko baik secara umum ataupun khusus. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan Sosialisasi, Training, dan Sharing Knowledge Risk Management yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018 bagi pengelola Risiko pada Unit/ Unit Bisnis/ Divisi/Proyek Pengembangan di Bio Farma. Penanaman budaya sadar risiko juga dilakukan melalui sosialisasi menggunakan media

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka peningkatan kualitas mananjemen risiko di lingkungan Bio Farma dan pengembangan kompetensi personil yang membidangi manajemen risiko, telah dilakukan program pelatihan berupa public training yang diselenggarakan oleh lembaga professional maupun in house training yang bekerjasama dengan narasumber dan pelatih berpengalaman di dalam Manajemen Risiko. Program pengembangan kompetensi sbb:

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

KARYAWAN BIO FARMA YANG SUDAH SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Adapun sertifikasi Manajemen Risiko yang pernah diikuti sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Topik Pelatihan/Workshop/Seminar/Lokakarya
Basuki Harjo	Kepala Bagian	*Project Risk Management*
		Corporate Portfolio Risk Management "Risk Analysis, Modeling and Optimization"
		Risk Based Bussiness Process Improvement
		Praktik ERM berbasis ISO 31000
		Invitation on Responding to Risks Effectively with Key Risk Indicators
		Pengelolaan Risiko Hukum
		Enterprise Risk Management, Konsep dan Implementasi
		Teknik asesmen risiko EC/ISO 31010
		Integrated Project Management Tingkat Manager
		IT Risk Management Optimize The Hidden Value of IT Risk Management
		ISO 31000 International Risk Management Standard
Mudi Risandi	Kepala Seksi	*Governance Risk Compliance (GRC)*
		Corporate Portfolio Risk Management "Risk Analysis, Modeling and Optimization"
		Manajemen Risiko Proyek
		Business Continual Management (BCM)
		Risk Based Business Process Improvement
		ISO 31000 series 1 : ERM fundamental
		Global compliance for computer systems validation-mastering the balance of effectiveness and efficiency with risk and compliance
Rian Dwi Oktavian	Staf	*Project Risk Management*
		Risk Based Business Process Improvement

Nama	Jabatan	Jenis Sertifikasi
Basuki Harjo	Kepala Bagian	ERMCP ISO 31000

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

PENJELASAN SINGKAT MENGENAI PENGENDALIAN INTERNAL MENCAKUP PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bio Farma secara berkesinambungan (*on going basis*) yang kualitas disain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh insan Bio Farma, dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perusahaan
2. Menjamin tersedianya laporan Keuangan yang akurat,
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku,
4. Mengurangi dampak kerugian keuangan,
5. Penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud)* dan
6. Pelanggaran aspek kehati-hatian, serta
7. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi operasional.
8. Keandalan dan kebenaran informasi.
9. Kepatuhan Perusahaan terhadap kebijakan rencana kerja, prosedur dan peraturan perundangan.
10. Penggunaan sumber daya (resources) yang ekonomis dan efisien.
11. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program.
12. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN INSAN BIO FARMA

DEWAN KOMISARIS

Melakukan pengawasan dan pemberian nasehat terkait kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan risiko dengan dibantu oleh Komite-komite yang dimiliki Dewan Komisaris.

DIREKSI

Menerapkan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan tersebut antara lain terkait dengan kegiatan operasional, manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Bio Farma bahwa fungsi Direksi dalam Pengendalian Internal Perusahaan adalah:

1. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal Perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan
2. Internal Audit melaksanakan pengujian dan review terhadap sistem pengendalian internal Perusahaan
3. Internal Audit melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Keuangan
4. Secara struktural Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan mempunyai hubungan koordinasi dengan Komite Audit.

KARYAWAN / INSAN BIO FARMA

Seluruh karyawan Bio Farma menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pengendalian internal dan dalam tugas fungsionalnya sehari-hari wajib mempelajari dan memahami kebijakan sistem pengendalian internal di Perusahaan. Pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan.

Bio Farma memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang berperan dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan. Satuan Pengawasan Intern (SPI) senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip GCG dapat berjalan sesuai secara baik.

PEDOMAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DI BIO FARMA

Bio Farma telah melaksanakan sistem pengawasan dan pengendalian intern sebagaimana diamanatkan dalam:

1. **Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pasal 26 sbb:**
   m. Direksi menetapkan sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset.
   n. Sistem pengendalian intern di Bio Farma mencakup hal-hal sebagai berikut
      - Lingkungan pengendalian intern di Bio Farma dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari

- Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan
- Filosofi dan gaya manajemen
- Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya
- Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia
- Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

- Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
- Aktivitas pengendalian, merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.
- Sistem informasi dan komunikasi, merupakan suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Monitoring, merupakan proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

15. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pasal 28 sbb:

a. Direksi menyelenggarakan Pengawasan Intern.
b. Pengawasan intern dilakukan, dengan:
   - Membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
   - Membuat Piagam Pengawasan Intern.
c. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
d. Fungsi pengawasan intern sebagaimana adalah:
   - Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
   - Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
e. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
f. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Bio Farma dalam pengendalian intern yang diterapkan oleh unit-unit kerja, Bio Farma mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang diatur dalam SK Direksi Nomor: 05097/DIR/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Kebijakan Umum Pengendalian Internal. Kebijakan tersebut meliputi:

1. Peningkatan lingkungan pengendalian intern yang disiplin dan terstruktur.
2. Pelaksanaan kajian dan pengelolaan risiko usaha, meliputi proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan secara berkesinambungan.
3. Melakukan aktivitas pengendalian pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan aset Perusahaan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang meliputi proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Melakukan pemantauan yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk pelibatan fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perseroan.

Kegiatan-kegiatan di atas ditangani secara sinergis dan proporsional lintas Bagian dengan melibatkan aktivitas Satuan Pengawasan Intern (SPI), Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Divisi Quality Assurance dan bagian terkait lainnya.

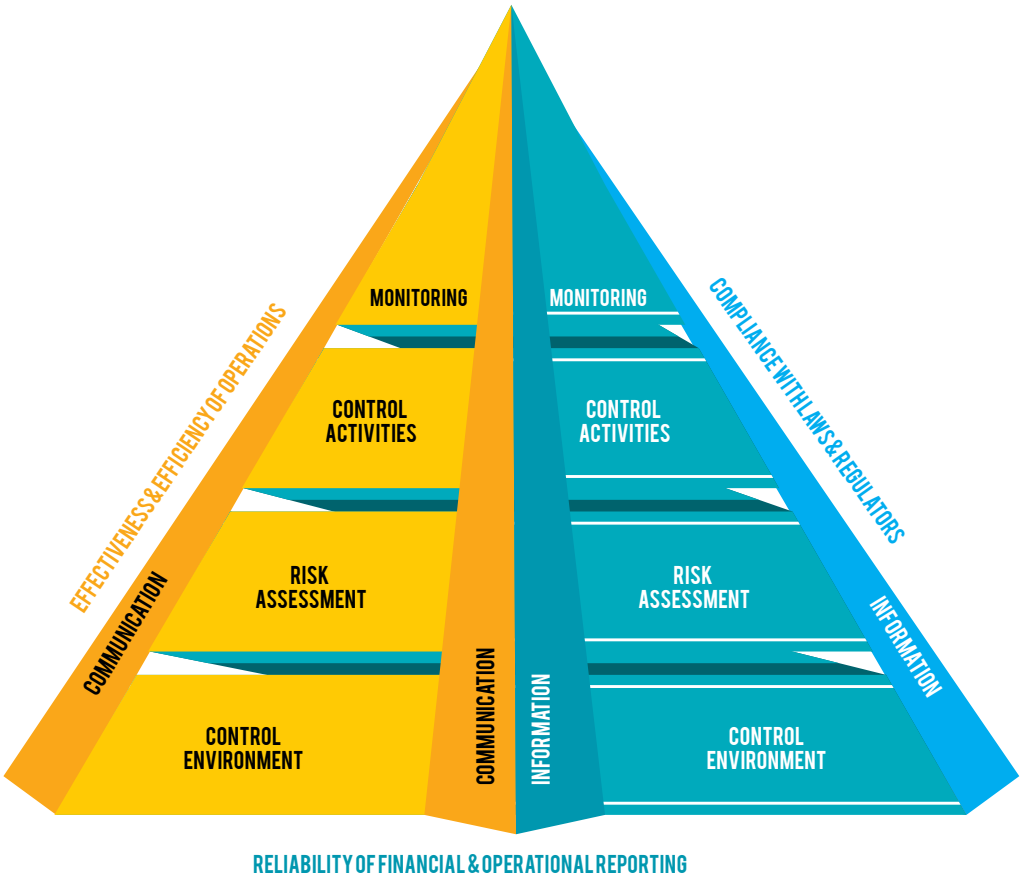

PENGENDALIAN INTERN MENCAKUP PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

REVIEW PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PELAPORAN KEUANGAN *(INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING REVIEW (ICOFR REVIEW))*

Pengendalian internal atas pelaporan keuangan merupakan unsur penting dalam pengelolaan Perusahaan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perusahaan yang sehat dan aman. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICOFR) dapat membantu manajemen Perusahaan meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, dan mencapai efisiensi dan efektivitas dari kegiatan penyusunan laporan keuangan Perusahaan.

Mengacu pada kerangka yang diakui secara internasional yaitu COSO-*Internal-Control Framework*, Audit Internal telah melakukan *review* atas pelaksanaan sistem pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan (*Internal Control over Financial Reporting Review*, ICOFR *Review*).

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH BIO FARMA UNTUK PENGENDALIAN KEUANGAN YAITU

1. Menyusun rencana kerja yang membahas strategi Bio Farma secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
2. pengendalian investasi,
3. alokasi biaya,
4. Memantau RKAP dengan realisasi dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibahas pada rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.
5. perolehan laba agar dapat berjalan sesuai dengan rencana Perusahaan.

REVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Pada tahun 2018 Satuan Pengawasan Intern dan Penjamin Mutu Dan Regulasi (QA) telah melakukan audit operasional di seluruh Unit Kerja yang ada di Bio Farma dan evaluasi atas penerapan manajemen risiko Perusahaan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab Satuan Pengawasan Intern, Divisi Pengawasan Mutu & Regulasi dan Manajemen Risiko pada laporan Annual Report ini.

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH BIO FARMA UNTUK PENGENDALIAN OPERASIONAL YAITU AGAR KEGIATAN OPERASIONAL DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN.

1. Pengendalian operasional Perusahaan menggunakan *standar operating procedur* (SOP) yang merinci prosedur kerja setiap aktivitas operasional yang dilakukan oleh Bio Farma terkait produk & aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait.
2. Aturan keputusan yang telah ditentukan lebih dahulu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Perusahaan mengidentifikasi operasi-operasi dan aktivitas yang terkait dengan aspek penting lingkungan teridentifikasi sejalan dengan kebijakan, tujuan dan sasaran.
3. Bio Farma membuat struktur organisasi Perusahaan yang baik, dilengkapi dengan Divisi pengawasan / pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional.

Sistem pengendalian di Bio Farma melibatkan seluruh insan Bio Farma, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Kegiatan pengendalian harus direncanakan terlebih dahulu sebelum diterapkan agar dapat mengendalikan risiko yang mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bio Farma. Kegiatan pengendalian juga mencakup pada penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau setiap kegiatan Bio Farma sehari-hari. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Perusahaan.

KAJI ULANG YANG DILAKUKAN BIO FARMA DALAM MENINGKATKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

KAJI ULANG MANAJEMEN *(TOP LEVEL REVIEWS)*

Direksi Bio Farma secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan karyawan sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).

KAJI ULANG KINERJA OPERASIONAL *(FUNCTIONAL REVIEW)*

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan maupun bulanan.

1. Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, Bagian GCG & ERM.
2. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan output (laporan) yang dihasilkan oleh Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko, Bagian GCG & ERM
3. Melakukan kaji ulang atas realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
   a. Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
   b. Menetapkan persyaratan untuk tindakan dan perbaikan (*corrective action*).

KAJI ULANG PENGENDALIAN INTERNAL

Kaji ulang pengendalian dimulai dari lingkungan pengendalian melalui

1. Budaya Perusahaan PITIC (Profesional, Integritas, *Teamwork, Innovation, Customer Orinted*), GCG *(Good Corporate Governance)* melalui buku saku *Code of Conduct* yang sudah disosialisasikan dan dibagikan kepada Dewan Komisaris, Komite-komite, Direksi, semua insan Bio Farma serta penandatanganan Pakta Integritas, jadi lingkungan pengendalian Bio Farma sudah sesuai dengan kerangka COSO.

2. Management risiko, yaitu risiko dipetakan dan dimitigasi.
3. Pemantauan melalui audit internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern & Divisi Penjamin Mutu Dan Regulasi (QA) yang berbasis risiko (risk based audit).

PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

1. Bio Farma melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari aktifitas dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan interen.
2. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
   a. Pengendalian umum *(general control)* meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software,* pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe, server,* dan *users workstation,* serta jaringan internal–eksternal.
   b. Pengendalian aplikasi *(application controls)* diterapkan terhadap program yang digunakan Bio Farma dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar.

Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

PENGENDALIAN ASET FISIK *(PHYSICAL CONTROL)*

1. Pengendalian asset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap asset Bio Farma.
2. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan *file* data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Bio Farma dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.

DOKUMENTASI *(DOCUMENTATION)*

1. Bio Farma sekurang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai.
2. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Bio Farma secara aktual, dan diinformasikan kepada pejabat dan karyawan.
3. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor interen, & akuntan publik.
4. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor interen ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DENGAN KERANGKA YANG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL *(COSO – INTERNATIONAL CONTROL FRAMEWORK)*

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BIO FARMA

1. Tujuan Kepatuhan yaitu untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bio Farma telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah maupun kebijakan, ketentuan, dan peraturan interen yang ditetapkan oleh Bio Farma.
2. Tujuan Informasi yaitu tersedianya informasi laporan keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tujuan Operasional yaitu meningkatkan efektivitas dan efisisiensi dalam menggunakan asset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bio Farma dari risiko kerugian.
4. Tujuan Budaya Risiko *(risk culture)* yaitu mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bio Farma secara berkesinambungan.
5. Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Sedangkan, lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, komitmen, perilaku, kepedulian dan langkah-langkah dari Dewan Komisaris dan Direksi, dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bio Farma.

Sikap terhadap pentingnya pengendalian interen ini terdiri atas unsur-unsur lingkungan pengendalian yang meliputi:

1. Struktur organisasi Perusahaan yang memadai.
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen Bio Farma.
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh karyawan.
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia.
5. Atensi dan arahan manajemen Bio Farma dan komite lainnya, seperti Komite Risiko.
6. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bio Farma dan penerapan manajemen risiko.

5 ELEMEN PENGENDALIAN INTERN *(COSO INTERNATIONAL CONTROL FRAMEWORK)*

Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Bio Farma telah sesuai dengan kerangka pengendalian internal COSO yang terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu:

1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

a. Melalui budaya Perusahaan PITIC (Profesional, Integritas, *Teamwork, Innovation, Customer Orinted),*
b. Penerapan GCG *(Good Corporate Governance)* melalui buku saku *Code of Conduct* yang sudah disosialisasikan dan dibagikan kepada Dewan Komisaris, Komite-komite, Direksi, semua insan Bio Farma
c. Penandatanganan Pakta Integritas,
d. Kompetensi karyawan, peng-organisasian dan pengembangan sumberdaya manusia,
e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi jadi lingkungan pengendalian Bio Farma

2. PENILAIAN RISIKO

Di Bio Farma Bagian GCG & ERM, Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko (CRM) yang mengkaji dan pengelolaan risiko usaha yaitu mengidentifikasi, menganalisis & evaluasi, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan.

3. PROSEDUR PENGENDALIAN

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit kerja dalam struktur organisasi Perusahaan.

Yang sudah diterapkan oleh Bio Farma terkait dengan aktivitas pengendalian:

a. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suartu kegiatan.
b. Pembagian tugas dan tanggung jawab untuk kegiatan terkait,
c. Pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan)
d. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Pendokumentasian dan pencatatan Laporan Keuangan Audited Tahunan, telah dilakukan pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, serta dilakukan pemeriksaan kinerja secara independen, oleh Internal Audit maupun eksternal Audit (Kantor Akuntan Publik, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/BPKP).

4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen, pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

Pengendalian informasi dan komunikasi yang sudah dilakukan oleh Bio Farma:

Dilakukan melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, sosialisasi, mail moderator, Website Perusahaan, intranet, Portal Bio Farma, biolibrary, dan media lain lainnya.

5. PEMANTAUAN (MONITORING)

Dilakukan melalui performance check oleh Pembina Teknis, Audit Internal oleh Divisi Pengawasan Internal & *Quality Assurance* dan Audit oleh eksternal (BPK, BPKP, KAP).

Selain kelima komponen di atas, Bio Farma juga memberlakukan mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan sesuai dengan peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011. yaitu Mekanisme

Pengaduan *(Whistleblowing System)*. Mekanisme ini diberlakukan sebagai upaya agar Bio Farma terus meningkatkan praktik transparansi dan keterbukaan informasi khususnya terkait dengan pelaporan pelanggaran baik yang dilakukan oleh Insan Bio Farma maupun manajemen Perusahaan. Penjelasan lebih lanjut terkait *Whistleblowing System* terdapat dalam Laporan Tahunan ini bagian *Whistleblowing System*.

HASIL *REVIEW* & EVALUASI YANG DILAKUKAN ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TAHUN 2018

Review dan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian intern Bio Farma dilakukan pada tingkat entitas dan operasional. *Review* dan evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan secara berkala oleh auditor Internal maupun eksternal sesuai prosedur audit yang berlaku. Divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) melakukan *review* dan evaluasi pada Bagian-Bagian yang diaudit yang ditetapkan dalam PKPT. Sedangkan secara entitas *review* dan evaluasi dilakukan oleh Auditor Eksternal, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) pada saat pelaksanaan general audit pada setiap tutup buku. Hasil audit atas efektivitas system pengendalian intern dituangkan dalam Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal.

Untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian intern, Perusahaan/ Perseroan melakukan *review* dan evaluasi sistem pengendalian intern secara berkala.

MAKSUD DAN TUJUAN REVIEW DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Memberikan keyakinan kepada Direksi dalam pemberian asersi mengenai efektivitas pengendalian intern untuk selanjutnya memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan lain bahwa penerapan sistem pengendalian intern perusahaan telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, serta efisiensi/efektivitas dari kegiatan usaha Perusahaan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi menyangkut perbaikan penerapan sistem pengendalian intern perusahaan di masa yang akan datang *(areas of improvement*).

LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN BIO FARMA DALAM RANGKA MEMASTIKAN TERSELENGARANYA KEGIATAN PEMANTAUAN YANG EFEKTIF

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam Perusahaan
2. Menetapkan unit kerja yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian interen
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bio Farma dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
4. Mengintegrasikan PI ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakandan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari unit kerja yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
6. Menetapkan informasi/*feed back* dalam format dan frekuensi yang tepat.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMSARIS DAN ANGGOTA DIREKSI YANG MENJABAT PADA PERIODE LAPORAN TAHUNAN

Sampai dengan 31 Desember 2018 di Bio Farma, tidak terdapat perkara penting (perdata dan pidana) yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan, baik permasalahan hukum perdata maupun pidana. Tidak ada dampak terhadap kondisi keuangan dan operasional Perusahaan.

Dengan demikian per 31 Desember 2018 Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang pokok perkara/gugatan, status penyelesaian perkara/gugatan, risiko Perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan, dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otorisasi (pasar modal, perbankan dan lainnya).

Hal ini menunjukan ketaatan dan kepatuhan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris terhadap segala peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan serta komitmen manajemen untuk menegakan prinsip tata kelola yang baik.

PERMASALAHAN HUKUM YANG MELIBATKAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama tahun 2018 tidak terdapat permasalahan hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

SANKSI ADMINISTRASI OLEH REGULATOR

Selama tahun 2018, tidak pernah ada sanksi administrasi yang dikenakan kepada Bio Farma, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya).

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bio Farma secara berkala memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Bio Farma kepada stakeholders agar mengetahui kondisi Perusahaan secara jelas dan terbuka. Bio Farma memiliki berbagai sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi.

Bio Farma senantiasa memberikan kemudahan bagi stakeholder untuk mengakses informasi dan data Perusahaan melalui telepon, website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, Facebook, Twitter, Instagram.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

BIO FARMA 4 KALI RAIH PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Bio Farma kembali meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla kepada Direktur Produksi Bio Farma Juliman di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, pada Senin 19 Desember 2016. Ini adalah merupakan penghargaan yang ke-4 kalinya sejak tahun 2013.

Penghargaan ini merupakan komitmen Bio Farma yang secara konsisten menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengharuskan Badan Publik termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyajikan informasi yang diperuntukkan bagi kepentingan publik. Dengan skor 81,27 Bio Farma meraih peringkat ke 3 untuk kategori badan publik BUMN. Penerapan keterbukaan informasi publik ini mampu mendorong korporasi untuk bisa bersaing secara global dan penghargaan ini merupakan prestasi bagi Bio Farma yang telah memasuki kualifikasi informatif.

Penilaian melalui *assessment* yang ketat dari Komisi Informasi Pusat dilakukan sepanjang tahun 2016 melalui Kuesioner Penilaian Mandiri atau *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) sebagai alat ukur bagi badan publik dalam menjalankan amanah UU KIP.

Penilaian tahap akhir dilakukan dengan melakukan kunjungan ke badan publik untuk mengukur indikator pelayanan informasi publik, indikator pengelolaan informasi dan dokumentasi badan publik.

Bio Farma banyak melakukan inovasi di bidang layanan publik baik secara *hard facilities* maupun *soft facilities* dengan didukung IT terintegrasi seperti penyediaan informasi yang disediakan di Museum Bio Farma dan Exhibition Hall.

Melalui layanan informasi publik ini, hak masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai perusahaan, proses bisnis, tata kelola, laporan keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan dan informasi terkait lainnya dapat terpenuhi.

Bio Farma memiliki perangkat dan mekanisme KIP yang lengkap, diperbaharui setiap tahun. Bio Farma pun telah menyusun klasifikasi informasi publik yang terdiri dari informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi yang wajib disediakan.

KOMUNIKASI EKSTERNAL

Bio Farma memiliki *website* Perusahaan (www.biofarma.co.id) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang menyajikan informasi yang lengkap tentang Bio Farma seperti profil Perusahaan, visi, misi, strategi, produk, struktur manajemen, kebijakan GCG, CoC, berita Perusahaan, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan rilis media. *Website* Bio Farma menampilkan informasi terkini secara transparan, konsisten dan tepat sasaran sehingga dapat membentuk pemahaman publik mengenai Bio Farma dengan baik. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui *website* tepat waktu, akurat, lengkap dan tidak melangar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain media *online*, Perusahaan juga memanfaatkan media TV dan radio dalam bentuk pemasangan *adlips/spot* radio, info Bio Farma maupun *talkshow*. Selain itu Bio Farma juga menggunakan media luar ruang berupa majalah dinding (mading) digital. Mading digital memberikan informasi mengenai kegiatan manajemen Bio Farma dalam bentuk foto.

Media cetak dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi berupa berita dan publikasi laporan keuangan. Berita yang disebarkan berupa kegiatan Perusahaan yang perlu diketahui oleh publik termasuk laporan tahunan, *company profile* dan brosur.

Selama tahun 2018 Bio Farma telah mengeluarkan 123 kali siaran pers dengan perincian sebagai berikut:

DAFTAR SIARAN PERS SELAMA TAHUN 2018

No	Judul Press Release	Kategori	Tanggal
1	Gencarkan Vaksinasi Difteri di DKI, Anies akan Gandeng Bio Farma	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News	04/01/2018
2	Bio Farma dan Serikat Pekerja Sepakati Perjanjian Kerja Bersama Periode 2018 – 2020	Uncategorized, Featured News, News, Press Release, Corporate News	08/01/2018
3	BI Jabar Gandeng Bio Farma Gelar Penyuluhan Kesehatan dan Vaksin Difteri Bagi Pegawai / Keluarga	Featured News, News, News Biofarma	08/01/2018
4	Dinas Kesehatan kota Tarakan Gelar Sosialisasi Vaksin dan Pengolahannya	Featured News, News, News Biofarma	10/01/2018
5	Kasus Difteri Menurun, Menteri Nila Moeloek Perintahkan Imunisasi Difteri Jalan Terus	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	12/01/2018
6	Biofarma Suplai Vaksin ke 50 Negara Islam	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	12/01/2018
7	Menkes Nila Moeloek dan Dede Yusuf Tinjau Fasilitas Produksi Vaksin Bio Farma	Featured News, News, Press Release	14/01/2018
8	Geopark Ciletuh Resmi Memenuhi Kriteria Sebagai Taman Bumi Dunia: Bio Farma diapresiasi langsung oleh Global Geopark Network	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	16/01/2018
9	M.Rahman Rustan Resmi Menjadi Dirut Bio Farma	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	24/01/2018
10	Bio Farma Berikan Vaksinasi Flu Kepada Wartawan	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News	08/02/2018
11	Bio Farma Kembangkan Produk Lifescience	Uncategorized, Featured News, News, Press Release, Corporate News	08/02/2018
12	Peranan Bio Farma Dalam Vaksinasi	Featured News, News, News Biofarma	08/02/2018
13	Isu Anti-Vaksin Turunkan Cakupan Vaksinasi	Featured News, News, News Biofarma	08/02/2018
14	Bio Farma Pasok 70 Persen Kebutuhan Vaksin Dunia	News, Press Release	17/02/2018
15	Peduli Soal Pendidikan, Bio Farma Berikan Beasiswa Pendidikan senilai 800 Juta	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	22/02/2018
16	Bio Farma Raih Kembali Sustainability Report Award (SRA) 2017	Featured News, News, Press Release	24/02/2018
17	Bio Farma siapkan strategi Diplomasi Ekonomi Bidang Kesehatan bersama Kemenlu	News, Press Release	01/03/2018
18	Bersama Kemenlu, Bio Farma Siapkan Strategi Diplomasi Ekonomi Bidang Kesehatan	Featured News, News, News Biofarma	02/03/2018
19	Bio Farma signed a Business Development MOU with RNI	News, News Biofarma, Press Release	04/03/2018
20	Bio Farma raih Apresiasi Penghargaan Wajib Pajak Besar 2018	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	13/03/2018
21	Bio Farma Sosialisasikan Perjanjian Kerja Bersama 2018-2020	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	13/03/2018

No	Judul Press Release	Kategori	Tanggal
22	Bio Farma luncurkan Aplikasi Manajemen Risiko Perusahaan	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	14/03/2018
23	Bio Farma Gandeng Kejaksaan untuk Percepatan Kemandirian Produk Lifescience	Featured News, News, News Biofarma, Press,Release, Corporate News, Events	23/03/2018
24	Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Bio Farma Kembali Menggelar Sosialisasi & Penandatanganan Pakta Integritas	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	27/03/2018
25	Peduli Terhadap Korban Bencana Alam di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Bio Farma dan Organisasi Internal berikan bantuan	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	27/03/2018
26	Perkuat Ketahanan Kesehatan Nasional Bio Farma Bersinergi Dengan Ikatan Alumni Lemhanas	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	27/03/2018
27	Bio Farma ungkap Tantangan Penerapan Standar Halal Industri Farmasi	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News	11/04/2018
28	Tingkatkan Kesadaran Pentingnya Kesehatan di Lingkungan Pesantren, Bio Farma Gelar Santri Sehat 2018	FeatFeatured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate	16/04/2018
29	Ratusan Santri Tebuireng Diberi Pelatihan Kesehatan	Featured News, News, News Biofarma, Corporate News, Events	17/04/2018
30	Antusiasme Ponpes Pabelan di Santri Sehat Bio Farma 2018	Featured News, News, News Biofarma, Corporate News, Events	18/04/2018
31	Fokus Inovasi pertahanan dan kesehatan, Bio Farma tandatangani nota kesepahaman pada Indonesia Science Day 2018	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	20/04/2018
32	Penghargaan “Promising Company in Strategic Marketing” & “Promising Company in Marketing 3.0”	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News	03/05/2018
33	Indonesia Resmi sebagai Centre of Excellence Pengembangan Vaksin dan Produk Bioteknologi Negara OKI	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	14/05/2018
34	Bio Farma Turut Berpartisipasi dalam Pameran UKM & Bazar Sembako yang diselenggarakan Kementerian BUMN	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	18/05/2018
35	Anies: Surat edaran hapus imunisasi di PPDB dicabut	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	22/05/2018
36	Bio Farma Siap Berangkatkan Pemudik Gratis BUMN 2018	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	23/05/2018
37	Bio Farma Membantu Komunitas Keterbatasan Khusus Agar Sejahtera dan Mandiri	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, CSR, Sustainability	31/05/2018
38	Bio Farma Berikan Bantuan Lingkungan dan Sosial untuk Sejahterakan Masyarakat	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, CSR	31/05/2018
39	Bio Farma Raih Penghargaan Perusahaan PMDN Berperingkat Terbaik	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	06/06/2018

No	Judul Press Release	Kategori	Tanggal
40	Dirut Bio Farma Berangkatkan 1.000 Peserta Mudik Gratis Bersama BUMN	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News	06/06/2018
41	Dirut Bio Farma Berangkatkan 1.000 Peserta Mudik Gratis Bersama BUMN	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News	08/07/2018
42	Bio Farma mengikuti Pameran yg digelar Kementerian Perindustrian	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	10/07/2018
43	Putri Indonesia 2018 Mendukung Pencegahan Penyakit Melalui Vaksinasi	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	11/07/2018
44	Lab Mikrobiologi Bio Farma Siap Bantu Industri Makanan dan Kesehatan	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	12/07/2018
45	Museum Bio Farma Masuk 10 Destinasi Wisata Bandung	Featured News, News, News Biofarma, Events	18/07/2018
46	Belajar Sejarah Bio Farma dari Masa ke Masa Lewat Museum	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News,	19/07/2018
47	Open House Museum Bio Farrma	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, Events	24/07/2018
48	Santri Pondok Pesantren Kuningan Mendapat Vaksin Flu	News, News Biofarma, Press Release	28/07/2018
49	Bio Farma Upayakan Untuk Sertifikasi Halal Vaksin MR	Featured News, News, News Biofarma, Events	31/07/2018
50	Tingkatkan Elektrifikasi Nasional,Kementrian BUMN Inisiasi Program Sambung Listrik Gratis	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News	08/08/2018
51	BUMN Haidr- Pembekalan SMN di Bio Farma	Featured News, News, News Biofarma, Events, News Coverage	09/08/2018
52	Delapan BUMN kenalkan potensi Jawa Barat dan keragaman Indonesia pada Program Siswa Mengenal Nusantara 2018	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	10/08/2018
53	Strengthening Cooperation between Indonesia - Morocco - Tunisia, Indonesia is trusted to assist the Self-Reliance of Vaccine Production in OIC member countries	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, Publications, News Coverage	28/08/2018
54	Perkuat Kerjasama Indonesia – Maroko – Tunisia, Indonesia dipercaya untuk membantu Kemandirian Produksi Vaksin di negara anggota OKI	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, News Coverage	28/08/2018
55	Bio Farma Invites The OIC Country Vaccine Manufacturers To Conduct Research Collaborations	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, Publications	28/08/2018
56	Bio Farma Ajak Produsen Vaksin Negara OKI untuk Kolaborasi Riset	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News	28/08/2018
57	Tingkatkan Potensi Ekspor BUMN:Bio Farma Dorong Pencapaian Penjualan Ekspor 2018	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	12/09/2018
58	Bio Farma Terus Percepat Penemuan Vaksin & Produk Life Science Baru Melalui FRLN	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, Events	13/09/2018
59	Kultur Milenia Lebih Penting Ketimbang Keahlian	Featured News, News, News Biofarma	13/09/2018
60	Era Industri 4.0 Mengubah Budaya Kerja Karyawan	Featured News, News, News Biofarma	13/09/2018

No	Judul Press Release	Kategori	Tanggal
61	Pemberian Vaksin Menjadi Cara Efektif, Efisien, Murah dan Ampuh	Featured News, News, News Biofarma	19/09/2018
62	Ma'ruf Amin: Darurat dan Berbahaya, Vaksin MR Diperbolehkan, Bahkan Wajib	Featured News, News, News Biofarma	19/09/2018
63	Bio Farma: Indonesia Sudah Menjadi Pusat Produksi Vaksin Negara-Negara Islam	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	19/09/2018
64	Jamin Keamanan dan Mutu, BPOM Awasi Ketat Vaksin MR Sejak Prapemasaran hingga Pascapemasaran	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	19/09/2018
65	Pengakuan Nursiah, Ibu dengan Anak Penderita Rubella	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	19/09/2018
66	Kemenkes Sekuat Tenaga Mengeliminasi Dampak Campak Rubella	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	19/09/2018
67	PEFINDO memberikan peringkat "idAAA" kepada PT. Bio Farma (Persero) dan MTN Tahun 2018, dan peringkat "idAAA(sy)" untuk MTN Syariah Mudharabah Tahun 2018	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	19/09/2018
68	Dirut Bio Farma Lepas Ekspor Vaksin ke PNG	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	21/09/2018
69	"Tingkatkan Peran UMKM Dalam Pembangunan, Kanwil DJP WP Besar dan Biofarma Kerja Sama Edukasi Pp 23"	Featured News, News, Corporate News, News Biofarma, Press Release	01/10/2018
70	"Increasing the Role of MSMEs in Development, DGT Regional Office for Large Taxpayers and Bio Farma cooperates for Pp 23 Education Bandung (10/1/2018)."	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News	01/10/2018
71	"Lanjutkan Kolaborasi dalam Bidang Lingkungan dan Kesehatan, Walikota Bandung Kunjungi Bio Farma di Dua Minggu Pertama Masa Jabatannya"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	02/10/2018
72	"Lanjutkan Kolaborasi dalam Bidang Lingkungan dan Kesehatan, Walikota Bandung Kunjungi Bio Farma di Dua Minggu Pertama Masa Jabatannya"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	02/10/2018
73	"Komitmen Terapkan Aturan Pajak, Bio Farma Hadirkan 200 UMKM Dalam Edukasi Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan di Era Industri 4.0"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	02/10/2018
74	"Committed to Implement Tax Rules, Bio Farma Presents 200 MSMEs in Education on Utilizing Tax Facilities in the Industrial Age 4.0"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	02/10/2018
75	"Bio Farma Kirimkan Bantuan Vaksin dan Tim Medis untuk Bantu Korban Gempa Bumi & Tsunami Palu – Donggala"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	03/10/2018
76	"Bio Farma Sent Vaccine Aid and Medical Team to Help the Earthquake & Tsunami Victims of Palu – Donggala"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	03/10/2018
77	"Tak Henti Hadir Untuk Negeri, Bio Farma Ikuti Pameran IBD EXPO BUMN Terbesar di Indonesia"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	03/10/2018
78	"Always There for the Country, Bio Farma Participated in the Largest SOE IBD EXPO Exhibition in Indonesia"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	03/10/2018

No	Judul Press Release	Kategori	Tanggal
79	"Hari kedua di Palu, Bio Farma Imunisasi Tetanus dan Flu di Lokasi Gempa Bumi & Tsunami Palu – Donggala"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	04/10/2018
80	"The second day in Palu, Bio Farma gave Tetanus and Flu in the Earthquake & Tsunami Location in Palu – Donggala"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	04/10/2018
81	"Bio Farma raih 2 Penghargaan CSR Bergengsi"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	05/10/2018
82	"Bio Farma won 2 Prestigious CSR Awards"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	05/10/2018
83	"Dirut Bio Farma Paparkan Skema Inovasi Vaksin pada Pertemuan Tingkat Tinggi HLM4-CLKS 2018 di Bali"	Featured News, News, Corporate News, Events, News Biofarma, Press Release	15/10/2018
84	"Dirut Bio Farma paparkan skema inovasi vaksin pada pertemuan tingkat tinggi HLM4-CLKS 2018 di Bali"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, Events	15/10/2018
85	"Bio Farma Jajaki pasar Afrika: Pertemuan tingkat Tinggi Bali"	Featured News, News, Corporate News, Events, News Biofarma, Press Release	15/10/2018
86	"Bio Farma Jajaki pasar Afrika: Pertemuan tingkat Tinggi Bali"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, Events	15/10/2018
87	"Fourth High Level Meeting on Country-led Knowledge Sharing: Local Innovation as Driver for Global Development"	Featured News, News, Corporate News, Events, News Biofarma, Press Release	15/10/2018
88	"Fourth High Level Meeting on Country-led Knowledge Sharing: Local Innovation as Driver for Global Development"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, Events	15/10/2018
89	"Konsisten Perluas Ekspor Pasar Baru, Bio Farma raih kembali Penghargaan Primaniyarta 2018"	Featured News, News, News Biofarma	24/10/2018
90	"Konsisten Perluas Ekspor Pasar Baru, Bio Farma raih kembali Penghargaan Primaniyarta 2018"	Featured News, News, News Biofarma	24/10/2018
91	"Indonesia Has Become a Vaccine Production Center for Islamic States"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News	27/10/2018
92	"Increasing National Electrification, Ministry of SOE Initiated Free Electricity Connection Program"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News	29/10/2018
93	"Santri of Al-Ikhlas Islamic Boarding School Kuningan Got Flu Vaccine"	News, News Biofarma, Press Release	29/10/2018
94	"Menteri Rini, Lepas Ekspor Produk Vaksin ke Pakistan, Turki dan Honduras"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	31/10/2018
95	"Menteri Rini, Lepas Ekspor Produk Vaksin ke Pakistan, Turki dan Honduras"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	31/10/2018
96	"Komitmen Bio Farma Terapkan Pola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	01/11/2018
97	"Komitmen Bio Farma Terapkan Pola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	01/11/2018
98	"The First Meeting of Heads of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) from OIC Member Countries"	News, News Biofarma	07/11/2018

No	Judul Press Release	Kategori	Tanggal
99	"The First Meeting of Heads of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) from OIC Member Countries"	News, News Biofarma	07/11/2018
100	"Bio Farma: Perlunya Kolaborasi Industri, Regulasi dan Diplomasi untuk Menembus Pasar Global"	News, News Biofarma, Press Release	19/11/2018
101	"Bio Farma: Perlunya Kolaborasi Industri, Regulasi dan Diplomasi untuk Menembus Pasar Global"	News, News Biofarma, Press Release	19/11/2018
102	"Indonesia Siap Menyambut Kolaborasi Negara Anggota OKI"	News, News Biofarma, Press Release	19/11/2018
103	"Indonesia Siap Menyambut Kolaborasi Negara Anggota OKI"	News, News Biofarma, Press Release	19/11/2018
104	"Bio Farma; Tantangan dan Peluang memasarkan Produk di Negara Islam"	News, News Biofarma, Press Release	20/11/2018
105	"Bio Farma; Tantangan dan Peluang memasarkan Produk di Negara Islam"	News, News Biofarma, Press Release	20/11/2018
106	"Pertemuan Kepala Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota OKI, Solidaritas Kemanusiaan Untuk Kemandirian Obat dan Vaksin"	Featured News, News, Corporate News, Events, News Biofarma, Press Release	23/11/2018
107	"Pertemuan Kepala Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota OKI, Solidaritas Kemanusiaan Untuk Kemandirian Obat dan Vaksin"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, Events	23/11/2018
108	"Delegasi Negara OKI Bahas Harmonisasi Halal Vaksin"	Featured News, News, Corporate News, Events, News Biofarma, Press Release	23/11/2018
109	"Delegasi Negara OKI Bahas Harmonisasi Halal Vaksin"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, Events	23/11/2018
110	"Apresiasi Bantuan Bio Farma untuk Kemandirian Vaksin Negara OKI"	Featured News, News, Corporate News, Events, News Biofarma, Press Release	23/11/2018
111	"SEKRETARIAT OKI: Apresiasi bantuan Bio Farma untuk Kemandirian Vaksin negara Anggota OKI"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, Events	23/11/2018
112	"OIC appreciates Bio Farma's role in promoting Vaccine Self Reliance among OIC Member Countries"	Featured News, News, Corporate News, Events, News Biofarma, Press Release	27/11/2018
113	"OIC appreciates Bio Farma's role in promoting Vaccine Self Reliance among OIC Member Countries"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News, Events	27/11/2018
114	"Badan POM RI Siap Membantu Percepatan Vaksin Halal Bio Farma"	Featured News, News, Corporate News, News Biofarma, Press Release	29/11/2018
115	"Badan POM RI Siap Membantu Percepatan Vaksin Halal Bio Farma"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, Corporate News	29/11/2018
116	"PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI UNTUK PELELANGAN"	Announcement	03/12/2018
117	"Bio Farma Beri Akses Sanitasi Bersih untuk Al-Fitri, Cimaung"	Featured News, News, News Coverage, News Biofarma, Press Release	07/12/2018
118	"Bio Farma Beri Akses Sanitasi Bersih untuk Al-Fitri, Cimaung"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release, News Coverage	07/12/2018

No	Judul Press Release	Kategori	Tanggal
119	"Bio Farma Beri Akses Sanitasi Bersih untuk Al-Fitri, Cimaung"	Featured News, News, News Coverage, News Biofarma, Press Release	07/12/2018
120	"Dirut Bio Farma Raih Top Leader on IT Leadership 2018"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	07/12/2018
121	"Dirut Bio Farma Raih Top Leader on IT Leadership 2018"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	07/12/2018
122	"Terapkan Sistem Manajemen Inovasi, Bio Farma Raih kategori Gold (Asia Sustainability Reporting) 2018"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	13/12/2018
123	"Terapkan Sistem Manajemen Inovasi, Bio Farma Raih kategori Gold (Asia Sustainability Reporting) 2018"	Featured News, News, News Biofarma, Press Release	13/12/2018

Bio Farma juga mendistribusikan rilis tidak hanya di dalam negeri namun Internasional melalui jaringan ACN Newswire, yang dikutip berbagai media International khususnya di Asia dan Timur Tengah.

PENERIMAAN KUNJUNGAN PERUSAHAAN

Kegiatan Penerimaan Kunjungan Perusahaan bertujuan untuk memperkenalkan Perusahaan dan mengedukasi tentang pentingnya vaksinasi dan mengenal sejarah Bio Farma. Tamu yang berkunjung ke Bio Farma selama tahun 2018 berasal dari dalam maupun dari luar Pulau Jawa, sebanyak 68 institusi atau 3.316 peserta.

Tahun	Jumlah Tamu yang Berkunjung (orang)	Jumlah Group
2014	4.211	76
2015	4.639	77
2016	4.889	70
2017	3.203	61
2018	3.316	68

KOMUNIKASI INTERNAL

Kemudahan akses komunikasi internal merupakan kunci kelancaran penyebaran informasi perusahaan dan sebagai alat untuk membangun soliditas di internal perusahaan. Keberhasilan komunikasi internal sangat ditunjang oleh media komunikasi yang digunakan dan *content* informasi yang disebarkan. Dengan demikian, seluruh karyawan dapat mengerti informasi yang disampaikan dengan cepat dan efektif.

CORPORATE PORTAL

Bio Farma memiliki *Corporate Portal* sebagai sarana komunikasi internal karyawan Bio Farma. Konten portal mencakup kebijakan, aturan serta pedoman-pedoman terkait GCG maupun aktivitas operasional yang lainnya.

KLIPING

Perusahaan secara rutin mendistribusikan kliping berita yang terkait dengan Perusahaan kepada Direksi dan karyawan melalui jaringan intranet. Selama tahun 2018 telah disebarkan sebanyak 1.483 berita baru dengan rata-rata berita yang dibaca 33,35%.

Tahun	Berita Baru	Jumlah Orang Yang Baca Berita	Persentase
	1	2	3=2/1
2014	2.400	2.650	110,42%
2015	1.635	1.797	109,91%
2016	2.719	2.086	76,72%
2017	8.409	2.831	33,67%
2018	7.940	2.648	33,35%

BULETIN BIO MAGZ

Bio Magzs merupakan buletin internal triwulanan berisi informasi kegiatan Perusahaan yang didistribusikan melalui e-buletin. Selama tahun 2018 telah diterbitkan 4 edisi.

No	Edisi / Volume	Periode	Tema
1	Volume 1	Januari – Maret 2018	Mandiri Vaksin Negara Islam
2	Volume 2	April – Juni 2018	Mudik Gratis BUMN 2018 bersama Bio Farma
3	Volume 3	Juli – September 2018	128 Tahun Berkontribusi untuk menyehatkan generasi
4	Volume 4	Oktober – Desember 2018	Solidaritas Kemanusiaan Untuk kemandirian Obat dan Vaksin

NEWSLETTER

Newsletter yang berkaitan dengan informasi umum didistribusikan e-mail dan dipasang pada papan pengumuman. Selama tahun 2018 telah dilakukan pemasangan Newsletter sebanyak 161 kali.

Tahun	Jumlah Pemasangan
Newsletter (kali)	
2014	150
2015	125
2016	147
2017	163
2018	161

COFFEE MORNING

Coffe Morning adalah kegiatan *sharing knowledge* informal yang dilaksanakan secara rutin oleh Bio Farma. Setiap karyawan yang telah mengikuti seminar, pelatihan, pendidikan formal yang sifatnya strategis, bagi Perusahaan, diwajibkan untuk melakukan *sharing knowledge* baik dalam bentuk tulisan maupun presentasi, yang nantinya akan dijadikan buku kompetesi Biofarma / *Bio Farma's books of competency*. Buku ini nantinya akan berisi ilmu – ilmu yang berkaitan dengan perkembangan bisnis Bio Farma di masa yang akan datang. Selain narasumber berasal dari internal Bio Farma, di beberapa kesempatan juga mengundang narasumber dari luar Perusahaan untuk menambah wawasan karyawan.

Pada tahun 2018, telah dilakukan sebanyak 5 kali *sharing knowledge* yang melibatkan karyawan, dari level Staf sampai dengan level Kepala Divisi yang berasal dari berbagai macam latar belakang keilmuan. Kegiatan sharing *knowledge* ini mempunyai misi untuk meningkatkan soliditas antar karyawan dan menjalin hubungan komunikasi harmonis dan berkesinambungan di perusahaan.

PELAKSANAAN *COFFEE MORNING* SELAMA TAHUN 2018

Tanggal	Tema	Narasumber
Senin / 5 Maret 2018	Tantangan Bio Farma Di Era Digital	Sri Harsi Teteki (Direktur Pemasaran) Enda Nasution (Executif Director 1000 Star Up Digital Coordinator)
Rabu / 2 Mei 2018	"Budaya Digital dan Masyarakat Jepang"	Junita Sari Siregar
Rabu / 18 Juli 2018	Open House Museum "Menjejak Sejarah Museum Medis Indonesia dan Menghidupkan Museum sebagai Jejak Literasi"	Komunitas Literasi Kedokteran
Senin / 10 Sept 2018	Media Brief acara FRLN 2018	Adriansjah Azhari
Kamis, 1 Nov 2018	FGD Branding Strategy untuk perluasan Market Place Pelayanan Imunisasi	Yuswohady Managing DirectorInventure

PENGUMUMAN MELALUI INTRANET

Media intranet (e-mail) juga dimanfaatkan untuk sosialisasi berbagai aktivitas, pengumuman dan berita informal seperti pengumuman dari bagian SDM dan organisasi internal, penyelenggaraan kegiatan donor darah, berita duka cita, dan sebagainya. Selama tahun 2018 telah dilakukan sosialisasi aktivitas sebanyak 1.483 kali.

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	152
2	Februari	125
3	Maret	170
4	April	157
5	Mei	119
6	Juni	129
7	Juli	217
8	Agustus	181
9	September	68
10	Oktober	65
11	November	39
12	Desember	61

UPDATE WEBSITE

Bio Farma selalu melakukan update content website: www.biofarma.co.id

POSTING BERITA, ARTIKEL DAN LAIN-LAIN SELAMA TAHUN 2018

Tahun 2018	Jumlah Posting
Januari	9
Februari	7
Maret	10
April	5
Mei	7
Juni	2
Juli	9
Agustus	7
September	12
Oktober	12
November	20
Desember	8
Total	**108**

PENGUNJUNG WEBSITE SELAMA TAHUN 2018

Tahun 2018	Jumlah Pengunjung
Januari	6,155
Februari	7,102
Maret	6,769
April	44.998
Mei	6.158
Juni	3.292
Juli	7.576
Agustus	4.484
September	3.448
Oktober	8.153
November	3.637
Desember	3.226
TOTAL	**104.998**

UPDATE PORTAL BUMN

Bio Farma selalu melakukan pengisian dan update content portal BUMN : http://bumn.go.id/biofarma

Tahun 2018	Jumlah Pengisian& Update Content
Januari	9
Februari	7
Maret	10
April	7
Mei	7
Juni	2
Juli	10
Agustus	2
September	30
Oktober	12
November	8
Desember	4
TOTAL	**108**

PUSAT LAYANAN INFORMASI BIO FARMA

Bio Farma membuka layanan informasi konsumen melalui berbagai media komunikasi interaktif dimana konsumen atau masyarakat lainnya dapat menyampaikan pendapat, keluhan maupun pertanyaan melalui berbagai media seperti:

Menu Customer Care
Pada website perusahaan
www.biofarma.co.id
Portal Kementerian BUMN:
http://www.bumn.go.id/biofarma/kontak-kami/
Corporate blog: www.infoimunisasi.com

Bio Care : 1500810
Telepon : (62-22) 2033755
Faksimile : (62-22) 2041306
Email : mail@biofarma.co.id
Facebook : infoimunisasi
Twitter : @biofarmaID, @infoimunisasi
instagram : @biofarmaID

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Pada tanggal 13 Maret 2018, Bio Farma meluncurkan atau GO LIVE aplikasi *Enterprise Risk Management* secara resmi. Dengan peluncuran aplikasi *Enterprise Risk Management* ini, diharapkan setiap unit kerja lebih memahami semua aspek risiko yang dimilikinya, aplikasi *Enterprise Risk management (ERM)* ini menjadi dasar dan landasan yang kuat terhadap aspek risiko keuangan, bisnis, maupun strategis, termasuk aspek risiko kualitas, lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk aktivitas internal maupun eksternal perusahaan. Aplikasi *Enterprise Risk Management* ini dapat di akses di: http://bios64v1.biofarma.co.id/erm/index.aspx

KODE ETIK
(PEDOMAN PERILAKU / *CODE OF CONDUCT*)

Untuk tercapainya tujuan Perusahaan dalam jangka panjang, maka pelaksanaan GCG harus dilandasi oleh integritas yang tinggi dan diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ Perusahaan dan semua insan Bio Farma dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya Perusahaan.

PENGESAHAN PEDOMAN PERILAKU *(CODE OF CONDUCT)*

Merujuk kepada Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-08/DK/BF/12/2018; Nomor: PER-06965/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Perilaku *(Code of Conduct).* Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* (CoC) disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, dan mengendalikan kesesuaian tingkah laku Insan Bio Farma yang sejalan dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi misi Perusahaan. CoC ini disusun CoC ini senantiasa di sesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan bisnis Bio Farma.

PRINSIP-PRINSIP YANG DIMILIKI BIO FARMA UNTUK PENERAPAN KODE ETIK (PEDOMAN PERILAKU)

1. Nilai-nilai Perusahaan yang menggambarkan sikap moral Perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
2. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, Bio Farma sudah memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ Perusahaan dan insan Bio Farma. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan membentuk budaya Perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai Perusahaan.
3. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis Perusahaan dituangkan dan dijabarkan dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

Etika bisnis merupakan acuan bagi Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Penerapan nilai-nilai Perusahaan dan etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya Perusahaan. Setiap Perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati bersama dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku.

FUNGSI PEDOMAN PERILAKU BAGI BIO FARMA

1. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai Perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi organ Perusahaan dan semua insan Bio Farma
2. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

KEBERADAAN KODE ETIK

Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan Bio Farma diwajibkan untuk menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Perusahaan sehari-harinya.

PEDOMAN PENERAPAN KODE ETIK (PEDOMAN PERILAKU) DI BIO FARMA

Sebagai wujud kepedulian Bio Farma untuk penerapan kode etik (Pedoman Perilaku) maka Direksi Bio Farma telah mengeluarkan Surat Keputusan sbb:

1. Anggaran Dasar Perusahaan
2. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-06/DK/BF/12/2018; Nomor: PER-06963/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* di PT Bio Farma (Persero)
3. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-08/DK/BF/12/2018; Nomor: PER-06965/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Perilaku *(Code of Conduct).*

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan pedoman bagi insan Bio Farma dalam bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan tugas sehari-hari serta dalam berinteraksi dengan rekan sekerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Dengan demikian diharapkan lingkungan kerja Bio Farma dapat menjadi lingkungan kerja yang profesional dan menyenangkan sehingga seluruh potensi karyawan dapat dioptimalkan.

POKOK-POKOK KODE ETIK *(CODE OF CONDUCT)*

Pedoman Perilaku merupakan salah satu bentuk komitmen Bio Farma dalam rangka penerapan dan penegakan tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance / GCG*) dan merupakan sekumpulan komitmen yang berisi tentang kewajiban, larangan dan hubungan dengan stakeholders lainnya.

Kode Etik Perusahaan yang mengatur kewajiban yang harus ditaati setiap insan Bio Farma memuat:

BAB I
PENDAHULUAN

Daftar Isi
Visi, Misi, Philosophy,Value

BAB II ETIKA USAHA
CARA PERUSAHAAN MELAKUKAN BISNIS

1. Etika Terhadap Pelanggan
2. Etika Terhadap Pemasok/Mitra Bisnis
3. Etika Terhadap Kreditur
4. Etika Terhadap Pesaing
5. Etika Terhadap Media Massa
6. Etika Terhadap Penegak Hukum
7. Etika Terhadap Pemerintah/Negara
8. Etika Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup
9. Etika Terhadap Karyawan
10. Etika Terhadap Pemegang Saham

BAB III ETIKA KERJA
TATA PERILAKU MANAJEMEN DAN KARYAWAN

1. Kepatuhan Terhadap Hukum
2. Benturan Kepentingan
3. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Cindera Mata, Jamuan, Hiburan, Pemberian Donasi dan Fasilitas Lainnya
4. Kesempatan yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi
5. Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan
6. Pencatatan dan Penyusunan Data Perusahaan serta Integritas Laporan Keuangan
7. Perlindungan Informasi Perusahaan
8. Perlindungan Aset Perusahaan
9. Aktivitas Politik
10. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang dan Perjudian
11. Perilaku Etis Jajaran Manajemen dan Karyawan

BAB IV
MEKANISME PELAPORAN DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN

1. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
2. Penanganan terhadap Dugaan Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)
3. Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)

PAKTA INTEGRITAS UNTUK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (***GOOD CORPORATE GOVERNANCE***) DI PT BIO FARMA (PERSERO)

PAKTA INTEGRITAS UNTUK KARYAWAN

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (***GOOD CORPORATE GOVERNANCE***) DI PT BIO FARMA (PERSERO)

STANDAR PERILAKU YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN DALAM BERINTERAKSI DAN BERHUBUNGAN DENGAN *STAKEHOLDERS*

- Hubungan dengan Karyawan
- Hubungan dengan Pelanggan
- Hubungan dengan Pemasok/Mitra bisnis
- Hubungan dengan Kreditur
- Hubungan dengan Pesaing
- Etika terhadap Media Massa
- Etika terhadap Penegak Hukum
- Hubungan dengan Pemerintah
- Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
- Hubungan dengan Pemegang Saham
- Hubungan dengan Anak Perusahaan Patungan
- Hubungan dengan Organisasi Profesi
- Hubungan dengan Profesi Kesehatan (ASN) maupun Pegawai Swasta

STANDAR PERILAKU DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN MAUPUN DALAM BERINTERAKSI

- Kepatuhan Terhadap Hukum
- Pemberian Hadiah, Jamuan, Hiburan, Donasi dan Fasilitas Lainnya
- Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
- Kesempatan yang sama untuk mendapatkan Pekerjaan dan Promosi
- Kepedulian terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan
- Pencatatan dan Penyusunan Data perusahaan serta Integritas Laporan Keuangan
- Perlindungan Informasi Perusahaan
- Perlindungan Aset Perusahaan
- Kekayaan Intlektual
- Aktivasi Politik
- Perilaku Asusila, Penyalahgunaan Narkoba dan Obat Terlarang Perjudian, dan Penggunaan Senjata Api
- Penggunaan Media Sosial
- Promosi atau Iklan
- Sponsor untuk Profesi Kesehatan

PEDOMAN PERILAKU JUGA MENGATUR ANTARA LAIN :

BENTURAN KEPENTINGAN	GRATIFIKASI	ANTI SUAP DAN KORUPSI	PERILAKU ETIS TERHADAP BAWAHAN, ATASAN, DAN REKAN KERJA
• Situasi yang dapat Menimbulkan Benturan Kepentingan • Jenis Benturan Kepentingan • Sumber Penyebab Benturan Kepentingan • Langkah Preventif dan Penanganan terhadap Situasi yang dapat Menimbulkan Benturan Kepentingan • Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan • Faktor-Faktro Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan kepentingan • Sanksi atas Pelanggaran	• Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan • Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan • Gratifikasi yang Terkait dengan Kedinasan • Batasan Pemberian Gratifikasi • Mekanisme Pelaporan Gratifikasi • Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) • Pelaporan atas Pengendalian Gratifikasi		

ISI PEDOMAN PERILAKU *(CODE OF CONDUCT)*

Tujuan ditetapkannya Pedoman Perilaku adalah:

1. menjabarkan nilai-nilai dan standar etika yang selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan;
2. sebagai panduan perilaku bagi Insan Bio Farma dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab;
3. sebagai panduan bagi Insan Bio Farma untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan dalam menjalankan segala aktivitas Perusahaan;
4. sebagai panduan bagi Insan Bio Farma dalam melakukan interkasi dengan pihak lain untuk kepentingan Perusahaan dengan berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan beretika.

Manfaat Pedoman Perilaku adalah:

1. menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan yang menyeluruh;
2. mendorong kegiatan operasional Perusahaan agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah dan Pemangku Kepentingan (stakeholders) lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;
3. meningkatkan nilai Perusahaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada Pemangku Kepentingan (stakeholders) dalam berinteraksi dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik demi mewujudkan keberhasilan usaha jangka panjang;
4. meningkatkan keyakinan Pemegang Saham bahwa Perusahaan dikelola secara hati-hati (prudent), efisien, transparan, akuntabel dan fair untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepetingan Perusahaan;
5. menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan (stakeholders).

Standar perilaku yang diterapkan Perusahaan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan stakeholders

PENGUNGKAPAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL DI BIO FARMA

Setiap insan Bio Farma harus memiliki komitmen untuk dapat menyelaraskan diri dengan sistem nilai dan budaya kerja di Perusahaan. Oleh karena itu, seluruh insan Bio Farma wajib menempatkan diri untuk menyamakan dan menyatukan keyakinan dan tekad agar dapat menerapkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya kerja yang dianut Perusahaan, yang dikodifikasikan dalam Code of Conduct. Keberhasilan penerapan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) merupakan tanggung jawab dari setiap insan Bio Farma di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pada tanggal 26 Maret 2018, bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Bio Farma telah melaksanakan internalisasi dan sosialisasi Surat Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor: 01024/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Bio Farma (Persero) yang telah diperbaharui dengan SKB Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor: 01103/DIR/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero) dan diperbahui kembali dalam Peraturan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. PER-08/DK/BF/12/2018 No. PER-06965/DIR/XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Perilaku (Code Of Conduct) PT Bio Farma (Persero), dimana maksud dan tujuannya adalag sebagai pedoman bagi insan Bio Farma memahami, mencegah dan menaggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan, sebagi pedoman dalm mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan Di Perusahaan dan mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala benturan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)

Acara ini yang dihadiri oleh seluruh insan Bio Farma dan diakhiri dengan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan atas Pedoman Perilaku.

PAKTA INTEGRITAS

Setiap insan Bio Farma wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen insan Bio Farma untuk melaksanakan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Bio Farma (Persero).

Setiap 1 tahun sekali seluruh insan Bio Farma diwajibkan secara tertulis untuk menyatakan kesanggupan mentaati dan melaksanakan setiap butir Pedoman Perilaku, yang diwujudkan dalam suatu pernyataan kepatuhan yang ditanda tangani oleh setiap insan Bio Farma sebagai salah satu syarat kelanjutan hubungan kerja dengan perusahaan.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Untuk penyebarluasan kode etik (*Code of Conduct*), Bio Farma melakukannya dengan cara sosialisasi terhadap Pedoman Perilaku untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh insan Bio Farma bahwa pentingnya melaksanakan Pedoman Perilaku ini.

Sosialisasi Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Setiap insan Bio Farma diberikan buku saku sekaligus penandatanganan pakta integritas yang merupakan komitmen insan Bio Farma untuk melaksanakan Pedoman Perilaku PT Bio Farma (Persero).
2. Manajemen memberikan pemahaman dan kesadaran kepada karyawan untuk menerapkan Pedoman Perilaku melalui acara sosialisasi yang dilaksanakan dengan cara tatap muka dengan seluruh karyawan minimal 1 (Satu) tahun sekali.
3. Aplikasi Code of Conduct yang berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar pemahaman seluruh karyawan terhadap Code of Conduct (berupa kuesioner).
4. Website, intranet, banner
5. Aplikasi GCG
6. Penyebaran kuesioner secara berkala setiap tahun

MEKANISME PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU TERMASUK PELAPORAN DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN

Penegakan dan sanksi bagi pelanggar Code of Conduct diatur Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-08/DK/BF/12/2018 Nomor: PER-06965/DIR/XII/2018 Tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Bio Farma (Persero).

Penegakan dan sanksi pelanggaran kode etik dilaksanakan Bio Farma melalui mekanisme *Whistle Blowing System*.

Adapun mekanisme pelaporan pelanggaran sebagai berikut:

1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku, maka insan Bio Farma berkewajiban melaporkan kepada :
   a. Atasan langsung yang bersangkutan. Apabila Insan Bio Farma tidak dapat melaporkan kepada atasan langsung karena Benturan Kepentingan dengan atasannya, maka dapat mendiskusikan hal tersebut dengan pihak-pihak berikut:
      - Atasan dari atasan langsung yang bersangkutan;
      - Divisi SDM;
      - Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko; atau
      - Serikat Pekerja;
   b. Kotak Pengaduan Pelanggaran / *Whistleblowing System*.
2. Pelaporan dilakukan atas dasar itikad baik dan bukan didasari atas kehendak buruk atau fitnah.
3. Disamping pihak intenal Perusahaan, pelaporan pelanggaran Pedoman Perilaku juga dapat dilakukan oleh pihak ekternal Perusahaan seperti Pelanggan, Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) lainnya.

KEWENANGAN MENANGANI DUGAAN PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU

Kewenangan menangani dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku diatur secara berjenjang dimana tim yang menangani dugaan pelanggaran dipimpin oleh pejabat jabatannya yang satu tingkat lebih tinggi dari terduga pelaku pelanggaran.

Terduga Pelaku Pelanggaran	Pejabat Yang Menangani Dugaan Pelanggaran
Insan Bio Farma, selain karyawan di Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko	Pejabat di Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko
Karyawan di Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko	Direktur Utama
Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris	Komisaris Utama
Komisaris Utama	Pemegang Saham

SANKSI UNTUK MASING-MASING JENIS PELANGGARAN YANG DIATUR DALAM KODE ETIK (NORMATIF)

Dewan Komisaris, Direksi, semua Insan Bio Farma, Pemasok, Mitra Bisnis atau Pemangku Kepentingan (stakeholders) lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (Code of Conduct) akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Direksi atau tenaga kerja Bio Farma yang terbukti melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku dan peraturan disiplin dan tata tertib

yang berlaku di Perusahaan. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

2. Pemberian sanksi diberikan oleh Divisi SDM kepada tenaga kerja yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi bagi Organ Pendukung Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Pemegang Saham.
5. Apabila Pemasok, Mitra Bisnis atau Pemangku Kepentingan (stakeholders) lainnya melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan prosedur Perusahaan yang relevan, apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

DASAR PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU DI BIO FARMA

Penegakan Pedoman Perilaku diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan (Bio Farma) dengan Serikat Pekerja Karyawan Bio Farma Bab XVII: Disiplin dan Tata Tertib Kerja, Pasal 69 s.d. 81. Sedangkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Bio Farma yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui SK Nomor: AHU-61576.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK BESERTA SANKSI YANG DIBERIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Pelanggaran pedoman perilaku yang dilakukan oleh insan Bio Farma dimonitoring dan dievaluasi oleh Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko dengan kewenangan untuk memberikan punishment sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Perusahaan. Sampai 31 Desember 2018 di Bio Farma tidak terdapat pelanggaran kode etik sehingga tidak disajikannya jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun 2018.

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, angggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan Perusahaan.

PENGUKURAN PEMAHAMAN PEDOMAN PERILAKU

Untuk mengukur pemahaman Pedoman Perilaku, Bio Farma melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh tenaga kerja. Dari hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden Bio Farma didapat kesimpulan bahwa Pedoman Perilaku efektif diterapkan di lingkungan kerja Bio Farma baik dalam berinteraksi dengan stakeholders maupun dalam praktik prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

PEDOMAN TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, Direksi BUMN dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.
2. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan diatur di dalam Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-08/DK/BF/12/2018 Nomor: PER-06965/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)*, dimana maksud dan tujuannya adalah sebagai pedoman bagi Insan Bio Farma memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan, sebagai pedoman dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan, dan mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Terkait ketentuan tersebut, seluruh anggota Direksi Bio Farma telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan yang dibuat tanggal 26 Maret 2018 yang isinya adalah sebagai berikut:

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* di PT Bio Farma (Persero), maka dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan.
3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai:

a. Anggota Direksi pada BUMN lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturankepentingan;
b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness di dalam pengelolaan perusahaan.
5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham perusahaan sejenis.
6. Tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain yang terkait dengan jabatan saya di Biofarma dimana saya atau keluarga saya mempunyai kepentingan atau memperoleh manfaat karenanya.
7. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah.
8. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Direksi lainnya atau dengan Dewan Komisaris.
9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan.

Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas pernyataan yang Saya buat, Saya bersedia dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2018, belum pernah terjadi peristiwa-peristiwa terkait benturan kepentingan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

HAL-HAL YANG HARUS PERHATIKAN OLEH DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, INSAN BIO FARMA DAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.
2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain
3. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta.
4. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan
5. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan.

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN DI BIO FARMA

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung/tidak langsung, sejenis/tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk jabatan lainnya, yang ada hubungannya dengan aktivitas bisnis Perusahaan;
5. Situasi dimana Insan Bio Farma memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa prosedur yang seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang mengawasi atau yang diawasi;
7. Situasi dimana melakukan penilaian atas sesuatu hal, yang mana sesuatu hal tersebut merupakan hasil kerja dari Insan Bio Farma yang bersangkutan;
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan/wewenang;
9. Situasi dimana memungkinan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk memenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa di Perusahaan;
10. Bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya (moonlight/outside employment).

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN DI BIO FARMA

KEBIJAKAN DARI INSAN BIO FARMA YANG BERPIHAK AKIBAT PENGARUH, HUBUNGAN DEKAT, KETERGANTUNGAN, DAN/ATAU PEMBERIAN GRATIFIKASI

1. Pemberian izin, rekomendasi dan/atau persetujuan dari Insan Bio Farma yang diskriminatif.
2. Pengangkatan Insan Bio Farma berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Insan Bio Farma lainnya atau pihak lainnya yang melanggar prosedur.
3. Pemilihan Mitra Bisnis oleh Insan Bio Farma berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
4. Menggunakan aset Perusahaan dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
5. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN DI BIO FARMA

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas dari wewenang yang dimilikinya;
2. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Bio Farma dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
3. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
4. Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Bio Farma yang disebabkan karena aturan, Pedoman, Prosedur baku atau uraian pekerjaan (Job descriptions)yang tidak jelas;
5. Kepentingan pribadi (Vested interest) yaitu keinginan I kebutuhan Insan Bio Farma mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

PRISIP DASAR

1. Insan Bio Farma harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan Benturan Kepentingan.
2. Insan Bio Farma yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan DILARANG untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Selanjutnya yang bersangkutan harus mengungkapkan kejadian/ keadaan Benturan Kepentingan yang dialami/ diketahui dan tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
3. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan Bio Farma dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut.
4. Insan Bio Farma yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung.
5. Pimpinan unit kerja dan atas langsung harus mengendalikan dan menangani Benturan Kepentingan secara memadai.

MEKANISME PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Bio Farma wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Atasan Langsung Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan Bio Farma yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran I *Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Insan Bio Farma atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System di Perusahaan.Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir 2 di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Komitmen dan Keteladanan Manajemen
   Manajemen wajib mempergunakan kewenangannya secara wajar, baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan Insan Bio Farma, kepentingan masyarakat dan berbagai faktor lain.
2. Partisipasi dan Keterlibatan Para Insan Bio Farma
   Implementasi kebijakan untuk mencegah Benturan

Kepentingan membutuhkan keterlibatan para Insan Bio Farma. Para Insan Bio Farma harus sadar dan paham tentang isu Benturan Kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya Benturan Kepentingan.Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Insan Bio Farma, dapat dilakukan antara lain dengan:

a. Melakukan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman Insan Bio Farma akan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
b. Memberi bantuan konsultasi bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.

3. Perhatian Khusus Atas Hal Tertentu Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:
   a. Hubungan afiliasi;
   b. Gratifikasi;
   c. Pekerjaan tambahan;
   d. Informasi orang dalam;
   e. Kepentingan pribadi dalam pengadaan barang/jasa di Perusahaan;
   f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
   g. Kedudukan di organisasi-organisasi lain di mana yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium;
   h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
   i. Perangkapan jabatan.
4. Langkah – langkah Preventif Berbagai langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan.

TERHADAP SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN, MAKA SETIAP LNSAN BIO FARMA DAPAT MELAKUKAN HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. Secara Profesional akan menghindari situasi Benturan Kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain;
2. Harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung Benturan Kepentingan;
3. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
4. Tidak menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan;
5. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;
6. Tidak memanfaatkan dan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau yang dapat menghambat perkembangan Perusahaan;
7. Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perusahaan;
8. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah dan/atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan oleh Perusahaan;
9. Mematuhi Kode Etik Perilaku *(Code of Conduct)* yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Insan Bio Farma agar selalu mengikuti prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* dan memproteksi diri dari tindakan Benturan Kepentingan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Benturan Kepentingan ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH DAN DONASI

Pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
3. Donasi oleh perusahaan ataupun pemberian suatu aset perusahaan kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan, donasi untuk amal dapat dibenarkan

4. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memberikan sesuatu dan atau menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

BUDAYA PERUSAHAAN

PERNYATAAN MENGENAI BUDAYA PERUSAHAAN *(CORPORATE CULTURE)*

Bio Farma dalam mengembangkan kegiatan usaha membutuhkan budaya perusahaan dalam bentuk pedoman tertulis, yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

PEDOMAN BUDAYA PERUSAHAAN

Pedoman yang memuat tentang Nilai-nilai Perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor: 01103/DIR/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero) No: KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor: 01024/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero). Budaya Perusahaan (corporate culture) telah dirumuskan dengan icon ”PITIC “ dengan uraian sebagai berikut:

Setiap organ Perusahaan yang bersikap dan berpikir secara profesional, memiliki integritas yang tinggi, bekerja dalam suatu tim, penuh inovasi dan berorientasi terhadap pelayanan konsumen.

P = Profesional

Berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, efisien, efektif berorientasi ke depan, dan taat prosedur.

I = Integritas

Jujur, transparan dan dapat dipercaya sesuai dengan tujuan Perusahaan.

T = *Teamwork*

Bekerjasama dengan menghargai peran dan pendapat orang lain.

I = *Innovation*

Melakukan perbaikan dan pengembangan secara terus menerus untuk mengahasilkan gagasan baru.

C = *Cusstomer Oriented*

Memahami kebutuhan dan memberikan solusi yang tepat kepada customer.

Dalam upaya meningkatkan budaya kerja di Perusahaan, pada tahun 2018 telah dilakukan kegiatan survei kepuasan karyawan PT Bio Farma. Output yang diharapkan dari survei kepuasan karyawan Bio Farma ini adalah:

1. Data mengenai kebutuhan karyawan Bio Farma terhadap organisasi Bio Farma
2. Data mengenai kelemahan-kelemahan organisasi berdasar penilaian karyawan
3. Rekomendasi kebijakan organisasi terkait dengan kebutuhan karyawan dan kelemahan organisasi yang ditemui

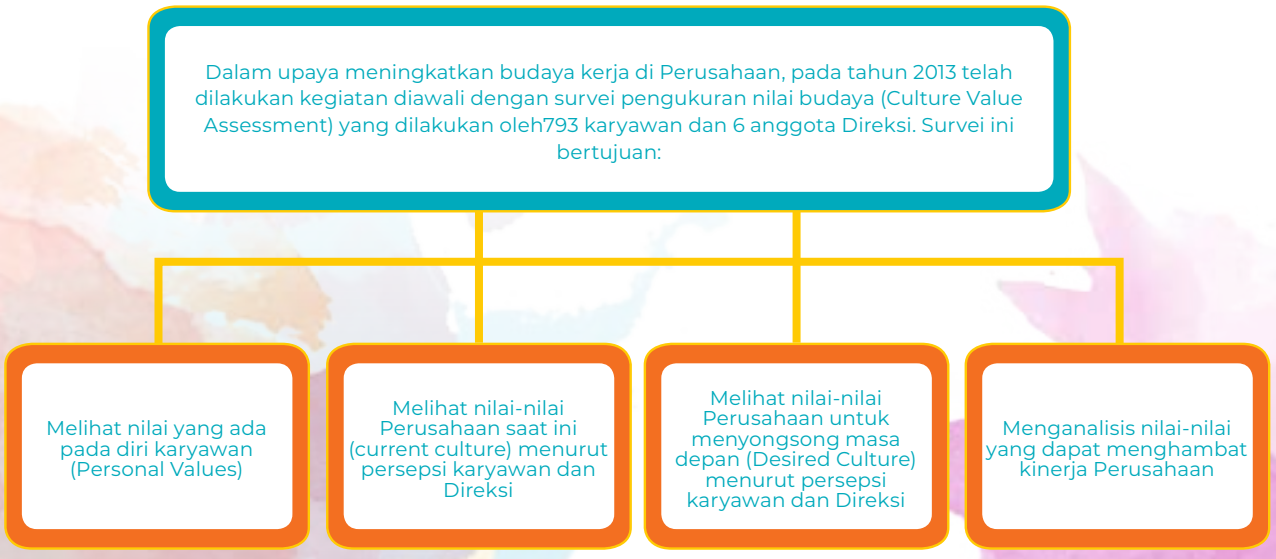

Pasca pengukuran nilai budaya (Culture Value Assessment) akan dirancang program internalisasi nilai-nilai perusahaan secara sistematis dan komprehensif dengan berlandaskan kepada nilai-nilai yang muncul dari internal Perusahaan. Dengan proses tersebut diharapkan nilai-nilai yang dibangun, mampu melekat kuat pada setiap pribadi karyawan dan menjadi budaya yang positif untuk tumbuh-kembangnya Perusahaan.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN

1. Organ Perusahaan dan insan Bio Farma melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan
2. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi dan insan Bio Farma melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan
3. Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

KERAHASIAAN INFORMASI

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham serta Insan Bio Farma harus menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham serta Insan Bio Farma dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi rencana pengambil-alihan, penggabungan usaha dan pembelian kembali saham
3. Setiap mantan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Insan Bio Farma, serta Pemegang Saham yang telah mengalihkan sahamnya, dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia perusahaan yang diperolehnya selama menjabat atau menjadi pemegang saham di Perusahaan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik perusahaan.

PENGUNGKAPAN MENGENAI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN *(WHISTLEBLOWING SYSTEM)*

Whistleblowing System **merupakan suatu *system* yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam suatu perusahaan serta mendukung asas kewajaran dalam hubungan antara Perusahaan dengan *Stakeholder***

Pelaporan Pelanggaran *(whistleblowing)* adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun Pemangku Kepentingan, yang dilakukan oleh insan Bio Farma atau Pimpinan Bio Farma kepada Pimpinan Bio Farma atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini dilakukan secara rahasia (*confidential*), iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* – WBS) merupakan sistem yang mengelola pengaduan/ penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim, dan mandiri (*independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Bio Farma dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

YANG TERMASUK AKTIVITAS PELANGGARAN

1. Melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba, perusakan barang.
2. Melanggar pedoman etika perusahaan, misalnya benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.
3. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, ataupun kebijakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.
5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja

Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) adalah karyawan Bio Farma, tetapi tidak menutup kemungkinan pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.

Sistem ini dilaksanakan berlandaskan pada nilai budaya perusahaan yang menyatakan bahwa setiap organ Perusahaan yang bersikap dan berpikir secara profesional, memiliki integritas yang tinggi, bekerja dalam suatu tim, penuh inovasi dan berorientasi terhadap pelayanan konsumen. *Whistleblowing System* ini merupakan bukti nyata dilaksanakannya nilai-nilai budaya perusahaan.

Nilai tambah yang dicapai oleh perusahaan melalui penerapan program ini adalah adanya sistem pengawasan dan pengendalian internal Perusahaan yang dapat mendeteksi kejadian risiko operasional khususnya kejadian kecurangan *(fraud)* secara dini dan memungkinkan Perusahaan untuk dapat mengatasi kejadian risiko tersebut secara cepat.

PERBEDAAN ANTARA SAKSI DENGAN PELAPOR

Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi.

Pelapor adalah orang yang melaporkan adanya tindak pelanggaran, tetapi mungkin ia tidak melihat dan mendengar sendiri pelaksanaan tindak pelanggaran tersebut, tetapi mempunyai bukti-bukti surat atau alat bukti petunjuk (rekaman, gambar, dlsb.) bahwa telah terjadi tindak pelanggaran.

MANFAAT DARI PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran
7. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

DASAR HUKUM PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

1. Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 9 (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
2. UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 31 dan pasal 41 ayat (2) butir e. dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.
3. PP No.71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6.
4. Uu No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasl 39 s/d 43
5. PP No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf I dan pasal 158 ayat (1) huruf i
7. Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Lembaran Negara RI Nomor 4297).
8. UU No.7 tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), Section 33 UNCAC;
9. Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat 1;
10. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
11. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1997 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) .
12. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.
13. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
14. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada BUMN.
15. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN.

PELAPORAN PERORANGAN
Pelapor Ada Indentitas
- **Foto *copy* Indentitas**
- **Foto *copy* dokumen pendukung**

Pelapor Tida Ada Indentitas
Foto copy dokumen pendukung

PERWAKILAN *STAKEHOLDER*
Foto *copy* Indentitas *Stakeholder* & Perwakilan
Surat Kuasa *Stakeholder*

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TENTANG PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

1. PKB PT Bio Farma (Persero) dengan Serikat Pekerja
2. Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-06/DK/BF/12/2018 Nomor: PER-06963/DIR/XII/2018 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di PT Bio Farma (Persero)
3. Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: 02759/DIR/VII/2016 tentang Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Kerja.

Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: PER-08/DK/BF/12/2018 Nomor: PER-06965/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)*.

TUJUAN DITETAPKANNYA KEBIJAKAN

1. Sebagai pedoman pelaksanaan dalam menangani pengaduan pelanggaran dari internal dan eksternal Perusahaan untuk menjamin mekanisme sistem pelaporan eksternal Perusahaan untuk menjamin mekanisme sistem pelaporan pelanggaran *(Whistle Blowing System)* berjalan secara efektif.
2. Sebagai upaya dalam pengungkapan pelanggaran di Perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika dan hukum.
3. Melalui sistem pelaporan pelanggaran *(Whistle Blowing System)* akan muncul persepsi apabila melakukan Kecurangan *(Fraud)*, pelanggaran hukum dan etika serta misconduct lainnya maka ada potensi untuk dapat terdeteksi dan dilaporkan sehingga mencegah melakukan pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari penggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum keselamatan kerja dan reputasi.

RUANG LINGKUP PENERAPAN PEDOMAN

Kebijakan ini berlaku bagi Insan Bio Farma dengan ketentuan pengaturan sebagai berikut:

1. Pelapor Pelanggaran adalah Insan Bio Farma dan Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)* lainnya.
2. Terlapor Pelanggaran adalah Insan Bio Farma yang diduga melakukan pelanggaran.

Sistem Pelaporan Pelanggaran digunakan apabila pengaduan/penyingkapan dianggap tidak efektif bila disampaikan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait).

KRITERIA UMUM PELAPORAN PELANGGARAN

1. Pelapor dapat mengungkapkan identitas dengan jelas (nama, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi) ataupun anonim.
2. Pelaporan dilakukan melalui sarana pelaporan yang telah tersedia.
3. Isi laporan dugaan pelanggaran dapat berupa:
   a. Jenis pelanggaran yang dilaporkan
   b. Pelaku pelanggaran dan pihak yang terlibat
   c. Lokasi kejadian pelanggaran
   d. Waktu kejadian pelanggaran
   e. Kronologis kejadian pelanggaran
   f. Nilai kerugian/dampak pelanggaran
   g. Bukti yang mendukung pelaporan

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM)* SECARA LANGSUNG

1. Penerimaan Pengaduan Pelanggaran
2. Penanganan Dugaan Pelanggaran
3. Pembentukan Tim Investigasi
4. Komunikasi dengan Pelapor
5. Pelaporan atas Sistem Pelaporan Pelanggaran

PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Admin Pelaporan Pelanggaran adalah staf Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko.
   Tugasnya adalah menerima, meregister dan mengadministrasikan Pelaporan Pelanggaran yang masuk baik melalui e-mail, surat, dropbox maupun aplikasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengelola Pelaporan Pelanggaran.
   Admin Pelaporan Pelanggaran menjaga kerahasiaan identitas Pelapor sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor.
2. Pengelola Pelaporan Pelanggaran adalah Pejabat di Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko.
   Tugasnya adalah menerima Pelaporan Pelanggaran yang diteruskan oleh Admin Pelaporan Pelanggaran dan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pelapor, menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi dan melaporkan kepada Direktur Utama (untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan) atau kepada Komisaris Utama (untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris)
3. Tim investigasi dibentuk oleh Direksi untuk pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan, sedangkan untuk pengaduan pelanggaran yang diduga oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris dibentuk oleh Dewan Komisaris.
   Tugasnya adalah melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan, menyusun Berita Acara Hasil Investigasi dan melaporkan kepada Direktur Utama (untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja) atau kepada Komisaris Utama (untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris). Tim investigasi memiliki akses operasional dan informasi terhadap seluruh unit yang diinvestigasi.

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN *(WHISTLEBLOWING SYSTEM)* BERBASIS WEBSITE

Di tahun 2015, Bio Farma mulai membangun sistem pelaporan pelanggaran berbasis Website dengan nama Aplikasi WBS (*Whistleblowing System*).

Pengembangan WBS merupakan salah satu upaya Bio Farma untuk menegakkan etika bisnis, etika kerja, serta upaya pemberantasan KKN. Sistem WBS memungkinkan seluruh Insan Bio Farma dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan laporan dugaan tindakan pelanggaran dan kecurangan (fraud) dan bentuk pelanggaran etika lainnya yang terjadi di Perusahaan.

Pelapor dapat melaporkan secara online melalui sistem berbasis web dengan alamat http://aplikasi.biofarma.co.id/gcg. Mekanisme pelaporan pelanggaran *(Whistle Blowing System)* sebagai berikut:

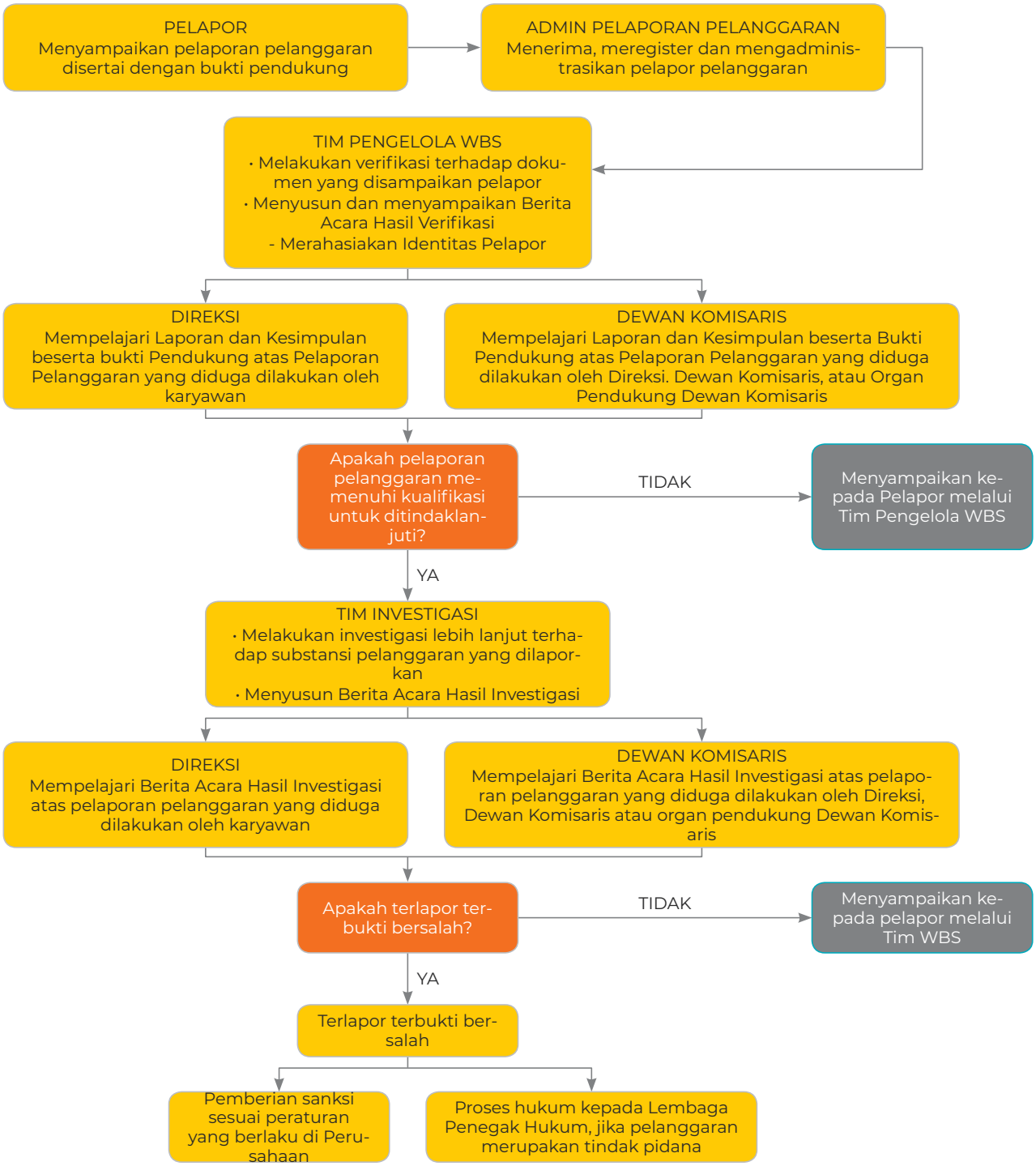
PELAPOR
Menyampaikan pelaporan pelanggaran disertai dengan bukti pendukung
ADMIN PELAPORAN PELANGGARAN
Menerima, meregister dan mengadministrasikan pelapor pelanggaran
TIM PENGELOLA WBS
· Melakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan pelapor
· Menyusun dan menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi
- Merahasiakan Identitas Pelapor
DIREKSI
Mempelajari Laporan dan Kesimpulan beserta bukti Pendukung atas Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan
DEWAN KOMISARIS
Mempelajari Laporan dan Kesimpulan beserta Bukti Pendukung atas Pelaporan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris, atau Organ Pendukung Dewan Komisaris
Apakah pelaporan pelanggaran memenuhi kualifikasi untuk ditindaklanjuti?
TIDAK
Menyampaikan kepada Pelapor melalui Tim Pengelola WBS
YA
TIM INVESTIGASI
· Melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan
· Menyusun Berita Acara Hasil Investigasi
DIREKSI
Mempelajari Berita Acara Hasil Investigasi atas pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan
DEWAN KOMISARIS
Mempelajari Berita Acara Hasil Investigasi atas pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau organ pendukung Dewan Komisaris
Apakah terlapor terbukti bersalah?
TIDAK
Menyampaikan kepada pelapor melalui Tim WBS
YA
Terlapor terbukti bersalah
Pemberian sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan
Proses hukum kepada Lembaga Penegak Hukum, jika pelanggaran merupakan tindak pidana

MEDIA PELAPORAN

a. Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) yang diduga dilakukan oleh Karyawan ditujukan kepada Direksi yang disampaikan melalui :
   - Email ke : pelaporan.wbs@biofarma.co.id
   - Surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos dengan alamat :
     Direksi PT Bio Farma (Persero)
     Up : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
     Jalan Pasteur No. 28 Bandung 40161
   - Drop Box di kantor Perusahaan
   - Aplikasi GCG dengan alamat portal.biofarma.co.id (media bagi tenaga kerja Bio Farma sebagai Pelapor)

b. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris ditujukan kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui:
   - Email ke : pelaporan.wbs@biofarma.co.id
   - Surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dengan cara diantar langsung atau melalui pos dengan alamat:
     Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero)
     Up : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
     Jalan Pasteur No. 28 Bandung 40161
   - Drop Box di kantor Perusahaan

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR PELANGGARAN *(WHISTLEBLOWER)*

Dalam penerapan WBS, Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran *(Whistleblowing)* **sebagai berikut:**

1. Menjamin perlindungan kerahasiaan atas identitas dari pelapor dan akan menggunakan berbagai cara untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaporan pelanggaran yang terjadi di Bio Farma dan menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya.
2. Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan. Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas ia juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini sebagai bukti komitmen Perusahaan dalam melindungi pelapor.
3. Bagaimana seorang pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya dari terlapor
4. Perlindungan dari pemecatan, penurunan jabatan atau grade, penundaan kenaikan grade atau berkala, tekanan, tindakan fisik
5. Perlindungan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya

Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beriktikad baik, Perusahaan juga menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur pada

1. Pasal 43 UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Pasal 13 UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Pasal 5 PP No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu
   a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata
   b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental
   c. Perlindungan terhadap harta Pelapor
   d. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau
   e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Bila dirasakan perlu, pelapor dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai UU No.13 tahun 2006. Lampiran 1 Pedoman ini memuat panduan berupa checklist hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan perlindungan pelapor.

Kebijakan perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada Pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan merupakan laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan internal Perusahaan.

PENANGANAN PENGADUAN

Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran diatur dalam SK Direksi Nomor: 01026/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013.

PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

a. Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) yang diduga dilakukan oleh Karyawan ditujukan kepada Direksi yang disampaikan melalui :

- Email ke : HYPERLINK "mailto:pelaporan.wbs@biofarma.co.id" pelaporan.wbs@biofarma.co.id
- Surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos dengan alamat :
  Direksi PT Bio Farma (Persero)
  Up : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
  Jalan Pasteur No. 28 Bandung 40161
- Drop Box di kantor Perusahaan
- Aplikasi GCG dengan alamat portal.biofarma.co.id (media bagi tenaga kerja Bio Farma sebagai Pelapor)

b. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris ditujukan kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui :
   - Email ke : HYPERLINK "mailto:pelaporan.wbs@biofarma.co.id" pelaporan.wbs@biofarma.co.id
   - Surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dengan cara diantar langsung atau melalui pos dengan alamat :
     Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero)
     Up : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
     Jalan Pasteur No. 28 Bandung 40161
   - Drop Box di kantor Perusahaan

PROSES PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) menerima pelaporan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pelapor.
2. Menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi yang didalamnya antara lain memuat resume dan rekomendasi kepada Direktur Utama/ Dewan Komisaris (sesuai jalur pelaporan) apakah pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor cukup bukti untuk ditindaklanjuti kepada tahap berikutnya atau tidak.
3. Menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Direktur Utama/Dewan Komisaris (sesuai jalur pelaporan) dan jika diperlukan melakukan presentasi kepada Direktur Utama/Dewan Komisaris.
4. Direksi atau Dewan Komisaris akan mempelajari laporan dan kesimpulan dari Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) beserta bukti pendukung untuk kemuadian menetapkan apakah Pengaduan Pelanggaran perlu untuk ditindak lanjut ke tahap Investigasi atau tidak perlu (ditutup).
5. Pelaksanaan verifikasi oleh Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) terhadap Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing)* yang masuk dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya.
6. Dalam hal Direksi/Dewan Komisaris memutuskan bahwa Pelaporan Pelanggaran tidak cukup bukti sehingga proses pemeriksaan pelaporan dihentikan, maka keputusan tersebut akan disampaikan kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS). Selanjutnya Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) akan menginformasikan keputusan tersebut kepada Pelapor.
7. Dalam hal Direksi/Dewan Komisaris memutuskan bahwa Pelaporan Pelanggaran cukup bukti untuk ditindaklanjuti kepada tahap investigasi, maka Berita Acara Hasil Verifikasi beserta dokumen-dokumen pendukung akan disampaikan kepada Tim Investigasi.

TINDAKAN LANJUTAN PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Tim Investigasi

h. Tim Investigasi menerima laporan dari Tim Pengelolaan *Whistleblowing System*.
i. Tim investigasi kemudian akan melakukan investigasi. Pelaksanaan Investigasi oleh Tim Investigasi terhadap Pelaporan Pelanggaran yang diterima dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya.
j. Membuat Berita Acara Hasil Investigasi dan melaporkan kepada Direktur Utama (untuk dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan) atau kepada Dewan Komisaris (untuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris) jika diperlukan Tim Investigasi dapat mempresentasikan hasil kerjanya kepada Direksi/ Dewan Komisaris.
k. Mendokumentasikan seluruh proses investigasi terkait bukti pendukung, kertas kerja, berita acara maupun dokumen lainnya.

2. Direksi

a. Direksi menerima laporan dari Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* atas dugaan pelanggaran.
b. Direksi menugaskan tim investigasi untuk melakukan investigasi.
c. Berdasarkan Berita Acara Hasil Investigasi, Direksi akan mempelajari dan memutuskan.
d. Keputusan atas hasil investigasi akan disampaikan oleh Direksi kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System* sesuai dengan jalur pelaporan untuk selanjutnya disampaikan kepada Terlapor.
e. Mendokumentasikan seluruh proses investigasi terkait bukti pendukung, kertas kerja, berita acara maupun dokumen lainnya.

3. **Dewan Komisaris**
   a. Dewan Komisaris menerima laporan dari Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi/Dewan Komisaris
   b. Selanjutnya Dewan Komisaris akan melakukan investigasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada Sistem Pedoman Dugaan Pelanggaran.
   c. Berdasarkan Berita Acara Hasil Investigasi, Dewan Komisaris akan mempelajari dan memutuskan.
   d. Keputusan atas hasil investigasi akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System* sesuai dengan jalur pelaporan untuk selanjutnya disampaikan kepada Terlapor.
   e. Mendokumentasikan seluruh proses investigasi terkait bukti pendukung, kertas kerja, berita acara maupun dokumen lainnya.

KOMUNIKASI DENGAN PELAPOR

1. Komunikasi dengan Pelapor akan dilakukan melalui Tim Pengelola *Whistleblowing System*. Dalam komunikasi ini, Pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak
2. Bila pelapor adalah karyawan Perusahaan maka Perusahaan memberikan informasi perkembangan penanganan hasil Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing)* tersebut. Pemberian informasi ini dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara pelapor dengan Perusahaan. Pepmbocoran sifat kerahasiaan ini oleh Pelapor akan menhapuskan kewajiban Perusahaan atas jaminan kerahasiaan yang diberikan kepadanya dan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan kepada Pelapor.
3. Dalam hal Pelapor orang luar dan bukan Karyawan Perusahaan, kebijakan komunikasi dengan Pelapor ini dapat diberikan kepadanya. Hal ini berlaku bila ia bersedia menandatangani kesepakatan tertulis tentang kerahasiaan informasi baik yang ia terima dari Perusahaan, maupun yang disampaian kepada Perusahaan.

HASIL PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Atas rekomendasi oleh Tim Investigasi, Direksi mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, Apabila hasil investigasi terbukti bersalah maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka akan ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum. Apabila hasil investigasi tidak terbukti adanya pelanggaran oleh Terlapor maka dinyatakan tidak bersalah.
2. Atas rekomendasi oleh Dewan Komisaris, apabila menyangkut Direksi, Komisaris menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila menyangkut Komisaris, Pemegang Saham menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan pengaduan akan ditutup dan dituangkan dalam Berita Acara Tindak Lanjut Selesai.

PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Pemanuatan penanganan Pelaporan Pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS).
   - Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* membuat laporan secara berkala kepada Direksi/Dewan Komisaris sesuai dengan jalur pelaporan mengenai Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing)* yang masuk, yang diinvestigasi dan yang telah selesai diproses.
2. Direksi melaporkan secara berkala perkembangan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran kepada Dewan Komisaris.
3. Ringkasan perkembangan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dilaporkan dalam Laporan Tahunan *(Annual Report)*.

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk menjamin efektivitas penerapan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dilakukan monitoring dan evaluasi Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran secara berkala minimal satu tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal pencanangan sistem ini dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis perseroan maupun peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi ini dapat dilakukan sendiri oleh Direksi melalui Satuan Pengawasan Intern atau menggunakan pihak luar yang independen. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran maupun melakukan pemantauan atas rekomendasi perbaikan. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan kepada Direksi.

SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN *(WISTLEBLOWING SYSTEM)*

Perusahaan melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) kepada seluruh Insan Bio Farma untuk memberikan pemahaman atas kebijakan Pelaporan Pelanggran (WBS). Sosialiasi dilakukan juga kepada Pemangku Kepentingan *(Stakeholder)* lainnya melalui situs (website) Perusahaan.

TIM PENGELOLA *WISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

Tim melakukan pengelolaan atas laporan pelanggaran dan melakukan perlindungan terhadap pelapor. Tim ini menerima pelaporan pelanggaran, menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh tim investigasi tanpa membuka identitas pelapor. Tim ini bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor. Untuk keperluan pengelolaan laporan dan perlindungan pelapor, tim mendapatkan bantuan hukum, keuangan dan operasional bila diperlukan. Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No: 01390/DIR/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 yng telah diperbaharui dengan SK No. 04043/DIR/IX/2014 tanggal 04 September 2014 yang diketuai oleh Direktur Utama.

TUGAS TIM PENGELOLA *WISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)

1. Menerima laporan atas adanya dugaan pelanggaran dari pelapor.
2. Menjaga kerahasiaan pelapor dan menyimpan identitas pelapor pada tempat yang aman.
3. Memferifikasi laporan atas dugaan pelanggaran yang masuk, dengan cara memastikan bahwa laporan tersebut telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan kategori yang ditetapkan.
4. Membuat berita acara hasil verifikasi laporan dugaan pelanggaran dan rekomendasi tindak lanjut.
5. Memfasilitasi perlindungan kepada pelapor.
6. Membuat laporan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Direksi, yang meliputi jumlah pengaduan, kategori pengaduan, status pelaporan dugaan pelanggaran serta media yang digunakan oleh pelapor.

TIM INVESTIGASI

Tim investigasi bertugas mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk memastikan bahwa memang telah terjadinya pelanggaran. Jika sudah terdapat bukti-bukti yang mencukupi, maka Tim Investigasi membuat rekomendasi kepada Direktur Utama untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Tetapi bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mencukupi, maka proses investigasi dihentikan dan laporan pelanggaran tidak dilanjutkan. Untuk keperluan investigasi tim mendapatkan bantuan hukum, keuangan dan operasional terhadap seluruh unit yang diinvestigasi.

TUGAS TIM INVESTIGASI

1. Melakukan investigasi terhadap laporan pelanggaran.
2. Memastikan terjadinya tindakan pelanggaran dengan bukti-bukti yang mencukupi.
3. Menentukan nilai kerugian/dampak atas tindakan pelanggaran.
4. Berkoordinasi dengan investigator eksternal, penegak hukum dan/atau instansi lainnya, bila diperlukan dengan persetujuan Direksi.
5. Membuat Laporan Hasil Investigasi yang di dalamnya memuat rekomendasi dan/atau sanksi atas tindakan pelanggaran kepada Direksi.
6. Mendokumentasikan seluruh proses investigasi terkait bukti pendukung, kertas kerja, berita acara maupun dokumen lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Tim yang menangani pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi/Komisaris.

TUGAS DEWAN KOMISARIS

1. Menerima Laporan dari Tim Pengelolaan Laporan dan Perlindungan Pelapor atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi/Komisaris.
2. Memastikan terjadinya tindakan pelanggaran oleh Direksi/Komisaris dengan bukti-bukti cukup.
3. Menentukan nilai kerugian/dampak atas tindakan pelanggaran Direksi/Komisaris.
4. Berkoordinasi dengan investigator eksternal, penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
5. Membuat Laporan Hasil Investigasi yang di dalamnya memuat rekomendasi dan dilaporkan kepada Komisaris Utama atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan kepada Pemegang Saham apabila pelanggaran dilakukan oleh Komisaris.

6. Mendokumentasikan seluruh proses investigasi terkait bukti pendukung, kertas kerja, berita acara maupun dokumen lainnya.

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN 2018

Pada tahun 2018 Tim Pengelola WBS tidak menerima laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Organ Perusahaan maupun Insan Bio Farma sehingga tidak disajikannya jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun 2018.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES PADA TAHUN 2018

Pada tahun 2018 Tim Pengelola WBS tidak menerima laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Organ Perusahaan maupun Insan Bio Farma dengan demikian tidak disajikannya sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah diproses pada tahun 2018.

Sebagai perwujudan terciptanya penyelenggaraan *Good Corporate Governance* yang efektif dan baik maka sosialisasi dan penegakan penerapan terhadap *Whishel Blowing System* akan selalu terus ditingkatkan dan akan dilaksanakan secara berkala penyempurnaan sistem dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

URAIAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM PENDIDIKAN (BIDANG STUDI), KEAHLIAN, PENGALAMAN DAN USIA

Bio Farma meyakini bahwa keragaman latar belakang pendidikan, keahlian, pengalaman dan usia sangat diperlukan untuk efektivitas tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengurusan Perusahaan oleh Direksi dengan tidak mengenal perbedaan gender. Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, memiliki komposisi yang beragam, baik berdasarkan latar belakang pendidikan, keahlian, pengalaman dan usia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Bio Farma berupaya untuk menjaga bauran keahlian dan pengalaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup diantaranya bidang kedokteran, administrasi publik & kualifikasi publik, ekonomi manajemen, ekonomi akuntansi, hukum, administrasi bisnis, farmasi, apoteker, strategik manajemen, manajemen operasi, sosial politik dan SDM. Identifikasi keahlian Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja serta pelatihan yang pernah diikuti. Bio Farma juga berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi, baik melalui training, workshop serta kegiatan lainnya yang relevan untuk peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif karena keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai sudut pandang dan kepentingan tanpa adanya diskriminatif.

PEDOMAN PERUSAHAAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pedoman Bio Farma mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris mengacu kepada sbb:
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN

KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Bio Farma mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris mengacu kepada sbb:

1. Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero)
2. Keputusan Bersama Antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris Dan Direksi (Board Manual) PT Bio Farma (Persero).

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka meningkatkan daya saing Perusahaan untuk menghadapi persaingan dunia usaha yang kompetitif terutama di era global seperti saat ini, Bio Farma sudah memiliki Dewan Komisaris yang ahli, berpengalaman, beritegritas dan berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Bio Farma, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan dan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing

Dewan Komisaris Bio Farma bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bio Farma memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memiliki keberagaman usia, pendidikan (Bidang Studi), pengalaman kerja.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif karena keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai sudut pandang dan kepentingan tanpa adanya diskriminatif.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/11/2014 tanggal 7 November 2014.

Bahwa untuk lebih memperjelas dan memperlancar proses, serta menyesuaikan dengan peraturan/perubahan kebijakan dalam tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, maka Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/10/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/11/2014 perlu ditinjau kembali, sehingga proses pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat dilakukan secara lebih baik, lebih terencana dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2018, keberagaman komposisi Dewan Komisaris Bio Farma sebagai berikut:

PERIODE 1 JANUARI - 20 APRIL 2018

Nama	Jenis Kelamin	Usia Per 31 Desember 2018	Tingkat Pendidikan			Keahlian								
			S1	S2	S3	Kedokteran	Administrasi Publik & Kualifikasi Publik	Ekonomi Manajemen	Ekonomi Akuntansi	Hukum	Administrasi Bisnis	Farmasi	Sosial Politik	Komunikasi & Teknik Informatika	Agama
Ahmad M. Ramli	Laki-Laki	57			√					√				√	
Ihsan Setiadi	Laki-Laki	46			√								√	√	√
M. Subuh	Laki-Laki	56		√		√	√					√			
Heridadi	Laki-Laki	66			√	√							√		

PERIODE 20 APRIL - 08 JANUARI 2019

Nama	Jenis Kelamin	Usia Per 31 Desember 2018	Tingkat Pendidikan			Keahlian								
			S1	S2	S3	Kedokteran	Administrasi Publik & Kualifikasi Publik	Ekonomi Manajemen	Ekonomi Akuntansi	Hukum	Administrasi Bisnis	Farmasi	Sosial Politik	Komunikasi & Teknik Informatika	Agama
Farid Wadjdi Husain	Laki-Laki	68		√		√							√		
M. Subuh	Laki-Laki	56		√		√	√					√			
Made Arya Wijaya	Laki-Laki	53		√				√	√						
Saud Usman Nasution	Laki-Laki	60			√					√			√		
Yuni Suryanto	Laki-Laki	54		√					√		√				
Heridadi *	Laki-Laki	66			√	√							√		
Elen Setiadi **	Laki-Laki	47		√				√		√			√		

Keterangan
* Berakhir masa jabatan Tanggal 08 Januari 2019

** Mulai Menjabat Tanggal 08 Januari 2019

PEDOMAN PERUSAHAAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pedoman Bio Farma mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris mengacu kepada sbb : Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN

KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Bio Farma mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris mengacu kepada sbb :

1. Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero)
2. Keputusan Bersama Antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dan telah diperbaharui dengan Keputusan No. PER-07/DK/BF/2018, No. PER-06964/DIR/XII/2018 tanggal 31

Desember 2018 Tentang Pedoman Dewan Komisaris Dan Direksi (Board Manual) PT Bio Farma (Persero).

Dalam rangka memperoleh Sumber Daya Manusia BUMN khususnya Anggota Direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi, guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk mewujudkan suatu proses pergantian Anggota Direksi secara baik, diperlukan penyempurnaan pedoman yang mengatur mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi yang akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Keberagaman Komposisi Direksi Bio Farma antara lain:

1. Orang perorangan:
   - Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
   - Cakap melakukan perbuatan hukum
   - Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan
   - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan
   - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
   - Integritas;
2. Kompetensi teknis/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiliki:
   - Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan
   - Pengalaman dan keahlian dibidang pengurusan Perusahaan
   - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan
   - Pemahaman masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen
   - Dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
   - Psikologis bahwa yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk elaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi Perusahaan
   - Persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, memajukan dan mengembangkan Perusahaan dengan melakukan terobosan inisiatif segala aspek dalam menghadapi persaingan global, Bio Farma memiliki Direksi yang ahli, berpengalaman, berintergritas dan berdedikasi tinggi,

Direksi Bio Farma memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan serta memiliki keberagaman usia, pendidikan (Bidang Studi), pengalaman kerja.

Keberagaman komposisi Direksi mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif karena keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai sudut pandang dan kepentingan tanpa adanya diskriminatif.

Pada tahun 2018, keberagaman komposisi Direksi Bio Farma sbb:

PERIODE 1 JANUARI - 20 APRIL

Nama	Jenis Kelamin	Usia Per 31 Desember 2018	Tingkat Pendidikan			Keahlian														
			S1	S2	S3	Kedokteran	Ekonomi Manajemen	Ekonomi Akuntansi & Keuangan	Hukum	Administrasi Bisnis	Farmasi	Apoteker	Strategik Manajemen	Manajemen Operasi	Teknik & Pemeliharaan	Marketing	SDM	Manajemen Risiko	Laboratorium	Perencanaan & Pengembangan
M. Rahman Roestan	Laki-Laki	48			√					√	√	√	√			√				
Juliman	Laki-Laki	56		√							√	√		√	√	√				
Sri Harsi Teteki	Perempuan			√		√										√				
Disril Revolin Putra	Laki-Laki	53		√					√	√							√			
Pramusti Indrascaryo	Laki-Laki			√				√										√		
Sugeng Raharso	Laki-Laki	54		√		√								√		√		√	√	√

PERIODE 20 APRIL - 31 APRIL 2018

Nama	Jenis Kelamin	Usia Per 31 Desember 2018	Tingkat Pendidikan			Keahlian														
			S1	S2	S3	Kedokteran	Ekonomi Manajemen	Ekonomi Akuntansi	Hukum	Administrasi Bisnis	Farmasi	Apoteker	Strategik Manajemen	Manajemen Operasi	Teknik & Pemeliharaan	Marketing	SDM	Manajemen Risiko	Laboratorium	Perencanaan & Pengembangan
M. Rahman Roestan	Laki-Laki	48			√					√	√	√	√			√				
Juliman	Laki-Laki	56		√							√	√		√	√	√				
Sri Harsi Teteki	Perempuan	54		√		√										√				
Disril Revolin Putra	Laki-Laki	53		√					√	√							√			
Pardiman	Laki-Laki	58		√			√										√			
Adriansjah Azhari	Laki-Laki	55									√	√	√	√						√

SEPANJANG TAHUN 2018, KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DIRKESI BIO FARMA SBB:

Tahun	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
2015	6	6
2016	6	6
2017	6	6
2018	6	6

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa per tanggal 31 Desember 2018, jumlah dan komposisi Anggota Komisaris dan Direksi masing-masing sebanyak enam orang sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

STUDI STUDI BANDING

Studi Banding atau Benchmarking merupakan suatu proses nilai tambah bagi perusahaan khususnya Bio Farma karena dengan adanya benchmarking, Bio Farma mampu melihat gambaran kondisi kerja yang ada di perusahaan lain dan dapat mengadopsinya sebagai best practices untuk meraih sasaran yang diinginkan. Bio Farma juga memiliki nilai tambah apabila menjadi tujuan benchmarking dari perusahaan lain karena hal ini dipandang bahwa Bio Farma memiliki sistem kerja atau proses kerja yang dapat dijadikan contoh (best practices) bagi perusahaan lain.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bio Farma terus meningkatkan kinerja *non-financial* dengan mengintegrasikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) dalam strategi dan proses bisnis perusahaan dengan mengacu pada ISO 26000. Untuk itu, berbagai langkah dan program strategis terus dijalankan, yang mencakup 7 (tujuh) *core subject* CSR yaitu, (1) Tata Kelola (2) Hak Azasi Manusia, (3) Operasi yang adil (4) Lingkungan Hidup, (5) Ketenaga kerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, (6) tanggungjawab pada konsumen dan (7) Pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Pelaksanaan CSR Bio Farma secara lengkap, kami publikasikan kepada pemangku kepentingan melalui laporan keberlanjutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan tahunan ini.

TATA KELOLA

Langkah-langkah strategis tersebut dijalankan secara konsisten dengan berlandaskan pada tata kelola CSR. Bio Farma berkomitmen untuk menjaga tata kelola CSR yang lebih luas, tidak hanya menekankan kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi juga mengimplementasikan berbagai standar, prinsip, prakarsa dan kebiasaan yang berlaku secara internasional (*best practices*).

Bio Farma memiliki komitmen tinggi untuk terus melaksanakan CSR yang diintegrasikan dalam proses bisnis oleh seluruh jajaran perusahaan yang terkait dengan menggunakan ISO 26000 sebagai referensi utama. Bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), setiap unit kerja terkait melakukan perencanaan CSR dan melakukan kajian terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari kegiatan operasi perusahaan, termasuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terdampak dari atau berdampak pada kegiatan operasi perusahaan. Anggaran CSR tersebar hampir diseluruh unit kerja perusahaan.

CSR yang dilaksanakan oleh Bio Farma meliputi bukan hanya yang diatur/disayaratkan oleh peraturan perundangan-undangan, tetapi kami juga menerapkan norma-norma dan prakarsa internasional seperti tindakan pengurangan gas emisi rumah kaca sebagai kontribusi Bio Farma dalam mitigasi perubahan iklim.

Kami menyadari bahwa perusahaan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan berupa pengeluaran emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan lainnya seperti limbah, dan juga dampak sosial. Kami terus berusaha menekan dampak lingkungan dan dampak sosial ini serendah mungkin. Di lain pihak keberadaan perusahaan juga berdampak positif terhadap penciptaan nilai ekonomi bagi pemangku kepentingan, mulai dari pemegang saham, karyawan, pemasok, konsumen, penyandang dana sampai pada masyarakat, semuanya memperoleh nilai-nilai ekonomi dari Bio Farma.

Untuk memastikan tata kelola perusahaan diterapkan dengan baik, Bio Farma melakukan evaluasi penerapan tata kelola perusahaan (GCG) setiap tahun. Dari hasil yang didapatkan, terlihat peningkatan skor secara konsisten dari tahun ke tahun, sejak tahun 2006. Pada tahun 2018 dilakukan penilaian penerapan GCG untuk periode penilaian tahun 2017, dengan capaian skor sebesar 90,53 yang masuk dalam kategori “sangat baik.”

Penyempurnaan tata kelola dalam konteks CSR akan terus kami lakukan, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan serta mendengar suara pemangku kepentingan, sehingga kebijakan, sistem dan prosedur pelaksanaan CSR berjalan efektif.

HAK AZASI MANUSIA

Bio Farma sebagai warga korporat *(corporate citizenship)* memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan mengemban Hak Asasi Manusia (HAM). Bio Farma mengakui bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. HAM berlaku universal, bukan hanya bagi karyawan tetapi juga diterapkan pada seluruh pemangku kepentingan. Manajemen Bio Farma menghormati HAM oleh sebab itu kami akan mencegah dan menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran terhadap HAM. Pemahaman dan penguasaan HAM di kalangan karyawan termasuk mitra bisnis dan pemasok akan terus ditingkatkan melalui kegiatan internalisasi dan pelatihan.

Kebijakan-kebijakan terkait dengan HAM yang telah dan akan terus kami laksanakan meliputi; mengakui hak-hak kaum disabilitas dengan mengangkat mereka sebagai karyawan pada unit kerja dengan memberikan jenis pekerjaan yang pantas. Kami juga mengakui adanya keberagaman dan menghindari terjadinya intoleransi. Penerimaan karyawan dilakukan tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan. Semua karyawan diperlakukan sama secara adil dan mereka memiliki kebebasan untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Kami juga memperhatikan HAM masyarakat disekitar daerah operasi kami yang terdampak dengan operasi perusahaan. Berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dan akan terus kami laksanakan.

Terkait dengan Hak masyarakat atas kesehatan, kami menyediakan vaksin berkualitas dengan harga yang relatif murah terjangkau agar setiap masyarakat bisa mendapatkan akses untuk peningkatan kesehatan mereka. Menyadari pentingnya akses terhadap kesehatan, Bio Farma dengan progresif membuka pasar-pasar baru. Kami banyak melakukan ekspor ke negara tujuan yang mengandung risiko, baik risiko politik, risiko ekonomi pada saat pembayaran. Atas prestasi ini, Bio Farma meraih Penghargaan Primaniyarta kategori Pelopor Pasar Baru dari Kementerian Perdagangan.

OPERASI YANG ADIL *(FAIR OPERATING PARCTICES)*

Kami memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan kegiatan operasi perusahaan dengan cara-cara yang sehat dan adil. Berbagai kebijakan strategis telah dirumuskan, antara lain peraturan perusahaan terkait korupsi dan suap, penandatanganan pakta integritas baik untuk karyawan maupun mitra bisnis dan peraturan peraturan whistle blowing. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya, kami juga telah merumuskan budaya dan sikap kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh insan Bio Farma. Rumusan ini diperlukan guna mendapatkan insan Bio Farma yang jujur, loyal dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan.

Untuk mewujudkan praktek bisnis yang sehat dan adil, Bio Farma telah mengaturnya dalam berbagai peraturan perusahaan terkait, misalnya dengan pemasok, mulai dari proses seleksi pemasok sampai pada proses pembayaran. Secara regular kami mengadakan acara temu pemasok, paling kurang sekali dalam setahun. Begitu pula dengan Konsumen, kami memperlakukan mereka dengan adil. Setiap keluhan konsumen ditindaklanjuti dengan cepat. Kami juga membuka pos pengaduan pelanggan.

KEGIATAN

Berbagai aspek dan kegiatan terkait operasi yang adil yang kami terapkan adalah:

1. Penekanan atas kebijakan antikorupsi.
2. Tata kelola yang mengedepankan transparansi.
3. Ketaatan pada peraturan perundangan dan standar yang berlaku (baik standar nasional maupun internasional)
4. Transaksi dan kerja sama berdasarkan keadilan dan kesetaraan dengan para pemasok.
5. Mengembangkan hubungan timbal balik, yang dibangun berdassrkan asas kesetaraan, keberagaman dan keadilan dengan karyawan.
6. Dedikasi untuk pemberdayaan masyarakat serta pengembangan usaha melalui kegiatan Pengembangan Masyarakat.

Perencanaan dan pelaksanaan mengenai aspek-aspek operasional yang adil ini dilakukan oleh masing-masing unit kerja terkait. Sedangkan capaian prestasinya dapat dilihat secara lengkap dalam Laporan keberlanjutan 2018.

LINGKUNGAN HIDUP

Kami memiliki komitmen untuk menjalankan operasi perusahaan secara ramah lingkungan. Berbagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kerusakan lingkungan telah dikeluarkan dan akan terus dipertajam. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh unit kerja khusus dengan sumber daya yang berkompeten. Unit ini membuat pemetaan dampak lingkungan dan melakukan upaya pengurangan dampak lingkungan mulai dari proses perencanaan sampai pada proses evaluasi risiko lingkungan hidup.

Insiatif CSR terkait lingkungan hidup yang dilaksanakan sepanjang tahun 2018 meliputi

1. ***Green process***, yaitu menjalankan prinsip yang berpihak pada kelestarian lingkungan dalam proses bisnis perusahaan dari hulu ke hilir. Kami membeli bahan baku yang ramah lingkungan melalui proses seleksi pemasok yang pro lingkungan. Bio Farma juga mengedepankan prinsip kepedulian pada lingkungan dalam proses produksi, formulasi, *filling*, *packaging*, hingga penanganan produk jadi.
2. **Efisiensi energi**, yakni melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pemakaian energi.
3. **Efisiensi dan konservasi air** dengan menerapkan prinsip 4 R dalam penggunaan air, yaitu *reduce, reuse, recycle, recovery*.
4. **Pengelolaan limbah** yaitu dengan melakukan pemilahan sampah dalam lima kategori. Selain membuat sampah lebih ramah lingkungan, pemilahan juga akan memudahkan proses pengolahannya di tempat pembuangan akhir.
5. Internalisasi budaya ramah lingkungan lewat upaya mendorong dan terus mengumandangkan budaya dan perilaku yang mendukung kelestarian lingkungan hidup, baik di tempat kerja maupun dalam keluarga karyawan.

KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Hubungan kerja yang kondusif dengan karyawan merupakan bagian penting dalam Program CSR Bio Farma. Berbagai kebijakan perusahaan telah dirumuskan untuk mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang baik antara perusahaan dengan karyawan. Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah diatur hak dan kewajiban karyawan disamping hak dan kewajiban perusahaan. Di dalamnya termasuk juga diatur masalah Kesehatan dan Keselamatan kerja, kesetaraan gender, jenjang karir serta sarana dan keselamatan kerja.

Komitmen Bio Farma dalam menjalankan praktik terbaik dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dinyatakan melalui strategi yang komprehensif, penerapan yang teliti dan kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku. Bagi kami, definisi sukses termasuk menjamin kesejahteraan pekerja serta memastikan keselamatan kerja yang mendukung keberlangsungan perusahaan.

Bio Farma telah merumuskan serangkaian kebijakan terkait K3 yang dituangkan dalam peraturan perusahaan. Kami juga menerapkan standar internasional yaitu OHSAS 18001:2007 mengenai Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sistem pelaporan kecelakaan kerja dalam Bio Farma juga dilakukan dengan terperinci dan sistematis, mengacu pada prosedur baku 236K-KK-01 Tentang Penanganan Kecelakaan Kerja, mencakup lima aspek: penanganan peristiwa kecelakaan, pelaporan kecelakaan, penyelidikan kecelakaan dan tindak lanjut tindakan perbaikan serta tata cara pelaporannya.

Mengenai tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan secara rinci kami laporkan dalam laporan keberlanjutan, termasuk target dan capaian kecelakaan karja.

TANGGUNG JAWAB PADA KONSUMEN

Kesehatan konsumen menjadi prioritas kami selama 128 tahun berkarya bagi Indonesia dan bagi masyarakat global. Bio Farma bertekad untuk menjalankan *best practices* dalam setiap kegiatannya, demi menyiapkan produk unggulan yang menjamin kesehatan konsumen. Bio Farma membangun bangsa dan masyarakat global melalui keamanan kesehatan *(health security)* untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Untuk itu Bio Farma telah menyusun berbagai kebijakan strategis terkait tanggung jawab terhadap konsumen. Bio Farma terus meningkatkan keunggulan kompetitifnya melalui riset dan inovasi di bidang *Life Science* yang berkelanjutan di Indonesia. Kami juga mengirimkan karyawan dan ilmuwan kami untuk mengikuti pendidikan di dalam dan luar negeri dalam upaya memajukan Bio Farma sebagai perusahaan yang berdikasi menjaga *global health security* atau keamanan kesehatan global.

Melalui bioteknologi, Bio Farma dapat menyediakan produk-produk kesehatan berkualitas dengan standar internasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selama 128 tahun, Bio Farma berperan membangun keamanan dan kesehatan global *(global health security)*, bahkan sejak tahun 1997, Bio Farma telah mendapat pengakuan dari *World Health Organization* (WHO) atas keberhasilannya membuat vaksin yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Produk Bio Farma kini telah digunakan di lebih dari 130 negara di dunia.

Untuk menjaga kepercayaan dunia, seluruh insan Bio Farma dan semua proses serta aktivitas perusahaan ditujukan untuk memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku serta mempraktikkan *best practices* demi keamanan dan kepuasan konsumen.

Riset dan pengembangan menjadi dasar sebuah perusahaan *Life Science* untuk dapat menjadi yang terdepan dan terus menjawab tantangan zaman. Untuk itu, Bio Farma senantiasa mengedepankan riset dan pengembangan untuk senantiasa mengembangkan pengetahuan dan mendapatkan terobosan.

Bio Farma menerapkan sistem manajemen terintegrasi dengan sertifikasi nasional dan internasional, di antaranya: Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Praktek Produksi yang Baik (*Good Manufacturing Practices*/GMP), GMP dari WHO dan persyaratan produk yang tertuang dalam seri acuan dari WHO diantaranya Laporan Teknis (Technical Report Series), Praktik Laboratorium yang Baik (GLP), Praktik Klinis yang Baik (GCP), Praktik Distribusi yang Baik (GDP), Sistem Manajemen Mutu Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan (OHSAS) 18001, ISO 17205 khusus untuk laboratorium pengujian di Divisi Imunisasi dan Klinik, serta sistem dan regulasi lainnya.

Bio Farma menghargai setiap input, saran dan keluhan dengan menyediakan layanan pengaduan konsumen. Setiap saran, keluhan dan pengaduan ditindaklanjuti dengan segera, termasuk di dalamnya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). KIPI adalah serangkaian reaksi setelah seseorang mendapatkan imunisasi. Walaupun kejadian KIPI cenderung ringan dan dapat membaik dengan sendirinya, namun Bio Farma membuka jalur pengaduan agar konsumen mendapatkan keterangan yang sebenarnya dan membuat konsumen tenang. Selain itu, Bio Farma juga melakukan sosialisasi melalui distributor, dokter dan petugas kesehatan untuk menangani pelaporan KIPI, sehingga tim independen yang telah ditunjuk dapat segera bergerak untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen tersebut.

Sebagai bagian penting dari informasi kepada pelanggan adalah pelabelan yang lengkap, yaitu pelabelan yang mengandung berbagai informasi penting. Informasi ini disiapkan secara akurat untuk setiap jenis produk dengan persetujuan BPOM dan WHO. Konsumen juga dengan mudah dapat memperoleh informasi produk melalui laman situs Bio Farma yang dapat diakses kapan pun. Sepanjang tahun pelaporan, Bio Farma tidak mengalami insiden dan tuntutan terkait ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menyangkut pelabelan dan informasi produk. Sepanjang tahun pelaporan, Bio Farma tidak mengalami insiden dan tuntutan terkait ketidakpatuhan terhadap regulasi yang menyangkut pelabelan dan informasi produk.

Secara reguler, Bio Farma mengadakan survei untuk mengetahui pendapat dan perasaan pelanggan terhadap produk dan kinerja perusahaan. Informasi ini kemudian digunakan untuk menyempurnakan strategi dan kinerja Bio Farma. Survei kepuasan konsumen ini dilakukan di bawah tanggung jawab Divisi Pengembangan Produk *(Product Development Division)* bagian Manajamen Produk. Agar mendapatkan data yang akurat, mekanisme pelaksanaannya diatur dalam sebuah pedoman prosedur baku dan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu lembaga independen yang telah melakukan survei secara profesional baik di dalam dan luar negeri. Responden survei kepuasan pelanggan ini dibagi menjadi beberapa sektor antara lain: Dinas Kesehatan di 34 provinsi, dokter dan distributor di area Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan, serta pelanggan internasional baik institusi maupun korporasi. Tahun 2018, survei kepuasan pelanggan dilakukan oleh lembaga survei independen Kinas Consulting dengan hasil kepuasan pelanggan sebesar 84,19. Nilai ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu 82,74.

PENGHARGAAN

Konferensi Tingkat Tinggi Menteri Kesehatan Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) ke-6 di Jeddah tahun 2017 lalu menetapkan Indonesia sebagai *"The Centre of Excellence on Vaccine and Bio-technology Products"*. Penetapan ini menjadi dorongan bagi pemerintah Indonesia yang diminta untuk membentuk dan membuka *"Centre of Excellence"* yang dimaksud. Melalui Bio Farma, Indonesia telah dipercaya dan diakui kinerjanya terkait industri vaksin dan produk bioteknologi yang lebih maju di bandingkan negara-negara anggota OKI. Indonesia merupakan satunya anggota OKI yang memiliki industri vaksin imunisasi lengkap yang diakui WHO.

PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Bio Farma beroperasi dan tumbuh karena adanya masyarakat, oleh sebab itu kami memiliki perhatian yang tinggi kepada masyarakat terutama mereka yang berada di sekitar wilayah operasi Bio Farmadengan melaksanakan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

CSR bagi Bio Farma bukan sekedar sebuah sumbangan kemanusiaan, melainkan telah menjadi bagian yang integral dari sebuah bisnis untuk memperkuat eksistensinya perusahaan di tengah masyarakat. Di samping itu, adanya program CSR yang ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat dan menjaga lingkungan hidup merupakan dorongan moril bagi setiap karyawan, bahwa mereka bekerja untuk sesuatu yang bernilai mulia.

Berbagai program untuk masyarakat telah kami laksanakan setelah terlebih dahulu melakukan asesmen atas kebutuhan masyarakat dan memetakan isu-isu sosial yang patut dibantu oleh Bio Farma. Isu yang paling menonjol adalah masalah kualitas hidup yang masih rendah termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang pada gilirannya akan menambah tingkat kemiskinan apabila tidak ada upaya perbaikan. Ketimpangan tingkat ekonomi masyarakat di sekitar daerah operasi perusahaan merupakan salah satu risiko sosial yang harus diatasi oleh perusahaan.

Program Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan yang dilakukan melalui Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk; (1) Bantuan peningkatan kesehatan, (2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, (3) Bantuan pelestarian alam, (4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, (5) Bantuan sarana ibadah, (6) Bantuan korban bencana alam, (7) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan (8) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya pengingkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

Pengungkapan lebih rinci atas kegiatan Program Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan dapat dilihat dalam laporan keberlanjutan 2018 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporran tahunan ini.

PENGHARGAAN

Atas kiprahnya dalam upaya kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui CSR, Bio Farma meraih dua penghargaan bergengsi di bidang CSR dari Majalah Top Bussiness, yaitu:

1. Top CSR 2018 sektor Industri Farmasi
2. Top Leader CSR Commitment kepada M. Rahman Roestan selaku Direktur Utama Bio Farma

Top CSR merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan tertinggi kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berhasil menjalankan program CSR/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/Pengembangan Masyarakat *(Community Development)* secara efektif dan berkualitas di Indonesia. Apresiasi diberikan kepada Bio Farma karena telah mempraktikan CSR dengan baik, mempublikasikannya kepada masyarakat, pemerintah, investor, dan lembaga pembiayaan CSR serta mendukung pelaksanaan program Nawa Cita Kabinet Kerja 2014-2019.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT BIO FARMA (PERSERO)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 2017

PT Bio Farma (Persero)
Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161, Indonesia, P.O. Box 1136, Telp. +62.22-2033755, Fax. +62.22-2041306
email : mail@biofarma.co.id http : //www.biofarma.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BIO FARMA (PERSERO)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

DAFTAR ISI

Halaman :

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Posisi Keuangan 1

Laporan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 3

Laporan Perubahan Ekuitas 4

Laporan Arus Kas 5

Catatan atas Laporan Keuangan 6

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 2017
PT BIO FARMA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	**M. Rahman Roestan**
Alamat Kantor	:	Jl. Pasteur No.28 Bandung 40161, Jawa Barat
Alamat Domisili	:	Bukit Dago Selatan RT 005/RW 002 Dago Coblong Bandung
Nomor Telepon	:	(022) 2033755
Jabatan	:	Direktur Utama

Nama	:	**Pardiman**
Alamat Kantor	:	Jl. Pasteur No.28 Bandung 40161, Jawa Barat
Alamat Domisili	:	Jl. Timbul No. 55 RT 007/RW 004 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Nomor Telepon	:	(022) 2033755
Jabatan	:	Direktur Keuangan

Menyatakan Bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 14 Februari 2019

Direktur Utama	**Direktur Keuangan**
(M. Rahman Roestan)	**(Pardiman)**

PT. BIO FARMA (Persero)
Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161, Indonesia, P.O. Box 1136, Telp. 022-2033755, Fax. 022 2041306
e-mail : mail@biofarma.co.id - http : //www.biofarma.co.id

Roebiandini dan Rekan
Registered Public Accountants
Ijin : KEP MENKEU RI No.684/KM.1/2008

Nomor :00010/2.0756/AU.1/04/1055-1/1/II/2019

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bio Farma (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan pendapat opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atau ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Jl. Cikutra Baru VI No. 49 Tlp. 022-20529558 Fax. 022-20527374

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bio Farma (Persero) tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik ROEBIANDINI dan Rekan
Partner,

Rudiana, SE., M. Ak., Ak., CPSAK., CA., CPA.
NRAP: AP.1055
NIUKAP.684/KM.1/2008

14 Februari 2019

PT BIO FARMA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.e,2.f,3	535.910.339.458	369.546.131.323
Piutang Usaha	2.e,2.g,4	254.065.476.289	313.138.277.507
(Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp400.349.778 pada 31 Desember 2018, Rp365.343.156 pada 31 Desember 2017)			
Piutang Lain-lain	5	799.820.095	121.769.028
(Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp1.302.637.458 pada 31 Desember 2018, Rp1.302.637.458 pada 31 Desember 2017)			
Persediaan	2.i,6	1.177.241.649.665	712.911.960.933
(Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp6.215.501.830 pada 31 Desember 2018, Rp4.310.484.907 pada 31 Desember 2017)			
Uang Muka	2.e,7	121.850.634.341	27.734.362.805
Pajak Dibayar Dimuka	2.n,8a	279.927.563.475	359.948.026.140
Biaya Dibayar Dimuka	2.l,9	12.410.115.795	12.473.630.758
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	2.l,10	84.177.688	13.994.095
Aset Lancar Lainnya	11	9.640.198.233	168.198.388.626
Jumlah Aset Lancar		**2.391.929.975.038**	**1.964.086.541.215**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Pajak Tangguhan	2.n,8e	24.999.885.862	30.213.960.819
Aset Tetap	2.j,12	4.930.721.366.111	4.394.230.961.112
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.271.071.568.640 pada 31 Desember 2018, Rp1.133.301.850.570 pada 31 Desember 2017)			
Aset Tak Berwujud	2.k,13	25.346.613.486	32.522.393.190
(Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp35.388.191.805 pada 31 Desember 2018, Rp28.212.412.101 pada 31 Desember 2017)			
Aset Biologis	14	4.367.560.000	-
Aset Tidak Lancar Lainnya	15	23.793.893.994	28.395.092.292
(Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp14.085.839.149 pada 31 Desember 2018, Rp7.362.379.155 pada 31 Desember 2017)			
Jumlah Aset Tidak Lancar		**5.009.229.319.453**	**4.485.362.407.413**
Jumlah ASET		**7.401.159.294.491**	**6.449.448.948.628**

Lihat catatan atas Laporan Keuangan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PT BIO FARMA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	2.e,16	336.111.914.023	371.252.524.474
Utang Pajak	2.n,8b	68.519.412.714	57.801.114.118
Biaya Yang Masih Harus Dlbayar	2.e,2.l,17	110.910.557.440	107.859.074.686
Pendapatan Diterima Dimuka	2.e,2.l,18	1.646.362.140	1.007.776.470
Utang Jangka Pendek	19	205.000.000.000	-
Liabilitas Lancar Lainnya	2.e,20	23.116.864.544	41.635.031.977
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**745.305.110.862**	**579.555.521.725**
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang	21	450.000.000.000	-
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja	2.o,22	243.014.772.217	219.937.069.439
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**693.014.772.217**	**219.937.069.439**
JUMLAH LIABILITAS		**1.438.319.883.079**	**799.492.591.164**
Ekuitas			
Modal Saham		2.000.000.000.000	2.000.000.000.000
(Modal dasar lembar saham pada 31 Desember 2018 dan lembar saham pada 31 Desember 2017. Nominal Rp1.000.000 per lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh lembar saham pada 31 Desember 2018 dan lembar saham pada 31 Desember 2017	23		
Komponen Ekuitas Lainnya	24	1.880.115.558.980	1.874.048.520.876
Saldo Laba (Rugi)			
Dicadangkan	25a	1.539.497.836.587	1.250.552.226.426
Laba Periode Berjalan	25b	543.226.015.844	525.355.610.162
JUMLAH EKUITAS		**5.962.839.411.411**	**5.649.956.357.464**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**7.401.159.294.491**	**6.449.448.948.628**

Lihat catatan atas Laporan Keuangan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PT BIO FARMA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2018	2017
PENJUALAN BERSIH			
Produk Perusahaan	26	2.038.035.461.494	1.872.113.076.150
Produk Partnership	27	1.133.975.323.015	1.111.028.033.574
Trading Partnership	28	53.110.832.810	20.119.589.100
Jasa	29	10.103.774.403	8.310.031.520
Jumlah Penjualan Bersih		**3.235.225.391.723**	**3.011.570.730.344**
BEBAN POKOK PENJUALAN			
Produk Perusahaan	30	(1.010.965.648.712)	(923.185.406.019)
Produk Partnership	31	(758.733.554.454)	(710.317.953.702)
Trading Partnership	32	(39.980.685.930)	(16.765.732.180)
Jasa	33	(14.070.120.220)	(6.861.250.646)
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Jasa		(1.823.750.009.317)	(1.657.130.342.547)
LABA (RUGI) KOTOR		**1.411.475.382.406**	**1.354.440.387.797**
Penghasilan Lain-lain	34	454.801.671.191	115.158.413.202
Beban Penjualan	35	(137.763.098.316)	(137.478.250.141)
Beban Administrasi dan Umum	36	(410.885.284.484)	(409.734.449.135)
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	2.m,37	(126.062.455.796)	(124.570.343.182)
Beban Lain-lain	38	(464.198.599.200)	(84.181.898.552)
Jumlah		(684.107.766.605)	(640.806.527.808)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**727.367.615.801**	**713.633.859.989**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak Kini	2.n,8d	(178.927.525.000)	(194.907.187.750)
Pajak Tangguhan	2.n,8e	(5.214.074.957)	6.628.937.923
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		(184.141.599.957)	(188.278.249.827)
LABA (RUGI) BERSIH		**543.226.015.844**	**525.355.610.162**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi			
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria atas Imbalan Pasca Kerja	22	6.067.038.104	(27.238.526.186)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		**6.067.038.104**	**(27.238.526.186)**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		**549.293.053.948**	**498.117.083.976**

Lihat catatan atas Laporan Keuangan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PT BIO FARMA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	Saldo Laba			Komponen Ekuitas Lain	Jumlah Ekuitas
	Modal Saham	Dicadangkan	Belum Dicadangkan		
Saldo awal per 1 Januari 2017	2.000.000.000.000	899.824.236.342	501.040.990.083	1.901.287.047.062	5.302.152.273.487
Pembagian Laba					
Dividen	-	-	(150.313.000.000)	-	(150.313.000.000)
Cadangan	-	350.727.990.083	(350.727.990.083)	-	-
Bina Lingkungan	-	-	-	-	-
Kapitalisasi cadangan ke setoran modal	-	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(27.238.526.186)	(27.238.526.186)
Laba (Rugi) tahun 2017	-	-	525.355.610.162	-	525.355.610.162
Saldo akhir per 31 Desember 2017	**2.000.000.000.000**	**1.250.552.226.426**	**525.355.610.162**	**1.874.048.520.876**	**5.649.956.357.464**
Saldo awal per 1 Januari 2018	2.000.000.000.000	1.250.552.226.426	525.355.610.162	1.874.048.520.876	5.649.956.357.464
Pembagian Laba					-
Dividen	-	-	(236.410.000.000)	-	(236.410.000.000)
Cadangan	-	288.945.610.162	(288.945.610.162)	-	-
Kapitalisasi cadangan ke setoran modal	-	-		-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	6.067.038.104	6.067.038.104
Laba (Rugi) tahun 2018	-	-	543.226.015.844	-	543.226.015.844
Saldo per 31 Desember 2018	**2.000.000.000.000**	**1.539.497.836.587**	**543.226.015.844**	**1.880.115.558.980**	**5.962.839.411.411**

Lihat catatan atas Laporan Keuangan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PT BIO FARMA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	3.335.795.623.900	3.111.408.452.396
Penerimaan pajak (restitusi)	298.006.790.345	167.612.639.609
Penerimaan bunga	4.505.065.423	3.557.788.614
Pembayaran bunga	(24.024.557.690)	(8.071.427.633)
Penerimaan Hibah/donasi WHO	8.112.245.475	1.917.254.546
Penerimaan (Pembayaran) lainnya-bersih	5.954.189.746	613.488.648
Pembayaran tantiem	(15.446.349.997)	(11.020.999.997)
Pembayaran pajak	(459.064.042.700)	(537.334.513.445)
Klaim Asuransi	38.507.867	575.233.401
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(2.885.703.331.549)	(2.362.897.930.651)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**268.174.140.820**	**366.359.985.488**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(538.677.278.261)	(293.309.273.980)
Penjualan aset tetap	30.454.545	-
Pembelian aset takberwujud	(46.000.000)	(3.245.057.927)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	**(538.692.823.716)**	**(296.554.331.907)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman jangka pendek	1.616.325.000.000	782.495.911.104
Pembayaran pinjaman jangka pendek	(1.411.325.000.000)	(782.495.911.104)
Penerimaan pinjaman jangka panjang	450.000.000.000	-
Pembayaran pinjaman jangka panjang	-	-
Pembayaran dividen	(236.410.000.000)	(150.313.000.000)
Pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan	-	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**418.590.000.000**	**(150.313.000.000)**
Kenaikan (penurunan) kas bersih	**148.071.317.104**	**(80.507.346.419)**
Pengaruh Selisih Kurs Kas dan Setara Kas	18.292.891.031	2.103.151.474
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	**369.546.131.323**	447.950.326.268
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**535.910.339.458**	**369.546.131.323**

Lihat catatan atas Laporan Keuangan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Bio Farma (Persero) ("Perusahaan"), pada awalnya bernama "Parc Vaccinogene" yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda No. 14 tanggal 6 Agusutus 1890. Mulai tahun 1955, berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 14 tahun 1955 Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pasteur. Pada tahun 1961, Perusahaan berubah menjadi PN Bio Farma berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Bio Farma. Sesuai Peraturan Pemerinatah No. 26 tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara, status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1997 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Bio Farma (Perum) Bio Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Akta Pendirian dan Anggaran Dasar atas perubahan bentuk Perusahaan tersebut telah dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 3 Februari 1997, Akta No. 188 tanggal 20 Juni 1997, dan Akta No. 30 tanggal 21 Oktober 1997 yang dibuat oleh Notaris Muhani Salim, S.H., dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-1423 HT.01.01.Th.98 tanggal 5 Maret 1998 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2002 No. 57 Tambahan No. 6884.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 34 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024481.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bio Farma (Persero), serta sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0109923 tanggal 21 Desember 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero).

b. Tujuan Kegiatan Usaha Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penelitian, pengembangan, produksi dan pemasaran produk biologi, produk farmasi dan alat kesehatan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Penelitian dan pengembangan produk biologi dan farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain;
b. Produksi produk biologi dan produk farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain;
c. Pemasaran, perdagangan dan distribusi produk biologi, farmasi, alat kesehatan, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri;
d. Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Klinik
e. Berusaha di bidang jasa yang ada hubungannya dengan yang tertera pada huruf a, b, c, dan d.

Sifat usaha Perusahaan adalah melayani kebutuhan pasar domestik dan global, sebagai berikut:

a. Pasar Pemerinatah, yaitu melayani kebutuhan Pemerinatah untuk program imunisasi dasar/reguler yaitu Vaksin BCG, DT, TT, Polio, Campak, Hepatitis B, Td dan Vaksin DTP-HB-Hib.

b. Pasar swasta nasional, yaitu melayani para distributor dalam negeri untuk memenuhi vaksin diluar program imunisasi rutin Pemerintah yaitu vaksin BCG, BioTd, BioTT, FluBio, Campak, Polio, Hepatitis B, PentaBio, anti sera (BioSAT, BioADS, BioSAVE, ABU II (Australia)), PPD 2 TU.
c. Pasar Internasional, terutama untuk melayani kebutuhan UNICEF dan Institusi lain yang telah melakukan kerjasama bilateral. Vaksin yang digunakan merupakan vaksin yang telah memenuhi prakualifikasi WHO baik dalam bentuk produk jadi maupun bulk, yaitu vaksin TT, Td, BioTT, DTP, Polio, Campak, Pentabio, bulk Polio, bulk Difteri, bulk Pertusis, dan bulk Tetanus.

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Farid Wadjdi Husain	Ahmad Ramli
Komisaris	Heridadi	-
Komisaris	H. Mohamad Subuh	H. Mohamad Subuh
Komisaris	Saud Usman Nasution	-
Komisaris	Made Arya Wijaya	Ihsan Setiadi Latief
Komisaris	Yuni Suryanto	Heridadi
Komisaris Independen		
	-	Heridadi

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Direksi		
Direktur Utama	Rahman Roestan	Juliman
Direktur Pemasaran	Sri Harsi Teteki	Rahman Roestan
Direktur Produksi	Juliman	Juliman
Direktur Keuangan	Pardiman	Pramusti Indrascaryo
Direktur Perencanaan dan Pengembangan	Adriansjah Azhari	Sugeng Raharso
Direktur Sumber Daya Manusia	Disril Revolin Putra	Disril Revolin Putra

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Komite Audit		
Ketua	Made Arya Wijaya	-
Wakil Ketua	Yuni Suryanto	Ihsan Setiadi Latief
Anggota	Drs. Asawir Harahap	Drs. Asawir Harahap
Anggota	Priyatno	Priyatno

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Komite Pengembangan, Risiko dan GCG		
Ketua	Heridadi	Heridadi
Wakil Ketua I	-	-
Wakil Ketua II	H. Mohamad Subuh	H. Mohamad Subuh
Anggota	Judi Jaenudin Endjun	Judi Jaenudin Endjun
Anggota	Afrizal	Afrizal

1. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-102/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018
2. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-101/MBU/04/2018 tanggal 20 April 2018

3. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Frama (Persero) Nomor: KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016 dan Nomor: KEP-01/DK/BF/01/2017 tanggal 16 Januari 2017.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-13/MBU/01/2019 tanggal 8 Januari 2019 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma, mengangkat Elen Setiadi sebagai Anggota Dewan Komisaris menggantikan Heridadi.

Susunan Direksi Perusahaan terakhir berdasarkan Akta Nomor 86 tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-17236 tanggal 3 Mei 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bio Farma (Persero), sedangkan susunan Dewan Komisaris Perusahaan terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0949789 tanggal 9 Juli 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bio Farma (Persero).

Pada 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan memiliki karyawan masing-masing 1.195 dan 1.186 karyawan.

d. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perincian gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Dewan Komisaris	12.525.950.831	12.754.173.358
Direksi	25.877.316.176	26.560.545.754
	38.403.267.006	**39.314.719.112**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah memenuhi semua persyaratannya.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (*historical/ cost method*), kecuali beberapa akun tertentu menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode akrual (accrual basis), kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Pada tahun 2016 dan 2017, Dewan standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan penyesuaian dan amandemen atas beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta mengesahkan Standar dan Interpretasi Satandar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang relevan dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, sebagai berikut:

- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi, memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK 13: Properti Investasi. Berlaku efektif 1 Januari 2017.

- PSAK 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan Kerja, mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan, mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Selain itu, perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok pelepasan.
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016): Intrumen keuangan: Pengungkapan, mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan 42C untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.

Penerapan standar-standar tersebut tidak mempunyai pengaruh material terhadap jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan.

Amandemen, Interprestasi, dan penyesuaian standar, serta SAK yang berlaku efektif untuk peroide yang di mulai pada atau setelah 1 Januari 2018.

- Amandemen PSAK 13: Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi, mengamandemen paragraf 57 sehingga mencerminkan prinsip bahwa perubahan penggunaan mencakup penilaian atas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan bukti pendukung bahwa perubahan penggunaan telah terjadi. Berlaku efektif 1 Januari 2018, dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
- Amandemen PSAK 16: Agrikultur: Tanaman Produktif, mengklarifikasi bahwa aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif (bearer plants) masuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset Tetap. Berlaku efektif periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Janari 2018, penerapan dini diperkenankan.
- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka, ISAK 33 mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing. Berlaku efektif 1 Januari 2019, dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 69: Agrikultur, mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 71: Instrumen keuangan, mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai. Berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 73: Sewa, menetapkan prinsip pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Perusahaan sedang mengevaluasi penerapan standar-standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

d. Penentuan Materialitas Suatu Pos

Berdasarkan SM-S15 Pedoman Akuntansi Keuangan sebagai ukuran objektif, suatu akun dinyatakan material dan karenanya harus disajikan tersendiri di dalam laporan keuangan jika:

- 5% dari jumlah seluruh aset untuk akun-akun aset;
- 5% dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban;
- 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas;

- 10 % dari pendapatan untuk akun-akun lab-rugi; dan
- 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi.

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Pada akhir periode pelaporan keunagan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut, sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dollar Amerika Serikat (USD)	14.481,00	13.548,00
Euro (EUR)	16.559,75	16.173,62
Dollar Singapore (SGD)	10.602,97	10.133,53
Dollar Australia (AUD)	10.211,29	10.557,29
Yen Jepang (JPY)	131,12	120,22
Poundsterling Inggris (GBP)	18.372,78	18.218,01
Danish Krone Denmark (DKK)	2.217,87	2.172,34
Frank Swiss (CHF)	14.709,75	13.842,15

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek. Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba-rugi. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2018, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang. Pencatatan atas penyisihan piutang ragu-ragu dilakukan pada setiap triwulan. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat tertagih.

Pada tanggal 31 Desember 2018, aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain.

iii) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo
Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:
a) Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
b) Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
c) Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.
Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada 31 Desember 2018, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual
Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode yang tidak ditentukan, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas, atau perubahan suku bunga, valuta asing, atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah nilai transaksi, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar diakui sebagai pendapatan (beban) komprehensif lain dan disajikan tersendiri pada bagian ekuitas hingga terealisasi, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dibawah nilai perolehan yang bersifat non-temporer dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar.

Pada 31 Desember 2018, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas Keuangan
Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori:
i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada tahun 2018 dan 2017, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

ii) Liabilitas keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tahun 2018 dan 2017, perusahaan mempunyai utang usaha, biaya masih harus dibayar, dan liabilitas lancar lainnya yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dipasar aktif ditentukan berdasarkan harga pasar kuotasian (*quote price*) pada tanggal pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu yang meliputi transaksi pasar wajar kini, referensi nilai wajar instrumen keuangan lainnya yang serupa dan analisis arus kas diskonto atau model penilaian lainnya.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer. Jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai diakui jika, dan hanya jika, terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai terjadi sebagai akibat dari adanya peristiwa merugikan yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut. Peristiwa yang merugikan tersebut dapat diestimasi secara handal dan berdampak negatif pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan yang bersangkutan.

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi penurunan nilainya diukur dari selisih antara nilai tercatat dan nilai kini estimasi arus kas di masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif

h. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, sesuai dengan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015)

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri BUMN yang merupakan pemegang saham Perusahaan, dan BUMN lain yang memiliki hubungan afiliasi melalui Penyertaan Modal Pemerintah.
- Perusahaan menempatkan dana atau memiliki pinjaman dana pada bank yang dimiliki Pemerintah atau BUMN/D dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- Mempunyai anggota pengurus (komisaris dan direksi) yang sama dengan Entitas Anak
- Perusahaan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha dengan BUMN lain maupun Entitas Anak BUMN serta badan/lembaga-lembaga Pemerintah.

i. Persediaan

1. Penilaian Persediaan

   Nilai persediaan dinyatakan dalam laporan posisi keuangan sebesar yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak atau rata-rata sederhana bergantung pada jenis persediaan. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual persediaan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan.

2. Biaya Perolehan Persediaan
   Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, biaya konversi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (*present location and condition*), kecuali untuk persediaan produk dalam proses dicatat sebesar persentase beban pokok barang dalam proses terhadap beban pokok barang jadi, yaitu:
   - Produk dalam proses untuk barang curah (bulk) penilaiannya disamakan antara yang akan diformulasi menjadi produk akhir atau yang akan dijual.
   - Produk dalam proses untuk produk akhir dilakukan berdasarkan rata-rata beban pokok produksi (HPP) tanpa bahan kemasan terhadap HPP Vaksin terapan dikurangi persentase produk reject saat dikemas, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Direksi No. 07841/DIR/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.
3. Persediaan Bahan Baku, Bahan Penolong dan Perlengkapan
   Persediaan bahan baku, bahan penolong dan perlengkapan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak (*moving average method*)
4. Persediaan Produk Dalam Proses
   Persediaan produk dalam proses dihitung setiap triwulan berdasarkan beban pokok produksi terapan, dan pada akhir tahun buku dinyatakan sebesar beban pokok produksi dengan menggunakan metode rata-rata sederhana.
   Persediaan produk dalam proses terdiri dari:
   - *Bulk* (barang curah) hasil produksi yang belum lulus uji (karantina) maupun telah lulus uji dengan kondisi siap untuk diformulasi menjadi produk akhir dan dijual sebelum dilakukan pengemasan lebih lanjut.
   - Produk akhir hasil produksi yang telah dikemas dalam wadah (botol/ampul/vial/*uniject blank*) baik yang belum lulus uji (karantina) maupun telah lulus uji sebelum dilakukan pengemasan lebih lanjut, diberi etiket, leaflet dan dimasukkan ke dalam dus.
5. Persediaan Produk Jadi
   Persediaan produk jadi terdiri dari :
   - Persediaan Produk Perusahaan
     Persediaan produk perusahaan merupakan hasil produksi sendiri dan produk yang dibeli dari luar, tetapi masih memerlukan proses produksi lebih lanjut di perusahaan.

     Persediaan produk pada tahun berjalan dinilai dengan metode harga pokok terapan tahunan *(applied cost with yearly estimated cost method)* dan pada akhir tahun dinilai dengan metoda harga pokok aktual rata-rata sederhana *(simple average actual cost method)*.

     Total nilai perbedaan (*variance*) yang timbul antara harga pokok terapan dan harga pokok aktual akan dialokasikan :
     a. Pada laporan keuangan interim (triwulan I, II dan III) dialokasikan proporsional kepada (i) kelompok akun Beban Pokok Penjualan pada akun Selisih Pembebanan Beban Pokok Penjualan Produk dan (ii) kelompok akun Persediaan Produk Jadi pada akun Selisih Pembebanan Persediaan Produk.
     b. Pada laporan keuangan tahunan (akhir tahun) dialokasikan proporsional untuk masing-masing produk yang terjual dan yang masih tersisa sebagai persediaan.
   - Persediaan *Partnership*
     Persediaan Partnership terdiri dari barang jadi yang dibeli oleh Perusahaan (selain bulk) yang masih memerlukan tambahan proses produksi menjadi produk akhir di Perusahaan.
   - Persediaan *trading partnership*
     Persediaan *trading partnership* terdiri dari barang jadi yang dibeli secara lokal maupun impor yang dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih *(the lower of cost or net realizable value)*. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak *(moving average method)*.

6. Persediaan dalam Perjalanan
   Persediaan barang dalam perjalanan adalah persediaan bahan baku/bahan penolong/ perlengkapan/barang dagangan yang pada akhir periode pelaporan barangnya sudah diterima/tiba di pelabuhan dan sesuai syarat penyerahan barang sudah menjadi milik Perusahaan. Khusus untuk barang yang berasal dari impor dibuat Nota Perhitungan Barang Impor (NPI) sementara sebagai dasar mencatat nilai "Persediaan dalam Perjalanan".
7. Persediaan dalam Karantina
   Persediaan dalam karantina merupakan persediaan bahan baku, bahan penolong, perlengkapan maupun barang dagangan yang pada akhir periode pelaporan barangnya sudah diterima atau tiba di Perusahaan, tetapi belum memenuhi syarat penyerahan barang karena belum lulus uji. Persediaan dalam karantina dikelompokkan ke kelompok Aset Lancar Lainnya.
8. Penurunan Nilai Persediaan
   Penurunan nilai persediaan menjadi sebesar nilai realisasi bersih diakui sebagai beban dalam periode terjadinya penurunan nilai. Pemulihan kembali nilai persediaan setelah terjadi penurunan nilai diakui sebagai pengurangan beban periode terjadinya pemulihan.

   Persentase penurunan nilai persediaan diakui jika nilai tercatat melebihi nilai realisasi neto. Persentase ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa depan.

j. Aset Tetap

1. Pengukuran Aset Tetap
   Aset tetap pemilikan langsung, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset tetap, kecuali Tanah, disusutkan sesuai tabel berikut:

Kelompok Aset Tetap	Metode Penyusutan	Manfaat Keekonomian	Tarif Penyusutan
Bangunan	Garis Lurus	10-20 Tahun	5%-10%
Inventaris Pabrik & Mesin	Saldo Menurun	8-16 Tahun	12,5%-25%
Inventaris Kantor	Saldo Menurun	4-8 Tahun	25%-50%
Inventaris Lainnya	Saldo Menurun	8-16 Tahun	12,5%-25%
Kendaraan Bermotor	Saldo Menurun	4-5 Tahun	25%-50%

   Penyusutan tahun berjalan untuk golongan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus *(straigtht-line method)* sedangkan penyusutan untuk golongan bukan bangunan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun *(declining balance method)*.

   Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap dalam rangka menjaga manfaat keekonomian di masa yang akan datang, diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran dalam jumlah yang material setelah perolehan awal suatu aset dan dapat meningkatkan manfaat keekonomian di masa yang akan datang, dikapitalisasi.

2. Aset Dalam Pembangunan
   Aset dalam pembangunan disajikan tersendiri dalam kelompok aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya diperoleh dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

3. Aset Tetap Tidak Produktif
   Aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena rusak atau usang dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan disajikan pada pos aset tetap tidak produktif dalam kelompok aset tidak lancar lainnya sebesar nilai wajarnya. Jika akan dijual dalam periode pendek maka aset tersebut disajikan dalam kelompok aset lancar sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

   Penghapusbukuan aset tetap dilakukan setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS atau Dewan Komisaris.

k. Aset Takberwujud

1. Biaya yang berhubungan dengan penyempurnaan sistem dan prosedur yang dapat diidentifikasi, dikendalikan serta memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset takberwujud. Biaya ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat 4 (empat) tahun.

2. Biaya pengembangan *upstream* vaksin flu meliputi biaya-biaya yang terkait dengan penemuan riset atau pengetahuan produksi vaksin flu yang berbasis telur dari penyiapan telur, pembuatan bulk, uji klinis sampai registrasi dari produk tersebut yang dilakukan oleh pihak eksternal. Biaya pengembangan *upstream* vaksin flu diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat 8 (delapan) tahun.

l. Akuntansi Argikultur

Akuntansi agrikultur bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Aktivitas agrikultur (*agricultural activity*) adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh perusahaan untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan.

Aset biologis merupakan hewan atau tanaman hidup yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk digunakan dalam proses utama dalam kegiatan utamanya, termasuk pula didalamnya produk yang tumbuh pada tanaman produktif, Tanaman dan hewan produktif adalah tanaman hidup dan hewan yang:

a. Digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur;
b. Diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan
c. Memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental (*incidental scrap*).

Hewan yang termasuk dalam aset biologis aktivitas agrikultur, antara lain:

a. Hewan yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur;
b. Hewan yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur dan perusahaan juga akan memanen dan menjual hewan tersebut sebagai produk agrikultur; serta.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi yaitu pada saat penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual).

n. Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans

Biaya-biaya yang dikeluarkan dari tahapan penelitian (atau tahapan penelitian pada proyek internal) uji klinis, surveilans produk dan lingkungan serta pemantauan produk yang sudah dijual di pasar.

o. Pajak Penghasilan

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini. Pajak kini diakui berdasarkan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

p. Imbalan Kerja

Perushaan melaksanakan imbalan manfaat karyawandan menyelenggarakan program pensiun/imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program pensiun karyawan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan membukukan imbalan manfaat karyawan lainnya untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Perusahaan mengakui beban dan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja".

Perhitungan beban jasa kini, jasa lalu dan nilai kini kewajiban imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Perusahaan mengakui komponen biaya imbalan pasti sebagai berikut:

a. Biaya jasa dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti dalam laba rugi; dan
b. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan imbalan hasil atas aset program dalam penghasilan komprehensif lain.

Selain imbalan manfaat karyawan, Perusahaan juga menyelenggarakan program pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat dan karyawan kontrak. Program ini memberikan imbalan manfaat karyawan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya. Pendanaan dana pensiun berdasarkan ketentuan terakhir yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan Himpunan Karyawan (HIKA) periode 2015-2017 pasal 66, yaitu 15% dari gaji dasar dengan komposisi 60% ditanggung oleh pemberi kerja sedangkan 40% ditanggung oleh karyawan masing-masing.

q. Pendapatan Hibah

Sejak 1 Januari 2011, Perusahaan melakukan penerapan lebih awal terhadap PSAK 61 "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah" sehubungan dengan diberlakukannya PSAK 6 " Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas", ISAK 1 " Penentuan Harga Pasar Dividen:, ISAK 2 "Penyajian Modal Dalam Neraca dan Piutang Kepada Pemegang Saham" dan ISAK 3 "Akuntansi Atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan". Penerapan PSAK ini dilakukan secara retrospektif.

Hibah terkait dengan aset, termasuk hibah non moneter pada nilai wajar, disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai penghasilan ditangguhkan atau dicatat sebagai pengurang jumlah tercatat aset. Hibah terkait dengan penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam pos umum seperti "penghasilan lain-lain" atau alternatif pengurangan dalam beban terkait. Hibah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan dana hibah.

r. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, mensyaratkan Perusahaan untuk memakai estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan. Sehubungan dengan ketidakpastian yang melekat dalam pembuatan estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan dalam periode mendatang mungkin didasarkan atas jumlah-jumlah yang berbeda dari estimasi tersebut.

Sejak 1 Januari 2011, Perusahaan telah mengadopsi PSAK 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabiltas Kontijensi, dan Aset Kontijensi", yang efektif untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif.

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Pos-pos signifikan yang terkait dengan taksiran dan asumsi antara lain termasuk, nilai tercatat aset tetap, aset takberwujud dan penyisihan untuk piutang. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut.

3. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kas	185.630.168	183.925.904
Bank :		
Pihak Berelasi - Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.818.631.222	97.880.105.993
PT Bank Jabar Banten Tbk	263.059.119	1.013.938.428
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.281.816.967	5.285.645.071
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	174.256.150	141.582.538
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	144.277.121.666	51.861.052.904
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	30.050.767.671	-
Pihak Berelasi - Valas		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
2018 : USD17.334.637,08	251.022.879.556	
2017 : USD10.050.343,80		136.162.057.802
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
2018 : EUR120.528,19	1.995.916.694	
2017 : EUR744.988,86		12.049.166.726
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
2018 : USD5.045.005,94	73.056.731.017	
2017 : USD2.045.219,81		27.708.637.986
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		
2018 : USD16.590,89	240.252.678	
2017 : USD89.836,57		1.217.105.850
Jumlah dipindahkan	518.181.432.741	333.319.293.298

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Jumlah Bank Valas pindahan	518.181.432.741	333.319.293.298
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		
2018 : EUR27.149,40	449.587.277	
2017 : EUR27.149,40		439.104.079
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
2018 : USD53.089,84	768.793.973	
2017 : USD53.043,67		718.635.641
	519.399.813.990	334.477.033.019
Sub Jumlah Kas dan Bank	**519.585.444.158**	**334.660.958.923**
Setara Kas		
Pihak Berelasi		
Deposit On Call - Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1.000.000.000
PT Bank BTN Syariah (Persero) Tbk	-	15.000.000.000
Deposito Berjangka - Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.500.000.000	4.500.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	3.000.000.000
Deposito Berjangka - Valas		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
2018 : USD471.300	6.824.895.300	
2017 : USD471.300		6.385.172.400
Sub Jumlah Setara Kas	**16.324.895.300**	**34.885.172.400**
Jumlah Kas dan Setara Kas	**535.910.339.458**	**369.546.131.323**
Tingkat Bunga Deposito:		
Deposit On Call - Rupiah	-	3,50%-4,00%
Deposito Berjangka - Rupiah	5,75%	6,00%
Deposito Berjangka - US Dollar	0,50%	0,50%-1,50%

4. PIUTANG USAHA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pelanggan Dalam Negeri		
Pihak Berelasi:		
PT Rajawali Nusantara Indonesia	7.988.497.172	5.307.142.900
PT Indofarma Global Medika	2.591.896.328	3.561.885.745
PT Kimia Farma Trading & Distribution	3.616.541.695	-
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	363.378.265	345.444.602
Jumlah	14.560.313.460	9.214.473.247
Pihak Ketiga		
PT Merapi Utama Pharma	10.225.352.901	8.406.421.739
PT Sagi Capri	5.558.037.291	8.287.776.967
PT Pamor Baru	225.000.000	225.000.000
Aventis Pharma	404.106.176	464.200.400
Bumi Paradise	2.712.842.264	-
Jumlah	19.125.338.632	17.383.399.106
Sub Jumlah	**33.685.652.092**	**26.597.872.353**

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pelanggan Luar Negeri		
Pihak Ketiga:		
UNICEF		
2018: USD3.184.459,00	46.114.150.779	
2017: USD5.816.952,50		78.808.072.470
Bionet		
2018: USD7.200.170,10	104.265.663.218	
2017: USD13.219.267,15		179.094.631.348
Universal - Exim		
2018: USD4.770.500,00	69.081.610.500	
2017: USD1.682.450,00		22.793.832.600
BIOLOGICAL E LIMITED		
2018: USD0	-	
2017: USD403.760,00		5.470.140.480
PANACEA		
2018: USD1.575,00	22.807.575	
2017: USD115,00		1.558.020
Arabio		
2018: USD17.304,88	299.756.700	
2017: USD0,00		-
Sub Jumlah	**219.783.988.772**	**286.168.234.918**
Jasa	996.185.203	737.513.392
Jumlah	**254.465.826.067**	**313.503.620.663**
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai	(400.349.778)	(365.343.156)
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	**254.065.476.289**	**313.138.277.507**

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (tahun) adalah:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sampai dengan 1 Tahun	254.065.476.289	313.137.291.250
>1 s.d 2 Tahun	33.212.055	17.816.260
>2 s.d 3 Tahun	8.087.288	225.492.710
>3 s.d 4 Tahun	11.013.832	29.796.419
Lebih dari 4 Tahun	348.036.603	93.224.024
Jumlah	**254.465.826.067**	**313.503.620.663**

Mutasi Penyisihan Penurunan Nilai:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Awal	365.343.156	346.011.041
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	35.006.623	19.456.433
Penghapusan Tahun Berjalan	-	(124.318)
Saldo Akhir	**400.349.778**	**365.343.156**

Piutang usaha senilai Rp35.000.000.000 dijadikan jaminan yang bersifat fidusia atas fasilitas kredit yang diterima dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/ Indonesia Exim Bank berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Pembiayaan No. PBD/SP3/38/2017 tanggal 15 Juni 2017 untuk jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juni 2019.

Piutang usaha senilai Rp250.000.000.000 dijadikan jaminan yang bersifat fidusia atas fasilitas kredit modal kerja (KMK) yang diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan No. R.II.291-ADK/DKR-2/12/2016, tanggal 19 Desember 2016 untuk jangka waktu kredit sampai dengan 19 Desember 2017 dan surat No. R.II.126-ADK.DKR-2/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 untuk jangka waktu sampai dengan 22 Juni 2019.

Penyisihan penurunan nilai piutang dinilai berdasarkan kondisi pelanggan yang sudah tidak bisa ditagih karena entitas pelanggan tidak diketahui dan sisa piutang dari bukti piutang PPh pasal 23 yang sudah lewat masa pajaknya, sehingga manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang yang lebih dari 1 tahun disisihkan sebesar 100%. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas tidak tertagihnya piutang.

Adanya hubungan berelasi mungkin mengakibatkan persyaratan transaksi tersebut diatas tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak ketiga.

5. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pihak Berelasi:		
Piutang PT Iglas (Persero)	1.302.637.458	1.302.637.458
Penjualan Aset	527.721.810	-
Pihak Ketiga:		
Piutang Lainnya	272.098.285	121.769.028
Jumlah	2.102.457.553	1.424.406.486
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai	(1.302.637.458)	(1.302.637.458)
Jumlah Piutang Lain-lain	**799.820.095**	**121.769.028**

6. PERSEDIAAN

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Bahan Baku/Penolong	612.582.735.193	212.600.886.226
Perlengkapan	-	767.989.350
Produk Dalam Proses	485.667.210.808	461.660.017.021
Produk Jadi	76.354.739.660	39.939.698.457
Trading Partnership	8.852.465.835	2.253.854.786
Jumlah	1.183.457.151.495	717.222.445.840
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai	(6.215.501.830)	(4.310.484.907)
Jumlah Persediaan-Bersih	**1.177.241.649.665**	**712.911.960.933**

Mutasi Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Awal	4.310.484.907	5.053.143.454
Pembebanan Tahun Berjalan	12.049.645.902	4.396.564.267
Pemulihan Tahun Berjalan	(10.144.628.979)	(5.139.222.814)
Saldo Akhir	**6.215.501.831**	**4.310.484.907**

Persediaan produk jadi dan bahan baku yang rusak atau kedaluwarsa tahun berjalan dibebankan pada kelompok beban pokok penjualan dilaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk selisih kurang atau lebih harga pokok terapan-aktual dibebankan ke beban (penghasilan) lain. Penyisihan dilakukan atas saldo persediaan yang telah dikurangkan dengan yang rusak atau kedaluwarsa.

Persediaan tahun 2018 telah diasuransikan kepada PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 (Polis No. 017-E/T/Bmd-Bdg/III2017); PT Mandiri AXA General Insurance (Polis No. CN/PAR/BDG-00248/032017/NDN), PT Asuransi Jasa Tania (Polis No. 000037/KP/KCBDG/III/2017), dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Polis No.01/BF/PAR-PRS/III/2017) terhadap semua risiko kecuali gempa bumi berdasarkan suatu paket polis tertentu untuk periode pertanggunggan 20 Maret 2017 sampai dengan 20 Maret 2019 dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp365.591.333,00; Rp111.186.417,00, Rp246.860.574,00, dan Rp232.773.678,00. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atas risiko kerugian.

Persedian barang senilai Rp60.000.000.000 dijadikan jaminan yang bersifat fidusia atas fasilitas kredit yang diterima dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan No.PBD/SP3/38/2018 tanggal 15 Juni 2017 untuk jangka waktu kredit sampai dengan 25 Juni 2019.

Persediaan barang senilai Rp300.000.000.000 dijadikan jaminan yang bersifat fidusia atas fasilitas kredit modal kerja (KMK) yang diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. R.II.291-ADK/DKR-2/12/2016, tanggal 19 Desember 2016 untuk jangka waktu sampai dengan 19 Desember 2017 dan No. R.II.126-ADK.DKR-2/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 untuk jangka waktu sampai dengan 22 Juni 2019.

7. UANG MUKA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pembelian Lokal	53.786.581.219	3.547.564.020
Pembelian Barang Impor	67.508.746.659	22.119.373.593
Impor Dalam Penyelesaian	255.106.463	566.425.191
Uang Muka Monitoring	-	1.410.000.000
Uang Muka Diklat	86.000.000	67.000.000
Uang Muka Lainnya	214.200.000	24.000.000
Jumlah	**121.850.634.341**	**27.734.362.805**

Uang muka pembelian lokal dari:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PT Pembangunan Perumahan	31.183.087.740	-
PT Prodia Diacro Laboratories	108.419.200	-
PT Sabil Huda Utama	1.474.851.040	-
PT Wijaya Karya Gedung	18.401.261.039	-
CV Biolaf Indonesia	1.080.000.000	-
PT Jantan Setia Sakti	153.750.000	-
PT Bina Bandung	1.185.212.200	-
PT Niagaraasri Karyatama	-	1.617.525.420
PT Sinar Inti Panel	170.000.000	1.174.530.000
Lain-lain	30.000.000	755.508.600
Jumlah	**53.786.581.219**	**3.547.564.020**

Uang muka pembelian barang impor terdiri dari:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Autoclave No. 2 for Filling Line 3	1.048.307.687	-
Strains of Bordotella Pertussis for Efficient Production of Acellular Pertussis Vaccine	1.344.789.215	-
Stainless Steel Final Bulk Vessel 500/240 L and Intermediate Vessel 320/235L System (1 set Formulation Equipment for Filling Ilne 3)	3.824.535.000	-
20% of 2 set Autoclave Sterilization (FRD-U15A30WZ) for Media Department	2.682.715.200	-
2,500,000 pcs HEATmarker VVM2 bOPV 20 ds BF76	1.764.165.926	-
Pembayaran L/C Impor MI77106108353 Concentrate HBSAG Bulk	44.684.592.541	-
20% 1 Unit Saturated Steam Sterilization, Chamber mm 900Wx1300Hx1250D	1.240.739.269	-
20% 1 Unit Steam/Water Washer,Chamber mm 1000Wx1000H	1.133.514.888	-
2,000 pcs HEATmarker VVM2 Freight ,bOPV 20 Dose	1.058.148.536	-
20% Down Payment for 1 unit CARR Powerfuge Separation System Model P12 from A Barry-Wehmiller Company	4.776.876.432	-
20 % Down Payment of 1 unit Saturated Steam Sterilizer ,Chamber mm 800W X 1000H X 1250D	1.076.383.750	-
Freeze Alert Profile 157; 20,000pcs Vaxalert Type 1 & 10,000pcs Type 2	-	6.071.454.912
CS 40 with U Caps-Case of 2 Pieces-Getinge Singapore	-	4.466.369.160
20% for one (1) set Filling Syringe Machine_Inv 170370 PO-14060	-	4.085.456.412
Heatmaker VVM30 Dot	-	1.578.125.232
Underpayment of service fee invoice	-	1.382.844.510
30% of 2.008 liters CS-IF-1D Iron Fortified Calf-Serum etc	-	1.371.100.954
Autoclave Sterilizations for SPF Animal	-	1.696.506.639
Pembelian Lainnya (dibawah 1 Miliar)	2.873.978.214	1.467.515.775
Jumlah	**67.508.746.659**	**22.119.373.594**

Uang muka impor dalam penyelesaian sebesar Rp255.106.463 merupakan pembayaran biaya asuransi, biaya bongkar muat, biaya inklaring, bea masuk dan pajak terkait proses penanganan barang impor dari bandar udara/pelabuhan dalam negeri ke lokasi Perusahaan.

8. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	138.453.336.124	199.225.676.163
Pungutan/Potongan PPN - Keluaran WAPU	16.420.652.332	5.561.014.882
PPH Pasal 28	125.053.575.019	155.161.335.095
Jumlah	**279.927.563.475**	**359.948.026.140**

Saldo PPN Masukan per 31 Desember 2018 sebesar Rp138.453.336.124 setelah memperhitungkan restitusi PPN masa pajak Bulan Maret 2016 sebesar Rp27.917.798.683 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80028/051-00028-2018, restitusi PPN masa pajak Bulan

Juli 2017 sebesar Rp 24.141.709.406 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.00028/SKPPKP/WPJ.19/KP.0303/2017, restitusi PPN masa pajak Bulan September 2017 sebesar Rp22.436.016.164 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.00029/SKPPKP/WPJ.19/KP.0303/2017, restitusi PPN masa pajak Bulan Oktober 2017 sebesar Rp6.254.124.486 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80114/051-00114-2018 tanggal 23 april 2018, restitusi PPN masa pajak Bulan November 2017 sebesar Rp9.440.898.751 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80120/051-00120-2018 tanggal 23 april 2018, restitusi PPN masa pajak Bulan Desember 2017 sebesar Rp75.417.881.571 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80115/051-00115-2018 tanggal 23 april 2018.

Saldo PPN Masukan per 31 Desember 2017 sebesar Rp199.342.513.940 setelah memperhitungkan restitusi PPN masa pajak Bulan Februari Tahun 2017 sebesar Rp6.859.852.977 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80358/051-00358-2017 tanggal 9 November 2017. restitusi PPN masa pajak Bulan Maret Tahun 2017 sebesar Rp11.441.397.822 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80358/051-00359-2017 tanggal 9 November 2017, restitusi PPN masa pajak Bulan April Tahun 2017 sebesar Rp3.2320.018.592 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80358/051-00360-2017 tanggal 9 November 2017, restitusi PPN masa pajak Bulan Mei Tahun 2017 sebesar Rp10.750.315.827 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80358/051-00367-2017 tanggal 16 November 2017, restitusi PPN masa pajak Bulan Juni Tahun 2017 sebesar Rp18.730.817.739 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80358/051-00361-2017 tanggal 10 November 2017, restitusi PPN masa pajak Bulan Maret Tahun 2015 sebesar Rp26.819.788.146 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 00060/047/15/051/16 tanggal 22 Desember 2017, restitusi PPN masa pajak Bulan Juni Tahun 2015 sebesar Rp31.758.428.878 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 00005/047/15/051/17 tanggal 25 Januari 2017, restitusi PPN masa pajak Bulan Oktober-Desember Tahun 2017 sebesar Rp33.512.573.869 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80162/051-00162-2017 dan restitusi PPN masa pajak Bulan Juni – September Tahun 2017 sebesar Rp24.509.445.759 sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor; 80133/051-00133-2017.

Saldo PPH Pasal 28 per 31 Desember 2018 sebesar Rp125.053.574.959 adalah saldo PPH Pasal 28 tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp42.334.688.801 dan Rp82.718.886.217 dan PPH Pasal 28 tahun 2016 sebesar Rp72.885.249.118 setelah memperhitungkan restitusi sebesar Rp70.567.965.988 dan koreksi fiskal pajak sebesar Rp2.317.283.130.

b. Utang Pajak

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PPN Keluaran	-	-
PPN WAPU	31.327.819.106	12.985.314.722
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2)	5.068.527.178	261.872.244
Pajak Penghasilan Pasal 21	30.447.575.017	43.541.965.863
Pajak Penghasilan Pasal 22	986.276.000	702.243.000
Pajak Penghasilan Pasal 23	689.215.413	309.718.290
Jumlah	**68.519.412.714**	**57.801.114.118**

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pajak Kini	(178.927.525.000)	(194.907.187.750)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	(5.214.074.957)	6.628.937.923
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	**(184.141.599.957)**	**(188.278.249.827)**

d. Rekonsiliasi antara Laba Komersial dan Laba Fiskal

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi	727.367.615.801	713.633.859.989
Beda Waktu		
Beban Imbalan Pascakerja	29.144.740.882	25.565.469.092
Penyisihan penurunan nilai piutang	35.006.623	19.332.115
Penyisihan nilai persediaan	6.808.829.168	930.950.483
Penyusutan Aset Dalam Penyelesaian	(56.844.876.500)	-
Jumlah Beda Waktu	(20.856.299.828)	26.515.751.690
Beda Permanen		
Tantiem	-	14.782.500.218
Beban Rekreasi Karyawan & Direksi	677.948.880	-
Koreksi pajak dan denda pajak	5.349.519.963	5.576.669.070
Penghargaan dalam bentuk barang	90.668.000	1.054.924.200
Sumbangan sosial masyarakat	517.908.696	7.247.403.752
Bantuan sosial karyawan, direksi dan komisaris	17.200.000	7.937.060.217
Beban HUT Perusahaan, Olahraga dan Paket Ramadhan	654.891.206	2.896.408.604
Tunjangan Komunikasi dan Utilities Direksi (50%)	17.277.287	38.374.123
Beban jamuan tamu perusahaan	1.769.881.144	2.081.747.859
Company Profile, Kalender, Agenda & Peliputan	279.126.404	354.649.525
Langganan Perpustakaan dan Surat Kabar	96.801.300	95.525.000
Beban Promosi yang tidak dapat dibiayakan	440.775.000	620.277.273
Beban Bunga Deposito (SE-46/PJ.4/1995)	4.129.054.135	-
Bunga Jasa Giro dan Deposito yang dikenakan	(4.514.994.616)	(3.108.077.683)
Penyusutan mobil Non Direksi	-	133.114.746
Sewa ruangan dan Bagi Hasil yang dikenakan PPh Final	(327.272.727)	(231.437.500)
Jumlah Beda Permanen	9.198.784.672	39.479.139.404
Laba Kena Pajak	715.710.100.645	779.628.751.083
Taksiran Beban Pajak Penghasilan		
Laba Kena Pajak (Dibulatkan)	715.710.100.000	779.628.751.000
25%x715.710.100.000	178.927.525.000	
25%x779.628.751.000		194.907.187.750
Jumlah	**178.927.525.000**	**194.907.187.750**
Dikurangi: Pajak Dibayar Dimuka		
Pasal 22	50.762.225.593	32.913.093.693
Pasal 23	50.539.790	56.504.162
Pasal 25	170.449.448.418	244.656.476.112
	221.262.213.801	277.626.073.967
(Lebih) Kurang Bayar PPh Badan	**(42.334.688.801)**	**(82.718.886.217)**

e. Pajak Tangguhan

Rekonsiliasi antara taksiran pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku sebesar 25% dari laba akuntansi sebelum taksiran beban (manfaat) pajak penghasilan dan beban pajak seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Laba Sebelum Pajak Penghasilan menurut laporan lab rugi	727.367.615.801	713.633.859.989
Beban Pajak dengan Tarif Pajak Maksimum	181.841.903.950	178.408.464.997
Pengaruh Pajak atas Beda Permanen	2.299.696.006	9.869.784.830
Beban Pajak Perusahaan	184.141.599.957	188.278.249.827
Beban Kini	178.927.525.000	194.907.187.750
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	**5.214.074.957**	**(6.628.937.923)**

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dari dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas

	2016	Dibebankan Ke Laba Rugi Komprehensif	2017	Dibebankan Ke Laba Rugi Komprehensif	2018
Aset Pajak Tangguhan					
Imbalan Kerja	21.909.574.908	6.391.367.273	28.300.942.181	7.286.185.220	35.587.127.401
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	412.162.125	4.833.029	416.995.153	8.751.656	425.746.809
Penyisihan Persediaan	1.263.285.863	232.737.621	1.496.023.484	1.702.207.292	3.198.230.776
Penyusutan Aset Dalam Penyelesaian	-	-	-	(14.211.219.125)	(14.211.219.125)
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	**23.585.022.897**	**6.628.937.923**	**30.213.960.819**	**(5.214.074.957)**	**24.999.885.862**

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Asuransi	10.150.459.695	7.385.114.091
Sewa	2.259.656.100	5.088.516.667
Jumlah	**12.410.115.795**	**12.473.630.758**
Asuransi Dibayar Dimuka terdiri dari:		
Asuransi Karyawan	370.377.958	346.208.417
Asuransi persediaan	177.669.009	159.402.100
Asuransi kebakaran bangunan dan aset tetap didalamnya	9.592.489.931	6.851.822.718
Asuransi kendaraan	9.922.797	27.680.856
Jumlah	**10.150.459.695**	**7.385.114.091**

Asuransi dibayar dimuka tersebut merupakan saldo premi asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), BNI Life, PT Asuransi Bumiputera Muda 1967, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

10. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Bunga Deposito	23.923.288	13.994.095
Pendapatan Lainnya YMA Diterima	60.254.400	-
Jumlah	**84.177.688**	**13.994.095**

11. ASET LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Persediaan Dalam Perjalanan	1.102.741.811	-
Persediaan Dalam Karantina	8.001.519.388	166.520.427.315
Persediaan Dalam Proses Penggantian	535.937.034	1.677.961.312
Jumlah	**9.640.198.233**	**168.198.388.626**

Persediaan dalam karantina berasal dari pembelian bahan baku vaksin dan sera dan bahan perkemasan yang sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 masih dalam status karantina karena sedang dalam proses pengujian (lihat catatan 2i).

Persediaan Dalam Proses Penggantian per 31 Desember 2018 terutama dari persediaan bahan kemasan yang dinyatakan tidak lulus uji.

12. ASET TETAP

	31 Desember 2018				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Tanah	2.099.450.724.575	-	-	-	2.099.450.724.575
Bangunan	724.633.787.458	311.547.085	383.892.190	9.147.942.800	733.709.385.153
Peralatan Mesin & Pabrik	1.374.341.255.360	49.649.340.602	4.690.786.606	38.601.602.167	1.457.901.411.523
Peralatan Kantor	143.467.626.748	10.490.831.730	227.920.356	-	153.730.538.122
Peralatan Utilitas	106.328.397.795	5.265.082.300	1.534.618.580	53.014.634.019	163.073.495.534
Kendaraan Bermotor	4.700.933.750		2.450.490.000		2.250.443.750
Aset Dalam Pembangunan					-
Bangunan	239.722.775.371	323.731.109.063	-	(9.147.942.800)	554.305.941.634
Peralatan Mesin, Pabrik, kantor dan Utilitas	790.146.053.504	289.961.570.485	-	(46.874.979.064)	1.033.232.644.925
Aset tetap Dalam Perjalanan					-
Peralatan Mesin, Pabrik, kantor dan Utilitas	44.741.257.122	4.138.349.535	-	(44.741.257.122)	4.138.349.535
Jumlah	5.527.532.811.682	683.547.830.800	9.287.707.732	-	6.201.792.934.751
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai					
Bangunan	212.551.036.469	35.668.868.118	232.180.451	-	247.987.724.136
Peralatan Mesin & Pabrik	756.398.174.412	27.578.812.815	4.224.055.499	-	779.752.931.728
Peralatan Kantor	110.751.408.029	74.619.749.322	226.464.531	-	185.144.692.820
Peralatan Utilitas	49.187.694.430	8.225.714.057	1.307.899.397	-	56.105.509.090
Kendaraan Bermotor	4.413.537.230	117.663.630	2.450.489.994	-	2.080.710.866
Jumlah	1.133.301.850.570	146.210.807.942	8.441.089.872	-	1.271.071.568.640
Nilai Buku	**4.394.230.961.112**				**4.930.721.366.111**

	31 Desember 2017				
	Saldo Awal 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir 31 Desember 2017
Biaya Perolehan					
Tanah	2.059.183.000.000	40.267.724.575	-	-	2.099.450.724.575
Bangunan	631.496.070.678	210.100.000	-	92.927.616.780	724.633.787.458
Peralatan Mesin & Pabrik	1.277.104.717.501	51.840.821.026	-	45.395.716.834	1.374.341.255.360
Peralatan Kantor	130.023.223.543	12.664.403.205	-	780.000.000	143.467.626.748
Peralatan Utilitas	98.139.095.695	810.909.000	-	7.378.393.100	106.328.397.795
Kendaraan Bermotor	4.700.933.750	-	-	-	4.700.933.750
Aset Dalam Pembangunan					
Bangunan	281.524.373.167	51.126.018.984	-	(92.927.616.780)	239.722.775.371
Peralatan Mesin, Pabrik, kantor dan Utilitas	500.840.232.644	342.859.930.794	-	(53.554.109.934)	790.146.053.504
Aset tetap Dalam Perjalanan					
Peralatan Mesin, Pabrik, kantor dan Utilitas	-	44.741.257.122	-	-	44.741.257.122
Jumlah	4.983.011.646.978	544.521.164.706	-	-	5.527.532.811.682
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai					
Bangunan	178.620.094.413	33.930.942.056	-	-	212.551.036.469
Peralatan Mesin & Pabrik	668.202.004.521	88.196.169.891	-	-	756.398.174.412
Peralatan Kantor	92.179.926.332	18.571.481.697	-	-	110.751.408.029
Peralatan Utilitas	41.617.915.932	7.569.778.498	-	-	49.187.694.430
Kendaraan Bermotor	4.204.609.449	208.927.780	-	-	4.413.537.230
Jumlah	984.824.550.647	148.477.299.923	-	-	1.133.301.850.570
Nilai Buku	**3.998.187.096.331**				**4.394.230.961.112**

Pada tahun 2009 perusahaan menyediakan lahan untuk digunakan sebagai fasilitas vaksin flu burung oleh Departemen Kesehatan RI. Lahan tersebut berlokasi di desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat seluas 5.145 m2 dan dijalan pasteur seluas 3.953 m2. Sejak tahun 2011 proyek tersebut terhenti dan sampai dengan tanggal laporan ini lahan tersebut masih tertutup dan belum dapat digunakan oleh Perusahaan.

Pada tahun 2017 perusahaan membeli lahan seluas 2.36 Ha yang terletak di kawasan industry blok F6 dan F8 Kabupaten Karawang. Tanah tersebut akan dipergunakan untuk membangun penambahan fasilitas produksi.

Perusahaan melakukan penilaian atas indikasi penurunan maupun kenaikan atas nilai wajar tanah yang dimiliki perusahaan. Dan pada 31 Desember 2018 , tidak ada penurunan maupun kenaikan yang signifikan atas tanah yang dimiliki perusahaan.

Sebagian aset tetap yang terdiri atas mesin, inventaris dan peralatan pabrik yang berlokasi di jalan pasteur no.28 Bandung senilai Rp180.000.000.000 dijadikan jaminan fidusia atas fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan No. PBD/SP3/38/2018 tanggal 15 Juni 2018 untuk jangka waktu sampai dengan 25 Juni 2019.

Sebagian aset tetap yang terdiri atas mesin, inventaris dan peralatan pabrik yang berlokasi di jalan pasteur no.28 Bandung senilai Rp695.000.000.000 dijadikan jaminan fidusia atas fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. No. TIO.CRO/CCL.772/ADD/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dengan jangka waktu sampai

dengan 14 Agustus 2019, SPPK No. TIO.CRO/CCL.771/ADD/2018 tanggal 13 Agustus 2018 untuk jangka waktu sampai 14 Agustus 2019.

Aset tetap kecuali tanah dan kendaraan, telah diasuransikan kepada PT Asuransi Bumiputera Muda 1967, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Asuransi Jasa Tania terhadap semua risiko termasuk gempa bumi berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp4.163.187.160.692.

Kendaraan diasuransikan terhadap risiko all risk dan total loss only (TLO) kepada PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 dan PT Asuransi Jasa Tania dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp753.599.999.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atas risiko kerugian

Rincian Aset Dalam Pelaksanaan

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Bangunan Dalam Pelaksanaan		
Gedung Fasilitas Produksi Vaksin & Pengemasan	184.533.474.155	184.575.974.155
Fasilitas Downstream Vaksin BCG	29.657.550.000	20.909.603.900
Sentral Hewan Laboratorium-Animal House 2 (SHL-AH2) Building	7.677.061.500	7.677.061.500
Piping & Utilities Fasilitas Vaksin Rekombinan (Gedung 16)	-	7.280.133.300
Pembangunan Faspord Vaksin dan Pengemasan *Prefilled Syringe*	12.592.550.000	6.323.525.000
Bangunan Utility untuk Proyek Modular Campak Biofarma-Cisarua	9.341.875.000	3.886.220.000
Gedung Fasilitas Gedung No.3 (Media, Survailance, Pengujian Mutu)	58.247.925.055	2.589.471.250
Gedung Produksi vaksin dan Pengemasan Tahap II	244.499.757.616	2.310.138.636
Pembangunan Fasilitas Pengembangan Produk Pilot Scale (Gd No.34)	3.537.187.500	1.571.187.500
Building Control System Gedung No.16	1.581.269.000	1.423.142.100
Gedung Learning and Development Center	1.037.715.095	1.037.715.095
Bangunan Gudang Barang Inventaris di Cisarua	1.428.210.154	-
Lainnya (di bawah Rp1 Miliar)	171.366.559	138.602.934
Jumlah	**554.305.941.634**	**239.722.775.370**

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Peralatan Mesin, Pabrik, kantor dan Utilitas		
Integreted Filling Line 3	193.010.387.814	191.131.123.914
Filling Line BCG	119.400.375.374	119.400.375.374
Integreted WTP	101.996.896.326	101.996.896.326
Upstream Integrasi Tetanus	140.873.155.998	73.279.800.675
Downstream Tetanus	120.059.872.330	60.640.610.404
Integreted Filling Line for Filling Line 4	51.930.164.287	51.880.090.181
Autoclave	48.276.033.993	23.090.505.560
Packaging Line	36.135.620.717	36.135.620.717
Fermentor	34.938.329.455	17.583.040.459
Buffer Preparation Equipment	33.242.872.535	-
Formulation Equipment	26.352.734.802	13.974.936.470
Separator	21.396.164.151	10.773.631.000
Filling Syringe Machine_CIP2-000000198	21.126.295.474	-
Vial Ampoule Packaging Line	18.407.202.364	18.407.202.364
Kill Tank CIP2-000000310	8.918.600.000	-
Kompressor Udara	8.460.000.000	-
Generator Set 380 V_ CIP2-000000309	7.950.870.000	-
CEDI+Tangki Feed dan Permeated RO	5.928.351.242	5.928.351.242
Filter Cascade For Harvesting 1	5.254.189.690	-
Rack Knock Down	4.920.000.000	-
Isolator	4.129.665.128	4.129.665.128
Bioreactor 150L	3.261.929.763	3.261.929.763
Toc Analyzer	2.625.257.600	-
Sistem Otomatisasi Distribusi Listrik	2.325.057.520	-
URS SIPV	1.568.756.550	1.568.756.550
Infrastruktur Jaringan data Rendundant Fasiltas data center (DC) & Disarter Recovery Cente	1.443.780.480	-
Aset Pabrik/Mesin/Utility/Kantor Eks. IHU	1.441.702.625	1.441.702.625
Firewall CIP2-000000308	1.390.000.000	-
Ultralow Freezer CIP2-000000313	1.128.000.000	-
FFF URS Documents FPVP	1.063.601.200	1.063.601.200
Utilitas Listrik Gedung Vaksin dan Pengemasan	-	42.307.948.720
Upgrade Mixing Vessel	-	3.286.392.272
Integreted Continous Monitoring Particle & Remote Microbia	-	3.051.000.000
Peremajaan Listrik Gedung 33	-	2.100.080.000
Lainnya (dibawah 1 Miliar)	4.276.777.513	3.712.792.558
Jumlah	**1.033.232.644.925**	**790.146.053.502**

Aset Dalam Pelaksanaan merupakan gedung dan fasilitas peralatan didalamnya yang sampai dengan 31 Desember 2018 masih dalam proses pembangunan dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Aset	Nilai 31/12/2018
1	Gedung dalam Pelaksanaan	
	a. Gedung 43	429.033.231.771
	b. Gedung Lainnya	125.272.709.929
	Total Gedung dalam Pelaksanaan	**554.305.941.700**
2	Mesin, Pabrik, Utiliti dalam Pelaksanaan	
	a. Fasilitas Gedung 43	784.335.770.387
	b. Fasilitas Gedung Lainnya	248.896.874.542
	Total Mesin, Pabrik, Utiliti dalam Pelaksanaan	**1.033.232.644.929**
	Total Aset Dalam Pelaksanaan	**1.587.538.586.629**

Sebagian besar nilai Aset Dalam Pelaksanaan tersebut terdapat di Gedung Fasilitas Produksi Vaksin dan Pengemasan (gedung 43). Pembangunan Gedung 43 dimulai dengan perencanaan yang dilakukan oleh konsultan yaitu PT Rayakonsult dengan kontrak No. 00616/DIR/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Perencanaan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Fasilitas Produksi Vaksin dan Pengemasan PT Bio Farma (Persero) dengan nilai Rp13.698.000.000 tidak termasuk PPN. Kontrak tersebut kemudian di adendum beberapa kali yaitu adendum I No.01937/DIR/IV/2013 tanggal 3 April 2013, adendum II No. 01741/DIR/IV/2014 tanggal 14 April 2014 dengan merubah nilai kontrak menjadi Rp15.048.000.000 tidak termasuk PPN. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung 43 akan dilakukan dalam tiga tahap.

Tahap I pembangunan telah selesai dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk Cabang IV dengan kontrak No. 06063/DIR/XII/2014 tanggal 14 Desember 2014 dan di adendum dengan kontrak No. 00331/DIR/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Perjanjian Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Fasilitas Produsi Vaksin dan Pengemasan PT Bio Farma (Persero) Tahap I dengan nilai sebesar Rp167.024.180.921 tidak termasuk PPN. Serah terima pekerjaan telah dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 02/BAST-II/PP/Cab.IV/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Tahap II pembangunan Gedung 43 dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk Cabang IV dengan kontrak No. 00465/DIR/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 yang di adendum dengan kontrak No.02841/DIR/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Perjanjian Pengadaan Jasa Pekerjaan Pembangunan Gedung Fasilitas Produsi Vaksin dan Pengemasan PT Bio Farma (Persero) Tahap II dengan nilai kontrak Rp386.175.727.000 tidak termasuk PPN. Sampai dengan 31 Desember 2018 progres penyelesaian gedung telah mencapai 60,82 % . Pembagunan Gedung 43 Tahap II ini direncanakan akan selesai dan diserahterimakan pada triwulan IV tahun 2019.

Selanjutnya akan dilakukan pembangunan Gedung 43 tahap ke III yang sampai pada tanggal 31 Desember 2018 masih dalam tahap perencanaan.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Gedung 43 dan peralatan yang merupakan fasilitas produksi dan pengemasan dengan nilai sebesar Rp1.213.369.002.158 belum siap digunakan menunggu selesainya pembangunan gedung tersebut. Oleh karena itu seluruh nilai gedung dan peralatan tersebut masih dicatat kedalam Aset Dalam Pelaksanaan.

Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Gedung 43 dan fasilitas peralatannya akan selesai dan dapat digunakan pada tahun 2022.

Nilai Aset Dalam Pelaksanaan untuk gedung lainnya beserta tingkat penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

Gedung Dalam Pelaksanaan selain Gedung 43

No	Nama Aset	Data Per 31 Desember 2018			Keterangan
		Nilai Bangunan	Progres Penyelesaian	Rencana Penyelesaian	
1	Gedung Sentral Hewan Laboratorium	7.677.061.500	0%	Tahun 2022	Masih tahap perencanaan (Detail Engineering Design)
2	Fasilitas Downstream BCG	29.657.550.000	100%	-	Masih dalam proses kualifikasi dan Validasi Alat beserta ruangan
3	Gedung Produksi Media, SE (Gedung No.34)	58.247.925.055	37%	Triwulan III 2019	-
4	Fasilitas LAB	82.800.000	0%	-	-
5	Building Control System	1.581.269.000	90%	Mar-19	Masih dalam proses penyelesaian adminitrasi berita acara serah terima pekerjaan
6	Gedung Learning dan Development Center	1.037.715.095	0%	Tahun 2022	Pelaksanaan ditunda dan direschedule dan direncanakan selesai pada tahun 2022
7	Gedung Fasilitas Pengembangan Produk Skala Pilot (Gedung No.34)	3.537.187.500	0%	Triwulan II 2021	Tahap persiapan lelang dan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8	Pembangunan Fasilitas Produksi Vaksin dan Pengemasan Produk dalam Kemasan Prefiled Syringe di Are Ex-Difteri	12.592.550.000	100%	-	Masih dalam proses kualifikasi dan Validasi Alat beserta ruangan
9	Fasilitas Ayam SPF	16.153.000	0%	-	-
10	Bangunan Utiliti untuk Proyek Modular Campak Biofarma-Cisarua	9.341.875.000	100%	-	Sudah selesai dan akan digunakan menunggu kesiapan gedung lainnya
11	Bangunan Gedung Barang Inventaris di Cisarua	1.428.210.154	0%	Apr-19	Tahap persiapan konstruksi
12	Fasilitas Ruangan Generator Set Standby	72.413.625	0%	Jun-19	Tahap pelaksanaan konstruksi pada tahun 2019
Total Aset Dalam Pelaksanaan		**125.272.709.929**			

Sampai dengan 31 Desember 2018, gedung lainnya dan peralatan yang ada didalamnya dengan nilai sebesar Rp. 374.169.584.471,- belum siap digunakan menunggu selesainya pembangunan gedung dan instalasi alat. Oleh karena itu seluruh nilai gedung dan peralatan tersebut masih dicatat kedalam Aset Dalam Pelaksanaan.

Terhadap gedung dan peralatan yang sudah dapat dipakai di tahun 2019 akan segera dilakukan reklasifikasi ke aset tetap pada tahun 2019.

Beban penyusutan aset tetap tahun 2018 dan 2017 dialokasikan sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Produksi	97.165.114.045	97.756.594.684
Beban Jasa (catatan 33)	133.369.600	116.962.134
Beban Administasi dan Umum (catatan 36)	19.905.740.336	22.249.807.269
Beban Penjualan (Catatan 35)	5.531.266.086	6.022.070.903
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	23.475.317.875	22.331.864.932
Jumlah	**146.210.807.942**	**148.477.299.923**

13. ASET TAK BERWUJUD

	31 Desember 2018				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai Bruto					
Pengembangan Upstream Vaksin Flu dalam Penyelesaian	15.031.886.706	-	-		15.031.886.706
Perangkat Lunak	39.823.341.639	-	-		39.823.341.639
Perangkat Lunak Dalam Penyelesaian	5.879.576.946	-	-		5.879.576.946
Jumlah	60.734.805.291	-	-	-	60.734.805.291
Akumulasi Amortisasi					
Perangkat Lunak	28.212.412.101	7.175.779.704			35.388.191.805
Jumlah	28.212.412.101	7.175.779.704	-	-	35.388.191.805
Nilai Tercatat	**32.522.393.190**				**25.346.613.486**

	31 Desember 2017				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Nilai Bruto					
Pengembangan Upstream Vaksin Flu dalam Penyelesaian	14.638.406.706	393.480.000	-	-	15.031.886.706
Perangkat Lunak	39.593.341.639	230.000.000	-	-	39.823.341.639
Perangkat Lunak Dalam Penyelesaian	3.320.151.506	2.559.425.440	-	-	5.879.576.946
Jumlah	57.551.899.851	3.182.905.440	-	-	60.734.805.291
Akumulasi Amortisasi					
Perangkat Lunak	18.918.302.793	9.294.109.308	-	-	28.212.412.101
Jumlah	18.918.302.793	9.294.109.308	-	-	28.212.412.101
Nilai Tercatat	**38.633.597.058**				**32.522.393.190**

Aset takberwujud terdiri atas aset takberwujud dalam penyelesaian dan aset takberwujud setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Pengembangan Upstream Vaksin Flu dicatat sebagai aset takberwujud sesuai Nota Dinas No.09698/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang sampai dengan tanggal laporan masih dalam penyelesaian. Biaya ini merupakan biaya yang terkait dengan penerapan temuan riset atau pengetahuan produksi vaksin flu yang berbasis telur dari penyiapan telur, pembuatan bulk, uji klinis sampai registrasi dari produk tersebut.

Biaya pengembangan Upstream vaksin flu dalam penyelesaian per 31 Desember 2018 sebesar Rp15.031.886.706 merupakan biaya yang terkait dengan transfer teknologi upstream flu dengan BIKEN-Jepang yang meliputi aktivitas pengembangan vaksin flu pada skala pilot (5.000 telur), optimalisasi proses produksi pada skala pilot untuk menghasilkan yield (hasil) yang ekonomis, produksi preclinical lot, untuk vaksin prepandemik, uji tantang (*challenge study*) pada hewan uji ferret dan uji preklinis immunogenicity.

Tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan mulai tahun 2018 untuk vaksin flu (pre-pandemik) meliputi Uji klinis fase 2 dan 3 serta lisensi/registrasi produk ke BPOM.

Biaya pengembangan Upstream Vaksin Flu ini akan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat 8 (delapan) tahun sejak vaksin tersebut diproduksi secara komersiil.

14. ASET BIOLOGIS

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Aset Biologis	5.480.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Biologis	(1.112.440.000)	-
Jumlah	**4.367.560.000**	-

Pada tahun 2018 manajemen melakukan perhitungan atas aset biologis berdasarkan PSAK No. 69 tentang Agrikultur, mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, penerapan dini diperkenankan.

Penerapan PSAK No 69 ini merupakan penerapan awal di PT Bio Farma (Persero) yaitu hewan kuda yang berjumlah 208 ekor dimana hewan kuda tersebut diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dimasukkan dalam laba rugi pada periode terjadinya.

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Tangguhan	9.024.791.000	9.024.791.000
Dikurangi:		
Akumulasi Amortisasi Beban Tangguhan	(7.508.417.875)	(5.688.770.125)
Jumlah Beban Tangguhan Bersih	1.516.373.125	3.336.020.875
Setoran Jaminan	3.288.940.496	3.288.940.496
Persediaan tidak produktif	3.795.870.725	1.673.609.030
Dikurangi:		
Akumulasi Amortisasi Persediaan Tidak Produktif	(2.223.395.090)	(1.673.609.030)
Persediaan Bulk OPV Tipe 2	21.770.130.921	21.770.130.921
Akumulasi Penurunan Nilai Bulk OPV Tipe 2	(4.354.026.184)	-
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	**23.793.893.994**	**28.395.092.292**

Beban tangguhan merupakan biaya sistem jaringan listrik PLN ditangguhkan yang diamortisasi selama 4 tahun.

Setoran jaminan merupakan jaminan yang diberikan untuk penambahan daya listrik, jaminan sewa gedung Pakarti Center (Kantor Perwakilan Perusahaan) dan jaminan gas elpiji.

Pada bulan April 2016 World Health Organization (WHO) mendeklarasikan penghentian penggunaan, pengedaran, penyimpanan dan produksi vaksin polio tipe 2 (trivalent Oral Polio Vaccine/tOPV) secara global terhitung 1 Mei 2016, dan menggantinya dengan bivalent Oral Polio Vaccine (bOPV). Atas putusan tersebut Perusahaan telah mengambil langkah-langkah menghentikan produksi tOPV dan Bulk OPV tipe 2 serta menarik dari peredaran dan menggantinya dengan bOPV.
Pada tanggal Laporan Posisi Keuangan, Perusahaan memiliki persediaan OPV tipe 2 dalam bentuk bulk setara 2.882,5 liter dengan nilai tercatat sebesar Rp21.770.130.921,20. Manajemen berpendapat bahwa penyimpanan bulk OPV tipe 2 diperlukan karena:

a. Untuk keperluan produksi sIPV pada tahun 2021 dan pengembangan vaksin Polio Oral baru menggunakan strain baru virus Polio tipe 2 (nOPV2).
b. Sebagai cadangan untuk mendukung program Pemerintah jika terjadi outbreak atau wabah polio tipe 2, mengingat Indonesia masih berisiko terjadi outbreak atau wabah polio tipe 2.
c. Telah mendapat dukungan dari Pemerintah cc. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah meminta kepada WHO melalui representatif di Indonesia, agar PT Bio Farma diberi wewenang sebagai *stockpile* nasional untuk vaksin mOPV2.

d. Permintaan UNICEF kepada PT Bio Farma (Persero) agar tetap menyimpan persediaan bulk mOPV2 melalui surat Deputy Director, Supply Division UNICEF kepada Plt. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) tanggal 18 Desember 2017.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat persediaan bulk OPV tipe 2 sebesar Rp21.770.130.921,20 telah mencerminkan nilai realisasi bersih (netto) setalah mempertimbangkan aspek kegunaan dan mengkaji jumlah kebutuhannya di masa depan sesuai dengan kriteria-kriteria diatas.

Mempertimbangkan status eradikasi wabah polio pada akhir tahun 2022 sesuai dengan perkiraan waktu dari UNICEF. Pada tahun 2018 Perusahaan melakukan pencadangan sebagai penyisihan penurunan nilai persediaan bulk OPV tipe 2 berdasarkan position paper yaitu sebesar 20% per tahun.

16. UTANG USAHA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pihak Berelasi		
Bahan Baku/Penolong	14.065.903.448	14.188.380.308
Investasi	17.024.216.598	3.361.697.625
	31.090.120.046	17.550.077.933
Pihak Ketiga		
Bahan Baku/Penolong	215.343.500.565	227.735.251.361
Investasi	86.603.800.506	118.052.474.259
Pengadaan Jasa	3.074.492.907	7.914.720.921
	305.021.793.978	353.702.446.541
Jumlah Utang Usaha	**336.111.914.023**	**371.252.524.474**

Rincian Pihak Berelasi

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Bahan Baku/Penolong		
Koperasi Karyawan Bio Farma (K2BF)	6.074.566.076	7.160.314.918
PT Pertamina (Persero)	3.680.640.000	3.405.240.000
CV Karya Cahya Abadi	2.460.573.381	2.078.620.517
PT Telkom (Persero) Tbk	1.674.133.760	1.350.000.000
PT Kimia Farma (Persero)Tbk	175.990.231	194.204.873
Jumlah	**14.065.903.448**	**14.188.380.308**

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Investasi		
Koperasi Karyawan Bio Farma (K2BF)	1.303.784.900	3.019.432.690
CV Karya Cahaya Abadi	1.783.047.360	342.264.935
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	11.743.603.858	-
PT Telkom	2.193.780.480	-
Jumlah	**17.024.216.598**	**3.361.697.625**

Rincian Pihak Ketiga

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Bahan Baku/Penolong		
Rupiah		
PT Sabil Huda Utama	7.749.997.840	3.315.101.214
CV Sinar Gemilang	2.752.964.600	3.684.009.200
PT Dipa Pharmalab Intersains	6.960.000.000	-
PT Global Satria Aji	5.155.513.910	1.326.353.140
Sanofi	2.886.240.000	-
CV EMS	2.778.950.200	2.345.830.801
PT Schott Igar Glass	2.294.769.140	-
PT Menjangan Sakti	2.220.677.050	-
PT Bakti Mega Lestari	1.893.320.000	1.625.000.000
CV Pop Grafika	2.065.061.000	1.853.986.000
PT Satronet Filtrasi Indonesias	1.616.506.400	-
PT Pall Filtration Indonesia	-	1.570.420.295
PT Trakindo Utama	-	1.550.307.422
PT Fluida Teknika	-	1.055.995.050
CV Surya Tehnik	-	3.568.802.442
Monang Sianipar	-	1.003.160.150
PT Sciencewerke	-	1.368.520.010
PT Sagi Capri	-	32.763.500.000
PT INQUATEX	-	1.857.600.000
PT Elo Karsa Utama	-	4.864.938.625
PT Deisitek Manufaktur	-	1.053.263.270
Lainnya (di bawah Rp1 Miliar)	14.723.245.742	17.793.681.890
Jumlah - Rupiah	**53.097.245.883**	**82.600.469.509**
Valas		
Jansen Vaccine Corp		
2018: USD5.297.523,23	76.713.438.238	
2017: USD9.375.124,4		127.014.185.371
BioNet-Asia HONG KONG		
2018: USD1.650.000	23.893.650.000	
2017: USD1.200.000		16.257.600.000
Sanofi		
2018: EUR2.388.744	39.557.016.702	
2017: EUR0		-
Olympic Star Pharmaceutical		
2018: USD630.000	9.123.030.000	
2017: USD0		-
Bio Laboratories		
2018: USD199.983	2.895.953.823	
2017: USD11.296,48		153.044.711
Jumlah dipindahkan	152.183.088.763	143.424.830.082

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Jumlah Bahan Baku/Penolong Pindahan	152.183.088.763	143.424.830.082
Iwatani Corporation		
2018: JPY21.055.688	2.760.821.811	
2017: JPY0		-
AJ Vaccine A/S		
2018: USD157.241,28	2.277.010.976	
2017: USD0		-
Temptime		
2018: USD122.097,60	1.768.095.346	
2017: USD0		-
Samsung Medical Rubber Co., Ltd		
2018: USD105.500	1.527.745.500	
2017: USD		-
Seqirus Pty Ltd		
2018: AUD111.707	1.203.143.406	
2017: AUD0		-
Java TNC		
2018: USD35.160	509.151.960	
2017: USD		-
BioReliance		
2018: GBP936	17.196.921	
2017: GBP936		17.052.057
BIONET-ASIA CO., LTD		
2018: USD0,00	-	
2017: USD120.000		1.625.760.000
NIBSC		
2018: GBP0,00	-	
2017: GBP2.436		44.379.072
BE Vaccines Pte. Ltd		
2018: USD0,00	-	
2017: USD1.680		22.760.640
Jumlah - Mata Uang Asing	**162.246.254.683**	**145.134.781.852**
Jumlah Bahan Baku/Penolong	**215.343.500.565**	**227.735.251.361**

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rincian Utang Investasi/Pembelian Aset		
Rupiah		
PT Trakindo Utama	6.900.710.000	5.016.900.000
PT Sabil Huda Utama	5.214.199.390	1.152.065.225
PT Pall Filtration Indonesia	4.541.325.000	-
PT Catudaya Data Prakasa	2.599.286.670	2.510.989.000
PT Vision Teknik	2.625.257.600	1.875.000.000
CV Sinar Gemilang	5.975.583.000	-
PT ITS Science Indonesia	2.382.000.000	-
Jumlah dipindahkan	30.238.361.660	10.554.954.225

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Jumlah utang investasi Pindahan	30.238.361.660	10.554.954.225
CV Bhakti Mega Lestari	-	7.145.660.000
PT Archetype Construction Consultants Indonesia	5.600.874.455	-
PT MGI Asia Pacific	1.609.791.800	5.113.850.725
PT Kichi Arziki Industri	1.000.000.000	-
PT Bina Bandung	1.313.807.724	-
PT Bakti Mega Lestari	1.128.000.000	-
PT Fluida Teknika	1.035.781.790	-
PT Wijaya Karya	2.742.566.240	-
PT Niagaraasri Karyatama	-	4.967.150.977
PT Sinar Inti Panel	-	4.701.880.000
PT Chandra Karya Nusa	-	3.532.955.700
PT CELCO TEKNIK INDUSTRI	1.300.960.000	1.856.255.000
PT Karunia Alamindo Utama	1.278.500.000	1.906.100.000
PT Azbil Berca Indonesia	-	1.923.142.100
PT Prima Instrument Analitika	-	1.756.000.000
Lainnya (di bawah Rp1 Miliar)	7.652.449.515	9.833.983.234
Jumlah-Rupiah	54.901.093.184	53.291.931.961
Valas		
Applikon Biotechnology		
2018: EUR685.125	11.345.498.719	
2017: EUR806.175		13.038.768.104
Getinge		
2018: EUR94.170	1.559.431.658	
2017: EUR69.670		1.126.816.105
MGI		
2018: EUR12,048,30	199.516.836	
2017: EUR12.048,30		194.864.626
Airplan S.A		
2018:EUR685.600	11.353.364.600	
2017: EUR0		-
Pneumatic Scale Angelus		
2018: USD144.500	2.092.504.500	
2017: USD505.750		-
Maquinara Industrial Dara, S.L		
2018: EUR126.300	2.091.496.425	
2017: EUR0		-
Zirbus Technology GmbH		
2018: EUR52.447	868.504.572	
2017: EUR33.131,35		-
Jumlah dipindahkan	29.510.317.310	14.360.448.835

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Jumlah utang investasi Pindahan	29.510.317.310	14.360.448.835
Systech GmbH		
2018: EUR132.393	2.192.390.014	
2017: EUR0		-
MARCHESINI GROUP S.P.A		
2018: EUR0,00	-	
2017: EUR1.701.364,46		27.517.222.258
Adam Fabriwek P Ltd		
2018: USD0,00	-	
2017: USD1.098.000		14.875.704.000
Jumlah-Mata Uang Asing	31.702.707.324	56.753.375.093
Jumlah Pihak Ketiga-Investasi	**86.603.800.506**	**110.045.307.054**
Pengadaan Jasa		
Jasa Audit Manajemen dan Riset	2.520.179.375	6.738.630.725
Biaya Impor	554.313.532	1.176.090.196
Jumlah Pengadaan Jasa	**3.074.492.907**	**7.914.720.921**

17. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Jasa Produksi Karyawan	86.012.783.000	79.080.306.646
Keagenan Ekspor, Royalti dan Insentif Penjualan	16.915.955.336	10.706.534.275
Beban Karyawan dan Lainnya	695.239.092	5.142.407.893
Beban Kantor	3.580.849.989	9.253.711.680
Bunga Pinjaman	3.298.730.023	-
Jasa Profesional	377.000.000	1.036.774.754
Beban Angkut dan Embalage	-	2.639.339.438
Lainnya (di bawah Rp1 Miliar)	30.000.000	-
Jumlah	**110.910.557.440**	**107.859.074.686**

18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Swasta	18.484.579	97.054.169
Ekspor	1.627.877.560	910.722.301
Jumlah	**1.646.362.140**	**1.007.776.470**

19. UTANG JANGKA PENDEK

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Utang Bank		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	140.000.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60.000.000.000	-
PT Bank Exim	5.000.000.000	-
Jumlah	**205.000.000.000**	**-**

Utang jangka pendek senilai Rp205.000.000.000 merupakan Kredit Modal Kerja atas realisasi penggunaan fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Bio Farma (Persero) senilai Rp1.590.000.000.000. (Lihat catatan 42 point 13 sampai dengan 17).

20. LIABILITAS LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Tantiem	15.900.000.000	30.538.249.501
Taksasi Ongkos angkut dan embalage	9.172.619.733	10.490.052.968
Sanofi	(3.068.990.260)	-
Lainnya	1.113.235.071	606.729.508
Jumlah	**23.116.864.544**	**41.635.031.977**

Saldo liabilitas lancar lainnya atas sanofi merupakan pembelian yang belum dilakukan set off dengan penjualan ke PT Aventis Pharma dikarenakan belum dilakukan penagihan.

21. UTANG JANGKA PANJANG

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Middle Term Notes		
MTN Konvensional	125.000.000.000	-
MTN Syariah	325.000.000.000	-
Jumlah	**450.000.000.000**	**-**

Utang jangka panjang senilai Rp450.000.000.000 merupakan Middle Term Notes yang diberikan kepada PT Bio Farma (Persero). (Lihat catatan 42 point 18 sampai dengan 19)

22. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menerapkan liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013). Selain itu Perusahaan juga mengikutsertakan seluruh karyawan tetap dan kontrak ke dalam program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya.

Uraian berikut ini merupakan rangkuman perhitungan beban dan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan tahun 2018 dan 2017 yang diakui pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Perhitungan beban dan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan per 31 Desember 2018 dilakukan berdasarkan proyeksi perhitungan tahun 2018 yang dilakukan oleh aktuaris Independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria dalam laporannya No.035/KIS/LA/PS/01/2019 tanggal 9 Januari 2019 dengan menggunakan metode Project Unit Credit.

Asumsi Utama yang Digunakan

	2018	2017
Usia Pensiun Normal	58	50 & 58
Tingkat Diskonto	8,30%	7,50%
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	8%	8%
Tabel Mortalita	TMI III-2011	TMI III-2011
Tingkat Cacat	1% dari Mortalita	1% dari Mortalita
Tingkat Pengunduran Diri	0%	0%
Jumlah Pekerja (orang)	1.195	1.186
Rata-rata Usia Pensiun (tahun)	36,46	38,25
Rata-rata Masa Kerja (tahun)	9,61	11,88
Rata-rata sisa masa kerja (tahun)	17,54	12,10
Jumlah Upah sebulan (Rp)	6.823.578.150,00	5.942.225.027
Rata-rata upah sebulan (Rp)	5.710.107	5.010.308

Beban Imbalan Pasca Kerja

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Jasa Kini	15.005.336.206	14.394.931.921
Beban Bunga	17.890.721.776	13.064.543.848
Dampak Perubahan Kurtailmen dan Penyelesaian	-	-
Pembayaran GSH (Beban Langsung)	-	-
Jumlah	**32.896.057.982**	**27.459.475.769**

Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Awal Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	219.937.069.439	167.133.074.162
Dampak Perubahan Kurtailmen dan Penyelesaian		-
Dampak Perubahan Asumsi Aktuaria	(20.651.198.792)	31.811.337.218
Beban Jasa Kini	15.005.336.206	14.394.931.921
Beban Bunga	17.890.721.776	13.064.543.848
Pembayaran GSH	-	-
Pembayaran Imbalan Pasca Kerja Periode Berjalan	(3.751.317.100)	(1.894.006.678)
Laba (Rugi) Aktuaria atas Kewajiban	14.584.160.688	(4.572.811.032)
Saldo Akhir	**243.014.772.217**	**219.937.069.439**

Perubahan Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Awal	219.937.069.439	167.133.074.162
Beban Imbalan Pasca Kerja Tahun Berjalan	32.896.057.982	27.459.475.769
Pembayaran Pensiun	(3.751.317.100)	(1.894.006.678)
Pembayarn GSH (Sesuai Cadangan)	-	-
Pembayarn GSH (Beban Langsung)	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain	(6.067.038.104)	27.238.526.186
Saldo Akhir	**243.014.772.217**	**219.937.069.439**

23. MODAL SAHAM

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Modal Ditempatkan dan Disetor Pada Awal Tahun	8.000.000.000.000	8.000.000.000.000
Kapitalisasi Cadangan ke Modal Disetor	(6.000.000.000.000)	(6.000.000.000.000)
Modal Ditempatkan dan Disetor Pada Akhir Tahun	**2.000.000.000.000**	**2.000.000.000.000**

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No.34, tanggal 14 Desember 2016, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024481.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bio Farma (Persero), modal dasar Perseroan meningkat dari semula Rp5.000.000.000.000 (terdiri dari 5.00.000 lembar saham) menjadi Rp8.000.000.000.000 (terdiri dari 8.000.000 lembar saham) dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan meningkat dari semula Rp1.650.000.000.000 (terdiri dari 1.650.000 lembar saham) menjadi Rp2.000.000.000.000 (terdiri dari 2.000.000 lembar saham) dengan mengkapitalisasi sebagian cadangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp350.000.000.000.

24. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Surplus Revaluasi Aset Tetap - Net	1.980.781.821.592	1.980.781.821.592
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria		
Saldo Awal	(106.733.300.716)	(79.494.774.530)
Penambahan tahun berjalan	6.067.038.104	(27.238.526.186)
Jumlah	(100.666.262.612)	(106.733.300.716)
Jumlah Komponen Ekuitas Lainnya	**1.880.115.558.980**	**1.874.048.520.876**

25. SALDO LABA DAN PENGGUNAAN LABA

a. Saldo Laba-Dicadangkan

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Awal Tahun	1.250.552.226.426	899.824.236.342
Pembentukan Cadangan	288.945.610.161	350.727.990.083
Kapitalisasi Cadangan ke Setoran Modal	-	-
Penerapan PSAK 24	-	-
Saldo Laba Dicadangkan Akhir Tahun	**1.539.497.836.587**	**1.250.552.226.426**

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PE-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, dana PKBL bersumber dari:

1. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau
2. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN

Perusahaan mengambil kebijakan, dan PKBL bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan

b. Saldo Laba-Belum Dicadangkan

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Saldo Laba Pada Awal Tahun	525.355.610.162	501.040.990.083
Pembagian Laba:		
Dividen	(236.410.000.000)	(150.313.000.000)
Cadangan	(288.945.610.162)	(350.727.990.083)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	543.226.015.844	525.355.610.162
Saldo Laba Belum Dicadangkan Akhir Tahun	**543.226.015.844**	**525.355.610.162**

Penggunaan Laba

Pembagian atas laba bersih tahun 2017 dan 2016 ditetapkan dalam RUPS tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2016 tanggal 10 Mei 2017 sebagai berikut:

	31 Desember 2017	Persentase	31 Desember 2016	Persentase
Dividen	236.410.000.000	45,00%	150.313.000.000	30,00%
Cadangan	288.945.610.162	55,00%	350.727.990.083	70,00%
	525.355.610.162	**100,00%**	**501.040.990.083**	**100,00%**

26. PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN

	2018			
	Pemerintah	**Swasta**	**Ekspor**	**Jumlah**
Vaksin Bakteri	152.415.069.070	26.039.655.148	52.295.346.214	230.750.070.432
Vaksin Virus	129.137.590.360	51.494.257.437	1.025.599.087.639	1.206.230.935.436
Vaksin Kombinasi	523.629.830.990	16.688.850.480	144.063.990	540.462.745.460
Sera & Diagnostika	-	82.426.437.651	20.853.000	82.447.290.651
Jumlah	805.182.490.420	176.649.200.716	1.078.059.350.843	2.059.891.041.979
Dikurangi:				
Potongan Penjualan	-	(21.855.580.485)	-	(21.855.580.485)
Jumlah Bersih	**805.182.490.420**	**154.793.620.231**	**1.078.059.350.843**	**2.038.035.461.494**

	2017			
	Pemerintah	**Swasta**	**Ekspor**	**Jumlah**
Vaksin Bakteri	46.830.834.000	15.238.641.615	124.795.782.701	186.865.258.316
Vaksin Virus	137.983.668.000	45.137.436.034	1.118.103.714.876	1.301.224.818.910
Vaksin Kombinasi	306.291.210.000	17.509.693.665	9.519.244	323.810.422.909
Sera & Diagnostika	-	76.073.806.650	-	76.073.806.650
Jumlah	491.105.712.000	153.959.577.964	1.242.909.016.820	1.887.974.306.784
Dikurangi:				
Potongan Penjualan	-	(15.861.230.634)	-	(15.861.230.634)
Jumlah Bersih	**491.105.712.000**	**138.098.347.330**	**1.242.909.016.820**	**1.872.113.076.150**

27. PENJUALAN PRODUK *PARTNERSHIP*

	2018	**2017**
Pemerintah		
Vaksin MR 10DS	819.343.653.089	650.647.830.000
IPV	166.334.463.900	130.326.496.000
Vaksin BCG Impor	68.292.708.280	87.200.000.000
Jumlah	1.053.970.825.269	868.174.326.000
Swasta		
HJ Vaksin Meningitis/Menivax ACWY (0.5ml/vial)	45.801.916.602	227.782.836.375
HJ Vaksin PPD	22.055.110.920	10.444.130.220
HJ Live Attenuated JE	4.671.855.500	8.607.780.000
HJ BD Vaksin Measles Rubella (MR) 5 DS	-	715.600.000
HJ BD Vaksin Measles Rubella (MR) 10 DS	8.029.765.280	854.100.000
Jumlah	**1.134.529.473.571**	**1.116.578.772.595**
Dikurangi: Potongan Penjualan	(554.150.556)	(5.550.739.021)
Jumlah Bersih	**1.133.975.323.015**	**1.111.028.033.574**

28. PENJUALAN *TRADING PARTNERSHIP*

	2018	2017
Swasta		
Td 10 (*Trading Partnership)*	5.767.235.100	1.983.447.000
Human Papilloma Virus-Gardasil	30.683.400.000	15.355.050.000
HJ Diftheria Antitoxin	10.866.450.000	2.898.360.000
HJ Live Attenuated JE 1ds	-	110.500.000
Polyvalent snake Anti Venom	4.538.952.000	-
HJ Urokinase 60.000 IU	1.505.240.000	-
HJ Vaksin Varicella	3.337.200.000	-
Jumlah	56.698.477.100	20.347.357.000
Dikurangi: Potongan Penjualan	(3.587.644.290)	(227.767.900)
Jumlah Penjualan *Trading Partnership*	**53.110.832.810**	**20.119.589.100**

29. PENJUALAN JASA

	2018	2017
Imunisasi	7.834.023.812	7.047.018.650
Laboratorium	2.815.921.095	1.695.687.637
Jumlah	10.649.944.907	8.742.706.287
Dikurangi: Potongan Penjualan	(546.170.504)	(432.674.767)
Jumlah Bersih	**10.103.774.403**	**8.310.031.520**

Hasil penjualan imunisasi diperoleh dari imunisasi vaksin dan serum, sedangkan hasil penjualan laboratorium diperoleh dari jasa pengujian mutu dan pemeriksaan laboratorium.

30. BEBAN POKOK PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN

	2018	2017
Beban Produksi		
Pemakaian Bahan Baku	284.476.748.873	357.218.375.992
Pemakaian Bahan Penolong	92.298.435.686	185.157.807.918
Biaya Pemasangan & QC-FP	152.499.389.363	-
Karyawan	187.891.587.061	185.227.576.626
Sosial Karyawan	8.497.382.292	6.450.248.204
Perjalanan Dinas	3.276.851.004	3.339.827.992
Jasa Profesional	1.415.189.929	5.562.337.525
Pemeliharaan dan Perbaikan	167.156.660.502	148.022.825.768
Asuransi	7.877.938.587	3.967.633.607
Penyusutan dan Amortisasi	104.572.139.287	104.704.854.926
Kantor	13.568.157.189	9.143.705.323
Peningkatan dan Pengembangan SDM	1.188.252.475	2.947.002.960
Total Beban Produksi	**1.024.718.732.248**	**1.011.742.196.840**
Persediaan Produk Dalam Proses		
Awal Tahun	461.660.017.021	357.924.068.324
Akhir Tahun	(451.958.987.316)	(461.660.017.021)
Beban Pokok Produksi	**1.034.419.761.953**	**908.006.248.143**

	2018	2017
Persediaan Produk Jadi		
Awal Tahun	35.450.728.207	77.727.356.075
Kadaluarsa/Rusak	(1.657.312.381)	(3.755.261.785)
Promosi, Disumbangkan	(236.571.303)	(330.416.527)
Penggantian, dan Pemakaian Sendiri	(312.012.269)	(337.541.327)
Reklasifikasi ke Persediaan Lain-lain	-	(21.770.130.921)
Beban Pokok Barang tersedia untuk Dijual	**1.067.664.594.207**	**959.540.253.659**
Dijual untuk Imunisasi	(1.429.347.111)	(904.119.432)
Akhir Tahun	(55.269.598.384)	(35.450.728.207)
Jumlah	**1.010.965.648.712**	**923.185.406.019**

31. BEBAN POKOK PENJUALAN PRODUK *PARTNERSHIP*

	2018	2017
Beban Produksi		
Pemakaian Bahan baku	804.572.249.847	713.271.342.990
Pemakaian Bahan Penolong	188.433.554	-
Biaya Pemasangan & QC-FP	4.573.311.983	-
Persediaan Produk dalam proses		
Awal Tahun	-	-
Akhir Tahun	(33.708.223.492)	-
Beban Pokok Produksi	775.625.771.893	713.271.342.990
Persediaan Produk Jadi		
Persediaan Produk Jadi Awal	4.488.970.250	4.129.859.581
Produk rusak/Kadaluarsa	(59.915.528)	(1.786.655.458)
Pemakaian Produk Sendiri	(218.602.498)	(793.179.172)
Promosi Produk	(991.748)	(1.913.076)
Beban Pokok Produk Siap dijual	779.835.232.369	714.819.454.865
Persediaan Produk Jadi Akhir	(21.085.141.276)	(4.488.970.250)
Beban Pokok Produk untuk Imunisasi	(16.536.639)	(12.530.913)
Beban Pokok Penjualan Produk Jadi Partnership	**758.733.554.454**	**710.317.953.702**

32. BEBAN POKOK PENJUALAN *TRADING PARTNERSHIP*

	2018	2017
Persediaan Awal Tahun	2.253.854.786	1.077.050.535
Pembelian	50.007.840.623	20.680.487.803
Tersedia Untuk Dijual	52.261.695.410	21.757.538.338
Kadaluarsa/Rusak	-	(532.905.285)
Digunakan untuk promosi, penggantian, pemakaian sendiri dan disumbangkan	(2.573.276.047)	(378.090.231)
Digunakan untuk imunisasi	(855.267.597)	(1.826.955.855)
Persediaan Akhir Tahun	(8.852.465.835)	(2.253.854.786)
Jumlah Beban Pokok Penjualan Trading Partnership	**39.980.685.930**	**16.765.732.180**

33. BEBAN POKOK PENJUALAN JASA

	2018	2017
Penjualan Produk Jadi Perusahaan untuk imunisasi	1.429.347.111	904.119.432
Penjualan Produk Jadi Partnership untuk imunisasi	16.536.639	12.530.913
Penjualan Trading Partnership untuk imunisasi	855.267.597	1.826.955.855
Pemakaian Bahan Baku dan Penolong	1.085.562.861	21.795.553
Karyawan	9.064.450.808	3.490.437.848
Perjalanan Dinas	388.626.103	76.145.000
Jasa Profesional	384.269.545	73.217.000
Pemeliharaan dan Perbaikan	146.689.740	121.015.368
Penyusutan Aset Tetap	133.369.600	116.962.134
Asuransi	8.499.773	4.261.212
Beban Kantor	243.593.938	202.788.450
Peningkatan dan Pengembangan SDM	274.349.883	11.021.880
Lain-lain	39.556.623	-
Jumlah	**14.070.120.220**	**6.861.250.646**

34. PENGHASILAN LAIN-LAIN

	2018	2017
Penjualan Sampingan	1.213.699.217	448.844.848
Pendapatan Bunga Deposito	3.160.730.981	2.390.541.148
Pendapatan Jasa Giro	1.354.263.635	720.209.013
Hasil Sewa Ruangan dan Bagi Hasil	339.226.962	231.437.500
Pendapatan Denda dari Pemasok dan Pelanggan	3.438.364.911	1.744.798.043
Pendapatan Klaim Asuransi	38.507.867	575.233.401
Keuntungan Selisih Kurs	406.105.088.166	86.500.603.564
Keuntungan Penjualan Aset lain-lain	479.747.096	-
Potongan Pembelian Tunai	-	868.008.072
Pendapatan Hibah	8.200.623.608	2.005.440.189
Pemulihan Penyisihan Piutang	-	124.318
Pemulihan Penyisihan Persediaan	2.720.591.828	3.465.613.784
Pendapatan Lainnya (di Bawah Rp1 Milyar)	27.750.826.920	16.207.559.323
Jumlah	**454.801.671.191**	**115.158.413.202**

35. BEBAN PENJUALAN

	2018	2017
Pemaikan Bahan Baku & Penolong	7.415.902	126.000
Karyawan	20.400.100.738	27.980.806.494
Perjalanan Dinas	2.263.544.175	2.587.115.407
Jasa Profesional	146.725.000	91.515.600
Pemeliharaan dan Perbaikan	600.589.751	572.513.947
Asuransi	458.811.002	51.632.657
Penyusutan Aset Tetap	6.619.045.799	7.109.850.616
Beban Kantor	3.680.033.070	3.875.745.936
Peningkatan dan Pengembangan SDM	84.160.400	249.016.921
Ongkos Angkut & Embalage	53.491.702.088	52.019.220.941
Promosi dan Periklanan	13.281.661.543	15.634.426.421
Monitoring Produk	9.450.181.507	9.732.928.505
Royalti & Insentif Penjualan	25.539.628.249	16.207.869.473
Jaminan dan Kerugian Penjualan	1.687.159.093	1.365.481.224
Sumbangan Produk Jadi	52.340.000	-
Jumlah	**137.763.098.316**	**137.478.250.141**

36. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2018	2017
Karyawan	233.354.320.619	214.386.016.524
Dewan Komisaris dan Direksi	38.403.267.006	39.314.719.112
Beban Kantor	41.787.526.259	47.473.842.440
Pemeliharaan dan Perbaikan	27.251.405.816	27.009.466.724
Sosial Karyawan	11.051.742.265	11.122.746.763
Penyusutan Aset Tetap	19.905.740.336	22.249.807.269
Peningkatan dan Pengembangan SDM	6.980.467.791	8.491.504.654
Perjalanan Dinas	3.679.817.170	3.649.999.918
Jasa Profesional	7.123.391.638	8.976.897.266
HUT Perusahaan dan Olahraga	4.029.034.482	3.121.033.604
Jamuan Tamu	3.137.529.259	2.397.876.959
Pajak Bumi dan Bangunan dan Kendaraan	2.499.833.102	4.763.576.834
Asuransi	1.954.831.248	695.823.263
Amort. Beban Tangguhan dan Aset Takberwujud	1.613.062.500	3.077.717.103
Kemitraan dan Bina Lingkungan	6.268.865.728	12.822.702.113
Sumbangan Sosial Masyarakat	1.596.548.517	-
Lain-lain	247.900.748	180.718.589
Jumlah	**410.885.284.484**	**409.734.449.135**

37. BEBAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN SURVEILANS

	2018	2017
Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	42.999.625.530	37.148.956.510
Jasa Profesional	20.117.270.633	26.633.091.812
Karyawan	28.936.098.097	26.930.763.992
Penyusutan Aset Tetap	23.475.317.875	22.331.864.932
Pemeliharaan dan Perbaikan	4.676.872.095	4.584.743.214
Perjalanan Dinas	1.946.522.080	2.687.082.347
Beban Kantor	477.730.603	2.950.701.329
Peningkatan dan Pengembangan SDM	1.922.005.514	682.785.552
Asuransi	1.511.013.369	620.353.495
Jumlah	**126.062.455.796**	**124.570.343.182**

38. BEBAN LAIN-LAIN

	2018	2017
Kerugian Selisih Kurs	424.825.595.010	68.944.343.868
Penurunan Nilai Persediaan	4.354.026.184	-
Koreksi Pajak dan Denda Pajak	5.349.519.963	5.576.669.070
Beban Bunga Pinjaman	27.323.287.713	8.071.427.633
Kerugian Penjualan Aset	816.163.309	-
Beban Hibah	561.029.456	1.175.911.572
Beban Lainnya (di bawah Rp1 Milyar)	968.977.565	413.546.409
Jumlah	**464.198.599.200**	**84.181.898.552**

39. INSTRUMEN KEUANGAN

Perusahaan memiliki berbagai aset keuangan seperti piutang usaha dan piutang lain-lain, kas dan setara kas dan aset keuangan lain- lain yang timbul secara langsung dari kegiatan usaha perusahaan. Liabilitas keuangan perusahaan terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, liabilitas lancar lainnya.
Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrument keuangan perusahaan yang dicatat di dalam laporan posisi keuangan perusahaan.

Keterangan	2018		2017	
	Pinjaman yang diberikan	Nilai Wajar	Pinjaman yang diberikan	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Kas	185.630.168	185.630.168	183.925.904	183.925.904
Rekening Bank	519.399.813.990	519.399.813.990	334.477.033.019	334.477.033.019
Deposito Berjangka	16.324.895.300	16.324.895.300	34.885.172.400	34.885.172.400
Piutang Usaha	254.065.476.289	254.065.476.289	313.138.277.507	313.138.277.507
Piutang Lainnya	799.820.095	799.820.095	121.769.028	121.769.028
Jumlah Aset Keuangan	**790.775.635.841**	**790.775.635.841**	**682.806.177.858**	**682.806.177.858**

Keterangan	2018		2017	
	Pinjaman yang	Nilai Wajar	Pinjaman yang	Nilai Wajar
Liabilitas Keuangan				
Pinjaman Jangka Pendek	205.000.000.000	205.000.000.000	-	-
Pinjaman Jangka Panjang	450.000.000.000	450.000.000.000	-	-
Utang Usaha	336.111.914.023	336.111.914.023	371.252.524.473	371.252.524.473
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	110.910.557.440	110.910.557.440	107.859.074.686	107.859.074.686
Pendapatan Diterima Dimuka	1.646.362.140	1.646.362.140	1.007.776.470	1.007.776.470
Utang Pajak	68.519.412.714	68.519.412.714	57.801.114.118	57.801.114.118
Liabilitas Lainnya	23.116.864.544	23.116.864.544	41.635.031.977	41.635.031.977
Jumlah Liabilitas Keuangan	**1.195.305.110.862**	**1.195.305.110.862**	**579.555.521.724**	**579.555.521.724**

Pada bulan November perusahaan mengadakan transaksi derivatif dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yakni kontrak forward valuta asing atas pembelian barang impor dengan Janssen Vaccine Corp yang jatuh tempo pada 17 Desember 2018 dengan tujuan dalam rangka memitigasi risiko atau melindungi suatu aset, liabilitas, pendapatan, dan/atau beban perusahaan terhadap perubahan di masa yang akan datang.

40. ASET DAN LIABILITAS DALAM VALUTA ASING

	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah
Aset				
Kas Setara Kas				
USD: 14.481/13.548	22.920.623,75	331.913.552.523,75	12.709.743,85	172.191.609.679,80
EUR: 16.560/16.174	147.677,59	2.445.503.971,00	772.138,26	12.488.270.804,70
Piutang Usaha				
USD: 14.481/13.548	15.174.008,98	219.734.824.039,38	21.122.544,65	286.168.234.918,20
Uang Muka				
USD: 14.481/13.548	3.802.171,76	55.059.249.256,56	1.018.633,20	13.800.442.593,60
EUR: 16.560/16.174	358.836,77	5.942.247.202	512.396,27	8.287.302.560
GBP: 18.373/18.218	-	-	-	-
JPY: 131/120	20.460.000,00	2.682.612.900	263.088,00	31.628.439
CHF: 14.710/13.842	260.000,00	3.824.535.000	-	-
Jumlah Aset		**621.602.524.893**		**492.967.488.996**

	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah	Mata Uang Asing	Ekuivalen Rupiah
Liabilitas				
Uang Muka Penjualan				
USD: 14.481/13.548	112.414,72	1.627.877.560	67.221,90	910.722.301
Utang Usaha				
USD: 14.481/13.548	7.934.747,81	114.903.083.037	11.830.199,22	160.275.539.033
EUR: 16.560/16.174	3.007.088,10	49.796.627.164	1.966.514,11	31.805.651.940
GBP: 18.373/18.218	936,00	17.196.922	37.372,00	680.843.470
JPY: 131/120	21.055.688,00	2.760.716.532	-	
CHF: 14.710/13.842	-	-	-	
AUD:	117.824,82	1.203.143.406	-	
SGD:	-	-	-	
Biaya Yang Masih Harus Dibayar				
USD: 14.481/13.548	-	-	62.400,00	845.395.200
Liabilitas Lancar Lainnya				
USD: 14.481/13.548	76.806,51	1.112.235.071	315.347,64	4.272.329.827
Jumlah Liabilitas		**171.420.879.693**		**198.790.481.770**

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

a. Berikut adalah saldo akun dengan pihak-pihak berelasi:

	31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Jumlah	% terhadap jumlah Aset	Jumlah	% terhadap jumlah Aset
Kas Setara Kas	535.724.709.290	7,24%	369.362.205.419	5,73%
Piutang Usaha	14.560.313.460	0,20%	9.214.473.247	0,14%
Piutang Lain-lain	1.830.359.268	0,02%	1.302.637.458	0,02%
Uang Muka Pembelian Lokal	49.584.348.779	0,67%	-	0,00%
Pendapatan YMA Diterima	23.923.288	0,00%	13.994.095	0,00%
Utang Usaha				
Koperasi Karyawan Bio Farma	7.378.350.976	0,10%	10.179.747.608	0,16%
CV Karya Cahya Abadi	4.243.620.741	0,06%	2.420.885.452	0,04%
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	11.743.603.858	0,16%	-	0,00%
PT Pertamina (Persero)	3.680.640.000	0,05%	3.405.240.000	0,05%
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	175.990.231	0,00%	194.204.873	0,00%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3.867.914.240	0,05%	1.350.000.000	0,02%
Jumlah Utang Usaha	**31.090.120.046**	**0,42%**	**17.550.077.933**	**0,27%**

b. Sifat Hubungan

Pihak Berelasi	Hubungan dengan Perusahaan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
Bank Milik Negara/Daerah	Entitas Sepengendali	Kas dan Setara Kas
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penjualan Produk
PT Indofarma Global Medika (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Penjualan Produk
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Entitas Sepengendali	Penjualan Produk
PT Iglas (Persero)	Entitas Sepengendali	Piutang Lain-lain
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Pembelian Investasi
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali	Pembelian Investasi
Koperasi Karyawan Bio Farma	Hubungan Istimewa	Pembelian Barang dan Investasi
CV Karya Cahya Abadi	Hubungan Istimewa	Pembelian Barang dan Investasi
Pihak Berelasi Lainnya	Entitas Sepengendali	Lain-lain dengan transaksi masing-masing dibawah 1 Miliar

42. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

1. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan tanggal 19 Januari 2018 tentang penyedia vaksin regular tahun 2018 (Ori Difteri) dengan kontrak No. KN.01.01/6/021-PK/2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Jumlah	
	Produk Bio Farma				
1	Vaksin DT 10 ds	Vial	1.187.581	Rp	19.428.825.160
2	Vaksin DPT-HB-Hib 5ds Reg	Vial	4.650.879	Rp	333.979.620.990
3	Vaksid Td 10 ds	Vial	6.919.962	Rp	106.913.412.900
Jumlah				**Rp**	**460.321.859.050**
Jumlah+PPN 10%				**Rp**	**506.354.044.955**

2. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan tanggal 14 Februari 2018 tentang penyedia vaksin regular tahun 2018 dengan kontrak No. KN.01.01/6/070-PK/2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Jumlah	
	Produk Bio Farma				
1	Vaksin DT 10 ds	Vial	347.646	Rp	5.687.488.560
2	Vaksin b-OPV 10 ds	Vial	2.929.385	Rp	53.139.043.900
3	Vaksin HB ADS (PID) 1 ds	Vial	3.384.766	Rp	73.821.746.460
4	Vaksid Td 10 ds	Vial	1.289.261	Rp	19.919.082.450
Jumlah				**Rp**	**152.567.361.370**
Jumlah+PPN 10%				**Rp**	**167.824.097.507**
	Produk Bio Farma				
1	Vaksin BCG Bayi 20 ds SII	Vial	1.169.723	Rp	65.925.588.280
2	Vaksin IPV 5ds	Vial	400.231	Rp	57.849.388.740
3	Vaksin Measles Rubella 10ds	Vial	5.596.647	Rp	792.753.854.256
Jumlah				**Rp**	**916.528.831.276**
Jumlah+PPN 10%					**Rp1.008.181.714.404**
Jumlah					**Rp1.069.096.192.646**
Jumlah+PPN 10%					**Rp1.176.005.811.911**

3. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan tanggal 26 Februari 2018 tentang Penyedia vaksin regular tahun 2018 (DPT-HB-HiB) kontrak No. KN.01.01/6/087-PK/2018, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Jumlah
	Produk Bio Farma			
1	Vaksin DTP-HB-HiB 5ds Reg	Vial	1.259.000	Rp 90.408.790.000
Jumlah				**Rp 90.408.790.000**
Jumlah+PPN 10%				**Rp 99.449.669.000**

4. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan No. KN.01.01/6/265-PK/2017 tanggal 3 Juli 2017 untuk melaksanakan penyediaan vaksin regular tahun 2017 (vaksi *Measles Rubella* (MR)) senilai Rp374.505.054.000 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Kuantitas	Jumlah Harga
1	Vaksin MR	2.499.700	374.505.054.000
Jumlah			**374.505.054.000**

5. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan No. KN.01.01/6/234-PK.GAVI-2017 tanggal 3 Juli 2017 untuk melaksanakan penyediaan vaksin *Measles Rubella* (MR), ADS dan *Safety Box* bersumber Dana Hibah GAVI tahun 2017 (Vaksin MR) senilai Rp310.188.690.000 (tidak termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Kuantitas	Jumlah Harga
1	Vaksin MR	2.277.450	310.188.690.000
Jumlah			**310.188.690.000**

6. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan No. KN.01.01/6/359-PK/2017 tanggal 22 Agustus 2017 untuk melaksanakan penyediaan vaksin regular tahun 2017 (Vaksin IPV) senilai Rp5.552.021.904 (termasuk PPN). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Provinsi	Vaksin MR	
		Alokasi (vial)	Jumlah Harga
1	Buffer Stock Pusat	36.114	Rp 5.552.021.904
Jumlah			**Rp 5.552.021.904**

7. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan No. KN.01.01/6/163-PK.GAVI-2017 tanggal 10 Mei 2017 untuk melaksanakan penyediaan vaksin IPV, ADS, dan Safety Box bersumber Dana Hibah GAVI tahun 2017 (vaksin IPV) senilai Rp51.892.888.000 (tidak termasuk PPN). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Kuantitas	Jumlah Harga
1	Vaksin IPV	371.300	51.892.888.000
Jumlah			**51.892.888.000**

8. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan No. KN.01.01/6/271-PK.GAVI-2017 tanggal 8 Agustus 2017 untuk melaksanakan penyediaan vaksin IPV, ADS dan *Safety Box* bersumber Dana Hibah Gavi tahap II tahun 2017 (vaksin IPV) senilai Rp35.580.939.360 (tidak termasuk PPN). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Kuantitas	Jumlah Harga
1	Vaksin IPV	254.586	35.580.939.360
Jumlah			**35.580.939.360**

9. PT Bio Farma (Persero) mengadakan penandatanganan kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tentang Vaksin Regular tahun 2017 (Vaksin IPV) pada tanggal 14 September 2017 dengan kontrak No. KN.01.01/6/412-PK/2017, Dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Jumlah Rp
Produk *Partnership*				
1	(APBN) Buffer Pusat 2	Vial	252.600	35.303.376.000
Jumlah (-PPN 10%)				**35.303.376.000**
Jumlah (+PPN 10%)				**38.833.713.600**

10. PT Bio Farma (Persero) mengadakan perjanjian jual beli/kontrak dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan No. KN.01.01/6/566-PK/2017 tanggal 14 Desember 2017 untuk melaksanakan penyediaan obat *Buffer* Bencana/KLB/Penanganan Darurat/*Emergency* dalam rangka ORI Difteri Tahun 2017 senilai Rp2.312.002.000 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Kuantitas	Jumlah Harga
1	Vaksin DT (10 dosis)	35.000	Rp 622.930.000
2	Vaksin Td (10 dosis)	102.368	Rp 1.689.072.000
Jumlah			**Rp 2.312.002.000**

11. Perusahaan melakukan perjanjian dengan distributor untuk menjual dan mendistribusikan produk kepada konsumen swasta dalam negeri, melalui:
    a) Perjanjian Distributorship antara PT Bio Farma (Persero) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 00023/DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.
    b) Perjanjian Distributorship antara PT Bio Farma (Persero) dengan PT Merapi Utama Pharma Nomor: 00019/DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.
    c) Perjanjian Distributorship antara PT Bio Farma (Persero) dengan PT Rajawali Nusindo Nomor: 00018/DIR/I/2018; tanggal 2 Januari 2018.
    d) Perjanjian Distributorship antara PT Bio Farma (Persero) dengan PT Indofarma Global Medika Nomor: 00020/DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.
    e) Perjanjian Distributorship antara PT Bio Farma (Persero) dengan PT Sagi Capri Nomor: 00021/DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.
    f) Perjanjian Distributorship antara PT Kimia Farma Trading & Distribution Nomor : 00022/DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018.
    g) Perjanjian Penjualan Produk Vaksin Ready to fill Hepatitis-B antara PT Bumi Paradise Nomor : 05392/DIR/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018

12. Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli produk-produk perusahaan dengan beberapa pelanggan luar negeri sebagai berikut:
    a) Pada tanggal 30 Juni 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 04394/DIR/VI/2010 dengan Universal Exim tentang Perjanjian Pemasaran, yang meliputi penjualan *Monovalent Poliomyelitis Bulk* dan *DTP Bulk*, yang berlaku hingga 31 Maret 2014. Pada tanggal 12 Juli 2013 dilakukan *amandement IX* atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No.03975/DIR/VII/2013, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Maret 2016. Pada tanggal 17 Desember 2013 dilakukan *amandement X* atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 06724/DIR/XII/2013, yang memperbaharui nilai perjanjian. Pada tanggal 9 Maret 2015 dilakukan amandement XI atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No.01512/DIR/III/2015 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Maret 2019 dan Nilai Perjanjian.
    b) Pada tanggal 7 Nopember 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 06384/DIR/XI/2011 dengan BioNet Asia Ltd. Tentang penjualan DPT Bulk, yang berlaku hingga 31 Desember 2015. Pada tanggal 14 Mei 2012 dilakukan amandement II atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 03098/DIR/V/2012, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2016. Pada tanggal 17 Nopember 2014 dilakukan amandement III atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 05664/DIR/XI/2014, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2019.
    c) Pada tanggal 7 Nopember 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 06383/DIR/XI/2011 dengan BioNet Asia Ltd. Tentang Penjualan Monovalent Poliomyelitis Bulk, yang berlaku hingga 31 Desember 2015. Pada tanggal 14 Mei 2012 dilakukan amandement I atas Perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 03097/DIR/V/2012, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2017. Pada tanggal 30 September 2013 dilakukan amandement II atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 05265/DIR/IX/2013, yang memperbaharui nilai perjanjian. Pada tanggal 17 Nopember 2014 dilakukan amandement III atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 05663/DIR/XI/2014, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2019.
    d) Pada tanggal 10 Desember 2009, perusahaan mengadakan perjanjian No. 09439/DIR/XII/2009 dengan BioNet Asia Ltd. Tentang pemasaran produk Bio Farma, berupa *Bulk* dan *Finished Product (Vaccine),* yang berlaku hingga 31 Desember 2014. Pada tanggal 9 Mei 2012 dilakukan *amandement II* atas perjanjian tersebut dengan perjanjian No. 02/56/DIR/V/2012 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2016. Pada tanggal 30 Desember 2016 dilakukan *amandement VI* atas perjanjian tersebut dengan perjanjian No. 04948/dir/XII/2016 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2019.
    e) Pada tanggal 30 Maret 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 02051/DIR/III/2010 dengan BioNet Asia Ltd. Tentang penjualan *Poliomyslitis Bulk*, yang berlaku hingga 30 Maret 2013. Pada tanggal 9 Mei 2012 dilakukan *amandement II* atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 02957.DIR/V/2012, yang memperbaharui masa berlaku hingga hingga 31 Desember 2016. Pada tanggal 30 Desember 2016 dilakukan *amandement III* atas perjanjian tersebut dengan perjanjian No. 04949/DIR/XII/2016 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2019.
    f) Pada tanggal 8 April 2010, perusahaan mengadakan perjanjian No. 02305/DIR/IV/2010 dengan BioNet Asia Ltd. Tentang penjualan DPT Bulk, yang berlaku hingga 8 April 2013. Pada tanggal 9 Mei 2012 dilakukan amandement II atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 02958/DIR/V/2012, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2016. Pada tanggal 30 Desember 2016 dilakukan amandement III atas perjanjian tersebut sesusai dengan perjanjian No. 04950/DIR/XII/2016 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2019.
    g) Pada tanggal 20 Desember 2012, perusahaan mengadakan perjanjian No. 07444/DIR/XII/2012 dengan BioNet Asia Ltd. Tentang penjualan *Ready-to-fill Final Bulk Td Vaccine*, yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal registrasi dari produk akhir di wilayah Thailand.
    h) Pada tanggal 16 Maret 2013, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 01391/DIR/III/2013 dengan Biological *E Limited* tentang Penjualan *Measles Bulk*, yang berlaku hingga 5 tahun mendatang (16 Maret 2018). Pada tanggal 5 Desember 2013 dilakukan *amandement I* atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No. 06511/DIR/XII/2013, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31Desember 2018.
    i) Pada tanggal 3Desember 2014, perusahaan mengadakan perjanjian No. 05887/DIR/XI/2014 dengan Propharm (M) SDN. BHD tentang penjualan *Finished Product (Vaccine*), yang berlaku hingga 30 April 2018.

j) Pada tanggal 15 Januari 2015, perusahaan mengadakan perjanjian No. 05900/DIR/XI/2014 dengan Arabio tentang penjualan produk, *Bulk Final* dan vaksin yang berlaku hingga 30 April 2014.

k) Pada tanggal 15 April 2016, perusahaan mengadakan perjanjian No. 03001/DIR/VIII/2016 dengan Serum Institute of India Private Limited dan BioNet Asia Ltd tentang suplai *Bulk* Campak yang berlaku hingga 31 Desember 2021.

l) Pada tanggal 6 September 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian No. 03347/DIR/VIII/2016 dengan BioNet Asia Ltd tentang penjualan *Bulk* Difteri dan Tetanus, yang berlaku hingga 31 Desember 2019.

m) Perusahaan mengadakan perjanjian (*Long Term Arrangement/LTA)* dengan UNICEF untuk pengadaan vaksin-vaksin berikut ini, yang ditandatangani pada tanggal:
- 18 Maret 2016, untuk *supply* vaksin DTP – 10 ds dari tahun 2016 sampai 2018
- 7 April 2016, untuk *supply* vaksin TT – 10 ds dari tahun 2016 sampai 2017
- 16 September 2016 – LTA Variation 11 No. 42104359 untuk *supply* bOPV – 20 ds tahun 2017
- 8 Nopember 2016 – LTA Variation 4 No. 42104330 untuk *supply* vaksin Measless – 10 ds tahun 2017
- 3 Februari 2017 – LTA Variation 3 No. 43105646 untuk *supply* vaksin DTP – 10 ds tahun 2017.
- 24 Mei 2017 – LTA Variation 14 No. 42104359 untuk *supply* bOPV 10 ds tahun 2017
- 5 September 2017 - LTA Variation 4 No. 42105646 untuk penambahan suplai Vaksin DTP-10 ds tahun 2017 melalui UNICEF, yang semula 376.000 vial menjadi 562.000 vial untuk penambahan suplai vaksin DTP-10 ds tahun 2018 yang semula 200.000 vial menjadi 323.880 vial.

n) Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama kegiatan pengembangan produk dengan pihak ketiga yaitu *University of Melbourne, Artes Biotechnology GmbH, PATH Vaccine Solution (SPV), The International Vaccine Institute (IVI), Lipotek Pty. Ltd., Iwate Medical University dan Japan Poliomyelitis Research Institute (JPRI).*

13. Perusahaan melakukan penandatanganan Addendum III (Ketiga) atas perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving Nomor: CDO.BDG/319/KMK/2015. Nomor: 07, tanggal 14 Agustus 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II (Kedua) Nomor: OPS.CRO/CCL.505/ADD/2017 dengan PT Bank Mandiri (Persero) dengan rincian fasilitas sebagaimana tercantum pada Perjanjian No. TIO.CRO/CCL.772/ADD/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang meliputi :

- Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK*) Sub Limit* NCL
  Limit : Rp250.000.000.000.
  Jenis Fasilitas : KM *Revolving* Rekening Koran
  Suku Bunga : 9% p.a
  Jangka Waktu : Sejak tanggal penandatangan Addendum III Perjanjian kredit s.d. tanggal 14 Agustus 2019
  Tujuan : Modal Kerja Operasional

- Fasilitas Non Cash Loan untuk penerbitan LC Impor/SKDN *(Sight, Usance, & Upas)*/BG.
- Jaminan fiduasia atas mesin-mesin yang berlokasi di Jalan Pasteur No. 28 Bandung dengan nilai penjaminan sebesar Rp265.000.000.000, yang bersifat cross collateral dengan fasilitas Non Cash Loan.

14. Perusahaan melakukan penandatanganan Addendum I (Pertama) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan Nomor: CRO.KP/063/NCL/2017. Akta Nomor: 01 tanggal 08 Mei 2017 dengan PT Bank Mandiri (Persero) dengan rincian fasilitas sebagaimana tercantum pada Perjanjian No. TIO.CRO/CCL.771/ADD/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang meliputi:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK*) Sub Limit* NCL
  Limit : Rp400.000.000.000.
  Jenis Fasilitas : *Non Cash Loan*
  Suku Bunga : Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank
  Jangka Waktu : Sejak penandatangan Addendum I Perjanjian Kredit s.d tanggal 14 Agustus 2019

Tujuan : LC Impor/SKBDN dan Bank Garansi (BG)

- Fasilitas Non Cash Loan untuk penerbitan LC Impor/SKDN *(Sight, Usance, & Upas)*/BG
- Jaminan fiduasia atas mesin-mesin yang berlokasi di Jalan Pasteur No. 28 Bandung dengan nilai penjaminan sebesar Rp430.000.000.000, yang bersifat cross collateral dengan Fasilitas KMK Revolving Rekening Koran.

15. Perusahaan melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional Nomor: CRO.KP/184/KMK/2018. Nomor:08, tanggal 26 Juni 2018 yang meliputi:
    - Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Transaksional Sub Limit NCL
      Limit : Rp190.000.000.000.
      Jenis Fasilitas : KMK Transaksional
      Suku Bunga : 9% p.a
      Jangka Waktu : 26 Juni 2018 s.d. tanggal 31 Maret 2019
      Tujuan : Fasilitas kredit Modal Kerja Transakisonal untuk modal kerja khusus
    - Jaminan:
      - Fasilitas Non Cash Loan untuk penerbitan LC Impor/SKDN (Sight, Usance, & Upas)/BG
      - Jaminan fiduasia atas mesin-mesin yang berlokasi di Jalan Pasteur No. 28 Bandung dengan nilai penjaminan sebesar Rp100.000.000.000.
      - Jaminan Fidusia atas piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp190.000.000.0000.

16. Perusahaan melakukan penandatangan perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Indonesia Eximbank sesuai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 669/ADDPK/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang meliputi:
    - Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dan Pembukaan LC Sight/Usance/UPAS dan/atau Pembukaan AKBDN Sight/Usance/UPAS dan/atau Pembiayaan LC dan/atau Pembiayaan SKBDN.
      Limit : Rp250.000.000.000.
      Jenis Fasilitas : KMK *Revolving Non* Rekening Koran
      Suku Bunga : 9% p.a untuk utilitasi dalam IDR; 5,6% p.a untuk utilitasi dalam USD
      Jangka Waktu : Sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit s.d. tanggal 25 Juni 2019
      Tujuan : Modal Kerja Operasional
    - Jaminan:
      - Fiduasia atas mesin, inventaris, dan peralatan pabrik yang berlokasi di Jalan Pasteur No. 28 Bandung dengan nilai penjaminan sebesar Rp180.000.000.000.
      - Fidusia atas persediaan barang yang berlokasi di Jalan Pasteur No. 28 dengan nilai penjaminan sebesar Rp60.000.000.000.
      - Fidusia atas piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp35.000.000.000.

17. Perusahaan melakukan Addendum IV (Keempat) Perpanjangan Kredit Nomor: 04 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 21 Januari 2019, yang meliputi:
    - Fasilitas Kredit Modal Kerja Max Co. Tetap (Fasilitas KMK)
      Limit : Rp 500.000.000.000,00
      Jenis fasilitas : Rekening Koran dengan Max Co. Tetap. *Interchangeable* dengan fasilitas Penangguhan Jaminan Impor (PJI) (LC/SKBDN), Fasilitas *Trade Line*, Fasilitas *Comercial Line* dan Fasilitas *Forex Line*.
      Suku Bunga : 9% p.a
      Jangka Waktu : 12 bulan, tmt 19 Desember 2018 s.d. 19 Desember 2019
      Tujuan : Tambahan Modal Kerja Operasional
      Unuk membackup fasilitas PJI dan menampungL/C impor baik sight maupun usance yang telah jatuh tempo atau tidak tebayar
    - Jaminan:
      - Fidusia atas persediaan barang dengan nilai penjaminan sebesar Rp300.000.000.000.
      - Fidusia atas piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp250.000.000.000.

18. Perusahaan melakukan pendaftaran Medium Term Notes (MTN) Bio Farma tahun 2018 sesuai dengan:
    - Perjanian penerbitan, Penatalaksanaan Penerbitan, dan Penunjukan agen pemantau Medium Term Notes (MTN) BIO FARMA tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018 No. 38
    - Perubahan Perjanjian Penerbitan, Penatalaksanaan Penerbitan, dan Penunjukan agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) Bio Farma tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 No. 43.
    - Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-099/MTN/KSEI/0818, tanggal 24 Agustus 2018
    - Perjanjian agen pembayaran efek bersifat utang di KSEI No.AP-099/MTN/KSEI/0818, tanggal 24 Agustus 2018 yang meliputi:
    - Adapun Medium Term Notes (MTN) tersebut meluputi:

Jumlah Pokok	: Rp125.000.000.000.
Tingkat Bunga	: 8,75% p.a (Tetap)
Periode Perhitungan Bunga	: Actual
Frekuensi Pembayaran Bunga	: Triwulan (3 Bulan)
Tenor	: 3 (tiga) tahun
Tanggal Distribusi	: 31 Agustus 2018
Tanggal Jatuh Tempo	: 31 Agustus 2021
Arranger	: BNI Sekuritas

19. Perusahaan melakukan Pendaftaran Medium Term Notes (MTN Syariah Mudharabah) Bio Farma Tahun 2018 sesuai dengan:
    - Perjanjian penerbitan, penatalaksanan penerbitan, dan penunjukan agen pemantau Medium Term Notes (MTN) Syariah Mudharabah Bio Farma Tahun 2018 Tanggal 21 Agustus 2018 No. 39.
    - Perjanjian pendaftaran surat berharga syariah di KSEI No.SP-016/SKK/KSEI/0818, tanggal 21 Agustus 2018
    - Perjanjian agen pembayaran efek bersifat utang di KSEI No.AP-099/MTN/KSEI/0818, tanggal 24 Agustus 2018 yang meliputi:
    - Adapun Medium Term Notes (MTN) Syariah Mudharabah tersebut meliputi:

Jumlah Pokok	: Rp325.000.000.000.
Periode Perhitungan Bagi Hasil	: 30/360
Periode Perhitungan Bunga	: Batas Atas – Batas Bawah
Frekuensi Pembayaran Bunga	: Triwulan (3 bulan)
Tanggal Distribusi	: 24 Agustus 2018
Tanggal Jatuh Tempo	: 24 Agustus 2021
Tenor	: 3 Tahun
Arranger	: BNI Sekuritas

20. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 397K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Juli 2009, Jo. No.01/Pailit/2009/PN Niaga Sby tanggal 30 September 200, yang menyatakan bahwa status PT Iglas (Persero) dalam pailit, perusahaan melakukan penyisihan 100% atas piutang PT Iglas (Persero) sebesar Rp4.897.737.040 dari jumlah kewajibannya sebesar Rp6.503.458.205 yang terdiri atas:
    - Pokok Piutang : Rp4.894.737.050.
    - Akumulasi Bunga : Rp1.398.732.896.
    - Akumulasi Denda : Rp 209.988.269.

    Perusahaan belum mengakui pendapatan bunga dan denda atas piutang tersebut karena pendapatan dan denda atas piutang tersebut dapat diakui pada saat diterima (*cash basis*). Namun, sesuai dengan putusan perdamaian per tanggal 13 Januari 2010 yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Perusahaan sebagai Kreditur Konkuren PT Iglass

(Persero) berhak untuk memperoleh pembayaran atas piutang mulai bulan April 2010, maka terbuka kembali kemungkinan untuk tertagihnya piutang tersebut.

Posisi Piutang PT Iglass (Persero) sebagai berikut:			
Total Piutang PT Iglass (Persero) pada saat pailit:			4.894.737.040
Pembayaran			
a.	Sumber Dana dari PT Iglass (Persero)		
	Tahun 2010	(681.057.000)	
	Tahun 2011	(302.691.939)	
	Tahun 2012	(50.000.000)	
	Tahun 2013	(25.000.000)	
	Sub Total	(1.058.748.939)	
b.	Sumber Dana dari PT Perusahaan Pengelola Aset	(2.533.350.643)	
	Jumlah Pembayaran		(3.592.099.582)
	Saldo Piutang		**1.302.637.458**

Sisa dana dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PPA sebesar Rp999.690.769 akan diselesaikan berdasarkan Notulen Rapat Tentang Piutang PT Iglass (Persero) antar PT Iglass (Persero) dengan PT Bio Farma (Persero) tanggal 14 September 2012. Namun, sampai saat ini pembayaran tersebut belum diterima perusahaan.

PT Iglass (Persero) melalui surat No.0736/Q-12-2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Penyelesaian Pinjaman dan No.0084/Q-2-2012 tanggal 6 Februari 2012 perihal konfirmasi data hutang PT Iglass (Persero) telah mengajukan permohonan pembebasan denda dan bunga pinjaman sebesar Rp1.608.721.165 kepada Perusahaan.

Perusahaan melalui surat No. 02316/TUK/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Pembebasan Bunga dan Denda Piutang PT Iglass (Persero) Menyatakan bahwa permohonan tersebut belum dapat dikabulkan, sesuai rekomendasi Desan Komisaris melalui surat No. 15/DK.BF/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.

Pada tanggal 11 Juni 2013 PT Iglass (Persero) mengirim surat No. 0214/D-06-2013 kepada PT Bio Farma (Persero) perihal penundaaan Sementara Pembayaran Kewajiban, yang isinya menerangkan tentang pembayaran amgsuran yang tersendat karena adanya mesin yang rusak yang harus diperbaiki sehingga mempengaruhi *cash flow* di PT Iglass (Persero).

Pada tanggal 30 Desember 2013 PT Iglass IPersero) mengirimkan surat No. 0489/D-12-2012 Kepada PT Bio Farma IPersero) perihal kewajiban PT Iglass (Persero), yang isinya menyatakan bahwa pembayaran PT Iglass (Persero) ke PT Bio Farma (Persero) tahun 2013 sebesar Rp25.000.000 adalah benar dan PT Iglass (Persero) belum dapat melakukan pembayaran kewajiban pada PT Bio Farma (Persero) tepat waktu sesuai kesepakatan.

PT Bio Farma (Persero) telah melakukan penagihan melalui surat No. 03307/TUK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 dan surat No. 04581/TUK/IX/2014 tanggal 30 September 2014, dan telah ditanggapi oleh PT Iglass (Persero) melalui surat No. 0328/D-10-2014 tanggal Oktober 2014 yang menyatakan bahwa PT iglass (Persero) masih berupaya memperbaiki mesin-mesin baik secara mandiri maupun rencana dikerjasamakan (kerjasama operasi (KSO) dengan PT Petrosida Gresik) sehingga belum dapat menyelesaikan kewajiban kepada PT Bio Farma (Persero).

PT Bio Farma (Persero) mengirimkan surat penagihan No. 04442/TUK/VI/2015 ke PT Iglass (Persero) tanggal 30 Juni 2015 perihal Konfirmasi Penagihan atas Penyelesaian Kewajiban Pembayaran.

PT Bio Farma (Persero) telah melakukan penagihan melalui surat No. 07769/TUK/XII/2015 ke PT Iglass (Persero) tanggal 18 Desember 2015 perihal Konfirmasi Lebih Lanjut atas Penyelesaian Kewajiban Pembayaran, setelah dilakukannya perbaikan dan pemasangan mesin-mesin di pabrik PT Iglass (Persero). Berdasarkan jawaban surat PT Iglas (Persero) sebelumnya No. 0313/D-07/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang menyatakan hal – hal sebagai berikut::

a. PT Iglass (Persero) telah melakukan perbaikan dan pemasangan kembali mesin Emhart di *Line* Dapur G-1.
b. PT PPA (Persero) telah merencanakan untuk memberikan pinjaman dana untuk pembelian/pembangunan Dapur G-2 beserta mesin-mesin lainnya.

PT Bio Farma (Persero) telah melakukan penagihan melalui surat No. 01372/TUK/IV/2016 ke PT Iglass (Persero) tanggal 7 April 2016 perihal konfirmasi lebih lanjut atas penyelesaian kewajiban pembayaran. Berdasarkan tanggapan yang diterima tanggal 20 April 2016 sesuai surat No. 0104/D-4-2016, PT Iglass (Persero) menyatakan telah menghentikan kegiatan operasional Perusahaan sejak 31 Oktober 2015 dan di Tahun 2016, Kementerian BUMN telah memasukan PT Iglass (Persero) dalam program Privatisasi tahunan, sehingga PT Iglass (Persero) belum bisa memastikan rencana Pembayaran maupun penyelesaian kewajiban.

43. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko Keuangan utama yang dihadapi perusahaan adalah risiko kredit, risiko mata uang risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Melalui pendekatan menajemen risiko, perusahaan mencoba untuk meminimalkan potensi dan dampak negative dari risiko-risiko di atas.

i. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengelami kerugian keuangan. Instrumen keuangan perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha, dan piutang lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Untuk risiko atas penjualan kredit, perusahaan mensyaratkan adanya bank garansi atau LC dengan limit tertentu. Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank-bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan perusahaan adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga perusahaan memiliki kas dan serata kas di berbagai bank.

Tabel dibawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki perusahaan:

	Konsentrasi Risiko Kredit		
	Institusi	**Lain-lain**	**Eksposur Maksimum**
Piutang Usaha	254.065.476.288,65	-	254.065.476.288,65
Piutang Lain-lain	1.302.637.458,00	799.820.094,73	2.102.457.552,73
	255.368.113.746,65	**799.820.094,73**	**256.167.933.841,38**

ii. Risiko Mata Uang

Risiko Mata Uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Perusahaan menggunakan mata uang asing dalam transaksi pengadaan barang/jasa dan penjualan ekspor dengan pihak luar negeri serta pengeluaran biaya operasional sehingga terdapat risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah yang berlangsung sejak transaksi terjadi sampai dengan pembayaran dilakukan atau diterima.

Disamping terkena eksposur transaksi yang dapat menyebabkan kerugian arus kas dimasa datang pada saat menerima atau melakukan pembayaran, juga perusahaan akan terkena eksposur ekonomi karena melakukan transaksi perdagangan internasional. Perusahaan akan menghadapi risiko penurunan nilai pendapatan atau peningkatan biaya akibat fluktuasi nilai tukar sehingga harga jual produk menjadi tidak kompetitif di banding pesaing baik di pasar global atau pesaing asing di pasar domestik.

Penerimaan hasil penjualan ekspor yang didominasi oleh mata uang Dolar AS (USD) secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami (natural hedging) terhadap eksposur fluktuasi nilai tukar. Namun demikian, karena posisi penerimaan dalam valuta asing lebih besar dibanding kebutuhan (long position) seta terdapat pengeluaran untuk pengadaan barang impor dalam mata uang asing non USD, maka perusahaan mempunyai eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi mata uang asing.

Untuk menghindari risiko fluktuasi nilai tukar diatas, perusahaan melakukan lindung nilai alami dengan menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran mata uang asing dengan cara memelihara saldo mata uang asing sesuai kebutuhan, mengalihkan harga beli barang/jasa dengan vendor luar negeri dari non USD ke USD, dan menjual sisa kebutuhan USD secara bertahap sesuai proyeksi kebutuhan arus kas dan harga pasar.

iii. Risiko Suku Bunga
Risiko Suku Bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrument keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negative terhadap perusahaan.

Tabel dibawah ini menggambarkan detail jatuh tempo asset dan liabilitas keuangan perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga:

	31 Desember 2018			
	Suku Bunga Mengambang	**Suku Bunga Tetap**	Tidak dikenakan bunga	**Jumlah**
	Kurang dari satu tahun	Kurang dari satu tahun		
Aset	-	-	-	-
Kas dan Setar Kas	535.724.709.289,87	16.324.895.300,00	185.630.168,00	552.235.234.757,87
Jumlah Efek	535.724.709.289,87	16.324.895.300,00	185.630.168,00	552.235.234.757,87
Jumlah gap suku bunga	**535.724.709.289,87**	**16.324.895.300,00**	**185.630.168,00**	**552.235.234.757,87**

iv. Risiko Likuiditas
Risiko Likuiditas adalah risiko dimana perusahaan akan mengealami kesulitas dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrument keuangan.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan perusahaan memenuhi komitmen kepada semua pihak dan melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo asset dan kewajiban keuangan.

Menindaklanjuti program WHO tahun 2013-2018 terkait eradikasi Polio Global yang telah disetujui oleh Dewan Eksekutif WHO di Tahun 2013. Dimana salah satu keputusannya yang harus dilaksanakan adalah melakukan penghapusan semua vaksin Polia Oral secara bertahap. Strategi untuk meminimalkan risiko adalah melalui penghentian produksi tOPV (*trivalent Oral Polio Vaccine*) secara bertahap oleh para produsen dan pembatasan produk tOPV ke bOPV (*bivalent Oral Polio Vaccine*) selesai dilakukan pada April 2016.

Komitmen Indonesia untuk eradikasi Polio Nasional tahun 2020 sudah ditindaklanjuti melalui edaran kemenkes mengenai peralihan 95% pemakaian vaksin tOPV ke bOPV secara bertahap sampai batas waktu 4 April 2016, melalui pengenalan produk pengganti IPV (*Inactivated Polio Vaccine*) pada program imunisasi rutin, pencabutan ijin edar dan penarikan tOPV serta pemusnahannya mulai tanggal 4-30 April 2016 diseluruh Indonesia baik di sektor swasta maupun pemerintah.

Perusahaan sudah menindaklanjuti edaran tersebut melalui percepatan atas realisasi kontrak pemerintah tahun 2016 untuk produk tOPV melalui program imunisasi yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia tanggal 8-11 Maret 2016 dan Penarikan secara bertahap produk tOPV di distributor sampai dengan 28 Maret 2016 serta melakukan penggantian secara serentak dengan produk bOPV mulai 4 April 2016.

b. Nilai Wajar Aset dan Liabillitas Keuangan
Nilai Wajar adalah suatu jumlah dimana asset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi *arms-length*.

Perusahaan memperhitungkan nilai wajar dari asset dan liabilitas keuangan jangka pendek mendekati nilai tercatatnya, sebagai dampak perdiskontoannya yang tidak signifikan.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang diestimasikan pada nilai kini arus kas masa depan pada tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank kepada perusahaan untuk utang dengan jatuh tempo sejenis.

44. RASIO ASPEK KEUANGAN

Tabel dibawah merupakan rasio keuangan PT Bio Farma tahun 2018, terdiri dari:

NO.	INDIKATOR	BOBOT	NILAI	SKOR
I.	**ASPEK KEUANGAN**			
	Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)	20,00	14,81	18,00
	Imbalan Investasi (ROI)	15,00	15,78	13,50
	Rasio Kas	5,00	58,14	5,00
	Rasio Lancar	5,00	553,70	5,00
	Collection Periods	5,00	26,14	5,00
	Perputaran Persediaan	5,00	71,13	4,00
	Perputaran Total Asset	5,00	53,43	2,50
	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	10,00	70,45	7,50
		70,00		**60,50**

45. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 14 Februari 2019.

REFERENSI KRITERIA
ANNUAL REPORT AWARD 2018

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
I.	**Umum**		
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris		√
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca		√
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka 2. Samping 3. Sampul belakang 4. Setiap halaman	√
4.	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir	√
II.	**Ikhtisar Data Keuangan Penting**		
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba (rugi): • Distribusikan kepada pemilik entitas induk • Distribusikan kepada kepentingan nonpengendali 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan : • Distribusikan kepada pemilik entitas induk • Distribusikan kepada kepentingan nonpengendali 4. Laba (rugi) per saham.	18-20
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi 2. Jumlah aset 3. Jumlah liabilitas 4. Jumlah ekuitas	20-27
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan	28-31

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: • Jumlah saham yang beredar • Informasi dalam bentuk tabel yang memuat : • Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan • Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan 2. Informasi dalam bentuk grafik yang paling kurang : • Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan • Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	32
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding) 2. Tingkat bunga/imbalan 3. Tanggal jatuh tempo 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2018	33
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi			
1.	Laporan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	36-53

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
2.	Laporan Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: • Kebijakan strategis • Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan • Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya 2. Analisis tentang prospek usaha 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya	54-65
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan	66-67
IV. Profil Perusahaan			
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website	68-71
2.	Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	72-77
3.	Bidang usaha	Memuat uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir 2. Kegiatan usaha yang dijalankan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan	78-82
4.	Struktur Organisasi	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi	83-84

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
5.	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	Mencakup: 1. Visi perusahaan • Misi perusahaan • Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direview dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku • Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	86-89
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Domisili 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk	90-98
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Domisili 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk	99-106
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku	107-121

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
9.	Komposisi Pemegang saham	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; • Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: • a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham • b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% • Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung	121
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Dalam bentuk tabel, memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi 2. Persentase kepemilikan saham 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	121
11.	Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV)	122
12.	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action) 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action) 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan	123
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan 4. Peringkat efek	123
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek	122

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)	124-145
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/ perwakilan.	146
17.	Informasi pada Website Perusahaan	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	150-152
18.	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku.	90—98, 348 99-106, 380 438-440, 459 459 462-464, 495 499,508 528,538, 540,542

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan			
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain : • Produksi • Peningkatan/penurunan kapasitas produksi • Penjualan/pendapatan usaha • Profitabilitas	154-189
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan, yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/ penurunan suatu akun	Dalam bentuk narasi tabel, antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas 3. Ekuitas 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan 5. Arus kas.	190-230
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang: 6. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 7. Tingkat kolektibilitas piutang.	232-235
4.	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)	Penjelasan atas: 8. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/ sukuk dan ekuitas 9. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies) 10. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal	236-240
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan 2. Tujuan dari ikatan tersebut 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait	241-244
6.	Bahasan mengenai ikatan investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir	245-249

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi) 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang	250-254
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang	254
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya	Uraian tentang prospek usaha perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya	255-266
10.	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar	267-273
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen 2. Total dividen yang dibagikan 3. Jumlah dividen kas per saham 4. Payout ratio 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun	274-276
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya 2. Jangka waktu 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak 4. Harga exercise	276
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana 2. Rencana penggunaan dana 3. Rincian penggunaan dana 4. Saldo dana 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada)	276

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi 3. Alasan dilakukannya transaksi 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait	277-279
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan	279
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan	280-281
17.	Informasi kelangsungan usaha	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment	282-286
VI. Good Corporate Governance			
1.	Uraian Dewan Komisaris	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris)	325-349
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen	350-359

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
3.	Uraian Direksi	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada) 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi)	360-382
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian 2. Pihak yang melakukan penilaian 3. Skor penilaian masing-masing kriteria 4. Rekomendasi hasil penilaian 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi	383-399
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada)	400-405
6.	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat 2. Peserta Rapat 3. Agenda Rapat	406-428
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali	429

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali	mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali	429-435
9.	Komite Audit	Mencakup penyampaian informasi antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit	436-459
10.	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi	Penyampaian informasi antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi	459
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Penyampaian informasi antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain	460-495

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	Penyampaian informasi antara lain; 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku	499-508
13.	Uraian mengenai unit audit internal	Penyampaian informasi antara lain 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal	528-543
14.	Akuntan Publik	Penyampaian informasi antara lain 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir	544-548
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil review yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut	549-570
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Penyampaian informasi antara lain 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai hasil review yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku	571-577

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
17.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait tatakelola Tanggung jawab sosial	Mencakup antara lain: 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan 3. Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan 4. Informasi tentang isu isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakankan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijlaankan 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial	620
18.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subjeck Hak Azasi Manusia	Mencakup antara lain: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subjeck Hak Azasi Manusia 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subjeck Hak Azasi Manusia 3. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang Hak Azasi Manusia 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	622

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
19.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subjeck Operasi yang adil	Mencakup antara lain: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subjeck Operasi yang adil 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subjeck operasi yang adil 3. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang operasi yang adil 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	623
20.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup	Penyampaian informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan 2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan 5. Informasi tentang pelaksanaan inisitaif CSR terkait lingkungan hidup 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	623

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
21.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subjeck ketenagakerjaan 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain	624
22.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Mencakup antara lain: 6. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan 7. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut 8. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain	624-626

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
23.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Mencakup antara lain informasi tentang: ng: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subjeck pengembangan sosial dan kemasyarakatan 2. Informasi tentang isu isu sosial yang relevan dengan perusahaan 3. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 7. Biaya yang dikeluarkan 8. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain	626
24.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi)	578
25.	Akses informasi dan data perusahaan	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya	579-590

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
26.	Bahasan mengenai kode etik	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir	591-603
27.	Pengungkapan mengenai whistleblowing system	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku	604-613
28.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin	613-617
VII.	**Informasi Keuangan**		
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	630
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan		631
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik	631-632

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
4.	Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan)	633
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas,menampilkan perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya		183-184
6.	Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan	637
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan	640-649
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait	681-682

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak	654-657
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi	646
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama	649-690

KRITERIA + PENJELASAN			HALAMAN
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif	690-692
13.	Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan	630

Laporan Tahunan 2018

PT BIO FARMA (PERSERO)

Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161,
Indonesia.

+62 22-2033755 (37412)

+62 22 – 2041306

0821 21511511

corcom@biofarma.co.id

BIO CARE
1 5 0 0 8 1 0

@biofarmaID

www.biofarma.co.id